MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LKBUN

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

Tahun 2025 *Audited*

Mei 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LKBUN

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

Tahun 2025 *Audited*

Mei 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2025 *Audited* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

LKBUN Tahun 2025 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2025 *Audited* terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

LKBUN Tahun 2025 *Audited* ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUN. Kami menyadari LKBUN Tahun 2025 *Audited* masih belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna *(stakeholders)*. Kami sebagai BUN akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKBUN secara akurat dan tepat waktu.

Jakarta, 16 Mei 2026
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2025 *Audited* yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, kecuali untuk hal-hal yang terkait dengan badan lainnya yang berada di luar kendali Bendahara Umum Negara.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 16 Mei 2026
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Bendahara Umum Negara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Bendahara Umum Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Bendahara Umum Negara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bendahara Umum Negara tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 37.b/T/LHP/DJPKN-II/PPN.01/05/2026 tanggal 16 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 16 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Anggota,

Ir. Daniel Lumban Tobing, M.Sc., CSFA., CFrA., CertDA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB iii
OPINI BPK v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
DAFTAR SINGKATAN xvii
RINGKASAN 1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 5
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 9
3. NERACA 11
4. LAPORAN OPERASIONAL 15
5. LAPORAN ARUS KAS 17
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 19
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 21

A. PENJELASAN UMUM 21
A.1. DASAR HUKUM 21
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 22
A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI 31

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 61
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN 61
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 61
B.2.1. Pendapatan BUN dan Hibah 61
B.2.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 61
B.2.1.2. Pendapatan Hibah 67
B.2.2. Belanja BUN 68
B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat 68
B.2.2.2. Transfer ke Daerah 80
B.2.3. Defisit Anggaran 87
B.2.4. Pembiayaan 87
B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri 87
B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri 100
B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran-SiKPA 102
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 103

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL 129
C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL 129
C.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL 129
C.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal 129
C.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 130

C.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 130
C.2.4. Penyesuaian SAL 131
C.2.4.1. Penyesuaian Pembukuan 131
C.2.4.2. Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL) 134
C.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir 136

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 139
D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 139
D.2. PENJELASAN PER POS NERACA 140
D.2.1. Aset 140
D.2.1.1. Aset Lancar 140
D.2.1.1.1. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah 140
D.2.1.1.2. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing 141
D.2.1.1.3. Kas di Rekening Pemerintah Lainnya 141
D.2.1.1.4. Kas di Rekening Kas di KPPN 142
D.2.1.1.5. Kas Dalam Transito 143
D.2.1.1.6. Kas di Bendahara Pengeluaran 143
D.2.1.1.7. Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga 143
D.2.1.1.8. Kas Lainnya dan Setara Kas 144
D.2.1.1.9. Kas pada Badan Layanan Umum 145
D.2.1.1.10. Uang Muka dari Rekening Khusus 146
D.2.1.1.11. Investas Dalam Deposito 146
D.2.1.1.12. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) 147
D.2.1.1.13. Uang Muka Belanja (*Prepayment*) 147
D.2.1.1.14. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 147
D.2.1.1.15. Piutang Bukan Pajak 150
D.2.1.1.16. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya 163
D.2.1.1.17. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman 165
D.2.1.1.18. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak 165
D.2.1.1.19. Persediaan 171
D.2.1.2. Investasi Jangka Panjang 172
D.2.1.2.1. Dana Bergulir 172
D.2.1.2.2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih 179
D.2.1.2.3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya 183
D.2.1.2.4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya 188
D.2.1.2.5. Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah 190
D.2.1.2.6. Investasi Permanen Badan Layanan Umum 199
D.2.1.2.7. Investasi Permanen Lainnya 200
D.2.1.3. Aset Tetap 204
D.2.1.3.1. Tanah 204
D.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin 205
D.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan 206
D.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 207
D.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya 207
D.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 208
D.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 208

D.2.1.4. Properti Investasi 209
D.2.1.4.1. Properti Investasi 209
D.2.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 220
D.2.1.5. Piutang Jangka Panjang 224
D.2.1.5.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 224
D.2.1.5.2. Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman 225
D.2.1.5.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya 226
D.2.1.5.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang 228
D.2.1.6. Aset Lainnya 229
D.2.1.6.1. Aset Tak Berwujud 230
D.2.1.6.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya 231
D.2.1.6.3. Dana Cadangan Penjaminan 244
D.2.1.6.4. Dana Kelolaan Badan Layanan Umum 245
D.2.1.6.5. Dana Jangka Panjang 250
D.2.1.6.6. Aset Lain-lain 252
D.2.1.6.7. Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL 283
D.2.1.6.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Aset Lainnya 287
D.2.2. Kewajiban 295
D.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek 295
D.2.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga 295
D.2.2.1.2. Utang Kepada Pihak Ketiga 297
D.2.2.1.3. Utang Bunga 311
D.2.2.1.4. Utang Subsidi 312
D.2.2.1.5. Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar 314
D.2.2.1.6. Utang Transfer 318
D.2.2.1.7. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 321
D.2.2.1.8. Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek 322
D.2.2.1.9. Pendapatan Diterima di Muka 323
D.2.2.1.10. Pendapatan Yang Ditangguhkan 327
D.2.2.2. Kewajiban Jangka Panjang 327
D.2.2.2.1. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara 327
D.2.2.2.2. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT 328
D.2.2.2.3. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan 328
D.2.2.2.4. Utang Jangka Panjang Subsidi 328
D.2.2.2.5. Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri 329
D.2.2.2.6. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri lainnya 329
D.2.2.2.7. Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri 332
D.2.2.2.8. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya 332
D.2.3. Ekuitas 333
D.3. Catatan Penting Lainnya 334

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 509
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN 509
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL 509
E.2.1. Pendapatan Operasional 509
E.2.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam 510

E.2.1.2. Pendapatan dari Kekayaaan Negara yang Dipisahkan 512
E.2.1.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 513
E.2.1.4. Pendapatan Hibah 527
E.2.2. Beban Operasional 528
E.2.2.1. Beban Pegawai 528
E.2.2.2. Beban Persediaan 529
E.2.2.3. Beban Barang dan Jasa 530
E.2.2.4. Beban Pemeliharaan 531
E.2.2.5. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 531
E.2.2.6. Beban Bunga 532
E.2.2.7. Beban Subsidi 533
E.2.2.8. Beban Hibah 539
E.2.2.9. Beban Transfer Ke Daerah 540
E.2.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi 545
E.2.2.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 547
E.2.2.12. Beban Lain-Lain 552
E.2.3. Kegiatan Non Operasional 556
E.2.3.1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 556
E.2.3.2. Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 561
E.2.3.3. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya 561
E.2.4. Pos Luar Biasa 569
E.3. Catatan Penting Lainnya 570

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 571
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 571
F.1.1. Saldo Awal Kas 571
F.1.2. Kenaikan/Penurunan Kas Setelah Koreksi Pembukuan 571
F.1.3. Saldo Akhir Kas 574
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 575
F.2.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 575
F.2.1.1. Penerimaan Perpajakan 575
F.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 578
F.2.1.3. Penerimaan Hibah 580
F.2.1.4. Belanja Pegawai 580
F.2.1.5. Belanja Barang 581
F.2.1.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang 581
F.2.1.7. Belanja Subsidi 583
F.2.1.8. Belanja Hibah 583
F.2.1.9. Belanja Bantuan Sosial 584
F.2.1.10. Belanja Lain-lain 584
F.2.1.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak 585
F.2.1.12. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 585
F.2.1.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai 585
F.2.1.14. Transfer Dana Alokasi Umum 585
F.2.1.15. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik 586
F.2.1.16. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Insentif Fiskal 586

F.2.1.17. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik 586
F.2.1.18. Dana Desa 587
F.2.1.19. Hibah kepada Daerah 587
F.2.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 588
F.2.2.1. Pengelolaan dan Penjualan BMN 588
F.2.2.2. Penjualan Aset Program Restrukturisasi 589
F.2.2.3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir 589
F.2.2.4. Penerimaan Investasi Pemerintah 589
F.2.2.5. Belanja Modal 590
F.2.2.6. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional 590
F.2.2.7. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir 590
F.2.2.8. Penyertaan Modal Negara 590
F.2.2.9. Pengeluaran Investasi Pemerintah 591
F.2.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 592
F.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 592
F.2.3.2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 594
F.2.3.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman 594
F.2.3.4. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain 594
F.2.3.5. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 595
F.2.3.6. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 595
F.2.3.7. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* 595
F.2.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 595
F.2.4.1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) 596
F.2.4.2. Transito (Neto) 597
F.2.4.3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) 597
F.2.4.4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) 598

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 599
G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 599
G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 599
G.2.1. Ekuitas Awal 599
G.2.2. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional 601
G.2.3. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas 601
G.2.3.1. Koreksi Nilai Persediaan 602
G.2.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi 602
G.2.3.3. Revaluasi Aset 606
G.2.3.4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya 606
G.2.3.5. Koreksi SAL 610
G.2.3.6. Lain lain 610
G.2.4. Transaksi Antar Entitas 627
G.2.5. Keuntungan/(Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Terealisasi 630
G.2.6. Mutasi Ekuitas BUN di K/L 630
G.2.7. Ekuitas Akhir 631

H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 632

DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN I

Informasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Atas Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun 2025 ..... LK1

B. LAMPIRAN II

1. LAMPIRAN LRA

LB.1. Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Per Akun LB1
LB.2. Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan LB2
LB.3. Realisasi PNBP Lainnya Per BA BUN LB3
LB.4. Realisasi Belanja Subsidi LB4
LB.5. Rekapitulasi Transfer ke Daerah LB5
LB.6. Realisasi Transfer ke Daerah Per Jenis Transfer Per Pemda LB6
LB.7. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil LB7
LB.8. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak LB8
LB.9. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LB9
LB.10. Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum LB10
LB.11. Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus LB11
LB.12. Laporan Realisasi Anggaran Hibah ke Daerah LB12
LB.13. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Yogyakarta LB13

2. LAMPIRAN NERACA

LD.1. Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah LD1
LD.2. Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing LD2
LD.3. Rekening Pemerintah Lainnya LD3
LD.4. Rincian Kas di KPPN LD4
LD.5. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per KPPN LD5
LD.6. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Kementerian/Lembaga LD6
LD.7. Rincian Kas Hibah Per KPPN LD7
LD.8. Rincian Kas Hibah Per Kementerian/Lembaga LD8
LD.9. Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum Per KPPN LD9
LD.10. Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum Per Kementerian/Lembaga LD10
LD.11. Uang Muka Rekening Khusus LD11
LD.12. Rincian Piutang PNBP Dividen dan Denda LD12
LD.13. Rincian Piutang Transfer ke Daerah LD13
LD.14. Rincian Aset Kredit Eks BPPN LD14
LD.15. Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA LD15
LD.16. Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) LD16
LD.17. Penyisihan Piutang tidak Tertagih Atas Aset Kredit Eks BPPN LD17
LD.18. Aset Inventaris Eks BPPN LD18

LD.19. Jumlah dan Nilai Aset Properti Eks BPPN LD19
LD.20. Rincian Aset Nostro LD20
LD.21. Surat Berharga Non Saham Eks BPPN LD21
LD.22. Aset Saham Eks BPPN LD22
LD.23. Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) LD23
LD.24. Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA LD24
LD.25. Aset Saham Eks Kelolaan PT PPA LD25
LD.26. Daftar ABMA/T Yang Belum Dapat Diselesaikan/Dilunasi Kompensasinya Sejak Awal Pengurusan Pelepasan ABMA/T LD26
LD.27. Daftar ABMA/T Yang Telah Ditetapkan Besaran Kompensasinya LD27
LD.28. Daftar ABMA/T Yang Telah Diterbitkan KMK Penyelesaian dan/atau Koreksi Penetapan Kembali LD28
LD.29. Daftar Barang Milik Negara Eks BMN *Idle* Yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang atau Pemda LD29
LD.30. Rincian Utang PFK Pajak Rokok Per Pemerintah Daerah LD30
LD.31. Rincian Utang Pihak Ketiga Pada UAPBUN AP LD31
LD.32. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TDF LD32
LD.33. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga DJSPSK LD33
LD.34. Rincian Utang Transfer ke Daerah LD34
LD.35. Utang SBN Jangka Pendek dan Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Rupiah LD35
LD.36. Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Valas LD36
LD.37. *Outstanding* Utang PDN LD37
LD.38. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri LD38
LD.39. *Unamortized Discount*/*Premium* Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah LD39
LD.40. *Unamortized Discount*/*Premium* Bagian Lancar Obligasi Negara Valas LD40
LD.41. *Unamortized Discount*/*Premium* Bagian Lancar SBSN Rupiah LD41
LD.42. Rincian Pendapatan Diterima di muka Pengelolaan Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI LD42
LD.43. Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek ABMA/T LD43
LD.44. Daftar Pembayaran/Pelunasan Kompensasi ABMA/T LD44
LD.45. Daftar Kompensasi Atas ABMA/T Yang Telah Diterbitkan KMK Penyelesaian LD45
LD.46. Pendapatan Diterima Di Muka Atas Aset Eks Pertamina LD46
LD.47. Klasifikasi Utang Pemerintah berdasarkan Jatuh Tempo (Umur Utang) LD47
LD.48. *Unamortized Discount*/*Premium* Obligasi Negara Rupiah LD48
LD.49. *Unamortized Discount*/*Premium* Obligasi Negara Valas LD49
LD.50. *Unamortized Discount*/*Premium* SBSN Rupiah LD50
LD.51. Daftar Seri SBSN Yang Diterbitkan Sebagai Pembiayaan SBN Ditangguhkan LD51
LD.52. Kewajiban Jangka Panjang Atas Aset Eks Pertamina LD52
LD.53. *Outstanding* Utang Program Pinjaman Luar Negeri Per Kreditor LD53
LD.54. *Outstanding* Utang Proyek Pinjaman Luar Negeri Per Kreditor LD54
LD.55. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) – Laporan Laba Rugi LD55
LD.56. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) – Neraca LD56
LD.57. Penyertaan Modal Pemerintah Pada Non-BUMN (Minoritas) LD57
LD.58. Ikhtisar Laporan Keuangan Non-BUMN (Minoritas) – Laporan Laba Rugi LD58
LD.59. Ikhtisar Laporan Keuangan Non-BUMN (Minoritas) – Neraca LD59

LD.60. Perusahaan Negara/Lembaga Dibawah Pembinaan Kementerian Keuangan – Laporan Laba Rugi LD60
LD.61. Perusahaan Negara/Lembaga Dibawah Pembinaan Kementerian Keuangan – Neraca LD61
LD.62. Laporan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Keuangan Internasional LD62
LD.63. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan LD63
LD.64. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan LD64
LD.65. Penjelasan Mutasi Lain-Lain Perusahaan Negara (BUMN) LD65
LD.66. Ikhtisar Laporan Keuangan Bank Indonesia LD66
LD.67. Ikhtisar Laporan Keuangan BPJS LD67
LD.68. Ikhtisar Laporan Keuangan PTNBH LD68
LDCPL.1. Mutasi Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas LDCPL1
LDCPL.2. Mutasi Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi LDCPL2
LDCPL.3. Rekapitulasi Pengisian, Pembayaran, dan Penihilan RPATA LDCPL3
LDCPL.4. Daftar Pinjaman ISDB *Closing Date* (Selesai) dan *On Going* (Masih Berjalan) LDCPL4
LDCPL.5. Pengalihan Saham Seri B dan/atau Seri C Milik Negara Republik Indonesia Pada 52 Perusahaan Negara kepada *Holding* Operasional LDCPL5
LDCPL.6. Daftar BUMN Persero di bawah *Holding* Operasional Pasca Peristiwa Aksi Korporasi LDCPL6
LDCPL.7. Daftar Perusahaan Negara yang Dicatat Dalam ILKPN LDCPL7
LDCPL.8. Setoran Dividen BUMN ke Kas Negara dan PT DAM (Persero) LDCPL8
LDCPL.9. Daftar BUMN Belum Melakukan Penerbitan Laporan Keuangan *Audited* LDCPL9
LDCPL.10. Rincian Portofolio Kewajiban Penjaminan Yang Masih Aktif Per Program Penjaminan LDCPL10
LDCPL.11. Daftar Rekapitulasi Nilai Pengalihan Satu Persen Saham Dari PT DAM kepada BP BUMN LDCPL11
LDCPL.12. Daftar Aset Hibah dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Masyarakat dan Pihak Ketiga kepada BP KPBPB (Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang) Yang Belum Disajikan Pada Neraca LKBUN LDCPL12
LDCPL.13. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit LDCPL13
LDCPL.14. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya - Lembaga Non Struktural Dana APBN dan Non APBN LDCPL14
LDCPL.15. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas LDCPL15
LDCPL.16. Rekapitulasi Penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dan Rekening BPJS Kesehatan LDCPL16

3. LAMPIRAN LO

LE.1. Kontribusi Skema *Burden Sharing* yang Dibayarkan Oleh Bank Indonesia LE1
LE.2. Pelaksanaan Konversi Mata Uang Valas Ke Mata Uang Rupiah LE2

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKI	: Biro Klasifikasi Indonesia
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BP MIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BP BUMN	: Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
BPI Danantara	: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
BPHTB	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CFO	: *Chief Financial Officer*
CGI	: *Consultative Group on Indonesia*
COO	: *Chief Operating Officer*
CPA	: *Contract Price Aramco*
CPI	: *Consumer Price Index*
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DAM	: *Danantara Asset Management*
DIM	: *Danantara Investment Management*
DBH	: Dana Bagi Hasil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran

DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP : Direktorat Jenderal Pajak
DJPb : Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO : Domestic Market Obligation
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
EDI : *Electronic Data Interchange*
GBHN : Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI : Hutan Tanaman Industri
HJE : Harga Jual Eceran
ICP : *Indonesian Crude Price*
INDRA : *Indonesian Debt Restructuring Agency*
JBT : Jenis Bahan Bakar Tertentu
JBKP : Jenis Bahan Bakar Penugasan Khusus
KITE : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS : Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKP : Kartu Kredit Pemerintah
K/L : Kementerian Negara/Lembaga
KL : Kilo Liter
KMK : Keputusan Menteri Keuangan
KONI : Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat
KU : Kiriman Uang
KUHR : Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK : Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN : Kas Umum Negara
KUTPA : Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
LAK : Laporan Arus Kas
LDKP : Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR : *Loan to Deposit Ratio*
LKI : Lembaga Keuangan Internasional
LKP : Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI : Lembaga Non Struktural/Independen
LRA : Laporan Realisasi Anggaran
LO : Laporan Operasional
LPE : Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
MA : Mata Anggaran (Penerimaan dan Pengeluaran)
MBOPD : *Milion Barel of Oil Per Day*
MBOEPD : *Milion Barrel Oil of Equivalent Per Day*
MPN : Modul Penerimaan Negara
MPN G-2 : Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua
MT : Metrik Ton
NAD : Nanggroe Aceh Darussalam

NPG : *Non-Public Goods*
NPL : *Non-Performing Loan*
PC-PEN : Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDB : Pendapatan Domestik Bruto
PFK : Perhitungan Fihak Ketiga
PG : *Public Goods*
PIP : Pusat Investasi Pemerintah
PKP2B : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMA : Penanaman Modal Asing
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
PMN : Penyertaan Modal Negara
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh : Pajak Penghasilan
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL : *Past Service Liability*
PSO : *Public Service Obligation*
PT PPA : PT Perusahaan Pengelolaan Aset
PT PLN : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PTNBH : Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
RANTF : *Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI : Rekening Dana Investasi
RIPPEN : Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional
RPATA : Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
RPD : Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUP : Rumah Sakit Umum Pusat
SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SABL : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain
SABS : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
SAI : Sistem Akuntansi Instansi
SAIP : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
SAKUN : Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL : Sisa Anggaran Lebih
SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPBL : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Badan Lainnya
SAPP : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAPPP : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman
SATD : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah
SATK : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
SAU : Sistem Akuntansi Umum
SAUP : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
SBN : Surat Berharga Negara
SBSN : Surat Berharga Syariah Negara
SDA : Sumber Daya Alam
SiAP : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat

SIBOR : *Singapore Interbank Offered Rate*
SiKPA : Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Sikubah : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
SKPKB : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPAN : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPKPBM : Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA : *Subsidiary Loan Agreement*
SPPD : Surat Perintah Pencairan Dana
SPN : Surat Perbendaharaan Negara
SUN : Surat Utang Negara
TA : Tahun Anggaran
TDF : *Treasury Deposit Facility*
TGR : Tuntutan Ganti Rugi
THT : Tabungan Hari Tua
TNP : *Treasury National Polling*
TP : Tim Pemberesan Aset
TPA : Tagihan Penjualan Angsuran
TSA : *Treasury Single Account*
TSP : Tempat Simpan Pinjam
UAKBUN : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
UAKKPA BUN : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAKPA BUN : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAPPA BUN : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran BUN
UAKPBUN : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN
UAPBUN : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
UABUN : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN
UAIP : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
USD : *United State Dollar*
USP : Usaha Simpan Pinjam
UP : Uang Persediaan
UPSL : *Unfunded Past Service Liability*
TKD : Transfer ke Daerah
TUP : Tambahan Uang Persediaan
TWh : *Tera Watt Hour*

RINGKASAN

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam rangka pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAP BUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), karena UAP BUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK).

LKBUN Tahun 2025 *Audited* merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan BUN, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan kementerian Negara/lembaga, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran BUN menggambarkan perbandingan antara Pagu Anggaran BUN Tahun 2025 dengan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran BUN menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer ke daerah, surplus/defisit, dan pembiayaan serta SiLPA/SiKPA periode Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp186,46 triliun atau 78,91 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Pendapatan tersebut terdiri dari realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp181,03 triliun atau 78,48 persen dari anggarannya, dan realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp5,43 triliun atau 96,96 persen dari anggarannya. Sementara itu, realisasi Belanja BUN pada Tahun 2025 *Audited* adalah sebesar Rp1.951,61 triliun atau 92,81 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara BUN tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.102,57 triliun atau 89,94 persen dari anggarannya, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp849,04 triliun atau 96,82 persen dari anggarannya.

Realisasi Defisit Anggaran BUN Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.765,15 triliun atau 94,56 persen dari anggarannya. Sedangkan realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2025 adalah sebesar Rp742,73 triliun atau 120,54 persen dari anggarannya. Dari data tersebut maka SiKPA sebelum Pendapatan dan Belanja K/L sebesar Rp1.022,43 triliun.

Ringkasan LRA BUN Tahun 2025 *Audited* disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024	Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi	%		Rp	%
Pendapatan BUN dan Hibah	**236,28**	**186,46**	**78,91**	**274,90**	**(88,44)**	**(32,17)**
Penerimaan Negara Bukan Pajak	230,68	181,03	78,48	240,51	(59,48)	(24,73)
Penerimaan Hibah	5,60	5,43	96,96	34,39	(28,96)	(84,20)
Belanja BUN	**2.102,89**	**1.951,61**	**92,81**	**2.035,76**	**(84,15)**	**(4,13)**
Belanja Pemerintah Pusat	1.225,95	1.102,57	89,94	1.172,22	(69,65)	(5,94)
Transfer ke Daerah	876,94	849,04	96,82	863,54	(14,50)	(1,68)
Surplus (Defisit)	**(1.866,61)**	**(1.765,15)**	**94,56**	**(1.760,86)**	**(4,29)**	**(0,24)**
Pembiayaan	**616,19**	**742,73**	**120,54**	**554,89**	**187,84**	**33,85**
Pembiayaan Dalam Negeri	488,06	656,82	134,58	462,58	194,24	41,99
Pembiayaan Luar Negeri	128,13	85,91	67,05	92,31	(6,40)	(6,93)
SiLPA (SiKPA) Sebelum K/L	**(1.250,42)**	**(1.022,43)**	**81,77**	**(1.205,97)**	**183,54**	**15,22**

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 adalah Rp457,54 triliun, Penggunaan SAL adalah Rp93,15 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah Rp72,40 triliun, Penyesuaian sebesar Rp1,47 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025 adalah Rp438,26 triliun.

Ringkasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUN Tahun 2025 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal	**457,54**	**459,50**	**(1,96)**	**(0,43)**
Penggunaan SAL	(93,15)	(56,38)	(36,77)	**(65,22)**
SILPA/SIKPA	72,40	45,73	26,67	58,32
Penyesuaian SAL	1,47	8,70	(7,23)	(83,10)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**438,26**	**457,55**	**(19,29)**	**(4,22)**

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BUN mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.549,17 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp511,64 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp4.928,36 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1,33 triliun, Properti Investasi sebesar Rp31,07 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp49,11 triliun dan Aset Lainnya sebesar Rp1.027,66 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.612,95 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.548,57 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp9.064,38 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas Neto per 31 Desember 2025 adalah sebesar minus Rp4.063,78 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun)	%
Aset	**6.549,17**	**5.961,60**	**587,57**	**9,86**
Aset Lancar	511,64	523,35	(11,71)	(2,24)
Investasi Jangka Panjang	4.928,36	4.391,56	536,80	12,22
Aset Tetap	1,33	1,29	0,04	3,10
Properti Investasi	31,07	32,76	(1,69)	(5,16)
Piutang Jangka Panjang	49,11	47,39	1,72	3,63
Aset Lainnya	1.027,66	965,25	62,41	6,47
Kewajiban	**10.612,95**	**9.538,22**	**1.074,73**	**11,27**
Kewajiban Jangka Pendek	1.548,57	1.208,89	339,68	28,10
Kewajiban Jangka Panjang	9.064,38	8.329,33	735,05	8,82
Ekuitas	**(4.063,78)**	**(3.576,62)**	**(487,16)**	**(13,62)**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**6.549,17**	**5.961,60**	**587,57**	**9,86**

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional memberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BUN untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah Tahun 2025. Laporan Operasional memberikan informasi bahwa Pendapatan Operasional selama Tahun 2025 *Audited* adalah Rp500,76 triliun, Beban Operasional sebesar Rp2.213,75 triliun dan Kegiatan Non Operasional sebesar minus Rp113,84 triliun, sehingga terdapat Defisit sebesar Rp1.826,83 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional BUN Tahun 2025 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Kegiatan Operasional	**(1.712,99)**	**(1.604,18)**	**(108,81)**	**(6,78)**
Pendapatan Operasional	500,76	579,64	(78,88)	(13,61)
Beban Operasional	2.213,75	2.183,82	(29,93)	(1,37)
Kegiatan Non Operasional	**(113,84)**	**19,72**	**(133,56)**	**(677,28)**
Surplus (Defisit) LO	**(1.826,83)**	**(1.584,46)**	**(242,37)**	**(15,30)**

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun 2025. Saldo Akhir Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas di Kementerian Negara/Lembaga (K/L) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp365,86 triliun. Saldo Akhir tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp629,02 triliun dan Penurunan Kas sebesar Rp263,16 triliun. Penurunan saldo kas tersebut berasal dari arus kas aktivitas operasi sebesar Rp243,90 triliun, arus kas aktivitas investasi sebesar minus Rp712,07 triliun, arus kas aktivitas pendanaan sebesar Rp828,37 triliun, arus kas aktivitas transitoris sebesar minus Rp44,16 triliun dan Penyesuaian sebesar Rp1,75 triliun serta Penggunaan SAL sebesar Rp93,15 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2025 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	(243,90)	(154,15)	(89,75)	(58,22)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(712,07)	(414,40)	(297,67)	(71,83)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	828,37	614,28	214,09	34,85
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	(44,16)	24,39	(68,55)	(281,06)
Koreksi dan Penyesuaian	1,75	9,26	(7,51)	(81,10)
Penggunaan SAL	(93,15)	(56,38)	(36,77)	(65,22)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(263,16)	23,00	(286,16)	(1.244,17)
Saldo Awal Kas	**629,02**	**606,01**	**23,01**	**3,80**
Saldo Akhir Kas	**365,86**	**629,01**	**(263,15)**	**(41,84)**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp3.576,62 triliun, Defisit LO sebesar Rp1.826,83 triliun, Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah Ekuitas sebesar Rp244,33 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.121,68 triliun, dan Mutasi Ekuitas BUN di KL sebesar minus Rp26,34 triliun. Dari data tersebut diketahui bahwa Penurunan Ekuitas sebesar Rp487,16 triliun dan Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 adalah minus Rp4.063,78 triliun.

Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2025 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	%
Ekuitas Awal	**(3.576,62)**	**(3.328,19)**	**(248,43)**	**(7,46)**
Surplus (Defisit) LO	(1.826,83)	(1.584,45)	(242,38)	(15,30)
Koreksi yang Langsung +/- Ekuitas	244,33	97,99	146,34	149,34
Transaksi Antar Entitas	1.121,68	1.236,87	(115,19)	(9,31)
Mutasi Ekuitas BUN di K/L	(26,34)	1,17	(27,51)	(2.351,28)
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	(487,16)	(248,43)	(238,73)	(96,10)
Ekuitas Akhir	**(4.063,78)**	**(3.576,62)**	**(487,16)**	**(13,62)**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum penyusunan LK BUN, metodologi penyusunan LKBUN dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	**B.2.1**	**236.275.500.847.000**	**186.456.746.764.097**	**78,91%**	**274.898.283.178.566**
1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.1**	**230.677.583.443.000**	**181.024.739.835.672**	**78,48%**	**240.510.919.462.810**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	B.2.1.1.1	123.017.538.808.000	104.735.406.249.496	85,14%	113.330.835.745.742
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	B.2.1.1.2	90.000.000.000.000	27.683.274.120.780	30,76%	86.384.593.538.563
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.1.3	17.660.044.635.000	48.606.059.465.396	275,23%	40.795.490.178.505
2. Pendapatan Hibah	**B.2.1.2**	**5.597.917.404.000**	**5.432.006.928.425**	**97,04%**	**34.387.363.715.756**
B. BELANJA BUN	**B.2.2**	**2.102.890.178.719.000**	**1.951.614.526.199.653**	**92,81%**	**2.035.762.478.740.043**
1. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**1.225.946.385.792.000**	**1.102.573.832.352.483**	**89,94%**	**1.172.219.672.257.679**
a. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	186.791.121.513.000	179.872.555.614.266	96,30%	173.106.602.391.953
b. Belanja Barang	B.2.2.1.2	1.695.861.420.000	1.521.790.488.999	89,74%	1.577.434.000.681
c. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.3	552.854.291.469.000	514.394.982.025.629	93,04%	488.426.422.143.817
d. Belanja Subsidi	B.2.2.1.4	315.455.154.663.000	281.759.776.982.061	89,32%	292.692.594.096.846
e. Belanja Hibah	B.2.2.1.5	576.249.779.000	493.977.094.757	85,72%	278.430.938.953
f. Belanja Lain Lain	B.2.2.1.6	168.573.706.948.000	124.530.750.146.771	73,87%	216.138.188.685.429
2. Transfer ke Daerah	**B.2.2.2**	**876.943.792.927.000**	**849.040.693.847.170**	**96,82%**	**863.542.806.482.364**
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1	178.377.765.616.000	168.890.519.118.880	94,68%	153.174.562.784.262
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.2	438.625.121.056.000	433.292.088.063.189	98,78%	429.210.611.278.998
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.3	166.934.762.675.000	162.932.253.327.901	97,60%	183.538.473.113.006

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1) Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.3.1	18.647.793.242.000	17.610.554.270.313	94,44%	50.890.077.113.845
2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.3.2	146.677.929.010.000	145.070.625.814.078	98,90%	130.441.233.738.467
3) Hibah ke Daerah	B.2.2.2.3.3	1.609.040.423.000	251.073.243.510	15,60%	2.207.162.260.694
d. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.4	17.006.143.580.000	17.006.143.580.000	100,00%	18.271.490.935.000
e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	B.2.2.2.5	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%	1.420.000.000.000
f. Dana Desa	B.2.2.2.6	69.000.000.000.000	61.645.153.758.700	89,34%	70.925.927.774.598
g. Insentif Fiskal	B.2.2.2.7	6.000.000.000.000	4.274.535.998.500	71,24%	7.001.740.596.500
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	**B.2.3**	**(1.866.614.677.872.000)**	**(1.765.157.779.435.556)**	**94,56%**	**(1.760.864.195.561.477)**
D. PEMBIAYAAN	**B.2.4**	**616.186.060.243.000**	**742.731.460.043.864**	**120,54%**	**554.888.579.353.028**
1. Pembiayaan Dalam Negeri	**B.2.4.1**	**488.055.417.613.000**	**656.824.953.980.649**	**134,58%**	**462.577.425.084.416**
a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	B.2.4.1.1	-	93.146.980.793.000	-	56.419.615.865.000
b. Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.2	(9.382.072.463.000)	(4.666.370.272.398)	49,74%	(4.242.437.773.274)
c. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.3	3.939.963.612.000	4.295.865.914.969	109,03%	4.023.538.398.833
d. Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.4	262.000.000.000	610.174.852.295	232,89%	1.400.109.062.740
e. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.5	642.562.027.445.000	639.271.552.983.338	99,49%	450.733.252.420.187
1) Penerimaan Penjualan Surat Berharga Negara		-	1.448.883.570.563.343	-	1.075.437.376.773.300
2) Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara		-	(809.612.017.580.005)	-	(624.704.124.353.113)
f. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.6	5.174.799.019.000	10.234.959.542.506	197,78%	15.019.471.247.141
1) Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		11.775.685.499.000	18.002.517.099.833	152,88%	20.122.653.359.752
2) Pembayaran cicilan pokok PDN		(6.600.886.480.000)	(7.767.557.557.327)	117,67%	(5.103.182.112.611)
g. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah (Neto)	B.2.4.1.7	(154.501.300.000.000)	(59.553.017.350.028)	38,55%	(44.332.592.681.665)
h. Pengeluaran Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.8	-	-	-	(1.458.986.000.000)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
i. Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.9	-	(26.698.925.315.000)	-	(15.000.000.000.000)
j. Pembiayaan Lain-Lain	B.2.4.1.10	-	183.732.831.967	-	15.454.545.454
2. Pembiayaan Luar Negeri	**B.2.4.2**	**128.130.642.630.000**	**85.906.506.063.215**	**67,05%**	**92.311.154.268.612**
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	B.2.4.2.1	216.498.528.421.000	181.592.359.658.866	83,88%	179.765.350.519.789
1) Penarikan Pinjam Tunai	B.2.4.2.1.1	80.000.000.000.000	59.315.481.801.800	74,14%	60.028.929.576.507
2) Penarikan Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	136.498.528.421.000	122.276.877.857.066	89,58%	119.736.420.943.282
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(88.367.885.791.000)	(95.685.853.595.651)	108,28%	(87.454.196.251.177)
E. SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	**B.2.5**	**(1.250.428.617.629.000)**	**(1.022.426.319.391.692)**	**81,77%**	**(1.205.975.616.208.449)**

Jakarta, 16 Mei 2026
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
A. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	C.2.1	457.543.275.049.219	459.497.872.070.698
B. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	C.2.2	(93.146.980.793.000)	(56.381.000.000.000)
C. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	C.2.3	72.396.045.683.987	45.727.115.463.645
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		436.792.339.940.206	448.843.987.534.343
D. PENYESUAIAN SAL	C.2.4		
1. Penyesuaian Pembukuan	C.2.4.1	2.126.915.000.875	9.293.355.123.095
2. Penyesuaian Lain-Lain	C.2.4.2	(653.686.043.549)	(594.067.608.219)
Total Penyesuaian SAL		1.473.228.957.326	8.699.287.514.876
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A+B+C+D)	C.2.5	438.265.568.897.532	457.543.275.049.219

Jakarta, 16 Mei 2026
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET	**D.2.1**		
ASET LANCAR	**D.2.1.1**		
Kas dan Setara Kas			
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	D.2.1.1.1	123.169.863.770.107	180.923.940.557.096
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing	D.2.1.1.2	27.379.477.124.598	169.108.412.005.997
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.3	20.422.950.926.725	9.936.262.585.075
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.4	838.386.237.732	697.379.362.618
Kas Dalam Transito	D.2.1.1.5	-	2.750.411.765
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.6	240.434.539.673	230.036.155.068
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	D.2.1.1.7	1.143.927.612.103	10.552.112.773.536
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.8	6.008.685.913.493	5.000.005.190
Kas pada Badan Layanan Umum	D.2.1.1.9	80.033.772.437.486	96.973.278.750.758
Jumlah Kas dan Setara Kas		**259.237.498.561.917**	**468.429.172.607.103**
Uang Muka			
Uang Muka dari Rekening Khusus	D.2.1.1.10	81.356.687.244	47.984.869.011
Jumlah Uang Muka		**81.356.687.244**	**47.984.869.011**
Investasi Jangka Pendek			
Investasi dalam Deposito	D.2.1.1.11	200.000.000.000.000	-
Jumlah Investasi Jangka Pendek		**200.000.000.000.000**	**-**
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)			
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	D.2.1.1.12	33.936.817.416	30.664.150.302
Uang Muka Belanja (Prepayment)	D.2.1.1.13	10.000.000	10.000.000
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)		**33.946.817.416**	**30.674.150.302**
Piutang			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.14	3.841.383.273.645	6.369.768.939.715
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.15	247.508.160.255.871	253.122.402.777.910
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.16	7.668.938.283.592	7.718.639.716.238
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.17	21.914.863.036.379	21.286.136.965.214
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.18	(228.694.693.411.173)	(233.653.899.504.306)
Jumlah Piutang		**52.238.651.438.314**	**54.843.048.894.771**
Persediaan			
Persediaan	D.2.1.1.19	52.993.494.437	2.490.243.783
Jumlah Persediaan		**52.993.494.437**	**2.490.243.783**
Jumlah Aset Lancar		**511.644.446.999.328**	**523.353.370.764.970**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
INVESTASI JANGKA PANJANG	**D.2.1.2**		
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	D.2.1.2.1	16.190.397.417.276	16.831.926.939.422
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.2	(1.419.856.141.752)	(1.404.183.720.277)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.3	324.455.373.266.807	269.364.784.080.765
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	D.2.1.2.4	(962.745.115.689)	(974.366.095.513)
Jumlah Investasi Non Permanen		**338.263.169.426.642**	**283.818.161.204.397**
Investasi Permanen			
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.5	3.556.339.409.493.147	3.317.709.229.098.828
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	D.2.1.2.6	8.053.004.500	8.053.004.500
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.7	1.033.747.322.724.706	790.019.190.222.637
Jumlah Investasi Permanen		**4.590.094.785.222.353**	**4.107.736.472.325.965**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**4.928.357.954.648.995**	**4.391.554.633.530.362**
ASET TETAP	**D.2.1.3**		
Tanah	D.2.1.3.1	96.562.505.000	49.598.506.000
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	490.311.101.646	311.503.452.236
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	101.208.263.075	81.252.321.014
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	1.778.149.891.736	1.722.156.865.217
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	52.582.748.755	50.504.068.840
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	9.618.219.556	8.954.062.424
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(1.203.185.210.040)	(931.230.799.820)
Jumlah Aset Tetap Kotor		**2.528.432.729.768**	**2.223.969.275.731**
Jumlah Aset Tetap Bersih		**1.325.247.519.728**	**1.292.738.475.911**
PROPERTI INVESTASI	**D.2.1.4**		
Properti Investasi	D.2.1.4.1	89.318.158.622.627	89.271.007.649.686
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	D.2.1.4.2	(58.249.147.236.922)	(56.513.502.716.643)
Jumlah Properti Investasi		**31.069.011.385.705**	**32.757.504.933.043**
PIUTANG JANGKA PANJANG	**D.2.1.5**		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	D.2.1.5.1	-	15.020.833
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.5.2	49.890.231.097.926	48.201.737.216.319
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.5.3	2.411.302.362.240	2.301.698.582.578
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang	D.2.1.5.4	(3.190.734.138.702)	(3.112.146.112.575)
Jumlah Piutang Jangka Panjang bersih		**49.110.799.321.464**	**47.391.304.707.155**
ASET LAINNYA	**D.2.1.6**		
Aset Tak Berwujud	D.2.1.6.1	328.700.290.824	236.386.021.679
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.6.2	488.209.124.513.224	486.632.618.588.563
Dana Cadangan Penjaminan	D.2.1.6.3	13.675.145.505.000	13.675.145.505.000
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	D.2.1.6.4	73.708.128.282.308	53.287.731.646.004
Dana Jangka Panjang	D.2.1.6.5	26.620.760.889.106	28.528.648.017.150
Aset Lain-lain	D.2.1.6.6	774.434.594.852.983	697.896.841.387.119

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL	D.2.1.6.7	29.130.879.455.119	31.292.147.271.351
Jumlah Aset Lainnya kotor		**1.406.107.333.788.564**	**1.311.549.518.436.866**
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Aset Lainnya	D.2.1.6.8	(378.446.911.948.316)	(346.296.838.636.420)
Jumlah Aset Lainnya Bersih		**1.027.660.421.840.248**	**965.252.679.800.446**
JUMLAH ASET		**6.549.167.881.715.468**	**5.961.602.232.211.887**
KEWAJIBAN	**D.2.2**		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**D.2.2.1**		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	D.2.2.1.1	3.394.915.378.996	4.320.940.427.530
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	191.669.817.125.697	114.541.686.926.029
Utang Bunga	D.2.2.1.3	141.333.352.414.906	118.250.088.626.967
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	431.287.525.165	27.307.329.522.064
Belanja subsidi yang masih harus dibayar	D.2.2.1.5	49.588.103.888.126	-
Utang Transfer	D.2.2.1.6	133.844.602.725.211	97.460.927.735.555
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.7	917.885.904.059.217	786.566.436.441.466
Unamortized Discount		(624.694.363.000)	(885.329.385.000)
Unamortized Premium		285.323.139.000	265.185.148.000
Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek	D.2.2.1.8	97.725.000.000.000	62.418.300.000.000
Unamortized Discount		(2.160.784.065.000)	(1.566.657.675.000)
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	15.087.286.744.749	97.758.669.978
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	105.464.675.905	111.122.213.990
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**1.548.565.579.248.972**	**1.208.887.788.651.579**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**D.2.2.2**		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	D.2.2.2.1	7.464.280.571.549.368	6.890.023.998.123.707
Unamortized Discount		(48.124.379.108.000)	(49.634.944.892.000)
Unamortized Premium		47.570.011.621.000	42.720.368.963.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.2	31.042.846.841.712	31.042.846.841.712
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.3	33.440.000.000.000	86.273.473.974.300
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.4	984.375.374.811	530.768.330.796
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.5	48.154.575.410.217	44.273.286.260.921
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.6	390.300.735.556.292	340.727.372.109.611
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		**7.967.648.737.245.400**	**7.385.957.169.712.047**
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.7	1.096.705.179.850.350	943.345.582.337.528
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.8	28.600.447.523	27.335.416.515
Jumlah Utang Jangka Panjang LN		**1.096.733.780.297.873**	**943.372.917.754.043**
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**9.064.382.517.543.273**	**8.329.330.087.466.090**
JUMLAH KEWAJIBAN		**10.612.948.096.792.245**	**9.538.217.876.117.669**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS	D.2.3	(4.063.780.215.076.777)	(3.576.615.643.905.782)
JUMLAH EKUITAS NETO		(4.063.780.215.076.777)	(3.576.615.643.905.782)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.549.167.881.715.468	5.961.602.232.211.887

Jakarta, 16 Mei 2026
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
A. KEGIATAN OPERASIONAL			
I. Pendapatan			
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak		**482.414.938.163.136**	**535.426.617.430.135**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1	133.424.927.057.308	139.138.205.840.997
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	E.2.1.2	7.500.000.000	2.254.798.245
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.3	348.982.511.105.828	396.286.156.790.893
2. Pendapatan Hibah	E.2.1.4	**18.346.886.424.369**	**44.216.321.039.110**
a. Pendapatan Hibah Dalam Negeri		9.283.772.968.294	35.496.411.343.168
b. Pendapatan Hibah Luar Negeri		9.063.113.456.075	8.719.909.695.942
Jumlah Pendapatan	**E.2.1**	**500.761.824.587.505**	**579.642.938.469.245**
II. Beban			
1. Beban Pegawai	E.2.2.1	179.785.573.595.212	173.001.346.744.056
2. Beban Persediaan	E.2.2.2	1.439.145.251	1.476.311.019
3. Beban Barang dan Jasa	E.2.2.3	1.508.607.572.612	1.578.465.424.841
4. Beban Pemeliharaan	E.2.2.4	14.647.796	18.200.253
5. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	E.2.2.5	1.202.040.000	-
6. Beban Bunga	E.2.2.6	567.595.900.665.365	524.147.192.364.375
7. Beban Subsidi	E.2.2.7	300.210.430.762.924	279.267.883.221.775
8. Beban Hibah	E.2.2.8	493.977.094.757	278.430.938.953
9. Beban Transfer ke Daerah	E.2.2.9	878.526.664.302.990	902.646.703.693.172
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.2.10	30.928.363.201.225	27.839.399.821.259
11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.2.11	(4.252.040.754.550)	12.482.753.654.145
12. Beban Lain-Lain	E.2.2.12	258.956.054.633.186	262.572.777.745.764
Jumlah Beban	**E.2.2**	**2.213.756.186.906.768**	**2.183.816.448.119.612**
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional		**(1.712.994.362.319.263)**	**(1.604.173.509.650.367)**
B. KEGIATAN NON OPERASIONAL			
1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.3.1	(970.572.056.121)	(684.927.964.114)
2. Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.3.2	(30.216.347.500)	(129.960.500.000)
3. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.3.3	(112.839.982.159.639)	20.536.219.742.948
Jumlah Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	**E.2.3**	**(113.840.770.563.260)**	**19.721.331.278.834**
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(1.826.835.132.882.523)**	**(1.584.452.178.371.533)**
C. POS LUAR BIASA			
1. Pendapatan Luar Biasa		**-**	**-**
2. Beban Luar Biasa		-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	**E.2.4**	**-**	**-**
D. SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		**(1.826.835.132.882.523)**	**(1.584.452.178.371.533)**

Jakarta, 16 Mei 2026
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**F.2.1**		
I Arus Kas Masuk			
1 Penerimaan Perpajakan	**F.2.1.1**	**2.218.168.226.056.948**	**2.231.839.822.879.833**
a Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1	1.023.337.095.261.721	1.061.940.526.200.605
b Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.1.2	792.361.480.774.189	828.436.302.857.826
c Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.3	29.274.120.880.711	32.491.020.191.825
d Cukai	F.2.1.1.4	221.673.175.427.801	226.371.492.151.997
e Pajak Lainnya	F.2.1.1.5	72.913.691.732.845	8.742.804.515.348
f Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.6	78.608.661.979.681	73.857.676.962.232
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	**F.2.1.2**	**540.904.970.576.936**	**583.878.607.181.721**
a Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.2.1	223.725.075.778.176	228.928.767.532.781
b Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	F.2.1.2.2	27.683.274.120.780	86.384.593.538.563
c Pendapatan PNBP Lainnya	F.2.1.2.3	179.339.060.480.344	163.848.513.738.956
d Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.2.4	110.157.560.197.636	104.716.732.371.421
3 Penerimaan Hibah	**F.2.1.3**	**5.432.006.928.425**	**34.387.363.715.756**
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**2.764.505.203.562.309**	**2.850.105.793.777.310**
II Arus Kas Keluar			
1 Belanja Pegawai	F.2.1.4	501.046.123.448.187	464.859.258.914.201
2 Belanja Barang	F.2.1.5	553.524.006.285.092	523.368.042.639.998
3 Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.6	514.394.982.025.629	488.426.422.143.817
4 Belanja Subsidi	F.2.1.7	281.759.776.982.061	292.692.594.096.846
5 Belanja Hibah	F.2.1.8	493.977.094.757	278.430.938.953
6 Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.9	183.618.484.876.271	154.949.830.442.829
7 Belanja Lain-lain	F.2.1.10	124.530.750.146.771	216.138.188.685.429
8 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.11	65.466.842.449.400	54.241.430.203.000
9 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.12	96.870.655.441.100	93.845.576.439.722
10 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.13	6.553.021.228.380	5.087.556.141.540
11 Transfer Dana Alokasi Umum	F.2.1.14	433.292.088.063.189	429.210.611.278.998
12 Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.15	17.610.554.270.313	50.890.077.113.845
13 Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Insentif Fiskal	F.2.1.16	22.280.679.578.500	26.693.231.531.500
14 Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.17	145.070.625.814.078	130.441.233.738.467
15 Dana Desa	F.2.1.18	61.645.153.758.700	70.925.927.774.598
16 Hibah Kepada Daerah	F.2.1.19	251.073.243.510	2.207.162.260.694
Jumlah Arus Kas keluar (A.II)		**3.008.408.794.705.938**	**3.004.255.574.344.437**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I-A.II)		**(243.903.591.143.629)**	**(154.149.780.567.127)**
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**F.2.2**		
I Arus Kas Masuk			
1 Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1	620.380.885.677	499.450.401.555
2 Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.2	610.174.852.295	1.400.109.062.740
3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.3	-	3.268.707.260.033
4 Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.2.4	14.121.986.879.370	19.619.717.681.824
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**15.352.542.617.342**	**24.787.984.406.152**
II Arus Kas Keluar			
1 Belanja Modal	F.2.2.5	427.052.204.101.925	355.511.133.723.811
2 Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.6	26.698.925.315.000	15.000.000.000.000
3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.7	-	-

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
4 Penyertaan Modal Negara	F.2.2.8	13.351.980.436.398	42.149.731.758.522
5 Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.9	260.323.023.793.000	26.530.271.865.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**727.426.133.646.323**	**439.191.137.347.333**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I – B.II)		**(712.073.591.028.981)**	**(414.403.152.941.181)**
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**F.2.3**		
I Arus Kas Masuk			
1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1	1.560.033.068.456.176	1.151.979.645.998.052
2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2	181.592.359.658.866	179.765.350.519.789
3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.3	4.295.865.914.969	4.023.538.398.833
4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.4	183.732.831.967	15.454.545.454
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**1.746.105.026.861.978**	**1.335.783.989.462.128**
II Arus Kas Keluar			
1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.5	817.379.575.137.332	629.807.306.465.724
2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.6	95.685.853.595.651	87.454.196.251.177
3 Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*	F.2.3.7	4.666.370.272.398	4.242.437.773.274
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**917.731.799.005.381**	**721.503.940.490.175**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I-C.II)		**828.373.227.856.597**	**614.280.048.971.953**
D ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**F.2.4**		
1 Perhitungan Fihak Ketiga (Netto)	F.2.4.1	(926.516.355.113)	(215.134.088.039)
2 Transito (Netto)	F.2.4.2	31.457.339.657.690	1.581.530.989.101
3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	F.2.4.3	(74.695.633.991.828)	23.022.929.532.814
4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	F.2.4.4	2.751.318.117	2.179.402.806
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(44.162.059.371.134)**	**24.391.505.836.682**
KENAIKAN/PENURUNAN KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN (A+B+C+D)		**(171.766.013.687.147)**	**70.118.621.300.327**
KOREKSI SILPA		2.347.429.214.088	2.052.665.074.805
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS		147.916.719.129	6.326.893.741.118
PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI			
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN		(744.370.688.275)	883.764.180.317
PENGGUNAAN SAL		(93.146.980.793.000)	(56.381.000.000.000)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	(263.162.019.235.205)	23.000.944.296.567
SALDO AWAL KAS	F.1.1	629.015.216.812.398	606.014.272.515.831
SALDO AKHIR KAS	**F.1.3**	**365.853.197.577.193**	**629.015.216.812.398**

Jakarta, 16 Mei 2026
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
A. EKUITAS AWAL	**G.2.1**	**(3.576.615.643.905.782)**	**(3.328.187.950.388.477)**
B. SURPLUS / (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	**G.2.2**	**(1.826.835.132.882.523)**	**(1.584.452.178.371.533)**
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
1. Koreksi Nilai Persediaan	G.2.3.1	-	-
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	G.2.3.2	40.386.034.567.048	24.873.996.185.564
3. Revaluasi Aset	G.2.3.3	-	-
4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	G.2.3.4	(2.161.267.816.232)	1.437.380.985.498
5. Koreksi SAL	G.2.3.5	8.551.629.023.703	2.074.667.959.503
6. Lain-lain	G.2.3.6	197.552.129.021.108	69.599.521.111.279
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	**G.2.3**	**244.328.524.795.627**	**97.985.566.241.844**
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**G.2.4**	**1.121.679.330.006.001**	**1.236.867.333.530.144**
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI	**G.2.5**	**-**	**-**
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L			
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran		10.398.384.605	32.325.296.274
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah		(9.408.185.161.433)	(3.440.440.444.071)
3. Mutasi Kas BLU		(16.939.506.313.272)	4.579.700.230.037
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN di K/L	**G.2.6**	**(26.337.293.090.100)**	**1.171.585.082.240**
KENAIKAN / (PENURUNAN) EKUITAS		**(487.164.571.170.995)**	**(248.427.693.517.305)**
G. EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E+F)	**G.2.7**	**(4.063.780.215.076.777)**	**(3.576.615.643.905.782)**

Jakarta, 16 Mei 2026
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara s.t.d.t.d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
9. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2025;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2025 tentang Mekanisme Penyaluran Dana atas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir Tahun Anggaran
18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, s.t.d.t.d. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengelolaan fiskal dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangan pengelolaan fiskal *(Chief Financial Officer/CFO)* tersebut adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Tugas ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan fungsi BUN.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN berwenang untuk:

1. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
2. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
4. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
5. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
7. menyimpan uang negara;
8. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
10. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
11. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
12. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
13. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
14. melakukan penagihan piutang negara;
15. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
16. menyajikan informasi keuangan negara;
17. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Negara;
18. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
19. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Selain menjalankan fungsi dan kewenangan BUN tersebut di atas, Menteri Keuangan juga mendapat alokasi dana APBN yang hanya dikelola oleh BUN dan tidak dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain, yaitu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Atas anggaran yang dikelola tersebut, Menteri Keuangan kemudian menunjuk Pembantu Pengguna Anggaran

(PPA) BUN untuk mengelola BA BUN serta Unit Kementerian Negara/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta, dengan alamat Gedung Juanda I Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat.

Anggaran dan transaksi yang dikelola Menteri Keuangan selaku BUN meliputi transaksi:

1. Utang Pemerintah terdiri dari:
   a. Penerimaan utang luar negeri;
   b. Penerimaan utang dalam negeri;
   c. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri;
   d. Pembayaran cicilan utang luar negeri;
   e. Pembayaran cicilan utang dalam negeri;
2. Hibah terdiri dari:
   a. Hibah dalam bentuk uang;
   b. Hibah dalam bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga;
3. Investasi Pemerintah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait Investasi Pemerintah, yang antara lain meliputi penyertaan modal negara, investasi pada lembaga keuangan internasional, pembiayaan untuk badan layanan umum, investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya, dana penjaminan serta pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah;
4. Pemberian Pinjaman yaitu transaksi pemberian pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau BUMD yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu;
5. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Transaksi TKD meliputi beban dan realisasi TKD, piutang TKD, kewajiban TKD dan transaksi transitoris TKD.

   TKD terdiri atas:

   a. Dana Bagi Hasil (DBH);
   b. Dana Alokasi Umum (DAU);
   c. Dana Alokasi Khusus (DAK);
   d. Dana Otonomi Khusus;
   e. Dana Keistimewaan;
   f. Dana Desa;
   g. Insentif Fiskal;
6. Belanja Subsidi yaitu pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat;

7. Belanja Lain-lain yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah;
8. Transaksi Khusus antara lain meliputi transaksi:
    a. belanja/beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional;
    b. belanja/beban Fasilitas Penyiapan Proyek;
    c. belanja/beban Dukungan Kelayakan;
    d. PNBP yang dikelola oleh DJA;
    e. transaksi aset dan belanja/beban yang berada dalam pengelolaan DJKN;
    f. belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
    g. pendapatan dan belanja/beban pengelolaan kas negara;
    h. transaksi penggunaan PNBP BUN PKN;
    i. utang perhitungan fihak ketiga pegawai;
    j. utang perhitungan fihak ketiga Pajak Rokok;
    k. pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara;
    l. belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan;
    m. pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah;
9. Badan Lainnya yaitu transaksi pada Badan Lainnya (yayasan dan lembaga non struktural) baik yang melalui APBN maupun yang tidak melalui mekanisme APBN.

Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan Menteri Keuangan selaku BUN di atas dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawabannya telah ditetapkan Kode Bagian Anggaran BUN (BA BUN) yaitu BA 999.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas (LAK). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas Pelaporan terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Kementerian Negara/Lembaga; dan
4. Bendahara Umum Negara.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan tugas BUN serta sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Keuangan selaku BUN merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dihasilkan dari Sistem Akuntansi BUN (SABUN). Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BA BUN) dan Laporan Keuangan Kuasa BUN yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) beserta Catatan atas Laporan Keuangan.

LAK merupakan Laporan Keuangan yang menginformasikan penerimaan/pengeluaran kas ke/dari kas negara. LAK tidak terkait dengan BA tertentu tetapi mencakup seluruh Bagian Anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya akan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

SABUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemberian Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL).

Dalam rangka pelaksanaan SABUN, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAPBUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK). Setiap UAPBUN membawahi satu atau lebih Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) dan/atau Unit Akuntansi Kuasa BUN (UAKBUN). Struktur organisasi akuntansi dan penanggung jawab untuk setiap subsistem SA-BUN diatur pada masing-masing subsistem SABUN. Dalam rangka proses konsolidasi laporan keuangan BUN, Menteri Keuangan membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN (UA BUN). Selain itu dalam kerangka SiAP, Menteri Keuangan selaku BUN juga menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. Fungsi Kuasa BUN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah.

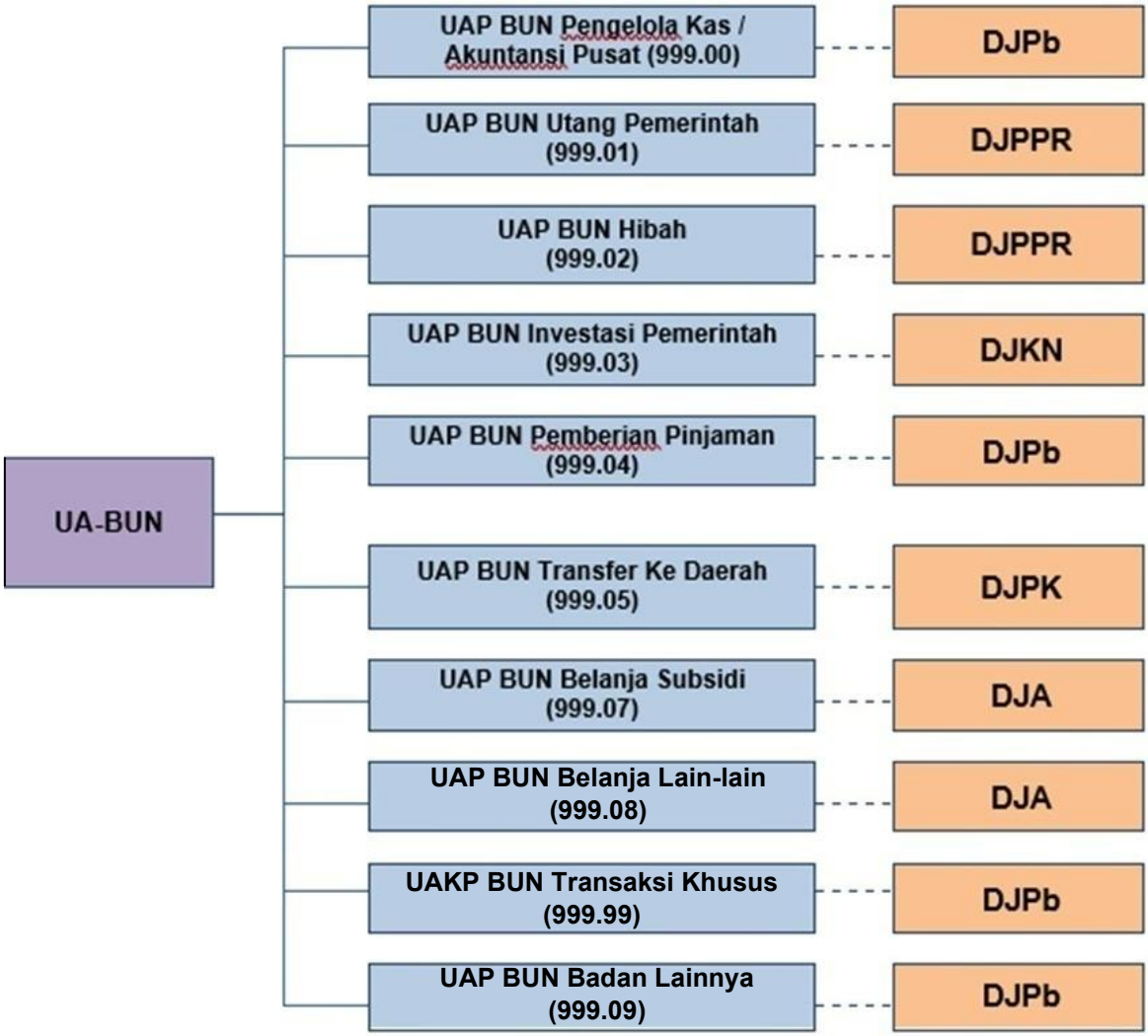

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UAPBUN dan UAKP BUN TK, UA BUN melakukan proses konsolidasi setiap semester dan tahunan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang dilaksanakan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari masing-masing laporan serta melakukan eliminasi terhadap akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2025 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN yang disajikan per 31 Desember 2025, yang meliputi:

No.	BA	Uraian	Jumlah Satker
1	999.00	UAPBUN Akuntansi Pusat (UAPBUN AP)	183
2	999.01	BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (DJPPR)	1
3	999.02	BA BUN Pengelola Hibah (DJPPR)	2
4	999.03	BA BUN Pengelola Investasi (DJKN)	18
5	999.04	BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (DJPb)	1
6	999.05	BA BUN Pengelola Transfer ke Daerah (DJPK)	520
7	999.07	BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (DJA)	17
8	999.08	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (DJA)	12
9	999.99	Transaksi Khusus (DJPb)	35
10	999.09	Badan Lainnya: Yayasan dan LNSI (DJPb)	1
Total Satuan Kerja			**790**

Dengan demikian, UABUN/entitas pelaporan adalah Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sedangkan anggaran dan transaksi BA BUN dilaksanakan oleh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang sekaligus sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN)/entitas akuntansi.

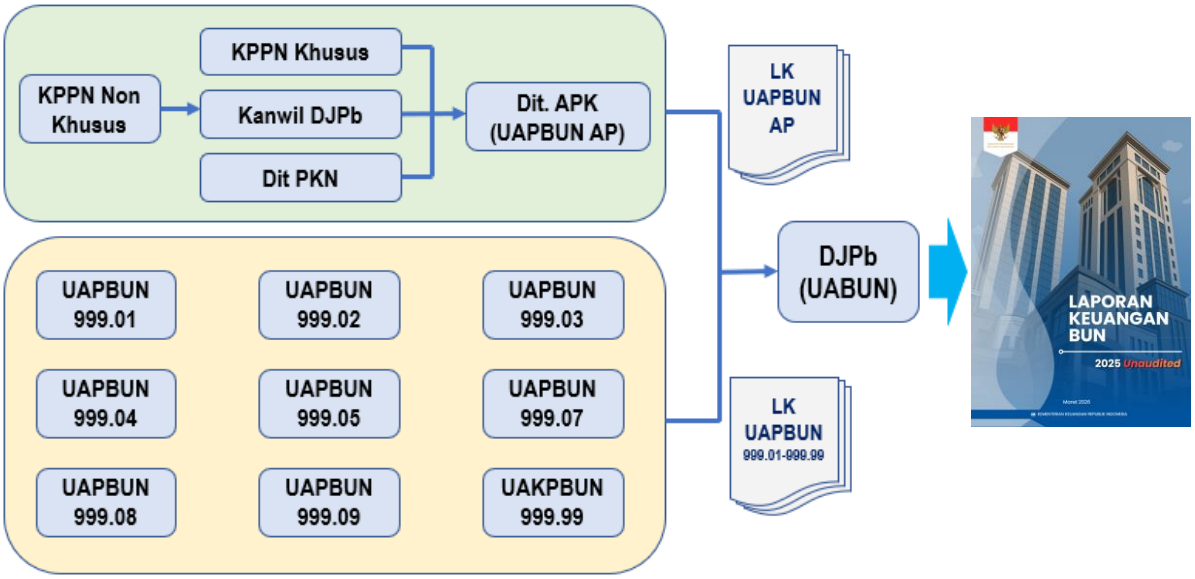

Dalam penyusunan LKBUN Tahun 2025 *Audited*, dilakukan simpilifikasi penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pertanggungjawaban atas pengeluaran negara yang seluruhnya telah dibukukan oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat (UAKBUN-Pusat). Sehubungan dengan pembukuan transaksi pengeluaran negara yang telah dilakukan secara terpusat oleh UAKBUN-Pusat, penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN juga dilaksanakan secara terpusat sehingga penyusunan laporan keuangan oleh UAKBUN-Daerah perlu disederhanakan.

Selanjutnya, guna menguji dan memastikan efektivitas penerapan simplifikasi, perlu dilaksanakan *piloting* simplifikasi penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-10/PB/2026 tentang Pelaksanaan *Piloting* Simplifikasi Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara. *Piloting* simplifikasi dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu:

a. tahap I dimulai pada penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun 2025 *Unaudited* untuk UAKBUN-Daerah di luar lingkup DKI Jakarta; dan
b. tahap II dimulai paling lambatpada penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN Semester I Tahun 2026 untuk UAKBUN-Daerah lingkup DKI Jakarta.

Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun 2025 *Audited* telah disusun dengan mengacu pada *piloting* simplifikasi tahap I. Pemindahan saldo aset dan kewajiban pada UAKBUN-Daerah ke UAKBUN-Pusat telah dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemindahan Data Aset dan Perubahan Atribut Segmen Bank, serta Pemindahan Saldo Utang kepada Pihak Ketiga pada KPPN. Daftar Berita Acara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berita Acara Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor BA-01/PB.64/2026 hal Pemindahan Saldo Utang kepada Pihak Ketiga dari Retur melalui Jurnal Manual; dan
b. Berita Acara Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor BA-02/PB.64/2026 hal

Pemindahan Data Aset dan Perubahan Atribut Segmen Bank dalam rangka Piloting Tahap I Simplifikasi Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN LKBUN TAHUN 2025

Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah yang disusun oleh KPPN dan Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat yang disusun oleh Direktorat PKN merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2025, penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN menggunakan aplikasi SPAN.

Kebijakan penyajian LK Kuasa BUN Tingkat KPPN secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah;
2. Penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak melalui Rekening Kuasa BUN Daerah namun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan penihilan/pengesahan dari KPPN; dan/atau
3. Penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah namun mempengaruhi Neraca UAKBUN Daerah.

Kebijakan penyajian UAKBUN-Pusat Direktorat PKN secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat; dan
2. Penerimaan dan pengeluaran pada SPM atau dokumen yang dipersamakan, dengan potongan, yang pembayarannya melalui rekening Kuasa BUN Pusat.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus; dan
11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-10/PB/2026 tentang Pelaksanaan *Piloting* Simplifikasi Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA BUN disusun berdasarkan LRA yang disampaikan oleh UAPBUN dan UAKP BUN TK dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. LRA Pendapatan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan negara dan hibah. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pendapatan tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi pendapatan tahun anggaran berjalan. LRA Pendapatan disusun oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos pendapatan berdasarkan pos-pos pendapatan yang disajikan pada LRA UAPBUN.

   b. LRA Belanja dan Transfer menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi belanja dan transfer. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian belanja dan transfer tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi belanja dan transfer tahun anggaran berjalan. LRA Belanja dan Transfer disusun oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada seluruh UAPBUN dan LRA UAKPBUN TK selain UAPBUN AP. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos belanja berdasarkan pos-pos belanja yang disajikan pada LRA UAPBUN dan UAKPBUN TK selain UAPBUN AP.

   c. LRA Pembiayaan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pembiayaan, mengurangi realisasi pembiayaan tahun anggaran berjalan. LRA Pembiayaan disusun oleh UAPBUN yang melaksanakan aktivitas pembiayaan maupun oleh UAPBUN selaku pengelola kas negara (UAPBUN AP). UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.

   d. Penyajian SiLPA/SiKPA dalam LRA BUN berisi selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

2. Neraca

   Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca disusun oleh seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menyusun neraca dengan menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada neraca seluruh UAPBUN dan

UAKPBUN TK. Dalam hal terdapat pos-pos neraca yang disajikan ganda antara UAPBUN dan UAPBUN AP dilakukan pengurangan pada neraca UAPBUN agar tidak terjadi duplikasi penyajian. Dalam hal terdapat realisasi pos-pos neraca yang bersifat *reciprocal*, dilakukan eliminasi *(reciprocal elimination).*

3. Laporan Arus Kas (LAK)

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang meliputi data penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih, Rekening Kas Penempatan, Rekening Khusus, Rekening Penerimaan, dan Rekening Pengeluaran termasuk transaksi pendapatan dan belanja operasional pada BLU. UAPBUN AP menyusun LAK dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LAK seluruh UAKBUN Daerah dan UAKBUN Pusat.

4. Laporan Operasional

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah sampai dengan periode 31 Desember 2025. Laporan Operasional disusun berdasarkan data pendapatan dan beban atas kegiatan operasional serta kegiatan non operasional yang dilakukan oleh seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP. Dalam rangka penyajian Laporan Operasional Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos Laporan Operasional berdasarkan hasil konsolidasi pos-pos Laporan Operasional yang disajikan pada Laporan Operasional seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan data ekuitas akhir tahun lalu yang merupakan ekuitas awal tahun berjalan ditambah surplus/defisit yang dihasilkan oleh Laporan Operasional ditambah koreksi karena dampak kumulatif kebijakan akuntansi dan transaksi antar entitas.

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN, penjelasan, daftar terinci, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis akrual yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dan pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penyusunan dan penyajian LKBUN Tahun 2025 *Audited* mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN ini adalah:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat pengesahan pendapatan oleh BUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKBUN Tahun 2025 *Audited* adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam rekening antara (rekening 600.000.411980) dan penerimaan panas bumi (rekening 508.000.084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting, DMO fee*, dan pengembalian *(reimbursement)* PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara (PNBP).

Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran BUN merupakan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN berupa realisasi pendapatan pada seluruh UAPBUN dan UAKP BUN TK.

Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari UAPBUN AP berfungsi sebagai penguji (kontrol) data realisasi BA BUN.

SiLPA/SiKPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah dalam hal ini UAPBUN yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak tagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (atau tidak setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat pengesahan belanja oleh BUN. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka lembar *(face)* laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan gabungan dari seluruh belanja Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi Koordinator Pembantu BUN TK.

Untuk transaksi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja tahun berjalan, menggunakan mata anggaran (akun) yang sama dengan mata anggaran (akun) realisasinya, tetapi dibedakan dalam penggunaan dokumen sumber. Jika terjadi pengembalian pendapatan/belanja pada tahun anggaran berjalan, maka langsung mengurangi realisasi pendapatan/belanja dengan mata anggaran pendapatan/belanja yang berkenaan.

SiLPA/SiKPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: (1) terjadinya penurunan manfaat ekonomi; (2) potensi jasa atau terjadinya konsumsi aset; (3) timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban karena penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Pengakuan beban karena konsumsi aset adalah saat terjadinya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Pengakuan beban karena timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara.

Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban yang disajikan pada Laporan Operasional merupakan gabungan dari seluruh beban Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN TK.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran), meskipun penyajian dalam LKBUN secara neto. Penyajian pagu anggaran pembiayaan menggunakan data yang bersumber dari pagu APBN dan APBN-P.

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKBUN berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek,

piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs penutup yaitu kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam Neraca LKBUN menggunakan data Kas Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Kas Lainnya dan Setara Kas dapat berupa bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta kas penerimaan hibah dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Kas pada BLU merupakan Saldo Kas pada BLU yang telah disahkan pendapatan dan belanja ke KPPN, tidak termasuk pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan ke KPPN.

Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kas di Kementerian Negara/Lembaga merupakan Saldo Kas yang berada di Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari pengesahan hibah dalam bentuk uang yang langsung diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

1) Transaksi Pendapatan

   Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.

3) Transaksi Penerimaan Lainnya / Non Anggaran

   Penerimaan Negara/Daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah, antara lain berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:

1) Transaksi Belanja Negara/Daerah

   Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3) Transaksi Pengeluaran Transfer

Pengeluaran transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus oleh pemerintah pusat.

4) Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran

Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Temasuk dalam pos Piutang adalah Piutang PNBP, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan piutang lainnya yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang lainnya adalah piutang bunga atas pemberian pinjaman Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD).

Pada LKBUN Tahun 2025 *Audited* ini, Piutang yang disajikan antara lain Piutang Bukan Pajak BA-BUN, Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, dan Uang Muka Belanja.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

1) harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian,
2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaannya namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan opname.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka

panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar. Penempatan dana untuk perolehan instrumen keuangan berupa *deposito on call* dalam jangka waktu enam bulan memenuhi pengakuan investasi dan perlakuan akuntansi investasi jangka pendek.

Dalam PSAP 6 terkait Akuntansi Investasi, pengertian investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama kurang 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar. Investasi yang dapat digolongkan dalam investasi jangka pendek, antara lain:

1) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dengan 12 bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis;
2) SUN jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 2 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
4) Reksa Dana.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca per 31 Desember 2025 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

   Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

   Investasi Non Permanen meliputi seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP), atau nasabah BPR.

   LKBUN Tahun 2025 *Audited* menyajikan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir pada BLU Kementerian/Lembaga yang pendanaan Dana Bergulir berasal dari BA 999.03 (Investasi Pemerintah). Selain itu LKBUN juga menyajikan Investasi Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian dan Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan.

   Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/ diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

   Penilaian Investasi Non Permanen Lainnya menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, misalnya dana bergulir.

2) Investasi Permanen

   Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara

berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN kepada Badan Usaha yang memenuhi definisi sebagai BUMN sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2025 minimal memenui salah satu ketentuan berikut:

a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Termasuk dalam investasi permanen adalah nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bank Indonesia (BI). PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. Aset-aset yang berstatus BPYBDS telah dikeluarkan dari neraca LKKL.

Penyertaan Pemerintah pada lembaga internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat dengan metoda biaya (*cost method*). Sedangkan BUMN dengan kepemilikan pemerintah pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen) ke atas atau kepemilikan pemerintah kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*).

Pengaruh yang signifikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya persentase kepemilikan saham. Dalam kondisi tertentu, kepemilikan saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dapat memiliki pengaruh yang signifikan jika mempunyai pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris/dewan pengawas;
2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/rapat yang sejenis.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan *(net realizable value)*. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca UAPBUN/UAKPBUN TK per 31 Desember 2025 pada harga perolehan.

Sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan
2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas tidak dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset (diperlakukan sebagai biaya), kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Dalam LKBUN Tahun 2025 *Audited*, seluruh aset tetap yang dikelola oleh UAPBUN selaku pengguna barang telah disusutkan/didepresiasi. Kebijakan akuntansi umur ekonomis dan nilai buku aset secara nasional sebagai dasar penyusutan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, terdapat beberapa aset dalam pengelolaan BA BUN yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri. Pengaturan khusus tersebut meliputi:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 188/PMK.05/2022 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 207/PMK.05/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-1/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis

Penyusutan BMN yang berasal dari KKKS berupa Aset Lainnya pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Bendahara Umum Negara;

4) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-08/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, serta dana lain yang sejenis.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) minyak dan gas bumi. Di samping itu, piutang macet Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset KKKS yang disajikan pada LKBUN Tahun 2025 *Audited* adalah aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang belum diserahkan kepada Pemerintah. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK. Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca

sebagai aset tetap atau persediaan.

Terhadap pengakuan Aset KKKS sebagai Aset Lain-lain, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan aset tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi Milik/Kekayaan Negara. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan Aset KKKS.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan dan piutang pemberian pinjaman yang berasal dari Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman (NPPP) tahun 2009 dan setelah tahun 2009.

Terkait dengan pelaporan Badan Lainnya diantaranya Otorita Asahan, dan Yayasan Gedung Veteran disajikan sebagai Aset Lainnya dari Ekuitas Pada Unit Badan Lainnya.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman *(accrued interest)*, Utang Subsidi, Utang SBN Jangka Pendek, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang SBN Jangka Pendek adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan. Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal tanggal pelaporan disajikan sebagai bagian lancar.

Termasuk juga bentuk utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi yang dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

Pengakuan Utang Kompensasi Jangka Pendek:

Kewajiban kompensasi kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat:

1) terdapat kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau

2) penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah.

Penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah menjadi dasar penyesuaian atas nilai kompensasi sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk.

Dalam hal besaran final nilai kompensasi ditetapkan akan dibayarkan lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban kompensasi diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang-utang jangka panjang lainnya.

Pengukuran Utang Kompensasi Jangka Pendek:

Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar:

1) kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau
2) besaran final nilai kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000.411980 dan 508.000.084980, seperti *under lifting, DMO fee*, dan pengembalian *(reimbursement)* PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerjasama berdasarkan verifikasi yang dilakukan Pemerintah bersama SKK Migas.

Estimasi Kurang Bayar Tagihan Belanja Subsidi

Kewajiban subsidi diestimasi merupakan tagihan kurang pembayaran belanja subsidi kepada pemerintah yang diakui saat KPA BUN belanja subsidi menetapkan nilai estimasi kewajiban kurang bayar belanja subsidi atau dokumen yang dipersamakan. KPA tetap memperhatikan nilai yang andal terkait derajat kepastian estimasi kewajiban berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan. Derajat kepastian nilai estimasi kewajiban belanja subsidi dapat disusun dalam kertas kerja yang didukung dengan data sumber yang andal

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Utang jangka panjang pemerintah dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam *Notice of Disbursement* (NoD), dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD. Nilai utang jangka panjang dari sumber pinjaman disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam PMK No.

160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang diakui pada saat tanggal setelmen yang tercantum dalam dokumen setelmen, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Nilai utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo posisi (*outstanding*) utang jangka panjang dari sumber pinjaman dan utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai rupiah utang jangka panjang pada periode semesteran dan tahunan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

Utang jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

c. Konversi Pinjaman

Konversi pinjaman merupakan strategi Direktorat Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) selaku BA BUN 999.01 dalam melakukan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman.

Konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pertukaran atau konversi yang disetujui oleh pemberi pinjaman (kreditur) dengan memanfaatkan tingkat suku bunga yang rendah untuk pinjaman dan/atau disertai dengan konversi mata uang asing lama dengan mata uang asing baru yang disepakati.

Pada saat tanggal pelaksanaan konversi pinjaman, dapat mengakibatkan selisih lebih atau kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman yang mempengaruhi nilai *outstanding* pinjaman dalam mata uang asing baru terkonversi maupun penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah.

Selisih lebih perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai *outstanding* pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih besar dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih besar dari semula.

Selisih kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai *outstanding* pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih kecil dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih kecil dari semula.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan, maka nilai selisih lebih perhitungan dicatat sebagai beban penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 596611 (Beban Lain-lain) dan menambah nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan, maka nilai selisih kurang perhitungan dimaksud dicatat sebagai pendapatan penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 491311 (Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan mengurangi nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Kewajiban Kontinjensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (*probable*). Kewajiban ini tidak diakui apabila: (i) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan (ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban kontijensi belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan paragraf 58 sampai dengan 62 sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontijensi perlu diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Kurs Valuta Asing

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran I dijelaskan sebagai berikut:

a. Paragraf 99 Kerangka Konseptual Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa "Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah".

b. Paragraf 74 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa: "Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca".

c. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63-66 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

   1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

   2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

   3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

   4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

      a) transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan

      b) transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

d. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas Paragraf 43-45 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

   1) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

   2) Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

3) Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

e. PSAP 12 tentang Laporan Operasional Paragraf 53-56 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi

b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2025 *Audited*, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang asing di BI, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Dalam satu hari, Bank Indonesia menerbitkan dua publikasi kurs, sebagai berikut:

a) Kurs Khusus Pemerintah (kurs tengah yang terbit pada pukul 08.00 WIB) merupakan kurs tengah pada H-1 yang diterbitkan oleh BI pada pukul 16.15 WIB. Kurs tersebut dihitung berdasarkan transaksi mata uang asing terhadap rupiah antar bank yang terjadi di pasar valuta asing Indonesia yang terjadi pada H-1;
b) Kurs Penutup (kurs tengah yang terbit pada pukul 16.15 WIB) merupakan kurs yang dihitung berdasarkan transaksi mata uang asing terhadap rupiah antar bank yang terjadi di pasar valuta asing Indonesia yang terjadi pada hari berkenaan. Kurs penutup (H+0) tersebut akan secara otomatis menjadi kurs tengah pada H+1 pukul 08.00 WIB.

Rekening koran yang dihasilkan oleh system pada BI mencatat transaksi harian menggunakan kurs tengah yang terbit pada pukul 08.00 WIB. Namun, transaksi tersebut akan direvaluasi berdasarkan kurs tengah yang diperbaharui datanya pada pukul 16.15 WIB. Revaluasi tersebut dilakukan ketika BI telah melakukan tutup buku/*End of Day* (EoD). Oleh karena itu, kurs tengah yang digunakan sebagai referensi kurs acuan dalam konversi nilai valuta asing ke nilai ekuivalen rupiah untuk keperluan penyajian laporan keuangan menggunakan kurs tengah pada tanggal pelaporan yang datanya diperbaharui setiap pukul 16.15 WIB yang kemudian disebut sebagai kurs penutup.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs penutup yaitu kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada tahun 2021 terjadi perubahan kebijakan penggunaan kurs BI yang digunakan sebagai acuan penjabaran nilai mata uang asing di tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan tersebut merujuk pada kebijakan BI yang mempublikasikan kurs penutup sebagai kurs untuk keperluan pelaporan. Kebijakan akuntansi terkait penggunaan kurs penutup BI pada entitas lingkup BUN diatur dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-258/PB/2021 tanggal 22 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas penggunaan Kurs Penutup pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan atau selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*). Dengan demikian LKBUN Tahun 2025 *Audited* menyajikan selisih kurs belum terealisasi atas kas dan utang kepada pihak ketiga dalam mata uang asing, bagian lancar pemberian pinjaman, utang luar negeri, pemberian pinjaman, utang jangka panjang luar negeri, dan SBN Valas sebagai pendapatan/kerugian selish kurs yang belum terealisasi pada Laporan Operasional, kenaikan/penurunan ekuitas pada Neraca, dan penyesuaian pada Laporan Arus Kas.

Kurs penutup BI tanggal 31 Desember 2025 dan kurs penutup BI tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	16.720,00	16.157,00
Dolar Australia [AUD]	1	11.182,34	10.052,89
Dolar Canada [CAD]	1	12.200,37	11.245,52
Franc Swiss [CHF]	1	21.083,16	17.883,67
Yuan China [CNY]	1	2.391,15	2.213,48
Kroner Denmark [DKK]	1	2.627,65	2.255,71
EURO [EUR]	1	19.624,26	16.822,67
Poundsterling Inggris [GBP]	1	22.500,10	20.296,42
Yen Jepang [JPY]	100	106,79	103,43
Korean Won [KRW]	1	11,59	10,96
Special Drawing Right [SDR]	1	22.918,27	21.070,83

Dalam penyajian LKBUN Tahun 2025 *Audited*, sebagai dasar kebijakan serta perlakuan selisih kurs atas investasi pada bentuk mata uang asing dan mata uang rupiah, di mana investasi dalam mata uang asing, selisih kursnya masuk pada Laporan Operasional dan investasi mata uang rupiah yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang asing yang dirupiahkan, selisih kursnya masuk dalam komponen LPE.

Selain itu, secara khusus pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas) dalam penyusunan LKBUN Tahun 2025 *Audited* diatur tersendiri melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Dalam Perdirjen tersebut antara lain mengatur bahwa dalam rangka pengelolaan kas, Kuasa BUN dapat:

a. menyimpan kas dalam mata uang asing;

b. melakukan konversi;

c. melakukan kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing

yang sama; dan/atau

d. melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Pengelolaan kas di atas dapat menimbulkan selisih kurs yang terdiri dari:

a. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*unrealized*);

b. Selisih Kurs Terealisasi (*realized*).

Dalam penyusunan, Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas): LKBUN

Selisih kurs yang belum terealisasi diakui pada saat translasi/ penjabaran saldo Kas di Rekening Milik BUN dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih Kurs Belum Terealisasi dilakukan penyesuaian pada saat Kuasa BUN melakukan:

a. kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan

b. pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Selisih kurs belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs penutup BI pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang belum terealisasi tersebut dibukukan dengan menggunakan akun Selisih Kurs (311711). Pada akhir periode pelaporan (bulanan, semesteran, dan tahunan), saldo akun Selisih Kurs (311711) diakui sebagai Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (491111) apabila bersaldo kredit (negatif) dan diakui sebagai Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211) apabila bersaldo debet (positif) sehingga akan tersaji dalam Laporan Operasional.

Selisih Kurs Terealisasi diakui pada saat Kuasa BUN melakukan konversi. Konversi tersebut dapat terjadi:

a. dari mata uang asing ke mata uang rupiah; dan/atau

b. dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.

Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi transaksi dan diperhitungkan dengan Selisih Kurs Belum Terealisasi yang telah dihitung sebelumnya. Selisih Kurs Terealisasi dan penyesuaian Selisih Kurs dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang dan dibukukan sebagai berikut:

a. untuk Selisih Kurs Terealisasi yang dihasilkan dari transaksi konversi,akun yang digunakan adalah Pendapatan Dari Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (425751) atau akun Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (581415).

b. untuk penyesuaian Selisih Kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dan pembayaran, akun yang digunakan adalah SILPA (311211).

Untuk selisih kurs pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Utang dan Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Hibah, diatur sebagai berikut:

a. Sesuai PMK Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, selisih kurs belum terealisasi dicatat sebagai kerugian/pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada Laporan Operasional dan disajikan pada Kegiatan Non Operasional;

b. Beban/Pendapatan Selisih Kurs yang timbul sebagai akibat dari perbedaan kurs pada tanggal SPP dengan SP2D seluruhnya dihilangkan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

1) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai akibat dari transaksi pengeluaran pembiayaan (72xxxx) dijurnal ke akun utang (22xxxx);

2) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai akibat dari transaksi 54xxxx dijurnal ke akun sesuai dengan SPM/SP2D (54xxxx).

12. Transaksi Non Anggaran pada Laporan Arus Kas

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Transaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

a. Transaksi transito

Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

b. Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat negara, iuran asuransi kesehatan yang disetor oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah untuk disalurkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga, serta transaksi penerimaan dan penyetoran pajak rokok.

c. Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Negara. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

d. Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN merupakan transaksi antara rekening BUN dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

13. Satuan Kerja Transaksi Khusus Suspen Penerimaan

Suspen Penerimaan merupakan transaksi penerimaan yang diterima kasnya di Kas Negara tetapi tidak teridentifikasi entitas penyetornya dan/atau tidak diakui oleh Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Untuk Laporan Keuangan BUN Tahun 2025 *Audited* telah dibentuk satuan kerjanya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-801/PB/2016 tentang Penunjukan KPPN Khusus Penerimaan Sebagai satuan kerja transaksi khusus suspen penerimaan. Pembentukan satker ini merupakan salah satu bentuk pengendalian atas penerimaan Negara dan upaya menyelesaikan permasalahan suspen penerimaan. Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan merupakan UAKPA BUN TK lingkup Ditjen Perbendaharaan yang bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Penyelesaian atas suspen penerimaan dilakukan terhadap suspen transaksi pendapatan,

pengembalian belanja, dan/atau penerimaan transitoris, dengan kondisi sebagai berikut:

a. Transaksi setoran penerimaan yang tidak teridentifikasi di dalam SPAN karena COA tidak lengkap; yang terdiri dari:
   1) Suspen kode satker (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZXXX menggunakan kode akun sesuai setoran);
   2) Suspen kode BA, ES1 (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZ ZZ dengan kode akun sesuai setoran);
   3) Suspen kode akun (SPAN mencatat dengan kode akun 498111).

b. Transaksi setoran dengan kode COA lengkap, namun tidak diakui oleh satker pada saat pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mengakui transaksi penerimaan dari KPA satker.

14. Transfer ke Daerah (TKD)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.05/2022, pada pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SATD, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan yang terdiri atas:

a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKKPA BUN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran;

c. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

d. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat UABUN yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Realisasi anggaran TKD diakui pada saat diterbitkannya SP2D oleh KPPN mitra kerja KPA BA BUN TKD.

Beban TKD diakui pada saat:

a. Resume tagihan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN sehubungan dengan pelaksanaan realisasi anggaran TKD; dan

b. Timbul kewajiban pemerintah atas kurang salur TKD yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam satu periode tahun anggaran berjalan.

Piutang TKD diakui sebagai piutang pada saat dana atas TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang TKD berdasarkan:

a. dokumen penetapan lebih salur transfer atau yang dipersamakan sebagaimana ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan TKD; dan

b. dokumen hasil rekonsiliasi perhitungan sisa dana yang harus dikembalikan ke rekening kas umum negara antara KPA penyaluran TKD dengan Pemerintah Daerah dan sampai dengan tanggal

laporan keuangan tahun berjalan belum dilakukan penyelesaian pengembalian lebih salur TKD.

Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran TKD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur transfer dan belum diketahui secara definitif Pemerintah Daerah penerima yang kelebihan salur transfer dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan.

Piutang Transfer dan Piutang Transfer Diestimasi disajikan dalam Neraca pada pos aset lancar.

Kewajiban TKD diakui sebagai kewajiban pada saat dana TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran yang bersangkutan kurang jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan sebagai kewajiban TKD berdasarkan dokumen penetapan kurang salur transfer atau yang dipersamakan dan sampai dengan tanggal laporan keuangan tahun berjalan belum dilakukan penyelesaian kurang salur TKD.

Dalam proses pelaksanaan anggaran TKD tahun anggaran berjalan yang masih berlangsung, pagu anggaran dan/atau sisa pagu anggaran TKD yang belum terealisasi tidak dicatat dan disajikan sebagai Kewajiban TKD di Neraca.

Kewajiban Transfer Diestimasi timbul dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran TKD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kekurangan salur transfer dan belum diketahui secara definitif Pemerintah Daerah penerima yang kekurangan salur dan/ atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan. Nilai kewajiban transfer diestimasi diukur sebesar nilai nominal sesuai Berita Acara Nota Kesepakatan Final (BA NKF) atau dokumen lain yang menyatakan jumlah kewajiban-piutang diestimasi.

Kewajiban Transfer dan Kewajiban Transfer Diestimasi disajikan di neraca pada pos kewajiban jangka pendek.

15. Penyajian dan Pengungkapan Hak dan Kewajiban Putusan Hukum Inkracht

Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap Entitas Pelaporan yang memiliki perkara tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain melakukan pemutakhiran informasi tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), setiap Entitas Pelaporan juga melaporkan tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas tuntutan hukum kepada Pemerintah dalam Laporan Keuangan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya;

b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK; dan

c. Yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan dan belum tersedia anggaran di Entitas Pelaporan/Bagian Anggaran yang bersangkutan.

Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas yang diselesaikan sebelum jatuh tempo antara lain karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya (*carrying amount*) harus diungkapkan pada CaLK.

b. Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Pembayaran kepada Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

c. Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Apabila jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

d. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi utang di atas.

Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CaLK yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

16. Pencatatan Dana ASR

Pemerintah telah mengatur lebih lanjut atas kebijakan akuntansi dan pelaporan atas pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas/ BPMA dan KKKS terkait kegiatan hulu migas. Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022, pencatatan Dana ASR dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan kode satker 999975 yang dikonsolidasi ke BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 99908). Pencatatan dilakukan dengan menggunakan kode akun debet 163119 Dana Lainnya dan kredit 221919 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.

17. Pencatatan Kewajiban Dana Talangan Pengadaan Tanah PSN

Kewajiban talangan pengadaan tanah PSN untuk penyajian laporan keuangan tahun 2025 pada LK K/L diakui berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan antara LMAN, badan usaha, Satker penerima dan/atau pengguna tanah PSN, Badan Pengatur Jalan Tol, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan konfirmasinya, untuk menentukan nilai kewajiban talangan pengadaan tanah PSN yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terselesaikan (*outstanding*), baik skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 maupun skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020.

Berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan, LMAN melakukan jurnal manual penyesuaian di aplikasi SAKTI 2025 untuk penghentian penyajian kewajiban atas pendanaan pangadaan tanah PSN (akun 212191) di Neraca atas akuntabilitas skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 sebesar saldo nilai tercatat penyajiannya per 31 Desember 2025, sebagai upaya konsistensi satu kesatuan penyajian dan penatausahaan perolehan tanah PSN yang berasal dari kewajiban talangan pengadaan tanah PSN pada Satker vertikal penerima dan/atau pengguna tanah PSN, dengan jurnal manual penyesuaian debet 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya pada kredit 391119 Koreksi Lainnya.

18. Konsolidasi dan Eliminasi

Kebijakan konsolidasi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan BUN adalah sebagai berikut:

a. Mengkonsolidasi seluruh akun yang tercatat pada buku besar satker-satker lingkup BUN (BA 999);

b. Mengkonsolidasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN AP (BA 999.00), dengan kaidah sebagai berikut:

   1) Konsolidasi Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111611 dan 111613 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN AP (999.00) dengan akun kontra 399911. Saldo akun 111611 dan 111613 disajikan di neraca pos Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399911 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;

   2) Konsolidasi Kas pada BLU dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111911 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN AP (999.00) dengan akun kontra 399912. Saldo akun 111911 disajikan di neraca pos Kas pada BLU sedangkan akun 399912 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L; dan

   3) Konsolidasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai

akun 111822 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN AP (999.00) dengan akun kontra 399913. Saldo akun 111822 disajikan di neraca pos Kas Lainnya di K/L dari Hibah sedangkan akun 399913 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;

c. Mengeliminasi penyajian ganda antar Bagian Anggaran BUN, dengan kaidah sebagai berikut:

1) Transaksi pengeluaran pembiayaan pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dicatat oleh dua entitas yaitu UAPBUN Investasi Pemerintah (999.03) sebagai akun 164111 (Dana Penjaminan) dan UAPBUN AP (999.00) sebagai akun 163119 (Dana Lainnya). Pada buku besar konsolidasian BUN, nilai akun 163119 akan dieliminasi sebesar nilai akun 164111 dengan akun kontra 391111. Eliminasi akun 163119 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, sedangkan akun 391111 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Koreksi Lain-Lain;

2) Transaksi RPATA dicatat oleh UAPBUN AP (999.00) sebagai akun 163119 (Dana Lainnya) sedangkan UAKPBUN Transaksi Khusus (999.99) dan UAPBUN Belanja Lain-lain (999.08) juga mencatat transaksi tersebut sebagai akun 163139 (Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga). Oleh karena itu pada buku besar konsolidasian BUN dilakukan eliminasi atas akun 163139 dengan akun kontra 391111. Eliminasi akun 163139 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, sedangkan akun 391111 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Koreksi Lain-Lain; dan

3) Kebijakan konsolidasi atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN AP mengakibatkan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada UAPBUN AP termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Anggaran BUN. Oleh karena itu pada buku besar konsolidasian BUN dilakukan eliminasi kembali atas akun 111611 dan 111613 beserta akun kontranya yaitu 399911 senilai saldo yang berada di Bagian Anggaran BUN. Eliminasi akun 111611 dan 111613 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan akun 399911 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Ekuitas BUN di K/L.

19. Kebijakan Akuntansi Terkait Properti Investasi

a. Sehubungan dengan terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (PSAP 17), terdapat kemungkinan satuan kerja (Satker) di lingkungan pemerintah pusat untuk melakukan reklasifikasi keluar dari pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya atas penyajian aset berwujud yang bersifat properti.

b. Paragraf 63 sampai dengan paragraf 66 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan paragraf 4 sampai dengan paragraf 14 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, memberikan panduan bahwa aset tetap pemerintah yang disajikan di Neraca pos Aset Tetap diberikan tekanan hanya yang memenuhi kriteria:

1) aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

2) digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

3) dalam kondisi siap dipakai, dan

4) jika aset tetap tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, maka disajikan di

Neraca di pos Aset Lainnya, termasuk dalam hal ini aset Kerjasama dalam kemitraan.

c. PSAP 17 memberikan panduan prinsip akuntansi berlaku umum bagaimana suatu Satker memperlakukan kebijakan akuntansi atas aset berwujud yang bersifat properti yang mengandung unsur kejadian digunakannya aset tersebut untuk menghasilkan pendapatan sewa atau intensi untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

d. Atas hal tersebut, untuk kebutuhan penerapan PSAP 17 di lingkungan pemerintah pusat, diperlukan kebijakan teknis akuntansi yang bersifat *regulatory-based accounting* yang memberikan panduan pencatatan dan penyajian Barang Milik Negara (BMN) yang bersifat properti yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau intensi untuk meningkatkan nilai aset.

20. Kebijakan Akuntansi Pajak Ditanggung Pemerintah (Pajak DTP)

a. Transaksi atas Pajak DTP dan Bea Masuk (BM) DTP mengakibatkan adanya aliran ekonomi yang terjadi dalam lingkup entitas pemerintah pusat dengan mengakui adanya pendapatan dan belanja dengan nilai yang sama. Berbeda dengan perlakuan belanja perpajakan (tax expenditure), dimana pemerintah tidak mengumpulkan pajak dari pihak ketiga. Tax expenditure tidak dialokasikan dalam mekanisme penganggaran maupun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran terhadap APBN sehingga tax expenditure tersebut dilaporkan secara terpisah dari Laporan Keuangan oleh Satuan Kerja (Satker) yang mempertanggungjawabkan alokasi anggaran belanja subsidi untuk Pajak DTP dan BM DTP maupun pendapatan atas Pajak DTP dan BM DTP.

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

1) Pajak DTP dan BM DTP diakui oleh entitas akuntansi/pelaporan Kementerian Keuangan (BA 015) melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan, yaitu pada saat SPM Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan Pajak DTP atau BM DTP telah diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN.

2) Dengan demikian secara bersamaan dengan pengakuan pendapatan Pajak DTP dan BM DTP pada potongan SPM/SP2D, Belanja Subsidi Pajak DTP dan BM DTP diakui oleh entitas akuntansi/pelaporan BUN (BA 999) melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan yang diajukan oleh Satker BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07).

3) Belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP diukur sebesar nilai SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan, dan pendapatan Pajak DTP atau BM DTP diukur sebesar nilai potongan pada SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan.

4) Nilai belanja subsidi Pajak DTP atau BM DTP disajikan oleh entitas akuntansi/pelaporan BUN (BA 999) melalui Satker BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) sebagai belanja subsidi di LRA dan sebagai beban subsidi di LO pos kegiatan operasional.

5) Nilai pendapatan Pajak DTP atau BM DTP disajikan oleh entitas akuntansi/pelaporan Kementerian Keuangan (BA 015) sebagai pendapatan perpajakan di LRA dan sebagai pendapatan-LO perpajakan di LO pos kegiatan operasional.

6) Belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP dan pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP diungkapkan secara memadai dan paling sedikit menjelaskan informasi mengenai:

   a) Nilai realisasi anggaran masing-masing belanja subsidi Pajak DTP/BM DTP dan/atau pendapatan Pajak DTP/BM DTP; dan

   b) Jenis belanja subsidi Pajak DTP/BM DTP dan/atau pendapatan Pajak DTP/BM DTP.

c. Konsolidasi Transaksi atas Pajak DTP dan BM DTP di Tingkat LKPP

1) Konsolidasi Laporan Keuangan di LRA

   a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LRA seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN;

   b) Tidak ada eliminasi atas penyajian belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP terhadap penyajian pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP;

   c) Konsolidasi pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP disajikan di LRA secara bruto pada masing-masing pos pendapatan perpajakan dan pos belanja subsidi; dan

   d) Penyajian pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP di LRA sebagai ketaatan dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang diamanatkan dan ditetapkan dalam APBN/APBN-P, sehingga penyajian realisasinya diperbandingkan dengan pagu anggarannya dalam satu tahun anggaran.

2) Konsolidasi Laporan Keuangan di LAK

   a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LAK yang ada di entitas pelaporan BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;

   b) Tidak ada eliminasi atas penyajian arus kas masuk pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan penyajian arus kas keluar belanja subsidi untuk Pajak DTP dan/atau BM DTP;

   c) Konsolidasi pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP disajikan di LAK secara bruto masing-masing pos arus kas dari operasi; dan

   d) Penyajian arus kas dari operasi secara bruto di LAK terhadap pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP memberikan informasi historis transaksional masing-masing pos arus kas dari operasi pemerintah, dan dapat juga digunakan sebagai pengendalian dan konsisten perlakuan akuntansi atas transaksi berbasis kas yang berlaku terhadap penyajian LRA dan LAK.

3) Konsolidasi Laporan Keuangan di LO

   a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LO seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian; dan

   b) Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN.

Dalam melakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud angka 1), diperlukan eliminasi akun-akun timbal balik di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan – LO Pajak DTP dan/atau BM DTP

dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan dalam satu dokumen yang sama dalam SPM/SP2D belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pajak DTP dan/atau BM DTP tahun anggaran berjalan.

21. Kebijakan Akuntansi UPSL THT

a. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 52/PMK.02/2023 yang merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 25/PMK.02/2013, yang mengatur bahwa *Unfunded Past Service Liability* atas Program THT (UPSL THT) PT Taspen (Persero) yang diakui dalam Peraturan Menteri ini adalah *Unfunded* PSL yang terjadi akibat kondisi a. perubahan formula manfaat Program THT PNS; b. kenaikan besaran gaji pokok PNS yang menjadi dasar pembayaran manfaat Program THT PNS; dan/atau c. perubahan metode dan/atau asumsi aktuaria yang disetujui oleh Menteri Keuangan.

b. Kebijakan Akuntansi pencatatan UPSL THT tahun 2025 adalah disajikan sebagai Beban Tunjangan Hari Tua (*Unfunded Liability*) (513161) pada Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (Kewajiban Jangka Panjang). Pencatatan dalam Kewajiban Jangka Panjang dilakukan karena rencana penyelesaian kewajiban yang melebihi 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Pengakuan dan penyajian UPSL THT sebagai Kewajiban Jangka Panjang, sejalan dengan pengaturan dalam Paragraf 11 PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa ”Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan”. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

22. *Treasury Deposit Facility*

a. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.

b. Atas saldo dana TDF, pemerintah daerah akan menerima remunerasi yang tarifnya sama dengan persentase yang diterima pemerintah dari BI. Remunerasi dibayarkan dari RKUN ke RKUD setiap 3 bulan sekali, berdasarkan rekonsiliasi antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb dengan Direktorat Transfer Umum DJPK.

c. *Holding period* TDF ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya DAU dan/atau DBH di fasilitas TDF pada Bank Indonesia. Setelah masa *holding period*, dana tetap di fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD.

d. Penarikan dana di rekening TDF dapat dilakukan dalam masa *holding period* dan setelah masa *holding period* berdasarkan permintaan kepala daerah. Penarikan dana pada masa *holding period* dilaksanakan dengan kondisi kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana, kebutuhan kas Daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya dan/atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri.

e. Sedangkan untuk penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah setelah masa *holding period* dilaksanakan apabila Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan perbaikan pelayanan public, infrastruktur dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah, Investasi, penggunaan lain

yang ditetapkan oleh Menteri, terdapat kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana, dan/atau terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri.

23. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

a. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

b. RPATA dibuka dengan nama Rekening Lain BI RPATA yang merupakan satu rekening yang digunakan untuk menampung dana atas transaksi dari seluruh Satker untuk membayar pekerjaan.

c. Dana yang tersimpan di RPATA selanjutnya akan dibayarkan apabila:
   1) pekerjaan selesai 100 persen;
   2) masa kontrak berakhir; atau
   3) batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.

d. Dalam hal setelah dilakukan pembayaran masih terdapat saldo dalam RPATA atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan, dananya akan dipindahbukukan ke RKUN.

24. Penyajian Dana *Equipment & Services*

Kebijakan Akuntansi dan pelaporan atas Dana E & S yang berlaku mulai tahun Pelaporan Keuangan 2025 antara lain sebagai berikut:

1) Untuk memenuhi prinsip pelaporan secara berjenjang maka pencatatan dan pelaporan Dana E & S dilaksanakan oleh satker yang secara langsung mengelola Dana E & S yaitu:

No.	Kode	Nama	Bagian Anggaran	Keterangan
1	999975	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	BUN-Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08)	Dilakukan Penggabungan Pada Laporan Keuangan BUN
2	447009	Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)	Kementerian ESDM-Ditjen Migas (020.04)	Dilakukan penggabungan pada Laporan Keuangan KESDM

2) Pencatatan dan pelaporan Dana E & S dilakukan secara periodik, dengan menyajikan saldonya pada tanggal pelaporan, dan tidak menyajikan secara transaksional, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

   a) Dana E & S yang saat ini berada di Rekening Pemerintah Lainnya belum dapat diakui sebagai PNBP. Dana tersebut belum sepenuhnya menjadi hak negara karena belum ada pengaturan hukum yang spesifik, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menetapkan Dana E & S sebagai PNBP dan mekanisme penggunaannya. Dana E & S dapat diakui sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya-Dana Lainnya (akun 163119) dengan kontra akun Kewajiban Jangka Panjang-Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya (akun 221919);

   b) Saldo Dana E & S disajikan di Neraca SKK Migas dan BPMA dalam mata uang rupiah. Jika terdapat Dana E & S dalam mata uang selain rupiah maka dijabarkan dalam mata uang rupiah

dengan menggunakan kurs Jisdor/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan sesuai peruntukannya; dan

c) Terhadap saldo Dana E & S perlu diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang memuat antara lain dasar hukum Dana E & S, daftar bank penyimpan dan rekeningnya, rekapitulasi mutasi tambah dan kurang, jumlah saldo dana, nilai pokok dana dan penambahannya yang berasal dari bunga/jasa giro/pengembangan, dan pengungkapan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka penyajian secara wajar.

25. Kebijakan Akuntansi Penempatan dan Penggunaan SAL

Pemerintah melalui Bendahara Umum Negara melaksanakan kebijakan pengelolaan kas secara aktif, antara lain melalui penempatan uang negara yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih pada bank umum mitra, sebagai upaya optimalisasi kas pemerintah, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas perbankan. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 30: Penempatan dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam rangka Pengelolaan Kas Negara, transaksi penempatan uang yang diatur dalam Petunjuk Teknis Akuntansi tersebut adalah:

a. Transaksi penempatan uang dicatat sebagai Penempatan Uang di Bank Umum (kelompok Setara Kas) apabila jatuh temponya 3 (tiga) bulan atau kurang, atau Investasi Jangka Pendek apabila jatuh temponya lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) dari tanggal perolehannya, yang disajikan pada Neraca;

b. Transaksi perolehan Penempatan Uang di Bank Umum (kelompok Setara Kas) dicatat pada Aktivitas Transitoris, sedangkan transaksi perolehan Investasi Jangka Pendek disajikan pada Aktivitas Investasi, yang disajikan pada Laporan Arus Kas; dan

c. Saldo penempatan uang baik dalam bentuk Penempatan Uang di Bank Umum (kelompok Setara Kas) maupun Investasi Jangka Pendek masih menjadi bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, SAL akhir periode pelaporan tahun anggaran berjalan merupakan saldo yang disimpan yang salah satunya oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Saldo yang disimpan oleh BUN tersebut terdiri atas:

a. saldo yang disimpan dalam rekening milik BUN; dan/atau
b. saldo dalam bentuk Instrumen Keuangan Jangka Pendek.

26. Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada BUMN

Sesuai dengan Revisi Kesatu Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 32: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada BUMN Pasca Perubahan UU tentang BUMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah Tahun 2025, kebijakan akuntansi dan pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada BUMN dapat dirinci sebagai berikut:

a. BP BUMN merupakan KPA BUN PMN sehingga dapat bertindak selaku UAKPA BUN PMN dalam hal investasi pemerintah pada BPI Danantara dan BUMN;

b. BP BUMN selaku UAKPA BUN PMN melaporkan penyertaan modal pemerintah berupa:

   1) 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada Holding Operasional;
   2) 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna pada BUMN anggota Holding Operasional;

3) kepemilikan pada BUMN non-anggota Holding Operasional;
4) 100% (seratus persen) kepemilikan pada Perum; dan
5) ekuitas pada Laporan Keuangan BPI Danantara.

c. dengan menggunakan metode penilaian sesuai ketentuan Paragraf 40 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi;

d. LK BPI Danantara Tahun 2025 disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh BPI Danantara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 21 Tahun 2025 tentang Keuangan. Sesuai Peraturan Kepala Badan dimaksud diatur bahwa Penyusunan LK BPI Danantara mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), kecuali pencatatan investasi pada entitas asosiasi yang menggunakan metode ekuitas pada masa transisi (sampai dengan Badan dapat mengaplikasikan PSAK) mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

e. LK BPI Danantara Tahun 2025 disusun dengan memasukkan dampak penyesuaian dari LK BUMN (anggota holding) *Audited* dengan dilengkapi dengan:

1) Tanda tangan Kepala BPI Danantara;

2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala BPI Danantara; dan

3) Surat Pernyataan Telah Direviu oleh Satuan Pengawasan Intern BPI Danantara.

f. LK BPI Danantara disampaikan kepada KPA BUN BP BUMN untuk digabungkan dengan kepemilikan negara pada BUMN melalui BP BUMN menjadi LK KPA BUN BP BUMN;

g. KPA BUN BP BUMN menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) sesuai PMK Nomor 23/PMK.01/2007 berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh seluruh BUMN dan BPI Danantara;

h. Pengalihan kepemilikan 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada Holding Operasional kepada BPI Danantara yang akan dilakukan pada awal Januari tahun 2026 diungkapkan dalam LKBUN dan LKPP tahun 2025 sebagai Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan; dan

i. Selanjutnya, LK KPA BUN BP BUMN dilampiri ILKPN disampaikan kepada UAPBUN IP DJKN untuk digabungkan dengan LK KPA BUN Investasi Pemerintah yang lainnya menjadi LK BUN 999.03 Investasi Pemerintah.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2025 adalah sebesar **Rp186.456.746.764.097,00** atau mencapai **78,91 persen** dari target APBN 2025 sebesar **Rp236.275.500.847.000,00**. Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp181.024.739.835.672,00** dan Pendapatan Hibah sebesar **Rp5.432.006.928.425,00**. Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp88.441.536.414.469,00** atau **32,17 persen** dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar **Rp274.898.283.178.566,00.** Rincian Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2025 dapat dilihat di Lampiran LB1.

Realisasi Belanja BUN pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp1.951.614.526.199.653,00** atau mencapai **92,81 persen** dari target APBN sebesar **Rp2.102.890.178.719.000,00**. Realisasi Belanja BUN Tahun 2025 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.102.573.832.352.483,00** dan Transfer ke Daerah sebesar **Rp849.040.693.847.170,00.**

Realisasi Pembiayaan BUN pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp742.731.460.043.864,00** atau mencapai **120,54 persen** dari target APBN sebesar **Rp616.186.060.243.000,00**. Realisasi pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar **Rp656.824.953.980.649,00** dan pembiayaan luar negeri sebesar **Rp85.906.506.063.215,00.** Seluruh pembiayaan negara berasal dari pembiayaan BUN.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan BUN dan Hibah

Realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2025 sebesar Rp186.456.746.764.097,00 berasal dari PNBP sebesar Rp181.024.739.835.672,00 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp5.432.006.928.425,00.

B.2.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 sebesar Rp181.024.739.835.672,00 atau 78,48 persen dari target sebesar Rp230.677.583.443.000,00. Realisasi PNBP Tahun 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp59.486.179.627.138,00 atau 24,73 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp240.510.919.462.810,00. Realisasi PNBP berasal dari (i) Pendapatan Sumber Daya Alam; (ii) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; dan (iii) PNBP Lainnya.

B.2.1.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam Tahun 2025 adalah sebesar Rp104.735.406.249.496,00 atau 85,14 persen dari target APBN Tahun 2025 sebesar Rp123.017.538.808.000,00. Realisasi pendapatan SDA tersebut lebih kecil Rp8.595.429.496.246,00 atau mengalami penurunan sebesar 7,58 persen dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp113.330.835.745.742,00. Penurunan realisasi PNBP SDA disebabkan oleh realisasi ICP yang berada di bawah asumsi APBN serta meningkatnya biaya operasi pada kegiatan pengusahaan panas bumi.

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan PNBP yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, berasal dari pengolahan minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. Sesuai dengan ketentuan perundangan, ketiga jenis pendapatan tersebut dibagihasilkan ke daerah

dalam rangka desentralisasi fiskal. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan SDA Tahun 2025 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Minyak Bumi	89.031.590.000.000	55.757.863.739.730	62,63
2	Pendapatan Gas Bumi	31.961.420.000.000	46.692.746.308.894	146,09
3	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.024.528.808.000	2.284.796.200.872	112,86
Jumlah		**123.017.538.808.000**	**104.735.406.249.496**	**85,14**

Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	(Kenaikan/ Penurunan)	Kenaikan/ (Penurunan) %
1	Pendapatan Minyak Bumi	55.757.863.739.730	77.961.123.337.930	(22.203.259.598.200)	(28,48)
2	Pendapatan Gas Bumi	46.692.746.308.894	32.661.085.038.989	14.031.661.269.905	42,96
3	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.284.796.200.872	2.708.627.368.823	(423.831.167.951)	(15,65)
Jumlah		**104.735.406.249.496**	**113.330.835.745.742**	**(8.595.429.496.246)**	**(7,58)**

Pendapatan Minyak Bumi

Pendapatan minyak bumi TA 2025 terealisasi sebesar Rp55.757.863.739.730,00 atau 62,63 persen dari estimasi APBN TA 2025 sebesar Rp89.031.590.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pendapatan minyak bumi lebih rendah Rp22.203.259.598.200,00 atau 28,48 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh terkontraksinya realisasi ICP pada tahun 2025 serta perubahan *split* bagi hasil di dalam Kontrak Kerja Sama antara pemerintah dan KKKS.

Realisasi Pendapatan SDA Minyak Bumi sebesar Rp55.757.863.739.730,00 telah memperhitungkan reklasifikasi akun yang berasal dari perhitungan alokasi PNBP Migas yang menyebabkan perubahan alokasi Pendapatan Minyak Bumi menjadi Pendapatan Gas Bumi dan Pendapatan Minyak Mentah DMO.

Pendapatan Gas Bumi

Pendapatan Gas Bumi pada tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 46.692.746.308.894,00 atau mencapai 146,09 persen dari estimasi pendapatan pada APBN TA 2025 sebesar Rp31.961.420.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasinya naik sebesar Rp14.031.661.269.905,00 atau 42,96 persen.

Pendapatan Gas Bumi Tahun 2025 sebesar Rp46.692.746.308.894,00 telah memperhitungkan reklasifikasi akun yang berasal dari hasil perhitungan alokasi PNBP SDA Migas yang menyebabkan perubahan alokasi dari pendapatan minyak bumi menjadi pendapatan gas bumi dan nilai pendapatan gas yang berasal dari pemindahbukuan dari rekening migas ke RKUN.

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi

Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan LRA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.284.796.200.872,00 atau mencapai 112,86 persen dari target Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi tahun 2025 sebesar Rp2.024.528.808.000,00. Keseluruhan

Pendapatan Panas Bumi Satker PNBP Khusus BUN Pengelola Panas Bumi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian realisasi PNBP panas bumi dapat dilihat sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	%
a	Setoran Bagian Pemerintah	3.428.621.827.061	3.610.596.954.925	(5,04)
b	*Reimbursement* PPN	569.500.000.000	349.698.846.372	62,85
c	PBB Pertambangan Panas Bumi	480.388.534.974	447.695.185.254	7,30
d	Penggantian bonus produksi panas bumi	98.952.014.687	105.992.162.460	(6,64)
e	Pendapatan pengusahaan Panas Bumi (a-b-c-d)	2.279.781.277.400	2.707.210.760.839	(15,79)
f	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi pembulatan ke bawah	2.279.781.277.400	2.707.210.760.839	(15,79)
g	PNBP Panas Bumi yang berasal dari saldo cadangan reimbursement PPN	-	-	-
h	Pendapatan pengusahaan Panas Bumi yang berasal dari kekurangan penyetoran bagian pemerintah	5.014.923.472	1.416.607.984	254,01
Total Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (f+g+h)		**2.284.796.200.872**	**2.708.627.368.823**	**(15,65)**

Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 15,65 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh menurunnya Setoran Bagian Pemerintah (SBP), utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasi, yang disebabkan antara lain oleh peningkatan beban imbalan pascakerja serta meningkatnya biaya bunga akibat penghentian kapitalisasi bunga pinjaman pada proyek yang dihentikan untuk sementara waktu.

Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi selama 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 berasal dari Setoran Bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan (*reimbursement* PPN, Pajak Bumi dan Bangunan, serta penggantian bonus produksi panas bumi) sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	Badan Usaha	Wilayah Kerja Panas Bumi	Jumlah
1	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Kamojang, Jawa Barat	322.137.592.050
2	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Lahendong, Sulawesi Utara	62.469.984.466
3	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Ulubelu, Lampung	24.140.450.383
4	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Lumut Balai, Sumatera Selatan	-
5	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	Gunung Salak, Jawa Barat	696.494.195.264
6	Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd		
7	Star Energy Geothermal Darajat I, Ltd	Darajat, Jawa Barat	512.369.457.321
8	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd		
9	PT Darajat Geothermal Indonesia		
10	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	Wayang Windu, Jawa Barat	701.379.116.054
11	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dieng, Jawa Tengah	1.020.279.897
12	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Patuha, Jawa Barat	31.037.485.558
13	*Faktor Pengurang: Pembayaran PBB *)*		66.252.360.121
	a. Sarulla Operations Ltd	*Gunung Sibual-buali, Sumetera Utara*	65.180.390.520
	b. Bali Energy, Ltd	*Bedugul, Bali*	681.450.727
	c. PT PLN Tulehu	*Maluku Tengah, Maluku*	390.518.874
PNBP Pengusahaan Panas Bumi (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12-13)			**2.284.796.200.872**

Keterangan:
*) Pembayaran PBB sebesar Rp66.252.360.121,00 adalah pembayaran PBB untuk Wilayah Kerja yang belum menyetorkan bagian Pemerintah

B.2.1.1.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2025 adalah sebesar Rp27.683.274.120.780,00 atau sebesar 34,50 persen dari target penerimaan selama Tahun 2025 sebesar Rp90.000.000.000.000,00. Realisasi sebesar Rp27.683.274.120.780,00 terdiri dari Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp12.683.274.120.780,00 dan setoran sisa surplus BI sebesar Rp15.000.000.000.000,00.

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp58.701.319.417.783,00 atau 67,95 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2024 yang mencapai Rp86.384.593.538.563,00. Hal ini disebabkan dividen BUMN disetor ke PT BKI sebagai holding operasional, bukan ke kas negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan PP Nomor 16 Tahun 2025, negara menyertakan modal pada BPI Danantara melalui pengalihan 99 persen saham Seri B milik negara di PT BKI selaku holding operasi. Negara tetap memiliki 1 persen saham Seri A Dwiwarna, sementara BPI Danantara menjadi pemegang mayoritas saham PT BKI.

PP Nomor 15 Tahun 2025 menyebutkan bahwa BPI Danantara telah mengelola 52 BUMN berbentuk Persero. Pengalihan saham tersebut menjadikan penerimaan dividen BUMN TA 2025 mengalami penurunan karena dividen kini disetor ke PT BKI sebagai *holding* operasional, bukan ke kas negara. Hal ini sesuai UU No. 1 Tahun 2025 dikelola oleh BPI Danantara, sebagaimana pengaturan dalam Pasal 3F yang mengatur bahwa BPI Danantara berwenang mengelola dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan Dividen BUMN. Sehingga mulai tahun 2025 dividen BUMN, kecuali dividen BUMN/Lembaga dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, menjadi dikelola oleh BPI Danantara.

Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	%
Pend. Laba BUMN Perbankan	10.882.481.879.391	49.590.787.691.195	(78,06)
Pend. Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	852.124.600.199	35.982.197.522.268	(97,63)
Pend. Laba BUMN dibawah Kementerian Keuangan	948.667.641.190	811.608.325.100	16,89
Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	15.000.000.000.000	-	100,00
Jumlah	**27.683.274.120.780**	**86.384.593.538.563**	**(67,95)**

Rincian Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran LB2.

B.2.1.1.3. Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp48.606.059.465.396,00 atau 275,23 persen dari target APBN Tahun 2025 sebesar Rp17.660.044.635.000,00. Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.810.569.286.891,00 atau 19,15 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp40.795.490.178.505,00. Kenaikan Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya didominasi oleh kenaikan Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening sebesar Rp9.594.588.179.415,00 atau 33,09 persen. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Pengelolaan BMN	5.918.842.418.906	5.688.906.897.694	229.935.521.212	4,04
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	-	161.185.250	(161.185.250)	(100,00)
Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening	38.589.330.092.399	28.994.741.912.984	9.594.588.179.415	33,09
Pendapatan Iuran dan Denda	51.742.215.329	33.449.201.660	18.293.013.669	54,69
Pendapatan Lain-lain	4.046.144.738.762	6.078.230.980.917	(2.032.086.242.155)	(33,43)
Jumlah	**48.606.059.465.396**	**40.795.490.178.505**	**7.810.569.286.891**	**19,15**

Rincian Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dapat dilihat pada Lampiran LB3.

Rincian PNBP Lainnya pada masing-masing BA BUN disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA BUN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
999.01 (Pengelola Utang)	10.531.887.001.706	3.926.058.890.083	6.605.828.111.623	168,26
999.02 (Pengelola Hibah)	-	404.410.273	(404.410.273)	(100,00)
999.03 (Pengelola Investasi Pemerintah)	1.511.624.200.503	1.415.020.328.033	96.603.872.470	6,83
999.04 (Pengelola Pemberian Pinjaman)	1.559.362.354.452	1.746.743.610.602	(187.381.256.150)	(10,73)
999.05 (Pengelola Belanja Transfer Daerah)	1.490.900.495.180	5.487.822.046.826	(3.996.921.551.646)	(72,83)
999.07 (Pengelola Belanja Subsidi)	2.040.368.806.530	39.998.801.883	2.000.370.004.647	5.001,07
999.08 (Pengelola Belanja Lain-Lain)	43.661.265.422	97.218.440.543	(53.557.175.121)	(55,09)
999.99 (Pengelola Transaksi Khusus)	31.428.255.341.603	28.082.223.650.262	3.346.031.691.341	11,92
Jumlah	**48.606.059.465.396**	**40.795.490.178.505**	**7.810.569.286.891**	**19,15**

Realisasi PNBP Lainnya pada BA BUN 999.01 (Pengelola Utang) Tahun 2025 sebesar Rp10.531.887.001.706,00. Pendapatan tersebut utamanya bersumber dari pendapatan premium atas penerbitan instrumen SBN (SUN dan SBSN).

Realisasi PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Utang Tahun 2025 lebih besar sebesar Rp6.605.828.111.623,00 atau 168,26 persen daripada Tahun 2024 sebesar Rp3.926.058.890.083,00. Hal ini dikarenakan peningkatan nilai pendapatan premium dalam rangka penerbitan SBN.
Pendapatan PNBP Lainnya dari pengelolaan transaksi SBN berasal dari transaksi:

1. *Gain* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang sebesar Rp5.298.500.000,00.
2. Penjualan Obligasi Negara dan SBSN dalam rupiah berupa pendapatan premium atas transaksi penerbitan SUN dan SBSN sebesar Rp10.526.584.739.900,00.
3. Pendapatan dari Transaksi lainnya sebesar Rp3.761.806,00.

Realisasi PNBP Lainnya pada BA BUN 999.02 (Pengelola Hibah) tahun 2025 sebesar Rp0,00, sementara pada tahun 2024 terdapat realisasi PNBP sebesar Rp404.410.273,00.

Penerimaan bukan pajak lainnya sebesar Rp1.511.624.200.503,00 pada BA BUN 999.03 (Pengelola Investasi Pemerintah) merupakan pendapatan yang berasal dari:

1. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah sebesar Rp140.621.187.060,00 atau turun 2,86 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp144.765.627.268,00. Penurunan ini

terjadi karena di bulan Januari tahun 2024 masih terdapat penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari transaksi Penjaminan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) *Loss Limit Gen*-1 bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan berikutnya. Penjaminan ini merupakan salah satu program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana program tersebut telah berakhir pada tahun 2023. Sementara di tahun 2025, realisasi PNBP sampai dengan 31 Desember 2025 hanya berasal dari penerimaan PNBP IJP infrastruktur untuk proyek KPBU dan tidak lagi terdapat PNBP IJP penjaminan PEN *Loss Limit* Gen-1. Sedangkan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur dipungut berdasarkan perjanjian penjaminan proyek KPBU antara Pemerintah dengan Badan Usaha pelaksana proyek KPBU.

2. Setoran bunga IP PEN sebesar Rp214.380.797.729,00. Rincian penyetoran bunga yang berasal dari Perusahaan Negara penerima Investasi Jangka Panjang Pemerintah Non Permanen dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan setoran denda keterlambatan penyetoran bunga tahun 2025 adalah sebagai berikut:

    a. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp39.671.232.871,00 untuk kewajiban bunga periode 31 Oktober 2024 s.d. 29 April 2025, serta sebesar Rp39.934.246.571,00 untuk kewajiban bunga periode 30 April 2025 s.d. 30 Oktober 2025. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada PT PN III No. 75 tanggal 28 Desember 2020. Dalam hal ini, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah melakukan pembayaran secara tepat waktu; dan

    b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp71.488.715.278,00 untuk kewajiban bunga periode 30 Oktober 2024 s.d. 30 April 2025, serta sebesar Rp63.286.603.009,00 untuk kewajiban bunga periode 30 April 2025 s.d. 30 Oktober 2025. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 173 tanggal 28 Desember 2020. Dalam hal ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan pembayaran secara tepat waktu.

3. Pemindahan saldo dana dari RIBUN ke RKUN dalam rangka realisasi PNBP Pemerintah sebesar Rp777.202.873.734,00 yang berasal terdiri dari imbal hasil Investasi Pemerintah pada BP Tapera.

4. Hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp379.419.341.980,00; yang berupa pendapatan bunga Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp379.107.344.410,00 dan pendapatan bunga deposito atas pengelolaan dana PEN PT SMI sebesar Rp311.997.570,00.

Realisasi PNBP Lainnya pada BA BUN 999.04 (Pengelola Pemberian Pinjaman) tahun 2025 sebesar Rp1.559.362.354.452,00 diperoleh dari pengelolaan pemberian pinjaman yaitu Pendapatan Bunga sebesar Rp1.555.618.379.268,00; Pendapatan Denda sebesar Rp3.429.075.246,00; dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp314.899.938,00.

Realisasi PNBP Lainnya pada BA BUN 999.05 (Pengelola Transfer ke Daerah) tahun 2025 sebesar Rp1.490.900.495.180,00 terdiri dari Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.437.893.031.410,00 yang meliputi pengembalian TKD DAK Non Fisik sebesar Rp1.392.580.577.941,00; pengembalian TKD Dana Desa sebesar Rp2.997.356.426,00; pengembalian Hibah ke Daerah sebesar Rp18.449.340.409,00 dan pengembalian TKD Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp23.865.756.634,00; Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp44.179.029.500,00; serta Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp8.828.434.270,00. Realisasi

Pendapatan Denda Lainnya merupakan pendapatan atas sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Realisasi Pendapatan dari Hibah yang Belum disahkan merupakan pemotongan Dana Alokasi Umum dalam rangka penyelesaian pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/PK/2025.

Realisasi PNBP Lainnya pada BA BUN 999.07 (Pengelola Belanja Subsidi) tahun 2025 sebesar Rp2.040.368.806.530,00 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp2.040.361.818.443,00; Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp6.978.507,00; dan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp9.580,00.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN 999.08 (Pengelola Belanja Lain-Lain) Tahun 2025 sebesar Rp43.661.265.422,00. Realisasi tersebut Rp53.557.175.121,00 lebih rendah dari realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp97.218.440.543,00. Pendapatan negara tersebut terdiri atas Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp18.663.831.748,00; Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp36.700.925,00; dan Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp7.101.770.241,00; Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.658.313.090,00; Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga sebesar Rp25.745.833,00; dan Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp174.903.585,00.

Realisasi PNBP Lainnya pada BA BUN 999.99 (Pengelola Transaksi Khusus) tahun 2025 adalah sebesar Rp31.428.255.341.603,00 terdiri dari Pendapatan Dari Penjualan BMN, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-lain.Berikut rincian PNBP Lainnya pada BA BUN 999.99:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025
1	PNBP Lainnya Pengelolaan Kas Negara	24.967.597.357.126
2	PNBP Lainnya Pengelolaan Dana Pensiun, Akes dll	416.208.293.630
3	PNBP Lainnya Satker TK Suspen Penerimaan	4.074.969.891
4	PNBP Lainnya Pengelola KPPN KPH	20.660.541.607
5	PNBP Lainnya dari Pengelolaan Aset BLBI	3.335.622.663
6	PNBP Lainnya dari Pengelolaan aset Eks Pertamina	234.176.340.292
7	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS	110.924.581.910
8	PNBP Lainnya Pengelolaan BPLS	-
9	PNBP Lainnya dari Setoran Lainnya Surplus Otoritas Jasa Keuangan	88.427.382.723
10	PNBP Lainnya Satker Migas	5.117.470.163.133
11	PNBP Lainnya Pengelola Panas Bumi	300.895.408
12	PNBP Lainnya Pengelola BMN PKP2B	359.335.633.043
13	PNBP Lainnya Pengelolaan Aset Lain-Lain	76.393.642.542
14	PNBP Lainnya Lainnya Aset Bekas Milik Asing Tionghoa	19.987.918.257
15	PNBP Lainnya Pengelola BMN Idle	-
16	PNBP Lainnya Supersemar	9.000.000.000
17	PNBP Lainnya dari Satker DJSPSK	361.999.378
Jumlah		**31.428.255.341.603**

B.2.1.2. Pendapatan Hibah

Realisasi Anggaran atas Pendapatan Hibah selama Tahun 2025 sebesar Rp5.432.006.928.425,00 atau 97,04 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.597.917.404.000,00. Realisasi pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp28.955.356.787.331,00 atau 84,20 persen dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp34.387.363.715.756,00.

Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
Hibah Dalam Negeri	3.599.752.378.109	32.247.196.309.907	(88,84)
Hibah yang Direncanakan	-	-	-
Hibah Langsung	3.599.752.378.109	32.247.196.309.907	(88,84)
Hibah Luar Negeri	1.832.254.550.316	2.140.167.405.849	(14,39)
Hibah yang Direncanakan	439.802.086.270	540.471.344.113	(18,63)
Hibah Langsung	1.392.452.464.046	1.599.696.061.736	(12,96)
Jumlah	**5.432.006.928.425**	**34.387.363.715.756**	**(84,20)**

Pendapatan Hibah bersumber dari Pendapatan Hibah dalam negeri sebesar Rp3.599.752.378.109,00 merupakan Pendapatan Hibah dalam negeri tidak melalui kuasa BUN dalam bentuk uang dan Pendapatan Hibah luar negeri sebesar Rp1.832.254.550.316,00 terdiri atas Pendapatan Hibah Luar Negeri yang direncanakan (melalui Kuasa BUN) sebesar Rp439.802.086.270,00 dan Pendapatan Hibah Luar Negeri langsung (tidak melalui Kuasa BUN) sebesar Rp1.392.452.464.046,00. Turunnya realisasi pendapatan hibah tersebut terutama disebabkan telah selesainya sebagian besar tahapan Pilkada secara serentak tahun 2024 sehingga penerimaan pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pilkada juga berkurang secara signifikan. Pada Tahun 2025 *Audited* masih terdapat penerimaan pendapatan hibah dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak yang merupakan kegiatan lanjutan tahun 2024. Pada tahun 2025 masih terdapat tahapan pelaksanaan Pilkada, antara lain pelantikan calon kepala daerah terpilih, penyelesaian sengketa, dan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah. Realisasi pendapatan hibah sebesar Rp5.432.006.928.425,00 terdiri dari pendapatan hibah terkait penyelenggaraan Pilkada serentak sebesar Rp338.800.014.093,00 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dan Non-Pilkada Serentak sebesar Rp5.093.206.914.332,00. Adapun rincian realisasi pendapatan hibah terkait penyelenggaraan Pilkada serentak dapat dilihat pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi	Persentase
1.	Pilkada Serentak	338.800.014.093	6,24
	a. Komisi Pemilihan Umum	241.155.780.033	4,44
	b. Badan Pengawas Pemilu	97.644.234.060	1,80
2.	Non-Pilkada Serentak	5.093.206.914.332	93,76
Jumlah		**5.432.006.928.425**	**100,00**

B.2.2. Belanja BUN

Realisasi Belanja BUN Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.951.614.526.199.653,00 atau 92,81 persen dari anggaran sebesar Rp2.102.890.178.719.000,00. Realisasi Belanja BUN mengalami penurunan sebesar Rp84.147.952.540.390,00 atau 4,13 persen dari realisasi Belanja BUN tahun 2024 yang sebesar Rp2.035.762.478.740.043,00. Realisasi Belanja BUN terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.102.573.832.352.483,00 dan (ii) Transfer ke Daerah sebesar Rp849.040.693.847.170,00.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.102.573.832.352.483,00 atau 89,94 persen dari anggaran sebesar Rp1.225.946.385.792.000,00. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp69.645.839.905.196,00 atau 5,94 persen dari realisasi Belanja

Pemerintah Pusat tahun 2024 yang sebesar Rp1.172.219.672.257.679,00. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja antara lain terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-lain.

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun 2025 adalah sebesar Rp179.872.555.614.266,00 atau sebesar 96,30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp186.791.121.513.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.765.953.222.313,00 atau 3,91 persen dari realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp173.106.602.391.953,00. Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari.

(dalam rupiah)

Akun	Deskripsi	Tahun 2025	Tahun 2024
5131XX	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu, Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI, Tunjangan dan Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan PKRI dan KNIP	166.503.789.577.419	160.520.141.397.297
5132XX	Belanja Askes, JKK, JKP	13.368.766.036.847	12.586.460.994.656
Jumlah		**179.872.555.614.266**	**173.106.602.391.953**

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.521.790.488.999,00 atau 89,74 persen dari anggaran sebesar Rp1.695.861.420.000,00. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp55.643.511.682,00 atau 3,53 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar Rp1.577.434.000.681,00. Rincian Belanja Barang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	Naik (Turun) %
Satker TK DJPb (987361)	1.063.144.915.200	1.086.777.823.908	(2,17)
Satker TK DJSPSK (984438)	211.903.520.624	238.734.433.000	(11,24)
Satker TK DJPPR (978010)	-	6.879.661.760	(100,00)
Satker TK DJKN (984515)	2.749.632.804	6.985.849.410	(60,64)
Satker TK DJPPR (999903)	-	1.414.519.000	(100,00)
Satker TK DJPPR (999982)	243.992.420.371	236.641.713.603	3,11
Jumlah	**1.521.790.488.999**	**1.577.434.000.681**	**(3,53)**

1. Belanja Barang satker TK DJPb (987361) sebesar Rp1.063.144.915.200,00 atau 88,07 persen dari anggaran sebesar Rp1.207.206.960.000,00 yang berasal dari satker pensiun (987361);
2. Belanja Barang pada satker TK DJSPSK (984438) sebesar Rp211.903.520.624,00 merupakan pembayaran kontribusi dan *trust fund* organisasi internasional;
3. Belanja Barang pada Satker TK DJKN (984515) sebesar Rp2.749.632.804,00 merupakan belanja penggantian biaya dan margin IP PEN kepada Pelaksana Investasi untuk periode tagihan bulan April dan Oktober 2025; dan
4. Belanja Barang pada Satker TK DJPPR (999982) sebesar Rp243.992.420.371,00 berupa Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek yang dilaksanakan oleh BUMN pelaksana penugasan.

B.2.2.1.3. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2025 adalah sebesar Rp514.394.982.025.629,00 atau 93,04 persen dari anggaran sebesar Rp552.854.291.469.000,00. Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.968.559.881.812,00 atau 5,32 persen

dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp488.426.422.143.817,00. Kenaikan tersebut seiring adanya pertambahan utang pada Tahun 2025. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp43.095.667.969.744,00 dan pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp471.299.314.055.885,00 yang terdiri dari pembayaran bunga utang Surat Berharga Negara sebesar Rp467.878.316.901.086,00 dan Pembayaran Bunga Utang Pinjaman Dalam Negeri senilai Rp3.420.997.154.799,00.

Adapun komposisi belanja pembayaran bunga tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	43.095.667.969.744	42.487.792.193.659	1,43
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	471.299.314.055.885	445.938.629.950.158	5,69
- Pembayaran Bunga SBN	467.878.316.901.086	443.568.558.825.337	5,48
- Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	3.420.997.154.799	2.370.071.124.821	44,34
Jumlah	**514.394.982.025.629**	**488.426.422.143.817**	**5,32**

Realisasi Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Tahun 2025 mengalami kenaikan 1,43 persen atau sebesar Rp607.875.776.085,00 dibandingkan Tahun 2024. Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan utang program dan proyek di Tahun 2025.

Rincian belanja pembayaran bunga utang luar negeri Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(dalam rupiah)

Kegiatan/Subkegiatan /Jenis Belanja/Rincian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Belanja Bunga Pinjaman Program	19.846.504.773.903	21.520.400.453.814	(7,78)
Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	159.511.026.800	188.436.044.066	(15,35)
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	18.314.060.150.522	15.871.395.895.386	15,39
Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	4.775.270.798.219	4.907.257.692.930	(2,69)
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	321.220.300	302.107.463	6,33
Belanja Terkait Pendapatan Hibah	-	-	0,00
Jumlah Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	**43.095.667.969.744**	**42.487.792.193.659**	**1,43**

Realisasi pembayaran bunga SBN Tahun 2025 sebesar Rp467.878.316.901.086,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp443.568.558.825.337,00. Realisasi Pembayaran Bunga SBN Tahun 2025 terdapat di dalamnya kontribusi BI atas *Public Goods* (PG) sebesar Rp23.770.592.635.000,00, kontribusi BI atas *Non-Public Goods* (NPG) sebesar Rp583.927.140.362,00 dan Kontribusi BI atas *Cluster* A sebesar Rp6.030.642.439.760,00. Realisasi pembayaran bunga SBN Tahun 2025 mengalami kenaikan 5,48 persen dibandingkan realisasi Tahun 2024, hal ini disebabkan karena meningkatnya *outstanding* SBN.

Realisasi Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2025 sebesar Rp3.420.997.154.799,00 dan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.370.071.124.821,00. Realisasi Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 44,34 persen dibandingkan realisasi Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan pembasyaran pinjaman dalam negeri di Tahun 2025. Rincian belanja pembayaran bunga utang dalam negeri Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(dalam rupiah)

Kode	Kegiatan/Subkegiatan /Jenis Belanja/Rincian	Tahun 2025	Tahun 2024
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Rupiah	311.423.480.980.337	298.380.324.974.246
541219	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	246.850.520.500	231.387.637.000
541231	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	3.420.997.154.799	2.370.071.124.821
541251	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	46.545.514.953.331	43.168.967.648.620
541259	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	95.979.275.952	82.914.760.737
541311	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	80.544.845.289.902	74.872.184.741.953
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya-Imbalan SBSN Jangka Panjang	320.460.674.637	322.740.183.995
541341	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	16.584.814.225.000	14.021.639.612.500
541342	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	49.132.238.397	25.106.549.436
542111	Belanja Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara	3.385.597.929.900	1.686.875.072.000
542121	Belanja Pembayaran *Discount* Obligasi Negara	3.848.358.591.400	3.392.865.751.600
542141	Belanja Pembayaran *Discount* Obligasi Negara Valas	405.110.893.630	630.536.088.750
544111	Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	35.514.847.500	160.319.500.000
544113	Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas	-	-
545111	Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	2.591.719.633.100	4.435.167.932.300
545131	Belanja Pembayaran *Discount* SPN Syariah	1.800.936.847.500	2.157.528.372.200
Jumlah Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri		**471.299.314.055.885**	**445.938.629.950.158**

B.2.2.1.4. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 adalah sebesar Rp281.759.776.982.061,00 atau 89,32 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp315.455.154.663.000,00. Sedangkan realisasi Belanja Subsidi tahun 2024 adalah sebesar Rp292.692.594.096.846,00 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.932.817.114.785,00 atau sebesar 3,74 persen. Penurunan ini disebabkan antara lain tertundanya pembayaran subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR serta berakhirnya program subsidi IJP *loss limit* korporasi/BUMN dalam rangka PEN Covid-19 pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen DJPPR. Rincian realisasi belanja subsidi menurut jenis subsidi Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Lampiran LB4**.**

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 pada Kementerian Negara/Lembaga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Satker	Anggaran	Realisasi TA 2025	%
Kementerian Keuangan	217.991.989.270.000	204.542.296.039.154	93,83
Kementerian Pertanian	45.369.646.933.000	32.713.229.203.181	72,10
Kementerian Perhubungan	7.865.514.284.000	7.803.477.672.408	99,21
Kementerian PU	11.038.880.000	9.464.854.425	85,74
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.670.610.175.000	4.892.272.303.162	86,27
Kementerian Komdigi	184.628.830.000	180.673.538.000	97,86
Kementerian Koperasi dan UKM	38.346.546.891.000	31.611.078.463.388	82,44
Kementerian Perdagangan	10.279.400.000	7.271.321.536	70,74
Kementerian Perindustrian	4.900.000.000	13.586.807	0,28
Jumlah	**315.455.154.663.000**	**281.759.776.982.061**	**89,32**

1. Kementerian Keuangan

Realisasi belanja subsidi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp204.542.296.039.154,00 atau 93,83 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp217.991.989.270.000,00. Pada tahun 2024 realisasi belanja subsidi sebesar Rp187.464.120.909.729,00; sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2025, realisasi belanja subsidi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.078.175.129.425,00 atau 9,11 persen.

Rincian Realisasi Belanja Subsidi pada Kementerian Keuangan per jenis subsidi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Subsidi Energi	**185.168.643.723.241**	**177.615.236.208.519**	**7.553.407.514.722**	**4,25**
Subsidi Minyak Solar	17.584.401.914.632	17.115.109.641.445	469.292.273.187	2,74
Subsidi Minyak Tanah	3.642.567.330.483	4.469.228.489.490	(826.661.159.007)	(18,50)
Subsidi LPG Tabung 3 Kg	82.905.250.426.495	80.213.612.965.648	2.691.637.460.847	3,36
Subsidi Listrik	81.036.424.051.631	75.817.285.111.936	5.219.138.939.695	6,88
Subsidi Pajak DTP	**19.254.945.285.565**	**9.116.394.780.661**	**10.138.550.504.904**	**111,21**
Subsidi PPh DTP	11.245.045.026.941	8.311.642.153.441	2.933.402.873.500	35,29
Subsidi PPnBM DTP	2.432.437.222.468	138.246.168.593	2.294.191.053.875	1.659,50%
Subsidi PPN DTP	5.577.463.036.156	666.506.458.627	4.910.956.577.529	736,82
Subsidi PPN DTP- Rusun dan KBLBB	-	-	-	-
Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-	-
Subsidi PPN-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-	-
Subsidi PPnBM-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-	-
Subsidi Bunga Kredit Program	**53.085.360.348**	**252.159.126.358**	**(199.073.766.010)**	**(78,95)**
Subsidi Bunga Pinjaman CPP	53.085.360.348	252.159.126.358	(199.073.766.010)	(78,95)
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	-	-	-	-
Subsidi Bunga Pinjaman Daerah	**65.621.670.000**	**114.365.781.222**	**(48.744.111.222)**	**(42,62)**
Subsidi Bunga Program PEN (DJPK) - Penanganan Pandemi Covid-19	65.621.670.000	114.365.781.222	(48.744.111.222)	(42,62)
Subsidi Imbal Jasa Penjamin	**-**	**365.965.012.969**	**(365.965.012.969)**	**(100,00)**
Subsidi IJP Program PEN(DJPPR) - Penanganan Pandemi Covid-19	-	365.965.012.969	(365.965.012.969)	(100,00)
Jumlah	**204.542.296.039.154**	**187.464.120.909.729**	**17.078.175.129.425**	**9,11**

a. Subsidi Energi

Realisasi Belanja Subsidi Energi pada tahun 2025 sebesar Rp185.168.643.723.241,00 atau 93,64 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp197.752.255.753.000,00. Realisasi Belanja Subsidi Energi tahun 2025 naik sebesar Rp7.553.407.514.722,00 atau 4,25 persen dari realisasinya pada tahun 2024 Rp177.615.236.208.519,00. Subsidi Energi terdiri dari Subsidi JBT Minyak Solar, Subsidi JBT Minyak Tanah, Subsidi Elpiji, dan Subsidi Listrik.

1) Realisasi pembayaran subsidi JBT pada tahun 2025 sebesar Rp21.226.969.245.115,00 terdiri atas 2 jenis, yaitu Subsidi JBT Minyak Solar dan Subsidi JBT Minyak Tanah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
   a) Pembayaran sebesar Rp17.584.401.914.632,00 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Solar, yang terdiri atas:
      - Rp831.793.477.249,00 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Solar tahun 2023 hasil audit BPK RI kepada PT Pertamina Patra Niaga.
      - Rp1.607.044.084.266,00 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Solar tahun 2024 hasil audit BPK RI kepada PT Pertamina Patra Niaga.
      - Rp14.967.828.196.700,00 merupakan pembayaran subsidi JBT Minyak Solar tahun 2025 kepada PT Pertamina Patra Niaga.
      - Rp15.719.102.050,00 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Solar tahun 2024 hasil audit BPK RI kepada PT AKR Corporindo, Tbk.
      - Rp162.017.054.367,00 merupakan pembayaran subsidi JBT Minyak Solar tahun 2025 kepada PT AKR Corporindo, Tbk.
   b) Pembayaran sebesar Rp3.642.567.330.483,00 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Tanah kepada PT Pertamina Patra Niaga, yang terdiri atas pembayaran subsidi tahun berjalan sebesar Rp3.235.575.084.827,00 dan pembayaran kurang bayar tahun 2024 sebesar Rp406.992.245.656,00.

   Total JBT yang disalurkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025 berdasarkan berita acara verifikasi antara KPA dengan badan usaha adalah sebesar 18.919,310 ribu KL atau mencapai 97,47 persen dari kuota APBN tahun 2025 sebesar 19.410 ribu KL, terdiri dari minyak tanah sebesar 507,944 ribu KL dari kuota penyaluran sebesar 525 ribu KL dan minyak solar 18.411,366 ribu KL dari kuota penyaluran sebesar 18.885 ribu KL. Penyaluran JBT diupayakan dilakukan secara tepat sasaran dengan harga yang terjangkau, guna menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kegiatan ekonomi skala mikro dan kecil agar tetap berjalan.
   Pembayaran subsidi JBT tahun berjalan pada periode Tahun 2025 merupakan pembayaran kepada:
   a) PT Pertamina Patra Niaga untuk pembayaran subsidi JBT Minyak Solar s.d. tagihan bulan Oktober 2025 dan subsidi JBT Minyak Tanah s.d. tagihan bulan Oktober 2025; dan
   b) PT AKR Corporindo, Tbk untuk pembayaran subsidi JBT Minyak Solar s.d. tagihan bulan November 2025 untuk JBT Minyak Solar.

2) Realisasi pembayaran subsidi Elpiji sebesar Rp82.905.250.426.495,00 yang merupakan:
   a) Pembayaran kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2024 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp7.884.514.223.721,00 terdiri atas subsidi harga sebesar Rp7.106.980.647.008,00 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada Pemerintah sebesar Rp777.533.576.713,00 dan
   b) Pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2025 kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp75.020.736.202.774,00 terdiri atas subsidi harga sebesar

Rp67.618.412.296.000,00 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada Pemerintah sebesar Rp7.402.323.906.774,00.

Pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun berjalan pada periode Tahun 2025 merupakan pembayaran kepada PT Pertamina Patra Niaga sampai dengan sebagian tagihan bulan November 2025. Sementara itu, jumlah LPG Tabung 3 Kg yang disalurkan sampai dengan bulan Desember 2025 berdasarkan berita acara verifikasi antara KPA dengan badan usaha adalah sebesar 8.524,141 juta Kg atau mencapai 99,76 persen dari kuota sebesar 8.544,881 juta Kg.

3) Realisasi pembayaran subsidi listrik pada Periode Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp81.036.424.051.631,00, yang terdiri atas pembayaran atas beban subsidi listrik tahun berjalan periode tagihan Januari s.d. November (tidak termasuk pembayaran koreksi triwulan III) sebesar Rp75.196.573.853.184,00 dan pembayaran sisa kurang bayar subsidi listrik tahun 2024 sebesar Rp3.815.987.230.334,00 serta pembayaran sisa kurang bayar subsidi listrik tahun 2023 sebesar Rp2.023.862.968.113,00.

Realisasi belanja subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp104.132.219.671.610,00 lebih tinggi sebesar Rp2.334.268.575.027,00 atau 2,29 persen dibandingkan realisasi belanja pada Periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp101.797.951.096.582,00. Hal ini disebabkan diantaranya: (1) Volume penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan (2) Pembayaran kekurangan subsidi tahun sebelumnya pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi subsidi listrik Periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp81.036.424.051.631,00 lebih tinggi sebesar Rp5.219.138.939.695,00 atau 6,88 persen dibandingkan realisasi Periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp75.817.285.111.936,00. Lebih tingginya nilai pembayaran subsidi listrik Tahun 2025 disebabkan karena BPP (Biaya Pokok Penyediaan) tenaga listrik pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024.

Pembayaran subsidi listrik mulai bulan Juni Tahun Anggaran 2025 berdasarkan tagihan bulan Mei tahun 2025 telah dilakukan pembayaran subsidi listrik dengan menggunakan mekanisme *By Name By Address* (BNBA) secara bertahap.

b. Subsidi Pajak DTP

Realisasi Belanja Subsidi Pajak-DTP tahun 2025 sebesar Rp19.254.945.285.565,00 atau 96,83 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp19.884.655.363.000,00. Realisasi Belanja Subsidi Pajak DTP tahun 2025 naik sebesar Rp10.138.550.504.904,00 atau 111,21 persen dari realisasinya tahun 2024 Rp9.116.394.780.661,00. Kenaikan ini dikarenakan adanya pembayaran tagihan pajak DTP dengan objek baru, seperti PPh Pasal 21 DTP Industri Tertentu dan PPnBM DTP *Hybrid*.

Realisasi belanja subsidi Pajak DTP meliputi belanja subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp4.473.364.907.952,00; belanja subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp6.388.098.020.252,00; belanja subsidi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun sebesar Rp3.803.052.076.507,00; belanja subsidi PPN DTP KBLBB sebesar Rp1.774.410.959.649,00; belanja subsidi PPnBM DTP KBLBB sebesar Rp2.150.283.756.289,00; belanja subsidi PPnBM DTP *Hybrid* sebesar Rp282.153.466.179,00; dan belanja subsidi PPh Pasal 21 DTP Industri Tertentu sebesar Rp383.582.098.737,00.

c. Subsidi Bunga Kredit

Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Program tahun 2025 sebesar Rp53.085.360.348,00 atau 18,34 dari pagu anggarannya sebesar Rp289.456.484.000,00. Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Program tahun 2025 turun sebesar Rp199.073.766.010,00 atau 78,94 persen dari realisasinya pada Tahun 2024 sebesar Rp252.159.126.358,00. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 pembayaran Subsidi Bunga untuk Cadangan Pangan Pemerintah hanya dilakukan untuk periode tagihan 2024, sedangkan untuk tahun 2025 tidak terdapat tagihan.

d. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah

Realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah tahun 2025 sebesar Rp65.621.670.000,00 atau 100,00 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp65.621.670.000,00. Realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah tersebut, Rp48.744.111.222,00 atau 42,62 persen lebih kecil dari realisasinya Tahun 2024 yang sebesar Rp114.365.781.222,00.

Capaian realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah yang rendah disebabkan oleh pokok pinjaman yang semakin berkurang, sehingga secara proporsional jumlah subsidi bunga yang dibayarkan menjadi semakin rendah. Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat 7 pemerintah daerah yang sudah melunasi pokok pinjaman dari 30 pemerintah daerah telah melakukan pencairan dana pinjaman daerah.

e. Subsidi Imbal Jasa Penjamin

Realisasi belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari anggaran sebesar Rp0,00.

Pada Tahun 2024 realisasi belanja subsidi sebesar Rp16.135.205.138,00 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2025, realisasi belanja subsidi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.135.205.138,00 atau 100,00 persen.

2. Kementerian Pertanian

Realisasi belanja subsidi tahun 2025 sebesar Rp32.713.229.203.181,00 atau 72,10 persen dari pagu Anggaran sebesar Rp45.369.646.933.000,00. Pada Tahun 2024 realisasi belanja subsidi sebesar Rp47.387.443.789.782,00 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2025, realisasi belanja subsidi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.674.214.586.601,00 atau 30,97 persen. Hal ini disebabkan terdapat penundaan pembayaran atas penyaluran subsidi pupuk.

Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Alsintan dan Pupuk Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun)	%
Subsidi Bunga Alsintan	2.185.357.764	41.353.431	2.144.004.333	5184,59
Subsidi Pupuk	32.711.043.845.417	47.387.402.436.351	(14.676.358.590.934)	(30,97)
Jumlah	**32.713.229.203.181**	**47.387.443.789.782**	**(14.674.214.586.601)**	**(30,97)**

3. Kementerian Komunikasi dan Digital

Realisasi belanja subsidi PSO Lainnya tahun 2025 sebesar Rp180.673.538.000,00 atau sebesar 97,86 persen dari pagu Anggaran sebesar Rp184.628.830.000,00. Pada Tahun 2024 realisasi belanja subsidi sebesar Rp176.322.920.000,00 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2025,

realisasi belanja subsidi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.350.618.000,00 atau 2,47 persen.

4. Kementerian Pekerjaan Umum

Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya tahun 2025 sebesar Rp9.464.854.425,00 atau 85,74 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp11.038.880.000,00. Realisasi Belanja Subsidi neto Tahun 2024 sebesar Rp6.702.617.829,00. Sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi Belanja Subsidi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.762.236.596,00 atau 41,21 persen. Kenaikan ini dikarenakan satu PDAM penerima manfaat subsidi bunga yang penyerapannya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu PT Air Minum Giri Menang.

5. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi Belanja Subsidi pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebesar Rp4.892.272.303.162,00 atau 86,27 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp5.670.610.175.000,00. Subsidi sebesar Rp4.892.272.303.162,00 terdiri dari Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp1.143.072.000.000,00; Subsidi Bunga KPR sebesar Rp3.746.927.221.073,00; dan Subsidi Bunga Kredit Program Perumahan sebesar Rp2.273.082.089,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp5.461.784.081.696,00; terjadi penurunan sebesar Rp569.511.778.534,00 atau 10,43 persen. Pada pemerintahan terpilih periode 2024-2029, Kementerian PUPR terjadi penataan organisasi yang menyebabkan pemisahan Bagian Anggaran menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6. Kementerian Perhubungan

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2025 sebesar Rp7.803.477.672.408,00 atau 99,21 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp7.865.514.284.000,00; sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp7.799.688.716.109,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi Belanja Subsidi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.788.956.299,00 atau 0,05 persen. Hal ini dikarenakan naiknya realisasi PSO pada PT. KAI.

Realisasi per jenis subsidi pada Kementerian Perhubungan tahun 2025 dan 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun)	%
Subsidi/PSO PT. PELNI	3.068.456.422.559	3.203.970.376.875	(135.513.954.316)	(4,23)
Subsidi/PSO PT. KAI	4.735.021.249.849	4.595.718.339.234	139.302.910.615	3,03
Jumlah	**7.803.477.672.408**	**7.799.688.716.109**	**3.788.956.299**	**0,05**

Realisasi belanja subsidi/PSO PT PELNI sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.068.456.422.559,00 atau 100,00 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp3.068.456.424.000,00; sedangkan realisasi belanja subsidi Tahun 2024 sebesar Rp3.203.970.376.875,00 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi belanja subsidi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp135.513.954.316,00 atau 4,23 persen.

Realisasi belanja subsidi/PSO PT KAI tahun 2025 sebesar Rp4.735.021.249.849,00 atau 98,71 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp4.797.057.860.000,00. Sementara itu, realisasi belanja subsidi Tahun 2024 sebesar Rp4.595.718.339.234,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi belanja subsidi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp139.302.910.615,00 atau 3,03

persen. Realisasi Belanja Subsidi/PSO KPT KAI Tahun 2025 terdiri atas pembayaran PSO Perkeretaapian sebesar Rp2.649.195.952.509,00; penyelenggaraan LRT Jabodebek sebesar Rp1.985.263.737.340,00; dan pembayaran sebagian kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp100.561.560.000,00.

7. Kementerian Perdagangan

Realisasi Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang tahun 2025 sebesar Rp7.271.321.536,00 atau 70,74 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp10.279.400.000,00, sedangkan realisasi belanja subsidi tahun 2024 sebesar Rp3.044.846.912,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp4.226.474.624,00 atau 138,8 persen.

8. Kementerian Koperasi dan UKM

Realisasi Belanja Subsidi Bunga Margin/KUR tahun 2025 sebesar Rp31.611.078.463.388,00 atau 82,44 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp38.346.546.891.000,00; sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp44.393.486.214.789,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi Belanja Subsidi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp12.782.407.751.401,00 atau 28,79 persen.

9. Kementerian Perindustrian

Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya tahun 2025 sebesar Rp13.586.807,00 atau 0,28 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp4.900.000.000,00; sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

B.2.2.1.5. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 adalah sebesar Rp493.977.094.757,00 atau 85,72 persen dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp576.249.779.000,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp215.546.155.804,00 atau 77,41 persen dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp278.430.938.953,00. Kenaikan belanja hibah didominasi oleh kenaikan belanja hibah kepada pemerintah Luar Negeri naik sebesar Rp234.318.030.444,00 atau 127,39 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp183.941.706.710,00.

Perbandingan realisasi belanja hibah Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun) %
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	418.259.737.154	183.941.706.710	127,39
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	75.282.562.321	94.227.497.856	(20,11)
Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah	434.795.282	261.734.387	66,12
Jumlah Belanja	**493.977.094.757**	**278.430.938.953**	**77,41**

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp493.977.094.757,00 terdiri dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Rp418.259.737.154,00; Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Rp75.282.562.321,00; dan Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah sebesar Rp434.795.282,00.

B.2.2.1.6. Belanja Lain-Lain

Realisasi Belanja Lain-Lain Tahun 2025 sebesar Rp124.530.750.146.771,00 atau sebesar 73,87 persen dari DIPA Tahun 2025 sebesar Rp168.573.706.948.000,00. Realisasi Belanja Lain-lain terdapat pada BA BUN 999.08 dan 999.99. Dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp91.607.438.538.658,00 atau 42,38 persen dari Tahun 2024 sebesar Rp216.138.188.685.429,00. Penurunan ini didominasi oleh Belanja Lain-lain BUN Lainnya (Dana Kompensasi) pada satker Dit. PNBP SDA KND sebesar Rp89.255.324.418.263,00 atau 42,65 persen.

Rincian Realisasi Neto Belanja Lain-Lain adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Naik/Turun	%
	2025	2024		
UAP BUN Belanja Lain-lain (999.08)	***123.553.861.728.484***	***215.042.260.698.507***	**(91.488.398.970.023)**	**(42,54)**
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	141.414.028.174	106.854.376.765	34.559.651.409	32,34
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	120.032.812.514.323	209.288.136.932.586	(89.255.324.418.263)	(42,65)
Belanja Lain-lain	3.379.635.185.987	5.647.269.389.156	(2.267.634.203.169)	(40,15)
UAP BUN Transaksi Khusus (999.99)	**976.888.418.287**	**1.095.927.986.922**	**(119.039.568.635)**	**(10,86)**
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	549.866.585.863	727.120.009.219	(177.253.423.356)	(24,38)
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D dan *Exotic Currency*	783	1.103	(320)	(29,01)
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	143.206.449.377	119.748.067.230	23.458.382.147	19,59
Belanja Lain-lain Penggunaan PNBP BUN	283.815.382.264	249.059.909.370	34.755.472.894	13,95
Realisasi Belanja Neto	**124.530.750.146.771**	**216.138.188.685.429**	**(91.607.438.538.658)**	**(42,38)**

Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2025 pada BA 999.08 sebesar Rp123.553.861.728.484,00 di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Belanja Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS Distrik Pedalaman Papua, pada satker Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku KPA. Pada Tahun 2025, realisasi OAB Papua sebesar Rp141.414.028.174,00 yang terdiri dari OAB Papua sebesar Rp126.767.248.733,00 dan OAB Papua Barat sebesar 14.646.779.441,00.

2. Belanja Lain-lain BUN Lainnya (Dana Kompensasi) pada satker Dit. PNBP SDA KND, merupakan pembayaran utang kompensasi dengan realisasi Tahun 2025 sebesar Rp120.032.812.514.323,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Nama Operator	Jenis	Periode	Nilai
Kompensasi BBM				**54.711.908.613.828**
1	PT. Pertamina (Persero)	Solar	2024	28.603.640.937.149
2	PT. Pertamina (Persero)	Pertalite	2024	2.403.668.225.426
3	PT AKR Corporindo, Tbk.	Solar	2024	118.541.858.793
4	PT. Pertamina (Persero)	Solar	Triwulan I 2025	15.423.348.983.445
5	PT. Pertamina (Persero)	Pertalite	Triwulan I 2025	7.891.896.131.066
6	PT AKR Corporindo, Tbk.	Solar	Triwulan I dan II 2025	270.812.477.949

No.	Nama Operator	Jenis	Periode	Nilai
Kompensasi Listrik				**65.320.903.900.495**
1	PT PLN (Persero)	Listrik	2024	37.450.897.653.771
2	PT PLN (Persero)	Listrik	Triwulan I 2025	27.870.006.246.724
Jumlah				**120.032.812.514.323**

3. Belanja Lain-lain neto sebesar Rp3.379.635.185.987,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut:
   a. Istana Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara, sebesar Rp1.153.101.780.000,00 dengan pengembalian Rp311.672.055.390,00 sehingga realisasi neto adalah Rp841.429.724.610,00 atau 72,97 persen dari anggaran sebesar Rp1.153.101.780.000,00. Belanja Lain-Lain tersebut merupakan Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang terdiri dari Bantuan Pendidikan, Bantuan keagamaan, Bantuan sosial, Bantuan organisasi kemasyarakatan dan kegiatan lain. Realisasi dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden berdasarkan arahan/perintah langsung dari Presiden dan banyaknya jumlah proposal/pengajuan dari organisasi kemasyarakatan/sosial/ Pendidikan yang disetujui oleh Presiden;

   b. Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, sebesar Rp69.311.993.000,00 dengan pengembalian Rp923.231,00 sehingga realisasi neto adalah Rp69.311.067.769,00 atau mencapai 99,99 persen dari anggaran Rp69.311.993.000,00. Belanja Lain-Lain tersebut merupakan Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden yang terdiri dari Bantuan Pendidikan, Bantuan keagamaan, Bantuan sosial, Bantuan organisasi kemasyarakatan dan kegiatan lain. Realisasi dana Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden berdasarkan arahan/perintah langsung dari Wakil Presiden dan banyaknya jumlah proposal/pengajuan dari organisasi kemasyarakatan/sosial/ Pendidikan yang disetujui oleh Wakil Presiden;

   c. Direktorat PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebesar Rp356.106.693.942,00 atau 92,44 persen dari anggaran belanja sebesar Rp385.223.997.000,00 yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Layanan Pos Universal di 2.460 KPC LPU;

   d. DKPBPB Batam, sebesar Rp233.048.189.513,00 dengan pengembalian Rp6.365.000,00 sehingga realisasi neto adalah Rp233.041.824.513,00 atau 94.40 persen dari pagu anggaran sebesar Rp246.860.461.000,00. Belanja Lain-Lain tersebut untuk kegiatan Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun; dan

   e. Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas), sebesar Rp1.880.174.523.796,00 dengan pengembalian sebesar Rp428.638.643,00 sehingga realisasi neto adalah sebesar Rp1.879.745.875.153,00 atau 99,12 persen dari anggaran sebesar Rp1.896.525.226.000,00. Realisasi Belanja Lain-Lain TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,68 persen dari periode TA 2024. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi belanja layanan dukungan manajemen pada Satker SKK Migas.

Realisasi Belanja Lain-Lain pada BA 999.99 Tahun 2025 sebesar Rp976.888.418.287,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pembayaran Selisih Harga Bulog sebesar Rp143.206.449.377,00. Belanja ini berasal dari Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran selisih lebih atau kurang antara nilai HPB Pemerintah yang digunakan dalam potongan beras dalam bentuk natura pada gaji pegawai (PFK) yang sudah dibayarkan oleh KPA BUN kepada Perum Bulog dibandingkan dengan dengan nilai HPB Pemerintah yang seharusnya dibayar KPA BUN kepada Perum Bulog;

2. Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN sebesar Rp549.866.585.863,00;
3. Belanja Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D dan *Exotic Currency* sebesar Rp783,00; dan

   Belanja Lain-lain Penggunaan PNBP BUN PKN sebesar Rp283.815.382.264,00. Belanja penggunaan PNBP BUN PKN direalisasikan sejak tahun 2024 dengan dasar Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2024 tanggal 9 Februari 2024 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Bendahara Umum Negara Pengelolaan Kas Negara.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Realisasi belanja Transfer ke Daerah sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp849.040.693.847.170,00 atau 96,82 persen dari anggaran sebesar Rp876.943.792.927.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp863.542.806.482.364,00, realisasi belanja Transfer ke Daerah mengalami penurunan sebesar Rp14.502.112.635.194,00 atau 1,68 persen. Penurunan realisasi Belanja Transfer ke Daerah disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa, dan Insentif Daerah sebagaimana tabel berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Dana	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Naik/ (Turun) (%)
	Pagu	Realisasi	%		
Transfer ke Daerah					
A. Dana Bagi Hasil	178.377.765.616.000	168.890.519.118.880	94,68	153.174.562.784.262	10,26
B. Dana Alokasi Umum	438.625.121.056.000	433.292.088.063.189	98,78	429.210.611.278.998	0,95
C. Dana Alokasi Khusus	166.934.762.675.000	162.932.253.327.901	97,60	183.538.473.113.006	(11,23)
1. Transfer DAK Fisik	18.647.793.242.000	17.610.554.270.313	94,44	50.890.077.113.845	(65,39)
2. Transfer DAK Non Fisik	146.677.929.010.000	145.070.625.814.078	98,90	130.441.233.738.467	11,22
3. Hibah Kepada Daerah	1.609.040.423.000	251.073.243.510	15,60	2.207.162.260.694	(88,62)
D. Dana Otonomi Khusus	17.006.143.580.000	17.006.143.580.000	100,00	18.271.490.935.000	(6,93)
E. Dana Keistimewaan DIY	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00	1.420.000.000.000	(29,58)
F. Dana Desa	69.000.000.000.000	61.645.153.758.700	89,34	70.925.927.774.598	(13,09)
G. Insentif Fiskal	6.000.000.000.000	4.274.535.998.500	71,24	7.001.740.596.500	(38,95)
Jumlah	**876.943.792.927.000**	**849.040.693.847.170**	**96,82**	**863.542.806.482.364**	**(1,68)**

Rincian Realisasi Transfer Daerah per Akun Tahun 2025 dapat dilihat di Lampiran LB5 dan Rincian Realisasi Transfer Daerah per Daerah Tahun 2025 dapat dilihat di Lampiran LB6.

B.2.2.2.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi transfer DBH sampai dengan 31 Desember TA 2025 sebesar Rp168.890.519.118.880,00 atau sebesar 94,68 persen dari pagu anggaran sebesar Rp178.377.765.616.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp153.174.562.784.262,00; realisasi pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.715.956.334.618,00 atau 10,26 persen. Kenaikan ini disebabkan adanya penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil s.d. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18,52 triliun. Realisasi penyaluran DBH pajak yang hanya tercapai 88,41 persen disebabkan oleh penundaan penyaluran DBH

Pajak untuk DBH PPh dan DBH PBB sebesar 50,00 persen dari alokasi penyaluran DBH Pajak Bulan Desember, dengan mempertimbangkan ketersediaan Kas Pemerintah Pusat. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menindaklanjuti dan melaporkan tentang penundaan penyaluran DBH kepada menkeu melalui nota dinas Nomor ND-163/PK/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang penyaluran DBH Pajak dan DBH Perkebunan Sawit bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp 9.429.099.260.600,00.

Berikut tabel rincian realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2025.

(dalam rupiah)

Jenis Dana	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Naik/(Turun)
	Pagu	Realisasi	%		(%)
1. DBH Non SDA	81.459.715.714.000	72.019.863.677.780	88,41	59.328.986.344.540	21,39
DBH PPh	45.893.851.229.000	40.735.535.692.200	88,76	32.733.740.472.000	24,45
DBH PBB	29.002.090.481.000	24.731.306.757.200	85,27	21.507.689.731.000	14,99
DBH Cukai	6.563.774.004.000	6.553.021.228.380	99,84	5.087.556.141.540	28,80
2. DBH Sumber Daya Alam	95.725.091.001.000	95.697.657.431.100	99,97	91.020.649.057.222	5,14
DBH Minyak bumi	9.547.214.159.000	9.547.214.159.000	100,00	8.944.481.225.000	6,74
DBH Gas Bumi	7.754.928.593.000	7.754.928.593.000	100,00	7.006.411.326.000	10,68
DBH Minerba	74.899.300.984.000	74.899.300.984.000	100,00	71.110.816.829.000	5,33
DBH Panas Bumi	1.660.558.734.000	1.660.558.734.000	100,00	1.586.280.291.000	4,68
DBH Kehutanan	1.148.424.824.000	1.120.991.254.100	97,61	1.420.960.624.222	(21,11)
DBH Perikanan	714.663.707.000	714.663.707.000	100,00	951.698.762.000	(24,91)
3. DBH Lainnya	1.192.958.901.000	1.172.998.010.000	98,33	2.824.927.382.500	(58,48)
DBH Perkebunan Sawit	1.192.958.901.000	1.172.998.010.000	98,33	2.824.927.382.500	(58,48)
Jumlah	**178.377.765.616.000**	**168.890.519.118.880**	**94,68**	**153.174.562.784.262**	**10,26**

Rincian Realisasi Anggaran untuk DBH per-Daerah pada Lampiran LB7, DBH Pajak disajikan pada Lampiran LB8, dan DBH SDA per Daerah disajikan pada Lampiran LB9.

B.2.2.2.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 sebesar Rp433.292.088.063.189,00. Realisasi DAU tahun 2025 dari pagu anggaran sebesar Rp438.625.121.056.000,00 mencapai 98,78 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp429.210.611.278.998,00; realisasi pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.081.476.784.191,00 atau 0,95 persen. Rincian Realisasi Anggaran DAU Tahun 2025 per pemerintah daerah disajikan pada Lampiran LB10.

Rincian realisasi DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya dan DAU Ditentukan Penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Akun	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/
	Anggaran	Realisasi	%		(Penurunan) (%)
Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	**360.515.964.881.000**	**360.515.964.881.000**	**100,00**	**343.527.595.289.000**	**4,95**
Dana Alokasi Umum Ditentukan Penggunaannya	**78.109.156.175.000**	**72.776.123.182.189**	**93,17**	**85.683.015.989.998**	**(15,06)**
Belanja Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPK	15.355.145.022.000	10.620.002.627.812	69,16	11.682.211.062.523	(9,09)
Belanja Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	1.699.600.000.000	1.659.888.602.000	97,66	1.649.654.425.851	0,62

Uraian Akun	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	33.977.498.065.000	33.578.181.449.999	98,82	37.276.919.147.598	(9,92)
Belanja Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	19.410.056.022.000	19.251.193.436.378	99,18	17.112.772.095.184	12,50
Belanja Dana Alokasi Umum Pekerjaan Umum	-	-	0,00	12.083.638.950.842	(100,00)
Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	7.666.857.066.000	7.666.857.066.000	100,00	5.877.820.308.000	30,44
Jumlah	**438.625.121.056.000**	**433.292.088.063.189**	**98,78**	**429.210.611.278.998**	**0,95**

Realisasi penyaluran DAU PPPK Daerah Tahun 2025 dilakukan berdasarkan pengajuan dari pemerintah daerah yang didasarkan pada realisasi pengangkatan PPPK Daerah formasi tahun 2024 yang diangkat di 2025. Pada tahun 2025, proses pengangkatan PPPK Daerah sempat mengalami keterlambatan dikarenakan adanya dinamika kebijakan pengangkatan PPPK di daerah sehingga menyebabkan realisasi DAU Penggajian Formasi PPPK di daerah tidak optimal. Realisasi Transfer DAU sampai dengan 31 Desember 2025 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dengan jumlah potongan sebesar Rp3.856.203.884.321,00. Potongan DAU tersebut untuk pembayaran penerusan pinjaman Pemda, pembayaran Pinjaman PEN dan sisa DAK Nonfisik.

B.2.2.2.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi keseluruhan Dana Alokasi Khusus sampai dengan tahun 2025 mencapai sebesar Rp162.932.253.327.901,00 atau telah mencapai 97,60 persen terhadap anggarannya sebesar Rp166.934.762.675.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.606.219.785.105,00 atau 11,23 persen dari realisasi periode yang sama tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp183.538.473.113.006,00. Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus non Fisik, dan Hibah Kepada Daerah. Realisasi Dana Alokasi Khusus per-Daerah dapat dilihat di Lampiran LB11. Rincian Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus sebagaimana disajikan dalam tabel realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun anggaran 2025 pada tabel berikut ini:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025		%	Realisasi Tahun 2024	Naik/ (Turun) %
	PAGU	REALISASI			
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	18.647.793.242.000	17.610.554.270.313	94,44	50.890.077.113.845	(65,39)
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	146.677.929.010.000	145.070.625.814.078	98,90	130.441.233.738.467	11,22
HIBAH KEPADA DAERAH	1.609.040.423.000	251.073.243.510	15,60	2.207.162.260.694	(88,62)
Jumlah	**166.934.762.675.000**	**162.932.253.327.901**	**97,60**	**183.538.473.113.006**	**(11,23)**

B.2.2.2.3.1. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Transfer DAK Fisik pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.610.554.270.313,00 dan Rp50.890.077.113.845,00. Realisasi Transfer DAK Fisik tahun 2025 mencapai 94,44 persen dari anggaran transfer DAK Fisik sebesar Rp18.647.793.242.000,00. Realisasi penyaluran dana transfer DAK Fisik Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.279.522.843.532,00 atau 65,39 persen dari periode Tahun 2024 disebabkan oleh adanya efisiensi pada Tahun 2025. Realisasi transfer DAK Fisik sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar

Rp17.610.554.270.313,00 seluruhnya disalurkan untuk DAK Fisik Penugasan. Alokasi DAK Fisik 2025 terbagi menjadi 12 bidang DAK Fisik. Sampai dengan periode 31 Desember 2025 terdapat 4 bidang DAK Fisik yang termasuk dalam kategori efisiensi belanja yaitu Bidang Konektivitas, Bidang Irigasi, Bidang Pangan Pertanian, dan Bidang Pangan Akustik dengan nilai efisiensi sebesar Rp18.306.195.715.000,00 sehingga penyaluran DAK Fisik Tahun 2025 hanya dilaksanakan dalam 8 bidang. Rincian Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

(dalam rupiah)

Bidang	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
	PAGU	Realisasi	%		
Air Minum	2.219.373.292.000	2.096.658.811.689	94,47	2.319.286.566.128	(9,60)
Industri Kecil dan Menengah	50.000.000.000	44.118.022.270	88,24	355.295.984.662	(87,58)
Infrastruktur Energi Terbarukan	-	-	-	87.452.503.920	(100,00)
Irigasi	-	-	-	1.559.041.608.960	(100,00)
Jalan	-	-	-	11.725.995.830.588	(100,00)
Kehutanan	-	-	-	29.402.396.409	(100,00)
Kelautan dan Perikanan	-	-	-	1.236.188.298.833	(100,00)
Kesehatan dan KB	11.809.651.294.000	11.201.429.812.312	94,85	12.496.924.270.572	(10,37)
Lingkungan Hidup	-	-	-	132.605.872.545	(100,00)
Pariwisata	-	-	-	402.845.647.941	(100,00)
Pendidikan	2.482.020.827.000	2.301.188.251.937	92,71	15.117.195.311.790	(84,78)
Perdagangan	124.198.880.000	88.645.200.208	71,37	69.499.769.000	27,55
Pertanian	-	-	-	2.310.501.901.284	(100,00)
Perumahan dan Permukiman	256.155.859.000	242.586.155.423	94,70	240.733.176.587	0,77
Sanitasi	1.609.432.000.000	1.552.866.842.445	96,49	1.658.452.595.251	(6,37)
Transportasi Perairan	-	-	-	348.006.240.634	(100,00)
Transportasi Perdesaan	-	-	-	707.527.853.146	(100,00)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	93.121.285.595	(100,00)
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	96.961.090.000	83.061.174.029	85,66	-	100,00
Jumlah	**18.647.793.242.000**	**17.610.554.270.313**	**94,44**	**50.890.077.113.845**	**(65,39)**

B.2.2.2.3.2. Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Transfer DAK Non Fisik pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp145.070.625.814.078,00 dan Rp130.441.233.738.467,00. Realisasi Transfer DAK Non Fisik tahun 2025 mencapai 98,90 persen dari anggaran transfer DAK Non Fisik sebesar Rp146.677.929.010.000,00. Realisasi DAK Non Fisik tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.629.392.075.611,00 atau 11,22 persen dari realisasi DAK Non Fisik pada periode yang sama Tahun 2024 sebesar Rp130.441.233.738.467,00. Selama periode Tahun Anggaran 2025 terdapat jenis TKD yang sudah tidak lagi dianggarkan yaitu Dana Pelayanan Kepariwisataan, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, dan Dana Biaya Layanan Pengelolaan Sampah. Penghentian alokasi untuk beberapa jenis DAK Non Fisik disebabkan oleh adanya dinamika kebijakan Transfer ke Daerah. Selain itu terdapat kebijakan penyaluran langsung ke penerima pada beberapa jenis TKD DAK Non Fisik seperti Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah. Terdapat jenis DAK Non Fisik yang baru dianggarkan sejak Tahun Anggaran 2025, yaitu Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah.

Realisasi belanja DAK Non Fisik dilaksanakan secara bruto dan memperhitungkan pemotongan yang disabkan oleh adanya sisa dana di tahun sebelumnya ataupun potongan Pajak Penghasilan dan Iuran Asuransi BPJS pada Tunjangan Guru ASN Daerah. Potongan DAK Nonfisik Tahun 2025 sebesar Rp1.392.580.577.941,00 terdiri atas potongan SPM sebesar Rp1.352.346.360.025,00 dan Setoran DAK Nonfisik sebesar Rp40.234.217.916,00.

Terdapat penurunan realisasi pada beberapa jenis belanja DAK Nonfisik antara lain Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah guru ASN Daerah yang telah bersertifikasi yang melebihi dari jumlah yang dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2025, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK sejalan dengan penurunan alokasi Dana PK2UMK di Tahun 2025, dan Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKM) yang disebabkan penurunan alokasi dana PK2SIKM dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terdapat penurunan realisasi, secara umum realisasi DAK Nonfisik mengalami peningkatan antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah dibandingkan tahun sebelumnya, serta penambahan jumlah sekolah dan siswa penerima Dana BOP Kesetaraan. Laporan Realisasi Anggaran DAK Nonfisik Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025		%	Realisasi Tahun 2024	Naik/ (Turun) (%)
	Pagu	Realisasi			
Dana Tunjangan Profesi Guru	67.300.287.432.000	67.278.112.196.853	99,97	51.850.462.245.921	29,75
Dana Tunjangan Khusus Guru	2.282.670.590.000	2.266.213.994.760	99,28	2.075.612.901.562	9,18
Dana Tambahan Penghasilan Guru	481.344.500.000	470.451.750.000	97,74	1.495.768.803.108	(68,55)
Dana Bantuan Operasional Sekolah	53.491.720.356.000	53.456.827.078.015	99,93	53.303.572.819.195	0,29
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	4.038.700.320.000	4.002.634.203.721	99,11	3.962.494.428.245	1,01
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Kesetaraan	1.741.189.650.000	1.715.933.882.381	98,55	1.550.857.706.506	10,64
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	12.878.672.152.000	11.429.909.548.348	88,75	11.481.642.480.980	(0,45)
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.239.300.000.000	3.238.900.005.500	99,99	3.237.433.806.000	0,05
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00	169.975.000.000	-
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	163.700.000.000	161.304.750.500	98,54	247.175.338.000	(34,74)
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132.000.000.000	130.522.518.000	98,88	129.806.000.000	0,55
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	516.379.010.000	510.916.636.000	98,94	297.142.612.500	71,94
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	91.990.000.000	89.299.250.000	97,07	198.119.692.500	(54,93)
Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	150.000.000.000	149.625.000.000	99,75	-	100,00
Dana Pelayanan Kepariwisataan	-	-	-	132.033.514.000	(100,00)
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	-	248.324.714.500	(100,00)
Dana Biaya Layanan Pengolahan Sampah	-	-	-	60.811.675.450	(100,00)
Jumlah	**146.677.929.010.000**	**145.070.625.814.078**	**98,90**	**130.441.233.738.467**	**11,22**

B.2.2.2.3.3. Hibah ke Daerah

Realisasi Hibah Kepada Daerah sebagaimana tercantum dalam LRA Tahun 2025 mencapai Rp251.073.243.510,00. Realisasi hibah kepada daerah tahun 2025 mencapai 15,60 persen dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp1.609.040.423.000,00. Realisasi Hibah ke Daerah mengalami penurunan sebesar Rp1.956.089.017.184,00 atau 88,62 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama TA 2024 sebesar Rp2.207.162.260.694,00. Rincian Realisasi Hibah Kepada Daerah TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	1.594.988.836.000	237.027.244.682	14,86
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	14.051.587.000	14.045.998.828	99,96
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	-	-	-
Jumlah Hibah Kepada Daerah	**1.609.040.423.000**	**251.073.243.510**	**15,60**

Rincian Hibah Kepada Daerah per jenis Hibah tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut. Sedangkan rincian per jenis Hibah per Pemda periode tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Lampiran LB12.

(dalam rupiah)

Uraian	Pagu Ta 2025	Realisasi Ta 2025	%
Hibah The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)	197.830.836.000	176.460.390.967	89,20
Hibah Mass Rapid Transit (MRT)	1.397.158.000.000	60.566.853.715	4,34
Hibah Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)	14.051.587.000	14.045.998.828	99,96
Jumlah	**1.609.040.423.000**	**251.073.243.510**	**15,60**

Rendahnya realisasi Hibah *Mass Rapid Transit* (MRT) Tahun 2025 disebabkan terbitnya PMK Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri dan PMK Nomor 109 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri serta PMK Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakukan Perpajakan Dalam Kerja Sama Operasi. Hal tersebut berdampak pada proses tagihan Kontraktor/Konsultan serta pergeseran jadwal pengadaan lahan pembangunan MRT Jakarta Metropolitan Koridor Timur Barat Fase 1 (satu) Tahap 1 (satu) yang semula direncanakan di Tahun 2025 menjadi Tahun 2026.

B.2.2.2.4. Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otsus pada LRA Tahun 2025 sebesar Rp17.006.143.580.000,00 atau 100,00 persen dari pagu anggaran sebesar Rp17.006.143.580.000,00. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, realisasi Dana Otsus tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.265.347.355.000,00 atau sebesar 6,93 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama TA 2024 sebesar Rp18.271.490.935.000,00. Penurunan realisasi Dana Otsus Tahun 2025 dikarenakan efisiensi sebesar Rp509.455.378.000,00 yang diambil dari jenis dana Otonomi Khusus Aceh dan Papua.

Rincian realisasi per jenis Dana Otsus TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024 tersaji pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Rincian Beban Dana Otonomi Khusus	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	**4.309.582.640.000**	**4.276.993.035.000**
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	4.309.582.640.000	4.276.993.035.000
Dana Tambahan Infrastruktur	**3.000.000.000.000**	**4.411.741.958.000**
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua	530.558.897.000	770.087.411.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat	436.774.856.000	636.516.027.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Daya	420.153.684.000	652.742.113.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan	588.385.327.000	861.274.294.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan	456.634.597.000	665.304.462.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah	567.492.639.000	825.817.651.000
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum	**4.309.582.640.000**	**4.276.993.036.000**

Rincian Beban Dana Otonomi Khusus	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua	781.495.894.000	717.359.936.000
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua Barat	497.515.870.000	485.551.411.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya	577.093.720.000	604.812.025.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Pegunungan	1.083.886.779.000	1.073.576.144.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan	527.310.024.000	547.131.349.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah	842.280.353.000	848.562.171.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya	**5.386.978.300.000**	**5.305.762.906.000**
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua	978.200.661.000	883.469.568.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat	627.774.300.000	630.041.924.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya	698.423.784.000	612.263.725.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan	1.362.514.769.000	1.395.865.798.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan	644.006.648.000	704.887.057.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah	1.076.058.138.000	1.079.234.834.000
Jumlah	**17.006.143.580.000**	**18.271.490.935.000**

B.2.2.2.5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Realisasi Transfer DK-DIY Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 yaitu 100,00 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang berjumlah Rp1.420.000.000.000,00, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp420.000.000.000,00 atau 29,58 persen karena adanya efisiensi belanja. Terdapat perubahan kebijakan penyaluran DK-DIY sebagaimana PMK Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan sisa DK-DIY menjadi SiLPA atau pembentukan Dana Abadi Daerah.

B.2.2.2.6. Dana Desa

Realisasi Transfer Dana Desa pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp61.645.153.758.700,00 dan Rp70.925.927.774.598,00. Realisasi Transfer Dana Desa Tahun 2025 adalah sebesar 89,34 persen dari anggaran transfer Dana Desa sebesar Rp69.000.000.000.000,00. Nilai realisasi sebesar 89,34 persen terjadi karena pada tahun 2025 terdapat kebijakan penghentian penyaluran Dana Desa Tahap 2 *Non-Earmark* sesuai dengan PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Realisasi transfer Dana Desa pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.280.774.015.898,00 atau 13,09 persen dari periode Tahun 2024 karena adanya efisiensi belanja. Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat pemotongan penyaluran Dana Desa sebesar Rp2.997.356.425,00 yang disebabkan adanya penyelesaian piutang dana desa tahun anggaran sebelumnya. Realisasi Dana Desa per-Daerah dapat dilihat di Lampiran LB13.

B.2.2.2.7. Insentif Fiskal

Realisasi Insentif Fiskal tahun 2025 sebesar Rp4.274.535.998.500,00 atau 71,24 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp6.000.000.000.000,00. Alokasi Insentif Fiskal TA 2025 terbagi menjadi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya dengan nilai Rp4.000.000.000.000,00 dan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp2.000.000.000.000,00. Namun pada kenyataanya hanya sebagian Insentif

Fiskal Tahun Berjalan yang dialokasikan per daerah yaitu sebesar Rp300.000.000.000,00. Oleh karena itu masih terdapat sisa alokasi sebesar Rp2.700.000.000.000,00 yang belum dialokasikan per-daerah dan direncanakan akan dialihkan ke Alokasi Belanja Lainnya pada Tahun 2025. Namun karena adanya dinamika kebijakan, alokasi Insentif Fiskal batal dialihkan ke Belanja Lainnya. Jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp7.001.740.596.500,00, realisasi Transfer Insentif Fiskal TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.727.204.598.000,00 atau 38,95 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya pagu dibandingkan tahun sebelumnya serta kebijakan pengendalian anggaran Dana Insentif Fiskal untuk Kinerja Tahun Berjalan. Insentif fiskal antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran iuran JKN, bantuan benih tanaman pangan, jalan usaha tani, serta bantuan penyediaan rumah layak huni.

B.2.3. Defisit Anggaran

Berdasarkan Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah dan Realisasi Belanja BUN Tahun 2025, maka Defisit Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp1.765.157.779.435.556,00 yang berarti 94,56 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.866.614.677.872.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
Pendapatan BUN dan Hibah	186.456.746.764.097	274.898.283.178.566	(32,17)
Belanja BUN	1.951.614.526.199.653	2.035.762.478.740.043	(4,13)
Defisit Anggaran	**(1.765.157.779.435.556)**	**(1.760.864.195.561.477)**	**0,24**

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp742.731.460.043.864,00 atau 120,54 persen dari anggaran sebesar Rp616.186.060.243.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp554.888.579.353.028,00, realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp187.842.880.690.836,00 atau naik 33,85 persen.

Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp656.824.953.980.649,00 atau 134,58 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp488.055.417.613.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp462.577.425.084.416,00, realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp194.247.528.896.233,00 atau naik 41,99 persen. Pembiayaan Dalam Negeri meliputi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan, Pemberian Pinjaman, Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman, Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Retrukturisasi, Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, PMN/Dana Investasi Pemerintah, Pengeluaran Kewajiban Penjaminan, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan Pembiayaan Lain-Lain.

B.2.4.1.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan selama Tahun 2025 sebesar Rp93.146.980.793.000,00 terdiri dari Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85.600.000.000.000,00 dan Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU sebesar Rp7.546.980.793.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp56.419.615.865.000,00; realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp36.727.364.928.000,00 atau 65,10 persen.

B.2.4.1.2. Pemberian Pinjaman

Realisasi Pemberian Pinjaman Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.666.370.272.398,00 atau 49,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp9.382.072.463.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.242.437.773.274,00, realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp423.932.499.124,00 atau naik 9,99 persen. Pemberian Pinjaman Tahun 2025 terdiri dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah sebesar Rp2.899.546.263.593,00 dan Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN sebesar Rp1.766.824.008.805,00.

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan	2.899.546.263.593	2.801.304.537.758	3,51
Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan	1.766.824.008.805	1.441.133.235.516	22,60
Jumlah	**4.666.370.272.398**	**4.242.437.773.274**	**9,99**

Realisasi Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.899.546.263.593,00 dan Rp2.801.304.537.758,00. Realisasi tahun 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp98.241.725.835,00 atau naik 3,51 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2024. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pagu DIPA Tahun 2025, persentase realisasi penarikan pinjaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mencapai 63,92 persen. Relatif rendahnya realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh kendala administratif dalam proses penarikan pinjaman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Pembiayaan *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project* (Phase 2). Selain itu, terdapat permasalahan gagal tender, hambatan dalam proses pembebasan lahan, serta berbagai kendala teknis lainnya yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan proyek dan turut memengaruhi rendahnya realisasi penarikan pinjaman pada periode ini.

Realisasi Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.766.824.008.805,00 dan Rp1.441.133.235.516,00. Realisasi tahun 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp325.690.773.289,00 atau naik 22,60 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2024. Kenaikan signifikan tersebut terutama didorong oleh tingginya realisasi penarikan pinjaman pada PT Pertamina (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang masing-masing telah mencapai lebih dari 90 persen dari pagu DIPA Tahun 2025. Tingkat realisasi yang tinggi tersebut mencerminkan percepatan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek pada kedua BUMN dimaksud.

Realisasi tersebut berdasarkan dokumen Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) Periode Januari s.d. Desember 2025 yang diterbitkan atas Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada tiga BUMN yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Sarana Multi Infrastruktur dan PT. Pertamina. Berikut rincian Realisasi Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan Tahun 2025:

(dalam rupiah)

No.	Nama Debitur	Cara Penarikan	Pagu	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	PT. PLN	PP	207.404.660.000	206.003.339.491	99,32
		PL	449.598.182.000	174.414.493.957	38,79
		Jumlah	**657.002.842.000**	**380.417.833.448**	**57,90**
2.	PT. Pertamina	PL	6.751.856.000	6.683.279.034	98,98
		LC	526.370.202.000	497.581.200.323	94,53
		Jumlah	**533.122.058.000**	**504.264.479.357**	**94,59**
3.	PT. SMI	PL	886.821.557.000	882.141.696.000	99,47
		Jumlah	**886.821.557.000**	**882.141.696.000**	**99,47**
Jumlah Keseluruhan			**2.076.946.457.000**	**1.766.824.008.805**	**85,07**

B.2.4.1.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.295.865.914.969,00 atau 109,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp3.939.963.612.000,00. Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman mengalami kenaikan sebesar Rp272.327.516.136,00 atau 6,77 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.023.538.398.833,00.

Rincian Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagaimana berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri (PPDN)	20.746.114.441	268.991.443.728	(92,29)
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPDN Kepada Pemda	1.120.000.000	1.120.000.000	-
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPDN Kepada BUMD	2.060.000.000	1.149.090.909	79,27
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPDN Kepada BUMN	9.489.343.325	258.288.664.984	(96,33)
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPDN Kepada Non Pemerintah	8.076.771.116	8.433.687.835	(4,23)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri (PPLN)	4.275.119.800.528	3.754.546.955.105	13,87
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Daerah	176.928.409.060	67.746.694.812	161,16
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada BUMN	4.072.675.417.699	3.662.304.059.667	11,21
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Non Pemerintah	25.515.973.769	24.496.200.626	4,16
Jumlah	**4.295.865.914.969**	**4.023.538.398.833**	**6,77**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 berasal dari pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman oleh debitur melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Nilai pembayaran terbesar dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dengan nilai pembayaran mencapai Rp3.113.086.155.821,00 atau 72,47 persen dari jumlah penerimaan pembiayaan.

Berikut merupakan 10 (sepuluh) debitur dengan nilai pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman terbesar sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

(dalam rupiah)

No.	Nama Debitur	Nilai
1.	PT. PLN	3.113.086.155.821
2.	PT.SMI	429.996.591.352
3.	PT PGN	263.507.485.260
4.	PERTAMINA	260.369.035.734
5.	PEMPROP DKI	133.339.120.600
6.	PT. BANK MANDIRI	17.188.975.306
7.	PEMKAB ACEH TIMUR	10.571.402.175
8.	PERUSAHAAN INTI RAKYAT	6.965.982.016
9.	PEMKAB MUARA ENIM	6.278.516.130
10.	PEMKOT. BOGOR	5.484.766.176

B.2.4.1.4. Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI sebesar Rp610.174.852.295,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp789.934.210.445,00 atau 56,42 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.400.109.062.740,00. Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI berasal dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan yang dilakukan DJKN melalui mekanisme pengurusan aset kredit oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan secara lelang aset inventaris, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) di mana yang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan adalah yang telah tercatat dalam aplikasi *Treasury Billing System* (TBS), Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI), SPAN, serta modul Penerimaan setoran ke RKUN (FIRA). Rincian Realisasi Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Penerimaan hasil penjualan / penyelesaian aset eks BPPN	513.012.420.241	1.221.059.570.444	(57,99)
2	Penerimaan hasil Penjualan / Penyelesaian aset eks BDL	97.162.432.054	179.049.492.296	(45,73)
Total		**610.174.852.295**	**1.400.109.062.740**	**(56,42)**

a. Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN.

Realisasi Penerimaan Penjualan/ Penyelesaian Aset Eks BPPN tahun 2025 sebesar Rp513.012.420.241,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp708.047.150.203,00 atau 57,99 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.221.059.570.444,00. Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA. Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, penebusan aset properti, pencairan aset nostro, pelepasan aset saham/surat berharga dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara.

b. Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BDL.

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BDL tahun 2025 sebesar Rp97.162.432.054,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp81.887.060.242,00 atau 45,73 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp179.049.492.296,00. Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), penjualan barang jaminan diambil alih/aset properti, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara.

B.2.4.1.5. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari SBN Tahun 2025 adalah sebesar Rp639.271.552.983.338,00 atau 99,49 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp642.562.027.445.000,00. Realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp188.538.300.563.151,00 atau 41,83 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp450.733.252.420.187,00. Hal tersebut dikarenakan penerbitan SBN Tahun 2025 yang lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024. Realisasi SBN, terdiri dari penerimaan penjualan SBN dan pengeluaran untuk pembayaran/pelunasan SBN. Realisasi Penerimaan SBN Tahun 2025 sebesar Rp1.448.883.570.563.343,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.075.437.376.773.300,00; sedangkan Realisasi Pengeluaran SBN Tahun 2025 sebesar Rp809.612.017.580.005,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp624.704.124.353.113,00. Rincian Realisasi SBN Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun) %
Penerimaan Penjualan Surat Berharga Negara	1.448.883.570.563.343	1.075.437.376.773.300	34,73
Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	80.050.000.000.000	33.504.000.000.000	138,93
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	800.580.316.000.000	590.125.540.000.000	35,66
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	12.952.157.432.725	8.634.640.335.000	50,00
Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Panjang	271.758.227.361.614	222.421.958.000.110	22,18
Penerimaan Imbalan dibayar dimuka SBSN Jk. Panjang	3.033.522.368.643	2.328.793.438.300	30,26
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	55.225.000.000.000	54.213.300.000.000	1,87
Penerbitan SBSN dlm rangka Pembiayaan Proyek-PBS	12.628.180.638.386	32.894.999.999.890	(61,61)
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara-Valas	132.349.016.761.975	92.879.895.000.000	42,49
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas Jangka Panjang	80.307.150.000.000	38.434.250.000.000	108,95
Pengeluaran Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	(809.612.017.580.005)	(624.704.124.353.113)	29,60
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	(34.650.000.000.000)	(34.896.000.000.000)	(0,70)
Pelunasan Obligasi Negara	(231.550.661.940.462)	(277.851.067.798.505)	(16,66)
Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali	(106.204.075.000.000)	(11.148.500.000.000)	852,63
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	(11.528.209.900.900)	(7.471.744.860.158)	54,29
Pelunasan SBSN Jangka Panjang	(216.328.204.000.000)	(171.081.697.000.000)	26,45

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun) %
Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali	(1.364.961.000.000)	-	100,00
Pembayaran Imbalan dibayar dimuka SBSN - Jk Panjang	(3.048.402.968.643)	(2.272.251.668.300)	34,16
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	(65.318.300.000.000)	(21.815.000.000.000)	199,42
Pelunasan Obligasi Negara - Valas	(92.340.502.770.000)	(63.305.247.366.000)	45,87
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	0	(365.660.150)	(100,00)
Pelunasan SBSN Valas - Jangka Panjang	(47.278.700.000.000)	(34.862.250.000.000)	35,62
Jumlah SBN Neto	**639.271.552.983.338**	**(450.733.252.420.187)**	**41,83**

B.2.4.1.6. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Neto Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.234.959.542.506,00 atau 197,78 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp5.174.799.019.000,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp4.784.511.704.635,00 atau 31,86 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp15.019.471.247.141,00.

Rincian Realisasi Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun %
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	18.002.517.099.833	20.122.653.359.752	(10,54)
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	17.398.152.960.882	18.649.607.994.305	(6,71)
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	604.364.138.951	1.473.045.365.447	(58,97)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri	(7.767.557.557.327)	(5.103.182.112.611)	52,21
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri - Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	(7.767.557.557.327)	(5.103.182.112.611)	52,21
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	**10.234.959.542.506**	**15.019.471.247.141**	**(31,86)**

Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri (Neto) tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp18.002.517.099.833,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok PDN sebesar Rp7.767.557.557.327,00. Rincian pemberi Pinjaman Dalam Negeri baik yang berasal dari BUMN dan Perusahaan Daerah, termuat dalam tabel berikut:

(dalam rupiah)

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN dan Perusahaan Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun) %
Bank DKI	604.364.138.951	1.473.045.365.447	(58,97)
PT. Bank Mandiri Tbk	14.803.772.635.157	16.924.459.665.665	(12,53)
PT. BNI (Persero)	2.322.806.667.025	836.555.462.175	177,66
PT. BTN (Persero)	271.573.658.700	888.592.866.465	(69,44)
Jumlah	**18.002.517.099.833**	**20.122.653.359.752**	**(10,54)**

Pada Tahun 2025, penarikan pinjaman berasal dari BUMN, yaitu Bank Mandiri, PT. BNI dan PT. BTN dan Perusahaan Daerah yaitu Bank DKI. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri serta beberapa kegiatan pada BIN.

B.2.4.1.7. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah (Neto)

Realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun 2025 adalah sebesar Rp59.553.017.350.028,00 atau 38,55 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp154.501.300.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.220.424.668.363,00 atau 34,33 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp44.332.592.681.665,00.

Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun 2025 sebesar Rp59.553.017.350.028,00 terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp14.121.986.879.370,00
2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp73.675.004.229.398,00

Rincian penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	KMK No. 235, KMK No. 286, KMK No. 359, dan KMK No. 385 Tahun 2025	DIPA TA 2025	Realisasi Tahun 2025	%***
PMN/Dana Investasi Pemerintah	**151.449.355.478.000**	**73.548.246.498.000**	**59.553.017.350.028**	**80,97**
Penerimaan Pembiayaan	**-**	**-**	**14.121.986.879.370**	**-**
Penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK	-	-	3.981.138.401.573	-
Penerimaan pembiayaan dari UAKPA LMAN	-	-	9.462.227.428.871	-
Penerimaan pembiayaan dari UAKPA BP BUMN	-	-	533.958.333.334	-
Penerimaan Pembiayaan dari UAKPA BLU BPDLH Mangrove	-	-	144.662.715.592	-
Pengeluaran Pembiayaan	**151.449.355.478.000**	**73.548.246.498.000**	**73.675.004.229.398**	**100,17**
Investasi kepada BUMN dan BLU*	21.591.537.793.000	19.004.003.498.000	19.004.003.498.000	100
Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	1.780.700.000.000	1.768.200.000.000	1.894.957.731.398	107,17
Investasi Pemerintah oleh BUN Non-Permanen**	74.776.043.000.000	52.776.043.000.000	52.776.043.000.000	100
Investasi Lainnya	53.301.074.685.000	-	-	-
Total	**151.449.355.478.000**	**73.548.246.498.000**	**59.553.017.350.028**	**80,97**

**) Termasuk alokasi yang berasal dari Saldo Kas BLU sesuai KMK No. 359 dan KMK No. 378. Namun tidak termasuk alokasi pada BLU LPDP yang dilaporkan pada pos Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.*

***) Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen) dialokasikan pada KMK No. 235 dan KMK No. 286* Tahun 2025.

****) Persentase realisasi terhadap DIPA*

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari PMN/Dana Investasi Pemerintah tahun 2025 sebesar Rp14.121.986.879.370,00. Penerimaan ini berasal dari UAP DJPK, UAKPA BLU LMAN, UAKPA Kementerian BUMN, dan UAKPA BLU BPDLH dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari UAP DJPK Tahun 2025 sebesar Rp3.981.138.401.573,00 terdiri dari pengembalian pokok pinjaman melalui mekanisme pemotongan DAU bulan Januari-Desember 2025 sebesar Rp3.973.110.242.883,00 dan Pengembalian Dana Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dari PT SMI sebesar Rp8.028.158.690,00. Sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah TA 2020 dan TA 2021 yang dikembalikan oleh Pemerintah Daerah ke PT SMI sebagai bentuk pengembalian dana pinjaman yang telah ditarik oleh pemerintah daerah masing-masing sebesar Rp7.402.362.791,00 dan sebesar Rp625.795.899,00.

b. Realisasi Penerimaan pembiayaan yang berasal dari UAKPA BP BUMN adalah sebesar Rp533.958.333.334,00 berasal dari penyetoran ke Kas Negara atas Pokok Pinjaman IP PEN PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp473.958.333.334,00 dan atas Pokok Pinjaman IP PEN PTPN III sebesar Rp60.000.000.000,00.

c. Realisasi Penerimaan pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2025 yang berasal dari UAKPA BLU LMAN adalah sebesar Rp9.462.227.428.871,00. Nilai tersebut merupakan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah terbit SP2D pengesahan belanja modal. Nilai pengesahan belanja modal adalah sebesar total pengeluaran Dana Jangka Panjang oleh LMAN pada tahun 2025 sebelum dikurangi dengan retur Dana Jangka Panjang yang mengatribusi pengeluaran sebelum tahun 2025. Rincian pengesahan tersebut per jenis PSN adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis PSN	Kementerian	Luas Tanah (m2)	Nominal
Proyek Air Baku	PUPR	155.263	63.958.751.028
Proyek Bendungan	PUPR	4.170.928	561.523.622.793
Proyek Irigasi	PUPR	133.572	5.344.399.110
Proyek Ibu Kota Nusantara	PUPR	1.914.699	890.410.215.140
Proyek Jalan Tol	PUPR	8.606.930	7.637.586.581.875
Proyek Ibu Kota Nusantara	OIKN	322.149	116.194.248.528
Proyek Perkeretaapian	Perhubungan	147.857	187.209.670.397
Jumlah		**15.451.398**	**9.462.227.428.871**

d. Realisasi penerimaan pembiayaan atas pengesahan belanja BRGM atas pengelolaan dana rehabilitasi mangrove tahun 2025 sebesar Rp144.662.715.592,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove, kegiatan rehabilitasi mangrove dilaksanakan oleh BRGM dengan menggunakan dana yang disalurkan melalui BLU BPDLH. BRGM menggunakan mekanisme pengesahan belanja atas beban DIPA Kementerian/Lembaga (K/L), sedangkan BLU BPDLH dalam mencairkan dana dari RKUN menggunakan mekanisme Bagian Anggaran BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari PMN/Dana Investasi Pemerintah tahun 2025 sebesar Rp73.675.004.229.398,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp6.453.986.605.876,00 atau 10,67 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp67.221.017.623.522,00. Dalam APBN tahun anggaran 2025 Arah kebijakan pembiayaan investasi Tahun 2025 ditujukan untuk: 1 meningkatkan efektivitas PMN untuk mendukung agenda Pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal; 2 menjaga efektivitas Pembiayaan Investasi; 3 mendorong penguatan SMV dan SWF serta sinergi bersama BUMN, BLU dan badan hukum lainnya; 4 mendorong peran BLU dan BUMN sebagai *agent of development* dan dukungan pembangunan melalui skema KPBU; 5 meningkatkan kontribusi BLU dan BUMN pada penerimaan negara; serta 6 mendukung pengembangan pasar keuangan/pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan.

Pemerintah telah menetapkan rincian alokasi pembiayaan investasi melalui KMK No. 49 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah 999.03 Tahun Anggaran 2025 yang terakhir diubah dengan KMK No. 385 Tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan KMK sebagai berikut:

a. KMK No. 286 Tahun 2025 Penetapan Alokasi Anggaran Pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah 999.03 Yang Bersumber Dari Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025, yang merupakan alokasi untuk Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
b. KMK No. 359 Tahun 2025 tentang Penetapan Alokasi Anggaran pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah 999.03 yang Bersumber dari Saldo Kas Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Tahun Anggaran 2025.
c. KMK No. 378 Tahun 2025 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah 999.03 yang Bersumber dari Saldo Kas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.

Namun atas alokasi yang tertuang dalam ketiga KMK dimaksud, hanya alokasi sesuai KMK No. 359 Tahun 2025 yang sampai dengan Desember 2025 dapat dilakukan realisasi karena telah terdapat dokumen pelaksanaan anggaran DIPA. Rincian realisasi untuk masing-masing KPA berdasarkan alokasi dijelaskan dalam tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	KMK No. 235, KMK No. 286, dan KMK No. 359 Tahun 2025	DIPA TA 2025	Realisasi Tahun 2025
Investasi kepada BUMN dan BLU*	**21.591.537.793.000**	**19.004.003.498.000**	**19.004.003.498.000**
KPA Satker Dit KND DJKN	6.684.022.705.000	6.684.022.705.000	6.684.022.705.000
KPA Satker BP BUMN	4.773.000.000.000	4.773.000.000.000	4.773.000.000.000
KPA Satker BLU LMAN KMK 359	7.546.980.793.000	7.546.980.793.000	7.546.980.793.000
KPA Satker BLU LPMUKP KMK 378	100.000.000.000	-	-
Investasi kepada BUMN dan BLU	2.487.534.295.000	-	-
Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	**1.780.700.000.000**	**1.902.337.169.000**	**1.894.957.731.398**
KPA Satker Dit KMKB	1.780.700.000.000	1.902.337.169.000	1.894.957.731.398
Investasi Pemerintah oleh BUN Non-Permanen**	**74.776.043.000.000**	**52.776.043.000.000**	**52.776.043.000.000**
KPA Satker Dit SMI	74.776.043.000.000	52.776.043.000.000	52.776.043.000.000
Investasi Lainnya	**53.301.074.685.000**	**-**	**-**
Pembiayaan Pendidikan	53.301.074.685.000	-	**-**
Cadangan Pembiayaan Investasi	-	-	**-**
Total	**151.449.355.478.000**	**73.682.383.667.000**	**73.675.004.229.398**

* Tidak termasuk alokasi pada BLU LPDP yang dilaporkan pada pos Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.
** Terdapat Investasi Pemerintah oleh BUN Non-Permanen yang dialokasikan pada KMK No. 235 dan KMK No. 286 Tahun 2025

a. Investasi kepada BUMN dan BLU

Realisasi investasi kepada BUMN dan BLU sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp19.004.003.498.000,00 atau 100,00 persen dari nilai yang dialokasikan dalam DIPA. Investasi kepada BUMN dan BLU dialokasikan dalam KMK No. 49 Tahun 2025 jo. KMK No. 385 Tahun 2025, KMK No. 359 Tahun 2025, dan KMK No. 378 Tahun 2025. Total alokasi Investasi kepada BUMN dan BLU sesuai ketiga KMK tersebut adalah sebesar Rp21.591.537.793.000,00. Namun atas alokasi tersebut, tidak seluruhnya terealisasi dikarenakan masih terdapat alokasi yang belum dirinci penerima investasinya. Selain itu, terdapat juga alokasi yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbit dokumen pelaksanaan anggarannya DIPA sehingga tidak dapat direalisasikan.

Adapun rincian alokasi yang telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	KMK No. 235, KMK No. 286, dan KMK No. 359 Tahun 2025	DIPA TA 2025	Realisasi Tahun 2025
Investasi kepada BUMN dan BLU*	21.591.537.793.000	19.004.003.498.000	19.004.003.498.000
KPA Satker Dit KND DJKN	6.684.022.705.000	6.684.022.705.000	6.684.022.705.000
PMN kepada PT SMF Persero	6.684.022.705.000	6.684.022.705.000	6.684.022.705.000
KPA Satker BP BUMN	4.773.000.000.000	4.773.000.000.000	4.773.000.000.000
PMN kepada BPI Danantara untuk diteruskan kepada: 1.PT KAI Persero 2.PT INKA Persero 3.PT PELNI Persero	4.773.000.000.000	4.773.000.000.000	4.773.000.000.000
KPA Satker BLU LMAN KMK 359	7.546.980.793.000	7.546.980.793.000	7.546.980.793.000
KPA Satker BLU LPMUKP KMK 378	100.000.000.000	-	-
Investasi kepada BUMN dan BLU	2.487.534.295.000	-	-

** Tidak termasuk alokasi pada BLU LPDP yang dilaporkan pada pos Dana Pengembangan Pendidikan Nasional*

1) Realisasi Investasi kepada BUMN dan BLU yang dianggarkan pada KPA Satker Direktorat KND DJKN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.684.022.705.000,00 atau 100,00 persen dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA. Nilai tersebut juga dialokasikan dalam KMK No. 49 Tahun 2025 jo. KMK No. 385 Tahun 2025. PMN kepada PT SMF Persero tersebut ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah berupa penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan guna menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2025.

2) Realisasi Investasi kepada BUMN dan BLU yang dianggarkan pada KPA Satker BP BUMN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.773.000.000.000,00 atau 100,00 persen dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA. Nilai tersebut juga dialokasikan dalam KMK No. 49 Tahun 2025 jo. KMK No. 385 Tahun 2025. Realisasi tersebut merupakan PMN kepada BPI Danantara untuk diteruskan kepada PT KAI Persero, PT INKA Perseo, dan PT PELNI Persero, dengan penjelasan sebagai berikut:

   a) PMN yang diteruskan oleh BPI Danantara kepada PT KAI Persero adalah sebesar Rp1.800.000.000.000,00 yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah berupa penyediaan sarana perkeretaapian berupa kereta rel listrik untuk meningkatkan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat, sesuai Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2025.

   b) PMN yang diteruskan oleh BPI Danantara kepada PT INKA Persero adalah sebesar Rp473.000.000.000,00 yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah berupa peningkatan kapasitas produksi guna penyediaan sarana perkeretaapian termasuk kereta rel listrik dalam rangka mendukung penyediaan sarana perkerataapian dan revitalisasi industri perkeretaapian dalam negeri, sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2025.

   c) PMN yang diteruskan oleh BPI Danantara kepada PT INKA Persero adalah sebesar Rp2.500.000.000.000,00 yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah berupa penyediaan kapal penumpang dalam rangka mendukung konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah serta memperkuat armada nasional melalui peremajaan kapal dan penyediaan angkutan laut penumpang kelas ekonomi, sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2025.

3) Realisasi Investasi kepada KPA BLU LMAN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.546.980.793.000,00 atau 100 persen dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA. Nilai tersebut juga dialokasikan dalam KMK No. 359 Tahun 2025. Nilai tersebut bersumber dari saldo kas BLU LMAN untuk menambah saldo dana jangka panjang.

4) Realisasi Investasi kepada BUMN dan BLU yang dianggarkan pada KPA BLU LPMUKP sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau atau tidak ada realisasi dari alokasi yang telah dianggarkan dalam KMK 378 Tahun 2025. Alokasi tersebut tidak dapat direalisasikan karena sampai dengan 31 Desember 2025 belum terdapat dokumen pelaksanaan anggaran DIPA.

Selain itu, terdapat alokasi investasi kepada BUMN dan BLU yang dianggarkan dalam KMK No. 49 Tahun 2025 jo. KMK No. 385 Tahun 2025 yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp2.487.534.295.000,00 karena sampai dengan 31 Desember 2025 belum terdapat rincian penerima investasi.

b. Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional

Realisasi investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.894.957.731.398,00 atau sebesar 99,61 persen dari DIPA. Nilai Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional untuk membayar komitmen pemerintah pada *Islamic Development Bank* IsDB, *International Fund for Agricultural Development* IFAD, dan *International Development Association* IDA.

Rincian investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	KMK No. 49 jo KMK 385 Tahun 2025	DIPA TA 2025	Realisasi Tahun 2025
Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI	1.780.700.000.000	1.902.337.169.000	1.894.957.731.398
KPA Satker Dit. KMKB DJSPSK	1.780.700.000.000	1.902.337.169.000	1.894.957.731.398
Islamic Development Bank (IsDB)	1.534.150.000.000	1.649.665.669.000	1.642.045.731.398
International Fund for Agricultural Development (IFAD)	45.300.000.000	48.831.000.000	49.068.000.000
International Development Association (IDA)	188.750.000.000	203.840.500.000	203.844.000.000
International Rubber Consortium Limited (IRCo)	12.500.000.000	-	-

c. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen)

Realisasi Investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen) sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp52.776.043.000.000,00 atau 100,00 persen dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA. Adapun nilai Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen) yang dialokasikan dalam KMK No. 49 Tahun 2025 jo. KMK No. 385 Tahun 2025 dan KMK No. 286 Tahun 2025 adalah sebesar Rp74.776.043.000.000,00. Rincian realisasi Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen) sampai dengan 31 Desember 2025 dijelaskan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	KMK No. 49 jo KMK No. 385 Tahun 2025 dan KMK No. 286 Tahun 2025	DIPA TA 2024	Realisasi Tahun 2025
Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen)	74.776.043.000.000	52.776.043.000.000	52.776.043.000.000
KPA Satker Dit SMI DJPb	74.776.043.000.000	52.776.043.000.000	52.776.043.000.000
Program FLPP	35.200.000.000.000	29.200.000.000.000	29.200.000.000.000
Investasi kepada Perum BULOG	22.076.043.000.000	22.076.043.000.000	22.076.043.000.000
Investasi kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
Investasi untuk Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/ Keluarahan Merah Putih*	16.000.000.000.000	-	-

**) Investasi untuk Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/ Keluarahan Merah Putih dialokasikan dalam KMK No. 286* Tahun 2025

Terdapat revisi pada DIPA KPA Satker Direktorat SMI DJPb berupa:

1) Revisi pengurangan pagu anggaran untuk alokasi dana Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebesar Rp16 triliun yang disertai dengan pengurangan rincian output. Hal ini dikarenakan perubahan skema investasi Pemerintah untuk KDMP/KKMP.
2) Revisi pengurangan pagu anggaran untuk alokasi dana Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp6 triliun yang disertai dengan pengurangan rincian output berupa rumah yang dibiayai sebesar 50.000 unit rumah, dari 350.000 unit rumah menjadi 300.000 unit rumah. Hal ini dikarenakan berdasarkan evaluasi penyaluran sampai dengan triwulan III tahun 2025 permintaan terhadap KPR FLPP tidak meningkat sesuai dengan proyeksi.

Realisasi investasi untuk program FLPP dan Perum Bulog dilaksanakan melalui mekanisme Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) kepada BP Tapera dan Perum Bulog selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP).

1) Realisasi Investasi kepada *Islamic Development Bank* (IsDB) sebesar Rp1.642.045.731.398,00.
2) Realisasi Investasi kepada *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar Rp49.068.000.000,00.
3) Realisasi Investasi kepada *International Development Association* (IDA) sebesar Rp203.844.000.000,00.
4) Realisasi Investasi Klaster Kerja Sama Internasional KPA Satker BLU LDKPI adalah sebesar Rp38.615.865.000,00.

d. Investasi Lainnya

Realisasi investasi lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat realisasi. Alokasi yang terdapat pada Investasi Lainnya sesuai KMK No. 49 Tahun 2025 jo. KMK No. 385 Tahun 2025 adalah sebesar Rp53.301.074.685.000,00 dan bersifat Cadangan, yang terdiri dari Pembiayaan Pendidikan dan Cadangan Pembiayaan Investasi.

Pembiayaan Pendidikan bersifat Cadangan, dan dapat direalisasikan apabila terdapat kebutuhan antara lain melalui realokasi dari pos Cadangan pembiayaan Pendidikan ke pos Dana Abadi di BidangPendidikan kepada BLU terkait kebutuhan Dana Abadi Pendidikan (DAP) (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Untuk

tahun 2025 terdapat realokasi dari Pembiayaan Pendidikan menjadi DAP untuk kebutuhan Sekolah Unggul Garuda sebesar Rp1.698.925.315.000,00.

Sementara Cadangan Pembiayaan Investasi, merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk mengakomodasi rencana pembiayaan investasi pada BUMN dan/atau lembaga/badan lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu. Alokasi tersebut dapat digunakan setelah memperoleh hasil pemantauan kesiapan dan progres pelaksanaan kinerja BUMN dan/atau lembaga/badan lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu.

B.2.4.1.8. Pengeluaran Kewajiban Penjaminan

Realisasi Pengeluaran Kewajiban Penjaminan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat realisasi. Pada tahun 2025 Pemerintah tidak menganggarkan dana kewajiban penjaminan. Sementara pada tahun 2024, kewajiban penjaminan telah terealisasi sebesar Rp1.458.986.000.000,00 yang digunakan untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional dan Dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan.

B.2.4.1.9. Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Realisasi Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Tahun 2025 adalah sebesar Rp26.698.925.315.000,00. Pembiayaan untuk Pendidikan pada tahun 2025 dialokasikan melalui pos investasi kepada BUMN dan BLU serta investasi lainnya. Nilai tersebut direalisasikan kepada BLU LPDP yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan, untuk Dana Abadi Pendidikan (DAP) (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian (DAPL), Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB). Sementara pada tahun 2024 Pemerintah telah merealisasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp15.000.000.000.000,00.

Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola LPDP sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 meliputi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Dana Abadi Penelitian (DAPL), Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB). Total akumulasi pokok dana abadi per tahun 2025 adalah sebesar Rp180.806.625.315.000,00.

Adapun rincian akumulasi pencairan Dana Abadi di Bidang Pendidikan disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Akumulasi sd 31 Desember 2024	Pencairan TA 2025	Akumulasi sd 31 Desember 2025
DAP	126.117.700.000.000	23.698.925.315.000	149.816.625.315.000
DAPL	12.990.000.000.000	1.000.000.000.000	13.990.000.000.000
DAPT	10.000.000.000.000	1.000.000.000.000	11.000.000.000.000
DAKB	5.000.000.000.000	1.000.000.000.000	6.000.000.000.000
Jumlah	**154.107.700.000.000**	**26.698.925.315.000**	**180.806.625.315.000**

B.2.4.1.10. Pembiayaan Lain-Lain

Realisasi Pembiayaan Lain-Lain Tahun 2025 adalah sebesar Rp183.732.831.967,00 yang berasal dari penerimaan pembiayaan atas pemberian pinjaman dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo sebagai pengembalian sebagian Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo sebesar Rp183.732.831.967,00.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri Tahun 2025 adalah sebesar Rp85.906.506.063.215,00 atau sebesar 67,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp128.130.642.630.000,00. Dengan demikian realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.404.648.205.397,00 atau 6,94 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp92.311.154.268.612,00.

Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman tunai dan (ii) penarikan pinjaman kegiatan.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2025 adalah sebesar Rp181.592.359.658.866,00 atau sebesar 83,88 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp216.498.528.421.000,00. Dengan demikian realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.827.009.139.077,00 atau 1,02 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp179.765.350.519.789,00.

Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman tunai dan (ii) penarikan pinjaman kegiatan.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Tunai

Realisasi Pinjaman tunai Tahun 2025 adalah sebesar Rp59.315.481.801.800,00 atau sebesar 74,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp80.000.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp713.447.774.707,00 atau 1,19 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp60.028.929.576.507,00. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang tentang APBN Tahun 2025 dimana terdapat opsi fleksibilitas pembiayaan utang sehingga pemerintah dapat merubah komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal, dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen utang. Pinjaman Tunai merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat disesuaikan berdasarkan fleksibilitas pembiayaan utang tersebut. Detail realisasi penarikan pinjaman tunai termuat dalam tabel berikut:

No.	Lender	MTU	Jumlah Valas	Jumlah Rupiah	Nama Program
1	ADB	EUR	459.644.000	7.920.677.336.800	PIFIP 3
		JPY	73.465.000.000	7.917.815.265.500	CITA SUBPROGRAM 3
		JPY	72.725.000.000	7.838.060.507.500	DRM SUBPROGRAM 1
2	FRANCE	EUR	150.000.000	2.885.059.500.000	PBL-ASET
3	GERMANY	EUR	200.000.000	3.918.668.000.000	ASET *Sub-Programme* I
4	IBRD	EUR	1.386.600.000	26.453.721.192.000	IPSI DPL
		USD	145.000.000	2.381.480.000.000	IDRFI
Jumlah				**59.315.481.801.800**	

Pinjaman tunai dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *underlying* dalam proses pencairan pinjaman. Untuk pinjaman tunai ini, setelah terpenuhinya *policy matrix* akan dilakukan negosiasi dan penandatanganan *loan agreement*, selanjutnya akan dilakukan pencairan. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *modalitas Program for Result* (PforR) *dan Investment Project Financing with Performance Based Conditions (IPF with PBC's)* dimana untuk PfR pengukuran capaian menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLIs. DLIs merupakan

indikator-indikator berupa target-target yang harus dicapai oleh *executing agency/implementing agency*. Dalam proses pencairan pinjaman, DLIs terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Independent Verification Agency (IVA) yang disepakati antara Pemerintah dan *lender* dalam beberapa pinjaman tunai yang ditunjuk adalah BPKP. Hasil verifikasi tersebut akan dijadikan dasar penarikan pinjaman tunai. Untuk pinjaman dengan modalitas IPF *with* PBC seperti pinjaman *Mangrove for Coastal Resilience* (M4CR) dilakukan penarikan setelah target PBC dicapai oleh *executing agency/implementing agency*. Daftar pinjaman tunai dengan menggunakan *policy matrix* dan DLIs/PBC untuk penarikan pinjaman tunai tahun 2025.

No.	*Lender*	Program	*Policy Matrix*/Output/Pilar	
1	*ADB*	*Promoting Innovative Financial Inclusion Program 3 (PBL)*	*a.*	*Tools and infrastructure for financial inclusion*
			b.	*Access to finance by micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) and marginalized groups including women and youth*
			c.	*Supervision and consumer protection measures for responsible financial inclusion*

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Kegiatan

Realisasi penarikan pinjaman kegiatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp122.276.877.857.066,00 atau sebesar 89,58 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp136.498.528.421.000,00. Dengan demikian realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.540.456.913.784,00 atau 2,12 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp119.736.420.943.282,00. Pinjaman kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2025 adalah sebesar Rp95.685.853.595.651,00 atau 108,28 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp88.367.885.791.000,00. Atas hal tersebut, realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.231.657.344.474,00 atau 9,41 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp87.454.196.251.177,00. Realisasi tersebut lebih besar dari yang dianggarkan dalam APBN disebabkan oleh adanya penguatan kurs pada saat transaksi pembayaran. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2025.

Realisasi pengeluaran pembiayaan Utang Luar Negeri terdiri dari:

1. Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Tunai
   Realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman tunai sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp50.109.358.231.275,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Kegiatan
   Realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman kegiatan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp45.576.495.364.376,00.

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)%
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Tunai	50.109.358.231.275	47.109.598.460.079	6,37
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Kegiatan	45.576.495.364.376	40.344.597.791.098	12,97
Jumlah	**95.685.853.595.651**	**87.454.196.251.177**	**9,41**

B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran – SiKPA

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA Tahun 2025 sebesar Rp1.022.426.319.391.692,00 atau 81,77 persen dari jumlah yang dianggarkan Tahun 2025 sebesar Rp1.250.428.617.629.000,00. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA merupakan penjumlahan dari defisit anggaran sebesar Rp1.765.157.779.435.556,00 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp742.731.460.043.864,00. Atas hal tersebut, realisasi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp183.549.296.816.757,00 atau 15,22 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.205.975.616.208.449,00.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

B.3.1. BA BUN 999.01

1. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah merespon kejadian luar biasa pandemi *covid-19* dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan *covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN). Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi *covid-19*, yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan KB I tahun 2020 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020).

   Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II tahun 2020 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020). Sesuai SKB II, BI membeli SBN yang diperuntukkan untuk *Public Goods* (PG) dan menanggung seluruh beban yang timbul sampai dengan SBN tersebut jatuh tempo. Selain itu, BI dan Pemerintah juga berbagi beban (*burden sharing*) biaya penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan *Non-Public Goods* (NPG). Penerbitan SBN untuk pemenuhan pembiayaan PG dan NPG sesuai SKB II hanya dilakukan pada tahun 2020, yaitu melalui 8 kali transaksi *private placement* dengan nilai Rp397,56 triliun untuk PG dan 9 kali lelang dengan nilai Rp177,03 triliun untuk NPG.
   Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan, diantaranya kondisi pandemi yang masih berlanjut dan munculnya varian baru virus Covid-19, konsumsi masyarakat yang masih terbatas, belum pulihnya aktivitas dunia usaha, serta masih rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan. Menyebarnya varian delta mengharuskan Pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan berdampak pada peningkatan pembiayaan utang Pemerintah. Peningkatan pembiayaan tersebut utamanya untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta upaya untuk pemulihan ekonomi tetap *on track*.
   Merespon kondisi tersebut, pada bulan Agustus 2021, Pemerintah kembali melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III (Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang skema dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) melalui penerbitan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan pembelian di Pasar perdana oleh BI). Perjanjian kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah, serta pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia, serta dasar mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan

Bank Indonesia guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan. Besaran nilai SBN sesuai kesepakatan adalah sebesar Rp439 triliun, yang direalisasikan tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun.

SBN yang diterbitkan pemerintah sesuai SKB II dan SKB III, khususnya dengan seri VR yang dibeli di pasar perdana, bersifat *tradable* dan *marketable* sehingga dapat dipergunakan BI untuk pelaksanaan operasi moneter. Dengan meningkatnya kepemilikan SBN *tradable* oleh BI maka kondisi ini sejalan dengan kebijakan untuk penggunaan SBN dalam operasi moneter, yang pada akhirnya dapat mendorong likuiditas pasar SBN.

SBN seri VR yang dibeli BI di pasar perdana dalam rangka SKB II dan SKB III mulai jatuh tempo pada tahun 2025. Sejalan dengan pelaksanaan operasi moneter tahun 2025, Bank Indonesia melakukan pembelian SBN di pasar sekunder dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (*bilateral debt switch*) dengan Pemerintah. Pelaksanaan *debt switch* dilakukan melalui pertukaran antara SBN yang jatuh tempo tahun 2025 dengan SBN *tradable* dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar. SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiscal Pemerintah. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui penerbitan SBN dan operasi moneter diharapkan dapat menjaga stabilitas pasar keuangan dan meminimalkan terjadinya disrupsi pada pasar SBN akibat konsentrasi jatuh tempo pada periode tertentu.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang beban/belanja bunga sebagaimana tujuan skema *burden sharing*. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban belanja bunga yang ditanggung Pemerintah. Pada Tahun 2025 rincian kontribusi Bank Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1. Porsi Pemerintah dan BI dalam skema *burden sharing*

(dalam rupiah)

No	Bulan	Porsi Bank Indonesia	Porsi Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	Januari	1.132.952.450.000	-	1.132.952.450.000
2	Februari	2.356.537.400.000	-	2.356.537.400.000
3	Maret	3.098.872.010.000	-	3.098.872.010.000
4	April	1.149.950.040.000	-	1.149.950.040.000
5	Mei	2.334.671.640.000	-	2.334.671.640.000
6	Juni	2.911.907.780.000	-	2.911.907.780.000
7	Juli	1.089.441.110.000	-	1.089.441.110.000
8	Agustus	2.248.346.315.000	-	2.248.346.315.000
9	September	2.833.816.130.000	-	2.833.816.130.000
10	Oktober	1.008.629.210.000	-	1.008.629.210.000
11	November	1.602.205.880.000	-	1.602.205.880.000
12	Desember	2.003.262.670.000	-	2.003.262.670.000
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG		**23.770.592.635.000**	**-**	**23.770.592.635.000**
B. Non Public Goods				
1	Juni	120.282.260.230	4.886.935.646.619	5.007.217.906.849
2	Desember	463.644.880.132	4.354.050.707.129	4.817.695.587.260
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK NPG		**583.927.140.362**	**9.240.986.353.748**	**9.824.913.494.109**

No	Bulan	Porsi Bank Indonesia	Porsi Pemerintah	Total
C. Cluster A				
1	Januari	358.585.173.150	-	358.585.173.150
2	Februari	144.357.777.900	-	144.357.777.900
3	Maret	1.128.362.590.030	-	1.128.362.590.030
4	April	367.529.573.700	-	367.529.573.700
5	Mei	143.627.854.320	-	143.627.854.320
6	Juni	1.060.285.095.340	-	1.060.285.095.340
7	Juli	344.348.486.700	-	344.348.486.700
8	Agustus	138.465.623.700	-	138.465.623.700
9	September	1.056.819.166.990	-	1.056.819.166.990
10	Oktober	336.366.319.950	-	336.366.319.950
11	November	117.825.495.480	-	117.825.495.480
12	Desember	834.069.282.500	-	834.069.282.500
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK CLUSTER A		**6.030.642.439.760**	**-**	**6.030.642.439.760**
TOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG, NPG DAN CLUSTER A		**30.385.162.215.122**	**9.240.986.353.748**	**39.626.148.568.869**

2. Sampai dengan Tahun 2025, pagu dan realisasi SBSN proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu dan Realisasi SBSN Proyek

(dalam rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	Pagu	Realisasi
1	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	419.597.528.000	419.205.364.594
2	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.072.993.101.000	1.072.993.101.000
3	KEMENTERIAN PERTANIAN	247.842.200.000	237.723.650.200
4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	37.742.000.000	37.008.397.896
5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.931.391.478.000	1.926.677.297.238
6	KEMENTERIAN AGAMA	1.912.494.726.000	1.899.658.686.886
7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.914.973.000	25.831.972.825
8	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	648.537.199.000	646.440.532.948
9	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI & GEOFISIKA	61.000.000.000	60.148.753.970
10	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3.093.434.000	3.093.432.386
11	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	197.832.829.000	195.938.334.977
12	BADAN KEAMANAN LAUT	207.132.095.000	206.878.608.978
13	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINSTEK	669.684.762.000	438.024.604.784
14	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	7.008.322.414.000	6.480.980.977.883
	JUMLAH	**16.443.578.739.000**	**13.650.603.716.565**

Realisasi pelaksanaan SBSN proyek TA 2025 s.d 31 Desember 2025 adalah 83,01 persen (dari total alokasi termasuk lanjutan/luncuran). Secara umum, kinerja pelaksanaan SBSN proyek TA 2025 tersebut cukup baik namun terdapat beberapa proyek dengan alokasi besar yang akan diluncurkan pada tahun 2026 khususnya pada Kementerian Perhubungan.

3. Nilai realisasi proyek SBSN *Single Year Contract* (SYC) yang dilanjutkan pelaksanaannya dari tahun 2024 ke tahun 2025 per masing-masing Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Proyek SBSN SYC 2024 yang Dilanjutkan Pelaksanaannya ke 2025

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	Pagu	Realisasi
1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	174.787.248.000	146.049.326.120
2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET & TEKNOLOGI	57.901.453.000	48.815.887.600
3	KEMENTERIAN AGAMA	24.315.397.000	24.315.392.607
4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	57.303.614.000	57.303.610.301
	JUMLAH	**314.307.712.000**	**276.484.216.628**

4. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK nomor 75 tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Proyek yang Dibiayai melalui Penerbitan SBSN dalam hal terdapat sisa pekerjaan pada proyek SBSN tahun tunggal dan tahun jamak periode tahun terakhir dapat diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Nilai Proyek SBSN Tahun Akhir 2025 yang masih dalam proses Pemberian Kesempatan ke Tahun 2026 (per 29 Januari 2026) berdasarkan rekonsiliasi realisasi tahun 2025 antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga nilai pemberian kesempatan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Proyek SBSN Tahun Akhir 2025 yang masih dalam proses Pemberian Kesempatan ke Tahun 2026

(dalam rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	Pagu
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	40.039.300.170
2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	6.627.290.104
3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	35.724.382.427
4	KEMENTERIAN AGAMA	89.111.802.570
5	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.851.429.807
6	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3.119.040.000
7	BADAN KEAMANAN LAUT	47.627.922.143
8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	91.853.660.677
	JUMLAH	**316.954.827.898**

5. Berdasarkan data realisasi penarikan pinjaman Tahun 2025, masih terdapat NoD pada beberapa Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar Rp41.024.068.500,00 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang belum dapat dilakukan pengesahan karena ketidakcukupan pagu anggaran dan perlu dilakukan pengajuan revisi pagu aggaran oleh Kementerian/ Lembaga.

Tabel 5. Daftar K/L belum SP3 yang bersumber dari Pinjaman

(dalam rupiah)

No	Kementerian/ Lembaga	Nilai Rupian
A	Pinjaman Dalam Negeri	-
B	Pinjaman Luar Negeri	41.024.068.500
1	Kementerian Riset dan Teknologi	41.024.068.500
	Jumlah	**41.024.068.500**

6. Sampai dengan Tahun 2025, Direktorat Pengelolaan Kas Negara telah melakukan pengembalian dana *(refund)* kepada *Lender* sebesar Rp222.238.350.742,00 dikarenakan adanya *refund* administratif dan *refund ineligible*. Rincian *refund* termuat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. *Refund*

(dalam rupiah)

No.	*Loan Id*	Register	Kementerian Lembaga	Lender	Nilai Rupiah
1	20430000	1NF3PM6A	Kemen PU	IBRD	(21.352.208.197)
2	20432000	1CPUK3GA	Kemen PU	IBRD	(6.063.667.373)
3	20433000	1M1JWRAA	Kemen PU	IBRD	(21.686.608.579)
4	20434000	1BUY9N3A	Kemen ATR/BPN	IBRD	(1.191.387.528)
5	20437000	1INV2QU4A	Kemenag	IBRD	(47.315.549.840)
6	20439000	1CZ6CF2A	Kemendagri	IBRD	(44.474.468.002)

No.	*Loan Id*	Register	Kementerian Lembaga	Lender	Nilai Rupiah
7	20441000	178292YA	Kemen PU	IBRD	(11.255.381.890)
8	20600004	1HS4NF9A	Kemen PU	AIIB	(21.352.208.197)
9	20819000	191SRJYA	Kementan	IFAD	(5.128.077.822)
10	21245000	10883301	Kemen PU	ADB	(1.702.488.425)
11	21246000	10884001	Kemen PU	ADB	(287.971.060)
12	21252000	1RUX78CA	Kemen PU	ADB	(8.092.817.664)
13	21263000	175D7J1A	Kemendiktisainstek	ADB	(30.473.295.622)
14	21265000	17D37YEA	Kemen PU	ADB	(1.862.220.543)
JUMLAH					**(222.238.350.742)**

7. Penundaan Pembayaran kepada *Lender* Rusia

Akibat adanya sanksi pembatasan transaksi dan penutupan SWIFT terhadap entitas utama di Rusia, sejak 2022 Pemerintah Rusia menyampaikan kebijakan pemberian penangguhan pembayaran utang sementara untuk Pemerintah Indonesia. Untuk penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga periode Tahun 2025 adalah sebesar USD 19,05 Juta sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Penundaan Pembayaran kepada *Lender* Rusia

(dalam rupiah)

Loan Id	Mtu	Pokok	Bunga	Total
23903000	USD	2.380.000	64.472	2.444.472
23904000	USD	127.500	3.454	130.954
23906000	USD	4.590.000	308.818	4.898.818
23907000	USD	424.261	28.544	452.805
23908000	USD	9.690.000	1.433.003	11.123.003
Jumlah		**17.211.761**	**1.838.291**	**19.050.051**

Berdasarkan Surat resmi terbaru dari pihak *Ministry of Finance of Russian Federation*, rencana pembayaran utang luar negeri (ULN) PEMRI akan dilakukan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh perwakilan Rusia yang berdomisili di Indonesia, yaitu PT E-System Solutions Indonesia (ESS). Pembayaran akan dilakukan pada tahun 2026 sesuai tanggal yang disepakati pihak PEMRI dan Rusia menggunakan mata uang Rupiah ke rekening khusus (*escrow account*) milik PT ESS di salah satu Bank Himbara, yaitu Bank BNI.

Perwakilan Bank BNI telah mengonfirmasikan bahwa mereka telah sukses melakukan uji coba pembayaran (penny test) dari escrow account kepada pihak Rusia, dan saat ini masih menunggu konfirmasi kepastian dari Kementerian Keuangan RI dan Rusia. Kewajiban PEMRI akan berakhir setelah uang diterima di *escrow account* PT ESS dan pihak Rusia menerbitkan surat peryataan.

8. Program Pengelolaan Utang Negara

Pada tahun 2025, Program Pengelolaan Utang Negara mempunyai anggaran sebesar Rp1.506.336.706.131.000,00. Sampai dengan periode Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.427.460.410.758.610,00 atau 94,76 persen. Indikator dari capaian kinerja pada Program Pengelolaan Utang Negara diwujudkan dalam bentuk Indikator Kinerja Program (Persentase Pembayaran Kewajiban Utang) yang mempunyai target 400 dan teralisasi sebesar 400 atau 400 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Indikator Kinerja Program (Persentase Pembayaran Kewajiban Utang) sebesar 400. Program Pengelolaan Utang Negara terdiri atas satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang.

B.3.2. BA BUN 999.03

Program Investasi Pemerintah mempunyai anggaran dalam DIPA sebesar Rp100.381.308.982.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 *Audited* telah terealisasi sebesar Rp86.251.942.665.028,00 atau 85,92 persen. Realisasi pada Program Investasi Pemerintah ini mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun 2024 yang dialokasikan sebesar Rp97.880.003.732.000,00 dengan realisasi sebesar Rp60.791.578.681.665,00. Program ini memiliki 5 (lima) kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Investasi Pemerintah

Kegiatan Pengelolaan Investasi Pemerintah mempunyai anggaran sebesar Rp52.776.043.000.000,00 dan sampai dengan *Audited* 2025 telah terealisasi sebesar Rp52.776.043.000.000,00 atau 100 persen. Untuk *output* Rumah yang dibiayai capaian *output* sebanyak 278.868 unit rumah atau 93 persen dari target sebesar 300.000 unit rumah. Tahun 2024 diperiode yang sama capaian output sebanyak 200.000 unit rumah. Untuk *output* Investasi Pemerintah Non Permanen kepada Perum Bulog capaian *output* 100 persen dari target, sementara tahun 2024 tidak terdapat alokasi. Untuk *output* Investasi Pemerintah Non Permanen kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) capaian *output* satu layanan atau 100 persen dari target, sementara tahun 2024 tidak terdapat alokasi.

Adapun penjelasan setiap Rincian *Output* (RO) pada tahun 2025 sebagai berikut:

a. Rincian *Output* (RO) Rumah yang Dibiayai - Dana FLPP (Direktorat SMI, DJPb - 961671)

Penyaluran investasi Dana FLPP didasarkan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan BP Tapera Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Sebelumnya saldo Dana FLPP per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.596.006.813.852,00 dikelola oleh BLU PPDPP dan dicatat sebagai Investasi angka Panjang Non Permanen Lainnya Dana Bergulir. Pengalihan pengelolaan tersebut berdasarkan amanat UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 Pasal 34; PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64, PMK Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah; serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021 hal Penunjukan BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Nilai pembukaan saldo awal atas pengalihan dana FLPP sebesar Rp60.675.114.000.000,00 berdasarkan hasil reviu BPKP. Nilai pembukaan saldo tersebut didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021 dan nomor BAST07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bergulir FLPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah FLPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada Tahun 2025 telah disalurkan dana FLPP sebesar Rp29.200.000.000.000,00 atau 100 persen dari total yang dianggarkan dalam DIPA. Alokasi tersebut direalisasikan melalui mekanisme Rekening Investasi Bendahara Umum Negara kepada Operator Investasi

Pemerintah yaitu BP Tapera. Adapun *output* atas alokasi tersebut adalah untuk membiayai 300.000 unit rumah. Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi *output* yang telah dicapai adalah sebanyak 278.868 unit rumah atau 93 persen dari target yang telah ditetapkan.

Selain itu terdapat penyetoran imbal hasil dari dana FLPP pada Rekening Investasi BUN sebesar Rp777.202.873.734,00. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara, saldo pendapatan tersebut berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi Nomor ND-3/PB.4/2022 tentang Laporan Pemindahan Dana Dari Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) telah dipindahbukukan seluruhnya dari RIBUN ke RKUN dilaksanakan dalam rangka realisasi PNBP dari imbal hasil Investasi Pemerintah dan selanjutnya dari RKUN ke RIBUN Imbal Hasil.

b. Rincian *Output* (RO) Investasi Pemerintah Non Permanen kepada Perum Bulog (Direktorat SMI, DJPb - 961671)

Pada tahun 2025 Pemerintah melakukan investasi non-permanen kepada Perum Bulog sebesar Rp22.076.043.000.000,00 yang digunakan untuk pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar Rp16.576.043.000.000,00 dan pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebesar Rp5.500.000.000.000,00. Nilai tersebut disalurkan melalui mekanisme Rekening Investasi Bendahara Umum Negara kepada Perum Bulog selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.05/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Penunjukaan Perusahaan Umum BULOG sebagai Operator Investasi Pemerintah, Perum BULOG ditunjuk menjadi OIP dalam rangka penugasan Perum BULOG dalam Penyelenggaraan CPP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan pelaksanaan mandat Perum BULOG sesuai penugasan pemerintah.

c. Rincian *Output* (RO) Investasi Pemerintah Non Permanen kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Pada tahun 2025 Pemerintah melakukan investasi non-permanen kepada PT SMI (Persero) sebesar Rp1.500.000.000.000,00 yang digunakan untuk *repayment* PEN. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat pencairan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Kabupaten Badung yang terlebih dahulu menggunakan dana PT SMI untuk selanjutnya pada Januari 2026 dilakukan mekanisme reimbursement melalui Dana Operasional Investasi Pemerintah dengan total sebesar Rp257.602.899.546,00.

Dana Investasi Pemerintah yang ditempatkan pada PT SMI melalui mekanisme penugasan sebagai OIP berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-576/MK.06/2025 tanggal 29 Agustus 2025 hal Penunjukan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sebagai Operator Investasi Pemerintah.

2. Kegiatan Pengelolaan PMN kepada BUMN

Kegiatan Pengelolaan PMN kepada BUMN mempunyai anggaran sebesar Rp11.457.022.705.000,00 dan sampai dengan *Audited* 2025 telah terealisasi sebesar Rp11.457.022.705.000,00 atau 100 persen dari anggaran. Output untuk kegiatan tersebut adalah Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Serapan Anggaran PMN kepada BPI Danantara, seluruhnya telah terealisasi 100 persen dari target. Sementara pada tahun 2024 *output* dari kegiatan tersebut adalah Serapan Anggaran PMN kepada PT Hutama Karya (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Len Industri (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero), dan Serapan Anggaran PMN kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Adapun penjelasan setiap Rincian *Output* (RO) pada tahun 2025 sebagai berikut:

a. Rincian *Output* (RO) Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Direktorat KND – 977191)

Pada tahun 2025, terdapat alokasi pembiayaan investasi pada UAKPA KND DJKN sebesar Rp6.684.022.705.000,00 yang merupakan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF (Persero). Alokasi tersebut telah dicairkan seluruhnya kepada PT SMF (Persero) sesuai PP No. 54 Tahun 2025 yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah berupa penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan guna menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

b. Rincian *Output* (RO) Serapan Anggaran PMN PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI (Persero) (BP BUMN – 986917)

PMN yang diteruskan oleh BPI Danantara kepada PT KAI (Persero) adalah sebesar (Rp1.800.000.000.000,00) yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah berupa penyediaan sarana perkeretaapian berupa kereta rel listrik untuk meningkatkan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat, sesuai Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2025.

c. Rincian *Output* (RO) Serapan Anggaran PMN PT Industri Kereta Api (Persero)/PT INKA (Persero) (BP BUMN – 986917)

PMN yang diteruskan oleh BPI Danantara kepada PT INKA (Persero) adalah sebesar (Rp473.000.000.000,00) yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah berupa peningkatan kapasitas produksi guna penyediaan sarana perkeretaapian termasuk kereta rel listrik dalam rangka mendukung penyediaan sarana perkerataapian dan revitalisasi industri perkeretaapian dalam negeri, sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2025.

d. Rincian *Output* (RO) Serapan Anggaran PMN PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PT PELNI (Persero) (BP BUMN – 986917)

PMN yang diteruskan oleh BPI Danantara kepada PT PELNI (Persero) adalah sebesar (Rp2.500.000.000.000,00) yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah berupa penyediaan kapal penumpang dalam rangka mendukung konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah serta memperkuat armada nasional melalui peremajaan kapal dan penyediaan angkutan laut penumpang kelas ekonomi, sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2025.

3. Kegiatan Pengelolaan Investasi pada OI/LKI

Nilai Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional yang dialokasikan pada KMK No. 49 Tahun 2025 jo. KMK No. 385 Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.780.700.000.000,00 atas alokasi tersebut, telah dianggarkan dalam DIPA Satker Direktorat Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan (Dit. KMKB DJSPSK) sebesar Rp1.768.200.000.000,00.

Uraian	KMK No. 49 jo KMK 385 Tahun 2025	DIPA TA 2025	Realisasi 31 Desember 2025 *Unaudited*
Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI	**(1.780.700.000.000)**	**(1.768.200.000.000)**	**(1.894.957.731.398)**
KPA Satker Dit. KMKB DJSPSK	**(1.780.700.000.000)**	**(1.768.200.000.000)**	**(1.894.957.731.398)**
Islamic Development Bank (IsDB)	(1.534.150.000.000)	(1.534.150.000.000)	(1.642.045.731.398)
International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(45.300.000.000)	(45.300.000.000)	(49.068.000.000)
International Development Association (IDA)	(188.750.000.000)	(188.750.000.000)	(203.844.000.000)
International Rubber Consortium Limited (IRCo)	(12.500.000.000)	-	-

Investasi pada *International Rubber Consortium Limeited* (IRCo) tidak dianggarkan pada DIPA 2025 karena masih belum tercapai kesepakatan antara negara-negara anggota IRCo untuk melakukan penambahan investasi berdasarkan informasi dari Kementerian Perdagangan selaku Focal point Pemerintah Republik Indonesia pada IRCo. Sehubungan dengan informasi tersebut, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyepakati atas pembayaran Investasi kepada IRCo tidak dimasukkan pada PMK tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, anggaran pembiayaan Investasi Pemerintah pada LKI TA 2025 dapat dilakukan melebihi pagu sepanjang disebabkan oleh selisih kurs.

Kini proses revisi pengesahan anggaran tersebut telah selesai dilakukan sehingga pagu yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pagu yang telah dilakukan penyesuaian.

Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025		
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Angaran
1	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	48.831.000.000	49.068.000.000	100,49%
2	International Development Association (IDA)	203.840.500.000	203.844.000.000	100,00%
3	Islamic Development Bank (IsDB)	1.649.665.669.000	1.642.045.731.398	99,54%
	Jumlah Pembiayaan	**1.902.337.169.000**	**1.894.957.731.398**	**99,61%**

Revisi pengesahan anggaran BA BUN 999.03 telah dilaksanakan dengan diterbitkannya DIPA Revisi ke 02 Nomor SP DIPA- 999.03.1.984393/2025 tanggal 11 Maret 2026 dengan Digital Stamp DS:0740-2890-7761-7663. Dalam revisi pengesahan tersebut, pagu anggaran BA BUN 999.03 yang ditetapkan adalah sebesar Rp1.902.337.169.000,00. Angka tersebut mengacu pada angka pagu minus yang termuat dalam aplikasi SAKTI sehingga terjadi perbedaan antara pagu anggaran dengan realisasi pembayaran yang berdasarkan SP2D. Selain itu, ketika mengajukan revisi pagu pengesahan anggaran dengan berdasarkan angka berdasarkan realisasi SP2D, terjadi penolakan konsep / tidak dapat divalidasi karena sistem SAKTI masih membaca bahwa angka yang diinput berdasarkan realisasi SP2D tersebut masih dibawah pagu/ belum menutup pagu minus sehingga prosesnya tidak dapat dilanjutkan. Berdasarkan konfirmasi yang dihimpun dari beberapa pihak, termasuk diantaranya PIC yang mengurus Revisi Pengesahan sebelumnya serta pihak dari Direktorat APK, diperoleh informasi bahwa pagu yang diinput dalam revisi adalah pagu tertinggi pada aplikasi SAKTI agar aplikasi tidak mengunci, dapat divalidasi dan dilanjutkan proses ke tahap berikutnya. Proses revisi pengesahan telah dilakukan review oleh APIP dan Penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

4. Kegiatan Pembiayaan Investasi untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional

Kegiatan Pembiayaan Investasi untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional mempunyai anggaran sebesar Rp7.546.980.793.000,00 dan sampai dengan *Audited* 2025 telah terealisasi sebesar Rp7.546.980.793.000,00 atau 100% dari target. Realisasi output adalah sebesar 15.451.398 m2 atau 66% dari target. Sementara tahun 2024 adalah sebesar 35.897.234 m2.

Sesuai mandat yang diberikan dalam Perpres Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN, LMAN melakukan pendanaan atas Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2020 yang menggantikan Perpres 106 Tahun 2016 serta diterbitkan pula tata cara pendanaan lahan PSN pada PMK Nomor 139/PMK.06/2020. Berkaitan dengan konteks pelaporan keuangan atas aktivitas pendanaan pengadaan tanah PSN, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan kebijakan akuntansi melalui surat nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas

Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020.

Pada Tahun Anggaran 2025, LMAN memperoleh alokasi pembiayaan investasi dari APBN sebesar Rp7.546.980.793.000,00 yang bersumber dari saldo kas BLU sesuai KMK No. 359 Tahun 2025. Sampai dengan 31 Desember 2025, alokasi tersebut telah direalisasikan seluruhnya kepada BLU LMAN. Berdasarkan dokumen DIPA nomor SP DIPA-999.03.1.984125/2025, rincian output berupa tanah PSN yang dibiayai adalah sebanyak 23.373.800 m2.

Adapun besaran nilai pendanaan pada 31 Desember 2025 yang disahkan dengan perincian per jenis proyek adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis PSN	Kementerian	Luas Tanah (m^2)	Nominal
Proyek Air Baku	PUPR	155.263	63.958.751.028
Proyek Bendungan	PUPR	4.170.928	561.523.622.793
Proyek Irigasi	PUPR	133.572	5.344.399.110
Proyek Ibu Kota Nusantara	PUPR	1.914.699	890.410.215.140
Proyek Jalan Tol	PUPR	8.606.930	7.637.586.581.875
Proyek Ibu Kota Nusantara	OIKN	322.149	116.194.248.528
Jenis PSN	**Kementerian**	**Luas Tanah (m^2)**	**Nominal**
Proyek Perkeretaapian	Perhubungan	147.857	187.209.670.397
Jumlah		**15.451.398**	**9.462.227.428.871**

5. Kegiatan Pengelolaan Dana Pembangunan Pendidikan Nasional

Kegiatan Pengelolaan Dana Pembangunan Pendidikan Nasional mempunyai anggaran sebesar Rp26.698.925.315.000,00 dan sampai dengan *Audited* 2025 telah terealisasi sebesar Rp26.698.925.315.000,00 atau 100 persen dari target. Nilai tersebut berupa Penyaluran Dana Abadi Penelitian, Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan, Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Sementara tahun 2024 hanya untuk Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dan telah terealisasi 100 persen.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah satuan kerja yang berdiri tanggal 28 Desember 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ditetapkan sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Sesuai peraturan menteri keuangan tersebut, LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025 Pemerintah melakukan investasi non-permanen sebesar Rp26.698.925.315.000,00 yang alokasikan kepada BLU LPDP. Sampai dengan 31 Desember

2025, akumulasi DPPN adalah sebesar Rp180.806.625.315.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	Pencairan TA 2025	31 Desember 2025
DAP	126.117.700.000.000	23.698.925.315.000	149.816.625.315.000
DAPL	12.990.000.000.000	1.000.000.000.000	13.990.000.000.000
DAPT	10.000.000.000.000	1.000.000.000.000	11.000.000.000.000
DAKB	5.000.000.000.000	1.000.000.000.000	6.000.000.000.000
Jumlah	**154.107.700.000.000**	**26.698.925.315.000**	**180.806.625.315.000**

B.3.3. BA BUN 999.04

Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran 2025

1. PT PLN (Persero)

Terdapat 4 (empat) kegiatan/proyek yang masih dalam masa penarikan dan mendapat pembiayaan dari DIPA BA BUN 999.04, yaitu:

(dalam rupiah)

No.	Nama Proyek	Lokasi Proyek	Kegiatan	Keterangan
1.	SLA-1265/DSMI/2016 (*Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*)	Provinsi Bengkulu	*Engineering Services*	*Closing Date:* 14 Oktober 2025
2.	SLA-1290/DSMI/2022 (*Development of Pumped Storage Hydropower in the Java-Bali System Project)*	Provinsi Jawa Barat	Konstruksi dan Konsultasi	*Closing Date:* 15 September 2027
3.	SLA-1293/DSMI/2022 (*Development of Pumped Storage Hydropower in the Java-Bali System Project*)	Provinsi Jawa Barat	Konstruksi dan Konsultasi	Closing Date: 30 Juni 2028
4.	SLA-1294/DSMI/2023 *(Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project II)*	Provinsi Aceh	Konstruksi dan Konsultasi	*Closing Date:* 24 Agustus 2028

Untuk *Subsidiary Loan Agreement* ("SLA") No. SLA-1265/DSMI/2016 yang berasal dari pinjaman lender Japan International Cooperation Agency ("JICA") No. *Loan Agreement* ("LA") IP-572 merupakan pembiayaan kegiatan *Engineering Services* (E/S) kegiatan/proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP)" Hululais baik untuk kegiatan konsultasi perencanaan maupun konsultasi pelaksanaan konstruksi. Untuk kegiatan konstruksi PLTP Hululais rencana akan dibiayai dari pinjaman JICA. Berdasarkan penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BUN 999.04 TA 2025 menunjukkan bahwa Capaian *Output* PT PLN sebesar 66,67 persen dan Konsistensi RPA-RPD sebesar 55,49 persen. Tidak tercapainya capaian *output* PT PLN (Persero) disebabkan terdapat satu dari tiga pinjaman yang telah dialokasikan dalam DIPA tidak dapat dilakukan penarikan, yaitu Pinjaman JICA IP-572 Hululais *Geothermal Power Plant Project* (E/S) yang telah memasuki akhir masa penarikan (*closing date*) di Oktober 2025, sedangkan kegiatan konstruksi yang akan dibiayai proses pengadaannya belum dapat dimulai akibat kendala di proses perencanaan (pengusulan ulang *bluebook/greenbook* di Bappenas). Selain itu, proses pengadaan konstruksi proyek Hululais *Geothermal Power Plant* dan proses pengadaan kontrak Paket 2 yang sebelumnya direncanakan di bulan Oktober 2025 menjadi April 2026 sehingga alokasi *advance payment* tidak dapat dibayarkan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Sistem Manajemen Investasi Nomor S-18/PB.4/2026 tanggal 20 Februari 2026, Direktur SMI menyampaikan salinan Perjanjian Perubahan

(Amandemen) Nomor AMA-526/SLA-1265/PB/2026 tanggal 15 Januari 2026 antara Pemerintah RI dan PT PLN (Persero) atas dana pinjaman dari JICA LA No. IP-572 tanggal 14 Oktober 2025, terkait perpanjangan *closing date* dari 14 Oktober 2025 menjadi 31 Desember 2029. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk mendampingi proses konstruksi *Hululais Geothermal Power Plant Project* yang direncanakan mulai tahun 2026.

Pembiayaan proyek ***Development of Pumped Storage Hydropower in the Java-Bali System Project ("Upper Cisokan")*** sebelumnya terkendala isu *retroactive financing* sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Pasal 75 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan setelah berlakunya perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Hibah atau setelah adanya perjanjian induk Pinjaman Luar Negeri." Atas isu tersebut telah diselesaikan dengan amandemen atas *Loan Agreement* (LA) L0512A dan 9278-ID yang menambahkan pasal bahwa pinjaman digunakan untuk membiayai proyek yang sebelumnya menjadi ruang lingkup LA 8057-ID yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Rincian surat amandemen sebagai berikut:

No.	Donor	LA	Surat Persetujuan	Keterangan
1	AIIB	L0512A	Surat tanggal 13 November 2024	Pada intinya kedua donor menyetujui proyek pada LA ini merupakan kelanjutan dari Loan IBRD No. 8057-ID sebelumnya.
2	*World Bank*	9278-ID	SD-195/WB/XI/2024 tanggal 5 November 2024	

Amandemen LA telah ditindaklanjuti dengan pembuatan amandemen SLA antara pemerintah dengan PT PLN sebagai berikut:

No.	SLA	LA	Surat Amandemen	Keterangan
1	SLA-1293/DSMI/2022	L0512A	AMA-516/SLA-1293/DSMI/2025 tanggal 21 Februari 2025	Memasukkan persetujuan amandemen LA ke dalam pasal SLA
2	SLA-1290/DSMI/2022	9278-ID	AMA-515/SLA-1290/DSMI/2025 tanggal 21 Februari 2025	

Pembiayaan Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project II ("PLTA Peusangan II") merupakan *additional loan* dari pembiayaan PLTA Peusangan yang mengalami kendala berupa gempa bumi pada tahun 2013. SLA-1294/DSMI/2023 belum efektif karena *front-end fee* belum dibayarkan, PT PLN bersedia membayar tagihan *front-end fee* SLA-1294/2023 setelah mendapat kepastian bahwa PT PLN dapat memanfaatkan dan mencairkan pinjaman dari SLA-1294/DSMI/2023 untuk penyelesaian proyek pembangunan PLTA Peusangan II.

Progres saat ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyampaikan pendapat aspek hukum dari Biro Hukum Kemenkeu kepada PT PLN terkait penyelesaian dan solusi permasalahan SLA PLTA Peusangan II melalui Nota Dinas Kepala Biro Hukum No. ND-1011/SJ.3/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Pendapat Hukum dalam rangka Pembiayaan Proyek PLTA Peusangan. Dalam Nota tersebut disampaikan bahwa penyelesaian pembiayaan proyek PLTA Peusangan tidak dapat dipersamakan dengan penyelesaian proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage yang menggunakan amendemen LA/SLA dan kontrak sebagai solusi. Atas kejadian gempa pada tahun 2013, guna menjaga governance penggunaan dana pinjaman, PT PLN masih perlu menyampaikan hasil pemeriksaan/audit atas perhitungan penggunaan dana pinjaman sebelum terjadinya gempa dan kesesuaian dengan tambahan biaya pasca gempa.

PT PLN telah menanggapi Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui surat Direktur Keuangan PT PLN No. Nomor 60563/KEU.01.08/F01070000/2024 tanggal 21 Oktober 2024 hal Penyampaian Tanggapan atas Pendapat Aspek Hukum untuk Penyelesaian Pembiayaan *Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project* (II) Dalam surat tersebut, PT PLN menyampaikan laporan hasil audit BPKP tertanggal 23 Agustus 2018 yang mencakup ruang lingkup usulan tambahan anggaran untuk *Loan Agreement* IP-538 yang berakhir pada 29 Januari 2019. Laporan hasil audit BPKP meliputi: (i) peningkatan jumlah kuantitas, (ii) variasi akibat perubahan desain yang disebabkan oleh kondisi geologis yang tidak terduga, dan (iii) penyesuaian harga. *Additional loan* dengan skema Penerusan Pinjaman dari JICA dipandang sebagai opsi pendanaan yang lebih efisien bagi PT PLN untuk melanjutkan penyelesaian PLTA Peusangan.

2. PT SMI

Terdapat 5 (lima) perjanjian penerusan pinjaman kepada PT SMI dalam masa penarikan, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Nomor SLA	Nomor LA	Tujuan Pinjaman	Lender	Plafon Pinjaman (USD)
1.	SLA-1269/DSMI/2020	3840-INO	*Pembiayaan Leveraging Private Infrastructure Investment Project (LPIIP)*	ADB	50.000.000
2.	SLA-1270/DSMI/2020	9009-ID	*Pembiayaan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM)*	World Bank	100.000.000
3.	SLA-1271/DSMI/2020	TF0B0306		World Bank (CTF)	40.000.000
4.	SLA-1272/DSMI/2021	TF0B3799		World Bank (GCF)	7.500.000
5.	SLA-1292/DSMI/2022	4172-INO	*Pembiayaan SDG's Indonesia One Green Finance Facility (SIO-GFF)*	ADB	150.000.000

Dari kelima SLA dimaksud, penerusan pinjaman untuk pembiayaan eksplorasi panas bumi belum dilakukan penarikan disebabkan beberapa faktor yakni belum adanya kesepakatan terkait tarif jual listrik ke PT PLN (Persero) (PPA), terbatasnya sisa masa eksplorasi yang dimiliki pengembang PLTP, dan skema pembiayaan yang kurang menarik bagi pengembang swasta. Saat ini sedang dilakukan proses restrukturisasi pinjaman kepada lender untuk menyesuaikan plafon pinjaman dan skema yang menarik minat swasta.

Pada tanggal 17 Juli 2025 telah ditandatangani amendemen *Loan Agreement* GREM antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan dengan World Bank. Menindaklanjuti hal tersebut, PT SMI telah mengajukan amendemen *Subsidiary Loan Agreement* GREM kepada Kementerian Keuangan.

3. PT Pertamina

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat 1 (satu) kegiatan/proyek pada PT Pertamina yang masih dalam masa penarikan dan mendapat pembiayaan dari DIPA BA BUN 999.04, yaitu SLA-1242/DSMI/2011, Proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lumut Balai.

Proyek tersebut bertujuan Meningkatkan kapasitas pasokan energi listrik sistem Sumatera. Profil penerusan pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Kategori	Uraian
Loan Agreement	JICA IP-557 Tanggal 29 Maret 2011
SLA	1242/DSMI/2011 Tanggal 20 Oktober 2011
Jumlah Pinjaman	JPY 26.966.000.000
Tingkat Bunga Tranch I (Plafon JPY 25.834.000.000)	0,09% s.d. 0,3% per tahun
Tingkat Bunga Tranch II (Plafon JPY 1.132.000.000)	0,003% s.d. 0,01% per tahun
Closing Date	31 Desember 2026 (amandemen ke-4, diperpanjang dari sebelumnya 25 Oktober 2023)
Jangka waktu	40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun sejak tanggal LA aktif

Pada tanggal 28 November 2023, telah terbit Surat Menteri Keuangan No. S-103/PMK.05/2023 tentang Perubahan PPLN No. SLA-1242/DSMI/2011 tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan *Side Letter* No. S-63/MK.05/2021 tanggal 6 Agustus 2021 antara Pemerintah RI dan PT Pertamina (Persero) ("Amandemen Keempat"). Berdasarkan amandemen tersebut, tanggal terakhir penarikan pemberian pinjaman diperpanjang dari 25 Oktober 2023 menjadi 31 Desember 2026.

PT Pertamina melalui Surat Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Nomor 075/H00000/2024-S4 tanggal 14 Maret 2024 mengajukan realokasi sejumlah plafon pada *Loan Agreement* Nomor IP-557 Lumut Balai *Geothermal Power Plant Project* (selanjutnya disebut "LA IP-557") dari porsi *Contingencies ke porsi Consulting Services* sebesar JPY252.000.000 dalam rangka memenuhi kewajiban kepada kontraktor.

Menindaklanjuti permohonan PT Pertamina dimaksud, Direktur Pinjaman dan Hibah a.n. Menteri Keuangan melalui surat S-12/MK.8/PR.2/2024 menyampaikan permohonan realokasi kedua LA IP-557 kepada JICA. Adapun rincian realokasi adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kategori	Alokasi Semula	Alokasi Perubahan	Penambahan/ Pengurangan
(A) *Civil Works and Equipmet Supply*	25.327.000.000	25.327.000.000	-
(B) *Consulting Services*	1.387.000.000	1.639.000.000	252.000.000
(C) *Contingencies*	252.000.000	-	(252.000.000)
(B) *Unavailable Balance*	-	-	-
Jumlah	**26.966.000.000**	**26.966.000.000**	**-**

JICA melalui melalui surat *Chief Representative* JICA Indonesia Office Nomor JICAIN-202406100001 tanggal 10 Juni 2024 menyampaikan dokumen amendemen LA IP-557 yang pada intinya menyetujui seluruh permohonan yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan.

Direktorat SMI melalui Surat No. S-220/PB.4/2024 tanggal 6 September 2024 telah menyampaikan Penyampaian Naskah Perjanjian Perubahan (Amendemen) Kelima terhadap Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Nomor SLA-1242/DSMI/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Sebagaimana Terakhir Diubah dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-103/MK.5/2023 Tanggal 28 November 2023 antara Pemerintah RI dengan PT Pertamina (Persero) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

B.3.4. BA BUN 999.07

Pengungkapan Hal-hal dalam Penyaluran Subsidi Bunga

Pada Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian ditetapkan sebagai penanggungjawab kegiatan penyaluran dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam pelaksanaan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya, peraturan tersebut adalah:

1. Permenko Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya;
2. PMK Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima Kredit Industri Padat Karya.

Selain itu, di Tahun 2025 terdapat subsidi baru lainnya berupa Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan dan menunjuk Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai penanggungjawab kegiatan. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam pelaksanaan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan, peraturan tersebut adalah:

1. Permenko Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan;
2. PMK Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan;
3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan.

Pengungkapan Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Sejalan dengan penetapan undang-undang tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Penetapan peraturan pemerintah tersebut merupakan upaya dukungan Pemerintah terhadap pemulihan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya sebagai bagian dari dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Program PEN sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas dilaksanakan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara, Investasi Pemerintah, Penjaminan, Penempatan Dana, dan Belanja Negara. Sesuai dengan Pasal 20 peraturan pemerintah tersebut diatas, Program PEN melalui mekanisme Belanja Negara dapat dilakukan antara lain melalui pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan.

Program PEN Pada BA BUN Belanja Subsidi (BA 999 07) 31 Desember 2025 terdapat pada satker:

No.	Satuan Kerja		Jenis Subsidi
1	999704	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (PEN)

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19, maka program pemulihan ekonomi nasional karena dampak Covid-19 juga berakhir.

Rincian *Ouput* Belanja Subsidi adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

kode/Uraian Kegiatan,Output	Belanja			Capaian Keluaran			
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
4861 Pengelolaan Subsidi Pajak	19.884.655.363.000	19.254.945.285.565	96,83%				
4861.9FC Subsidi Pajak	19.884.655.363.000	19.254.945.285.565	96,83%				
4861.9FC.001 Subsidi PPh DTP Panas Bumi	4.473.364.909.000	4.473.364.907.952	100,00%	9	9	Wajib Pajak	100,00%
4861.9FC.002 Subsidi PPh DTP SBN Valas	6.388.098.021.000	6.388.098.020.252	100,00%	1	1	Wajib Pajak	100,00%
4861.9FC.014 Subsidi PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun	4.421.317.429.000	3.803.052.076.507	86,02%	67.434	54.464	Wajib Pajak	86,02%
4861.9FC.015 Subsidi PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik	1.774.410.961.000	1.774.410.959.649	100,00%	42.790	42.790	Wajib Pajak	100,00%
4861.9FC.016 Subsidi PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik	2.150.303.248.000	2.150.283.756.289	100,00%	33.475	33.475	Wajib Pajak	100,00%
4861.9FC.019 Subsidi PPh Pasal 21 DTP Stimulus Ekonomi Untuk Industri Tertentu	395.000.004.000	383.582.098.737	97,11%	940.475	913.295	Wajib Pajak	97,11%

kode/Uraian Kegiatan,Output	Belanja			Capaian Keluaran			
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
4861.9FC.020 Subsidi PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid	282.160.791.000	282.153.466.179	100,00%	26.585	17.936	Wajib Pajak	67,47%
4862 Pengelolaan Subsidi Kredit Program	299.735.884.000	60.356.681.884	20,14%				
4862.9FB Subsidi Kredit Program	299.735.884.000	60.356.681.884	20,14%				
4862.9FB.005 Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)	10.279.400.000	7.271.321.536	70,74%	499	673	Debitur	100,00%
4862.9FB.008 Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	289.456.484.000	53.085.360.348	18,34%	2	1	Debitur	50,00%
4863 Pengelolaan Subsidi IJP KUR dan Bunga KUR	38.558.577.276.000	31.615.550.490.048	81,99%				
4863.9FB Subsidi Kredit Program	38.558.577.276.000	31.615.550.490.048	81,99%				
4863.9FB.002 Subsidi IJP KUR	67.682.405.000	0	0,00%	2	0	Penjamin	0,00%
4863.9FB.004 Subsidi Bunga KUR	38.278.864.486.000	31.611.078.463.388	82,58%	4.178.954	4.058.291	Debitur	97,11%
4863.9FB.005 Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	26.043.649.000	2.185.357.764	8,39%	400	129	Debitur	32,25%
4863.9FB.006 Subsidi Bunga/ Margin Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	4.900.000.000	13.586.807	0,28%	347	2	Debitur	0,58%
4863.9FB.007 Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan Sisi Penyediaan Rumah	110.601.811.000	2.056.147.327	1,86%	7.811	256	(Debitur/Unit/ Penyalur/ Penjamin)	3,28%
4863.9FB.008 Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan Sisi Permintaan Rumah	70.484.925.000	216.934.762	0,31%	22.224	649	(Debitur/Unit/ Penyalur/ Penjamin)	2,92%
4865 Pengelolaan Subsidi Pupuk	45.343.603.284.000	32.711.043.845.417	72,14%				
4865.9FA Subsidi Barang/Jasa	45.343.603.284.000	32.711.043.845.417	72,14%				
4865.9FA.001 Subsidi Pupuk	45.343.603.284.000	32.711.043.845.417	72,14	8.423.743	8.038.179	Ton	95,42%
4867 Pengelolaan Subsidi Energi	197.752.255.753.000	185.168.643.723.241	93,64				
4867.9FD Subsidi Energi	197.752.255.753.000	185.168.643.723.241	93,64				
4867.9FD.001 Subsidi Listrik	89.746.512.366.000	81.036.424.051.631	90,29	75,55	69,6559	TeraWattHour	92,20%
4867.9FD.002 Subsidi Minyak Solar	19.716.793.478.000	17.584.401.914.632	89,18	18.885.000	16.778.972	Kilo Liter	88,85
4867.9FD.003 Subsidi Minyak Tanah	5.343.763.741.000	3.642.567.330.483	68,16	525.000	459.589	Kilo Liter	87,54
4867.9FD.004 Subsidi LPG Tabung 3 Kg	82.945.186.168.000	82.905.250.426.495	99,95	8.170.000	7.781.875	Metrik Ton	95,25
4868 Pengelolaan Subsidi PSO Perkeretaapian	4.797.057.860.000	4.735.021.249.849	98,71				

kode/Uraian Kegiatan,Output	Belanja			Capaian Keluaran			
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
4868.9FA Subsidi Barang/Jasa	4.797.057.860.000	4.735.021.249.849	98,71				
4868.9FA.001 Subsidi PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Antarkota	278.681.977.000	278.477.867.000	99,93	11.481.270	11.550.711	Penumpang	100%
4868.9FA.002 Subsidi PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Perkotaan	2.518.375.883.000	2.471.279.645.509	98,13	405.106.396	385.813.482	Penumpang	95,24%
4868.9FA.003 Subsidi PSO Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek	2.000.000.000.000	1.985.263.737.340	99,26	28.417.701	27.631.982	Penumpang	97,24%
4869 Pengelolaan Subsidi PSO Angkutan Laut	3.068.456.424.000	3.068.456.422.559	100,00				
4869.9FA Subsidi Barang/Jasa	3.068.456.424.000	3.068.456.422.559	100,00				
4869.9FA.001 Subsidi PSO Angkutan Laut Kelas Ekonomi	3.068.456.424.000	3.068.456.422.559	100,00	4265009	4472918	Penumpang	100,00
4870 Pengelolaan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers	184.628.830.000	180.673.538.000	97,86				
4870.9FA Subsidi Barang/Jasa	184.628.830.000	180.673.538.000	97,86				
4870.9FA.001 Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers	184.628.830.000	180.673.538.000	97,86	171.035	170.840	Berita	99,89
6454 Pengelolaan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah	65.621.670.000	65.621.670.000	100,00				
6454.9FB Subsidi Kredit Program	65.621.670.000	65.621.670.000	100,00				
6454.9FB.001 Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (PEN)	65.621.670.000	65.621.670.000	100,00	25	25	Pemda	100,00
4871 Pengelolaan Subsidi Bunga untuk Air Bersih	11.038.880.000	9.464.854.425	85,74				
4871.9FB Subsidi Kredit Program	11.038.880.000	9.464.854.425	85,74				
4871.9FB.001 Subsidi Bunga Air Bersih	11.038.880.000	9.464.854.425	85,74	6	6	PDAM	100,00
4873 Pengelolaan Subsidi Perumahan	5.489.523.439.000	4.889.999.221.073	89,08				
4873.9FB Subsidi Kredit Program	5.489.523.439.000	4.889.999.221.073	89,08				
4873.9FB.001 Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	1.229.574.000.000	1.143.072.000.000	92,96	300.000	278.865	Unit	92,96
4873.9FB.002 Subsidi Bunga Kredit Perumahan	4.259.949.439.000	3.746.927.221.073	87,96	729.069	729.035	Unit	100%
Jumlah	**315.455.154.663.000**	**281.759.776.982.061**	**89,32**				

B.3.5. BA 999.08

1. Satker Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP)

Sampai dengan berjalan per 31 Desember 2025 ini Manajemen Pelaksana belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). MPPKP merupakan unit pelaksana yang bertugas melaksanakan Program Kartu Prakerja (*implementing agency*). MPPKP adalah satker Kemenko Perekonomian sekaligus satker BUN. Sejak tahun 2020, MPPKP menerima keputusan alokasi anggaran Program Kartu Prakerja yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan/atau Tim Pelaksana. Terkait Program Kartu Prakerja Tahun 2025, MPPKP telah melakukan korespondensi sebagai berikut:

a. MPPKP telah melakukan pengusulan anggaran pelaksanaan Program Kartu Prakerja untuk Semester I Tahun Anggaran 2025 kepada Direktorat Jenderal Anggaran ("DJA") sebesar Rp800 miliar untuk target peserta sebanyak 171.500 orang penerima pada tanggal 2 Januari 2025 untuk menindaklanjuti Surat Sesmenko Perekonomian selaku Sekretaris KCK Nomor: B/KWU.05/356/SES.M.EKON/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2025.

b. Usulan MPPKP ini kemudian direviu oleh APIP Kemenko Perekonomian menjadi Rp791 miliar pada tanggal 15 Januari 2025, dengan periode pelaksanaan sebanyak 5 bulan. Berdasarkan reviu APIP ini, MPPKP kemudian melakukan pengusulan anggaran pelaksanaan Program Kartu Prakerja untuk Semester I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp791 miliar pada tanggal 20 Januari 2025.

c. Mengingat waktu yang terus bergulir, pada tanggal 14 Februari 2025 MPPKP mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian selaku Ketua KCK tembusan kepada Menkeu dan Sesmenko Perekonomian selaku Sekretaris KCK untuk menyampaikan *timeline* eksekusi program dan menyampaikan harapan agar penetapan DIPA dapat dilakukan sebelum 21 Februari 2025 yang disusul dengan penerbitan DIPA sebelum 28 Februari 2025.

d. Setelah dilakukan beberapa kali pembahasan dan penelaahan ulang Rencana Kerja Anggaran ("RKA") oleh DJA, pada tanggal 17 Maret 2025 DJA memberikan arahan bahwa usulan anggaran untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada Satuan Biaya Umum (999525) TA 2025 yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan adalah sebesar Rp668 miliar, yang merupakan cukup untuk mencakup target sebanyak 150.000 orang penerima Kartu Prakerja di Semester I Tahun 2025.

e. Mempertimbangkan waktu yang tersisa sudah tidak *feasible* lagi bagi program untuk dieksekusi, MPPKP kemudian memohon arahan kepada Menko Perekonomian berdasarkan surat dari Menko Perekonomian kepada Menteri Nomor KWU.5/88A/M.EKON/03/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang menyampaikan bahwa untuk kelangsungan program, MPPKP kemudian menyusun kembali revisi RKA senilai Rp666 miliar untuk 150.000 penerima pada tanggal 24 Maret 2025.

f. Pada tanggal 8 April 2025, DJA kemudian meminta agar RKA direvisi dengan periode yang tetap berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Transisi Program Kartu Prakerja 10 April 2025, MPPKP kemudian menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja tidak feasible untuk

dieksekusi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan oleh karenanya MPPKP tidak dapat (bukan berkeberatan) menyusun RKA yang berakhir pada 31 Desember 2025. Setiap awal tahun, Prakerja memerlukan waktu untuk mobilisasi. Perlu waktu untuk melakukan mobilisasi *resources* (tenaga ahli dan vendor), sosialisasi/arahaan kepada mitra-mitra, penyiapan sistem pendaftaran *batch*, pendaftaran peserta, pelaksanaan proses pelatihan, penayangan pelatihan di platform digital, dan sosialisasi publik. Pembukaan *batch* 1 tahun 2024 (batch 63) misalnya, dilakukan pada tanggal 23 Februari 2024 (H+0). Skenario yang mendatar diversifikasi. Rata-rata 533.620 orang *join batch* 63, disusul member keberlanjutan peraturan perundang-undangan dan ordinansi seperti provinsi untuk di-SK-kan sebagai penerima pelatihan. Pada 28 Februari 2024 (H+5) sebanyak 100.000 peserta ditetapkan sebagai penerima *batch* 63. Secara rata-rata, penerima batch 63 ini menyelesaikan pelatihan pada minggu ke-7, menerima insentif pada H+34, menerima survei Evaluasi I pada minggu ke-6 dan menerima Survei Evaluasi ke-1 pada H+62. Itu belum termasuk Survei Evaluasi ke-2 dan insentif Survei Evaluasi ke-2 yang paling cepat memakan waktu 13 hari. Semua ini belum termasuk pelatihan Prakerja (tanpa pembelian pelatihan) dan RPL yang dijalankan oleh penerima *batch* di bulan Oktober.

2. Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

a. Tidak terdapat temuan pemeriksaan BPK yang memerlukan tindak lanjut.

b. Sehubungan dengan telah selesainya kewajiban pembayaran denda PT Pos Indonesia (Persero) kepada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua berdasarkan Hasil Kesepakatan Koordinasi Tindaklanjut Atas Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal 25 April 2024 (Undangan nomor UND-137/PB.7/2024) diantara Direktur Sistem Perbendaharaan, Inspektur III Itjen Kementerian Keuangan, SVP Enterprise Business PT Pos Indonesia (Persero), dan SVP Financial Operation PT Pos Indonesia (Persero) dan Perjanjian Komitmen Pembayaran Denda Nomor: PERJ- 001/999292/2024 dan Nomor : 780/REG I/ADM PENJUALAN/4/0524 tanggal 13 Mei 2024 dengan nilai total Rp16.094.173.971,00 dan detail sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Bulan	Tahun	Tanggal SSBP	NTPN	Nilai Pembayaran
1	Mei	2024	14/05/2024	BD66C6U8EUGUS6EF	1.341.181.164
2	September	2024	19/06/2024	05CEE3CIFKAFUT05	1.341.181.164
3	Juli	2024	17/07/2024	C41817QLUP9BDH54	1.341.181.164
4	Agustus	2024	19/08/2024	B8FE555DF9L3L2L4	1.341.181.164
5	September	2024	18/09/2024	F1F4161QV4AIMKTQ	1.341.181.164
6	Oktober	2024	17/10/2024	5292355DF9R5RDRS	1.341.181.164
7	November	2024	18/11/2024	6D23A6U8EV2UKUQN	1.341.181.164
8	Desember	2025	17/12/2024	4A8182G4VQ9V3B1G	1.341.181.164
9	Januari	2025	20/01/2025	161680NA0DEGUER	1.341.181.164
10	Februari	2025	19/02/2025	8732561QVCVOQ8DA	1.341.181.164
11	Maret	2025	17/03/2025	5389B1JNG86OUCNU	1.341.181.164
12	April	2025	17/04/2025	13D242G502S30KUT	1.341.181.167
Jumlah					**16.094.173.971**

c. Maka Perjanjian Komitmen Pembayaran Denda dimaksud dinyatakan ditutup dan kewajiban di dalamnya dinyatakan lunas (tercantum pada Surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Nomor S-1114/WPB.34/2025 tanggal 26 Mei 2025).

B.3.6. BA 999.99

Catatan Pengungkapan Lainnya UAP BUN TK DJSPSK

Berdasarkan DIPA BUN Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) TA 2025 Nomor: SP DIPA-999.99.1.984438/2024 dengan kode pengaman (*digital stamp*) DS: 5657-3862-8938-5094, pagu anggaran BA BUN 999.99 Transaksi Khusus Pengelolaan Kontribusi *Trust Fund* kepada Organisasi Internasional sebesar Rp211.909.208.000,00 dengan target *output* berupa pembayaran kontribusi *trust fund* kepada 3 Organisasi Internasional/OI.

Kemudian dilakukan revisi DIPA dengan nomor SP DIPA- 999.99.1.984438/2025 dengan kode pengaman (*digital stamp*) DS: 2370-4967-6960-1900 tanggal 29 Desember 2025 dengan pagu revisi sebesar Rp211.909.208.000,00 dengan target *output* yang masih sama berupa pembayaran kontribusi *trust fund* kepada 3 Organisasi Internasional/OI. Sampai 31 Desember 2025 telah dilakukan pembayaran kontribusi *trust fund* kepada 3 OI dengan realisasi anggaran sebesar Rp211.541.521.246,00 atau 99,83% dari total anggaran. Dengan pembayaran kepada 3 OI tersebut, capaian output DJSPSK pada 31 Desember 2025 adalah 100%. Rincian Realisasi Anggaran dan Capaian Output pada TA 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Kode Program	Uraian RO	Belanja			Capaian RO				Ket
				Pagu	Realisasi	%	Target Volume	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	
1	Direktorat Jenderal Stabilitas Pengelolaan Sektor Keuangan	999.99.13	*Trust Fund* Kepada Organisasi Internasional (OI)	211.909.208.000	211.541.521.264	99,83%	3	3	Organisasi Internasional	100%	Pembayaran Kepada USAID *Trust Fund* Tidak Jadi Dilakukan Karena terdapat penghentian Kegiatan USAID oleh Pemerintah Amerika dan diganti dengan Pembayaran pada Asian Development Fund ADF-14

*) Realisasi volume merupakan capaian sampai dengan bulan Desember 2025

**) Progress Capaian RO merupakan progress sampai dengan bulan Desember 2025

Penerimaan Pungutan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang kini mandatnya telah diperkuat secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebagai poros utama dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK memegang tanggung jawab integratif yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, hingga inovasi teknologi sektor keuangan seperti aset digital dan kripto. Perluasan wewenang ini menuntut OJK untuk menjalankan fungsi penegakan hukum dan perlindungan konsumen secara optimal demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam menjalankan mandat tersebut, OJK didukung oleh sumber daya keuangan negara yang

pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem keuangan negara.

Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, Pasal 34 UU P2SK menetapkan bahwa Anggaran OJK merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) pada APBN. Ketentuan ini membawa konsekuensi yuridis di mana seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pungutan industri jasa keuangan dan penerimaan lainnya wajib ditatausahakan serta dilaporkan sebagai bagian integral dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Guna mempertegas mekanisme pelaporan tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) sebagai Pembantu Pengguna Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99). Dalam kapasitas tersebut, DJSPSK bertanggung jawab penuh untuk melakukan konsolidasi, validasi, serta pelaporan realisasi PNBP OJK guna diintegrasikan ke dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), untuk memastikan bahwa setiap Rupiah yang dikelola selaras dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, yang mencakup penerimaan, penggunaan, pelaporan, dan konsolidasi dalam sistem keuangan negara. Pungutan dan penerimaan lainnya yang diperoleh OJK merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pendanaan OJK.

Berdasarkan PMK Nomor 27 Tahun 2026, akuntansi dan pelaporan keuangan atas anggaran OJK yang bersumber dari Pungutan dan penerimaan lainnya dilaksanakan setelah ditetapkannya ketentuan mengenai cakupan anggaran OJK sebagai bagian dari bagian anggaran BUN, yang akan dilakukan mulai periode pelaporan anggaran tahun 2027. Sampai dengan ditetapkannya ketentuan tersebut, laporan keuangan atas anggaran OJK yang bersumber dari Pungutan dan penerimaan lainnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan pasal 34 UU P2SK, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK dibahas oleh OJK dan DPR. Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner OJK tanggal 10 September 2024 ditetapkan anggaran OJK tahun 2025 sebesar Rp11.557.368.948.861,00. RKA OJK Tahun 2025 tersebut direncanakan menggunakan sumber dari realisasi penerimaan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

ANGGARAN		
RKA OJK Tahun 2025:		11.557.368.948.861
• Penerimaan Tahun 2024 • Proyeksi Penerimaan Tahun 2025	3.029.170.983.256 8.528.197.965.605	
REALISASI		
Realisasi:		11.006.769.302.572
• Realisasi Beban Operasional Tahun 2025 a. Penerimaan Tahun 2024 : Rp3.029.170.983.256 b. Penerimaan Tahun 2025 : Rp5.773.915.888.407	8.803.086.868.663	
• Alokasi untuk Pembayaran Kewajiban Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 (penerimaan tahun 2025)	2.203.682.433.909	

Dalam rangka penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2025 terdapat masa transisi pengaturan terkait mekanisme penggunaan dan pelaporan dana pungutan. Transisi ini melibatkan dua ketentuan yang memiliki karakter operasional berbeda dalam hal lini masa penggunaan anggaran:

1. Mekanisme PP Nomor 11 Tahun 2014 untuk Pungutan dan Penerimaan Lainnya pada Tahun 2024

   Berdasarkan ketentuan ini, pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan tidak dapat langsung digunakan, melainkan baru dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan kegiatan OJK pada satu tahun anggaran berikutnya (T+1) dan tahun berikutnya lagi (T+2). Apabila setelah periode tersebut masih terdapat sisa dana yang tidak habis digunakan, maka sisa tersebut wajib disetorkan ke kas negara (pada T+3).

   Dengan demikian, penerimaan OJK pada tahun 2024 belum dapat dipergunakan di tahun 2024. Pada awal tahun 2025, terdapat sisa penerimaan tahun 2024 sebesar Rp 8.078.854.896.746,00 yang dipergunakan sebesar Rp 3.029.170.983.256,00 pada triwulan I tahun 2025. Sehingga terdapat sisa penerimaan yang belum dipergunakan sebesar Rp5.049.683.913.490,00. Pada akhir tahun 2025 dan disajikan sebagai Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada Laporan Keuangan OJK Tahun 2025. Sisa penerimaan tersebut dapat dipergunakan secara langsung oleh OJK karena sudah diserahkelolakan oleh Pemerintah kepada OJK menggunakan mekanisme Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 41 tahun 2024.

   Berikut merupakan Rincian Penerimaan dan Pengeluaran atas Pungutan dan Penerimaan Lainnya OJK Tahun 2024:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Total Penerimaan Tahun 2024	8.078.854.896.746
Pengeluaran: Realiasasi pada RKA OJK Tahun 2025	3.029.170.983.256
Penerimaan Tahun 2024 yang belum digunakan	**5.049.683.913.490**

2. Mekanisme PP Nomor 41 Tahun 2024 untuk Pungutan dan Penerimaan Lainnya Tahun 2025
   Sejalan dengan penguatan fungsi OJK dalam UU P2SK, aturan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 ini memberikan fleksibilitas di mana pungutan dan penerimaan lainnya dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berjalan (T+0) serta tahun anggaran berikutnya (T+1). Penerimaan OJK yang tidak habis digunakan setelah tahun T+1 akan disetorkan ke Kas Negara menjadi PNBP pada T+2 setelah diterimanya Laporan Keuangan Audited dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berikut merupakan Rincian Penerimaan dan Pengeluaran atas Pungutan dan Penerimaan Lainnya OJK Tahun 2025:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Total Penerimaan Tahun 2025	8.373.377.035.116
Pengeluaran: Realisasi pada RKA OJK Tahun 2025	7.977.598.319.316
Penyetoran ke Kas Negara sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI Tahun 2023 terkait Penggunaan Kelebihan Penerimaan Tahun 2022	20.985.342.005
Penerimaan Tahun 2025 yang belum digunakan	**374.793.373.795**

Dengan demikian, penerimaan tahun 2025 yang belum digunakan adalah sebesarRp374.793.373.795,00 merupakan selisih dari total penerimaan tahun 2025 sebesar Rp8.373.377.035.116,00 dengan anggaran yang telah direalisasikan pada RKA OJK Tahun 2025 sebesar Rp7.977.598.319.316,00 dan kewajiban OJK dalam hal Penyetoran ke Kas Negara sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI Tahun 2023 terkait Penggunaan Kelebihan Penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp20.985.342.005,00.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL

Ringkasan Laporan Perubahan SAL selama periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	**457.543.275.049.219**	**459.497.872.070.698**
Penggunaan SAL	(93.146.980.793.000)	(56.381.000.000.000)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah Penggunaan SAL	**364.396.294.256.219**	**403.116.872.070.698**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	**72.396.045.683.987**	**45.727.115.463.645**
Penyesuaian Pembukuan	2.126.915.000.875	9.293.355.123.095
Penyesuaian Lain-lain	(653.686.043.549)	(594.067.608.219)
Total Penyesuaian	**1.473.228.957.326**	**8.699.287.514.876**
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	**438.265.568.897.532**	**457.543.275.049.219**

C.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp457.543.275.049.219,00 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik per 31 Desember 2024. Saldo Anggaran Lebih Fisik meliputi Kas BUN, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang telah disahkan dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang telah disahkan setelah memperhitungkan Utang PFK, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan penyesuaian karena selisih transaksi Kiriman Uang, Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan dan transito lainnya pada tahun 2024.

Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	1 Januari 2025	1 Januari 2024
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Kas BUN	350.032.352.563.093	342.835.699.040.576
Kas di KPPN	697.379.362.618	5.128.787.424.755
Kas di Bendahara Pengeluaran	230.036.155.068	197.710.858.794
Kas pada BLU yang sudah disahkan	96.973.278.750.758	92.393.578.520.721
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan	10.552.112.773.536	13.992.553.217.607
Saldo Anggaran Lebih Awal sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**458.485.159.605.073**	**454.548.329.062.453**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN		-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengurang Fisik SAL	(547.774.498.003)	(44.029.816.776)
Utang kepada Pihak Ketiga Pengurang Fisik SAL	(350.140.071.933)	(513.135.846)
Selisih Kiriman Uang	(2.179.402.806)	4.129.878.872
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	-	(3.336.178.894)
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	(41.790.583.112)	(6.707.739.111)
Transito Lainnya	-	-
Penempatan Dana di Bank Umum	-	5.000.000.000.000
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**(941.884.555.854)**	**4.949.543.008.245**
Saldo Anggaran Lebih Awal	**457.543.275.049.219**	**459.497.872.070.698**

Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Per 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024

C.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL pada TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp93.146.980.793.000,00 dan Rp56.381.000.000.000,00. Penggunaan SAL merupakan Pembiayaan Lainnya dari APBN tahun 2025 yang bersumber dari Rek Lain BI SAL sebesar Rp85.600.000.000.000,00 dan bersumber dari Rekening Kas BLU sebesar Rp7.546.980.793.000,00.

Penggunaan SAL tersebut sesuai dengan alokasi dalam postur APBN Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian PMK Nomor 147/PMK.05/2021 pada Pasal 8 tentang Pengolaan Saldo Anggaran Lebih menyatakan bahwa SAL digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi. Penggunaan SAL dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, terdapat penggunaan SAL BLU sebesar Rp39.485.330.573.184,00 yang digunakan untuk membiayai belanja pada masing-masing Satker BLU di TA 2025. Penggunaan SAL BLU ini terdapat pada 19 Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun rincian realisasi penggunaan SAL BLU adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	BA	Kementerian/Lembaga	Jumlah
1	006	Kejaksaan Republik Indonesia	12.871.795.653
2	007	Kementerian Sekretariat Negara	226.216.513.998
3	012	Kementerian Pertahanan	205.798.014.385
4	015	Kementerian Keuangan	29.654.401.661.028
5	018	Kementerian Pertanian	38.309.704.268
6	019	Kementerian Perindustrian	22.560.277.615
7	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	67.778.001.300
8	022	Kementerian Perhubungan	379.047.171.060
9	024	Kementerian Kesehatan	2.765.619.704.390
10	025	Kementerian Agama	244.535.364.168
11	032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	33.667.407.756
12	059	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	4.143.492.024.146
13	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	518.116.738.760
14	092	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	78.214.301.519
15	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	168.100.000
16	138	Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	55.895.372.151
17	139	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi	1.028.654.720.689
18	147	Kementerian Pariwisata	595.300.411
19	150	Kementerian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	9.388.399.887
Jumlah			**39.485.330.573.184**

Realisasi penggunaan SAL BLU pada TA 2025

C.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Pada LKBUN, tidak menggunakan nilai SiLPA/SiKPA yang tertera pada LRA LKBUN dikarenakan transaksi yang tertuang dalam LRA LKBUN hanya terbatas pada lingkup Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, tidak dapat mencerminkan keseluruhan realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN (BA BUN dan BA K/L).

SiLPA pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp72.396.045.683.987,00 dan Rp45.727.115.463.645,00. SiLPA per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp26.668.930.220.342,00 atau naik 58,32 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024.

C.2.4. Penyesuaian SAL

C.2.4.1. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.126.915.000.875,00 dan Rp9.293.355.123.095,00 Penyesuaian Pembukuan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.166.440.122.220,00 atau turun 77,11 persen dari TA 2024.

Penyesuaian Pembukuan merupakan penyesuaian/koreksi tahun berjalan akibat koreksi SiLPA, selisih kurs (*unrealized*), koreksi kas dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL.

Adapun rincian Penyesuaian Pembukuan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Koreksi SiLPA	2.347.429.214.088	2.052.665.074.805
Selisih Kurs Kas BUN *(Unrealized)*	147.916.719.129	6.326.893.741.118
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(78.992.638.471)	(61.355.941.239)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	(680.181.448.905)	859.144.688.316
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	14.803.399.120	85.975.723.953
Koreksi Utang PFK	(491.306.579)	613.457.641
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	349.456.188.264	4.371.606.409
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	26.974.874.248	25.046.772.092
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	(19)	-
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**2.126.915.000.875**	**9.293.355.123.095**

Rincian Penyesuaian Pembukuan TA 2025 dan TA 2024

Penjelasan Penyesuaian Pembukuan sebesar Rp2.126.915.000.875,00 terdiri dari:

C.2.4.1.1. Koreksi SILPA

Koreksi SILPA sebesar Rp2.347.429.214.088,00 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar Rp6.231.969.141.350,00 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp8.579.398.355.438,00. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA (311212) melalui penerbitan SPM PP senilai Rp27.768.310.051,00 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai Rp6.204.200.831.299,00.

C.2.4.1.2. Selisih Kurs (*Unrealized*)

Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)* sebesar Rp147.916.719.129,00 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp534.114.460.862,00 dikurangi kerugian selisih kurs sebesar Rp386.197.741.733,00 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.

C.2.4.1.3. Koreksi Kas BUN

Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp78.992.638.471,00 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.

C.2.4.1.4. Koreksi Kas BLU

Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp680.181.448.905,00 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada TA 2025, penyesuaian saldo Kas BLU akibat likuidasi, perubahan nomenklatur kode satuan kerja, kesalahan pembukuan, pengembalian kas hibah yang diterima BLU, serta amoritasi diskonto/premium yang pada TAYL telah diakui sebagai *accrued interest*.

Rincian koreksi Kas BLU pada TA 2025 terdapat pada KPPN sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	KPPN	Jumlah
1	Palembang (014)	(324.902.555.077)
2	Pangkal Pinang (015)	12.751.808.711
3	Jakarta I (018)	(25.000)
4	Jakarta II (019)	(212.932.212.709)
5	Surakarta (028)	3.184.012.624
6	Yogyakarta (030)	1.878.145.352
7	Mataram (038)	846.851.196
8	Palangkaraya (043)	(10.348.298.816)
9	Jayapura (063)	(14.961.226.501)
10	Sorong (066)	(1.000.000.000)
11	Merauke (068)	1.361.403.467
12	Jakarta III (088)	(141.204.633.328)
13	Magelang (115)	3.514.915.350
14	Semarang II (134)	1.630.365.826
Jumlah Koreksi Kas BLU		**(680.181.448.905)**

Rincian Koreksi Kas BLU TA 2025

Koreksi Kas BLU paling besar terdapat pada KPPN Palembang sebesar minus Rp324.902.555.077,00 yang merupakan penyesuaian kas pada BLU Universitas Sriwijaya yang telah likuidasi dan ditetapkan menjadi PTN-BH. Koreksi terbesar kedua yaitu pada KPPN Jakarta II yang merupakan penyesuaian saldo kas BLU pada BLU LDKPI dan LPDP dalam rangka kesalahan pembukuan dan pencatatan *accrued interest*.

C.2.4.1.5. Koreksi Kas Hibah

Koreksi Kas Hibah sebesar Rp14.803.399.120,00 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada TA 2025 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah TAYL dengan nilai neto sebesar Rp17.346.249.701,00, revaluasi saldo kas hibah sebesar Rp5.467.048.130,00, serta penyesuaian kas hibah senilai minus Rp8.009.898.711,00.

C.2.4.1.6. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp349.456.188.264,00 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas sebesar minus Rp12.150.373.696,00 dan koreksi akuntansi/pembukuan lainnya sebesar Rp361.606.561.960,00.

Rincian koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang dilakukan pada TA 2025 per KPPN dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	KPPN	Jumlah
1	KPPN Jakarta I (018)	(24.517.207)
2	KPPN Jakarta II (019)	(3.856.620)
3	KPPN Jakarta V (139)	9.164.610

No.	KPPN	Jumlah
4	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(609.881)
5	KPPN Jakarta VI (175)	1.577.031
6	KPPN Jakarta VII (182)	1.937.320
7	Direktorat Pengelolaan Kas Negara (999)	349.472.493.011
Jumlah Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga		**349.456.188.264**

Rincian Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) TA 2025

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang dilakukan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal Utang Kepada Pihak Ketiga	580.770.692.629	128.907.360.569
Saldo Akhir Utang Kepada Pihak Ketiga	5.721.816.371.796	580.770.692.629
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	5.141.045.679.167	451.863.332.060
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga	5.490.501.867.431	456.234.938.469
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**349.456.188.264**	**4.371.606.409**
Penjelasan Selisih: **Penyesuaian akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas dan penyesuaian saldo utang retur transaksi migas**	**349.456.188.264**	**4.371.606.409**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	**-**	**-**

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) TA 2025 dan TA 2024

C.2.4.1.7. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)

Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp26.974.874.248,00 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN), karena adanya Revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas sebesar Rp27.689.140.663,00, Selisih Kurs antara SPM dengan SP2D sebesar Rp8.066.642,00 serta koreksi akuntansi/pembukuan lainnya sebesar minus Rp722.333.057,00.

Rincian koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran pada TA 2025 pada masing-masing KPPN sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	KPPN	Jumlah
1	KPPN Jakarta I (018)	24.740.979.026
2	KPPN Jakarta II (019)	93.383.907
3	KPPN Palangkaraya (043)	(56.793.001)
4	KPPN Manado (049)	(417.749.718)
5	KPPN Jakarta III (088)	1.869.970.562
5	KPPN Medan II (123)	(4.459.459)
6	KPPN Jakarta IV (133)	(157.018.973)
7	KPPN Jakarta V (139)	516.915.720
8	KPPN Jakarta VI (175)	357.331.688
9	KPPN Jakarta VII (182)	32.314.496
Jumlah Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran		**26.974.874.248**

Rincian Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilakukan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	230.036.155.068	197.710.858.794
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	240.434.539.673	230.036.155.068
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	10.398.384.605	32.325.296.274
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran	(16.576.489.643)	7.278.524.182
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**26.974.874.248**	**25.046.772.092**
Penjelasan Selisih: **Revaluasi, Penyesuaian Selisih Kurs dan Penyesuaian lainnya atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Jurnal Manual)**	**26.974.874.248**	**25.046.772.092**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	**-**	**-**

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan TA 2024

C.2.4.1.8. Koreksi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp491.306.579,00 merupakan selisih penerimaan dengan pengeluaran non anggaran pihak ketiga dan piutang pengembalian kelebihan penyaluran PFK TAYL. Rincian perhitungan dan penjelasan dari Utang PFK yang dilakukan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal Utang PFK	4.320.940.427.530	4.536.797.626.051
Saldo Akhir Utang PFK	3.394.915.378.996	4.320.940.427.530
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(926.025.048.534)	(215.857.198.521)
Mutasi Transaksi PFK	(926.516.355.113)	(215.134.088.039)
Selisih Mutasi Transaksi dan Mutasi Saldo	(491.306.579)	723.110.482
Invoice PFK	-	(109.652.841)
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**(491.306.579)**	**613.457.641**
Penjelasan Selisih: **Penyesuaian pengakuan utang PFK BLBI**	**(491.306.579)**	**613.457.641**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Transaksi PFK	**-**	**-**

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Utang Perhitungan Fihak Ketiga TA 2025 dan TA 2024

C.2.4.1.9. Koreksi Kas KPPN

Koreksi Kas KPPN sebesar minus Rp19,00 merupakan koreksi atas saldo kas pada KPPN Khusus Penerimaan diakibatkan karena pembulatan.

C.2.4.2. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp653.686.043.549,00 dan minus Rp594.067.608.219,00. Penyesuaian Lain-lain TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp59.618.435.330,00 atau turun 10,04 persen dari TA 2024. Penyesuaian lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan.

Adapun rincian Penyesuaian Lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	(286.740)
Penyesuaian Transaksi RPL	(579.656.029.496)	77.811.228.379

Uraian	TA 2025	TA 2024
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	(117.999.999.971)	(677.792.588.991)
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	43.969.985.918	5.914.039.133
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	**(653.686.043.549)**	**(594.067.608.219)**

Rincian Penyesuaian Lain-lain TA 2025 dan TA 2024

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dan Rekening *Escrow* merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL dan Rekening *Escrow* bukan merupakan bagian fisik SAL, namun pada nilai catatan SAL (yang merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan) masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening tersebut. Penyesuaian Transaksi RPL sebesar minus Rp579.656.029.496,00 dan Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* sebesar minus Rp117.999.999.971,00 merupakan nilai total transaksi yang memengaruhi Catatan SAL tahun berjalan yang berasal dari aktivitas transaksi rekening non-SAL tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap catatan SAL sehingga tersaji nilai SAL yang sesungguhnya.

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Rekening Pemerintah Lainnya dan Rekening *Escrow* yang dilakukan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rekening Pemerintah Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal Rekening Pemerintah Lainnya	9.705.631.964.379	3.379.352.455.808
Saldo Akhir Rekening Pemerintah Lainnya	14.705.346.096.640	9.705.631.964.379
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	4.999.714.132.261	6.326.279.508.571
Koreksi Kas RPL	-	3.973
Mutasi Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya	4.420.058.102.765	6.404.090.740.923
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**(579.656.029.496)**	**77.811.228.379**
Penjelasan Selisih: **Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi**	**(579.656.029.496)**	**77.811.228.379**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Rekening Pemerintah Lainnya	**-**	**-**

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Rekening Pemerintah Lainnya TA 2025 dan TA 2024

2. Rekening *Escrow*

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal Rekening *Escrow*	157.050.664.847.791	143.663.249.475.207
Saldo Akhir Rekening *Escrow*	110.031.948.474.286	157.050.664.847.791
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	47.018.716.373.505	13.387.415.372.584
Mutasi Transaksi Rekening *Escrow*	47.136.716.373.476	12.709.622.783.593
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**(117.999.999.971)**	**(677.792.588.991)**
Penjelasan Selisih: **Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Pengelolaan SBN**	**(117.999.999.971)**	**(677.792.588.991)**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Rekening *Escrow*	**-**	**-**

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Rekening Escrow TA 2025 dan TA 2024

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp43.969.985.918,00 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL.

Dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025
Selisih Kiriman Uang TAYL	2.179.402.806
Pendapatan Hibah Dalam Rekening Khusus Ditangguhkan TAYL	-
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	41.790.583.112
Pembulatan	-
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	**43.969.985.918**

Selisih Kiriman Uang TAYL sebesar Rp2.179.402.806,00 merupakan penyesuaian saldo awal di TA 2025 yang disebabkan pelimpahan antara rekening pemerintah pada akhir Desember 2024 yang baru diterima di awal Januari 2025.

C.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp438.265.568.897.532,00. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL.

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Saldo Awal SAL	**457.543.275.049.219**	**459.497.872.070.698**
Koreksi Saldo Awal SAL	**-**	**-**
Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan TAB	**(93.146.980.793.000)**	**(56.381.000.000.000)**
SAL Awal setelah Penggunaan SAL & Koreksi Saldo Awal	**364.396.294.256.219**	**403.116.872.070.698**
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	**72.396.045.683.987**	**45.727.115.463.645**
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL:	**436.792.339.940.206**	**448.843.987.534.343**
Penyesuaian Pembukuan:		
Koreksi SiLPA	2.347.429.214.088	2.052.665.074.805
Selisih Kurs Kas di BUN (*Unrelized*)	147.916.719.129	6.326.893.741.118
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(78.992.638.471)	(61.355.941.239)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	(19)	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	14.803.399.120	85.975.723.953
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	(680.181.448.905)	859.144.688.316
Pembulatan		-
Koreksi Utang PFK	(491.306.579)	613.457.641
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	349.456.188.264	4.371.606.409
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	26.974.874.248	25.046.772.092
Total Penyesuaian Pembukuan	**2.126.915.000.875**	**9.293.355.123.095**
Penyesuaian Catatan SAL		
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	(286.740)
Penyesuaian Transaksi RPL	(579.656.029.496)	77.811.228.379
Penyesuaian Transaksi Rek. *Escrow*	(117.999.999.971)	(677.792.588.991)
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. RPL	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan	43.969.985.918	5.914.039.133
Transito Lainnya		
Pembulatan		

Uraian	TA 2025	TA 2024
Total Penyesuaian Catatan SAL	**(653.686.043.549)**	**(594.067.608.219)**
Saldo Akhir SAL	**438.265.568.897.532**	**457.543.275.049.219**
Saldo Akhir Catatan SAL	**438.265.568.897.532**	**457.543.275.049.219**

Rincian Perhitungan Sisa Anggaran Lebih TA 2025 dan TA 2024

Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Kas BUN	150.549.340.894.705	350.032.352.563.093
Kas di KPPN	838.386.237.732	697.379.362.618
Kas di Bendahara Pengeluaran	240.434.539.673	230.036.155.068
Kas pada BLU yang sudah disahkan	80.033.772.437.486	96.973.278.750.758
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan	1.143.927.612.103	10.552.112.773.536
Total Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**232.805.861.721.699**	**458.485.159.605.073**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Penyesuai Fisik SAL	(562.044.384.840)	(547.774.498.003)
Utang kepada Pihak Ketiga Penyesuai Fisik SAL	(4.211.541.711)	(350.140.071.933)
Penyesuaian Rekening Khusus		
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	460.147.840	-
Uang Muka Belanja Pegawai (*Prepayment*)		-
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan		-
Pengembalian *Escrow* PNBP		-
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang	(2.751.318.117)	(2.179.402.806)
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	28.254.272.661	(41.790.583.112)
Transito Lainnya		-
Transito Hibah		-
Penempatan Dana di Bank Umum	206.000.000.000.000	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**205.459.707.175.833**	**(941.884.555.854)**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**438.265.568.897.532**	**457.543.275.049.219**

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Dengan demikian, terdapat penurunan Saldo SAL pada TA 2025 adalah sebesar Rp19.277.706.151.687,00 atau turun 4,21 persen dari Saldo SAL TA 2024.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar	511.644.446.999.328	523.353.370.764.970
Investasi Jangka Panjang	4.928.357.954.648.995	4.391.554.633.530.362
Aset Tetap	1.325.247.519.728	1.292.738.475.911
Properti Investasi	31.069.011.385.705	32.757.504.933.043
Piutang Jangka Panjang	49.110.799.321.464	47.391.304.707.155
Aset lainnya	1.027.660.421.840.248	965.252.679.800.446
Jumlah Aset	**6.549.167.881.715.468**	**5.961.602.232.211.887**
Kewajiban Jangka Pendek	1.548.565.579.248.972	1.208.887.788.651.579
Kewajiban Jangka Panjang	9.064.382.517.543.273	8.329.330.087.466.090
Jumlah Kewajiban	**10.612.948.096.792.245**	**9.538.217.876.117.669**
Jumlah Ekuitas	**(4.063.780.215.076.777)**	**(3.576.615.643.905.782)**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**6.549.167.881.715.468**	**5.961.602.232.211.887**

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

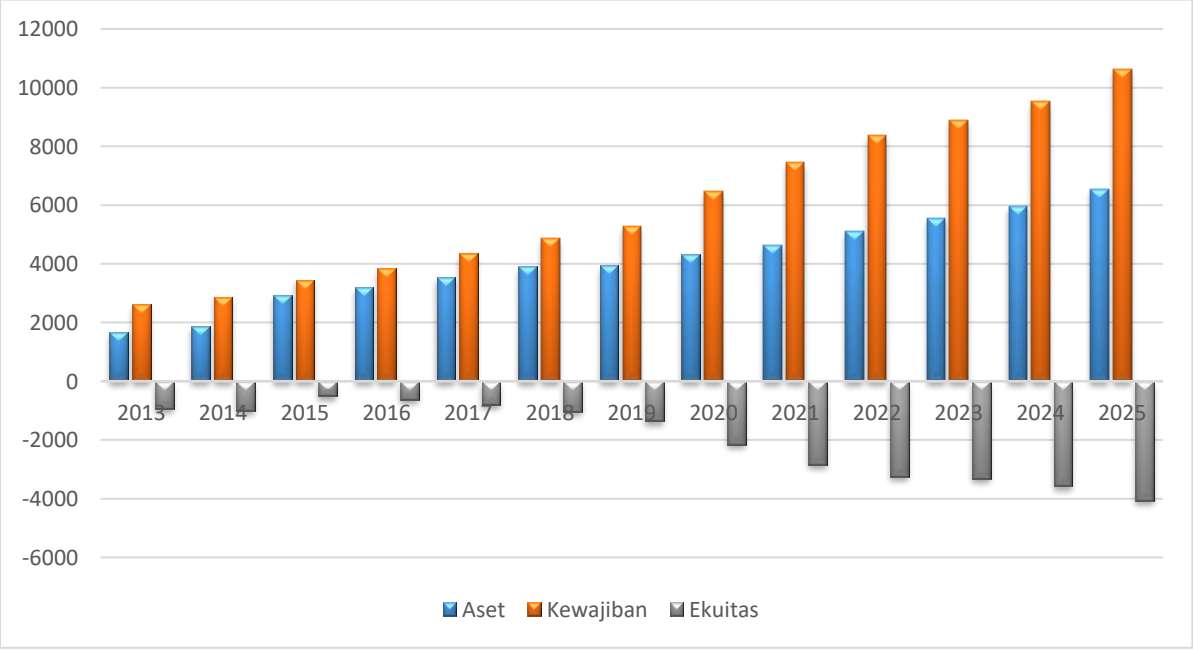

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1. ASET

D.2.1.1. ASET LANCAR

D.2.1.1.1. KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH

Kas di Rekening Pemerintah di BI dan Bank Umum dalam rupiah merupakan rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam mata uang rupiah. Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp123.169.863.770.107,00 dan Rp180.923.940.557.096,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp57.754.076.786.989,00 atau 31,92 persen.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2025 sebesar Rp123.169.863.770.107,00 dapat dirinci per akun sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	2.369.109.429.171	1.412.484.191.184
2.	Kas di Rekening Investasi Pemerintah BUN	2.063.555.922.621	1.318.079.197.015
3.	Kas di Rekening SAL	50.043.172.297.078	157.278.533.057.481
4.	Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah	50.036.681.450.795	-
5.	Kas di Rekening Antara Reksus	-	-
6.	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	2.965.477.325.410	6.134.714.082.349
7.	Kas di Rekening Penampungan Pendapatan Rekening Pembangunan Hutan	3.027.557.575.055	2.874.137.905.125
8.	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji	2.049.860.356.713	2.399.943.739.619
9.	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji	10.614.449.413.264	9.506.048.384.323
Jumlah		**123.169.863.770.107**	**180.923.940.557.096**

Perubahan saldo yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah antara lain kenaikan pada Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah sebesar Rp50.036.681.450.795,00 (100 persen) dan penurunan saldo pada Rekening Lain BI SAL (500000002980).

Penurunan saldo sebesar Rp107.235.360.760.403,00 bersumber dari transaksi pemindahbukuan dana SAL yang disimpan di BI ke instrumen penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra dengan total Rp200 triliun pada tanggal 12 September 2025 berdasarkan KMK Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah. Selain itu, juga terdapat transaksi pemindahbukuan dana SAL yang disimpan di BI ke instrumen penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra dengan total Rp76 triliun pada tanggal 12 November 2025 berdasarkan KMK 332 Tahun 2025. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2025 dilakukan penarikan dana sebelum jatuh tempo kembali ke SAL dengan nilai Rp70 triliun. Selanjutnya terdapat pembiayaan penggunaan SAL pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp85,60 triliun.

Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran LD1.

D.2.1.1.2. KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM VALUTA ASING

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing merupakan saldo rekening pemerintah di BI dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp27.379.477.124.598,00 dan Rp169.108.412.005.997,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp141.728.934.881.399,00 atau 83,81 persen. Rincian Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing dirinci per akun adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing	1.398.891.969.800	1.303.761.590.408
2	Kas di Rekening SAL dalam Valuta USD	-	135.969.518.719.521
3	Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD	7.204.406.363.062	3.672.424.884.520
4	Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD	139.532.675.973	537.263.479.023
5	Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro	3.738.408.555.028	21.602.777.733.225
6	Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro	3.892.027.285	23.223.159.124
7	Kas di rekening Penempatan Dalam Valuta Yen	14.698.741.215.978	5.977.775.835.318
8	Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen	24.310.393.419	21.666.604.858
9	Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta CNH	38.557.804.479	-
10	Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta AUD	132.736.119.574	-
Jumlah		**27.379.477.124.598**	**169.108.412.005.997**

Penurunan tersebut bersumber dari beragam faktor karena salah satu komponen pembentuk saldo pada pos kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing adalah Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan Rekening Kas Penempatan dalam valuta asing yang merupakan rekening tujuan akhir atas transaksi penerimaan dan pengeluaran negara baik berupa pendapatan perpajakan/non pajak maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam valuta asing, dengan rincian yang disajikan pada Lampiran LD2.

Penurunan signifikan saldo pos Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing terdapat pada Rekening Lain BI SAL USD (609028411980) yang turun sebesar ekuivalen Rp135.969.518.719.521,00 atau sebesar 100,00 persen. Penurunan saldo tersebut bersumber dari transaksi konversi/penukaran seluruh dana SAL yang disimpan pada Rek Lain BI SAL USD dalam rangka melaksanakan kebijakan penempatan uang negara dan pembiayaan penggunaan SAL.

D.2.1.1.3. KAS DI REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp20.422.950.926.725,00 dan Rp9.936.262.585.075,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp10.486.688.341.650,00 atau 105,54 persen merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang ada di BI dan Bank Umum yang menampung rekening pemerintah selain rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Rincian Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dirinci per akun adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	3	-
2	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	12.486.025.790.463	7.622.914.791.421
3	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat	2.219.320.306.167	2.082.717.172.958
4	Kas di Rekening Dana Bergulir	7	-

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
5	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji	5.716.464.494.897	229.354.385.423
6	Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	1.118.724.888	1.273.544.373
7	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	21.610.300	2.690.900
Jumlah		**20.422.950.926.725**	**9.936.262.585.075**

Kenaikan pada pos tersebut dipengaruhi oleh kenaikan saldo pada Rekening Lain BI Penerimaan, Pengeluaran Migas di mana terdapat pencadangan penerimaan migas untuk keperluan pembayaran DMO *Fee* dan *underlifting*, serta Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji yang berupa transaksi retur yang signifikan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Rincian rekening yang membentuk saldo pada pos Rekening Pemerintah Lainnya tersaji pada Lampiran LD3.

D.2.1.1.4. KAS DI REKENING KAS DI KPPN

Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp838.386.237.732,00 dan Rp697.379.362.618,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp141.006.875.114,00 atau 20,22 persen merupakan saldo pada satker satker KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang terdiri dari Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro sebesar Rp184.625.038,00 dan Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD sebesar Rp148.431.800,00. Selain itu terdapat pula saldo pada satker Penerimaan Negara yaitu Rekening Sub RKUN Penerimaan sebesar Rp7,00 dan Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa persepsi) sebesar Rp838.053.180.887,00.

Saldo Kas KPPN pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah merupakan saldo dari retur pada Desember 2025 yang telah diproses menjadi SP2D retur pada 8 Januari 2026.

Sementara itu, saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) pada KPPN Khusus Penerimaan merupakan saldo rupiah dan setara rupiah dengan kurs JISDOR Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2025 pada beberapa rekening.

Terdapat selisih sebesar minus Rp105.245.071.887,00 antara Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan sebesar Rp838.045.422.682,00 dengan saldo rekening koran pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp943.290.494.569,00. Adapun rincian selisih sebesar Rp105.245.071.887,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Rincian Selisih	Keterangan	Nilai	Tindak Lanjut Atas Selisih
1	RK ONLY	Transaksi yang hanya dicatat di Rekening CA, namun bukan transaksi MPN	(14.984.558.495)	Koreksi pendebetan di rekening CA
2	DUPLIKASI	Pencatatan dobel (lebih dari satu kali) kode billing pada catatan rekening CA	(974.902.766)	Koreksi pendebetan di rekening CA
3	SETTLEMENT ONLY	Kode billing hanya ada di settlement, namun tidak ada di Rekening CA	29.599.569	Koreksi pengkreditan di rekening CA
4	PENDEBETAN RK	Pengurangan di rekening CA yang bukan transaksi pelimpahan ke negara	40.445.696	Koreksi pengkreditan di rekening CA
5	PERBEDAAN PENCATATAN	Perbedaan tanggal pencatatan antara rekening koran CA dengan catatan di settlement	(89.407.002.746)	Tidak ada tindak lanjut karena akan sama di periode berikutnya

No.	Rincian Selisih	Keterangan	Nilai	Tindak Lanjut Atas Selisih
6	BEDA NOMINAL	Nominal yang tercatat pada CA berbeda dengan yang seharusnya terdapat di settlement	51.346.855	Koreksi pendebetan di rekening CA
	Total selisih		**(105.245.071.887)**	

Daftar Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Lampiran LD4.

D.2.1.1.5. KAS DALAM TRANSITO

Saldo Kas Dalam Transito per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp2.750.411.765,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.750.411.765,00 atau 100,00 persen. Saldo tersebut terdiri dari kas dalam transito pada BUN, rekening pinjaman/hibah, dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah ditambah selisih penerimaan kiriman uang dan pengeluaran kiriman uang.

Penurunan saldo selisih kiriman uang antar Rekening Bank Milik BUN disebabkan terselesaikannya aktivitas non anggaran pemerintah yang melibatkan rekening-rekening yang dikelola oleh Kuasa BUN Pusat Per 31 Desember 2025.

D.2.1.1.6. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp240.434.539.673,00 dan Rp230.036.155.068,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp10.398.384.605,00 atau 4,52 persen. Kas di Bendahara pengeluaran adalah total saldo yang dibukukan seluruh KPPN atas saldo kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran satuan kerja mitra kerja KPPN yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan. Kas Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah direkonsiliasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Kementerian dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terbesar diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri (BA 011) sebesar Rp136.659.031.598,00, Kementerian Sekretariat Negara (BA 007) sebesar Rp70.722.028.009,00, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (BA 138) sebesar Rp9.152.173.632,00, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (BA 137) sebesar Rp2.893.317.239,00, dan Kementerian Keuangan (BA 015) sebesar Rp2.756.820.624,00.

Daftar Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran LD5, LD6.

D.2.1.1.7. KAS LAINNYA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Jumlah Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.143.927.612.103,00 dan Rp10.552.112.773.536,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp9.408.185.161.433,00 atau 89,16 persen merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2025.

Kementerian dengan saldo Kas Lainnya terbesar diantaranya adalah Kementerian Kesehatan (BA 024) sebesar Rp347.036.444.311,00, Kementerian Sosial (BA 027) sebesar Rp282.216.918.724,00, Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032) sebesar Rp195.942.723.165,00, Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BA 103) sebesar Rp71.400.998.087, dan Kejaksaan Republik Indonesia (BA 006) sebesar Rp68.866.663.742,00.

Rincian saldo Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari hibah langsung dapat dilihat di Lampiran LD7, LD8.

D.2.1.1.8. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.008.685.913.493,00 dan Rp5.000.005.190,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.003.685.908.303,00 atau 120.073,59 persen. Akun ini merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BA 999.00, BA 999.07 dan BA 999.08. Detail menurut BA BUN adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	BA BUN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	999.00	6.000.000.000.000	-
2.	999.07	49.435	5.190
3.	999.08	8.685.864.058	5.000.000.000
Total		**6.008.685.913.493**	**5.000.005.190**

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.00

Saldo Kas Lainnya dan Setara kas pada neraca tingkat Kuasa BUN Pusat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.000.000.000.000,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara kas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.000.000.000.000,00 atau 100,00 persen.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut bersumber dari penempatan dana SAL pada Bank Umum Mitra berdasarkan KMK Nomor 332 Tahun 2025 dengan total penempatan sebesar Rp76.000.000.000.000,00 dalam jenis instrumen *deposito on call* dengan tenor tiga bulan. Penempatan dana pada Bank Umum Mitra tersebut dilakukan pada tanggal 12 November 2025 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Nama Bank	Nominal	Tanggal Penempatan	Tenor (hari)	Tanggal Jatuh Tempo
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	25.000.000.000.000	12 November 2025	92	12 Februari 2026
PT Bank Negara Indonesia (Persero), TBK	25.000.000.000.000	12 November 2025	92	12 Februari 2026
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	25.000.000.000.000	12 November 2025	92	12 Februari 2026
PT Bank DKI	1.000.000.000.000	12 November 2025	92	12 Februari 2026
Jumlah	**76.000.000.000.000**			

Namun, pada tanggal 15 Desember 2025 dilakukan penarikan dana sebelum jatuh tempo dengan nilai Rp70.000.000.000.000,00 sehingga nilai *outstanding* penempatan dana SAL berdasarkan KMK nomor 332 Tahun 2025 per 31 Desember 2025 adalah Rp6.000.000.000.000,00 dengan detail sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Nama Bank	Nominal	Tanggal Penempatan	Tenor (hari)	Tanggal Jatuh Tempo
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	2.000.000.000.000	12 November 2025	92	12 Februari 2026
PT Bank Negara Indonesia (Persero), TBK	2.000.000.000.000	12 November 2025	92	12 Februari 2026
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1.000.000.000.000	12 November 2025	92	12 Februari 2026
PT Bank DKI	1.000.000.000.000	12 November 2025	92	12 Februari 2026
Jumlah	**6.000.000.000.000**			

2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp49.435,00 dan sebesar Rp5.190,00. Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44.245,00 atau 852,50 persen. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 merupakan pendapatan jasa giro RPL Penyaluran SBUM yang belum disetorkan ke rekening negara dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Saldo sebesar Rp49.435,00 terdapat pada Kementerian Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman saldo jasa giro pada 3 rekening RPL bank pelaksana SBUM dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/ Kantor/ Pos	Saldo
1	100001000231768	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	Mega Syariah	999
2	70122065906	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	DKI SYARIAH	24.434
3	0010103666778	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD Kalsel Syariah	24.002
Jumlah				**49.435**

3. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA.999.08

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp8.685.864.058,00 dan Rp5.000.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.685.864.058,00 atau 73,72 persen. Saldo kas lainnya dan Setara Kas berasal dari Satker Istana Kepresidenan Jakarta yang merupakan Sisa Dana Bantuan Masyarakat tahun anggaran berjalan untuk digunakan pada akhir tahun dan awal tahun anggaran selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan anggaran Banmas dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke daerah selama akhir tahun dan minggu awal tahun.

D.2.1.1.9. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp80.033.772.437.486,00 dan Rp96.973.278.750.758,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp16.939.506.313.272,00 atau 17,47 persen terdiri dari Kas pada Badan Layanan Umum yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Layanan Umum serta koreksi saldo awal kas pada Badan Layanan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Kementerian/Lembaga yang memiliki saldo kas pada Badan Layanan Umum terbesar diantaranya Kementerian Keuangan (BA 015) sebesar Rp49.268.215.461.129,00, Kementerian Kesehatan (BA 024)

sebesar Rp7.909.709.226.715,00, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (BA 139) sebesar Rp6.387.408.224.847,00, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059) sebesar Rp3.890.269.313.582,00, dan Kementerian Agama (BA 025) seesar Rp2.731.002.325.848,00.

Rincian Saldo Kas pada Badan Layanan Umum dapat dilihat pada Lampiran LD9, LD10.

D.2.1.1.10. UANG MUKA DARI REKENING KHUSUS

Jumlah Uang Muka dari Rekening Khusus per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp81.356.687.244,00 dan Rp47.984.869.011,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp33.371.818.233,00 atau 69,55 persen. Uang Muka dari Rekening Khusus merupakan bagian dari kelompok akun uang muka rekening BUN yang digunakan untuk menampung pengeluaran-pengeluaran Satker yang telah diterbitkan SP2D atas kegiatan tertentu yang sumber dananya berasal dari Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan mekanisme Rekening Khusus (Reksus) yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah dan pada tanggal pelaporan keuangan belum dibebankan pada Rekening Khusus berkenaan.

Adapun Rincian Saldo Uang Muka Rekening Khusus per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
ADB	2.406.879.670	189.391.819
IFAD	1.727.967.062	1.338.906.116
JBIC/OECF	-	-
BANK DUNIA	74.760.147.336	46.045.990.247
IDB	1.401.625.443	44.160.000
AUSTRALIA	-	-
UNI EROPA	367.044.338	17.997.299
KFW	693.023.395	348.423.530
SBSN	-	-
Jumlah	**81.356.687.244**	**47.984.869.011**

Rincian Saldo Uang Muka Rekening BUN dapat dilihat pada Lampiran LD11.

D.2.1.1.11. INVESTASI DALAM DEPOSITO

Saldo Investasi dalam Deposito pada neraca tingkat Kuasa BUN Pusat Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp200.000.000.000.000,00 atau naik 100,00 persen dari jumlah per 31 Desember 2024.

Saldo Investasi dalam Deposito tersebut bersumber dari penempatan dana SAL pada Bank Umum Mitra berdasarkan KMK Nomor 276 Tahun 2025 yang ditempatkan sejak 12 September 2025 dengan total sebesar Rp200.000.000.000.000,00 dalam jenis instrumen *deposito on call* dengan tenor 6 bulan dengan detail sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Nama Bank	Nominal	Tanggal Penempatan	Tenor (hari)	Tanggal Jatuh Tempo
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	55.000.000.000.000	12 September 2025	182	13 Maret 2026
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	55.000.000.000.000	12 September 2025	182	13 Maret 2026
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	55.000.000.000.000	12 September 2025	182	13 Maret 2026
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	25.000.000.000.000	12 September 2025	182	13 Maret 2026
PT Bank Syariah Indonesia	10.000.000.000.000	12 September 2025	182	13 Maret 2026

D.2.1.1.12. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp33.936.817.416,00 dan Rp30.664.150.302,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.272.667.114,00 atau 10,67 persen. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya belanja secara penuh dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Perbandingan belanja dibayar di muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

BA Pel.	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
-	MPP Prakerja	-	1.048.387
-	SKK Migas	33.936.817.416	30.663.101.915
Jumlah		**33.936.817.416**	**30.664.150.302**

Belanja Dibayar Dimuka pada SKK Migas sebesar Rp33.936.817.416,00 yang merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja Dibayar Dimuka ini adalah Belanja Lain-Lain Teknologi Informasi dan Non Teknologi Informasi baik itu berupa sewa atau non sewa untuk mendukung Kegiatan Operasional Kantor Pusat dan 5 (lima) Kantor Perwakilan SKK Migas.

Rincian Beban Dibayar Dimuka (prepaid) adalah:
1. Beban Dibayar Dimuka Non Sewa berupa Lisensi, TI dan lainnya sebesar Rp28.533.312.699,00;
2. Beban Dibayar Dimuka Sewa pada Kantor Pusat sebesar Rp5.114.338.051,00;
3. Beban Dibayar Dimuka Sewa pada Kantor Perwakilan Kalsul sebesar Rp206.666.666,00;
4. Beban Dibayar Dimuka Sewa pada Kantor Perwakilan Sumbagut sebesar Rp82.500.000,00.

D.2.1.1.13. UANG MUKA BELANJA (*PREPAYMENT*)

Jumlah Uang Muka Belanja (*Prepayment*) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp10.000.000,00, tidak mengalami perubahan. Uang Muka Belanja (*Prepayment*) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo ini terdapat pada SKK Migas, merupakan Belanja Lain-Lain (*prepayment*) atas deposit sewa rumah dinas Kantor Perwakilan Sumbagsel.

D.2.1.1.14. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp3.841.383.273.645,00 dan Rp6.369.768.939.715,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.528.385.666.070,00 atau 39,69 persen. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut.

1. BA 999 01 sebesar Rp1.995.429.901.055,00 merupakan penyesuaian akrual kontribusi BI dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo tersebut mengalami penurunan Rp1.296.347.805.860,00 atau 39,38 persen dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.995.429.901.055	3.291.777.706.915
	Public Goods	1.357.543.122.500	2.536.264.580.000
	Non Public Goods	108.461.709.315	11.235.156.175
	Cluster A	529.425.069.240	744.277.970.740

2. BA 999 03 sebesar Rp29.636.519.414,00 merupakan pendapatan yang masih harus diterima berasal pengakuan pendapatan pada UAKPA BP BUMN dan UAKPA Direktorat SMI. Saldo tersebut mengalami kenaikan dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.005.004.843,00 atau 25,41 persen dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Satker	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	UAKPA BP BUMN	16.635.205.478	16.839.041.094
2	UAKPA Direktorat SMI	13.001.313.936	6.792.473.477
	Jumlah	**29.636.519.414**	**23.631.514.571**

Pendapatan yang masih harus diterima pada UAKPA BP BUMN merupakan pengakuan akrual atas bunga yang belum jatuh tempo atas investasi non permanen pada BUMN selaku Penerima Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN). Adapun rincian pendapatan yang masih harus diterima pada UAKPA BP BUMN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Perusahaan Negara selaku Penerima Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	13.385.205.478	13.589.041.094
2	Perum Perumnas	3.250.000.000	3.250.000.000
Jumlah		**16.635.205.478**	**16.839.041.094**

Pendapatan yang masih harus diterima pada UAKPA Direktorat SMI sebesar Rp13.001.313.936,00 merupakan pencatatan nilai pendapatan akrual imbal hasil dana FLPP yang belum digulirkan BP Tapera.

3. BA 999.07, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 sebesar Rp515.997.495.395,00. Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tersebut turun sebesar Rp1.766.240.556.399,00 atau 77,39 persen dari Jumlah Pendapatan Masih Yang Harus Diterima per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.282.238.051.794,00. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 terdapat pada:

   a. Kementerian Pertanian
   Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp52.190.709,00 dan Rp1.942.332.641.125,00.

   Saldo per 31 Desember 2025 Pendapatan yang Masih Harus Diterima berada pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian senilai Rp52.190.709,00 merupakan kelebihan pembayaran belanja subsidi pupuk kepada PT. Pupuk Kalimantan Timur TA.2020 berdasarkan koreksi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor R.470/PW.110/G.3/12/2022 sebesar Rp52.190.709,00.

   Terdapat mutasi kurang atas Pendapatan yang Masih Harus Diterima tahun 2025 senilai Rp1.942.280.450.416,00 berasal dari penyetoran ke kas negara senilai Rp1.749.802.207.583,00 dan senilai Rp192.478.242.833,00 yang merupakan pajak, dikarenakan penyaluran subsidi pupuk tahun 2024 oleh produsen pupuk, yang pembayarannya atas penyaluran tersebut dari Ditjen PSP sudah dipotong pajak sehingga pada saat terdapat temuan atas kelebihan penyaluran pupuk sudah tidak membayarkan sebesar nilai lebih bayar tersebut. Adapun rincian Penyetoran ke Kas Negara atas Lebih bayar Subsidi Pupuk Tahun 2024 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

ANPER	Nilai Subsidi yang dibayarkan Tahun 2025	Nilai Subsidi sesuai UJK BPK (Tripartit Tahun 2024)	Mutasi PYMHD 2025	PYMHD telah disetor ke kas negara	Potongan Pajak	Keterangan
	a	b	c = (a-b)			
PT Pusri Palembang	7.335.594.258.281	7.237.082.803.434	98.511.454.847	88.749.058.421	9.762.396.426	Tgl 25 November 2025 NTPN No. D01250NA0EC8DJ3K
PT Pupuk Kaltim	5.223.999.673.147	5.175.137.128.358	48.862.544.789	44.020.310.621	4.842.234.168	Tgl 25 Nopember 2025 NTPN No. 876863CIFU3DKKNJ
PT. Petro Kimia Gresi	18.139.176.937.837	16.344.270.487.057	1.794.906.450.780	1.617.032.838.541	177.873.612.239	Tgl 24 Nopember 2025 NTPN No. 244098N3ETHO2JHB
Total Lebih Bayar	**30.698.770.869.265**	**28.756.490.418.849**	**1.942.280.450.416**	**1.749.802.207.583**	**192.478.242.833**	

b. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Saldo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Pendapatan yang Masih Harus Diterima masing-masing adalah sebesar Rp1.296.472.389,00 dan Rp912.110.186,00.
Pada Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan tindak lanjut atas pendapatan yang masih harus diterima berupa setoran ke kas negara senilai total Rp430.708.400,00. Pada 31 Desember 2025, masih terdapat saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp1.296.472.389,00 berasal dari koreksi penyajian beban bunga subsidi KPR dan tagihan 395 debitur yang telah dilunasi asuradur.

c. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp514.648.832.297,00 dan Rp338.993.300.483,00. Nilai tersebut diperoleh karena adanya kelebihan pembayaran subsidi bunga kredit program lainnya atas penyaluran tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 oleh Himbara.

4. BA 999.99, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.300.319.357.781,00 dan Rp772.121.666.435,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp528.197.691.346,00 atau 68,41 persen. Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari:
   a. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp10.078.898.095,00 dan Rp4.551.597.135,00. Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari kewajiban pembayaran ke kas negara atas Transfer BMN Hulu Migas antar KKKS;
   b. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp787.978.101.693,00 dan Rp685.180.716.922,00. Jumlah tersebut merupakan SBP Triwulan I TA 2026 (atas hasil kegiatan usaha Panas Bumi periode Triwulan IV Tahun 2025) yang diterima pada bulan Januari 2026.
   c. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp979.720,00 dan Rp0,00 merupakan nilai dari Pendapatan yang masih Harus Diterima dari piutang PNBP Hasil Lelang Barang Gratifikasi tanggal 22 Agustus 2025.
   d. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp502.261.378.273,00 dan Rp82.389.352.378,00. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tersebut terdapat pada satker transaksi khusus pengelola kas Negara yang berasal dari:
      1) Pendapatan dari Penempatan Uang Negara Sesuai KMK 276 Tahun 2025 Yang Masih Harus Diterima Desember 2025 senilai Rp418.916.164.383,00;
      2) Pendapatan dari Penempatan Uang Negara Sesuai KMK 332 Tahun 2025 Yang Masih

Harus Diterima Desember 2025 senilai Rp10.996.549.315,00;

3) Pendapatan dari Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* Yang Masih Harus Diterima pada bulan Desember 2025 senilai Rp49.117.372.448,00;
4) Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau hibah Masih Harus Diterima Desember 2025 sebesar Rp22.177.629.549,00; serta
5) Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional dan/atau Bank Penyalur Gaji bulan Desember 2025 sebesar Rp1.053.662.578,00.

D.2.1.1.15. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp247.508.160.255.871,00 dan Rp253.122.402.777.910,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.614.242.522.039,00 atau 2,22 persen. Piutang Bukan Pajak tersebut merupakan piutang pada Investasi Pemerintah (BA 999.03), Transfer Ke Daerah (BA 999.05), Belanja Subsidi (BA 999.07), Belanja Lain-Lain (BA 999.08) dan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak ini terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Debitur	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Piutang Dividen (BA 999.03)	81.442.490.185	10.924.958.559.900
2.	Piutang Transfer ke Daerah (BA 999.05)	17.927.792.405.262	14.014.954.200.303
3.	Piutang Subsidi (BA 999.07)	12.350.000.000	12.350.000.000
4.	Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	327.624.924.315	299.050.825.309
5.	Piutang PNBP (BA 999.99)	229.158.950.436.109	227.871.089.192.398
Jumlah		**247.508.160.255.871**	**253.122.402.777.910**

D.2.1.1.15.1. Piutang Dividen (BA 999.03)

Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp81.442.490.185,00 dan Rp10.924.958.559.900,00, mengalami penurunan sebesar Rp10.843.516.069.715,00 atau 99,25 persen.

Perubahan saldo piutang negara bukan pajak per 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Saldo piutang negara bukan pajak pada tanggal 1 Januari 2025 Rp10.924.917.871.782,00 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp10.906.308.456.708,00 dan denda sebesar Rp18.609.415.074,00.

b. Terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp10.882.481.878.260,00, yaitu pembayaran piutang dividen interm PT BRI TB 2024.

c. Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN per tanggal 31 Desember 2025 tercatat menjadi sebesar Rp42.435.993.522,00 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.826.578.448,00 dan denda sebesar Rp18.609.415.074,00.

Rincian Piutang PNBP Dividen dan Denda dapat dilihat pada Lampiran LD12.

d. Terdapat piutang lainnya pada UAKPA DJPK pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.496.663,00 dan Rp40.688.118,00. Nilai tersebut merupakan Piutang Bukan Pajak yang berasal dari Pendapatan Bunga dari PT. SMI yang belum disetorkan ke Kas Negara sehingga menjadi pendapatan yang akan diterima (piutang) dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Rincian Rekening Bank	31 Desember 2025	31 Desember 2024
BNI a.c 2926022009/SMI PEN Pemda 2021	5.249.602	23.618.216
BRI a.c 0206-01-010508-30-3/PT Sarana Multi Infrastruktur	1.247.061	17.069.902
Jumlah	**6.496.663**	**40.688.118**

e. Terdapat piutang lainnya pada UAKPA BP BUMN pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp39.000.000.000,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan bunga Perum Perumnas yang sudah jatuh tempo namun sampai dengan 31 Desember 2025 belum dibayarkan ke Kas Negara. Adapun rincian piutang lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Jenis	Jangka Waktu Perhitungan	Suku Bunga	Pinjaman	Total Bunga	Pembayaran Bunga	Pengakuan Piutang Bunga
1	Seri A	31 Desember 2024 s.d. 29 Mei 2025 (6 bulan)	6%	200.000.000.000	6.000.000.000	-	6.000.000.000
		30 Mei 2025 s.d. 30 November 2025 (6 bulan)			6.000.000.000	-	6.000.000.000
2	Seri B	31 Desember 2024 s.d. 29 Mei 2025 (6 bulan)		450.000.000.000	13.500.000.000	-	13.500.000.000
		30 Mei 2025 s.d. 30 November 2025 (6 bulan)			13.500.000.000	-	13.500.000.000
Jumlah					**39.000.000.000**	**-**	**39.000.000.000**

D.2.1.1.15.2. Piutang Transfer ke Daerah (BA 999.05)

Piutang Transfer ke Daerah BA 999.05 per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp17.927.792.405.262,00 dan Rp14.014.954.200.303,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.912.838.204.959,00 atau 27,92 persen. Aset yang disajikan dalam Neraca TA 2025 terdiri atas Piutang Transfer ke Daerah sebagaimana rincian berikut:

(dalam rupiah)

No.	Rincian Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Piutang TKD – Dana Transfer Umum	13.327.956.550.999	12.316.984.195.966
2.	Piutang TKD – Dana Transfer Khusus	3.903.739.769.665	-
3.	Piutang TKD - Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK)	48.493.741.213	80.977.185.711
4.	Piutang TKD Diestimasi	647.602.343.385	1.616.992.818.626
Jumlah		**17.927.792.405.262**	**14.014.954.200.303**

Rincian Piutang DBH, DAK Non Fisik dan Dana Desa dapat dilihat pada Lampiran LD13.

1. Piutang TKD - Dana Transfer Umum

Piutang TKD - Dana Transfer Umum per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp13.327.956.550.999,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.010.972.355.033,00 atau 8,21 persen dari 31 Desember 2024 sebesar Rp12.316.984.195.966,00. Saldo Piutang TKD – Dana Transfer Umum disajikan secara rinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Jenis Dana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a.	**Piutang Dana Bagi Hasil**	**13.327.956.551.000***	**9.795.347.278.000**
	Piutang Dana Bagi Hasil PPh	103.766.242.000	103.766.242.000
	Piutang Dana Bagi Hasil PBB	1.069.096.632.000	955.205.017.000
	Piutang Dana Bagi Hasil CHT	93.698.787.000	93.698.787.000
	Piutang DBH SDA Minyak Bumi	800.173.360.000	564.620.892.000
	Piutang DBH SDA Gas Bumi	2.652.411.013.000	2.469.226.607.000
	Piutang DBH SDA Mineral dan Batu Bara	4.954.607.905.000	3.761.452.930.000
	Piutang DBH SDA Panas Bumi	72.825.093.000	60.754.392.000
	Piutang DBH SDA Kehutanan	461.146.482.000	261.697.739.000
	Piutang DBH SDA Perikanan	728.172.547.000	537.929.368.000
	Piutang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	2.392.058.490.000	986.995.304.000
b.	**Piutang Dana DAK Non Fisik**	**-**	**2.497.771.161.333**
	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	-	-
	Bantuan Operasional Sekolah	-	4.571.826.433
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	-	1.735.012.552
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	-	899.077.902
	Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	-	501.939.039.939
	Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	-	64.572.883.554
	Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	-	78.426.493.502
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	-	7.837.852.057
	Bantuan Operasional Kesehatan	-	1.535.563.005.887
	BOK Dinas	-	-
	BOK POM	-	-
	BOK Puskesmas	-	-
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	206.911.148.614
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	11.528.435.509
	Dana Pelayanan Kepariwisataan	-	9.932.248.602
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	18.264.116.971
	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	-	19.009.490.528
	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	17.574.335.231
	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	-	18.943.614.529
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	62.579.523
	Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	-	-
c	**Piutang Dana Keistimewaan DIY**	**-**	**23.865.756.634**
Total		**13.327.956.551.000***	**12.316.984.195.966**

*selisih Rp1 merupakan pembulatan-

a. Piutang TKD – Dana Bagi Hasil

Piutang TKD – Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp13.327.956.550.999,00 dan sebesar Rp9.795.347.278.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.532.609.272.999,00 atau 36,04 persen yang disebabkan adanya pengakuan Piutang TKD - DBH Lebih Bayar Tahun 2024 sesuai PMK 120 Tahun 2025. Nilai Piutang TKD – Dana Bagi Hasil merupakan nilai lebih bayar DBH kepada pemerintah daerah.

b. Piutang TKD – Dana DAK Non Fisik

Piutang TKD – Dana DAK Non Fisik per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.497.771.161.333,00. Terjadi penurunan sebesar Rp2.497.771.161.333,00 atau 100 persen dikarenakan Piutang TKD – Dana DAK Non Fisik pada tahun 2024 masuk ke dalam kelompok akun Piutang TKD – Dana Transfer Umum, sedangkan tahun 2025 direklasifikasi masuk ke dalam kelompok akun Piutang TKD – Dana Transfer Khusus. Nilai Piutang TKD – Dana DAK Non Fisik merupakan nilai sisa Dana DAK Non Fisik pada pemerintah daerah maupun penerima manfaat.

c. Piutang TKD – Dana Keistimewaan DIY

Piutang TKD – Dana Keistimewaan DIY per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp23.865.756.634,00. Terjadi penurunan sebesar Rp23.865.756.634,00 atau 100

persen dikarenakan Piutang TKD – Dana Keistimewaan DIY pada tahun 2024 masuk ke dalam kelompok akun Piutang TKD – Dana Transfer Umum, sedangkan tahun 2025 direklasifikasi masuk ke dalam kelompok akun Piutang TKD – DDIOKK.

2. Piutang TKD – Dana Transfer Khusus

Piutang TKD - Dana Transfer Khusus per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.903.739.769.665,00 yang baru diakui pada 2025. Piutang Dana Transfer Khusus pada 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.903.739.769.665,00 atau 100,00 persen dibanding dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, dikarenakan pada tahun 2024 Piutang TKD – Dana DAK Non Fisik masuk dalam kelompok akun Piutang TKD Dana Transfer Umum, sedangkan di tahun 2025 direklasifikasi masuk ke dalam kelompok akun berbeda yakni Piutang TKD – Dana Transfer Khusus. Mutasi dan rincian Saldo Piutang TKD – Dana Transfer Khusus disajikan secara rinci sebagai berikut:

Mutasi Saldo Piutang TKD – Dana Transfer Khusus

(dalam rupiah)

No.	Transaksi	31 Desember 2025
a	Piutang awal DAK Non Fisik pada Piutang TKD – Dana Transfer Khusus	-
b	Reklasifikasi dari Piutang DAK Non Fisik pada Piutang TKD – Dana Transfer Umum	2.497.771.161.333
c	Penyesuaian Saldo Awal Piutang DAK Non Fisik (*Update* Laporan Sisa Dana 2024)	2.568.604.074.036
d	Penyelesaian Piutang melalui Potongan SPM	(2.601.926.768.503)
e	Penyelesaian Piutang melalui Setoran Langsung	(40.334.545.342)
f	Penyesuaian Saldo Akhir Piutang DAK Non Fisik (*Update* Laporan Sisa Dana 2025)	1.479.625.848.143
Piutang Akhir DAK Non Fisik – Dana Transfer Khusus		**3.903.739.769.667**

Rincian Saldo Piutang TKD – Dana Transfer Khusus

(dalam rupiah)

No.	Jenis Dana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	1.578.570.032	-
b	Bantuan Operasional Sekolah	-	-
c	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	-	-
d	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	-	-
e	Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	1.568.453.720.888	-
f	Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	341.208.737.698	-
g	Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	295.934.985.142	-
h	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	9.689.961.153	-
i	Bantuan Operasional Kesehatan	-	-
j	BOK Dinas	505.491.258.862	-
k	BOK POM	25.694.502.525	-
l	BOK Puskesmas	763.051.211.604	-
m	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	289.363.975.535	-
n	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	10.750.980.801	-
o	Dana Pelayanan Kepariwisataan	630.693.917	-
p	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	24.784.460.583	-
q	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	1.534.761.000	-
r	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	40.309.592.367	-
s	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	10.281.599.037	-
t	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	220.080.300	-
u	Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	14.760.678.223	-
Jumlah		**3.903.739.769.667**	**-**

3. Piutang TKD - Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK)

Piutang TKD DDIOKK per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp48.493.741.213,00, mengalami penurunan sebesar Rp32.483.444.498,00 atau 40,11 persen dari 31 Desember 2024 sebesar Rp80.977.185.711,00 dikarenakan adanya penyesuaian Piutang TKD DDIOKK - Dana Desa dan pelunasan Piutang TKD DDIOKK – DIY. Saldo Piutang TKD DDIOKK dapat dirincikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Jenis Dana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a.	Dana Keistimewaan DIY	-	-
b.	Dana Desa	48.493.741.213	80.977.185.711
Jumlah		**48.493.741.213**	**80.977.185.711**

a. Piutang TKD – DDIOKK Dana Keistimewaan DIY

Piutang TKD – DDIOKK Dana Keistimewaan DIY per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang TKD – Dana Keistimewaan DIY pada tahun 2024 masuk ke dalam kelompok akun Piutang TKD – Dana Transfer Umum, sedangkan tahun 2025 direklasifikasi masuk ke dalam kelompok akun Piutang TKD – DDIOKK sehingga saldo awal 2025 sebesar Rp23.865.756.634,00. Penyelesaian atas piutang tersebut dilakukan melalui pemotongan penyaluran Dana Keistimewaan pada penyaluran tahap I tahun 2025 sebesar Rp23.865.756.634,00 sehingga sisa piutang menjadi Rp0,00. Kemudian di tahun 2025 terdapat perubahan peraturan pada PMK Nomor 88 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa sisa Dana Keistimewaan DIY menjadi SiLPA atau pembentuk dana abadi daerah yang mengakibatkan tidak ada lagi pencatatan piutang Dana Keistimewaan.

(dalam rupiah)

No.	Transaksi	31 Desember 2025
a	Piutang awal Piutang TKD – DDIOKK Dana Keistimewaan DIY	-
b	Reklasifikasi dari Piutang TKD – DTU Dana Keistimewaan DIY	23.865.756.634
c	Pelunasan Piutang Dana Keistimewaan DIY	(23.865.756.634)
Piutang Akhir Dana Keistimewaan DIY		**-**

b. Piutang TKD – DDIOKK Dana Desa

Piutang TKD – DDIOKK Dana Desa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp80.977.185.711,00 dan Rp48.493.741.213,00. Saldo Piutang TKD DDIOKK - Dana Desa adalah nilai sisa dana desa di Rekening Kas Desa tahun 2024 dan sebelumnya yang tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2025 dan belum memperhitungkan sisa dana desa di Rekening Kas Desa tahun 2025.

4. Piutang TKD Diestimasi

Piutang TKD-Diestimasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp647.602.343.385,00 dan Rp1.616.992.818.626,00, mengalami penurunan sebesar Rp969.390.475.241,00 atau 59,95 persen. Saldo akhir Piutang TKD-Diestimasi disajikan secara rinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Jenis Dana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a.	DBH PBB Lainnya	4.917.964.734	-
b.	Cukai Hasil Tembakau (CHT)	40.041.237.046	-
c.	DBH Minerba - Landrent	30.836.754.665	-
d.	DBH Minyak Bumi	570.952.163.342	-
e.	DBH Kehutanan - IIUPH	854.223.598	-
f.	DBH Perikanan	-	190.366.284.622
g.	DBH Perkebunan Sawit	-	1.426.626.534.004
Jumlah		**647.602.343.385**	**1.616.992.818.626**

D.2.1.1.15.3. Piutang Subsidi (BA 999.07)

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.350.000.000,00. Jumlah Piutang Bukan Pajak tersebut tidak mengalami perubahan dibanding Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.350.000.000,00.

Saldo tersebut terdiri dari Hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp12.350.000.000,00. Piutang ini merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri.

D.2.1.1.15.4. Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp327.624.924.315,00 dan Rp299.050.825.309,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp28.574.099.006,00 atau 9,55 persen. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

BA Pel.	Uraian BA Pel.	31 Desember 2025	31 Desember 2024
015	Kementerian Keuangan	-	7.101.770.243
018	Kementerian Pertanian	287.901.122.353	288.901.122.353
059	Kementerian Komdigi	36.318.160.039	-
999	MPP Kartu Prakerja	2.445.234.900	2.445.234.900
999	SKK Migas	960.407.023	602.697.813
Jumlah		**327.624.924.315**	**299.050.825.309**

Piutang bukan pajak tersebut terdapat pada:

1. Kementerian Keuangan, saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Saldo Piutang tahun 2024 sebesar Rp7.101.770.243,00 terdapat pada satker Kanwil DJPB Papua sebesar Rp5.364.724.659,00 yang merupakan saldo piutang atas denda PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2024 dan telah dilakukan pelunasan di bulan April 2025.

   Saldo Piutang tahun 2024 pada satker Kanwil DJPB Papua Barat sebesar Rp1.737.045.584,00 yang merupakan saldo piutang atas denda PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2024 dan telah dilakukan pelunasan di bulan April 2025.

2. Kementerian Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp287.901.122.353,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	PT. SHS	PT. Pertani	Jumlah	PT. SHS	PT. Pertani	Jumlah
Piutang CBN	235.312.610.399	36.794.725.767	272.107.336.166	235.312.610.399	36.794.725.767	272.107.336.166
Biaya Distribusi CBN	13.133.698.434	3.698.612.007	16.832.310.441	13.133.698.434	3.698.612.007	16.832.310.441
Temuan LHP CBN	3.700.000.000	-	3.700.000.000	4.700.000.000	-	4.700.000.000
Jasa Giro Dana CBN	(1.039.912.247)	(3.698.612.007)	(4.738.524.254)	(1.039.912.247)	(3.698.612.007)	(4.738.524.254)
Total	**251.106.396.586**	**36.794.725.767**	**287.901.122.353**	**252.106.396.586**	**36.794.725.767**	**288.901.122.353**

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan rincian piutang bukan pajak sebagai berikut:

a. Saldo Piutang CBN merupakan nilai benih CBN per tanggal pelaporan yang masih terdapat pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero). Nilai Piutang CBN diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas Pengelolaan Bagian Anggaran 999.08 Kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No. R.320/PW.130/G.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020. Nilai Piutang CBN PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp235.312.610.398,50 terdiri dari:

   1) Persediaan bahan dan pestisida sebesar Rp109.232.000,00;
   2) Uang muka *fee* pengelolaan CBN sebesar Rp7.608.666.240,00;
   3) Piutang lain-lain untuk relokasi senilai Rp234.096.700,00;
   4) Biaya penyimpanan dan pemeliharaan CBN sebesar Rp4.930.295.737,00 (sebesar Rp1.041.018.103,00 pada rekening bank per 31 Desember 2019);
   5) Benih yang tidak berada di gudang dan penangkar sebesar Rp222.430.319.721,50.

   Sedangkan untuk nilai piutang CBN pada PT. Pertani (Persero) sebesar Rp36.794.725.767,00 merupakan benih yang tidak berada di gudang penangkar.

b. Biaya Distribusi CBN merupakan nilai biaya distribusi penyaluran CBN per tanggal pelaporan yg masih terdapat pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp13.133.698.434,00 dan PT. Pertani (Persero) sebesar Rp3.698.612.007,00. Nilai Biaya Distribusi CBN per 31 Desember 2024 ini diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas Pengelolaan Bagian Anggaran 999.08 Kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No: R.320/PW.130/G.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020.

c. Saldo Piutang Bukan Pajak senilai Rp3.700.000.000,00 tersebut merupakan Temuan LHP BPK RI No. 25/LHP/XVII/06/2013 berupa uang muka penyegaran benih CBN pada PT Sang Hyang Seri (Persero) yang harus disetorkan ke Kas Negara. Pada periode Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 terdapat cicilan pembayaran penyelesaian kewajiban PT.SHS sebesar Rp111.607.957,00 dan senilai Rp1.000.000.000,00 pada periode Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

d. Jasa giro pengelolaan dana CBN pada BUMN pelaksana CBN sebesar Rp4.738.524.254,00 yang sudah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian: 1) PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp1.039.912.247,00, merupakan Saldo Induk yang berasal dari biaya penyimpanan dan pemeliharaan CBN; dan 2) PT. Pertani (Persero) sebesar Rp3.698.612.007,00 merupakan Saldo Induk yang berasal dari biaya distribusi benih yang masih disimpan di rekening bank PT. Pertani (Persero).

e. Terhadap piutang bukan pajak tersebut, Ditjen Tanaman Pangan telah melakukan upaya penagihan sebagai berikut:
   1) Surat Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan No. B.111/PW.220/C.1/04/2022 tanggal 5 April 2022 tentang penyelesaian kewajiban atas temuan BPK-RI;
   2) Surat Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan No. B.1907/PW.220/C.1/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang penyelesaian kewajiban tahun 2023;
   3) Surat Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan No. B.2991/PW.220/C.1/09/2023 tanggal 6 September 2023 tentang penyelesaian kewajiban tahun 2023;
   4) Surat Plt. Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan No. B-4359/KU.100/C.1/12/2023 Tanggal 10 Desember 2023 tentang Penyelesaian Kewajiban Tahun 2023;

5) Surat Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan No. 2321/PW.030/C.1/06/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang penyelesaian kewajiban Tahun 2024; dan
6) Surat Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan No. 5472/PW.030/C.1/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang penyelesaian kewajiban Tahun 2024.

3. Kementerian Komdigi sebesar Rp36.318.160.039,00 yang merupakan Piutang Lainnya yang berasal dari kelebihan pembayaran realisasi Bantuan/Subsidi Operasional LPU selama periode tahun anggaran 2025.

4. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp2.445.234.900,00 yang merupakan Pengembalian belanja implementasi pelatihan Program Kartu Prakerja atas temuan dari Direktorat Pemantauan dan Evaluasi MPPKP dan Tuntutan Perbendaharaan atas Rekomendasi Pemeriksaan BPK RI dan Inspektur Kemenko Perekonomian kepada Penyedia Jasa Perorangan yang belum dilakukan pengembalian belanja kepada MPPKP.

5. SKK Migas sebesar Rp960.407.023,00 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Transaksi	Jumlah
1.	Kelebihan Kontrak Jasa Tenaga Keamanan 2018	108.533.011
2.	Piutang Pegawai	851.874.012
3.	Piutang Pihak Ketiga	-
Jumlah		**960.407.023**

Piutang pihak ketiga sebesar Rp108.533.011,00 merupakan piutang atas kelebihan bayar kontrak jasa tenaga keamanan tahun 2018 yang masuk kategori piutang macet. Atas piutang tersebut SKK Migas telah mengalihkan urusan penagihan piutang macet tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta melalui surat nomor SRT-0231/SKKIC0000/2024/S0 tanggal 11 September 2024 hal Penyerahan Piutang Negara atas nama PT. Jatayu Alihdaya Bagadata. Pada tanggal 1 Oktober 2024 Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta telah menerima pengalihan tersebut melalui surat No. SP3N-374/PUPNC.10.05/2024 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT Jatayu Alihdaya Bagadata. Surat tersebut menyatakan bahwa pengurusan piutang negara beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V. Pada 10 Desember 2025, telah terbit Surat Paksa nomor SP-981/PUPNC.10.00/2025 yang dikeluarkan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta yang ditujukan kepada PT Jatayu Alihdaya Bagadata.

D.2.1.1.15.5. Piutang Bukan Pajak (BA 999.99)

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp229.158.950.436.109,00 dan Rp227.871.089.192.398,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.287.861.243.711,00 atau 0,57 persen. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pada UAPBUN TK DJPB	109.777.977.130	107.792.038.684
Piutang Pada UAPBUN TK DJA	13.370.076.865.340	15.778.396.457.441

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pada UAPBUN TK DJKN	215.679.095.593.639	211.984.900.696.273
Jumlah	**229.158.950.436.109**	**227.871.089.192.398**

1. Piutang Pada UAPBUN TK DJPB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp109.777.977.130,00 dan Rp107.792.038.684,00, terdapat kenaikan sebesar Rp1.985.938.446,00 atau 1,84 persen yang disebabkan adanya piutang bukan pajak baru per 31 Desember 2025 dengan rincian piutang sebagai berikut.
   a. Piutang Jasa Giro Bulan Desember 2025 ASABRI sebesar Rp146.493.145,00;
   b. Piutang Potongan utang Non TGR (Non Dapem Desember 2025) ASABRI sebesar Rp89.235.212,00;
   c. Piutang Setoran SUP (SUP Bulan Desember dan SUP Retur Desember 2025) ASABRI Rp3.931.004.290,00;
   d. Piutang Kelebihan Pencairan Desember 2025 ASABRI Rp1.162.727.896,00;
   e. SUP Retur bulan Desember 2025 TASPEN Rp17.650.833.778,00;
   f. SUP Kompensasi bulan Desember 2025 TASPEN Rp36.900.379.234,00;
   g. Kelebihan Pencairan belanja pensiun bulan Desember 2025 TASPEN Rp34.290.541.202,00;
   h. Potongan utang non TGR (setoran Kasneg Non Dapem dan Susulan Desember 2025) TASPEN Rp807.862.658,00;
   i. Jasa Giro bulan Desember 2025 TASPEN Rp1.180.807.374,00; dan
   j. Kelebihan pencairan dana luran Jaminan Kesehatan TW IV 2025 BPJS Rp13.618.092.341,00.

2. Piutang PNBP UAPBUN TK DJA merupakan Piutang PNBP Sumber Daya Alam periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp13.370.076.865.340,00 dan Rp15.778.396.457.441,00 merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas dan panas bumi.

   Jumlah tersebut terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, *overlifting* KKKS dan piutang PNBP migas lainnya, serta kekurangan setoran bagian pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	%
Hasil Penjualan Minyak	6.420.572.709.806	8.436.256.854.277	(2.015.684.144.471)	(23,89)
Hasil Penjualan Gas	3.370.701.373.711	4.516.099.950.074	(1.145.398.576.363)	(25,36)
Overlifting KKKS	3.566.680.892.539	1.898.439.889.435	1.668.241.003.104	87,87
PNBP Migas lainnya	12.121.889.284	927.599.763.655	(915.477.874.371)	(98,69)
Jumlah Piutang	**13.370.076.865.340**	**15.778.396.457.441**	**(2.408.319.592.101)**	**(15,26)**

Saldo piutang PNBP Sumber Daya Alam Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.370.076.865.340,00 adalah lebih rendah Rp2.408.319.592.101,00 dari posisi per 31 Desember 2024.

Saldo piutang PNBP Sumber Daya Alam Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.370.076.865.340,00 tersebut terdiri dari:

a. Hasil penjualan minyak atas transaksi *lifting* minyak yang berasal dari transaksi belum jatuh

tempo sebesar Rp6.420.572.709.806,00. Piutang dimaksud umumnya diselesaikan pada bulan Januari 2026.

b. Hasil penjualan gas atas transaksi *lifting* gas yang berasal dari transaksi yang belum jatuh tempo sebesar Rp3.370.701.373.711,00. Piutang dimaksud umumnya diselesaikan pada bulan Januari 2026.

c. Saldo piutang *overlifting* sebesar Rp3.566.680.892.539,00 seluruhnya berasal dari estimasi tagihan *overlifting* tahun 2025 dan per 31 Desember 2025 belum ditagihkan kepada KKKS.

d. Transaksi PNBP Migas Lainnya sebesar Rp12.121.889.284,00, dari saldo piutang tersebut termasuk di dalamnya sebagai berikut.

1) Piutang atas denda keterlambatan penyetoran atas Gas Bumi sebesar USD692,653 atau ekuivalen Rp11.581.158.690,00;

2) Piutang atas transaksi Jasa Pandu Tunda sebesar Rp540.730.594,00.

3. Piutang PNBP UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp215.679.095.593.639,00 dan Rp211.984.900.696.273,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a.	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Eks Pertamina	-	-
b.	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	215.647.103.394.983	211.957.341.532.847
c.	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	31.992.198.656	27.559.163.426
Jumlah		**215.679.095.593.639**	**211.984.900.696.273**

a. Piutang yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina.

Perhitungan sewa aset eks Pertamina pada mulanya didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523,00. Berdasarkan surat tersebut, seluruh BMN eks Pertamina kelompok aset eks KKKS senilai Rp16,2 Triliun yang digunakan oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP disetujui untuk dikenakan biaya sewa, kecuali terhadap aset berupa sumur dan tanah sepanjang merupakan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) menyampaikan Laporan Inventarisasi Aset Eks Pertamina kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menerangkan hasil inventarisasi aset eks Pertamina kelompok eks KKKS yang digunakan oleh Pertamina berupa sumur, tanah, peralatan, bangunan, dan aset lainnya, dengan pengelompokan sebagai aset masih digunakan, aset tidak digunakan, aset digunakan anak perusahaan lainnya, aset tidak ditemukan, dan aset dalam proses usul hapus, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Status Aset	Bangunan	Equipment	Lain-Lain	Sumur	Tanah	Grand Total
Digunakan	601.111	5.889.151	140.667	5.404.568	1.741.017	13.776.514
Digunakan Anak Usaha Lain	241	203.899	1.312	-	-	205.452
Proses Usul Hapus	9.366	86.619	519	9.456	2.028	107.988
Tidak Digunakan	103.168	1.161.309	19.121	207.227	449.777	1.940.602
Tidak Ditemukan	11.185	185.587	12.524	1.498	742	211.536

Status Aset	Bangunan	Equipment	Lain-Lain	Sumur	Tanah	Grand Total
Grand Total	**725.071**	**7.526.565**	**174.143**	**5.622.749**	**2.193.564**	**16.242.092**

SKK Migas melalui suratnya Nomor SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa peralatan, bangunan, dan aset lain-lain yang berstatus digunakan sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Unit	Equipment	Bangunan	Lain-lain	Total
	Masih Digunakan	Masih Digunakan	Masih Digunakan	
Reg Jawa	1.224.326.862.000	102.658.104.000	111.023.870.000	1.438.008.836.000
Kawasan Timur	419.133.095.522	77.183.384.000	15.515.077.000	511.831.556.522
Reg Sumatera	2.855.534.590.000	274.425.208.000	3.673.196.000	3.133.632.994.000
UBEP Adera	116.409.369.551	501.242.000	-	116.910.611.551
Talisman	4.065.030.000	1.780.968.000	-	5.845.998.000
UBEP Jambi	144.393.015.000	71.588.257.000	5.153.085.000	221.134.357.000
UBEP Lirik	293.053.917.000	19.668.524.000	3.103.672.000	315.826.113.000
UBEP Satar	36.711.086.000	13.881.564.267	45.894.000	50.638.544.267
UBEP Limau	234.690.912.000	67.942.000	2.133.534.000	236.892.388.000
UBEP Tanjung	560.833.422.333	39.355.713.665	18.819.000	600.207.954.998
Jumlah	**5.889.151.299.406**	**601.110.906.932**	**140.667.147.000**	**6.630.929.353.338**

Perhitungan Piutang PNBP didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa equipment, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338,00. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS).

Atas dasar tersebut, SKK Migas menghitung besaran tunggakan biaya sewa Aset eks Pertamina oleh PT Pertamina EP dari bulan September 2003 s.d. Juni 2014 sebesar Rp2.227.577.829.636,98 dan telah dilunasi dengan cara swap off dengan utang subsidi Pemerintah kepada Pertamina pada Tahun 2014 tersebut.

Kemudian, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan dokumen perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina EP Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 yang menyatakan objek sewa menyewa adalah BMN yang berasal dari kelompok aset eks KKKS Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP berupa fasilitas produksi, bangunan, HBM bergerak, dan aset lain-lain senilai Rp6.630.929.353.338,00.

PT Pertamina EP telah melakukan penyetoran kembali pada Tahun 2016 sebesar Rp518.041.355.730,00 sehingga posisi saldo piutang pada Tahun 2016 berdasarkan perhitungan PT Pertamina EP sudah nihil. Pembayaran tersebut dilanjutkan untuk periode tahun-tahun selanjutnya sebesar Rp207.216.542.292,00 per tahun.

Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338,00 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003.

Oleh karena itu, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar

Rp6.630.929.353.338,00: 384 bulan = Rp17.268.045.191,00 per bulan atau Rp207.216.542.292,00 per tahun.

PT Pertamina pada Tahun 2025 ini telah melakukan pembayaran sewa untuk tahun 2025 yaitu sebesar Rp207.216.542.292,00. Sehingga tidak lagi Piutang PNBP yang tercatat, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Mutasi Piutang PNBP	Nilai
Saldo 1 Januari 2025	**-**
Mutasi Tambah:	**207.216.542.292**
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP sampai dengan 31 Desember Tahun 2025	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	**207.216.542.292**
Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP sampai dengan 31 Desember Tahun 2025	207.216.542.292
Saldo 31 Desember 2025	**-**

b. Piutang Bukan Pajak Aset Eks BLBI

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp215.647.103.394.983,00 dan Rp211.957.341.532.847,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Kredit eks BPPN	103.520.527.567.186	101.677.737.767.431
Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA	102.928.520.547.936	100.789.774.362.132
Piutang BDL	9.198.055.279.861	9.489.829.403.284
Jumlah	**215.647.103.394.983**	**211.957.341.532.847**

1) Aset Kredit Eks BPPN

Aset kredit eks BPPN yang dilaporkan di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.520.527.567.186,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp101.677.737.767.431,00, atau terjadi penambahan piutang pada Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp1.842.789.799.755,00. Adapun rincian Aset Kredit Eks BPPN sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN (ATK serta Non ATK yang telah melalui tahap PB/PJPN)	51.743.338.444.096	49.747.446.548.535
2	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	33.775.431.802.564	33.787.431.802.566
3	Aset kredit ATK yang masih dikelola DJKN	15.308.732.573.348	15.464.700.114.762
4	Aset Kredit ATK Lainnya	2.693.024.747.178	2.678.159.301.568
Jumlah		**103.520.527.567.186**	**101.677.737.767.431**

Rincian lebih lanjut terkait Aset Kredit yang berasal dari Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham disajikan lebih lanjut pada Pengungkapan Penting Lainnya.

Rincian lebih lanjut terkait Aset Kredit dilihat di Lampiran LD14.

2) Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset kredit eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) yang kemudian setelah berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tertanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkelolakan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Pengelolaan Aset Kredit eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara menyerahkan pengurusan/penagihan aset kredit dimaksud kepada PUPN.

Nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp102.928.520.547.936,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.789.774.362.132,00 atau terjadi kenaikan nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp2.138.746.185.804,00. Detil dapat dilihat pada Lampiran LD15.

Adapun rincian Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024
1.	Aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN	101.073.301.171.198	98.867.673.004.272
2.	Aset kredit yang masih dikelola DJKN	1.855.219.376.738	1.922.101.357.860
Jumlah		**102.928.520.547.936**	**100.789.774.362.132**

3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi

Piutang eks BDL per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.198.055.279.861,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.489.829.403.284,00, atau terjadi penurunan Piutang eks BDL sebesar Rp291.774.123.423,00. Piutang eks BDL per 31 Desember 2025 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Eks Dana Talangan	7.217.925.728.152	7.289.839.895.890
2	Eks Dana Penjaminan	1.980.129.661.709	2.199.989.507.394
	Jumlah	**9.198.055.279.861**	**9.489.829.403.284**

Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan pencairan deviden atas saham eks BDL yang telah jatuh tempo pada tahun 2025. Rincian tersebut dapat dilihat pada Lampiran LD16.

c. Piutang Bukan Pajak pada satker TK DJKN Pengelola aset KKKS

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar sebesar Rp31.992.198.656,00 dan Rp27.559.163.426,00 yang semula tercatat pada akun piutang lain-lain. Piutang Lain-Lain merupakan piutang terhadap pemanfaatan sewa BMN yang berasal dari KKKS oleh Pihak lain yang belum dibayarkan ke kas Negara dan piutang terhadap transfer antar KKKS yang telah melebihi periode 1 tahun dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pihak Ketiga	Jumlah per 31 Desember 2024	
			USD	Rp
1	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Java*	PT Pertamina (Persero)	1.413.347	23.631.155.988
2	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Java*	PT Pertamina (Persero)	68.393	1.143.522.600
3	Sewa pada KKKS - Conocophillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	-	145.582.002

No.	Uraian	Pihak Ketiga	Jumlah per 31 Desember 2024	
			USD	Rp
4	Sewa pada KKKS – PT Pertamina Hulu Rokan	Yayasan Lembaga Pendidikan Islam	-	1.999.695.000
5	Transfer Material Persediaan PT Pertamina EP	PT PHE Ogan Komering	-	22.937.310
6	Transfer Material Persediaan – PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra	628	10.500.829
7	Transfer Material Persediaan – Eni Rapak Deepwater Ltd.	PT Imbang Tata Alam	243,288	4.067.775.360
8	Sewa pada KKKS – PT Pertamina EP	PT Multidaya Prima Elektrindo	-	756.000.000
9	Transfer Material Persediaan – PT Pertamina EP	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	7,957	133.042.378
10	Transfer Material Persediaan – Premier Oil Natuna Sea B.V	Transfer Material Persediaan – Premier Oil Natuna Sea B.V	4,904	81.987.189
Jumlah				**31.992.198.656**

*Kurs konversi mata uang sesuai JISDOR 31 Desember 2025 (Rp16.720)

D.2.1.1.16. BAGIAN LANCAR PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.668.938.283.592,00 dan Rp7.718.639.716.238,00, atau mengalami penurunan sebesar Rp49.701.432.646,00 atau 0,64 persen. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Debitur	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA.999.03)	10.000.000.000	40.000.000.000
2.	Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA 999.99)	7.658.938.283.592	7.678.639.716.238
Jumlah		**7.668.938.283.592**	**7.718.639.716.238**

1. Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA.999.03)

Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan sebagian piutang jangka panjang lainnya Perum Perumnas yang jatuh tempo 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaporan. Pengakuan dan Pengukuran Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya tersebut berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-693/MK.02/2019 tanggal 23 September 2019 mengenai restrukturisasi piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997. Kemudian terdapat surat Menteri Keuangan Nomor S-91/MK.02/2025 tanggal 24 Februari 2025 hal Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumas. Dalam surat tersebut pembayaran piutang Perum Perumnas sebesar Rp57.225.637.648,00 disesuaikan menjadi dari tahun 2025 s.d. 2032.

Saldo Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.000.000.000,00, sementara sisanya merupakan piutang jangka panjang lainnya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Tahun	Nilai Piutang	Jenis Piutang
2025	5.000.000.000	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
2026	5.000.000.000	
2027	5.000.000.000	Piutang Jangka Panjang Lainnya
2028	7.500.000.000	
2029	7.500.000.000	
2030	7.500.000.000	
2031	9.800.000.000	
2032	9.925.637.648	
Jumlah Piutang	**57.225.637.648**	

Total Piutang atas Perum Perumnas sebesar Rp57.225.637.648,00 tersebut dicatat pada dua akun pada LKBUN, yaitu pada akun Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp10.000.000.000,00 dan pada akun Piutang Jangka Panjang sebesar Rp47.225.637.648,00.

2. Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA 999.99)

Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya BA 999.99 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.658.938.283.592,00 dan Rp7.678.639.716.238,00 yang terdiri dari:

a. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.525.052.377.503,00 dan Rp2.708.785.209.470,00. Nilai Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.525.052.377.503,00 mengalami penurunan sebesar Rp183.732.831.967,00 atau 6,78 persen dari saldo tahun 2024 dikarenakan adanya angsuran pelunasan piutang pada tahun 2025. Sehingga rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	773.382.049.559	773.382.049.559
Bunga	275.324.009.644	275.324.009.644
Denda	1.829.048.547.206	1.829.048.547.206
Pembiayaan	(352.702.228.906)	(168.969.396.939)
Jumlah	**2.525.052.377.503**	**2.708.785.209.470**

Pada tahun 2015, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2015 mengenai pemberian dana antisipasi untuk pelunasan pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Sidoarjo. Perpres ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan dana talangan guna menyelesaikan ganti rugi di area terdampak luapan lumpur Sidoarjo. Dana Antisipasi diberikan kepada Lapindo Brantas Inc. (LBI) dan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sebesar Rp773.382.049.559,00.

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Lapindo Brantas Inc. (LBI) dan PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ) Nomor Nomor PRJ-16/MK.01/2015 dan Nomor: 402/P/TSS/L15 dan 37-AGR/MLJ/ADS-DIRUT/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.

Piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo telah menjadi kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-53/KN/2023 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS) a.n Lapindo Brantas, Inc, PT Minarak Lapindo Jaya dan Nirwan Bakrie. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Penyerah Piutang menghentikan pembebanan bunga, denda, ongkos/biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada PUPN.

b. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya kepada Yayasan Supersemar

Bagian Lancar Piutang jangka panjang Yayasan Supersemar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.133.885.906.089,00 dan Rp4.969.854.506.768,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp164.031.399.321,00 atau 3,30 persen. Kenaikan berasal dari adanya perubahan

kurs per tanggal 31 Desember 2025 (dari Rp16.157,00 menjadi Rp16.720,00) dari saldo piutang sebesar USD307,050,592.47. Pada tahun 2025 terdapat eksekusi sita jaminan yang berasal dari pencairan deposito atas nama Yayasan Supersemar dan/ atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar dari 7 (tujuh) deposito dengan jumlah total nominal Rp9.000.000.000,00.

Dengan adanya perubahan kurs per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.720,00, maka saldo piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dalam mata uang asing (USD)	307.597.605,17	307.597.605,17
Setoran Pelunasan Piutang (Rp)	9.000.000.000	-
Kurs tengah setoran	16.453	-
Konversi (USD) atas Setoran Pelunasan Piutang	547.012,70	-
Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (USD)	307.050.592,47	307.597.605,17
Kurs JISDOR	16.720	16.157
Konversi (Rp)	5.133.885.906.089	4.969.854.506.768
Jumlah	**5.133.885.906.089**	**4.969.854.506.768**

Piutang kepada Yayasan Supersemar merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia melawan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagaimana telah diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015.

D.2.1.1.17. BAGIAN LANCAR PIUTANG PEMBERIAN PINJAMAN

Jumlah Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp21.914.863.036.379,00 dan Rp21.286.136.965.214,00 mengalami kenaikan sebesar Rp628.726.071.165,00 atau 2,95 persen. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman meliputi Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman, dan Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrual. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2025 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	13.080.284.796.916	12.672.218.564.890
2.	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	8.379.790.516.258	8.293.593.433.556
3.	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrual	454.787.723.205	320.324.966.768
Jumlah		**21.914.863.036.379**	**21.286.136.965.214**

D.2.1.1.18. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG BUKAN PAJAK

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp228.694.693.411.173,00 dan Rp233.653.899.504.306,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.959.206.093.133,00 atau 2,12 persen. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Penyisihan Piutang Dividen (BA 999.03)	42.960.993.522	123.498.402.913
2.	Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman (BA 999.04)	13.643.672.716.754	13.495.592.874.640
3.	Penyisihan Piutang Subsidi (BA 999.07)	12.350.000.000	12.350.000.000
4.	Penyisihan Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	289.418.122.985	290.261.567.261
5.	Penyisihan Piutang Transaksi Khusus (BA 999.99)	214.706.291.577.912	219.732.196.659.492
Jumlah		**228.694.693.411.173**	**233.653.899.504.306**

D.2.1.1.18.1. Penyisihan Piutang Dividen (BA 999.03)

Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019.

Nilai Penyisihan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp42.960.993.522,00, yang terdiri dari:

1. Saldo Penyisihan Piutang Bukan Pajak atas piutang dividen sebelum TB 2024 sebesar Rp42.435.993.522,00 yang merupakan penyisihan piutang dividen dengan kualitas Macet pada 4 BUMN;
2. Saldo penyisihan piutang atas restrukturisasi Piutang Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas yang merupakan bagian lancar atas piutang jangka panjang lainnya sebesar Rp525.000.000,00.

   Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 diatur tentang restrukturisasi utang debitur, sebagai berikut:

   a. Perubahan kualitas piutang setelah persetujuan restrukturisasi paling tinggi menjadi piutang dengan kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau macet.
   b. Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, kualitas yang telah diubah dimaksud ditetapkan kembali menjadi kualitas piutang sebelum adanya restrukturisasi.

   Kemudian terdapat surat Menteri Keuangan nomor S-91/MK.02/2025 tanggal 24 Februari 2025 hal Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumas. Dalam surat tersebut pembayaran piutang Perum Perumnas sebesar Rp57.225.637.648,00 disesuaikan menjadi dari tahun 2025 s.d. 2032.

   Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.000.000.000,00, dengan rincian penyisihan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Tahun	Nilai Angsuran Restrukturisasi	Bagian Lancar	% Penyisihan	Status Piutang	Nilai Penyisihan
2025	5.000.000.000	5.000.000.000	10%	Kurang Lancar	500.000.000

Tahun	Nilai Angsuran Restrukturisasi	Bagian Lancar	% Penyisihan	Status Piutang	Nilai Penyisihan
2026	5.000.000.000	5.000.000.000	0,5%	Lancar	25.000.000
2027	5.000.000.000				-
2028	7.500.000.000				
2029	7.500.000.000				
2030	7.500.000.000				
2031	9.800.000.000				
2032	9.925.637.648				-
Jumlah Piutang		**10.000.000.000**	**Penyisihan 31 Desember 2025**		**525.000.000**

D.2.1.1.18.2. Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman (BA 999.04)

Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.643.672.716.754,00 dan Rp13.495.592.874.640,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih berupa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak, terdiri dari:

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, dan

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih, sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	8.087.773.222.287	7.938.269.850.261
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	5.555.899.494.4467	5.557.323.024.379
Jumlah	**13.643.672.716.754**	**13.495.592.874.640**

D.2.1.1.18.3. Penyisihan Piutang Subsidi (BA 999.07)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp12.350.000.000,00 dan Rp12.350.000.000,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.350.000.000,00 terdapat pada Kementerian Pertanian yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Ditjen TP	Total
Piutang Bukan Pajak	12.350.000.000	**12.350.000.000**
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	12.350.000.000	**12.350.000.000**
Piutang Bukan Pajak (Neto)	**-**	**-**

Berdasarkan tabel diatas, penyisihan piutang tak tertagih-jangka pendek diubah tingkat kolektibilitas Piutang PNBP pada PT Sang Hyang Seri dari kategori diragukan menjadi macet, sehingga nilai akumulasi penyisihan dan beban penyisihan atas piutang PNBP pada PT Sang Hyang Seri dengan persentase penyisihan 100%. Terkait hal ini, Ditjen Tanaman Pangan telah bersurat dengan Nomor 2321/PW.030/C.1/06/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang penyelesaian kewajiban Tahun 2024.

D.2.1.1.18.4. Penyisihan Piutang Belanja Lain-Lain (BA 999.08)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp289.418.122.985,00 dan Rp290.261.567.261,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh

kualitas piutang masing-masing debitur. Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
015	Kementerian Keuangan	-	26.823.623
018	Kementerian Pertanian	287.901.122.353	288.901.122.353
059	Kementerian Komdigi	181.590.800	
999	MPP Kartu Prakerja	1.222.617.450	1.222.617.450
999	SKK Migas	112.792.382	111.003.835
Total		**289.418.122.985**	**290.261.567.261**

Rincian penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar			
- SKK Migas	851.874.012	0,5	4.259.370
- Kementerian Komdigi	36.318.160.039	0,5	181.590.801
Kurang Lancar			
Diragukan			
- MPP Kartu Prakerja	2.445.234.900	50	1.222.617.450
Macet			
- SKK migas	108.533.011	100	108.533.011
- Kementerian Pertanian	287.901.122.353	100	287.901.122.353
Jumlah	**327.634.924.315**		**289.418.122.985**

D.2.1.1.18.5. Penyisihan Piutang Transaksi Khusus (BA 999.99)

Nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp214.706.291.577.912,00 dan Rp219.732.196.659.492,00 merupakan penyisihan Piutang DJPB, Pemanfaatan Aset Eks Pertamina, Aset Kredit Eks BPPN, Aset KKKS, Piutang kepada Yayasan Supersemar dan Piutang Migas. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang DJPB	548.889.886	538.960.193
Penyisihan Piutang Aset Kredit eks BPPN	207.132.520.380.118	211.592.587.482.199
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina	-	-
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset KKKS	25.945.469.306	25.085.888.948
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Piutang kepada Yayasan Supersemar	4.988.670.906.091	4.824.639.506.770
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset BPLS	2.490.111.977.503	2.673.844.809.470
Penyisihan Piutang Sumber Daya Alam	68.493.955.008	615.500.011.912
Jumlah	**214.706.291.577.912**	**219.732.196.659.492**

1. Penyisihan piutang tak tertagih piutang DJPB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp548.889.886,00 dan Rp538.960.193,00.

2. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas Aset Kredit Eks BPPN

   Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berasal dari penyisihan piutang lain-lain. Metode penyisihan piutang tidak tertagih atas aset kredit eks BPPN, aset kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero), dan Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih Eks BPPN, dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero). Sedangkan metode penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang eks BDL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.09/2019.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp207.132.520.380.118,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp211.592.587.482.199,00, terdapat penurunan sebesar Rp4.460.067.102.081,00 atau 2,11 persen.

Rincian Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan di Lampiran LD17.

3. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas pemanfaatan aset eks Pertamina

Mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, atas Piutang PNBP berupa piutang sewa BMN sebesar Rp1.176.715.352.919,00 dilakukan penyisihan sebesar 100 persen. Dengan pertimbangan bahwa masih dilakukan proses pembahasan bersama antara DJKN dengan PT Pertamina EP untuk menentukan besarnya nilai piutang sewa.

Piutang sewa sebesar Rp1.176.715.352.919,00 telah timbul sejak tahun 2017 karena terdapat perbedaan pengakuan nilai perolehan BMN Eks Pertamina yang disewa oleh Pertamina EP antara DJKN dengan Pertamina EP. DJKN mengakui nilai perolehan BMN yang disewa Pertamina EP didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523,00, sedangkan Pertamina EP mengakui BMN Eks Pertamina yang disewa sebesar Rp6.630.929.353.338,00 berdasarkan surat SKK Migas Nomor SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina EP Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 yang menyatakan objek sewa menyewa adalah BMN yang berasal dari kelompok aset eks KKKS Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP berupa fasilitas produksi, bangunan, HBM bergerak, dan aset lain-lain senilai Rp6.630.929.353.338,00.

Mengingat telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka penyisihan piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919,00 menjadi Rp0,00.

Mengingat PT Pertamina EP telah melakukan pembayaran pada 2025 atas sewa penggunaan aset Eks Pertamina sebesar Rp207.216.542.292,00, maka atas penyisihan piutang disesuaikan menjadi Rp0,00.

4. Penyisihan piutang tak tertagih Aset KKKS

   Penyisihan piutang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp25.945.469.306,00 dan Rp25.085.888.948,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 berasal dari:

   a. Piutang kategori Macet (Lebih dari 3 tahun sejak tahun tempo). dengan Penyisihan Piutang 100 persen pada 3 Piutang dengan total nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp24.920.260.590,00;

   b. Piutang kategori Diragukan. dengan Penyisihan Piutang 50 persen pada 1 Piutang dengan total nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp999.847.500,00; dan

   c. Piutang kategori Kurang Lancar. dengan Penyisihan Piutang 0,5 persen pada 6 Piutang dengan total nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp25.361.216,00.

5. Penyisihan piutang tak tertagih kepada Yayasan Supersemar

   Penyisihan Piutang Tak Tertagih kepada Yayasan Supersemar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.988.670.906.091,00 dan Rp4.824.639.506.770,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp164.031.399.321,00 atau 3,40 persen. Kenaikan tersebut disebabkan adanya Koreksi Penyajian Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp164.031.399.321,00. Koreksi tersebut antara lain disebabkan adanya koreksi kurang selisih kurs.

6. Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset BPLS

   Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Bukan Pajak Aset BPLS per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.490.111.977.503,00 sedang nilai penyisihan per 31 Desember 2024 adalah Rp2.673.844.809.470,00, artinya Penyisihan atas Piutang Tidak Tertagih telah dikenakan tarif 100,00 persen atau kategori dengan kualitas piutang macet karena piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo.

   Hasil penilaian kembali jaminan adalah sebagai berikut :

   a. Tanah seluas 622,34 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor: 00347/2.00113-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar sebesar minus 137.276.401.432,00 rupiah yang kemudian dianggap nol karena nilainya negatif.

   b. Tanah seluas 22,85 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor: 00348/2.013-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar 58.234.000.000,00 rupiah dan nilai ini yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai penyisihan piutang yang dalam pertemuan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS disepakati sudah mencapai kualitas piutang macet.

7. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBP Sumber Daya Alam per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp68.493.955.008,00 dan Rp615.500.011.912,00 merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek migas dari piutang minyak bumi, gas bumi dan migas lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian penyisihan piutang berdasarkan kualitas terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kualitas Lancar	66.820.306.431	75.432.137.277
Kualitas Kurang Lancar	354.915.007	7.645.385.747
Kualitas Diragukan	1.318.733.570	83.092.655.537

Kualitas Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kualitas Macet	-	449.329.833.351
Jumlah	**68.493.955.008**	**615.500.011.912**

D.2.1.1.19. PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp52.993.494.437,00 dan Rp2.490.243.783,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.503.250.654,00 atau 2.028,04 persen. Persediaan yang terdapat pada SKK Migas, Setneg dan BP Batam tersebut merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut**:**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	1.306.084.586	1.271.525.548
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	30.263.775	11.860.315
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	51.652.357.280	1.202.040.000
4	Persediaan Lainnya	4.788.796	4.817.920
	Jumlah	**52.993.494.437**	**2.490.243.783**

D.2.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.928.357.954.648.995,00 dan Rp4.391.554.633.530.362,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp536.803.321.118.633,00 atau 12,22 persen dari periode sebelumnya. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dana Bergulir	16.190.397.417.276	16.831.926.939.422
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1.419.856.141.752)	(1.404.183.720.277)
Investasi Non Permanen Lainnya	324.455.373.266.807	269.364.784.080.765
Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	(962.745.115.689)	(974.366.095.513)
Investasi Non Permanen	**338.263.169.426.642**	**283.818.161.204.397**
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	3.556.339.409.493.147	3.317.709.229.098.828
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	8.053.004.500	8.053.004.500
Investasi Permanen Lainnya	1.033.747.322.724.706	790.019.190.222.637
Jumlah Investasi Permanen	**4.590.094.785.222.353**	**4.107.736.472.325.965**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**4.928.357.954.648.995**	**4.391.554.633.530.362**

D.2.1.2.1. DANA BERGULIR

Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.190.397.417.276,00 dan Rp16.831.926.939.422,00 mengalami penurunan sebesar Rp641.529.522.146,00 atau 3,81 persen. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir yang dilaporkan merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran 999.03 atau dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran Lainnya, dan sedang dalam proses perguliran atau *outstanding* di masyarakat atau pihak ketiga lainnya.

Nilai dana bergulir yang disajikan sesuai dengan rincian:

(dalam rupiah)

No.	Unit Pengelola	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi	4.492.139.167.391	5.197.083.516.904
2	BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	621.633.119.508	621.633.119.508
3	BLU Pusat Investasi Pemerintah	8.349.005.709.284	8.399.546.659.356
4	BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1.350.000.000.000	1.289.162.028.597
5	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Dit. SMI)	1.361.176.113.976	1.308.416.308.939
6	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	16.443.307.117	16.085.306.116
Jumlah		**16.190.397.417.276**	**16.831.926.939.420***

*Selisih Rp2 karena pembulatan

D.2.1.2.1.1. Dana Bergulir LPDB Kementerian Koperasi

Dana bergulir pada BLU LPDB Kementerian Koperasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.492.139.167.391,00 dan Rp5.197.083.516.904,00.

Adapun rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB Kementerian Koperasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Total
Piutang Dana Bergulir	4.153.403.186.782
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2025	338.735.980.609
Jumlah	**4.492.139.167.391**

Nilai Piutang Dana Bergulir 31 Desember 2025 sebesar Rp4.153.403.186.782,00 termasuk di dalamnya masih ada nilai piutang pokok koperasi yang telah cair klaim subrogasi dari Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Jawa Tengah, Jamkrida Cabang Khusus Jakarta dan Jamkrida Riau). Atas dana klaim tersebut dicatat sebagai kewajiban subrogasi dana bergulir dan tidak mengurangi nilai piutang koperasi. Nilai Realisasi Bersih Dana Bergulir merupakan potensi pengembalian atas dana bergulir yang telah dicairkan dari Kementerian Koperasi kepada koperasi, dimana pengembalian dana tersebut dikembalikan kepada LPDB sebagai Pengalihan Dana Bergulir. Besarnya Nilai Realisasi Bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, tertagihnya dana bergulir berasal dari dana pengalihan LPDB selain itu juga hasil monitoring dan evaluasi dari Kementerian Koperasi untuk klasifikasi piutang lancar dan piutang tidak lancar.

Adapun dalam laporan keuangan BA 999.03 klaim yang dicairkan oleh LPK dicatat sebagai penambah Dana Kelolaan BLU sehingga menambah juga nilai di kewajiban jangka panjang/kewajiban subrogasi. Klaim subrogasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Dokumen PKS		Total
	Nomor	Tanggal	
Koperasi Kampus Unsoed (klaim tahun 2022)	025/SP3-JJT/III/2020	18 Maret 2020	860.633.286
KSU Monjari 45 (klaim tahun 2023)	064/SP3-JJt-XII/2020	8 Desember 2020	348.412.800
Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonesia (Klaim tahun 2023 dan 2025)	301/SP3-JR/X/2021	4 Oktober 2021	784.606.643
KSP Argo Sumbing Mandiri (klaim tahun 2025)	297A/SP3-JJT/IX/2022	8-Sep-22	373.000.000
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Umat (klaim tahun 2025)	085/SP3-JJT/VIII/2021 054/SP3-JJT/VI/2023	25 Agustus 2021 19 Juni 2023	17.255.826.175
Koperasi Produsen Mitra Usaha Perkasa (klaim tahun 2025)	074/DIR-JJS/III/2022	4 Maret 2022	879.151.675
Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia (KLAIM TAHUN 2025)	099/SP3-JJT/IX/2023	23-Sep-25	228.730.850
Jumlah			**20.730.361.429**

Berdasarkan tabel di atas, rincian klaim subrogasi sebagai berikut:

1. Atas Koperasi Kampus Unsoed sebesar Rp860.633.286,00 telah dicatat pada tahun 2022;
2. Terdapat klaim subrogasi atas KSU Monjari 45 sebesar Rp348.412.800,00 pada tahun 2023;
3. Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonusa sebesar Rp784.606.643,00 yang terdiri dari Rp400.000.000,00 yang dicatat pada tahun 2023 dan Rp384.606.643,00 dicatat pada tahun 2024;

4. Pada tahun 2025 klaim subrogasi sebesar Rp18.736.708.700,00 dengan rincian KSP Argo Sumbing Mandiri sebesar Rp373.000.000,00, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bmt Mitra Umat sebesar Rp17.255.826.175,00, Koperasi Produsen Mitra Usaha Perkasa sebesar Rp879.151.675,00 dan Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia sebesar Rp228.730.850,00.

Mutasi dana bergulir per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Mutasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2025	Jumlah
Piutang Dana Bergulir Per 1 Januari 2025	5.197.083.516.904
Mutasi Tambah:	
- Penyaluran tahun 2025	1.738.766.780.282
- Koreksi BPK LK TA 2024 atas transaksi UI yang telah teridentifikasi pembayaran angsuran 2 koperasi (Sejahtera Padang dan Makmur Mandiri) ke LPBD TA 2025	13.636.364
- Koreksi Sri Wigati TL Temuan BPK, semula BAST Kejaksaan diakui sebagai *Crash Program* pada TA 2025	1.115.241.358
Mutasi Kurang:	
- Mutasi NRB 2025	(3.286.249.320)
- Pengembalian Pokok tahun 2025	(2.309.905.782.891)
- Hapus buku piutang PSBDT 2025	(2.801.940.659)
- Mekanisme hapus buku piutang Kopanti yang penanganannya diserahkan ke KPK 2025	(98.333.553.000)
- Subrogasi per 31 Desember 2025	(13.029.638.672)
- Mekanisme hapus buku piutang penanganan kejaksaan dengan uang pengganti 2025	(8.666.666.631)
- Reklas kewajiban subrogasi per 31 Desember 2025	(7.700.722.757)
- Koreksi pencatatan atas lebih bayar piutang dana bergulir per 31 Desember 2025	(212.229)
- Pencatatan dana yang diterima dari Sri Wigati atas transaksi *Crash Program* TA 2024	(579.925.506)
- Pencatatan hapus buku piutang dana bergulir Sri Wigati	(535.315.852)
Piutang Dana Bergulir Per 31 Desember 2025	**4.492.139.167.391**

Adapun penjelasan dari mutasi-mutasi yang disajikan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. Mutasi tambah
   a. Nilai sebesar Rp1.738.766.780.282,00 merupakan dana bergulir yang telah tersalurkan ke koperasi periode januari sampai dengan 31 Desember 2025;
   b. Nilai sebesar Rp13.636.364,00 merupakan nilai koreksi BPK tahun 2024 atas UI 2024 yang telah diidentifikasi pada TA 2025 (Sejahtera Padang dan Makmur Mandiri); dan
   c. Nilai sebesar Rp1.115.241.358,00 merupakan koreksi pencatatan piutang atas nama Sri Wigati sebagai bentuk tindak lanjut temuan BPK, dimana pada tahun 2024 semula penghapusan piutangnya berdasarkan BAST Kejaksaan, menjadi penghapusan piutang *Crash Program* pada TA 2024.
2. Mutasi kurang
   a. Nilai sebesar Rp3.286.249.320,00 merupakan nilai mutasi NRB periode Januari sampai dengan 31 Desember 2025;
   b. Nilai sebesar Rp2.309.905.782.891,00 merupakan pengembalian dana bergulir dari koperasi ke LPDB dari periode Januari sampai dengan 31 Desember 2025;
   c. Nilai sebesar Rp2.801.940.659,00 merupakan nilai atas koperasi yang terbit surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) pada tahun 2025;
   d. Nilai sebesar Rp98.333.553.000,00 merupakan hapus buku piutang yang penanganannya oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Kopanti;

e. Nilai sebesar Rp13.029.638.672,00 merupakan nilai subrogasi per 31 Desember 2025;

f. Nilai sebesar Rp8.666.666.631,00 merupakan hapus buku piutang yang penanganannya oleh Pengadilan Negeri Makassar atas nama KSP Mitra Mandiri;

g. Nilai sebesar Rp7.700.722.757,00 merupakan reklas kewajiban subrogasi per 31 Desember 2025;

h. Nilai sebesar Rp212.229,00 merupakan Koreksi Pencatatan atas Lebih Bayar Piutang Dana Bergulir Tahun 2025;

i. Nilai sebesar Rp579.925.506,00 merupakan pencatatan dana yang diterima dari Sri Wigati atas transaksi *Crash Program* TA 2024. Hal ini tindak lanjut temuan BPK TA 2024;

j. Nilai sebesar Rp535.315.852,00 merupakan pencatatan hapus buku piutang dana bergulir Sri Wigati atas transaksi *Crash Program* TA 2024.

D.2.1.2.1.2. Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT

Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp621.633.119.508,00 dan Rp621.633.119.508,00 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Rincian Dana Bergulir Kementerian Pekerjaan Umum berupa piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.
Rincian Dana Bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	45.804.619.447	45.804.619.447
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang – Batang	32.556.096.062	32.556.096.062
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	29.735.705.526	29.735.705.526
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	-	-
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	-	-
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	-	-
PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	303.802.866.247	303.802.866.247
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	192.353.001.405	192.353.001.405
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	-	-
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways / Cibitung-Cilincing	-	-
PT Cimanggis Cibitung Tollway / Cimanggis-Cibitung	-	-
Jumlah	**621.633.119.508**	**621.633.119.508**

Rincian nilai penyaluran dan pengembalian pokok dana bergulir per 31 Desember 2025 *Audited* sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Tahun	Penyaluran Pokok	Pengembalian Pokok
2007	179.564.079.598	-
2008	461.561.311.518	105.387.690.235
2009	375.880.107.714	57.450.000.000
2010	938.767.004.911	327.292.606.467
2011	753.022.593.125	-
2012	571.561.373.299	154.792.210.168
2013	1.204.414.669.524	300.000.000.000
2014	1.585.543.081.210	520.476.479.788
2015	41.988.563.340	254.266.360.343
2016	652.312.381.419	306.765.382.473
2017	108.061.886.000	230.112.102.608
2018	-	300.496.638.650
2019	-	43.643.786.000
2020	-	1
2021	-	-
2022	-	22.000.000.000
2023	-	359.653.415.387
2024	-	3.268.707.260.033
Jumlah	**6.872.677.051.658**	**6.251.043.932.153**
Saldo dana bergulir		**621.633.119.505***

*Selisih Rp3 karena pembulatan

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka sejak bulan Januari Tahun 2015 pembayaran UGR menggunakan dana APBN sehingga penggunaan dana bergulir BLU menjadi terhenti.
Perkembangan Penting Sehubungan dengan Penyaluran Dana Bergulir:
Berdasarkan Surat Kepala BPJT No. HK02.03-P/95 tanggal 7 Juli 2015 kepada PT Marga Setiapuritama dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor HK.02.03-Mn/539 tanggal 3 Juli 2015 dilakukan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas Semarang-Batang dengan nama BUJT PT Marga Setiapuritama.

Sebagai tindak lanjut pengakhiran PPJT, Kepala Satker BLU BP Set BPJT telah menyampaikan surat nomor KU.02.03.Pt5/Kasatker/2334 tanggal 9 Juli 2015 kepada PT Marga Setiapuritama untuk Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Layanan Dana Bergulir, dan sebagai konsekuensinya adalah segala piutang BLU BP Set BPJT kepada PT Marga Setiapuritama menjadi jatuh tempo seketika dan perhitungan Nilai Tambah dan Denda Nilai Tambah dihentikan sejak tanggal 7 Juli 2015.

Selanjutnya Kepala BLU BP Set BPJT mengirim Surat ke Kepala BPJT agar piutang tersebut diatas dijadikan kewajiban bagi BUJT baru yang mendapat hak pengusahaan untuk ruas tersebut.

Ruas Semarang-Batang ditender ulang dan telah dibentuk BUJT baru untuk menyelesaikan ruas jalan tol tersebut yaitu PT Jasamarga Semarang Batang sebagai pemenang tender dengan PPJT Nomor 01/PPJT/BPJT/2016 tanggal 27 April 2016.

BUJT lama yaitu PT Marga Setiapuritama mengajukan permohonan arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diadakan dan diselenggarakan pemeriksaan arbitrase (permohonan arbitrase) atas perselisihan atau sengketa antara BPJT dan PT Marga Setiapuritama, dengan surat nomor 193/MSP-1601/AF/VIII/16 tanggal 18 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Sekretariat BANI dengan Register Nomor 881/VIII/ARB-BANI/2016 tanggal 18 Agustus 2016. BANI telah memberikan keputusan

pada tanggal 13 September 2017 namun PT Marga Setiapuritama tidak puas dengan keputusan BANI dan kemudian menggugat keputusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI dengan Register Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017 dan PN Jakarta telah memberikan keputusan pada tanggal 28 September 2017.

Kemudian PT Marga Setiapuritama mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2018. PN Jakarta Selatan menolak gugatan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018. PT Marga Setiapuritama kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor Register 199/PDT/2019/PT.DKI dan PT DKI Jakarta telah memberikan keputusan pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta.

Upaya penyelesaian piutang PT Marga Setiapuritama telah dilakukan oleh Satker Set BPJT. Adapun upaya terakhir yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024 Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Hukum Umum Kemenkumham memberikan tanggapan melalui surat nomor AHU.7-AH.01-2982 perihal Pemberian Data dan Informasi PT Marga Setiapuritama yang memberitahukan bahwa akses PT Marga Setiapuritama sedang terblokir karena belum melaporkan pemilik manfaat/*beneficial ownership* (BO) sesuai Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

D.2.1.2.1.3. Dana Bergulir Pusat Investasi Pemerintah

Nilai Dana Bergulir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada BLU PIP sebesar Rp8.349.005.709.284,00 dan Rp8.399.546.659.356,00 terjadi penurunan sebesar Rp50.540.950.072,00 atau 0,60 persen. Realisasi tersebut berupa pemberian pinjaman kepada 69 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dapat dirincikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	LKBB/ *Linkage*	*Outstanding* 31 Desember 2025
1	PT. PNM	7.283.333.333.320
2	Koperasi Syariah Annisa	266.666.670
3	KSP KARYA BAITUL MANDIRI	34.075.983.507
4	PT. USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA	2.013.793.103
5	LKMA Mojo Agung	336.666.670
6	LKMA Tani Makmur	569.999.996
7	PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH (Syariah)	792.000.000
8	KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI (Syariah)	1.000.000.000
9	Kopdit Pelangi Kasih	2.770.620.493
10	Koperasi Al Manar	2.420.000.000
11	KSPPS RAYA BANDA MADANI	19.289.417.992
12	KSPPS Artha Bahana Syariah	4.000.000.008
13	KSP Jujur Utama Mandiri	1.952.380.951
14	KSP Sila Mukti	2.269.264.072
15	KSP Sari Sedana Bali	2.198.373.972
16	KSP KUD Mintorogo	5.960.450.988
17	SPPS Abdi Kerta Raharja	1.474.871.790
18	KSP GUNA PRIMA DANA	466.666.658
19	PT LKM Gentha Persada	617.777.779
20	KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	3.804.249.349
21	KSU Gapoktan Al Basiko II	280.000.000
22	KSPPS BMT Jati	20.833.341
23	PT LKM Batang	7.789.743.586
24	KSPPS Benteng Mikro Indonesia	40.275.862.061

No.	LKBB/ *Linkage*	*Outstanding* 31 Desember 2025
25	KSPPS Mitra Dhuafa Syariah	12.266.666.665
26	Koperasi Jasa Karya Abadi	7.000.000.000
27	KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	7.579.999.995
28	KSP Permata Siaga	333.333.340
29	KSPPS BMT Al Ishlah	100.000.000
30	KSPPS BMT Ibaadurrahman	1.667.111.103
31	Koperasi Konsumen Central Hutama Mandiri	724.444.452
32	SPPS BMT Bina Auladi Mandiri	1.015.999.996
33	KSPPS BMT Ayyasi	348.333.327
34	BMT Niaga Utama	2.300.000.000
35	BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera	3.518.750.000
36	KSP Karya Mandiri	1.000.000.006
37	KSP Permata Utama	1.300.000.000
38	KSU Krama Bali	520.000.000
39	KSPPS BMT El Itqan	411.666.661
40	KSPPS Muhammadiyah Surya Mandiri	2.555.555.561
41	KSPPS BMT Al Fataya	999.999.995
42	KSPPS Nusa Ummat Sejahtera	98.333.333.331
43	KSP Mitra Dhuafa	161.103.448.279
44	Koperasi Dana Raharja	1.737.777.780
45	KSPPS BMT Ampek Jurai	637.701.154
46	KSP Citra Mandiri	666.666.670
47	KM Sedasa	1.198.125.000
48	Koperasi BT Muhammadiyah (Sumbar)	3.640.000.002
49	KSPPS BMT Harapan Bersama Kalingga	3.499.999.997
50	KSPPS BMT Huwaiza	1.479.310.347
51	KSPPS BMT Alhikmah Semesta	22.000.000.000
52	PT LKM BKD Pekalongan	5.866.666.664
53	PT BAV - Langsung	98.000.000.000
54	KJP Cipta Prima Sejahtera	678.571.429
55	KSPPS BMT Korong Gadang	736.666.668
56	KSP Kopdit Karya Jasa	3.195.000.001
57	Kopdit SAE	765.000.001
58	Kop Sarana Makmur Bersama Sama-sama	193.333.333
59	LKM Kalijaga	483.333.333
60	BMT NU Jatim	207.027.393.180
61	BMT Al Roudloh	4.500.000.000
62	PT BAV - Linkage	137.214.564.708
63	PT Pegadaian	125.000.000.000
64	KSPPS BMT Bahtera	3.000.000.000
65	KSPPS Suciati Saliman Sejahtera	900.000.000
66	KSPPS Prima Artha	1.760.000.000
67	PT Delapan Pilar Tanggul Jaya	108.000.000
68	Koperasi Jasa LKM PPUMI	2.160.000.000
69	BMT BISMA	1.500.000.000
Jumlah		**8.349.005.709.284**

D.2.1.2.1.4. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi). Jumlah Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.350.000.000.000,00 dan Rp1.289.162.028.597,00, mengalami peningkatan Rp60.837.971.403,00 dari tahun 2024. Jumlah Dana Bergulir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selama Tahun 2025, LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar

Rp149.283.905.187,00 yang disalurkan kepada 38 debitur dengan 1.912 pemanfaat yang merupakan pelaku usaha kelautan dan Perikanan;

2. Terdapat pengembalian pokok dana bergulir sebesar Rp88.445.933.784,00 sehingga nilai dana bergulir LPMUKP per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.350.000.000.000,00.

D.2.1.2.1.5. Dana Bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup – Dit. SMI

Saldo dana bergulir pada BLU BPDLH (Dit. SMI) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.361.176.113.976,00 dan Rp1.308.416.308.939,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.759.805.037,00 atau 4,03 persen dari saldo 31 Desember 2024.

Rincian mutasi dana bergulir BLU BPDLH adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nominal
1	Saldo Awal Dana Reboisasi Sektor Kehutanan TA 2025	1.308.416.308.939
2	Penyaluran Dana Reboisasi Sektor Kehutanan kepada Debitur	199.773.575.000
3	Pengembalian Dana Reboisasi Sektor Kehutanan dari Debitur	(141.418.029.162)
4	Transaksi belum direkonsiliasi dari debitur yang restrukturisasi (dicatat sebagai pengurang Pokok dana bergulir/outstanding)	(2.200.000)
5	Penyesuaian pencatatan dana bergulir atas kelebihan pembayaran piutang oleh debitur yang melebihi saldo outstanding pokok, yang sebelumnya diakui sebagai pengurang dana outstanding dan seharusnya diklasifikasikan sebagai dana pihak ketiga	240.345.225
6	Penyesuaian akibat penghapusan secara bersyarat terhadap piutang (PSBDT) berupa keringanan yang diterima debitur yang belum dilakukan rekonsiliasi (dicatat sebagai pengurang pokok dana bergulir)	(5.833.886.026)
Jumlah		**1.361.176.113.976**

D.2.1.2.1.6. Dana Bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

KPA BA 999.03 BLU BPDLH ditetapkan melalui KMK nomor 89/KMK.06/2022 tanggal 18 Maret 2022. Pada tanggal 2 November 2022 dilakukan pemindahbukuan dana DNS dari Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggran (UAKPA) Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sesuai dengan BAST Nomor BA-14/KN.3/2022 dan Nomor BAST-24/BPDLH.2/2022 tanggal 2 November 2022, sehingga pencatatan dana DNS dicatat oleh KPA BLU BPDLH.

Nilai dana bergulir pada KPA BLU BPDLH sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.443.307.117,00 dan Rp16.085.306.116,00, terdapat kenaikan sebesar Rp358.001.001,00 dari nilai per 31 Desember 2024. Adapun rincian dana DNS eks KLH dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai Dana Bergulir 31 Desember 2024	Rp16.085.306.116
Penyaluran dana bergulir selama tahun 2025	Rp450.000.000
Pengembalian dari Debitur selama tahun 2025 yang diakui sebagai Pokok	(Rp91.998.999)
Nilai Dana Bergulir DNS akhir Per 31 Desember 2025	**Rp16.443.307.117**

D.2.1.2.2. DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH

Nilai dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.419.856.141.752,00, dan Rp1.404.183.720.277,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp15.672.421.475,00 atau 1,12 persen. Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir. Secara rinci, penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih dibentuk pada entitas sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Unit Pengelola	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi	663.404.218.634	732.408.871.754
2	Satker BUN Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	77.806.059.690	77.806.059.690
3	BLU LPMUKP	58.023.336.184	68.004.075.492
4	BLU BPDLH (Dit. SMI)	515.429.582.967	422.224.809.462
5	BLU PIP	89.198.323.975	87.654.597.764
6	BLU BPDLH	15.994.620.302	16.085.306.116
Jumlah		**1.419.856.141.752**	**1.404.183.720.278***

Perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih sesuai dengan metode yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 Penentuan Nilai Bersih Investasi Non permanen Dalam Bentuk Tagihan.

1. BLU LPDB KEMENTERIAN KOPERASI

Nilai Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp663.404.218.634,00 dan Rp732.408.871.754,00.
Dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang.

Rincian perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2024	732.408.871.754
Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2025	6.650.308.566
Dana bergulir diragukan tertagih atas penurunan nilai penyisihan tahun 2025	(11.873.999.488)
Dana bergulir diragukan tertagih atas hapus buku PSBDT tahun 2025	(2.397.643.152)
Dana bergulir diragukan tertagih atas hapus buku piutang penanganan KPK tahun 2025	(43.147.198.160)
Penurunan penyisihan penghapusan *crash program* tahun 2025	(835.241.358)
Penurunan penyisihan penghapusan uuang pengganti Kejaksaan tahun 2025	(7.866.666.631)
Penurunan penyisihan piutang tahun 2025	(904.150.009)
Dana bergulir diragukan tertagih atas penurunan nilai penyisihan tahun 2025	(7.725.912.879)
Koreksi penyisihan piutang klaim subrogasi tahun 2025	(904.150.009)
Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2025	**663.404.218.634**

Berikut ini rincian perhitungan penyisihan diragukan tertagih sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Non Permanen Dalam Bentuk Tagihan.

(dalam rupiah)

Klasifikasi	Dana Bergulir 31 Desember 2025	Tarif Penyisih-an	Dana Bergulir 31 Desember 2025 yang dapat diperhitungkan	Nilai Jaminan	Dana Bergulir diragukan Tertagih per 31 Desember 2025
Lancar	2.979.507.298.231	0,50%	14.897.536.491	(4.497.760.701.805)	45.184.442
Kurang Lancar	15.362.006.444	10%	1.536.200.644	(30.962.911.356)	-
Diragukan	501.857.000	50%	250.928.500	(1.102.271.500)	-
Macet	1.158.032.025.107	100%	1.158.032.025.107	398.158.566.226	663.359.034.192
Jumlah	**4.153.403.186.782**		**1.174.716.690.742**	**(4.131.667.318.435)**	**663.404.218.634**

2. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp77.806.059.690,00 dan Rp77.806.059.690,00, atau tidak terdapat pergerakan nilai dana bergulir diragukan tertagih. Rincian Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	4.580.461.945	4.580.461.945
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang – Batang	3.255.609.606	3.255.609.606
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	2.973.570.553	2.973.570.553
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	-	-
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	-	-
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	-	-
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	30.380.286.625	30.380.286.625
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	19.235.300.141	19.235.300.141
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	-	-
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways/Cibitung-Cilincing	-	-
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	-	-
Jumlah	**77.806.059.691***	**77.806.059.691***

*selisih Rp1 karena pembulatan

3. BLU LPMUKP

Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya. Nilai Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp58.023.336.184,00 dan Rp68.004.075.492,00. Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih menurun Rp9.980.739.308,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada 31 Desember 2025 senilai Rp58.023.336.184,00 merupakan dana bergulir diragukan tertagih dari *outstanding* dana bergulir LPMUKP sebesar Rp1.350.000.000.000,00.

Rincian berdasarkan kolektibilitas dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kolektibilitas	Nominal Piutang	*Outstanding* setelah penyesuaian	Tarif Penyisihan	Penyisihan
Lancar	910.676.919.575	417.185.054.264	0,5%	2.085.925.271
Kurang Lancar	67.492.008.766	8.425.353.702	10%	842.535.370
Diragukan	10.362.144.690	2.825.000.000	50%	1.412.500.000
Macet	361.468.926.969	53.682.375.542	100%	53.682.375.542
Jumlah	**1.350.000.000.000**	**482.117.783.508**		**58.023.336.184**

4. BLU BPDLH (Dit. SMI)

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp515.429.582.967,00 dan Rp422.224.809.462,00, mengalami kenaikan sebesar Rp93.204.773.505,00 atau 22,07 persen dari tahun sebelumnya.

Perhitungan nilai dana bergulir diragukan tertagih pada BLU BPDLH disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	*Outstanding* Awal	Pengurangan Nilai Jaminan	Saldo Setelah Dikurangi Jaminan	Tarif	Penyisihan Akhir
Lancar	623.125.816.480	103.837.393.566	519.288.422.914	0,50%	2.596.442.115
Kurang Lancar	25.234.250.417	2.293.109.109	22.941.141.308	10%	2.294.114.131
Diragukan	5.913.948.348	-	5.913.948.348	50%	2.956.974.174
Macet (termasuk DNS)	706.902.098.731	199.320.046.183	507.582.052.548	100%	507.582.052.548
Total	**1.361.176.113.976**	**305.450.548.858**	**1.055.725.565.118**		**515.429.582.967**
				Dana bergulir diragukan tertagih 2024	**422.224.809.462**
				Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025	**93.204.773.505**

Berdasarkan pendataan yang dilakukan, nilai perhitungan jaminan ini akan terus bertambah seiring dengan proses pendataan yang saat ini tengah dilakukan.

5. BLU PIP

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU PIP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp89.198.323.975,00 dan Rp87.654.597.764,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.543.726.211,00 atau 1,76 persen dari nilai penyisihan per 31 Desember 2024.

BLU PIP baru melaksanakan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih pada tahun 2021 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 Penentuan Nilai Bersih Investasi Non Permanen Dalam Bentuk Tagihan.

Rincian Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai *Outstanding*	Tarif Penyisihan	Dana Bergulir diragukan tertagih
Lancar	8.297.334.018.725	0,50%	41.486.670.094
Kurang Lancar	111.333.334	10%	11.133.333
Diragukan	7.719.673.408	50%	3.859.836.704
Macet	43.840.683.844	100%	43.840.683.844
Jumlah	**8.349.005.709.311**		**89.198.323.975**

6. BLU BPDLH

Nilai dana bergulir diragukan tertagih pada KPA BLU BPDLH per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.994.620.302,00 dan Rp16.085.306.116,00, nilai tersebut berasal dari

pengalihan dana DNS eks KLH yang disisihkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Nilai Dana Bergulir 31 Desember 2024	16.085.306.116
Pengembalian dari debitur selama tahun 2025 yang diakui sebagai pokok	(90.685.814)
Retur ke debitur selama tahun 2025	-
Nilai Dana Bergulir DNS akhir TA 2025	**15.994.620.302**
Dana Bergulir diragukan tertagih akhir TA 2025	**15.994.620.302**

D.2.1.2.3. INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp324.455.373.266.807,00 dan Rp269.364.784.080.765,00 mengalami kenaikan sebesar Rp55.090.589.186.042,00 atau 20,45 persen.

Investasi nonpermanen Lainnya merupakan investasi nonpermanen yang dimiliki oleh Pemerintah selain Dana Bergulir. Rincian Investasi Nonpermanen Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Investasi Non Permanen	31 Desember 2025	31 Desember 2024
IP PEN Kementerian BUMN	9.159.791.666.077	9.693.749.999.411
UAIP	278.424.972.731	278.424.972.731
UAKPA Dit SMI (BLU LPDP, BP Tapera, BPDPKS)	293.352.604.307.680	233.746.918.386.731
UAKPA BLU LDKPI	8.038.681.014.148	8.038.681.014.148
PPA DJPK Pinjaman PEN Daerah	13.625.871.306.171	17.607.009.707.744
Jumlah	**324.455.373.266.807**	**269.364.784.080.765**

1. Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional

Investasi Pemerintah Non Permanen lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional adalah masing-masing sebesar Rp9.159.791.666.077,00 dan Rp9.693.749.999.411,00. Terdapat penurunan investasi sebesar Rp533.958.333.334,00 atau 5,51 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 karena adanya pembayaran cicilan pokok oleh PT KAI Persero sebesar Rp473.958.333.334,00 dan PT PN III sebesar Rp60.000.000.000,00.

Program pemulihan ekonomi nasional baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Adapun investasi pemerintah non permanen yang telah tersalurkan kepada BUMN penerima adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Penerima Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.369.791.666.666	2.843.750.000.000
Perum Perumnas	650.000.000.000	650.000.000.000

Penerima Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PT Krakatau Steel	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
PT Perkebunan Nusantara III	3.939.999.999.411	3.999.999.999.411
Jumlah	**9.159.791.666.077**	**9.693.749.999.411**

a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000,00 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-13/KN/2020 sesuai Surat Ketetapan Pencairan (SKP) Nomor SK-4/KPA999.03.MBU/12/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-77/PB/PB.3/2020. Saat ini sudah dilakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp1.130.208.333.334,00 sehingga nilai pokoknya menjadi sebesar Rp2.369.791.666.666,00.

b. Perum Perumnas sebesar Rp650.000.000.000,00 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-12/KN/2020 dan Nomor 179/PPI/SMF-KKRI/XI/2020 sesuai SKP Nomor SK-3/KPA999.03.MBU/11/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-68/PB/PB.3/2020, dan SKP Nomor SK-3/KPA999.03.MBU/11/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-173/PB/PB.3/2021.

c. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sebesar Rp2.200.000.000.000,00 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-14/KN/2020 dan PERJ-187/SMI/1220 sesuai SKP Nomor SK-5/KPA999.03.MBU/12/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-89/PB/PB.3/2020.

d. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp3.999.999.999.411,00 sesuai Perjanjian Nomor PRJ-16/KN/2020 dan 595/PKS/12/2020 sesuai SKP Nomor SK-2/KPA999.03.MBU/04/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-103/PB/PB.3/2021, SKP Nomor SK-4/KPA999.03.MBU/06/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-1 85/PB/PB.3/2021, dan SKP Nomor SK-7/KPA999.03.MBU/12/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-309/PB/PB.3/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.02/2022 Tanggal 27 Juli 2022. Saat ini sudah dilakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp60.000.000.000,00 sehingga nilai pokoknya menjadi sebesar Rp3.939.999.999.411,00.

2. Investasi Non Permanen pada UAIP

Investasi nonpermanen pada UAIP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp278.424.972.731,00 dan Rp278.424.972.731,00. Pada tahun 2024 investasi non permanen terdiri dari:

a. Investasi non permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.145,00.

Investasi Non Permanen lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) melalui Skim 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

Skim 2 adalah pinjaman pembelian mesin dengan suku bunga rendah melalui sistem modal padanan. Pengelolaan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk pembiayaan pembelian mesin/peralatan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Ditjen BIM dengan Lembaga Pengelola Program (LPP). Proporsi modal padanan untuk pembelian mesin tersebut adalah: perusahan ITPT sebesar 20 persen, LPP sebesar 10 persen dan Kemenperin sebesar 70 persen.

Pihak yang bertindak sebagai LPP untuk penyaluran pinjaman pada tahun 2007 dan 2008 adalah PT PNM, sedangkan untuk pinjaman TA 2009 adalah BSM.

Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp0,00 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.145,00.

b. Investasi non permanen pada tiga entitas yaitu PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco sebesar Rp274.335.740.586,00.

Investasi Non Permanen pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco senilai Rp274.335.740.586,00 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN tahun 2020.

Investasi Non Permanen pada PT Karabha Digdaya sebesar Rp251.240.740.586,00. PT Karabha Digdaya adalah perusahaan yang berasal dari aset eks. PT PPA. Perusahaan tersebut memiliki 2 (dua) divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf (Emeralda Golf) dan pengembangan perumahan (estate) di Cimanggis, Kota Depok.

Investasi Non Permanen pada pada PT SEG Sebesar Rp22.470.000.000,00. PT SEG berasal dari aset saham Eks PT PPA. Perusahaan tesebut melakukan usaha pengelolaan *real estate* serta pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata (*club house*) yang dikenal dengan nama “Klub Bogor Raya”.

Investasi Non Permanen pada pada PT Aldevco sebesar Rp625.000.000,00. PT Aldevco berasal dari hibah Ir AR Soehoed. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

3. Investasi Non Permanen pada Dit SMI (BLU LPDP, BP Tapera, BPDPKS)

Investasi nonpermanen pada Direktorat SMI pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp293.352.604.307.680,00 dan Rp233.746.918.386.731,00 terdiri dari:

a. Investasi Non permanen BLU LPDP Rp124.301.447.307.680,00;

b. Investasi Non permanen BP Tapera Rp145.475.114.000.000,00;

c. Investasi Non permanen pada Perum Bulog Rp22.076.043.000.000,00; dan

d. Investasi Non permanen pada PT SMI (Persero) Rp1.500.000.000.000,00.

a. Investasi Non permanen BLU LPDP

Investasi jangka BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU. Nilai investasi non permanen BLU LPDP pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp124.301.447.307.680,00 dan Rp117.471.804.386.731,00. Terjadi kenaikan Rp6.829.642.920.949,00 atau 5,81 persen.

Rincian klasifikasi portofolio LPDP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Instrumen	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Deposito	-	-

No.	Instrumen	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2	Obligasi menurut harga perolehan		
	a. Obligasi Negara-HTM	116.899.443.307.680	109.819.905.386.731
	b. Obligasi Korporasi-HTM	7.402.004.000.000	7.651.899.000.000
	Total	**124.301.447.307.680**	**117.471.804.386.731**

b. Investasi Non permanen BP Tapera

Investasi Non permanen BP Tapera per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp145.475.114.000.000,00 dan Rp116.275.114.000.000,00, terdiri dari:

1) Investasi Non Permanen Lainnya pada BP Tapera sebesar Rp60.675.114.000.000,00 berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengalihan dari BLU PPDPP.
2) Akumulasi dana FLPP yang berasal dari APBN TA 2022 sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp84.800.000.000.000,00.

BP Tapera merupakan badan hukum publik (*sui generis*) yang dibentuk sebagai amanat Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tujuan pembentukan badan ini adalah menghimpun dan menyediakan dana murah jangka Panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.
Investasi Non Permanen Lainnya pada BP Tapera per 31 Desember 2025 sebesar Rp116.275.114.000.000,00 adalah berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sebelumnya saldo Dana FLPP per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.596.006.813.852,00 dikelola oleh BLU PPDPP dan dicatat sebagai Investasi Non Permanen Lainnya Dana Bergulir. Pengalihan pengelolaan tersebut berdasarkan amanat UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 Pasal 34; PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64, PMK Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah; serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Penunjukan BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).
Nilai saldo awal atas pengalihan dana FLPP sebesar Rp60.675.114.000.000,00 berdasarkan hasil reviu BPKP. Nilai saldo tersebut didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021-Nomor BAST-07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021, dari Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bergulir FLPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah FLPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penyaluran investasi Dana FLPP didasarkan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan BP Tapera Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut antara lain mengatur:

1) Bahwa skema investasi merupakan Tabungan Pemerintah pada BP Tapera.
2) Bahwa Pemerintah berhak menarik Dana FLPP sewaktu-waktu dari BP Tapera dalam hal tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Hasil yang didapat Pemerintah adalah sebagai berikut:
    a. Sebesar imbal hasil atas pengelolaan Dana FLPP yang sedang digulirkan yaitu minimal sebesar 0,5 persen pertahun dari akumulasi Dana FLPP yang sedang digulirkan dikurangi dengan jasa pengelolaan Dana FLPP.

b. Sebesar rata-rata tingkat suku bunga/margin deposito standar per tahun untuk jangka waktu 3 (tiga bulan) yang terbitkan oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara yang berlaku di pasar atas pendapatan atas Dana FLPP yang belum digulirkan.

c. Seluruh pendapatan jasa giro dan pendapatan lainnya yang diakibatkan oleh penempatan dana yang bersumber dari Dana FLPP.

4) Hasil investasi (imbal hasilnya) akan disetor ke RIBUN atas nama Rekening Lain BI Investasi Bendahara Umum Negara Nomor 513000001980 di Bank Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta atau nama dan/atau nomor rekening lain yang ditentukan kemudian oleh Kementerian Keuangan.

Skema penyaluran dana FLPP oleh BP Tapera menggunakan mekanisme yang sama seperti saat dikelola oleh BLU PPDPP. Pada skema dimaksud, BP Tapera menggulirkan dana melalui Bank Penyalur kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur FLPP.

Investasi Non Permanen BP Tapera Rp60.675.114.000.000,00 disajikan sebesar nilai perolehannya dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat intensi permintaan penyetoran sebagian atau seluruh Dana FLPP oleh Pemerintah merupakan investasi nonpermanen yang tidak untuk dimiliki berkelanjutan dan bukan merupakan model bisnis investasi nonpermanen berbentuk tagihan.

Pada tahun 2025 terdapat pembiayaan dana FLPP sebesar Rp29.200.000.000.000,00 melalui mekanisme Rekening Investasi Bendahara Umum Negara kepada Operator Investasi Pemerintah yaitu BP Tapera. Selain itu terdapat penyetoran imbal hasil dari dana FLPP pada Rekening Investasi BUN sebesar Rp777.202.873.734,00.

c. Investasi Non permanen pada Perum Bulog

Investasi Non permanen pada Perum Bulog per 31 Desember dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp22.076.043.000.000,00 dan Rp0,00. Investasi Non Permanen Lainnya pada Perum Bulog terdiri dari Rp16.576.043.000.000,00 dialokasikan untuk pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Dana senilai Rp5.500.000.000.000,00 dialokasikan untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.05/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Penunjukan Perusahaan Umum BULOG Sebagai Operator Investasi Pemerintah, Perum BULOG ditunjuk sebagai OIP untuk mendukung penugasan Perum BULOG dalam penyelenggaraan CPP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan pelaksanaan mandat Perum BULOG sesuai penugasan Pemerintah. Penunjukan Perum BULOG selaku OIP dilakukan dalam bentuk Investasi Langsung Lainnya dalam rangka mendukung program CPP dan pelaksanaan mandat Perum BULOG. Selanjutnya, penyaluran investasi Dana Cadangan Beras Pemerintah di dasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah Pada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah.

d. Investasi Non permanen pada PT SMI (Persero)

Investasi Non permanen pada PT SMI (Persero) per 31 Desember dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.500.000.000.000,00 dan Rp0,00. Investasi Non Permanen Lainnya pada PT SMI (Persero) digunakan untuk *repayment* PEN.

4. Investasi Non Permanen BLU LDKPI

Nilai Investasi Non Permanen Lainnya BLU LDKPI pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.038.681.014.148,00 dan Rp8.038.681.014.148,00, tidak mengalami perubahan dari periode 31 Desember 2024. Adapun rincian investasi non permanen lainnya pada LDKPI adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	Rincian Investasi Jangka Panjang	Nilai
SBSN	SBSN PBSNTXX1	3.000.000.000.000
SBSN	SBSN PBSNTXX2	2.000.000.000.000
SUN	SBN FRXX5	1.000.000.000.000
SBSN	SBSN PBSXXX7	286.947.641.948
SBSN	SBSN PBSXX9	1.713.117.680.200
SUN	SBN FRXXX0	38.615.692.000
Jumlah		**8.038.681.014.148**

5. Investasi Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman PEN Daerah merupakan dukungan pembiayaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

Investasi Pemerintah tersebut ditempatkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan pasal 4, BAB II , PRJ-2/PK/2020 yang telah diubah menjadi PRJ-3/PK/2020.

Investasi Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp13.625.871.306.171,00 dan Rp17.607.009.707.744,00. Terdapat penurunan nilai investasi sebesar Rp3.981.138.401.573,00 atau 22,61 persen dari nilai investasi tahun 2024. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh adanya pengembalian pokok pinjaman selama tahun 2025 melalui pemotongan DAU maupun pengembalian pinjaman PEN dari PT SMI. Pada Tahun 2025 tidak terdapat pencairan pnjaman PEN.

Investasi pemerintah untuk pinjaman PEN Daerah yang di transfer langsung ke rekening khusus PT Sarana Multi Infrastruktur yang kemudian dikelola sebagai pinjaman PEN daerah yaitu dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

D.2.1.2.4. INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA DIRAGUKAN REALISASINYA

Nilai Investasi non permanen lainnya diragukan realisasinya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp962.745.115.689,00 dan Rp974.366.095.513,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.620.979.824,00 atau 1,19 persen.

Investasi nonpermanen lainnya diragukan realisasinya terdapat pada investasi non permanen skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), IP PEN, LDKPI, dan BPDPKS.

(dalam rupiah)

No.	Unit Pengelola	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Investasi nonpermanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.145	4.089.232.145
2	Dit SMI	955.660.022.803	955.257.621.372
3.	IP PEN	31.548.958.330	34.218.749.997
4.	LDKPI	(28.553.097.589)	(19.199.508.001)
Jumlah		**962.745.115.689**	**974.366.095.513**

1. Kementerian Perindustrian

Nilai Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.089.232.145,00 dan Rp4.089.232.145,00, tidak terdapat pergerakan nilai investasi nonpermanen diragukan realisasinya pada Kementerian Perindustrian.

2. Direktorat SMI

Investasi nonpermanen lainnya diragukan realisasinya pada Direktorat SMI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp955.660.022.803,00 dan Rp955.257.621.372,00, terjadi peningkatan sebesar Rp402.401.431,00 atau 0,04 persen dari periode 2024. Nilai tersebut berasal dari penyesuaian nilai investasi jangka pangang non permanen pada BLU LPDP dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Amortisasi Investasi *Held to Maturity* :		
- Akumulasi amortisasi Premium	(1.293.481.545.120)	(1.146.828.365.016)
- Akumulasi amortisasi Diskon	116.376.069.181	74.942.931.327
- Akumulasi Penyesuaian IJPNPL-DR Lainnya	49.862.497.399	-
Pencairan Premium Obligasi 2024	-	66.765.314.917
Mark-to-Market SRBI	15.133.717.340	(15.133.717.340)
Unrealized Holding Gain/(*Loss*) Investasi *Available for Sale*	156.449.238.397	64.996.214.740
Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	**(955.660.022.803)**	**(955.257.621.372)**

3. IP PEN

Investasi nonpermanen lainnya diragukan realisasinya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp31.548.958.330,00 dan Rp34.218.749.997,00, terjadi penurunan sebesar Rp2.669.791.667,00 atau 7,80 persen dari periode 2024.

(dalam rupiah)

No.	Perusahaan Negara	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)
1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	11.848.958.333	14.218.750.000	(2.369.791.667)
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	19.699.999.997	19.999.999.997	(300.000.000)
Jumlah		**31.548.958.330**	**34.218.749.997**	**(2.669.791.667)**

Nilai tersebut merupakan nilai pencadangan investasi non permanen pada perusahaan negara yang berupa pinjaman. Nilai pencadangan tersebut sebesar 0,5 persen dari nilai perolehan awal pinjaman, maka rinciannya adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Perusahaan Negara	Nilai Perolehan Awal Pinjaman	Jumlah
	(1)	(2)	(3) = (2) x 0,5%
1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.369.791.666.666	11.848.958.333
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	3.939.999.999.411	19.699.999.997
Jumlah			**31.548.958.330**

4. LDKPI

Nilai Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya yang tercatat dalam neraca pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp28.553.097.589,00 dan Rp19.199.508.001,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp9.353.589.588,00 dari periode 2024. Nilai tersebut berasal dari amortisasi diskonto atas penempatan investasi non permanen lainnya dalam bentuk Surat Berharga Negara.

D.2.1.2.5. INVESTASI PERMANEN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

Nilai investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah, atau dapat disebut juga penyertaan modal Negara, per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.556.339.409.493.147,00 dan Rp3.317.709.229.098.828,00 mengalami kenaikan sebesar Rp238.630.180.394.319,00 atau 7,19 persen.

Investasi permanen PMN meliputi:

1. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero;
2. Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum;
3. Penyertaan Modal Luar Negeri;
4. Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero	127.864.979.900.475	3.109.055.891.450.581
Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum	39.353.540.926.250	38.959.606.930.482
Penyertaan Modal Luar Negeri	39.377.688.307.018	35.559.449.396.360
Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya	3.349.743.200.359.404	134.134.281.321.405
Total	**3.556.339.409.493.147**	**3.317.709.229.098.828**

1. PMN pada Persero

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp127.864.979.900.475,00 dan Rp3.109.055.891.450.581,00.

Pernyataan Modal Pemerintah atau disebut juga Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Persero, merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah ≥ 51 persen, sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

PMN pada Persero dilakukan oleh 2 pihak yakni:

a. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero BP BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero BP BUMN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp31.647.738.830.954,00 dan Rp3.023.668.410.040.017,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp2.992.020.671.209.063,00 atau 98,95 persen.
Penurunan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada persero dipengaruhi oleh adanya imbreng saham Perusahaan Perseroan kepada PT Danantara Asset Management (DAM)/PT Biro Klasifikasi Indonesia selaku *Holding* Operasional sesuai PP No. 15 Tahun 2025 dimana Pemerintah melakukan pengalihan seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik Negara Republik Indonesia pada 52 BUMN kepada *Holding* Operasi. Selanjutnya, melalui PP No. 16 Tahun 2025 Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal negara pada BPI Danantara yang berasal dari pengalihan 99 persen saham milik negara berupa saham Seri B pada PT Danantara Asset Management (DAM)/PT Biro Klasifikasi Indonesia. Sehingga penyertaan negara pada Perusahaan Perseroan, menjadi dicatat melalui BPI Danantara yang memiliki kepemilikan saham sebesar 99 persen pada PT Danantara Asset Management (DAM)/PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Nilai penyertaan modal pemerintah pada Persero BP BUMN sebesar Rp31.647.738.830.954,00 terdiri atas Persero atas kepemilikan 1 persen pada Holding Operasional sebesar Rp31.647.276.231.690,00 dan Persero BUMN Anggota Holding atas kepemilikan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna sebesar Rp462.599.264,00.

Nilai penyertaan modal pemerintah pada Holding Operasional tersebut merupakan kepemilikan pemerintah melalui BP BUMN atas kepemilikan 1 persen saham seri A pada Holding Operasional (PT Danantara Asset Management). Nilai investasi tersebut berasal dari perhitungan porsi kepemilikan 1 persen BP BUMN dari ekuitas PT DAM sebesar Rp3.169.500.525.231.690,00 dikurangi selisih porsi 1 persen PMN PT Pelni, PT INKA, dan PT KAI sebesar Rp47.730.000.000,00 akibat PMN sepenuhnya disalurkan melalui BPI Danantara sehingga per 31 Desember 2025 terdapat porsi 1 persen PMN yang tidak dipenuhi dari sisi BP BUMN dengan rincian sebagai berikut:

(Rp3.169.500.525.231.690,00 x 1%) – Rp47.730.000.000,00 = Rp31.647.276.231.690,00.

Nilai selisih porsi 1 persen PMN PT Pelni, PT INKA, dan PT KAI sebesar Rp47.730.000.000,00 tersebut tetap utuh merupakan porsi milik negara, hanya sementara dicatatkan melalui BPI Danantara pada 31 Desember 2025 sebelum dilakukan pengalihan secara penuh saham BP BUMN pada PT DAM ke BPI Danantara pada tanggal 5 Januari 2026 sejalan dengan mandat UU Nomor 16 Tahun 2025.

Selain itu, nilai investasi pemerintah pada Persero BP BUMN sebesar Rp462.599.264,00 berasal dari kepemilikan Pemerintah atas 1 (satu) lembar saham seri A BUMN Persero anggota holding operasional yang dinilai menggunakan metode ekuitas.

b. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp96.217.241.069.521,00 dan Rp85.387.481.410.564,00, meningkat sebesar Rp10.829.759.658.957,00 atau 12,68 persen dari nilai per 31 Desember 2024.

Peningkatan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dikarenakan seluruh Persero di bawah Kementerian Keuangan membukukan laba, kecuali PT Bina Karya yang masih memiliki ekuitas negatif, sehingga nilai investasi pada Persero Kementerian Keuangan juga meningkat.

Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha

Milik Negara atau lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Badan Usaha Milik Negara/lembaga tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

1) Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
2) Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan

(dalam rupiah)

No.	Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	PT Sarana Multigriya Finansial	100%	27.725.931.000.000	20.559.960.000.000
2	PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	46.413.886.319.513	43.811.220.354.747
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	17.485.427.156.000	16.672.573.693.000
4	PT Geo Dipa Energi	94,5%	4.549.397.071.417	4.343.727.362.817
5	PT Bina Karya	100%	42.599.522.591	-
Total			**96.217.241.069.521**	**85.387.481.410.564**

Perubahan nilai kepemilikan pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara/Lembaga dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan disebabkan oleh peningkatan nilai ekuitas pada masing-masing Perusahaan dan Lembaga.

Rincian persero di bawah Kementerian Keuangan sebagai berikut :

1) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan. PT SMF berfungsi untuk mengalirkan dana dari pasar modal ke sektor perumahan dengan menyediakan fasilitas pinjaman, transaksi sekuritisasi, dan efisiensi pasar primer.

2) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. PT SMI bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur salah satunya melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral.

3) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Negara Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. PT PII bergerak di bidang penjaminan infrastruktur dalam rangka peningkatan kelayakan kredit dari proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS).

4) PT Geo Dipa Energi (Persero)

PT Geo Dipa Energi (Persero) (PT GDE) didirikan pada tanggal 5 Juli 2002. PT GDE memanfaatkan nilai ekonomis dan lingkungan energi panas bumi untuk menghasilkan listrik. PT GDE berupaya untuk memenuhi permintaan daya listrik nasional dengan memanfaatkan sifat-sifat hemat biaya dan lingkungan dari energi panas bumi.

5) PT Bina Karya (Persero)

PT Bina Karya (Persero) (PT BIKA) pada awalnya berbentuk Perusahaan Negara (PN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 1962 hingga akhirnya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1970. Sejak berdiri pada tahun 1962, pembinaan dan pengawasan Perseroan berada di bawah Menteri Pekerjaan Umum yang kemudian pembinaannya dialihkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998. Dalam rangka *repurposing* PT Bina Karya (Persero) menjadi Badan Usaha Otorita (BUO) Ibu Kota Nusantara, Pemerintah telah menerbitkan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sejak diterbitkannya PP tersebut, pembinaan dan pengawasan PT BIKA berada di bawah Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan telah memberikan Kuasa Pemegang Saham kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sesuai Surat Kuasa Nomor SKU 625.1/MK.06/2023 pada tanggal 5 Desember 2023. Pasca *repurposing*, saat ini PT BIKA menjalankan fungsi sebagai *master developer*, *bussiness owner*, dan operator di IKN yang digunakan OIKN sebagai *vehicle* dalam 4P (Percepatan Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan) IKN dan Daerah Mitra.

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi permanen yang dimiliki pemerintah.

2. PMN pada Perum

Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp39.353.540.926.250,00 dan Rp38.959.606.930.482,00. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp393.933.995.768,00 atau 1,01 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum dipengaruhi oleh naiknya bagian laba pemerintah pada Perum. Dari 10 (sepuluh) Perum, terdapat 7 (tujuh) Perum yang mencatatkan laba dengan total sebesar Rp1.455.153.548.755,00, yang sebagian besar dikontribusikan oleh Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, yang pada *Audited* 2025 mencatat laba sebesar Rp832,45 miliar (naik 53,07 persen). Kenaikan laba tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha dari jasa pelayanan penerbangan dan jasa pelayanan terminal.

Pernyataan Modal Pemerintah pada Perum merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Perum dinilai PMN pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh BP BUMN.

3. PMN Luar Negeri

Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp39.377.688.307.018,00 dan Rp35.559.449.396.360,00. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar

Rp3.818.238.910.658,00 atau 10,74 persen dari tahun sebelumnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, perubahan nilai investasi pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) diakibatkan dari perubahan nilai tukar.

(dalam rupiah)

No.	PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	*Asian Development Bank* (ADB)	6.619.823.364.000	6.071.724.791.356
2	*International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD)	4.178.306.597.899	4.037.613.618.555
3	*International Development Association* (IDA)	2.349.006.460.191	2.067.947.630.222
4	*International Finance Corporation* (IFC)	5.171.579.600.000	4.997.440.885.000
5	*Multilateral Investment and Guarantee Agency* (MIGA)	63.499.550.400	61.361.377.740
6	*Islamic Development Bank* (IDB)	7.225.039.102.116	5.065.835.782.925
7	*International Islamic Trade Finance Corporation* (ITFC)	34.443.200.000	33.283.420.000
8	*The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit* (ICIEC)	5.648.790.074	5.181.089.713
9	*International Fund for Agricultural Development* (IFAD)	1.587.714.480.000	1.485.781.563.000
10	*Common Fund for Commodities* (CFC)	21.588.278.098	20.382.990.680
11	*The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector* (ICD)	371.894.884.240	359.372.347.169
12	*Credit Guarantee and Investment Facility*	511.632.000.000	494.404.200.000
13	*Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB)	11.237.512.000.000	10.859.119.700.000
Jumlah		**39.377.688.307.018**	**35.559.449.396.360**

Perubahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI dalam rupiah berasal dari:

a. Penambahan Penyertaan Modal pada *International Development Association* (IDA) sebesar Rp203.844.000.000,00; *Islamic Development Bank* (IsDB) sebesar Rp1.642.045.731.398,00; dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar Rp49.068.000.000,00;
b. Pendapatan atas selisih hasil konfirmasi pada *Islamic Development Bank* (IsDB) sebesar Rp3.888.071.386,00;
c. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.919.393.107.874,00.

4. PMN pada Badan Usaha Lainnya

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.349.743.200.359.404,00 dan Rp134.134.281.321.405,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.215.608.919.037.999,00 atau 2.397,31 persen jika dibandingkan dengan 2024.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya terdiri dari :

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyertaan pada Badan Usaha lainnya (UAKPA DJKN)	125.712.221.299.147	124.754.540.945.568
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (UAKPA Dit EAS DJPPR)	648.623.299	637.129.177
Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya dan Perusahaan Minoritas (UAKPA BP BUMN)	3.215.720.275.000.100	1.687.799.417.150
Penyertaan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri (UAKPA Dit. KMKB – DJSPSK)	2.073.280.000.000	2.003.468.000.000
Penyertaan Pada BP Tapera (UAKPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP)	2.903.191.720.024	2.845.624.180.464
Bank Tanah (UAKPA Dirjen Pengadaaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan)	3.333.583.716.834	2.842.211.649.046
Jumlah	**3.349.743.200.359.404**	**134.134.281.321.405**

a. UAKPA DJKN

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya pada UAKPA DJKN terdiri dari Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI) dan Lembaga Pengelola Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp125.712.221.299.147,00 dan Rp124.754.540.945.568,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp957.680.353.579,00 atau 0,77 persen dari periode 2024.

(dalam rupiah)

Uraian	Persentase	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UAKPA DJKN)	100%	14.197.282.000.000	13.992.629.000.000
PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI)	35,23%	3.292.892.299.147	3.215.436.945.568
Lembaga Pengelola Investasi	100%	108.222.047.000.000	107.546.475.000.000
Jumlah		**125.712.221.299.147**	**124.754.540.945.568**

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset Lembaga/Badan usaha secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi permanen yang dimiliki pemerintah.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI), merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal.

Nilai penyertaan Pemerintah pada LPEI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp14.197.282.000.000,00 dan Rp13.992.629.000.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp204.653.000.000,00 atau 1,46 persen dari tahun 2024.

PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI)

Nilai penyertaan Pemerintah pada PT TPI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah

Rp3.292.892.299.147,00 dan Rp3.215.436.945.568,00 mengalami peningkatan sebesar Rp77.455.353.579,00 atau 2,41 persen dari nilai tahun 2024.

PT TPI didirikan pada tanggal 16 Maret 2001. Pada awalnya, BPPN adalah pemilik 70 persen saham PT TPI dan sisanya dikuasai oleh Grup Tirtamas Majutama. Pengakhiran tugas BPPN pada 2004, mengakibatkan beralihnya kepemilikan 70 persen saham kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). Pada tahun 2019, komposisi kepemilikan saham TubanPetro berubah dikarenakan adanya konversi MYB menjadi saham yang dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penambahan modal saham melalui right issue yang seluruhnya diambil oleh PT Pertamina (Persero), sehingga struktur kepemilikan TubanPetro terdiri dari PT Pertamina (Persero) (51 persen), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (46,99 persen) dan PT Pertamina Pedeve Indonesia (2 persen) per 27 November 2019.

Pada November 2022 terdapat penambahan modal saham oleh pemegang saham lain yaitu PT Pertamina (Persero) ke dalam ekuitas PT TPI. Dengan adanya penambahan modal oleh pemegang saham lainnya tersebut, persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengalami penururan dari 46,99 persen menjadi 35,23 persen.

Lembaga Pengelola Investasi

Lembaga Pengelola Investasi (”LPI/INA”) didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Pasal 165 yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Ruang lingkup kegiatan INA terutama meliputi mengelola investasi dan merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi investasi. Pemerintah Indonesia adalah entitas induk dan pemegang saham pengendali INA. INA bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Nilai penyertaan Pemerintah pada LPI/INA per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp108.222.047.000.000,00 dan Rp107.546.475.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp675.572.000.000,00 atau 0,63 persen.

Badan Usaha Milik Negara/Lembaga terkecuali PT TPI dan INA (hanya pembinaannya saja yang berada di bawah Kemenkeu), seluruhnya berada di bawah pengawasan dan pembinaan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
- Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.
- Salah satu *fiscal tools* yang digunakan dalam penentuan kebijakan fiskal oleh Menteri Keuangan.

b. UAKPA Dit EAS DJPPR

Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN (*special purpose vehicle*-SPV).

Nilai penyertaan Pemerintah pada Perusahaan Penerbit SBSN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp648.623.299,00 dan Rp637.129.177,00, mengalami peningkatan sebesar

Rp11.494.122,00 atau 1,80 persen dari tahun 2024.

Jumlah Investasi Jangka Panjang merupakan jumlah saldo penyertaan modal pemerintah pada badan usaha lainnya sejak tahun 2008 yang didepositokan dalam deposito mudharabah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Jakarta Thamrin.

c. UAKPA BP BUMN

Nilai investasi pemerintah pada Badan Usaha Lainnya pada BP BUMN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.215.720.275.000.100,00 dan Rp1.687.799.417.150,00, meningkat sangat signifikan yaitu sebesar Rp3.214.032.475.582.950,00 dari periode tahun 2024. Adapun rincian nilai investasi pemerintah pada Badan Usaha Lainnya pada BP BUMN adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	BPI Danantara	3.215.594.968.000.000	-
2	BUMN Minoritas	125.307.000.100	1.687.799.417.150
	Total	**3.215.720.275.000.100**	**1.687.799.417.150**

BPI Danantara merupakan badan yang dibentuk berdasarkan UU No.1 Tahun 2025 untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. BPI Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. BPI Danantara membawahi Holding Operasi (PT Danantara Assets Management) dan Holding Investasi (PT Danantara Investment Management).

Pada tanggal 21 Maret 2025 melalui PP No. 15 Tahun 2025 Pemerintah melakukan pengalihan seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik Negara Republik Indonesia pada 52 BUMN kepada Holding Operasi. Selanjutnya, melalui PP No. 16 Tahun 2025 Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal negara pada BPI Danantara yang berasal dari pengalihan 99 persen saham milik negara berupa saham Seri B pada PT Danantara Assets Management/PT Biro Klasifikasi Indonesia, sehingga komposisi pemegang saham PT Biro Klasifikasi Indonesia menjadi:

- Negara Republik Indonesia melalui Menteri BUMN memiliki 1 persen saham berupa saham Seri A Dwiwarna.
- BPI Danantara memiliki 99 persen saham berupa saham seri B.

Peningkatan nilai investasi yang sangat signifikan terjadi karena adanya pengalihan saham Perusahaan Perseroan kepada PT Danantara Assets Management (PT DAM), dimana sebesar 99% kepemilikan dimiliki oleh Pemerintah melalui BPI Danantara dan sebesar 1 persen kepemilikan dimiliki oleh Pemerintah melalui BP BUMN. Mengingat BPI Danantara bukan merupakan BUMN, sehingga investasi pemerintah pada BUMN yang semula dilaporkan pada akun penyertaan modal pemerintah pada Persero dilakukan reklasifikasi pada akun penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Lainnya.

Nilai investasi permanen pada BPI Danantara sebesar Rp3.215.594.968.000.000,00 terbentuk dari inbreng saham dari Pemerintah Indonesia sesuai PP Nomor 15 Tahun 2025, selisih pengakuan awal investasi dan *Net Book Value* (NBV) pada tanggal pelaksanaan inbreng, serta penambahan Penyertaan Modal Negara PT Pelni, PT INKA, dan PT KAI yang disalurkan melalui BPI Danantara.

Nilai Investasi Permanen pada BPI Danantara tersebut berasal dari saldo investasi asosiasi yang dicatat pada PT DAM sebesar Rp3.137.853.249.000.000,00 (mencakup investasi permanen atas 53 BUMN) dan pada PT DIM sebesar Rp70.116.597.000.000,00, serta total aset bersih BPI Danantara di luar Investasi Asosiasi sebesar Rp7.625.122.000.000,00.

Pengalihan saham kepada PT DAM juga berpengaruh terhadap nilai investasi pada BUMN Minoritas yang

mengalami penurunan karena pemerintah melalui Kementerian BUMN hanya memiliki kuasa atas 1 (satu) lembar saham seri A. Sedangkan pada periode sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian BUMN masih memiliki lebih dari 1 persen pada perusahaan Minoritas, diantaranya PTPN I (10,58 persen), PTPN IV (7,07 persen), dan Rekayasa Industri (4,97 persen).

d. UAKPA Dit. KMKB – DJSPSK

Investasi pemerintah Badan Usaha Lainnya pada UAKPA Dit. KMKB – DJSPSK merupakan Penyertaan pada ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF) dan *International Rubber Consortium Limited* (IRCo). Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya UAKPA Dit. KMKB – DJSPSK masing-masing sebesar Rp2.073.280.000.000,00 dan Rp2.003.468.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp69.812.000.000,00 atau 3,48 persen yang berasal dari pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

LKI	Nilai Investasi per 31 Desember 2025	Nilai Investasi per 31 Desember 2024	Selisih KURS
ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF)	2.006.400.000.000	1.938.840.000.000	67.560.000.000
International Rubber Consortium Limited (IRCo)	66.880.000.000	64.628.000.000	2.252.000.000
Jumlah	**2.073.280.000.000**	**2.003.468.000.000**	**69.812.000.000**

e. UAKPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Modal Awal BP Tapera)

BP Tapera merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BP Tapera ditetapkan dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. BP Tapera bertanggungjawab kepada Komite Tapera (yang terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan unsur profesional).

BP Tapera memperoleh modal awal yang bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Awal BP Tapera diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal BP Tapera.

Posisi penyertaan pada BP Tapera pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.903.191.720.024,00 dan Rp2.845.624.180.464,00, terjadi kenaikan sebesar Rp57.567.539.560,00 atau 2,02 persen. Kenaikan nilai investasi pada Modal Awal BP Tapera disebabkan adanya surplus dari kegiatan operasional selama tahun 2025.

f. UAKPA Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Bank Tanah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Bank Tanah ditetapkan dengan tujuan mengelola tanah dengan fungsi untuk melaksanakan perencanaan perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Badan Bank Tanah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk diberi kewenangan khusus dalam mengelola tanah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komite yang terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selanjutnya, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana Bank Tanah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Komite Bank Tanah Nomor 04/SK/Kom-BTI/XII/2021 dengan susunan sebagai berikut:

1) Kepala Badan Pelaksanaan Bank Tanah;
2) Deputi Bidang Perencanaan Strategi dan Pengadaan Tanah; dan
3) Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Keuangan.

Kepala Badan Pelaksana dan Deputi bertanggung jawab kepada Komite Badan Bank Tanah.

Badan Bank Tanah memperoleh modal awal yang bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Awal Badan Bank Tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Posisi penyertaan pada Badan Bank Tanah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.333.583.716.834,00 dan Rp2.842.211.649.046,00. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp491.372.067.788,00 atau 17,29 persen. Kenaikan nilai investasi disebabkan adanya kenaikan nilai ekuitas yang berasal dari perolehan tanah penetapan pemerintah selama periode tahun 2025.

D.2.1.2.6. INVESTASI PERMANEN BADAN LAYANAN UMUM

Nilai investasi permanen BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.053.004.500,00 dan Rp8.053.004.500,00, tidak terjadi kenaikan atau penurunan nilai investasi dari nilai investasi per 31 Desember 2024.

(dalam rupiah)

No	BLU	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	UIN Sumatera Utara Medan	1.415.810.000	1.415.810.000
2	PPK Gelora Bung Karno	6.637.194.500	6.637.194.500
	Jumlah	**8.053.004.500**	**8.053.004.500**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (PP Nomor 74/2012), BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Selain itu, investasi merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Oleh karena itu, semua investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum akan dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi induk Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Investasi permanen BLU terdapat pada BLU Pengelola Kawasan dan BLU Pelayanan Pendidikan. Adapun rincian investasi adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10 persen dengan nilai sebesar Rp6.637.194.500,00. Tidak ada perubahan nilai kepemilikan BLU PPK Gelora Bung Karno pada PT STS karena penyertaan BLU PPK Gelora Bung Karno dicatat dengan metode biaya.
2. BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan memiliki penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani dengan kepemilikan sebanyak 3.518 lembar saham seri A dan 30.348 lembar saham seri B. Pada tahun 2019 terdapat penerbitan saham baru dari BPRS yang tidak diambil bagian oleh UIN Sumatera Utara sehingga persentase kepemilikan sahamnya turun atau terdilusi dari 30,82 persen menjadi 22,82 persen.

D.2.1.2.7. INVESTASI PERMANEN LAINNYA

Nilai Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.033.747.322.724.706,00 dan Rp790.019.190.222.637,00, terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp243.728.132.502.069,00 atau 30,85 persen dari nilai investasi per 31 Desember 2024.

Investasi Permanen Lainnya terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia	680.782.624.000.000	473.944.440.890.756
2	Penyertaan Modal Negara pada Otorita/Lembaga Penjamin Simpanan	270.346.412.180.000	239.408.499.778.000
3	Penyertaan Modal Negara Lain-lain	82.618.286.544.706	76.666.249.553.881
	Jumlah	**1.033.747.322.724.706**	**790.019.190.222.637**

1. Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia

Nilai Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp680.782.624.000.000,00 dan Rp473.944.440.890.756,00, terdapat kenaikan sebesar Rp206.838.183.109.244,00 atau 43,64 persen yang berasal dari peningkatan nilai akumulasi surplus dan selisih revaluasi.

Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Dengan mulai efektifnya Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/13/PDG/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, mulai tahun 2014 Bank Indonesia tidak lagi menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

Bank Indonesia berpandangan bahwa Bank Indonesia sebagai entitas independen menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara, selain itu Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (*net worth*).

Selain itu, Bank Indonesia juga tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan tidak tercermin dari kemampuan menghasilkan kas masa depan. Kewenangan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga sui generis yang dapat mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah menyebabkan laporan arus kas tidak relevan karena Bank Indonesia tidak memiliki kendala dalam menghasilkan arus kas.

Dalam menghadapi perubahan kebijakan ini, DJKN dalam menentukan nilai penyertaan Pemerintah pada Bank Indonesia menggunakan pendekatan menjumlahkan sub-sub akun yang pada laporan keuangan Bank Indonesia tahun sebelumnya menjadi komponen ekuitas antara lain:

a. Selisih Revaluasi.
b. Modal.
c. Akumulasi Surplus/Defisit yang terdiri dari:
    1) Cadangan Umum;
    2) Cadangan Tujuan;
    3) Surplus/Defisit Tahun berjalan.

2. Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Penjamin Simpanan

Nilai Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp270.346.412.180.000,00 dan Rp239.408.499.778.000,00. Terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp30.937.912.402.000,00 yang berasal dari surplus tahun berjalan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

3. Penyertaan Modal Negara Lain-lain

Investasi Lain-lain terdiri dari Penyertaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Nilai penyertaan modal Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp82.618.286.544.706,00 dan Rp76.666.249.553.881,00.

Adapun rincian investasi lain-lain disajikan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Institut Pertanian Bogor	3.113.625.000.000	2.990.843.503.969
2	Universitas Airlangga	3.542.488.512.104	3.591.352.850.630
3	Institut Teknologi Bandung	1.921.411.385.612	2.205.593.497.050
4	Universitas Indonesia*	5.203.956.625.134	4.987.446.197.141
5	Universitas Gajah Mada	4.839.951.040.750	4.690.537.636.727
6	Universitas Pendidikan Indonesia	1.382.052.033.447	1.337.549.025.053
7	Universitas Sumatera Utara	2.049.653.503.285	1.974.779.275.696
8	Universitas Padjajaran	1.650.501.810.411	1.385.194.813.264
9	Universitas Diponegoro	4.763.694.068.636	4.503.404.904.260
10	Universitas Hassanudin	2.729.954.414.184	2.653.554.569.612
11	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	2.283.712.567.679	2.024.869.034.265
12	Universitas Negeri Sebelas Maret	1.833.235.386.877	1.779.364.907.379
13	Universitas Negeri Malang	2.330.898.366.889	2.142.369.181.646
14	Universitas Andalas*	1.577.894.863.973	1.401.297.719.035
15	Universitas Brawijaya	4.019.733.139.363	3.821.445.509.872
16	Universitas Negeri Padang	1.642.897.475.855	1.403.755.330.398
17	Universitas Syah Kuala	1.642.076.110.225	1.590.623.277.520
18	Universitas Terbuka	3.705.492.493.181	3.370.784.028.495
19	Universitas Negeri Surabaya	2.110.439.375.484	1.977.372.725.959
20	Universitas Negeri Yogyakarta*	1.325.184.802.369	1.709.485.958.936
21	Universitas Negeri Semarang*	2.137.631.311.031	2.010.881.734.706
22	Universitas Negeri Jakarta	1.768.554.322.962	-
23	Universitas Sriwijaya	1.523.406.510.331	-

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
24	BPJS Kesehatan	11.183.243.205.994	10.581.197.310.345
25	BPJS Ketenagakerjaan	12.336.598.218.930	12.532.546.561.923
	Jumlah	**82.618.286.544.706**	**76.666.249.553.881**

**Menggunakan angka LK Unaudited 2025*

a. PTN BH

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa Perguruan Tinggi eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 21 Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Rincian Penetapan statuta PTN BH adalah sebagai berikut:

1) Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
2) Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
3) Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
4) Universitas Indonesia (UI) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6) Universitas Sumatera Utara (USU) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
7) Universitas Airlangga (UNAIR) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
8) Universitas Padjajaran (UNPAD) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran;
9) Universitas Diponegoro (UNDIP) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
10) Universitas Hasanuddin (UNHAS) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
11) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12) Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia;
13) Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
14) Universitas Andalas (UNAND) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
15) Universitas Brawijaya (UB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;

16) Universitas Negeri Padang (UNP) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
17) Universitas Negeri Malang (UNM) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
18) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta;
19) Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
20) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
21) Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
22) Universitas Terbuka (UT) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
23) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta;
24) Universitas Sriwijaya (Unsri) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam PP penetapan masing-masing PTNBH tersebut telah diamanatkan bahwa kekayaan awal dari PTNBH akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai kekayaan awal PTNBH yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan menjadi dasar pencatatan pada Laporan Keuangan BUN. Per 31 Desember 2025, Menteri Keuangan telah menetapkan KMK Penetapan Nilai Kekayaan Awal (PNKA) pada 23 PTNBH yang dicatat dalam Laporan Keuangan BUN. Sementara itu, terdapat satu PTNBH yang belum ditetapkan kekayaan awalnya oleh Menteri Keuangan, yakni PTNBH Universitas Islam Internasional Indonesia, dikarenakan masih menunggu penyelesaian proses hibah dari Kementerian Agama kepada PTNBH Universitas Islam Internasional Indonesia.
Nilai penyertaan modal lain-lain pada PTNBH per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp59.098.445.119.782,00 dan Rp53.552.505.681.613,00.

b. BPJS

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan amanat UU dan PP tersebut, pada akhir tahun 2013 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang pada salah satu pasalnya menetapkan nilai kekayaan awal BPJS sebesar Rp500.000.000.000,00 berbentuk uang tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.

Adapun modal yang bersumber dari hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan yaitu bersumber dari PT Askes (Persero) pada tanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp9.151.813.376.805,00 sehingga total modal BPJS adalah sebesar Rp9.651.813.376.805,00. Jumlah tersebut telah disahkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Nomor 510/KMK.06/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial per 1 Januari 2014.

Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah RI juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp7.323.338.452.469,00 sebagaimana tercantum dalam LK Penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000,00 sesuai PP Nomor 83 Tahun 2013.

Nilai investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp11.183.243.205.994,00 dan Rp10.581.197.310.345,00. Sedangkan nilai investasi pada BPJS ketenagakerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.336.598.218.930,00 dan Rp12.532.546.561.923,00.

D.2.1.3 ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.325.247.519.728,00 dan Rp1.292.738.475.911,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.509.043.817,00 atau 2,51 persen. Jumlah tersebut merupakan nilai neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	96.562.505.000	49.598.506.000
Peralatan dan Mesin	490.311.101.646	311.503.452.236
Gedung dan Bangunan	101.208.263.075	81.252.321.014
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.778.149.891.736	1.722.156.865.217
Aset Tetap Lainnya	52.582.748.755	50.504.068.840
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.618.219.556	8.954.062.424
Jumlah Aset Tetap Kotor	**2.528.432.729.768**	**2.223.969.275.731**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.203.185.210.040)	(931.230.799.820)
Jumlah Aset Tetap	**1.325.247.519.728**	**1.292.738.475.911**

D.2.1.3.1. TANAH

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp96.562.505.000,00 dan Rp49.598.506.000,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp46.963.999.000,00 atau 94,69 persen. Tanah tersebut terdapat pada Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Aset berupa tanah berada pada BP Karimun dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Luas (m²)	Lokasi Objek	Nilai Wajar
1	42.870	Jalan Kawasan Industri, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat	10.146.193.000
2	56.660	Jalan Kawasan Industri SP Parit Rampak-Seipem, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral Barat	13.409.921.000
3	5.707	Jalan Pesisir Selatan,Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral	1.583.686.000

No.	Luas (m²)	Lokasi Objek	Nilai Wajar
4	9.149	Jalan Pesisir, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral	2.457.518.000
5	6.368	Jalan Pesantren Darul Taufiq, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral	1.756.895.000
6	11.800	Jalan Pesisir Selatan-Eks Pelabuhan TPI, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral	3.086.169.000
7	43.200	Jalan Simpang Pangke-Pantai Pelawan, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat	8.968.061.000
8	36.250	Jalan Simpang Mutiara-Simpang Pangke, Desa Pangke Barat, KecamatanMeral Barat	9.633.546.000
9	6.078	Jalan Simpang Pangke-Kampung Ambat, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat	1.773.226.000
10	19.190	Jalan Paya Rengas, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun	4.622.380.000
11	28.380	Jalan Simpang Teluk Paku-PT. KSS, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat	6.276.521.000
12	191.100	Jalan Raja Haji Fisabillilah, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat	32.848.389.000
Jumlah			96.562.505.000

Mutasi/perubahan Tanah tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo Awal	**49.598.506.000**
Penambahan	**73.006.391.000**
Transfer Masuk	-
Perolehan Lainnya	73.006.391.000
Pengurangan	**26.042.392.000**
Transfer Keluar	23.004.399.000
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	3.037.993.000
Saldo per 31 Desember 2025	**96.562.505.000**

Mutasi tambah sebesar Rp73.006.391.000,00 merupakan koreksi atas sepuluh bidang tanah yang bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota/Kabupaten setempat dan Masyarakat yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Selama Periode Tahun 2025, terdapat mutasi kurang aset Tanah sebesar Rp26.042.392.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi kurang sebesar Rp23.004.399.000,00 yang berada pada BP Tanjungpinang merupakan Tanah yang diperoleh dari alih status sesuai Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang No. BA-KOSP 2 Tahun 2024 dan No. 14.019/BP-TPI/I/2024.
2. Koreksi sebesar Rp3.037.993.000,00 merupakan koreksi atas Pencatatan Aset Tanah pada BP Karimun untuk jalan Sp. Parit Rampak – Saipem, Kec. Meral Barat yang semula seluas 51.600 m2 dan 62.194 m2 menjadi seluas 42.870 m2 dan 56.660 m2. Perubahan luas tersebut disebabkan hasil pengukuran ulang atas penerbitan sertifikat dan diketahui terdapat lahan yang masuk wilayah hutan. Nilai Aset Tanah tersebut sebelumnya sebesar Rp26.594.107.000,00 menjadi Rp23.556.114.000,00.

D.2.1.3.2. PERALATAN DAN MESIN

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp490.311.101.646,00 dan Rp311.503.452.236,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp178.807.649.410,00 atau 57,40 persen. Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2025	31 Desember 2024
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	20.810.723.023	19.739.856.323
-	Otoritas Jasa Keuangan	66.534.542.151	66.685.257.107
-	SKK Migas	267.348.528.471	172.750.558.806
	PPP BUN	135.617.308.001	52.327.780.000
Total		**490.311.101.646**	**311.503.452.236**

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut:
Mutasi pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Otoritas Jasa Keuangan dan SKK Migas:

(dalam rupiah)

Saldo Awal	**259.175.672.236**
Penambahan :	**97.640.170.477**
Saldo Awal	84.475.107.925
Pembelian	1.633.698.405
Perolehan Lainnya	10.332.184.505
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	12.903.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	199.339.000
Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	4
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	3.798.638
Koreksi Susulan	981.240.000
Reklasifikasi Masuk	1.899.000
Pengurangan:	**(2.122.049.068)**
Reklasifikasi Keluar	(29.146.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(2.092.903.068)
Saldo per 31 Desember 2025	**354.693.793.645**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	**(322.204.449.049)**
Nilai buku per 31 Desember 2025	**32.489.344.596**

Mutasi pada PPP BUN:

(dalam rupiah)

Saldo Awal	**52.327.780.000**
Penambahan	**83.289.528.001**
Pembelian	83.289.528.001
Pengurangan	-
Saldo per 31 Desember 2025	**135.617.308.001**
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	**36.009.323.004**
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**99.607.984.997**

Aset Peralatan dan Mesin pada satker PPP BUN per 31 Desember 2025 sebesar Rp135.617.308.001,00 sedang dalam proses penetapan status penggunaan (PSP) kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan.

D.2.1.3.3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp101.208.263.075,00 dan Rp81.252.321.014,00, terdapat kenaikan nilai selama periode tahun 2025 sebesar Rp19.955.942.061,00 atau 24,56 persen. Nilai Gedung dan Bangunan tersebut berasal dari BP Batam. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo Awal	**81.252.321.014**
Penambahan :	**21.545.335.207**
Saldo Awal	88.600.000
Pembelian	1.500.793.146
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	18.508.262.060
Pengembangan Melalui KDP	1.447.680.001
Pengurangan	**(1.589.393.146)**
Koreksi Pencatatan	(1.500.793.146)
Reklasifikasi Keluar	(88.600.000)
Saldo per 31 Desember 2025	**101.208.263.075**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	**(5.688.570.186)**
Nilai buku per 31 Desember 2025	**95.519.692.889**

D.2.1.3.4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.778.149.891.736,00 dan Rp1.722.156.865.217,00, terjadi kenaikan sebesar Rp55.993.026.519,00 atau 3,25 persen Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.778.133.801.236	1.722.140.774.717
-	SKK Migas	16.090.500	16.090.500
Total		**1.778.149.891.736**	**1.722.156.865.217**

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo Awal	**1.722.156.865.217**
Penambahan:	**181.198.769.059**
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	180.674.897.899
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	523.871.160
Pengurangan:	**(125.205.742.540)**
Koreksi Pencatatan	(193.037.880)
Transfer Keluar	(125.012.704.660)
Saldo per 31 Desember 2025	**1.778.149.891.736**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	**(824.045.780.645)**
Nilai buku per 31 Desember 2025	**954.104.111.091**

D.2.1.3.5. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp52.582.748.755,00 dan Rp50.504.068.840,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.078.679.915,00 atau 4,12 persen. Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
112	BP Batam	1.376.406.900	1.349.159.900
-	SKK Migas	51.206.341.855	49.154.908.940
Total		**52.582.748.755**	**50.504.068.840**

Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo Awal	**50.504.068.840**
Penambahan:	**2.188.585.815**
Saldo Awal	687.296.518
Pembelian	66.963.361
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Perolehan Lainnya	1.308.833.036
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Koreksi Susulan	-
Reklasifikasi Masuk	125.492.900
Pengurangan	**(109.905.900)**
Reklasifikasi Keluar	(9.645.900)
Hibah Keluar	(100.260.000)
Saldo per 31 Desember 2025	**52.582.748.755**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	**(15.237.087.156)**
Nilai buku per 31 Desember 2025	**37.345.661.599**

D.2.1.3.6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.618.219.556,00 dan Rp8.954.062.424,00, mengalami peningkatan sebesar Rp664.157.132,00 atau 7,42 persen. KDP tersebut terdapat pada BP Batam. Mutasi KDP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo Awal	**8.954.062.424**
Penambahan:	**203.075.707.885**
Perolehan/Penambahan KDP	17.041.251.737
Pengembangan KDP	183.442.792.112
Koreksi Nilai KDP Bertambah	692.826.666
Perolehan Lainnya KDP	1.699.815.258
Reklasifikasi Dari Aset KDP Lainnya	199.022.112
Pengurangan	**(202.411.550.753)**
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(565.475.300)
Penghapusan/Penghentian KDP	(717.008.458)
Reklasifikasi dari aset KDP ke aset KDP lainnya	(298.888.035)
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	(200.830.178.960)
Saldo per 31 Desember 2025	**9.618.219.556**

D.2.1.3.7. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.203.185.210.040,00 dan Rp931.230.799.820,00 mengalami kenaikan sebesar Rp271.954.410.220,00 atau 29,20 persen. Akumulasi penyusutan terdiri dari:

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp358.213.772.053,00;
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.688.570.186,00;
3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp824.045.780.645,00; dan
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.237.087.156,00.

Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
112	BP Batam		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.213.358.114	15.549.852.111
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.688.570.186	3.878.344.566
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	824.035.321.820	684.965.876.905
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	41.171.798	39.305.131
-	Otoritas Jasa Keuangan		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.534.542.151	66.685.257.107
-	SKK Migas		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	238.456.548.784	139.153.117.660
	Akumulasi Penyusutan Jaringan	10.458.825	8.849.775
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	15.195.915.358	14.425.614.065
-	PPP BUN		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.009.323.004	6.524.582.500
Jumlah		**1.203.185.210.040**	**931.230.799.820**

D.2.1.4. PROPERTI INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset atau keduanya. Saldo Properti Investasi (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.069.011.385.705,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.757.504.933.043,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.688.493.547.338,00 atau 5,15 persen jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024.

Adapun perbandingan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	BA BUN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	**999.03**	**12.025.418.037.959**	**12.143.026.669.492**	**(117.608.631.533)**
	Properti Investasi	31.723.226.655.810	31.409.555.874.245	313.670.781.565
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(19.697.808.617.851)	(19.266.529.204.753)	(431.279.413.098)
2.	**999.99**	**19.043.593.347.746**	**20.614.478.263.551**	**(1.570.884.915.805)**
	Properti Investasi	57.594.931.966.817	57.861.451.775.441	(266.519.808.624)
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(38.551.338.619.071)	(37.246.973.511.890)	(1.304.365.107.181)
Jumlah		**31.069.011.385.705**	**32.757.504.933.043**	**(1.688.493.547.338)**

D.2.1.4.1. PROPERTI INVESTASI

D.2.1.4.1.1. PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.03

Posisi Properti Investasi dalam kelolaan LMAN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp31.723.226.655.810,00 dan Rp31.409.555.874.245,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp19.697.808.617.851,00 dan Rp19.266.529.204.753,00 sehingga nilai Properti Investasi bersih adalah sebesar Rp12.025.418.037.959,00 dan Rp12.143.026.669.492,00.

Rincian Properti Investasi per kelompok aset menurut penyerahkelolaan secara komparatif pada 31 Desember 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Tahun 2025			
Kelompok Aset Penyerahkelolaan	**Nilai Aset**	**Akumulasi Penyusutan**	**Nilai Bersih**
Properti Investasi eks BPPN	1.025.275.148.695	1.942.791.372	1.023.332.357.323
Properti Investasi eks PPA	672.975.816.528	71.142.415.845	601.833.400.683
Properti Investasi eks Pertamina	29.033.781.202.195	19.575.940.633.207	9.457.840.568.988
Properti Investasi eks HTBI	761.348.278.331	30.214.777.779	731.133.500.552
Properti Investasi Lainnya	225.797.376.061	18.496.967.473	207.300.408.588
Properti Investasi Eks BDL	4.048.834.000	71.032.175	3.977.801.825
Total Properti Investasi	**31.723.226.655.810**	**19.697.808.617.851**	**12.025.418.037.959**

(dalam rupiah)

Tahun 2024			
Kelompok Aset Penyerahkelolaan	**Nilai Aset**	**Akumulasi Penyusutan**	**Nilai Bersih**
Properti Investasi eks BPPN	964.787.053.773	1.003.505.753	963.783.548.020
Properti Investasi eks PPA	652.379.473.774	63.685.461.433	588.694.012.341
Properti Investasi eks Pertamina	28.821.040.315.002	19.164.621.538.252	9.656.418.776.750
Properti Investasi eks HTBI	754.881.078.467	25.766.813.591	729.114.264.876
Properti Investasi Lainnya	216.467.953.229	11.451.885.724	205.016.067.505
Total Properti Investasi	**31.409.555.874.245**	**19.266.529.204.753**	**12.143.026.669.492**

1. Properti Investasi eks BPPN

Posisi Properti Investasi eks BPPN pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.025.275.148.695,00 dengan akumulasi penyusutan Rp1.942.791.372,00. Nilai bersih dari Properti Investasi eks BPPN adalah sebesar Rp1.023.332.357.323,00. Penyajian pos Properti Investasi eks BPPN sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi.

Rincian Properti Investasi eks BPPN per klasifikasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	Posisi 1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2025
Tanah	947.076.596.518	48.204.454.000	-	995.281.050.518
Gedung dan Bangunan	16.872.849.247	12.337.538.348	-	29.210.387.595
Properti Investasi dalam Pengerjaan	837.608.008	-	53.897.426	783.710.582
Total Properti Investasi	**964.787.053.773**	**60.541.992.348**	**53.897.426**	**1.025.275.148.695**

Mutasi Properti Investasi eks BPPN pada tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	KDP
Posisi 1-Jan-2025	947.076.596.518	16.872.849.247	-	837.608.008
Perubahan Tambah:				
(+) Penyerahkelolaan	27.978.294.000	-	-	-
(+) Penilaian Wajar	16.662.691.000	742.077.000	-	-
(+) Kapitalisasi CAPEX	-	5.258.144.263	-	-
(+) Kapitalisasi KDP menjadi aset		369.896.085		(53.897.426)
(+) Reklas AL ke PI	3.563.469.000	653.193.000	-	-
(+) Penetapan Aset Kelolaan	-	5.476.694.000	-	-
Perubahan Kurang:				
(-) Penghapusan	-	(162.466.000)	-	-

Keterangan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	KDP
Posisi 31-Des-2025	995.281.050.518	29.210.387.595	-	783.710.582
Posisi 31-Des-2025				**1.025.275.148.695**

2. Properti Investasi eks PPA

Posisi Properti Investasi eks PPA pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp672.975.816.528,00 dengan total akumulasi penyusutan Rp71.142.415.845,00. Nilai bersih Properti Investasi eks PPA adalah sebesar Rp601.833.400.683,00. Penyajian pos Properti Investasi eks PPA sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi.

Rincian Properti Investasi eks PPA per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	Posisi 1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2025
Tanah	413.869.532.000	10.524.241.000	-	424.393.773.000
Gedung dan Bangunan	213.550.313.457	16.006.775.051	385.063.000	229.172.025.508
Peralatan dan Mesin	16.852.758.549	82.928.100	-	16.935.686.649
Properti Investasi dalam Pengerjaan	8.106.869.768	-	5.632.538.397	2.474.331.371
Total Properti Investasi	**652.379.473.774**	**26.613.944.151**	**6.017.601.397**	**672.975.816.528**

Mutasi Properti Investasi eks PPA pada tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	KDP
Posisi 1-Jan-2025	413.869.532.000	213.550.313.457	16.852.758.549	8.106.869.768
Perubahan Tambah:				
(+) Kapitalisasi CAPEX	-	15.978.453.051	82.928.100	-
(+) Penilaian Wajar	-	28.322.000	-	-
(+) Aset Kelolaan	10.524.241.000	-	-	-
Perubahan Pengurang:				
(-) Penyelesaian PIDP	-	(385.063.000)	-	-
(-) Penyelesaian PIDP	-	-	-	(5.632.538.397)
Posisi 31-Des-2025	424.393.773.000	229.172.025.508	16.935.686.649	2.474.331.371
Posisi 31-Des-2025				**672.975.816.528**

3. Properti Investasi eks Pertamina

Penyajian pos Properti Investasi eks Pertamina sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi. Posisi Properti Investasi eks Pertamina pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp29.033.781.202.195,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp19.575.940.633.207,00 sehingga nilai bersih setelah penyusutan adalah sebesar Rp9.457.840.568.988,00.

Rincian Properti Investasi eks Pertamina per kelompok adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kelompok	Posisi 1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2025
Kawasan	27.566.225.571.739	227.113.435.455	15.479.177.748	27.777.859.829.446
Non-Kawasan	1.254.369.755.363	1.040.079.806	-	1.255.409.835.169
KDP	444.987.900	66.549.680	-	511.537.580
Total Properti Investasi	**28.821.040.315.002**	**228.220.064.941**	**15.479.177.748**	**29.033.781.202.195**

Mutasi kurang bersih Properti Investasi eks Pertamina pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2025 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	Kawasan	Non-Kawasan	KDP	Total
Posisi 1-Jan-2025	27.566.225.571.739	1.254.369.755.363	444.987.900	28.821.040.315.002
Perubahan:				
142 (-) Kilang LNG Arun	(14.142.870.633)			(14.142.870.633)
(+) Kilang LNG Badak	225.777.128.340			225.777.128.340
(+) Non Kawasan		1.040.079.806		1.040.079.806
(+) KDP			66.549.680	66.549.680
Posisi 31-Des-2025	**27.777.859.829.446**	**1.255.409.835.169**	**511.537.580**	**29.033.781.202.195**

4. Properti Investasi eks HTBI

Penyajian pos Properti Investasi eks HTBI sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi. Posisi Properti Investasi eks HTBI pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp761.348.278.331,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp30.214.777.779,00 sehingga nilai bersih setelah penyusutan adalah sebesar Rp731.133.500.552,00.

Rincian Properti Investasi eks HTBI per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	Posisi 1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2025
Tanah	617.553.811.140	-	-	617.553.811.140
Gedung dan Bangunan	130.597.806.311	6.440.728.722	-	137.038.535.033
Peralatan dan Mesin	2.744.216.167	1.665.000	-	2.745.881.167
Properti Investasi dalam Pengerjaan	3.985.244.849	24.806.142	-	4.010.050.991
Total Properti Investasi	**754.881.078.467**	**6.467.199.864**	**-**	**761.348.278.331**

Mutasi Properti Investasi eks HTBI pada tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	KDP
Posisi 1-Jan-2025	617.553.811.140	130.597.806.311	2.744.216.167	3.985.244.849
Perubahan Tambah:				
(+) CAPEX	-	-	1.665.000	24.806.142
(+) Pengakuan PIDP	-	6.440.728.722	-	-
Posisi 31-Des-2025	617.553.811.140	137.038.535.033	2.745.881.167	4.010.050.991
Posisi 31-Des-2025				**761.348.278.331**

5. Properti Investasi Lainnya

Posisi Properti Investasi Lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp225.797.376.061,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp18.496.967.473,00 sehingga nilai bersih setelah penyusutan adalah sebesar Rp207.300.408.588,00.

Rincian Properti Investasi Lainnya per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	Posisi 1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2025
Gedung dan Bangunan	198.938.852.000	98.001.900	-	199.036.853.900
Peralatan dan Mesin	17.375.481.670	8.795.029.471	-	26.170.511.141
Aset Tetap Lainnya	-	436.391.460	-	436.391.460
PI dalam Pengerjaan	153.619.560	-	-	153.619.560
Total	**216.467.953.230***	**9.329.422.831**	**-**	**225.797.376.061**

*selisih Rp1 karena pembulatan

Penambahan Properti Investasi Lainnya pada periode ini berasal dari pengakuan aset kelolaan berdasarkan Keputusan Direktur Utaman LMAN Nomor KEP-28/LMAN/2025, pengadaan barang pendukung berupa peralatan dan mesin, serta adanya koreksi nilai berdasarkan Berita Acara Pemutakhiran Data Aset Gedung AA Maramis Nomor BA-02/LMAN.1/2025 tanggal 19 Maret 2025.

6. Properti Investasi Eks BDL

Posisi Properti Investasi Lainnya pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.048.834.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp71.032.175,00 sehingga nilai bersih setelah penyusutan adalah sebesar Rp3.977.801.825,00.

Rincian Properti Investasi Eks BDL per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	Posisi 1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2025
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	-	4.048.834.000	-	4.048.834.000
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
PI dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Total	**-**	**4.048.834.000**	**-**	**4.048.834.000**

Mutasi Properti Investasi eks HTBI pada tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	KDP
Posisi 1-Jan-2025	-	-	-	-
Perubahan Tambah:				
(+) Penyerahkelolaan	-	4.048.834.000	-	-
Posisi 31-Des-2025	-	4.048.834.000	-	-
Posisi 31-Des-2025				**4.048.834.000**

D.2.1.4.1.2. PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.99

Saldo Properti Investasi tahun 2025 sebesar Rp57.594.931.966.817,00, sedangkan per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp57.861.451.775.441,00, mengalami penurunan sebesar Rp266.519.808.624,00.

Rincian Properti Investasi dari per 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Satker	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
1	UAKPA BMN Eks BMN Idle	71.953.630.941	141.465.968	71.812.164.973
2	UAKPA Aset Eks Pertamina	18.752.405.159.625	7.763.432.451.300	10.988.972.708.325
3	UAKPA Aset PKP2B	38.747.821.392.853	30.787.764.701.803	7.960.056.691.050
4	UAKPA BMN Hulu Migas pada DJKN	22.751.783.398	-	22.751.783.398
Jumlah		**57.594.931.966.817**	**38.551.338.619.071**	**19.043.593.347.746**

D.2.1.4.1.2.1. Properti Investasi pada UAKPA BMN Eks BMN *Idle*

Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp71.953.630.941,00 dan Rp88.809.950.101,00. Rincian Properti Investasi UAKPA BMN Eks BMN *Idle* adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
Tanah	88.637.514.626	218.943.000	17.075.262.160	71.781.195.466
Bangunan	172.435.475	-	-	172.435.475
Total Properti Investasi	**88.809.950.101**	**218.943.000**	**17.075.262.160**	**71.953.630.941**

Rincian Mutasi Properti Investasi BMN Eks BMN *Idle* Tahun 2025 sebagai berikut:

Mutasi tambah Properti Inventasi

(dalam rupiah)

Kode BMN Idle	Uraian Barang	Jumlah BMN	Nilai Perolehan
2010199999	Tanah Persil Lainnya	2	218.943.000
Total		**2**	**218.943.000**

Mutasi tambah dimaksud terjadi karena:

1. Berdasarkan KMK 106/MK/KNL.0401/2025 tanggal 03 September 2025 dan BAST Nomor BA-16/SJ.7/2025 tanggal 18 September 2025, BMN *Idle* pada Kementerian Keuangan telah diserahkan kepada KPKNL Jambi berupa tanah bangunan rumah negara golongan II seluas 233 m² yang berlokasi di Jalan Untung Suropati, Muara Sabak Ilir, Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan nilai perolehan Rp18.943.000,00;
2. Berdasarkan KMK Nomor 9/KM.6/KNL.1501/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan BAST Nomor BAST-0281/87.31/KU.01.02/2024 tanggal 7 Maret 2024, BMN Idle pada Kemendiksaintek telah diserahkan kepada KPKNL Mamuju berupa 1 (satu) bidang tanah/bangunan kantor pemerintah seluas 9.022 m² yang berlokasi di Jalan Tahaya-haya, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan nilai perolehan Rp200.000.000,00. Aset tersebut dicatat sebagai saldo awal per 31 Desember 2025.

Mutasi kurang Properti Inventasi

(dalam rupiah)

Kode BMN *Idle*	Uraian Barang	Jumlah BMN	Nilai Perolehan
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	556.950.000
2010199999	Tanah Persil Lainnya	8	16.518.312.160
Jumlah		**9**	**17.075.262.160**

Mutasi kurang dimaksud terjadi karena:

1. Hibah 1 (satu) bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang disajikan sebagai Properti Investasi dengan nilai perolehan Rp556.950.000,00 pada KPKNL Jambi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Balai Barat, sesuai dengan KMK-13/KM.6/KN.4/2025 tanggal 25 Maret 2025 dan BAST Hibah Nomor BAST-01/KNL.0401/2025 tanggal 09 April 2025;
2. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) bidang Tanah Persil Lainnya yang disajikan sebagai Properti Investasi dengan nilai perolehan Rp1.702.875.000,00 pada KPKNL Batam kepada KemenATR/BPN, sesuai dengan KMK 22/MK/KN.4/2025 tanggal 06 Juni 2025 dan BAST Nomor BAST-01/KNL.0304/2025 tanggal 25 Agustus 2025;
3. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) bidang Tanah Persil Lainnya yang disajikan sebagai Properti Investasi dengan nilai perolehan Rp1.840.735.160,00 pada KPKNL Palembang kepada Kementerian Kesehatan, sesuai dengan KMK 33/MK/KN.4/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan BAST Nomor BAST-01/KNL.0402/2025 tanggal 18 September 2025;
4. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) bidang Tanah Persil Lainnya

yang disajikan sebagai Properti Investasi dengan nilai perolehan Rp58.500.000,00 pada KPKNL Banjarmasin kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, sesuai dengan KMK 37/MK/KN.4/2025 tanggal 30 September 2025 dan BAST Nomor BA-23/KNL.1203/2025 tanggal 24 November 2025;

5. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) bidang Tanah Persil Lainnya yang disajikan sebagai Properti Investasi dengan nilai perolehan Rp1.000.000.000,00 pada KPKNL Surabaya kepada Ombudsman RI, sesuai dengan KMK 34/MK/KN.4/2025 tanggal 10 September 2025 dan BAST Nomor BA-29/KNL.1001/2025 tanggal 03 Oktober 2025;
6. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) bidang Tanah Persil Lainnya yang disajikan sebagai Properti Investasi dengan nilai perolehan Rp1.293.000.000,00 pada KPKNL Bima kepada Bawaslu RI, sesuai dengan KMK 20/MK/KN.4/2025 tanggal 27 Mei 2025 dan BAST Nomor BA-15/KNL.1404/2025 tanggal 07 Agustus 2025;
7. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) bidang Tanah Persil Lainnya yang disajikan sebagai Properti Investasi dengan nilai perolehan Rp8.664.912.000,00 pada KPKNL Lhokseumawe kepada Kemendiksaintek RI, sesuai dengan KMK 237/MK/KN.4/2025 tanggal 09 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-51/KNL.0102/2025 tanggal 28 Oktober 2025;
8. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) bidang Tanah Persil Lainnya yang disajikan sebagai Properti Investasi dengan nilai perolehan Rp1.111.399.000,00 pada KPKNL Lahat kepada Bawaslu RI, sesuai dengan KMK 28/MK/KN.4/2025 tanggal 14 Juli 2025 dan BAST Nomor BAST-001/IDLE/KNL.0403/2025 tanggal 14 Agustus 2025;
9. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) bidang Tanah Persil Lainnya yang disajikan sebagai Properti Investasi dengan nilai perolehan Rp846.891.000,00 pada KPKNL Jember kepada Kementerian Agama RI, sesuai dengan KMK 32/MK/KN.4/2025 tanggal 25 Agustus 2025 dan BAST Nomor BAST-13/KNL.1004/2025 tanggal 21 November 2025.

D.2.1.4.1.2.2. Properti Investasi pada UAKPA Eks Pertamina

Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp18.752.405.159.625,00 dan Rp18.644.290.105.918,00.

Rincian Properti Investasi UAKPA Eks Pertamina adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
Tanah & Bangunan	47.580.000.000	-	-	47.580.000.000
Aset Eks Kontrak Kerjasama	18.712.200.038.841	67.848.825.000	(75.223.704.216)	18.704.825.159.625
Total Properti Investasi	**18.759.780.038.841**	**67.848.825.000**	**(75.223.704.216)**	**18.752.405.159.625**

D.2.1.4.1.2.2.1. Aset Berupa Tanah dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Lokasi Aset	Tanah (m^2)	Bangunan (m^2)	Nilai (Rp)
1	Sawangan, Depok	8.345	-	-
2	Jl. Abdul Muis 68, Jakarta	4.000	-	47.580.000.000
	Jumlah			**47.580.000.000**

Aset tanah di Jl. Abdul Muis Jakarta dan Sawangan Depok, Direktorat PKN telah mengirimkan surat kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero) Nomor S-369/KN.4/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Penyelesaian Tindak Lanjut Pengelolaan atas Aset Eks Pertamina di Jalan Abdul Muis dan Sawangan, Depok. Selain itu Tanah di Sawangan Depok masih dalam proses identifikasi lahan oleh PT

Pertamina (Persero).

Terhadap Aset eks Pertamina di Jalan Abdul Muis, terdapat surat usulan sewa dari Commercial & Operation Director Pertamina Retail. Selanjutnya atas usulan tersebut Dit PKN telah mengirimkan surat Nomor S-1553/KN.4/2023 tanggal 29 September 2023 yang intinya memintakan kelengkapan dokumen atas usulan pemanfaatan yang diusulkan. Sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dari PT Pertamina.

D.2.1.4.1.2.2.2. Aset Eks Kontrak Kerjasama Pertamina

Properti Investasi Aset Eks Kontrak Kerjasama per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp18.704.825.159.625,00 dan Rp18.712.200.038.841,00, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Tanah	10.298.496.215.849	10.367.794.016.064
2	Bangunan	1.256.873.962.797	1.254.097.259.798
3	*Equipment*	3.902.924.187.672	3.864.236.562.672
4	Sumur	3.110.668.230.153	3.090.209.637.153
5	Lain-lain	135.862.563.154	135.862.563.154
	Jumlah	**18.704.825.159.625**	**18.712.200.038.841**

Aset eks Kontrak Kerjasama berada pada wilayah kerja di 12 Kanwil DJKN, rincian Properti Investasi Aset Eks Kontrak Kerjasama sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kanwil DJKN	31 Des 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Des 2025
1	Aceh	485.510.795.000	-	-	485.510.795.000
2	Sumatera Utara	466.628.624.040	-	-	466.628.624.040
3	Riau, Kepri dan Sumbar	1.213.380.999.499	-	-	1.213.380.999.499
4	Sumatera Selatan dan Babel	7.548.811.495.988	20.458.593.000	-	7.569.270.088.988
5	Serang	16.903.044.000	-	-	16.903.044.000
6	Jakarta	2.369.256.486	-	-	2.369.256.486
7	Jawa Barat	5.521.668.113.245	14.952.633.000	-	5.536.620.746.245
8	Jawa Tengah dan DIY	396.640.557.166	-	-	396.640.557.166
9	Jawa Timur	45.090.263.409	-	-	45.090.263.409
10	Kalimantan Selatan dan Tengah	876.316.852.300	14.357.645.000	-	890.674.497.300
11	Kaltimtara	1.546.738.020.330	18.079.954.000	29.222.538.000	1.535.595.436.330
12	Papua, Papua Barat, Maluku	592.142.017.378	-	46.001.166.216	546.140.851.162
Jumlah		**18.712.200.038.841**	**67.848.825.000**	**75.223.704.216**	**18.704.825.159.625**

Adapun transaksi yang mempengaruhi aset eks kontrak kerjasama sampai dengan akhir tahun 2025 sebagai berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp67.848.825.000,00 terdiri dari:

- Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada *Field* Prabumulih sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor BA-01/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01 sebesar Rp15.788.168.000,00;
- Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada *Field* Jatibarang sesuai 02/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01 sebesar Rp9.016.560.000,00;
- Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada *Field* Tanjung sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor BA-03/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01 sebesar Rp14.357.645.000,00;
- Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada *Field* Prabumulih sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor BA-04/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01 sebesar Rp821.752.000,00;

- Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada *Field* Prabumulih sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor BA-05/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01 sebesar Rp3.848.673.000,00;
- Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada *Field* Subang sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor BA-06/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01 sebesar Rp5.936.073.000,00;
- Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada *Field* Tarakan-Bunyu sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor BA-07/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01 sebesar Rp18.079.954.000,00.

b. Mutasi kurang sebesar Rp75.223.704.216,00 terdiri dari:

- Pelepasan aset berlokasi di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan mekanisme penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 31/KM.6/KN.4/2024 tanggal 23 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-3/KN/2025 tanggal 12 Maret 2025 serta Keputusan Penghapusan Nomor KMK 157/MK/KN/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp29.222.538.000,00;
- Pelepasan aset berlokasi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dengan mekanisme penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/KM.6/KN.4/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan BAST Nomor BA-5/KN/2025 tanggal 12 Maret 2025 serta Keputusan Penghapusan Nomor 16/MK/KN.4/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp615.112.428,00;
- Pelepasan aset berlokasi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dengan mekanisme penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor KEP-1/MK.6/2024 tanggal 19 November 2024 dan BAST Nomor BA-4/KN/2025 tanggal 12 Maret 2025 serta Keputusan Penghapusan Nomor 158/MK/KN/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp45.386.053.788,00.

D.2.1.4.1.2.3. Properti Investasi pada UAKPA PKP2B

Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp38.747.821.392.853,00 dan Rp38.990.110.003.101,00. Rincian Properti Investasi UAKPA PKP2B adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	Saldo 31 Des 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2025
Tanah	3.366.246.509.533	-	-	3.366.246.509.533
Non Tanah	35.623.863.493.568	15.230.250.000	257.518.860.248	35.381.574.883.320
Total Properti Investasi	**38.990.110.003.101**	**15.230.250.000**	**257.518.860.248**	**38.747.821.392.853**

Mutasi Properti Investasi BMN BMN PKP2B Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah Properti Investasi Non Tanah yaitu sebesar Rp15.230.250.000,00 atas hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN PT Kaltim Prima Coal sesuai Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara nomor S-186/KN.2/2025 tanggal 22 Juli 2025.
2. Mutasi kurang Properti Investasi Non Tanah yaitu sebesar Rp257.518.860.248,00 karena:
   a. Penghapusan sebesar Rp39.250.735.716,00 dengan rincian:
      - SK Menteri ESDM Nomor 242.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang

Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Kaltim Prima Coal di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp10.593.079.123,00;

- SK Menteri ESDM Nomor 647.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 4 Juni 2025 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Bangunan di Senakin, Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp15.568.277.528,00;
- SK Menteri ESDM Nomor 588.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 21 Mei 2025 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama berupa Civil Work LKCT di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebesar Rp829.357.555,00;
- SK Menteri ESDM Nomor 178.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 13 Februari 2025 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung berupa Bangunan Apartemen dan Kelengkapannya (Furniture) di Jakarta sebesar Rp8.291.089.000,00;
- SK Menteri ESDM Nomor 718.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 13 Februari 2025 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung berupa Non Tanah di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp149.678.000,00;
- SK Menteri ESDM Nomor 980.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Non Tanah sebesar Rp3.819.254.510,00.

b. Koreksi kurang nilai wajar rupiah BMN pada PT Kaltim Prima Coal dikarenakan penilaian ulang atas 31 (tiga puluh satu) unit BMN sesuai LHIP nomor S-186/KN.2/2025 tanggal 22 Juli 2025 sebesar Rp450.222,00;

c. Koreksi kurang ke CALK sebesar Rp218.267.674.310,00 dengan rincian:

- Koreksi kurang BMN PT Adaro Indonesia dari Neraca ke CALK karena telah terbit NTPN 17ED86U8F7IE3JRQ dan Risalah Lelang nomor RL 41/12.03/2025-01 tanggal 26 Februari 2025 sebesar Rp217.155.562.532,00;
- Koreksi kurang BMN PT Multi Harapan Utama dari Neraca ke CALK karena telah terbit NTPN D2A0548WOCOBQTR dan Risalah Lelang nomor RL 127/13.02/2025-01 tanggal 14 Agustus 2025 sebesar Rp1.111.986.778,00;
- Koreksi kurang BMN Arutmin dari Neraca ke CALK karena aset tersebut merupakan aset ekstrakomptabel sebesar Rp125.000,00.

3. Saldo akhir 31 Desember 2025 Properti Investasi pada PKP2B yaitu sebesar Rp38.747.821.392.853,00.

D.2.1.4.1.2.4. Properti Investasi pada UAKPA BMN Hulu Migas pada DJKN

Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.751.783.398,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp22.751.783.398,00. Seluruh Properti Investasi UAKPA PL BMN Hulu Migas pada DJKN adalah berupa tanah sebagaimana tabel berikut berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	31 Des 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Des 2025
Tanah	22.751.783.398	-	-	22.751.783.398
Total Properti Investasi	**22.751.783.398**	**-**	**-**	**22.751.783.398**

Saldo tanah tersebut terdiri atas:

(dalam rupiah)

No.	KKKS Asal	Nilai
1	Star Energy (Sekayu) Ltd.	479.504.520
2	Orchard Energy (West Belida Limited)	77.760.000
3	Aset eks Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd.	4.510.237.878
4	Aset eks Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd	417.099.000
5	Aset eks SPE Petroleum Ltd	17.267.182.000
Total		**22.751.783.398**

Secara rinci aset properti investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset eks Star Energy Sekayu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Sekayu (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 0023.BA/92/SJA.4/2019 dan Nomor BA-4/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019.

(dalam rupiah)

No.	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Danau Cala, Lais, Musi Banyuasin, Sumsel	07 September 2013	-	25.643	479.504.520	-

2. Aset eks Orchard Energy (West Belida Limited) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja West Belida (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 0024.BA/92/SJA.4/2019 dan Nomor BA-5/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019.

(dalam rupiah)

No.	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Sungai Merah, Pelawan, Sarolangun, Jambi	7 Agustus 2012	12 November 2021	8.099,78	809.978.000	26.497.000
2	Pelawan Jaya, Pelawan, Sarolangun, Jambi	7 Agustus 2012	12 November 2021	12.888,29	1.501.329.000	51.263.000

3. Aset eks Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Citarum (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 16.BA/92/SJA.4/2020 dan Nomor BA-1/KN.4/2020 tanggal 29 Juli 2020 untuk aset di lokasi Kabupaten Karawang.

(dalam rupiah)

No.	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Kec. Pangkalan, Kab. Kawarang, Jawa Barat	2011	-	54.196	4.510.237.878	-

4. Aset eks Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd. yang dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd. pada Wilayah Kerja Sebatik dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan Nomor 417.BA/BN.05/SJA.4/2023 dan Nomor BA-8/KN.4/2023 tanggal 8 Desember 2023. Aset tersebut pada lokasi Desa Binusan menggunakan nilai wajar dan Jalan Sinualing menggunakan harga perolehan.

(dalam rupiah)

No.	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan	Nilai Wajar
1	Desa Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara	2009		52.503,00	715.400.205	210.012.000
2	Jl. Sinualing RT. 07, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan	2016	-	10.000,00	207.087.000	-

5. Aset eks SPE Petroleum Ltd yang dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja SPE Petroleum Ltd pada Wilayah Kerja Madura dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan Nomor 416.BA/BN.05/SJA.4/2023 dan Nomor BA-9/KN.4/2023 tanggal 8 Desember 2023.

(dalam rupiah)

No.	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Dungok #1 Desa Gunung Eleh, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur	13 Agustus 2009	30 Agustus 2024	53.526,00	4.469.421.000	2.203.381.000
2	Dungok #2 Desa Gunung Eleh & Desa Batuporo Timur, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur	15 Juli 2010	5 September 2024	15.954,00	1.332.159.000	652.006.000
3	Dolang #1 Desa Genteng, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur	9 Juli 2009	30 Agustus 2024	44.998,00	-	3.070.298.000
4	Dolang #2 Desa Batokaban, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur	10 April 2010	5 September 2024	30.676,00	-	2.145.518.000
5	Dolang #3 Desa Genteng, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur	7 Agustus 2009	30 Agustus 2024	36.312,00	-	2.469.275.000
6	Madederop #1 Desa Banyoneng Dajah, Kec. Gege, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur	15 September 2009	30 Agustus 2024	30.296,00	-	6.726.704.000

D.2.1.4.2. AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp58.249.147.236.922,00 dan Rp56.513.502.716.643,00, terdapat peningkatan sebesar Rp1.735.644.520.279,00 dari saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi adalah sebagai berikut:

D.2.1.4.2.1. AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.03

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp19.697.808.617.851,00 dan Rp19.266.529.204.753,00, terdapat peningkatan sebesar Rp431.279.413.098,00 atau 2,24 persen dari saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024.

(dalam rupiah)

Kelompok Aset Penyerahkelolaan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Properti Investasi eks BPPN	1.942.791.372	1.003.505.753	939.285.619
Properti Investasi eks PPA	71.142.415.845	63.685.461.433	7.456.954.412
Properti Investasi eks Pertamina	19.575.940.633.207	19.164.621.538.252	411.319.094.955
Properti Investasi eks HTBI	30.214.777.779	25.766.813.591	4.447.964.188
Properti Investasi Lainnya	18.496.967.473	11.451.885.724	7.045.081.749
Properti Investasi Eks BDL	71.032.175	-	71.032.175
Total Properti Investasi	**19.697.808.617.851**	**19.266.529.204.753**	**431.279.413.098**

1. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks BPPN

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks BPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.942.791.372,00 dan Rp1.003.505.753,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan	Posisi 1-Jan-2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2025
Gedung dan Bangunan	1.003.505.753	939.285.619	-	1.942.791.372
	1.003.505.753	**939.285.619**	**-**	**1.942.791.372**

Perubahan Penambahan penyusutan pada periode ini merupakan pembebanan penyusutan.

2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks PPA

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks PPA per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp71.142.415.845,00 dan Rp63.685.461.433,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Penyusutan	1-Jan-2025	Tambah	Kurang	31-Des-2025
Gedung dan Bangunan	51.179.270.365	6.499.253.458	-	57.678.523.823
Peralatan dan Mesin	12.506.191.068	957.700.954	-	13.463.892.022
	63.685.461.433	**7.456.954.412**	**-**	**71.142.415.845**

Penambahan penyusutan pada periode ini merupakan pembebanan penyusutan.

3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks Pertamina

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks Pertamina per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp19.575.940.633.207,00 dan Rp19.164.621.538.252,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan	Posisi 1-Jan-2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2025
Kawasan	19.162.684.995.100	411.042.337.107	-	19.573.727.332.207
Non-Kawasan	1.936.543.152	276.757.848	-	2.213.301.000
	19.164.621.538.252	**411.319.094.955**	**-**	**19.575.940.633.207**

4. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks HTBI

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks HTBI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.214.777.779,00 dan Rp25.766.813.591,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan	Posisi 1-Jan-2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2025
Gedung dan Bangunan	24.501.676.995	4.230.032.964	-	28.731.709.959
Peralatan dan Mesin	1.265.136.596	217.931.224	-	1.483.067.820
	25.766.813.591	**4.447.964.188**	**-**	**30.214.777.779**

5. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Lainnya

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.496.967.473,00 dan Rp11.451.885.724,00.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan	Posisi 1-Jan-2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2025
Gedung dan Bangunan	5.968.165.560	3.980.737.078	-	9.948.902.638
Peralatan dan Mesin	5.483.720.164	3.064.344.671	-	8.548.064.835
	11.451.885.724	**7.045.081.749**	**-**	**18.496.967.473**

6. Akumulasi Penyusutan Properti Eks BDL

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi Eks BDL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp71.032.175,00 dan Rp0,00.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan	Posisi 1-Jan-2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2025
Gedung dan Bangunan	-	71.032.175	-	71.032.175
Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	-	**71.032.175**	**-**	**71.032.175**

D.2.1.4.2.2. AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI PADA BA 99.999

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.551.338.619.071,00 dan Rp37.246.973.511.890,00, terdapat peningkatan sebesar Rp1.304.365.107.181,00 atau 3,50 persen dari saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024.

(dalam rupiah)

Kelompok Properti Investasi	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
UAKPA BMN Eks BMN *Idle*	141.465.968	140.554.714	911.254
UAKPA BMN Eks Pertamina	7.763.432.451.300	7.685.669.636.181	77.762.815.119
UAKPA PKP2B	30.787.764.701.803	29.561.163.320.995	1.226.601.380.808
Total Properti Investasi	**38.551.338.619.071**	**37.246.973.511.890**	**1.304.365.107.181**

D.2.1.4.2.2.1. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA BMN Eks BMN *Idle*

(dalam rupiah)

No.	Akun Neraca	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	71.781.195.466	-	71.781.195.466
2	Gedung dan Bangunan	172.435.475	141.465.968	30.969.507
Jumlah		**71.953.630.941**	**141.465.968**	**71.812.164.973**

D.2.1.4.2.2.2. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA Eks Pertamina

Saldo akumulasi properti investasi pada UAKPA Eks Pertamina pada tahun 2025 sebesar Rp7.763.432.451.300,00 yang berasal dari penyusutan Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Akumulasi penyusutan 2024 di Neraca	**7.685.669.636.181**
Mengakui penyusutan selama tahun 2025	77.762.815.119
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 di Neraca	**7.763.432.451.300**

D.2.1.4.2.2.3. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA PKP2B

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.787.764.701.803,00 dan Rp29.561.163.320.995,00. Rincian Akumulasi

Penyusutan Properti Investasi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**29.561.163.320.995**
Mutasi Tambah:	**1.483.551.637.714**
Penyusutan Periode Berjalan	614.467.256.492
Koreksi Penyusutan	869.084.381.222
Mutasi Kurang:	**(256.950.256.906)**
Penghapusan	(38.682.196.553)
Koreksi Penyusutan	(218.268.060.353)
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**30.787.764.701.803**

Penjelasan atas nilai akumulasi penyusutan properti investasi yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada 31 Desember 2024 sebesar Rp29.561.163.320.995,00.
2. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp1.483.551.637.714,00 merupakan penyusutan Properti Investasi rincian sebagai berikut.
   a. Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp614.467.256.492,00;
   b. Koreksi tambah atas Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp869.084.381.222,00 dengan rincian sebagai berikut:
      - Koreksi sebesar Rp418.554.000,00 pada PT Kaltim Prima Coal atas BMN yang dilakukan penilaian ulang sesuai Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara nomor S-186/KN.2/2025 tanggal 22 Juli 2025 dan telah habis masa manfaatnya;
      - Penyesuaian atas BMN yang seharusnya sudah habis masa manfaat sesuai PMK 29/PMK.06/2010 dan KMK 295/KM.6/2019 pada PT Arutmin Indonesia sebesar Rp10.071.611.000,00;
      - Penyesuaian atas BMN yang seharusnya sudah habis masa manfaat sesuai PMK 29/PMK.06/2010 dan KMK 295/KM.6/2019 pada PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp858.594.216.222,00.
3. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp256.950.256.906,00 dengan rincian sebagai berikut.
   a. Mutasi kurang akibat penghapusan sebesar Rp38.682.196.553,00 dengan rincian sebagai berikut:
      - SK Menteri ESDM Nomor 242.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Kaltim Prima Coal di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp10.593.079.123,00;
      - SK Menteri ESDM Nomor 647.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 4 Juni 2025 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Bangunan di Senakin, Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp15.568.277.528,00;
      - SK Menteri ESDM Nomor 588.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 21 Mei 2025 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama berupa Civil Work LKCT di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebesar Rp262.629.892,00;
      - SK Menteri ESDM Nomor 178.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 13 Februari 2025 Tentang

Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung berupa Bangunan Apartemen dan Kelengkapannya (Furniture) di Jakarta sebesar Rp8.291.089.000,00;

- SK Menteri ESDM Nomor 718.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 13 Februari 2025 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung berupa Non Tanah di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp149.678.000,00;
- SK Menteri ESDM Nomor 980.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Non Tanah sebesar Rp3.817.443.010,00.

b. Koreksi kurang yaitu sebesar Rp218.268.060.353,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi kurang BMN PT Adaro Indonesia dari Neraca ke CALK karena telah terbit NTPN 17ED86U8F7IE3JRQ dan Risalah Lelang nomor RL 41/12.03/2025-01 tanggal 26 Februari 2025 sebesar Rp217.155.562.532,00;
- Koreksi kurang BMN PT Multi Harapan Utama dari Neraca ke CALK karena telah terbit NTPN D2A0548WOCOBQTR dan Risalah Lelang nomor RL 127/13.02/2025-01 tanggal 14 Agustus 2025 sebesar Rp1.111.986.778,00;
- Koreksi kurang nilai wajar rupiah BMN pada PT Kaltim Prima Coal dikarenakan penilaian ulang atas 31 (tiga puluh satu) unit BMN sesuai LHIP nomor S-186/KN.2/2025 tanggal 22 Juli 2025 sebesar Rp386.043,00;
- Koreksi kurang BMN Arutmin dari Neraca ke CALK karena aset tersebut merupakan aset ekstrakomptabel sebesar Rp125.000,00.

4. Saldo akhir 31 Desember 2025 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada PKP2B yaitu sebesar Rp30.787.764.701.803,00.

D.2.1.5. PIUTANG JANGKA PANJANG

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp49.110.799.321.464,00 dan Rp47.391.304.707.155,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.719.494.614.309,00 atau 3,63 persen.

Rincian Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	15.020.833
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	49.890.231.097.926	48.201.737.216.319
Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.411.302.362.240	2.301.698.582.578
(Peny.Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang)	(3.190.734.138.702)	(3.112.146.112.575)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	**49.110.799.321.464**	**47.391.304.707.155**

D.2.1.5.1. TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Jumlah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp15.020.833,00. Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Piutang Tagihan TP/TGR yaitu pada satker OJK yaitu Tuntutan Ganti Rugi BMN Hilang. Atas piutang tersebut telah dilakukan pelunasan dan dilakukan penyetoran ke kas negara pada tahun 2025.

D.2.1.5.2. PIUTANG JANGKA PANJANG PEMBERIAN PINJAMAN

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp49.890.231.097.926,00 dan Rp48.201.737.216.319,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.688.493.881.607,00 atau 3,50 persen.

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman pada BA 999.04 per 31 Desember 2025 sebesar Rp49.890.231.097.926,00, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (153111)	49.310.361.620.104	47.613.855.967.381
Aset Lainnya Kredit Program (153117)	579.869.477.822	587.881.248.938
Jumlah	**49.890.231.097.926**	**48.201.737.216.319**

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (153111) sebesar Rp49.310.361.620.104,00 merupakan pokok Piutang Pemberian Pinjaman yang jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah periode Laporan Keuangan TA 2025 (jatuh tempo setelah 31 Desember 2026).

Aset Lainnya Kredit Program (153117) sebesar Rp579.869.477.822,00 merupakan saldo piutang pokok atas pemberian pinjaman dengan skema kredit program.

Nilai piutang di neraca harus dijaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau tingkat kolektabilitasnya. Dalam menetapkan kebijakan penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan menurut jenis/karakteristik piutang. Untuk jenis/ karakteristik piutang pada bagian anggaran pengelolaan pemberian pinjaman dapat dibedakan menjadi pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda/BUMD/ badan hukum lainnya, sedangkan untuk kualitas piutangnya dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut adalah rincian daftar umur piutang menurut klasifikasi debitur penerusan pinjaman:

(dalam rupiah)

Kategori	Klasifikasi Kualitas Piutang				Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
PEMDA	12.339.473.029.762	1.120.000.000	11.590.305.505	174.105.941.420	12.526.289.276.687
BUMN	41.834.538.930.975	2.220.404.741.341	30.142.930.283	11.879.670.776.837	55.964.757.379.437
BUMD	21.927.194.247	-	-	24.545.632.013	46.472.826.260
Perbankan	674.030.457.855	135.666.615.000	-	1.316.121.323.105	2.125.818.395.960
Koperasi	35.577.097.548	-	-	64.559.936.195	100.137.033.743
Proyek	-	-	-	40.380.207.023	40.380.207.023
IEPC	107.391.550.720	-	-	-	107.391.550.720
Kredit Program	-	-	-	580.029.154.623	580.029.154.623
Total	**55.012.938.261.107**	**2.357.191.356.341**	**41.733.235.788**	**14.079.412.971.216**	**71.491.275.824.453**

D.2.1.5.3. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Jumlah Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.411.302.362.240,00 dan Rp2.301.698.582.578,00, mengalami kenaikan sebesar Rp109.603.779.662,00 atau 4,76 persen. Piutang untuk Tahun 2024 terdiri dari BA 999.03 bagian Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perumnas sebesar Rp47.225.637.648,00 dan pada BA999.99 bagian Piutang Jangka Panjang lainnya sebesar Rp2.364.076.724.592,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 per 31 Desember 2025 sebesar Rp47.225.637.648,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.225.637.648,00, yang merupakan Piutang dari Perum Perumnas.

   Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp47.225.637.648,00 tersebut merupakan bagian dari piutang atas tunggakan Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas dengan total tunggakan per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.225.637.648,00.

   Pada tahun 2025 terdapat surat Menteri Keuangan nomor S-91/MK.02/2025 tanggal 24 Februari 2025 hal Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumas. Dalam surat tersebut pembayaran piutang Perum Perumnas sebesar Rp57.225.637.648,00 disesuaikan menjadi dari tahun 2025 s.d. 2032. Dari nilai piutang Rp57.225.637.648,00, sebesar Rp10.000.000.000,00 merupakan bagian lancar piutang jangka panjang lainnya. Sehingga sisanya sebesar Rp47.225.637.648,00 merupakan piutang jangka panjang lainnya.

2. Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.99 per 31 Desember 2025 sebesar USD141,392,149 atau ekuivalen sebesar Rp2.364.076.724.592,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.284.472.944.930,00, yang seluruhnya merupakan piutang migas yang berasal dari PT TPPI. Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalti PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp36.094.761.472,00. Saldo piutang jangka panjang sampai dengan Juni tahun 2025 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100%.

   Atas Piutang Jangka Panjang yang berasal dari PT TPPI, DJA telah meminta pendapat hukum Jamdatun yang telah disampaikan melalui Surat Jamdatun Nomor B-209/G/Gph.1/3/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa Piutang Jangka Panjang yang berasal dari PT TPPI dicatat berdasarkan hubungan keperdataan yang mengikat PT TPPI sebagai badan hukum dengan BP Migas (sekarang SKK Migas).

   Atas piutang dimaksud, TPPI telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Pengadilan Niaga No: 47/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor: 60/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst per tanggal 26 Desember 2012.

   Namun demikian, mempertimbangkan Surat Jamdatun No. R-116/G/Gph.1/01/2023, tanggal 31 Januari 2023 perihal Pendapat Hukum Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia PT TPPI oleh SKK Migas, yang pada intinya menyampaikan bahwa:

   a. Meskipun terdapat Putusan Perdamaian/Homologasi terhadap TPPI sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 47/PKPU/2012/PN.Niaga,Jkt,Pst, jo, Nomor 60/Pailit/2012/PN. Niaga, Jkt. Pst, namun

berdasarkan ketentuan Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, SKK Migas tidak tunduk pada penyelesaian kewajiban pembayaran TPP/ yang diatur dalam Putusan Homologasi dimaksud.

b. Penyelesaian kewajiban pembayaran TPPI kepada SKK Migas terkait penjualan kondensat bagian negara mengacu pada *Seller Appointed Agreement* (SAA) beserta amandemennya yaitu dengan melakukan pencairan jaminan-jaminan *fiducia* yang termuat dalam Akta *Fiducia* sebagaimana diatur dalam Pasal 5.10 jo. Pasal 19.3 SAA.

Berdasarkan Sertifikat Jaminan *Fiducia*. No. W7-000819 AH.05.01.TH2011/STD dengan Salinan Buku Daftar Fiducia tanggal 10 Januari 2011 dan perubahannya tanggal 28 Juni 2011, bahwa nilai Jaminan Fidusia sebesar USD300,000,000 dengan nilai Obyek Jaminan Fidusia sebesar USD178,736,443.98. Adapun obyek Jaminan Fidusia terdiri dari:

a. Kondensat Bagian Negara yang hak kepemilikannya telah beralih sepenuhnya kepada PT TPPI, baik yang telah ada pada saat Perjanjian Penunjukan Penjual maupun perubahannya, terakhir dengan Amandemen Kedua, ditandatangani maupun yang akan dimiliki PT TPPI di kemudian hari yang jumlahnya sebanyak 55.719 ton atau 488.122 barrel.

b. Barang setengah jadi (Sweet Naphta BTX, *Intermediate Products*) milik PT TPPI, baik yang telah ada pada saat Akta ditandatangani maupun yang dimiliki PT TPPI di kemudian hari dengan total sejumlah 20.727 ton atau 158.861 barrel.

c. Barang jadi milik PT TPPI, baik yang telah ada pada saat Akta ditandatangani maupun yang dimiliki PT TPPI di kemudian hari.

d. *Accounts Receivable* atau piutang yang merupakan hasil penjualan dari barang jadi milik PT TPPI baik yang telah ada pada saat Akta ditandatangani maupun yang dimiliki oleh PT TPPI di kemudian hari.

e. Klaim Asuransi atas kondensat dalam pengiriman dan *inventory* baik yang telah ada pada saat Akta ini ditandatangani maupun yang akan dimiliki PT TPPI di kemudian hari.

Saat ini, SKK Migas selaku pihak yang berikat kontrak dengan PT TPPI sedang mempertimbangkan untuk menempuh opsi eksekusi Jaminan Fidusia dan opsi lainnya dalam penyelesaian piutang PT TPPI, di antaranya:

a. Pembayaran tunai dari PT TPPI kepada Pemerintah (Menteri Keuangan) melalui pemotongan (cicilan) *revenue* PT TPPI;

b. Meminta pembayaran penuh atas total *Outstanding* (Pokok dan Denda);

c. Mengusulkan kepada Pemerintah untuk melimpahkan Piutang TPPI kepada Pengurusan Urusan Piutang Negara (PUPN);

d. Tunduk pada Putusan PKPU (Perjanjian Perdamaian).

Berdasarkan surat Dirjen Anggaran nomor S-71/AG/AG.6/2024, tanggal 12 Maret 2024, SKK Migas diminta untuk berkoordinasi dengan para pihak terkait dan menyampaikan kajian atas opsi terbaik dalam rangka penyelesaian kewajiban pembayaran PT TPPI atas pengambilan kondensat bagian negara sebesar USD141 Juta, dan dapat diterima pada akhir Maret 2024.

Melalui surat nomor SRT-0015/SKKIA0000/2025/S4 tanggal 13 Januari 2025, SKK Migas mengusulkan opsi penyelesaian piutang dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menjalankan putusan PKPU dalam rangka mendapatkan dana pembayaran sebagian dari PT TPPI di Bank of New York Mellon sebesar USD15.15 juta (terdiri dari cicilan untuk pokok *notes* sebesar USD1.09 juta dan bunga notes sebesar USD14.06 juta); dan

b. Penyelesaian melalui skema *Head of Agreement* antara Kementerian Keuangan dan PT Pertamina (Persero) untuk menyelesaikan sisa *outstanding* piutang pemerintah pada PT TPPI.

Pada tanggal 31 Juli 2025 SKK Migas menyelenggarakan rapat pembahasan Langkah Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Pemerintah kepada PT TPPI, dengan mengundang perwakilan dari Direktorat PNBP SDA KND-DJA, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-DJPB, Direktorat Pengelolaan Kas Negara-DJPB, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan-DJKN, Biro Advokasi-Setjen Kemenkeu, PT TPPI, PT Pertamina (Persero), dan PT TPI, dengan hasil rapat antara lain:

a. Dalam rangka penyelesaian permasalahan piutang Pemerintah pada PT TPPI, SKK Migas akan melaksanakan putusan PKPU dan melakukan *subscription notes*;

b. Terhadap *outstanding* piutang Pemerintah yang belum diselesaikan pembayarannya, SKK Migas akan berkoordinasi dengan PT Pertamina selaku *shareholder* PT TPPI untuk menyelesaikannya berdasarkan skema *Head of Agreement Addendum* ke III antara Kementerian Keuangan (DJKN) dan PT Pertamina (Persero) tanggal 10 Oktober 2024, yang mengatur antara lain Pasal 1 angka 2 yaitu: "Pertamina bersama dengan pihak terkait lainnya tetap melanjutkan langkah-langkah dalam rangka penyelesaian kewajiban TPPI kepada pihak terkait (termasuk kewajiban kepada SKK Migas) melalui transformasi/restrukturisasi bisnis dan keuangan TPPI, sinergi bisnis di dalam Pertamina Group serta langkah-langkah lain yang dimungkinkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku";

c. Sesuai dengan semangat *Head of Agreement* (HOA) dan sesuai dengan mekanisme PKPU, Pertamina group akan menyampaikan usulan *Road Map* pengembangan PT TPPI dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

d. Kementerian Keuangan, SKK Migas, Pertamina group, Kementerian BUMN dan Danantara akan berkoordinasi mengenai skema yang akan diambil untuk menyelesaikan sisa piutang Pemerintah pada PT TPPI dan hasilnya akan dibawa di *high-level meeting*.

D.2.1.5.4. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PIUTANG JANGKA PANJANG

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.190.734.138.702,00 dan Rp3.112.146.112.575,00, mengalami kenaikan sebesar Rp78.588.026.127,00 atau 2,53 persen dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	75.104
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	826.421.285.922	825.950.528.776
3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.364.312.852.780	2.286.195.508.695
Jumlah		**3.190.734.138.702**	**3.112.146.112.575**

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp75.104,00. Penurunan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR sebesar Rp75.104,00 disebabkan adanya penyesuaian penyisihan berdasarkan pelunasan Piutang Tagihan TP/TGR pada OJK.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp826.421.285.922,00 dan sebesar Rp825.950.528.776,00. Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Pemberian Pinjaman tahun 2025 ini berasal dari Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (156511) sebesar Rp246.551.808.100,00, dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya Kredit Program (156513) sebesar Rp579.869.477.822,00.

3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.364.312.852.780,00 dan Rp2.286.195.508.695,00.

Saldo penyisihan piutang jangka panjang sebesar Rp2.364.312.852.780,00 berasal dari saldo piutang jangka panjang BA 999.03 sebesar sebesar Rp47.225.637.648,00 disisihkan sebesar 5 permil atau sejumlah Rp236.128.188,00, dan dari BA 999.99 sebesar Rp2.364.076.724.592,00 berasal dari saldo piutang jangka panjang PT TPPI yang digolongkan dalam piutang macet, yaitu dengan jumlah penyisihan sebesar 100 persen, sehingga penyisihan piutang jangka panjang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.364.076.724.592,00.

D.2.1.6. ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.027.660.421.840.248,00 dan Rp965.252.679.800.446,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp62.407.742.039.802,00 atau 6,47 persen. Jumlah tersebut merupakan nilai netto setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi pada aset lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tak Berwujud	328.700.290.824	236.386.021.679
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	488.209.124.513.224	486.632.618.588.563
Dana Cadangan Penjaminan	13.675.145.505.000	13.675.145.505.000
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	73.708.128.282.308	53.287.731.646.004
Dana Jangka Panjang	26.620.760.889.106	28.528.648.017.150
Aset Lain-lain	774.434.594.852.983	697.896.841.387.119
Aset Lainnya dari Ekuitas UBL	29.130.879.455.119	31.292.147.271.351
Jumlah Aset Lainnya Kotor	**1.406.107.333.788.564**	**1.311.549.518.436.866**
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Aset Lainnya	(378.446.911.948.316)	(346.296.838.636.420)
Jumlah	**1.027.660.421.840.248**	**965.252.679.800.446**

D.2.1.6.1. ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp328.700.290.824,00 dan Rp236.386.021.679,00, terdapat kenaikan nilai sebesar Rp92.314.269.145,00 atau 39,05 persen. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tak Berwujud BA 999.08	139.869.733.023	135.000.450.399
Aset Tak Berwujud BA 999.99	188.830.557.801	101.385.571.280
Total	**328.700.290.824**	**236.386.021.679**

D.2.1.6.1.1. Aset Tak Berwujud BA 999.08

(dalam rupiah)

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
112	BP Batam		
	Hasil Kajian/penelitian	12.947.154.016	13.528.803.766
	Aset Tak Berwujud Lainnya	16.001.734.018	13.988.913.218
-	SKK Migas		
	Software	105.544.204.295	104.676.328.415
	Lisensi	4.851.132.694	2.280.897.000
	Aset Tak Berwujud Lainnya	525.508.000	525.508.000
Total		**139.869.733.023**	**135.000.450.399**

Mutasi Aset Tak Berwujud tersebut per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	**135.000.450.399**
Penambahan :	**8.739.183.374**
Saldo Awal	130.793.980
Pembelian	488.966.800
Perolehan Lainnya	3.307.317.594
Reklasifikasi Masuk	3.288.251.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.523.854.000
Pengurangan	**(3.831.773.500)**
Reklasifikasi Keluar KDP	(3.250.123.750)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(581.649.750)
Saldo per 31 Desember 2025	**139.907.860.273**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	**(104.452.193.841)**
Nilai buku per 31 Desember 2025	**35.455.666.432**

D.2.1.6.1.2. Aset Tak Berwujud BA 999.99

(dalam rupiah)

Saldo Awal	**101.385.571.280**
Penambahan	**87.444.986.521**
Pembelian	87.444.986.521
Pengurangan	-
Saldo per 31 Desember 2025	**188.830.557.801**
Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2025	19.580.085.018
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**169.250.472.783**

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp188.830.557.801,00 dan

Rp101.385.571.280,00. Aset tersebut berupa lisensi pada satker Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan BUN. Aset tak berwujud tersebut sedang dalam proses penetapan status penggunaan (PSP) kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan.

D.2.1.6.2. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Saldo Dana yang Dibatasi Pengunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp488.209.124.513.224,00 dan Rp486.632.618.588.563,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.576.505.924.661,00 atau 0,32 persen. Angka untuk tahun 2025 ini didapat setelah dikurangi penyesuaian eliminasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp13.257.962.672.178,00 yang terdiri dari Dana Cadangan Penjaminan sebesar Rp13.175.145.505.000,00 dan RPATA sebesar Rp82.817.167.178,00. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan
BA 999.00	112.864.819.468.442	160.823.830.777.318	(47.959.011.308.876)
BA 999.07	154.442.000.000	170.974.000.000	(16.532.000.000)
BA 999.08	67.837.963.998.392	58.632.821.728.923	9.205.142.269.469
BA 999.99	320.609.861.718.568	280.282.974.599.043	40.326.887.119.525
Penyesuaian eliminasi dana yang dibatasi penggunaannya	(13.257.962.672.178)	(13.277.982.516.721)	20.019.844.543
TOTAL	**488.209.124.513.224**	**486.632.618.588.563**	**1.576.505.924.661**

D.2.1.6.2.1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Akuntansi Pusat

Jumlah Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp112.864.819.468.442,00 dan Rp160.823.830.777.318,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.959.011.308.876,00 atau 29,82 persen apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2024. Penurunan saldo dana yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2025 sebagian besar disebabkan pemindahbukuan hasil lelang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing dalam rangka *Prefunding* Tahun 2026 sebesar USD2,000,000,000 atau ekuivalen Rp33.440.000.000.000,00.

(dalam rupiah)

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024
1	Dana di Rekening *Treasury Deposit Facility*-Transfer Keuangan Daerah	6.288.034.879.188	20.558.040.446.440
2	Dana Lainnya	60.243.915.321.443	114.456.529.130.618
3	Dana Perhitungan Fihak Ketiga	2.832.870.994.156	3.773.165.929.527
4	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	43.499.998.273.655	22.036.095.270.733
Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya		**112.864.819.468.442**	**160.823.830.777.318**

Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Direktorat PKN melaporkan pos aset yang dibatasi penggunaannya sebagai bagian dari aset lainnya dalam rangka mencatat kegiatan untuk tujuan tertentu. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat tahun 2025 tercatat sebesar Rp112.864.819.468.442,00 yang diantaranya sebesar Rp13.175.145.505.000,00 menampung dana cadangan penjaminan yang telah disajikan sebagai cadangan penjaminan sehingga dilakukan eliminasi. Perincian saldo dana yang dieliminasi dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	Akun	Segmen Bank	Deskripsi	Saldo Akhir
1	163119	S0009	Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	12.768.268.505.000
2	163119	S2040	Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	406.877.000.000
Total				**13.175.145.505.000**

Rekening Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang dikelola oleh Direktorat PKN adalah sebagai berikut:

1. Rekening Pembangunan Hutan (RPH) dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi (DR) dibuka berdasarkan :
   a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/ 2007 dan Nomor 02/MENHUT-11/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan; dan
   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.05/2007 tentang Pembukaan Rekening Pembangunan Hutan dan Penempatan Dana Reboisasi Pertama Kali dalam Rekening Pembangunan Hutan.

   Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan dan Rekening Cadangan Dana Rebosisasi dilakukan berdasarkan petunjuk-petunjuk teknis sebagai berikut:

   a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan.
   b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Cadangan.
   c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 86/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Cadangan.
   d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6/PB/2019 tentang Penyimpanan Dana Reboisasi pada Bank Umum.

   Rekening Pembangunan Hutan dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi dibuka untuk menampung Dana Reboisasi (dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alami yang berupa kayu) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.

   Transaksi penerimaan meliputi:
   a. penerimaan dalam rangka penyimpanan dana reboisasi ke dalam RPH; dan
   b. penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH.

   Transaksi pengeluaran meliputi:

a. pengeluaran dalam rangka pemindahbukuan/transfer dari RPH ke Rekening KUN; dan

b. pengeluaran dalam rangka pemindahbukuan/transfer penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH ke Rekening KUN.

2. Rekening Dana Cadangan Alutsista dibuka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Rekening Dana Cadangan Alutsista adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana titipan milik Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan akhir tahun 2025, terdapat 6 rekening Dana Cadangan Alutsista yang terdiri dari:

   a. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AD (519000144980);

   b. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AU (519000145980);

   c. Rekening Dana Cadangan Alutsista Kemhan (519000146980);

   d. Rekening Dana Cadangan Alutsista Mabes TNI (519000147980);

   e. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AU dalam USD (609027411980);

   f. Rek Lain BI Dana Cadangan Alutsista TNI AL dalam IDR (519000154980).

   Jika masih terdapat sisa rekening dana cadangan alutsista sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK 143/PMK.05/2018, maka Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktur PKN menyampaikan surat perintah penihilan saldo rekening dana cadangan alutsisa kepada KPA Satker dan dicatat sebagai pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu melalui potongan SPM. Dan jika KPA Satker tidak melakukan penihilan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PMK, maka Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan langsung melakukan pemindahbukuan sisa dana dari rekening dana cadangan alutsista ke Rekening Kas Umum Negara.

3. Rekening Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dibuka berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat untuk menampung dana penerbitan SBN dan dana pembayaran pokok, bunga utang dan kewajiban lainnya SBN yang jatuh tempo dengan Nama “Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara”. Rekening ini terdiri dari 5 (lima) rekening yaitu:

   a. Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dalam Rupiah (502000001980);

   b. Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara dalam valuta USD (609024411980);

   c. Menteri Keuangan Pengelolaan SBN EURO (609024991980);

   d. Menteri Keuangan Pengelolaan SBN CNH (609000115980);

   e. Menteri Keuangan Pengelolaan SBN AUD (609001311980).

   Pada Januari 2026 telah dilakukan pemindahbukuan dana atas *prefunding* pada Rek Lain BI Pengelolaan SBN USD ke RKUN USD sebesar USD2,000,000,000 atau ekuivalen Rp33.440.000.000.000,00 dengan rincian SBSN Valas Seri SNI1230 dan SNI1235.

4. Rekening Khusus Dana PFK dengan nomor 510000281980 dibuka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-66/PB/2016 tentang Pemisahan Dana PFK dari

Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Khusus Dana PFK yang digunakan untuk menampung dana realisasi penerimaan PFK dalam rangka meningkatkan akurasi data monitoring dana PFK dan sebagai fungsi kontrol atas saldo dana pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pengelolaan rekening khusus dana PFK diatur dalam PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Aliran Uang pada rekening ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber dana masuk berasal dari Rekening Kas Umum Negara.

b. Pengeluaran dana keluar berasal Nota Perintah Pemindahbukuan dana ke Rekening Kas Umum Negara dari Direktur PKN.

5. Rekening Lain BI BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan dengan nomor 502000002980 dibuka dengan dasar:

   a. Keppres Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.

   b. Keppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

   Rekening ini digunakan untuk menampung dana yang berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan digunakan untuk membayar kewajiban negara serta untuk menjamin bank umum apabila terjadi krisis moneter.

   Aliran uang rekening:

   a. Sumber dana berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999.

   b. Pengeluaran dana dari Rekening BUN untuk Obligasi dalam Rangka Penjaminan ditujukan ke bank penjamin.

6. Rekening Stabilisasi Surat Berharga Negara (500000006980) untuk menampung dana pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik dan dibuka berdasarkan PMK nomor 188/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik. Ketentuan penggunaan saldo adalah berdasarkan kondisi pasar SBN domestik ditetapkan dalam level krisis berdasarkan protokol manajemen krisis pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan dan mendapatkan persetujuan Badan Anggaran DPR.

7. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980) dibuka dengan tujuan untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR. Dasar hukum pembukaan rekening adalah Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 31 Januari 2001 tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Pengelolaan Rekening ini diatur dalam:

   a. PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

   b. Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-40/PB/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara melalui Sistem Bank Indonesia *Government-Electronic Banking* (BIG-

eB).

Kebijakan pencairan dana pada rekening ini dilakukan setelah status hukum Aset BPR sebagai milik pemerintah sudah jelas. Aliran kas masuk dan kas keluar dari rekening ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber dana berasal dari pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR.

b. Pengeluaran/pencairan dana berdasarkan kebijakan pemerintah.

8. Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980) atau disebut RDCPP ini diperlukan dalam hal anggaran kewajiban penjaminan pemerintah yang telah dialokasikan dalam APBN tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Anggaran dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening tersebut yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

   Dasar hukum pembukaan rekening:

   a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

   b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

   Pengelolaan RDCPP ini diatur menggunakan petunjuk teknis sebagai berikut:

   a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 69 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

   Dirjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah mengajukan permintaan pembukaan RDCPP kepada Kuasa BUN Pusat dan berdasarkan permintaan tersebut Dirjen Perbendaharaan mengajukan permintaan pembukaan RDCPP kepada Bank Indonesia melalui surat Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia nomor 14/892/DASP tanggal 19 Desember 2013 hal Pembukaan Rekening. Alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah untuk:

   a. Pemberian Jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;

   b. Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;

   c. Pelaksanaan Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;

   d. Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;

   e. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol;

   f. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah perkotaan;

   g. Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;

   h. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;

i. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi;

j. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM; dan

k. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk BUMN.

Aliran kas masuk dan kas keluar dari rekening ini dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Dana masuk berasal dari pencairan alokasi DIPA Dana Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang tidak habis dipergunakan sampai dengan akhir dalam tahun anggaran berjalan oleh DJPPR sebagai KPA ke RDCPP.

b. Dana keluar dari RDCPP akan disalurkan ke penerima jaminan atas permintaan KPA guna melunasi kewajiban Pemerintah akibat pemberian jaminan apabila pihak terjamin tidak dapat membayar kewajibannya dengan kondisi sebagai berikut:

   1) Anggaran Kewajiban Penjaminan tidak dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan.

   2) Anggaran Kewajiban Penjaminan dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan tetapi tidak mencukupi; atau

   3) Sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat memenuhi kewajiban Kementerian/Lembaga kepada BUPI.

9. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) atau disebut Rekening DJPPID adalah rekening yang akan digunakan untuk menampung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, dan/atau sumber-sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar terlebih dahulu sebagaimana telah diatur dalam PMK 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, dimana nantinya rekening digunakan sebagai rekening penampungan alokasi anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah dalam hal tidak digunakan pada tahun anggaran berjalan dan penampungan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH. Kemudian, dalam hal tidak terdapat alokasi anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah atau dana pada alokasi dimaksud tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), maka rekening dimaksud juga digunakan untuk membayar kewajiban penjaminan pemerintah kepada PT. SMI. rekening DJPPID dimaksud dikategorikan pada Rekening Lainnya Milik BUN.

10. Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980) adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN. Dana investasi Pemerintah tersebut ditujukan kepada penerima investasi sebagaimana diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020.

11. Rek Lain BI Investasi Bendahara Umum Negara (513000001980)

Rekening Investasi Bendahara Umum Negara yang disingkat RIBUN adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana dan/atau imbal hasil Investasi Pemerintah. Rekening tersebut dibuka di Bank Indonesia dengan nama Rekening Lain BI Investasi Bendahara Umum Negara dengan nomor 5120000001980 degan dasar hukum sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.
c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara.
d. Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-276/PB/PB.3/2021 tanggal 20 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.
e. Surat Bank Indonesia nomor 23/189/DPPT/Srt/B tanggal 30 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

RIBUN bersifat kumulatif dan berfungsi untuk:

a. menyalurkan dana Investasi Pemerintah kepada OIP;
b. menerima dana Investasi Pemerintah beserta imbal hasilnya dari OIP; dan
c. mengkonsolidasikan pencatatan dana Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh BUN melalui OIP.

Sampai dengan 31 Desember 2025, penerimaan RIBUN bersumber dari tiga jenis:

a. Pencairan dana Investasi Pemerintah untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari RKUN ke RIBUN yang akan disalurkan ke OIP, dalam hal ini adalah BP Tapera senilai Rp29.200.000.000.000,00;
b. Pencairan dana Investasi Pemerintah untuk Ketahanan Pangan yang akan disalurkan ke OIP dalam hal ini Perum Bulog senilai Rp22.076.043.000.000,00;
c. Pencairan dana Investasi Pemerintah untuk Pembiayaan Dana Abadi Penelitian Tahun Anggaran 2025 disalurkan ke OIP, dalam hal ini LPDP senilai Rp1.000.000.000.000,00;
d. Pencairan dana Investasi Pemerintah untuk Pembiayaan Pembiayaan Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2025 disalurkan ke OIP, dalam hal ini LPDP senilai Rp1.000.000.000.000,00;
e. Pencairan dana Investasi Pemerintah untuk Pembiayaan Dana Abadi Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 disalurkan ke OIP, dalam hal ini LPDP senilai Rp1.000.000.000.000,00;
f. Pencairan dana Investasi Pemerintah untuk Penyaluran Dana Repayment PEN Daerah Tahun 2025 disalurkan ke OIP, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), senilai Rp1.500.000.000.000,00;
g. Pencairan dana Investasi Pemerintah untuk Pembiayaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (Dana Abadi Pendidikan untuk Pesantren dan Dana Abadi Pendidikan untuk Sekolah Unggul Garuda) Tahun Anggaran 2025 disalurkan ke OIP dalam hal ini LPDP senilai Rp23.698.925.315.000,00;
h. Penerimaan pada RIBUN juga berasal dari penyetoran hasil investasi pemerintah dan

pengembalian pokok investasi dari OIP. Penerimaan imbal hasil Investasi Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu Rp141.128.806.664,00 (imbal hasil Triwulan I), Rp180.103.816.624,00 (imbal hasil Triwulan II), Rp206.223.703.735,00 (imbal hasil Triwulan III), dan Rp249.746.546.711,00 (imbal hasil Triwulan IV).

Sedangkan pengeluaran RIBUN sampai dengan akhir tahun 2025 dilakukan untuk penyaluran Investasi Pemerintah untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari RIBUN ke rekening BP Tapera di Bank Umum senilai Rp29.200.000.000.000,00 dan penyaluran Investasi Pemerintah untuk Ketahanan Pangan pada Perum Bulog senilai Rp22.076.043.000.000,00. Penyaluran investasi untuk pembiayaan Dana Abadi Penelitian, Perguruan Tinggi, dan Kebudayaan yang masing-masing bernilai Rp1.000.000.000.000,00 dan dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp23.698.925.315.000,00 ke rekening LPDP. Penyaluran dana investasi pemerintah berupa penyaluran Dana *Repayment* PEN Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp1.500.000.000.000,00. Selain penyaluran investasi Pemerintah, pengeluaran RIBUN juga terjadi atas pemindahbukuan hasil investasi pemerintah dan pokok investasi dari RIBUN ke RKUN atas perintah Menteri Keuangan untuk diperlakukan sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp777.202.873.734,00.

12. Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Sentral (Bank Indonesia). Bentuk penyimpanan adalah *overnight* pada rekening lain BI *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) yang dibuka di Bank Indonesia dengan dasar hukum pembukaan rekening sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Depocit Facility.*

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Dalam Bentuk Nontunai.

d. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-143/PB/PB.3/2023 tanggal 21 Desember 2023, S-144/PB/PB.3/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan S-146/PB/PB.3/2023 tanggal 23 Desember 2023 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

e. Surat Bank Indonesia nomor 24/272/DPPT/Srt/B tanggal 26 Desember 2023, 24/273/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2023 dan 24/275/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2023 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia.

f. Surat Bank Indonesia nomor 25/299/DPPT/Srt/B tanggal 28 Desember 2023 hal-hal Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat 546 rekening lain BI TDF-TKD Pemda dengan total saldo Rp6.288.034.879.188,00.

13. Rekening Lain BI Penampungan Akhir Tahun Anggaran

    Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan rekening lain-lain milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000700980 untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Dasar hukum pembukaan rekening sebagai berikut:

    a. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 109 tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.

    b. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-184/PB/PB.3/2023 tanggal 13 November 2023 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

    c. Surat Bank Indonesia nomor 25/275/DPPT/Srt/B tanggal 28 November 2023 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia.

    Sampai dengan 31 Desember 2025, saldo RPATA sebesar Rp43.499.998.273.655,00.

14. Rekening Pengeluaran Lainnya Bank Umum SKN RTGS In Transit yang selanjutnya disingkat RPgL in transit merupakan rekening milik BUN yang dibuka di Bank Umum sebagai rekening antara/transit untuk menampung dana SP2D tanggal 31 Desember 2025 yang belum dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun 2025 karena keterbatasan sistem perbankan. Dasar pembukaan RPgL *in transit* sebagai berikut:

    a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2025 tentang Mekanisme Penyaluran Dana atas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir Tahun Anggaran.

    b. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-91/PB/PB.3/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Permohonan Pembukaan Rekening Pengeluaran Lainnya.

    RPgL *in transit* dibuka pada lima Bank Operasional dengan detail sebagai berikut:

    a. RPgL BU IN TRANSIT BRI (032901006617302) sesuai dengan surat Head of Finance & Police Institution Department dan Head of Health & Investment Institution Department Bank BRI nomor B.1367.e-INS/FPC/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Informasi Pembukaan Rekening Pengeluaran Lainnya.

    b. RPgL BU IN TRANSIT BMRI (1190012412670) sesuai surat Branch Manager Bank Mandiri Cabang Jakarta Gambir nomor R04.Br.JGR/914/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Laporan Pembuatan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL).

    c. RPgL BU In Transit BNI (2912051230) sesuai surat Pemimpin KCP Kemenkeu BNI nomor PCG/4.2/313 tanggal 29 Desember 2025 hal Pemberitahuan Pembukaan Rekening RPgL BU In Transit BNI.

    d. RPgL BU IN TRANSIT BTN (0001401300027650) sesuai surat Division Head of Instutional

Banking 1 Division Bank BTN nomor 1386/S/IBD1/GOV/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Pemberitahuan Pembukaan Rekening RPGL BU IN TRANSIT BTN.

e. RPgl BU In Transit BSI (7339225097) sesuai surat Group Head Institutional Banking Group BSI nomor 05/3362-3-/IBG tanggal 30 Desember 2025 hal Penyampaian Nama dan Nomor Rekening RPGL BU INTRANSIT pada Bank Syariah Indonesia.

D.2.1.6.2.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.07

Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp154.442.000.000,00 dan Rp170.974.000.000,00. Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut mengalami penurunan sebesar Rp16.532.000.000,00 atau 9,67 persen dari Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024. Dana tersebut terdapat pada satker Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 pada Neraca merupakan dana subsidi yg sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL bank yang bersangkutan. Rincian atas saldo tersebut pada tabel di bawah ini:

(dalam rupiah)

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Bank/Kantor/ Pos	Saldo 31 Desember 2025
1	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	61001010000055	BANK ACEH SYARIAH	120.000.000
2	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	0070102000821	BANK BJB SYARIAH	692.000.000
3	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	0480635545	BANK BNI	6.106.000.000
4	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	121101000137308	BANK BRI	90.402.000.000
5	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	1032330505	BANK BSI	640.000.000
6	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	1501300010194	BANK BTN	35.080.000.000
7	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	40001209936	BANK DKI	1.896.000.000
8	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	70122065906	BANK DKI SYARIAH	700.000.000
9	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	1000001844	BANK KALBAR	460.000.000
10	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	0011100279	BANK KALTIMTARA	292.000.000
11	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	1260007322810	BANK MANDIRI	16.748.000.000
12	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	1500105000074	BANK PAPUA	10.000.000
13	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	1300020000318955	BANK SULSELBAR	392.000.000
14	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	5100520000000063	BANK SULSELBAR SYARIAH	64.000.000
15	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	11730012288	BANK NOBU	840.000.000
Jumlah				**154.442.000.000**

D.2.1.6.2.3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.08

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp67.837.963.998.392,00 dan Rp58.632.821.728.923,00. Dana Lainnya merupakan Dana yang Dibatasi Penggunaannya yang terdiri dari:

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 Satker SKK Migas sebesar Rp67.778.850.083.402,00 dan Rp58.555.708.079.202,00 yang merupakan dana kegiatan pasca-operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR), Dana *Equipment & Services* (E&S), serta kegiatan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM)

Wilayah Kerja Rokan dalam kegiatan usaha hulu migas. Saldo tersebut merupakan konversi saldo ASR sebesar USD3,370,527,007.42, saldo E&S sebesar USD30,784,009.03, saldo TTM sebesar USD652,447,960.39 menggunakan kurs penutup BI 31 Desember 2025 sebesar Rp16.720,00. Mutasi saldo dana ASR tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai ASR (USD)	Nilai E&S (USD)	Nilai TTM (USD)
Saldo Awal	2,956,492,921.42	30,284,960.03	637,391,709.39
Mutasi tambah	421,030,100.00	499,049.00	15,056,251
Mutasi kurang:	(6,996,014.00)	-	-
Saldo Akhir USD	**3,370,527,007.42**	**30,784,009.03**	**652,447,960.39**
Saldo Akhir Rupiah	**56.355.211.557.207**	**514.708.635.329**	**10.908.929.890.866**

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan *Abandonment and Site Restoration* (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 36, KKKS sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas. Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi (*cost recoverable*). Dana ASR dapat diajukan *cost recovery* pada saat bersamaan setelah KKKS melakukan penyetoran ke rekening bersama.

Kesepakatan substansi pengaturan kebijakan akuntansi Dana ASR tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration Yang Ditempatkan pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas, yang mengatur kebijakan akuntansi pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi dimaksud telah diatur sebelumnya dalam surat nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR *on face* dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaanya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker;

b. Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, penyajian Saldo Rekening Dana ASR *on face* dalam laporan keuangan perlu disempurnakan menjadi disajikan sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);

c. Selanjutnya agar SKK Migas dapat menyampaikan perhitungan jumlah Saldo Rekening Dana ASR dari Kontrak Kerjasama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (*Cost Recovery*) maupun dari Kontrak Kerjasama yang berbentuk Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, disertai penjelasan yang memadai untuk proses pencatatannya pada LKBUN dan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);

d. Ketentuan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana ASR sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud surat ini;

e. Kebijakan akuntansi ini dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan LKBUN untuk dikonsolidasikan ke dalam LKPP yang mulai diberlakukan sejak pelaporan tahun 2020;

f. Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor: 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, yaitu pengaturan yang lebih detil atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR, termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA. Hal tersebut berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas dan surat Kuasa Pengguna Anggaran SKK Migas Nomor SRT-0032/SMKPA0000/2022/S4 tanggal 8 Maret 2022 hal Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Satker SKK Migas Tahun 2021.

2. Saldo Dana di Rekening Penampungan-K/L per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp59.113.914.990,00 dan Rp77.113.649.721,00. Dana di Rekening Penampungan-K/L merupakan Dana Pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Dana di Rekening Penampungan-K/L telah disajikan pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada BA BUN 999.00, maka dari itu saldo sebesar Rp59.113.914.990,00 pada BA BUN 999.08 dieliminasi.

(dalam rupiah)

BA Pel.	Uraian BA Pel .	31 Desember 2025	31 Desember 2024
015	Kementerian Keuangan	2.550.000.000	24.824.302.727
-	MPP Kartu Pekerja	-	2.524.964.225
-	SKK Migas	56.527.414.990	48.643.514.019
-	BP Batam	36.500.000	1.120.868.750
Jumlah		**59.113.914.990**	**77.113.649.721**

D.2.1.6.2.4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.99

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp320.609.861.718.568,00 dan Rp280.282.974.599.043,00, terdapat kenaikan Rp40.326.887.119.525,00 atau 14,39 persen jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2024.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	285.428.962.413.233	250.426.347.869.742	35.002.614.543.491
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	35.157.196.053.147	29.830.903.367.301	5.326.292.685.846

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
RPATA satker PPP BUN	23.703.252.188	25.723.362.000	(2.020.109.812)
Total Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	**320.609.861.718.568**	**280.282.974.599.043**	**40.326.887.119.525**

Catatan:

1. Berdasarkan Laporan AIP Tahun 2025 *Audited* tanggal 17 Maret 2026 dan Berita Acara Perhitungan Nilai AIP Nomor 01/BA/LK/DJPb-TSP/2026 Tanggal 23 April 2026 disebutkan bahwa saldo AIP PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp285.428.962.413.233,00 serta Laporan AIP Tahun 2025 *Audited* tanggal 6 Maret 2026 dan Berita Acara Perhitungan Nilai AIP Nomor 01/BA/LK/DJPb-ASB/2026 Tanggal 21 April 2026 disebutkan bahwa saldo AIP PT ASABRI (Persero) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp35.157.196.053.147,00 dengan perkembangan dana AIP sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	PT Taspen	PT Asabri
Penambahan		
Hasil Investasi	19.311.022.670.224	2.362.261.390.143
Laba (Rugi) Penjualan Investasi FVTOCI	4.265.690.602	
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	9.244.694.680.058	1.273.889.487.285
Iuran Peserta	8.444.484.924.713	1.916.346.759.917
Pendapatan di Luar Investasi	163.591.152	7.348.535.239
Jumlah Penambahan	**37.004.631.556.749**	**5.559.846.172.584**
Pengurangan		
Beban, SP3IP dan Koreksi	(1.999.231.459.739)	(232.603.915.323)
Jumlah Pengurangan	**(1.999.231.459.739)**	**(232.603.915.323)**
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Peningkatan Dana Bersih	**35.005.400.097.010**	**5.327.242.257.261**
Dana Bersih Awal Tahun 25	**250.426.347.869.742**	**29.830.903.367.301**
Dana Bersih Awal Tahun 25 (Penyajian Kembali)	**250.423.562.316.223**	
Perubahan Kembali		**(949.571.415)**
Dana Bersih Akhir Tahun 25	**285.428.962.413.233**	**35.157.196.053.147**

   a. Hasil investasi pada PT Taspen sebesar Rp19,3 triliun dan pada PT Asabri sebesar Rp2,36 triliun merupakan pendapatan bunga deposito, bunga obligasi, bagi hasil sukuk, deviden saham, deviden reksadana, laba rugi pelepasan investasi dan pendapatan investasi lainnya. hasil investasi pada PT Taspen terbesar berasal dari bunga SUN sebesar Rp9,6 triliun dan bunga deposito sebesar Rp4,03 triliun. Hasil investasi pada PT Taspen Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp3,6 triliun dari Tahun 2024 sebesar Rp15,7 triliun dikarenakan terdapat kenaikan signifikan pada bunga SUN sebesar Rp1,3 triliun dan kenaikan indeks harga saham gabungan sebesar Rp1,7 triliun, sementara itu hasil investasi PT Asabri Tahun 2025 juga mengalami kenaikan sebesar Rp1,3 triliun dari tahun 2024 yang terdapat peningkatan harga saham sebesar Rp704,6 miliar dikarenakan kenaikan IHSG dan terdapat reklasifikasi penerapan PSAK 109 khususnya reklasifikasi ada reksadana sebesar Rp392,9 miliar;

   b. Terdapat kenaikan nilai investasi pada PT Taspen sebesar Rp13,8 triliun terdapat pembelian SUN yang cukup banyak pada tahun 2025 dan kondisi pasar yang membaik sementara itu terdapat nilai investasi pada PT Asabri sebesar Rp2,01 triliun dikarenakan mayoritas instrument

investasinya mengalami kenaikan.

c. Sementara itu terdapat kenaikan beban imbal jasa pengelolaan AIP pada PT Taspen dan PT Asabri dikarenakan kenaikan hasil investasi dengan rincian:

1) Pada PT Taspen mengalami kenaikan sebesar Rp576,2 miliar;

2) Pada PT Asabri mengalami kenaikan sebesar Rp89,3 miliar.

2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya terdapat pada satker Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan BUN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 senilai Rp23.703.252.188,00 dan Rp25.723.362.000,00 merupakan saldo Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Dana di Rekening Penampungan-K/L telah disajikan pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada BA BUN 999.00, maka dari itu saldo sebesar Rp23.703.252.188,00 pada BA BUN 999.99 dieliminasi.

D.2.1.6.3. DANA CADANGAN PENJAMINAN

Dana Cadangan penjaminan adalah dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dana Penjaminan EAS	13.268.268.505.000	13.268.268.505.000
Dana Penjaminan PRKN	406.877.000.000	406.877.000.000
Jumlah	**13.675.145.505.000**	**13.675.145.505.000**

Dana Penjaminan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.675.145.505.000,00 atau tidak terdapat pergerakan nilai dana penjaminan. Pada Tahun 2019, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan (pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari satker 999986 (Direktorat PRKN) ke satker 970974 (Direktorat EAS).

Terdapat dua KPA Dana Penjaminan yakni Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.

Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat EAS sebesar Rp13.268.268.505.000,00. Pada tahun 2024 terdapat penambahan dana kewajiban penjaminan sebesar Rp1.458.986.000.000,00 yang ditujukan untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp823.986.000.000,00 dan dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan sebesar Rp635.000.000.000,00.

Dana Cadangan Penjaminan sebesar Rp13.268.268.505.000,00 terdiri dari sebesar Rp12.768.268.505.000,00 berada di Rekening BI Nomor 519000126980 dengan Nama Rekening Rek Lain BI Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan sebesar Rp500.000.000.000,00 sedang dikelola melalui mekanisme Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana diatur dalam PMK 69 Tahun 2023 dan KMK Nomor 13 Tahun 2024 oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) BLU LDKPI, terdiri dari Rp122.905.310.000,00 sebagai Investasi Non Permanen dalam bentuk SUN dan sebesar Rp377.094.690.000,00 sebagai Dana Kelolaan BLU dalam bentuk Giro/Deposito dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Jenis	Tanggal Transaksi	Nilai
Investasi non-permanen	SUN - FR0095	4/26/2024	49.286.360.000
	SUN - FR0095	5/29/2024	34.346.950.000
	SUN - FR0087	5/29/2024	39.272.000.000
Total Investasi non-permanen			**122.905.310.000**
Dana kelolaan BLU	Deposito 3 bulan	12/13/2024	377.090.000.000
	Giro		4.690.000
Total Dana Kelolaan BLU			**377.094.690.000**

Dari total dana penjaminan sebesar Rp13.268.268.505.000,00, terdapat Dana Cadangan Pemerintah untuk program Penjaminan PC-PEN sebesar Rp6.449.000.000.000,00. Dana Cadangan Penjaminan digunakan untuk program:

1. Pemberian Jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;
2. Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
3. Pelaksanaan Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
4. Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
5. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol;
6. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah perkotaan;
7. Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
8. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
9. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi;
10. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM; dan
11. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk BUMN.

Adapun Dana Penjaminan yang dikelola oleh Direktorat PRKN adalah sebesar Rp406.877.000.000,00 yang merupakan dana penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

Dana Penjaminan dengan total sebesar Rp406.877.000.000,00 ditampung di rekening Bank Indonesia pada nomor rekening 519.000142980 dengan nama rekening “Rek Lain BI Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur”, yang merupakan rekening penempatan dalam rupiah yang pembayaran bunganya disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah pada akhir bulan berjalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan 11/3/KEP.GBI/2009 tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.

D.2.1.6.4. DANA KELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM

Nilai dana kelolaan BLU yang belum digulirkan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp73.708.128.282.308,00 dan Rp53.287.731.646.004,00, terjadi kenaikan sebesar Rp20.420.396.636.304,00 atau 38,32 persen.

Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan adalah dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BA 999.03 atau pengalihan dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan pengganggarannya atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Rincian dana kelolaan pada masing-masing BLU adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Instansi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	BLU PIP	1.650.994.290.716	1.600.453.340.644
2	BLU BPDLH (Dit. SMI)	2.865.844.788.381	2.924.438.479.445
3	BLU LPDB KEMENTERIAN KOPERASI	1.974.833.299.591	1.377.389.357.978
4	BLU LPMUKP	-	60.837.971.403
5	BLU LMAN	1.216.609.392.510	1.247.520.036.882
6	BLU BPDLH (PFB)	7.360.065.865.349	7.360.423.866.350
7	BLU BPDLH (*Mangrove*)	840.895.075.226	985.557.790.818
8	BLU LPDP (Dit. SMI)	57.798.885.397.535	37.731.110.629.484
9	BLU LDKPI	173.000	173.000
	JUMLAH	**73.708.128.282.308**	**53.287.731.646.004**

1. Dana Kelolaan pada BLU PIP

Dana Kelolaan BLU PIP yang belum digulirkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.650.994.290.716,00 dan Rp1.600.453.340.644,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp50.540.950.072,00 atau 3,16 persen dari tahun sebelumnya.

Adapun rincian penempatan dana kelolaan BLU PIP adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Bank	No. Rekening	Jumlah
1	BRI	0329-01-003827-30-6	2.297.881.743,77
2	BNI	2018220615	7.154.132.040,00
3	Mandiri	103-00-10816995	24.718.194.285,93
4	BTN (Deposito)	0001401400503687	321.600.000.000,00
5	BSI	7292781215	9.291.825.533,22
6	BRI (Deposito)	050701003666401	500.000.000.000,00
7	BRI (Deposito)	050701003667407	304.000.000.000,00
8	BSI (Deposito)	7000000223031859	482.400.000.000,00
Jumlah			**1.651.462.033.602,92**

Terdapat selisih nilai antara nilai buku dengan saldo pada rekening dana kelolaan sebesar Rp467.742.886,92 lebih besar nilai pada saldo rekening dikarenakan Jasa Giro dan Jasa Investasi yang belum dipindahbukukan ke rekening operasional sampai dengan akhir periode pelaporan.

2. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Dit. SMI)

Dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan dana kelolaan yang diserahterimakan dari BLU P3H. Nilai dana kelolaan BLU BPDLH per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.865.844.788.381,00 dan Rp2.924.438.479.445,00, terjadi

penurunan sebesar Rp58.593.691.064,00 atau 2,00 persen dari periode sebelumnya.

Dana tersebut dikelola dalam rekening dengan saldo per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Bank	No Rekening	Nilai
1	BRI Cabang Jakarta Kebayoran	0193-01-003531-30-4	22.362.441.026
2	BRI Cabang Jakarta Kebayoran	0193-01-000830-30-1	4.372.568.727
3	BNI Cabang Jakarta Menteng	1548674583	118.279.321.737
4	Mandiri Cabang Jakarta Thamrin	30206464485	200.000.000.000
5	Mandiri Cabang Jakarta Thamrin	1650200975283	200.000.000.000
6	BTN KC Kelapa Gading	21101400306322	100.000.000.000
7	Mandiri Cabang Jakarta Thamrin	30206446946	2.225.000.000.000
Jumlah			**2.870.014.331.490**

Terdapat selisih sebesar Rp4.169.543.109,00 antara saldo rekening dengan nilai dana kelolaan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyesuaian atas penerimaan dana pembayaran piutang dari debitur yang melebihi saldo outstanding pokok dan bunga. Dana ini seharusnya dikembalikan oleh BPDLH ke debitur ybs dan masih berada di rekening dana kelolaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp862.519.075,00;
b. Pendapatan investasi layanan penyaluran dana bergulir sektor kehutanan yang belum ditransfer ke Rekening Operasional Penerimaan sebesar Rp3.088.926.126,00;
c. Bunga Jasa Giro atas rekening Dana Kelolaan Dana Reboisasi yang belum dipindahbukukan ke Rekening Operasional Penerimaan. Bunga Jasa Giro ini belum diakui dan belum disahkan sebagai Pendapatan BLU sebesar Rp218.097.903,00;
d. Pembulatan Rp5,00.

3. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana bergulir Kementerian Koperasi

Nilai Dana Kelolaan Badan Layanan Umum LPDB- Kementerian Koperasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.974.833.299.591,00 dan Rp1.377.389.357.978,00, terjadi kenaikan sebesar Rp597.443.941.613,00 atau 43,38 persen. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan sebagai pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada mitra LPDB-KEMENTERIAN KOPERASI. Dana Kelolaan BLU terdiri dari pengembalian pokok dana bergulir dan program Kementerian Koperasi dan UKM pada saldo pengelolaan pokok dana bergulir BA 999.03.

Saldo Rekening Giro per 31 Desember 2025 sebesar Rp91.463.603.948,00 dan nilai deposito sebesar Rp1.890.800.000.000,00, dengan total nilai yang ada di rekening pokok sebesar Rp1.982.263.603.948,00, kemudian dilakukan rekonsiliasi sebesar minus Rp7.430.304.357,00. Pada nilai rekonsiliasi tersebut termasuk di dalamnya kas yang belum teridentifikasi sebesar Rp3.897.066.351,00 dikarenakan adanya pembayaran angsuran pokok namun tidak diketahui nama debiturnya, sehingga LPDB-KEMENTERIAN KOPERASI memerlukan waktu lebih untuk identifikasi atas pembayaran angsuran tersebut. Kemudian terdapat penyesuaian hasil rekonsiliasi sebesar Rp84.033.299.591,00.

Pada nilai dana kelolaan sebesar Rp1.974.833.299.591,00 nilai sebesar Rp20.730.361.429,00 merupakan pembayaran piutang beberapa koperasi dengan mencairkan klaim subrogasi. Adapun koperasi tersebut sebagai berikut:

a. Koperasi Kampus Unsoed dengan mencairkan klaim subrogasi melalui Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Jawa Tengah) sebesar Rp860.633.286,00;
b. KSU Monjari 45 sebesar Rp348.412.800,00 melalui Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrindo);

c. Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonesia melalui Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Riau) sebesar Rp784.606.643,00;
d. KSP Argo Sumbing Mandiri melalui Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Jawa Tengah) sebesar Rp373.000.000,00;
e. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt Mitra Umat melalui Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Jawa Tengah) sebesar Rp17.255.826.175,00;
f. Koperasi Produsen Mitra Usaha Perkasa melalui Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Sulawesi Selatan) sebesar Rp879.151.675,00; dan
g. Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia melalui Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Jawa Tengah) sebesar Rp228.730.850,00.

4. Dana Kelolaan pada BLU LPMUKP

Dana Kelolaan BLU LPMUKP yang belum Digulirkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp60.837.971.403,00. Terjadi penurunan Aset Lainnya berupa Dana Kelolaan Badan Layanan Umum sebesar Rp60.837.971.403,00 atau 100,00 persen karena meningkatnya realisasi pencairan Dana Bergulir.

Dari total nilai dana kelolaan tersebut, terdapat perbedaan nilai antara Dana Kelolaan yang tersaji di neraca dengan total nilai dana kelolaan pada rekening koran dan deposito per 31 Desember 2025 sebesar minus Rp9.597.845.019 ,00. Perbedaan tersebut terjadi karena:

a. Terdapat angsuran pokok yang terdapat pada rekening Operasional senilai Rp61.363.163,00. Nilai tersebut telah telah dipindahbukukan ke Rekening Dana Kelolaan pada tanggal 12 Januari 2026;
b. Terdapat angsuran jasa layanan yang terdapat pada rekening Dana Kelolaan senilai minus Rp140.018.853,00 yang belum dipindahbukukan ke rekening Operasional Penerimaan. Nilai tersebut telah telah dipindahbukukan ke Rekening Dana Kelolaan pada tanggal 12 Januari 2026;
c. Terdapat Kas Lainnya-BLU sebesar minus Rp1.650.000,00 pada rekening Dana Kelolaan, dan telah dipindahbukukan ke Rekening Operasional Penerimaan pada tanggal 13 Januari 2026;
d. Terdapat penyesuaian rekening atas pengembalian pemindahan saldo operasional pada dana kelolaan sebesar minus Rp9.519.941.329,00 yang telah dipindahbukukan ke rekening Operasional Penerimaan pada tanggal 9 Januari 2026;
e. Terdapat koreksi kelebihan pencairan dana bergulir sebesar Rp2.402.000,00 yang telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan BLU LPMUKP pada tanggal 9 Januari 2026.

5. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

Nilai dana kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.216.609.392.510,00 dan Rp1.247.520.036.882,00. Terjadi penurunan sebesar Rp30.910.644.372,00 atau 2,48 persen.

Pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan menyajikan dana yang digunakan oleh LMAN untuk *upgrade* aset kelolaan yang diperoleh melalui pembiayaan investasi APBNP TA 2015. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025, LMAN menggunakan dana sebesar Rp30.910.644.372,00 untuk melakukan *upgrade* aset kelolaan, baik dalam bentuk pekerjaan fisik maupun pekerjaan penunjang berupa perencanaan dan pengawasan.

Rincian mutasi pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nominal
Posisi per 31 Desember 2024	1.247.520.036.882
(-) Penggunaan dana untuk *upgrade* properti investasi eks BPPN	(5.201.262.159)
(-) Penggunaan dana untuk *upgrade* properti investasi eks PPA	(9.887.860.598)
(-) Penggunaan dana untuk *upgrade* aset properti investasi eks Pertamina	(1.397.946.514)
(-) Penggunaan dana untuk *upgrade* properti investasi eks HTBI	(6.576.203.640)
(-) Penggunaan dana untuk *upgrade* properti investasi lainnya (*heritage)*	(5.134.465.727)
(-) Penggunaan dana untuk *upgrade* properti eks BDL	(2.712.905.734)
Posisi per 31 Desember 2025	**1.216.609.392.510**

Penggunaan dana investasi untuk upgrade aset kelolaan dan penebusan HTBI yang dirinci per tahun adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nominal
Alokasi APBN-P TA 2015	1.500.000.000.000
(-) Penggunaan di tahun 2016	(26.734.113.000)
(-) Penggunaan di tahun 2017	(54.778.165.126)
(-) Penggunaan di tahun 2018	(11.908.277.761)
(-) Penggunaan di tahun 2019	(16.608.319.662)
(-) Penggunaan di tahun 2020	(65.868.718.321)
(-) Penggunaan di tahun 2021	(20.247.945.147)
(-) Penggunaan di tahun 2022	(17.056.125.398)
(-) Penggunaan di tahun 2023	(20.474.669.119)
(-) Penggunaan di tahun 2024	(18.803.629.584)
(-) Penggunaan di tahun 2025	(30.910.644.372)
Posisi per 31 Desember 2025	**1.216.609.392.510**

6. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (*Pooling Fund* Bencana (PFB))

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan Kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, BPDLH ditunjuk menjadi pengelola dana PFB. Selanjutnya, berdasarkan KMK nomor 393/KMK.06/2022 tanggal 28 September 2022, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BLU BPDLH ditetapkan menjadi KPA BUN BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PFB) dan dana DNS.

Dana kelolaan pada BLU BPDLH per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.360.065.865.349,00 dan Rp7.360.423.866.350,00, terjadi penurunan sebesar Rp358.001.001,00 atau 0,005 persen. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang berasal dari BA 999.03 pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana dan dana DNS, dengan rincian dana bersama penanggulangan bencana sebesar Rp7.300.000.000.000,00 dan dana DNS sebesar Rp60.065.865.349,00.

Dana Bersama Penanggulangan Bencana merupakan dana cadangan yang dikelola dengan mekanisme dana abadi. Dana Kelolaan Pokok diinvestasikan, untuk kemudian imbal hasil investasinya digunakan untuk mendanai kegiatan terkait bencana. Sesuai dengan *draft* peraturan teknis terkait pengelolaan dana ini, dalam hal tertentu, Dana Pokok dapat digunakan untuk pendanaan bencana. Dana Bersama

Penanggulangan Bencana (DBPB) / *Pooling Fund* Bencana (PFB) dicairkan dalam dua kali pencairan, yaitu sebesar Rp3.000.000.000.000,00 pada tahun 2022 dan Rp4.300.000.000.000,00 pada tahun 2023. Pada tahun 2025 tidak terdapat pengalokasian kembali atas dana PFB, sehingga per 31 Desember 2025 dana PFB berjumlah Rp7.300.000.000.000,00.

Dana Kelolaan *Debt for Nature Swap* (DNS) eks KLH merupakan Dana Kelolaan yang diserahterimakan dari PPA BUN DJKN ke KPA BUN BPDLH melalui BAST antara UAIP dan UAKPA BLU BPDLH Nomor BA-14/KN.3/2022 dan BAST24/BPDLH.2/2022 tanggal 2 November 2022. Nilai dana DNS pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.065.865.349,00.

7. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (*Mangrove*)

Dana kelolaan pada BLU BPDLH per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp840.895.075.226,00 dan Rp985.557.790.818,00, terdapat penurunan sebesar Rp144.662.715.592,00 atau 14,68 persen dari periode 2024. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang berasal dari BA 999.03 berupa Dana Rehabilitasi *Mangrove* yang belum disalurkan sesuai peruntukannya.

8. Dana Kelolaan pada BLU LPDP (UAKPA Dit. SMI)

Dana kelolaan pada BLU LPDP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp57.798.885.397.535,00 dan Rp37.731.110.629.484,00, terjadi kenaikan sebesar Rp20.067.774.768.051,00 atau 53,19 persen. Adapun rincian dana kelolaan BLU LPDP pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Hasil Pengembangan	31 Desember 2025
Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	
Instrumen Deposito	57.798.659.552.441
Selisih kurs belum terealisasi	225.845.094
Jumlah	**57.798.885.397.535**

9. Dana Kelolaan pada BLU LDKPI

Dana kelolaan pada BLU LDKPI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp173.000,00 dan Rp173.000,00, atau tidak terdapat pergerakan nilai dana kelolaan. Nilai tersebut merupakan sisa saldo atas penempatan *endowment fund* pada Surat Berharga Negara sebesar Rp38.615.692.000,00 yang bersumber dari saldo kas BLU LDKPI Tahun Anggaran 2024.

D.2.1.6.5. DANA JANGKA PANJANG

Posisi pos Dana Jangka Panjang pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp26.620.760.889.106,00 dan Rp28.528.648.017.150,00, terdapat penurunan sebesar Rp1.907.887.128.044 atau 6,69 persen.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, dana jangka panjang adalah dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional, yang dikelola oleh LMAN.

Pada tahun 2020, melalui surat nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara

pada Akhir Tahun Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan kebijakan penyajian atas dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional pada pos Dana Jangka Panjang (165211). Sebelumnya, penyajian atas dana tersebut dilakukan pada pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.

Mutasi tambah dan kurang untuk pos Dana Jangka Panjang di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian		Nominal
Posisi per 31 Desember 2024		28.528.648.017.150
(-)	Penggunaan dana untuk pendanaan pengadaan tanah PSN tahun 2025	(9.462.227.428.871)
+	Retur/pengembalian dana atas transaksi sebelum tahun 2025	7.359.507.827
+	Pencairan alokasi APBN TA 2025 melalui konversi saldo kas BLU	7.546.980.793.000
Posisi per 31 Desember 2025		**26.620.760.889.106**

Penerimaan dan penggunaan dana jangka panjang untuk pendanaan pengadaan tanah PSN yang dirinci per tahun sejak 2017-2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian		Nominal	Total
Pencairan Alokasi			
	Pencairan Alokasi APBN-P TA 2016	16.000.000.000.000	
	Pencairan Alokasi APBN-P TA 2017	32.050.560.000.000	
	Pencairan Alokasi APBN TA 2018	31.152.730.000.000	
	Pencairan Alokasi APBN TA 2019	12.000.000.000.000	
	Pencairan Alokasi APBN TA 2021	11.123.000.000.000	
	Pencairan Alokasi Pembiayaan dari SAL TA 2021	3.300.000.000.000	
	Pencairan Alokasi APBN TA 2022	28.840.000.000.000	
	Pencairan alokasi APBN TA 2023	25.424.000.000.000	
	Pencairan alokasi APBN TA 2024	7.500.000.000.000	
	Pencairan alokasi APBN TA 2025 (Konversi Surplus)	7.546.980.793.000	
	Total Pencairan Alokasi 2016 s.d. 31 Desember 2025		**174.937.270.793.000**
Penggunaan Dana			
Tahun 2017		(11.722.231.996.179)	
Tahun 2018		(21.251.698.468.616)	
Tahun 2019		(13.877.102.365.133)	
Tahun 2020		(19.914.234.201.505)	
Tahun 2021		(22.857.581.670.565)	
Tahun 2022		(16.045.203.917.692)	
Tahun 2023		(18.206.337.942.274)	
Tahun 2024		(14.987.251.420.886)	
Tahun 2025		(9.454.867.921.044)	
	Total Penggunaan Dana 2016 s.d. 2025		**(148.316.509.903.894)**
Posisi per 31 Desember 2025			**26.620.760.889.106**

Penggunaan dana jangka panjang pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang dirinci per proyek adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Proyek Air Baku	63.958.751.028	62.790.158.500
Proyek Bendungan	558.060.401.790	1.476.236.509.747
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara	1.006.604.463.668	2.106.409.275.212
Proyek Irigasi	5.344.339.110	19.822.077.282
Proyek Jalan Tol	7.633.690.295.051	11.246.731.987.455

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Proyek Perkeretaapian	187.209.670.397	75.261.412.690
Jumlah Penggunaan Dana s.d. 31 Desember 2025	**9.454.867.921.044**	**14.987.251.420.886**

D.2.1.6.6. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp774.434.594.852.983,00 dan Rp697.896.841.387.119,00, mengalami kenaikan sebesar Rp76.537.753.465.864,00 atau 10,97 persen. Nilai per tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari aset KKKS, aset PKP2B, aset lainnya BLBI, aset ABMA/T, aset BMN *Idle*, Aset Eks Pertamina dan Aset Lain-lain:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Aset Eks Pertamina	-	-
2.	Aset KKKS Hulu Migas pada PPBMN	113.727.862.989	243.028.148.370
3.	Aset KKKS Hulu Migas pada SKK Migas	742.617.496.205.629	668.740.738.490.428
4.	Aset KKKS Hulu Migas pada BPMA	14.439.114.513.600	14.371.313.426.237
5.	Aset KKKS Hulu Migas pada Dit PKN	130.000.000	-
6.	Aset PKP2B	3.072.565.981.405	3.063.230.520.563
7.	Aset Lainnya BLBI	12.527.751.904.243	10.230.620.927.132
8.	Aset ABMA/T	33.745.617.100	35.474.626.100
9.	Aset BMN Idle	12.836.831.034	14.113.278.239
10.	Aset Lain-lain	728.057.831.169	363.502.761.721
11.	Aset Lain-lain 999.03	850.733.727.777	764.944.939.588
12.	Aset Lain-lain 999.08	38.434.378.037	69.874.268.741
Jumlah		**774.434.594.852.983**	**697.896.841.387.119**

D.2.1.6.6.1. Aset Eks Pertamina

Aset Lainnya pada Eks Pertamina per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	Jumlah
Saldo Awal	**-**
Mutasi Tambah:	**158.890.299.964**
Hasil Inventarisasi Aset 2025	67.848.825.000
Reklasifikasi dari Properti Investasi ke Aset Lainnya karena ditetapkan status penggunaan kepada K/L	75.223.704.216
Transfer masuk penarikan sebagian Aset Kelolaan LMAN kepada Pengelola Barang sesuai Kepdirjen Nomor KEP-25/KN/2025 tanggal 5 Maret 2025 dan BAST Nomor BAST-1/LMAN/2025	15.817.770.748
Mutasi Kurang:	**(158.890.299.964)**
Hasil Inventarisasi Aset 2025 (Reklasifikasi menjadi Properti Investasi)	(67.848.825.000)
Transfer Keluar Aset Lainnya karena pelepasan aset melalui penetapan status penggunaan: BA-3/KN/2025	(29.222.538.000)

Aset Lainnya	Jumlah
Transfer Keluar Aset Lainnya karena pelepasan aset melalui penetapan status penggunaan: BA-4/KN/2025	(615.112.428)
Transfer Keluar Aset Lainnya karena pelepasan aset melalui penetapan status penggunaan: BA-5/KN/2025	(45.386.053.788)
Transfer Keluar Aset Lainnya karena pelepasan aset melalui penetapan status penggunaan: BA-6/KN/2025	(15.817.770.748)
Saldo Akhir	**-**

Penjelasan atas mutasi aset eks pertamina adalah sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp158.890.299.964,00 dengan rincian:
   a. Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2025 sebesar Rp67.848.825.000,00, terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Deskripsi *Field*	Berita Acara IP	Nominal
1)	IP pada *Field* Prabumulih	BA-01/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01	15.788.168.000
2)	IP pada *Field* Jatibarang	BA-02/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01	9.016.560.000
3)	IP pada *Field* Tanjung	BA-03/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01	14.357.645.000
4)	IP pada *Field* Prabumulih	BA-04/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01	821.752.000
5)	IP pada *Field* Prabumulih	BA-05/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01	3.848.673.000
6)	IP pada *Field* Subang	BA-06/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01	5.936.073.000
7)	IP pada *Field* Tarakan-Bunyu	BA-07/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2025 Lampiran LP-01	18.079.954.000
Jumlah			**67.848.825.000**

   b. Reklasifikasi dari Properti Investasi menjadi Aset Lainnya dikarenakan akan ditetapkan status penggunaan kepada K/L sebesar Rp75.223.704.216,00. Terdiri dari:

      1) Aset berlokasi di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 31/KM.6/KN.4/2024 tanggal 23 Februari 2024 dan BAST Nomor BA-3/KN/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebesar Rp29.222.538.000,00;

      2) Aset berlokasi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan KMK Nomor KEP-1/MK.6/2024 tanggal 19 November 2024 dan BAST Nomor BA-4/KN/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebesar Rp45.386.053.788,00;

      3) Aset berlokasi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sesuai KMK 29/KM.6/KN.4/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan BAST Nomor BA-5/KN/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebesar Rp615.112.428,00.

   c. Transfer masuk penarikan sebagian Aset Kelolaan LMAN kepada Pengelola Barang sesuai Kepdirjen Nomor KEP-25/KN/2025 tanggal 5 Maret 2025 dan BAST Nomor BAST-1/LMAN/2025 tanggal 14 Maret 2025 sebesar Rp15.817.770.748,00.

2. Mutasi kurang sebesar Rp158.890.299.964,00 dengan rincian:
   a. Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2025 yang direklasifikasi menjadi Properti Investasi sebesar Rp67.848.825.000,00;

   b. Pelepasan aset berlokasi di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan mekanisme penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 31/KM.6/KN.4/2024 tanggal 23 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-3/KN/2025 tanggal 12 Maret 2025 serta Keputusan Penghapusan Nomor KMK 157/MK/KN/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp29.222.538.000,00;

c. Pelepasan aset berlokasi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dengan mekanisme penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/KM.6/KN.4/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan BAST Nomor BA-5/KN/2025 tanggal 12 Maret 2025 serta Keputusan Penghapusan Nomor 16/MK/KN.4/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp615.112.428,00;

d. Pelepasan aset berlokasi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dengan mekanisme penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor KEP-1/MK.6/2024 tanggal 19 November 2024 dan BAST Nomor BA-4/KN/2025 tanggal 12 Maret 2025 serta Keputusan Penghapusan Nomor 158/MK/KN/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp45.386.053.788,00;

e. Pelepasan aset berlokasi di Kota Lhokseumawe, Aceh dengan mekanisme penetapan status penggunaan berdasarkan KMK nomor 85/KM.6/2025 tanggal 14 Maret 2025 dan 11/KM.6/KN.4/2025 tanggal 14 Maret 2025 serta BAST Nomor BA-6/KN/2025 tanggal 16 April 2025. Dengan Keputusan Penghapusan KMK Nomor 188/MK/KN/2025 tanggal 26 Mei 2025 dan KMK Nomor 18/MK/KN.4/2025, dengan total nilai sebesar Rp15.817.770.748,00.

D.2.1.6.6.2. Aset KKKS Hulu Migas pada PPBMN

Aset lainnya pada KKKS/Hulu Migas PPBMN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp113.727.862.989,00 dan Rp243.028.148.370,00. Aset KKKS terdiri atas Aset Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Aset	31 Des 2025	31 Des 2024
1.	Aset Tanah	-	-
2.	Aset Non Tanah HBM	-	3.388.629.974
3.	Aset Non Tanah HBI	8.507.400	215.608.537
4.	Aset Non Tanah MP	113.719.355.589	239.423.909.859
Jumlah		**113.727.862.989**	**243.028.148.370**

1. Aset Tanah

(dalam rupiah)

Saldo 1 Januari 2025	**-**
Mutasi Tambah	**130.000.000**
Alih Terima	130.000.000
Mutasi Kurang	**130.000.000**
Alih Serah	130.000.000
Saldo 31 Desember 2025	**-**

Penjelasan atas aset KKKS berupa aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal sebesar Rp0,00 merupakan saldo Aset Tanah per 31 Desember 2024;

b. Terdapat Mutasi Tambah atas KKKS Jadestone Energy Lemang Pte. Ltd. sebesar Rp130.000.000,00 karena alih terima aset sesuai surat Persetujuan Penyerahan BMN Hulu Minyak dan Gas Bumi pada KKKS Jadestone Energy (Lemang) Pte. Ltd. Nomor S-714/MK.6/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan mutasi kurang alih serah kepada Pengelola Barang sebesar Rp130.000.000,00 atas KKKS Jadestone Energy Lemang Pte. Ltd. sesuai BAST Nomor 1.BA/KS.01/SJN.A/2024 dan BA-5/KN.4/2024 Tanggal 1 Maret 2024

c. Saldo akhir aset tanah sebesar Rp0,00.

2. Aset Non Tanah Berupa HBM

(dalam rupiah)

Saldo 1 Januari 2025	**3.388.629.974**
Mutasi Tambah	**-**
Alih Terima	-
Mutasi Kurang	**3.388.629.974**
Pemindahtanganan/Penjualan Lelang	3.388.629.974
Saldo 31 Desember 2025	**-**

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal sebesar Rp3.388.629.974,00 merupakan saldo Aset HBM per 31 Desember 2024;

b. Tidak terdapat mutasi tambah HBM pada tahun 2025;

c. Mutasi kurang HBM sebesar Rp3.388.629.974,00 berasal dari:
   1) Pemindahtanganan atau penjualan lelang HBM Eks KKKS Repsol Andaman B.V sebesar Rp1.500.615.918,00 sesuai risalah lelang nomor 327/08.03/2025-01 tanggal 02 Juni 2024 serta SK Penghapusan Nomor 812.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 10 Juli 2025;
   2) Pemindahtanganan atau penjualan lelang HBM Eks KKKS Eni Bukat LTD. sebesar Rp1.888.014.056,00 sesuai risalah lelang nomor 276/06.02/2025-01 17 September 2025 serta SK Penghapusan nomor 45.K/BN.09/SJN/2026 tanggal 10 Januari 2026.

d. Saldo akhir aset HBM sebesar Rp0,00.

3. Aset Non Tanah Berupa HBI

(dalam rupiah)

Saldo 1 Januari 2025	**215.608.537**
Mutasi Tambah	**8.507.400**
Alih Terima	8.507.400
Mutasi Kurang	**215.608.537**
Pemindahtanganan/Penjualan Lelang	215.608.537
Saldo 31 Desember 2025	**8.507.400**

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal sebesar Rp215.608.537,00 merupakan saldo Aset HBI per 31 Desember 2024;

b. Mutasi Tambah sebesar Rp8.507.400,00 berasal dari alih terima karena penyerahan aset HBI dari KKKS PT. Pertamina Hulu Energi Metana Sumatera 7 kepada KESDM sebesar USD731,12 atau sebesar Rp8.507.400,00 sesuai BAST nomor 144.BA/BN.05/SJA.4/2025 tanggal 21 April 2025;

c. Mutasi Kurang sebesar Rp215.608.537,00 berasal dari Pemindahtanganan/ Penjualan Lelang aset HBI dari KKKS PT. Pertamina Hulu Energi Metan Tanjung II sesuai risalah lelang nomor 516/08.03/2025-01 tanggal 30 Juli 2025 serta SK Penghapusan nomor 20.K/BN.09/SJN/2026 tanggal 7 Januari 2026;

d. Saldo akhir aset HBI sebesar Rp8.507.400,00.

4. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

(dalam rupiah)

Uraian	USD	Nilai Konversi Rupiah
Saldo Awal 1 Januari 2025*	**14.814.002,59**	**239.423.909.859**
Mutasi Tambah	**6.776.269,55**	**113.719.355.589**
Alih Terima**	6.776.269,55	113.719.355.589
Mutasi Kurang	**14.814.002,59**	**248.608.590.847**

Uraian	USD	Nilai Konversi Rupiah
Pemindahtanganan/Penjualan Lelang**	14.640.030,83	245.688.997.390
Alih Kelola Serah**	173.970,76	2.919.577.295
Koreksi*	1,00	16.162
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	**6.776.269,55**	**104.534.674.601**
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2025		9.184.680.988
Saldo Akhir 31 Desember 2025**	**6.776.269,55**	**113.719.355.589**

Ket : * menggunakan kurs tengah Transaksi BI pada 31 Desember 2024 (Rp16.162/US$)
** menggunakan kurs tengah Transaksi BI pada 31 Desember 2025 (Rp16.782/US$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

a. Saldo Awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2024 sebesar USD14,814,002.59 atau setara Rp239.423.909.859,00 (kurs per 31 Desember 2024 adalah Rp16.162/USD);

b. Mutasi Tambah berasal dari alih terima sebesar USD6,776,269.55 atau setara dengan Rp113.719.355.589,00 karena penyerahan dari:

   1) KKKS Vico CBM LTD kepada KESDM sebesar USD6,468,183.08 atau setara dengan Rp108.549.048.449,00 sesuai BAST nomor 143.BA/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 21 April 2025;

   2) KKKS PHE Metana Sumatera 1 kepada KESDM sebesar USD254,813.21 atau setara dengan Rp4.276.275.290,00 sesuai BAST nomor 145.BA/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 21 April 2025;

   3) KKKS PHE Metana Sumatera 7 kepada KESDM sebesar USD53,273.26 atau setara dengan Rp894.031.850,00 sesuai BAST nomor 144.BA/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 21 April 2025.

c. Mutasi Kurang sebesar USD14,814,002.59 atau setara dengan Rp248.608.590.847,00 berasal dari penjualan aset MP melalui lelang, alih kelola serah dan koreksi dengan masing-masing rincian:

   1) Pemindahtanganan/ Penjualan Lelang aset Material Persediaan dari KKKS Eni Bukat LTD sebesar USD9,068,518.74 atau setara dengan Rp152.187.881.495,00 sebagaimana tercantum pada Risalah Lelang nomor 112/13.02/2025-01 30 Juli 2025, 119/13.01/2025-01 tanggal 1 Agustus 2025 dan 215/13.02/2025-01 tanggal 17 Desember 2025 SK Penghapusan Nomor 1316.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 22 Desember 2025.

   2) Pemindahtanganan/ Penjualan Lelang aset Material Persediaan dari KKKS CBM Sekayu sebesar USD387,573.43 atau setara dengan Rp6.504.257.303,00 sebagaimana tercantum pada Risalah Lelang nomor 234/04.02/2025-01 tanggal 17 Juli 2025 dan SK Penghapusan Nomor 1081.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 22 September 2025.

   3) Pemindahtanganan/ Penjualan Lelang aset Material Persediaan dari KKKS PHE Metana Tanjung II sebesar USD35,889.05 atau setara dengan Rp602.290.037,00 sebagaimana tercantum pada Risalah Lelang nomor 309/12.03/2025-01 tanggal 21 Agustus 2025 dan SK Penghapusan Nomor 21.K/BN.09/SJN/2026 tanggal 7 Januari 2026.

   4) Pemindahtanganan/ Penjualan Lelang aset Material Persediaan dari KKKS Repsol Andaman sebesar USD5,148,049.61 atau setara dengan Rp86.394.568.555,00 sebagaimana tercantum pada Risalah Lelang Nomor: 156/04.02/2025-01 tanggal 16 Mei 2025 dan SK Penghapusan Nomor 807.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 9 Juli 2025.

   5) Alih serah ke SKK Migas atas aset Material Persediaan dari KKKS Medco E&P Bengara ke Texcal Energy Bengara sebesar USD173,970.76 atau setara dengan Rp2.919.577.295,00

sebagaimana tercantum dalam SK Penggunaan Nomor 220.K/BN.03/SJN.A/2025 tanggal 21 Februari 2025.

6) Koreksi saldo awal atas aset Material Persediaan Eks KKKS Medco E&P Bengara sebesar USD1 atau setara Rp16.162,00 disesuaikan berdasarkan BAST.

d. Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS per 31 Desember 2025 senilai USD6,776,269.55 yang jika dikonversikan dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2025 yaitu setara dengan Rp113.719.355.589,00. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan penyesuaian tambah selisih kurs sebesar Rp9.184.680.988,00.

D.2.1.6.6.3. Aset KKKS Hulu Migas pada SKK Migas

Aset KKKS Hulu Migas pada SKK Migas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp742.617.496.205.629,00 dan Rp668.740.738.490.428,00. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Aset	31 Des 2025	31 Des 2024
1.	Aset Tanah	47.933.077.574.918	45.574.688.348.898
2.	Aset Non Tanah HBM	665.329.985.665.208	593.583.489.821.100
3.	Aset Non Tanah HBI	139.266.871.194	132.223.585.163
4.	Aset Non Tanah MP	29.215.166.094.309	29.450.336.735.267
Jumlah		**742.617.496.205.629**	**668.740.738.490.428**

A. Aset Tanah

(dalam rupiah)

Saldo 1 Januari 2025	**45.574.688.348.898**
Mutasi Tambah	**2.491.630.236.748**
Pengadaan Tanah Tahun Sebelumnya	518.140.874.007
Koreksi Pencatatan	181.056.904.617
Koreksi Tambah Hasil Ip	1.730.554.939.000
Alih Terima Dari KKKS	-
Koreksi Tambah Sertifikasi	61.877.519.124
Mutasi Kurang	**133.241.010.728**
Koreksi Pencatatan	11.322.978.207
Alih Serah Kepada KKKS	-
Koreksi Kurang Sertifikasi	68.628.797.500
Alih Serah Kepada Negara	3.985.391.457
Alih Serah Kepada Negara Tahun Sebelumnya	49.303.843.564
Saldo 31 Desember 2025	**47.933.077.574.918**

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar Rp45.574.688.348.898,00 merupakan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 (*audited*);
2. Mutasi tambah sebesar Rp2.491.630.236.748,00 yang terdiri dari:
   a. Pengadaan Tanah dengan tahun perolehan sebelum tahun 2025 sebesar Rp518.140.874.007,00;
   b. Koreksi pencatatan sebesar Rp181.056.904.617,00;
   c. Koreksi tambah nilai aset sebesar Rp1.730.554.939.000,00;

d. Koreksi Tambah Sertifikasi sebesar Rp 61.877.519.124,00.

3. Mutasi Kurang sebesar Rp133.241.010.728,00 yang berasal dari:
   a. Koreksi Kurang nilai perolehan Tanah sebesar Rp11.322.978.207,00;
   b. Koreksi Kurang Sertifikasi sebesar Rp68.628.797.500,00;
   c. Alih Serah kepada Negara sebesar Rp3.985.391.457,00;
   d. Alih Serah kepada Negara Tahun Sebelumnya Rp49.303.843.564,00.
4. Saldo akhir aset tanah sebesar Rp47.933.077.574.918,00.

B. Aset Non Tanah

B.1. Aset Non Tanah Berupa HBM

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**593.583.489.821.100**
Mutasi Tambah:	**79.066.998.098.989**
PIS/Pengadaan Tahun Berjalan	22.395.465.786.988
PIS/Pengadaan Tahun Sebelumnya	47.907.657.418.730
Koreksi Tambah	5.888.877.790.117
Transfer In	410.057.765
Selisih Pembulatan	348.183
Subsequent Expenditure	2.874.586.697.206
Mutasi Kurang:	**7.320.502.254.881**
Penghapusan	153.627.680.987
Transfer Out	16.348.276.195
Selisih Pembulatan	280.828
Koreksi Kurang	6.374.470.590.267
Dalam Proses Penghapusan	776.055.426.604
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**665.329.985.665.208**

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar Rp593.583.489.821.100,00 merupakan saldo aset HBM per 31 Desember 2024 (*audited*).
2. Mutasi tambah HBM sebesar Rp79.066.998.098.989,00 berasal dari:
   a. Pembelian HBM pada Tahun 2025 sebesar Rp22.395.465.786.988,00;
   b. Penambahan HBM baru dengan tahun perolehan sebelum Tahun 2025 yang baru dicatat pada tahun 2025 sebesar Rp47.907.657.418.730,00;
   c. Koreksi tambah nilai perolehan HBM sebesar Rp5.888.877.790.117,00 berasal dari 44 KKKS;
   d. *Transfer in* sebesar Rp410.057.765,00;
   e. Selisih pembulatan sebesar Rp348.183,00;
   f. *Subsequent Expenditure* sebesar Rp2.874.586.697.206,00.
3. Mutasi kurang HBM sebesar Rp7.320.502.254.881,00 berasal dari:
   a. Penghapusan sebesar Rp153.627.680.987,00 merupakan penghapusan HBM berdasarkan surat hapus buku SKK Migas yang telah laku lelang;
   b. *Transfer out* sebesar Rp16.348.276.195,00;

c. Selisih Pembulatan sebesar Rp280.828,00;

d. Koreksi kurang nilai perolehan HBM yang antara lain berasal dari koreksi nilai AFE sebesar Rp6.374.470.590.267,00;

e. Terdapat HBM yang sudah laku lelang yang dijelaskan dalam risalah lelang namun belum diterbitkan surat keputusan penghapusan dan/atau surat hapus bukunya dan aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Menteri ESDM sebesar Rp776.055.426.604,00.

4. Saldo akhir aset non tanah HBM sebesar Rp665.329.985.665.208 ,00.

B.2. Aset Non Tanah Berupa HBI

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**132.223.585.163**
Mutasi Tambah:	**16.066.741.274**
Koreksi Saldo Awal	-
PIS/Pengadaan Tahun Berjalan	6.578.181.942
PIS/Pengadaan Tahun Sebelumnya	334.744.538
Koreksi Tambah	9.153.814.794
Alih Terima	-
Mutasi Kurang:	**9.023.455.243**
Penghapusan	396.997.448
Alih Serah	8.507.400
Koreksi Kurang	8.617.950.395
Dalam Proses Penghapusan	-
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**139.266.871.194**

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar Rp132.223.585.163,00 merupakan saldo aset HBI per 31 Desember 2024 (*audited*);
2. Mutasi tambah sebesar Rp16.066.741.274,00 berasal dari:
   a. Pembelian HBI pada Tahun 2025 sebesar Rp6.578.181.942,00;
   b. Pembelian HBI baru dengan tahun perolehan sebelum Tahun 2025 yang baru dicatat pada tahun 2025 sebesar Rp334.744.538,00;
   c. Koreksi tambah nilai perolehan HBI yang antara lain berasal dari *late charges* dan koreksi nilai AFE sebesar Rp9.153.814.794,00.
3. Mutasi Kurang sebesar Rp9.023.455.243,00 berasal dari:
   a. Penghapusan sebesar Rp396.997.448,00 merupakan penghapusan HBM berdasarkan surat hapus buku SKK Migas yang telah laku lelang;
   b. Terdapat Nilai Alih Serah HBI yang berasal dari KKKS PT Pertamina Hulu Energi Metana Sumatera 7 sebesar Rp8.507.400,00;
   c. Koreksi kurang nilai perolehan HBI yang antara lain berasal dari koreksi biaya perolehan HBI sebesar Rp8.617.950.395,00.
4. Saldo Akhir aset non tanah HBI sebesar Rp139.266.871.194,00.

B.3. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

(dalam rupiah)

Deskripsi	USD	Nilai Konversi Rupiah
Saldo Awal 1 Januari 2025	**1.822.196.308**	**29.450.336.735.267**
Mutasi Tambah :	**1.451.678.533**	**24.333.884.995.128**
Penyesuaian Saldo Awal Tambah*	45.458.291	734.696.899.711
Pengadaan	1.340.184.275	22.490.972.507.428
Pengembalian MP *Non Capital*	14.538.713	243.988.679.049
Pengembalian MP *Capital*	25.118.761	421.543.046.965
Transfer Masuk	26.204.522	439.764.284.680
Alih Kelola Terima	173.971	2.919.577.295
Mutasi Kurang :	**1.533.011.649**	**25.681.023.053.493**
Penyesuaian Saldo Awal Kurang*	26.168.365	422.933.116.256
Pemakaian *Capital*	638.855.694	10.721.276.248.815
Pemakaian *Non Capital*	719.313.284	12.071.515.534.004
Transfer Keluar	37.356.915	626.923.746.322
Penghapusan*	47.990.400	775.620.841.083
Alih Kelola Serah	6.776.270	113.719.355.589
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Alih Kelola *Capital*	21.195.754	355.707.138.441
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Alih Kelola *Non Capital*	32.241.965	541.084.661.975
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Lain *Capital*	347.294	5.828.292.557
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Lain *Non Capital*	2.765.708	46.414.118.451
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	**1.740.863.192**	**28.103.198.676.902**
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2025	-	1.111.967.417.407
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**1.740.863.192**	**29.215.166.094.309**

Ket:

* menggunakan kurs tengah BI pada 31 Desember 2024 (Rp16.162/US$)

Selain (*) menggunakan kurs tengah BI pada 31 Desember 2025 (Rp16.782/US$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar USD1,822,196,308.00 atau setara dengan Rp29.450.336.735.267,00 merupakan saldo Material Persediaan per 31 Desember 2024 (*audited*);
2. Mutasi tambah sebesar USD1,451,678,533.00 atau setara dengan Rp24.333.884.996.128,00 berasal dari:
    a. Koreksi tambah atas saldo awal sebesar USD45,458,291.00 atau setara dengan Rp734.696.899.711,00 yang terjadi pada 41 KKKS;
    b. Pengadaan Material Persediaan sebesar USD1,340,184,275.00 atau setara dengan Rp22.490.972.507.428,00 yang terjadi pada 70 KKKS;
    c. Pengembalian atas Material Persediaan Non Capital sebesar USD14,538,713.00 atau setara dengan Rp243.988.679.049,00 yang terjadi pada 19 KKKS;
    d. Pengembalian atas Material Persediaan Capital sebesar USD25,118,761.00 atau setara dengan Rp421.543.046.965,00 yang terjadi pada 19 KKKS;
    e. Transfer Masuk sebesar USD26,204,522.00 atau setara Rp439.764.284.680,00 yang terjadi pada 45 KKKS;

f. Alih Kelola Terima sebesar USD173,971.00 atau setara dengan Rp2.919.577.295,00.

3. Mutasi kurang sebesar USD1,533,011,649.00 atau setara dengan Rp25.681.023.053.493,00 berasal dari:
   a. Koreksi kurang atas saldo awal sebesar USD26,168,365.00 atau setara dengan Rp422.933.116.256,00 yang terjadi pada 39 KKKS;
   b. Pemakaian atas Material Persediaan capital sebesar USD638,855,694.00 atau setara dengan Rp10.721.276.248.815,00 yang terjadi pada 60 KKKS;
   c. Pemakaian atas Material Persediaan non-capital sebesar USD719,313,284.00 atau setara dengan Rp12.071.515.534.004,00 yang terjadi pada 63 KKKS;
   d. Transfer Keluar sebesar USD37,356,915.00 atau setara dengan Rp626.923.746.322,00 yang terjadi pada 60 KKKS;
   e. Penghapusan sebesar USD47,990,400.00 atau setara dengan Rp775.620.841.083,00 terjadi pada 17 KKKS;
   f. Alih Kelola Serah sebesar USD6,776,270.00 atau setara dengan Rp113.719.355.589,00 pada 3 KKKS;
   g. Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Alih Kelola Capital sebesar USD21,195,754.00 atau setara dengan Rp355.707.138.441,00;
   h. Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Alih Kelola Non Capital sebesar USD32,241,965.00 atau setara dengan Rp541.084.661.975,00;
   i. Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Lain Capital sebesar USD347,294.00 atau setara dengan Rp5.828.292.557,00;
   j. Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Lain Non Capital sebesar USD2,765,708.00 atau setara dengan Rp46.414.118.451,00.

4. Saldo akhir material persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar USD1,740,863,192.00 yang jika dikonversikan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2025 (Rp16.782,00/US$) setara dengan Rp29.215.166.094.309,00 menyebabkan terjadinya pendapatan selisih kurs sebesar Rp1.111.967.417.407,00.

D.2.1.6.6.4. Aset KKKS Hulu Migas pada BPMA

Aset KKKS Hulu Migas pada BPMA per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp14.439.114.513.600,00 dan Rp14.371.313.426.237,00. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Aset	31 Des 2025	31 Des 2024
1.	Aset Tanah	548.916.162.693	547.251.182.593
2.	Aset Non Tanah HBM	12.452.855.326.803	12.449.928.456.831
3.	Aset Non Tanah HBI	2.133.180.830	2.021.681.631
4.	Aset Non Tanah MP	1.435.209.843.274	1.372.112.105.182
Jumlah		**14.439.114.513.600**	**14.371.313.426.237**

A. Aset Tanah

Mutasi tanah meliputi:

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**547.251.182.593**
Mutasi Tambah:	**1.664.980.600**
PIS tahun sebelumnya	-
PIS tahun berjalan	1.664.980.600
Mutasi Hasil IP	-
Mutasi Kurang:	**500**
Koreksi Pencatatan	500
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**548.916.162.693**

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp547.251.182.593,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2024;
2. Mutasi tambah sebesar Rp1.664.980.600,00 merupakan pengadaan aset tanah tahun 2025 di KKKS Medco E&P Malaka;
3. Mutasi kurang senilai Rp500,00 dan mutasi tambah seluas 3m² merupakan hasil verifikasi dokumen perolehan tanah pada KKKS PT Medco E&P Malaka;
4. Saldo akhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp548.916.162.693,00.

B. Aset Non Tanah

B.1. Aset Non Tanah Berupa HBM

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**12.449.928.456.831**
Mutasi Tambah:	**4.345.334.422**
Koreksi Saldo Awal	-
PIS/Pengadaan Tahun Berjalan	1.028.665.064
PIS/Pengadaan Tahun Sebelumnya	2.877.757.467
Transfer In	438.911.891
Mutasi Kurang:	**1.418.464.450**
Koreksi	3.071.241
Penghapusan	1.415.393.209
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**12.452.855.326.803**

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp12.449.928.456.831,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2024;

b. Mutasi tambah sebesar Rp4.345.334.422,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) PIS/Pengadaan Tahun Berjalan pada KKKS Aceh Energy sebesar Rp69.616.690,00;
   2) PIS/Pengadaan Tahun Berjalan pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp959.048.374,00;
   3) PIS/Pengadaan Tahun Sebelumnya pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp1.757.027.457,00;
   4) PIS/Pengadaan Tahun Sebelumnya pada KKKS Triangle Pase sebesar Rp1.120.730.010,00;
   5) *Transfer In* pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp438.911.891,00.

c. Mutasi kurang sebesar Rp1.418.464.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Koreksi Nilai Perolehan/ Nilai Wajar pada KKKS ONWA Pte Ltd sebesar Rp3.071.241,00 dikarenakan penyesuaian tanggal PIS dari KKKS;
2) Penghapusan aset pada KKKKS Eks. Pertamina Hulu Energi NSB sebesar Rp1.415.393.209,00.

d. Saldo akhir 31 Desember 2025 sebesar Rp12.452.855.326.803,00.

B.2. Aset Non Tanah Berupa HBI

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**2.021.681.631**
Mutasi Tambah:	**112.659.071**
PIS/Pengadaan Tahun Berjalan	91.547.735
PIS/Pengadaan Tahun Sebelumnya	-
Koreksi	21.111.336
Mutasi Kurang:	**1.159.872**
Koreksi Kurang	1.159.872
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**2.133.180.830**

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp2.021.681.631,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2024;

b. Mutasi tambah sebesar Rp112.659.071,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) PIS Pada KKKS Pema Global Energi sebesar Rp91.547.735,00;
   2) Reklas Hasil IP pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp2.503.000,00;
   3) Koreksi Nilai Perolehan/ Nilai Wajar pada KKKS ONWA Pte Ltd sebesar Rp315.365,00 dikarenakan penyesuaian tanggal PIS dari KKKS;
   4) Koreksi pada KKKS Aceh Energy sebesar Rp18.292.971,00 atas perhitungan total nilai wajar pada Audited 2024.

c. Mutasi kurang Koreksi Nilai Perolehan/ Nilai Wajar pada KKKS ONWA Pte Ltd sebesar Rp1.159.872,00 dikarenakan penyesuaian tanggal PIS dari KKKS;

d. Saldo akhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp2.133.180.830,00.

B.3. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

(dalam rupiah)

Uraian	USD	Nilai konversi rupiah
Saldo Awal 1 Januari 2025	**84.897.420,19**	**1.372.112.105.182**
Mutasi Tambah:	**4.037.051,08**	**67.749.791.226**
Penyesuaian Saldo Awal Tambah*	-	-
Pengadaan**	3.979.536,49	66.784.581.376
Pengembalian *Non Capital***	-	-
Transfer Masuk**	57.514,59	965.209.850
Mutasi Kurang:	**(3.413.684,52)**	**(57.288.453.648)**
Penyesuaian Saldo Awal Kurang*	(0,01)	(200)
Pemakaian *Capital***	(690.070,13)	(11.580.756.922)
Pemakaian *Non Capital***	(2.545.689,79)	(42.721.766.056)
Transfer Keluar *Capital***	(177.924,59)	(2.985.930.470)
Alih Kelola Serah	-	-
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	**85.520.786,75**	**1.382.573.442.760**
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2025		52.636.400.514
Saldo Akhir 31 Desember 2025		**1.435.209.843.274**

Ket: * menggunakan kurs tengah pada 31 Desember 2024 (Rp16.162/US$)
** menggunakan kurs tengah pada 31 Desember 2025 (Rp16.782/US$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2024 sebesar USD84,897,420.19 atau setara Rp1.372.112.105.182,00.

b. Mutasi tambah sebesar USD4,037,051.08 atau setara dengan Rp67.749.791.226,00 berasal dari:

   1) Pengadaan sebesar USD3,979,536.49 atau setara dengan Rp66.784.581.376,00 merupakan Pengadaan dari KKKS Medco E&P Malaka;

   2) Transfer Masuk sebesar USD57,514.59 atau setara dengan Rp965.209.850,00 merupakan Transfer Masuk pada KKKS Medco E&P Malaka.

c. Mutasi kurang sebesar USD3,413,684.52 atau setara dengan Rp57.288.453.648,00 berasal dari:

   1) Penyesuaian Saldo Awal sebesar USD0,01 atau setara dengan Rp200,00;

   2) Pemakaian Capital sebesar USD690,070.13 atau setara dengan Rp11.580.756.922,00 merupakan pemakaian Aset MP dari KKKS Medco E&P Malaka;

   3) Pemakaian Non-capital sebesar USD2,545,689.79 atau setara dengan Rp42.721.766.056,00 merupakan pemakaian Aset MP dari KKKS Medco E&P Malaka;

   4) Transfer Capital sebesar USD177,924.59 atau setara dengan Rp2.985.930.470,00 merupakan transfer aset MP sebagai antar KKKS Medco E&P Malaka ke KKKS Medco E&P Grissik Ltd & Medco Energi Bangkanai Ltd.

d. Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan BPMA per 31 Desember 2025 senilai USD85,520,786.75 yang jika dikonversikan dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2025 yaitu setara dengan Rp1.435.209.843.274,00. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan penyesuaian tambah selisih kurs sebesar Rp52.636.400.514,00.

D.2.1.6.6.5. BMN Hulu Migas Pada DJKN

Aset Lainnya BMN Hulu Migas Pada DJKN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp130.000.000,00 dan Rp0,00. Aset tersebut merupakan aset eks Jadestone Energi (Lemang) Pte. Ltd. yang dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hulu Migas Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Jadestone Energi (Lemang) Pte. Ltd. (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 1.BA/KS.01/SJN.A/2024 dan Nomor BA-5/KN.4/2024 tanggal 1 Maret 2024. Pencatatan aset ini sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN Nomor T-115/BN.10/SJA.2.1/2026 tanggal 28 Januari 2026 hal Pencatatan Mutasi BMN Berupa Tanah Eks KKKS Jadestone Energy (Lemang) Pte. Ltd. Yang Telah Diserahkan kepada Pemerintah.

D.2.1.6.6.6. Aset PKP2B

Aset Lainnya PKP2B per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.072.565.981.405,00 dan Rp3.063.230.520.563,00. Penjelasan atas Aset PKP2B sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Aset	31 Des 2025	31 Des 2024
1.	Aset Tanah	442.761.205.303	442.761.205.303
2.	Aset Non Tanah	2.629.804.776.102	2.620.469.315.260
Jumlah		**3.072.565.981.405**	**3.063.230.520.563**

A. Penjelasan Aset Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**442.761.205.303**
Mutasi Tambah:	**-**
Penambahan BMN Tanah	-
Koreksi Tambah	-
Mutasi Kurang:	-
Koreksi Kurang	-
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**442.761.205.303**

1. Saldo awal merupakan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 (*audited*) sebesar Rp442.761.205.303,00 pada PT Berau Coal;
2. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang pada aset tanah sampai pada tahun 2025,00;
3. Nilai Aset tanah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp442.761.205.303,00 yaitu aset tanah yang berasal dari PT Berau Coal.

B. Penjelasan Aset Non Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**2.620.469.315.260**
Mutasi Tambah:	**9.698.108.898**
Penambahan Aset Baru	9.698.108.898
Koreksi Tambah	-
Mutasi Kurang:	**362.648.056**
Koreksi Pencatatan	362.648.056
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**2.629.804.776.102**

Penjelasan atas aset yang disajikan dalam neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan saldo Aset Non Tanah per 31 Desember 2024 (*audited*) sebesar Rp2.620.469.315.260,00 pada PT Berau Coal;
2. Mutasi tambah Aset Non Tanah yaitu adanya pembelian aset pada PT Berau Coal sebesar Rp9.698.108.898,00 yang terdiri dari 56 aset baru serta 1 *line item* kapitalisasi pada 28 Februari dan 30 April 2025 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN PKP2B PT Berau Coal Semester I TA 2025 Nomor 233.BA/BN.10/SJA2.2/2025 tanggal 8 Juli 2025. Sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2022, pembelian yang dilakukan oleh PT Berau Coal selaku pemegang IUPK pada tahun 2025 tetap diakui dan dicatat sebagai Barang Milik Negara;
3. Mutasi kurang Aset Non Tanah PT Berau Coal dikarenakan aset tersebut ekstrakomptabel sebesar Rp362.648.056,00;
4. Saldo akhir 31 Desember 2025 Aset Non Tanah PKP2B sebesar Rp2.629.804.776.102,00 yang berasal dari PT Berau Coal.

D.2.1.6.6.7. Aset Lainnya Eks BLBI

Jumlah aset lainnya eks BLBI per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.527.751.904.243,00 sedangkan per tangal 31 Desember 2024 sebesar Rp10.230.620.927.132,00, atau terjadi kenaikan sebesar Rp2.297.130.977.111,00. Aset eks BPPN terdiri dari aset inventaris, aset properti eks BPPN, aset nostro, surat berharga eks BPPN dan aset saham eks BPPN. Rincian aset eks BPPN per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	Mutasi	31 Desember 2024
1	Aset Inventaris	5.206.248.830	(3.367.967)	5.209.616.797
2	Aset Properti eks BPPN	4.351.491.637.114	1.033.629.203.499	3.317.862.433.615
3	Aset Nostro	2.336.718.564	(584.179.642)	2.920.898.206
4	Surat Berharga Eks BPPN	559.294.077.458	18.616.681.854	540.677.395.604
5	Aset Saham Eks BPPN	37.068.044.154	(10.208.270.582)	47.276.314.736
6	Aset Lain-lain	7.572.355.178.123	1.255.680.909.949	6.316.674.268.174
	Jumlah	**12.527.751.904.243**	**2.297.130.977.111**	**10.230.620.927.132**

1. Aset Inventaris Eks BPPN

Aset inventaris adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi/BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Aset Inventaris yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2025 adalah sejumlah 9.973 unit dengan nilai sebesar Rp5.206.248.830,00 sedangkan 31 Desember 2024 adalah sejumlah 10.059 unit dengan nilai sebesar Rp5.209.616.797,00 sehingga terdapat penurunan nilai sebesar Rp3.367.967,00 yang disebabkan oleh adanya penambahan jumlah aset yang berlokasi di Jl. Raden Intan, Lampung (Kanwil V DJKN) berdasarkan hasil inventarisasi, selanjutnya laku lelang sesuai RLNo.159/05.02/2025 tanggal 28 Mei 2025.

Selain itu terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu 18 unit aset dengan nilai Rp33.700.000,00 yang terletak di Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan status penggunaannya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 574/KN/2022 tanggal 23 Desember 2022.

Rincian Aset Inventaris Eks BPPN terlampir pada Lampiran LD18.

2. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti eks BPPN yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*).

Jumlah aset properti eks BPPN per 31 Desember 2025 sejumlah 1.336 aset dengan nilai sebesar Rp4.351.491.637.114,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sejumlah 1.382 aset dengan nilai sebesar Rp3.317.862.433.615,00.

Rincian mutasi aset properti eks BPPN adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kelompok	31 Desember 2025		Mutasi		31 Desember 2024	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	843	1.491.264.639.024	(30)	274.467.605.566	873	1.216.797.033.458
2	Temuan BPK	361	2.196.453.692.076	(2)	576.889.485.207	363	1.619.564.206.869
3	BJDA (Verifikasi 2009)	58	433.402.868.179	(4)	203.479.950.879	62	229.922.917.300
4	Settlement	-	-	-	-	-	-
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-	-	-	-	-
	Sinar Bonana	2	46.613.347.327	-	-	2	46.613.347.327
6	Griya Potensa	2	295.000.000	-	-	2	295.000.000
7	*Covernote*	70	183.462.090.508	(10)	(21.207.838.153)	80	204.669.928.661
Jumlah		**1.336**	**4.351.491.637.114**	**(46)**	**1.033.629.203.499**	**1.382**	**3.317.862.433.615**

Perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks BPPN disebabkan oleh adanya perubahan nilai, penyerahkelolaan ke LMAN dan penetapan status penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga beserta rincian jumlah dan nilai aset properti eks BPPN per 31 Desember 2025 tersaji pada Lampiran LD19 dan Pengungkapan Penting Lainnya.

3. Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.336.718.564,00 dan Rp2.920.898.206,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp584.179.642,00. Rincian mutasi aset nostro per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraia	31 Desember 2025	Mutasi	31 Desember 2024
Aset Nostro di Bank Ganesha	2.336.718.564	(584.179.642)	2.920.898.206
Jumlah	**2.336.718.564**	**(584.179.642)**	**2.920.898.206**

Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp454.445.361.290,00, dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN. Sehingga dalam hal aset nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, aset nostro tersebut akan disajikan di Neraca.

Rincian aset Nostro terlampir pada Lampiran LD20.

4. Surat Berharga Eks BPPN

Surat berharga eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Namun, setelah tugas-tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

Nilai surat berharga eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Citibank per 31 Desember 2025 sebesar Rp559.294.077.458,00, sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp540.677.395.604,00 atau terjadi kenaikan nilai Surat Berharga Eks BPPN sebesar Rp18.616.681.854,00 yang berasal dari selisih kurs.

Rincian surat berharga non saham eks BPPN terlampir pada Lampiran LD21.

5. Aset Saham Eks BPPN

Aset Saham adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari *Asset settlement* BTO dan BBKU. Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Nilai aset saham eks BPPN per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp37.068.044.154,00 sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp47.276.314.736,00 sehingga terjadi penurunan nilai aset saham eks BPPN sebesar Rp10.208.270.582,00. Penurunan yang terjadi karena fluktuasi nilai saham 14 emiten, yaitu:

a. Penurunan nilai aset saham eks BPPN sebesar Rp20.265.944.500,00 terdiri dari:
    1) PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL) mengalami penurunan sebesar Rp15.000,00;
    2) PT Merck, Tbk. (MERK) mengalami penurunan sebesar Rp25.000,00;

3) PT Trias Sentosa, Tbk (TRST) mengalami penurunan sebesar Rp8.500,00; dan

4) PT Kabelindo Murni, Tbk (KBLM) mengalami penurunan sebesar Rp20.265.896.000,00.

b. Kenaikan nilai aset saham eks BPPN sebesar Rp10.057.673.918,00 terdiri dari:

1) PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX) mengalami kenaikan sebesar Rp32.137.300,00;

2) PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX) mengalami kenaikan sebesar Rp37.459.700,00;

3) PT Citatah, Tbk (CTTH) mengalami kenaikan sebesar Rp1.220.877.900,00;

4) PT Citatah, Tbk (CTTH) mengalami kenaikan sebesar Rp4.473.515.412,00;

5) PT Holcim Indonesia, Tbk (PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk) (SMCB) mengalami kenaikan sebesar Rp347.462.500,00;

6) PT Langgeng Makmur Industri, Tbk (LMPI) mengalami kenaikan sebesar Rp173.703.006,00;

7) PT Star Pacipic, Tbk (dlh. PT Lippo E-Net) (LPLI) mengalami kenaikan sebesar Rp9.600,00;

8) PT Sreeya Sewu Indonesia (PT Sierad Produce, Tbk (SIPD) mengalami kenaikan sebesar Rp575.659.500,00;

9) PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO) mengalami kenaikan sebesar Rp4.921.000,00;

10) PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO) mengalami kenaikan sebesar Rp2.446.440.000,00;

11) PT Aqua Golden Mississippi mengalami kenaikan sebesar Rp623.688.000,00; dan

12) PT Permadani Khatulistiwa Nusantara mengalami kenaikan sebesar Rp121.800.000,00.

Terjadi perubahan terhadap jumlah lembar saham dan nilai aset saham eks BPPN yang disebabkan oleh:

a. Penyajian nilai aset saham eks BPPN untuk perusahaan terbuka didasarkan pada data historis per 31 Desember 2025 diambil dari *website* resmi BEI yang diakses secara *online*;

b. Penjualan saham PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM) melalui lelang dengan Risalah Lelang Nomor 109/07.05/2025-01 tanggal 14 Agustus 2025, dan telah dihapuskan dengan Keputusan Dirjen KN Nomor KEP-162/KN/2025 tanggal 29 Desember 2025.

Rincian aset saham eks BPPN sebagaimana terlampir pada Lampiran LD22.

6. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain pada neraca per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.572.355.178.123,00 sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.316.674.268.174,00. Terdapat kenaikan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp1.255.680.909.949,00. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Aset Properti eks PPA	6.316.502.461.385	5.104.817.636.841

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2	Surat Berharga eks PPA	1.234.883.401.960	1.193.302.433.132
3	Saham Non Bank eks PPA	20.969.314.778	18.554.198.201
	Jumlah	**7.572.355.178.123**	**6.316.674.268.174**

a. Aset Lain-lain - Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*).

Jumlah aset properti eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2025 sejumlah 1.491 aset dengan nilai sebesar Rp6.316.502.461.385,00, sedangkan per 31 Desember 2024 sejumlah 1.339 aset dengan nilai sebesar Rp5.104.817.636.841,00, terjadi peningkatan 152 aset dengan nilai sebesar Rp1.211.684.824.544,00. Perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) disebabkan oleh adanya perubahan nilai, penyerahkelolaan ke LMAN, penarikan kembali dari LMAN, telah dilakukan pelelangan, baru dicatat karena telah ditemukan dokumen kepemilikan asli dan penetapan status penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga beserta Rincian Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA berikut perubahannya disajikan pada Lampiran LD23.

Rincian lebih lanjut terkait Aset Properti disajikan lebih lanjut pada Pengungkapan Penting Lainnya.

b. Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA

Surat berharga eks kelolaan PT PPA merupakan surat berharga yang telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Nilai surat berharga eks PT PPA per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.234.883.401.960,00 sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.193.302.433.132,00. Terdapat kenaikan nilai surat berharga eks kelolaan PT PPA pada Tahun 2024 karena penyesuaian kurs senilai Rp41.580.968.828,00.

Rincian Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA terlampir pada Lampiran LD24.

c. Saham Non Bank Eks PPA

Nilai aset saham (non bank) eks PT PPA per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.969.314.778,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.554.198.201,00 atau terjadi kenaikan nilai saham sebesar Rp2.415.116.577,00. Kenaikan nilai yang terjadi karena fluktuasi nilai saham 6 emiten yaitu:

1) Penurunan nilai aset saham sebesar Rp1.284.641.461,00 terdiri dari:
   a) PT Sarana Jambi Ventura mengalami penurunan sebesar Rp156.190.001,00;
   b) PT Sarana Kalbar Ventura mengalami penurunan sebesar Rp343.488.000,00;
   c) PT Sarana Kalsel Ventura mengalami penurunan sebesar Rp10.011.460,00; dan
   d) PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (PT Perta Life Insurance) mengalami penurunan sebesar Rp774.952.000,00.
2) Kenaikan nilai aset saham sebesar Rp3.699.758.038,00 terdiri dari:
   a) PT Jembo Cable Company Tbk (JECC.JK) mengalami kenaikan sebesar Rp3.331.405.000,00; dan

b) PT Sukapraja Estetika Padang Golf mengalami kenaikan sebesar Rp368.353.038,00.

Terjadi perubahan terhadap jumlah lembar saham dan nilai aset saham eks PT PPA yang disebabkan oleh:

1) Terdapat perubahan nilai saham PT Sarana Jambi Ventura yang didasarkan pada Laporan Penilaian LP-0113/2/KN.5/2025 tanggal 9 Mei 2025 dengan tanggal penilaian 14 Maret 2025;
2) Terdapat perubahan nilai saham PT Sarana Kalbar Ventura yang didasarkan pada Laporan Penilaian LP-0120/2/KN.5/2025 tanggal 28 Mei 2025 dengan tanggal penilaian 17 April 2025;
3) Terdapat perubahan nilai saham PT Sarana Kalsel Ventura yang didasarkan pada Laporan Penilaian LP-0114/2/KN.5/2025 tanggal 9 Mei 2025 dengan tanggal penilaian 7 Maret 2025;
4) Terdapat perubahan nilai saham PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (PT Perta Life Insurance) yang didasarkan pada Laporan Penilaian LP-0116/2/KN.5/2025 tanggal 9 Mei 2025 dengan tanggal penilaian 7 Maret 2025;
5) Terdapat perubahan jumlah lembar saham pada PT Jembo Cable Company Tbk, dikarenakan stock split 1:5 yang dilakukan perseroan pada 13 Juni 2024 sesuai informasi dari Laporan Tahunan PT Jembo Cable Company Tbk 2024. Selanjutnya, nilai per lembar saham perusahaan terbuka didasarkan pada data historis per 31 Desember 2025 diambil dari website resmi BEI yang diakses secara *online*;
6) Terdapat perubahan nilai saham PT Sukapraja Estetika Padang Golf yang didasarkan pada Laporan Penilaian LP-0115/2/KN.5/2025 tanggal 16 Mei 2025 dengan tanggal penilaian 14 Maret 2025.

Saham eks kelolaan PT PPA merupakan saham telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA dilakukan sendiri oleh DJKN dengan berpedoman kepada PMK Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui PMK Nomor 230/PMK.06/2022. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA oleh DJKN meliputi menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS, permintaan pembayaran atas dividen saham atau hasil likuidasi, penjualan, penilaian, dan/atau penatausahaan.

Terdapat tindak lanjut transfer keluar aset saham PT Sejahtera Eka Graha senilai Rp26.563.266.134,00 ke Dit. KND (BA 999.03 Aset Investasi) sesuai Surat Perintah PRIN-25.1/KN/2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020. Rincian terlampir pada Lampiran LD25.

D.2.1.6.6.8. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)

Saldo Aset Lainnya pada Aset Bekas Milik Asing Tionghoa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp33.745.617.100,00 dan Rp35.474.626.100,00.

Berikut rincian mutasi saldo aset lainnya:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**35.474.626.100**
Penambahan nilai aset lainnya dari nilai wajar ABMA/T yang ditetapkan kompensasinya s.d. 31 Desember 2025	71.233.041.000

Uraian	Nilai
Pengurangan nilai aset lainnya dari penyelesaian ABMA/T yang terjadi s.d. 31 Desember 2025	(72.962.050.000)
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**33.745.617.100**

Adapun rincian nilai saldo awal Aset Lainnya Tahun 2025 yang merupakan nilai saldo akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.474.626.100,00 berasal dari nilai wajar atas ABMA/T yang belum dapat dilunasi/diselesaikan sejak awal pengurusan pelepasan ABMA/T hingga 31 Desember 2024 disajikan di Lampiran LD26

Guna membentuk saldo akhir Aset Lainnya sampai dengan akhir Tahun 2025, maka saldo awal Aset Lainnya tersebut selanjutnya ditambah dengan nilai wajar atas ABMA/T yang ditetapkan besaran kompensasinya hingga akhir Tahun 2025 dan/atau ditetapkan kembali besaran kompensasinya sehingga menimbulkan kenaikan nilai dari aset terdahulu, dengan total nilai sebesar Rp71.233.041.000,00 disajikan di Lampiran LD27.

Selanjutnya dikurangi dengan nilai wajar atas ABMA/T yang dilepaskan karena telah diterbitkan KMK pelepasannya, koreksi penetapan kembali besaran kompensasi ABMA/T, dengan total nilai sebesar Rp72.962.050.000,00 disajikan pada Lampiran LD28.

Dengan demikian, total nilai aset pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp33.745.617.100,00.

D.2.1.6.6.9. Aset BMN *Idle*

Aset BMN *idle* per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp12.836.831.034,00 dan Rp14.113.278.239,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.276.447.205,00. BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle* dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain.

Pada periode Tahun 2025 terdapat mutasi atas BMN *idle* sebagai berikut:

Saldo Awal:

Saldo BMN *Idle* yang telah diserahkan ke Pengelola Barang per tanggal 1 Januari 2025 (sebelum penyusutan) adalah sebesar Rp14.113.278.239,00.

Mutasi Tambah:

Tidak terdapat mutasi tambah BMN *Idle* di tahun 2025.

Mutasi kurang:

Terdapat Nilai mutasi kurang BMN eks BMN *Idle* pada periode Tahun 2025 sebesar Rp1.276.447.205,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi berkurang sebesar Rp13.000.000,00, karena terdapat 2 (dua) unit bangunan BMN eks BMN Idle yang dikeluarkan dari neraca dan disajikan sebagai aset Ekstrakomptabel, dengan rincian sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit bangunan BMN eks BMN *Idle* pada KPKNL Surabaya dengan nilai perolehan Rp8.000.000,00 yang berlokasi di Jalan Brondong, Desa Brengkok, Kec. Brondong, Kab. Lamongan;

b. 1 (satu) unit bangunan BMN eks BMN *Idle* pada KPKNL Medan dengan nilai perolehan Rp5.000.000,00 yang berlokasi di Jl. Thamrin, Kec. Babalan, Kab. Langkat.

2. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) unit Bangunan Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp148.346.000,00 pada KPKNL Batam ke KemenATR/BPN sesuai berita acara nomor BAST-01/KNL.0304/2025 tanggal 25 Agustus 2025;
3. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) unit Bangunan Lainnya dengan nilai buku sebesar Rp15.866.000,00 pada KPKNL Lahat ke Bawaslu sesuai berita acara nomor BAST-001/IDLE/KNL.0403/2025 tanggal 14 Agustus 2025;
4. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) unit Bangunan Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp44.360.161,00 pada KPKNL Jember ke Kementerian Agama sesuai berita acara nomor BAST-13/KNL.1004/2025 tanggal 21 November 2025;
5. Penetapan Status Penggunaan BMN eks BMN *Idle* berupa 1 (satu) unit Bangunan Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp116.834.000,00 pada KPKNL Bima ke Bawaslu sesuai berita acara nomor BA-15/KNL.1404/2025 tanggal 07 Agustus 2025;
6. Penghapusan 4 (empat) unit Bangunan Lainnya dengan nilai perolehan total Rp69.523.624,00 pada KPKNL Pamekasan, sesuai keputusan Penghapusan nomor 35/MK/KN.4/2025 tanggal 18 September 2025;
7. Penghapusan 13 (tiga belas) unit Bangunan Lainnya dengan nilai perolehan total Rp855.117.420,00 pada KPKNL Singkawang, sesuai keputusan Penghapusan nomor KMK 27/MK/KN.4/2025 tanggal 08 Juli 2025;
8. Penghapusan 2 (dua) unit Bangunan Lainnya dengan nilai perolehan total Rp13.400.000,00 pada KPKNL Makassar, sesuai keputusan Penghapusan nomor KMK 56/MK/KN.4/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Nilai mutasi kurang BMN eks BMN *Idle* pada Periode Tahun 2025 lebih rinci disajikan pada Lampiran LD29.

Saldo Akhir:

Saldo BMN *Idle* yang telah diserahkan ke Pengelola Barang (sebelum penyusutan) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.836.831.034,00.

D.2.1.6.6.9. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan TK DJKN

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp728.057.831.169,00. Nilai ini merupakan saldo akhir aset lain-lain dalam pengelolaan DJKN. Rincian nilai aset lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset
1	Barang Gratifikasi	2.250	115.116.548.169
2	Aset yang berasal dari perjanjian antara pemerintah dan badan internasional/negara asing	1	183.780.000
3	Aset Rampasan PT TLI	17.317 m²	248.110.792.000

No.	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset
4	Aset Eks PT AAF	355.069 m²	326.390.877.000
5	Aset Eks Proyek Alumina Bintan	1.583.007 m²	38.255.834.000
Jumlah			**728.057.831.169**

1. Barang Gratifikasi

Nilai barang gratifikasi dalam pengelolaan DJKN per 01 Januari 2025 sebesar Rp115.391.969.721,00. Nilai tersebut merupakan barang gratifikasi perolehan tahun 2015 hingga 2025 yang masih belum selesai proses pengelolaannya. Barang gratifikasi diakui sebagai aset lain-lain dalam pengelolaan DJKN setelah diserahkan kepada DJKN. Aset lain-lain dicatat berdasarkan nilai perolehan. Apabila nilai perolehan dicatat dalam mata uang asing maka nilai pencatatan dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penyerahan.

Selama Tahun 2025, KPK melakukan penyerahan barang gratifikasi sebanyak 45 kali dengan jumlah barang sebanyak 1.366 dan senilai Rp802.853.214,00, penerimaan barang gratifikasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) antara DJKN dan KPK. Selain penerimaan tersebut, terdapat koreksi pencatatan atas saldo barang gratifikasi tahun 2025 sebesar Rp33.776.251,00 karena kesalahan pencatatan.

Selama Tahun 2025 telah dilaksanakan 21 kali lelang dengan barang yang laku terjual sebanyak 749 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan nilai perolehan sebesar Rp424.735.496,00.

Selama Tahun 2025 telah dilaksanakan 2 kali PSP sebanyak 541 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	Keputusan Menteri Keuangan	BAST dan Tanggal BAST	Satker Penerima	Jumlah Barang	Nilai
1	KMK 8/KM.6/KN.4/2025 tanggal 11 Maret 2025	BA-5/KN.4/2025 tanggal 18 Maret 2025	Komisi Pemberantasan Korupsi	2	17.749.000
2	KMK 36/KM.6/KN.4/2025 tanggal 22 September 2025	BA-27/KN.4/2025 tanggal 1 Oktober 2025	Kementerian Agama	539	241.655.931
Jumlah				**541**	**259.404.931**

Selama Tahun 2025 telah dilaksanakan 3 kali hibah sebanyak 799 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	Keputusan Menteri Keuangan	BAST dan Tanggal BAST	Satker Penerima	Jumlah Barang	Nilai
1	KMK-25/KM/KN.4/2025 tanggal 4 Juli 2025	BA-1/MK/KN.4/2025	MA Annur Malangbong Garut	454	92.450.475
2	KMK 49/KM/KN.4/2025 tanggal 30 November 2025	BA-6/MK/KN.4/2025	Desa Pantai Bahagia	343	157.757.086
3	KMK 42/KM/KN.4/2025 tanggal 17 Oktober 2025	BA-2/MK/KN.4/2025	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	2	29.628.000
Jumlah				**799**	**279.835.561**

Selama Tahun 2025 telah dilaksanakan 2 kali pemusnahan sebanyak 573 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	Keputusan Menteri Keuangan	BA Pemusnahan	Jumlah Barang	Nilai
1	KMK 48/MK/KN.4/2025 tanggal 28 November 2025	BA-4/MK/KN.4/2025	338	91.313.629
2	KMK 52/KM/KN.4/2025 tanggal 17 Desember 2025BA-2/MK/KN.4/2025	BA-2/MK/KN.4/2025	235	56.761.400
Jumlah			**573**	**148.075.029**

Dengan demikian, saldo akhir barang gratifikasi yang dicatat sebagai aset lain-lain adalah sebesar Rp115.116.548.169,00. Nilai tersebut merupakan barang gratifikasi dalam pengelolaan DJKN sampai dengan 31 Desember 2025 dengan jumlah barang sebanyak 2.250 unit/buah/set/lembar.

2. Aset yang berasal dari perjanjian antara pemerintah dan badan internasional/negara asing

Aset yang berasal dari perjanjian antara pemerintah dan badan internasional/negara asing per 01 Januari 2025 sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2025 terdapat 1 (satu) kali penyerahan aset kepada DJKN melalui Berita Acara Serah Terima Nomor GIZ-01/ETC/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 berupa 1 (satu) unit Mini Bus Merk Toyota Kijang Innova G-Dsl M/T dengan nilai perolehan sebesar Rp183.780.000,00. Dengan demikian saldo aset yang berasal dari perjanjian kerjasama antara pemerintah dan badan internasional/negara asing per 31 Desember 2025 sebesar Rp183.780.000,00.

Progres pengelolaan aset tersebut telah laku dijual melalui lelang dengan perolehan PNBP senilai Rp128.612.000,00 namun belum dilakukan serah terima kepada pemenang lelang, sehingga aset tersebut belum dikeluarkan dari pencatatan.

3. Aset Rampasan PT Tuban LPG Indonesia (PT TLI)

Dalam surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor PRIN-257/M.1.10/Ft.1/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Sdr. Honggo Wendratno diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2020 atas nama HONGGO WENDRATNO, pengadilan telah menetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan bangunan di atasnya berupa pabrik/kilang LPG PT TLI yang berada di kawasan pabrik PT TPPI yang terletak di Jl. Tanjung Dusun Tanjung Awar-Awar, Desa Remen Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 dan 12 dengan alamat Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur atas nama PT. Tuban LPG Indonesia, dirampas untuk Negara cq. Menteri Keuangan RI.

Guna menjalankan putusan dimaksud, Kejaksaan RI diwakili Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan barang bukti dimaksud kepada Menteri Keuangan diwakili Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 07 Juli 2020, bertempat di Gedung

Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI Jakarta. Dengan penyerahan sesuai BAST tanggal 07 Juli 2020 dimaksud, Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari rampasan dimaksud dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

BAST aset tidak mencantumkan nilai perolehan aset beserta akumulasi penyusutan maupun nilai wajar aset. Selayaknya aset tetap, memperhatikan PSAP 07 Paragraf 20, apabila penilaian aset dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset agar didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Surabaya sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Penilaian Nomor LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diperoleh nilai wajar sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Objek Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Nilai Wajar Aset
1.	Tanah	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	2.277.846.000
2.	Tanah	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	2.309.215.000
3.	Bangunan pabrik/kilang LPG	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	243.523.731.000

Kemudian, dalam rangka pengamanan serta menjunjung prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan BMN, Kilang LPG tersebut dititipkan kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sejak tanggal 7 Juli 2020 melalui surat penitipan aset Pengelola Barang Nomor S-429/KN/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan Berita Acara Penitipan BMN eks Rampasan tanggal 7 Juli 2020 untuk dioperasikan dengan ketentuan hasil pengelolaan Kilang LPG disetorkan ke kas negara setelah dikurangi segala biaya yang timbul akibat proses penitipan.

Atas kegiatan penitipan Kilang LPG tersebut, PT TPPI telah melakukan perhitungan hasil pengelolaan Kilang LPG (setelah dikurangi segala biaya yang timbul akibat proses penitipan) dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Sepanjang Tahun 2025, PNBP hasil pengelolaan kilang LPG yang telah disetorkan sebesar:

(dalam rupiah)

No.	Periode	Jumlah	Ket.
1.	01 Oktober s.d. 31 Desember 2024	13.646.672.978	Disetorkan pada 6 Maret 2025
2.	01 Januari s.d. 1 Maret 2025	-	

Kegiatan penitipan bersifat sementara sampai Pengelola Barang memutuskan bentuk pengelolaan lebih lanjut atas aset dimaksud. Dalam hal ini, Dit. PKNSI selaku Pengelola Barang telah melakukan pengkajian optimalisasi aset Kilang LPG dalam jangka pendek dengan opsi bentuk pemanfaatan sewa serta optimalisasi dalam jangka panjang menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP).
Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan penilaian nilai wajar atas sewa aset tersebut oleh KPKNL Surabaya sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Penilaian Nomor LAP-0024/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diperoleh nilai wajar atas sewa sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Periodesitas Sewa	Nilai Sewa
1.	1 Tahun	20.650.659.000
2.	3 Tahun	73.184.696.000

Namun, memperhatikan *trend* hasil pengelolaan Kilang LPG melalui kegiatan penitipan yang cukup tinggi dibandingkan dengan nilai sewa aset tersebut, dilakukan reviu kembali atas bentuk pemanfaatan Kilang

LPG yang mempertimbangkan nilai keekonomian kilang LPG sehingga lebih menguntungkan bagi Pengelola Barang dengan bentuk pemanfaatan berupa Kerja Sama Pemanfaatan untuk Mengoperasionalkan Kilang LPG.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pengelola Barang telah memintakan permohonan penilaian kelayakan bisnis KSP Operasional kepada KPKNL Surabaya melalui Nota Dinas Nomor ND-1619/KN.5/2021 tanggal 16 Juli 2021 hal Permohonan Penilaian KSP Untuk Mengoperasionalkan Barang Milik Negara berupa Kilang LPG Eks PT TLI dan saat ini sedang dilakukan proses penilaian oleh Tim Penilai KPKNL Surabaya.

Kemudian terhadap rencana KSPO tersebut, telah dilaksanakan penilaian atas Kilang LPG sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Nomor LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022 dan Laporan Analisis Kelayakan Bisnis Nomor Lap-001/WKN.10/KNL.01/AKB/KSP/2022 tanggal 15 Februari 2022. Atas penilaian tersebut diperoleh nilai wajar BMN berupa Kilang LPG sebesar Rp164.937.148.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Objek Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Nilai Wajar Aset
1	Tanah	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	2.279.710.000
2	Tanah	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	2.311.105.000
3	Bangunan pabrik/kilang LPG	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	160.346.333.000

Namun, tidak perlu dilakukan koreksi pencatatan nilai aset TLI untuk tahun 2022 karena tujuan penilaian kembali atas aset TLI tersebut adalah untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka pemanfaatan aset dan bukan sebagai nilai perolehan baru. Sehingga, nilai aset TLI yang tercatat pada neraca tetap sebesar Rp248.110.792.000,00.

Aset TPPI dan TLI termasuk sebagai BMN yang men-*supply* LPG nasional yang menyangkut hajat orang banyak dan atas aset TPPI beberapa kali kilangnya mendapat arahan/atensi langsung presiden. TLI memproses *offgas* buangan Kilang TPPI yang membantu mewujudkan program pemerintah *Zero Flaring*.

Telah diperoleh hasil audit BPKP terhadap kewajaran pengenaan biaya pengelolaan kilang LPG dan *tolling fee* antara pihak DJKN selaku pemilik kilang, PT TPPI selaku operator, serta PT KPI selaku *supplier*. Tim Audit BPKP telah menyelesaikan audit atas hasil Kewajaran Biaya Pengelolaan/Pengolahan Kilang LPG eks PT TLI dengan dilaksanakannya *exit meeting* pada Kamis, 10 Agustus 2023 yang dihadiri perwakilan PT TPPI. Selanjutnya, telah diperoleh hasil audit sebagai berikut:

a. Diperlukan koreksi pengenaan beban oleh PT TPPI selaku operator penitipan pada beberapa pos baik biaya rutin dan non rutin dengan total sebesar Rp56.661.855.791,00;

b. Koreksi pembebanan biaya yang cukup materiil terdapat pada pos Estimasi *Turnaround* minus Rp22.782.359.246,00 dan pencadangan PPN serta PPh 23 minus Rp32.447.914.772,00.

Atas dasar hasil audit tersebut, Direktorat PKN telah bersurat kepada PT TPPI melalui surat Nomor S-1169/KN.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023 hal Tindak Lanjut Hasil Audit Kewajaran Biaya Pengelolaan Kilang LPG eks PT TLI dan telah ditindaklanjuti oleh PT TPPI dengan menyetorkan hak negara sebesar Rp56.661.855.791,00 pada tanggal 27 September 2023.

Melalui surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor S-772/KN.4/2025 tanggal 29 Juli 2025 hal Perhitungan dan Penyetoran Hasil Pengelolaan Kilang/Pabrik LPG, Direktorat Pengelolaan Kekayaan

Negara telah bersurat kepada PT TPPI untuk melakukan penyetoran atas hasil pengelolaan pabrik/kilang untuk periode Mei s.d. September 2025 ke Rekening Umum Kas Negara.

4. Aset Eks PT Asean Aceh Fertilizer (PT AAF)

Sehubungan dengan dana pinjaman PT AAF dari dana Kerjasama Ekonomi Luar negeri (OECF), berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-516/MK.016/1997 tanggal 28 Oktober 1997 telah menyetujui penyerahan aset PT AAF (Persero) berupa Pelabuhan dan Water Intake berserta prasarananya senilai USD153,999,227.03 kepada Pemerintah dengan kompensasi pengurang utang PT AAF kepada Pemerintah sejumlah yang sama terhitung mulai 1 Januari 1997.

Sebagaimana adanya Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Desember 1997 antara Negara Republik Indonesia dengan PT AAF, PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) I dan PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) tentang Penyerahan Pengelolaan Sarana Pelabuhan dan Water Intake PT AAF, Pemerintah menyerahkan pengelolaan dan pengoperasian kolam pelabuhan termasuk alur masuk seluas 520.000 m2 dan prasarana pelabuhan kepada PT Pelindo I, dan pengelolaan sarana water intake diserahkan kepada PT PIM.

Untuk aset Dermaga eks PT AAF beserta sarana pendukungnya, dalam rangka tindak lanjut penyelesaian dan pencatatan, telah dilakukan terlebih dahulu penilaian atas aset dimaksud, sesuai Laporan penilaian Nomor LP-0168/1/KN.5/2025 tanggal 13 Agustus 2025 sebesar Rp326.390.877.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian tabel hasil penilaian, sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Objek Penilaian	Luas (m2)	Nilai Wajar
1.	Tanah (Beserta Kolam Pelabuhan)	332.520,00	224.625.148.000
2.	Dermaga A	7.799,44	19.370.711.000
3.	Dermaga B	2.461,15	5.392.202.000
4.	*West Break Water*	1.928,60	21.094.301.000
5.	*East Break Water*	10.624,02	22.538.846.000
6.	*West Inner Break Water*	1.377,10	12.852.339.000
7.	*East Inner Break Water*	1.916,45	17.886.048.000
8.	*Slope Protection*	1.138,59	890.232.000
9.	*West Shore Protection*	1.019,53	764.034.000
10.	*East Shore Protection*	1.303,74	977.016.000
Jumlah			**326.390.877.000**

Selanjutnya, tindak lanjut penyelesaian Dermaga eks AAF beserta sarana pendukungnya, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekjen Kemenkeu melalui nota dinas Nomor ND-404/MK/SJ.7/2025 tanggal 28 Agustus 2025, menyampaikan usulan permohonan penetapan status penggunaan (PSP) kepada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe terhadap dermaga beserta sarana pendukungnya.

Atas permohonan tersebut, telah telah sedang berproses penetapan status penggunaan (PSP) Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan c.q. DJBC.

5. Aset Eks Proyek Alumina Bintan (PAB)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain, penyerahan Aset Lain-lain dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Selanjutnya, Pengelola Barang melakukan pencatatan atau pembukuan atas BMN

yang berasal dari Aset Lain-lain tersebut dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-404/MK.05/2022 tanggal 16 Mei 2022, PT Aneka Tambang Tbk. (PT Antam) ditugaskan untuk menyerahkan aset eks Proyek Alumina Bintan berupa tanah seluas 1.583.007 m² (SHGB Nomor 479/Kelurahan Kijang) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang.

Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021, BMN yang berasal dari Aset Lain-lain antara lain mencakup aset yang diperoleh dari pihak lain dan di dalamnya melekat hak negara. Dengan demikian, aset eks Proyek Alumina Bintan dapat dikategorikan sebagai BMN yang berasal dari Aset Lain-lain.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, terhadap aset eks Proyek Alumina Bintan telah dilakukan verifikasi bersama oleh PT Aneka Tambang Tbk. dan DJKN untuk melengkapi persyaratan administrasi penyerahan aset menjadi BMN, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021.

PT Antam telah melakukan verifikasi bersama dengan DJKN atas aset eks PAB berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 1.583.007 m2 sesuai dengan SHGB Nomor 479/Kelurahan Kijang tanggal 14 Juli 2001 atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 13 Juli 2031 dan telah melengkapi persyaratan administrasi proses penyerahan aset menjadi BMN (*vide* Pasal 10 Permenkeu Nomor 53/PMK.06/2021), yaitu:

a. Berita acara hasil verifikasi bersama yang dilampiri daftar BMN Aset;

b. Dokumen kepemilikan; dan

c. Surat pernyataan dari Penyerah Barang bahwa barang dalam keadaan tidak terdapat permasalahan hukum (*free and clear*).

Mengacu pada verifikasi bersama tersebut, PT Antam meminta untuk segera menuntaskan proses penyerahan aset kepada Kementerian Keuangan. Namun hal ini terkendala oleh status tanah yang masuk dalam Daftar Indikasi Tanah Terlantar, sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Bintan Nomor HP.03.04/267-21.01/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023. Status ini mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan, selain itu dalam area tersebut terdapat masyarakat/penghuni liar yang telah lama bermukim.

PT Antam telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar mengeluarkan SHGB 479 dari Daftar Indikasi Tanah Terlantar yang akhirnya telah dikonfirmasi melalui surat Nomor T/TL.03.01/160/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 yang menyatakan bahwa Lahan PAB dikeluarkan dari basis data Indikasi tanah terlantar.

Berdasarkan koordinasi, Pemda Kabupaten Bintan telah mengajukan permohonan hibah melalui surat Bupati Bintan Nomor B/16/500.17/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dan menyampaikan kajian rencana pengelolaan terhadap sebagian Aset Eks PAB untuk dimanfaatkan dalam rangka program pembangunan perluasan tanah pada wilayah Kelurahan Sungai Enam maupun untuk rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

Bahwa rencana penyerahan aset lahan eks PAB menjadi BMN telah sesuai dengan Pasal 10 Permenkeu No 53/PMK.06/2021, sebagaimana disebut angka 3 di atas, Direktur Utama PT Antam Tbk. telah

menyampaikann surat Nomor 247.A/00/DAT/2025P tanggal 11 Juni 2025 hal Tindaklanjut Penyerahan Aset Eks Proyek Alumina Bintan.

Selanjutnya, telah dilakukan serah terima aset Eks Proyek Alumina Bintan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2025 yang dilakukan oleh Direktur Komersial PT Aneka Tambang Tbk selaku penyerah barang kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku penerima barang serupa sehamparan tanah dengan total luas sebesar 1.583.007 m2 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 479/Kelurahan Kijang tanggal 14 Juli 2001 atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk. yang terletak di Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (d.h. Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau) dengan nilai perolehan sebesar Rp257.161.741,47 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat puluh tujuh sen) beserta dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima Nomor BA-4/KN/2025.

Selanjutnya dalam rangka pencatatan, aset Eks Proyek Alumina Bintan telah dinilai oleh Tim Penilai Pemerintah KPKNL batam pada tanggal 02 s.d 04 September 2025. Tim Penilai KPKNL Batam melakukan survei lapangan dengan peninjauan langsung menggunakan metode pendekatan pasar (perbandingan data pasar) atas tanah seluas 1.583.007 m2 yang berlokasi di Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan nilai wajar sebesar Rp38.255.834.000,00.

Diketahui atas aset dimaksud, Bupati Bintan melalui surat Nomor B/152/500.17/IX/2025 tanggal 23 September 2025 menyampaikan permohonan Hibah Lahan Eks Proyek Alumina Bintan dengan luasan 58 Ha untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan, pertanian, dan jasa lainnya, guna mendukung program ketahanan pangan, termasuk akan direncanakan untuk pengembangan kawasan industri dan kepelabuhanan.

Selanjutnya Kepala Badan Logistik Pertahanan a.n Menteri Pertahanan RI melalui surat Nomor B/2150/LOG.02.00.01.177 /BALOGHAN tanggal 11 September 2025 juga menyampaikan permohonan penetapan status penggunaan aset eks Proyek Alumina Bintan untuk memenuhi kebutuhan lahan dalam rangka pembangunan perkantoran dan perumahan dinas serta pengembangan sarana prasarana pangkalan TNI.

Terhadap permohonan Hibah oleh Bupati Bintan dan PSP oleh Kementerian Pertahanan tersebut, telah dilakukan rapat koordinasi dalam rangka pembagian luasan lahan kepada masing-masing pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2025 secara daring, dengan hasil rapat, sebagai berikut:

a. Belum ada kesepakatan terkait pembagian wilayah yang akan di PSP kepada Kementerian Pertahanan dan yang akan dihibahkan ke Pemda Kabupaten Bintan;

b. TNI AL akan menyampaikan terkait usulan wilayah yang tumpang tindih dengan usulan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada pimpinan untuk dimintakan arahan;

c. Pemda Kabupaten Bintan perlu menyajikan data yang lebih spesifik terkait jalan kabupaten yaitu Jalan Sei Enam dan Jalan Sei Enam Darat;

d. Perlu dilakukan konfirmasi kepada Kementerian Kehutanan atau instansi terkait mengenai status hutan mangrove yang ada disekitarnya, yang berpotensi untuk dibuka dan mendapatkan akses ke laut;

e. Akan dilaksanakan rapat lanjutan setelah para pihak sudah mendapatkan data-data yang diperlukan.

Untuk usulan yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan c.q. TNI AL dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan merupakan wilayah yang sama yaitu wilayah yang memiliki akses dengan pantai/laut dan juga diperoleh alternatif yang akan dimohonkan Izin akses jalan ke arah laut dengan koordinat ternyata melewati kawasan bakau/mangrove.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur PKN melalui surat Nomor S-1334/KN.4/2025 tanggal 4 November 2025 melakukan konfirmasi atas status Kawasan Bakau/Mangrove yang berbatasan dengan Aset Eks Proyek Alumina Bintan serta prosedur untuk menggunakannya sebagai akses menuju ke arah laut kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Setelah dilakukan koordinasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau, sesuai Surat Nomor: T/500.4.3.5/1344/DLHK-05/2025 tgl 17 November 2025 hal Arahan dan Konfirmasi Kawasan Bakau/Mangrove Yang Berbatasan dengan Aset Eks Proyek Alumina Bintan, diketahui bahwa terkait informasi status kawasan bakau/mangrove termasuk kawasan hutan atau bukan, dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

C.2.1.6.6.10. Aset Lain-Lain BA 999.03

Aset Lain-lain BA 999.03 per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp850.733.727.777,00 dan Rp764.944.939.588,00. Nilai tersebut merupakan aset lain-lain pada BLU LMAN dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Rincian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Aset eks BPPN	60.093.795.333	43.730.869.333
2	Aset eks kelolaan PT PPA	135.440.964.393	135.440.964.393
3	Aset eks Pertamina	556.190.092.801	557.961.421.612
4	Aset lain-lain BUN – Eks HTBI	27.811.684.250	27.811.684.250
5	Aset lain-lain BUN – Eks BDL	71.197.191.000	-
Jumlah		**850.733.727.777**	**764.944.939.588**

Aset lain-lain pada Laporan Keuangan BA 999.03 terdiri dari :

1. Aset Eks BPPN

Posisi Aset Lain-lain eks BPPN pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp60.093.795.333,00 dan Rp43.730.869.333,00. Perubahan posisi Aset Lain-lain eks BPPN pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
Tanah	42.429.176.333	17.016.119.000	-	59.445.295.333
Gedung dan Bangunan	1.301.693.000	-	(653.193.000)	648.500.000
Jumlah	**43.730.869.333**	**17.016.119.000**	**(653.193.000)**	**60.093.795.333**

Penambahan berupa aset kelolaan baru berasal dari penyerahkelolaan aset eks BPPN pada Pengelola Barang yang ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1/KN.2/2025 tanggal 13 Januari 2025 masing-masing sebanyak 6 unit. Terhadap aset kelolaan yang baru diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan penilaian oleh KPKNL untuk mendapatkan nilai wajar sebagai dasar

pemisahan penyajian aset yang dicatat secara komposit, serta nilai acuan untuk penyusutan bangunan. Penurunan nilai aset kelolaan eks BPPN berasal dari reklasifikasi aset lain-lain menjadi properti investasi.

2. Aset Eks Kelolaan PT PPA

Nilai aset Lain-lain eks Kelolaan PT PPA menyajikan Aset eks PPA yang tidak direklasifikasi ke properti investasi. Posisi Aset eks PPA pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp135.440.964.393,00 dan Rp135.440.964.393,00 atau tidak terdapat perubahan nilai aset eks kelolaan PT PPA dari periode sebelumnya.

Secara terperinci mutasi Aset eks PPA sebelum akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
Tanah	126.048.411.250	-	-	126.048.411.250
Gedung dan Bangunan	9.392.553.143	-	-	9.392.553.143
Jumlah	**135.440.964.393**	**-**	**-**	**135.440.964.393**

3. Aset Eks Pertamina

Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan LMAN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp556.190.092.801,00 dan Rp557.961.421.612,00.

Secara terperinci mutasi Aset eks Pertamina sebelum akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kelompok	1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
Kawasan	415.190.640.714	-	(338.593.000)	414.852.047.714
Non-Kawasan	142.770.780.898	-	(1.432.735.811)	141.338.045.087
Jumlah	**557.961.421.612**	**-**	**(1.771.328.811)**	**556.190.092.801**

Mutasi kurang aset Kawasan berasal dari aset Kawasan Kilang LNG Arun yang disebabkan adanya penarikan kembali sebagian aset kelolaan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-25/KN/2025. Penarikan tersebut termasuk berupa bangunan TK yang tersaji dalam pos Aset eks Pertamina sebesar Rp338.593.000,00.

4. Aset Lain-lain BUN

Pos Aset Lain-lain BUN menyajikan:

a. Aset hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020, dan PMK Nomor 139/PMK.06/2020 yang belum dihentikan pengakuannya melalui pengesahan belanja modal pada KL.

b. Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI) yang tidak memenuhi klasifikasi Properti Investasi.

Posisi Aset Lain-lain BUN (sebelum akumulasi) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp99.008.875.250,00 dan Rp27.811.684.250,00. Akumulasi penyusutan sebesar Rp271.940.458,00, sehingga nilai aset lain-lain BUN bersih Rp98.736.934.791,00 yang terdiri dari Aset Tanah PSN sebesar Rp0,00, Aset Lain-lain BUN eks HTBI (setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp27.628.708.746,00 dan Aset Lain-lain BUN eks BDL sebesar Rp71.197.191.000 ,00.

a. Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional

Sesuai PMK Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, pencatatan aset hasil pengadaan tanah oleh LMAN dilakukan sebesar ganti kerugian kepada pihak yang berhak dalam skema pembayaran langsung dan sebesar penggantian dana kepada badan usaha untuk skema penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu. Selanjutnya, LMAN akan melakukan penghentian pengakuan atas aset hasil pengadaan tanah setelah adanya pengesahan belanja modal oleh kementerian/lembaga terkait.

Posisi Aset Lain-lain BUN tanah PSN pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau seluruhnya telah dilakukan proses pengesahan belanja modal oleh Kementerian teknis. Adapun rincian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Deskripsi	Nominal
Posisi 1 Januari 2025	-
Penggunaan dana untuk pembayaran langsung	9.210.938.693.542
Penggunaan dana untuk penggantian dana talangan	251.288.735.329
Pengesahan belanja modal K/L	(9.462.227.428.871)
Posisi 31 Desember 2025	**-**

b. Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia

Posisi Aset Lain-lain BUN eks HTBI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27.811.684.250,00 dan Rp27.811.684.250,00 dengan akumulasi penyusutan tahun 2025 sebesar Rp271.940.458,00 sehingga nilai bersih Aset Lain-lain BUN eks HTBI adalah sebesar Rp27.539.743.791,00. Mutasi Aset Lain-lain BUN eks HTBI pada periode yang berakhir di 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
Tanah	25.748.661.250	-	(23.381.250)	25.725.280.000
Gedung dan Bangunan	2.063.023.000	23.381.250	-	2.086.404.250
Jumlah	**27.811.684.250**	**23.381.250**	**(23.381.250)**	**27.811.684.250**

c. Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Posisi Aset Lain-lain BUN eks BDL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp71.197.191.000,00 dan Rp0,00 dan belum dilakukan penyusutan. Mutasi Aset Lain-lain BUN eks BDL pada periode yang berakhir di 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Klasifikasi	1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
Tanah	-	71.197.191.000	-	71.197.191.000
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**71.197.191.000**	**-**	**71.197.191.000**

Pada tahun 2025, LMAN mendapatkan penambahan aset kelolaan berupa 6 (enam) unit Aset eks BDL berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-134/KN/2025 tanggal 11 November 2025. Penyerahkelolaan Aset Eks BDL dimaksud disertai dengan pengalihan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran hak nasabah penyimpan dana (NPD) Bank Dalam Likuitasi kepada LMAN. Penyerahkelolaan ini merupakan penyerahkelolaan pertama kali atas Aset eks BDL kepada LMAN.

C.2.1.6.6.11. Aset Lain-lain BA 999.08

Aset Lain-lain pada BA 999.08 per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp38.434.378.037,00 dan Rp69.874.268.741,00. Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah terdapat pada Satker OJK berupa Alat Angkutan Darat Bermotor yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.558.130.252,00, pada Satker SKK Migas berupa Aset Eks BPMIGAS yang diusulkan untuk penghapusan sebesar Rp2.194.732.112,00 serta pada BP Batam berupa Konstruksi dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp681.515.673,00. Mutasi Aset Lain-lain tersebut per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo Awal	**69.874.268.741**
Penambahan :	**3.073.700.853**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2.774.812.818
Penghentian Sementara KDP	298.888.035
Pengurangan	**34.513.591.557**
Penghapusan	34.150.951.489
Pencatatan Barang Yang Akan Dihapuskan	150.714.956
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	12.903.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Penggunaan Kembali KDP	199.022.112
Saldo per 31 Desember 2025	**38.434.378.037**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	**(37.581.628.865)**
Nilai buku per 31 Desember 2025	**852.749.172**

D.2.1.6.7. ASET LAINNYA DARI EKUITAS PADA UBL

Jumlah Aset Lainnya dari ekuitas UBL per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp29.130.879.455.119,00 dan Rp31.292.147.271.351,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.161.267.816.232,00 atau 6,91 persen merupakan Aset Lainnya dari Unit Badan Lainnya yang berada di 7 (tujuh) Unit Badan Lainnya Bukan Satker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya pada neraca Laporan Keuangan Badan Lainnya merupakan nilai ekuitas bersih dari UBL bukan satuan kerja.

Rincian aset lainnya UBL berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	UBL	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Otorita Asahan	5.396.635.686	5.396.635.686
2	Yayasan Gedung Veteran	5.567.168.804	6.574.375.517
3	Baznas	453.082.861.601	412.670.873.066
4	Badan Wakaf Indonesia	38.725.638.685	32.798.408.382
5	SKK MIGAS	-	-
6	Badan Pengelola Keuangan Haji	22.375.322.629.361	22.246.225.752.806
7	Otoritas Jasa Keuangan	6.252.784.520.982	8.588.481.225.894
JUMLAH		**29.130.879.455.119**	**31.292.147.271.351**

Penjelasan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.396.635.686,00 dan Rp5.396.635.686,00. Aset Lainnya sebesar Rp5.396.635.686,00 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 15 Mei 2019 dikurangi nilai Aset yang telah dilikuidasi periode 2022 *Audited*. Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-604/AG/2014 tanggal 10 April 2014 hal penyampaian SP-SABA.999.08 untuk keperluan penyediaan anggaran untuk gaji, operasional dan kegiatan Otorita Asahan TA 2014 dan Surat penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran NOMOR DIPA: 019.01.1.247101/2015 Tanggal 14 November 2015, dialokasikan Pagu Program Rp8.300.000.000,00 Unit Organisasi 019.01 Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.

   Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

   Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2025 masih dalam proses penyelesaian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan, bahwa tim likuidasi dimaksud bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

2. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.567.168.804,00 dan Rp6.574.375.517,00. Aset Lainnya sebesar Rp5.567.168.804,00 adalah total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2025 *Audited*. Laporan keuangan Yayasan Gedung Veteran tahun 2024 disusun berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Akan tetapi, pada penyusunan laporan keuangan tahun 2025, YGVRI menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Atas penerapan SAK EP, YGVRI melakukan konsolidasi entitas anak dan mencatat kewajiban pensiun. Selain itu, YGVRI melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas laporan keuangan tahun 2024. *Restatement* ini mengakibatkan saldo ekuitas YGVRI tahun 2024 berubah dari semula Rp6.574.375.517,00 menjadi Rp6.887.249.031,00. Atas perubahan ini, saldo ekuitas pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2024 tidak berubah, tetapi melakukan koreksi saldo awal tahun 2025 pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2025.

3. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp453.082.861.601,00 dan Rp412.670.873.066,00. Aset Lainnya yang berasal dari Baznas sebesar Rp453.082.861.601,00 merupakan total Ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Baznas Tahun 2025. Laporan Keuangan Baznas disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2023.

4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp38.725.638.685,00 dan Rp32.798.408.382,00. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp38.725.638.685,00 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2025 *Audited*. Aset Lainnya dari BWI merupakan jumlah keseluruhan dana yang bersumber dari Pengelolaan APBN, Pengelolaan Non APBN, Pengelolaan Non Kas, Pengelolaan Wakaf/Lembaga Kenazhiran, dan Operasional. Dalam penyusunan laporan keuangan, BWI berpedoman kepada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tantang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang diimodifikasi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Hal ini dilakukan karena BWI menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

   Aset Lainnya sebesar Rp0 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK MIGAS Tahun 2025 *Audited* sebesar minus Rp1.852.369.953.970,00 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.930.081.767.141,00 dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK MIGAS (BA 999.08) sebesar Rp113.720.316.499,00 dan dilakukan penyesuaian atas penyajian Ekuitas Negatif sebesar minus Rp36.008.503.328,00.

   Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Bukan Satker	(1.852.369.953.970)
Penyesuaian Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.930.081.767.141
Dikurangi Ekuitas Bersih Satker SKK Migas BA 999.08	(113.720.316.499)
Penyesuaian Penyajian Ekuitas Negatif	36.008.503.328
Aset Lainnya yang berasal dari SKK Migas	**-**

   Selanjutnya terhadap penyesuaian pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 yang membubarkan kelembagaan BPMIGAS, pemerintah telah menerbitkan beberapa payung hukum sebagai berikut:

   1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu migas dialihkan ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.

   2) Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, dan Organisasi, dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain menetapkan bahwa:

      a) Pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas);

b) Seluruh personalia Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada SKSP Migas.

3) Keputusan Menteri ESDM Nomor 3136 K/73/MEM/2012, yang antara lain menetapkan bahwa:

a) Para pekerja yang semula jabatannya sebagai Wakil Kepala dan Deputi pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas dialihkan pada jabatan yang sama pada SKSP Migas;

b) Seluruh pejabat dan pekerja lainnya dialihkan sebagai pejabat dan pekerja pada SKSP Migas dengan jabatan yang sama.

4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain mengatur bahwa pegawai SKK Migas untuk pertama kali berasal dari pengalihan pegawai eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dapat diketahui bahwa :

a) Tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara eks BPMIGAS dengan para pekerjanya.

b) Tidak ada kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh Pemerintah terkait pengalihan para pekerja eks BPMIGAS baik ke SKSP Migas maupun ke SKK Migas.

7. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.375.322.629.361,00 dan Rp22.246.225.752.806,00. Aset Lainnya sebesar Rp22.375.322.629.361,00 merupakan Aset Bersih Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2025 *Audited*. Laporan Keuangan BPKH yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan syariah, PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

8. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai UBL Satker dan UBL Bukan Satker. Hal ini dilakukan mengingat OJK sebagai sebuah lembaga yang independen, namun di sisi lain juga merupakan UBL Satker dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.08 (BA BUN Belanja Lain-Lain).

Aset bersih OJK selaku satker BA 999.08 per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp14.945.729,00.

Selanjutnya, sebagai UBL Bukan Satker OJK mulai tahun 2014 mulai melakukan pungutan. Pungutan ini dilakukan sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang OJK dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam PP di atas, mengatur antara lain bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal pungutan pada tahun berjalan

melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Otoritas Jasa, selaku lembaga independen nilai aset OJK per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.252.784.520.982,00 dan Rp8.588.496.171.623,00. Saldo Aset Lainnya dari OJK sebagai bukan satker Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan OJK yang telah diaudit.

Berdasarkan dua Laporan Keuangan OJK yaitu selaku satuan kerja BA BUN 999.08 dan OJK selaku lembaga independen, maka untuk konsolidasi Laporan Keuangan atas nilai aset bersih OJK per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.252.784.520.982,00 dan Rp8.588.481.225.894,00. Saldo ini merupakan nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena OJK selaku satker BA BUN 999.08, laporan keuangannya telah dikonsolidasi pada LK BA BUN 999.08.

Laporan Keuangan OJK disusun berdasarkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

D.2.1.6.8. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PADA ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp378.446.911.948.316,00 dan Rp346.296.838.636.420,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Aset Lainnya (BA 999.03)	403.355.762.653	402.077.317.174
2.	Aset Lainnya (BA 999.08)	142.033.822.706	171.658.244.411
3.	Aset Lainnya (BA 999.99)	377.901.522.362.957	345.723.103.074.835
Jumlah		**378.446.911.948.316**	**346.296.838.636.420**

C.2.1.6.8.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BA 999.03

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	BA 999.03 – Eks Kelolaan PT PPA	1.684.998.279	1.182.858.342
2.	BA 999.03 – Aset Eks Pertamina	401.398.823.915	400.685.355.608
3.	BA 999.03 – Aset Lain-lain BUN (Eks HTBI)	271.940.459	182.975.504
4	BA 999.03 – Aset Lain-lain BUN (Eks BPPN)	-	26.127.720
Jumlah		**403.355.762.653**	**402.077.317.174**

1. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET EKS KELOLAAN PT PPA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain eks Kelolaan PT PPA yang berada pada pengelolaan LMAN per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.684.998.279,00 dan Rp1.182.858.342,00.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan	Posisi 1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2025
Gedung dan Bangunan	1.182.858.342	502.139.937	-	1.684.998.278
Jumlah	**1.182.858.342**	**502.139.936**	**-**	**1.684.998.278**

2. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET EKS PERTAMINA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain eks Pertamina yang berada pada pengelolaan LMAN per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp401.398.823.915,00 dan Rp400.685.355.608,00.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan	Posisi 1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2025
Kawasan	400.296.290.985	945.310.930	-	401.241.601.915
Non-Kawasan	389.064.623	-	(231.842.623)	157.222.000
Jumlah	**400.685.355.608**	**945.310.9330**	**(231.842.623)**	**401.398.823.915**

3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET LAIN-LAIN BUN (EKS HTBI)

Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain BUN (eks HTBI) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp271.940.459,00 dan Rp182.975.504,00.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan	Posisi 1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2025
Gedung dan Bangunan	182.975.504	88.964.955	-	271.940.459
Jumlah	**182.975.504**	**88.964.955**	**-**	**271.940.459**

4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET LAIN-LAIN BUN (EKS BPPN)

Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain BUN (eks BPPN) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp26.127.720,00.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2025
Gedung dan Bangunan	26.127.720	-	26.127.720	-
Jumlah	**26.127.720**	**-**	**26.127.720**	**-**

5. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET LAIN-LAIN BUN (EKS BDL)

Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain BUN (eks BDL) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau belum memperhitungkan penyusutan. Pada tahun 2025, LMAN mendapatkan penambahan Aset Kelolaan sebanyak 6 (enam) unit Aset eks BDL berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-134/KN/2025 tanggal 11 November 2025. Penyerahkelolaan Aset Eks BDL dimaksud disertai dengan pengalihan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran hak nasabah penyimpan dana (NPD) Bank Dalam Likuitasi kepada LMAN. Penyerahkelolaan ini merupakan penyerahkelolaan pertama kali atas Aset eks BDL kepada LMAN.

C.2.1.6.8.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.08

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp142.033.822.706,00 dan Rp171.658.244.411,00. Akumulasi

penyusutan dan amortisasi aset lainnya terdiri dari:

(dalam rupiah)

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2025	31 Desember 2024
999.08	Otoritas Jasa Keuangan		
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	35.558.130.252	69.709.081.741
999.08	SKK Migas		
	Akumulasi Amortisasi *Software*	102.504.145.547	100.316.693.576
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	1.948.048.294	1.580.108.550
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	2.023.498.613	52.360.544
Jumlah		**142.033.822.706**	**171.658.244.411**

C.2.1.6.8.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.99

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp377.901.522.362.957,00 dan Rp345.723.103.074.835,00, mengalami kenaikan sebesar Rp32.178.419.288.122,00 atau 9,31 persen yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset lain-lain Aset Eks Pertamina, akumulasi penyusutan aset lain-lain aset BMN *Idle*, akumulasi penyusutan aset KKKS dan akumulasi penyusutan aset PKP2B.

(dalam rupiah)

Kelompok	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi penyusutan aset eks Pertamina	-	-
Akumulasi penyusutan aset BMN *Idle*	5.889.688.178	6.113.239.732
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada PPBMN	8.507.400	3.604.238.511
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada SKK Migas	368.551.240.919.441	336.347.544.867.366
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada BPMA	7.419.384.445.734	7.663.075.772.814
Akumulasi penyusutan aset PKP2B	1.793.554.185.693	1.673.035.046.864
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	111.864.531.493	24.660.630.984
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada PPP BUN	19.580.085.018	5.069.278.564
Jumlah	**377.901.522.362.957**	**345.723.103.074.835**

1. Akumulasi Penyusutan Aset eks Pertamina

Akumulasi Penyusutan Aset eks Pertamina s.d. tahun 2025 dan akhir tahun 2024 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Jumlah
Saldo awal	-
Akumulasi penyusutan atas Transfer Masuk Penarikan Sebagian Aset Kelolaan LMAN kepada Pengelola Barang sesuai Kepdirjen Nomor KEP-25/KN/2025 tanggal 5 Maret 2025 dan BAST Nomor BAST-1/LMAN/2025	1.749.833.872
Menghapus akumulasi penyusutan untuk Aset yang diserahkan ke Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Penetapan Status Penggunaan Nomor 85/KM.6/2025	(1.749.833.872)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Jumlah
tanggal 14 Maret 2025 dan 11/KM.6/KN.4/2025 tanggal 14 Maret 2025 serta BAST Nomor BA-6/KN/2025 tanggal 16 April 2025	
Saldo s.d. Desember 2025	**-**

2. Akumulasi Penyusutan Aset BMN *Idle*

Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat maka diimplementasikan penyusutan BMN termasuk untuk BMN idle yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang.

(dalam rupiah)

No.	Akun Neraca	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	-	-	-
2	Gedung dan Banguan	12.836.831.034	5.889.688.178	6.947.142.856
Jumlah		**12.836.831.034**	**5.889.688.178**	**6.947.142.856**

Akumulasi penyusutan pada akhir periode Tahun 2025:

(dalam rupiah)

Akumulasi penyusutan periode Tahun 2024	**6.113.239.732**
Penyusutan Reguler	388.576.013
Koreksi Penyajian Akumulasi Penyusutan	(25.925.246)
Penyusutan Transaksional mutasi tambah BMN *idle*	-
Penyusutan Transaksional mutasi kurang BMN eks *idle*	(586.202.321)
Akumulasi penyusutan periode Tahun 2025	**5.889.688.178**

3. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada PPBMN

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.507.400,00 dan Rp3.604.238.511,00. Akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca terdiri dari akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBM dan HBI. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**3.604.238.511**
Mutasi Tambah	8.507.400
Mutasi Kurang	3.604.238.511
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**8.507.400**

a. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**3.388.629.974**
Mutasi Tambah	-
Transfer masuk dari SKK Migas	-
Mutasi Kurang	3.388.629.974
Pemindahtanganan/Penjualan	3.388.629.974
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**-**

Penjelasan atas penyusutan aset HBM yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal sebesar Rp3.388.629.974,00 merupakan saldo akumulasi penyusutan Aset HBM per 31 Desember 2024;
2) Tidak terdapat mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset HBM pada TA. 2025;
3) Mutasi kurang akumulasi penyusutan aset HBM sebesar Rp3.388.629.974,00 berasal dari:
4) Pemindahtanganan tahun berjalan Rp1.500.615.918,00 pada BMN Eks. KKKS Repsol Andaman B.V;
5) Pemindahtanganan tahun berjalan Rp1.888.014.056,00 pada BMN Eks. KKKS Eni Bukat LTD.
6) Saldo akhir akumulasi penyusutan HBM per 31 Desember 2025 Rp0,00.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**215.608.537**
Mutasi Tambah	8.507.400
Transfer masuk dari SKK Migas	8.507.400
Mutasi Kurang	215.608.537
Pemindahtanganan/Penjualan	215.608.537
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**8.507.400**

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal sebesar Rp215.608.537,00 merupakan saldo akumulasi penyusutan Aset HBI per 31 Desember 2024;
2) Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp8.507.400,00 merupakan transfer masuk dari SKK Migas pada KKKS PT. Pertamina Hulu Energi Metana Sumatera 7;
3) Mutasi kurang akumulasi penyusutan HBM sebesar Rp215.608.537,00 yang merupakan pemindahtanganan/Penjualan BMN Eks KKKS PT. Pertamina Hulu Energi Metan Tanjung II;
4) Saldo akhir akumulasi penyusutan aset HBI sebesar Rp8.507.400,00.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada SKK Migas

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp368.551.240.919.441,00 dan Rp336.347.544.867.366,00. Akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca terdiri dari akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBM dan HBI. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

Akumulasi penyusutan aset non tanah terdiri dari:

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**336.230.342.612.027**
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan	**33.430.190.301.696**
Penyusutan Tahun Berjalan	29.017.934.779.323
Koreksi Tambah	4.412.255.522.373
Mutasi Kurang:	**1.229.253.058.279**
Koreksi Kurang	1.229.253.058.279
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**368.431.279.855.444**

a. Saldo awal sebesar Rp336.230.342.612.027,00 merupakan saldo akumulasi penyusutan aset HBM per 31 Desember 2024 (*audited*).

b. Penambahan penyusutan HBM sebesar Rp33.430.190.301.701,00 berasal dari:

1) Beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp29.017.934.779.323,00;

2) Koreksi tambah penyusutan sebesar Rp4.412.255.522.373,00 disebabkan karena adanya koreksi tambah nilai perolehan HBM, perubahan kategori. perubahan tanggal PIS, serta adanya aset perolehan tahun sebelum tahun 2025 yang baru dicatatkan ditahun 2025.

c. Pengurangan penyusutan HBM sebesar Rp1.229.253.058.279,00 berasal dari koreksi kurang penyusutan yang disebabkan koreksi kurang nilai perolehan HBM. perubahan kategori. perubahan tanggal PIS. penghapusan aset. dan aset yang dalam proses penghapusan.

d. Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM sebesar Rp368.431.279.855.444,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**117.202.255.339**
Mutasi Tambah:	**6.810.406.090**
Penyusutan Tahun Berjalan	5.292.602.612
Koreksi Tambah	1.517.803.478
Mutasi Kurang:	**4.051.597.432**
Koreksi Kurang	4.043.090.031
Transfer Keluar	8.507.401
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**119.961.063.997**

a. Saldo awal sebesar Rp117.202.255.339,00 merupakan saldo akumulasi penyusutan aset HBI per 31 Desember 2024 (*audited*).

b. Penambahan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp6.810.406.090,00 terdiri dari:

1) Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp5.292.602.612,00;

2) Koreksi tambah penyusutan sebesar Rp1.517.803.478,00 disebabkan karena adanya koreksi tambah nilai perolehan HBI, perubahan kategori, perubahan tanggal PIS, serta adanya aset perolehan tahun sebelum tahun 2025 yang baru dicatatkan ditahun 2025.

c. Pengurangan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp4.051.597.432,00 berasal dari

1) Koreksi kurang penyusutan sebesar Rp4.043.090.031,00 yang disebabkan koreksi kurang nilai perolehan HBI, perubahan kategori, perubahan tanggal PIS, penghapusan aset, dan aset yang dalam proses penghapusan;

2) Transfer keluar penyusutan sebesar Rp8.507.401,00 atas penyerahan HBI KKKS PT. Pertamina Hulu Energi Metana Sumatera 7.

d. Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI sebesar Rp119.961.063.997,00.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada BPMA

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp7.419.384.445.734,00 dan Rp7.663.075.772.814,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM

(dalam rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2025	**7.661.691.650.632**
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan:	**356.353.457.364**
Koreksi Saldo Awal Tambah	-
Penyusutan Tahun Berjalan	356.353.457.364
Koreksi Tambah	-
Mutasi Kurang :	**600.249.645.128**
Koreksi kurang	600.249.645.128
Koreksi saldo awal Kurang	-
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**7.417.795.462.868**

a. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp7.661.691.650.632,00 merupakan saldo akumulasi penyusutan aset HBM per tanggal 31 Desember 2024;

b. Mutasi tambah sebesar Rp356.353.457.364,00 merupakan penyusutan tahun berjalan;

c. Mutasi kurang sebesar Rp600.249.645.128,00 merupakan koreksi penyusutan;

d. Saldo akhir akumulasi penyusutan aset non tanah HBM per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.417.795.462.868,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI

(dalam rupiah)

Saldo 1 Januari 2025	**1.384.122.182**
Mutasi Tambah:	**204.860.684**
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB	-
Penyusutan Tahun Berjalan	196.457.752
Koreksi Tambah	8.402.932
Mutasi Kurang:	**-**
Koreksi Kurang	-
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**1.588.982.866**

a. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp1.384.122.182,00 merupakan saldo akumulasi penyusutan aset HBI per 31 Desember 2024;

b. Mutasi tambah sebesar Rp204.860.682,00 disebabkan dari penyusutan tahun berjalan sebesar Rp196.457.791,00 dan koreksi penyusutan sebesar Rp8.402.931,00;

c. Saldo akhir akumulasi penyusutan aset non tanah HBI per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.588.982.864,00.

5. Akumulasi Penyusutan Aset PKP2B

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.793.554.185.693,00 dan Rp1.673.035.046.864,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo 1 Januari 2025	**1.673.035.046.864**
Mutasi Tambah:	**120.525.966.568**
Penyusutan	78.891.696.291
Koreksi Akumulasi Penyusutan	41.634.270.277
Mutasi Kurang:	**6.827.739**
Koreksi Akumulasi Penyusutan	6.827.739
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**1.793.554.185.693**

Penjelasan atas nilai akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal merupakan saldo Akumulasi penyusutan aset non tanah saldo akumulasi penyusutan aset HBM per 31 Desember 2024 (*audited*) sebesar Rp1.673.035.046.864,00 pada PT Berau Coal;

b. Mutasi tambah Akumulasi penyusutan Aset Non Tanah sebesar Rp120.525.966.568,00 merupakan penyusutan tahun 2025 pada PT Berau Coal sebesar Rp78.891.696.291,00 dan koreksi akibat penyesuaian masa manfaat dengan kode barang sesuai PMK 29/PMK.06/2010 dan KMK 295/KM.6/2019 sebesar Rp41.634.270.277,00;

c. Mutasi kurang Akumulasi penyusutan Aset Non Tanah sebesar Rp6.827.739,00 dikarenakan aset tersebut merupakan aset ekstrakomptabel pada PT Berau Coal;

d. Saldo Akhir 31 Desember 2025 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya PKP2B sebesar Rp1.793.554.185.693,00 yaitu berasal dari PT Berau Coal.

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp111.864.531.493,00 dan Rp24.660.630.984,00. Akumulasi penyusutan aset tersebut sebesar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Akun Neraca	Akumulasi Penyusutan Awal	Beban Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan Akhir
1.	Aset Eks PT TLI	27.743.209.857	3.082.578.873	30.825.788.730
2.	Aset GIZ	-	183.780.000	183.780.000
3.	Aset PT AAF	79.460.911.680	1.394.051.083	80.854.962.763
	Jumlah	**107.204.121.537**	**4.660.409.956**	**111.864.531.493**

7. Akumulasi amortisasi aset lainnya pada PPP BUN

Saldo Akumulasi amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp19.580.085.018,00 dan Rp5.069.278.564,00 merupakan amortisasi aset berupa lisensi pada satker Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan BUN.

D.2.2. KEWAJIBAN

D.2.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

D.2.2.1.1. UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.394.915.378.996,00 dan Rp4.320.940.427.530,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp926.025.048.534,00 atau 21,43 persen.

Utang PFK BA BUN 999.99

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.394.915.378.996,00 dan Rp4.320.940.427.530,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Utang PFK DJPb	985.488.607.282	809.372.413.024
2.	Utang PFK DJKN	1.606.099.797	-
3.	Utang PFK DJPK	2.407.820.671.917	3.511.568.014.506
Jumlah		**3.394.915.378.996**	**4.320.940.427.530**

1. UTANG PFK BA 999.99 DJPb

Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJPB sebesar Rp985.488.607.282,00 rincian Utang PFK Pegawai sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Badan Penyelenggara	Akun	Nilai	
			31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	BPJS Kesehatan	211111, 211112, 211116, 211117, 211118, 211119, & 211121	930.530.645.381	764.116.700.443
2	Perum BULOG	211113	104.281.107	12.167.064
3	PT Taspen	211114	51.475.703.402	44.610.450.818
4	PT Asabri	211151	2.997.443.032	252.560.339
5	BP Tapera	211115, 211152, 211153, & 211154	380.534.360	380.534.360
Jumlah			**985.488.607.282**	**809.372.413.024**

Saldo Utang PFK Pegawai di atas diperoleh dari saldo awal Utang PFK Pegawai Bulan Januari 2025 ditambah penerimaan dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2025 dikurangi pembayaran dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2025. Apabila Badan Penyelenggara menerima kelebihan penerimaan pada tahun angggaran berjalan (tahun lalu), maka saldo utang (awal utang) ikut diperhitungkan dengan saldo 118122 berjalan (tahun lalu). Pelunasan atas piutang Akun 118122 tahun lalu menggunakan akun 811921 di tahun berjalan juga turut diperhitungkan dalam komponen penerimaan penambah saldo Utang PFK 2025.

2. UTANG PFK 999.99 DJKN

Utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3. Adapun porsi hak Nasabah Penyimpan Dana dimaksud berasal dari 3 (tiga) bank, yaitu:

a. PT Bank Global Internasional, Tbk (DL), dengan pembagian hak Pemerintah sebesar 96,3 persen dan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,70 persen;

b. PT Bank Asiatic (DL), dengan pembagian hak Pemerintah sebesar 99,93 persen dan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 0,07 persen; dan

c. PT Bank Dagang Bali (DL), dengan pembagian hak Pemerintah sebesar 96,40 persen dan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,60 persen.

Adapun nilai utang Utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL tahun 2025 adalah sebesar Rp1.606.099.797,00 sedangkan nilai tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Porsi utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL tahun 2024 sebesar Rp491.306.579,00 telah dibayarkan melalui OJK pada tanggal 24 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Nama Eks Bank Dalam Likuidasi	Saldo Per 31 Desember 2025
1.	Bank Asiatic	3.562.429
2.	Bank Dagang Bali	1.483.693.368
3.	Bank Global Internasional	118.844.000
Jumlah		**1.606.099.797**

3. UTANG PFK BA 999.99 DJPK

Utang Perhitungan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.407.820.671.917,00 dan Rp3.511.568.014.506,00. Utang PFK tersebut merupakan hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada periode penyetoran triwulan berikutnya. Penyetoran periode tahun anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan data penerimaan yang disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan		Nominal	
a.	**Saldo awal tahun 2025 (Utang PFK tahun 2024)**		**3.511.568.014.506**
b.	**Penerimaan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2025**		**21.048.328.220.771**
c.	**Penyetoran Tahun 2025**		
	Penyetoran Utang Saldo PFK Tahun 2024	(3.495.678.522.480)	
	Penyetoran Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2025	(5.449.661.864.660)	
	Penyetoran Pajak Rokok Triwulan II Tahun 2025	(4.808.018.412.949)	
	Penyetoran Pajak Rokok Triwulan III Tahun 2025	(5.147.533.502.213)	
	Penyetoran Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2025	(3.250.929.251.246)	
	Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok	(254.009.812)	
Jumlah			**(22.152.075.563.360)**
d.	Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada periode berikutnya setelah Pemda memenuhi persyaratan		2.407.820.671.917

Hak Pemerintah Daerah yang akan disetorkan pada periode tahun berikutnya adalah sebesar Rp2.407.820.671.917,00 yang terdiri dari:

a. Penerimaan Pajak Rokok Bulan Desember 2025 yang telah dikurangi dengan penyetoran restitusi kelebihan pembayaran Pajak Rokok pada Bulan Desember 2025, dengan nilai sebesar Rp2.080.624.421.500,00.

b. Penyetoran yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp327.196.250.417,00 karena belum terpenuhinya ketentuan/persyaratan penyetoran dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Daerah	Utang Pajak Rokok
Provinsi Bangka Belitung	18.313.337.344
Provinsi Bengkulu	25.190.210.631
Provinsi Sulawesi Tenggara	133.036.336.260
Provinsi Maluku Utara	108.206.796.220
Provinsi Papua	13.023.095.834
Provinsi Papua Barat Daya	29.426.474.128
Jumlah	**327.196.250.417**

Rincian utang pajak rokok TA 2025 per pemda, sebagaimana tercantum pada Lampiran LD30.

D.2.2.1.2. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp191.669.817.125.697,00 dan Rp114.541.686.926.029,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp77.128.130.199.668,00 atau 67,34 persen.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Instansi	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	(BA 999.00)	5.721.816.371.796	11.936.770.692.629	(6.214.954.320.833)	(52,07)
2	(BA 999.03)	1.062.922.464	253.152.246	809.770.218	319,87
3	(BA 999.05)	6.309.107.743.135	20.619.467.553.611	(14.310.359.810.476)	(69,40)
4	(BA 999.08)	158.930.634.714.483	68.647.993.489.467	90.282.641.225.016	131,52
5	(BA 999.99)	20.958.289.580.794	13.585.614.307.816	7.372.675.272.978	54,27
Jumlah		**191.920.911.332.672**	**114.790.099.195.769**	**77.130.812.136.903**	**67,19**
Eliminasi		**(251.094.206.975)***	**(248.412.269.740)**	**(2.681.937.235)**	**1,08**
Jumlah Bersih		**191.669.817.125.697**	**114.541.686.926.029**	**77.128.130.199.668**	**67,34**

**)Keterangan:*
Pemindahbukuan PNBP panas bumi Transaksi Khusus DJA BA 999.99 dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada:

D.2.2.1.2.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.00

Jumlah Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp5.721.816.371.796,00 dan Rp11.936.770.692.629,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp6.214.954.320.833,00 atau 52,07 persen yang salah satunya disebabkan karena penurunan pada utang jangka pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan pada Direktorat PKN. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada UAPBUN AP adalah Utang kepada Pihak Ketiga berupa utang dari Retur SP2D, utang yang berasal dari penerimaan reklasifikasi kelebihan setoran UP pada satker Pengembalian SAL, utang dari adanya kesalahan perbankan, dan utang *invoice* yang berasal dari SPM yang belum SP2D.
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Utang	Jumlah	Penjelasan
1	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)	5.718.153.716.684	1. Utang retur SP2D di Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN Daerah sebesar Rp5.718.152.916.684. 2. Utang yang berasal dari penerimaan reklasifikasi kelebihan setoran uang persediaan yang belum diterbitkan SPM pengembalian pendapatannya pada satker pengembalian penerimaan negara atas beban SAL sebesar Rp800.000
2	Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan (219944)	3.662.655.112	1. Berdasarkan Surat Kepala Divisi Layanan Jasa Perbankan nomor 28/7/DPPT-GKPP-LJPSrt/B tanggal 7 Januari 2026 hal Informasi stastus transaksi valas tanggal 31 Desember 2025, terdapat 2 transaksi SP2D: a) 259991116000035 tgl 31 des 25 nominal $89.468 b) 259991112000145 tgl 31 des 25 nominal $129.050 (nilai total ekuivalen Rp3.653.620.960) dengan status "*Failure*/gagal" dengan keterangan "*Rejected at CBS EOD*" sehingga transaksi tersebut tidak dapat tersalurkan dan secara otomatis dinihilkan ke RKUN pada tanggal 31 Desember 2025. Penyaluran atas transaksi tersebut diselesaikan melalui mekanisme retur SP2D sesuai Surat Kepala Subdit SAPPK nomor S-2/PB.36/2026 tanggal 8 Jan 26 hal Permohonan Pemindahbukuan Dana Dalam Rangka Transaksi Retur. 2. Berdasarkan surat Kepala Divisi Banking Operations nomor BOP/5.4/125 tanggal 7 Januari 2026 hal terlambat salur SP2D 259991403002401000001 *docdate* 31 Desember 2025, terdapat keterlambatan penyaluran SP2D retur dengan nomor 259991403002401 sebesar Rp9.034.152 yang telah disalurkan pada 2 Januari 2025. terhadap keterlambatan tersebut telah dikenakan denda dan peringatan sesuai surat Direktur PKN nomor S-11/PB.3/2026 tanggal 9 Januari 2026
Jumlah		**5.721.816.371.796**	

Rincian utang pihak ketiga pada BA 999.00 tersaji dalam Lampiran LD31.

D.2.2.1.2.2. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.03

Nilai kewajiban jangka pendek pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.062.922.464,00 dan Rp253.152.246,00. Nilai tersebut merupakan kewajiban kepada penyedia jasa *upgrade*/renovasi aset yang mana hasil pekerjaan *upgrade*/renovasinya telah diterima oleh LMAN namun belum dilakukan pembayaran.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.03 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Puri Casablanca Tahap I	2.453.000	2.453.000
Aset Danadyaksa Cikini	1.877.150	1.877.150
Aset Kebayoran Lama 47	-	153.759.989
Aset Latumenten	-	69.215.757
Aset Mangga Besar XIII Sawah Besar	-	25.846.350
Aset Kebayoran Lama 16B	10.489.500	-
Aset Padang Pondok 180	69.691.601	-
Aset Mangga Besar Tangki	12.789.420	-
Aset Ruko Tanjung Pinang	113.721.753	-
Aset Ruko Tanjung Pinang	15.256.686	-
Aset Medan Yos Sudarso 60 AA-BB	46.712.143	-

Rincian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Ancol Barat III	9.753.210	-
Aset Kondominium Graha Family Prime A-302	8.741.595	-
Aset Cilandak	766.526.127	-
Aset Kilang LNG Arun	4.910.279	-
Total	**1.062.922.464**	**253.152.246**

D.2.2.1.2.3. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.05

Utang kepada Pihak Ketiga dalam LKBUN 999.05 adalah utang/kewajiban yang terjadi akibat kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil secara nontunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain Bank Indonesia TDF-TKD Pemda di Bank Indonesia.

Total Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.309.107.743.135,00 yang terdiri dari utang penyaluran pokok DBH tahun 2023 dan 2024 yang disimpan pada rekening TDF TKD sebesar Rp6.288.034.879.188,00 dan utang penyaluran remunerasi DBH yang disimpan pada rekening TDF TKD sebesar Rp21.072.863.947,00. Pada tahun 2025 tidak ada penyaluran DBH/DAU dalam bentuk TDF. Penurunan saldo disebabkan penarikan oleh Pemerintah Daerah dan penyaluran dana TDF ke Pemerintah Daerah pada tahun 2025.

Rincian utang pihak ketiga TDF pada BA 999.05 tersaji dalam Lampiran LD32.

D.2.2.1.2.4. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.08

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp158.930.634.714.483,00 dan Rp68.647.993.489.467,00. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).
Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian BA Pel	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kementerian Keuangan	158.880.298.399.542	68.601.134.793.366
MPP Kartu Prakerja	-	2.512.309.626
BP Batam	36.500.000	1.001.704.850
SKK Migas	50.299.814.941	43.344.681.625
Total	**158.930.634.714.483**	**68.647.993.489.467**

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada:

1. KEMENTERIAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan sebesar Rp158.880.298.399.542,00.

(dalam rupiah)

No	Uraian Entitas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	ICSID Sekretariat Jenderal	3.679.236.000	3.555.347.850
2	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat	-	1.782.088.140
3	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua	-	19.048.682.237
4	Satker Pengguna Anggaran Dana Kompensasi	158.876.619.163.542	68.576.748.675.139
Jumlah		**158.880.298.399.542**	**68.601.134.793.366**

a. ICSID Sekretariat Jenderal

ICSID Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.679.236.000,00 dan Rp3.555.347.850,00, Utang kepada Pihak Ketiga tersebut berasal dari biaya pembayaran tahap III atas penyedia Jasa Hukum Rajah & Tann LLP sebesar USD200,000.00 sesuai Perjanjian Penyediaan Jasa Hukum nomor 1/PPK-ICSID/2014 tanggal 2 Desember 2014 ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai dan biaya transfer yang dihitung berdasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-940/MK.01/2017 tanggal 24 November 2017 hal Usulan Penggunaan Anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1/MK.1/SJ.44/2024 tanggal 18 September 2024 hal Usulan Alokasi Anggaran Untuk Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga atas Penanganan Arbitrase di ICSID Tahun 2024. Angka tersebut mengalami perubahan nilai dibandingkan 31 Desember 2024 karena adanya selisih kurs yang digunakan sebagai rujukan pelaporan. Nilai kurs penutup BI yang digunakan per 31 Desember 2024 adalah Rp16.157,00/USD, sedangkan nilai kurs penutup BI yang digunakan per 31 Desember 2025 adalah Rp16.720,00/USD

Dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian		Nilai
1	Pembayaran Tahap III atas Penyedia Jasa Hukum oleh Rajah dan Tann LPP	=USD200,000 x Rp16.720 (Nilai Kurs Penutup BI per 31 Des 2025)	3.344.000.000
2	PPN (10% dari Biaya Pengacara)	=USD20,000 x Rp16.720	334.400.000
3	Biaya Transfer valuta asing	=USD50 x Rp16.720	836.000
Total Nilai Utang kepada Pihak Ketiga			**3.679.236.000**

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp1.782.088.140,00. Utang sebesar Rp1.782.088.140,00 yang timbul dari pembaruan *progress* pekerjaan Kegiatan OAB TA 2024 (sesuai BAPP Nomor BAPP-007/WPB/2024) telah diselesaikan. Pembayaran *progress* tersebut sebelumnya belum dilakukan hingga akhir tahun karena menggunakan mekanisme RPATA, yang pembayarannya dilakukan sekaligus setelah seluruh pekerjaan OAB TA 2024 selesai.

(dalam rupiah)

Saldo Utang Tahun 2024	Realisasi Pembayaran Tahun 2025	Sisa Utang (31 Desember 2025)
1.782.088.140	1.782.088.140	-

c. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua sebesar Rp0,00. Saldo Utang kepada pihak ketiga pada tahun 2024 yang merupakan tagihan termin IV kontrak ongkos angkut beras kepada PD Irian Bhakti Papua atas prestasi pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 dan telah dibayarkan pada tahun 2025.

d. Satker Pengguna Anggaran Dana Kompensasi

Dit PNBP SDA KND (Dana Kompensasi) sebesar Rp158.876.619.163.542,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2024 *Audited* adalah sebesar Rp68.576.748.675.139,00. Dan atas utang tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian

sebagai berikut:

1) Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBT Minyak Solar Tahun 2024, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-280/MK.02/2025 tanggal 18 April 2025 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (*Gasoline*) RON 90 Periode Tahun 2024 sebesar Rp28.603.640.937.149,00.

2) Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Pertalite Tahun 2024, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-280/MK.02/2025 tanggal 18 April 2025 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (*Gasoline*) RON 90 Periode Tahun 2024 sebesar Rp2.403.668.225.426,00.

3) Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-281/MK.02/2025 tanggal 18 April 2025 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar Periode Tahun 2024 sebesar Rp118.541.858.793,00.

4) Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik (TTL) Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-282/MK.02/2025 tanggal 18 April 2025 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Periode Tahun 2024 sebesar Rp37.450.897.653.771,00.

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat pengakuan utang dana kompensasi sebesar Rp158.876.619.163.542,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBT Minyak Solar Tahun 2025, sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 38/T/BA/DJPKN-VII/PPN/04/2026 tanggal 30 April 2026 tentang Perhitungan Kompensasi BBM Tahun 2025 pada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp60.076.399.472.814,00 terdiri atas utang dana kompensasi BBM JBT Minyak Solar sebesar Rp44.986.356.026.766,00 dan utang dana kompensasi BBM JBKP Pertalite sebesar Rp15.090.043.446.048,00.

2) Utang Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2025 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 40/T/BA/DJPKN-VII/PPN/04/2026 tanggal 30 April 2026 tentang Perhitungan Kompensasi JBT Minyak Solar Tahun 2025 Pada PT AKR Corprindo TBK sebesar Rp325.910.607.704,00.

3) Utang Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik (TTL) Tahun 2025 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 21/T/BA/DJPKN-VII/PPN/04/2026 tanggal 30 April 2026 tentang Perhitungan Kompensasi Listrik Tahun 2025 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp84.864.810.768.687,00.

4) Utang Pemerintah atas pelaksanaan kebijakan Diskon Biaya Listrik Tahun 2025 (Januari dan Februari) sebesar Rp13.609.498.314.337,00, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-80/MK/AG/2026 tanggal 5 Mei 2026 yang menyatakan Pemerintah mengakui kewajiban atas program diskon biaya listrik periode Januari s.d. Februari 2025 dengan nilai sebesar Rp13.609.498.314.337,00 sesuai Laporan Hasil Reviu BPKP Nomor PE.12.03/LHP-155/D102/01/2025 tanggal 17 Oktober 2025 dan akan dicatat pada Belanja Lain-lain dengan klasifikasi jangka pendek yang penyelesaiannya dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Sehingga saldo Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp158.876.619.163.542,00.

2. MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRAKERJA

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.512.309.626,00. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan realisasi dana atas penyelesaian pekerjaan yang dicadangkan pada RPATA yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga pada TA 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.

3. BP Batam

BP Batam sebesar Rp36.500.000,00, merupakan pembayaran untuk Termin 2 Pekerjaan Belanja Sewa Colocation Server pada BP Bintan yang selesai pada tanggal 31 Desember 2025.

4. SKK MIGAS

SKK Migas sebesar Rp50.299.814.941,00, merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar	526.312.111	1.764.284.135
Utang Kepada Pihak Lainnya	49.773.502.830	41.580.397.490
Total	50.299.814.941	43.344.681.625

Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar merupakan tunggakan kewajiban tahun 2025 dan saldo Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan utang atas pekerjaan akhir tahun yang dananya terdapat pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

5. MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRAKERJA

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-

masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.512.309.626,00. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan realisasi dana atas penyelesaian pekerjaan yang dicadangkan pada RPATA yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga pada TA 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.

6. BP Batam

BP Batam sebesar Rp36.500.000,00, merupakan pembayaran untuk Termin 2 Pekerjaan Belanja Sewa Colocation Server pada BP Bintan yang selesai pada tanggal 31 Desember 2025.

7. SKK MIGAS

SKK Migas sebesar Rp50.299.814.941,00, merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar	526.312.111	1.764.284.135
Utang Kepada Pihak Lainnya	49.773.502.830	41.580.397.490
Total	50.299.814.941	43.344.681.625

Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar merupakan tunggakan kewajiban tahun 2025 dan saldo Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan utang atas pekerjaan akhir tahun yang dananya terdapat pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

D.2.2.1.2.5. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TRANSAKSI KHUSUS BA 999.99

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp20.707.195.373.819,00 dan Rp13.337.202.065.076,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Instansi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPB	170.025.069.409	161.875.635.664
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJKN	364.172.667	1.660.048.429
3.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA	20.787.848.490.668	13.422.069.786.625
4.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJSPSK	51.848.050	8.864.098
Jumlah		**20.958.289.580.794**	**13.585.614.334.816**
Eliminasi		**(251.094.206.975)***	**(248.412.269.740)**
Total		**20.707.195.373.819**	**13.337.202.065.076**

**)Keterangan:*
Pemindahbukuan PNBP panas bumi Transaksi Khusus DJA BA 999.99 dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah

a. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJPB

Utang Kepada Pihak Ketiga DJPB sebesar Rp170.025.069.409,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Utang IJP Bank/Pos Persepsi TA 2025 (termasuk Utang IJP rampung 2022-2024)	39.693.282.000	IJP s.d Pembayaran di Desember 2025
2	Utang PPN RTGS/Swift Bank pada BI s.d BAR September 2025	316.412.991	BAR PPN BI s.d September 2025
3	Utang kepada pihak ketiga karena kesalahan penyetoran oleh pihak ketiga tersebut	1.000.000	01/BA/LK/DJPb-TSP/2024 18 Jan 24
4	Utang Kekurangan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2025 Asabri	4.550.862.588	3/BA/LK/DJPb-ASB/2026
5	Utang Kekurangan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2025 Taspen	441.020.584	01/BA/LK/DJPb-TSP/2026
6	Utang Kekurangan pensiun program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) Triwulan IV 2025	1.848.697.966	01/BA/LK/DJPb-TSP/2026
7	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan TW IV 2025 BPJS	86.194.155.171	BA-8/PB.7/2026
8	Kekurangan Pencairan Dana JKK TW IV 25 Asabri	831.678.758	BA-4/PB.7/2026
9	Kekurangan Pencairan Dana JKm TW IV 25 Asabri	1.086.548.048	BA-5/PB.7/2026
10	Kekurangan Pencairan Dana JKK TW IV 25 Taspen	2.839.539.777	BA-6/PB.7/2026
11	Kekurangan Pencairan Dana JKm TW IV 25 Taspen	8.518.619.338	BA-7/PB.7/2026
12	Utang Kepada Pihak Ketiga Satker PPP BUN	23.703.252.188	Tagihan yang belum terbayar/RPATA
Jumlah		**170.025.069.409**	

b. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJKN

Utang Kepada Pihak Ketiga DJKN sebesar Rp364.172.667,00 terdiri dari kewajiban pembayaran kepada nasabah penyimpan dana atas penetapan status penggunaan aset properti eks BDL khususnya 3 (tiga) bank yang memiliki porsi kewajiban kepada pihak ketiga yang harus disisihkan dan dibayarkan oleh Pemerintah sebesar Rp122.151.060,00 dan pengakuan kewajiban atas tagihan penggantian biaya margin IP PEN yang diusulkan Pelaksana Investasi untuk periode November dan Desember Tahun 2025 sebesar Rp242.021.607,00.

c. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJA

Utang Kepada Pihak Ketiga DJA sebesar Rp20.787.848.490.668,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga Migas	17.780.550.082.823	10.654.171.896.758
2	Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi	3.007.298.407.845	2.767.897.889.867
Jumlah		**20.787.848.490.668**	**13.422.069.786.625**

1) Utang Kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Jumlahnya yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.780.550.082.823,00. Sumber dana pembayaran kewajiban kontraktual tersebut berasal dari penerimaan migas pada Rekening Migas Nomor 600.000411980. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	PBB Migas	-	-
2.	*Reimbursement* PPN	-	-
3.	Pajak Air Tanah dan Air Permukaan	-	-
4	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	-	1.074.470.588
5	DMO *Fee* KKKS	1.167.840.500.227	1.371.471.469.018
6	Utang *Underlifting* KKKS	16.612.709.582.596	9.054.316.723.770
7	Utang *Fee* Penjualan Migas	-	227.309.233.382
Jumlah		**17.780.550.082.823**	**10.654.171.896.758**

1. PBB Migas

   Pada tahun 2025 terdapat kewajiban yang berasal dari PBB Migas sebesar Rp8.515.141.940.935,00 yang telah diselesaikan seluruhnya melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Migas Ke RKUN pada bulan Juni 2025. Dengan demikian saldo utang PBB Migas per 31 Desember 2025 adalah nihil.

2. *Reimbursement* PPN

   Mekanisme pembayaran *reimbursement* PPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. KKKS menagihkan *reimbursement* PPN kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas meneruskan tagihan kepada Kementerian Keuangan (dhi. Direktur Jenderal Anggaran).

   Rincian utang *reimbursement* PPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

3. Pajak Air Tanah dan Air Permukaan

   Pajak Air Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi *assumed and discharged* yang diatur dalam PSC.

   Mekanisme penyampaian tagihan permintaan pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan dan kelengkapan dokumen penagihan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan untuk kegiatan usaha hulu migas melalui Rekening Migas Nomor 600.000411.980 pada Bank Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2021 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi.

Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Namun, peraturan Menteri ESDM tersebut belum mengatur mengenai PAT untuk air ikutan dan air tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang masih menjadi *dispute* antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Oleh karena itu, PAT yang ditagihkan oleh pemerintah daerah adalah PAT selain yang berasal dari proses *dewatering*.

Sepanjang periode Tahun 2025 tidak terdapat tagihan Pajak Air Permukaan (PAP). Adapun untuk Pajak Air Tanah (PAT), pada periode 2025 terdapat tagihan dari Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp8.888.763.184,00 pada bulan September 2025 dan sebesar Rp10.649.410.953,00 pada bulan November 2025 yang telah dibayar seluruhnya oleh pemerintah pusat sehingga tidak terdapat utang PAT pada 31 Desember 2025. Apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024, maka utang PAP dan PAT per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) (d/h Pajak Penerangan Jalan Non-PLN

Perubahan nama akun Utang Pajak Penerangan Jalan menjadi Utang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang telah mencabut regulasi terdahulu, yaitu PMK Nomor 9/PMK.02/2016 jo. PMK Nomor 195/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan istilah nama tagihan pada PMK 139 Tahun 2024 menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Seperti halnya Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, PBJT-TL untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas juga merupakan pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi *assumed and discharged* yang diatur dalam PSC. Demikian pula halnya dengan mekanisme penyampaian tagihan dan kelengkapan dokumen penagihan serta mekanisme pembayarannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Per 31 Desember 2025 saldo utang PBJT-TL sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2024 terdapat saldo utang sebesar Rp1.074.470.588,00.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	1.074.470.588
Jumlah		**-**	**1.074.470.588**

Utang PBJT-TL per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.074.470.588,00 telah dibayarkan seluruhnya pada tanggal 8 Januari 2025. Namun melalui surat SKK Migas nomor SRT-

0102/SKKIG0000/2025/S4 tanggal 25 Februari 2025, SKK Migas menyampaikan bahwa terdapat perubahan kontrak Wilayah Kerja Jabung dari semula *cost recovery* dengan skema *assumed and discharged* menjadi *cost recovery* yang diperlakukan sebagai biaya operasi terhitung mulai tanggal 27 Februari 2023. Oleh karena itu, tagihan yang telah dibayarkan oleh pemerintah pada tanggal 8 Januari 2025 dengan total tagihan senilai Rp1.074.470.588,00 menjadi lebih bayar, yaitu sebesar tagihan untuk periode tagihan 27 Februari 2023 s.d. 31 Desember 2023 karena seharusnya tagihan tersebut menjadi kewajiban kontraktor. Atas kelebihan pembayaran tersebut, KKKS Petrochina Jabung telah menyetorkan kembali seluruh nilai kelebihan pembayaran ke RKUN sebesar Rp506.771.973,00 pada tanggal 7 Mei 2025.

5. DMO *Fee* KKKS

Mekanisme pembayaran DMO *Fee* kepada KKKS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. KKKS menagihkan DMO *Fee* kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i Direktur Jenderal Anggaran).

Saldo Utang DMO *Fee* per 31 Desember 2025 sebesar USD69,846,920.00 atau Rp1.167.840.500.227,00 dan 31 Desember 2024 sebesar USD84,884,042.00 atau setara dengan Rp1.371.471.469.018,00. Utang DMO *Fee* KKKS per 31 Desember 2024 sebesar USD84.884.042 tersebut telah dibayarkan seluruhnya, yaitu sebesar USD37.519.412,46 pada bulan Januari 2025 dan sebesar USD47.364.629,47 pada bulan Februari 2025.

Berikut ini rincian DMO *Fee* KKKS per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	KKKS	Tahun 2025	Tahun 2024
1	BP BERAU LTD.,BP MUTURI HOLDINGS B.V., BP WIRIAGAR LTD.	1.038.166	735.439
2	CONOCO PHILIPS (Grissik) LTD / MEDCO E&P (GRISSIK) LTD.	1.346.603	2.651.191
3	JOB PERTAMINA-MEDCO TOMORI SULAWESI	461.476	783.366
4	EXXONMOBIL CEPU LTD	9.360.008	12.868.318
5	PT PHE WMO 20% (Kodeco Energy Ltd.)	18.453	16.453
6	PT MEDCO E&P INDONESIA	-	139.187
7	PT MEDCO E&P INDONESIA (NATUNA)	738.280	604.982
8	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD	399.749	481.462
9	PT SPR LANGGAK	35.320	47.002
10	PT PERTAMINA EP	23.260.432	51.370.127
11	PERTAMINA EP CEPU JTB	688.622	662.275
12	PHE MEDCO TOMORI – JOB P MEDCO	2.840.578	3.370.447
13	PT PHE WMO 80%	510.403	455.080
14	PERTAMINA HULU MAHAKAM	6.740.452	5.309.824
15	TEXCAL ENERGY MAHATO INC. (DH. TEXCAL MAHATO EP LTD sd Maret 2023)	350.067	4.450.173
16	PT SELERAYA MERANGIN DUA	276.267	433.508

No.	KKKS	Tahun 2025	Tahun 2024
17	PT EMP ENERGI GANDEWA	-	505.209
18	PT EMP ENERGI RIAU	448.281	-
19	PT. PHE ONWJ	7.649.674	-
20	PERTAMINA EP CEPU ADK	23.439	-
21	PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR	13.660.650	-
Total		**69.846.920**	**84.884.042**
Ekivalen		**1.167.840.500.227**	**1.371.471.469.018**

6. Utang *Underlifting* KKKS

Underlifting KKKS adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor apabila dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. Saldo utang per 31 Desember 2025 adalah sebesar USD993,583,109.00 atau setara dengan Rp16.612.709.582.596,00, sedangkan saldo utang per 31 Desember 2024 adalah sebesar USD560,395,909.00 atau setara dengan Rp9.054.316.723.770,00. Terhadap Utang atas underlifting KKKS dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Per 31 Desember 2025, dapat disampaikan terdapat nilai *outstanding* utang *underlifting* dari 3 KKKS yang tidak mengalami perubahan karena belum adanya realisasi tagihan yang disampaikan kepada pemerintah. KKKS tersebut, yaitu Inpex Mahakam, Chevron Makassar, dan Energy Equity Epic (Sengkang) PTY Ltd dengan total nilai sebesar USD15,299,969.00.

b. Dari saldo akhir *underlifting* sebesar USD168,105,133.00 merupakan tagihan dari KKKS Pertamina EP Cepu yang berasal dari tagihan baru di luar estimasi, yaitu untuk periode triwulan III 2025.

c. Sisa saldo utang *underlifting* sebesar USD810,178,006.42 berasal dari estimasi baru atas tagihan *underlifting* berdasarkan FQR Preliminary Kuartal IV 2025.

Berikut ini rincian Utang *Underlifting* KKKS per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kontraktor	Tahun 2025	Tahun 2024
1	BP BERAU LTD.	68.734.189	2.888.710
2	BP MUTURI HOLDINGS B.V.	32.792.209	10.918.583
3	BP WIRIAGAR LTD.	5.628.839	-
4	CHEVRON MAKASSAR LTD.	889.905	889.905
5	CHEVRON RAPAK LTD.	-	1.315.403
6	EMP BENTU LTD.	1.328.598	-
7	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY LTD.	117.858	117.858
8	ENI MUARA BAKAU B.V.	5.199.068	-
9	ENI RAPAK DEEPWATER LTD.	289.021	-
10	EXXONMOBIL CEPU LTD.	-	88.488.473
11	INPEX MAHAKAM	14.292.206	14.292.206
12	KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	-	2.806.974
13	MEDCO E&P INDONESIA	-	380.928
14	MEDCO E&P NATUNA LTD.	29.629.007	-
15	MEDCO ENERGI BANGKANAI LTD.	2	-
16	MEDCO ENERGI SAMPANG PTY. LTD.	6.507.636	-
17	PASIR PETROLEUM RESOURCES LTD.	5	-
18	PEARLOIL (SEBUKU) LTD.	725.345	-

No.	Kontraktor	Tahun 2025	Tahun 2024
19	PT PERTAMINA EP	41.975.995	-
20	PT PERTAMINA HULU ENERGI TUBAN EAST JAVA	2.304.057	-
21	PT PERTAMINA HULU ENERGI TOMORI SULAWESI	950.027	-
22	PT PERTAMINA HULU ENERGI WEST MADURA OFFSHORE	1.322.216	-
23	PERTAMINA HULU MAHAKAM	-	46.834.923
24	PT PERTAMINA EP CEPU	319.587.529	306.762.446
25	PT Pertamina EP WK Indonesia	-	58.563.496
26	PT PERTAMINA HULU SANGA SANGA	-	10.203.001
27	PT SELE RAYA BELIDA	4.358	-
28	SELE RAYA MERANGIN DUA	990.457	696.677
29	PT SPR LANGGAK	160.167	-
30	SAKA INDONESIA PANGKAH LTD.	7.113.467	-
31	STAR ENERGY (KAKAP) LTD.	10	3.398.997
32	TATELY N.V.	426.243	
33	TEXCAL MAHATO EP LTD.	8.331.861	11.837.330
34	PT BUMI SIAK PUSAKO	77.478	-
35	PT IMBANG TATA ALAM	4.797.025	-
36	PT MEDCO E&P TARAKAN	500.224	-
37	PT PERTAMINA HULU ROKAN	438.908.110	-
Jumlah		**993.583.109**	**560.395.909**
Ekuivalen		**16.612.709.582.596**	**9.054.316.723.770**

7. Utang *Fee* Penjualan Migas

Utang *fee* penjualan Migas merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang berasal dari tagihan *fee* atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang telah diverifikasi, diteliti dan disepakati bersama antara DJA dan SKK Migas. Per 31 Desember 2025 tidak terdapat terdapat saldo utang *fee* penjualan migas, sedangkan per 31 Desember 2024 terdapat saldo utang *fee* penjualan migas sebesar USD14,068,777.00 atau ekuivalen sebesar Rp227.309.233.382,00 menggunakan kurs JISDOR per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157,00.

Atas utang *fee* tersebut sebesar USD14,068,777.00 telah dilakukan pembayaran di tanggal 8 Januari 2025.

Utang *Fee* Penjualan Migas tersebut merupakan *fee* penjualan Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) periode April s.d. September 2024 yang dihitung berdasarkan kriteria dan besaran tarif imbalan (*fee*) penjualan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 7.K/MG.05/MEM.M/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 21.K/MG.05/MEM.M/2022.

2) UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PANAS BUMI

Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi.

Pada Neraca, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (*reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga *reimbursement* PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji sebesar Rp3.007.298.407.845,00 dan Rp2.767.897.889.867,00.

Rincian Utang kepada pihak ketiga panas bumi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi – Reimbursement PPN	1.009.866.000.484	916.882.156.360
2	Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi - PBB Panas Bumi	2.265.451.749	-
3	Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi – Penggantian Bonus Produksi	46.511.153.901	47.514.671.795
4	Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi – Reimbursement PPN	1.241.657.476.272	1.163.320.344.789
5	Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi – Diestimasi PBB Panas Bumi	430.838.809.356	375.813.805.470
6	Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi – Diestimasi Penggantian Bonus Produksi	25.065.309.108	15.954.641.713
7	Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan	251.094.206.975	248.412.269.740
Total (1+2+3+4+5+6+7)		**3.007.298.407.845**	**2.767.897.889.867**

d. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJSPSK

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp51.848.050,00 dan Rp8.864.098,00. Besaran nilai utang kepada pihak ketiga dalam rupiah tersebut meningkat Rp42.983.952,00 jika dibandingkan saldo utang per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp8.864.098,00. Peningkatan saldo utang tersebut disebabkan beberapa hal antara lain:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Per 31 Desember 2024	**8.864.098**
Mutasi Tambah:	
Pengakuan Utang ADF (7 Maret 2025)	46.493.889.600
Bank Charges AMTF (17 Maret 2025)	163.920
Revaluasi Utang Per 30 Juni 2025 (Beban Selisih Kurs)	41.259
Revaluasi Utang Per 30 September 2025 (Beban Selisih Kurs)	1.312.309.652
Revaluasi Utang Per 31 Desember 2025 (Beban Selisih Kurs)	86.834
Revaluasi Utang ADF Per 29 Desember 2025	213.266.801
Mutasi Kurang:	
Revaluasi utang ADF (Pendapatan Selisih Kurs)	(298.840.500)

Uraian	Nilai
Revaluasi utang AMTF (Pendapatan Selisih Kurs)	(1.610)
Pembayaran Utang ADF	(47.677.925.920)
Penghapusan Utang GFTEI	(6.084)
Saldo Per 31 Desember 2025	**51.848.050**

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

tanggal	USD	EUR
31 Desember 2024 (Kurs JISDOR)	16.157	16.822,67
30 Juni 2025 (Kurs JISDOR)	16.231	19.031,66
30 September 2025 (Kurs JISDOR)	16.692	19.600,58
31 Desember 2025 (Kurs JISDOR)	16.720	19.624,26

Pada laporan keuangan terdapat saldo awal utang jangka pendek yang disebabkan oleh kekurangan pembayaran kontribusi dan *trust fund* akibat selisih kurs karena pagu anggaran yang tidak mencukupi dan/atau karena terdapat pengurangan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak Organisasi Internasional (OI) akibat adanya biaya transfer bank (*bank charges*).

Utang tersebut berasal dari transaksi pembayaran sejak awal dibentuknya BA BUN 999.99 Transaksi Khusus Pengelolaan Kontribusi *Trust Fund* kepada Organisasi Internasional tahun 2014. Adanya saldo awal utang jangka pendek tersebut akan menimbulkan pendapatan atau kerugian selisih kurs yang belum terealisasi.

Pada saldo awal utang jangka pendek yang kepada APTCF dan *Pandemic Fund* FIF berasal dari akumulasi kurang bayar akibat selisih kurs antara anggaran dan pada saat pembayaran sehingga mengakibatkan kurangnya pagu anggaran saat pembayaran. Sedangkan, pada saldo awal utang jangka pendek yang berasal dari OI lainnya diakibatkan adanya pengurangan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak OI akibat adanya biaya transfer bank (*bank charges*).

Rincian Utang Jangka Pendek TK DJSPSK per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran LD33.

D.2.2.1.3. UTANG BUNGA

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp141.333.352.414.906,00 dan Rp118.250.088.626.967,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp23.083.263.787.939,00 atau 19,52 persen disebabkan karena meningkatnya *outstanding* utang. Utang Bunga Tahun 2025 meningkat dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena meningkatnya *outstanding* utang.

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah		Kenaikan/	%
		2025	2024	(Penurunan)	
213111	Utang Bunga Luar Negeri	12.368.418.968.386	9.532.992.045.637	2.835.296.334.450	29,74
213112	Utang Bunga Dalam Negeri	128.220.861.461.243	107.929.410.656.405	20.291.450.804.838	18,80
213113	Utang Bunga-Pinjaman Dalam Negeri	744.071.985.277	787.685.924.925	(43.613.939.648)	(5,54)
Jumlah		**141.333.352.414.906**	**118.250.088.626.967**	**23.083.133.199.639**	**19,52**

a. Utang Bunga Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp12.368.418.968.386,00 dan Rp9.532.992.045.637,00, meningkat sebesar Rp2.835.426.922.749,00 atau 29,74 persen dengan rincian:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Bunga Pinjaman Program	7.299.761.194.616	5.178.387.072.513
Utang Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	10.530.458.484	11.532.562.394
Utang Bunga Pinjaman Proyek	4.693.289.458.646	4.148.819.786.675
Utang Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	364.837.856.639	194.252.624.055
Jumlah	**12.368.418.968.386**	**9.532.992.045.637**

b. Utang Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp128.220.861.461.243,00, meningkat 18,80 persen dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena meningkatnya *outstanding* SBN. Utang Bunga SBN Tahun 2025 di dalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara Rupiah, penerimaan imbalan diterima di muka SBSN Jangka Panjang dan penerimaan utang bunga obligasi negara-valuta asing yang belum dibayarkan sebesar Rp3.655.521.227.202,00.

c. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp744.071.985.277,00 dan Rp787.685.924.925,00, turun sebesar Rp43.613.939.648,00 atau 5,54 persen .

D.2.2.1.4. UTANG SUBSIDI

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp431.287.525.165,00 dan Rp27.307.329.522.064,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp26.876.041.996.899,00 atau 98,42 persen. Terdapat Utang Subsidi Estimasi dikarenakan adanya tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA namun masih memerlukan verifikasi dan validasi bersama, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	K/L	Jumlah		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2025	31 Desember 2024		
1	Keuangan	-	24.448.204.017.570	(24.448.204.017.570)	(100)
2	Perhubungan	-	1.329.383.027.036	1.329.383.027.036	(100)
3	Pekerjaan Umum	3.592.504.272	3.451.526.637	140.977.635	4,08
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	337.115.561.301	(337.115.561.301)	(100)
5	Perdagangan	-	2.001.449.037	(2.001.449.037)	(100)
6	Pertanian	427.695.020.893	1.187.173.940.483	(759.478.919.590)	(63,97)
Jumlah		**431.287.525.165**	**27.307.329.522.064**	**(26.876.041.996.899)**	**(98,42)**

1. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN KEUANGAN

Nilai Utang Subsidi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp24.448.204.017.570,00. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian pencatatan selisih

kurang antara pembayaran tagihan belanja subsidi dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat, yang dicatat sebagai belanja subsidi yang masih harus dibayar.

2. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nilai Utang Subsidi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.329.383.027.036,00. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian pencatatan selisih kurang antara pembayaran tagihan belanja subsidi dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat, yang dicatat sebagai belanja subsidi yang masih harus dibayar.

3. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Saldo Utang Subsidi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.592.504.272,00 dan Rp3.451.526.637,00. Nilai Utang Subsidi tersebut berasal dari Eselon I Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Rincian Utang Subsidi adalah sebagai berikut:

a. Bulan September 2025 = Rp879.126.532,00

b. Bulan Oktober 2025 = Rp919.522.151,00

c. Bulan November 2025 = Rp883.553.408,00

d. Bulan Desember 2025 = Rp910.302.181,00

Terdapat kenaikan Utang Subsidi dari Periode 31 Desember 2024 ke 31 Desember 2025 senilai Rp140.977.635,00 dikarenakan seluruh PDAM pemerima manfaat subsidi yang mengikuti Perpres 46 Tahun 2019 telah menyelesaikan konstruksi pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan pinjaman PDAM ke perbankan yang sudah melakukan penarikan 100,00 persen sehingga tagihan subsidi bunga mengalami kenaikan menyesuaikan nilai pinjaman. Pembayaran subsidi bunga dilakukan berdasarkan tagihan termin pembayaran pekerjaan oleh PDAM ke bank pemberi kredit sehingga nilai utang subsidi menyesuaikan penarikan pembayaran pekerjaan.

Rincian Sumber Utang Subsidi Per PDAM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025:

(dalam rupiah)

Bulan	Kab. Cilacap	Giri Menang	Kota Bogor	Kota Palembang
September 2025	4.895.422	370.709.865	155.863.682	347.657.563
Oktober 2025	5.058.603	383.066.860	159.179.931	372.216.757
November 2025	4.895.422	370.709.865	152.310.559	355.637.562
Desember 2025	5.058.603	382.243.061	155.508.370	367.492.147
Jumlah	**19.908.050**	**1.506.729.651**	**622.862.542**	**1.443.004.029**

Terdapat utang subsidi bulan September s.d Desember 2025 sebesar Rp3.592.504.272,00 yang akan dibayarkan pada periode April 2026.

4. UTANG SUBSIDI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nilai Utang Subsidi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp337.115.561.301,00. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian pencatatan selisih kurang antara pembayaran tagihan belanja subsidi dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat, yang dicatat sebagai belanja subsidi yang masih harus dibayar.

5. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Nilai Utang Subsidi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.001.449.037,00. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian pencatatan selisih kurang antara pembayaran tagihan belanja subsidi dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat, yang dicatat sebagai belanja subsidi yang masih harus dibayar.

6. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PERTANIAN

Nilai Utang Subsidi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp427.695.020.893,00 dan Rp1.187.173.940.483,00. Nilai Utang Subsidi tersebut berasal dari Eselon I Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, merupakan tunggakan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 yang masih memerlukan verifikasi dan validasi bersama antara Ditjen PSP Kementerian Pertanian dan PT. PI (Persero) senilai Rp427.695.020.893,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

No	Produsen	Jenis Pupuk	Kewajiban diestimasi
1	PT Petrokimia Gresik	NPK	173.498.690.246
		ORGANIK	623.422.351
		UREA	10.359.863.742
		ZA	22.342.608
		Subtotal	184.504.318.947
2	PT Pupuk Iskandar Muda	NPK	11.792.434.067
		UREA	13.065.487.039
		Subtotal	24.857.921.106
3	PT Pupuk Kaltim	NPK	48.957.795.874
		NPK KAKAO	65.411.069
		UREA	61.810.355.057
		Subtotal	110.833.562.000
4	PT Pupuk Kujang	NPK	7.345.903.509
		ORGANIK	37.727.877
		UREA	76.052.417.965
		Subtotal	83.436.049.351
5	PT Pupuk Sriwidjaja	NPK	10.848.628.475
		UREA	13.214.541.015
		Subtotal	24.063.169.490
6	Pembulatan		(1)
Jumlah			**427.695.020.893**

D.2.2.1.5. BELANJA SUBSIDI YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp49.588.103.888.126,00 dan Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp49.588.103.888.126,00 atau 100,00 persen. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian pencatatan selisih kurang antara pembayaran tagihan belanja subsidi oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama dicatat sebagai belanja subsidi yang masih harus dibayar sesuai kebijakan akuntansi yang diatur dalam PMK nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain.

Rincian Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	K/L	Jumlah		Kenaikan/(Penurunan)	%
		31 Desember 2025	31 Desember 2024		
1	Keuangan	30.647.403.072.726	-	30.647.403.072.726	100
2	Perhubungan	1.859.664.862.995	-	1.859.664.862.995	100
3	PKP	154.442.000.000	-	154.442.000.000	100
4	KUKM	4.916.234.246.326	-	4.916.234.246.326	100
5	Perdagangan	1.520.717.872	-	1.520.717.872	100
6	Pertanian	12.008.838.988.207	-	12.008.838.988.207	100
Jumlah		**49.588.103.888.126**	**-**	**48.558.610.477.551**	**100**

1. Kementerian Keuangan

Nilai Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp30.647.403.072.726,00 dan Rp0,00. Nilai Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar tersebut berasal dari Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Satker	Nama Satker	Saldo Akhir
1	979321	DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN	23.596.306.634.042
2	980522	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	7.050.787.789.695
3	999704	DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN	308.648.989
Jumlah			**30.647.403.072.726**

a. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Pada Satker DJA atas Subsidi Energi, Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.596.306.634.042,00 meliputi Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg	11.332.216.885.218
Subsidi Listrik	12.264.089.748.824
Jumlah Subsidi	**23.596.306.634.042**

Atas utang subsidi tahun 2024 sebesar Rp16.585.913.331.389,00 telah dilakukan pembayaran pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembayaran Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp831.793.477.249,00;
2) Pembayaran Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp1.607.044.084.266,00;
3) Pembayaran Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2024 kepada PT AKR Corporindo Tbk sebesar Rp15.719.102.050,00;
4) Pembayaran Sebagian Kekurangan Subsidi JBT Minyak Tanah Tahun 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp406.992.245.656,00;
5) Pembayaran Sebagian Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp7.884.514.223.721,00;

6) Pembayaran Kekurangan Subsidi Listrik Tahun 2023 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp2.023.862.968.113,00; dan
7) Pembayaran Kekurangan Subsidi Listrik Tahun 2024 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp3.815.987.230.334,00;

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdapat pengakuan kekurangan pembayaran subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg dan Listrik yang berdampak pada kenaikan Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar sebesar Rp23.596.306.634.044,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2025 kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp3.255.882.160.300,00;
2) Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2025 kepada PT AKR Corporindo Tbk sebesar Rp17.545.518.809,00;
3) Kekurangan Subsidi JBT Minyak Tanah Tahun 2025 kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp794.459.441.035,00 (termasuk PPN);
4) Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2025 kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp7.264.329.765.076,00 (termasuk PPN); dan
5) Kekurangan subsidi listrik Tahun 2025 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp12.264.089.748.824,00.

b. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pada satker DJP atas Subsidi Pajak DTP, Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp7.050.787.789.695,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Belanja Subsidi YMHD	31 Desember 2025
PPh DTP Panas Bumi	1.309.984.122.227
PPh DTP SBN Valas	576.969.418.500
PPN DTP Rumah Tapak	784.768.182.789
PPN DTP KBLBB	514.720.050.139
PPN DTP BKO	89.429.866.828
PPN DTP Kuda dan Perlengkapannya	52.663.386.204
PPnBM DTP Impor KBLBB	2.637.277.882.710
PPnBM DTP Hybrid	162.900.888.468
PPh Pasal 21 DTP Sektor Tertentu	90.774.349.464
PPN DTP Tiket Pesawat Lebaran	107.001.215.747
PPN DTP Tiket Pesawat Libur Sekolah	724.298.426.619
Jumlah	**7.050.787.789.695**

c. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Pada satker DJPK atas Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp308.648.989,00, berasal dari kekurangan penyaluran Belanja Subsidi Bunga Pinjaman kuartal IV dimana jumlah tagihan kuartal IV sebesar Rp12.427.692.236,00 sedangkan sisa pagu Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Tahun 2025 sebesar Rp12.119.043.247,00. Kekurangan tagihan sebesar Rp308.648.989,00 direncanakan diselesaikan pada perhitungan tagihan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah kuartal I tahun 2026.

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
kekurangan penyaluran Belanja Subsidi Bunga Pinjaman kuartal IV dimana jumlah tagihan kuartal IV	12.427.692.236
Sisa pagu Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Tahun 2025	12.119.043.247
Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025	**308.648.989**

2. Kementerian Perhubungan

Nilai Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.859.664.862.995,00 dan Rp0,00. Nilai Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Satker	Nilai
Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1.424.188.120.185
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	435.476.742.810
Jumlah	**1.859.664.862.995**

Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Nilai Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp1.424.188.120.185,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis PSO KAI	2024	2025	Total
Subsidi PSO Perkeretaapian	313.494.229.190	439.742.817.583	753.237.046.773
Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek	116.069.651.521	554.881.421.891	670.951.073.412
Total	**429.563.880.711**	**994.624.239.474**	**1.424.188.120.185**

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Nilai Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA 2025 sebesar Rp435.476.742.810,00.

3. Kementerian Perdagangan

Nilai Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.520.717.872,00 dan Rp0,00. Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran pemerintah untuk diberikan kepada perusahaan/Lembaga, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bank Penyalur	Periode Penyaluran	Hasil Verifikasi
Bank BRI	1 Jan 2021 – 31 Mar 2021	7.895.443
	1 Apr 2021 – 30 Jun 2021	14.935.717
Bank BRI	1 Mar 2024 – 30 Nov 2024	1.365.355.951
Bank Kalsel	1 Sep 2024 – 30 Nov 2024	12.810.373
Bank Aceh Syariah	1 Apr 2024 – 30 Nov 2024	95.041.514
Bank BRI	2022-2023	24.678.874
TOTAL		**1.520.717.872**

4. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Nilai Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.916.234.246.326,00 dan Rp0,00. Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar tersebut berasal dari Deputi Bidang Usaha Mikro terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Tagihan yang timbul karena terdapat Surat Perintah Membayar (SPM) yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	4.901.796.892.062

Uraian	Nilai
Tagihan yang berasal dari Berita Acara Verifikasi (BAV) yang telah diterbitkan, namun sampai dengan akhir tahun belum diterbitkan SPM	14.437.354.264
Jumlah	**4.916.234.246.326**

5. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nilai Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp154.442.000.000,00 dan Rp0,00. Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar tersebut berasal dari unit Eselon I Direktorat Jenderal Tata Kelola daan Pengendalian Risiko meliputi saldo dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 senilai Rp154.442.000.000,00.

6. Kementerian Pertanian

Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp12.008.838.988.207,00 dan Rp0,00.

(dalam rupiah)

No.	Satker	Nama Satker	Saldo Akhir
1	979302	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	497.642.320
2	984149	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	12.008.341.345.887
Jumlah			**12.008.838.988.207**

Jumlah Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar per 31 Desember 2025 yang berasal dari Belanja subsidi bunga dan subsidi pupuk sebagai berikut:

a. Senilai Rp497.642.320,00 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (979302) merupakan tagihan atas penyaluran kredit yang belum dibayarkan pada periode Desember 2025. Adapun Bank penyalur kredit yang tagihannya belum dibayarkan dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

(dalam rupiah)

No.	Penyalur	Tanggal	Tagihan
1	BPD Kalsel	Desember 2025	5.594.285
2	BNI	Desember 2025	11.193.187
3	Bank Nagari	Desember 2025	14.466.173
4	BPD Bali	Desember 2025	79.838.301
5	BPD Jateng	Desember 2025	23.500.675
6	BPD Sulselbar	Desember 2025	228.054.645
7	BPD Sultra	Desember 2025	87.653.982
8	BPD DIY	Desember 2025	30.247.602
9	BPD Sumselbabel	Desember 2025	3.732.916
10	Bank Mandiri	Desember 2025	13.360.554
Total			**497.642.320**

b. Senilai Rp12.008.341.345.887,00 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (984149) yang merupakan Belanja Subsidi yang masih harus Dibayar Tahun 2025 berasal dari jumlah tagihan subsidi yang belum dibayar.

D.2.2.1.6. UTANG TRANSFER

Jumlah Utang Transfer per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp133.844.602.725.211,00 dan Rp97.460.927.735.555,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp36.383.674.989.656,00 atau 37,33 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh pengakuan kurang bayar DBH tahun 2024 dan sebelumnya serta estimasi kurang bayar DBH tahun 2024.

(dalam rupiah)

Rincian	Nilai
Kewajiban TKD - DTU	83.587.272.319.000
Kewajiban TKD – DTK	1.162.003.801.061
Kewajiban TKD Diestimasi	49.095.326.605.150
Total	**133.844.602.725.211**

1. Kewajiban TKD - DTU

Kewajiban Transfer ke Daerah – DTU seluruhnya merupakan hak Pemerintah Daerah atas Kurang Bayar DBH yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. Nilai Kewajiban DBH per tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp83.587.272.319.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp40.576.164.928.000,00 atau 94,33 persen dari periode yang sama di tahun 2024 yang sebesar Rp43.011.107.391.000,00.

Rincian Kewajiban DBH periode Tahun Anggaran 2025.

(dalam rupiah)

Rincian	Nilai
Utang DBH Pajak	43.301.222.962.000
Utang DBH SDA	40.286.049.357.000
Utang DBH Lainnya	-
Total	**83.587.272.319.000**

Selama periode Tahun Anggaran 2025 terdapat penyaluran Kurang Bayar DBH berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 sebesar Rp18.516.535.761.000,00. Besaran Kewajiban DBH mengalami peningkatan pada tahun 2025 berdasarkan pengakuan utang yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

(dalam rupiah)

Transaksi	Jumlah
Utang Awal DBH (LK 2024 *Audited)*	43.011.107.391.000
Penyelesaian kewajiban DBH TA 2025 berdasarkan KMK No. 29/MK/PK/2025	(18.516.535.761.000)
KB DBH Tahun 2024 (Penetapan KB/LB DBH TA 2025 melalui PMK Nomor 120 Tahun 2025)	59.092.700.689.000
Utang Akhir DBH TA 2025	**83.587.272.319.000**

2. Kewajiban TKD – DTK

Kewajiban Transfer ke Daerah – DTK seluruhnya merupakan hak Pemerintah Daerah atas Dana Alokasi Khusus Nonfisik yaitu Kurang Bayar Tunjangan Guru ASND yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. Nilai Kewajiban Dana Alokasi Khusus Nonfisik per tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.162.003.801.061,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp945.372.467.031,00 atau 436,00 persen dari periode yang sama di tahun 2024 yang sebesar Rp216.631.334.030,00. Penyebab utama kurang salur karena adanya penambahan guru selama tahun berjalan yang belum diperhitungkan dalam alokasi anggaran tahun sebelumnya. Proses penganggaran tunjangan guru dilakukan pada tahun sebelumnya dengan mengacu pada data guru yang tersedia saat itu. Namun, selama periode berjalan, terjadi penambahan guru baru, baik melalui rekrutmen, mutasi masuk, maupun pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, sehingga jumlah penerima tunjangan bertambah.

Rincian Kewajiban DAK Nonfisik periode Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Dana	Nilai
Dana TPG ASND	769.365.182.177
Dana TKG ASND	95.301.843.883
Dana Tamsil Guru ASND	297.336.775.001
Total	**1.162.003.801.061**

Selama periode Tahun Anggaran 2025 terdapat penyelesaian Kewajiban Kurang Bayar Dana Tunjangan Guru sebesar Rp215.172.605.280,00. Pengakuan Kewajiban Dana Tunjangan Guru selama periode Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan Laporan *Carry Over* dan laporan SiLPA Tunjangan Guru yang bernilai negatif yang disampaikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah. Mutasi transaksi pembentukan kewajiban DAK Nonfisik selama periode Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Transaksi	Jumlah
Utang Awal DAK NF (LK 2024 *Audited)*	216.631.334.030
Penyesuaian Utang Awal DAK NF (Laporan *carry over* dari Kemendikdasmen)	1.132.367.556.745
Penyelesaian Utang melalui SPM Tunjangan Guru	(215.172.605.280)
Penyesuaian Utang Akhir DAK NF (Laporan Sisa Dana Negatif Tunjangan Guru)	28.177.515.566
Utang Akhir DAK Nonfisik TA 2025	**1.162.003.801.061**

3. Kewajiban TKD Diestimasi

Kewajiban TKD Diestimasi - DBH per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp49.095.326.605.150,00 dan Rp54.233.189.010.525,00. Terdapat penurunan perubahan Kewajiban TKD diestimasi pada periode 31 Desember 2025 dibandingkan periode 31 Desember 2024 sebesar Rp5.137.862.405.375,00 atau 9,47 persen dari periode yang sama di tahun 2024. Kewajiban TKD Diestimasi telah memperhitungkan penundaan penyaluran DBH Pajak Desember 2025 sebesar Rp9.429.099.260.600,00.

Rincian kewajiban TKD Diestimasi disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Dana	Saldo Kewajiban TKD Diestimasi - DBH
DBH PPh Pasal 21	9.456.224.075.777
DBH PPh Pasal 25/29	2.043.769.773.943
DBH PPh Final	502.240.269.641
DBH PBB Perkebunan	858.939.737.509
DBH PBB Perhutanan	11.096.305.420
DBH PBB Pertambangan	2.222.430.338.054
DBH PBB Migas	3.718.234.325.478
DBH PBB Pertambangan Panas Bumi	115.424.359.564
DBH Minyak Bumi	-
DBH Gas Bumi	7.636.130.358.213
DBH Minerba - Royalti	20.855.751.817.574
DBH Kehutanan - DR	44.470.380.461
DBH Kehutanan - IIUPH	-
DBH Kehutanan - PSDH	3.340.375.521

Jenis Dana	Saldo Kewajiban TKD Diestimasi - DBH
DBH Panas Bumi - Iuran Produksi	44.286.887.489
DBH Panas Bumi - Iuran Tetap	18.507.446.276
DBH Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	531.229.114.698
DBH Perikanan	106.536.004.189
DBH Perkebunan Sawit	926.715.035.343
Jumlah	**49.095.326.605.150**

Rincian utang transfer DBH dan DAK Nonfisik tersaji pada Lampiran LD34.

D.2.2.1.7. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp917.885.904.059.217,00 dan Rp786.566.436.441.466,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp131.319.467.617.751,00 atau 16,70 persen disebabkan karena meningkatnya *outstanding* utang. Saldo tersebut merupakan reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca.

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, *Unamortized Discount* sebesar Rp624.694.363.000,00 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp285.323.139.000,00, sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah	
		2025	2024
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		**917.885.904.059.217**	**786.566.436.441.466**
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	112.763.840.234.018	92.568.473.192.354
216112	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	13.334.467.201.860	6.980.796.808.650
216121	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	510.463.464.003.339	337.103.824.940.462
216131	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing	63.175.405.620.000	85.782.635.500.000
216141	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	167.988.727.000.000	217.275.406.000.000
216151	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing	50.160.000.000.000	46.855.300.000.000
Unamortized Discount		**(624.694.363.000)**	**(885.329.385.000)**
213122	Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	(102.990.762.000)	(155.874.083.000)
213124	Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing	(3.296.450.000)	(18.042.401.000)
213126	Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	(518.407.151.000)	(711.412.901.000)
Unamortized Premium		**285.323.139.000**	**265.185.148.000**
213131	Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah	234.929.948.000	152.040.584.000
213133	Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	50.393.191.000	113.144.564.000

Rincian Bagian Lancar utang SBN dan Pinjaman termuat pada Lampiran LD35, LD36, LD37,LD38, LD39, LD40, dan LD41.

Dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp917.885.904.059.217,00 terdapat porsi dari instrumen pinjaman sebesar Rp126.098.307.435.878,00 yang di dalamnya termasuk penundaan pembayaran pokok kepada *Lender* Rusia, namun atas penundaan tersebut pihak Rusia tidak memperlakukan sebagai tunggakan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah	
		2025	2024
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pinjaman			
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	112.763.840.234.018	92.568.473.192.354
216112	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	13.334.467.201.860	6.980.796.808.650
Jumlah		**126.098.307.435.878**	**99.549.270.001.004**

Bagian lancar untuk Surat Berharga Negara adalah sebesar Rp791.787.596.623.339,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah	
		2025	2024
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang SBN			
216121	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	510.463.464.003.339	337.103.824.940.462
216131	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing	63.175.405.620.000	85.782.635.500.000
216141	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	167.988.727.000.000	217.275.406.000.000
216151	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing	50.160.000.000.000	46.855.300.000.000
Jumlah		**791.787.596.623.339**	**687.017.166.440.462**

D.2.2.1.8. UTANG SURAT BERHARGA NEGARA – JANGKA PENDEK

Utang Surat Berharga Negara – Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp97.725.000.000.000,00 dan Rp62.418.300.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp35.306.700.000.000,00 atau 56,56 persen dengan *Unamortized Discount* sebesar Rp2.160.784.065.000,00.

Terdapat kenaikan Utang SBN – Jangka Pendek di Tahun 2025 sebesar 56,56 persen dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan penerbitan SBN Jangka Pendek pada Tahun 2025 yang lebih besar dari pelunasannya.

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah	
		2025	2024
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek		**97.725.000.000.000**	**62.418.300.000.000**
217111	Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah	71.800.000.000.000	26.400.000.000.000
217132	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	25.925.000.000.000	36.018.300.000.000

Akun	Uraian	Jumlah	
		2025	2024
Unamortized Discount		**(2.160.784.065.000)**	**(1.566.657.675.000)**
213121	*Discount* Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah	(1.777.321.584.000)	(811.138.136.000)
213125	*Discount* Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah	(383.462.481.000)	(755.519.539.000)

D.2.2.1.9. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.087.286.744.749,00 dan Rp97.758.669.978,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp14.989.528.074.771,00 atau 15.333,20 persen.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	UAKPA BUN TK	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Pengelola BMN yang berasal dari KKKS	22.824.192.873	45.568.869.723	(22.744.676.850)	(49,91)
2	Pengelola BMN Hulu Migas pada BPMA	224.818.727	823.788.327	(598.969.600)	(72,71)
3	Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B	52.662.591.837	41.565.437.991	11.097.153.846	26,70
4	Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	2.177.857.896	2.618.455.537	(440.597.641)	(16,83)
5	Pengelola BMN Eks *Idle*	28.743.333	45.763.333	(17.020.000)	(37,19)
6	Pengelola ABMA/T	2.186.911.000	2.795.377.748	(608.466.748)	(21,77)
7	Pengelola Aset Eks Pertamina	3.001.629.083	299.660.562	2.701.968.521	901,68
8	PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi	4.180.000.000	4.041.316.757	138.683.243	3,43
9	Setoran Lainnya	15.000.000.000.000	-	15.000.000.000.000	100
Jumlah		**15.087.286.744.749**	**97.758.669.978**	**14.989.528.074.771**	**15.333,20**

1. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada SKK Migas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp22.824.192.873,00 dan Rp45.568.869.723,00 sebagaimana tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo 1 Januari 2024	**45.568.869.723**
Mutasi Tambah:	**22.824.192.873**
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	22.824.192.873
Mutasi Kurang:	**45.568.869.723**
Penutupan Saldo	45.568.869.723
Saldo pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2025	**22.824.192.873**

a. Saldo awal sebesar Rp45.568.869.723,00 merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024;
b. Mutasi tambah sebesar Rp22.824.192.873,00 merupakan pemanfaatan BMN Hulu Migas yang disebabkan sisa saldo akrual pendapatan diterima dimuka dengan status aktif pada 48 pemanfaatan.
c. Mutasi kurang sebesar Rp45.568.869.723,00 disebabkan Penutupan Saldo Pendapatan Diterima dimuka Tahun 2024;
d. Saldo akhir 31 Desember 2025 sebesar Rp22.824.192.873,00.

2. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada BPMA, per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp224.818.727,00 dan Rp823.788.327,00 sebagaimana tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2025	**823.788.327**
Mutasi Tambah:	**224.818.727**
Penyesuaian Pendapatan Diterima dimuka tahun 2025	224.818.727
Mutasi Kurang:	**823.788.327**
Penyesuaian Pendapatan Diterima dimuka tahun 2024	823.788.327
Saldo pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2025	**224.818.727**

Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada BPMA merupakan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka yang berasal dari sewa BMN Hulu Migas pada KKKS PT Pema Global Energi yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina Gas.

a. Saldo awal sebesar Rp823.788.327,00 merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka akhir Tahun 2024;
b. Mutasi tambah sebesar Rp224.818.727,00 merupakan penyesuaian pendapatan diterima dimuka tahun 2025;
c. Mutasi kurang sebesar Rp823.788.327,00 merupakan Penutupan Saldo Pendapatan Diterima dimuka Tahun 2025; dan
d. Saldo akkhir Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp224.818.727,00.

3. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp52.662.591.837,00 dan sebesar Rp41.565.437.991,00 yang berasal dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari 2025	41.565.437.991
Mutasi Tambah	18.947.156.000
Mutasi kurang	7.850.002.154
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**52.662.591.837**

a. Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka per 1 Januari 2025 sebesar Rp41.565.437.991,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Deskripsi	Nilai
1.	Pendapatan diterima dimuka atas sewa pemanfaatan BMN PKP2B pada PT Kaltim Prima Coal oleh PT PLN (Persero) berupa tanah untuk tapak tower dan jalur span ROW yang tersebar di 8 (delapan) titik pada area lahan konsesi PKP2B PT KPC dengan jangka waktu 9 tahun 6 bulan mulai 13 Juni 2022 s.d 12 Desember 2031	41.674.063

No.	Deskripsi	Nilai
2.	Pendapatan diterima dimuka atas pemanfaatan BMN tanah PT Kaltim Prima Coal yang digunakan untuk kegiatan niaga umum BBM oleh PT Petromine Energy dengan jangka waktu sewa mulai dari 23 Maret 2024 sampai dengan 22 Desember 2031	17.352.885.538
3.	Pendapatan diterima dimuka atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT Bayan Resources dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031	24.170.878.390
Jumlah Saldo Awal		**41.565.437.991**

b. Terdapat Mutasi Tambah sebesar Rp18.947.156.000,00 merupakan pendapatan diterima dimuka atas pemanfaatan BMN tanah PT Kaltim Prima Coal yang dimanfaatkan oleh PT Kaltim Nusantara Coal dengan jangka waktu sewa mulai dari 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2031;

c. Terdapat Mutasi kurang sebesar Rp7.850.002.154,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Deskripsi	Nilai
1.	Pengakuan PNBP Januari s.d Desember 2025 atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal oleh PT Bayan Resources dengan jangka waktu 10 tahun mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031	3.451.631.696
2.	Pengakuan PNBP Januari s.d Desember 2025 atas pemanfaatan tanah untuk tapak tower dan jalur span ROW yang tersebar di 8 (delapan) titik pada area lahan konsesi PKP2B PT KPC oleh PT PLN dengan jangka waktu 9 tahun 6 bulan mulai 13 Juni 2022 s.d 12 Desember 2031	5.995.677
3.	Pengakuan PNBP Januari s.d Desember 2025 atas pemanfaatan BMN tanah PT Kaltim Prima Coal yang digunakan untuk kegiatan niaga umum BBM oleh PT Petromine Energy dengan jangka waktu sewa mulai dari 23 Maret 2024 sampai dengan 22 Desember 2031	2.486.770.011
4.	Pengakuan PNBP Mei s.d Desember 2025 atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT Kaltim Nusantara Coal dengan jangka waktu mulai dari 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2031	1.905.604.770
Jumlah Mutasi Kurang		**7.850.002.154**

d. Saldo Akhir 31 Desember 2025 Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp52.662.591.837,00.

4. Pendapatan Diterima di Muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI, nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.177.857.896,00 sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.618.455.537,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp440.597.641,00 yang berasal dari penurunan jumlah sisa bulan sewa atas aset properti eks BPPN dan aset properti eks Kelolaan PT PPA yang belum dapat diakui pada tahun berjalan.

   Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI disajikan pada Lampiran LD42.

5. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Eks *Idle* pada akhir periode Tahun 2025, terdapat saldo utang jangka pendek berupa Pendapatan Diterima Dimuka dengan nilai total sebesar Rp28.743.333,00. Dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Deskripsi	Nilai
1.	Saldo pendapatan sewa dibayar dimuka atas pemanfaatan BMN eks BMN *Idle* sesuai dengan KMK 146/KM.6/2021 tentang Pelaksanaan Sewa BMN Eks BMN *Idle* dengan Sdr. Renan Amru Kafi	5.000.000
2.	Saldo pendapatan sewa dibayar dimuka atas pemanfaatan BMN eks BMN *Idle* sesuai dengan KMK 166/KM.6/2023 tentang Pelaksanaan Sewa BMN Eks BMN *Idle* pada KPKNL Metro	4.500.000

No.	Deskripsi	Nilai
3.	Saldo pendapatan sewa dibayar dimuka atas pemanfaatan BMN eks BMN *Idle* sesuai dengan KMK 179/KM.6/2024 tentang Pelaksanaan Sewa BMN Eks BMN *Idle* pada KPKNL Pekalongan	19.243.333
Jumlah		**28.743.333**

6. Pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, nilai Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai Kewajiban pada akhir Tahun 2025 adalah senilai Rp2.186.911.000,00 yaitu kewajiban jangka pendek yang merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T sampai dengan Tahun 2024, yang berasal dari nilai saldo akhir kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.795.377.748,00, dengan rincian saldo awal sebagaimana disajikan pada Lampiran LD43.

   Ditambah dengan kewajiban yang berasal dari nilai pembayaran/pelunasan kompensasi ABMA/T yang dilakukan sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp19.987.918.257,00, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Lampiran LD44.

   Nilai tersebut selanjutnya dikurangi dengan nilai kompensasi atas ABMA/T yang diselesaikan/diterbitkan KMK pelepasan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp20.596.385.005,00, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Lampiran LD45.

   Dengan demikian membentuk nilai kewajiban sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp2.186.911.000,00.

7. Kewajiban dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina, Kewajiban berupa kewajiban jangka pendek, yang mana harus diselesaikan dalam 1 (satu) periode pelaporan, dan kewajiban jangka panjang, yang diselesaikan lebih dari 1 (satu) periode pelaporan. Kewajiban jangka pendek berupa Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp3.001.629.083,00.

   Rincian Pendapatan Diterima Dimuka atas Aset Eks Pertamina sebagaimana disajikan pada Lampiran LD46.

8. Saldo pendapatan diterima dimuka pada PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.180.000.000,00 dan Rp4.041.316.757,00. Saldo tersebut merupakan PNBP Migas Lainnya atas adanya tagihan bonus produksi pada KKKS PHE Tomori yang diterbitkan dan dibayarkan pada tahun 2017 sebesar US$2,500,000.00, kemudian terdapat koreksi tagihan oleh SKK Migas pada tahun 2021 menjadi sebesar US$2,250,000.00 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar US$250,000.00.

9. Saldo pendapatan diterima dimuka pada satker Setoran Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.000.000.000.000,00 dan Rp0,00. Sesuai dengan Pasal 22A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara, Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian Sisa Surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir. Melalui surat nomor S-901/MK.03/2025 tentang Permohonan Penyetoran Sebagian Sisa Surplus Sementara Bank Indonesia Tahun 2025, Menteri Keuangan mengajukan permohonan penyetoran sebagian sisa surplus. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Bank Indonesia (BI) telah menyetorkan sebagian sisa

surplus senilai Rp15.000.000.000.000,00. Pemerintah mencatat dana tersebut sebagai kewajiban dalam bentuk pendapatan diterima di muka. Pengakuan sebagai pendapatan pemerintah baru akan dilakukan setelah Laporan Keuangan BI Tahun 2025 *Audited* secara resmi menyatakan adanya sisa surplus yang menjadi hak pemerintah.

D.2.2.1.10. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

Saldo Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp105.464.675.905,00 dan Rp111.122.213.990,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.657.538.085,00 atau 5,09 persen. Saldo Pendapatan Migas Ditangguhkan merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per tanggal pelaporan, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

D.2.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

D.2.2.2.1. UTANG JANGKA PANJANG SURAT BERHARGA NEGARA

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.464.280.571.549.368,00 dan Rp6.890.023.998.123.707,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp574.256.573.425.661,00 atau 8,33 persen dengan *Unamortized Discount* sebesar Rp48.124.379.108.000,00 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp47.570.011.621.000,00. Terdapat kenaikan Utang Jangka Panjang SBN dikarenakan penerbitan SBN yang lebih besar dari pelunasannya.

Rincian Utang Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah	
		2025	2024
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri		**7.464.280.571.549.368**	**6.890.023.998.123.707**
221211	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah	4.900.362.542.889.368	4.610.896.602.892.707
221221	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	1.137.827.263.660.000	1.012.387.927.231.000
221231	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Rupiah	1.073.716.765.000.000	957.736.843.000.000
221241	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Valuta Asing	352.374.000.000.000	309.002.625.000.000
Unamortized Discount		**(48.124.379.108.000)**	**(49.634.944.892.000)**
221251	*Discount* Obligasi Negara - dalam rupiah	(27.725.681.395.000)	(28.402.121.623.000)
221252	*Discount* Obligasi Negara - dalam valuta asing	(4.771.843.835.000)	(4.871.523.417.000)
221253	*Discount* SBSN - dalam rupiah	(15.626.853.878.000)	(16.361.299.852.000)
Unamortized Premium		**47.570.011.621.000**	**42.720.368.963.000**
221261	Premium Obligasi Negara - dalam rupiah	38.836.441.980.000	33.690.114.900.000
221262	Premium Obligasi Negara - dalam valuta asing	478.265.218.000	522.547.650.000

Akun	Uraian	Jumlah	
		2025	2024
221263	Premium SBSN - dalam rupiah	8.255.304.423.000	8.507.706.413.000

Rincian Profil Jatuh tempo Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri dapat dilihat pada Lampiran LD47, LD48, LD49 dan LD50.

D.2.2.2.2. UTANG KEPADA DANA PENSIUN DAN THT

Saldo Utang Kepada Dana Pensiun dan THT 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp31.042.846.841.712,00 dan Rp31.042.846.841.712,00 atau tidak mengalami perubahan.

Pada Tahun 2022 telah ditetapkan Kewajiban Kekurangan Pendanaan Program THT dan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2023 hal Penetapan dan Pengakuan Kewajiban atas Kekurangan Pendanaan Program Tabungan Hari Tua pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp22.176.507.759.421 dan pada Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-263/MK.02/2024 Hal Pengakuan dan Penetapan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program THT yang Dikelola PT Taspen (Persero) Tahun 2023 sebesar Rp3.694.707.595.916,00, maka total UPSL PT Taspen (Persero) di Tahun 2023 sebesar Rp25.871.215.355.337,00. Selanjutnya terdapat Surat Menteri Keuangan nomor S-310/MK.02/2024 Hal Pengakuan dan Penetapan UPSL Program THT yang Dikelola PT Asabri (Persero) Tahun 2024 sebesar Rp5.171.631.486.375,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)	Pembayaran	Sisa
1	Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Taspen Tahun 2022	22.176.507.759.421	-	22.176.507.759.421
2	Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Taspen Tahun 2023	3.694.707.595.916	-	3.694.707.595.916
3	Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Asabri Tahun 2024	5.171.631.486.375	-	5.171.631.486.375
Jumlah		**31.042.846.841.712**	**-**	**31.042.846.841.712**

D.2.2.2.3. PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA NEGARA DITANGGUHKAN

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp33.440.000.000.000,00 dan Rp86.273.473.974.300,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp52.833.473.974.300,00 atau 61,24 persen. Transaksi ini merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN yang diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2026.

Daftar Seri SBN yang diterbitkan sebagai pembiayaan SBN ditangguhkan dapat dilihat pada Lampiran LD51.

D.2.2.2.4. UTANG JANGKA PANJANG SUBSIDI

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp984.375.374.811,00 dan Rp530.768.330.796,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp453.607.044.015,00 atau 85,46 persen.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	K/L	Jumlah		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2025	31 Desember 2024		
1	Pertanian	316.537.013.275	420.266.452.275	(103.729.439.000)	(24,68)
2	Perhubungan	667.838.361.536	110.501.878.521	557.336.483.015	504,37
	Jumlah	**984.375.374.811**	**530.768.330.796**	**453.607.044.015**	**85,46**

4. Kementerian Pertanian

Utang subsidi jangka panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp316.537.013.275,00 dan Rp420.266.452.275,00.

Atas utang jangka panjang Kurang Bayar Tahun 2020 senilai Rp420.266.452.275,00 telah diselesaikan/dibayarkan senilai Rp103.729.439.000,00 sesuai dengan reviu Itjen dan telah diajukan ke KPPN Jakarta II dengan Nomor SPM 00125A tanggal 3 November 2025 dan terbit SP2D Nomor 259991310984669 tanggal 11 November 2025. Untuk sisanya sebesar Rp316.537.013.275,00 sedang proses reviu Itjen Kementan.

5. Kementerian Perhubungan

Utang Jangka Panjang Subsidi merupakan Kewajiban pemerintah yang belum dianggarkan pembayarannya. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2025 sebesar Rp667.838.361.536,00 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang pada Satker PSO Ditjen Perkeretaapian, yang belum dianggarkan pembayarannya di tahun 2025 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang subsidi PSO TA 2015	2.216.878.521	2.216.878.521
2	Utang subsidi PSO TA 2016	108.285.000.000	108.285.000.000
3	Sisa tunggakan PSO TA 2023	557.336.483.015	-
Total		**667.838.361.536**	**110.501.878.521**

D.2.2.2.5. UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN DALAM NEGERI

Jumlah Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp48.154.575.410.217,00 dan Rp44.273.286.260.921,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.881.289.149.296,00 atau 8,77 persen.

D.2.2.2.6. UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI LAINNYA

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp390.300.735.556.292,00 dan Rp340.727.372.109.611,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp49.573.363.446.681,00 atau 14,55 persen.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BA 999.03	-	2.134.614.540	(2.134.614.540)	(100)
2	BA 999.04	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159	-	-
3	BA 999.08	67.778.850.083.402	58.555.708.079.202	9.223.142.004.200	15,75

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4	BA 999.99	320.609.957.745.731	280.257.601.688.710	40.352.356.057.021	14,40
Jumlah		**390.300.735.556.292**	**340.727.372.109.611**	**49.573.363.446.681**	**14,55**

1. BA 999.03

Nilai utang jangka panjang dalam negeri lainnya berasal dari UAKPA BLU LPDB KUMKM sebesar pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.134.614.540,00.

2. BA 999.04

Tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban Jangka Panjang posisi 31 Desember 2025 dengan posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp1.911.927.727.159,00.

Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan Kewajiban atas *risk sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skema Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan holtikultura. Terdapat dua pola dalam penyaluran KUT yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25 persen ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75 persen ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5,00 persen ditanggung Perum Jamkrindo.

Realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.359,79. terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.699,61 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660,18. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110,09 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235,53. Dengan demikian estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *risk sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.314,56. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25 persen sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159,36 (52,25% x Rp3.659.191.822.314,56). Namun telah dilakukan kesepakatan *Risk Sharing* KUT Tahun Penyediaan 1998/1999 antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan PT Jamkrindo pada tanggal 21 Februari 2023. Bank Indonesia mencatat adanya penurunan nilai tunggakan KUT pada periode 2010-2019 sebesar Rp8.669.721.689,81 sehingga nilai porsi utang Pemerintah menjadi sebesar Rp1.908.221.550.684,00.

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai Kewajiban atas *risk sharing* Kredit Program KUT berdasarkan hasil verifikasi lapangan, putusan pengadilan atau hal lain yang menyebabkan Pemerintah dapat menyesuaikannya. Di samping itu, dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

Terdapat temuan BPK atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 yaitu Penyajian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya atas Risk Sharing Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999 pada LKBUN Tidak Andal dan Terdapat Perbedaan Pengakuan Outstanding Tunggakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar:

a. Berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya untuk penyelesaian utang KUT TP1998/1999 secara akuntabel;

b. Melakukan rekonsiliasi data tunggakan KUT dengan BI dan Jamkrindo untuk penyelesaian perbedaan penyajian nilai KUT TP 1998/1999 serta menyesuaikan penyajiannya pada LKBUN.

Tindak lanjut temuan sampai dengan tahun 2025 adalah dalam rapat yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2023, Bank Indonesia menyajikan nilai tersebut dalam Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) secara total sebagai Tagihan kepada non-bank di Dalam Negeri (tidak terdapat pengungkapan secara rinci terkait jumlah tagihan KUT kepada Pemerintah).

3. BA 999.08

Kewajiban Jangka Panjang berupa Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp67.778.850.083.402,00 dan Rp58.555.708.079.202,00.

Saldo utang tersebut berasal dari satker SKK Migas. Kewajiban ini merupakan lawan akun dari Dana ASR dan Dana E&S serta TTM yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

4. BA 999.99

Berdasarkan PMK Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 127/PMK.05/2018, pencatatan utang jangka panjang dalam negeri lainnya merupakan penjurnalan dari aset lainnya sebagai akun lawannya.

Utang jangka panjang dalam negeri lainnya terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) serta utang jangka panjang yang dikelola oleh satker aset eks pertamina. AIP ini dicatat selain dicatat sebagai Aset Lainnya, juga dicatat sebagai utang karena merupakan dana milik peserta yang kolektif dikuasai oleh pemerintah.

Perbandingan nilai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
Utang Jangka Panjang Lainnya			
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	285.428.962.413.233	250.426.347.869.742	35.002.614.543.491
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	35.157.196.053.147	29.830.903.367.301	5.326.292.685.846
Aset Eks Pertamina	23.799.279.351	350.451.667	23.448.827.684
Total Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	**320.609.957.745.731**	**280.257.601.688.710**	**40.352.356.057.021**

Nilai AIP di atas dicatat berdasarkan dokumen sumber Berita Acara Perhitungan AIP antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagaimana dijelaskan pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yaitu:

1. Berdasarkan Laporan AIP Tahun 2025 Audited tanggal 17 Maret 2026 dan Berita Acara Perhitungan Nilai AIP Nomor 01/BA/LK/DJPb-TSP/2026 Tanggal 23 April 2026 disebutkan bahwa saldo AIP PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp285.428.962.413.233,00;
2. Berdasarkan Laporan AIP Tahun 2025 Audited tanggal 6 Maret 2026 dan Berita Acara Perhitungan Nilai AIP Nomor 01/BA/LK/DJPb-ASB/2026 Tanggal 21 April 2026 disebutkan bahwa saldo AIP PT ASABRI (Persero) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp35.157.196.053.147,00.
3. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada DJKN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp23.799.279.351,00 dan Rp350.451.667,00, terjadi kenaikan sebesar Rp23.448.827.684,00 atau 6.691,03 persen.

   Rincian Kewajiban Jangka Panjang atas Aset Eks Pertamina termuat pada Lampiran LD52.

D.2.2.2.7. UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN LUAR NEGERI

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.096.705.179.850.350,00 dan Rp943.345.582.337.528,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp153.359.597.512.822,00 atau 16,26 persen. Terdapat kenaikan dikarenakan penarikan pokok pinjaman pada Tahun 2025 yang lebih besar dari pembayarannya.

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
222115	Utang Program	569.823.709.518.762	514.882.523.504.606	54.941.186.014.156	10.67
222116	Utang Proyek	526.881.470.331.588	428.463.058.832.922	98.418.411.498.666	22,97
Jumlah		**1.096.705.179.850.350**	**943.345.582.337.528**	**153.359.597.512.822**	**16,26**

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri termuat pada Lampiran LD53 dan LD54.

D.2.2.2.8. UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI LAINNYA

Nilai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp28.600.447.523,00 dan Rp27.335.416.515,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.265.031.008,00 atau 4,63 persen. Kewajiban tersebut berasal dari utang jangka panjang luar negeri lainnya. Kewajiban jangka panjang tersebut merupakan kewajiban kepada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa *promissory notes*. Kenaikan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan nilai tukar. Rincian kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Investasi Permanen	Mata Uang Awal		31 Desember 2025	31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545	-	-

No	Investasi Permanen	Mata Uang Awal		31 Desember 2025	31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1.135.018	18.977.500.960	18.338.485.826	639.015.134	3,48
3	Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223.450	4.385.045.018	3.759.029.144	626.015.874	16,65
Total				**28.600.447.523**	**27.335.416.515**	**1.265.031.008**	**4,63**

Detail *promissory note* Pemerintah Indonesia pada IDA, MIGA, dan CFC adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	LKI	Mata Uang Penempatan	Rincian	Tanggal	Jumlah
1	IDA	IDR	2 *(two) promissory notes*	19-Jan-73	129.523.754
			1 *(one) promissory note*	21-Sep-73	355.340.804
			1 *(one) promissory note*	26-Des-73	71.956.501
			1 *(one) promissory note*	25-Mei-74	514.542.829
			1 *(one) promissory note*	14-Jul-00	2.163.936.250
			1 *(one) promissory note*	22-Mei-03	2.002.601.407
2	MIGA	USD	1 *(one) promissory note*	27-Jun-88	1.135.018
3	CFC	EUR	1 *(one) promissory note*	03-Agu-90	742.326
			1 *(one) promissory note*	19-Agu-91	2.969.303

D.2.3. EKUITAS

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar minus Rp4.063.780.215.076.777,00 dan minus Rp3.576.615.643.905.782,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp487.164.571.170.995,00 atau 13,62 persen.

D. 3. CATATAN PENTING LAINNYA

D.3.1. BA 999.00

D.3.1.1. Rekening Pemerintah Lainnya

1. **Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980**

   Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut.

   Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian Kontrak Production Sharing (KPS) atau rekening Migas per tanggal 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar USD746,771,877.42 atau ekuivalen sebesar Rp12.486.025.790.462,40. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

   Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

   Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama periode Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran LDCPL1.

2. **Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084980 Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi**

   Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi Nomor 508.000084980 digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain reimbursement PPN, PBB, dan penggantian bonus produksi. Pemindahbukuan dari Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi Nomor 508.000084980 ke RKUN/rekening Pengusaha Panas Bumi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan. Saldo Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.219.320.306.162,44 dan Rp2.082.717.172.958,00.

   Berikut adalah Mutasi Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi selama periode Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran LDCPL2.

3. **Rekening Lainnya di BI TDF-TKD Pemda**

   Sesuai PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja

pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar. DBH dan/ atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/ atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam rangka penyimpanan DBH dan/atau DAU yang disalurkan dalam bentuk nontunai berupa TDF pada BI, Kuasa BUN Pusat telah membuka 546 rekening lain BI TDF-TKD Pemda berdasarkan permohonan KPA BUN Pengelolaan DTU di Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Atas penyimpanan dana dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda tersebut, BI memberikan remunerasi sesuai kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Gubernur BI, dimana remunerasi tersebut ditransfer oleh BI ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara bulanan. Ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan TDF dalam rangka penyaluran DBH TA 2022 dalam bentuk nontunai diatur dalam KMK Nomor 10/KM.5/2022, di mana pengisian rekening lain BI TDF-TKD Pemda didahului dengan penerbitan SPM nihil penyaluran DBH nontunai oleh KPA BUN Penyaluran DTU yang diajukan Bersama dokumen pendukungnya ke KPPN Jakarta II. Berdasarkan SPM tersebut, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D nihil penyaluran DBH nontunai, dilanjutkan dengan pemindahbukuan dana oleh Kuasa BUN Pusat dari RKUN ke rekening lain BI TDF-TKD Pemda. Alur penyaluran DBH nontunai berupa TDF adalah sebagaimana gambar berikut:

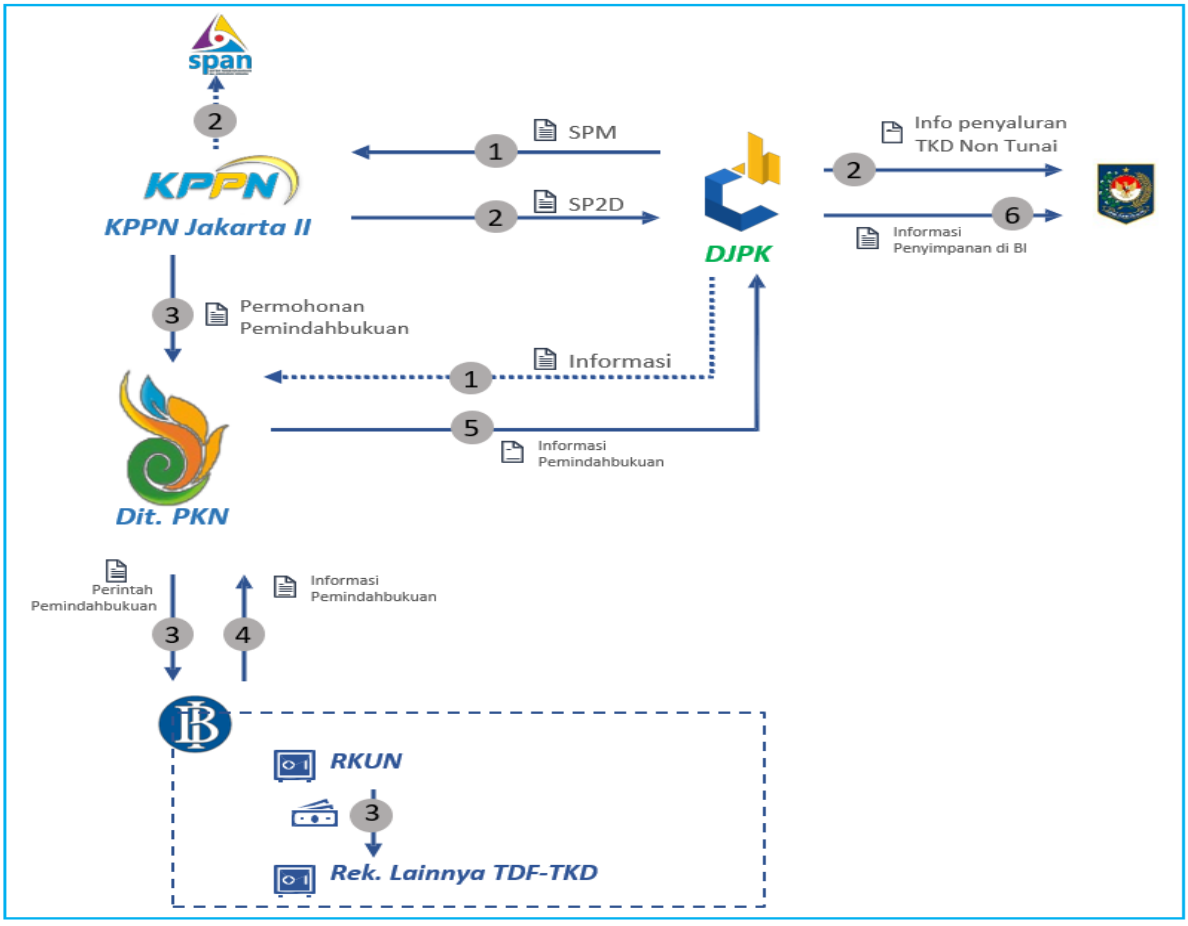

Sejak inisiasi pembentukan rekening TDF pada tahun 2022 pergerakan saldo TDF yang berasal dari pengisian dan penarikan dana TDF oleh pemda mengalami penurunan yang signifikan mulai tahun 2023. Penurunan saldo TDF dari pada tahun 2025 sebesar Rp14.270.005.567.252,00.

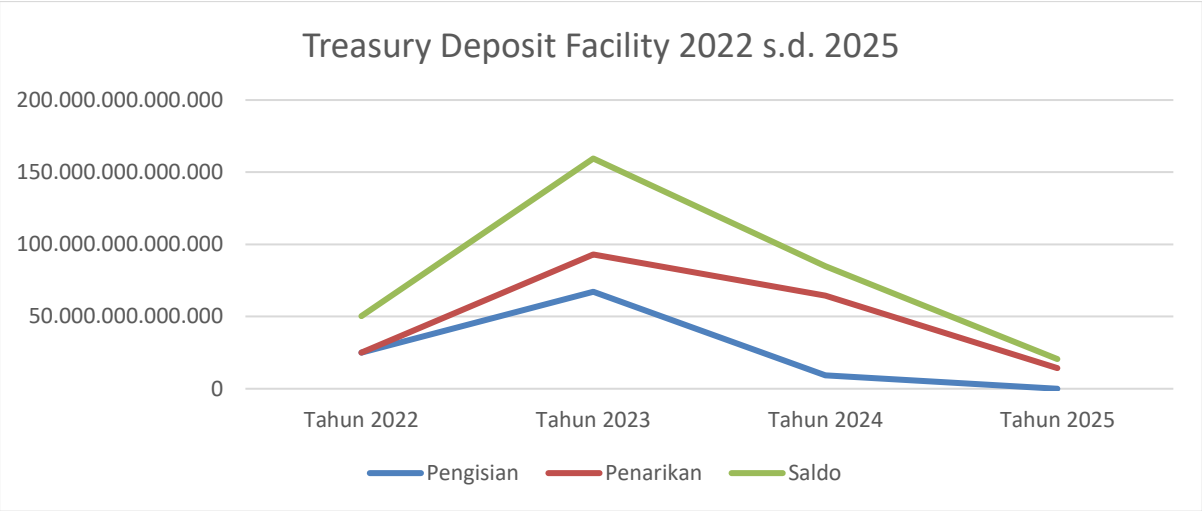

Realisasi TDF pada tahun 2025

Selama Tahun 2025 telah dilakukan penarikan DBH nontunai berupa TDF yang berasal dari saldo TDF kepada pemda dengan total Rp14.270.005.567.252,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Tahap	Nilai	Jumlah Pemda	Keterangan
1	1.957.882.438.187	11	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Februari 2025
2	221.376.880.190	15	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Maret 2025
3	6.303.857.296.102	481	Berdasarkan KMK Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk kebutuhan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada ASN daerah tahun 2025
4	3.442.796.905.871	50	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Juni 2025
5	1.052.128.455.548	9	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Juli 2025
6	41.778.841.024	2	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Agustus 2025
7	193.320.984.492	3	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan September 2025
8	237.586.584.867	2	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Oktober 2025
9	490.705.786.866	4	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan November 2025
10	328.571.394.105	6	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Desember 2025

Selain itu, sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengisian atau penyaluran dana DBH nontunai berupa TDF sehingga sisa dana DBH nontunai berupa TDF yang disimpan di rekening TDF pada 31 Desember 2025 sebesar **Rp6.288.034.879.188,00** yang terdiri dari 21 Pemda pada Lampiran LD32.

4. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, dibuka Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan tersebut. RPATA merupakan rekening lain-lain milik BUN yang

dibuka di Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000700980 untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Pengelolaan RPATA berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 84 tahun 2025 menggantikan probis Bank Garansi yang diterapkan sebelumnya. Proses bisnis pengelolaan RPATA sebagai berikut:

a. Proses bisnis Penampungan RPATA yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM)

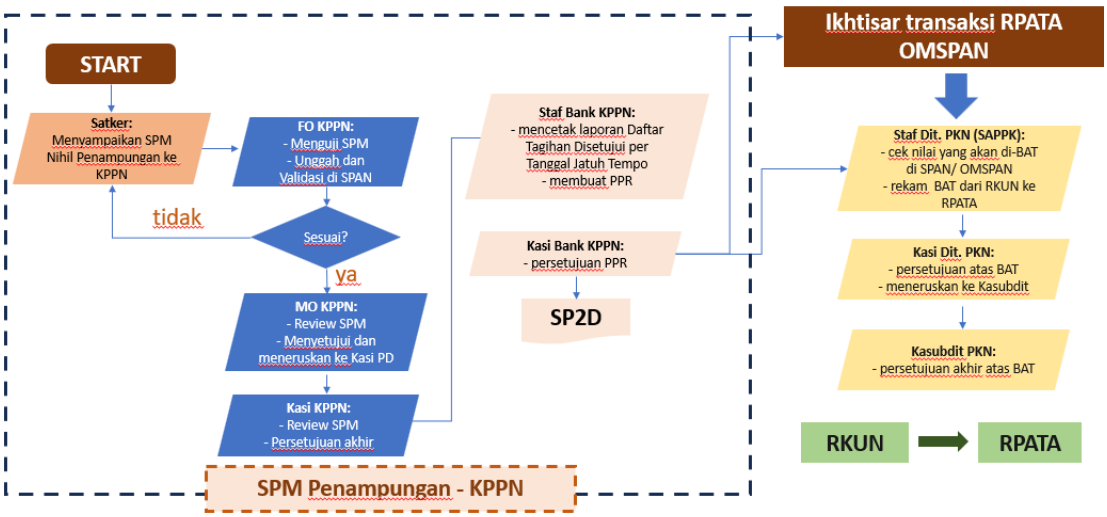

b. Proses bisnis Pembayaran RPATA yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM)

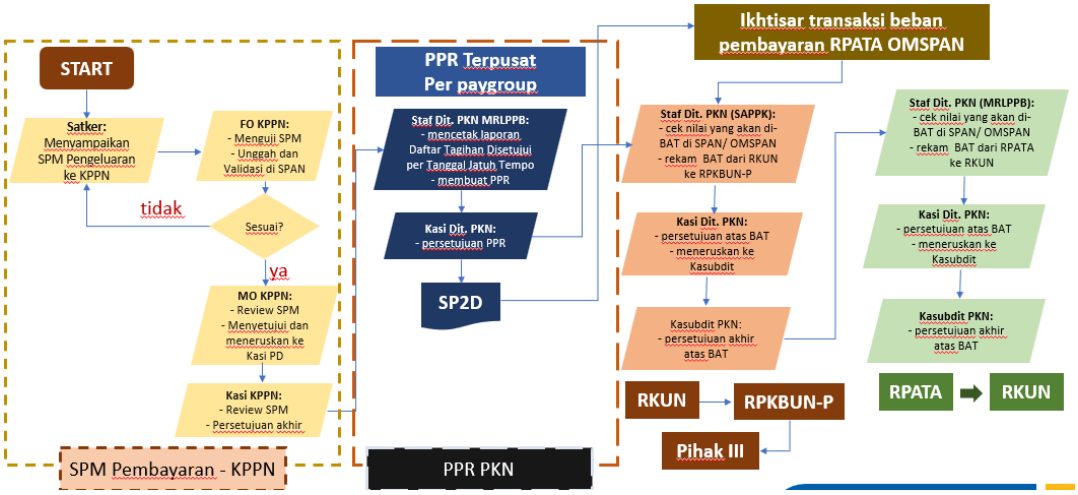

c. Proses bisnis Penihilan RPATA yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM)

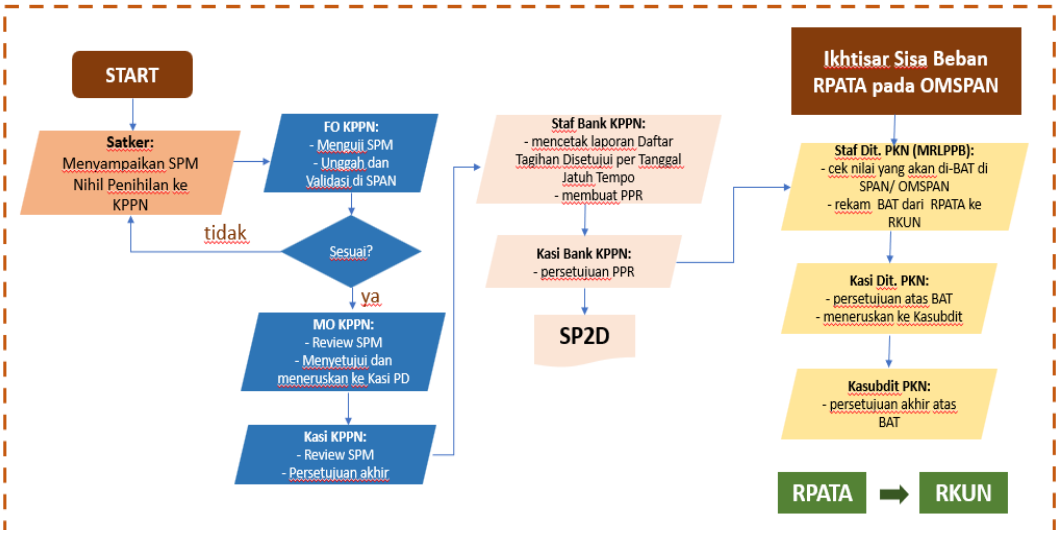

d. Proses bisnis Penampunggan, Pembayaran dan Penihilan RPATA yang bersumber dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

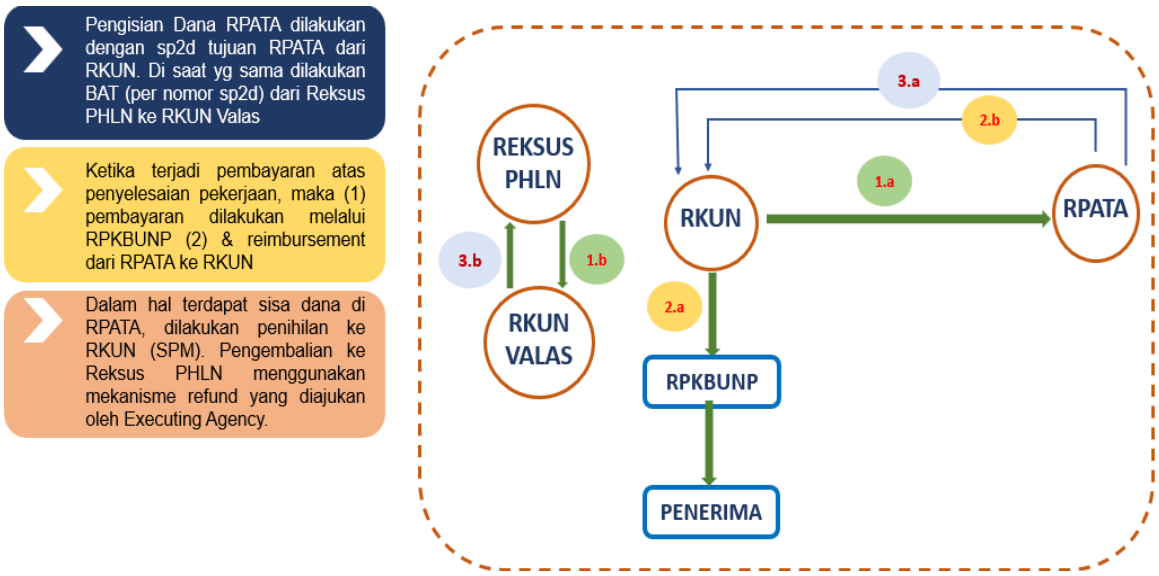

e. Proses bisnis Penampungan, Pembayaran dan Penihilan RPATA yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

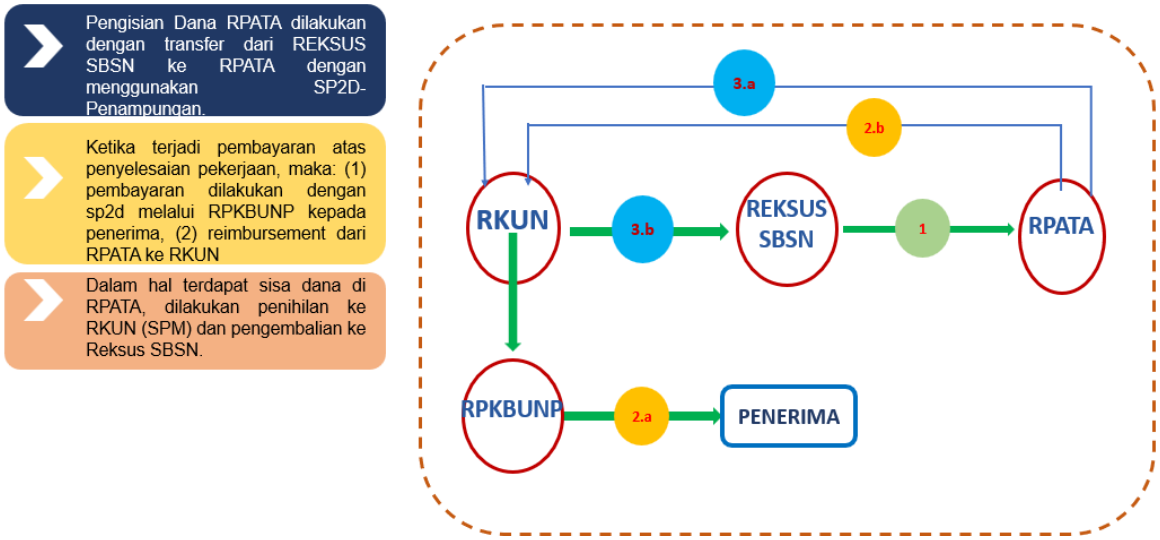

f. Proses bisnis penyelesaian retur SP2D RPATA

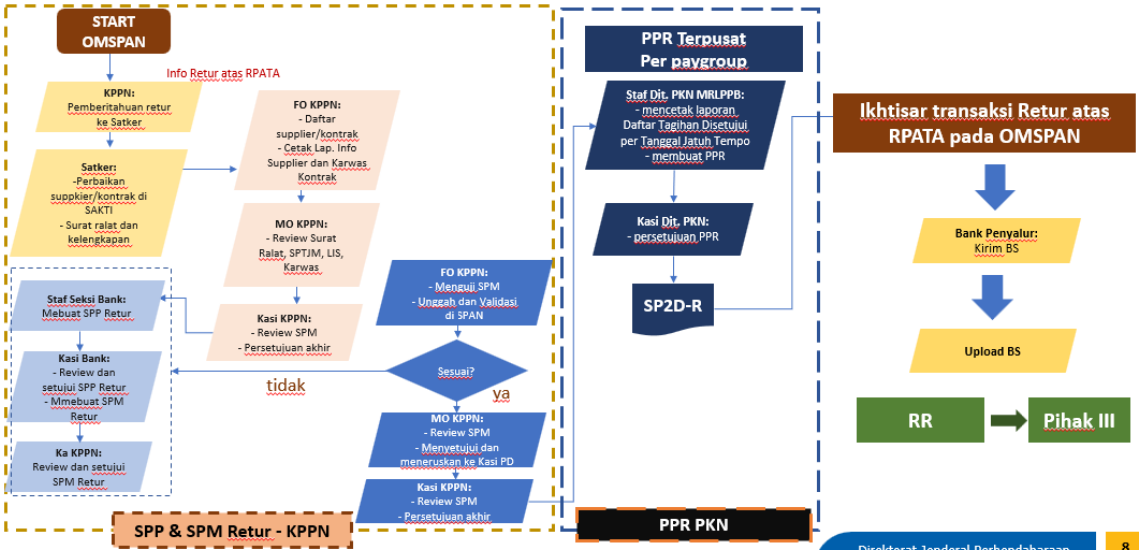

Berdasarkan rekening koran RPATA, diketahui nilai saldo Rekening RPATA per 31 Desember 2025 sebesar Rp43.396.749.437.834,00. Selanjutnya, terdapat penyesuaian saldo RPATA yang berasal dari perbedaan/selisih data Ikhtisar Kebutuhan Dana RPATA tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan nota dinas Direktur PKN nomor ND-35/PB.3/2026 tanggal 8 Januari 2026. Penyesuaian tersebut terdiri dari penambahan dari SP2D Penampungan sebesar Rp160.961.973.620,00; pengurangan dari SP2D Pembayaran sebesar Rp57.713.117.121,00; dan pengurangan dari SP2D Penihilan sebesar Rp20.678,00 sehingga saldo akhir RPATA per 31 Desember 2025 berdasarkan pembukuan sebesar Rp43.499.998.273.655,00.

Dalam pelaksanaan penyelesaian atas saldo RPATA per 31 Desember 2025 sebesar Rp43.499.998.273.655,00 tersebut, pada tahun 2026 telah terdapat realisasi SPM Pembayaran sebesar Rp36.509.514.181.854,00 dan SPM Penihilan sebesar Rp6.990.484.091.801,00 sehingga saldo RPATA per 8 Mei 2026 telah nihil.

Rincian nilai pembayaran dan penihilan RPATA pada Tahun 2026 disajikan pada Lampiran LDCPL3.

5. Rekening SAL dalam Valuta USD

Pada tahun 2023 terdapat kebijakan pembukaan Rekening SAL dalam mata uang USD (Rek SAL BUN USD), sehingga seluruh saldo penerimaan dalam mata uang USD tetap dapat dipertahankan dan dapat digunakan untuk kebutuhan di awal tahun berikutnya, tanpa pemerintah perlu melakukan penukaran valuta asing. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan dasar hukum pembukaan rekening melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2023 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2022 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemindahbukuan Dana SAL BUN Serta Formula Perhitungan Jumlah Dana SAL BUN Efisien, pada tanggal 6 Desember 2023.

Konversi Dana SAL BUN USD

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah, telah dilakukan penjualan/konversi Dana SAL BUN yang disimpan pada Rek Lain BI SAL USD ke Rek Lain BI SAL IDR sebesar USD5,000,000,000.00 pada tanggal 12 September 2025 dan sebesar USD2,000,000,000.00 miliar pada tanggal 29 September 2025 serta konversi USD dalam rangka pemenuhan kebutuhan *cash buffer* dalam IDR sesuai Nota Dinas Direktur PKN nomor ND-1798/PB.3/2025 pada tanggal 14 November 2025 sebesar USD1,415,517,653.00. Konversi dana SAL BUN dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 16/PB/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-45/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Penukaran Uang Negara dalam Valuta Asing di Bank Indonesia, sehingga saldo dana SAL BUN yang disimpan di Rek Lain BI SAL USD per tanggal 31 Desember 2025 sebesar USD0.00.

Konversi USD tersebut menimbulkan selisih kurs *realized* yang pencatatanya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-19/PB/2016 dengan formula perhitungan selisih kurs *realized* sebagai berikut:

$$WA = \frac{(\text{Saldo Valas} \times \text{Kurs WA Terakhir}) + (\text{Valas Masuk} \times \text{Kurs Transaksi Masuk})}{(\text{Saldo Valas} + \text{Valas Masuk})}$$

Realized Gain/Loss = (*Kurs Transaksi Keluar – WA*) x *Valas keluar*

Jika hasilnya positif maka merupakan Selisih Kurs ***Realized Gain***, sedangkan jika hasilnya negatif merupakan Selisih Kurs ***Realized Loss***

Dengan catatan:

- Saldo Valas adalah saldo valas terakhir transaksi sebelumnya. Pada awal tahun, digunakan saldo valas awal tahun
- Kurs WA Terakhir adalah kurs WA atas transaksi sebelumnya. Dalam hal belum terdapat kurs WA atas transaksi sebelumnya maka digunakan kurs tengah BI pada posisi Saldo awal
- Valas Masuk adalah nilai transaksi penerimaan dalam valuta asing pada waktu berkenaan.
- Kurs Transaksi Keluar adalah kurs transaksi atas nilai pengeluaran di saat terjadinya transaksi.
- WA adalah kurs WA pada saat terjadi transaksi.
- Valas keluar adalah nilai transaksi pengeluaran dalam valuta asmg pada waktu berkenaan
- Kurs Transaksi Masuk adalah kurs transaksi atas nilai penerimaan di saat terjadinya transaksi.

Sehingga perhitungan selisih kurs *realized* pada penjualan/penukaran SAL USD sebagai berikut:

(dalam rupiah)

TANGGAL	KURS_TRX	AMOUNT	SALDO_AWAL	SALDO_AKHIR	WA_AWAL	KURS_WA	REALISASI
12-Sep-25	16.426,83	5.000.000.000	8.415.517.653	3.415.517.653	16.157	16.173,75	1.265.400.000.000
29-Sep-25	16.733,06	2.000.000.000	3.415.517.653	1.415.517.653	16.157	16.173,75	1.118.620.000.000
14-Nov-25	16.690,17	1.415.517.653	1.415.517.653	-	16.157	16.173,75	731.001.626.362

Berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat *realized gain* selisih kurs atas konversi SAL USD ke SAL IDR sebesar Rp3.115.021.626.362,00.

Perhitungan Selisih Kurs *Unrealized* Rek Lainnya BI SAL USD

Penyimpanan Dana SAL BUN dalam valuta asing Pengelolaan rekening SAL valas secara akuntansi tetap menimbulkan selisih kurs *unrealized* yang pencatatannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 dengan formula perhitungan selisih kurs *unrealized* sebagai berikut:

UNREALIZED GAIN/LOSS = Saldo Akhir – {Saldo Awal + (Mutasi Penerimaan – Mutasi Pengeluaran)}

1. **Saldo Awal** = *Saldo Valas Pada Awal Periode x Kurs Tengah BI*
2. **Mutasi Penerimaan** = *Jumlah (Transaksi Penerimaan x Kurs Transaksi)*
3. **Mutasi Pengeluaran** = *Jumlah (Transaksi Pengeluaran x Kurs Transaksi)*
4. **Saldo Akhir** = *Saldo Valas Pada Akhir Periode x Kurs Tengah BI*

Jika hasilnya positif maka merupakan Selisih Kurs ***Unrealized Gain***, sedangkan jika hasilnya negatif merupakan Selisih Kurs ***Unrealized Loss***.

Dengan catatan:

- Saldo Awal merupakan saldo awal Dana SAL BUN pada RKUN USD dan Rekening Penempatan USD sebelum Pemenuhan Dana SAL BUN ke Rek SAL USD berdasarkan LKPP 2023 *Audited* yaitu sebesar USD8,415,517,653
- kurs tengah BI pada posisi saldo awal tanggal 2 Januari 2025 yaitu Rp16.157,00
- Mutasi Penerimaan merupakan transaksi masuk ke Rek SAL USD, detail transaksi masuk sebagai berikut:
  - Tgl 24 Juli sebesar USD 1 miliar yang merupakan pengembalian atas peminjaman dana SAL BUN untuk kebutuhan kas temporer dengan kurs transaksi Rp16.298,00.
- Mutasi Pengeluaran merupakan transaksi keluar dari RKUN USD detail transaksi keluar sebagai berikut:
  - Tgl 8 Juli sebesar USD 1 miliar yang merupakan peminjaman dana SAL BUN untuk kebutuhan kas temporer kurs dengan kurs transaksi Rp16.237,00.
  - Tgl 12 September sebesar USD 5 miliar yang merupakan penjualan/konversi SAL BUN USD ke SAL IDR dengan kurs transaksi Rp16.426,83.
  - Tgl 29 September sebesar USD 2 miliar yang merupakan penjualan/konversi SAL BUN USD ke SAL IDR dengan kurs transaksi Rp16.733,06.

- Tgl 14 November sebesar USD 1,42 miliar yang merupakan penjualan/konversi SAL BUN USD ke SAL IDR dengan kurs transaksi Rp16.690,17

- kurs tengah BI pada posisi pelaporan LK Tahun 2025 yaitu Rp16.720,00.

Berdasarkan formula dimaksud, perhitungan selisih kurs *unrealized* disajikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} unrealized\ gain\ (loss) \\ &= (0 \times 16.720) - [(8.415.517.653 \times 16.157) \\ &+ (((1.000.000.000 \times 16.298)) - ((1.000.000.000 \times 16.237) \\ &+ (5.000.000.000 \times 16.426{,}83) + (2.000.000.000 \times 16.733{,}06) \\ &+ (1.415.517.653 \times 16.690{,}17)))] = 3.194.981.547.050 \end{aligned}$$

sehingga selisih kurs *unrealized* dalam rangka pengelolaan Dana SAL BUN pada Rekening SAL USD per tanggal 31 Desember 2025 mengalami *gain* (selisih kurs *unrealized gain*) sebesar Rp3.194.981.547.050,00.

6. Penempatan SAL pada Bank Umum Mitra

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat yang diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah melalui BUN melakukan pemindahan dana dari Rekening Lain BI SAL ke instrumen keuangan jangka pendek berupa penempatan dana pada Bank Umum mitra.

Penempatan dana SAL ini dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029 dan agenda Asta Cita, untuk itu pemerintah memerlukan instrumen kebijakan yang mampu memperkuat fungsi intermediasi perbankan serta menurunkan biaya pendanaan (*cost of fund*) di sektor keuangan. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang strategis adalah penempatan dana pemerintah pada Bank Umum Mitra.

Selama ini, kas negara seringkali mengalami kondisi *idle* baik yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan. Kondisi *idle cash*, bila tidak dimanfaatkan secara optimal, berpotensi menimbulkan *opportunity cost* yang cukup besar, di mana dana mengendap tanpa memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang memungkinkan pemanfaatan dana *idle* untuk tujuan produktif, dengan tetap menjaga fleksibilitas pemerintah dalam memenuhi kewajiban belanja negara.

Di sisi lain, kondisi perbankan nasional masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya pendanaan, yang pada gilirannya membatasi ruang untuk ekspansi kredit ke sektor riil. Penempatan dana pemerintah pada Bank Umum Mitra dengan skema tertentu akan menurunkan *cost of fund*, memperkuat likuiditas perbankan, dan membuka ruang lebih luas bagi perbankan untuk menyalurkan kredit/pembiayaan ke sektor produktif, termasuk UMKM dan sektor prioritas pembangunan.

Dengan demikian, Penempatan Dana SAL pada BUM tidak hanya bersifat teknis untuk mendukung likuiditas perbankan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam:

a. Mengoptimalkan kas negara yang *idle* menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi;

b. Menurunkan biaya pendanaan perbankan sehingga memperluas akses pembiayaan;

c. Menjaga stabilitas sistem keuangan melalui instrumen kebijakan fiskal yang terukur; dan

d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan kas negara.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025, telah dialokasikan penempatan dana SAL dengan total Rp200 triliun dengan rincian:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp55 triliun.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp55 triliun.
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp55 triliun.
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp25 triliun.
5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp10 triliun.

Penempatan dana dilakukan dalam bentuk *Deposit On Call* konvensional/syariah dengan mekanisme tanpa lelang, dengan tenor 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan tingkat bunga/imbal hasil yang berlaku adalah sebesar 80,476% dari BI 7-Day *Reverse Repo Rate* (BI 7-DRR *Rate*). Berdasarkan alokasi pada KMK dimaksud telah dilakukan setelmen melalui nota dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-1403/PB.3/2025 tanggal 12 September 2025 kepada 5 Bank Umum Mitra.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332 Tahun 2025, telah dialokasikan penempatan dana SAL dengan total Rp76 triliun dengan rincian:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp25 triliun.
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp25 triliun.
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp25 triliun.
4. PT Bank DKI sebesar Rp1 triliun.

Penempatan dana dilakukan dalam bentuk *Deposit On Call* konvensional dengan mekanisme tanpa lelang, dengan tenor 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan tingkat bunga/imbal hasil yang berlaku adalah sebesar 80,476% dari BI 7-Day *Reverse Repo Rate* (BI 7-DRR *Rate*). Berdasarkan alokasi pada KMK dimaksud telah dilakukan setelmen melalui nota dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-1776/PB.3/2025 tanggal 12 November 2025 kepada 4 Bank Umum Mitra.

Kemudian berdasarkan analisis *cash flow* akhir tahun 2025 serta awal tahun 2026 terdapat pengeluaran signifikan mulai minggu kedua bulan Desember 2025 yang melampaui saldo kas operasional serta potensi penerimaan sampai dengan awal tahun 2026, sehingga pada tanggal 15 Desember 2025 dilakukan penarikan sebagian penempatan Dana SAL dengan tenor 3 bulan (dari alokasi pada KMK 332) dalam rangka penambahan *cash buffer* dengan rincian:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp24 triliun sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-240/PB/2025 tanggal 12 November 2025 hal Permintaan Penarikan atas Penempatan Uang Negara sebelum Jatuh Tempo sehingga *outstanding* penempatan dana SAL sebesar Rp1 triliun.
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp23 triliun sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-241/PB/2025 tanggal 12 November 2025 hal Permintaan Penarikan atas

Penempatan Uang Negara sebelum Jatuh Tempo sehingga *outstanding* penempatan dana SAL sebesar Rp2 triliun.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp23 triliun sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-239/PB/2025 tanggal 12 November 2025 hal Permintaan Penarikan atas Penempatan Uang Negara sebelum Jatuh Tempo sehingga *outstanding* penempatan dana SAL sebesar Rp2 triliun.

Laporan atas penggunaan penempatan dana SAL (penyaluran kredit) oleh Bank Umum Mitra.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Bank Umum Mitra telah melakukan penyaluran kredit/pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Penempatan berdasarkan KMK 276 Tahun 2025

(dalam miliar rupiah)

No.	Bank	*Outstanding* Penempatan	Penyaluran Kredit	Persen Penyaluran
1	BRI	55.000,00	55.862,57	101,57%
2	MANDIRI	55.000,00	55.193,95	100,35%
3	BNI	55.000,00	55.799,60	101,45%
4	BTN	25.000,00	25.000,00	100,00%
5	BSI	10.000,00	10.329,14	103,29%
Jumlah		**200.000,00**	**202.185,25**	**101,09%**

Penempatan berdasarkan KMK 332 Tahun 2025

(dalam miliar rupiah)

No.	Bank	Jumlah Penempatan	Penarikan	Penyaluran Kredit	Persen Penyaluran	*Outstanding*
1	BRI	25.000,00	24.000,00	28.820,73	115,28%	1.000,00
2	MANDIRI	25.000,00	23.000,00	26.144,18	104,58%	2.000,00
3	BNI	25.000,00	23.000,00	27.578,36	110,31%	2.000,00
4	Bank DKI	1.000,00	-	1.000,00	100,00%	1.000,00
Jumlah		**76.000,00**	**70.000,00**	**83.543,26**	**109,93%**	**6.000,00**

Penyajian Penempatan Dana SAL dalam LK Kuasa BUN Pusat

Dalam rangka menjamin konsistensi perlakuan akuntansi atas transaksi penempatan uang tersebut, telah ditetapkan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 30: Penempatan dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam rangka Pengelolaan Kas Negara, setelah pemerintah berkonsultasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi atas transaksi penempatan uang yang diatur dalam Petunjuk Teknis Akuntansi tersebut adalah:

a. Transaksi penempatan uang dicatat sebagai Penempatan Uang di Bank Umum (kelompok Setara Kas) apabila jatuh temponya 3 (tiga) bulan atau kurang, atau Investasi Jangka Pendek apabila jatuh temponya lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) dari tanggal perolehannya, yang disajikan pada Neraca.

b. Transaksi perolehan Penempatan Uang di Bank Umum (kelompok Setara Kas) dicatat pada Aktivitas Transitoris, sedangkan transaksi perolehan Investasi Jangka Pendek disajikan pada Aktivitas Investasi, yang disajikan pada Laporan Arus Kas.

c. Saldo penempatan uang baik dalam bentuk Penempatan Uang di Bank Umum (kelompok Setara Kas) maupun Investasi Jangka Pendek masih menjadi bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Sehingga berdasarkan PTA dimaksud, penempatan dana SAL dengan tenor 6 bulan pada LK Kuasa BUN Pusat Tahun 2025 *Audited* disajikan sebagai:

1) Investasi Jangka Pendek (Investasi dalam Deposito) pada Neraca.
2) Transaksi perolehan Investasi Jangka Pendek disajikan pada Aktivitas Investasi pada LAK.

Sedangkan penempatan dana SAL dengan tenor 3 bulan pada LK Kuasa BUN Pusat Tahun 2025 *Audited* disajikan sebagai:

1) Penempatan Uang di Bank Umum (kelompok Setara Kas) pada Neraca.
2) Transaksi perolehan Penempatan Uang di Bank Umum (kelompok Setara Kas) dicatat pada Aktivitas Transitori pada LAK.

7. Rekening Pengeluaran Lainnya di Bank Umum *In Transit*

Berdasarkan *lesson learned* tahun 2023 yaitu terjadi ketidakselarasan dalam penyaluran dana SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dengan aliran kas keluar dari RKUN dan RPKBUN yang disebabkan oleh berakhirnya operasional SKN-BI/BI-RTGS serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP LKBUN dan LHP LKPP, telah dilakukan langkah-langkah mitigasi dan penyelesaian sebagai berikut:

a. Pemetaan potensi risiko.
b. Peningkatan koordinasi antar unit di Internal Kemenkeu.
c. Koordinasi dengan Bank Indonesia tentang perpanjangan sistem SKN-BI/BI-RTGS.

berdasarkan hasil langkah-langkah mitigasi dimaksud, terdapat potensi risiko serupa pada akhir tahun 2025, terutama pada belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk proyek strategis seperti Proyek IKN, kebutuhan optimalisasi penyerapan anggaran program prioritas, belanja pada Bendahara Umum Negara (BUN) untuk transaksi Penyertaan Modal Negara (PMN), dan transfer ke daerah. Risiko ini dapat menjadi signifikan jika aliran kas atas beban SP2D tidak terselesaikan akibat berakhirnya operasional sistem perbankan Bank Indonesia di penghujung tahun.

Guna mengantisipasi kebijakan akhir tahun yang masih dinamis, diperlukan mitigasi paling akhir dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 104 Tahun 2025 tentang Mekanisme Penyaluran Dana atas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir Tahun Anggaran sebagai payung hukum upaya penyelesaian transaksi akhir tahun. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa SP2D yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2025 tetap dapat disalurkan secara optimal meskipun operasional sistem SKN-BI/BI-RTGS telah berakhir.

Sebagai amanat dari PMK 104 Tahun 2025 telah dibuka rekening pengeluaran lainnya di masing-masing Bank Operasinal dengan proses bisnis sebagai berikut:

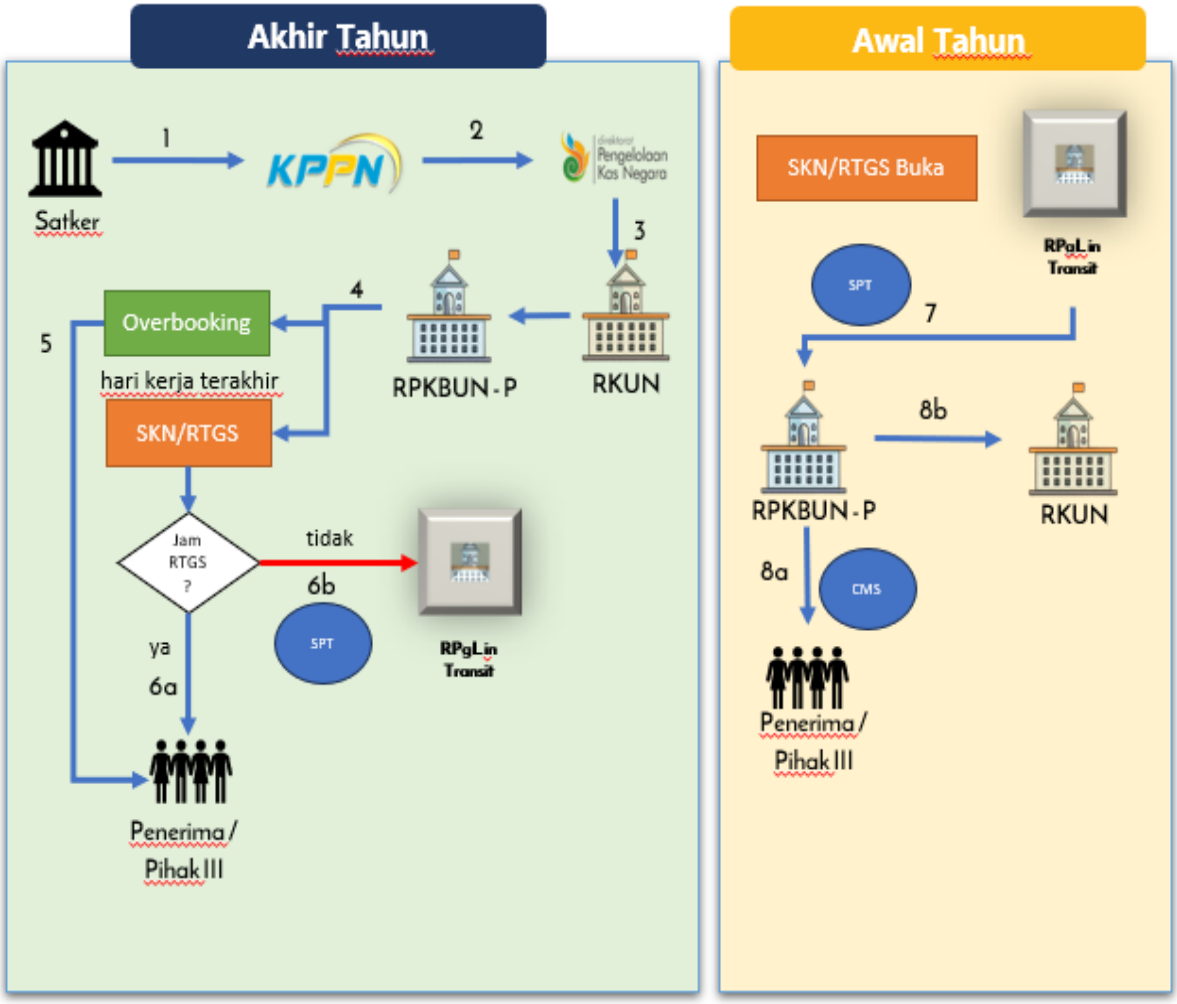

Penggunaan Rekening pada Akhir Tahun 2025

Pada tanggal 31 Desember 2025 telah diterbitkan 105.884 SP2D yang dibayarkan melalui Bank Operasional dengan total Rp118.542.872.828.799,00 terhadap SP2D tersebut telah berhasil disalurkan seluruhnya sehingga tidak terdapat penggunaan Rekening in transit pada akhir tahun 2025.

(dalam rupiah)

Bank Operasional	*Dropping* Dana	Penerbitan SP2D		SP2D yang disalurkan/dinihlkan		Penggunaan RPGL *in transit*	
		Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal (saldo)
BRI	12.622.370.602.391	5.368	12.622.363.171.742	5.368	12.622.363.171.742	0	0
Mandiri	51.304.879.109.076	61.510	51.304.879.109.076	61.510	51.304.879.109.076	0	0
BNI	20.630.528.096.523	31.969	20.630.528.096.523	31.969	20.630.528.096.523	0	0
BTN	33.650.414.945.435	732	33.650.414.945.435	732	33.650.414.945.435	0	0
BSI	334.687.506.023	6.305	334.687.506.023	6.305	334.687.506.023	0	0

D.3.2. BA 999.01

1. Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan

dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

(dalam miliar rupiah)

No.		Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah
			valas (Rp)	Rupiah	
1		**Utang Luar Negeri**			
	a	SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	1.481.797	878.655	2.360.452
	b	Pinjaman luar negeri	1.209.469	-	1.209.469
Jumlah Utang Luar Negeri			**2.691.266**	**878.655**	**3.569.921**
2		**Utang Dalam Negeri**			
	a	SBN yang dimiliki oleh penduduk	121.740	5.871.602	5.993.342
	b	Pinjaman dalam negeri	-	61.489	61.489
Jumlah Utang Dalam Negeri			**121.740**	**5.933.091**	**6.054.831**
Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri pemerintah			**2.813.006**	**6.811.746**	**9.624.751**

*) Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*)

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (*Part IV Balance of Payments Manual (BOPM) IMF*, Edisi 4, *Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users* Tahun 2013 dan *External Debt Statistics: Guide for Compiler and User* Tahun 2014).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual.

2. Adapun penggunaan koefisien dalam perhitungan *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi (*Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium*) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum tahun 2007, perhitungan nilainya yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 (Audited) menjadi saldo awal *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Seri SBN yang diterbitkan mulai 2007, nilai *unamortized* diskon/premium disajikan pada neraca dengan memperhitungkan amortisasinya menggunakan metode garis lurus dan koefisiennya sebesar nilai *unamortized* diskon/premium saat penerbitan yang diperhitungkan selama umur utang tersebut sampai dengan tanggal pelunasannya.

3. BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN pada penerbitan SBSN dengan Tahun 2025 adalah sejumlah 1.493 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai sebesar Rp293.871.611.251.016,00. Seluruh BMN yang digunakan sebagai underlying asset SBSN sampai dengan Tahun 2025 merupakan BMN yang telah menggunakan nilai revaluasi.

4. *Outstanding* SBSN per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.670.164.492.000.000,00 (menggunakan kurs pelaporan) dan sebesar Rp1.629.656.859.847.280,00 (menggunakan kurs APBN pada tahun penerbitan). Adapun *outstanding* aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.629.656.859.847.281,00 yang terdiri dari:

a. BMN sebesar Rp977.137.251.276.825,00;
b. Proyek sebesar Rp648.664.608.570.456,00; dan
c. Jasa sebesar Rp3.855.000.000.000,00.

Dalam rangka memenuhi ketentuan PMK Nomor 99/PMK.08/2021 Tentang Perubahan atas PMK 205/PMK.08/2017 Tentang Penggunaan BMN Sebagai Dasar penerbitan SBSN dan PMK Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan SBSN, pada tahun 2023 telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi *underlying asset* baik berupa BMN dan proyek.

5. Dari Pinjaman Luar Negeri yang dikelola Pemerintah terdapat 59 *Outstanding* Pinjaman berasal dari IsDB. Dari pinjaman IsDB tersebut, terdapat 4 pinjaman yang akan *closing date* di Tahun 2026 dan 9 pinjaman berstatus on *going* (masih berjalan) sebagaimana pada Lampiran LDCPL4, selebihnya telah memasuki periode pembayaran cicilan kewajiban. Pinjaman IsDB tersebut menggunakan beberapa akad yaitu: *Loans*, *Istisna*, *Installment sale* dan *Ijarah muntahiyah Bittamlik*, namun dari bisnis proses perencanaan, pelaksanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban, serta pencatatan tetap menggunakan dan berpedoman pada regulasi terkait pengelolaan utang dan sistem akuntansi utang pemerintah (SAUP). Atas penarikan pinjaman tersebut akan dilakukan pembayaran cicilannya dan IsDB mengenakan tambahan kewajiban yang harus dibayar sesuai akadnya (antara lain *Future Value*, *Service Fee*, *Advance Payment*, *Markup*) yang perlakuannya oleh Pemerintah diperlakukan sebagai biaya/imbal hasil/ sewa.

D.3.3. BA 999.02

D.3.3.1. Realisasi Pendapatan Hibah atas Register Hibah yang Diterbitkan Tahun 2024 dan 2025

Pendapatan Hibah sebesar Rp18.346.886.424.369,00 (3.935 register) terdiri dari realisasi pendapatan hibah yang registernya diterbitkan pada tahun 2025 sebesar Rp8.129.231.238.427,00 (3.468 register), realisasi pendapatan hibah yang registernya diterbitkan pada tahun 2024 sebesar Rp1.032.210.341.594,00 (106 register), dan realisasi pendapatan hibah yang registernya diterbitkan sebelum tahun 2024 sebesar Rp9.185.444.844.348,00 (361 register).

Dari keseluruhan register yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan nilai komitmen hibah ekuivalen sebesar Rp19.495.747.779.323,00, masih terdapat nilai hibah yang tidak terealisasi pengesahannya hingga Tahun 2025 (*Audited*) sebesar Rp7.518.536.828.303,00 mengingat terdapat hibah yang kegiatannya bersifat *multiyears* dan/atau hibah yang kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun realisasinya tidak sebesar nilai komitmen.

Dari keseluruhan register yang diterbitkan pada tahun 2025 dengan nilai komitmen hibah ekuivalen sebesar Rp17.696.379.010.968,00, masih terdapat nilai hibah yang tidak terealisasi pengesahannya hingga Tahun 2025 (*Audited*) sebesar Rp9.567.147.772.541,00 mengingat terdapat hibah yang kegiatannya bersifat *multiyears* dan/atau hibah yang kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun realisasinya tidak sebesar nilai komitmen.

D.3.4. BA 999.03

D.3.4.1. Kondisi Status ILKPN

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Perusahaan Negara Sebelum dan Sesudah UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2025

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003, kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan KND. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 PP No. 41 Tahun 2003 sebagian kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS (Persero), wakil pemerintah pada Perum, dan Pembinaan Keuangan pada Perjan. Adapun yang tetap dalam kewenangan Menteri Keuangan adalah terkait (1) Pengusulan setiap PMN dari APBN; (2) Penatausahaan setiap PMN dan perubahannya; (3) Pendirian Persero, Perum, Perjan, dan perubahan bentuk hukum Perjan; dan (4) Pembinaan dan pengawasan BUMN alat fiskal.

Selanjutnya, pada tahun 2025 terbit UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian diubah kembali menjadi UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 3A mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara oleh Presiden untuk pengelolaan BUMN termasuk kepemilikan KND pada BUMN dikuasakan kepada BP BUMN dan/atau BPI Danantara kecuali BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal.

Berdasarkan pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003, Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Perusahaan Negara merupakan salah satu lingkup keuangan negara, sehingga meskipun pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan kepada perusahaan negara telah dikuasakan oleh Presiden kepada BP BUMN dan BPI Danantara, informasi atas Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Perusahaan Negara tersebut tetap dilaporkan dalam LKPP.

Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Perusahaan Negara dilaporkan secara berjenjang sebagai investasi permanen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. BP BUMN ditunjuk sebagai KPA BUN PMN kepada BUMN berdasarkan KMK Nomor 373 Tahun 2025 dimana salah satu tugas KPA adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penunjukan BP BUMN sebagai KPA tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 4A UU No. 16 Tahun 2025 yang mengatur bahwa PMN dalam rangka (1) pendirian Badan dan BUMN; (2) perubahan PMN kepada Badan; (3) penambahan PMN kepada Badan; dan/atau (4) penugasan pemerintah pusat diajukan oleh Kepala BP BUMN.

2. Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2025

Melalui UU No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah menetapkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“Danantara”) yang membawahi *Holding* Operasi (PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)) dan *Holding* Investasi.

a. **Pembentukan *Holding* Operasional/”HO” (PT Danantara Aset Management)**

Sebagai tindak lanjut amanat UU BUMN, telah dibentuk *Holding* Operasional yang bertujuan untuk mengelola operasional BUMN. Pembentukan *Holding* Operasional didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri BUMN Nomor SK-64/MBU/03/2025 dan Keputusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Nomor SKB.01/DI-BP/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Penunjukkan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/”PT BKI” sebagai Perusahaan Induk Operasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 (”PP Nomor 15 Tahun 2025”) tanggal 21 Maret 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian *Holding* Operasional yang menunjuk PT BKI sebagai induk *Holding* Operasional BUMN BPI Danantara.

Melalui PP Nomor 15 Tahun 2025, Pemerintah melakukan pengalihan seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik Negara Republik Indonesia pada 52 Perusahaan Negara kepada *Holding* Operasional, sebagaimana pada Lampiran LDCPL5.

Pengalihan saham pemerintah berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2025 diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2025, belum termasuk PMN kepada PT. LEN Industri (persero) sebesar Rp649.230.000.000,00 berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2024. Atas hal tersebut, BPI Danantara telah mencatat PMN tersebut secara manual sebagai penambah ekuitas sesuai dengan porsi kepemiilikan dalam LK BPI Danantara Tahun 2025.

Selanjutnya, pada tanggal yang sama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 ("PP Nomor 16 Tahun 2025") tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal negara pada BPI Danantara yang berasal dari pengalihan 99 persen saham milik negara berupa saham Seri B pada PT Biro Klasifikasi Indonesia, sehingga komposisi pemegang saham PT Biro Klasifikasi Indonesia menjadi:

1) Negara Republik Indonesia melalui Menteri BUMN memiliki 1 persen saham berupa saham Seri A Dwiwarna.
2) BPI Danantara memiliki 99 persen saham berupa saham seri B.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Nomor 163 tanggal 23 Mei 2025, telah ditetapkan perubahan Anggaran Dasar yang menyatakan perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management (PT DAM). Dalam restrukturisasi ini, Perseroan sebelum perubahan nama menjadi PT DAM tetap dipertahankan sebagai entitas eksisting, sedangkan kegiatan usaha operasionalnya dialihkan kepada entitas baru yang dibentuk dalam rangka restrukturisasi klaster BUMN Jasa Survei.

1) Pendirian PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero) dan PT Biro Klasifikasi Internasional

   Dalam rangka mendukung *Holding* Operasional BPI Danantara agar dapat melaksanakan tugasnya lebih optimal maka perlu dilakukan restrukturisasi klaster BUMN Jasa Survei yang telah mendapat persetujuan Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT BKI Nomor SK-110/MBU/03/2025 dan Nomor SK.02/DI-BP/III/2025 tentang Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Sebagai Entitas Pengelola Bisnis Inspeksi, Sertifikasi dan Survei tertanggal 26 Maret 2025.

   Selanjutnya, didirikan PT Inspeksi Sertifikasi dan Survei Indonesia sebagai induk *Holding* klaster Jasa Survei melalui Akta Nomor 188 tanggal 27 Maret 2025 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Inspeksi Sertifikasi dan Survei Indonesia dan PT Biro Klasifikasi Internasional melalui Akta Nomor 187 tanggal 27 Maret 2025, sedangkan PT Biro Klasifikasi Internasional dibentuk sebagai entitas yang menerima pengalihan kegiatan usaha operasional Perseroan sebelum perubahan nama menjadi PT DAM dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang *Holding* jasa survei, jasa klasifikasi dan registrasi kapal, survei, verifikasi, inspeksi, sertifikasi, konsultasi dan supervisi.

2) *Spin-off* PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

   PT BKI melakukan *spin-off* untuk kegiatan usaha operasional *Testing, Inspection, Certification, Classification dan Statutory*/"TICCS" kepada PT Biro Klasifikasi Internasional ("BKI NewCo")

yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh PT BKI, sebagai pihak yang akan menerima penyertaan seluruh aset dan liabilitas. Pemisahan dilaksanakan dengan PT BKI melakukan penyertaan modal kepada BKI NewCo yang berasal dari spin-off kegiatan usaha dengan nilai wajar dari penilai independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kegiatan usaha operasional PT BKI dialihkan kepada BKI NewCo. Selanjutnya, PT BKI menghibahkan 1 (satu) lembar saham BKI NewCo, kepada Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian BUMN. BKI NewCo kemudian berganti nama menjadi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) serta melakukan perubahan anggaran dasar BKI NewCo yang dianggap perlu oleh pemegang saham.

3) Inbreng Saham kepada PT Inspeksi Sertifikasi dan Survei Indonesia
Selanjutnya, dalam rangka pembentukan Holding klaster Jasa Survei, saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) hasil perubahan nama dari PT Biro Klasifikasi Internasional, serta saham PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo yang sebelumnya merupakan anak perusahaan PT BKI sebelum perubahan nama menjadi PT DAM, diinbrengkan kepada PT Inspeksi Sertifikasi dan Survei Indonesia/ID Survey. Dengan demikian, PT Inspeksi Sertifikasi dan Survei Indonesia/ID Survey menjadi induk Holding klaster Jasa Survei yang membawahi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Surveyor Indonesia, dan PT Sucofindo sebagai entitas operasional.

Dengan demikian, daftar BUMN Persero di bawah Holding Operasional pasca peristiwa aksi korporasi di atas (hingga 31 Desember 2025), sebagaimana pada Lampiran LDCPL6.

b. **Pembentukan Holding Investasi/"HI" (PT Danantara Investment Management)**

PT Bahana Mitra Investa ("BMI") merupakan anak Perusahaan yang sahamnya dimiliki 100 persen oleh PT BPUI (Persero) ("IFG"). Pada bulan Mei 2025, telah dilakukan hibah 1 persen saham oleh IFG kepada Kementerian BUMN dan telah direklasifikasi 1 persen saham BMI tersebut menjadi Saham Seri A Dwiwarna pada bulan Juni 2025.

Penunjukan BMI sebagai Holding Investasi dilakukan melalui Keputusan Bersama Menteri BUMN dengan Kepala BPI Danantara nomor SK-147/MBU/06/2025 dan SKB-04/DI-BP/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Penunjukan BMI sebagai Holding Investasi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Penetapan Kepemilikan Saham Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa. Berdasarkan PP 32 Tahun 2025 tersebut dijelaskan bahwa:

1) Negara Republik Indonesia menetapkan kepemilikan saham negara pada BMI sebagai akibat hibah saham milik IFG kepada Negara sebesar 1% (satu persen) saham ekuivalen dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) yang selanjutnya telah diklasifikasikan sebagai saham seri A Dwiwarna pada Perusahaan Perseroan (Persero) PI Bahana Mitra Investa.
2) BMI dapat melakukan perubahan nama dan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BUMN dan Perseroan Terbatas, serta Anggaran Dasar BMI.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Nomor 7 tanggal 4 Agustus 2025, telah ditetapkan perubahan Anggaran Dasar yang menyatakan perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Investment Management.

PT DIM selanjutnya dimiliki penuh (100%) oleh BPI Danantara dengan adanya pengalihan saham milik negara melalui BP BUMN sebanyak satu persen saham seri A Dwiwarna kepada BPI Danantara tanggal 22 Desember 2025. Adapun angka PT DIM secara 100 persen telah masuk dalam figur ekuitas BPI Danantara.

c. **Penjelasan Pasca Terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2025**

Pada 6 Oktober 2025 telah diterbitkan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Melalui UU tersebut, terdapat perubahan struktur kepemilikan yang dimiliki oleh Negara terhadap BUMN menjadi:

1) Negara Republik Indonesia melalui Kepala BP BUMN memiliki satu persen saham berupa saham Seri A Dwiwarna pada BUMN.
2) BPI Danantara memiliki 99 persen saham berupa saham seri B pada BUMN.

Merujuk kepada Pasal 3AB ayat 4 dan Pasal 3AK ayat 4, terdapat perubahan struktur kepemilikan Holding Operasional dan Holding Investasi yang semula dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (sebesar 1%) dan BPI Danantara (sebesar 99%) menjadi seluruhnya dimiliki oleh BPI Danantara.

Dalam Pasal 94F dinyatakan bahwa pengalihan kepemilikan 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna pada Holding Investasi dan Holding Operasional kepada BPI Danantara dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan di atas, Para Pemegang Saham PT DIM (BPI Danantara dan BP BUMN) telah menyetujui pengalihan seluruh saham seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia melalui Kepala BP BUMN pada PT DIM kepada BPI Danantara sebanyak 500.040 lembar saham senilai Rp500.040.000.000,00 masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 pada tanggal 22 Desember 2025 berdasarkan Salinan Akta Nomor 200 perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Investment Management menjadi PT Danantara Investment Management.

Di sisi lain, pengalihan satu persen saham seri A Dwiwarna milik Negara melalui BP BUMN atas PT DAM telah dialihkan kepada BPI Danantara per tanggal 5 Januari 2026 melalui Perjanjian Pengalihan satu persen Saham Milik Negara Republik Indonesia Berupa Saham Seri A Dwiwarna pada PT Danantara Asset Management (Persero) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Nomor PERJ-2/BPU/01/2026 dan KPPS PT Danantara Asset Management (Persero) Nomor 41 Tahun 2026 dan Nomor SK.01/DI-BP/I/2026 tentang Persetujuan Pengalihan Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Danantara Asset Management (Persero) terkait Nama Perseroan, Kepemilikan Saham dan Klasifikasi Saham (KPPS), dengan catatan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 30 Januari 2026. Berdasarkan KPPS, disetujui pengalihan seluruh saham seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia melalui Kepala BP BUMN pada Perseroan kepada BPI Danantara sebanyak 10.379.520 lembar saham senilai Rp10.379.520.000.000,00 dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d. **Pengelolaan BUMN di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Keuangan Pasca UU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2025**

Sesuai Pasal 3A UU 16/2025 beserta Penjelasannya bahwa BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dikecualikan dari BUMN yang dilimpahkan kepada BP BUMN dan BPI Danantara. BUMN yang ditetapkan sebagai Alat Fiskal (SMV) merupakan BUMN yang digunakan Menteri Keuangan untuk

mendukung kebijakan fiskal, antara lain mengantisipasi adanya risiko fiskal, intervensi kebijakan fiskal, mendukung pembiayaan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan pengelolaan yang lebih fleksibel dan tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) UU 17/2003 yang menyatakan bahwa kewenangan presiden dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, tetap berlaku, dimana keberadaan BUMN tersebut merupakan bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang dijalankan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara dipisahkan.

Saat ini Pemerintah sedang menyusun aturan turunan UU BUMN dan termasuk di antaranya adalah penegasan pengecualian Pasal 3A ayat (5) dan penjelasannya. Bersamaan dengan itu, sedang diproses juga Permohonan Izin Prakarsa terkait Rancangan Peraturan Pemerintah untuk Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan BUMN sebagai Alat Fiskal kepada Presiden Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pengelolaan BUMN sebagai Alat Fiskal di bawah Kementerian Keuangan.

3. Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA BP BUMN Pasca UU Nomor 1 Tahun 2025

a. Metode Penilaian Penyertaan Modal Negara atas Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna

Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2025, definisi BUMN mengalami perubahan mendasar dengan adanya penambahan opsi pemenuhan minimal salah satu ketentuan berikut:

1) seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau
2) terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Hak istimewa tersebut ditunjukkan dengan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna oleh negara melalui BP BUMN. Sesuai Pasal 4C ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2025, negara memiliki hak istimewa paling sedikit:

1) hak untuk menyetujui dalam RUPS;
2) hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
3) hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; dan
5) hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Perubahan definisi BUMN menunjukkan bahwa tidak ada lagi batas persentase kepemilikan negara pada Persero untuk dapat dikategorikan sebagai BUMN, sepanjang negara memiliki saham Seri A Dwiwarna.

Kriteria pemilihan metode penilaian investasi permanen pemerintah sesuai Paragraf 40 PSAP 06 dan PTA 32 (Revisi Kesatu, 1 Mei 2026) adalah sebagai berikut:

1) Kepemilikan kurang dari 20 persen menggunakan metode biaya;
2) Kepemilikan 20 persen sampai dengan 50 persen, atau kepemilikan kurang dari 20 persen tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3) Kepemilikan lebih dari 50 persen menggunakan metode ekuitas.

Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi, antara lain:

1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2) Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
3) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Berdasarkan asesmen kriteria pemilihan metode penilaian investasi permanen pemerintah tersebut, hak istimewa pada saham Seri A Dwiwarna sebagaimana telah disebutkan di atas dianggap memenuhi ciri-ciri pengaruh signifikan atas BUMN sebagaimana diatur dalam PMK nomor 100 Tahun 2025. Dengan demikian, sesuai ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku maka pencatatan atas kepemilikan saham Seri A Dwiwarna dinilai menggunakan metode ekuitas. Hal ini berimplikasi pada peralihan metode pada 52 Anper Holding yang pada periode sebelumnya dikategorikan sebagai "Minoritas" (dicatat menggunakan metode biaya) berubah menjadi kategori "Persero" (dicatat menggunakan metode ekuitas). Sedangkan pada kategori "Minoritas" tersisa 2 perusahaan yaitu PT Asean Bintulu Fertilizer dan PT Indosat Tbk yang masih tetap dicatat menggunakan metode biaya karena negara melalui BP BUMN Tidak memiliki hak istimewa melalui Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana UU Nomor 16 Tahun 2025.

Adapun daftar lengkap Perusahaan Negara yang tercatat per Periode 31 Desember 2025 yang dicatat dalam ILKPN *Audited* 2025, sebagaimana pada Lampiran LDCPL7.

b. Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) Nomor 32

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025, pemerintah menerbitkan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 32: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada BUMN Pasca Perubahan UU Tentang BUMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah Tahun 2025.

Petunjuk Teknis Akuntansi (Revisi Kesatu, 1 Mei 2026) ini mengatur diantaranya hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah Tahun 2025, BP BUMN selaku UAKPA BUN PMN melaporkan penyertaan modal pemerintah berupa:
   a) 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada Holding Operasional;
   b) 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna pada BUMN anggota Holding Operasional;
   c) kepemilikan pada BUMN non-anggota Holding Operasional;
   d) 100% (seratus persen) kepemilikan pada Perum; dan
   e) ekuitas pada Laporan Keuangan BPI Danantara.

   dengan menggunakan metode penilaian sesuai ketentuan Paragraf 40 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi.

   Yang dimaksud LK BPI Danantara Tahun 2025 sebagaimana huruf e) merupakan LK BPI Danantara yang disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana (Perka) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Keuangan.

2) Adapun ilustrasi penyusunan laporan keuangan pada UAKPA BUN BP BUMN adalah sebagai berikut:

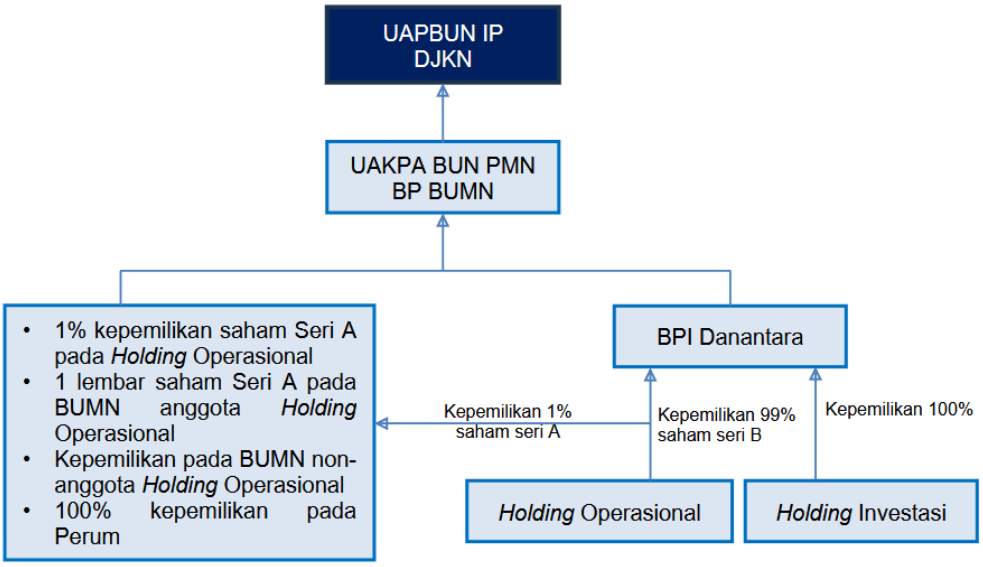

a) LK BPI Danantara Tahun 2025 disusun dengan memasukkan dampak penyesuaian dari LK BUMN (anggota holding) Audited yang dilengkapi dengan tanda tangan Kepala BPI Danantara, Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala BPI Danantara, dan Surat Pernyataan Telah Direviu oleh Satuan Pengawasan Intern BPI Danantara.

b) LK KPA BUN BP BUMN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dilampiri ILKPN disampaikan kepada UAPBUN IP DJKN untuk digabungkan dengan LK KPA BUN Investasi Pemerintah yang lainnya menjadi LKBUN 999.03 Investasi Pemerintah.

c. Kebijakan Akuntansi Signifikan yang Melandasi Penyusunan LK BPI Danantara Tahun 2025

Penyusunan Laporan Keuangan pada Masa Transisi BPI Danantara yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan BPI Danantara bertujuan untuk melaporkan informasi keuangan BPI Danantara sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ("LKPP"). Laporan Keuangan BPI Danantara ini disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 21 Tahun 2025 tentang Keuangan. Peraturan Kepala Badan dimaksud mengatur bahwa penyusunan LK BPI Danantara mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), kecuali pencatatan investasi pada entitas asosiasi yang menggunakan metode ekuitas pada masa transisi (sampai dengan Badan dapat mengaplikasikan PSAK) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan demikian, BPI Danantara mencatat investasi pada entitas asosiasi menggunakan metode ekuitas tanpa penyelarasan kebijakan akuntansi atas entitas asosiasi.

Pada saat laporan keuangan ini diterbitkan BPI Danantara dalam proses menyusun laporan keuangan konsolidasian atas seluruh entitas asosiasi dengan melakukan penyelarasan kebijakan akuntansi entitas asosiasi ke kebijakan akuntansi BPI Danantara, eliminasi transaksi dan saldo di dalam grup BPI Danantara, dan eliminasi porsi laba yang belum terealisasi di dalam grup BPI Danantara, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 2 Tahun 2026 tentang Konsolidasi Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Konsolidasian ini berpotensi menimbulkan perubahan nilai ekuitas BPI Danantara yang dapat berdampak pada nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah.

4. Pengelolaan Dividen Pasca UU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2025

Dengan ditetapkannya UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 dan PP Nomor 15 Tahun 2025 yang terbit pada Triwulan I 2025, kepemilikan Negara dalam hal ini Saham Seri B dan Seri C telah sepenuhnya dialihkan ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Holding Operasional yang saat ini berubah nama menjadi PT Danantara Asset Management (Persero). Selain itu, Undang-undang tersebut juga mengatur salah satu wewenang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) antara lain untuk mengelola BUMN secara operasional dan mengoptimalkan dana setoran dividen BUMN.

Selanjutnya, dengan terbitnya UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara RI memiliki saham 1% pada BUMN yang merupakan saham seri A Dwiwarna melalui Kepala BP BUMN dan 99% pada BUMN yang merupakan saham seri B melalui BPI Danantara, serta ketentuan pada Pasal 4C ayat (2) dinyatakan bahwa kepemilikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki Negara RI melalui BP BUMN dan dividennya dapat dikelola secara langsung oleh BP BUMN setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden. Pengalihan saham dari PT DAM kepada Negara RI (melalui Kepala BP BUMN) berlaku efektif pada tanggal 5 Januari 2026.

Sehubungan dengan terbitnya UU No.16 Tahun 2025 tersebut yang menyatakan bahwa dividen dapat dikelola langsung setelah mendapat persetujuan Presiden, dan mempertimbangkan persetujuan Presiden belum diperoleh, maka diputuskan bahwa dividen bagian Negara RI TA 2025 disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai ketentuan PNBP yang ditindaklanjuti dengan adanya Surat Kepala BP BUMN Nomor S-94/BPU/11/2025 tanggal 28 November 2025 perihal Penyampaian Informasi Rekening Setoran Dividen BUMN Bagian Negara RI.

Hingga akhir tahun 2025, BUMN telah memberikan kontribusi PNBP dividen ke Kas Negara dengan total sebesar Rp11.734,61 miliar yang berasal dari 40 BUMN dan memberikan setoran dividen ke PT Danantara Asset Management (Persero) dengan total sebesar Rp131.416,02 miliar yang berasal dari 16 BUMN, sebagaimana pada Lampiran LDCPL8.

BPI Danantara melakukan pengelolaan dividen dengan menganut prinsip kehati-hatian mengacu pada Perka No. 21 Tahun 2025 tentang Keuangan. Dividen yang diterima oleh BPI Danantara dapat digunakan untuk:

1. Cadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal;
2. Pengeluaran operasional BPI Danantara;
3. Investasi;
4. Setoran ke Negara Republik Indonesia; dan/atau
5. Penggunaan lainnya, antara lain untuk melaksanakan kewenangan BPI Danantara dalam pemberian hibah kepada Negara Republik Indonesia untuk menjaga porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia pada entitas asosiasi (BUMN).

BPI Danantara dapat melakukan investasi dalam bentuk:

1. Penyertaan modal pada holding operasional dan holding investasi;
2. Piutang/pinjaman kepada holding operasional dan holding investasi;
3. Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, Bank Indonesia dan BUMN dengan peringkat *investment grade*;
4. Kas atau setara kas yang meliputi uang tunai deposito; dan

5. Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh BPI Danantara secara sah

Dividen PT DAM tahun 2025 sebesar Rp131,42 triliun antara lain digunakan untuk memberikan Dividen ke BPI Danantara sebesar Rp79,99 triliun (yang terdiri dari Rp461,18 miliar atas Tahun Buku 2024 dan Rp79.530,82 miliar atas dividen interim Tahun Buku 2025) dan capital support kepada BUMN sebesar Rp34,89 triliun. Dividen yang diterima BPI Danantara antara lain diinvestasikan ke PT DIM sebesar Rp70 triliun.

5. Kondisi Laporan Keuangan pada Tahun 2025 *Audited*

Laporan Keuangan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sebagai UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada BUMN dan BPI Danantara Tahun 2025 *Audited* disusun berdasarkan ILKPN yang disampaikan oleh BUMN/Badan Lainnya kepada BP BUMN. Adapun rekapitulasi status laporan keuangan perusahaan negara dirinci pada tabel berikut:

Metode	Status Terakhir	Jumlah Perusahaan
Metode Ekuitas	*Audited* 2025	57
	Draft Audited 2025	4
	Unaudited 2025	47
	TW III 2025	2
	SMT I 2025	1
	Audited 2024	2
	Unaudited 2024	2
	SMT I 2024	1
	Total	**116**
Metode Biaya	*Audited* 2025	1
	Audited 2022	1
	Total	**2**

Rincian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) laba rugi dan neraca yang berakhir 31 Desember 2025 pada Lampiran LD55 dan Lampiran LD56.

Sampai dengan penerbitan laporan ini, beberapa BUMN belum melakukan penerbitan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited*, sebagaimana pada Lampiran LDCPL9.

Selain itu, terdapat pula BUMN dalam proses likuidasi yang telah dikeluarkan dari ILKPN, yaitu:

a. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dikeluarkan dari ILKPN dengan mempertimbangkan telah terdapat surat dari Tim Kurator PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (dalam pailit) tanggal 24 Januari 2025 yang menyatakan "tidak ada potensi Penerimaan Negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah". PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit dan menyebabkan harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines berada dalam keadaan insolvensi.

b. PT Istaka Karya dikeluarkan dari ILKPN dengan mempertimbangan telah terdapat surat dari Tim Kurator PT Istaka Karya (Persero) (dalam pailit) tanggal 5 Juli 2024 yang menyatakan bahwa "tidak ada potensi Penerimaan Negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah". PT Istaka Karya

dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2022, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya dinyatakan pailit dan menyebabkan harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya berada dalam keadaan insolvensi.

c. PT Iglas (Persero) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 23 November 2023. PT Iglas (Persero) mencatatkan ekuitas negatif dan sudah dihapuskan untuk penyajian ILKPN Tahun 2025 Unaudited karena tidak terdapat potensi penerimaan Negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah.

d. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Mdn tanggal 6 Februari 2024. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) mencatatkan ekuitas negatif dan sudah dihapuskan untuk penyajian ILKPN Tahun 2025 Unaudited karena tidak terdapat potensi penerimaan Negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah.

e. PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 28 Maret 2019. Pada tanggal 20 Februari 2023 sudah diterbitkan PP No. 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces. PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) mencatatkan ekuitas negatif dan sudah dihapuskan untuk penyajian ILKPN Tahun 2025 *Unaudited*.

f. PT PANN (Persero) dilikuidasi berdasarkan keputusan RUPS LB yang dituangkan melalui Berita Acara Nomor 05, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Notaris Marliansyah, SH. Pada tanggal 17 Oktober 2024, sudah diterbitkan PP No. 43 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional. PT PANN (Persero) mencatatkan ekuitas negatif dan telah dikeluarkan dari pencatatan ILKPN karena tidak terdapat potensi penerimaan Negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah.

g. PT Industri Sandang Nusantara (ISN) (Persero) dikeluarkan dari ILKPN mempertimbangkan tidak ada potensi penerimaan negara melalui porsi ekuitas pada PT ISN (Persero).

D.3.4.2. Perkembangan BUMN/Perusahaan Negara yang mengalami Defisit Ekuitas

Per 31 Desember 2025, jumlah BUMN yang mengalami defisit ekuitas sebanyak 14 BUMN. Jumlah tersebut sama dengan jumlah BUMN yang mengalami defisit ekuitas pada 31 Desember 2024. Namun terdapat perubahan komposisi atau daftar BUMN yang mengalami defisit ekuitas. Adapun perkembangan nilai defisit ekuitas BUMN ditunjukkan melalui tabel berikut:

(dalam juta rupiah)

No.	BUMN	Ekuitas Atribusi Entitas Pengendali		
		31 Desember 2024	31 Desember 2025	Keterangan
1	PT Barata Indonesia (Persero)	(3.673.947)	(3.516.879)	Metode Ekuitas
2	PT Indah Karya (Persero) [1,2]	(645.615)	(645.615)	Metode Ekuitas
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero) [3]	(415.058)	(363.163)	Metode Ekuitas
4	PT Djakarta Lloyd (Persero) [1]	(13.664)	(13.664)	Metode Ekuitas
5	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	(703.250)	(658.379)	Metode Biaya
6	PT ASABRI (Persero)	(906.735)	(362.742)	Metode Biaya

No.	BUMN	Ekuitas Atribusi Entitas Pengendali		
		31 Desember 2024	31 Desember 2025	Keterangan
7	PT Produksi Film Negara (Persero)	(4.209)	(2.394)	Metode Biaya
8	PT Semen Kupang (Persero) [4]	2.807.134	(1.032.269)	-
9	PT Primissima (Persero) [4]	8.868.681	(884.711)	-
10	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	(1.076.351)	(950.187)	Metode Biaya (Sebelumnya dicatat nol akibat negatif ekuitas)
11	PT Boma Bisma Indra (Persero)	(61.154)	(89.926)	Metode Biaya (Sebelumnya masih memiliki ekuitas positif)
12	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	(21.318.766)	137.179	Metode Biaya (Sebelumnya masih memiliki ekuitas positif)
13	PT Indofarma Tbk [5]	(539.373)	(590.296)	Metode Biaya (Sebelumnya tidak dicatat dalam ILKPN karena tidak berstatus BUMN)
14	PT Industri Nuklir Indonesia [5]	(47.631)	(47.631)	Metode Biaya
Jumlah		**(17.729.938)**	**(9.020.677)**	

Catatan:

1 Menggunakan data Unaudited 2024

2 PT Indah Karya dalam status pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 173/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkts.Pst.

3 PT Asuransi Jiwasraya sedang dalam proses pembubaran (likuidasi)

4 Kepemilikan Negara pada PT Semen Kupang (Persero) dan PT Primissima (Persero) telah seluruhnya di-inbrengkan kepada PT Danantara Asset Management (Persero) sehingga BP BUMN tidak lagi memiliki hak untuk mencatat kedua Perusahaan negara tersebut dalam ILKPN (Tidak terdapat saham Seri A).

5 PT Indofarma Tbk dan PT Industri Nuklir Indonesia merupakan anak perusahaan BUMN Persero yang sahamnya dimiliki negara secara minoritas sebelumnya, sehingga dicatat menggunakan metode biaya.

6 Kepemilikan Negara pada PT Semen Kupang (Persero) dan PT Primissima (Persero) telah seluruhnya di-inbrengkan kepada PT Danantara Asset Management (Persero).

Posisi defisit ekuitas BUMN per 31 Desember 2025 mencapai negatif Rp9,02 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp8,71 triliun atau turun 49,12 persen dibandingkan posisi defisit ekuitas per 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan karena beralihnya defisit ekuitas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari negatif Rp21,32 triliun menjadi positif Rp0,14 triliun akibat injeksi modal dari PT DAM dan konversi utang pemegang saham sebesar $1,42 bn atau kurang lebih setara Rp23,74 triliun (menggunakan kurs akhir tahun).

Namun demikian, terdapat penambahan BUMN yang mengalami defisit ekuitas per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk dari Rp2,81 triliun menjadi negatif Rp1,03 triliun, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dari Rp8,87 triliun menjadi negatif Rp0,88 triliun.

Selain itu, dengan adanya inbreng saham yang dilakukan ke PT DAM (melalui PP Nomor 15 tahun 2025), Negara sudah tidak memiliki saham Seri A lagi pada PT Semen Kupang (Persero) dan PT Primissima (Persero). Saham kedua Perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh PT DAM selaku Holding Operasional.

D.3.4.3. Estimasi Dari Dampak Finansial yang Diukur - Kewajiban Penjaminan

Menurut Undang-Undang nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 diketahui bahwa anggaran kewajiban penjaminan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03..

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 28/PMK.08/2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 27/PMK.08/2022, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk program penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional (pasal 42 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023), anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk program PEN (dukungan loss limit pelaku UMKM dan dukungan back stop loss limit pelaku Korporasi), dan pengelolaan dana cadangan kewajiban penjaminan dalam rangka pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Kemudian Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK Nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan.

Amanat pengaturan pemberian jaminan

Sesuai Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70 persen jaminan Pemerintah tersebut menjadi beban utang PDAM apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan

Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (*risk factor*) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (*risk factor*) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Kemudian melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Kereta Api (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelengaraan *Light Rail Transit*/LRT Jabodebek.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

Kemudian melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian/Lembaga/Pemda/ BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerja sama/dokumen yang dipersamakan dengan Badan Usaha dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020), Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN, sedangkan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan di Tahun 2020 kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jaminan

Kredit Indonesia/Jamkrindo (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia/Askrindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan loss limit kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero).

Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan loss limit yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan loss limit tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). PT PII sebagai pelaksana dukungan loss limit juga menerima dukungan Pemerintah berupa Backstop Loss Limit sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan loss limit yang ditanggung oleh PT PII. Selain itu, bagi BUMN yang melakukan penugasan dari Pemerintah dan terdampak pandemik Covid -19, Pemerintah bersama PT PII juga memberikan penjaminan bersama untuk pinjaman kredit dari BUMN dimaksud.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung dapat memberikan jaminan atas pinjaman pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk memenuhi kewajiban penempatan modal pada perusahaan patungan yang dibentuk konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium BUMN Tiongkok atau untuk memenuhi kewajiban membiayai perubahan harga (*cost overrun*) pada proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (BUMN, BUMD, PJPK/PJPSN/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya (mengalami *default*). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan antara lain sebagai berikut:

a. Perlu pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian vs keterbatasan dana Pemerintah; dan
b. Perlu dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerja sama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau

PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 (tidak ada alokasi). Begitu juga untuk program penugasan infrastruktur daerah meskipun programnya masih berjalan namun tidak dialokasikan anggaran kewajiban penjaminannya. Sedangkan untuk program cadangan pangan pemerintah, jaminan pemerintah sudah selesai dengan berakhirnya fasilitas kredit di tanggal 2 April 2024. Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 diatur bahwa anggaran kewajiban penjaminan pada APBN diakumulasikan ke rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang digunakan untuk pembayaran klaim pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan akhir Triwulan IV 2025 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 105 surat jaminan pemerintah Rp743.699,66 miliar (Rp220.135,74 miliar, USD29,92 miliar, dan EUR 1,08 milar). Per akhir Desember 2025, 50 penjaminan masih berstatus aktif dengan nilai komitmen sebesar ekuivalen Rp518.601,34 miliar (Rp130.224,99 miliar, USD21,87 miliar, dan EUR1,08 milar) dengan nilai outstanding/eksposur investasi sebesar Rp395.798,58 miliar (Rp104.811,07 miliar, USD15,35 miliar, EUR 0,95 miliar dan JPY137,53 miliar). Rincian portofolio kewajiban penjaminan yang masih aktif per program penjaminan sampai dengan akhir Desember 2025 (data nilai komitmen dan *outstanding* per Triwulan IV tahun 2025) disajikan dalam lampiran LDCPL10.

Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/ badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

b. Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70 persen dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Dari 70 persen jaminan tersebut selanjutnya menjadi utang PDAM kepada Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah. Atas beban utang dimaksud, Pemerintah Daerah dapat: (i) membayar secara langsung melalui mekanisme penganggaran APBD tahun berjalan dan/atau (ii) mengkonversi beban menjadi pinjaman Pemerintah Daerah melalui perjanjian pinjaman antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan, dimana dalam hal terdapat tunggakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian pinjaman, Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).

c. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara risk sharing (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau amount sharing (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat (4)).

d. Berdasarkan PMK Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Hutama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Hutama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).

e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara.

f. Berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.08/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.

g. Berdasarkan PMK Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.

h. Berdasarkan PMK Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN), kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPSN.

i. Berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pelaksanaan pembayaran klaim dukungan loss limit yang berasal dari dana cadangan penjaminan, tidak mengakibatkan piutang Pemerintah dan/atau Regres Pemerintah.

j. Berdasarkan PMK Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dengan PMK 32/PMK.08/2021, pembayaran klaim

atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI/Pemerintah kepada Terjamin (pelaku usaha korporasi).

k. Berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah menimbulkan piutang dan/atau Regres dari PT PII/Pemerintah kepada Terjamin (BUMN penugasan).

l. Berdasarkan PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, pembayaran klaim penjaminan kepada Penerima Jaminan atas porsinya timbul piutang dalam bentuk Regres kepada Terjamin.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan Tahun 2025, tidak terdapat gagal bayar (*default*) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/PJPSN/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Dalam APBN TA 2025 tidak dialokasikan anggaran kewajiban penjaminan karena saldo dana cadangan penjaminan Pemerintah telah memenuhi batasan kecukupan dana cadangan penjaminan sebagaimana ketentuan batas kecukupan dana cadangan penjaminan infrastruktur dalam KMK 30/2021. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir Juni tahun 2025 sebesar Rp13.268 miliar dengan dana sebesar Rp500 miliar di tempatkan dalam instrumen investasi. Saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp406,87 miliar.

D.3.4.4. Kepemilikan Negara pada PT Semen Kupang (Persero), PT Primissima (Persero), dan PT Rekayasa Industri

Kepemilikan negara pada PT Semen Kupang (Persero), PT Primissima (Persero), dan PT Rekayasa Industri telah dialihkan seluruhnya kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang kemudian menjadi PT Danantara Asset Management (Persero) dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Semen Kupang (Persero)

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Semen Kupang (Persero) Nomor SK-262/MBU/09/2025, Nomor KEP.DIR/67/2025, dan Nomor 900.1.13.2/783/EK tentang Persetujuan Pengalihan Saham PT Semen Kupang (Persero), telah disetujui pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Danantara Asset Management (Persero) sebanyak 82.213 lembar saham dengan nilai sementara sesuai PP No. 15 Tahun 2025 senilai Rp82.213.000.000,00 dengan masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00. Dengan pengalihan tersebut, maka Pemegang Saham Perseroan adalah PT Danantara Asset Management (Persero), Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

b. PT Primissima (Persero)

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Primissima (Persero) Nomor SK-263/MBU/09/2025 dan Nomor 002/SK-GI/IX/2025 tentang Persetujuan Pengalihan Saham PT Primissima (Persero), telah disetujui pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Danantara Asset Management (Persero) sebanyak 6.863 lembar saham dengan nilai sementara sesuai PP No. 15 Tahun 2025 senilai Rp6.863.000.000,00 dengan masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00. Dengan pengalihan tersebut, maka Pemegang Saham Perseroan adalah PT Danantara Asset Management (Persero) dan PT GKBI Investment.

c. PT Rekayasa Industri

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rekayasa Industri Nomor SK-66/MBU/03/2025, Nomor 001/A/HK/D0302/KPS/2025, dan Nomor 13697/D/HM/D51200/IT/2025 tentang Persetujuan Pengalihan Saham PT Rekayasa Industri, telah disetujui pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (sekarang menjadi PT Danantara Asset Management (Persero)) sebanyak 22.366 lembar saham dengan nilai sementara sesuai PP No. 15 Tahun 2025 senilai Rp22.366.000.000,00 dengan masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00. Dengan pengalihan tersebut, maka Pemegang Saham Perseroan adalah PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Danantara Asset Management (Persero), dan PT Pupuk Kalimantan Timur.

D.3.4.5. Perkembangan Pembubaran Perusahaan Negara

Berdasarkan arahan Presiden RI dalam Rapat Internal Pembentukan Holding Danareksa – PPA tanggal 8 Maret 2021 dan Rakor KBUMN tanggal 14 Oktober 2021 mengenai BUMN yang mengalami kinerja operasional dan keuangan yang buruk untuk dilakukan penutupan. Dalam rangka menindaklanjuti arahan tersebut Menteri BUMN telah menyampaikan rencana pembubaran Tujuh BUMN kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-1009/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021.

Tujuh Perusahaan Negara yang dinilai tidak layak dipertahankan sehingga diusulkan untuk dilakukan pembubaran, antara lain PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero). Menteri Keuangan telah memberikan tanggapan melalui surat No. S-494/MK.06/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang menyampaikan sependapat tujuh BUMN tersebut dapat dibubarkan. Selain 7 (tujuh) BUMN tersebut, PT Asuransi Jiwasraya dilikuidasi berdasarkan surat nomor S-30/MBU/01/2025 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Efektif Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya tanggal 22 Januari 2025.

Berikut merupakan penjelasan atas proses pembubaran BUMN dan pencatatannya dalam ILKPN Tahun 2025 *Audited*:

a. PT Iglas (Persero)

1. Telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui surat keputusan RUPS Nomor: S-149/MBU/03/2022 pada tanggal 10 Maret 2022. Pada tanggal 3 April 2023 sudah diterbitkan PP No. 18 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas.
2. PT Iglas (Persero) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 23 November 2023. Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan (PKPU), khususnya pasal 16 jo. Pasal 69 Undang-undang PKPU, Dimana segala tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit menjadi kewenangan dari Kurator.
3. Pada tanggal 13 Agustus 2024, telah dilakukan pertemuan antara Direktorat Lelang Kementerian Keuangan, PT PPA, dan PT BNI (Persero) Tbk, dan disepakati bahwa akan dilakukan pelaksanaan Lelang Bersama antara aset yang menjadi boedel pailit PT Iglas (Persero) dan aset yang dimiliki PT PPA (milik PT Iglas yang dibeli oleh PT PPA sehubungan dengan upaya retrukturisasi menyeluruh dan penyelesaian kewajiban PT Iglas).
4. Sebagai informasi, telah dilakukan penjualan aset scrap pada bulan September 2024 senilai Rp26 Miliar, Hingga saat ini belum dilakukan pembagian oleh Kurator dikarenakan adanya gugatan keberatan atas daftar pembagian dari salah satu kreditur IGLAS. Namun, sudah terdapat upaya dari PT PPA untuk meminta Kurator segera melakukan pembagian dana hasil penjualan.
5. Selanjutnya, telah dilakukan Lelang ke-2 aset boedel pailit dan aset PPA pada tanggal 15 November 2024 dan 19 Desember 2024, namun hasil “Tidak Ada Penawaran" (TAP). Saat ini Kurator dalam

proses pembaharuan penilaian aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai persiapan jadwal Lelang ke-3.

6. Pada tanggal 21 Februari 2025, PT PPA telah bersurat kepada PT BNI (Persero) Tbk (tembusan kepada Kementerian BUMN) yang pada intinya menyampaikan bahwa proses lelang bersama dapat dilaksanakan mengingat bahwa penjualan aset secara lelang bersama dapat meningkatkan nilai penjualan boedel pailit, dengan tetap memperhatikan kepentingan hak dan kewajiban seluruh pihak terkait atas proses kepailitan PT Iglas (Persero).
7. PT Iglas (Persero) mencatatkan ekuitas negatif dan sudah dihapuskan untuk penyajian ILKPN Tahun 2025 *Audited* karena tidak terdapat potensi penerimaan Negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah.

b. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

1. Dinyatakan dibubarkan setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Kertas Kraft Aceh tanggal 3 April 2023 yang kemudian dilanjuti dengan penerbitan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Kertas Kraft Aceh (Persero) No. 08 tanggal 21 Juli 2023 dan ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Kertas Kraft Aceh (Persero) No. 01 tanggal 2 Oktober 2023, yang secara definitif menetapkan pembubaran KKA dan penunjukan likuidator.
2. Likuidator selanjutnya mencatat dan menginventarisasi aset dan kewajiban PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (”KKA”) dan memverifikasi bahwa utang KKA lebih besar dari aset, sehingga Likuidator wajib mengajukan permohonan penyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.
3. KKA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Mdn tanggal 6 Februari 2024.
4. Pada Mei 2024 terdapat Daftar Piutang Tetap dengan total tagihan sebesar Rp2.448.267.595.750,00, dimana terdapat tagihan dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp153.989.814.242,00, KPP Besar Tiga Rp17.897.841.750,00, dan KPP Pratama Lhokseumawe Rp12.084.275.312,00.
5. Telah dilakukan lelang sebagian kendaraan dan scrap pada 15 Agustus 2024 dengan nilai penjualan Rp3,1 M, lelang ke-1 atas tanah bangunan pada 10 Des 2024, lelang ke-2 pada 3 Feb 2025, dan lelang ke-3 pada 29 Apr 2025, dimana Tidak Ada Peminat (”TAP”).
6. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) mencatatkan ekuitas negatif dan sudah dihapuskan untuk penyajian ILKPN Tahun 2025 *Unaudited* karena tidak terdapat potensi penerimaan Negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah.
7. Belum ada informasi lanjutan terkait progres penyelesaian piutang negara atas pembubaran PT Kertas Kraft Aceh (Persero).

c. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

1. Dinyatakan pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Sby Jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby pada tanggal 2 Juni 2022. Pada tanggal 20 Februari 2023 sudah diterbitkan PP No. 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines.
2. Pada tanggal 9 Agustus 2022 terdapat Daftar Piutang Tetap dengan total tagihan sebesar Rp11.019.973.564.730,00. Dimana terdapat tagihan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari Rp10.482.177,00, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke Rp82.836.718,00, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Rp1.108.314.359.170,00, KPP Pratama Balikpapan Barat Rp3.589.496,00, KPP Pratama Sidoarjo Utara Rp145.222.155,00, dan KPP Pratama Tangerang Barat Rp100.524.148.239,00 serta tagihan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp2.917.489.789.947,00.

3. Sampai dengan April 2025 telah dilakukan penjualan sebagian besar aset oleh Kurator melalui lelang berupa pesawat, scrap, mesin, simulator, suku cadang, tanah bangunan, serta saham anak perusahaan yaitu MMF dan MTC dengan nilai total sebesar Rp267,7 miliar. Selain itu terdapat pula pendapatan Kurator dari dana KSO MNA dengan Pemkab Merauke sebesar Rp46,8 miliar. Aset MNA yang belum terjual adalah Aset Biak dan Jayapura.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan pembagian hasil penjualan aset dalam 4 kali pembagian kepada para kreditur antara lain kepada Kemenkeu sebesar Rp13.583.347.714,00 serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari Rp10.482.177,00, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke Rp82.836.718,00, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Rp26.773.302.720,00, KPP Pratama Balikpapan Barat Rp3.589.496,00, KPP Pratama Sidoarjo Utara Rp145.222.155,00, dan KPP Pratama Tangerang Barat Rp2.402.200.439,00.
5. Tim Kurator PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (Dalam Pailit) telah menyampaikan surat tertanggal 24 Januari 2025 yang isinya menyampaikan:
   a) Saat ini, progres kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (Dalam Pailit):
      1) Telah berhasil menjual aset-aset berupa tanah dan bangunan, scrap, dan saham PT MNA di PT Merpati Maintenance Facility dan PT Merpati Training Center; dan
      2) Terhadap hasil penjualan aset-aset tersebut, Tim Kurator telah melakukan pembagian sebanyak 4 (empat) tahap yaitu pada tanggal 23 Desember 2022, 23 Mei 2023, 23 Juni 2023, dan 14 Juni 2024.
   b) Tidak ada potensi Penerimaan negara dari porsi kepemilikan Saham pemerintah.
   c) Belum pernah dilakukan penyetoran ke Kas Negara.
6. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) sudah dihapuskan untuk penyajian ILKPN tahun 2025 *Audited* karena sudah tidak memiliki nilai investasi pemerintah sebagaimana mencatatkan ekuitas negatif. Selain itu, dinyatakan oleh Tim Kurator bahwa ”tidak ada potensi Penerimaan negara dari porsi kepemilikan Saham pemerintah.”

d. PT Kertas Leces (Persero)

1. Dinyatakan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 28 Maret 2019. Pada tanggal 20 Februari 2023 sudah diterbitkan PP No. 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.
2. Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) telah menyampaikan surat nomor 872/PAILIT-KL/AG-RB-FEB/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang isinya menyampaikan:
   a) Sampai saat ini, proses kepailitan masih dalam tahap pemberesan sisa harta pailit oleh Tim Kurator.
   b) Ada potensi Penerimaan Negara atas hasil pemberesan sisa harta pailit milik dan atas nama PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit), namun demikian masih terdapat kendala dalam proses pemberesan oleh karena 16 sertifikat milik dan atas nama perusahaan masih dikuasai oleh Kementerian Keuangan RI dan sampai saat ini tidak pernah diserahkan kepada Tim Kurator.
   c) Adapun potensi Penerimaan negara akan diinformasikan apabila sisa harta Perusahaan telah laku terjual oleh Tim Kurator melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
   d) Telah dilakukan pembagian sebanyak dua kali yakni sebesar Rp1,36 miliar pada tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian PT Kertas Leces (Persero) (dalam Pailit) tertanggal 30 Agustus 2021 dan sebesar Rp10,43 miliar pada tanggal 16 Agustus 2022 berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) tertanggal 1 Desember 2021.
3. Total tagihan Leces berdasarkan Daftar Piutang Tetap adalah sebesar Rp3.001 miliar dimana terdapat utang kepada Kementerian Keuangan (yang terdiri dari utang eks Foreign Exchange Loan

(SLA), Direktorat Dana Investasi (RDI), dan utang subordinasi) sebesar Rp749,8 miliar dan utang kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga sebesar Rp12,4 miliar.

4. Atas utang kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga telah dilakukan pembagian sebesar Rp22,5 juta berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian PT Kertas Leces (Persero) (dalam Pailit) tertanggal 30 Agustus 2021 dan sebesar Rp12,3 miliar berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) tertanggal 1 Desember 2021.
5. Pada tanggal 7 Maret 2025 telah dilaksanakan Rapat Kreditur Leces di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan kesimpulan rapat yaitu mengenai Evaluasi Kinerja Tim Kurator.
6. PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) mencatatkan ekuitas negatif dan sudah dihapuskan untuk penyajian ILKPN Tahun 2025 *Audited*.

e. PT PANN (Persero)

1. Dilikuidasi berdasarkan keputusan RUPS LB yang dituangkan melalui Berita Acara Nomor 05,- tanggal 11 Oktober 2023 oleh Notaris Marliansyah, SH. Pada tanggal 17 Oktober 2024, sudah diterbitkan PP No. 43 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional.
2. Pada tahun 2017, telah dilakukan upaya restrukturisasi SLA, berupa konversi menjadi Penyertaan Modal Negara ("PMN") non-tunai. Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat No. S-537/MK.05/2019 tanggal 16 Juli 2019 mengenai Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) menyetujui hal-hal sebagai berikut:
   a) Konversi utang pokok SLA, sebesar US$261.304.449,49, menjadi PMN non-tunai; dan
   b) Penghapusan utang non-pokok SLA, sebesar US$199.792.520,10, yang mana memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) Republik Indonesia sebelum ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Persetujuan atas PMN non-tunai telah dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) tahun fiskal 2020 dan APBN-Perubahan tahun fiskal 2020. Sedangkan, untuk penghapusan utang non-pokok SLA, telah memperoleh persetujuan dari DPR Republik Indonesia. Rancangan Peraturan Pemerintah (“RPP”) telah dibahas dalam Panitia Antar Kementerian (“PAK”) dan harmonisasi RPP. Namun demikian, mengingat PANN dianggap tidak lagi memiliki kapabilitas untuk mengembangkan usaha kedepannya, maka proses penetapan RPP tidak dilanjutkan.
4. Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”) terkait penetapan pembubaran Perseroan (RUPS Definitif Pembubaran) telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2025 dan berdasarkan keputusan RUPS tersebut, Likuidator secara resmi ditunjuk. Likuidator kemudian mengumumkan pada surat kabar terkait pembubaran PANN. Pengumuman tersebut juga menginformasikan periode pendaftaran tagihan kepada Likuidator, yaitu dari tanggal 26 Februari 2025 hingga 26 April 2025. Total tagihan yang didaftarkan oleh kreditur kepada Likuidator hingga 26 April 2025 adalah sebesar US$461.096.969,59 dan Rp213.888.049.227,43. Pada tagihan tersebut, terdapat tagihan Pemerintah, yaitu melalui:
   a) Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendaftarkan tagihan sebesar USD461,096,969.59 atau setara dengan Rp7.523.258.155.830,44 (asumsi kurs tengah BI Rp16.316,00, sesuai yang didaftarkan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kemenkeu kepada Likuidator);
   b) Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran mendaftarkan tagihan sebesar Rp45.776.300.000,00; dan
   c) KPP Wajib Pajak Besar Empat (Ditjen Pajak) mendaftarkan tagihan sebesar Rp127.951.449.069,00.

5. Saat ini, proses pembubaran PANN masih ada dalam tahap verifikasi aset dan kewajiban yang sedang dilakukan oleh Likuidator.
6. PT PANN (Persero) mencatatkan ekuitas negatif dan telah dikeluarkan dari pencatatan ILKPN karena tidak terdapat potensi penerimaan Negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah.

f. PT Istaka Karya (Persero)

1. Dinyatakan pailit dan harta pailit berada dalam keadaan insolven berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 12 Juli 2022. Pada tanggal 17 Maret 2023 sudah diterbitkan PP No. 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya.
2. Saat ini, penanganan PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit) (”ISTAKA”) dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan, dimana sedang dilakukan proses pemberesan boedel pailit hingga nantinya melakukan pencabutan status badan hukum ISTAKA pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Nilai Daftar Piutang Tetap (”DPT”) ISTAKA sebesar Rp786.276.796.998,59, dimana terdapat tagihan pajak sebesar Rp4.500.000,00 yang telah dibayar berdasarkan Pembagian Tahap Pertama hasil pemberesan harta pailit ISTAKA berupa penjualan scrap, piutang tertagih dan penjualan tanah di Pecatu Bali. Berdasarkan surat No. 003/PAILIT-IK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, Kurator telah menyampaikan kepada PPA, bahwa telah melaksanakan Pembagihan Tahap Pertama kepada para Kreditur Preferan yaitu pajak sebesar Rp28.400.770,00 (didalamnya termasuk Rp4.500.000,00), gaji terutang Rp9.777.369.166,00 dan BPJS sebesar Rp427.364.713,00
4. PT Istaka Karya (Persero) sudah dihapuskan untuk penyajian ILKPN tahun 2024 karena dianggap sudah tidak memiliki nilai investasi pemerintah sebagaimana adanya surat dari Tim Kurator PT Istaka Karya (Persero) PT Istaka Karya (Persero) (dalam pailit) tanggal 5 Juli 2024 yang menyatakan bahwa “tidak ada potensi penerimaan negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah”.
5. Progres penjualan aset ISTAKA oleh Kurator sebagai berikut: lelang aset Naragong, Bekasi 6 kali terakhir tanggal 8 Agustus 2024, lelang aset Pandansari, Bogor 5 kali terakhir tanggal 27 Februari 2025, lelang aset Sinarancang, Setupatok, dan Nanggela di Cirebon 1 kali tanggal 20 Desember 2024, lelang aset Kedungbunder, Cirebon 2 kali terakhir tanggal 20 Desember 2024 dan akan dilakukan lelang ke-3 pada tanggal 27 Mei 2025.
6. Selain itu, pada tanggal 26 dan 27 Februari 2025, serta tanggal 18 Maret 2025, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RRI, dimana Kreditur BUMN terdaftar pada Daftar Piutang tetap Kreditur PT Istaka Karya (Persero), diminta untuk melepaskan hak tagihnya sehingga hasil penjualan aset boedel pailit dapat diprioritaskan untuk penyelesaian kewajiban pada kreditur UMKM dan penyelesaian pesangon karyawan.

g. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

1. Telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-90/MBU/02/2022 pada tanggal 2 Februari 2022. Pada tanggal 17 Maret 2023 sudah diterbitkan PP No. 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.
2. Tim Likuidator PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (Dalam Likuidasi) telah menyampaikan surat tertanggal 8 Juli 2025 yang isinya menyampaikan:
   a) Saat ini, progress likuidasi PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (Dalam Likuidasi) masih berlangsung.
   b) Tidak ada potensi Penerimaan negara dari porsi kepemilikan Saham Pemerintah.
   c) Belum pernah dilakukan penyetoran ke kas negara.

3. Progres penjualan aset ISN, telah dilakukan lelang atas aset patal Secang dan scrap ex Patal Cilacap pada Maret 2025 dengan nilai penjualan sebesar Rp201.27 miliar, penetapan pembagian secara keseluruhan ditargetkan pada April 2025. Untuk tahapan selanjutnya akan diterbitkan daftar pembagian atas penjualan aset serta penjualan aset ISN lainnya termasuk saham ABP.
4. PT ISN telah dikeluarkan dari ILKPN karena tidak ada potensi penerimaan negara melalui porsi ekuitas pada PT ISN.

h. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Dilikuidasi berdasarkan keputusan RUPS Nomor S-30/MBU/01/2025 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Efektif Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya tanggal 22 Januari 2025 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor KEP 9/D.05/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Saat ini PP pembubaran belum diterbitkan dan masih dalam proses.

Tim Likuidator PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Dalam Likuidasi) telah menyampaikan surat nomor 00211/S/TL-JS/0725 tanggal 10 Juli 2025 perihal Penyampaian Informasi Progres Pelaksanaan Likuidasi PT Asuransi Jiwasraya yang pada intinya menyampaikan:

1. Saat ini, progress likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Dalam Likuidasi) masih berlangsung dengan rincian sebagai berikut:
   a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi Jiwasraya (RKAB);
   b) Menindaklanjuti Aspek Legal Pembubaran;
   c) Penyelesaian Kewajiban kepada Pegawai, dan pengangkatan tim pendukung Likuidasi;
   d) Audit Laporan Keuangan Tahun 2024;
   e) Pengajuan Pembubaran Afiliasi;
   f) Penyelesaian Audit Neraca Penutupan per Tanggal Cabut Izin Usaha;
   g) Inventarisir Aset dan Kewajiban;
   h) Neraca sementara likuidasi;
   i) Proses likuidasi lainnya baru dapat dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi mendapatkan persetujuan dari OJK, di antaranya: (1) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang; (2) Melakukan pembayaran kewajiban kepada kreditur; (3) Melakukan proses penutupan NPWP Perusahaan; (4) Menyusun dan mengaudit neraca akhir likuidasi; (5) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Likuidasi; dan (6) Pengakhiran proses likuidasi.
2. "Tidak ada" potensi Penerimaan negara dari porsi kepemilikan Saham Pemerintah. Sesuai Neraca penutupan Audited tanggal 22 Januari 2025, total nilai Kewajiban Jiwasraya sebesar Rp527,10 miliar dan total Aset sebesar Rp162,05 miliar dimana posisi nilai kewajiban lebih besar dari nilai aset yang dimiliki sehingga tidak ada potensi penerimaan negara dari porsi kepemilikan saham pemerintah.
3. Belum pernah dilakukan penyetoran ke kas negara.

i. PT Indah Karya (Persero)

1. Dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat per tanggal 26 November 2024 dalam Surat PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") Nomor S-92/PPA/DU/0125 tanggal 9 Januari 2025 dan merujuk kepada Surat INDKA ke PPA nomor U.7/47/11/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Putusan Sidang Permohonan PKPU No. Perkara: 173/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst ("Surat Pemberitahuan Kepailitan").
2. PT Indah Karya (Persero) masih tetap dimasukkan dalam ILKPN Tahun 2025 audited karena hingga saat ini belum ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Pembubarannya dan saat ini sedang diproses pengajuan Izin Prakarsa Pembubaran sebagai tahap awal untuk selanjutnya ditetapkan dalam PP.

j. PT Semen Kupang (Persero)

Dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada putusan per tanggal 15 September 2025 dalam Surat Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Sby. Berdasarkan putusan Pailit tersebut dan sesuai dengan arahan PT Danantara Aset Management (Persero) (DAM) selaku Pemegang Saham, PT Semen Kupang (Persero) mengajukan Kasasi pada tanggal 23 September 2025. Hingga saat ini putusan atas Kasasi tersebut belum keluar, dan sampai dengan tanggal penyelesaian Laporan ini, Peraturan Pemerintah atas pembubaran PT Semen Kupang (Persero) belum diterbitkan.

k. PT Primissima (Persero)

Dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada putusan per tanggal 15 September 2025 dalam Surat Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Sby. Berdasarkan putusan Pailit tersebut dan sesuai dengan arahan PT Danantara Aset Management (Persero) (DAM) selaku Pemegang Saham, PT Semen Kupang (Persero) mengajukan Kasasi pada tanggal 23 September 2025. Hingga saat ini putusan atas Kasasi tersebut belum keluar, dan sampai dengan tanggal penyelesaian Laporan ini, Peraturan Pemerintah atas pembubaran PT Semen Kupang (Persero) belum diterbitkan.

l. PT Djakarta Lloyd (Persero)

Dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan per tanggal 12 November 2025 dalam surat putusan 54/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga Jkt.Pst jo. nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/pn.Niaga Jkt.Pst. PT Djakarta Lloyd (Persero) masih tetap dimasukkan dalam ILKPN Tahun 2025 dikarenakan hingga akhir 2025 belum ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Pembubarannya.

m. PT PANN Pembiayaan Maritim

PT PANN Pembiayaan Maritim telah melaksanakan RUPS Pembubaran pada tanggal 1 November 2024. Selanjutnya, PT PANN Pembiayaan Maritim dicabut izin usahanya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.06/2025 tanggal 15 April 2025. Dengan dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, PT PANN Pembiayaan Maritim masih tetap dimasukkan dalam ILKPN Tahun 2025 dikarenakan hingga akhir 2025 belum ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Pembubarannya.

D.3.4.6. Peristiwa Non-Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

1. Pengalihan Saham

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2025, terdapat kewajiban pengalihan kepemilikan:

1) Satu persen Saham BP BUMN atas PT DIM selaku Holding Investasi dan PT DAM selaku Holding Operasional kepada BPI Danantara sehingga BPI Danantara akan memiliki 100 persen kepemilikan atas Holding Investasi dan Holding Operasional;
2) Saham PT DAM atas BUMN Persero kepada BP BUMN sehingga BP BUMN akan memiliki satu persen Saham (diklasifikasikan Seri A) secara langsung atas BUMN Persero.

Sesuai mandat Pasal 2 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2025, periode pengalihan wajib dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah UU No. 16 Tahun 2025 diundangkan (maksimal 6 Januari 2026).

a) Pengalihan Saham Seri A Dwiwarna pada PT DAM
Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Para Pemegang Saham PT

DIM (BPI Danantara dan BP BUMN) menyetujui pengalihan seluruh saham seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia melalui Kepala BP BUMN pada PT DIM kepada BPI Danantara sebanyak 500.040 lembar saham senilai Rp500.040.000.000,00, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 pada tanggal 22 Desember 2025 berdasarkan Salinan Akta Nomor 200 perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Investment Management menjadi PT Danantara Investment Management.

Di sisi lain, pengalihan satu persen saham seri A Dwiwarna milik Negara melalui BP BUMN atas PT DAM telah dialihkan kepada BPI Danantara per tanggal 5 Januari 2026 melalui Perjanjian Pengalihan satu persen Saham Milik Negara Republik Indonesia Berupa Saham Seri A Dwiwarna pada PT Danantara Asset Management (Persero) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Nomor PERJ-2/BPU/01/2026 dan KPPS PT Danantara Asset Management (Persero) Nomor 41 Tahun 2026 dan Nomor SK.01/DI-BP/I/2026 tentang Persetujuan Pengalihan Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Danantara Asset Management (Persero) terkait Nama Perseroan, Kepemilikan Saham dan Klasifikasi Saham, dengan catatan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 30 Januari 2026. Berdasarkan KPPS, disetujui pengalihan seluruh saham seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia melalui Kepala BP BUMN pada Perseroan kepada BPI Danantara sebanyak 10.379.520 lembar saham senilai Rp10.379.520.000.000,00, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

b) Pengalihan Saham PT DAM atas BUMN Persero

Sebelum diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2025, kepemilikan saham seri A Dwiwarna pada 50 BUMN yang telah di-inbreng-kan berdasarkan PP No. 15 Tahun 2025 adalah sebesar 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dan sisanya berupa saham Seri B dimiliki oleh PT DAM selaku Holding Operasional maupun Induk Holding BUMN. Dengan demikian, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU 16/2025, maka: 1) perlu dilakukan pengalihan sebagian saham seri B milik PT DAM kepada BP BUMN untuk memenuhi 1% (satu persen) kepemilikan saham seri A Dwiwarna oleh BP BUMN melalui perjanjian pengalihan saham, 2) sebagian saham Seri B milik PT DAM yang dialihkan pada Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN, akan diklasifikasikan menjadi saham Seri A Dwiwarna.

Perubahan kepemilikan tersebut telah dilaksanakan per tanggal 5 Januari 2026 melalui KPPS PT DAM Nomor 41 Tahun 2026 dan Nomor SK.01/DI-BP/I/2026 tentang Persetujuan Pengalihan Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Danantara Asset Management (Persero) terkait Nama Perseroan. Berdasarkan KPPS tersebut disetujui pengurangan penyertaan modal Perseroan pada masing-masing 50 BUMN (anak perusahaan Perseroan) yang telah diinbrengkan oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia kepada Negara Republik Indonesia melalui Kepala BP BUMN untuk memenuhi ketentuan sebanyak 1% (satu persen) kepemilikan saham Seri A Dwiwarna.

Sebagai landasan hukum operasional atas proses pengalihan tersebut, BP BUMN dan PT DAM telah menandatangani Akta Nomor 13 tanggal 6 Januari 2026 tentang Perjanjian Pengalihan Saham milik Negara Republik Indonesia berupa Saham Seri B pada BUMN kepada Badan Pengaturan BUMN. Akta ini secara formal menandai peralihan hak dan kewajiban atas proporsi kepemilikan saham yang dimaksud, sekaligus menjadi basis legal dalam penyesuaian hak pengendalian negara melalui klasifikasi ulang saham Seri B menjadi Seri A Dwiwarna. Berikut rekapitulasi nilai pengalihan 1 persen saham dari PT DAM kepada BP BUMN per 5 Januari 2026, sebagaimana pada Lampiran LDCPL11.

2. Surat Kuasa Khusus Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah (Persero) Tbk sudah tidak menjadi kewenangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehingga SKK-43/MBU/06/2022 yang dikeluarkan pada 24 Januari 2022 sudah tidak berlaku. Sejalan dengan transformasi Bank Syariah yang dilakukan oleh PT DAM selaku Holding Operasional sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Pemegang Saham Seri A mengalihkan sejumlah tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada PT DAM sebagaimana tertuang pada SKK-7/BPU/01/2026 pada 27 Januari 2026.

3. Pembayaran Hasil Investasi Pemerintah (Bunga) Perum Perumnas

Pada bulan Januari 2026, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melakukan penyetoran ke Kas Negara atas Hasil Investasi Pemerintah Program PEN kepada Perumnas sebesar Rp21.937.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	Nilai
1	SUJP Seri A – Jatuh Tempo Nov 2025	6.000.000.000
2	SUJP Seri B – Jatuh Tempo Nov 2025	13.500.000.000
3	Cicilan SUJP Seri A – Standstill Jatuh Tempo Mei 2025	750.000.000
4	Cicilan SUJP Seri A – Standstill Jatuh Tempo Mei 2025	1.687.500.000
Jumlah		**21.937.500.000**

4. Pembayaran Dividen

a) Pembayaran Dividen Tahun Anggaran 2026 pada UAKPA BP BUMN

Sampai dengan bulan April 2026 terdapat 3 BUMN yang telah memberikan kontribusi PNBP dividen ke Kas Negara dengan total sebesar Rp126,73 miliar (data rincian sebagaimana tabel di bawah ini).

(dalam rupiah)

No.	BUMN	Total PNBP Dividen ke Negara
Tahun Anggaran 2026 (s.d. April 2026)		
Dividen Interim Tahun Buku 2025		
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	137
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	48.533.333.300
Dividen Tahun Buku 2025		
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	78.193.077.935
Jumlah		**126.726.411.372**

b) Setoran Dividen Perusahaan Negara Non-KND

Pada tahun 2025, terdapat setoran dividen yang berasal dari PT Karabha Digdaya (KD) sebesar Rp7.500.000.000,00 yang disetorkan menggunakan akun 422132 (Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non-Perbankan di bawah Kementerian Keuangan). Berdasarkan status badan hukum, PT KD bukan merupakan BUMN. Selain itu, investasi kepada PT KD tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Dengan demikian, investasi kepada PT KD tidak memenuhi definisi KND sesuai PMK No. 246/PMK.06/2016, yang menjelaskan bahwa KND adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN dan/atau sumber lainnya yang diinvestasikan secara jangka panjang dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan dikelola secara terpisah dari mekanisme APBN.

Oleh sebab itu, penggunaan akun penerimaan atas penyetoran dividen oleh Perusahaan Negara Non-KND akan ditinjau kembali untuk memastikan penggunaan akun penerimaan yang lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik entitas tersebut.

Berdasarkan dokumen Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (BA999.03) Tahun 2025 yang dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025 (Audited) Nomor NKF-903/999.03/PB.6/2026 tanggal 12 Mei 2026 menyepakati bahwa terkait penerimaan dividen yang berasal dari Perusahaan Negara yang dilaporkan dalam investasi jangka panjang non-permanen (PT Karabha Digdaya, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Aldevco), akan disetorkan dan dilaporkan dengan menggunakan akun Pendapatan atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain (425144) pada periode pelaporan selanjutnya.

D.3.4.7. Capaian *Output* BUN

Dalam rangka menyajikan capaian *output* BUN, Dirjen Perbendaharaan selaku UA-BUN melalui nota dinas nomor ND-12/PB/2026 tanggal 9 Januari 2025, mewajibkan agar setiap UAPBUN/UAKPBUN untuk menyampaikan capaian *output* dan mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Program Investasi Pemerintah mempunyai anggaran dalam DIPA sebesar Rp100.381.308.982.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 Audited telah terealisasi sebesar Rp86.251.942.665.028,00 atau 85,92 persen. Realisasi pada Program Investasi Pemerintah ini mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun 2024 yang dialokasikan sebesar Rp97.880.003.732.000,00 dengan realisasi sebesar Rp60.791.578.681.665,00. Program ini memiliki 5 kegiatan, sebagai berikut.

1. Kegiatan Pengelolaan Investasi Pemerintah

Kegiatan Pengelolaan Investasi Pemerintah mempunyai anggaran sebesar Rp52.776.043.000.000,00 dan sampai dengan Audited 2025 telah terealisasi sebesar Rp52.776.043.000.000,00 atau 100 persen. Untuk RO Rumah yang dibiayai capaian output sebanyak 278.868 unit rumah atau 93 persen dari target sebesar 300.000 unit rumah. Tahun 2024 diperiode yang sama capaian output sebanyak 200.000 unit rumah. Untuk RO Investasi Pemerintah Non Permanen kepada Perum Bulog capaian output 100 persen dari target, sementara tahun 2024 tidak terdapat alokasi. Untuk RO Investasi Pemerintah Non Permanen kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) capaian *output* satu layanan atau 100 persen dari target, sementara tahun 2024 tidak terdapat alokasi.

Adapun penjelasan setiap Rincian *Output* (RO) adalah sebagai berikut.

a. Rincian *Output* (RO) Rumah yang Dibiayai (Direktorat SMI, DJPb - 961671)

Penyaluran investasi Dana FLPP didasarkan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan BP Tapera Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Sebelumnya saldo Dana FLPP per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.596.006.813.852,00 dikelola oleh BLU PPDPP dan dicatat sebagai Investasi angka Panjang Non Permanen Lainnya Dana Bergulir. Pengalihan pengelolaan tersebut berdasarkan amanat UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 Pasal 34; PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64, PMK Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah; serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021 hal Penunjukan BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Nilai pembukaan saldo awal atas pengalihan dana FLPP sebesar Rp60.675.114.000.000,00 berdasarkan hasil reviu BPKP. Nilai pembukaan saldo tersebut didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021 dan nomor BAST07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bergulir FLPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah FLPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada Tahun 2025 telah disalurkan dana FLPP sebesar Rp29.200.000.000.000,00 atau 100 persen dari total yang dianggarkan dalam DIPA. Alokasi tersebut direalisasikan melalui mekanisme Rekening Investasi Bendahara Umum Negara kepada Operator Investasi Pemerintah yaitu BP Tapera. Adapun output atas alokasi tersebut adalah untuk membiayai 300.000 unit rumah. Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi *output* yang telah dicapai adalah sebanyak 278.868 unit rumah atau 93 persen dari target yang telah ditetapkan.
Selain itu terdapat penyetoran imbal hasil dari dana FLPP pada Rekening Investasi BUN sebesar Rp777.202.873.734,00. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara, saldo pendapatan tersebut berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi Nomor ND-3/PB.4/2022 tentang Laporan Pemindahan Dana Dari Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) telah dipindahbukukan seluruhnya dari RIBUN ke RKUN dilaksanakan dalam rangka realisasi PNBP dari imbal hasil Investasi Pemerintah dan selanjutnya dari RKUN ke RIBUN Imbal Hasil.

b. Rincian *Output* (RO) Investasi Pemerintah Non Permanen kepada Perum Bulog (Direktorat SMI, DJPb - 961671)

Pada tahun 2025 Pemerintah melakukan investasi non-permanen kepada Perum Bulog sebesar Rp22.076.043.000.000,00 yang digunakan untuk pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar Rp16.576.043.000.000,00 dan pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebesar Rp5.500.000.000.000,00. Nilai tersebut disalurkan melalui mekanisme Rekening Investasi Bendahara Umum Negara kepada Perum Bulog selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP).
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.05/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Penunjukaan Perusahaan Umum BULOG sebagai Operator Investasi Pemerintah, Perum BULOG ditunjuk menjadi OIP dalam rangka penugasan Perum BULOG dalam Penyelenggaraan CPP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan pelaksanaan mandat Perum BULOG sesuai penugasan pemerintah.

c. Rincian *Output* (RO) Investasi Pemerintah Non Permanen kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Pada tahun 2025 Pemerintah melakukan investasi non-permanen kepada PT SMI (Persero) sebesar Rp1.500.000.000.000 yang digunakan untuk *repayment* PEN. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat pencairan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Kabupaten Badung yang terlebih dahulu menggunakan dana PT SMI untuk selanjutnya pada Januari 2026 dilakukan mekanisme reimbursement melalui Dana Operasional Investasi Pemerintah dengan total sebesar Rp257.602.899.546,00.

Rincian pencairan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp257.602.899.546,00 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Debitur	Tanggal Pencairan	Realisasi Pencairan
1.	Pemkab Lampung Tengah Tahap 1	31 Oktober 2025	21.908.492.600
2.	Pemkab Lampung Tengah Tahap 2	24 Desember 2025	30.487.878.500
3.	Pemkab Bandung Tahap 1	24 Desember 2025	205.206.528.446
Jumlah			**257.602.899.546**

Dana Investasi Pemerintah yang ditempatkan pada PT SMI melalui mekanisme penugasan sebagai OIP berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-576/MK.06/2025 tanggal 29 Agustus 2025 hal Penunjukan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sebagai Operator Investasi Pemerintah.

2. Kegiatan Pengelolaan PMN kepada BUMN

Kegiatan Pengelolaan PMN kepada BUMN mempunyai anggaran sebesar Rp11.457.022.705.000,00 dan sampai dengan *Audited* 2025 telah terealisasi sebesar Rp11.457.022.705.000,00 atau 100 persen dari anggaran. RO untuk kegiatan tersebut adalah Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Serapan Anggaran PMN kepada BPI Danantara, seluruhnya telah terealisasi 100% dari target. Sementara pada tahun 2024 RO dari kegiatan tersebut adalah Serapan Anggaran PMN kepada PT Hutama Karya (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Len Industri (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero), dan Serapan Anggaran PMN kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Adapun penjelasan setiap Rincian *Output* (RO) pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Rincian *Output* (RO) Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Direktorat KND – 977191)

Pada tahun 2025, terdapat alokasi pembiayaan investasi pada UAKPA KND DJKN sebesar Rp6.684.022.705.000,00 yang merupakan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF (Persero). Alokasi tersebut telah dicairkan seluruhnya kepada PT SMF (Persero) sesuai PP No. 54 Tahun 2025 yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah berupa penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan guna menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

b. Rincian *Output* (RO) Serapan Anggaran PMN PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI (Persero) (BP BUMN – 986917)

PMN yang diteruskan oleh BPI Danantara kepada PT KAI (Persero) adalah sebesar (Rp1.800.000.000.000,00) yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah berupa penyediaan sarana perkeretaapian berupa kereta rel listrik untuk meningkatkan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat, sesuai Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2025.

c. Rincian *Output* (RO) Serapan Anggaran PMN PT Industri Kereta Api (Persero)/PT INKA (Persero) (BP BUMN – 986917)

PMN yang diteruskan oleh BPI Danantara kepada PT INKA (Persero) adalah sebesar (Rp473.000.000.000,00) yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah berupa peningkatan kapasitas produksi guna penyediaan sarana perkeretaapian termasuk kereta rel listrik dalam rangka mendukung penyediaan sarana perkerataapian dan revitalisasi industri perkeretaapian dalam negeri, sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2025.

d. Rincian *Output* (RO) Serapan Anggaran PMN PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PT PELNI (Persero) (BP BUMN – 986917)

PMN yang diteruskan oleh BPI Danantara kepada PT PELNI (Persero) adalah sebesar (Rp2.500.000.000.000,00) yang ditujukan untuk melaksanakan penugasan pemerintah berupa penyediaan kapal penumpang dalam rangka mendukung konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah serta memperkuat armada nasional melalui peremajaan kapal dan penyediaan angkutan laut penumpang kelas ekonomi, sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2025.

3. Kegiatan Pengelolaan Investasi kepada OI/LKI/BUI

Kegiatan Pengelolaan Investasi kepada OI/LKI/BUI mempunyai anggaran sebesar 1.768.200.000,00 dan sampai dengan *Audited* 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.894.957.731.398,00 atau 107 persen dari

target dengan *output* 3 Organisasi/LKI/BUI. Tahun 2024 diperiode yang sama capaian *output* 3 organisasi/LK/BUI.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UAKPA KMKB DJSPSK yang pada tahun 2025 mendapatkan alokasi sebesar Rp1.902.337.169.000,00 pada DIPA dengan *output* berupa Jumlah Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional yang mendapat penambahan investasi sebanyak enam LKI. Sampai dengan 31 Desember 2025, telah dilakukan realisasi sebesar Rp1.894.957.731.398,00 atau 99,61 persen dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA UAKPA KMKB DJSPSK. Nilai tersebut dibayarkan kepada 3 (tiga) LKI dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	DIPA TA 2025	Realisasi 2025
KPA Satker PKPPIM BKF	**1.902.337.169.000**	**1.894.957.731.398**
Investasi Kepada Islamic Development Bank (IsDB)	1.649.665.669.000	1.642.045.731.398
Investasi Kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)	48.831.000.000	49.068.000.000
Investasi Kepada International Development Association (IDA)	203.840.500.000	203.844.000.000

4. Kegiatan Pembiayaan Investasi untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional

Kegiatan Pembiayaan Investasi untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional mempunyai anggaran sebesar Rp7.546.980.793.000,00 dan sampai dengan *Audited* 2025 telah terealisasi sebesar Rp7.546.980.793.000,00 atau 100 persen dari target. Realisasi Ro Adalah sebesar 15.451.398 m2 atau 66 persen dari target. Sementara RO tahun 2024 adalah sebesar 35.897.234 m2.

Sesuai mandat yang diberikan dalam Perpres Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN, LMAN melakukan pendanaan atas Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menggantikan Perpres 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta diterbitkan pula tata cara pendanaan lahan PSN pada PMK Nomor 139/PMK.06/2020. Berkaitan dengan konteks pelaporan keuangan atas aktivitas pendanaan pengadaan tanah PSN, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan kebijakan akuntansi melalui surat Nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020.

Pada Tahun Anggaran 2025, LMAN memperoleh alokasi pembiayaan investasi dari APBN sebesar Rp7.546.980.793.000,00 yang bersumber dari saldo kas BLU sesuai KMK No. 359 Tahun 2025. Sampai dengan 31 Desember 2025, alokasi tersebut telah direalisasikan seluruhnya kepada BLU LMAN. Berdasarkan dokumen DIPA Nomor SP DIPA- 999.03.1.984125/2025, rincian output berupa tanah PSN yang dibiayai adalah sebanyak 23.373.800 m2.

Adapun besaran nilai pendanaan pada 31 Desember 2025 yang disahkan dengan perincian per jenis proyek adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis PSN	Kementerian	Luas Tanah (m^2)	Nominal
Proyek Air Baku	PUPR	155.263	63.958.751.028
Proyek Bendungan	PUPR	4.170.928	561.523.622.793
Proyek Irigasi	PUPR	133.572	5.344.399.110
Proyek Ibu Kota Nusantara	PUPR	1.914.699	890.410.215.140
Proyek Jalan Tol	PUPR	8.606.930	7.637.586.581.875

Jenis PSN	Kementerian	Luas Tanah (m²)	Nominal
Proyek Ibu Kota Nusantara	OIKN	322.149	116.194.248.528
Proyek Perkeretaapian	Perhubungan	147.857	187.209.670.397
Jumlah		**15.451.398**	**9.462.227.428.871**

5. Kegiatan Pengelolaan Dana Pembangunan Pendidikan Nasional

Kegiatan Pengelolaan Dana Pembangunan Pendidikan Nasional mempunyai anggaran sebesar Rp26.698.925.315.000,00 dan sampai dengan *Audited* 2025 telah terealisasi sebesar Rp26.698.925.315.000,00 atau 100 persen dari target. Nilai tersebut untuk RO berupa Penyaluran Dana Abadi Penelitian, Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan, Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Sementara RO tahun 2024 hanya untuk Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dan telah terealisasi 100 persen.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah satuan kerja yang berdiri tanggal 28 Desember 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ditetapkan sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Sesuai peraturan menteri keuangan tersebut, LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025 Pemerintah melakukan investasi non-permanen sebesar Rp26.698.925.315.000,00 yang alokasikan kepada BLU LPDP. Sampai dengan 31 Desember 2025, akumulasi DPPN adalah sebesar Rp180.806.625.315.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	Pencairan TA 2025	31 Desember 2025
DAP	126.117.700.000.000	23.698.925.315.000	149.816.625.315.000
DAPL	12.990.000.000.000	1.000.000.000.000	13.990.000.000.000
DAPT	10.000.000.000.000	1.000.000.000.000	11.000.000.000.000
DAKB	5.000.000.000.000	1.000.000.000.000	6.000.000.000.000
Jumlah	**154.107.700.000.000**	**26.698.925.315.000**	**180.806.625.315.000**

D.3.5. BA 999.04

D.3.5.1. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM

Landasan hukum mekanisme penyelesaian piutang negara pada PDAM diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI, dan RPD pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu.

Skema penyelesaian piutang Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali seluruh kewajiban Pokok dan/atau;
b. Penghapusan seluruh kewajiban Non Pokok.

Pemerintah masih memiliki hak tagih atas dua debitur penerusan pinjaman, yaitu PDAM Kabupaten Sorong dan PDAM Kabupaten Biak, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pengurusan piutang negara atas kedua PDAM tersebut telah diserahkan kepada PUPN sejak tanggal 22 Oktober 2013.

Sampai dengan 31 Desember 2025, PDAM Kabupaten Sorong c.q. Pemerintah Kota Sorong telah melakukan pembayaran angsuran utang sebesar Rp3.175.195.849,25, dengan sisa kewajiban sebesar Rp27.852.755.643,88. Sementara itu, PDAM Kabupaten Biak telah melakukan pembayaran angsuran utang sebesar Rp241.818.182,00, dengan sisa kewajiban sebesar Rp18.620.070.615,63.

Pemerintah Kota Sorong dan PDAM Kabupaten Biak telah menyatakan komitmennya untuk melunasi kewajiban pokok utang dimaksud serta berencana mengajukan permohonan restrukturisasi setelah seluruh utang pokok tersebut diselesaikan.

D.3.5.2. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang Negara pada Pemda adalah:

a. Tunggakan pinjaman Pemda tidak selesai selama bertahun-tahun.

b. Pemda tidak dapat melakukan investasi infrastruktur melalui skema pinjaman karena masih terdapat tunggakan pinjaman kepada pemerintah.

c. Membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

d. Membuka kesempatan Pemda dalam melakukan investasi.

Landasan hukum mekanisme penyelesaian piutang negara pada Pemda diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017.

b. PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2019.

Skema penyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam PMK No.104/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah, secara umum dilaksanakan dengan:

a. Penjadwalan kembali;

b. Perubahan persyaratan dan/atau;

c. Penghapusan tunggakan non pokok melalui skema *debt swap* untuk penyediaan sarana dan prasarana pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Sampai dengan tahun 2025, terdapat lima pemda dalam proses penyelesaian piutang negara dengan rincian sebagai berikut:

Skema Restrukturisasi	Nama Pemda	Progres Penyelesaian
Penjadwalan Tunggakan Pokok dan Penghapusan Tunggakan Non Pokok Melalui *debt swap*	1. Pemkot Palembang 2. Pemkab Lampung Utara 3. Pemkab Lampung Tengah	▪ Proses administrasi penghapusan secara mutlak kewenangan Presiden
	4. Pemkot Makassar	▪ Proses administrasi penyelesaian pinjaman TSL
	5. Pemprov Maluku	▪ Pelaksanaan verifikasi *debt swap* tahap II bersama BPKP

Sedangkan satu pemda dalam proses cicilan melalui potongan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Pemkab Aceh Timur.

Sampai dengan periode 31 Desember 2025 terdapat penutupan perjanjian pada debitur Pemda berikut:

No.	Debitur	Nomor Perjanjian	Surat Penutupan	Tanggal
1	Pemkot Cimahi	SLA-1208/DP3/2007	S-63/MK/PB/2025	23 Oktober 2025
2	Pemkot Pare-Pare	SLA-1205/DP3/2006	S-88/MK/PB/2025	23 Desember 2025
3	Pemkab Parigi Moutong	SLA-1203/DP3/2006	S-89/MK/PB/2025	23 Desember 2025

D.3.5.3. Usaha-Usaha Penyelesaian Tunggakan Kredit Program Non Subsidi

D.3.5.3.1. Proyek Perkebunan

Proyek Perkebunan terdiri dari Proyek PIR dan Proyek UPP Perkebunan. Proyek PIR dimulai tahun 1976 (Repelita II) dan sampai tahun 1992 telah ada di 68 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan UPP Perkebunan terdiri dari 4 Proyek, yaitu P3RSU, P3RSB, PRPTE, dan TCSDP yang juga tersebar di 30 provinsi.

Pada tahun 2010 telah dilakukan rekonsiliasi sisa utang Proyek PIR/UPP Perkebunan yang melibatkan pihak perbankan sebagai bank penatausaha, Ditjen Perkebunan sebagai penanggung jawab program, PT Perkebunan Nusantara sebagai perusahaan inti untuk PIR, dan Dinas Perkebunan sebagai pihak yang menerima pelimpahan tugas/pengelolaan UPP Perkebunan setelah UPP Perkebunan ditutup oleh Menteri Pertanian.

Kemudian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penyebab tunggakan perlu diketahui kondisi dan permasalahan petani/kebun. Untuk itu, telah dilakukan uji petik di 15 lokasi Proyek PIR/UPP Perkebunan yang melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perkebunan, perbankan, dan Dinas Perkebunan Provinsi. Uji petik ini dilakukan dengan melihat kondisi kebun, mewawancarai petani/kelompok tani serta memberikan kuesioner. Petani yang menjadi responden adalah 212 orang untuk PIR dan 104 orang untuk UPP Perkebunan. Berdasarkan uji petik diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

a. Sebagian petani sudah tidak memelihara kebunnya sesuai dengan aturan, dikarenakan kurangnya biaya untuk pemeliharaan.

b. Kondisi kebun sebagian rusak berat karena kurangnya pemeliharaan.

c. Hanya sedikit petani yang membayar cicilan kredit.

d. Sudah tidak ada petugas penyuluh lapangan di lokasi proyek yang memungut angsuran petani karena ditarik ke instansi lain setelah otonomi daerah.

Kemudian pada November 2010 telah dilakukan inventarisasi di lima lokasi Proyek PIR Perkebunan lingkup PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I/Aceh dengan melibatkan BPKP. Tim telah bertemu dan melakukan wawancara serta memberikan kuesioner kepada kelompok petani/pekebun dan pihak perbankan. Adapun kesimpulan dari inventarisasi di lima lokasi Proyek PIR Perkebunan lingkup PTPN I adalah:

a. lahan perkebunan sebagian besar sudah ditinggalkan oleh petani peserta akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif ditambah dengan kondisi tanaman yang sudah rusak berat, tidak terpelihara dan sudah menjadi hutan kembali.

b. kondisi bangunan kantor, gudang, dan fasilitas lainnya rusak berat, bahkan terdapat bangunan yang hanya tersisa puing-puingnya karena dibakar.

c. peralatan pertanian, peralatan berat dan peralatan angkutan sudah tidak ada (dibakar, hilang atau diambil Gerakan Aceh Merdeka (GAM)).

d. pada saat inventarisasi sudah tidak ada petugas kebun/dialihkan ke kebun lain.

Upaya penyelesaian piutang negara pada Proyek PIR/UPP Perkebunan tersebut dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.05/2015.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut kemudian didukung dengan pedoman teknis pelaksanaan penyelesaian piutang negara yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan. Diharapkan dengan diterbitkannya dua Peraturan Menteri tersebut pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada Proyek PIR/UPP Perkebunan lebih optimal.

Tahun 2019 Direktorat SMI menginisiasi untuk pengembangan aplikasi penatausahaan data hutang petani yang dinamai aplikasi Penyelesaian Hutang Petani (PHP), diharapkan pengembangan aplikasi tersebut dapat memudahkan proses penyelesaian hutang petani PIR UPP Perkebunan.

Di tahun 2021 telah diterbitkan KMK Mutlak untuk 330 petani eks proyek Durian Luncuk dan di tahun 2024 Direktorat SMI bekerjasama dengan BPKP dalam penyusunan Pedoman Audit Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek PIR UPP Perkebunan guna memudahkan BPKP daerah dalam melakukan audit terhadap proyek PIR UPP tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman:

a. Nilai *outstanding* piutang pokok transaksi Aset Lainnya Kredit Program disajikan sebagai Aset Lainnya Kredit Program pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca;

b. Transaksi pengesahan atau pelunasan dan/atau cicilan secara kas atas piutang pokok transaksi Aset Lainnya Kredit Program disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos Pembiayaan, dan mengurangi nilai *outstanding* Aset Lainnya Kredit Program pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca;

c. Dalam hal setoran tidak teridentifiksi Surat Pengakuan Hutangnya (SPH), disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya di LRA dan sebagai pendapatan PNBP Lainnya pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO;

Mulai tahun 2023, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar yang telah dimutakhirkan dengan KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar dilakukan koreksi untuk pengklasifikasian Penerimaan PIR UPP Non SPH sebagai Penerimaan PNBP Lainnya dengan akun 425981 (Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman).

Pada tahun 2024, telah dilakukan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai upaya penyelesaian piutang negara yang memiliki status macet yang kemudian ditetapkan dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang

Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana jenis piutang yang dapat diselesaikan dengan skema penghapusan antara lain adalah piutang macet petani eks PIR dan UPP Perkebunan. Hingga batas waktu yang telah ditetapkan di tahun 2025, data dan dokumen yang diperlukan dalam proses penghapusan belum diterima secara lengkap, sehingga belum memenuhi persyaratan untuk penetapan penghapusan baik secara bersyarat maupun secara mutlak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2024.

Pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025, terdapat setoran petani untuk program PIR SPH sebesar Rp5.147.272.536,00 dan PIR Non SPH sebesar Rp154.594.893,25 serta UPP SPH sebesar Rp683.879.258,00 dan UPP Non SPH sebesar Rp52.681.118,00.

D.3.5.3.2. Proyek Peternakan

Proyek Peternakan terdiri dari Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dan Redistribusi ternak yang dimulai sejak tahun 1990 yang berlokasi di Bali dan Nusa Tenggara Barat (Dompu), sedangkan Proyek Redistribusi Ternak dimulai sejak tahun 1978 dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui gambaran tentang kondisi terkini, pada tahun 2010 telah dilakukan uji petik di Dompu, NTB oleh Ditjen Peternakan dengan hasil sebagai berikut:

a. Ternak sapi sudah tidak diketahui keberadaannya.

b. Kondisi bangun kantor dan fasilitas lainnya sudah rusak dan tidak terurus.

c. Peternak/kelompok ternak sudah tidak diketahui keberadaannya.

Pada Tahun 2022 Itjen Kementerian Keuangan melakukan inventarisasi terhadap kredit program lama yang macet termasuk Proyek Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dan Redistribusi ternak, namun belum ada kelanjutannya.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi tiga pihak (tripartit) dalam rangka penyusunan asersi final atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman Tahun 2024, diusulkan adanya koreksi pencatatan pada laporan keuangan *Audited*. Perubahan dimaksud berkaitan dengan setoran bunga atas Kredit Program P3Bali yang semula dicatat sebagai Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri kepada Non Pemerintah (715114). Berdasarkan hasil pembahasan bersama tim BPK, disepakati bahwa pencatatan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik transaksi, sehingga untuk tahun anggaran berjalan dilakukan koreksi pencatatan ke akun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya, yaitu Pendapatan Bunga Kredit Program (425716) sebesar Rp1.518.617,00. Koreksi tersebut berdampak terhadap penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana komponen pendapatan PNBP mengalami peningkatan, sementara komponen penerimaan pembiayaan mengalami penurunan dengan nilai yang sama. Penyesuaian ini dilakukan untuk mencerminkan klasifikasi pendapatan yang lebih akurat dan sesuai dengan substansi ekonomi transaksi. Selain itu, untuk transaksi tahun anggaran yang lalu (TAYL), diketahui bahwa selama ini pendapatan bunga kredit program dicatat sebagai pengurang akun Aset Lainnya – Kredit Program yang berdampak pada salah saji nilai piutang di neraca. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan koreksi atas piutang beserta penyisihan piutangnya pada neraca dengan memindahkan saldo sebesar Rp11.139.637,00 dari akun Aset Lainnya – Kredit Program ke akun Piutang Bunga Pemberian Pinjaman. Koreksi ini bertujuan untuk mencerminkan posisi keuangan yang lebih wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.

Pada tahun 2024, telah dilakukan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai upaya penyelesaian piutang negara yang memiliki status macet yang kemudian ditetapkan dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana salah satu jenis piutang

yang dapat diselesaikan dengan skema penghapusan adalah piutang macet Program Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali).

Hingga akhir periode pengumpulan data dan dokumen, Kementerian Pertanian c.q. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bank Penyalur belum mampu melengkapi persyaratan data dan dokumen sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 sehingga proses penyelesaian piutang tidak dapat dilaksanakan. Kendala utama yang dialami adalah ketidakcocokan data antara dokumen akad/perjanjian utang dengan data debitur yang tersedia. Selain itu, belum ada dokumen yang dapat membuktikan bahwa piutang negara macet tersebut pernah dilakukan upaya penagihan. Untuk piutang negara macet program Redistribusi Ternak, sampai dengan semester I 2025 masih belum terdapat progres lebih lanjut karena data dan dokumen terkait belum tersedia. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat setoran pokok proyek P3 Bali sebesar Rp2.511.750,00 dan bunga sebesar Rp1.197.761,00.

D.3.5.3.3. Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi (P2A)

P2A adalah proyek yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah lulusan kursus akuntansi yang dapat bekerja, meningkatkan jumlah lembaga kursus akuntansi yang dapat memperoleh akreditasi, serta memantapkan sistem dan mekanisme pengujian dan sertifikasi akuntansi. Pada tanggal 29 September 2010, dilakukan rapat persiapan dan koordinasi dalam rangka rekonsiliasi dan pengumpulan data piutang Pemerintah pada Proyek P2A dengan melibatkan Direktorat SMI dan Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kemendiknas yang merupakan reorganisasi dari Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. Peserta rapat sepakat perlunya dibentuk Tim Kerja Penyelesaian Proyek P2A yang melibatkan Direktorat SMI dan Ditjen PNFI.

Menindaklanjuti kesepakatan rapat dimaksud, Dirjen PNFI dan Direktur SMI menunjuk petugas untuk duduk dalam Tim Tindak Lanjut Penyelesaian Proyek P2A yang tugasnya melakukan visitasi dan penelusuran data dalam rangka tindak lanjut P2A. Namun demikian, setelah Ditjen PNFI menyampaikan surat kepada Itjen Kemendiknas perihal Permintaan Data Proyek P2A, pihak Itjen Kemendiknas memberikan jawaban bahwa tidak terdapat data pemeriksaan terhadap Proyek P2A dimaksud di Kemendiknas.

Ditjen PNFI juga telah melakukan rapat koordinasi intern Ditjen PNFI tentang pengumpulan data-data P2A dengan melibatkan pensiunan-pensiunan pegawai Kemendiknas yang pernah terlibat dalam proyek P2A, namun Ditjen PNFI mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran dan pengumpulan data proyek P2A dimaksud. Selanjutnya, Ditjen PNFI melalui Setditjen PNFI menyampaikan surat permintaan data-data lembaga yang pernah menerima bantuan dalan Proyek P2A kepada 33 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi di Indonesia, namun baru dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang telah memberikan jawaban atas surat Ditjen PNFI dimaksud.

Ditjen PNFI juga telah menyampaikan surat kepada Pimpinan LP3I dan LPK Wijaya Kusuma (Jakarta) serta LPK Jurnal (Garut) perihal permintaan informasi proyek P2A mengingat ketiga lembaga termasuk yang pernah menerima dana bantuan Proyek P2A, namun baru Pimpinan LPK Jurnal yang telah menyampaikan jawaban bahwa kewajibannya telah diselesaikan namun tidak dapat memberikan bukti pembayaran mengingat telah lebih dari 15 tahun.

Pada tanggal 21 s.d. 23 Desember 2010, Tim Direktorat SMI melaksanakan tugas monitoring ke Kabupaten Malang dalam rangka penelusuran data Proyek P2A. Monitoring dilakukan dengan melakukan visitasi dan penelusuran data ke Bank BRI Cabang Malang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang serta melakukan visitasi dan penelusuran ke LKP Ganesha yang pernah mendapatkan bantuan dalam Proyek P2A. Mengingat belum adanya surat tanggapan atas surat permintaan data yang telah disampaikan oleh Ditjen PNFI kepada Pimpinan LP3I dan LPK Wijaya Kusuma (Jakarta), perwakilan dari Ditjen PNFI telah melakukan penelusuran

Proyek P2A secara langsung kepada kedua lembaga dimaksud, namun diperoleh informasi bahwa kedua lembaga dimaksud belum memperoleh data yang diminta dan dalam waktu dekat akan memberikan jawaban secara resmi atas surat permintaan data yang telah disampaikan oleh Ditjen PNFI.

Hingga saat ini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) sebagai reorganisasi dari Ditjen PNFI, serta Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) masih mencoba melakukan penelusuran atas data-data proyek P2A dengan berkoordinasi dengan Direktorat SMI.

Pada tahun 2022 Itjen Kementerian Keuangan melakukan inventarisasi terhadap kredit program lama yang macet termasuk proyek P2A, namun belum ada kelanjutannya. Sebagai kelanjutan dari upaya penelusuran dan penyelesaian atas Proyek P2A, pada tahun 2025 KPPN Khusus Investasi melakukan kegiatan rekonsiliasi (rekon) atas kredit macet Proyek P2A berdasarkan surat undangan nomor UND-32/KPN.1210/2025, dengan berkoordinasi bersama Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI). Rekon tersebut dilakukan dalam satu rangkaiann kegiatan rekonsiliasi seluruh kredit program lama, seperti PIR UPP, P2A, P3 Bali, Redis Ternak, dan Kredit Lahan Pertanian (KLP), dengan mengundang instansi-instansi terkait.

Namun demikian, khusus untuk Proyek P2A, pihak Kemendikbudristek, dalam hal ini Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menjadi entitas yang paling relevan dengan pelaksanaan proyek, tidak memberikan tanggapan maupun hadir dalam kegiatan rekonsiliasi tersebut, sehingga proses klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut terhadap data Proyek P2A masih menemui hambatan.

D.3.5.3.4. Kredit Listrik Pedesaan (KLP)

KLP adalah program Pemerintah dalam bentuk penyediaan dana untuk kredit biaya penyambungan dan pemasangan instalasi listrik di rumah konsumen, termasuk biaya asuransi melalui PT Askrindo. Berdasarkan temuan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 terkait dengan hak tagih Pemerintah atas KLP yang masih diragukan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realized Value),* maka perlu dilakukan langkah awal penyelesaian piutang Negara pada proyek KLP dengan melakukan rekonsiliasi dan pengumpulan data.

Pada 31 Desember 2010, telah dilakukan rapat antara Direktorat SMI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Bank BRI sebagai persiapan dan koordinasi dalam rangka rekonsiliasi dan pengumpulan data KLP serta menetapkan *time line* terkait penyelesaian permasalahan KLP dimaksud.

PLN dan Bank BRI mengundang Direktorat SMI guna melakukan verifikasi lapangan dan *sampling* data KLP di PLN Disjaya dan Tangerang (APJ Cisoka) serta Bank BRI Cabang Tangerang. Namun, Bank BRI dan PLN Tangerang mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran atas data-data dimaksud mengingat KLP di wilayah Tangerang dilaksanakan pada tahun 1986-1987 dan pencatatan saat itu dilakukan secara manual. Selanjutnya, telah disepakati bahwa akan dibentuk Tim Koordinasi KLP wilayah Tangerang untuk melakukan penelusuran ke langsung ke lapangan (pelanggan-pelanggan KLP) serta perlu dilakukan penelusuran data hingga ke Kantor Unit Bank BRI. Menindaklanjuti kesepakatan dimaksud, PLN APJ Cisoka telah melakukan uji petik ke pelanggan KLP di Desa Saga dan Keronjo, namun sebagian sudah tidak lagi menjadi pelanggan/sudah dibongkar. Di samping itu, Bank BRI Cabang Tangerang juga telah meminta data KLP kepada seluruh Kantor Unit Bank BRI di Cabang Tangerang, namun data dimaksud tidak dapat ditemukan. Hingga saat ini, Bank BRI dan PLN masih mencoba melakukan penelusuran atas data-data KLP.

Pada tahun 2022 dilakukan penelusuran dan pendalaman informasi KLP yang dilakukan Direktorat SMI bersama dengan Itjen Kementerian Keuangan. Pendalaman informasi terkait KLP oleh Itjen ini diharapkan dapat membantu penyelesaian piutang KLP. Inspektur III menyampaikan rekomendasi Itjen atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas piutang pemberian pinjaman (BA BUN 999.04) pada Koperasi dan KLP

melalui nota dinas nomor ND-572/IJ.4/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang memberikan rekomendasi yaitu berkoordinasi dengan Kantor Ditjen DJPb setempat untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait status dan jumlah piutang atas 3 (tiga) koperasi dan KLP yang masih aktif, yaitu Puskud Sumut, KUD Jateng, dan KLP Singkut, serta 2 (dua) KLP yang sudah tidak aktif, yaitu KLP Sinar Rinjani dan KLP Sinar Siwo Mego, untuk dapat menindaklanjuti penyelesaian piutang yang bersangkutan.

Sejak bulan Oktober 2024, telah dilakukan upaya penyelesaian piutang macet Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani dan KLP Singkut dengan skema penghapusan melalui PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun dalam implementasinya, progres penyelesaian piutang negara macet pada KLP Sinar Rinjani dan KLP Singkut masih belum sesuai yang diharapkan.

Pada tahun 2025, progres implementasi telah dilaporkan kepada Presiden RI melalui Surat Menteri Keuangan kepada Presiden RI Nomor: S-454/MK.06/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Pelaksanaan Penghapusan Piutang Negara Macet sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 dengan kesimpulan isi surat sebagai berikut:

Cakupan piutang kredit program yang dapat diusulkan penghapusannya terdiri dari:

a. piutang kepada petani eks proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan dan Unit Pelaksana Proyek (UPP) Perkebunan, serta peternak peserta Program Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dengan potensi nilai piutang yang dapat diusulkan penghapusannya sebesar Rp12.899.482.461,72 pada 2.247 debitur; dan

b. piutang pada Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) dhi. KLP Sinar Rinjani di NTB dan KLP Singkut I di Jambi dengan potensi nilai piutang yang dapat diusulkan penghapusannya sebesar Rp3.030.425.020,00.

Hingga batas waktu yang telah ditetapkan, data dan dokumen yang diperlukan dalam proses penghapusan belum dapat disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara lengkap, sehingga belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur untuk penetapan penghapusan baik secara bersyarat maupun secara mutlak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2024.

Sebagai upaya lebih lanjut setelah masa berakhirnya PP Nomor 47 Tahun 2024, Kementerian Keuangan tetap melaksanakan upaya penyelesaian piutang negara macet sebagaimana tersebut di atas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan tata kelola keuangan negara yang berlaku. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan rapat dengan BPKP pada bulan Mei 2025 membahas tentang permohonan Audit Tujuan Tertentu kepada Koperasi terkait upaya penyelesaian kredit program macet.

D.3.5.4. Usaha-usaha Penyelesaian Tunggakan Pemberian Pinjaman

D.3.5.4.1. Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)/Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Status beberapa bank swasta nasional menjadi BBO/BBKU/BDL, diantaranya merupakan bank penerima pinjaman *Two Step Loan* (TSL) dari BI dan BTN. BBO/BBKU/BDL meliputi PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), PT Bank Umum Nasional (BUN), PT Bank Asia Pasifik (ASPAC), PT Bank Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO), PT Bank Dagang Bali, PT UNIBANK, PT Bank Andromeda, PT Bank Central Dagang, PT Bank Papan Sejahtera, PT Bank Putra Surya Perkasa, dan BPD Timor Timur.

Langkah awal penyelesaian BBO/BBKU/BDL pada BI setelah pembekuan status tersebut, pihak Kementerian Keuangan, BI, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Tim Administrasi BBO/BBKU/BDL telah

melakukan beberapa kali rekonsiliasi perhitungan posisi pinjaman TSL eks BBO/BBKU/BDL guna mengetahui perkembangan tingkat pengembalian atas pinjaman TSL dari BBO/BBKU/BDL. Berdasarkan Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-36/BPPN/0204 tanggal 17 Februari 2004 tentang Penyelesaian Aset dan Kewajiban BBO/BBKU/BDL, disebutkan bahwa penyelesaian kewajiban Bank Beku akan dilakukan dengan cara memperhitungkan hasil penyelesaian aset Bank Beku dengan kewajiban Bank Beku. Terkait dengan penyelesaian beberapa permasalahan di bidang keuangan termasuk di dalamnya permasalahan BBO/BBKU/BDL yang menyalurkan kredit TSL, dibentuk Tim Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Kementerian Keuangan dan BI melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 209/KMK.06/2005 dan Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005. Dalam pertemuan tanggal 28 Maret 2005, Tim Penyelesaian BPPN mengemukakan bahwa berdasarkan hasil likuidasi kelima bank BBO/BBKU/BDL, aset yang tersisa hanya cukup untuk mengurangi kewajiban utang pajak bank beku, utang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah dialihkan hak dan penagihannya kepada BPPN, serta utang program penjaminan Pemerintah. Sedangkan utang kepada pihak lainnya tidak mampu ditutupi.

Pasal 3 Ayat 3.03 dari sebagian besar Perjanjian Pemberian Pinjaman (SLA) kepada BI yang terkait dengan Pemberian pinjaman kepada bank BBO/BBKU/BDL di atas, menyebutkan bahwa "BI harus memastikan bahwa setiap bank swasta memenuhi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pemberian Pinjaman dan Akad Pemberian Pinjaman, dan BI wajib mengikuti serta memantau perkembangan masing-masing Bank Swasta dalam melaksanakan Pinjaman Pemberian, mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah, keadaan atau hal-hal mana meliputi peristiwa yang disebutkan dalam Pasal V Perjanjian Pinjaman". Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun saat ini proses likuidasi bank BBO/BBKU/BDL telah selesai (bank BBO/BBKU/BDL sudah tidak beroperasi lagi dan tidak ada lagi proses BPPN terhadap BBO/BBKU/BDL), kiranya BI masih tetap memiliki kewajiban kepada Pemerintah untuk mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3.03) dari SLA kepada BI terkait dengan penyaluran TSL.

BBO/BBKU/BDL/BDL tidak dapat mengikuti proses restrukturisasi dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 211/PMK.05/2021 sehubungan dengan tidak adanya institusi yang akan memenuhi dokumen dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti restrukturisasi. Dalam rangka penyelesaian pinjaman TSL eks BBO/BBKU/BDL telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Permintaan konfirmasi atas tata cara penghapusan pinjaman terhadap entitas yang sudah tidak ada kepada Ditjen Kekayaan Negara (DJKN);
2. Pembahasan opsi penyelesaian dengan DJKN dan Biro Bantuan Hukum menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
    a. Penyelesaian melalui Panita Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan tujuan penghapusan piutang setelah piutang diurus secara optimal dan diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
    b. Penyelesaian diluar mekanisme PUPN sebagaimana diatur dalam PP 14/2005 Bab IV terkait Piutang BUMN maupun Pemerintah Daerah.

Akan disusun tahapan-tahapan penyelesaian sesuai dengan kedua opsi tersebut. Berkaitan dengan tindak lanjut penyelesaian pinjaman BBO/BBKU/BDL, Menteri Keuangan telah menetapkan surat penghentian perhitungan non pokok melalui surat nomor S-626/MK.05/2015 tanggal 18 Agustus 2015. Sesuai dengan surat

tersebut, penghentian perhitungan kewajiban non pokok dilakukan pada saat pembubaran/likuidasi entitas berkenaan, yaitu pada tanggal 26 April 2004.

Perkembangan selanjutnya, pada saat rapat pembahasan Penyelesaian TSL dari Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Nusa Dua Bali, Kementerian Keuangan menyampaikan pendapat bahwa Kementerian Keuangan tidak dapat menindaklanjuti penyelesaian TSL OLA (BBO/BBKU/BDL) sepanjang belum mendapatkan kejelasan mengenai konstruksi hukum, proses bisnis, dan data pendukung yang memadai. BI dan Kemenkeu harus memastikan bahwa telah ada dokumen hukum yang menyatakan bahwa debitur-debitur TSL OLA (BBO/BBKU/BDL) telah hapus status badan hukum dan diambil alih oleh Pemerintah.

Pada hari Rabu, 31 Maret 2021 telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut penyelesaian TSL Bank Indonesia pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB, melalui fasilitas *video conference* menggunakan aplikasi Zoom dengan peserta perwakilan Biro Hukum, Biro Advokasi, Inspektur III, dan Direktorat SMI. Adapun beberapa poin penting hasil rapat pembahasan dengan para undangan adalah sebagai berikut:

a. BI tidak dapat mengalihkan pengurusan pengelolaan TSL kepada Pemerintah sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerima pengelolaan tersebut dari BI. Sampai dengan saat itu, BI masih harus bertanggung jawab atas pengelolaan TSL sampai ditunjuk instansi/unit yang akan mengelolanya;

b. Apabila BI ingin mengalihkan pengelolaan TSL, maka dokumentasi dan data peminjamnya harus clear sampai dengan perjanjian juga mungkin harus dialihkan atas nama Pemerintah dalam hal ini Dit. SMI agar debitur juga clear pada saat akan melakukan pembayaran dan penutupan perjanjian;

c. Pentingnya komitmen bersama dari pimpinan untuk mengambil sikap menerima atau menolak baik seluruh atau sebagian atas TSL agar dapat menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan ini;

d. Pasal 74 UU BI tahun 1999 belum bisa dijadikan dasar pengalihan TSL karena pemberian mandat melalui surat kuasa Menteri Keuangan untuk melakukan penatausahaan penerusan pinjaman. Maka dari itu, mandat tidak menghilangkan tanggung jawab Pemerintah atas penerusan pinjaman untuk melakukan penatausahaan TSL. Jika BI ingin mengalihkan TSL, maka menjadi tidak tepat, yang mungkin seharusnya adalah mengembalikan tanggung jawab kepada pemerintah;

e. Karena pengelolaan TSL oleh BI diberikan melalui mandat surat kuasa, maka jika ingin melepaskan tanggung jawab BI dapat dilakukan dengan mencabut surat kuasa tersebut. Namun, jika tidak dicabut, kewenangan atas pengelolaan TSL pada prinsipnya masih di Menteri Keuangan;

f. Mengenai hal-hal teknis terkait pengalihan pengelolaan TSL BI, sebaiknya dicantumkan dalam PMK mengenai penatausahan TSL. Namun harus dipikirkan juga dasar hukum pembentukan PMK apakah ada amanat pembuatannya;

g. Permasalahan pengalihan pengelolaan TSL membutuhkan keputusan dari pimpinan mengingat banyaknya debitur yang sudah tidak ada wujudnya.

Dalam rangka menyelesaikan TSL, Direktorat SMI telah bekerja sama dengan BPPK untuk Menyusun kajian penyelesaian TSL. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut penyelesaian TSL dengan Bank Indonesia. Adapun beberapa poin penting hasil rapat pembahasan dengan para undangan adalah sebagai berikut:

a. Pihak BI siap mensupport dan menawarkan kolaborasi dengan Kemenkeu bilamana pihak Kemenkeu mengalami hambatan dalam mencapai titik temu atas penyusunan kajian maupun tindaklanjut atas isu dari hasil kajian hukum Kemenkeu;

b. Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Tim Kajian Akademis dari widyaiswara utama BPPK dan Tim Kajian Hukum untuk memprioritaskan TSL yang paling mudah untuk diselesaikan;

c. Perlunya kehadiran dan keterlibatan Kementerian BUMN mengingat BUMN yang akan ditunjuk Pemerintah dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank Indonesia, penyaluran dan administrasi kredit program, dan mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelanjutan pelaksanaan kredit program adalah BUMN yang kondisi keuangannya sehat;

d. Dokumen dan catatan yang dimiliki Kemenkeu saat ini terbatas/ tidak lengkap dan belum dapat diyakini keakuratan angka yang tersaji, termasuk data yang tercatat dalam sistem DMFAS/SPAN dan dalam Laporan Keuangan Kemenkeu, sehingga diperlukan penelusuran dan validasi data bersama oleh Kemenkeu dan Bank Indonesia guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan akurat.

Pada tanggal 5 Desember 2024 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Progres Penyelesaian TSL BI secara *online* yang dihadiri oleh Kepala Divisi PTBI (Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri), Plt. Kepala Subdirektorat Investasi Badan Usaha Milik Negara (Direktorat SMI) dan Perwakilan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi. Poin penting dalam diskusi rapat antara lain:

a. Upaya Direktorat SMI agar piutang TSL termasuk ke dalam piutang yang dapat dihapuskan dalam PP Nomor 47 Tahun 2024. Namun, terdapat pembatasan kriteria piutang yang perlu dihapuskan sehingga tidak semua piutang TSL dapat dimasukkan ke dalam penghapusan PP Nomor 47 Tahun 2024;

b. Sampai dengan Desember 2024, Direktorat SMI dan Bank Indonesia masih dalam proses konsolidasi kesesuaian data yang ada di sistem dan yang ada di Bank Indonesia;

c. Penyelesaian TSL secara parsial agar dapat menentukan mekanisme penyelesaian masing-masing pinjaman TSL secara tepat. Penyelesaian saat ini difokuskan kepada BUMN/BUMD/BHL dengan status data lengkap dan debitur jelas (tidak dalam proses hukum atau dibubarkan).

Pada tanggal 26 Februari 2025 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Penutupan Perjanjian TLS BI pada PDAM Ambon dan Penyelesaian TSL BI, poin penting rapat antara lain:

a. Terkait penutupan SLA TSL PDAM Ambon masih dalam pembahasan terkait penandatangan surat kuasa penutupan SLA TSL pada PDAM Ambon; dan

b. Pengalihan TSL Bank Indonesia diusulkan untuk dapat dibahas pada *high level meeting*.

D.3.5.5. Penyelesaian Pinjaman BUMN

D.3.5.5.1. Progress Penyelesaian Piutang Negara Tahun 2025

Direktorat Sistem Manajemen Investasi melaksanakan fungsi koordinasi antar unit yang terkait dalam lingkup Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN selaku Unit in Charge dalam pelaksanaan program penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan Terbatas (PT). Upaya perbaikan terus dilakukan agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program. Pemerintah telah menerbitkan aturan hukum sebagai landasan pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT/Badan Hukum Lainnya (BHL) yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT/BHL.

Optimalisasi penyelesaian piutang negara dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan kembali;
2. Perubahan persyaratan;
3. *Debt to Asset Swap;*
4. PMN;
5. Penghapusan dan/atau
6. Keringanan (*discount*) pembayaran.

Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dapat dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) cara (lebih dari satu skema penyelesaian). Pada optimalisasi penyelesaian piutang negara melalui Perubahan Persyaratan terdapat penambahan cara yaitu dengan konversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok.

Konversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok dimaksud hanya dapat dilakukan kepada BUMN atau Perseroan yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara. Selanjutnya juga terdapat tambahan ketentuan berkenaan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari konversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok dilakukan dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, perbaikan kinerja, dan organisasi BUMN/Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.3.5.5.2. Progres Penyelesaian Piutang Negara pada PTPN XIV dan PTPN XI

1. PTPN XIV

Melalui surat Nomor: S.994/03.N14/X/XI/2019 tanggal 18 November 2019, Direksi PTPN XIV mengajukan permohonan penyelesaian hutang RDI/SLA dengan skema:

a. Utang Pokok sebesar Rp84.702.120.539,08 di konversi menjadi PMN Non Tunai;

b. Utang Non Pokok sebesar Rp121.709.486.635,46 dijadwalkan kembali.

Atas pengajuan tersebut, Direktorat SMI telah meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan penyelesaian hutang RDI/SLA dan masih terdapat dokumen persyaratan yang belum disampaikan oleh PTPN XIV. Melalui surat Direktur SMI Nomor S-375/PB.4/2019 tanggal 31 Desember 2019 telah meminta direksi PTPN XIV untuk segera menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung penyelesaian piutang Negara. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dokumen yang belum diterima Direktorat SMI yaitu rekomendasi dari Kementerian BUMN terkait proses restrukturisasi hutang PTPN XIV, belum disampaikan oleh direksi PTPN XIV.

Direktur SMI membatalkan permohonan restrukturisasi hutang PTPN XIV melalui surat nomor S-123/PB.4/2021 tanggal 29 Maret 2021 karena dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tidak dapat dilengkapi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima.

PTPN XIV saat ini telah menjadi bagian dalam Proyek Strategis Nasional PTPN Group (*Supporting Co.*). Saat ini pembentukan sedang dalam proses, sehingga penyelesaian piutang negara pada PTPN XIV menunggu proses tersebut selesai agar dapat diketahui piutang negara tersebut akan dibebankan ke mana. Sebagai komitmen, PTPN XIV telah mengirim surat kepada Direktorat SMI Nomor S-644/05.N14/X/V/2023 perihal Penyelesaian Kewajiban SLA/RDI yang juga ditembuskan ke induk PTPN Group, yaitu PTPN III. PTPN XI telah bergabung (*merger*) ke dalam PTPN I berdasarkan akta

penggabungan Nomor 9 tanggal 1 Desember 2023 sehingga diperlukan novasi atas perjanjian pinjaman PTPN XI menjadi PTPN I.

Pada tanggal 1 Desember 2023 PTPN XI dan PTPN XIV bergabung ke dalam PTPN I, PTPN I ditunjuk sebagai induk subholding yang bergerak di bidang pendukung bisnis Perkebunan (*Supporting Co.*). Penggabungan tersebut didasari oleh akta notaris No. 9 tanggal 1 Desember 2023. PTPN I mengajukan surat Permohonan Novasi No. DPAK–DK/X/2024.08.07-1 tanggal 7 Agustus 2024 hal Permohonan Novasi Piutang Negara/Rekening Dana Investasi (RDI) PTPN XI dan PTPN XIV ke PTPN I dan Direktorat SMI telah memverifikasi surat permohonan tersebut dengan mengirimkan surat permintaan kelengkapan dokumen dan persyaratan novasi kepada Direktur Utama PTPN I melalui Surat No. S-221/PB.4/2024 tanggal 6 September 2024. PTPN I kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan surat nomor DPAK-DK/X/2024.11.15-1 tanggal 15 November 2024 hal Permohonan Novasi Piutang Negara/Rekening Dana Investasi (RDI) PTPN XI dan PTPN XIV ke PTPN I, mengajukan permohonan pembaruan utang (novasi). Perkembangan sampai dengan saat ini, dokumen novasi dan amandemen perjanjian antara Pemerintah RI dan PTPN I telah ditandatangani tanggal 22 Juli 2025.

2. PTPN XI

PTPN XI tidak lagi membayar cicilan sejak tahun 2020 karena adanya proses revitalisasi/modernisasi perusahaan sehingga produksi belum optimal. Disamping itu, Direktorat SMI dan PTPN XI tidak memiliki dokumen fisik perjanjian pinjaman RDI No. 15/002/INV/1983. Berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.05/2021, penyelesaian piutang negara pada BUMN dengan kriteria tertentu (Perjanjian Pinjaman tidak lengkap dan/atau tidak ditemukan namun nilai atau jumlah piutang negara tercatat atau diakui) dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Surat Kesepakatan Utang (SKU) yang ditandatangani Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dengan Direktur Utama/Direktur/pengurus BUMN.

Pada bulan Juli 2022, telah dilakukan kesepakatan antara Direktorat SMI dan PTPN XI terkait penyelesaian piutang negara dengan terlebih dahulu membuat SKU. Poin-poin kesepakatan pada SKU antara lain:

1) Besaran Piutang Negara sebesar Rp3.522.896.325,00;
2) Jangka Waktu Pinjaman 5 tahun sejak tanggal penandatanganan SKU s.d. tanggal 15 Juni 2027;
3) Pembayaran pertama akan dilakukan setelah penandatanganan SKU, selanjutnya per semester setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember; dan
4) Tingkat Suku Bunga nol persen.

Kemudian pada bulan Mei 2023, poin-poin kesepakatan tersebut diperbaharui yaitu jangka waktu pinjaman yang semula 5 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan. Penyesuaian ini dilakukan setelah adanya arahan Dirjen Perbendaharaan untuk terlebih dahulu mencari ulang fisik dokumen perjanjian RDI sebelum dilakukan penyusunan perjanjian baru. Namun setelah dilakukan pencarian ulang, dokumen tersebut tetap tidak ditemukan.

SKU yang telah ditandatangani menjadi dasar persetujuan penyelesaian piutang negara oleh Menteri Keuangan. Persetujuan ini kemudian akan menjadi dasar penyusunan perjanjian pinjaman RDI baru antara Kementerian Keuangan dan PTPN XI.

SKU telah ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan dan Direktur Utama PTPN XI, serta telah diterbitkan surat persetujuan penyelesaian piutang negara oleh Menteri Keuangan. Saat ini perjanjian pinjaman telah diterbitkan dengan Nomor RDI-406/DSMI/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan PTPN XI telah

mulai membayar angsuran pertamanya pada tanggal 15 Juli 2023 yang dilanjutkan pembayaran untuk angsuran kedua pada tanggal 12 Desember 2023.

Pada tanggal 1 Desember 2023, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengumumkan penggabungan 13 (tiga belas) perusahaan di bawah Holding Perkebunan Nusantara, menjadi 2 (dua) Sub Holding, yakni Palm Co. dan Supporting Co. Subholding Supporting Co. dibentuk yang diantaranya melalui *merger* PTPN XI ke dalam PTPN I berdasarkan akta penggabungan No. 9 tanggal 1 Desember 2023 sehingga diperlukan novasi atas perjanjian utang PTPN XI menjadi PTPN I.

Pada tanggal 1 Desember 2023 PTPN XI dan PTPN XIV bergabung ke dalam PTPN I, PTPN I ditunjuk sebagai induk subholding yang bergerak di bidang pendukung bisnis Perkebunan (*Supporting Co.*) Penggabungan tersebut didasari oleh akta notaris No. 9 tanggal 1 Desember 2023. PTPN I mengajukan surat Permohonan Novasi No. DPAK–DK/X/2024.08.07-1 tanggal 7 Agustus 2024 hal Permohonan Novasi Piutang Negara/Rekening Dana Investasi (RDI) PTPN XI dan PTPN XIV ke PTPN I dan Direktorat SMI memverifikasi surat permohonan tersebut dengan mengirimkan surat No. S-221/PB.4/2024 tanggal 6 September 2024. PTPN I kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan surat nomor DPAK-DK/X/2024.11.15-1 tanggal 15 November 2024 hal Permohonan Novasi Piutang Negara/Rekening Dana Investasi (RDI) PTPN XI dan PTPN XIV ke PTPN I, mengajukan permohonan pembaruan utang (novasi).

Terkait proses pengajuan novasi oleh PTPN XI, Dit. SMI telah mengadakan rapat sesuai Surat Undangan Direktur Sistem Manajemen Investasi Nomor: UND-71/PB.4/2025 tanggal 10 Maret 2025 dan UND-80/PB.4/2025 tanggal 18 Maret 2025 dalam rangka penyusunan draf novasi perjanjian dan telah dilakukan pembahasan dengan pihak PTPN I, PTPN XI, dan PTPN XIV. Perkembangan sampai dengan saat ini, dokumen novasi telah selesai dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

D.3.5.5.3. Progres Penyelesaian Piutang Negara Lainnya

1. Penyelesaian piutang Negara pada BUMN

Berikut adalah progress penyelesaian piutang negara kepada beberapa BUMN, diantaranya:

a. PT Djakarta Llyod (Persero)

Pasca PT Djakarta LLoyd kembali digugat PKPU sesuai Putusan No. 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 November 2023, telah mengabulkan permohonan PKPU atas PT Djakarta Lloyd (Persero).Pemerintah telah mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus PT Djakarta Lloyd (Persero) pada tanggal 6 Desember 2023, dengan tagihan sebesar Rp168.361.692.009,78. Pemerintah akan mengikuti proses PKPU untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara. Berdasarkan putusan pengadilan, Proposal Perdamaian PKPU yang diajukan PT Djakarta Lloyd diterima oleh mayoritas kreditur dengan skema penyelesaian piutang negara dilakukan penjadwalan kembali selama 18 tahun termasuk masa tenggang selama 2 tahun.

Berdasarkan relaas Mahkamah Agung No.513/PAN.03/W.10.U1/HK2.5/VIII/2024.MIR tanggal 30 Agustus 2024, putusan homologasi PT Djakarta Lloyd (Persero) dimohonkan kasasi oleh PT Asia Mulia Transpasifik. Implikasi dari permohonan kasasi tersebut, putusan homologasi belum dapat ditindaklanjuti melalui proses amandemen perjanjian pinjaman antara pemerintah dengan PT Djakarta Lloyd (Persero).

Berdasarkan Putusan No.301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2024 Jo Putusan Mahakamah Agung No. 182K/Pdt.Sus-Pailit/2025 tanggal 13 Maret 2025, Majelis Hakim menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian serta menghukum termohon

PKPU/Debitor/PT DL dan seluruh kreditor untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) sesuai putusan homologasi. Sebagai tindak lanjut atas putusan dimaksud, PT Djakarta Lloyd telah mengajukan permohonan amandemen dalam rangka menindaklanjuti hasil PKPU 2023 sesuai surat Direktur Utama PT DL No. 130.1/TU.803.04/DIRUT/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025. Selanjutnya akan dilakukan amandemen perjanjian sesuai dengan putusan pengadilan.

Telah dilaksanakan amendemen perjanjian atas Perjanjian Nomor AMA-421/RDI-019/PB/2025 tanggal 14 Oktober 2025 dan AMA-422/RDI-019/PB/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Namun, saat ini PT Djakarta Lloyd dituntut pailit oleh salah satu kreditur. Selanjutnya, Pemerintah telah mengirimkan tagihan kepada Tim Kurator PT Djakarta Lloyd melalui Surat Direktur SMI Nomor S-306/PB.4/2026 tanggal 27 November 2025 senilai Rp168.361.692.009,78.

b. PT PANN

Sesuai Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, telah menyetujui dimulainya penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran PT PANN (Persero). Pada tanggal 17 Oktober 2024 telah ditetapkan Pembubaran Perseroan PT PANN melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2024 dimana proses likuidasi dilakukan selama paling lambat 5 (lima) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah tersebut.

Adapun proses likuidasi dilaksanakan oleh Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. dan Satrio Sapto Nugroho, S.H. berdasarkan penunjukan dan pengangkatan RUPS LB PT PANN (Persero) melalui Akta Nomor 3/2025 (“Tim Likuidator”). Tahap pertama dari proses likuidasi dimaksud yaitu pendaftaran tagihan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman likuidasi tanggal 26 Februari 2025. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat SMI, Biro Advokasi, dan Direktorat SP (“Tim Kementerian Keuangan”) mendaftarkan tagihan sebesar USD461,096,969.59 melalui Surat Nomor S-106/PB.4/2025 tanggal 20 April 2025. Adapun tagihan dimaksud telah diterima oleh Tim Likuidator berdasarkan tanda terima tanggal 22 April 2025.

Pemerintah dan Tim Likuidator PT PANN (Persero) telah sepakat dan melakukan penandatanganan berita acara verifikasi tagihan sebesar USD461,096,969.59 pada tanggal 17 Juli 2025 bersama dengan Tim Likuidator PT PANN (Persero).

Kemudian, melalui Surat Nomor S-336/PB.4/2025 tanggal 30 Desember 2025 Pemerintah meminta informasi progres likuidasi PT PANN kepada Tim Likuidator PT PANN (Persero).

c. PT Kertas Kraft Aceh

Telah diterbitkan PP Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran PT KKA. Untuk pengajuan tagihan piutang pada PT KKA masih menunggu terbentuknya tim likuidator yang dibentuk oleh PT KKA. Berdasarkan akta berita acara RUPSLB PT KKA (Dalam Likuidasi) yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2023 dilakukan penunjukkan Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai likuidator PT KKA. Likuidator melalui surat nomor 002/KKA-LIKUIDASI/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 melakukan pemberitahuan pendaftaran pengajuan kreditor.

Direktur Sistem Manajemen Investasi melalui surat nomor S-258/PB.4/2023 tanggal 21 Agustus 2023 mengajukan tagihan atas pinjaman SLA-1207/DP3/2007 PT KKA dengan jumlah kewajiban sebesar USD8,544,534.67. Telah dilakukan verifikasi piutang oleh Likuidator PT KKA pada tanggal

19 Oktober dan 23 Oktober 2023 dimana Likuidator menyetujui kewajiban PT KKA sebesar USD8,544,534.67.

Pada tanggal 6 Februari 2024, PT KKA mengajukan pailit sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga (PN) Medan No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn tanggal 6 Februari 2024. Hal tersebut menyebabkan perubahan total perhitungan akhir untuk PT KKA kepada pemerintah atas kewajiban pokok, bunga, jasa bank, dan denda atas bunga sebesar USD9,805,145.77 dengan sifat tagihan preferen atau didahulukan. Tagihan atas Piutang Negara tersebut telah disepakati Tim Kurator sesuai dengan hasil Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang. Namun, terkait dengan sifat tagihan atas piutang negara Tim Kurator telah memberikan Keputusan untuk memasukkan tagihan tersebut sebagai tagihan konkuren.

Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan telah mengajukan gugatan perdata berupa permohonan Renvoi Prosedur kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dengan nomor perkara: 21/Pdt.Sus-Renvoi/2024/PN Niaga Mdn. Telah dilakukan beberapa kali sidang gugatan renvoi prosedur pada perkara kepailitan PT Kertas Kraft Aceh, sejak 24 Juni 2024 s.d. Sidang pembacaan putusan pada tanggal 2 Oktober 2024. Sesuai Laporan Bersama Kasubdit Investasi BUMN dan Kasubdit Hukum kepada Direktur SMI No. ND-510/PB.44/2024 dan ND-469/PB.43/2024 tanggal 3 Oktober 2024 bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 21/Pdt.Sus-Renvoi/2024/PN Niaga Mdn, permohonan Renvoi prosedur ditolak dan sifat tagihan Pemerintah bersifat konkuren (dimana pembayarannya dilakukan setelah pembayaran tagihan kepada kreditur preferen dan separatis). Tagihan pemerintah pada PT KKA telah dimasukkan dalam daftar piutang tetap PT KKA sebesar Rp153.989.814.242,946,00.

Berdasarkan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara, telah diterima salinan Daftar Piutang Tetap (DPT) dan Putusan Pailit PT KKA sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara Nomor ND-402/WPB.02/2025 tanggal 3 Maret 2025 hal Penyampaian Salinan Daftar Piutang Tetap (DPT) dan Salinan Putusan Pailit PT KKA Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Medan tanggal 6 Februari 2024.

d. PT Kertas Leces

Telah diterbitkan PP Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces tanggal 20 Februari 2023. Tim Kurator melalui surat nomor 881/PAILIT-KL/AG-RB-FEB/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, menyampaikan bahwa Tim Kurator telah mencatatkan Tagihan Kemenkeu Sebesar Rp749. 817.814.012,54 ke dalam Daftar Piutang Tetap Kreditor Preferen PT Kertas Leces, dan telah dilakukan pembayaran kepada Pemerintah atas penjualan aset benda bergerak PT Kertas Leces senilai Rp11.796.914.354,13, sehingga Sisa Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp738.020.899.658,41.

Perkembangan terakhir yaitu melalui rapat kreditur tanggal 7 Maret 2025 Tim Kurator berusaha untuk menyelesaikan aset berupa 14 sertifikat tanah yang dikuasai oleh DJKN Kementerian Keuangan (“14 sertifikat tanah”) dan aset jaminan milik PT Waskita Karya. Melalui rapat kreditur dimaksud, perwakilan kreditur menyampaikan keluhan atas komunikasi dan proses pembagian harta. Adapun penyelesaian dari Tim Kurator pembentukan grup WhatsApp sebagai wadah komunikasi dan pembayaran tagihan dilakukan setelah dilakukan proses perhitungan dan verifikasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat SMI telah menyampaikan nama dan nomor WhatsApp yang bertindak sebagai perwakilan melalui Surat Nomor S-87/PB.4/2025 tanggal 18 Maret 2025.

Selanjutnya, Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) telah menyampaikan daftar pembagian atas hasil pembayaran sewa gudang harta pailit milik PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) selama tahun 2020 s.d. tahun 2026 dan cadangan biaya perkara dari daftar pembagian harta melalui Surat Nomor 926/PAILIT-KL/AG-RB-FEB/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa apabila terhadap daftar pembagian tidak diajukan keberatan dan telah mengikat, maka jumlah pembagian yang akan diterima oleh Kementerian Keuangan RI sebagaimana daftar pembagian adalah sebesar Rp1.426.945.855,62.

e. PT Kertas Gowa

Penghapusan piutang pada PT Kertas Gowa akan dilakukan setelah Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU) menyampaikan surat keterangan penghapusan status badan hukum PT Kertas Gowa. Direktur SMI sudah menyampaikan surat kepada Ditjen AHU nomor S-106/PB.4/2023 tanggal 13 April 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan dan Penghapusan Nama Perseroan PT. Kertas Gowa dari Daftar Perseroan.

Melalui surat nomor AHU.2.UM.01.01-3146 tanggal 4 Agustus 2023, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham menyampaikan tanggapan bahwa PT Kertas Gowa tidak tercatat melakukan perubahan atau pembubaran pada Sistem Administrasi Badan Hukum, juga dalam arsip yang tersimpan di Ditjen AHU. Selanjutnya untuk pengumuman berakhirnya status badan hukum perseroan PT Kertas Gowa dalam Berita Negara, Ditjen AHU mengarahkan untuk berkoordinasi dengan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Direktur SMI telah menyampaikan Surat Permohonan Informasi atas Pengumuman Berakhirnya Status Badan Hukum PT Kertas Gowa pada Berita Negara Republik Indonesia kepada Direktur Umum PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PT PNRI) melalui Surat nomor S-278/PB.4/2023 tanggal 11 September 2023. Pada tanggal 12 Desember 2023, telah dilaksanakan koordinasi dengan PT PNRI terkait Surat Direktur SMI No. S-278/PB.4/2023 tanggal 11 September 2023. Dari hasil koordinasi, PT PNRI menyampaikan bahwa dalam *database* Berita Negara RI belum ada pengumuman berakhirnya status badan hukum PT Kertas Gowa pada Berita Negara RI. Namun, belum ada surat tanggapan secara resmi dari PT PNRI.

Pada tanggal 26 November 2024, telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Konfirmasi Status Badan Hukum Usaha PT Kertas Gowa (Dalam Likuidasi) dengan Ketua Tim Kerja Perseroan Terbatas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana dilaporkan dalam ND-617/PB.44/2024.

Menindaklanjuti kegiatan koordinasi tersebut, Direktorat SMI mengirimkan Surat No. S-335/PB.4/2024 Tanggal 21 Desember 2024 tentang Permohonan Konfirmasi Status Badan Hukum PT Kertas Gowa kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Adapun tanggapan Ditjen AHU melalui Surat Nomor AHU.7-AH.01-587 tanggal 26 Februari yaitu PT Kertas Gowa tidak tercatat melakukan perubahan atau pembubaran pada sistem dan arsip. Oleh karenanya, Dirjen AHU merekomendasikan untuk berkoordinasi dengan Perum Percetakan Negara RI.

Direktorat SMI telah berkoordinasi dengan Perum Percetakan Negara RI melalui Surat Nomor S-79/PB.4/2025 tanggal 4 Maret 2025 dalam rangka permohonan konfirmasi atas pengumuman berakhirnya status badan hukum PT Kertas Gowa. Adapun tanggapan Perum Percetakan Negara RI melalui Surat Nomor 049/DIR/IV/2025 tanggal 8 April 2025 yaitu tidak ditemukan pengumuman dimaksud.

f. PT Perikanan Indonesia (Perindo)

PT Perindo ditetapkan dalam PKPU berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 107/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2024. Kemenkeu telah mengajukan tagihan piutang negara melalui surat S-2/PB.4/PB.43/2024 tanggal 21 Juni 2024 dan telah ditetapkan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan nilai sebesar Rp44.750.398.705,96 yang terbagi atas: Utang RDI PT Perindo sebesar Rp393.096.679,57 dan terkait Utang TSL BI yang masih tercatat atas PT Perikanan Nusantara (PT Perikanus) sebesar Rp44.357.302.026,39.

Saat ini telah diputuskan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) melalui Nomor: 107/PDT.SUS-PKPU/2024/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2024. Hasil putusan tersebut antara lain Kemenkeu sebagai Kreditur Preferen atas piutangnya sebesar Rp44.750.398.706,00 akan dibayarkan setelah Grace Period 5 (lima) tahun setelah tanggal Efektif dan setelah *grace period* berakhir hingga tahun ke-15 (lima belas) setelah Tanggal Efektif, kewajiban pembayaran pokok Utang Debitor kepada Kreditor Preferen akan dilaksanakan dengan mekanisme *balloon payment*, yaitu dengan cara mencicil setiap 6 (enam) bulan dan pada tahun ke-15 (lima belas) setelah Tanggal Efektif, Debitor akan melakukan pelunasan atas seluruh sisa Utang Debitor. Selanjutnya seluruh pembayaran Utang akan dilaksanakan dengan Sisa Kas Hasil Kegiatan Operasi (CFADS) yang disetor ke Rekening Penerimaan Kas.

Direktorat SMI telah mengadakan rapat koordinasi Penyelesaian Piutang Negara pada PT Perindo Pasca Homologasi pada tanggal 18 Desember 2024 untuk menindaklanjuti Putusan Homologasi Nomor: 107/Pdt.Sus-PKPU/2024 /PN.Niaga.Jkt.Pst. Sesuai dengan Surat Undangan Direktur SMI No.UND-430/PB.4/2024 tanggal 17 Desember 2024. Direktorat SMI telah berkoordinasi dengan PT Perindo agar segera mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara. Adapun PT Perindo telah mengajukan permohonan dimaksud melalui Surat Nomor S-0001/Dir.A/I/2025 tanggal 20 Januari 2025. Perkembangan sampai dengan saat ini, dokumen novasi dan amandemen perjanjian antara Pemerintah RI dan PT Perindo telah ditandatangani tanggal 21 November 2025.

2. Progres penyelesaian permohonan restrukturisasi pinjaman SLA dan RDI pada yang dititipkelolakan pada PT PPA

Pada klaster titip kelola danareksa-PPA terdapat penyelesaian utang SLA/RDI melalui pengadilan/penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yaitu pada PT Barata dan PT DPS dengan proses sebagai berikut:

1) PT Barata Indonesia

a) Berdasarkan Putusan sela majelis hakim pengadilan niaga Surabaya tanggal 23 Agustus 2021 dan pengumuman tim pengurus PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) tanggal 30 Agustus 2021;

b) Kewajiban dari pinjaman RDI dengan jumlah sampai dengan 23 Agustus 2021 sebesar Rp76.268.526.518,41;

c) Progress terakhir pengesahan perjanjian perdamaian/homologasi telah ditentukan oleh Hakim Pemutus tanggal 6 Desember 2021, dengan skema penyelesaian melalui penjadwalan kembali (Pembayaran akan dilakukan sampai dengan 1% (satu persen) dari total kewajiban Perseroan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tetap tunduk CFADS (*Cash Available for Debt*

Service) sejak Triwulan 1 Tahun 2022 dan opsi konversi atas sisa tagihan pada tahun ke-10 setelah tanggal homologasi;

d) Setelah Perjanjian Perdamaian tersebut di atas disahkan Majelis Hakim, sebagai bentuk pelaksanaan skema homologasi, PT Barata telah mengirimkan laporan terkait CFADS dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Laporan	Nomor Surat Pengantar	Tanggal	Saldo CFADS/ Pembayaran
1	Review LK Tw III Tahun 2023	-	12 Desember 2024	Nihil
2	Review LK Tw IV Tahun 2023	-	12 Desember 2024	Nihil
3	Review LK Tw I Tahun 2024	-	12 Desember 2024	Nihil
4	Review LK Tw II Tahun 2024	-	12 Desember 2024	1,15 Miliar
5	Review LK Tw III Tahun 2024	-	11 Maret 2025	2,55 Miliar
6	Review LK Tw IV Tahun 2024	-	17 April 2025	2,58 Miliar

e) Sesuai dengan laporan CFADS tersebut, PT Barata telah melakukan pembayaran kewajiban sejak triwulan II s.d. IV 2024 pada Senin, 26 Mei 2025 sebesar Rp62.964.678,00;

f) Direktorat SMI telah mengirim surat No. S-319/PB.4/2024 tentang Permintaan Penyampaian Tindak Lanjut Pasca Putusan Homologasi Pinjaman RDI PT Barata pada 12 Desember 2024. Melalui surat tersebut, Direktorat SMI meminta PT Barata untuk melaksanakan pembayaran piutang negara sesuai dengan putusan homologasi yang telah ditetapkan, dan menyampaikan proyeksi CFADS untuk dijadikan dasar amandemen perjanjian;

g) Pada tanggal 16 April 2025, PT Barata telah menyampaikan permohonan amendemen perjanjian melalui surat No. 10 25 092 hal Permohonan Amandemen Perjanjian Pasca Putusan Homologasi PT Barata Indonesia (Persero).

2) PT Dok dan Perkapalan Surabaya

a) Hak Direktur Sistem Manajemen Investasi melalui surat nomor S-61/PB/PB.4/2021 tanggal 19 Oktober 2021 mengajukan tagihan atas pinjaman AMA-184/RDI-110/DSMI/2017 dan AMA-185/RDI-134/DSMI/2017 PT DPS dengan jumlah kewajiban sebesar Rp32.840.212.102,98;

b) Sesuai dengan Proposal Perdamaian PKPU PT DPS berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan PKPU Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Februari 2023;

c) Adapun skema penyelesaian kewajiban RDI PT DPS yaitu setiap arus kas yang tersedia dan/atau dana yang telah digunakan untuk operasional dan pembayaran kepada Karyawan dan Pensiunan akan dibayarkan kepada Kementerian Keuangan melalui skema balloon payment selama 15 tahun dengan pembayaran mulai pada tahun ke 5 setelah tanggal homologasi.

d) PT DPS telah mengajukan Permohonan Amandemen Perjanjian Pasca Putusan Homologasi sesuai dengan Surat Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor: 24/1034-12/DS/I/M-4 tanggal 16 Desember 2024. Permohonan dimaksud telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perjanjian Perubahan (Amandemen) PT DPS Nomor AMA-419/RDI-110/DSMI/2025 dan AMA-420/RDI-134/DSMI/2025 tanggal 28 Mei 2025.

3. Progres penyelesaian restrukturisasi pinjaman pada BUMN

Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat amandemen dan novasi perjanjian pada debitur berikut:

No.	Debitur	Nomor Perjanjian	Tanggal
1	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	AMA-419/RDI-110/DSMI/2025	28 Mei 2025
2	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	AMA-420/RDI-134/DSMI/2025	28 Mei 2025
3	PTPN I	RDI-423/EKS-13-017-IBRD-PP-RDI/DSMI/2025	22 Juli 2025
4	PTPN I	SLA-1315/EKS-SLA-276/DSMI/2025	22 Juli 2025
5	PTPN I	SLA-1318/EKS-SLA-419/DSMI/2025	22 Juli 2025
6	PTPN I	SLA-1319/EKS-SLA-638/DSMI/2025	22 Juli 2025
7	PTPN I	SLA-1312/EKS-SLA-079/DSMI/2025	22 Juli 2025
8	PTPN I	SLA-1316/EKS-SLA-277/DSMI/2025	22 Juli 2025
9	PTPN I	SLA-1314/EKS-SLA-141/DSMI/2025	22 Juli 2025
10	PTPN I	SLA-1317/EKS-SLA-313/DSMI/2025	22 Juli 2025
11	PTPN I	SLA-1311/EKS-SLA-010/DSMI/2025	22 Juli 2025
12	PTPN I	SLA-1313/EKS-SLA-091/DSMI/2025	22 Juli 2025
13	PTPN I	RDI-426/EKS-RDI-095/DSMI/2025	22 Juli 2025
14	PTPN I	RDI-427/EKS-RDI-096/DSMI/2025	22 Juli 2025
15	PTPN I	RDI-428/EKS-RDI-248/DSMI/2025	22 Juli 2025
16	PTPN I	RDI-429/EKS-RDI-249/DSMI/2025	22 Juli 2025
17	PTPN I	RDI-424/EKS-RDI-063/DSMI/2025	22 Juli 2025
18	PTPN I	RDI-425/EKS-RDI-069/DSMI/2025	22 Juli 2025
19	PTPN I	SLA-1310/EKS-13-017-IBRD-PP-FEL/DSMI/2025	22 Juli 2025
20	PTPN I	SLA-1309/EKS-11-008-IDA-AM/DSMI/2025	22 Juli 2025
21	PTPN I	SLA-1320/EKS-SLA-677/DSMI/2025	22 Juli 2025
22	PTPN I	RDI-430/EKS-RDI-406/DSMI/2025	22 Juli 2025
23	PT. AMARTA KARYA	AMA-517/SLA-428/DSMI/2025	25 Agustus 2025
24	PT DJAKARTA LLOYD	AMA-421/RDI-019/PB/2025	14 Oktober 2025
25	PT DJAKARTA LLOYD	AMA-422/RDI-323/PB/2025	14 Oktober 2025
26	PT PERINDO	AMA-522/19-004-IDA-AM/PB/2025	21 November 2025
27	PT PERINDO	SLA-1321/PB/2025	21 November 2025
28	PT PERINDO	AMA-518/19-004-ID-AM/PB/2025	21 November 2025
29	PT PERINDO	AMA-520/ADB-154-INO-SF/PB/2025	21 November 2025
30	PT PERINDO	AMA-521/EKS-OECF-IP-89/PB/2025	21 November 2025
31	PT PERINDO	AMA-519/IDA-211/PB/2025	21 November 2025
32	PT PERINDO	SLA-1322/PB/2025	21 November 2025
33	PT PERINDO	AMA-425/ADB.216-Eks-RDI-ADB/PB/2025	21 November 2025
34	PT PERINDO	AMA-426/RDI-389/DSMI/2025	21 November 2025
35	PT PUPUK INDONESIA NIAGA	AMA-423/RDI-014/DSMI/2025	05 November 2025
36	PT PUPUK INDONESIA NIAGA	AMA-424/RDI-373/DSMI/2025	05 November 2025

4. Penutupan perjanjian

Sampai dengan periode 31 Desember 2025 terdapat penutupan perjanjian pada debitur berikut:

No.	Debitur	Nomor Perjanjian	Surat Penutupan	Tanggal
1	PERTAMINA	SLA-1210/DP3/2007	S-1/MK.5/2025	8 Januari 2025
2	PT Telkom	SLA-809/DP3/1995	S-2/MK.5/2025	10 Januari 2025
3	PT Telkom	SLA-810/DP3/1995	S-2/MK.5/2025	10 Januari 2025
4	PT. PLN	SLA-818/DP3/1995	S-2/MK.5/2025	6 Februari 2025
5	PT. PLN	SLA-1071/DP3/1998	S-2/MK.5/2025	6 Februari 2025
6	PT. PLN	SLA-1158/DP3/2003	S-2/MK.5/2025	6 Februari 2025
7	PT. PLN	SLA-1192/DP3/2005	S-2/MK.5/2025	6 Februari 2025
8	PT. PLN	SLA-1206/DP3/2007	S-2/MK.5/2025	6 Februari 2025
9	PT. PLN	SLA-1233/DSMI/2010	S-2/MK.5/2025	6 Februari 2025
10	PT. PLN	SLA-1237/DSMI/2010	S-46/MK/PB/2025	13 Agustus 2025
11	BPD JAWA BARAT	SLA-1135/DP3/2000	S-50/MK/PB/2025	26 Agustus 2025
12	PT Djakarta Lloyd	SLA-1264/EKS-SLA-725-SLA-727/DSMI/2016	S-61/MK/PB/2025	23 Oktober 2025
13	PT PLN	SLA-1250/DSMI/2013	S-62/MK/PB/2025	23 Oktober 2025
14	PT PANN	RDI-234/DDI/1991	S-71/MK/PB/2025	29 Oktober 2025

D.3.6. BA 999.07

PENGUNGKAPAN PENTING PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Kementerian Perhubungan

Ditjen Perkeretaapian

a. Terdapat pergantian pejabat struktural dalam lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehinga diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP – DJKA 68 Tahun 2025 tanggal 02 Juni 2025 Tentang Struktur Organisasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*/PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi dan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi Tahun Anggaran 2025.

b. Selanjutnya, terdapat pergantian pejabat struktural dalam lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehinga diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP – DJKA 106 Tahun 2025 tanggal 04 September 2025 Tentang Struktur Organisasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*/PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi dan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi Tahun Anggaran 2025.

2. Kementerian Keuangan

a. Direktorat Jenderal Pajak

Subsidi P-DTP yang Belum Dibayarkan

Terdapat subsidi PPh Pasal 21 DTP atas IKN yang pada pelaksanaannya di tahun 2025 ini belum ada pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. Subsidi PPh DTP atas proyek PHLN pelaporan realisasinya berakhir pada tanggal 30 Nov 2025, atas data realisasi yang disampaikan sampai saat ini masih belum diyakini kebenaran nilai realisasinya.

b. DJPPR

Pada tahun 2025, DJPPR tidak menerima alokasi anggaran belanja subsidi karena Belanja Subsidi IJP Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 telah berakhir pada tahun 2024. Atas Belanja Subsidi yang telah dibayarkan di tahun 2024, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pelunasan dipercepat atas Penjaminan PEN yang akan menimbulkan kelebihan bayar IJP 2024. Sesuai PMK 71/PMK.08/2020 jo. PMK 28/PMK.08/2022 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kelebihan bayar IJP pada akhir Penjaminan Program PEN, maka kelebihan tersebut dikembalikan Negara. Adapun pengembalian kelebihan bayar IJP 2024 tersebut akan dicatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu pada tahun 2025.

3. Kementerian Pertanian

Penyelesaian Kewajiban PT.SHS pada Subsidi Benih
Berdasarkan surat dari PT.Sang Hyang Seri Nomor: 886/DIR/SHS.01/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal penyelesaian Kewajiban Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI PT.SHS, bahwa kewajiban tersebut dapat dilaksanakan Restrakturisasi atau penjadwalan pembayaran selama 10 (sepuluh) tahun.

4. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Capaian *output* subsidi IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR TA 2025

Pada Tahun 2025 capaian output atas pembayaran subsidi IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR sebagai berikut:

1) Target Capaian Output IJP KUR yaitu tersalurkannya IJP KUR kepada 2 (dua) perusahaan penjamin dengan realisasi masih nol dari target yang ditetapkan, disebabkan belum selesainya verifikasi/audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

2) Target Capaian Output Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR yaitu tersalurkannya subsidi bunga/subsidi marjin KUR kepada 4.178.954 debitur atas akad Desember 2024 s.d November 2025 dengan realisasi kepada 4.058.921 debitur atau sebesar 97,13 persen dari target yang ditetapkan, tidak tercapai disebabkan terdapat pembayaran subsidi bunga/subsidi marjin periode November 2025 yang hingga akhir Desember 2025 tidak terbit SP2D.

3) Potensi tagihan subsidi KUR

Dapat disampaikan bahwa sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat potensi tagihan subsidi IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang telah dilakukan penagihan oleh Penjamin dan Penyalur KUR namun belum dilakukan verifikasi yaitu sebesar Rp3.315.254.875.975,00 terdiri dari:

a) Subsidi IJP KUR sebesar Rp3.191.990.106.777,00, disebabkan belum dilakukan verifikasi/audit oleh BPKP;

b) Subsidi bunga/subsidi marjin KUR reguler sebesar Rp25.210.322,00, disebabkan tagihan dari penyalur terlambat disampaikan kepada KPA;

c) *Carry Over* subsidi bunga/subsidi marjin KUR sampai dengan tahun 2023 reguler sebesar Rp13.677.460.906,00; dan

d) *Carry Over* subsidi bunga/subsidi marjin KUR tambahan sebesar Rp109.562.097.970,00, disebabkan belum terbitnya Keputusan Menteri Keuangan pengganti KMK 188 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Atas Pelaksanaan Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat.

5. Kementerian Perindustrian

a. Menteri Keuangan selalu PA BUN di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya menetapkan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian sebagai KPA KIPK.

b. Direktur Jenderal KPAII menyampaikan Usulan Satuan Kerja dan Informasi KinerJa Pengelola Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya (KIPK) melalui surat Nomor B/149/KPAII/IND/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pimpinan PPA BUN BA.999.07

Kementerian Keuangan. Selanjutnya Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan Penetapan Satuan Kerja BUN dan Informasi Kinerja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya dengan kode Satker 999705. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya; dan
3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima Kredit Industri Padat Karya.

D.3.7. BA 999.08

1. Satker SKK Migas

   a. Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR)

   Dana ASR merupakan akumulasi dana yang disimpan pada rekening bersama (*escrow account*) dalam mata uang USD yang diawasi oleh SKK MIGAS dan Kontraktor yang dicadangkan untuk pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi (KPO)/*Abandonment and Site Restoration* (ASR) yaitu kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pencadangan dana ASR dimulai sejak KKKS berproduksi komersial sampai dengan produksi berakhir (umur ekonomis lapangan).

   Menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan – Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 04 Maret 2022, perihal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas. Pencatatan dan pelaporan pada laporan keuangan Dana ASR dilakukan secara periodik dengan menyajikan saldonya pada tanggal pelaporan. Penyajian atas saldo Dana ASR disajikan pada Neraca SKK Migas dan tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.

   Pengelolaan dan penatausahaan dana ASR pada rekening bersama dilakukan oleh SKK Migas berdasarkan Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas, KKKS dan Bank. Saldo Dana ASR TA 2025 disajikan dengan menggunakan kurs penutupan (JISDOR) per 31 Desember 2025 (1USD = Rp16.720,00).

   b. Dana Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) Wilayah Kerja Rokan

   Dana Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) Wilayah Kerja Rokan dari Kegiatan Operasi Kontraktor Sebelumnya, sebelum tahun 2024 merupakan bagian dari Dana ASR WK Rokan yang disimpan dalam rekening bersama Dana ASR WK Rokan Lanjutan.

   Berdasarkan surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor B-5759/MG.06/DJM/2023, tanggal 5 Juni 2023, yang menyatakan bahwa kasus pemulihan TTM di WK Rokan berbeda dengan pemulihan lokasi yang tertulis pada Permen ESDM nomor 15 tahun 2018, karena pemulihan TTM

WK Rokan yang dimaksud bukan merupakan sebab dari kegiatan pasca operasi melainkan dampak kumulatif dari praktik operasi terdahulu ketika peraturan lingkungan hidup belum mengatur hidrokarbon sebagai limbah B3, maka Dana TTM WK Rokan dipisahkan dan dipindahbukukan dari rekening bersama Dana ASR WK Rokan Lanjutan ke rekening baru, yaitu rekening bersama Dana TTM WK Rokan.

Pengelolaan Rekening Bersama Dana TTM WK Rokan diatur dalam Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas, Himbara (Bank Mandiri, BNI dan BRI) dan PHR yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 22 April 2024. Rekening Bersama Dana TTM WK Rokan telah dibuka pada tanggal 23 April 2024 (BRI) dan 24 April 2024 (Bank Mandiri & BNI), senilai US$220,000,000.00 pada masing-masing rekening.

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat perolehan jasa giro, PPh dan penggunaan Dana TTM WK Rokan dengan detail sebagai berikut:

(dalam USD)

No.	Rekening US$	Jasa Giro	Jasa Giro	PPh	Penggunaan	Saldo 31 Desember 2025
1.	BMRI	220,000,000.00	8,616,378.62	(1,522,419.94)	(9,613,566.00)	217,480,392.68
2.	BNI	220,000,000.00	8,870,406.04	(1,774,081.29)	(9,613,566.00)	217,482,758.75
3.	BRI	220,000,000.00	8,872,060.99	(1,773,686.44)	(9,613,566.00)	217,484,808.55
JUMLAH		**660,000,000.00**	**26,358,845.65**	**(5,070,187.67)**	**(28,840,698.00)**	**652,447,959.98**

Saldo Dana Dana Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) Wilayah Kerja Rokan TA 2025 disajikan dengan menggunakan kurs penutupan (JISDOR) per 31 Desember 2025 (1 USD = Rp16.720,00).

c. Dana *Equipment & Services* (Dana E & S)

Dana Equipment & Services merupakan dana yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke rekening SKK MIgas Dana Equipment & Services, sebagai pemenuhan kewajiban *Production Sharing Contract* (PSC) - Bab VIII dalam sejumlah nilai tertentu, yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan khusus atau untuk kegiatan eksplorasi dan produksi industry hulu migas Indonesia atau untuk kegiatan khusus eksplorasi dan produksi industri *Coalbed Methane*. Pemenuhan kewajiban ini tidak diperhitungkan sebagai biaya operasi/*non cost recoverable*.

Dasar hukum Dana E&S adalah *Production Sharing Contract* ("PSC") Bab VIII Bonus dan Bantuan Pasal 8.2. Berikut ini contoh klausul BAB VIII, terkait Kewajibanf Equipment & Services, yang dikutip dari salah satu PSC.

"*CONTRACTOR shall within thirty (30) days after GOI's request in writing during the first Contract Year provide GOI with equipment and/or services in an amount not exceeding the sum of United States Dollars (US$), for special purposes/for exploration and production activities in Indonesia's petroleum industry/for exploration and production activities special purposes in Indonesia's Coalbed Methane industry*".

Masing-masing PSC kemungkinan memiliki klausul/narasi yang berbeda.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-1/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 hal Penyampaian Penyampaian Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan atas Dana *Equipment & Services* (Dana E & S), pencatatan dan pelaporan Dana E&S dilakukan secara periodik, dengan menyajikan saldonya pada tanggal pelaporan, dan tidak menyajikan secara transaksional. Saldo

Dana E&S TA 2025 disajikan dengan menggunakan kurs penutupan (JISDOR) per 31 Desember 2025 (1 USD = Rp16.720,00).

2) Satker Layanan Pos Universal, Kemenkominfo

Dampak Pembentukan Kabinet Merah Putih

Pembentukan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 berdampak pada pergeseran tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur yaitu menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang mengikuti perubahan nomenklatur tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang membawahi Direktorat Pos pada Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai entitas penanggung jawab secara operasional atas kegiatan Pengelolaan Subsidi Operasional LPU yang mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan Belanja Lain-Lain (BA 999.08), mengalami perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang membawahi Direktorat Pos dan Penyiaran.

Perubahan Nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informat Pengelola Belanja Lain-Lain:

No.	Entitas	Semula	Menjadi
1.	Kementerian/Lembaga	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Digital
2.	Satuan Kerja	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
3.	Unit Kerja	Direktorat Pos	Direktorat Pos dan Penyiaran

Sehubungan dengan telah terjadi perubahan nomenklatur tersebut, perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap DIPA, peraturan, maupun ketentuan atas Program Pengelolaan Belanja Lainnya kegiatan Pengelolaan Bantuan/Subsidi Operasional LPU di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Subsidi Operasional Layanan Pos Universal (LPU) mulai dianggarkan melalui BA BUN 999.08 pada tahun 2013 melalui mekanisme SABA. Mulai tahun 2014, kegiatan tersebut dianggarkan melalui DIPA BA BUN 999.08. Pada Tahun Anggaran 2025, program pengelolaan Subsidi Operasional LPU dianggarkan melalui DIPA Nomor SP DIPA-999.08.1.984526/2025 tanggal 24 Desember 2024, dengan revisi DIPA tertanggal 12 September 2025 Bagian Anggaran 999.08 Pengelolaan Belanja Lain-Lain dengan kode satker 984526.

Bantuan Operasional LPU digunakan untuk membiayai Kantor LPU sesuai kriteria yang terdapat pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 442 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perencanaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pengawasan Subsidi Operasional Layanan Pos Universal. Dana Subsidi Operasional LPU diberikan berdasarkan metode pelaporan realisasi pendapatan dan biaya

penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penetapan Kantor Layanan Pos Universal dalam Rangka Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun 2025, jumlah Kantor LPU pada tahun 2025 ini telah ditetapkan sebanyak 2.460 kantor.

3) Satker BPKPBPB Batam

Satker Belanja Lain-Lain Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun mengalami perubahan kode satker yaitu yang semula 984422 (Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun) menjadi 984423 (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam). Perubahan kode satker tersebut terjadi berdasarkan ketentuan pada pasal 108 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta mengacu pada Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S3532/AG/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Usulan Penetapan dan Surat Kesediaan Ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08) TA 2014.

Nilai Aset dan Kewajiban yang berada pada satker 984423 sama dengan satker 984422 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) dari Tahun 2014 hingga kini.

Pengungkapan penambahan aset

Mutasi tambah sebesar Rp73.006.391.000,00 merupakan koreksi atas sepuluh bidang tanah yang bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota/Kabupaten setempat dan Masyarakat yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Selain itu, terdapat aset yang bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota/Kabupaten setempat dan Masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan jalan di kawasan Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang berdasarkan dokumen Berita Acara Hibah atau Berita Acara Serah Terima tanah yang telah mencantumkan lokasi dan luas tanah, namun beberapa dokumen belum mencantumkan nilai perolehan atas tanah. Jumlah aset Tanah yang dikuasai BP Kawasan sebanyak 68 aset tanah dan 1 aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, namun belum disajikan di neraca dengan perincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah Aset	Nilai
1.	Tanah	56	550.794.822.837,52
		12	Belum ada nilai
2.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	32.248.183.404,00
Jumlah		**69**	**583.043.006.241,52**

Rincian Daftar Aset Hibah dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Masyarakat dan Pihak Ketiga kepada BP KPBPB (Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang) yang belum disajikan pada Neraca LKBUN per 31 Desember 2025 pada Lampiran LDCPL12.

4) Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Tidak terdapat temuan pemeriksaan BPK yang memerlukan tindak lanjut.

Sehubungan dengan telah selesainya kewajiban pembayaran denda PT Pos Indonesia (Persero) kepada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua berdasarkan Hasil Kesepakatan Koordinasi Tindaklanjut Atas

Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal 25 April 2024 (Undangan nomor UND-137/PB.7/2024) diantara Direktur Sistem Perbendaharaan, Inspektur III Itjen Kementerian Keuangan, SVP Enterprise Business PT Pos Indonesia (Persero), dan SVP Financial Operation PT Pos Indonesia (Persero) dan Perjanjian Komitmen Pembayaran Denda Nomor: PERJ- 001/999292/2024 dan Nomor : 780/REG I/ADM PENJUALAN/4/0524 tanggal 13 Mei 2024 dengan nilai total Rp16.094.173.971.

Maka Perjanjian Komitmen Pembayaran Denda dimaksud dinyatakan ditutup dan kewajiban di dalamnya dinyatakan lunas (tercantum pada Surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Nomor S-1114/WPB.34/2025 tanggal 26 Mei 2025).

5) Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua Barat pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

   a) Saldo Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 (*Audited*) menyajikan nilai nihil atau sebesar Rp0,00. Kondisi ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan saldo pada Laporan Keuangan Periode Tahun 2024 (*Audited*), di mana pada periode sebelumnya masih terdapat kewajiban atas pekerjaan yang belum terselesaikan pembayarannya. Penurunan ini mencerminkan bahwa seluruh komitmen belanja kepada pihak ketiga yang telah ditagihkan pada tahun berjalan telah diselesaikan pembayarannya sepenuhnya melalui mekanisme pencairan dana yang berlaku. Ketiadaan saldo utang pada akhir tahun 2025 tersebut utamanya disebabkan oleh belum adanya tagihan atas pekerjaan Output Antar Baris (OAB) yang disampaikan oleh penyedia jasa kepada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat hingga posisi 31 Desember 2025. Hal ini sejalan dengan tidak adanya pembaruan data progres fisik maupun administratif terkait kegiatan OAB Tahun Anggaran 2025 yang dapat diakui sebagai beban yang masih harus dibayar (*accrued expenditures*) pada akhir periode. Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban hukum maupun finansial yang perlu dicatatkan dalam neraca pada penutupan tahun anggaran ini.

   b) Atas kontrak kegiatan OAB ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025, hingga menjelang akhir tahun, penyaluran beras ASN Tahun 2025 belum dapat dilakukan seluruhnya yang disebabkan oleh beberapa kendala yang di luar kendali operator diantaranya: (a) keterlambatan penyampaian DO Beras dari Pemda kepada PT Bulog dan PT Irian Bhakti Papua selaku operator penyaluran beras Tahun 2024 dan (b) keterlambatan sarana angkutan terjadwal toll laut, sesuai dengan Surat Direktur Perniagaan PT Irian Bhakti Papua Nomor 116/000/XII/2025 Tanggal 13 Desember 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Distribusi Beras ASN Papua Barat dan Papua Barat Daya. Atas permohonan tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat melalui Surat PPK Nomor S019/WPB.33/999976/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan OAB Pegawai ASN di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Tahun 2025 melewati batas akhir tahun anggaran 2025. Sesuai dengan kebijakan pemerintah atas langkah-langkah akhir TA 2025, maka atas kontrak penyaluran beras Tahun 2025 yang belum terbayarkan dilakukan melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Transaksi RPATA Tahun 2025 dengan nilai total sebesar Rp5.845.139.440,00 dilakukan melalui 2 termin transaksi pengisian RPATA dengan rincian Termin I sebesar Rp3.295.139.440,00 dengan Nomor SP2D 259990302024209 dan Termin II sebesar Rp2.550.000.000,00 dengan Nomor SP2D 259990302024085.

   c) Menunjuk Surat Keputusan KPA Satker Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat Nomor KEP-001/WPB.33/999976/2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan

dan Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat untuk Kegiatan Ongkos Angkut Beras ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya (BA 999.08.999976) Tahun Anggaran 2025.

d) Mulai tahun anggaran 2025, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat mengimplementasikan kebijakan pemberian uang muka kerja kepada operator dalam pelaksanaan kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB). Langkah strategis ini diambil guna mendukung kelancaran operasional dan memacu percepatan distribusi beras, seiring dengan mekanisme pengendalian yang semakin kuat serta kejelasan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap efektivitas distribusi di lapangan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Penerapan uang muka kerja ini merupakan perubahan kebijakan dibandingkan periode-periode sebelumnya, termasuk tahun 2024, di mana pemberian uang muka tidak dilakukan demi penguatan aspek pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan sistem pengendalian internal yang telah ditingkatkan pada tahun berjalan, pemberian uang muka kini dapat dilaksanakan tanpa mengesampingkan aspek risiko, sehingga tercipta keseimbangan antara percepatan kinerja pelayanan dan tertib administrasi keuangan negara.

e) Berdasarkan Perjanjian Komitmen Pembayaran Denda antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: PERJ-001/999976/2024 dan Nomor: 681/Penjualan-KCU Jap/ASN/0524 tanggal 13 Mei 2024, PT Pos Indonesia berkomitmen untuk membayar denda kepada negara sebesar dua kali lipat dari selisih harga antara nilai dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor terakhir, yaitu sebesar Rp10.578.245.360,00. Dari jumlah tersebut, telah diperhitungkan pembayaran sebelumnya sebesar Rp5.367.108.610,00, sehingga sisa kekurangan pembayaran denda menjadi Rp5.211.136.750,00. Pembayaran sisa denda dilakukan secara bertahap melalui skema cicilan selama 12 (dua belas) bulan secara pro-rata, masingmasing sebesar Rp434.261.396,00 per bulan, dimulai sejak Mei 2024. Dengan skema tersebut, pada tahun 2025 masih terdapat pelunasan denda oleh PT Pos Indonesia yang berlangsung hingga bulan April 2025.

f) Mulai Tahun Anggaran 2025, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat melakukan perbaikan pengalokasian akun dengan mencatat beban kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) pada akun Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua (581412). Pengalihan ini merupakan langkah strategis dalam upaya perbaikan klasifikasi akun atas transaksi-transaksi serupa di masa lalu, guna memastikan pelaporan keuangan yang lebih presisi dan sesuai dengan substansi ekonominya. Penggunaan akun yang lebih spesifik ini menggantikan penggunaan akun Beban Lain-lain (581919) yang digunakan pada periode-periode sebelumnya hingga Tahun Anggaran 2024. Melalui penerapan akun 581412 di tahun berjalan, diharapkan penyajian beban dalam laporan keuangan menjadi lebih informatif, akurat, dan memenuhi prinsip kesesuaian klasifikasi akun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

6) Satker Pengelola Dana Kompensasi pada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Dan Kekayaan Negara Dipisahkan

Dalam Konferensi Pers terkait Paket Kebijakan Ekonomi pada 16 Desember 2024, Menko Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa untuk menjaga kesejahteraan masyarakat atas dampak pemberlakuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi di mana salah satunya berupa pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen periode Januari s.d. Februari 2025 bagi pelanggan rumah tangga dengan daya

listrik hingga 2.200 VA. Kebijakan pemberian diskon biaya listrik tersebut diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Penyajian beban dan kewajiban atas Kebijakan Diskon Biaya Listrik Tahun 2025 dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2025 dilakukan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Belanja Lain-Lain (999.08). Pencatatan utang Pemerintah atas pelaksanaan kebijakan Diskon Biaya Listrik Tahun 2025 sebesar Rp13.609.498.314.337,00 dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Satuan Kerja Direktorat Jenderal Anggaran (999510 – Dana Kompensasi) ini bersifat sementara sampai dengan ditetapkan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran Diskon Biaya Listrik tahun 2025.

7) Satker ICSID (*International Center For Settlement of Investment Dispute*) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263 Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya Dalam Rangka Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Atas Penanganan Perkara di ICSID Pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kode Satuan Kerja: 999355), yang antara lain menetapkan Kepala Bagian Advokasi IV sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Bagian Advokasi I sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (Plt. KPA).

Atas Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp3.571.631.550,00 telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian sebagaimana Surat Kepala Biro Advokasi Nomor S50/SJ.4/2025 kepada Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran BUN tanggal 25 Juni 2025.

8) Satker Istana Kepresidenan Jakarta, Sekretariat Presiden

DIPA BUN Istana Kepresidenan Jakarta (999.08.964250) Tahun Anggaran 2025 diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2024 dengan Nomor: SP DIPA– 999.08.1.962450/2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp139.370.863.000,00 untuk Banmas. Pada tanggal 19 Agustus 2025, terdapat penambahan anggaran sesuai dengan DIPA Revisi Ke-03 sehingga alokasi anggaran menjadi sebesar Rp367.301.780.000,00. Pada tanggal 11 Desember 2025, terdapat penambahan anggaran kembali sesuai DIPA Revisi Ke-04 sehingga alokasi anggaran menjadi sebesar Rp1.153.101.780.000,00.

Satker Istana Kepresidenan Jakarta telah melakukan penyetoran pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp5.000.000.000,00 ke Kas Negara pada tanggal 31 Januari 2025 dengan nomor NTPN: 64E1C55DFIAPSFMF.

Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 283 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden Pada Satuan Kerja Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018, mengangkat Sdr. Tatang, S.A.P. sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden pada Satuan Kerja Istana Kepresidenan Jakarta, Sekretariat Presiden.Telah disampaikan Laporan Keuangan Likuidasi Satker Distribusi dan Cadangan Pangan BA BUN (999801) tanggal 10 September 2024 melalui surat Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan selaku KPA, Nomor 20/KU.01.01/B.3/09/2024.

9) Satker Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Negara

DIPA BUN Sekretariat Wakil Presiden (999.08) Tahun Anggaran 2025 diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2024 dengan Nomor SP DIPA-999.08.1.999465/2025 dengan alokasi dana sebesar

Rp18.853.323.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga Rupiah) untuk Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden.

Pada 25 Juni 2025 diterbitkan Revisi I DIPA BUN Sekretariat Wakil Presiden (999.08) sehingga alokasi anggaran bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden Tahun 2025 menjadi Rp61.020.914.000,00 (enam puluh satu milyar dua puluh juta sembilan ratus empat belas ribu Rupiah).

Pada 14 Desember 2025 diterbitkan Revisi II DIPA BUN Sekretariat Wakil Presiden (999.08) sehingga alokasi anggaran bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden Tahun 2025 menjadi Rp69.311.993.000,00 (enam puluh Sembilan milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah).

Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Pengelolaan Belanja Lainnya Satuan Kerja Sekretariat Wakil Presiden pada tanggal 10 Maret 2025 dan mengangkat Sdr. Triana Rochmatun Handayani, S.E. sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengelolaan Belanja Lainnya Satuan Kerja Sekretariat Wakil Presiden.

10) Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kementerian Pertanian

Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA 999.08.969380.KP merupakan satker inaktif, tidak lagi mendapat alokasi anggaran sejak tahun 2013.

D.3.8. BA 999.09

1. Entitas UAPBUN PBL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-296/PB/2022 Tentang Perubahan Unit Badan Lainnya yang tercantum dalam daftar Unit Badan Lainnya pada sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Pada tahun 2022 terdapat penambahan 3 (tiga) UBL baru, pengurangan 3 (tiga) UBL, dan penyesuaian 3 (tiga) UBL dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan 3 (tiga) UBL baru, yaitu:
   a. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
   b. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
   c. Kantor Staf Presiden
2. Pengurangan 3 (tiga) UBL, yaitu:
   a. Lembaga Perlindungan Saksi Korban
   b. Bapertarum
   c. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
3. Penyesuaian 3 (tiga) UBL, yaitu:
   a. Badan Restorasi Gambut menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
   b. Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
   c. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal menjadi Badan Pengelola Masjid Istiqlal

Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2025 *Audited*, terhadap 70 (tujuh puluh) UBL tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 62 (enam puluh dua) UBL.
2. UBL Bukan Satker sebanyak 8 (delapan) UBL.

Untuk SKK Migas dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN/berakhir kelembagaannya yaitu:

1. Badan Pertimbangan Kepegawaian
   Pada Tahun 2021 Badan Pertimbangan Kepegawaian berganti menjadi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021.
2. Badan Promosi Pariwisata Indonesia
   Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.
3. Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM)
   Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-175/M/D-1/HK.03.00/04/2025 menyatakan bahwa kelembagaan BRGM telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut Mangrove. Selanjutnya, pelaksanaan tugas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dialihkan ke Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangan masing-masing.
4. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)
   Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) tidak mendapatkan alokasi Dana.
5. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
   Sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Komite Nasional Geopark Indonesia
   Komite Nasional Geopark Indonesia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.
7. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
   Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomor S-03/D.I.M.EKON/01/2017 tanggal 30 Januari 2020 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) ataupun alokasi Dana.
8. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
   Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.
9. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
   Sesuai Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka pengelolaan pada KASN dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
10. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
    Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, KKI dinyatakan bubar setelah terbentuk konsil dan majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.

11. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)
    Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, KTKI dinyatakan bubar setelah terbentuk konsil dan majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.
12. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
    Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.
13. Tim Pengembangan Vaksin COVID-19
    Masa kerja tim telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
14. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
    Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.
15. Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)
    Sampai dengan akhir tahun 2025, belum terdapat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan tim kerja LPN tahun 2025. Dengan demikian, LPN belum menerima dana APBN dan belum aktif menjalankan fungsinya.

2. Laporan Keuangan Badan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, UAPBUN PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Ikhtisar laporan Keuangan.

Rincian untuk Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya diuraikan dalam Lampiran LDCPL13, LDCPL14, LDCPL15.

Dalam Laporan Keuangan UAPBUN PBL Tahun 2025 *Audited,* sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-296/PB/2022, menyajikan ekuitas bersih atas beberapa Unit Badan Lainnya Bukan Satker sebagai berikut:

1. Otorita Asahan
2. Yayasan Gedung Veteran RI
3. Badan Amil Zakat Nasional
4. Badan Wakaf Indonesia
5. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
6. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
7. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terdapat satu Badan Lainnya yang sudah dilikuidasi yaitu Taman Mini Indonesia Indah sesuai dengan KMK 99/KM.6/2021 dan KMK 27/KM.6/KNL.0702/2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Sekretariat Negara.

D.3.9. BA 999.99

UAP BUN TK DJPb

A. Satker PFK

1. Saldo akhir utang menurut akrual sama dengan saldo akhir utang menurut kas. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: saldo akhir utang menurut akrual dipengaruhi oleh saldo awal utang menurut akrual ditambah dengan penerimaan PFK Pegawai, dikurangi pengeluaran PFK Pegawai, ditambah/ dikurangi saldo akhir piutang (menggambarkan potensi penerimaan kas yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan), serta dipengaruhi oleh koreksi utang.

   Sampai dengan Bulan Desember 2025, rincian saldo utang menurut akrual dan utang menurut kas adalah sebagai berikut:

   (dalam rupiah)

No.	Uraian	LK UAKPA	Neraca Percobaan Ledger Kas
1.	Saldo Awal Utang	809.372.413.024	809.372.413.024
2.	Mutasi Utang / Kas (81-82)	176.116.198.458	176.116.194.258
	Akun 81	-	42.501.370.484.908
	Akun 82	-	42.325.254.290.650
3.	**Saldo Akhir (1+2)**	985.488.611.482	985.488.607.282
4.	Koreksi Utang	-	-
5.	Piutang (*lih.* B.2)	-	-
	Saldo Akhir (3+4+5)	**985.488.611.482**	**985.488.607.282**

2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) Laporan Keuangan.

   Pada prinsipnya Satuan Kerja (440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menyusun Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai hanya meliputi Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional tidak diwajibkan terdapat dalam Laporan Keuangan dimaksud. Namun demikian, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyusunan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai Bulan Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Laporan Keuangan ini.

3. Penyajian Neraca Percobaan Basis Akrual dan Neraca Percobaan Basis Kas Laporan Keuangan.

   Penyajian dimaksudkan untuk memberikan keyakinan mengenai rincian saldo utang per 31 Desember 2025 dan memberikan informasi mengenai transaksi penerimaan setoran/potongan PFK Pegawai dan transaksi pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pegawai.

4. Penerimaan dana PFK untuk BP Tapera tercatat pada laporan keuangan karena sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan 212/PMK.05/2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, akun-akun terkait penerimaan BP Tapera sudah diaktifkan.

5. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

   Dalam rangka menyalurkan hasil penerimaan Dana PFK Pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-2/PB/PB.3/2026 Tanggal 8 Januari 2026 dan KEP-5/PB/PB.3/2026 Tanggal 27 Januari 2026 tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Lanjutan Kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Perum Bulog Berdasarkan Realisasi Penerimaan PFK Sampai Dengan Tanggal 31 Bulan Desember 2025.

Penerbitan SKP ini sejalan dengan BAB VI Penetapan SKP-PFK Lanjutan dan Pembayaran Dana PFK Pegawai atas SKP-PFK Lanjutan PMK Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 212/PMK.05/2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. Adapun realisasi pembayaran per badan penyelenggara adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Pihak Ketiga	Nilai Utang	Tagihan Sesuai SKP-PFK	Sisa
1	Perum Bulog	104.281.107	104.281.171	(64)
2	PT Taspen (Persero)	51.475.703.402	51.408.196.124	67.507.278
3	PT Asabri (Persero)	2.997.443.032	2.996.968.423	474.609
4	BP Tapera	380.534.360	-	380.534.360

Khusus untuk BPJS Kesehatan, dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Utang	Nilai Utang	Tagihan Sesuai SKP-PFK	Selisih
5	211111	52.947.061.698	32.607.916.718	20.339.144.980
	211112	-	-	-
	211116	-	-	-
	211117	781.245.431.595	375.177.963.291	406.067.468.304
	211119	96.327.795.112	14.274.182.663	82.053.612.449
	211121	10.356.976	7.428.589	2.928.387

B. Satker Pensiun

1. Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela. Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanja pensiun masih bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (a) UU Nomor 11 Tahun 1969.

   Undang-undang tersebut beserta regulasi turunannya mengamanatkan bahwa program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (*Defined Benefit*). Sedangkan mekanisme pendanaan yang digunakan adalah *pay as you go* yang dibiayai dari APBN. Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan *Pay As You Go* adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.

   Nilai kewajiban jangka panjang program pensiun per 31 Desember 2025 dihitung oleh Aktuaris Perusahaan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang ditunjuk dengan surat Menteri Keuangan nomor S-635/MK.3/2025 tanggal 6 Oktober 2025. Atas penunjukan tersebut, Akutaris Perusahaan sudah melakukan perhitungan kewajiban jangka panjang dan telah dilaporkan oleh

Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan. Besaran nilai kewajiban jangka Panjang program pensiun per 31 Desember 2025 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran nomor ND-138/AG.10/2026 hal Penyampaian Hasil Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah Tahun 2025 sebesar Rp3.316.705.123.919.520,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Peserta	PT Taspen	PT Asabri	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun
Pegawai aktif	1.231.831.106.310.940	267.462.039.434.185	1.499.293.145.745.125
pensiunan	1.547.284.585.211.260	270.127.392.963.135	1.817.411.978.174.395
Jumlah	**2.779.115.691.522.200**	**537.589.432.397.320**	**3.316.705.123.919.520**

Kewajiban jangka panjang Program Pensiun tahun 2025 dapat terbagi sebagai berikut:

a. Kewajiban terhadap pegawai aktif sebesar Rp1.499.293.145.745.125,00.

b. Kewajiban terhadap pensiunan sebesar Rp1.817.411.978.174.395,00.

Kewajiban jangka panjang Program Pensiun tahun 2025 tersebut juga dapat dikelompokan ke dalam kewajiban terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Pusat sebesar Rp2.378.836.527.938.970,00, yang terdiri dari:
   1) PT Taspen (Persero) sebesar Rp1.841.247.095.541.650,00.
   2) PT ASABRI (Persero) sebesar Rp537.589.432.397.320,00.
b. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Daerah sebesar Rp937.868.595.980.552,00.

2. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan. Akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

3. Berkaitan dengan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atau Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Kereta Api Indonesia / PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut:

   a. Perubahan Nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) yang semula Rp1.150.776.261.331,00 menjadi Rp1.144.246.105.908,00 sesuai Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Dephub pada PT KAI (Persero) untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 *Audited* dan 31 Desember 2024 *Audited*.

   b. Pada saat ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) dikelola terpisah dari AIP PNS. Dalam hal ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) akan disetorkan ke dalam AIP PNS pada saat program penyesuaian pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada lagi penerima pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yang berbunyi “Pada saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil.”

c. Sehubungan dengan poin b, maka nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) tidak masuk ke dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (kode satker 987361).

4. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-512/MK.02/2024 tanggal 11 Juni 2024 hal Persetujuan Metode dan Asumsi Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT Tahun 2024, metode dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan KMPMD Program THT adalah sebagai berikut:

Uraian	2024
Metode	GPV
Tingkat bunga	7,5%
Kenaikan gaji	Sesuai hasil studi perusahaan
Selisih usia pasangan	Data aktual
Selisih usia anak	Data aktual
Batas Usia	Data aktual
Laju Kematian	TMT 2023/TMA 2016
Laju Pengunduran Diri	TMT 2023/Sesuai hasil studi perusahaan
Laju Keuzuran	TMT 2023/Sesuai hasil studi perusahaan
Biaya	Sesuai hasil studi perusahaan
Inflasi	Data Aktual

UAP BUN TK DJPPR

Realisasi pembayaran pengelolaan dukungan *loss limit* per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan tidak terdapat alokasi anggaran atau DIPA pada tahun 2025. Hal tersebut karena berakhirnya penugasan pengelolaan dukungan *loss limit* kepada PT RIU per tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KM.8/2020 tentang Penugasan Kepada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Operasional Dukungan *Loss Limit* Terkait Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Perjanjian Kerja; dan
2. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Nomor PRJ-350/PR/2020 dan 00319/HK.01.01/01IndonesiaRe/09/2020 tentang Operasional Dukungan *Loss Limit* Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Sehubungan dengan berakhirnya penugasan dukungan *loss limit* atas penjaminan program PEN kepada PT RIU sebagaimana pada poin di atas, maka satuan kerja sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : 999 Bagian Anggaran BUN

Eselon I : 999.99 PPA BUN Pengelola Transaksi Khusus

UAPPAW/Kanwil : B996 UAPPAW UAP BUN TK DJPPR

Satuan Kerja/Satker : 999903 DJPPR

mulai tahun 2025 dan seterusnya tidak mendapat alokasi anggaran lagi dan satuan kerja dapat dinonaktifkan.

UAP BUN TK DJA

1. Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi (984572)

a. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Pada tahun 2025 terdapat peristiwa setelah tanggal neraca sebagai berikut:

1) Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP LKBUN 2024, pada tanggal 26 Januari 2026 dan 26 Februari 2026, Direktur Jenderal Anggaran melalui nota dinas nomor ND-36/AG/2026 dan ND-114/AG/2026 telah mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dari rekening migas ke rekening KUN untuk menindaklanjuti penyelesaian atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT tahun 2020, 2021, dan 2024 dengan total bagian pemerintah senilai USD59.721,15 dan USD2.334.918,29.

2) Dari total saldo utang DMO *Fee* sebesar USD69,846,920 atau Rp1.167.840.500.226,00 telah diselesaikan seluruhnya pada bulan Januari dan Februari 2026.

3) Dari saldo utang *underlifting* KKKS per 31 Desember 2025 sebesar USD993,583,109, telah dibayarkan sebesar USD168,105,133 pada bulan Januari tahun 2026 (*underlifting* Pertamina EP Cepu). Selain itu, DJA juga telah memproses pembayaran tagihan *underlifting* PT Pertamina Hulu Rokan sebesar USD238,294,265 pada bulan Mei 2026.

b. Ringkasan Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Kontrak Kerja Sama Tahun 2025

Penyusunan laporan keuangan tahun 2025 dilakukan berdasarkan PMK Nomor 115 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, maka pencatatan *lifting* dan penerimaan migas pada laporan keuangan ini mengikuti ketentuan klasifikasi PNBP SDA Migas dalam PMK Nomor 115 Tahun 2023.
Berikut ini adalah ringkasan hasil kegiatan usaha hulu migas dari kontrak kerja sama selama tahun 2025 (periode *lifting* Januari s.d. Desember) pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS):

		Jumlah
Lifting oil	Bbls	221,140,710.27
	BOPD	605,864.96
Lifting gas	MMBTU	2,008,788,183.38
	BBTUD	5,503.53
Price	USD	54.74
Oil	USD/ICP	68.94
Gas	USD/Harga Rata-Rata Tertimbang	8.39
Gross revenue	(USD 000)	30,544,170
First Tranche Petroleum	(USD 000)	2,954,703
		Jumlah
Total Recoverable	(USD 000)	8,436,225
Equity to be Split	(USD 000)	10,185,249
Government Share	(USD 000)	10,959,672
Lifting Pemerintah	(USD 000)	11,393,759
Net Under	(USD 000)	(434,087)

**) include NGL*
Data yang disampaikan merupakan data FQR *Cost Recovery* dan *Gross Split* Kuartal IV 2025 update per 28 April 2026

c. Dampak Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 jo. No. 121 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Penetapan HGBT diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang:

1) industri pupuk, 2) industri petrokimia, 3) industri oleochemical, 4) industri baja, 5) industri keramik, 6) industri kaca, 7) industri sarung tangan karet, serta 8) penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Penetapan HGBT dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor atau tarif penyaluran gas bumi, yang menyebabkan penurunan harga gas bumi di sejumlah KKKS yang memberlakukan HGBT.

Berdasarkan data resume rekapitulasi yang diperoleh dari SKK Migas dan BPMA, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas dan BPMA diketahui terdapat besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT dengan rincian:

1) Pada tahun 2025 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp39.590.477.695.196,00 dan Rp66.288.016.696. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp2.909.236.927.162,00 dan Rp1.603.660.266,00. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp5.537.573.362.917,00 dan Rp22.451.123.451,00. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp7.237.282.215.803,00 dan Rp24.004.969.388,00. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp23.906.385.189.315,00 dan Rp18.228.263.591,00.

2) Pada tahun 2024 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp43.836.298.588.038,00 dan Rp63.126.389.591,00. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp7.251.980.232.795,00 dan Rp1.616.322.920,00. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp13.509.705.487.059,00 dan Rp22.628.399.654,00. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp4.269.443.320.167,00 dan Rp22.752.551.699,00. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp18.805.169.548.017,00 dan Rp16.129.115.318,00.

3) Pada tahun 2023 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp38.681.435.809.060,00 dan Rp81.298.459.247,00. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp6.356.957.354.460,00 dan Rp3.458.340.691,00. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp11.362.912.854.107,00 dan Rp48.416.510.302,00. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp7.305.320.925.338,00 dan Rp3.135.779.299,00. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp13.656.244.675.155,00 dan Rp26.287.828.954,00.

4) Pada tahun 2022 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp52.228.049.220.107,00 dan

Rp151.131.951.406,00. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp9.523.533.983.284,00 dan Rp6.856.148.650,00. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp15.948.330.215.292,00 dan Rp95.985.566.897,00. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp3.075.963.489.095,00 dan Rp8.577.758.915,00. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp23.680.221.532.435,00 dan Rp39.712.476.945,00.

5) Pada tahun 2021 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp40.992.195.353.406,00 dan Rp133.384.528.710,00. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp6.408.926.449.236,00 dan Rp4.700.821.802,00. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp10.583.363.221.527,00 dan Rp65.811.152.672,00. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp6.131.465.924.649,00 dan Rp25.779.665.891,00. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp17.868.439.757.994,00 dan Rp37.092.888.344,00.

6) Pada tahun 2020 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp27.970.425.235.344,00 dan Rp200.129.371.792,00. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp2.461.609.746.916,00 dan Rp3.222.044.251,00. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp3.916.094.264.674,00 dan Rp25.591.368.636,00. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp5.204.357.297.105,00 dan Rp94.397.142.981,00. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp16.388.363.926.647,00 dan Rp76.918.815.925,00.

Pada tahun 2020 dan 2021, terdapat nilai kekurangan bagian KKKS PHE NSO yang tidak tertutupi oleh bagian pemerintah sebesar USD296,065.01 atau ekuivalen Rp4.175.997.001,00 untuk tahun 2020, dan sebesar USD1,053,990.75 atau ekuivalen Rp15.048.879.940,00 untuk tahun 2021. Namun demikian, pada tahun 2024 telah dilakukan rekonsiliasi hulu hilir periode 2020-2023 dan ditindaklanjuti dengan melakukan perhitungan kembali atas bagi hasil periode 2020, 2021 dan 2023, sehingga diperoleh bagian negara yang cukup untuk mengganti kekuarangan bagian KKKS dimaksud.

Selain itu, pada tahun 2020 terdapat nilai kekurangan bagian KKKS Medco E&P Malaka yang tidak tertutupi oleh bagian pemerintah senilai USD1,285,635.16 atau ekuivalen Rp18.133.883.933,00. Namun demikian, atas nilai tersebut pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan penyesuaian dari sisi harga dan/atau volume atas penjualan gas yang mengimplementasikan kebijakan HGBT sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas dan BPMA.

Dengan mengakumulasikan seluruh KKKS di bawah kewenangan SKK Migas dan BPMA, maka total nilai kewajiban pemerintah, penyesuaian HGBT, dan bagian negara akhir ditunjukkan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Rincian	2020	2021	2022	2023	2024	2025* (*Audited*)
(**1**) Bagian negara awal (sebelum HGBT)	28.170.554.607.136	41.125.579.882.116	52.379.181.171.513	38.762.734.268.307	43.899.424.977.630	39.656.765.711.892
(**2**) Kewajiban pemerintah terhadap Kontraktor	5.298.754.440.086	6.157.245.590.541	3.084.541.248.010	7.308.456.704.637	4.292.195.871.866	5.542.882.026.333
(**3**) Bagian negara setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah [**3 = 1 - 2**]	22.871.800.167.050	34.968.334.291.575	49.294.639.923.503	31.454.277.563.670	39.607.229.105.764	34.113.883.685.559
(**4**) Penyesuaian HGBT (*kept-whole* kontraktor + penurunan *entitlement* GOI akibat HGBT)	6.406.517.424.477	17.062.801.645.237	25.574.705.914.123	17.771.745.059.561	20.785.930.442.428	8.470.865.073.796
(**5**) Bagian negara akhir atau setelah HGBT [**5 = 3 - 4**]	16.465.282.742.573	17.905.532.646.338	23.719.934.009.380	13.682.532.504.109	18.821.298.663.336	25.643.018.611.763
(**6**) Proporsi penyesuaian bagian negara [**6 = 4 / 3**]	28,01%	48,80%	51,88%	56,50%	52,48%	24,83%
(**7**) Kekurangan Bagian Pendapatan KKKS yang Tidak Tertutupi dari *Keptwhole* **)	18.133.883.933	-	-	-	-	-
Total penyesuaian HGBT sejak 2020 s.d. tahun ybs:	**6.406.517.424.477**	**23,469,319,069,714**	**49,044,024,983,837**	**66,815,770,043,398**	**87,601,700,485,826**	**92.944.072.234.309**

*) Sebagian Data Penerimaan Bagian Negara berdasarkan FQR *Preliminary* Kuartal IV Tahun 2025

**) Pada tahun 2024, nilai kekurangan bagian pendapatan KKKS (Medco E&P Malaka) yang tidak tertutupi dari *keptwhole* tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyesuaian dari sisi harga dan/atau volume atas penjualan gas yang mengimplementasikan kebijakan HGBT sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku

Lebih lanjut, sejalan dengan ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, SKK Migas, BPMA, serta Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Migas melakukan rekonsiliasi hulu-hilir atas implementasi HGBT. Berdasarkan data SKK Migas dan BPMA, diketahui bahwa terdapat penerimaan bagian negara atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2023 sebesar USD255,305,550.

(dalam USD)

SKK Migas	Total Hasil Rekon	Penyelesaian 2022	Penyelesaian 2023	Penyelesaian 2024	Total Penyelesaian	%	*Outstanding*
2020	51.950.364	-	45.903.905	4.741.341	50.645.246	97,49	1.305.118
2021	80.434.950	6.167.215	69.121.549	4.015.067	79.303.831	98,59	1.131.119
2022	64.300.968	-	54.304.427	7.053.859	61.358.286	95,42	2.942.682
2023	58.375.256	-	-	55.025.108	55.025.108	94,26	3.350.148
Subtotal	**255.061.538**	**6.167.215**	**169.329.881**	**70.835.375**	**246.332.471**	**96,58**	**8.729.067**

(dalam USD)

BPMA	Total Hasil Rekon	Penyelesaian 2022	Penyelesaian 2023	Penyelesaian 2024	Total Penyelesaian	%
2020	95.257	-	-	95.257	95.257	100
2021	133.569	-	18.742	114.827	133.569	100
2022	13.592	-	4.109	9.483	13.592	100

BPMA	Total Hasil Rekon	Penyelesaian 2022	Penyelesaian 2023	Penyelesaian 2024	Total Penyelesaian	%
2023	1.594	-	-	1.594	1.594	100
Subtotal	**244.012**	**-**	**22.851**	**221.161**	**244.012**	**100**
Subtotal SKK+BPMA	**255.305.550**	**6.167.215**	**169.352.732**	**71.056.536**	**246.576.482**	**96,58**

Terhadap nilai penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT untuk KKKS yang berada di bawah kewenangan SKK Migas dan BPMA telah dilakukan penyelesaian sebesar USD6,167,215 pada tahun 2022, USD169,352,732 pada tahun 2023, dan USD71,056,636 pada tahun 2024. Nilai penyelesaian 2023 telah diterima pada rekening kas umum negara (RKUN) pada tahun 2023. Sedangkan atas penyelesaian tahun 2022 dan 2024 sebesar USD77,223,751 telah dipindahbukukan pada RKUN sebagaimana surat Direktur Jenderal Anggaran nomor ND-362/AG/2025 pada tanggal 16 Juli 2025. Dengan demikian, penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu hilir HGBT yang telah diterima di dalam RKUN mencapai USD246,576,483 atau 96,58 persen dari total penerimaan bagian negara atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2023.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran, sampai dengan 2025 terdapat penyelesaian atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2023 sebesar USD8,729,147. Sehingga, diperoleh *outstanding* hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2023 per 30 September 2025 sebesar minus USD80 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Nilai minus USD80 berasal dari kelebihan bayar atas piutang rekonsiliasi hulu-hilir tahun 2021 dengan *invoice* nomor D5221212-HBGT2021 tanggal 21 Desember 2022 senilai USD80. Atas kelebihan bayar tersebut, tidak dilakukan pemindahbukukan ke RKUN terlebih dahulu sampai dengan SKK Migas memperoleh konfirmasi dari KKKS terkait; dan
2) Nilai *outstanding* telah memperhitungkan *outstanding* piutang rekonsiliasi hulu-hilir tahun 2020 untuk *invoice* bernomor IAE/3B/2024 tanggal 1 April 2024 senilai USD4,700 yang telah dilakukan *adjustment* melalui penerbitan *credit note* dengan nomor *invoice* IAE/3/2024/CN tanggal 1 April 2024 senilai USD4,700.

Berkenaan dengan penjelasan tersebut, telah dilakukan pemindahbukuan senilai USD8,729,067 melalui nota dinas Direktur Jenderal Anggaran nomor ND-640/AG/2025 tanggal 22 Oktober 2025. Dengan pelaksanaan pemindahbukuan tersebut, maka atas piutang rekonsiliasi hulu-hilir tahun 2020 s.d. 2023 yang telah ditagihkan, seluruhnya telah diselesaikan dan dipindahbukukan ke dalam RKUN.

Lebih lanjut, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP LKBUN 2024, telah dilakukan pemindahbukuan hasil rekonsiliasi hulu-hilir secara berkala. Melalui nota dinas Direktur Jenderal Anggaran Nomor ND-890/AG/2025 tanggal 30 Desember 2025, hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT tahun 2020-2024 yang ditagihkan sepanjang tahun 2025 telah dipindahbukukan ke dalam RKUN senilai USD81,234,939.87.

Skema penyelesaian atas transaksi yang timbul dari penyesuaian pengurangan penerimaan bagian negara adalah dengan diperhitungkan melalui mekanisme bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja, sehingga transaksi ini tidak tersaji dalam Laporan A0 yang diterima DJA dari SKK Migas dan BPMA (pada Laporan A0 hanya terdapat informasi terkait transaksi yang terdampak oleh kebijakan HGBT pada kolom keterangan). Di sisi lain, berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 61 Tahun 2020 sebagaimana telah dicabut dan digantikan oleh PMK No. 115 Tahun 2023 pada Modul Petunjuk Teknis Akuntansi Umum Bab VI Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan, Pendapatan PNBP Migas-Laporan Operasional dicatat berdasarkan dokumen sumber Laporan Pengiriman Migas

Bagian Negara (A0). Mengingat hal tersebut, maka pencatatan pendapatan telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

Berdasarkan forum *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu serta Dampaknya Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan surat undangan Auditor Utama Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 73/S/XV/03/2022 tanggal 28 Maret 2022, Pemerintah telah menyampaikan pandangan bahwa implementasi kebijakan HGBT mengakibatkan penyesuaian atas penerimaan bagian negara, termasuk adanya pengurangan bagian kontraktor yang ditanggung oleh Negara belum dapat diakui sebagai beban tersendiri. Akan menjadi terlalu dini untuk pengakuan beban tersendiri karena masih diperhitungkan dalam formula bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor.

Di samping itu, berdasarkan PMK No. 61 Tahun 2020 sebagaimana telah dicabut dan digantikan oleh PMK No. 115 Tahun 2023 pada Modul Petunjuk Teknis Akuntansi Umum Bab VII Petunjuk Teknis Akuntansi Beban disebutkan bahwa Beban pihak ketiga Migas dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat tagihan atau dokumen penetapan lainnya. Dalam hal ini, tidak terdapat tagihan kepada Pemerintah atas provisional *entitlement* yang dilakukan secara bulanan. Dalam mengimplementasikan penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu, SKK Migas mengacu pada ketentuan KEP-0053/SKKMA0000/2020/S9 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Bagi Hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama terhadap Penurunan Harga Gas Bumi melalui Mekanisme Perhitungan Provisional *Entitlement* dan Final *Entitlement*. Dengan demikian, tidak ada dasar pengukuran dan pengakuan beban bagi keperluan pencatatan Pemerintah atas provisional layana *entitlement* dimaksud.

Oleh karena itu, untuk penyajian wajar dan penyajian secara lengkap dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing entitas saat ini, dampak atas kebijakan HGBT diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan menyajikan data perbandingan antara nilai perhitungan pendapatan bagian pemerintah dengan bagian KKKS berdasarkan penetapan harga normal (sebelum penyesuaian) dan harga penyesuaian (kebijakan HGBT) sebagaimana penyajian tersebut di atas.

2. Satuan Kerja PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Setoran Lainnya

Sesuai dengan Pasal 22A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara, Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian Sisa Surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir.

Melalui surat nomor S-901/MK.03/2025 tentang Permohonan Penyetoran Sebagian Sisa Surplus Sementara Bank Indonesia Tahun 2025, Menteri Keuangan mengajukan permohonan penyetoran sebagian sisa surplus. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Bank Indonesia (BI) telah menyetorkan sebagian sisa surplus senilai Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah). Pemerintah mencatat dana tersebut sebagai kewajiban dalam bentuk pendapatan diterima di muka. Pengakuan sebagai pendapatan pemerintah baru akan dilakukan setelah Laporan Keuangan Audit BI Tahun 2025 secara resmi menyatakan adanya sisa surplus yang menjadi hak pemerintah.

UAP BUN TK DJPK

1. Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Penyetoran Pajak Rokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, khususnya pasal 10, Menteri Keuangan menetapkan:

a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN penerimaan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Rokok,
b. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai KPA BUN penerimaan dan pemotongan Pajak Rokok, dan
c. Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer sebagai sebagai KPA BUN penyetoran Pajak Rokok.

Salah satu tugas dari KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas penerimaan dan penyetoran pajak rokok kepada PPA BUN penerimaan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Rokok dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Sehubungan dengan perubahan tugas, fungsi, dan nomenklatur unit kerja pada DJPK sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan selaku PA BUN menetapkan Direktur Sistem Perimbangan Keuangan sebagai KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok. Penetapan dimaksud diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyetoran Pajak Rokok.

2. Tindak Lanjut atas Temuan BPK

Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang adanya perbedaan data penerimaan Pajak Rokok tahun 2015 menurut DJBC (SAC-S) sebesar Rp12.254.041.168.540,00 dan menurut DJPB (SPAN) sebesar Rp13.953.934.936.936,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp1.699.893.768.396,00), telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan antara DJPK, DJPB, DJBC dan Itjen. Kemudian disepakati akan dilakukan penelusuran perbedaan data tersebut dengan mengacu pada NTPN. Selanjutnya melalui surat DJPK nomor S-17/PK.3/2017 tanggal 14 Februari 2017 hal Permintaan Penjelasan Data Pajak Rokok TA 2015 dan 2016 yang telah ditindaklanjuti dengan surat Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai nomor S-552/BC.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 hal Penyampaian hasil Rekonsiliasi Data Pajak Rokok Tahun 2015 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. DJBC telah mengirimkan surat nomor S-304/BC.04/2017 tanggal 31 Juli 2017 hal Permintaan Penjelasan Data Pajak Rokok tahun 2015 kepada beberapa KPPBC yang menangani Pajak Rokok.
b. DJBC telah melakukan rekonsiliasi Pajak Rokok tahun 2015 kepada beberapa KPPBC secara langsung dengan mendatangi kantor tersebut serta melakukan wawancara dengan pegawai yang menangani Pajak Rokok di kantor tersebut.
c. Didapatkan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:
    1) Dari 124 NTPN yang ada pada aplikasi SPAN namun tidak ada dalam aplikasi SAC-S telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 110 NTPN.
    2) Dari 21 NTPN yang ada pada aplikasi SACS namun tidak ada dalam aplikasi SPAN telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 21 NTPN.

3) Dari 24 NTPN yang memiliki nilai setoran yang sama dengan frekuensi penyetoran pada tanggal penyetoran yang sama lebih dari 1 kali telah terkonfirmasi sebanyak 24 NTPN.
4) Dari 13 data pajak rokok yang memiliki NTPN yang sama tetapi nominal penyetorannya berbeda telah terkonfirmasi sebanyak 13 data.
5) Dari 6 transaksi ganda pajak rokok yang dan memiliki perbedaan pada detail transaksinya telah terkonfirmasi sebanyak 1 transaksi.

d. Terdapat kendala dalam pencarian data pajak rokok dikarenakan penelusuran data hanya dari nama penyetor, tidak menyebutkan nama KPPBC-nya. Hal tersebut mengakibatkan data pajak rokok tidak ditemukan.
e. Data pajak rokok yang belum ditemukan masih dalam proses pencarian dan menunggu konfirmasi dari KPPBC terkait.

Pada Semester I TA 2018, telah dilakukan pembahasan bersama antara DJPK, DJPB, DJBC, dan Itjen Kemenkeu pada tanggal 23 Mei 2018 di Ruang Rapat II, Gedung Papua Lantai 4, DJBC sesuai dengan undangan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai nomor UND-148/BC.04/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Undangan Rapat Pembahasan dan Penelahaan Bersama. Pada rapat tersebut telah disimpulkan bahwa dari 17 transaksi Pajak Rokok yang belum ditemukan sampai akhir tahun 2017, telah ditemukan dokumen sumber dari 6 transaksi tersebut. Sehingga total sisa selisih data tahun 2015 adalah sebanyak 11 transaksi dengan jumlah pajak rokok sebesar Rp 22.705.652.400,00. Untuk transaksi yang belum ditemukan akan dilakukan konfirmasi ke KPPBC/Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nomor ND-69/BC.04/2019 tanggal 25 Januari 2019 hal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekonsiliasi Data Pajak Rokok Tahun 2015 dapat disampaikan bahwa:

1) DJBC telah melakukan rekonsiliasi Pajak Rokok Tahun 2015 dengan meminta penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) secara langsung (mendatangi kantor tersebut) ataupun tidak langsung.
2) Telah ditemukan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:
   a) Dari 25 NTPN yang ada pada aplikasi SPAN namun tidak ada dalam aplikasi SAC-S telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 24 NTPN dan tersisa 1 (satu) NTPN yang belum terkonfirmasi.
   b) Dari 9 (sembilan) NTPN yang ada pada aplikasi SAC-S namun tidak ada di aplikasi SPAN telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 9 (sembilan) NTPN.
   c) Dari 2 (dua) data pajak rokok yang memiliki NTPN berbeda antara aplikasi dan aplikasi SAC-S (indikasi salah input) namun nominal penyetorannya sama, telah terkonfirmasi sebanyak 2 (dua) data.
   d) Dari 5 (lima) transaksi pajak rokok yang *double entry* dan memiliki perbedaan pada detail transaksinya telah terkonfirmasi sebanyak 5 (lima) transaksi.
3) Bahwa tersisa 1 (satu) transaksi yang belum ditemukan dengan jumlah sebesar Rp21,59 juta atau sebesar 0,001 persen dari jumlah nilai temuan seluruhnya (Rp1,69 Triliun).

Dalam rangka penyelesaian adanya 1 (satu) sisa transaksi yang belum ditemukan tersebut, telah dilakukan beberapa kali pembahasan bersama antara DJPK dengan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan, namun belum bisa ditemukan penyelesaiannya.

3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Rokok, Wajib Pajak Rokok dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, mengatur bahwa pengembalian pembayaran Pajak Rokok yang dihitung berdasarkan (a) kelebihan pembayaran Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan, (b) pengembalian Cukai Rokok, atau (c) Pajak Rokok yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek Pajak Rokok yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok untuk poin a dan c dilakukan secara tunai. Adapun atas poin b dapat dilakukan secara tunai atau diperhitungkan pada pembayaran Pajak Rokok berikutnya.

Pengembalian Pajak Rokok secara tunai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Rokok, Wajib Pajak Rokok dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai;

b) Atas kelebihan pembayaran Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok;

c) Wajib Pajak Rokok mengajukan permohonan pengembalian Pajak Rokok secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan melampirkan Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok;

d) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan dan memeriksa jangka waktu berlakunya Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok;

e) Dalam hal hasil penelitian telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat permintaan kepada Kepala KPPN untuk menerbitkan SKTB dilampiri BPN;

f) Berdasarkan surat permintaan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai, Kepala KPPN menerbitkan SKTB.

g) Berdasarkan SKTB, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri dokumen permohonan dari Wajib Pajak Rokok, tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok, dan SKTB.

h) Berdasarkan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok, KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok menerbitkan SKP-KP2R, dan

i) Atas dasar SKP-KP2PR yang diterbitkan, pejabat perbendaharaan Penyetoran Pajak Rokok menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok melalui KPPN Jakarta II.

Pengembalian Pajak Rokok sampai dengan 31 Desember 2025 dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali kepada 6 (enam) wajib pajak dengan nilai sebesar Rp254.009.812,00. Pengembalian Pajak Rokok untuk masing-masing wajib pajak dirinci sebagaimana pada dalam tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	SKP-KP2R	Dokumen SPM		Nama Perusahaan	Nilai
		Tanggal	Nomor		
1	KEP-1/PK.5/2025	23/01/2025	82003A/999250/2025	PT Smoore Technology Indonesia	540.724
2	KEP-2/PK.5/2025	23/01/2025	82004A/999250/2025	PR Tebu	612.000

No.	SKP-KP2R	Dokumen SPM		Nama Perusahaan	Nilai
		Tanggal	Nomor		
3	KEP-14/PK.5/2025	16/05/2025	82014A/999250/2025	PT Smoore Technology Indonesia	115.483.368
4	KEP-15/PK.5/2025	16/05/2025	82015A/999250/2025	CV Sanar Jaya Barokah	1.566.600
5	KEP-21/PK.5/2025	28/07/2025	82032T/999250/2025	OTOK MM Sejahtera Mandiri	114.480
6	KEP-23/PK.5/2025	28/07/2025	82033T/999250/2025	PT Aroma Dinamis Sejahtera	47.852.640
7	KEP-31/PK.5/2025	11/12/2025	82054T/999250/2025	PR Umi Kulsum	87.840.000
Jumlah					**254.009.812**

4. Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Rokok

Rekonsiliasi dilaksanakan untuk menyesuaikan informasi catatan penerimaan Pajak Rokok yang disediakan oleh SPAN/MPN-DJPB dengan dokumen pendukung pemungutan yang tercatat dalam catatan penerimaan Pajak Rokok yang disediakan oleh SACS-DJBC. Sumber data yang digunakan antara lain berupa rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok yang disampaikan DJPB ke DJPK setiap triwulan serta data pendukung rincian transaksi yang diunduh melalui SPAN dan MPN dan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok yang disampaikan DJBC ke DJPK setiap bulan serta data pendukung rincian transaksi yang ditarik dari SACS.

Rekonsiliasi data penerimaan Pajak Rokok periode Semester I Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2025. Hasil Rekonsiliasi penerimaan Pajak Rokok ditemukan bahwa Total rekapitulasi penerimaan Pajak Rokok berdasarkan data SACS-DJBC adalah sebesar Rp10.367.112.959.374,00 sedangkan total rekapitulasi penerimaan Pajak Rokok berdasarkan data SPAN/MPN-DJPB sebesar Rp10.367.151.270.374,00 atau terdapat selisih sebesar Rp38.311.000,00. Menindaklanjuti perbedaan data dimaksud, Direktorat Jenderal Bea Cukai menyampaikan nota dinas Nomor ND-699/BC.04/2025 yang menyampaikan bahwa perbedaan data penerimaan Pajak Rokok terjadi akibat kekurangan pada saat penarikan data dari aplikasi billing yang dikelola oleh DJBC sehingga tidak terlaporkan dalam laporan bulanan penerimaan pajak rokok.

5. Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, dukungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dilaksanakan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari bagian masing-masing daerah atas Pajak Rokok. Adapun besaran kontribusi ditetapkan sebesar 37,5 persen dari realisasi penerimaan Pajak Rokok yang menjadi hak masing-masing daerah dan dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya. Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban dimaksud, maka dikenakan sanksi pemotongan Pajak Rokok sebesar selisih 37,5 persen dari rencana dan/atau realisasi penerimaan.

Selanjutnya untuk mengetahui kecukupan perencanaan dan penganggaran kontribusi program Jaminan Kesehatan, pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan. Hasil kesepakatan atas rekonsiliasi data dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditanda tangani oleh kepala daerah (atau pejabat yang menerima pendelegasian kewenangan) dan pejabat BPJS Kesehatan. Selanjutnya, Berita Acara Kesepakatan dikompilasi oleh Gubernur dan ditandatangani oleh Gubernur (atau pejabat yang menerima pendelegasian kewenangan) dan pejabat BPJS Kesehatan untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, paling lambat 31 Maret setiap tahun.

Mekanisme pemotongan penerimaan Pajak Rokok untuk disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan ketentuan:

1) dalam hal anggaran dan/atau realisasi kontribusi jaminan kesehatan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara kesepakatan sebesar 37,5 persen atau lebih, tidak dilakukan pemotongan Pajak Rokok,

2) dalam hal anggaran dan/atau realisasi kontribusi jaminan kesehatan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara kesepakatan kurang dari 37,5 persen, dilakukan pemotongan Pajak Rokok dilakukan sebesar selisih kurang dari 37,5 persen, atau

3) dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan, dikenakan pemotongan Pajak Rokok sebesar 37,5 persen.

Pemotongan atas penyetoran Pajak Rokok periode sampai dengan 31 Desember 2025 dilaksanakan sebesar Rp338.676.221.109,00. Pemotongan atas penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan atas penyetoran Pajak Rokok Tahun 2024, Triwulan I Tahun 2025, Triwulan II Tahun 2025, Triwulan III tahun 2025, dan Triwulan IV Tahun 2025. Rekapitulasi pemotongan Pajak Rokok sampai dengan 31 Desember dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Rincian Pemotongan	Nilai
1	Pemotongan atas penyetoran Pajak Rokok Periode 2024	97.667.430.105
2	Pemotongan atas penyetoran Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2025	94.868.286.206
3	Pemotongan atas penyetoran Pajak Rokok Triwulan II Tahun 2025	56.320.313.962
4	Pemotongan atas penyetoran Pajak Rokok Triwulan III Tahun 2025	44.044.203.256
5	Pemotongan atas penyetoran Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2025	45.775.987.580
Jumlah		**338.676.221.109**

Ringkasan besaran pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan masing-masing Provinsi dengan rincian sebagaimana pada Lampiran LDCPL16.

UAP BUN TK DJKN

A. ABMA/T

1. Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Capaian Kinerja Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Pada Tahun 2024

Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 16 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 7 (tujuh) aset diselesaikan sebagian status hukumnya.

Sampai dengan 31 Desember 2025, dari total ABMA/T sebanyak 1.020 dalam PMK Nomor 129 Tahun 2024, sebanyak 595 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 425 aset yang belum diselesaikan yang terdiri dari 94 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 331 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.

2. Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Aset Lainnya Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Dengan Pembayaran Kompensasi

Sejak awal pengelolaan ABMA/T sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat 107 Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T dengan cara dilepaskan kepada Pihak Ketiga dengan pembayaran kompensasi.

3. **Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Yang Telah Dilakukan Penilaian Namun Belum Diterbitkan Surat Persetujuan Menteri**

   Terhadap mekanisme penyelesaian ABMA/T dengan cara pelepasan penguasaan dari Negara kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah, didahului dengan penilaian dalam rangka mendapatkan Nilai Wajar sebagai dasar perhitungan besaran kompensasi yang akan dibayar oleh Pihak Ketiga. Adapun penetapan persetujuan Menteri atas besaran kompensasi terlebih dahulu dilengkapi dengan surat pernyataan Pihak Ketiga mengenai kesediaan/kesanggupan membayar kompensasi sebagai mitigasi risiko adanya wanprestasi. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang sudah dilakukan penilaian namun belum atau tidak diterbitkan surat persetujuan Menteri sebanyak 20.

4. **Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Aset Lainnya Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Dalam Proses Penilaian**

   Terhadap mekanisme penyelesaian ABMA/T dengan cara pelepasan penguasaan dari Negara kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah, didahului dengan penilaian dalam rangka mendapatkan Nilai Wajar sebagai dasar perhitungan besaran kompensasi yang akan dibayar oleh Pihak Ketiga. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang saat ini dalam proses dilakukan penilaian adalah nihil.

5. **Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Rapat Pembahasan**

   Sebagai upaya dalam penyelesaian ABMA/T, Tim Penyelesaian melaksanakan agenda rapat rutin pembahasan yang telah dilakukan selama dari awal tahun hingga 31 Desember 2025.

6. **Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Penambahan Jumlah Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021**

   Sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020, dijelaskan bahwa aset yang dilakukan penyelesaian tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Selanjutnya, dalam rangka mengakomodir penyelesaian ABMA/T agar dapat dilaksanakan secara tuntas dan menyeluruh, telah dilakukan perubahan terhadap PMK 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dengan menambahkan lima ABMA/T yang belum dieselesaikan secara keseluruhan (penyelesaian sebagian), yakni:

   a. Kantor Dispenda Kodya Dati II Bogor-TK/SD/SMP/SMA/ Akademi Management, berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat.
   b. SDN Waluyo I dan Perumahan/Pertokoan, berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
   c. SDN VII, IX, XIV dan XVI Karawang, Masyarakat, Pemerintah Daerah untuk fasilitas Jalan, berlokasi di Karawang, Jawa Barat.
   d. SMA Negeri Blitar, SD Negeri Sananwetan, berlokasi di Kotamadya Blitar, Jawa Timur.
   e. SD Negeri Jatituri 1 dan 3, Madrasah Aliyah Negeri, TK Pertiwi, SMP/SMA/SMEA Kodya Blitar, Perkoveri dan Makoramil, berlokasi di Kotamadya Blitar, Jawa Timur.

   Atas dasar tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, yang mengakibatkan terjadinya pemutakhiran data ABMA/T yang sebelumnya berjumlah 1.015 aset menjadi 1.020 aset.

7. Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Yang Masih Dalam Proses Penyelesaian Dengan Cara Pelepasan Kepada Pihak Ketiga

ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah nihil.

8. Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

a. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas kinerja/PDTT Terkait Pengelolaan ABMA/T Tahun 2007

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara dan/atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK-RI terkait pengelolaan ABMA/T, terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan atas Aset Bekas Milik Asing/Cina pada DJKN Tahun 2007 yang menyisakan 2 (dua) butir rekomendasi masih berstatus dalam proses tindak lanjut.

b. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 Terkait Pengelolaan ABMA/T

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Undang-Undang Bendahara Umum Negara Tahun 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 49.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 28 Mei 2022, terdapat temuan yang berkaitan dengan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dengan dua rekomendasi yang hingga saat ini masih dalam proses tindak lanjut.

B. Aset Eks Pertamina

1. Pemanfaatan BMN Oleh PT Pertamina C.Q. PT Pertamina EP

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, Menteri Keuangan menanggapi surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1105/C00000/2008-S0 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, Menteri Keuangan antara lain menyetujui skema sewa atas pemanfaatan aset-aset Eks KKKS Pertamina senilai Rp16,2 Triliun, dengan mengeluarkan objek sewa berupa lahan dan sumur yang dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak Wilayah Kerja dengan BP Migas (SKK Migas), sehingga pengakuan beban sewa sementara untuk Barang Milik Negara Eks Aset KKKS Hulu sebesar Rp16,2 Triliun adalah sebesar Rp9,472 Triliun. Untuk itu, perlu dilakukan pemilahan aset-aset eks KKKS Pertamina sebagai objek sewa dalam rangka penghitungan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Negara Eks Aset KKKS.

Menindaklanjuti skema sewa tersebut, melalui surat Nomor: S-155/KN.3/2014 tanggal 5 Juni 2014 perihal Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun 2013, Direktur KND meminta agar PT Pertamina (Persero) dan/atau Pertamina EP menyelesaikan pelunasan tunggakan hutang sewa BMN Eks Aset Pertamina.

Melalui surat Nomor: SRT-0365/SKKC0000/2014/S4 tanggal 29 September 2014 perihal Sewa BMN Eks Pertamina Rp3,03 Triliun, SKK Migas berkeberatan apabila pengembalian biaya sewa dilakukan dengan mekanisme *cost recovery*.

Menjawab surat dari SKK Migas, Menteri Keuangan kemudian bersurat kepada Kepala SKK Migas melalui surat Nomor: S-837/MK.06/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Piutang Sewa BMN oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP yang pada pokoknya menyampaikan bahwa SKK Migas memperhitungkan Biaya Sewa BMN sebagai biaya operasi PT Pertamina EP yang dapat dikembalikan sesuai ketentuan perundangan.

Pada tanggal 30 Desember 2014, SKK Migas melalui surat Nomor: SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 bersurat kepada Menteri Keuangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

Pada prinsipnya SKK Migas menyetujui sewa aset eks Pertamina dapat dibebankan sebagai biaya operasi (*cost recovery*) sepanjang aset tersebut digunakan dalam operasi hulu migas.

Sebagai tindak lanjut, SKK Migas telah meminta konfirmasi kepada PT Pertamina EP melalui surat Nomor: SRT-2498/SKKC2000/2014/S4 tanggal 17 Desember 2014 perihal Sewa Aset Eks Pertamina atas nilai aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP.

PT Pertamina EP melalui surat Nomor 127/EP4000/2014-S4 tanggal 24 Desember 2014 perihal Sewa Aset Eks Pertamina memberikan konfirmasi bahwa berdasarkan hasil inventarisasi aset eks BMN Pertamina yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks Pertamina, maka nilai aset BMN Eks Pertamina kategori *equipment*, bangunan dan aset lainnya yang saat ini digunakan oleh PT Pertamina EP sebesar Rp6.630.929.353.338,00.

Berdasarkan hal tersebut, maka SKK Migas meminta agar pengenaan sewa didasarkan pada hasil konfirmasi PT Pertamina EP sebagai Pengguna Barang Aset Eks KKKS Pertamina dengan nilai sebesar Rp6.630.929.353.338,00.

Hal ini sejalan juga dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat tripartit antara BPK, Kementerian Keuangan dan SKK Migas pada tanggal 13 November 2015 bahwa atas BMN Eks Aset Pertamina yang dikuasai oleh Pertamina EP dikenakan sewa dan perlu dibuat perjanjian sewa antara Pemerintah (DJKN) dengan PT Pertamina EP.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pertamina EP telah menyelesaikan pembayaran sewa sampai dengan per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.745.619.185.367,00 dan melalui surat Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor: S-21/KN.3/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal *Draft* Perjanjian Sewa Menyewa BMN Eks Pertamina, maka disusun dan ditandatangani perjanjian sewa menyewa Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 dengan menggunakan dasar perhitungan sewa sebesar Rp6.630.929.353.338,00.

Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184,00, sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015 kepada Menteri Keuangan, Direktorat KND telah dilakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.

Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit

dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473,00.

Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

Mempertimbangkan prinsip konservatisme dalam akuntansi, yaitu prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana Direktorat KND mengakui segera potensi adanya piutang sewa yang tidak tertagih, maka dasar perhitungan pendapatan PNBP Lainnya menggunakan nilai Rp6.630.929.353.338,00.

Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919,00 menjadi Rp0,00.

Berdasarkan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338,00 : 384 bulan = Rp17.268.045.191,00 per bulan atau Rp207.216.542.292,00 per tahun.

2. Tindak Lanjut Temuan BPK Terkait Aset Eks Pertamina

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "*Pengendalian atas Pemanfaatan BMN KKKS dan Pencatatan Aset Eks Pertamina Belum Tertib*". BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar melakukan penelusuran dan menetapkan status aset Eks Pertamina yang belum dilakukan IP atau belum dapat ditentukan nilai wajarnya.

a. Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK adalah Menteri Keuangan akan memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menelusuri BMN yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya berdasarkan Laporan Hasil IP tahun 2012 dan mengungkapkan status aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya tetap berstatus BMN sebagaimana ditetapkan dalam KMK Nomor 92/KMK.06/2008.

b. Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan 30 Juni 2024 adalah:

   1) Berdasarkan hasil penelusuran, telah terpetakan BMN Eks Pertamina yang menjadi objek IP sejumlah 42.994.

   2) Sampai dengan 31 Desember 2025, BMN Eks Pertamina yang telah dilakukan IP adalah 38.336 unit. Sedangkan untuk sisanya 4.659 unit akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek penilaian berupa tanah dan teknis pelaksanaan IP-nya

lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan kesiapan PT Pertamina EP selaku penanggung jawab BMN eks Pertamina.

Permasalahan ini kembali menjadi temuan pada pemeriksaan BPK tahun 2020 sehingga upaya penyelesaiannya menjadi satu kesatuan dengan upaya penyelesaian temuan tahun 2020.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2019, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "*Terdapat perbedaan penghitungan Piutang atas sewa Aset Eks Pertamina antara PT Pertamina EP dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)*".

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN untuk memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menyusun perjanjian pemanfaatan BMN Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP sesuai dengan hasil peninjauan lapangan untuk menetapkan nilai BMN Eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP serta menyesuaikan nilai piutang yang tercatat berdasarkan perjanjian yang telah disusun.

Adapun progres sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473,00.

2) Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

3) PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:

4) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil *Physical Check* BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.

5) Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK dimaksud, PT Pertamina EP menyampaikan Hasil *Physical Check Asset* (PCA) 2019 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kelas Aset Objek Sewa	Digunakan	Tidak Digunakan	Jumlah
Bangunan	502.296.425.065	98.814.481.867	601.110.906.932
Equipment	4.157.250.251.287	1.731.901.048.120	5.889.161.299.406
Lain-lain	94.463.625.000	46.203.522.000	140.667.147.000
Subtotal Objek Sewa	4.754.010.301.352	1.876.919.051.987	6.630.929.353.338

a) Berdasarkan hasil PCA 2019 tersebut, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338,00, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352,00.

b) Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Pertamina EP sebanyak dua kali dan disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan pihak lain yang terkait.

c) Terkait dengan koreksi besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919,00 menjadi Rp349.267.287.782,00 pada laporan keuangan, telah dimintakan permintaan pendapat melalui nota dinas Direktur PKNSI Nomor 2755/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Inspektorat IV dan Nomor 2756/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang pada intinya meminta pendapat apakah surat kepada Pertamina EP perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dapat dijadikan dasar untuk dilakukan koreksi piutang.

d) Menanggapi permintaan pendapat tersebut, Inspektorat IV berpendapat agar Dit. PKNSI segera melakukan pembahasan dengan PT. Pertamina EP untuk menyepakati hasil proses identifikasi dan verifikasi atas BMN yang dimanfaatkan dan menyusun perjanjian pemanfaatan BMN berdasarkan hasil kesepakatan dengan PT. Pertamina EP. Mengingat Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual mengatur pencatatan piutang pemanfaatan BMN pada neraca berdasarkan naskah perjanjian sewa.

e) Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.

f) Telah dilakukan pembahasan *draft* perjanjian sewa BMN Eks Pertamina pada 9 September 2022 sesuai undangan dari Direktur Regional 2 PT Pertamina EP melalui surat undangan nomor 1058/PEP00000/2022-S0 tanggal 07 September 2022. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan pembahasan lanjutan *draft* perjanjian sewa bersama PT Pertamina EP dan masih akan diagendakan pembahasan lanjutan untuk finalisasi draft perjanjian tersebut. Sehubungan dengan jangka waktu sewa, telah dimintakan pendapat kepada Direktorat PKKN melalui nota dinas Direktur PKN Nomor ND-1505/KN.4/2022 tanggal 20 September 2022 hal Permintaan Pendapat terkait Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Eks Aset Pertamina.

g) Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919,00 menjadi Rp0,00.

h) Berdasarkan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor

001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035 atau Rp207.216.542.292,00 per tahun.

Atas rekomendasi ini telah diusulkan selesai pada pembahasan tindak lanjut dengan BPK di awal tahun 2023.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2020, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "*Pengelolaan Aset Eks Pertamina Belum Memadai serta Belum Selesainya Perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP*" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

a) menyelesaikan inventarisasi dan penilaian atas 8.057 Aset Eks Pertamina dan menyajikan dalam Laporan Keuangan serta melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap minimal 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total dan atau FUPP sesuai ketentuan.

b) memerintahkan Dit. PKNSI melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dit. PNKNL atas penyelesaian, pengukuran dan pencatatan 18 bidang tanah Aset Eks Pertamina; dan

c) melakukan verifikasi dan penilaian bersama dengan PT Pertamina EP untuk menetapkan nilai Aset Eks Pertamina dalam perjanjian pemanfaatan Aset Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP dan menyelesaikan perbedaan nilai piutang serta menyesuaikan dampak pengakuan piutang terhadap nilai Investasi Permanen Pemerintah pada PT Pertamina yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Adapun progress tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a) Sampai dengan 31 Desember 2025, BMN Eks Pertamina yang telah dilakukan IP adalah 38.336 unit. Sedangkan untuk sisanya 4.659 unit akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek penilaian berupa tanah dan teknis pelaksanaan IP-nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan kesiapan PT Pertamina EP selaku penanggung jawab BMN eks Pertamina.

b) Sehubungan ditetapkannya PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terdapat perubahan tugas unit baru di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk juga antara lain peralihan tugas kegiatan Penatausahaan BMN pada Pengelola Barang yang dahulu pada Direktorat PKNSI menjadi tugas Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara. Menindaklanjuti hal tersebut telah dilakukan peralihan Tugas Penatausahaan serta pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN eks Pertamina kepada Direktroat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara sesuai nota dinas Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor ND-471/KN.4/2022 tanggal 13 Mei 2022.

c) Dalam rangka tindak lanjut temuan pengelolaan lebih lanjut terhadap minimal 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total dan atau FUPP, Dir. PKNSI dengan surat Nomor: S-1143/KN.5/2021 tanggal 20 Mei 2021 hal tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara eks Pertamina, meminta Pertamina untuk

segera mengajukan FUPP terhadap 4.330 unit aset sebagai tindak lanjut IP 2012 s.d 2020 (terdiri dari 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total). Selain itu telah ditindaklanjuti dengan sosialisasi sesuai undangan PT Pertamina Hulu Rokan nomor 2017/PHR11000/2025-S4 tanggal 11 Juni 2025 hal Undangan Sosialisasi Asset KMK 92 dan Proses FUPP PT. PEP Regional 1 Zona 1 Jambi dan Zona 4 Prabumulih.

d) Dalam rangka tindak lanjut temuan perbedaan pencatatan 18 bidang tanah Aset Eks Pertamina, telah dilakukan rekonsiliasi dengan pihak PT Pertamina EP, Kementerian ESDM dan SKK Migas terkait 18 aset tersebut, berdasarkan rekonsiliasi tersebut disepakati bahwa 17 aset merupakan aset eks Pertamina sedangkan 1 aset sisanya akan dilakukan penelitian dokumen terlebih dahulu oleh PT Pertamina EP.

e) Terkait dengan sisa 1 aset tersebut, Direktorat PKN telah menyampaikan permintaan konfirmasi kepada pihak PT. Pertamina EP melalui Surat Direktur PKN Nomor S-225/KN.4/2022 tanggal 10 Juli 2022. PT. Pertamina EP telah menjawab surat tersebut melalui surat Nomor 1009/PEP01100/2022-S0 tangaal 15 Agustus 2022 perihal Konfirmasi status Aset Tanah Eks Pertamina yang menyatakan bahwa 1 aset berupa tanah yang tercatat dengan deskripsi "aset tanah *pipeline* limanggis" pada Aset eks Pertamina dan tercatat dengan deskripsi aset "Cimanggis" pada CALK UAKPA BUN TK KKKS patut diduga merupakan objek yang berbeda.

f) Telah dilakukan rapat koordinasi sesuai surat undangan Direktur PKKN Nomor UND-257/KN.2/2023 tanggal 15 September 2023 yang dihadiri perwakilan Direktorat PKN, SKK Migas, PPBMN ESDM, PT Pertamina EP dimana dari hasi rapat tersebut Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara selaku UAKPA BUN TK Aset Eks PT Pertamina, SKK Migas selaku UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas, dan PT Pertamina EP untuk melakukan identifikasi terhadap masing-masing aset yang tercatat pada setiap unit dengan melakukan desk review dan pemeriksaan fisik serta penelusuran lebih lanjut.

g) Melalui surat Direktur PKKN Nomor S-252/KN.2/2023 tanggal 26 September 2023 telah dikonfirmasi bahwa dari 18 aset yang terindikasi *double* catat, 17 aset tanah telah selesai dilakukan identifikasi yaitu merupakan aset eks PT Pertamina sedangkan 1 (satu) aset tanah dengan deskripsi "aset tanah *pipeline* limanggis" pada aset eks Pertamina dan tercatat dengan Deskripsi aset "Cimanggis" pada CALK UAKPA BUN TK KKKS perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut.

h) Adapun perkembangan tahun 2025 terkait 1 (satu) aset dimaksud masih dalam verifikasi lanjutan.

Pada pembahasan tindak lanjut di awal 2023, seluruh rekomendasi ini telah diusulkan selesai kecuali terkait 1 aset yang masih dalam proses verifikasi lanjutan.

Progress penyelesaian perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP adalah sebagai berikut:

a) Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184,00, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP

sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi BA-01/KN.3/REKON.PEP/2015 antara DJKN dengan Pertamina EP dengan hasil Jumlah aset bangunan, *equipment*, dan aset lainnya sebesar Rp8,425 triliun, digunakan sebanyak Rp6,63 triliun, dan aset yang tidak digunakan sebesar Rp1,794 triliun.

b) Berdasarkan hasil rekonsiliasi tahun 2015 di atas, dilakukan pemetaan atas aset Rp1,794 triliun dalam rangka verifikasi atas aset yang benar-benar tidak digunakan

c) Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473,00.

d) Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

e) PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:

f) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil *Physical Check* BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.

g) Berdasarkan hasil PCA 2019, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338,00, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352,00.

h) Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338,00, dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.

i) Telah dilakukan pembahasan *draft* perjanjian sewa BMN Eks Pertamina pada 9 September 2022 sesuai undangan dari Direktur Regional 2 PT Pertamina EP melalui surat undangan nomor 1058/PEP00000/2022-S0 tanggal 07 September 2022. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan pembahasan lanjutan draft perjanjian sewa bersama PT Pertamina EP dan masih akan diagendakan pembahasan lanjutan untuk finalisasi draft perjanjian tersebut. Sehubungan dengan jangka waktu sewa, telah dimintakan pendapat kepada Direktorat PKKN melalui nota dinas Direktur PKN Nomor ND-1505/KN.4/2022

tanggal 20 September 2022 hal Permintaan Pendapat terkait Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Eks Aset Pertamina.

j) Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi pada tahun 2022 lalu dari semula Rp1.176.715.352.919,00 menjadi Rp0,00.

k) Berdasarkan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035 atau Rp207.216.542.292,00 per tahun.

Atas rekomendasi ini, BPK telah menyetujui statusnya telah selesai ditindaklanjuti.

Terkait dengan rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2023 yaitu:

a) Memerintahkan Direktur Jenderal KN untuk berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero dan Kepala PPBMN Kementerian ESDM melakukan upaya optimal dalam pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, diantaranya namun tidak terbatas pada penyertifikatan BMN atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

DJKN telah meminta dokumen/bukti kepemilikan melalui:

a) Surat Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor S-628/MK.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Pertamina Berupa Tanah dan telah ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 1 April 2022.

b) Surat Direktur PKN DJKN yang ditujukan kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor S-371/KN.4/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Permintaan Progress Penelusuran Dokumen Kepemilikan Aset Eks Pertamina Berupa Tanah.

c) Surat Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor S-52/MK.6/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) hal Permintaan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Pertamina Berupa Tanah.

d) Surat Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor S-363/MK.6/2024 tanggal 09 Mei 2024 hal Permintaan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Pertamina berupa Tanah.

Hingga periode semester I tahun 2024, surat tanggapan PT Pertamina (Persero) maupun PT Pertamina (EP) terkait permintaan penyampaian dokumen kepemilikan aset eks Pertamina tsb, belum diterima oleh Kementerian Keuangan c.q. DJKN. Namun demikian, telah dilakukan koordinasi dengan Tim Legal & Land Matter PT Pertamina EP untuk direncanakan akan diadakan rapat koordinasi pembahasan terkait pengelolaan dokumen kepemilikan dengan PT Pertamina Persero dan Pertamina EP serta DJKN pada semester 2 Tahun 2024.

a) Telah dilaksanakan rapat pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Perwakilan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP termasuk perwakilan dari regional/field, Direktorat Hukum dan Humas, dan Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara. dengan disepakati hal-hal terkait pengelolaan dokumen kepemilikan aset eks Pertamina sebagai berikut:

   I. PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP masih melakukan proses pemetaan tanah BMN yang berasal dari aset eks Pertamina, termasuk lokasi penyimpanan dokumen kepemilikannya.

   II. Penyerahan dokumen kepemilikan bisa dilakukan secara bertahap mempertimbangkan banyaknya dokumen kepemilikan yang dipetakan. Sebagaimana informasi dari PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP bahwa 50 persen identifikasi dokumen yang dilakukan sudah selesai.

   III. Perlu diskusi bersama antara Direktorat PKN, Direktorat PKKN, SKK Migas, PPBMN dan PT Pertamina (Persero) agar para pihak memiliki pemahaman bersama terkait tata kelola aset BMN yang berasal dari aset eks Pertamina (direncanakan akan diselenggarakan pada bulan September/Oktober).

   IV. Selanjutnya pelaksanaan penyerahan dokumen kepemilikan dan pelaksanaan sertifikasi tanah eks Pertamina menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan melibatkan Kementerian Keuangan, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

b) Terkait dengan rencana pembahasan dengan Direktorat PKN, Direktorat PKKN, SKK Migas, PPBMN dan PT Pertamina (Persero) belum terlaksana karena PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) masih menyelesaikan proses pemetaan (*mapping*) dokumen kepemilikan yang belum selesai. Rencana tersebut, akan dilaksanakan pada tahun 2026.

c) Adapun progress penyelesaian sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

   Telah dilaksanakan serah terima dokumen kepemilikan Tahap I pada tanggal 23 s.d. 24 Juni 2025 sesuai undangan dari Pjs. SVP Asset Management PT Pertamina (Persero) Nomor 140/I10000/2025-S0 tanggal 19 Juni 2025 sebanyak 102 dokumen dengan rincian yang telah diserahkan terdiri dari:

   I. 78 (tujuh delapan) dokumen kepemilikan yang berlokasi di *Field* Jambi dan 2 (dua) dokumen kepemilikan yang berlokasi di Field Lirik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA009/I10220/2025-S0 dan Nomor BA-3/KN.41/2025 tanggal 24 Juni 2025.

II. 1 (satu) dokumen kepemilikan BMN tanah eks Pertamina di Jalan Abdul Muis No. 68, Jakarta Pusat berupa SHGB No. 2535/Petojo Selatan dengan luas 22.305 m2 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-011/I10220/2025-S0 dan Nomor BA-4/KN.41/2025 tanggal 24 Juni 2025.

III. 21 (dua puluh satu) dokumen kepemilikan BMN yang berlokasi di *Field* Sorong sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-010/I10220/2025-S0 dan Nomor BA-2/KN.41/2025 tanggal 24 Juni 2025.

d) Telah dilaksanakan serah terima dokumen kepemilikan Tahap II pada tanggal 11 Desember 2025 sesuai undangan dari Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi Nomor 378/PHE01000/2025-S9 tanggal 02 Desember 2025 sebanyak 17 dokumen dengan rincian yang telah diserahkan terdiri dari:

I. 2 (dua) asli dokumen dan 1 (satu) *copy* dokumen kepemilikan tanah yang berlokasi di Cirebon di wilayah kerja PT Pertamina EP Area Regional 2 Jawa, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA025/I10220/2025-S0 dan BA-10/KN.41/2025 tanggal 11 Desember 2025.

II. 11 (sebelas) asli dokumen dan 3 (tiga) *copy* dokumen kepemilikan tanah yang berlokasi di Sidoarjo di wilayah kerja PT Pertamina EP Area Regional 4 Jawa, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA026/I10220/2025-S0 dan BA-11/KN.41/2025 tanggal 11 Desember 2025.

Penyerahan sisa dari keseluruhan dokumen kepemilikan akan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan pemetaan dari PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina EP. Selanjutnya terkait dokumen-dokumen kepemilikan yang telah diserahterimakan dimaksud, Pengelola Barang telah melakukan upaya pengamanan dengan meminta bantuan Kementerian ATR/BPN, agar tidak menerima dan memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah serta menyampaikan peralihan hak atas tanah berupa perpanjangan/pembaruan sertifikat menjadi SHP a.n. Pemerintah RI c.q. Keuangan.

e) Selain itu, telah dilakukan *piloting* upaya sertifikasi sebagai berikut:

I. *Piloting* pembaruan tersebut dilakukan di *field* Jambi berdasarkan Surat Direktur PKN Nomor S-1077/KN.4/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Permohonan Pembaruan Hak SHGB Nomor 28/Kenali Asam yang telah berakhir sejak 26 November 2004. Lebih lanjut, ditindak lanjuti dengan surat Direktur PKN Nomor S-542/KN.4/2025 tanggal 1 Juni 2025 hal Permohonan Informasi terkait Proses Pembaruan Hak SHGB Nomor 28/Kenali Asam.

II. BPN Kota Jambi menyampaikan tanggapan melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Nomor HP.01.01/686-15.71/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah terkait permintaan dan arahan proses pembaruan hak SHGB Nomor 28/Kenali Asam. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Nomor HP.03.02/808 tanggal 5 Juni 2025 yang ditujukan kepada Direktur PKN hal Permohonan Hak Pakai atas nama Instansi Pemerintah yang berasal dari HGB Nomor 28/Kenali Asam seluas 122.680 m2.

III. Selanjutnya BPN Kota Jambi akan melakukan pengukuran dengan didampingi DJKN dan PT Pertamina EP.

f) Progress sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Terhadap sertifikat tanah eks Pertamina yang telah diserahkan ke DJKN, telah disampaikan permintaan pembaruan sertifikat menjadi SHP atas nama Pemerintah RI c.q. Kemenkeu yaitu:

I. S-156/KN/2025 tanggal 1 Agustus 2025 (Siak)
II. S-157/KN/2025 tanggal 1 Agustus 2025 (Jambi)
III. S-163/KN/2025 tanggal 1 Agustus 2025 (Sorong)
IV. S-145/KN/2025 tanggal 18 Juli 2025 dan S-1098/KN.4/2025 tanggal 18 September 2025 (Jakarta)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA OLEH LMAN

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada LMAN masih dicatat oleh UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KND. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina kelolaan LMAN yang telah diserahkelolakan sebelum periode pelaporan. Selanjutnya, atas transaksi penyerahkelolaan aset kepada LMAN yang terjadi pada periode berjalan, diperlakukan sebagai Transfer Keluar.

4. PERALIHAN PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA KEPADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020, memberikan penugasan pengelolaan BMN eks Pertamina yang sebelumnya dikelola oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, dialihkan kepada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi sebagai tindak lanjut atas telah ditetapkannya PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terjadi perubahan nomenklatur dari semula Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menjadi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara.

Penetapan/penolakan usulan terkait dengan pengelolaan BMN eks Pertamina sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan. Tanggung jawab sebagai UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara.

C. Aset Lain-Lain

1. Kekurangan PNBP Hasil Lelang Gratifikasi

Terdapat kekurangan penyetoran hasil bersih lelang sebesar Rp979.720,00 pada lelang KPKNL Bogor. Atas hal tersebut, Direktorat PKN telah menyampaikan permintaan reklasifikasi dan koreksi jumlah setoran PNBP kepada KPKNL Bogor melalui nota dinas Nomor ND-361/KN.4/2026 tanggal 9 Februari 2026 hal Perminitaan Reklas Kode Akun Pembayaran Tagihan dan Koreksi Jumlah PNBP Hasil Lelang Barang Gratifikasi. KPKNL Bogor telah menindaklanjuti dengan penyampaian nota dinas Nomor ND-

155/KNL.0803/2026 tanggal 12 Februari 2026 hal Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara kepada KPPN Tipe A1 Jakarta II dan KPPN Khusus Penerimaan.

Direktorat PKN telah menjurnal selisih setor sebesar Rp979.720,00 sebagai piutang PNBP.

2. Penghapusan Aset GIZ

Terhadap aset GIZ yang telah laku lelang pada tanggal 6 Agustus 2025 dengan nilai laku lelang sebesar Rp128.612.000,00 sesuai dengan Risalah lelang Nomor RL-158/07.04/2025-01, namun serah terima barang kepada pemenang lelang baru dilaksanakan pada bulan Januari 2026 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-01/KN.4.3.2/2026 tanggal 27 Januari 2026, sehingga aset GIZ belum dapat dihapus pada periode ini dan akan dihapuskan pada periode pelaporan akuntansi selanjutnya.

3. Aset Eks PT Asean Aceh Fertilizer (PT AAF)

Untuk aset ***Water Intake***, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.01/1999 tanggal 6 Mei 1999 Hal Persetujuan Perubahan Kepemilikan *Water Intake* dari Pemerintah kepada PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), disebutkan bahwa persetujuan perubahan kepemilikan yang semula dari Pemerintah kepada PT PIM, dengan membayar biaya kompensasi yang harus dibayarkan oleh PT PIM kepada Pemerintah sebesar Rp15.959.000.000,00. Namun atas kompensasi belum dilunasi.

Berdasarkan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, diatur bahwa piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan, sehingga Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.01/1999 dapat menjadi dasar bagi pemerintah atas pengakuan piutang PNBP yang berasal dari pengalihan aset *Water Intake.*

Sehubungan dengan PT PIM belum melakukan pembayaran, maka berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP Jo. PP 59 tahun 2020, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) selama 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga jumlah yang harus dibayarkan PT PIM Adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
a. Nilai aset *Water Intake*	15.959.000.000
b. Denda: 2% * Rp15.959.000.000,00 * 24 bulan	7.660.320.000
Jumlah	**23.619.320.000**

Penyelesaian piutang PNBP sebagaimana ketentuan Peralihan Pasal 50 PP 59 tahun 2020, dijelaskan bahwa seluruh pengajuan keberatan PNBP, keringanan PNBP dan pengembalian PNBP yang sedang dalam proses penyelesaian, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Diketahui bahwa aset *Water Intake* yang telah dicatat oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), sehingga dalam rangka penyelesaian PNBP sebagaimana Surat Nomor S-472/KN/KN.4/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Penyelesaian Kewajiban atas Perubahan Kepemilikan *Water Intake* dari Pemerintah, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara melakukan penagihan piutang PNBP sebesar Rp15.959.000.000,00 beserta denda sebesar Rp7.660.320.000,00 dengan total Rp23.619.320.000,00. Adapun piutang PNBP dimaksud, akan disajikan dalam neraca (*face*) Laporan Keuangan Transaksi Khusus BUN Triwulan IV Tahun 2025 sebagai Piutang PNBP. Untuk pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih, mengacu pada PMK 207/PMK.06/2019 diatur tentang penentuan kualitas piutang dan

pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada Kementerian /Lembaga (K/L) dan Bendahara Umum Negara, dapat ditentukan bahwa piutang PNBP ini masuk ke kategori kualitas macet.

Selanjutnya PT Pupuk Iskandar telah melakukan pembayaran lunas, sesuai Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 27 November 2025 melalui bank persepsi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dengan kode billing nomor 820251120478215 untuk pembayaran piutang negara atas perubahan kepemilikan *Water Intake* dan nomor 820251120480654 untuk pembayaran denda. Dan atas pembayaran dimaksud telah diklarifikasi kebenarannya pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui Nomor Transaksi Bank (NTB) 042331401261 dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 8D97C55DFJ88KA07 untuk pembayaran piutang negara atas perubahan kepemilikan *Water Intake* serta Nomor Transaksi Bank (NTB) 446385400731 dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 8E17748VVOLS7CCE untuk pembayaran sanksi adminitratif berupa denda.

Berdasarkan dokumen-dokumen dimaksud, dengan ini Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyatakan bahwa pembayaran piutang negara atas perubahan kepemilikan *Water Intake* oleh PT Pupuk Iskandar Muda telah LUNAS.

Terdapat penjelasan tambahan terkait dengan penjualan barang gratifikasi di Risalah Lelang Nomor RL-9/07.03/2025-01 tanggal 10 Januari 2025 sebanyak 32 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 70 barang, RL-116/07.03/2025-01 tanggal 2 Mei 2025 sebanyak 26 barang di mana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 76 barang, RL-174/07.03/2025-01 tanggal 20 September 2025 sebanyak 8 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 11 barang, RL-175/07.03/2025-01 sebanyak 4 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 6 barang, RL-176/07.03/2025-01 tanggal 20 September 2025 sebanyak 9 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 12 barang, RL-173/07.03/2025-01 tanggal 20 September 2025 sebanyak 12 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 15 barang. RL-177 /07.03/2025-01 tanggal 20 September 2025 sebanyak 5 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 6 barang, RL-333/07.03/2025-01 tanggal 17 Oktober 2025 sebanyak 12 barang laku terjual dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 27 barang, RL-368/07.03/2025-01 tanggal 7 November 2025 sebanyak 8 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 13 barang, RL-370/07.03/2025-01 tanggal 7 November 2025 terdiri dari 10 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 153 barang, dan RL-445/08.02/2025-01 tanggal 20 November 2025 terdiri dari 11 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 97 barang.

dengan nilai PNBP keseluruhan per 31 Desember 2025 sebesar Rp374.767.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Nomor Risalah Lelang	PNBP
1	RL-9/07.03/2025-01	12.716.000
2	RL-116/07.03/2025-01	95.447.000
3	RL-174/07.03/2025-01	3.079.000
4	RL-173/07.03/2025-01	8.777.000
5	RL-175/07.03/2025-01	1.163.000
6	RL-176/07.03/2025-01	4.418.000
7	RL-177/07.03/2025-01	4.040.000
8	RL-223/08.02/2025-01	6.148.000
9	RL-224/08.02/2025-01	15.621.000
10	RL-225/08.02/2025-01	10.971.000
11	RL-599/08.03/2025-01	32.130.280
12	RL-600/08.03/2025-01	15.876.000

No.	Nomor Risalah Lelang	PNBP
13	RL-250/06.01/2025-01	27.677.000
14	RL-251/06.01/2025-01	6.343.000
15	RL-252/06.01/2025-01	23.714.000
16	RL-454/12.03/2025-91	518.000
17	RL-333/07.03/2025-01	2.956.000
18	RL-368/07.03/2025-01	2.206.000
19	RL-369/07.03/2025-01	12.467.000
20	RL-370/07.03/2025-01	30.224.000
21	RL-445.08.02/2025-01	58.276.000
Jumlah		**374.767.280**

D. BMN *Idle*

1. Terdapat reklasifikasi kode BMN eks BMN *Idle* guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 dan Pasal 39 huruf b. PMK 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga sedemikian sehingga seluruh tanah BMN eks BMN *Idle* direklasifikasi ke dalam golongan Tanah Persil Lainnya (kode BMN 2010199999), bangunan BMN eks BMN *Idle* direklasifikasi ke dalam golongan Bangunan Lainnya (kode BMN 4010130999) dan tugu atau pagar BMN eks BMN *Idle* direklasifikasi ke dalam golongan Tugu/Tanda Batas Lainnya (kode BMN 4040199999).
2. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:
   a. Satu unit Bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017 belum dilakukan Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Keuangan c.q. KPP Pratama Gresik Utara dengan Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya dikarenakan belum didukung penyerahan sertipikat/dokumen kepemilikan.
   b. Satu Bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan yang terletak di RT. 12, RW. 04, Kel. Kemasan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 79/KM.6/KNL.1002/2023 belum dilakukan Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Keuangan c.q. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dengan Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo dikarenakan belum didukung penyerahan sertipikat/dokumen kepemilikan.
   c. Satu Bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan yang terletak di RT. 04, RW. 01, Kel. Lengkong, Kec. Puri, Kab. Mojokerto sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 79/KM.6/KNL.1002/2023 karena belum dilakukan Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Keuangan c.q. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dengan Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo dikarenakan efisiensi anggaran pada Kementerian Keuangan.

PROGRES TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 , berdasarkan Temuan Pemeriksa tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Nomor 22.b – Data SIMAN atas BMN (tanah) *Idle* yang sudah ditetapkan oleh Pengelola tetapi belum di BAST ke Pengelola dan BMN (tanah) tidak digunakan. Terdapat enam Tanah pada aplikasi SIMAN yang ditengarai sudah ditetapkan sebagai BMN *idle* tetapi belum diserahkan ke Pengelola Barang.

Berikut merupakan penjelasan atas konsep temuan pemeriksaan BPK terhadap 6 (enam) aset:

1) Aset yang dinyatakan sebagai BMN *idle* pada Kementerian Ketenagakerjaan berupa 1 (satu) bidang tanah persil lainnya bukan merupakan BMN *idle*. Terdapat kesalahan input status penggunaan pada aplikasi SIMAN, dimana seharusnya BMN digunakan oleh pihak lain. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pada aplikasi SIMAN per tanggal 3 Mei 2023.

   BMN tercatat sebagai tanah persil lainnya pada Satuan Kerja Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan dengan kode barang 2010199999 dan NUP 1. Selanjutnya, saat ini BMN sedang dalam proses Alih Status Penggunaan ke Kemendes PDTT. Permohonan atas Alih Status Penggunaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang melalui Surat Keputusan Nomor S-207/MK.6/WKN.07/2022 dan didukung dengan pelaksanaan serah terima berdasarkan BAST BA.1/0005/UM.03.03/I/2023 101/KEU.09.05/I/2023 11 Januari 2023.

2) Berdasarkan Nota Dinas dari KPKNL Jakarta II ND-666/KNL.0702/2023 hal Penyampaian Konfirmasi atas Konsep Temuan BPK LKTP TA 2022 atas BMN (Tanah) *idle* Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, aset yang dinyatakan sebagai BMN *idle* pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, berupa 1 (satu) bidang tanah bangunan kantor pemerintah, dengan kode barang 2010104001 NUP 1 di Jalan Batu No. 2-3 Gambur, Jakarta Pusat, bukan merupakan BMN *idle* dan masih digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal KKP. Lebih lanjut, terhadap BMN tersebut telah dilakukan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2022 dengan hasil perhitungan sebesar 100 persen.

3) Aset yang dinyatakan sebagai BMN *idle* pada Satuan Kerja balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), bukan merupakan BMN *Idle*. BMN tersebut berupa tanah milik satker balai besar konservasi sumber daya alam sulawesi selatan yang berada di Palopo. Menurut perencanaan awal, di atas tanah tersebut akan dibangun rumah negara untuk kepala bidang ksda wilayah I palopo. Terkait dengan hal tersebut, KPKNL Makassar sudah mengonfirmasi ke satker sesuai dengan surat nomor S-2244/KNL.1502/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan satker telah menjawab melalui surat nomor S.626/K.8/TU/KAP/05/2023 tanggal 8 Mei 2023.

4) Aset yang dinyatakan sebagai BMN *Idle* pada satuan kerja Satker Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (kementerian PUPR) bukan merupakan BMN *idle*. Pada Satker tersebut salah melakukan pendataan pada aplikasi SIMAN. Lebih Lanjut aset tersebut masih digunakan oleh BBWS Pompengan dengan dasar surat balasan kepala BBWS Pompengan kepada Kepala Makassar nomor HM0501-AUI/1938.

5) Terhadap konsep temuan pemeriksaan BPK atas aset di KPKNL Surabaya, berdasarkan BAST-35/100/V/2022 telah dilakukan serah terima dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II kepada KPKNL Surabaya selaku Pengelola Barang pada tanggal 10 Mei 2022, walaupun BMN *idle* tersebut belum dihapus pada Daftar Barang Pengguna di TA 2022. KPKNL Surabaya telah menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II agar temuan tersebut dapat ditindaklanjuti berupa penghapusan BMN pada Daftar Barang Pengguna. Adapun surat yang disampaikan adalah S-3619/KNL.1001/2023 tanggal 16 Juni 2023 hal Tindak Lanjut Penyerahan BMN *Idle* kepada Pengelola Barang. Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan BMN Kantah Kota Surabaya II Karena Penyerahan Kepada Pengelola Barang Nomor 1604/SK-KU.04.03/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023.

6) Aset yang dinyatakan sebagai BMN *idle* pada Dit. Polair, Polda Sumsel, Kepolisian Negara RI berupa 1 (satu) bidang tanah untuk bangunan tempat kerja bukan merupakan BMN *idle*. Terdapat kesalahan dalam penginputan status penggunaan BMN pada aplikasi SIMAN sehingga data yang terekam tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dimana saat ini BMN tersebut digunakan oleh Kepolisian Negara RI sesuai SK PSP Nomor 271/KM.6/WKN.04/KNL.02/2020.

Atas enam BMN ini telah diusulkan sesuai dan ditindaklanjuti pada Tahun 2023, tetapi masih menunggu keputusan pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan.

E. Aset BLBI

1. Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Aset Lancar

a. Aset Kredit eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank.

Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit Asset Transfer Kit (ATK), aset kredit Non Asset Transfer Kit (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB).Sedangkan, Aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB.SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN. Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Per 31 Desember 2025
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJPN	5.409.087.258.582

No	Uraian	Nilai Per 31 Desember 2025
2	Aset Kredit Non ATK Yang Dikelola Kanpus DJKN	466.195.754.523
3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN	-
	Jumlah	**5.875.283.013.105**

Sedangkan untuk tagihan Aset Kredit PKPS, seluruhnya telah diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL.

Pada Tahun 2025 telah dilakukan penyerahan aset kredit eks BPPN untuk dilakukan pengurusan piutang oleh PUPN senilai Rp2.405.019.609.687,00**,** dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Mata Uang	Jumlah Aset Kredit	Nilai Penyerahan	Nilai Penyerahan
1	Dollar Amerika (USD)	15	68.379.007	1.143.297.004.397
2	Rupiah (IDR)	94	1.260.696.262.917	1.260.696.262.917
3	Yen Jepang (JPY)	1	9.610.910	1.026.342.373
Jumlah		**110**		**2.405.019.609.687**

Penatausahaan barang jaminan atas aset kredit eks BPPN (selain PKPS) dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang telah dilakukan pengurusan oleh PUPN dilakukan melalui Aplikasi Modul Kekayaan Negara Lain-Lain (MKNL). Adapun ringkasan barang jaminan aset kredit pada MKNL sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Jenis Kepemilikan	Jumlah Aset Kredit
1	AJB	1.288
2	BORTOGCH	1.360
3	BPK	58
4	BPKB	4.247
5	FAKTUR	96
6	GIRIK	257
7	IJAZAH	76
8	KET-KEPALA-DESA	45
9	KWITANSI	60
10	LAIN-LAIN	5.168
11	SHGB	2.630
12	SHGU	41
13	SHM	5.392
14	SHP	87
15	SIPTB	53
16	TASPEN	48
17	AJB	1.288
18	*(blank)*	177
Jumlah		**21.083**

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) diatur formula penyisihan sebagai berikut:

1) Penyisihan piutang tidak tertagih dari piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA (Persero) dihitung dengan cara saldo akhir piutang dikurangi hasil perkalian dari saldo akhir piutang dikalikan tingkat pengembalian (*recovery rate*) piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA;
2) Penyisihan piutang tidak tertagih yang berasal dari tagihan PKPS ditetapkan sebesar 100 persen dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan. Ketentuan mengenai penilaian

agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih, dilaksanakan secara penuh paling lambat untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2016.

Hingga saat laporan keuangan ini disusun, penilaian agunan PKPS sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih belum dilakukan secara menyeluruh, pada tahun 2015 penilaian baru dilakukan terhadap sebagian barang jaminan PKPS Obligor atas nama Kaharudin Ongko, Samadikun Hartono dan Trijono Gondokusumo. Sampai tahun 2020 belum dilakukan penilaian pada barang jaminan PKPS yang belum dinilai sebelumnya.

Penyisihan piutang tidak tertagih atas Piutang pada BDL ditetapkan sebesar 100 persen dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan (bukan tagihan BBO/BBKU/BPPN) kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN, dengan demikian, maka tagihan tersebut termasuk dalam piutang Pemerintah yang bersifat lancar sehingga penyisihan atas piutang tersebut merupakan ruang lingkup dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014. Besaran penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang lancar ditetapkan sebesar 5 ‰ (lima permil) dari piutang.

c. Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)

1) Penerimaan Pembiayaan Non Tunai dari Penetapan Status Penggunaan Aset Properti

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.06/2023 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset properti adalah penetapan aset properti menjadi Barang Milik Negara. Aset Properti yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara terlebih dahulu dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai wajar aset properti.

Dalam Pasal 68 telah diatur bahwa hasil pengelolaan aset berupa uang tunai atau non tunai diperhitungkan sebagai pengurang piutang Pemerintah Republik Indonesia pada Bank Dalam Likuidasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2) Penerimaan dari Pemanfaatan Aset Properti Dalam Bentuk Sewa

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset properti adalah pemanfaatan aset properti dengan cara sewa. Dalam Pasal 65 telah diatur bahwa hasil pengelolaan aset berupa uang tunai berasal dari sewa aset properti, dikenakan biaya pengelolaan aset pada MAP 425149 (Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Satuan Kerja Kantor Pusat DJKN, Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015).

d. Aset Kredit Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)

1) Penerimaan dari Pengelolaan Aset Kredit yang Telah Diserahkan kepada PUPN

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset kredit meliputi penatausahaan dan penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pelaporan pengelolaan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan rekonsiliasi aset kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester antara Direktorat PKNSI selaku Penyerah Piutang dengan PUPN (dhi. KPKNL).

Berdasarkan data yang berasal dari Modul MPN G3 NOW selama Periode Tahun 2025, telah tercatat setoran per MAP 711313. Direktorat PKN selaku unit pengelola aset eks BDL telah melakukan analisa dan pengakuan terhadap penerimaan pada MAP 711313 tersebut dan berdasarkan hasil rekonsiliasi Tahunan dengan KPKNL selaku Anggota PUPN Cabang.

Rincian hasil pengelolaan aset dari pembayaran/pelunasan aset kredit per KPKNL selama Periode Tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	KPKNL (Anggota PUPN Cabang)	MAP 711313	MAP 817713
1	BALIKPAPAN		
2	BANDA ACEH	636.362	
3	BANDAR LAMPUNG		
4	BANDUNG	99.999.999	
5	BANJARMASIN		
6	BATAM		
7	BEKASI	68.370.090	
8	BOGOR		
9	BUKITTINGGI	1.982.875	
10	CIREBON		
11	DENPASAR	1.987.694.964	74.229.273
12	DUMAI		
13	JAKARTA IV	44.321.579.536	122.455.521
14	JAKARTA V	9.331.998.761	
15	JEMBER		
16	KISARAN		
17	LHOKSEUMAWE		
18	MADIUN	1.752.725	65.455
19	MAKASSAR		
20	MALANG	4.327.272	
21	MANADO	34.122.104	
22	MEDAN	792.068.188	
23	METRO		
24	PADANG	575.677	
25	PADANGSIDIMPUAN		
26	PALEMBANG		
27	PANGKALPINANG		
28	PEKALONGAN		
29	PEKANBARU		
30	PEMATANGSIANTAR		
31	PONTIANAK	4.545.455	
32	PURWAKARTA		
33	SAMARINDA		
34	SEMARANG	46.285.182	
35	SERANG	3.151.838	
36	SIDOARJO	28.324.359	39.276
37	SINGARAJA	2.761.073	103.111
38	SINGKAWANG		
39	SURABAYA	2.321.421.152	111.268

No.	KPKNL (Anggota PUPN Cabang)	MAP 711313	MAP 817713
40	SURAKARTA		
41	TANGERANG I		
42	TANGERANG II	129.836.123	
43	TARAKAN		
44	TEGAL		
45	YOGYAKARTA		
Jumlah		**59.181.433.735**	**197.003.904**

e. ASET SURAT BERHARGA EKS BANK DALAM LIKUIDASI

Penerimaan Pembiayaan dari Dividen Tunai Saham

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset surat berharga adalah permintaan pembayaran atas dividen saham atau bunga obligasi. Direktorat PKNSI selaku pengelola barang atas aset eks Bank Dalam Likuidasi meminta pembayaran atas dividen saham dan/atau bunga obligasi setiap jatuh tempo.

f. DANA FIHAK KETIGA

1) Penjelasan Umum Nasabah Penyimpan Dana

Akun Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi) merupakan pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3, yang selanjutnya akan disetorkan oleh Pemerintah ke rekening Nomor:

a) 0019955279 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk : untuk PT Bank Asiatic (Dalam Likuidasi);
b) 070-0004080201 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk : untuk PT Bank Global Internasional, Tbk (DL) dan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi).

Penyetoran hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3 dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan penyetoran sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor MoU-07/MK.06/2015 – PRJ-39/D.01/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Percepatan Penyelesaian Kewajiban Bank Dalam Likuidasi eks Program Penjaminan kepada Pemerintah.

2) Proporsi Hasil Pengelolaan Aset setelah Diperhitungkan dengan Pembayaran kepada Nasabah Penyimpan Dana yang merupakan Hak Pemerintah

a) PT Bank Global Internasional, Tbk (DL):

I. hak Pemerintah sebesar 96,3 persen ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
II. hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,7 persen ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas

Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita ”hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Global Internasional Tbk., (DL)”.

b) PT Bank Asiatic (DL)

I. hak Pemerintah sebesar 99,93 persen ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).

II. hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 0,07 persen ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (AKUN) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita ”hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Asiatic (DL)”.

c) PT Bank Dagang Bali (DL)

I. hak Pemerintah sebesar 96,40 persen ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).

II. hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,60 persen ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita ”hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Dagang Bali (DL)”.

3) Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi

Rincian penerimaan Nasabah Penyimpan Dana atas hasil pengelolaan aset disajikan dalam tabel berikut:

a) Tahun 2017

(dalam rupiah)

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	1.874.999
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	16.650.000
BANK DAGANG BALI	-
Jumlah	**18.524.999**

b) Tahun 2018

(dalam rupiah)

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	480.235
BANK DAGANG BALI	149.327.009
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	20.350.000
Jumlah	**170.157.244**

c) Tahun 2019

(dalam rupiah)

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	89.678
BANK DAGANG BALI	100.518.124
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	28.318.966

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK GLOBAL INTERNASIONAL (Non Tunai)	122.089.640
Jumlah	**251.016.408**

d) Tahun 2020

(dalam rupiah)

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	15.273
BANK DAGANG BALI	78.401.540
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	35.150.000
Jumlah	**1.405.445.487**

e) Tahun 2021

(dalam rupiah)

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK DAGANG BALI	85.325.255
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	1.320.120.232
BANK GLOBAL INTERNASIONAL (Non Tunai)	61.420
Jumlah	**1.405.506.907**

f) Tahun 2022

(dalam rupiah)

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	78.812
BANK DAGANG BALI	82.439.750
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	68.817.026
Jumlah	**151.343.770**

g) Tahun 2023

(dalam rupiah)

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	-
BANK DAGANG BALI	265.407.986
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	499.443.808
Jumlah	**764.851.794**

h) Tahun 2024

(dalam rupiah)

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK DAGANG BALI	6.364
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	311.871.945
BANK DAGANG BALI (Non Tunai)	179.428.270
Jumlah	**491.306.579**

i) Tahun 2025

(dalam rupiah)

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	3.562.429
BANK DAGANG BALI	1.483.693.368
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	118.844.000
Jumlah	**1.606.099.797**

4) Pembayaran Nasabah Penimpan Dana

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur mekanisme pembayaran Nasabah Penyimpan Dana (NPD). Pembayaran NPD dilakukan ke rekening pada bank yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan realisasi dana pembayaran NPD pad akas negara pada tahun berjalan.

Dalam Pasal 77 telah diatur bahwa Direktur Jenderal menetapkan keputusan mengenai besaran pembayaran NPD untuk masing-masing BDL berdasarkan realisasi dana pembayaran NPD pada kas negara tahun berjalan. Selanjutnya, berdasarkan data realisasi dana NPD dan keputusan Direktur Jenderal mengenai besaran pembayaran NPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Direktur PKNSI selaku KPA Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (UAKPA BUN TK BLBI) menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran (SKP).

a) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2017 s.d. 2019

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 195/KN/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatic (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2020 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2020 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2020 sebesar Rp317.609.011,00.

Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2020 tanggal Juli 2020 sebesar Rp2.444.912,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Asiatic (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2020 tanggal Juli 2020 sebesar Rp249.845.133,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00003A/978706/2021 tanggal Juli 2020 sebesar Rp65.318.966,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2020.

b) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2020

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 153/KN/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatic (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2020, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2021 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2021 sebesar Rp113.566.813,00.

Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp15.273,00 untuk pembayaran

NPD PT Bank Asiatic (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp78.401.540,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00003A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp35.150.000,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2020.

c) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 127/KN/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatic (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2021, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2022 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2021 sebesar Rp1.405.445.487,00.

Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp85.325.255,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2021. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp1.320.120.232,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2021.

d) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2022

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 158/KN/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatic (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2022, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2022 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2022 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2021 sebesar Rp1.405.445.487,00.

Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp85.325.255,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2021. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp1.320.120.232,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2021.

e) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2024

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 144/KN/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Dagang Bali (DL) dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2024, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2024 Nomor SKP-001/KN.4/KPA/2025 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2024 sebesar Rp491.306.579,00

Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002TC/978706/2025 tanggal 22 Desember 2024 sebesar Rp311.871.945,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2024. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00003TC/978706/2025 tanggal 22 Desember 2024 sebesar Rp179.428.270,00 untuk PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2024. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001TC/978706/2025 tanggal 22 Desember 2024 sebesar Rp6.364,00 untuk PT Bank Asiatic Tbk (DL) periode tahun 2024.

2. Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Aset Lainnya

a. Aset Properti Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan hutang yang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat di hadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.202.309.825,19. Terhadap permasalahan ini, Direktorat PKN telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Unit	Nilai
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.202.309.825
Hasil Penelusuran TA 2013:		
Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.126,92
Aset jaminan BDL dan PKPS	25	35.552.445.176,15
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368,23
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	**627**	**400.339.684.384,70**

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam LHP BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut:

1) Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 31 Desember 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).

2) Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 31 Desember 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.

3) Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.

4) Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Data dan dokumen yang diperoleh dari upaya-upaya tersebut di atas, telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJKN kepada BPK RI melalui surat Nomor S-1503/KN/2014 tanggal 3 Oktober 2014. Dari hasil verifikasi BPK terhadap data dan dokumen-dokumen tersebut diperoleh keyakinan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Unit	Nilai
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	**627**	**400.339.684.384,89**
Hasil Penelusuran TA 2014:		
Terjual di BPPN dan PPA	122	50.135.490.148
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	8	59.069.114.858
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	20	5.090.723.763
Aset jaminan BDL dan PKPS	84	94.040.671.431
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	35	69.934.452.664
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	**358**	**122.069.231.520,89**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKBUN tahun 2014 disebutkan bahwa sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 358 unit senilai Rp122.019.231.519,89.

(dalam rupiah)

Uraian	Unit	Nilai
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	**358**	**122.019.231.519,89**
Hasil Penelusuran TA 2015:		
Terjual di BPPN dan PPA	20	6.266.711.166,71
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
Aset jaminan BDL dan PKPS	-	-
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	64	30.341.227.055
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	**272**	**85.328.090.117,18**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan selama bulan Januari s.d. Desember 2015 telah berhasil ditemukan dokumen pendukung atas 86 unit aset senilai Rp36.741.141.403,71. Sehingga sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebanyak 272 unit senilai Rp85.328.090.117,18.

(dalam rupiah)

Uraian	Unit	Nilai
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	**272**	**85.328.090.117,18**
Hasil Penelusuran TA 2016-2023:		
Terjual di BPPN dan PPA	3	912.345.839
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	-	-

Uraian	Unit	Nilai
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	-	-
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
Aset jaminan BDL dan PKPS	1	-
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	20	10.800.137.076
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2023)	**248**	**73.615.607.202,18**

Berdasarkan hasil penelusuran aset eks BPPN tersebut selama periode 2023, telah ditemukan 24 aset dengan rincian sebagai berikut:

1) Aset di Jl. Raya Purwakarta Cempaka Ds. Cibatu tercatat di Aset eks Kelolaan PT PPA (PRK-B002271).

2) Aset di Pakowa Kec.Sario Manado tercatat di aset titipan pada KPKNL Manado (PRK-C000193) namun tidak ada di daftar aset sesuai BAST dari PT PPA.

3) Aset di Jl. Tanjung Duren Raya No.356A-Jkt Servitia tercatat di aset titipan pada KPKNL Jakarta IV (03.01.02.00001581)

4) Aset di Gedung Graha Servitia tercatat di aset titipan pada KPKNL Jakarta IV (03.01.02.00001582).

5) Aset di Beverlly Hills, Cianjur tercatat di aset titipan pada KPKNL Bogor.

6) Aset di Jl. Aksara 134D Lk I Kel. Bantan Timur Medan tercatat di aset titipan pada KPKNL Medan (03.01.02.00001440)

7) Aset di Jl. Perintis Kemerdekaan No.21 Cibadak Permai berdasarkan Riwayat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sesuai surat nomor PHP/01.01/836.32.02/VIIII/2022 tanggal 31 Agustus 2023 diketahui bahwa atas sertifikat HGB No 205/Cibadak seluas 12.200 m2 dipasang Hipotik pada tahun 1990 dan pada tahun 1993 berdasarkan surat pengantar dari Bank Bali bahwa sertifikat Hipotik tersebut di Roya. Selanjutnya telah dilakukan pemisahan atas SHGB 205/Cibadak menjadi beberapa sertifikat. Salah satunya sertifikat 312/Cibadak seluas 3.310 m2 yang tercatat pada PRK-0003212, dan terhadap sisa sertifikat terindikasi sudah terjual.

8) Aset di Jl. Buah Batu Raya No. 159 - 161 Kel. Turangga, Kec. Lengkong berdasarkan Riwayat dari kantor pertanahan Kota Bandung sesuai surat Nomor 1602/32.73.HP.02.02/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 diketahui bahwa Aset di Jl. Buahbatu No. 161 telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 929/Kelurahan Turangga tanggal 09 Januari 1992. Nama pemegang semula tercatat a.n. Mochamad Basari, kemudian beralih kepemilikan terakhir kepada Ietje Ira Kosoema, SH., Rizky Adhitia Rakhman, Shasya Rajendra Rachman berdasarkan putusan PN Bandung No. 473/PDT/G/2011/PN.BDG tanggal 22 Februari 2012.

9) Aset di Jl. Dharma Griya II Blok C3/55, Taman Semanan Indah berdasarkan Riwayat dari kantor pertanahan diketahui bahwa Berdasarkan surat nomor HP.03.02/2483-31.73/VII/2022 tanggal 29 Juli 2023 hal Permohonan Informasi Riwayat Aset Properti eks BPPN di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, diketahui bahwa SHM No. 14/Semanan seluas 1.255 m2 telah dibebankan sertifikat hipotik no. 52/1977 oleh Bank Ekspor Impor Indonesia namun hipotik telah dihapuskan. Berdasakan AJB tanggal 2 April 1993 dan risalah lelang dari Kantor Lelang Negara Jakarta Nomor 18 tanggal 31 Januari 1997, bahwa SHM No. 14/Semanan telah beralih haknya kepada Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya,

SHM No. 14/Semanan tidak berlaku lagi, karena telah diterbitkan SHGB 09886/Semanan a.n. Pt Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk seluas 17.888 m2 berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantah Jakarta Barat No. 01104/SKHGB/BPN-31.73/VI/2021.

10) Aset di Cipinang Cempedak seluas 649 m2 berdasarkan Riwayat dari kantor pertanahan Jakarta Timur sesuai surat nomor HP.02.02/1788-31-75/XI/2022 tanggal 10 November 2022 diketahui bahwa aset terletak di jalan Pedati No.25 RT.013/04, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur sesuai gambar situasi seluas 386 m2. Pada sertifikat Nomor 1384/Cipinang Cempedak terdapat catatan pemblokiran atas surat BRI Cabang Jatinegara No. 558-V/KC/RTL/KRD/04/00 tanggal 20-04-2000.

11) Aset di Jl. Kayu Putih III A No. 25 berdasarkan Riwayat dari kantor pertanahan Jakarta Timur sesuai surat nomor HP.02.02/1788-31-75/XI/2022 tanggal 10 November 2022 diketahui bahwa sesuai surat ukur luas tanah adalah 75 m2 tercatat atas nama SUMARDI, penunjuk Tanah Negara terdaftar tanggal 11-12-2018 dan berakhir pada tahun 2038. Pada sertifikat ini terdapat catatan bahwa sertifikat tidak dapat dilakukan perbuatan hukum sebelum melunasi Pajak Terhutang BPHTB.

12) Aset di Jl. Cipinang Cempedak No. 37 bahwa tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001620).

13) Aset di Green Garden Blok N-10 No. 7 & Blok N-10a No. 36 bahwa tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001586).

14) Aset di Perum Mutiara Kedoya Blok D1/8, Kedoya Kebon Jeruk tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001584).

15) Aset di Pasar Jatinegara Blok A Lt III No.21, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001625) namun berdasarkan keterangan KPKNL bahwa Ruko telah dijual dan dikuasai oleh PD. Pasar Jaya.

16) Aset di Kenari Building Lt. 2 Blok E2-3, Jl. Salemba Raya tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001603).

17) Aset di Kalibata Mall, Jl. Kalibata Raya Raya tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001612).

18) Aset di Jl. Kramat Sentiong Gang III Rt 010/07, Jakarta Pusat tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001605).

19) Aset di Jl Brawijaya III No. 15, Jakarta Selatan Pusat tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001607), namun berdasarkan catatan KPKNL Aset diinfokan telah terjual lelang pada tahun 2011.

20) Aset di Jl. Hemat No.7 Jelambar, Kec. Jelambar, Jakarta Barat tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001585).

21) Aset di Jl. Kh. Fahrudin Blok B 4, No. 36 tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001601).

22) Aset di Jl. Kh. Fahrudin Blok B 5, No. 36 tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001602).

23) Aset di Jl. Iskandarsyah Raya Blok B2 - B3, Kec. Kebayoran Baru 36 tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001610). Berdasarkan catatan aset Dihuni Bapeltarum dan telah mendapat ijin dari Menteri Keuangan kepada Bapelterum NO. S-186/MK.6/2009 tgl. 3 Jul 2009.

24) Aset di Jl. Mangga Besar Raya No.55 F, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat tercatat pada aset titipan di KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001583).

Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 224 aset senilai Rp64.379.831.728,00.

(dalam rupiah)

Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2024)	**224**	**64.379.831.728**
Hasil Penelusuran TA 2024:		
Terjual di BPPN dan PPA	11	5.161.425.218
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	50.000.000
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	-	-
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
Aset jaminan BDL dan PKPS	-	53.138.170.416
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	21	702.217.206
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2024)	**191**	**6.030.236.094**

Berdasarkan hasil penelusuran aset eks BPPN tersebut selama periode Tahun 2024, telah ditemukan 33 aset dengan rincian sebagai berikut:

1) Aset di Jl. Asia No.320 Sli Rengas tercatat aset titipan pada KPKNL Medan (03.01.02.00001441)

2) Aset di Taman Malibu Indah, Komp. Malibu Blok B No. 77 tercatat pada LKTK Aset BPPN (03.01.02.00001447) dan sudah *released* PSP kepada Kemenkeu sesuai Kepdirjen KN No. 53/KN/2023 tanggal 15 Februari 2023 dan BAST No. BA-48/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

3) Aset di Jl. Hayam Wuruk XIX No. 56, Kel. Sempursari, Kec. Kaliwates tercatat Aset titipan pada KPKNL Jember (03.01.02.00001429).

4) Aset di Jl. Sei Btg Serangan No. 32 tercatat Aset titipan pada KPKNL Medan (03.01.02.00001443).

5) Aset di Pasar Setia Mekar tercatat Aset Titipan Pada KPKNL Bekasi (03.01.02.00001558).

6) Aset di Jl. Mataram No.1 Kel Petisah tengah Kec.Medan Barat, Medan tercatat pada aset titipan di KPKNL Medan (03.01.02.00001448).

7) Aset di Jl. Sutomo No.63 tercatat pada aset titipan di KPKNL Medan (03.01.02.00001444).

8) Aset di tercatat di Jl. Teuku Umar No.27, Kel Karangrejo Kec. Semarang Selatan Aset BPPN CaLK (03.01.02.00000421).

9) Aset di Jl. Daan Mogot No. 50 tercatat pada LKTK Aset BPPN (03.01.02.00000741).

10) Aset di Perumahan Taman Elang Blok A-6, Periuk, Kec. Jatiuwung Tercatat pada Aset titipan pada KPKNL Tangerang II (03.01.02.00001461).

11) Aset di Jl. Pluit Karang Asri II No. 4 tercatat Aset titipan KPKNL Jakarta V (03.01.02.00001637).

12) Aset di Jl. Raya Cibaduyut, Warung Nangka tercatat Aset titipan pada KPKNL Bandung (03.01.02.00001545).

13) Aset di JL. Raya Kartini No. 143 Kel Dr Soetomo Tegalsari Surabaya, terjual pada masa BPPN.

14) Aset di Jl. Raya Tandes Lor 8a Itandes Surabaya, terjual pada masa BPPN.

15) Aset di Jl. Sikatan No. 9 Krembangan Surabaya, terjual pada masa BPPN.

16) Aset di Jl. Raya Kenjeran Ds Kalijudan Sukolio Surabaya, terjual pada masa BPPN.

17) Aset di Jl. Walisongo No.5 Desa Jrakah, terjual pada masa BPPN.

18) Aset di Jl. Raya Gading Pantai Kav.3 Ds Sutorejo, Sukolilo, Surabaya, terjual pada masa BPPN.

19) Aset di Seabreeze Beachfront Condominium Carita Bay Resort 9261, terjual pada masa BPPN.

20) Aset di Ds. Sisir, Kec. Batu, Malang, terjual pada masa BPPN.

21) Aset di Jl. Jend. Basuki Rahmat Malang, terjual pada masa BPPN.

22) Aset di Jl. Orang Kayo Pingi, Jambi, terjual pada masa BPPN.

23) Aset di Jl. Jangli Telawah Ii No. 10 A Kel. Jangli, Kec Semarang Timur, terjual pada masa BPPN

24) Aset di Kalimalang Com.A3/11, terjual pada masa BPPN.

25) Aset di Tawangsari Semarang. (Komp. Perumahan Puri Anjasmoro), terjual pada tahun 2017.

26) Aset di Muara Baru, Penjaringan, tercatat aset eks BPPN kode register 03.01.02.00000807.

27) Aset di Jl. Bojong Koneng KM 1, KAV A3-04,06,08-14,KAV A4,01,03,04,07,09,10,12-18,KAV B3-24A,KAV B4-11, KAV B6-05,06,08-12,KAV B7 -07,KAV C2 - 06, KAV C3-06, 06A, 07A, 08A, 09-15,17,19,22,24,28,29,30,31,39-48,50,51,53,54, KAV C4 - 04,04 A,08, KAV C5 - 01,03-06,08, tercatat aset eks BPPN kode register 03.01.02.00000745.

28) Aset di JL. Cikande Serang, tercatat aset eks PPA PRK-B002738 dan *released* PSP kepada Kemenkeu sesuai KMK No. 205/KM.6/2020 tanggal 25 September 2020 dan BAST No. BA-180/KN/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

29) Aset di Ps. Pagi Mangga Dua BLOK D NO. 108,109,110,111,122,123,124,125, tercatat aset properti eks PPA nomor PRK-0012288, PRK-0012289, PRK-0012290, PRK-0012291, PRK-0012293, PRK-0012294, PRK-0012295, PRK-0012296

30) Aset di Kios Pasar Pagi Mangga Dua Blok B NO.167 LT.2, tercatat sebagai aset titipan pada KPKNL Jakarta V: 03.01.02.00001565.

31) Aset di Jl. Muara Karang Blok A - VIII, Utara NO. 75, Tercatat di aset titipan KPKNL Jakarta V: 03.01.02.00001640.

32) Aset di Mall Kalibata, Jakarta, Tercatat di aset titipan KPKNL Jakarta V nomor register 03.01.02.00001612.

33) Aset di Perum Renijaya,Bgr, tercatat aset properti eks PPA nomor PRK-0007027.

Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 191 aset senilai Rp6.030.236.094,00.

Terjadi perubahan terhadap jumlah aset properti eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) disebabkan oleh:

1) Pengurangan 1 (satu) aset yang berlokasi di Jalan Karasak Utara IV Nomor 14, Karasak senilai Rp0,00 karena dua kali catat dengan aset nomor register 03.01.02.00000263
2) Pengurangan 1 (satu) aset yang berlokasi di Blok bihbul, Sayati senilai Rp0,00 karena Laku terjual pada masa BPPN sesuai Risalah Lelang KPKNL Bandung Nomor 205/2000
3) Pengurangan 1 (satu) aset dengan kode register 03.01.02.00000443 karena dua kali catat dengan aset PPA PRK-B003018
4) Pengurangan 1 (satu) aset dengan kode register 03.01.02.00000444 karena dua kali catat dengan aset PPA PRK-B003020
5) Pengurangan 1 (satu) aset dengan kode register 03.01.02.00000445 karena dua kali catat dengan aset PPA PRK-B003019
6) Pengurangan 1 (satu) aset yang berlokasi di Jalan Vikamas Tengah I Blok H-VI Kav. no.10 Selatan, Kapuk Muara karena Laku Lelang Sesuai Risalah Lelang KPKNL Jakarta IV Nomor 044/2013 tanggal 21 Februari 2013
7) Pengurangan 1 (satu) aset yang berlokasi di Cilandak KKO Nomor 52, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta senilai Rp5.055.043.000,00 karena PSP kepada Badan Siber dan Sandi Negara sesuai KEP-105/KN/2024 tanggal 11 September 2024 dan BA-01/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025
8) Pengurangan 1 (satu) aset yang berlokasi di Cilandak KKO Nomor 52, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta senilai Rp8.982.666.000,00 karena PSP kepada Badan Siber dan Sandi Negara sesuai KEP-105/KN/2024 tanggal 11 September 2024 dan BA-01/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025
9) Perubahan nilai aset yang berlokasi di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Situbondo, Jawa Timur, TANJUNG KAMAL karena Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jember Nomor 0059/1/PRO-01/KNL.1004/01.01.00/2024 sebelumnya Rp0,00 menjadi Rp40.793.000.000,00.

Selain itu, terdapat aset properti eks BPPN, baik sebagian maupun seluruh tanah dan/bangunan, yang disewa oleh pihak ketiga yaitu:

1) Tanah seluas 782 m² berikut bangunan di atasnya seluas 2.205 m² di Jalan Pemuda Nomor 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp108.000.000,00 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-389/MK.6/2016 tanggal 6 Desember 2016 sebagaimana direvisi dengan surat nomor S-42/MK.6/2017 tanggal 22 Februari 2017. Jangka waktu sewa 21 Februari 2017 s.d. 21 Februari 2020. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp350.000.000,00 selama 5

(lima) tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-84/MK.6/2020 tanggal 18 Februari 2020. Jangka waktu sewa 23 Februari 2020 s.d. 22 Februari 2025.

2) Tanah seluas 69 m² di Jalan Merbabu No. 7, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp62.895.000,00 selama 5 (lima) tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-287/MK.6/2019 tanggal 24 April 2019. Jangka waktu sewa 1 Juli 2019 s.d. 30 Juni 2024. Selanjutnya diperpanjang sesuai surat persetujuan sewa nomor S-2/MK.6/WKN.02/2024 tanggal 23 Agustus 2024 senilai Rp118.045.000,00 sebanyak selama 5 tahun, jangka waktu 1 Juli 2024 s.d 30 Juni 2029. Perhitungan 12 Bulan Rp23.609.000,00.

3) Tanah seluas 50 m² berikut bangunan di atasnya seluas 150 m² di Jalan Medan - Binjai, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp44.100.000,00 selama 5 (lima) tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-927/MK.6/2019 tanggal 23 Desember 2019. Jangka waktu sewa 13 Maret 2020 s.d. 12 Maret 2025. Perhitungan 12 bulan R8.820.000,00.

4) Tanah seluas 12.000 m² di Jalan Industri, Dusun II, Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp186.000.000,00 selama 5 (lima) tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-31/MK.6/2020 tanggal 27 Januari 2020. Jangka waktu sewa 13 Maret 2020 s.d. 12 Maret 2025. Perhitungan 12 bulan Rp37.200.000,00.

5) Tanah seluas 17.654 m² di Jalan Industri, Dusun II, Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp84.386.000,00 selama 1 (satu) tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-4/MK.6/WKN.02/2024 tanggal 6 September 2024. Jangka waktu sewa 10 Juni 2024 s.d 9 Juni 2025.

6) Sebagian tanah seluas 42.940 m² di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur disewakan dengan nilai Rp222.000.000,00 selama 5 (lima) tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-189/MK.6/2020 tanggal 29 April 2020. Jangka waktu sewa 30 Juni 2020 s.d. 29 Juni 2025. Perhitungan 12 bulan Rp44.400.000,00.

7) Tanah seluas 2.093 m² berikut bangunan di atasnya seluas 210 m² di Kp. Sirnagalih Rt. 03 / 01, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Villa Kuala Deli) disewakan dengan nilai Rp108.000.000,00 selama 5 (lima) tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.08/2020 tanggal 29 Desember 2020. Jangka waktu sewa 7 Januari 2021 s.d. 7 Januari 2026. Perhitungan 12 bulan Rp21.600.000,00.

8) Tanah seluas 412 m² berikut bangunan di atasnya seluas 377 m² di Jalan Urip Sumoharjo No. 55 B Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan disewakan dengan nilai Rp726.570.000,00 selama 5 (lima) tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.15/2022 tanggal 21 Februari 2022. Jangka waktu sewa 20 Mei 2022 s.d. 19 Mei 2027. Perhitungan 12 bulan Rp145.314.000,00.

b. ASET NOSTRO

Dalam rangka penelusuran Aset Nostro, Direktorat PKNSI telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain berupa:

1) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Bank Indonesia

DJKN melalui surat Nomor S-1376/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 (lima) Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nostro eks. BBO/BBKU di bank-bank tersebut. PT Bank Mutiara mengkonfimasi rekening tersebut serta telah menyetorkannnya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tanggal 18 September 2014 dan PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut. Sedangkan tiga bank lainnya (Citibank, BRI, dan BPR Tri Sejahtera Makmur) tidak memberikan tanggapan.

Menanggapi surat Direktorat PKNSI, DJKN nomor S-2369/KN.5/2014 tanggal 30 September 2014, Bank Indonesia melalui surat nomor 16/156/DPTP tanggal 26 November 2014, menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509,00 dan Rp1.187.712.121,00 merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi *overdraft* (bukan aset nostro eks. BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penelitian dan penelusuran. Untuk rekening senilai Rp406.733.525.331,33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan untuk rekening Bank Indover, tidak terdapat nama bank eks. BBO/BBKU yang mengklaim dana ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada Trustee Indover Bank senilai EUR 338.538,20 yang berstatus *dispute*.

Selanjutnya, melalui surat undangan nomor UND-57/KN.5/2017 tanggal 25 Februari, DJKN mengundang Bank Indonesia untuk melakukan rapat pembahasan dana nostro di Bank Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam sistem penatausahaan rekening Bank Indonesia, saat ini tidak tercatat rekening atas nama eks. Bank BDNI. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia meminta informasi yang lebih rinci atas rekening dimaksud berupa nomor rekening, nama rekening, nominal dan periode penyimpanan, untuk melakukan pengecekan apakah pernah ada rekening atas nama Bank BDNI di Bank Indonesia dan apabila ada bagaimana proses penutupan rekening tersebut. Sesuai penjelasan Bank Indonesia, penutupan rekening dilakukan setelah rekening tersebut bersaldo nol.
b) Berdasarkan Dokumen Daftar Klaim dari Trustee Indover Bank per tanggal 20 Oktober 2009 yang disampaikan Bank Indonesia, diketahui bahwa terdapat tagihan Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan kepada Trustee Indover Bank yang berasal dari dana eks. BBO/BBKU dengan nilai sebesar EUR338.538,20 yang berstatus dispute, dengan Person in Charge (PIC) Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu, namun berdasarkan Dokumen Daftar Klaim per tanggal 10 September 2010, tagihan Kementerian Keuangan tersebut telah bersaldo nol.
c) Bank Indonesia saat ini menatausahakan rekening eks. Bank Ficorinvest dan Bank Tata dengan nilai sebesar Rp10.028.227.629,98, namun dikarenakan kedua rekening tersebut dibuka oleh internal Bank Indonesia terkait fasilitas diskonto dan koreksi *overdraft* maka Bank Indonesia masih memerlukan waktu untuk melakukan penelitian dan penelusuran atas dana di kedua rekening tersebut.

2) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Bank Ganesha

Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks BDR di Bank Ganesha sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Ganesha juga menyatakan memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083,00.

Melalui surat Nomor S-2586/KN.5/2014 tanggal 15 Oktober 2014, DJKN telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan dana eks BPPN yang tersimpan di PT Bank Ganesha ke rekening KUN. Melalui surat Nomor 277/Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Bank Ganesha menyampaikan bahwa terdapat kewajiban PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Ganesha juga memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083,00 sehingga secara set off eks BDR masih mempunyai kewajiban membayar kepada PT Bank Ganesha sebesar Rp45.605.763.668,00.

Melalui surat Nomor S-35/KN.5/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan dan S-1157/KN.5/2015 tanggal 15 April 2015, DJKN telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan kewajibannya kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415,00 ke Kas Negara karena dana tersebut tidak dapat dilakukan *set off* sedangkan tagihan PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp51.447.560.083,00 penyelesainya dilakukan melalui mekanisme APBN dan harus didukung dengan dokumen yang lengkap.

Melalui surat nomor S-200/KN.5/2015 tanggal 16 Februari 2016, DJKN telah mengundang PT Bank Ganesha untuk melakukan pembahasan, namun PT Bank Ganesha tidak hadir. Atas ketidakhadiran tersebut, melalui surat No.088/DIR/II/16 tanggal 23 Februari 2016, PT Bank Ganesha menyampaikan permintaan waktu untuk memastikan dan melengkapi data.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.05/2005, program penjaminan yang dilaksanakan oleh BPPN dengan memberikan jaminan terhadap pembayaran Bank Umum telah berakhir sejak tanggal 22 September 2005, dengan demikian maka tagihan Bank Ganesha kepada Bank BDR sudah tidak dijaminkan pemerintah sehingga sehingga *set off* dengan dana Bank BDR tidak dapat dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui surat nomor S-2369/KN.5/2016 tanggal 23 Desember 2016, DJKN telah meminta kembali Bank Ganesha untuk menyetorkan dana Bank BDR ke Kas Negara, namun sampai dengan tanggal penyajian Laporan Keuangan ini, Bank Ganesha belum menyetorkan dana eks. BDR tersebut ke Kas Negara.

Melalui surat nomor S-772/KN.5/2019 tanggal 5 September 2019 dan S-624/KN.5/2020 tanggal 21 September 2020, DJKN kembali meminta Bank Ganesha untuk menyetorkan dana BDR ke Kas Negara dan menyampaikan bahwa tagihan kontinjensi Bank Ganesha tidak dapat dibayarkan. Sebagai tanggapan atas surat nomor S-624/KN.5/2020 tanggal 21 September 2020, telah dilakukan koordinasi dengan Bank Ganesha dan disepakati pencairan dana eks BDR sebesar Rp5.841.796.415,00 akan dilakukan secara bertahap selama 10 (sepuluh) kali pembayaran dengan jangka waktu pembayaran selama 10 (sepuluh) tahun.

Pada tanggal 8 Oktober 2020 ditandatangani perjanjian dengan Bank Ganesha untuk kesepakatan pembayaran dana BDR yang dilakukan bertahap selama 10 (sepuluh) kali, dimulai sejak tahun 2020 dan berakhir tahun 2029 dengan jumlah pembayaran angsuran masing-masing sebesar Rp584.179.641,50 yang jatuh tempo setiap tanggal 1 Desember.

a) Pembayaran tahap I pada tanggal 1 Desember 2020. Melalui surat nomor S-1196/KN.5/2020 tanggal 19 November 2020, telah disampaikan surat penagihan pembayaran I kepada Bank Ganesha. Atas perjanjian tersebut telah dilakukan pembayaran tahap I pada tanggal 30 November 2020 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN EFE9F48VUA3TIN28).

b) Pembayaran tahap II pada tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN 4277E2G4UU94Q4BT).

c) Pembayaran tahap III pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN 3E86D6QR9C4NU3PM).

d) Pembayaran tahap IV pada tanggal 28 November 2023 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN 1578F0JUNU9CNA4G)

e) Pembayaran tahap V pada tanggal 26 November 2024 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN 25D64522A090N4Q3)

f) Pembayaran tahap VI pada tanggal 13 November 2025 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN 6D7DD522CT9E11L0).

3) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Clearstream Banking SA

Rekening eks. Bank BIRA di Clearstream Banking SA senilai USD258,438.50 telah terkonfirmasi sebagai Aset Nostro eks BPPN. Saat ini rekening tersebut masih dalam tahap pengembalian ke Kas Negara.

Melalui surat nomor S-1125/KN.5/2019 tanggal 29 November 2019, DJKN telah meminta Clearstream Banking SA untuk melakukan transfer dan penutupan rekening Bank BIRA pada Clearstream Banking SA, namun belum mendapat balasan dan tindak lanjut dari Clearstream Banking SA.

DJKN kembali menyurati Clearstream Banking SA melalui surat nomor S-725/KN.5/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang kemudian mendapatkan balasan melalui surat elektronik, sehingga komunikasi dengan Clearstream Banking SA dapat dilakukan dua arah. Pihak Clearstream meminta specimen tanda tangan pihak yang berwenang dalam pencairan dana Bank BIRA dan dilegalisasi oleh notaris publik. Sedang dalam proses pembuatan dokumen dimaksud.

Clearstream Banking SA telah mencairkan dana Bank BIRA dan telah tercatat masuk ke Kas Negara pada tanggal 18 Desember 2020 senilai Rp3.655.871.021,00 (No. Dok. Penerimaan 9186676352FS) sehingga pengelolaan aset nostro Bank BIRA pada Clearstream Banking SA telah selesai.

Terkait Aset Nostro yang tercatat di CaLK LKBUN TK Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, juga telah melakukan upaya penagihan meski tidak didukung dengan data dan/atau dokumen yang memadai, yaitu:

a) Terkait Aset Nostro di CaLK eks Bank Central Dagang (BBKU) di Bank CIC sebesar Rp54.584.286,49, Direktorat PKN telah bersurat kepada OJK melalui surat Nomor S-1842/KN.5/2021 tanggal 29 Agustus 2021. Sesuai surat Nomor S-354/PB.12/2021 tanggal 15 September 2021, OJK menanggapi bahwa Bank CIC telah beberapa kali merger dan berubah nama, terakhir menjadi PT Bank Mutiara Tbk.

b) Terkait Aset Nostro di CaLK eks Bank Umum Nasional (BUN) di Bank BRI Cabang Cut Mutiah sebesar Rp80.303.141,44, Direktorat PKN telah bersurat kepada Pemimpin Cabang BRI Cut Mutiah melalui surat Nomor S-132/KN.5/2021 tanggal 10 Februari 2021, namun belum ada jawaban.

c) Terkait Aset Nostro di CaLK eks Bank Umum Nasional (BUN) di Citibank senilai USD976,792.65, Direktorat PKN telah bersurat kepada Direksi Citibank N.A, Indonesia melalui surat Nomor S-130/KN.5/2021 tanggal 10 Februari 2021, namun belum ada jawaban.

d) Terkait Aset Nostro di CaLK eks Bank Dagang Negara Indonesia (BBO) pada BPR Tri Sejahtera Makmur, Direktorat PKN telah bersurat kepada Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-1827/KN.5/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Sesuai surat Nomor SR-52/KR.021/2021 tanggal 6 Oktober 2021, OJK menanggapi bahwa BPR Tri Sejahtera Makmur saat ini bernama BPR Karunia Kanaka beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa Blok B Nomor 46/47, Kota Wisata Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

   Direktorat PKN telah bersurat kepada Pemimpin BPR Karunia Kanaka (d/h. BPR Tri Sejahtera Makmur) melalui surat Nomor S-2259/KN.5/2021 tanggal 08 November 2021. Sesuai surat Nomor S-426/DIR/BPR-KK/XI/2021 tanggal 17 November 2021, BPR Karunia Kanaka memberikan tanggapan bahwa BPR Tri Sejahtera Makmur telah diambil alih oleh BPR Karunia Kanaka. Pada saat diambil alih, posisi aset dan kewajiban dalam kondisi nol, termasuk tidak tercatat rekening eks BDNI.

e) Terkait Aset Nostro di CaLK eks Bank Dagang Negara Indonesia (BBO) di Bank Ganesha, terdapat surat Bank Ganesha Nomor 277/Dir/XII/14 tanggal 29 Desember 2014 yang ditujukan kepada Direktur PKNSI, yang pada intinya tidak terdapat dana outstanding eks BDNI di Bank Ganesha.

f) Terkait Aset Nostro di CaLK eks Bank Dagang Negara Indonesia (BBO) di Bank Indonesia senilai Rp406,733,525,331.33 dan Aset Nostro di CaLK terdiri dari 26 rekening Bank Beku di Bank Indover senilai Rp4,976,247,431.22, Direktorat PKN telah bersurat kepada Direktur Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri Bank Indonesia melalui surat Nomor S-1172/KN.5/2021 tanggal 26 Mei 2021. Sesuai surat Nomor No. 23/84/DPPT/Srt/B tanggal 8 Juli 2021, Bank Indonesia menanggapi bahwa terkait Aset Nostro eks BDNI, Bank Indonesia mengalami kesulitan untuk menemukan rekening TRR-Bank Indonesia tersebut. Sedangkan terkait Aset Nostro di Bank Indover, Bank Indonesia tidak ikut menjalankan operasional Bank Indover baik pada saat masih beroperasi maupun setelah Bank Indover dinyatakan bangkrut dan/atau dicabut ijin usahanya oleh Otoritas yang berwenang di Belanda. Oleh karena itu, Bank Indonesia tidak memiliki catatan atas rekening yang ditatausahakan oleh Bank Indover termasuk rekening nostro milik BBO/BBKU.

g) Terkait Aset Nostro di CaLK eks Bank Dagang Negara Indonesia (BBO) di Indovina Bank (Vietnam), Direktorat PKN telah bersurat kepada General Director of Indovina Bank melalui surat Nomor S-231/KN.5/2021 tanggal 24 Februari 2021. Sesuai email tanggal 24 Maret 2021, Indovina Bank memberikan tanggapan bahwa BDNI tidak pernah membuka rekening di Indovina Bank.

c. SURAT BERHARGA EKS BPPN

Pada tanggal 29 s.d. 31 Juli 2013, Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank. Hasil pemeriksaan fisik surat berharga di Kustodi Citibank yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI adalah sebagai berikut:

1) Terdapat kekeliruan pada data surat berharga yang disampaikan oleh pihak DJKN yakni pada kolom jumlah lembar karena berdasarkan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank kolom tersebut tidak menunjukan jumlah lembar melainkan nilai total *coupun* atau nilai *principal* dari surat berharga yang bersangkutan.

2) Terdapat perbedaan dan kesalahan klasifikasi jenis surat berharga yaitu masukan ke dalam *Goverment Bond* namun setelah dilakukan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank surat berharga tersebut masuk kedalam, *Cooperate Bond*.

3) Sebagian besar surat berharga yang ada tidak mempunyai *principal*, hanya terdapat Coupon saja, sehingga tidak diketahui secara pasti tanggal jatuh tempo dari obligasi (*principal*) tersebut serta beberapa Coupun yang ada sudah melewati masa jatuh tempo.

4) Surat Berharga milik DGS Finance International sudah dihapuskan dari *Market Trading* Hongkong karena nilainya sudah nihil dan perusahaannya sudah tidak ada lagi.

Penyajian surat berharga eks BPPN telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI tersebut di atas yaitu terdapat penyesuaian akun *Goverment Bond* yang di reclass ke *Cooperate Bond* serta pencatatan *Corporate Bonds* Dgs International Finance Co dengan nilai Rp0,00 kerena telah dihapuskan *Market Trading* Hongkong.

d. ASET SAHAM EKS BPPN

Penyajian nilai aset saham yang disimpan di Kustodi Citibank didasarkan pada nilai saham yang disajikan pada *Monthly Report* Citibank per 31 Desember 2021.

Pengelolaan aset saham yang disimpan di Kustodi Citibank meliputi pencatatan saham, monitoring melalui *Monthly Report*, serta mencatat atau mengkoordinasikan pembagian dividen. Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank. Pada saat pemeriksaan tersebut berdasarkan infomasi dari Citibank, diketahui bahwa sebagian perusahaan yang sahamnya di simpan di di kustodi Citibank telah tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui 14 saham yang disimpan di kustodi Citibank Jakarta berstatus aktif dan saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 September 2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan Laporan Keuangan, hanya 9 (sembilan) emiten dari 15 emiten yang disurati, yang menjawab surat Direktorat PKNSI tersebut. Dari 9 (sembilan) emiten yang memberikan tanggapan hanya 2 emiten yang mengkonfirmasi kepemilikan saham eks. BPPN sedangkan emiten lainnya tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham eks. BPPN dan hanya menginformasikana nama Biro Administrasi Efeknya masing-masing. Untuk aset saham eks BPPN yang status emitennya belum diketahui, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI melalui surat Nomor

S-1233/KN.5/2014 tanggal 28 Mei 2014 telah meminta informasi kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumhan atas status emiten tersebut, namun belum mendapat tanggapan.

Terkait saham PT Mulia Industrindo, Tbk berdasarkan hasil penelitian dokumen, 5000 lembar saham PT Mulia Industrindo, Tbk yang tersimpan di Kustodi Citibank bukan merupakan aset eks. BPPN (Bank Bira). Berdasarkan *Agency Agreement* tanggal 15 Desember 1996, diketahui bahwa 3000 lembar saham tersebut merupakan milik Willow Overseas Investment Limited, dan berdasarkan *Placement Agreement* tanggal 4 April 1997, diketahui 2000 saham PT Mulia tersebut merupakan milik Crestlawn Ltd, Saham tersebut telah dikembalikan kepada Ery Yunasri & Partners selaku kuasa Willow Overseas Investment Limited dan Crestlawn Ltd.

Berdasarkan surat PT Datyndo Entricom selaku Biro Adminstrasi Efek emiten nomor DE/X/2014-7152 tanggal 9 Oktober 2014, diketahui saham PT Reksadana Perdana, Tbk dh. PT BDNI Reksadana telah berubah bentuk menjadi unit KIK Reksadana Prima dengan jumlah konversi atas saham 8000 lembar saham milik Kementerian Keuangan adalah menjadi 29.625.788 unit KIK. Saat ini pengkonversian saham milik Kementerian Keuangan menjadi unit KIK Reksadana Prima belum dilakukan.

Pada tahun 2018 dilakukan reklasifikasi aset saham PT Sukarpaja Estetika Padang Golf dari aset saham eks BPPN menjadi aset saham eks kelolaan PT PPA. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan perseroan. Berdasarkan Laporan Keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero). Pinjaman Subordinasi tersebut dapat dikonversi menjadi *Transferable Membership*.

Pada tahun 2020 saham PT Karabha Digdaya telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.

e. ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA adalah aset properti yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara di peradilan (*free and clear*) yang semula diserahkelolakan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kemudian dikembalikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai berita acara serah terima tanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkelolakan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016, Pengelolaan Aset Properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara penjualan melalui lelang, pemanfaatan, penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui Penetapan Status Penggunaan, dan pelepasan hak dengan pemberian kompensasi.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain aset properti eks kelolaan PT PPA belum disajikan dengan nilai wajar dan agar penyajian aset properti eks kelolaan PT PPA diseragamkan dengan penyajian aset properti eks BPPN dimana aset properti eks BPPN disajikan sesuai jumlah

dokumen yang dikuasai Kementerian Keuangan c.q. DJKN (antara lain Sertifikat, Girik, AJB, dsb) sedangkan aset properti eks kelolaan PT PPA disajikan sesuai kode PRK yang berasal sejak awal penyerahan dari PT PPA kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN, oleh karena itu, dilakukan penilaian terhadap sisa aset properti eks kelolaan PT PPA serta penyajian jumlah aset properti eks kelolaan PT PPA disesuaikan dengan penyajian aset properti eks BPPN.

Aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang didukung dengan asli dokumen kepemiilkan (sertipikat/*covernote*) disajikan di Neraca sebesar nilai wajar, sedangkan yang tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 520 aset dengan nilai sebesar Rp2.281.800.426.455,00, sedangkan per 31 Desember 2025 sejumlah 490 dengan nilai sebesar Rp1.688.742.996.247,00.

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (unit)	Nilai
Dokumen berupa AJB,APHT, Salinan Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB	490	1.688.742.996.247

f. ASET SAHAM (NON BANK) EKS KELOLAAN PT PPA

Aset saham PT Bina Prima Perdana yang merupakan perusahaan yang termasuk dalam Grup Texmaco tidak lagi masuk dalam draft perjanjian pengelolaan aset kepada PT PPA, sehingga direklasifikasi dari aset saham yang diserahkelolakan kepada PT PPA menjadi aset saham nonbank eks kelolaan PT PPA.

Pada tahun 2016, aset saham PT Asia Natural Resources Tbk, PT Jemblo Cable Company Tbk, PT Sukapraja Estetika Padang Golf tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT Asia Natural Resources Tbk di bursa telah di-*suspend* oleh BEI.

Pencatatan kepemilikan pemerintah pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) dicatat sebagai Investasi Permanen pada BA 999.03. Kepemilikan pemerintah pada PT. TPI pada dasarnya adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada saatnya, pemerintah akan melepaskan kepemilikannya kepada pihak yang tepat.

Pengelolaan PMN berupa aset saham pada PT. TPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana Pasal 4 PP No. 66 Periode Tahun 2020. Pengelolaan aset eks BPPN pada dasarnya dalam rangka *recovery* atas BLBI yang sudah dikeluarkan.

Pada Tahun 2020 saham PT Sejahtera Eka Graha telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.03 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.

g. Pengungkapan Penting Terkait Pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

1) Penjelasan atas pengalihan Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero) menjadi PMN pada PT. TPI:

a) Kepemilikan saham Pemerintah pada PT TPI

(1) Salah satu aset kredit eks BPPN yang dikelola oleh Menteri Keuangan cq. DJKN adalah piutang kepada TPI dalam bentuk *Multi Years Bond* (MYB) yang diterbitkan oleh TPI, dan Menteri Keuangan sebagai satu-satunya Pemegang Obligasi (*MYB Holder*). TPI merupakan suatu *holding company* yang bergerak di bidang industri petrokimia yang dibentuk pada tahun 2004, sebagai tindak lanjut restrukturisasi yang dilakukan oleh BPPN terhadap utang-utang Grup Silakencana Tirtalestari. Struktur kepemilikan TPI pada saat terbentuk adalah sebesar 70 persen dimiliki oleh BPPN, dan sebesar 30 persen dimiliki oleh PT Silakencana Tirtalestari (PT ST). Setelah TPI terbentuk, langkah selanjutnya dari kesepakatan restrukturisasi adalah diterbitkannya MYB oleh TPI, dan BPPN adalah sebagai satu-satunya *Bond Holder*.

(2) Berdasarkan Keppres Nomor 15 tahun 2004, Menteri Keuangan kemudian menggantikan kedudukan BPPN sebagai pemegang saham di TPI, dan sekaligus juga sebagai MYB *Holder*. Sampai dengan saat ini, DJKN telah melaksanakan pengelolaan aset kredit dimaksud dengan berpedoman kepada ketentuan pengelolaan aset eks BPPN, dengan tujuan utama untuk mewujudkan *recovery* aset kredit yang pada dasarnya merupakan piutang negara.

(3) Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan petrokimia Indonesia, diambil suatu tindakan strategis dalam konteks pengelolaan aset kredit eks BPPN, yaitu melakukan konversi utang (MYB) menjadi saham Menteri Keuangan di TPI dengan melakukan konversi utang TPI, sejalan dengan isi Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Millik Negara/Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Konversi utang TPI pada dasarnya adalah strategi DJKN dalam pengelolaan aset kredit eks BPPN, sebagaimana Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries, yang berbunyi bahwa pengelolaan penyertaan modal negara berupa aset saham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks Badan Khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan.

(5) Mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah (vide. PP71 dan aturan turunannya), maka kepemilikan saham pemerintah pada TPI sebesar Rp2.908.409.694.537,00 dalam bentuk penyertaan modal negara, dicatatkan menjadi bagian dari investasi pemerintah berupa Investasi Permanen, sehingga DJKN mencatat pada BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Sedangkan

sisa utang TPI sebesar Rp811.643.881.275,00 tetap dicatatkan pada BA 999.99 Transaksi Khusus.

(6) Penyertaan Modal Negara pada PT TPI pada saatnya nanti akan diserahkan kepada PT PERTAMINA Persero dengan maksud agar PT TPI dapat lebih berkembang.

b) Mutasi Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

1) Rincian perubahan nilai pokok MYB per tahun sampai dengan dikonversi

Perubahan nilai pokok MYB disebabkan adanya pembayaran angsuran oleh TPI (tahun 2005 s.d. 2017) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo Awal (Utang Pokok MYB)	Mutasi (Angsuran Pokok)	Saldo Akhir
2004	3.266.000	-	3.266.000
2005	3.266.000	(11000)	3.255.000
2006	3.255.000	-	3.255.000
2007	3.255.000	(50000)	3.205.000
2008	3.205.000	-	3.205.000
2009	3.205.000	(35000)	3.170.000
2010	3.170.000	(85000)	3.085.000
2011	3.085.000	(130000)	2.955.000
2012	2.955.000	(126.76500)	2.828.23.500
2013	2.828.235.000	(50.215.738.593,06)	2.778.019.261.406,94
2014	2.778.019.261.406,94	(90.526.680.949)	2.687.492.580.457,94
2015	2.687.492.580.457,94	(32.610.184.030)	2.654.882.396.427,94
2016	2.654.882.396.427,94	(36.640.901.891)	2.618.241.494.536,94
2017	2.618.241.494.536,94	-	2.618.241.494.536,94

2) Dasar penilaian aset yang diserahkan untuk dikelola PT PPA sebesar Rp873.811.488.440,40

a. Berdasarkan Perjanjian Serah Kelola dari Kemenkeu kepada PT PPA (Persero), Nilai Aset merupakan nilai atas Aset yang diserahkelolakan yang ditetapkan oleh Menkeu pada tanggal serahkelola berdasarkan hasil penilaian yang masih berlaku.

b. Nilai Aset tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.06/2008, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Aset Kredit	Nominal	Nilai Aset
1	*Multi Years Bond* (MYB)	3.266.000.000.000	1.024.000.000.000
2	*Mandatory Convertible Bond* (MCB)	4.167.000	497.813.000.000
Total Nilai Aset (Saldo Akhir 2008)			**1.521.813.000.000**

c. Adapun mutasi Nilai Aset selama diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) tahun 2009 s.d. 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Deskripsi	Nilai Aset	Keterangan
Saldo Awal (2009)	1.460.570.023.902,64	Selisih sebesar Rp61,2M (1.521.81300-1.460.570.023.902,64), karena pengaruh penurunan Nilai Aset. Awalnya Nilai Aset MYB dihitung dengan nilai pokok 3.266000,

Deskripsi	Nilai Aset	Keterangan
		namun dinilai ulang menjadi 3.205000 karena adanya pembayaran tahun 2005 dan 2007.
Mutasi (2009 s.d. 2017)	(586.758.505.463,06)	Angsuran pokok selama tahun 2009 s.d. 2017
Saldo Akhir (2017)	**873.811.488.440,40**	

d. Nilai Saldo akhir digunakan sebagai nilai pada saat diserahkelolakan kepada PT PPA, sebagai dasar dalam penghitungan Imbalan Pengelolaan Aset/Imbalan Kinerja kepada PT PPA.

e. Ketika pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA kepada Kemenkeu, maka saldo Aset Kredit menggunakan jumlah utang *as is* TPI dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok. Dengan demikian, hubungan antara Nilai Aset yang dikelola oleh PT PPA sebesar Rp873.811.488.440,40 dengan utang pokok MYB TPI sebesar Rp3.266.000.000.000,00 yang dikelola oleh DJKN sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Utang Pokok (DJKN)
Saldo Awal	3.266.000.000.000
Saldo 2009	3.205.000.000.000
Mutasi (2009 s.d. 2017)	(586.758.505.463,06)
Saldo Akhir (2017)	**2.618.241.494.536,94**

3) Mutasi saldo dari Rp873.811.488.440,40 menjadi Rp811.643.881.275,00 dan Perhitungan bunga dan penalti MYB TPI sebesar Rp811.643.881.275,00

a. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, saldo sebesar Rp873.811.488.440,40 merupakan saldo akhir Nilai Aset yang dikelola oleh PT PPA per 31 Desember 2017, yang kemudian dengan pengembalian pengelolaan aset kepada Kemenkeu, maka saldo Aset Kredit menggunakan jumlah utang *as is* TPI dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok.

b. Sementara saldo sebesar Rp811.643.881.275,00 merupakan saldo utang bunga dan penalti (*unconverted portion MYB*) per 31 Desember 2019, dengan keterangan:

(dalam rupiah)

Tanggal	Transaksi	Angsuran	Saldo
30/12/2018	Saldo Bunga+Penalti	-	733.924.166.667
31/03/2019	Saldo Bunga+Penalti	-	767.787.633.619
30/09/2019	Saldo Bunga+Penalti	-	836.643.881.275
20/11/2019	Angsuran	(5.000.000.000)	831.643.881.275
19/12/2019	Angsuran	(20.000.000.000)	811.643.881.275

2) Penjelasan atas koreksi dan penyerahan aset kredit eks kelolaan PT PPA (Persero) atas nama Grup Texmaco

Aset kredit Grup Texmaco telah diserahkan ke PUPN DKI Jakarta melalui KPKNL Jakarta III dengan Surat Nomor S-840/KN/KN.5/2021 tanggal 22 Oktober 2021 hal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Grup Texmaco; dengan jumlah hak tagih sebesar Rp31.722.860.855.522,00 dan USD3,912,137,146.21. Atas penyerahan tersebut, KPKNL melakukan penelitian, dan meminta konfirmasi atas selisih *outstanding* sebesar USD1.21. Setelah dilakukan penelitian kembali, PKNSI menyampaikan konfirmasi atas besaran *outstanding*, dengan surat nomor S-2327/KN.5/2021 tgl. 18 November 2021, yg mengkonfirmasikan *outstanding* utang sebesar Rp31.722.860.855.522,00 dan USD3,912,137,145. Setelah mendapatkan konfirmasi, PUPN kemudian menerbitkan Surat

Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. Grup Texmaco, dengan *outstanding* utang sebesar Rp31.722.860.855.522,00 dan USD3,912,137,145.

Terkait pengakuan dan pengukuran Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero), khususnya terkait aset kredit Group Texmaco pada LKBUN TK BLBI Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam PMK No. 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 127/PMK.05/2018, diatur bahwa Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) diakui pada saat berakhirnya perjanjian serahkelola antara PT PPA (Persero) dengan Menteri Keuangan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Aset dari PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan Tahun 2009, diatur pula bahwa aset kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) diukur sebesar nilai yg belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Outstanding Utang Grup Texmaco sebagaimana diserahkan piutangnya kepada PUPN didasarkan pada Surat Direktur PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) nomor S-590/PPA/ID/0415 tanggal 24 Juni 2015. Hal tersebut sebagaimana permintaan konfirmasi dari Direktorat PKNSI kepada PT PPA (Persero) melalui surat Nomor: S-1379/KN.5/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan surat nomor S-1309/KN.5/2021 tgl 10 Juni 2021.

3) Penyelesaian Aset Kredit Eks Kelolaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Pada Tahun 2023 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia (d.h. PT Perusahaan Perdagangan Indoenesia) pada tanggal 29 Desember 2023. Dalam PP dimaksud disetujui bahwa nilai penambahan penyertaan modal negara ke dalam saham PT RNI sebesar Rp2.564.710.242.000,00 yang terdiri dari:

a) Konversi piutang pokok negara berupa Rekening Dana Investasi (RDI) dan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) sebesar Rp1.955.049.413.943,56,

b) Konversi piutang pokok negara berupa aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp609.660.827.108,12.

Nilai sebagaimana huruf b tersebut merupakan nilai utang PT PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang tercatat di dalam neraca LKBUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI. Dengan adanya PMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2023 tersebut yang mengkonversi piutang negara menjadi penyertaaan modal negara maka sisa utang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah selesai.

4) Penyelesaian Aset Kredit Eks Kelolaan PT Dirgantara Indonesia

Penyelesaian aset kredit atas nama debitur PT Dirgantara Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a) Rekonsiliasi antara pemerintah dengan PT Dirgantara Indonesia sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Data Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada PT Dirgantara Indonesia Nomor BAR 01/202207/REKON/BPPN/KN.42/2022 tanggal 13 Juli 2022. Berdasarkan BAR tersebut, saldo utang PT Dirgantara Indonesia adalah sebesar:

(dalam rupiah)

Saldo	*Outstanding* (USD)	Kurs Tengah BI 22 Juli 2024	Konversi IDR
Pokok	43,476 ,186.56	14.933	649.229.893.900,48
Bunga	56,099.17	14.933	837.728.905,61
Jumlah	**43,532,285.73**	**14.933**	**650.067.622.806,09**

b) Sisa utang PT Dirgantara Indonesia senilai total Rp650.067.622.806,09 kemudian dinovasikan kepada PT LEN Industri berdasarkan Perjanjiann Novasi dan Amandemen Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero)PT LEN Industri serta PT Dirgantara Indonesia:
   I. PRJ-2/KN/2024 tanggal 21 Juni 2024; dan
   II. PRJ-3/KN/2024 tanggal 21 Juni 2024

c) Atas utang tersebut, berdasarkan kesepakatan di dalam BAR-01/202207/REKON/BPPN/KN.42/2022 tanggal 13 Juli 2022 dilakukan penyelesaian sebagai berikut:

   I. Pokok utang senilai Rp649.229.893.900,48 telah ditindaklanjuti dengan proses restrukturisasi dengan cara konversi menjadi tambahan penyertaan modal negara dengan diterbitkannya surat persetujuan Mentari Keuangan nomor S-815/MK.06/2022 tanggal 03 Oktober 2022 hal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Len Industri (Persero). Setelah terbit persetujuan Menteri Keuangan, ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT LEN Industri. PP tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme APBN dengan diterbitkannya SP2D Nomor 240190302000049 tanggal 31 Desember 2024.

   II. Bunga Utang senilai Rp837.728.905,61 telah dibayarkan secara tunai dan telah tercatat diterima pada kas negara berdasarkan Bukti Penerimaan Negara sebagaimana NTPN 8DEA1522A05E7O29 tanggal 12 November 2024.

d) Dengan adanya proses PMN atas pokok utang dan pembayaran bunga utang secara tunai tersebut, maka aset kredit atas nama debitur PT Dirgantara Indonesia yang dinovasikan kepada PT LEN Industri dinyatakan telah selesai.

3. Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Aset Berperkara

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum.

4. Pengungkapan Penting Terkait Inventarisasi Kelengkapan Data, Dokumen Kepemilikan Dan Peralihan, Serta Penguasaan Fisik Atas Aset Eks BLBI

Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan terhadap aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero). Pemetaan atas aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) masih berdasarkan data rekapitulasi aset properti yang disandingkan dengan arsip dokumen penguasaan dan pengalihan yang dimiliki Kementerian Keuangan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2009 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut:

a. Pemetaan Aset Properti eks BPPN

1) Terdapat 156 unit aset senilai Rp1.833.032.557.927,00 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

2) Terdapat 1.002 unit aset senilai Rp2.001.003.706.228,00 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.

3) Terdapat 178 unit aset senilai Rp437.203.153.078,00 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.

4) Terdapat 684 unit aset senilai Rp85.749.838.000,00 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

b. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)

1) Terdapat 934 unit aset senilai Rp5.143.872.058.299,00 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

2) Terdapat 532 unit aset senilai Rp891.506.456.086,00 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.

3) Terdapat 23 unit aset senilai Rp127.119.448.000,00 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.

4) Terdapat 490 unit aset senilai Rp 1.688.742.996.247,00 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut atas data dan dokumentasi yang ada diketahui bahwa:

a. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 423 aset.

b. Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 740 aset.

c. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 751 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemasangan papan nama pengamanan pada aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) sebanyak 510 bidang, pada tahun 2023 kembali dilakukan pemasangan papan nama pengamanan sebanyak 753 bidang. Pada Tahun 2024, dilakukan pemasangan papan nama pengamanan sebanyak 197 bidang. Pada Tahun 2025, kembali dilakukan pemasangan papan nama pengamanan oleh KPKNL yaitu sebanyak 104 bidang.

Saat ini, Kementerian Keuangan sedang melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan atau peralihan dan penguasaan aset Properti, sebagai dasar penyajian aset properti eks

BPPN dan eks PT PPA (Persero) tersebut pada Laporan Keuangan selanjutnya. Kegiatan inventarisasi dokumen aset properti eks BPPN dan PT PPA (Persero) dilakukan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali dilakukan inventarisasi beserta verifikasi terhadap setiap dokumen eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) secara lebih rinci. Terhadap hasil inventarisasi aset properti yang memerlukan tindak lanjut, telah dimintakan reviu kepada APIP. Hasil dari reviu tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Berdasarkan Kepdirjen KN Nomor 162/KN/2023 tanggal 06 November 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Aset Properti Eks BPPN dan Aset Properti Eks BDL, telah dilaksanakan Inventarisasi dan Penilaian, dengan rekap sebagai berikut:

Tahun	Jumlah KPKNL	Jumlah Aset	Nomor ND Permintaan Reviu
2023	4 KPKNL	99 Aset	ND-990/KN.4/2024 tanggal 30 April 2024
2024	32 KPKNL	387 Aset	ND-394/KN.4/2025 tanggal 13 Februari 2025
2025	21 KPKNL	312 Aset	ND-9/KN/2026 tanggal 13 Januari 2026

Terhadap hasil dari IP tahun 2024 telah dilakukan pemutakhiran pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus periode Semester I 2025. Selanjutnya terhadap hasil dari IP tahun 2025, akan dilakukan pemutakhiran pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus pada Semester I 2026.

5. Pengungkapan Penting Terkait Pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Terhadap aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang belum terdapat prioritas pengelolaan seperti PSP, Lelang, maupun serahkelola LMAN, dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Pada dengan Tahun 2025, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 96 persetujuan, dengan total PNBP sebesar Rp8.370.256.589,00.

6. Pengungkapan Penting Terkait Penggunaan Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Oleh Kementerian/Lembaga

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009 hingga Tahun 2025, telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan sebanyak 590 aset (4 Aset belum dilakukan serah terima kepada Kementerian/Lembaga) dengan total nilai sebesar Rp8.940.113.744.403,00.

7. Pengungkapan Penting Terkait Program Sejuta Rumah

Pada tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan penyediaan rumah ASN, TNI, dan Polri serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sesuai surat Kementerian PUPR Nomor RU.0104-DR/404 tanggal 17 April 2020, Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut.

8. Pengungkapan Penting Terkait Serah Kelola Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sejak tahun 2016 hingga Tahun 2025 jumlah serah kelola yang telah ditindaklanjuti dengan Berita

Acara Serah Terima adalah sebanyak 381 aset, dengan total nilai sebesar Rp976.206.612.494,00 dan sebanyak 29 aset senilai Rp102.829.637.608,00 diantaranya telah dilakukan penarikan kembali. Selanjutnya sebanyak 4 aset telah terbit keputusan serahkelola namun belum ditindaklanjuti dengan BAST.

(dalam rupiah)

Tahun	Serah Kelola ke LMAN		Penarikan Kembali	
	Jumlah Dokumen	Nilai	Jumlah Dokumen	Nilai
2016	17	67.486.550.000	-	-
2017	128	195.533.636.000	-	-
2018	12	12.747.928.000	-	-
2019	97	65.066.399.218	-	-
2020	61	53.853.055.650	10	26.340.090.650
2021	8	18.874.080.000	2	7.739.616.150
2022	9	177.058.608.606	7	3.871.455.000
2023	12	69.116.658.920	-	-
2024	14	269.446.619.572	8	9.142.461.000
2025	6	8.435.503.000	-	-
Jumlah	**364**	**936.084.233.494**	**29**	**102.829.637.608**

9. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET EKS BDL

Atas Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) pada 20 (dua puluh) BDL baik eks Dana Talangan maupun eks Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3) per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.198.055.279.860,57, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan menguasai dokumen dan fisik atas aset eks BDL berupa aset kredit, aset inventaris, surat berharga dan aset properti eks BDL dengan total Rp13.034.413.912.648,90. Berdasarkan PMK Nomor 170 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan c.q. DJKN mengelola aset Eks BDL tersebut dengan melakukan penjualan aset, pelunasan kredit, sewa, menjadikan sebagai BMN, kemudian hasil pengelolaan menjadi pengurang nilai Piutang BDL.

Aset adalah harta atau kekayaan eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Nilai sisa aset eks BDL yang dikelola Pemerintah per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.034.413.912.648,90. Aset eks BDL terdiri dari aset kredit, aset inventaris, Aset surat berharga, dan aset properti eks BDL.

Rincian aset eks BDL per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2025
1	Aset Kredit	11.686.397.123.960,40
2	Aset Inventaris	1.342.300,00
3	Aset Surat Berharga	1.524.031.350,00
4	Aset Properti eks BDL	1.346.491.415.038,56
Jumlah		**13.034.413.912.648,96**

Rincian lebih lanjut atas Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Aset Eks BDL dicatat pada Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), sebagai berikut:

a. Aset Kredit Eks BDL

Aset kredit adalah hak Pemerintah yang berasal dari tagihan BDL terhadap debiturnya. Pengelolaan atas aset kredit meliputi penatausahaan dan penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Untuk pelaporan pengelolaan aset kredit yang telah

diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan rekonsiliasi aset kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester antara Direktorat dengan PUPN/Kantor Pelayanan. Sisa aset kredit eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2025 adalah sejumlah **7.815** debitur dengan saldo akhir sebesar **Rp11.686.397.123.960,35**.

Adapun rincian Aset Kredit eks BDL sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN	9.110.024.486.211,55
2	Aset kredit yang ditatausahakan oleh DJKN	2.576.372.637.748,80
Jumlah		**11.686.397.123.960,35**

b. Aset Inventaris Eks BDL

Aset inventaris adalah aset yang berupa barang selain tanah dan/atau bangunan, termasuk kendaraan bermotor, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas aset inventaris meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, lelang, penetapan sebagai Barang Milik Negara (BMN), dan pemusnahan. Sisa aset inventaris eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2025 adalah sejumlah 54 unit dengan nilai sebesar Rp1.342.300,00.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Nilai
1	Kendaraan Bermotor	-
2	Peralatan dan Mesin	1.342.300
Jumlah		**1.342.300**

c. Aset Surat Berharga Eks BDL

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas surat berharga meliputi penatausahaan, permintaan konfirmasi kepemilikan, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), permintaan pembayaran atas dividen saham atau bunga, pencairan obligasi, dan penjualan. Sisa aset surat berharga eks BDL yang dicatatkan dengan nilai sebesar Rp1.524.031.350,00.

Adapun rincian Aset Inventaris eks BDL sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Nilai
1	Obligasi	-
2	Saham	1.524.031.350
Jumlah		**1.524.031.350**

d. Aset Properti Eks BDL

Aset properti adalah aset berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau satuan rumah susun/apartemen berikut benda yang melekat dan merupakan satu kesatuan, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas aset properti eks BDL meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, lelang, penebusan, penetapan aset properti menjadi Barang Milik Negara (BMN), dan pemanfaatan dalam bentuk sewa. Sisa aset properti eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2025 adalah sejumlah 658 aset dengan nilai sebesar Rp1.346.491.415.038,56.

Adapun rincian Aset Properti eks BDL sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
1	Aset tetap	184.972.384.000,00
2	Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA)	760.463.852.038,56
3	Aset yang diperoleh berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	224.202.054.000,00
4	Aset yang berasal dari penyerahan Pemegang Saham kepada BDL untuk menyelesaikan permasalahan permodalan dan likuiditas BDL	176.853.125.000,00
Jumlah		**1.346.491.415.038,56**

10. SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Penyelesaian penagihan dana BLBI yang tidak kunjung selesai selama lebih dari dua puluh tahun menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga diperlukan satu kekuatan baru yang dapat mendukung istrumen yang sudah berjalan selama ini, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam pemulihan hak negara. Bukti keseriusan pemerintah untuk memulihkan hak negara adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keppres Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Satgas BLBI dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien. Satgas BLBI yang terdiri dari berbagai Kementerian dan Lembaga berkomitmen melakukan upaya *extraordinary* untuk mengembalikan hak negara dengan total 110,45 triliun Rupiah dimana lebih dari 90 persen dari nilai tersebut merupakan aset kredit dari obligor/debitur. Sehingga pembentukan Satgas BLBI adalah sebagai katalisator dalam penyelesaian hak negara atas dana BLBI serta memperkuat fungsi PUPN.

Satgas BLBI terdiri dari gabungan Kementerian dan Lembaga bertugas dengan waktu yang terbatas hingga 31 Desember 2023, memiliki struktur keanggotan sebagai berikut:

a. Pengarah (terdiri dari delapan orang Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara)
b. Ketua Pelaksana Satgas (Dirjen Kekayaan Negara)
c. Wakil Ketua Satgas (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI)
d. Sekretaris (Deputi Bidkor Hukum dan HAM, Kemenkopolhukam)
e. Anggota Pelaksana (sembilan orang Pejabat Eselon I antar Kementerian dan Lembaga)
f. Sekretariat yang berkedudukan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN diketuai oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN
g. Kelompok Kerja (Pokja):
    1) Tim A, B, dan C. Masing-masing tim terdiri dari gabungan tiga Pokja yaitu Pokja Data dan Bukti, Pokja Pelacakan, dan Pokja Penagihan dan Litigas
    2) Pokja Tanah
    3) Pokja Peraturan
    4) Tim Penegakkan Hukum Bareskrim POLRI.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim Pokja Satgas melakukan telaah dan pendalaman terhadap obligor, debitur, dan aset properti dengan nilai yang signifikan dan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Terkait penanganan penagihan obligor/debitur, mekanisme pemanggilan yang dilakukan adalah sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak antar panggilan berselang 7 (tujuh) hari, dalam hal obligor/debitur tidak memenuhi panggilan, maka akan dilakukan pemanggilan berselang 7 (tujuh) hari melalui media massa nasional. Untuk tahap awal, Satgas BLBI bertugas untuk menangani sejumlah 8 (delapan) obligor, 14 debitur, dan 9 (sembilan) unit aset properti prioritas dengan nilai yang besar dan tingkat permasalahan yang kompleks. Saat ini proses pengelolaan hak tagih negara dari dana BLBI sudah memasuki tahap kedua dengan prioritas penanganan kepada 13 obligor, 15 debitur, dan 14 unit aset properti.

Selain upaya penagihan melalui pemanggilan, Satgas juga melakukan serangkaian upaya terkait aset-aset obligor/debitur seperti penguasaan fisik dan pemblokiran aset-aset milik debitur dan obligor yang ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pelelangan. Sejak dilantik pada tanggal 4 Juni 2021, Satgas BLBI efektif melaksanakan *special mission* penanganan hak tagih negara hingga nanti tanggal 31 Desember 2024.

Dengan jangka waktu yang relatif singkat tersebut, Satgas telah berhasil membukukan capaian perolehan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Capaian	Nilai	Luas (m^2)
1	PNBP dari Pembayaran	1.784.959.306.931	-
2	PNBP dari Lelang	167.815.189.998	-
3	PNBP Penjualan Tanpa Lelang	92.400.000.000	6.933
4	Penguasaan Fisik Aset Properti	9.209.432.947.044	21.038.005
5	Sita Aset dan Penyerahan Barang Jaminan	20.080.279.656.485	20.434.723
6	PSP dan Hibah	5.927.720.848.449	3.826.909
7	PMN Non Tunai	3.769.371.406.872	670.837
Jumlah		**41.031.979.355.779**	**45.977.407**

F. PENGELOLA PIUTANG DALAM RANGKA DANA ANTISIPASI PENANGANAN LUMPUR SIDOARJO

1. Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo pasal 15 ayat (1):

"Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 maret 2007, dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah".

Ayat (2):

"Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh persen) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun habis"

PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) merupakan badan hukum asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di Indonesia. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dibentuk PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Di dalam pelaksanaannya, proses pembayaran pelunasan jual beli tanah dan bangunan di wilayah PAT 22 Maret 2007 yang dilakukan PT MLJ tidak lancar Berdasarkan Peraturan Presiden no. 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

2. Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007

   Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres Nomor 14 tahun 2007 tentang tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, UAKPA BUN TK Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20 persen dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80 persen dari nilai jual beli.

   Kebijakan MLJ dalam pelaksanaan pembayaran pembelian tanah dan bangunan milik warga PAT 22 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

   a. Pembayaran tahap I 20 persen, seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga.

   b. Pembayaran tahap II 80 persen, dibagi menjadi tiga jenis pembayaran sebagai berikut:

      1) Delapan puluh persen seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga

      2) Program *Resettlement* dengan formula tanah pekarangan/darat mendapat relokasi dengan perbandingan 1:1 dari luas tanah asal + bangunan seluas tertentu (yang dibangun PT Wahana Artha Raya) + “susuk” (kembalian) sebesar nilai sisa dari luas bangunan menurut data Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), dengan tidak memperhitungkan uang muka 20 persen. Warga yang menerima program *resettlement*, setelah 12 (dua belas) bulan diberikan kesempatan untuk menjual kembali kepada MLJ (*buyback*) dengan nilai yang sama.

         Dalam perhitungan selanjutnya, uang muka 20 persen yang tidak diperhitungkan dalam program *resettlement*, dianggap pemberian uang kerohiman dalam bentuk bonus yang diberikan MLJ kepada warga.

      3) Delapan puluh persen dibayar secara tunai kepada warga dengan memperhitungkan sisa pokok KPR warga yang bersangkutan. Selanjutnya, sisa pokok KPR warga diselesaikan oleh MLJ kepada bank yang terkait.

3. Piutang

   Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559,00 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi beberapa kali yaitu:

   a. Surat No. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang peringatan untuk penagihan atas Pinjaman Dana Antisipasi.

   b. Surat No. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang peringatan II Penagihan Pinjaman atas Dana Antisipasi.

   c. Surat dari kementerian keuangan No. S-1375/KN/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

d. Surat No. PMS.04.02/56/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penagihan Kewajiban Terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

e. Surat dari kementerian keuangan No. S-170/MK.6/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

f. Surat dari kementerian keuangan No. S-4946/KN/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pengihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

g. Surat no. KU.01.12/PPLS/222 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

h. Surat dari kementerian keuangan No. S-1893/KN/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

i. Surat dari kementeria keuangan No. S-527/MK.6/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Peringatan Untuk Penagihan Atas Pinjaman Dana Antisipasi lumpur Sidoarjo.

j. Surat No. KU 0403-AI/63 tanggal 15 Maret 2021 tentang jumlah piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo sampai dengan 31 Desember 2020.

k. Surat dari kementerian keuangan No. S-291/MK.6/2021 tanggal 12 Juli 2021 tetang peringatan Penagihan atas Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

l. Surat dari Kementerian Keuangan No S-50/KN.5/2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Penyisihan Piutang Dana Antissipasi Lumpur Sidoarjo (DALS).

m. Surat dari kementerian keuangan No. S-15/KN/2022 tentang Penagihan Piutang Pemerintah Terhadap Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS).

n. Surat Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi dan Rekan Nomor 016/SK/SIH/XII/2021 Tanggal 6 Desember 2021 tentang Surat Keterangan atas Laporan Penilaian.

o. Surat No. HM 0503-AI/170 tanggal 21 April 2022 tanggal 21 April 2022 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

p. Surat Kepada DJKN No. HM 0501-AI/93 tanggal 28 Februari 2023 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

q. Surat kepada PT. Lapindo Brantas, Inc/Pt. Minarak Lapindo Jaya No. KU 0403-AI/94 tanggal 28 Februari 2023 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

r. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-53/KN/2023 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS) a.n Lapindo Brantas, Inc, PT Minarak Lapindo Jaya dan Nirwan Bakrie.

s. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS) diterima oleh PUPN Cabang DKI Jakarta dengan diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor SP3N-246/PUPNC.10.05/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n. Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo Jaya dan Nirwan D. Bakrie;

t. Melalui PUPN Cabang DKI Jakarta telah dilakukan pemanggilan terhadap LBI/PT MLJ yang terakhir dilakukan sesuai surat pemanggilan nomor S-1531/KNL.0705/2023 tanggal 4 Juli 2023 hal Panggilan terakhir atas nama Lapindo Brantas Inc (LBI), PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dan

Nirwan D. Bakrie, namun demikian pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS) belum dilakukan pelunasan.

u. Sesuai Surat dan Bukti Bayar Nomor 021/L.DIR/MLJ/LBI/IX/2023 tanggal 15 September 2023 hal Pemberitahuan Pembayaran.

Pada tanggal 11 Februari 2021 telah diadakan pembahasan Penilaian Jaminan Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo, adapun hasilnya masih dalam pembahasan lebih lanjut hasil penilaian kembali jaminan adalah sebagai berikut:

1) Tanah seluas 622,34 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor: 00347/2113-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar sebesar (Rp137.276.401.432,00) yang kemudian dianggap nol karena nilainya negatif.

2) Tanah seluas 22,85 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor: 00348/2.013-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar Rp58.234.000.000,00 dan nilai ini yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai penyisihan piutang yang dalam pertemuan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS disepakati sudah mencapai kualitas piutang macet.

G. PENGELOLA PIUTANG NEGARA ATAS YAYASAN SUPERSEMAR

Penyusunan laporan keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar.

1. Temuan BPK Tahun 2018 Pengaturan pencatatan dan pengelolaan Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar Rp4.700.985.148.701,56 tidak memadai.

   Neraca LKTK Tahun 2018 *unaudited* mencatat Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar Rp4.700.985.148.701,5 dengan nilai penyisihan sebesar Rp4.458.580.389.115,00. Pencatatan piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan berdasarkan putusan MA Tanggal 8 Juli 2015 Nomor 140/PK/Pdt/2015 yaitu sebesar USD3,152,183 dan Rp139.438.536.678,56 atau secara total senilai Rp4,7 Triliun dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral per 31 Desember 2018. Berdasarkan amar putusan ini telah terdapat eksekusi pencairan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp242.404.759.586,00 (dua ratus empat puluh dua miliar, empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdapat beberapa objek yang belum dieksekusi terutama tanah/bangunan Gedung Granadi, dan sebidang tanah di Jalan Raya Megamendung No.6 masih dalam proses di Pengadilan Negeri Cibinong.

   CaLK LKTK Tahun 2018 *Unaudited* mengungkapkan pencatatan piutang Supersemar merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara No PRINT-71/KN/2019 tanggal 14 Februari 2019. Selanjutnya Dit PNKSI mencatatkan

penyisihan piutang supersemar Tahun 2018 sebesar Rp4,458,580,389,115,00 dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Piutang Supersemar merupakan piutang BUN dengan Nilai penyisihan piutang Supersemar Tahun 2018 adalah sebesar 100 persen dengan kategori macet dikurangi nilai agunan berupa aset likuid Rp242,404,759,586,00 yang berasal dari eksekusi pencairan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang belum diserahterimakan kepada BUN.

Pengujian selanjutnya menunjukan penyisihan piutang Supersemar Tahun 2018 tersebut belum memiliki dasar hukum yang memadai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Pasal 2 ayat 1 poin (c) tidak mengatur piutang Supersemar dalam lingkup piutang BUN. Dengan demikian penyisihan 100 persen atas piutang Supersemar dalam lingkup pengelolaan piutang BUN berdasarkan norma waktu menjadi tidak memadai. Hasil wawancara selanjutnya dengan DJKN menunjukan belum terdapat upaya yang memadai dalam rangka penagihan piutang dan optimalisasi atas aset jaminan terkait Supersemar dalam mendukung pengkategorian piutang Supersemar sebagai piutang macet. Kondisi ini terkait dengan tidak adanya dasar hukum yang mengatur kewenangan dari Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN TK) dalam rangka melakukan penagihan dan pengelolaan atas aset jaminan piutang Supersemar.

Hasil analisa selanjutnya menunjukan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan pada Bagian tujuh tentang Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi pada Pasal 1236 sampai dengan Pasal 1255 tidak mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan khusus PNKSI dalam pengelolaan terkait piutang supersemar. Dalam peraturan tersebut, objek spesifik yang berada dalam kewenangan Dit PKNSI adalah kekayaan negara aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset eks UP3, aset nasionalisasi atau eks asing atau cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain lingkup I, II, dan III.

Dengan demikian, penunjukan piutang Supersemar tidak termasuk dalam kewenangan Dit PKNSI. Tidak adanya pengaturan memadai dalam mengatur kewenangan UAKPA dalam melakukan optimalisasi piutang beserta barang sitaan selanjutnya dapat berpotensi dalam ketidakjelasan kewenangan UAKPA dalam melakukan optimalisasi piutang termasuk pengelolaan atas aset sitaan lainnya pada Yayasan Supersemar.

2. Tanggapan:

PMK Nomor 127/PMK.05/2018 mengatur bahwa Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang kepada Yayasan Supersemar mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara. Namun demikian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara belum mengatur secara khusus perhitungan penyisihan piutang sebagaimana terjadi pada piutang Supersemar sehingga perhitungan penyisihan dilakukan dengan memperlakukan piutang Supersemar sebagai piutang yang dikelola

oleh BUN. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa PMK Nomor 127/PMK.05/2018 memperlakukan piutang Supersemar sebagai aset yang berada dalam pengelolaan DJKN.

PMK Nomor 127/PMK.05/2018 memberikan kewenangan Direktorat PKNSI selaku Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN TK) Piutang kepada Yayasan Supersemar. Guna menindaklanjuti penugasan tersebut dan mengingat perubahan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tidak dapat dilakukan dengan segera, Direktur Jenderal Kekayaan Negara menerbitkan Surat Perintah Nomor PRIN-71/KN/2019 tanggal 14 Februari 2019 kepada Direktorat PKNSI sebagai pelaksana UAKPA-BUN TK Piutang kepada Yayasan Supersemar. Kewenangan yang diberikan dalam surat perintah tersebut memang hanya mengatur kewenangan Direktorat PKNSI sebagai pihak yang menyajikan Piutang Supersemar dalam LKPP, belum mengatur secara khusus kewenangan terkait pengelolaan piutang supersemar dalam rangka optimalisasi penagihannya. Hal ini dapat dipahami mengingat penyelesaian piutang Supersemar termasuk ke dalam ranah pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pengadilan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kementerian Keuangan tidak terlibat dalam proses perkara sehingga tidak dapat terlibat aktif dalam proses eksekusi tersebut.

Namun demikian dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Negara, Kementerian Keuangan dapat mendorong pihak-pihak yang terkait untuk segera melakukan proses eksekusi dan menyerahkan hasil eksekusi tersebut untuk disetorkan ke kas negara melalui UAKPA-BUN TK Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait hal tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai aset yang telah dieksekusi berupa rekening yang telah diblokir dan dicairkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senilai Rp242.404.759.586,00 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang saat ini tersimpan pada rekening penampungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disetorkan ke kas negara.

Upaya-upaya lain juga akan terus dilakukan melalui kegiatan yang bersifat kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Pengacara Negara, Sekretariat Negara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Cibinong, dan Kementerian Sekretariat Negara masih terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKN juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya. Di samping itu, DJKN telah membiayai jasa penilaian oleh KJPP atas aset tanah dan/atau bangunan yang telah disita.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

a. Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku *principal*, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.

b. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal

10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara.

c. Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.

d. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.

e. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku *principal* beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp242.081.000.259,00 ke Kas Umum Negara. Adapun besaran uang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebesar Rp242.404.759.586,00. Dengan demikian terdapat perbedaan antara uang yang telah disita dengan uang yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp323.759.327,00.

f. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa *outstanding* Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa:

   1) Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016);

   2) Sebidang tanah seluas 8.120 m2 (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016)

g. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.

h. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-220/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Nomor S-380/KN/2020 tanggal 08 Juni 2020 kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak

tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar sekaligus menawarkan bantuan penilaian oleh Penilai DJKN.

i. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengajukan usulan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6 melalui surat Nomor B-313/G/Gp.2/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Yayasan Beasiswa Supersemar. Teknis penilaian tersebut telah dibahas bersama Direktorat Penilaian dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Juli 2020 sesuai pelaksanaan Hukum Acara Perdata dengan mempertimbangkan faktor keamanan.

j. Kejaksaan Agung telah menyampaikan surat permohonan penetapan penilai pemerintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat melakukan penilaian aset di Jalan Raya Megamendung dalam rangka mendukung pelaksanaan lelang eksekusi (Surat Jamdatun Nomor B-368/G/Gp.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020).

k. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-958/KN.5/2020 tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta progres tindak lanjut penilaian aset.

l. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN melalui surat Nomor B-616/G/Gp.2/11/2020 tanggal 04 November 2020 hal Permohonan Bantuan Biaya Appraisal Aset Tanah dan Bangunan Dalam Perkara Yayasan Beasiswa Supersemar menyampaikan permintaan bantuan biaya penilaian aset sitaan oleh KJPP dalam perkara perdata Piutang Yayasan Supersemar.

m. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktur PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-1171/KN.5/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa biaya penilaian aset sitaan Yayasan Supersemar akan dibebankan pada POK Direktorat PKNSI.

n. Direktorat PKNSI menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan ditunjuk sebagai pelaksana penilaian aset yang telah diletakkan sita sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6. Kontrak pelaksanaan penilaian aset dilaksanakan pada mulai tanggal 23 November sampai dengan 14 Desember 2020.

o. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah menyerahkan hasil penilaian aset sitaan sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar permohonan lelang sita pengadilan dari Kejaksaan Agung kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Cibinong.

p. Jamdatun melalui surat Nomor B-260/G/Gp.2/04/2021 tanggal 14 April 2021 meminta agar laporan penilaian Aset Granadi dan Aset Megamendung direvisi mengingat penilaian dilakukan sebelum ada penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri.

q. Menindaklanjuti surat tersebut, telah dilakukan pengambilan sumpah Tim Penilai Aset Granadi pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Ketua PN Jaksel dan tanggal 4 Juni 2021 oleh Ketua PN Cibinong.

r. Berdasarkan Surat Direktur PKNSI Nomor S-1320/KN.5/2021 tanggal 15 Juni 2021, telah dimohonkan penilaian ulang berikut penambahan pengguna laporan penilaian (PN Jaksel, PN Cibinong, Jamdatun).

s. Rencana survei (inspeksi) lapangan dalam rangka penilaian dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2021. Namun demikian, rencana tersebut harus ditunda mengingat daerah Jabodetabek sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19.

t. Tim Penilai KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan inspeksi lapangan terhadap Aset Megamendung pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Aset Granadi pada tanggal 26 Agustus dan 6 September 2021. Laporan penilaian tersebut diserahkan kepada Direktorat PKNSI melalui surat Nomor 00194/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 dan 00195/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

u. Direktorat PKNSI menyampaikan laporan penilaian dimaksud kepada Ketua PN Jakarta Selatan melalui surat Nomor S-2632/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 dan kepada Ketua PN Cibinong melalui surat Nomor S-2631/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 (tembusan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN).

v. Di samping sitaan berupa uang dan aset tanah-bangunan, terdapat aset finansial yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018 dengan rincian:

No.	Perusahaan	Jenis	Status	Keterangan
1	Plaza Indonesia Realty (PLIN)	Saham dan Deviden	*Listing*	Terdapat deviden sebesar Rp3.592.500 tahun 2012 s.d. 2015
2	PT Granadi	Saham dan Deviden	*Non Listing*	-
3	PT Wisma Kosgoro	Saham dan Deviden	*Non Listing*	-
4	PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)	Saham dan Deviden	*Listing*	-
5	PT Indofood Sukses Makmur (INDF)	Saham dan Deviden	*Listing*	-
6	PT Bank Muamalat	Saham dan Deviden	*Non Listing*	-
7	PT Bank Danamon (BDMN)	Saham dan Deviden	*Listing*	-
8	Timber Dana Jakarta	Saham dan Deviden	*Non Listing*	-
9	PT Pelita Indonesia Baru	Saham dan Deviden	*Non Listing*	-
10	PT Tri Megah Sekuritas (TRIM)	Saham	*Listing*	-
11	PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	Saham	*Non Listing*	-
12	Aset Yayasan Supersemar di PT Samuel Internasional	Saham	*Non Listing*	-
13	Rekening/Giro/Deposito an. Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar di PT BPR Mitra Sejahtera Lestari Bekasi	Rekening/Giro/Deposito	-	-

w. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-4/KN/2022 tanggal 17 Januari 2022 kepada Kemsetneg dan Kejagung untuk menyelesaikan outstanding piutang Yayasan Supersemar, termasuk dan tidak terbatas pada pengajuan permohonan lelang eksekusi Pengadilan terhadap aset yang telah disita dan telah dilakukan penilaian.

x. Direktorat PKNSI telah melaksanakan rapat dengan Jamdatun, Kejagung dan Kedeputian Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kemsetneg pada tanggal 6 Februari 2022 dengan simpulan:

1) Tindak lanjut penyelesaian piutang yang saat ini akan dilakukan adalah mendorong pelaksanaan lelang aset sitaan (aset Granadi dan Megamendung) dan pencairan saham-saham yang telah disita.

2) JPN akan menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai selisih uang yang telah dieksekusi dengan uang yang diserahkan/disetor, rencana lelang aset sitaan, dan pencairan saham.

y. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-40/KN/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Kemsetneg dan Kejagung yang pada intinya meminta penjelasan terkait selisih saldo yang dicairkan dengan saldo yang diserahkan serta sita eksekusi rekening lainnya jika ada.

z. Direktorat PKN telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-69/KN/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Ketua PN Jakarta Selatan dan Ketua PN Cibinong untuk dapat mengajukan lelang eksekusi ke KPKNL setempat. Selanjutnya, telah disampaikan pula surat Dirjen KN Nomor S-70/KN/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Jamdatun dan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum untuk dapat menyampaikan progres tindak lanjut atas hasil penilaian aset yang telah disita tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada upaya mendorong permohonan pelaksanaan lelang sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

aa. Direktorat PKN telah melakukan beberapa kali koordinasi yaitu pada tanggal 09 Juni 2022, 12 Juli 2022, dan 14 Juli 2022 guna mendorong pelaksanaan lelang sita eksekusi dan penyetoran uang sisa hasil eksekusi dengan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara selaku *principal* beserta Jaksa Pengacara Negara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Cibinong.

bb. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan uang sisa hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku *principal* beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 14 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp323.759.328,00 ke Kas Umum Negara.

cc. Adapun progres terkait aset sitaan berupa tanah dan/atau bangunan serta aset finansial (aset saham) adalah sebagai berikut:

1) Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan lelang eksekusi aset berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Megamendung No. 6 RT 03 RW 03 Kampung Citalingkup, Desa Megamendung, Bogor telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui KPKNL Bogor. Namun demikian, tidak terdapat penawaran atas lelang tersebut (TAP). Lelang ulang akan dilaksanakan setelah terdapat pembaruan penilaian oleh KJPP (laporan penilaian berakhir pada tanggal 25 Agustus 2022).
2) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memproses permohonan lelang eksekusi aset berupa tanah dan bangunan "Gedung Granadi" di Jl. HR. Rasuna Said Kav 8-9 Blok X/I, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Namun demikian, lelang belum dapat dilaksanakan mengingat laporan penilaian telah habis masa berlakunya.
3) Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PMK 213/PMK.06/2020, masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran yang digunakan se bagai dasar penetapan Nilai Limit paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang.
4) Mengingat diperlukan penilaian baru oleh KJPP, pelaksanaan penilaian akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dengan pertimbangan tidak tersedianya dana.
5) Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset finansial (aset saham) akan dilakukan setelah *principal* melakukan pembayaran panjar SKUM yang diestimasikan sebesar Rp19.100.000,00.

dd. Terkait aset sitaan berupa saham, Direktur PKN telah menyampaikan surat kepada Direktur Perdata Ditjen AHU Nomor S-594/KN.4/2022 tanggal 02 November 2022 yang pada intinya memohon informasi kepemilikan Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar pada aset yang telah ditetapkan sita eksekusi/pemblokirannya sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018.

ee. Direktur Perdata menyampaikan surat Nomor AHU.2.UM.01.01-5288 tanggal 30 Desember 2022 yang pada intinya menyampaikan susunan pengurus dan pemegang saham terhadap perusahaan yang sahamnya disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018. Untuk kategori perusahaan terbuka, Yayasan Supersemar tidak tercatat sebagai pemegang saham pada perusahaan tersebut. Adapun untuk PT Granadi, PT Wisma Kosgoro, Timber Dana Jakarta, dan PT Pelita Indonesia Baru, Yayasan Supersemar tercatat sebagai pengurus dan/atau pemegang saham perusahaan dimaksud.

ff. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat PKN telah menyampaikan surat Nomor S-377/KN.4/2023 tanggal 9 Maret 2023 kepada KSEI mengenai permintaan informasi kepemilikan saham Yayasan Supersemar terhadap saham perusahaan terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018. Direktur Utama KSEI menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor KSEI-1015/DIR/0423 tanggal 10 April 2023 yang pada intinya untuk memperoleh informasi mengenai kepemilikan saham Yayasan Supersemar diperlukan izin/persetujuan dari OJK.

gg. Terkait adanya perbedaan rekening/deposito/giro bank yang belum dieksekusi, Direktorat PKN telah meminta penjelasan kepada Kemsetneg (*principal*) dan Jamdatun (JPN) melalui surat Nomor S-56/KN/2023 tanggal 28 Maret 2023. Jamdatun menindaklanjuti surat tersebut melalui surat Nomor B-304/G/Gp.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang pada intinya menyampaikan kendala eksekusi aset yang telah disita baik berupa rekening/deposito/giro bank, saham, maupun tanah/bangunan.

hh. Direktorat PKN telah melakukan rapat bersama Kemsetneg (*principal*) dan Jamdatun (JPN) pada tanggal 30 Agustus 2023 guna meminta dukungan terkait rencana penilaian ulang aset Granadi dan Megamendung. Pengadaan KJPP dalam rangka penilaian ulang tersebut dibebankan pada DIPA Kantor Pusat DJKN POK Direktorat PKN. Selanjutnya Direktur PKN telah meminta bantuan Jamdatun (JPN) untuk mengajukan permohonan penilaian kepada Ketua PN Jaksel dan Ketua PN Cibinong melalui surat S-1989/KN.4/2023 tanggal 24 November 2023. Adapun KJPP yang ditunjuk untuk melakukan penilaian tersebut adalah KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan.

ii. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan penilaian atas aset sitaan Yayasan Supersemar berupa Aset Granadi dan Aset Megamendung melalui penilaian terbatas (*desktop valuation*). Laporan penilaian tersebut diserahkan kepada Direktorat PKN melalui surat Nomor 00192/2.0014-00/PI/11/0080/1/XII/2023 dan 00193/2.0014-00/PI/11/0080/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.

jj. Berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 282/PAN.PN.W11-U20/HK2.4/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 telah menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan penilaian atas aset sitaan Yayasan Supersemar di Megamendung dan telah dilakukan penilaian dengan Nomor Laporan 00063/2.0014-00/PI/11/0080/1/V/2024 tanggal 20

Mei 2024, dan berdasarkan Surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/4891/HK2.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan penilaian atas aset sitaan Yayasan Supersemar di Kuningan (Granadi) dan telah dilakukan penilaian dengan Nomor Laporan 00062/2.0014-00/PI/11/0080/1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Laporan Penilaian tersebut telah diserahkan kepada Direktorat PKN secara langsung pada 30 Mei 2024, selanjutnya diserahkan kepada JPN untuk diteruskan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Surat Direktur PKN Nomor S-473/KN.4/2024 tanggal 5 Juli 2024 dan Pengadilan Negeri Cibinong sesuai Surat Direktur PKN Nomor S-482/KN.4/2024 tanggal 10 Juli 2024.

kk. Terdapat Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Kab.Bogor, Up. Panitera Nomor S-8916/KNL.0803/2024 tanggal 10 Desember 2024 hal Penetapan Hari & Tanggal Lelang (Nomor Register 4049_2024 Tereksekusi YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR).

ll. Terdapat Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Kab.Bogor, Up. Panitera Nomor S-1797/KNL.0803/2025 tanggal 10 Februari 2025 hal Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang Reg 4049_2024, Terseksekusi YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR, Status Lelang Tidak Laku dengan keterangan Tidak Laku, Penjual dapat mengajukan Lelang Ulang, namun sampai dengan saat ini masih belum ada permohonan lelang kembali kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor.

mm. Berdasarkan Surat Direktur PKN Nomor S-654/KN.4/2024 tanggal 13 Agustus 2024 telah dilakukan penilaian ulang aset eks Yayasan Supersemar berupa Gedung Granadi menindaklanjuti Berita Acara Sumpah KJPP No.72/Eks.Pdt/2015 Jo.904/Pdt.G/2027/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2024.

nn. Setelah dilakukan penilaian ulang oleh KJPP, terbit Laporan Penilaian Nomor 00093/2.0014-00/PI/11/0080/1/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

oo. Terdapat permohonan lelang berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 21535/PAN.PN.W10.U3/HK.02/X/2024.121 tanggal 30 Oktober 2024.

pp. Terdapat Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Nomor 72/Eks.Pdt/2015 Jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Februari 2025.

qq. Terdapat Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Nomor 72/Eks.Pdt/2015 Jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel melalui Surat Kabar tanggal 25 Februari 2025.

rr. Terdapat Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Nomor S-228/KNL.0704/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang.

ss. Terdapat Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor Reg.Btl-04/07.04/2025 tanggal 12 Maret 2025, bahwa yang menjadi dasar pembatalan atas lelang yang akan dilaksanakan tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang berupa perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang, yakni antara SKPT Lelang dengan Penetapan Sita/Berita Acara Pelaksanaan

Sita, dan sampai dengan saat ini masih belum ada permohonan lelang kembali kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV.

tt. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 2/Eks.Del/2018/PN.Bks. Jo. Nomor 72/Eks.Pdt/2015. Jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, yang berbunyi:

1) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, jika berhalangan dapat menunjuk wakilnya yang sah dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat hukum untuk melaksanakan Eeksekusi Pencairan terhadap:

   Deposito atas nama Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar terdapat 7 (tujuh) deposito dengan nomor bilyet dan nominal:

   a) 1270/DB/MSL/XII/11 dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
   b) 1616/DB/MSL/XII/14 dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
   c) 1664/DB/MSL/XII/14 dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
   d) 1536/DB/MSL/XII/13 dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
   e) 1570/DB/MSL/XII/14 dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
   f) 1492/DB/MSL/XII/13 dengan Nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
   g) 1637/DB/MSL/XII/14 dengan Nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);

   Dengan jumlah total nominal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah); yang berada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari dengan alamat Plaza Pondok Gede, Blok A No. 3, Jalan Raya Pondok Cabe, Bekasi. Ekseskusi pencairan tersebut dalam rangka eksekusi untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 08 Juli 2015;

2) Memerintahkan pula kepada Jurusita tersebut untuk membuat Berita Acara Eksekusi Pencairan dan sekaligus memindahkan saldo rekenin tersebut kepada Rekening Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.00001-01-30-000114-6 atas nama RPL–175–PN–JAKSEL, Bank BTN Cabang Kuningan Jakarta, guna diserahkan kepada Pemohon Eksekusi.

uu. Telah dilakukan penyerahan selembar cek senilai uang Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) dari PIHAK PERTAMA (atas nama Negara RI cq. Presiden RI) yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Hukum, Kementerian Sekretariat Negara kepada PIHAK KEDUA (atas nama Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara) yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat PKN III, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, untuk disetorkan ke Kas Negara, sebagai sebagian hasil eksekusi putusan Peninjauan Kembali Nomor 140/PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2896 K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 465/PDT/2008/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. berdasarkan Berita Acara Nomor 01/KSN/D-1/03/2025 pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025.

vv. Telah dilakukan penyetoran sesuai dengan cek Nomor TQ 906976 tanggal 13 Maret 2025 sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kas Negara melalui Bank BTN Cabang Kuningan Jakarta.

ww. Telah diterima Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bank BTN Cabang Kuningan Jakarta dengan kode *billing* 820250313656879 pada tanggal 13 Maret 2025.

xx. Telah dilakukan rapat pembahasan Penyelesaian Piutang Negara pada Yayasan Supersemar berdasarkan surt undangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN nomor UND-241/KN.4/2025 tanggal 1 Desember 2025 hal Undangan Rapat Penyelesaian Piutang Yayasan Supersemar pada tanggal 11 s.d. 12 Desember 2025, Ruang Rapat Gede KPKNL Bogor, Jl. Veteran No.45, RT.01/RW.05, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, dengan mengundang perwakilan dari Kejaksaan RI, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) RI, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Secara garis besar kegiatan rapat pembahasan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Kementerian Setneg menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

   a) Perkembangan penyelesaian piutang Yayasan Supersemar agar disampaikan berupa laporan kepada Kementerian Setneg.

   b) Setelah laporan perkembangan penyelesaian piutang diterima, Kementerian Setneg akan meminta arahan *principal*/kebijakan kepada Presiden untuk proses penagihan selanjutnya.

   c) Terkait langkah-langkah penyelesaian piutang akan didiskusikan dengan pimpinan dan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2) Kejaksaan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

   a) Kejaksaan menjelaskan perkembangan penagihan piutang dimulai dari pencarian rekening/deposito, proses penjualan melalui lelang aset di Bogor dan Jakarta dan proses penelusuran kepemilikan saham.

   b) Untuk selanjutnya diusulkan tindak lanjut proses penagihan, agar dilakukan secara satu pintu melalui *principal* untuk efektivitas penyelesaian piutang Yayasan Supersemar.

   c) Perlu dipertimbangkan pendanaan untuk melakukan mengurus Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) juta Rupiah, melakukan penilaian ulang aset Gedung Granadi dan Villa Megamendung untuk dilakukan lelang ulang.

   d) Perlu didiskusikan bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Sekretariat MA untuk dapat memberikan pengenaan tarif PNBP terkait SKUM dalam hal berpekara di Pengadilan, diusulkan untuk dikenakan tarif Rp0,00 terkait dengan perkara piutang negara.

   e) Perlu dipertimbangkan pendanaan untuk melakukan penyitaan rekening (ada potensi saat dieksekusi ternyata saldonya sudah nihil).

   f) Perlu dipertimbangkan pendanaan untuk melakukan penyitaan saham (SKUM dikenakan untuk setiap lembar saham).

g) Untuk mengetahui masing-masing nomor saham, perlu dilakukan koordinasi pembahasan dengan melibatkan KSEI dan OJK terkait permintaan data masing- masing lembar saham. Adapun terkait rekening Yayasan Supersemar di beberapa cabang bank perlu dilakukan *asset tracing* dalam rangka sita eksekusi.

3) Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Terdapat wacana untuk diselesaikan melalui mekanisme penyerahan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk diusulkan diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bahwa pengurusan piutang negara Supersemar dapat diserahkan kepada PUPN.

b) Perlu dibahas atas perbedaan Legalitas formal Berita Acara sita dan permohonan lelang, diskusi bersama Direktorat Lelang, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN.

c) Untuk Gedung Granadi dapat saja diangkat sita dan dilakukan sita dengan menyertakan 4 nama pada sertifikat selain Yayasan Supersemar, namun demikian terdapat potensi konflik bahwa pihak yang tidak dihukum akan mengajukan perlawanan, dll.

4) Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Perlu didiskusikan dengan Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN c.q. Subdit Piutang Negara, untuk mengkaji apakah proses penagihan bisa diteruskan melalui jalur PUPN (apakah bisa dipersamakan dengan piutang Lapindo dan piutang BLBI).

b) Perlu dikaji apakah proses penilaian bisa dilakukan oleh Penilai Pemerintah.

c) Terdapat usulan, perlu diagendakan pertemuan secara berkala untuk mendiskusikan langkah kedepan, serta mereview langkah sebelumnya.

yy. Kesimpulan hasil rapat tersebut, antara lain:

1) Kementerian Keuangan akan menyampaikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (*audited*) dan Kejaksaan akan menyampaikan Laporan penyelesaian piutang Yayasan Supersemar secara periodik kepada Kementerian Setneg.

2) Tindak lanjut proses penagihan piutang Yayasan Supersemar menunggu hasil arahan dari Presiden melalui Kementerian Setneg (*principal*).

3) Perlu didiskusikan dengan Direktorat PKKN terkait potensi penyelesaian piutang melalui jalur PUPN.

4) Terkait dengan aset yang berbentuk saham perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan KSEI dan OJK.

H. Aset PKP2B

1. Terdapat kontraktor PKP2B yang asetnya tidak disajikan pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara TA 2024 yaitu PKP2B PT Indominco Mandiri, berdasarkan pasal 15 angka 1 Kontrak (perjanjian) Nomor 097.B.Ji/292/U/90 tanggal 5 Oktober 1990 antara pemerintah (dh. PN Batubara) dengan PT Indominco Mandiri, dinyatakan bahwa “peralatan (termasuk suku cadang) dan perlengkapan lainnya tersebut adalah milik Kontraktor.” Dengan demikian aset PKP2B PT Indominco Mandiri tidak termasuk dalam BMN. Atas status BMN tersebut, BPK meminta untuk dilakukan kajian sesuai LHP BPK Nomor 2/LHP/XV/02/2024 tanggal 12 Februari 2024;

2. Terdapat tanah pada PT. Berau Coal seluas 4.230.300 m2 yang berada pada Kawasan Hutan telah dilaporkan dan tercatat pada kertas kerja pemerintah sebanyak 288 bidang tanah dengan rincian 71 bidang berada pada Neraca dan 217 bidang berada pada *off-balance sheet*. 288 bidang tanah dimaksud timbul dari pencatatan 33 *line item* Tanah yang setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi diperoleh hasil bahwa tanah dimaksud dibebaskan oleh PT Berau Coal di area kawasan penetapan hutan. Atas kondisi tersebut masih dilakukan pembahasan oleh DJKN Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kehutanan apakah atas tanah tersebut dapat dikeluarkan dari peta penetapan kawasan hutan dan tetap dijadikan sebagai BMN yang berasal dari PKP2B. Jika tanah yang dimaksud tidak dapat dikeluarkan dari peta penetapan kawasan hutan, maka pencatatan atas BMN dimaksud akan dihapuskan dari pencatatan melalui mekanisme yang diatur oleh ketentuan yang berlaku;
3. Telah dilaksanakan Inventarisasi BMN PKP2B pada tahun 2025 sesuai Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang BMN PKP2B nomor 485.BA/BN.10/Invent.PKP2B/2025 tanggal 30 Desember 2025 dan Surat Penetapan Hasil Sensus nomor 486/.BA/BN.10/Invent.PKP2B/2025 tanggal 30 Desember 2025 dengan rincian hasil inventarisasi sebagai berikut:
    a. BMN PKP2B kondisi Baik yaitu sejumlah 9.708 (sembilan ribu tujuh ratus delapan) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp35.868.982.862.199,00;
    b. BMN PKP2B kondisi Rusak Ringan yaitu sejumlah 643 (enam ratus empat puluh tiga) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp755.850.070.888,00;
    c. BMN PKP2B kondisi Rusak Berat yaitu sejumlah 3.213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp3.647.679.811.564,00;
    d. BMN PKP2B Tidak Ditemukan yaitu 1008 (seribu delapan) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp1.547.706.074.109,00;
    e. BMN PKP2B Berlebih yaitu 5 (lima) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp351.245.000,00;

    Tindak lanjut hasil inventarisasi BMN PKP2B yaitu sebagai berikut:

    a. BMN PKP2B dengan kondisi Rusak Berat akan segera ditindaklanjuti dengan usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    b. BMN PKP2B Berlebih akan dilakukan penginputan transaksi Perolehan Lainnya pada aplikasi SAKTI dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi serta konfirmasi kepada Kontraktor PKP2B yang bersangkutan mengenai dokumen perolehan/dokumen lainnya;
    c. BMN PKP2B yang Tidak Ditemukan akan dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kontraktor PKP2B beserta Kuasa Pengguna Barang untuk memastikan keberadaan dan/atau kondisi BMN PKP2B yang Tidak Ditemukan. Dalam hal hasil penelusuran BMN PKP2B menjadi ditemukan, dilakukan pengkategorian:
        1) kondisi baik dan rusak ringan disajikan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai aset aktif untuk digunakan dalam kegiatan operasional;
        2) kondisi rusak berat dilakukan penyesuaian kondisi barang melalui transaksi perubahan kondisi barang menjadi rusak berat (apabila diperlukan perubahan), dan disajikan sebagai aset yang dihentikan dari kegiatan operasional untuk segera ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN.

Apabila dari hasil penelusuran lebih lanjut BMN PKP2B tetap tidak ditemukan, maka akan dilakukan reviu oleh APIP KESDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. BMN PKP2B sebagaimana pengelolaannya yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan PMK 77 Tahun 2025 dikategorikan sebagai Properti Investasi karena selain mendukung operasional pertambangan, BMN PKP2B memiliki kapasitas untuk menghasilkan pendapatan bagi negara melalui potensi nilai ekonomi yang direalisasikan melalui mekanisme sewa atau royalti, sesuai dengan ketentuan perlakuan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022;

5. Pengakhiran Perjanjian PKP2B Generasi I

   Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara PKP2B Generasi I dinyatakan berakhir atas dasar Surat Keputusan sebagaimana rincian berikut:

   a. Pada tahun 2020 PT Arutmin Indonesia melalui surat keputusan menteri ESDM nomor 221.K/33/MEM/2020 tanggal 2 November 2020 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

   b. Pada tahun 2021 PT Kendilo Coal Indonesia melalui surat keputusan menteri ESDM nomor 60/1/IUP/PMA/2021 tanggal 14 September 2021 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

   c. Pada tahun 2021 PT Kaltim Prima Coal melalui Keputusan Menteri BKPM nomor 90/1/IUP/PMA/2021 tanggal 9 Maret 2022 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

   d. Telah diterbitkannya Kepmen ESDM Nomor 4.K/30/MEM.B/2022 tentang Pencabutan Kepmen ESDM Nomor 101.K/30/MEM/2019 tentang Pembatalan Kepmen ESDM Nomor 07.K/30/MEM/2019 tentang Izin Usaha Operasi Pertambangan Khusus Perpanjangan Pertama Sebagai Kelanjutan dari PKP2B PT Tanito Harum, Diktum kedua Kepmen sebagaimana dimaksud di atas memberikan kewajiban kepada PT Tanito Harum untuk mengajukan permohonan penyesuaian perizinan menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Kepmen dimaksud ditetapkan. Pada saat ini, PT Tanito Harum telah memperoleh perizinan berupa IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sesuai dengan Nomor SK Menteri BKPM Nomor 54/1/IUP/PMDN/2023 tanggal 29 Desember 2023;

   e. Pada tahun 2023 PT Multi Harapan Utama melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 608/1/IUP/PMDN/2023 tanggal 1 April 2023 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

   f. Pada tahun 2023 PT Adaro Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 11/1/IUP/PMA/2023 tanggal 13 September 2023 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

   g. Pada tahun 2023 PT Kideco Jaya Agung melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 14/1/IUP/PMA/2023 tanggal 16 Desember 2023 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

h. Pada tahun 2025 PT Berau Coal melalui Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi 1/1/IUPK/PMA/2025 tanggal 31 Januari 2025 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian.

6. Sesuai dengan PMK 188/PMK.05/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa BMN yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, penjenjangan Unit Akuntansi dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan BMN PKP2B diilustrasikan sebagai berikut:

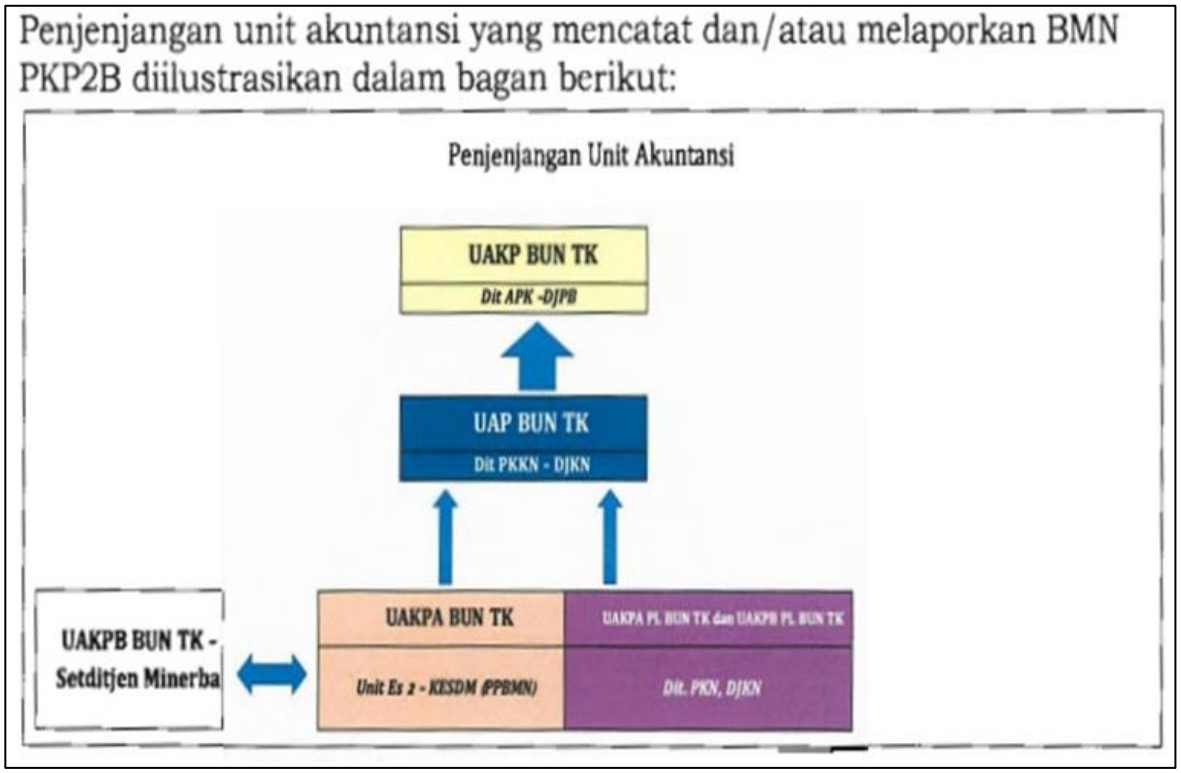

Pedoman Akuntansi BMN PKP2B ini mulai diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023, sehingga pada penyusunan LK TA 2023 ini tidak lagi konsolidasi di Biro Keuangan KESDM.

7. Sesuai dengan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-269/KN.2/2024 hal Penyampaian Timeline Interkoneksi BMN PKP2B, telah dilakukan penetapan user SAKTI pada UAKPB (Ditjen Minerba), UAKPA (PPBMN) dan UAKPKPB (Kontraktor) serta telah diselesaikan juga *mapping* kode BMN sesuai PMK 29/PMK.06/2010 tanggal 4 Februari 2010, format data untuk *inject* Saldo Awal 31 Desember 2023 *Audited*, Mutasi Tambah dan Kurang Tanah dan Non Tanah selama TA 2024. Selanjutnya, penyusunan dan pelaporan LKBUN PKP2B Generasi I Tahun 2025 telah dilaksanakan menggunakan aplikasi SAKTI namun demikian masih terdapat selisih angka antara SPAN dengan SAKTI yang memerlukan analisis lebih lanjut.

8. Pengungkapan Lainnya

a. Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor PKP2B yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Kontraktor PKP2B yang disajikan dalam mata uang USD

(dalam USD)

PKP2B/IUPK	Status	31 Des 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	31 Des 2025
PT Adaro Indonesia	IUPK	3.336.969	-	(23.660.267)	20.323.298	-	-
PT Arutmin Indonesia	PKP2B	2.593.875	-	(2.593.875)	-	-	-

PKP2B/IUPK	Status	31 Des 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	31 Des 2025
PT Berau Coal	IUPK	1.201.829	-	(122.191)	-	-	1.079.638
PT Kaltim Prima Coal	IUPK	13.155.499	-	(3.788.435)	-	(106.176)	9.260.888
PT Kideco Jaya Agung	IUPK	22.535	-	(22.199)	-	(336)	-
PT Multi Harapan Utama	IUPK	-	-	(111.686)	111.686	-	-
PT Kendilo Coal Indonesia	IUPK	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**20.310.707**	**-**	**30.298.653**	**20.434.984**	**106.512**	**10.340.526**

1) Saldo awal BMN yang disajikan dalam mata uang USD pada CALK per 1 Januari 2025 yaitu sebesar USD20,310,706.

2) Koreksi Tambah sebesar USD20,323,298 dikarenakan terdapat hal sebagai berikut:

   a) Koreksi tambah BMN dari Neraca ke CALK pada PT Adaro Indonesia dari Neraca ke CALK karena telah terbit NTPN 17ED86U8F7IE3JRQ dan Risalah Lelang nomor RL 41/12.03/2025-01 tanggal 26 Februari 2025 sebesar USD20,323,298;

   b) Koreksi tambah BMN dari Neraca ke CALK pada PT Multi Harapan Utama dari Neraca ke CALK karena telah terbit NTPN D2A0548WOCOBQTR dan Risalah Lelang nomor RL 127/13.02/2025-01 tanggal 14 Agustus 2025 sebesar USD111,686.

3) Koreksi kurang USD pada PT Kideco Jaya Agung dikarenakan terdapat aset 7-710-0061 yang telah dikapitalisasikan ke kode aset 3030206999 NUP 29 di Neraca sebesar USD336.

4) Koreksi kurang USD pada PT Kaltim Prima Coal ke Neraca hasil inventarisasi dan penilaian BMN yang dilakukan penilaian ulang sesuai Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara nomor S-186/KN.2/2025 tanggal 22 Juli 2025 sebesar USD106,176.

5) Mutasi kurang sebesar USD30,192,477 dikarenakan terdapat SK penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

   a) SK Penghapusan dengan Nomor 498.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Kendaraan Bermotor yang Berasal dari PKP2B PT Berau Coal, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD97,714;

   b) SK Penghapusan dengan Nomor 509.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD2,593,875;

   c) SK Penghapusan dengan Nomor 602.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa *Side Wall Stockpile* yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD22,199;

   d) SK Penghapusan dengan Nomor 704.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Bangunan yang Berasal dari PKP2B PT Kaltim Prima Coal, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD3,682,259;

   e) SK Penghapusan dengan Nomor 1076.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD111,686;

f) SK Penghapusan dengan Nomor 1979.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Adaro Indonesia, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD20,365,519;

g) SK Penghapusan dengan Nomor 1296.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 9 Desember 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Adaro Indonesia, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD3,294,748;

h) SK Penghapusan dengan Nomor 1382.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Berau Coal, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD24,477.

6) Saldo Akhir BMN per 31 Desember 2025 pada *off-balance sheet*/CALK dengan saldo USD yaitu sebesar USD10,340,526.

9. Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor PKP2B yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Kontraktor PKP2B yang disajikan dalam mata uang Rupiah:

(dalam rupiah)

PKP2B/IUPK	Status	31 Des 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	31 Des 2025
PT Tanito Harum	IUPK	62.596.188	-	(62.596.188)	-	-	-
PT Adaro Indonesia	IUPK	30.168.896.589	-	(247.324.459.120)	217.155.562.531	-	-
PT Arutmin Indonesia	PKP2B	-	-	-	-	-	-
PT Berau Coal	IUPK	-	-	-	-	-	-
PT Kaltim Prima Coal	IUPK	-	-	-	-	-	-
PT Kideco Jaya Agung	IUPK	-	-	-	-	-	-
PT Multi Harapan Utama	IUPK	-	-	(1.111.986.778)	1.111.986.778	-	-
PT Kendilo Coal Indonesia	IUPK	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**30.231.492.777**	**-**	**(248.499.042.086)**	**218.267.549.309**	**-**	**-**

a. Saldo awal BMN di CALK yang disajuikan dalam mata uang IDR per 1 Januari 2025 sebesar Rp30.231.492.777,00.

b. Koreksi Tambah sebesar Rp218.267.549.309,00 dikarenakan terdapat hal sebagai berikut:

1) Koreksi tambah BMN dari Neraca ke CALK pada PT Adaro Indonesia dari Neraca ke CALK karena telah terbit NTPN 17ED86U8F7IE3JRQ dan Risalah Lelang nomor RL 41/12.03/2025-01 tanggal 26 Februari 2025 sebesar Rp217.155.562.531,00;

2) Koreksi tambah BMN dari Neraca ke CALK pada PT Multi Harapan Utama dari Neraca ke CALK karena telah terbit NTPN D2A0548WOCOBQTR dan Risalah Lelang nomor RL 127/13.02/2025-01 tanggal 14 Agustus 2025 sebesar Rp1.111.986.778,00.

c. Mutasi kurang sebesar Rp248.499.042.086,00 pada CALK dikarenakan terdapat SK Penghapusan sebagai berikut:

1) SK Penghapusan nomor 594.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Floating Fender yang Berasal dari PKP2B PT Tanito Harum sebesar Rp29.357.188,00;

2) SK Penghapusan nomor 898.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Tanito Harum sebesar Rp33.239.000,00;

3) SK Penghapusan dengan Nomor 1076.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar Rp1.111.986.778,00;

4) SK Penghapusan dengan Nomor 1979.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Adaro Indonesia, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar Rp217.155.562.531,00;

5) SK Penghapusan dengan Nomor 1296.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 9 Desember 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Adaro Indonesia, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar Rp30.168.896.589,00;

d. Sehingga saldo akhir BMN yang disajikan dengan IDR pada o*ff-balance sheet*/CALK per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp0,00.

10. BMN Ekstrakomptabel

Koreksi tambah dari Neraca ke CALK atas BMN yang tidak memenuhi syarat minimum kapitalisasi pada aplikasi SAKTI dan masuk dalam BMN ekstrakomptabel pada PT Berau Coal dan PT Arutmin Indonesia yaitu dengan nilai perolehan sebesar Rp362.773.056,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Berau Coal yaitu sebesar Rp362.648.056,00;

b. PT Arutmin Indonesia yaitu sebesar Rp125.000,00.

Beban penyusutan BMN Ekstrakomptabel TA 2025 yaitu sebesar Rp7.243.626,00 pada PT Berau Coal.

Akumulasi penyusutan BMN Ekstrakomptabel TA 2025 yaitu sebesar Rp10.574.553,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Berau Coal yaitu sebesar Rp10.449.553,00;

b. PT Arutmin Indonesia yaitu sebesar Rp125.000,00.

sehingga nilai buku dari BMN Ekstrakomptabel TA 2025 yaitu sebesar Rp352.198.504,00.

I. ASET KKKS

KKKS PBMN

PENJELASAN ASET KKKS YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember 2025 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN TK yang Berasal dari KKKS per 31 Desember 2025 karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aset KKKS Pada PPBMN Yang Tidak Disajikan Pada Neraca

a. Harta Benda Modal perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP)

(dalam USD)

Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
795,249.72	-	795,249.72	-

b. Saldo awal merupakan aset HBM yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2024 (*Audited*).

c. Mutasi Kurang sebesar USD795,249.72 berasal dari penjualan BMN Berupa HBM Eks KKKS Repsol Andaman B.V dengan SK Penghapusan Nomor 812.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 10 Juli 2025 dan Eni Bukat LTD yang terbit SK Penghapusan tahun 2026 dengan No 45.K/BN.09/SJN/2026 tanggal 10 Januari 2026.

2. Aset Non Tanah Berupa HBM Dalam Proses Penghapusan

(dalam USD)

Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
-	433.195,71	-	433.195,71

a. Saldo awal merupakan aset HBM yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2024 (*Audited*).

b. Mutasi Tambah sebesar USD433,195.71 berasal dari:

1) reklasifikasi BMN Eks KKKS Eni Bukat LTD dari neraca sebesar USD295,764.14 atau senilai Rp1.888.014.056,00.

2) BMN berupa HBM Eks KKKS Eni Bukat LTD perolehan sampai dengan 2010 yang sudah laku terjual berdasarkan risalah lelang nomor 276/06.02/2025-01 tanggal 17 September 2025 dengan SK Penghapusan Tahun 2026 dengan Nomor 45.K/BN.09/SJN/2026 tanggal 10 Januari 2026, sehingga akan dilaporkan pada Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026.

KKKS BPMA

1. ASET KKKS PADA BPMA YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember 2025 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN TK yang Berasal dari KKKS per 31 Desember 2025 karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aset Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Awal 31 Desember 2024	**38.308.109.781**
Mutasi Tambah:	**-**
Mutasi Kurang:	**-**
koreksi Hasil IP	-
Saldo 31 Desember 2025	**38.308.109.781**

b. Harta Benda Modal (HBM)

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi yang sudah di-*plug and abandoned*. Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan secara *off-balance-sheet* dan disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2023 adalah senilai USD10,321,967 pada KKKS PHE NSB dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Aset HBM Berupa Sumur yang Tidak Digunakan

(dalam USD)

Jumlah KKKS	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
-	10,321,967.00	-	-	10,321,967.00

Pada tahun 2025 tidak terdapat kegiatan Inventarisasi dan Penilaian (IP) aset BMN Hulu Migas pada KKKS BPMA.

2) Aset Kondisi Rusak Berat

Aset kondisi rusak berat merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas. Total aset kondisi rusak berat per 31 Desember 2025 adalah senilai 314,532,295.00 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Kondisi Rusak Berat

(dalam USD)

Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
314,532,295.00	-	-	314,532,295.00

Saldo akhir diatas merupakan pembenahan atas total aset kondisi rusak berat yang tidak disajikan pada neraca.

3) Aset *Subsequence Expenditure* (SE)

Mutasi Aset HBM Berupa Aset SE

(dalam USD)

Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
-	104,296,313	-	104,296,313

Mutasi tambah sebesar USD104,296,313 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB.

4) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan BPMA pada 31 Desember 2025

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang dilaporkan oleh BPMA pada 31 Desember 2025 serta yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagai berikut:

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Belum di IP

(dalam USD)

Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
292,363,084.23	-	68,856,649.44	223,506,434.79

Penjelasan atas mutasi kurang adalah sebagai berikut:

a) Penghapusan aset PHE NSB senilai (USD59,652,874.44);
b) Penghapusan aset PT. Medco E&P Malaka senilai (USD9,218,358.00);
c) Pembenahan pencatatan aset KRX Energy yang belum diperhitungkan pada saldo awal senilai USD14,528.99.

5) Aset dalam proses penghapusan

Tidak terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS.

6) Aset Harta Benda Inventaris

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP).

Mutasi HBI perolehan sebelum tahun 2010 yang belum dilakukan IP

(dalam USD)

Nilai Perolehan Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Nilai Perolehan 31 Desember 2025
45,921.30	-	2.432,39	43,488.91

Penjelasan atas mutasi kurang adalah sebagai berikut:

a) Reklas aset pada PT. Medco E&P Malaka senilai (USD2,432.39)
b) Pembenahan pencatatan aset KRX Energy yang belum diperhitungkan pada saldo awal senilai (USD527.08).

KKKS SKK Migas

1. Aset Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Awal 31 Desember 2024	**14,864,735,507,714**
Koreksi Saldo Awal	**(3.087.822.644.013)**
Mutasi Tambah:	**2.652.010.311**
Pengadaan	2.338.264.311
Koreksi Pencatatan	160.238.000
Koreksi Tambah Sertifikasi	153.508.000
Mutasi Kurang:	**25.101.633.370**
Koreksi Pencatatan	1.512.244.350
Koreksi Kurang Hasil IP	23.567.234.396
Koreksi Kurang Sertifikasi	22.154.624
Saldo Akhir 31 Desember 2025	**11,754,463,240,642**

Penjelasan atas mutasi CaLK Tanah adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp14.864.735.507.714,00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2024 *Audited*.
b. Koreksi kurang saldo awal sebesar Rp3.087.822.644.013,00 merupakan koreksi saldo awal yang masih menggunakan saldo total nilai perolehan tanah per 31 Desember 2024.
c. Mutasi tambah Tanah sebesar Rp2.652.010.311,00 terdiri dari Pengadaan, koreksi pencatatan, koreksi tambah hasil IP dan koreksi tambah sertifikasi.
d. Mutasi kurang Tanah sebesar Rp25.101.633.370,00 terdiri dari:
    1) Koreksi pencatatan tanah sebesar Rp1.512.244.350,00 pada KKKS PT. Seleraya Merangin Dua dan PT. Pertamina Hulu Rokan;
    2) Koreksi pencatatan yang merupakan hasil dari IP sebesar Rp23.567.234.396,00 pada KKKS PT Pertamina Hulu Rokan, PT. Bumi Siak Pusako, PT. EMP Energi Gandewa, dan PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komering;
    3) Koreksi kurang sertifikasi yang merupakan penggabungan bidang tanah hasil sertifikasi sebesar Rp22.154.624,00 pada KKKS PT Pertamina Hulu Rokan.

2. Aset Harta Benda Modal (HBM)

    a. Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi yang sudah di *Plug and Abandoned* P&A). Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini di *off-balance* dan disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2025 adalah senilai USD24,494,929.

(dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2025
27,399,005	-	2,904,076	24,494,929

Terdapat mutasi kurang atas aset HBM Berupa Sumur yang Tidak Digunakan dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 pada KKKS PT Pertamina Hulu Rokan. Hal ini dikarenakan sumur – sumur yang tidak digunakan pada periode tersebut telah dilakukan P&A.

b. Aset Kondisi Rusak Berat

Aset kondisi rusak berat merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas. Total aset kondisi rusak berat per 31 Desember 2025 adalah sebesar USD162,431,009 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2025
185,729,167	-	23,298,158	162,431,009

Penjelasan atas mutasi Aset Kondisi Rusak Berat adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal yang disajikan sebesar USD185,729,167 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2024 *Audited*.

2) Mutasi kurang sebesar USD23,298,158 merupakan aset kondisi rusak berat yang telah diproses FUPP pada KKKS:

(dalam USD)

Operator	Rusak Berat
MEDCO E&P GRISSIK LTD,	2,192,240
ENERGY EQUITY EPIC SENGKANG PTY, LTD,	61,223
KANGEAN ENERGY INDONESIA LTD,	901
MINARAK BRANTAS GAS INC,	0.02
PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD,	1,612,446
PT PERTAMINA HULU ENERGI WEST MADURA OFFSHORE	11,364,800
PETROGAS ISLAND LTD,	159,194
PT PERTAMINA HULU ROKAN	7,907,354
Jumlah Mutasi	**23,298,158**

c. Aset *Subsequence Expenditure* (SE)

Aset *Subsequence Expenditure* (SE) berasal dari kapitalisasi SE yang direklasifikasi ke neraca, Total Aset *Subsequence Expenditure* per 31 Desember 2025 adalah senilai USD322,720,006 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2025
606,220,480	4,107,840	287,608,314	322,720,006

Penjelasan atas mutasi Aset HBM Berupa Aset SE adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal yang disajikan sebesar USD606,220,480 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2024 *Audited*.
2) Mutasi Tambah sebesar USD4,107,840 merupakan SE yang aset induknya disajikan di Neraca pada 10 KKKS.
3) Mutasi kurang sebesar USD287,608,314 merupakan SE yang aset induknya disajikan di CaLK pada 10 KKKS.

d. Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP)

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian IP posisi per 31 Desember 2025 dengan total nilai USD5,021,491,127 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2025
5,047,253,920	61,050,275	86,813,068	5,021,491,127

Penjelasan atas mutasi Aset HBM Berupa Aset Belum di IP adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal yang disajikan sebesar USD5,047,253,920 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2024 *Audited*.
2) Mutasi tambah sebesar USD61,050,275 merupakan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan dan atau koreksi catatan HBM pada 5 KKKS.
3) Mutasi kurang sebesar USD86,813,068 berasal dari koreksi nilai perolehan HBM dan reklasifikasi ke kategori aset dalam proses penghapusan pada 25 KKKS.

e. Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM, pada 31 Desember 2025 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD506,169,380 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2025
370,197,337	250,373,416	114,401,373	506,169,380

Penjelasan atas mutasi Aset Dalam Proses Penghapusan adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal yang disajikan sebesar USD370,197,337 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2024 *Audited*.

2) Mutasi tambah sebesar USD250,373,416 merupakan reklasifikasi aset yang di *off-balance* ke CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkan/dialihstatuskan ke pihak ketiga namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan atau kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM pada 21 KKKS.

3) Mutasi kurang aset sebesar USD114,401,373 merupakan reklasifikasi/koreksi catatan aset dan aset yang telah dihapuskan karena telah selesai proses hapus bukunya pada 9 KKKS.

f. Aset Tidak Ditemukan

Pada 31 Desember 2025 sudah tidak terdapat aset HBM tidak ditemukan. Berikut mutasi aset HBM tidak ditemukan dari periode 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2025:

(dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2025
31,654,947	-	31,654,947	-

Penjelasan atas mutasi Aset Tidak Ditemukan adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal yang disajikan sebesar USD31,654,947 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2024 *audited* yang merupakan aset eks PT. Chevron Pacific Indonesia yang tidak ditemukan, di mana secara pencatatan telah diserahkan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan sebagai KKKS Alih Kelola WK Rokan.

2) Mutasi kurang sebesar USD31,654,947 merupakan penghapusan Aset Tidak Ditemukan eks PT. Chevron Pacific Indonesia pada KKKS PT. Pertamina Hulu Rokan yang telah selesai dilakukan proses hapus buku.

3. Aset Harta Benda Inventaris

a. Aset Perolehan Sampai dengan Tahun 2010 yang Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian Posisi Per 31 Desember 2025

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian IP per 31 Desember 2025 sebesar USD4,045,178 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2025
4,157,877	85,956	198,654	4,045,179

Penjelasan atas mutasi Aset HBI perolehan sebelum tahun 2010 yang belum dilakukan IP adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal yang disajikan sebesar USD4,157,876 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2024 *Audited*.

2) Mutasi tambah sebesar USD85,956.00 merupakah koreksi nilai perolehan HBI pada KKKS Citic Seram dan Premir Oil Natuna.

3) Mutasi kurang sebesar USD198,654.00 merupakan koreksi nilai perolehan HBI pada KKKS Kangean Energy Indonesia Ltd., Petrochina Jabung, PHE Jambi Merang dan Medco Energi Sampang PTY. Ltd.

b. Aset Dalam Proses Penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM,

Pada 31 Desember 2025 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD975.06 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2025
98,999.00	-	98,024.00	975.00

Penjelasan atas mutasi Aset Dalam Proses Penghapusan adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal yang disajikan sebesar USD98.999.00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2024 *Audited*.

2) Mutasi kurang sebesar USD98,024.00 merupakan aset yang telah dihapuskan karena telah selesai proses hapus bukunya pada KKKS Premier Oil Natuna Sea B.V., Kangean Energy Indonesia Ltd., PT Pertamina Hulu Rokan, Exxon Mobil Cepu, PetroChina Jabung dan Medco Energi Bangkanai.

c. Aset Tidak Ditemukan

Pada 31 Desember 2025 sudah tidak terdapat aset HBM tidak ditemukan. Berikut mutasi aset HBM tidak ditemukan dari periode 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2025.

(dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2025
27,523	-	27,523	-

Penjelasan atas mutasi Aset Tidak Ditemukan adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal yang disajikan sebesar USD27,523 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2024 audited yang merupakan aset eks PT. Chevron

Pacific Indonesia yang tidak ditemukan, di mana secara pencatatan telah diserahkan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan sebagai KKKS Alih Kelola WK Rokan.

2) Mutasi kurang sebesar USD27,523 merupakan penghapusan Aset Tidak Ditemukan eks PT. Chevron Pacific Indonesia pada KKKS PT. Pertamina Hulu Rokan yang telah selesai dilakukan proses hapus buku sesuai dengan surat 577.K/BN.09/SJN.A/2025.

4. Pengungkapan Lainnya

a. Penjelasan atas Pengelolaan dan Pengamanan BMN Berupa Tanah di Wilayah Kerja Rokan oleh KKKS PHR (Alih Kelola Eks PT CPI) Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

PPBMN bersama dengan DJKN, SKK Migas dan KKKS melakukan pengelolaan BMN Tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, selain itu dalam rangka pengamanan BMN Tanah khususnya Eks KKKS PT CPI, telah dilakukan pengamanan secara administratif melalui pencatatan dan sertifikasi BMN Tanah Hulu migas yang saat ini terus berlangsung. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK RI, diketahui bahwa masih terdapat BMN Tanah yang bersengketa dengan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

Kasus Non Litigasi

No.	Kasus	Tahun	Status *Update*
1	Area 361 Ha (Murini)	1994	DJKN menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pemanfaatan BMN untuk periode 2019, Murini sampai sekarang belum merespon, BMN masih dikuasai secara fisik oleh Murini.
2	Ivomas Tunggal	1994	Status terakhir hearing di DPRD Riau pada tahun 2019 terkait laporan kelompok orang yg mengaku sbg masy adat, tidak ada resolusi apapun dlm hearing ini, *status quo* sampai sekarang.
3	Kelompok Masyarakat Pemilik Tanah (KMPT-Bangko Jaya)	2004	Status terakhir kelompok tsb mengirimkan surat ke Kemen BUMN di 2019, tidak ada perkembangan lebih lanjut.
4	Kelompok Sawit Permai (KTSP)	2004	status terakhir mereka kirim surat ke Menteri BUMN dan Dirut Pertamina di tahun 2019, CPI sekali diundang meeting oleh Tim Kawal BMN Kemen BUMN, status penanganan lebih lanjut tidak ada lagi sejak itu.
5	Candi Pemburu Bypass	2001	update terakhir di 2017 ybs melakukan aksi pemblokiran lokasi, CPI melaporkan ke polres rohil, dan belum ada update hingga kini.
6	PT. INTERNATIONAL PRIMA COAL (PT.IPC)	2011	a) Tahap diskusi internal dan *mapping* bersama antara Cue Kalimantan dan PT.IPC; b) PT.IPC menyampaikan Surat Permohonan Penggunaan Lahan untuk kegiatan penambangan.

Kasus Ligitasi

No.	Nama/Lokasi	No. Perkara PN/PT/MA	Status Perkara	Keterangan
1	Sarbini – PN Dumai	16/Pdt.G/2019/PN Dum	Putusan PN (Inkrah)	putusan PN Dumai menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Inkrah)
2	Yayasan Menara -PN Dumai	44/Pdt.G/2019/PN Dum 245/PDT/2020/PT PBR	Putusan PN (Inkrah)	Putusan PT Pekanbaru (banding) menguatkan putusan PN Dumai yg menolak gugatan penggugat utk seluruhnya (Inkrah)

No.	Nama/Lokasi	No. Perkara PN/PT/MA	Status Perkara	Keterangan
3	Buyung Nahar – PN Bengkalis	0/Pdt.G/2020/PN Bls	Proses Kasasi PN dan PT menang	Menunggu Putusan MA atas Kasasi yg diajukan Buyung Nahar. Di tingkat PN dan PT menolak gugatan penggugat utk seluruhnya.
4	Yulizar – PN Bengkalis	31/Pdt.G/2020/PN Bls	Putusan PT (Inkrah) PN menang	Putusan Banding yang menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
5	Mastison Isa – PN Pekanbaru	194/Pdt.G/2019/PN Pbr	Putusan Kasasi (Inkrah)	majelis hakim Kasasi mahkamah agung menguatkan putusan PT dan PN yg menolak gugatan penggugat utk seluruhnya (Inkrah).
		152/PDT/2020/PT PBR	PN, PT dan Kasasi menang	
6	Syamsuri (Rantau Bais) – PN Rokan Hilir)	10/PDT.PLW/2015/PN RHL 237/PDT/2017/PT PBR	Putusan Kasasi MA (Belum menerima Relaas Pemberitahuan Putusan)	Putusan Kasasi MA menguatkan putusan PT dan PN yang menyatakan gugatan penggugat syamsuri tidak dapat diterima.

Sebagai salah satu bentuk preventif dalam rangka mitigasi dan pemantauan risiko terhadap BMN Tanah yang bersengketa dengan pihak lain, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan SKK Migas selaku Kuasa Pengguna Barang melalui:

1) Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Deputi Dukungan Bisnis, SKK Migas Nomor 669/90/SJA.4/2020, tanggal 14 September 2020, hal Pelaporan Sertipikasi dan Bukti Kepemilikan BMN Hulu Migas Berupa Tanah;
2) Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Deputi Dukungan Bisnis, SKK Migas Nomor T-135/BN.05/SJA.4/2022, tanggal 22 Februari 2022, hal Penyampaian Bukti Kepemilikan BMN Hulu Migas berupa Tanah;
3) Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN yang ditujukan kepada Direktur PNKNL, Kementerian Keuangan Nomor T-145/BN.10/SJA.4/2022 tanggal 15 Februari 2022, hal Permintaan Pendapat/Masukan Atas Rancangan *Roadmap* Sertipikasi BMN Hulu Migas Berupa Tanah;
4) Surat Sekretaris Jenderal KESDM kepada Kepala SKK Migas Nomor T-540/BN.05/SJN.A/2021, tanggal 28 April 2021, hal Penyerahan Barang Milik Negara pada WK Rokan.

b. Pengelolaan Dan Pengamanan Bmn Berupa Tanah Pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 PMK 140/PMK.06/2020, bahwa Kontraktor, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna barang dan Pengelola Barang wajib melakukan Pengaman BMN Hulu Migas yang menjadi tanggung jawabnya dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran masing-masing dan sesuai ketentuan pasal 77 ayat 2, Pengamanan BMN Hulu Migas oleh Kontraktor dilakukan sampai dengan Terjadinya penyerahan atau peralihan kepada Pemerintah atau Pihak Lain dan/atau Selesainya pelaksanaan permusnahan yang dibuktikan dengan suatu berita acara. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Tim BPK RI, masih terdapat 3 bidang tanah dalam sengketa dengan pihak lain, yaitu:

1) Sengketa atas BMN Tanah Handil berlokasi di Kelurahan Muara Jawa Ulu seluas 40.800 m2 pekara nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Trg dengan penggugat a.n. Ramli dkk, 5 (orang) dan tergugat adalah PT PHM, PT Total Fina Elf E&P Balikpapan, BPN Kab. Kutai Kartanegara dan Kelurahan Muara Jawa Ulu. Status terakhir atas perkara ini telah diputus sampai dengan tingkat Banding di bawah perkara No. 79/PDT/2021/PT SMR, dengan amar gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

2) Sengketa atas BMN Tanah Muara Kembang Perkara 45/Pdt.G/2020/PN.Trg, dengan penggugat a.n. M.Nursidiq dkk (4 orang) dan tergugat adalah PT PHM dan SKK Migas, gugatan terkait dengan klaim atas tanah di wilayah Muara Kembang. Status terakhir atas perkara ini gugatan ini telah dicabut oleh Para Penggugat.

c. Permasalahan Hukum BMN Hulu Migas

Terdapat 7 permasalahan hukum BMN Hulu Migas sampai dengan 31 Desember 2024 yang terbatas pada:

1) Permasalahan hukum dimana SKK Migas menjadi pihak dalam perkara; dan/atau

2) Permasalahan hukum yang dilaporkan oleh KKKS

No.	Jenis Aset (HBM, HBI, MP, Tanah)	Deskripsi Aset	Permasalahan Hukum	Status Penanganan Permasalahan Hukum
1	Tanah	tanah seluas 7.500 M² di Desa Malawili	Gugatan Kepemilikan Tanah dengan pihak-pihak: Penggugat: Hasyir Saputra Tergugat I: PT Petrogas Basin Ltd Tergugat II: SKK Migas Tergugat III: Bupati Sorong Tergugat IV : PetroChina International Bermuda Ltd	Majelis Hakim tingkat Kasasi telah memutus perkara pada 27 Maret 2024 dengan amar pada pokoknya: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah objek sengketa seluas 7.500 M² adalah sah milik Penggugat; 3. Menyatakan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah No.01/KPTS/PPT-SRG/2001 tanggal 21 Mei 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik; 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp26.475.000.000,00.
2	Tanah	Tanah seluas 120.000 M² yang di dalamnya terdapat Sumur Bor Echo 1, Echo 2, Echo 3 dan Echo 4	Gugatan Kepemilikan Tanah dengan pihak-pihak: Penggugat: Mesak Moifilit Tergugat I: PT Pertamina (Persero) Tergugat II: PT Pertamina EP	Majelis Hakim tingkat Kasasi telah memutus perkara pada 29 April 2024 dengan amar pada pokoknya: 1. Menyatakan menurut hukum bahwa Keret Moifilit telah mengalami kerugian secara materiil sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang melakukan eksplorasi serta eksploitasi serta menguasai Tanah Objek Sengketa a quo seluas 12 Ha atau + 120.000 M2, dari tahun 1975 sampai dengan saat ini atau selama 47 (empat puluh tujuh) tahun, karena Keret Moifilit telah kehilangan kesempatan selama kurun waktu tersebut, untuk memperoleh pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp5.146.500.000,00; 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Objek Sengketa a quo adalah termasuk daerah penghasil minyak bumi yang disedot dan/atau dikelola oleh Para Tergugat sejak tahun 1975 sampai dengan saat ini atau selama 47 (empat puluh tujuh) tahun lamanya, maka adalah patut dan wajar bagi Keret Moifilit untuk memperoleh kompensasi atas perolehan hasil minyak bumi

No.	Jenis Aset (HBM, HBI, MP, Tanah)	Deskripsi Aset	Permasalahan Hukum	Status Penanganan Permasalahan Hukum
				sebesar 3% dari total rata-rata hasil produksi dalam Rupiah sejak tahun 1975 sampai dengan saat ini, yaitu sebesar Rp47.851.500.000,00; 3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat uang sejumlah Rp47.851.500.000,00;
3	HBM/HBI	Pipa	Klaim oleh Lembaga Masyarakat Adat Papua terhadap pipa-pipa yang terletak di gudang INPEX, SAKA, PT Pertamina EONWJ, PT Minarak Lapindo, dan Husky CNOOC Madura Ltd	Terhadap Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, saat ini sedang dilakukan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) oleh SKK Migas di Pengadilan Negeri Cibinong
4	Tanah	Tol Dumai	Perwalanan Eksekusi oleh warga	dalam tahap pengadilan Negeri Bengkalis
5	Tanah	tanah dengan luas + 74.340 M2 tanah dengan luas + 357.840 M2 tanah dengan luas + 795.600 M2	Gugatan Kepemilikan Tanah Penggugat: Adie Prajnawira Penggugat I: Andi Wilyanto Penggugat II: Hendry Tergugat : PT Imbang Tata Alam Turut Tergugat I: PT Pertamina (Persero) Turut Tergugat II: SKK Migas	dalam tahap pengadilan Tinggi Pekanbaru
6	Tanah	Tanah dengan luas + 600 Ha	Pembantah: Arwansyah (Ketua Perkumpulan Tani Rantau Bais Terpadu/TRBT) Dkk Terbantah : SKK Migas	Dalam tahap pengadilan Negeri Dumai
7	Tanah	Tanah dengan luas 98.260m2	Penggugat: SARBINI Tergugat: 1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu MInyak dan Gas Bumi (SKK Migas) – Tergugat I, Dll.	Dalam tahap pengadilan Negeri Dumai

J. CATATAN PENTING LAINNYA PENGGANTIAN BIAYA DAN MARGIN WAJAR ATAS INVESTASI PEMERINTAH DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PENGGANTIAN BIAYA DAN MARGIN YANG WAJAR

Penggantian biaya dan margin IP PEN merupakan bagian dari Program PEN. Realisasi penyaluran penggantian biaya dan margin IP PEN sampai dengan Desember Tahun 2025 sebesar Rp2.749.632.804,00 dari alokasi DIPA sebesar Rp2.953.978.000,00, dengan capaian Rincian *Output* 93,09 persen. Realisasi tersebut merupakan realisasi penyaluran penggantian biaya danld margin periode April dan Oktober 2025 sesuai hasil reviu oleh BPKP.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit) operasional dari suatu entitas pelaporan.

Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Hibah. Sedangkan Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Transfer, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Beban Lain-lain.

Terdapat defisit pada Laporan Operasional pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.826.835.132.882.523,00 dan Rp1.584.452.178.371.533,00. Defisit pada Laporan Operasional pada tahun 2025 mengalami kenaikan defisit sebesar Rp242.382.954.510.990,00 atau sebesar 15,30 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Defisit LO selama tahun 2025 sebesar Rp1.826.835.132.882.523,00 tersebut berasal dari defisit kegiatan operasional dan defisit kegiatan non operasional.

Adapun kegiatan operasional pada tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp1.712.994.362.319.263,00 yang terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp500.761.824.587.505,00 dan Beban Operasional sebesar Rp2.213.756.186.906.768,00.

Sedangkan dari kegiatan non operasional pada tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp113.840.770.563.260,00 yang merupakan rekapitulasi dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp970.572.056.121,00, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang sebesar Rp30.216.347.500,00 dan defisit kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp112.839.982.159.639,00.

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp500.761.824.587.505,00 dan Rp579.642.938.469.245,00. Pendapatan Operasional pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp78.881.113.881.740,00 atau turun 13,61 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan Hibah seperti tersebut di bawah ini:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	482.414.938.163.136	535.426.617.430.135
2	Pendapatan Hibah	18.346.886.424.369	44.216.321.039.110
Jumlah		**500.761.824.587.505**	**579.642.938.469.245**

PNBP pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp482.414.938.163.136,00 dan Rp535.426.617.430.135,00. PNBP pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp53.011.679.266.999,00 atau turun 9,90 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024 terutama penurunan pada PNBP Lainnya. PNBP pada tahun 2025 sebesar Rp482.414.938.163.136,00 terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, dan PNBP Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Sumber Daya Alam	133.424.927.057.308	139.138.205.840.997
2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	7.500.000.000	2.254.798.245
3	PNBP Lainnya	348.982.511.105.828	396.286.156.790.893
Jumlah		**482.414.938.163.136**	**535.426.617.430.135**

Pendapatan Hibah pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp18.346.886.424.369,00 dan Rp44.216.321.039.110,00. Pendapatan Hibah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp25.869.434.614.741,00 atau turun 58,51 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024.

E.2.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp133.424.927.057.308,00 dan Rp139.138.205.840.997,00. Pendapatan SDA pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.713.278.783.689,00 atau turun 4,11 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh terkontraksinya realisasi ICP dan *lifting* minyak pada tahun 2025.

Pendapatan Sumber Daya Alam terdiri dari PNBP Sektor Migas dan Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah atas Pertambangan Panas Bumi. Pendapatan LO sektor hulu migas diakui pada saat diterimanya tagihan atas piutang migas yang diterbitkan oleh SKK Migas. Sementara itu, Pendapatan LO-Setoran Bagian Pemerintah (SBP) Pertambangan Panas Bumi diakui pada saat selesainya perhitungan hak pemerintah atas Bagian Pendapatan Panas Bumi yaitu pada saat selesainya penyusunan kertas kerja perhitungan PNBP sebagai dasar pemindahbukuan PNBP panas bumi dan/atau pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran setoran bagian pemerintah. Adapun Pendapatan Sumber Daya Alam pada tahun 2025 sebesar Rp133.424.927.057.308,00 merupakan PNBP dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan SDA Minyak dan Gas	130.327.876.156.703	136.183.556.431.541
2	Pendapatan SDA Panas Bumi	3.097.050.900.605	2.954.649.409.456
Jumlah		**133.424.927.057.308**	**139.138.205.840.997**

1. Pendapatan SDA Minyak dan Gas Bumi

Pendapatan SDA Minyak dan Gas pada tahun 2025 sebesar Rp130.327.876.156.703,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.855.680.274.838,00 atau turun 4,30 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp136.183.556.431.541,00.

Pendapatan Operasional sektor hulu migas yang selanjutnya disebut dengan Pendapatan LO sektor hulu migas merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan LO sektor hulu migas diakui pada saat diterimanya tagihan atas hak negara dari kegiatan usaha hulu migas yang diterbitkan oleh SKK Migas dalam periode Januari s.d. Desember 2025. Pendapatan LO yang berasal dari PNBP SDA Migas (Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi) dikoreksi apabila terdapat tagihan PBB Migas dari Direktorat Jenderal

Pajak. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang dibayarkan oleh DJA (sebagai pengurang PNBP SDA Migas), namun di sisi lain merupakan pendapatan pajak yang dilaporkan oleh DJP. Apabila tidak dilakukan koreksi, penyajian total pendapatan negara dalam LKPP akan mengalami distorsi, karena menyajikan angka PBB Migas sebanyak dua kali.

Pendapatan SDA Minyak dan Gas dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Minyak Bumi	82.730.599.092.233	99.721.484.550.273
2	Pendapatan Gas Bumi	47.597.277.064.470	36.462.071.881.268
Jumlah		**130.327.876.156.703**	**136.183.556.431.541**

Pendapatan Minyak Bumi-LO merupakan nilai *lifting* SDA minyak bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Minyak Bumi-LO diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dan BPMA dalam laporan pengiriman minyak bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi-LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi, sehingga Pendapatan Minyak Bumi-LO tahun 2025 adalah sebesar Rp82.730.599.092.233,00, yaitu berasal dari nilai hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama dikurangi dengan PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi Rp5.682.026.188.587,00.

Pendapatan Gas Bumi-LO merupakan nilai *lifting* SDA gas bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Gas Bumi-LO diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dan BPMA dalam laporan pengiriman gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Gas Bumi-LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Gas Bumi. Pendapatan Gas Bumi-LO tahun 2025 adalah sebesar Rp47.597.277.064.470,00 berasal dari nilai hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama dikurangi PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Gas Bumi sebesar Rp2.833.115.752.348,00.

2. Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO)

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO) merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Sesuai dengan PMK Nomor 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi, Pendapatan PNBP Panas Bumi LO diakui berdasarkan asas bruto yakni diakui:

a. pada saat timbulnya hak atas bagian pemerintah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha; dan/atau
b. pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran SBP; dan/atau
c. pada saat dibayarkan Setoran Bagian Pemerintah oleh Pengusaha.

Selain itu, sesuai pengaturan PMK di atas, pengeluaran terkait dengan penyelesaian kewajiban pemerintah akan diakui sebagai:

a. beban yaitu pengeluaran terkait penyelesaian *reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi; atau
b. pengurang pendapatan laporan operasional yaitu terkait penyelesaian pembayaran PBB panas bumi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dengan demikian perhitungan pendapatan PNBP Panas Bumi-LO tahun 2025 diperoleh dari SBP yang diterima triwulanan di rekening panas bumi dikurangkan dengan jumlah pembayaran PBB panas bumi, sebagai berikut:

PNBP Panas Bumi-LO = Setoran bagian pemerintah – PBB panas bumi

Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO (Pendapatan LO) tahun 2025 sebesar Rp3.097.050.900.605,00 mengalami kenaikan sebesar Rp142.401.491.149,00 dibandingkan dari realisasi Pendapatan LO pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp2.954.649.409.456,00 atau naik sebesar 4,82 persen.

Rincian realisasi Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2025
1	**Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah triwulanan (1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**2.789.461.333.886**
	1) PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang	380.917.478.680
	2) PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong	120.655.260.933
	3) PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu	124.127.784.744
	4) PT Pertamina Geothermal Energy Area Lumut Balai	-
	5) Star Energy Geothermal Salak, Ltd	723.783.605.978
	6) Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	575.099.096.061
	7) Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	741.311.372.534
	8) PT Geo Dipa Energi Area Dieng	9.362.168.525
	9) PT Geo Dipa Energi Area Patuha	114.204.566.431
2	**Tagihan PBB Panas Bumi Tahun 2024**	**480.388.534.974**
3	**Pembayaran SBP TW I Tahun 2026 (hasil kegiatan usaha Oktober s.d. Desember 2025)**	**787.978.101.693**
Total (1-2+3)		**3.097.050.900.605**

E.2.1.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara Dipisahkan pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp7.500.000.000,00 dan Rp2.254.798.245,00. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan pendapatan bagian laba BUMN pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) dan BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99). Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebesar Rp7.500.000.000,00 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.245.201.755,00 atau naik 232,62 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini terjadi pada bagian laba Setoran Lainnya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah BP BUMN	-	19
2	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah BP BUMN	7.500.000.000	4.948.226
3	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	-	-
4	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	-	2.249.850.000
Jumlah		**7.500.000.000**	**2.254.798.245**

Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) sebesar Rp7.500.000.000,00 merupakan pendapatan bagian laba BUMN yang berasal dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dengan pencatatan metode biaya. Metode Biaya digunakan untuk penilaian Investasi Pemerintah pada PMN apabila kepemilikan atau saham milik negara sebagai Penyertaan Modal di entitas badan usaha (*investee*) kurang dari 20 persen dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau minoritas.

Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp2.249.850.000,00 merupakan pendapatan surplus dari Bank Indonesia atau Lembaga Keuangan.

E.2.1.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp348.982.511.105.828,00 dan Rp396.286.156.790.893,00. PNBP Lainnya pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp47.303.645.685.065,00 atau turun 11,94 persen.

Diketahui bahwa terdapat penurunan signifikan yang berasal pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain (999.08) dengan penurunan sebesar Rp21.958.278.627,00 yang pada tahun 2025 sebesar Rp211.604.510,00 atau turun 99,05 persen dari tahun 2024 sebesar Rp22.169.883.137,00.

(dalam rupiah)

BA	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
999.01	Pengelola Utang	34.745.622.261.968	38.896.471.636.138
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	273.767.486.493.431	319.370.622.455.722
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	1.621.539.933.831	1.654.329.294.874
999.05	Pengelola Transfer ke Daerah	53.007.463.770	-
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	7.032.332	8.129.695
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	211.604.510	22.169.883.137
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	38.794.636.315.986	36.342.555.391.327
Jumlah		**348.982.511.105.828**	**396.286.156.790.893**

1. PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Utang (BA BUN 999.01) pada 2025 sebesar Rp34.745.622.261.968,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.150.849.374.170,00 atau 10,67 persen dari tahun 2024 sebesar Rp38.896.471.636.138,00. PNBP Lainnya tersebut merupakan Pendapatan Premium dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Berikut rincian PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Utang (999.01):

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.592.528.816.100	4.600.546.055.800
2	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	44.282.432.000	44.403.755.000
3	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara Syariah (SBSN)	1.019.992.842.800	1.273.420.559.600
4	Pendapatan Anggaran lain-lain:	29.088.818.171.068	32.978.101.265.738
	- SBN	29.088.818.171.068	32.978.101.265.738
	- Pinjaman	-	-
Jumlah		**34.745.622.261.968**	**38.896.471.636.138**

Realisasi PNBP Lainnya merupakan realisasi atas Pendapatan Premium dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Pendapatan Premium merupakan amortisasi dari Penerimaan Premium atas Penerbitan SBN sampai dengan tahun 2025.

Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Surat Berharga Negara merupakan:

a. Kontribusi BI-LO sebesar Rp29.088.814.409.262,00. Rincian selengkapnya terkait kontribusi BI sebagaimana pada Catatan Penting Lainnya Pos LO;
b. Pelaksanaan Pengujian Evaluasi Tahunan atas Sistem Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan SUN Ritel 2025 sebesar Rp243.000,00;
c. Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran SUN Ritel sebesar Rp20.000,00;
d. *Wire test* (Uji Coba Transfer) dalam rangka Penerbitan *Kangaroo Bond* sebesar Rp21.194,00;
e. *Mock Production* SUN Ritel Valas sebesar Rp3.427.608,00;
f. *Mock Production* SUN Ritel sebesar Rp33.360,00; dan
g. *Wire test* (Uji Coba Transfer) dalam rangka Penerbitan Sukuk Valas sebesar Rp16.644,00.

Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Surat Berharga Negara tahun 2025 menurun dibanding tahun 2024 disebabkan karena menurunnya Kontribusi Bank Indonesia yang diterima oleh Pemerintah.

2. PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Investasi (BA BUN 999.03) sebesar Rp273.767.486.493.431,00 mengalami penurunan sebesar Rp45.603.135.962.291,00 atau turun 14,28 persen dari tahun 2024 sebesar Rp319.370.622.455.722,00. Penurunan yang signifikan terjadi pada penyesuaian nilai investasi. Rincian Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Investasi (999.03) adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	272.210.891.479.540	317.954.581.163.773
2	Pendapatan Bunga Lainnya	1.415.973.826.831	1.279.778.210.363
3	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	140.621.187.060	136.263.072.585
4	Pendapatan Anggaran Lainnya	-	9.000
Jumlah		**273.767.486.493.431**	**319.370.622.455.721***

*) Selisih (Rp1) karena akumulasi pembulatan tahun-tahun sebelumnya

a. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi

Pendapatan penyesuaian investasi merupakan pendapatan penyesuaian nilai investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah. Pendapatan penyesuaian Investasi pada BA BUN 999.03 pada tahun 2025 dan tahun 2024 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	KPA BP BUMN (986917)	148.246.171.558.228	224.125.748.484.232
2	KPA KND DJKN (977191)	12.307.906.269.556	10.066.480.172.389
3	KPA DJPPR dit EAS (970974)	11.494.122	11.336.939
4	UAIP (999244)	111.380.175.831.434	83.533.577.410.117
5	KPA Direktorat SMI DJPB (961671)	198.089.972.337	99.875.091.668
6	KPA Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR, modal Awal BP Tapera (987253)	57.409.784.237	49.803.033.365
7	KPA LDKPI (979015)	9.353.589.588	9.242.399.273
8	KPA Badan Bank Tanah (986392)	11.772.980.038	69.843.235.790
Jumlah		**272.210.891.479.540**	**317.954.581.163.773**

KPA BP BUMN (986917)

Pendapatan yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah BP BUMN senilai Rp148.246.171.558.228,00 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah BP BUMN dalam Laporan Keuangan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan sebesar Rp75.879.576.926.004,00 atau turun 33,86 persen.

Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya perbedaan metode pencatatan pada tahun 2024 dengan tahun 2025. Pada periode tahun 2025, bagian laba pemerintah (pendapatan) yang berasal dari laba BPI Danantara (termasuk di dalamnya PT DAM selaku *Holding* Operasional) dicatat menggunakan metode ekuitas yaitu dengan mengakui laba anak perusahaannya secara neto sesuai dengan persentase kepemilikan, termasuk yang memiliki ekuitas negatif.

Rincian Pendapatan Penyesuaian Investasi pada satuan kerja BP BUMN dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	BUMN Persero	41.317.327	222.733.415.320.832
2	BUMN Perum	1.455.153.548.755	1.392.333.163.400
3	BPI Danantara	145.299.233.000.000	-
4	*Holding*	1.491.743.692.147	-
5	Non BUMN (minoritas)	-	-
6	PMN Konversi Aset Non Kas	-	-
Jumlah		**148.246.171.558.228***	**224.125.748.484.232**

*) Selisih (Rp1) karena pembulatan

Dari 10 (sepuluh) Perum, terdapat 7 (tujuh) Perum yang mencatatkan laba dengan total sebesar Rp1.455.153.548.755,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp62.820.385.355,00 atau naik 4,51 persen. Peningkatan tersebut sebagian besar dikontribusikan oleh Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (Airnav), yang pada 2025 mencatat laba sebesar Rp832.450.000.000,00 atau naik 53,07 persen. Kenaikan laba tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha dari jasa pelayanan penerbangan dan jasa pelayanan terminal.

Sementara laba Persero pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan pada bagian laba pemerintah (pendapatan) BUMN Persero yang disebabkan oleh pelaksanaan inbreng saham negara pada BUMN Persero ke *Holding* Operasional (PT DAM) sehingga BP BUMN hanya mencatat 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna pada BUMN Persero.

KPA KND DJKN (977191)

Pendapatan yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) senilai Rp12.307.906.269.556,00 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan (sebagaimana tersaji dalam lampiran Mutasi Lain-lain BUMN/Badan Usaha/Non BUMN di bawah Kementerian Keuangan) berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan BUMN/Lembaga/Perusahaan. Terjadi kenaikan sebesar Rp2.241.426.097.167,00 atau naik 22,27 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024. Rincian pendapatan yang dibukukan BUMN dibawah Kementerian Keuangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Persero DJKN	4.608.955.269.556	3.958.788.859.540
2	Badan Usaha Lainnya	7.698.951.000.000	6.107.691.312.849
Jumlah		**12.307.906.269.556**	**10.066.480.172.389**

KPA DJPPR Dit. EAS (970974)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi yang dibukukan Badan Usaha (Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko) pada tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp11.494.122,00 dan Rp11.336.939,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp157.183,00 atau 1,39 persen dari tahun 2024. Nilai tersebut merupakan bagi hasil dari deposito mudharabah yang diakui pada tanggal laporan yang diinvestasikan kembali dengan menambahkan pada pokok investasi. Adapun deposito dimaksud merupakan setoran modal Pemerintah yang berasal dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan telah ditempatkan pada rekening atas nama Perusahaan Penerbit SBSN II, Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV, Perusahaan Penerbit SBSN V pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Thamrin, Jakarta.

UAIP (999244)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada UAIP tahun 2025 sebesar Rp111.380.175.831.434,00 dan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp83.533.577.410.117,00. Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada UAIP bersumber dari kenaikan investasi permanen lainnya dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Lembaga Penjamin Simpanan	30.987.890.952.000	27.424.045.657.000
2	Bank Indonesia	76.794.518.000.000	52.192.065.688.526
3	Institut Pertanian Bogor	122.042.000.000	102.793.748.899
4	Universitas Airlangga	-	205.727.822.326
5	Institut Teknologi Bandung	-	75.745.036.837
6	Universitas Indonesia	216.248.724.567	198.226.754.815
7	Universitas Gadjah Mada	150.542.118.221	233.481.815.942
8	Universitas Pendidikan Indonesia	44.166.930.394	196.062.705.073
9	Universitas Sumatera Utara	76.136.908.493	74.097.024.894
10	Universitas Padjajaran	277.176.309.258	42.332.181.424
11	Universitas Diponegoro	260.297.094.040	379.280.078.097
12	Universitas Hassanudin	75.210.739.487	162.050.469.257
13	Institut Teknologi Sepuluh November	258.791.551.772	143.280.578.853
14	Universitas Negeri Sebelas Maret	53.870.479.498	116.511.464.695
15	Universitas Negeri Malang	181.561.700.798	187.731.751.565
16	Universitas Andalas	51.411.170.102	124.629.593.520
17	Universitas Negeri Brawijaya	198.252.343.391	211.435.185.277
18	Universitas Negeri Padang	85.227.676.448	77.701.820.804
19	Universitas Syiah Kuala	45.527.238.594	58.435.225.382
20	Universitas Terbuka	349.564.430.593	128.336.585.204
21	Universitas Negeri Surabaya	138.080.757.894	212.022.367.395
22	Universitas Negeri Yogyakarta	-	282.685.189.529
23	Universitas Negeri Semarang	172.285.272.075	172.670.692.798
24	Universitas Negeri Jakarta	126.111.013.237	-
25	Universitas Sriwijaya	54.841.526.967	-
26	BPJS Kesehatan	654.869.862.714	254.516.322.708
27	BPJS Ketenagakerjaan	5.551.030.891	277.711.649.297
Jumlah		**111.380.175.831.434**	**83.533.577.410.117**

KPA Direktorat SMI DJPb (961671)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Direktorat SMI DJPb tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp198.089.972.337,00 dan Rp99.875.091.668,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp98.214.880.669,00 atau 98,34 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang

disebabkan adanya kenaikan nilai wajar investasi LPDP dalam bentuk aset keuangan. Pendapatan tersebut bersumber dari amortisasi diskon senilai Rp41.433.137.854,00 dan selisih kurs (*unrealized*) karena apresiasi nilai USD senilai Rp56.656.834.483,00.

KPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Modal Awal BP Tapera (987253)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR modal Awal BP Tapera (987253) tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp57.409.784.237,00 dan Rp49.803.033.365,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp7.606.750.872,00 atau 15,27 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan penyesuaian pada modal awal BP Tapera merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan BP Tapera periode 2025.

KPA LDKPI (979015)

Nilai pendapatan penyesuaian nilai investasi KPA LDKPI tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp9.353.589.588,00 dan Rp9.242.399.273,00. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp111.190.315,00 atau 1,20 persen. Pendapatan tersebut berupa pendapatan PNBP lainnya yang merupakan amortisasi atas penempatan dana pada instrumen investasi yang diperoleh dengan nilai diskonto. Pendapatan atas pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaporkan sebagai PNBP pada laporan keuangan LDKPI selaku Satker BA 015.

KPA Badan Bank Tanah (986392)

Nilai pendapatan penyesuaian nilai investasi KPA Badan Bank Tanah tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp11.772.980.038,00 dan Rp69.843.235.790,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp58.070.255.752,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Nilai pendapatan penyesuaian nilai investasi pada KPA Badan Bank Tanah merupakan bagian pemerintah atas keuntungan/surplus operasional yang dibukukan pada Laporan Keuangan Badan Bank Tanah sampai dengan periode pelaporan.

b. Pendapatan Bunga Lainnya

Pendapatan Bunga Lainnya pada 2025 sebesar Rp1.415.973.826.831,00 terdiri dari pendapatan UAIP, Bunga DNS, Pendapatan BP BUMN Bunga IP PEN, Pendapatan DJPK hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah dan Penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur. Rincian Pendapatan Bunga Lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan BP BUMN Bunga IP PEN	253.176.962.113	276.810.323.906
2	Pendapatan DJPK, hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah	379.385.150.525	460.360.142.942
3	KPA Direktorat SMI	783.411.714.193	542.607.743.515
Jumlah		**1.415.973.826.831**	**1.279.778.210.363**

KPA BP BUMN (986917)

Pendapatan Bunga pada KPA BP BUMN merupakan pendapatan bunga dari Investasi Non Permanen dalam Pemulihan ekonomi Nasional (IP PEN) dengan nilai pendapatan tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp253.176.962.113,00 dan Rp276.810.323.906,00. Terdapat penurunan sebesar Rp23.633.361.793,00 atau turun 8,54 persen. Pendapatan bunga tahun 2025 terdiri dari:

1) Pendapatan bunga lainnya (LRA) sebesar Rp214.380.797.729,00 dikurangi pendapatan bunga yang telah diakui pada periode sebelumnya sebesar Rp16.839.041.094,00;
2) Pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp16.635.205.478,00; dan
3) Piutang lainnya sebesar Rp39.000.000.000,00.

Berikut rincian pendapatan bunga IP PEN berdasarkan penerima investasi:

(dalam rupiah)

No.	Penerima Investasi	Pendapatan Bunga	Pendapatan yang masih harus diterima	Piutang Lainnya	Pendapatan yang diakui periode sebelumnya	Pendapatan Bunga Lainnya
1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	134.775.318.287	-	-	16.839.041.094	117.936.277.193
2	PT Perkebunan Nusantara III	79.605.479.442	13.385.205.478	-	-	92.990.684.920
3	Perum Perumnas	-	3.250.000.000	39.000.000.000	-	42.250.000.000
Jumlah		**214.380.797.729**	**16.635.205.478**	**39.000.000.000**	**16.839.041.094**	**253.176.962.113**

Terdapat piutang lainnya yang merupakan bunga jatuh tempo Perum Perumnas yang baru disetorkan pada Januari 2026.

KPA DJPK (999302)

Pendapatan bunga pada KPA DJPK tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp379.385.150.525,00 dan Rp460.360.142.942,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan bunga pada KPA DJPK menurun sebesar Rp80.974.992.417,00 atau turun 17,59 persen.

Pendapatan bunga pada PPA DJPK adalah Pendapatan bunga pinjaman PEN Daerah maupun pendapatan bunga lainnya yang berasal dari imbalan atas saldo dana pinjaman PEN Daerah di rekening khusus yang dibentuk PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menampung dana pinjaman PEN Daerah dan belum di salurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur kepada Pemda sesuai dengan perjanjian.

Sesuai dengan Pasal 14A ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021, bahwa hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah pada rekening penampungan PT Sarana Multi Infrastruktur setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada setiap triwulan. Setoran ke rekening kas negara oleh wajib setor (PT SMI) sebagai PNBP dengan menggunakan akun pendapatan bunga lainnya (425719).

KPA Direktorat SMI (999244)

Pendapatan bunga pada KPA Direktorat SMI pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp783.411.714.193,00 dan Rp542.607.743.515,00. Pendapatan bunga pada tahun 2025 meningkat sebesar Rp240.803.970.678,00 atau 44,38 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2024. Pendapatan tersebut terdiri dari:

1) pemindahan saldo dana imbal hasil pada BP Tapera dalam rangka realisasi PNBP Pemerintah sebesar Rp777.202.873.734,00; dan
2) pencatatan nilai pendapatan akrual imbal hasil dana FLPP belum diigulirkan BP Tapera sebesar Rp13.001.313.936,00, dikurangi pendapatan akrual imbal hasil dana FLPP belum diigulirkan BP Tapera Rp2.131.411.215,00 dan penyesuaian pendapatan akrual imbal hasil optimalisasi dana cadangan penjaminan Rp4.661.062.262,00.

c. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur merupakan pendapatan pada UAKPA Direktorat EAS. IJP Infrastruktur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP nomor 62 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku di Kementerian Keuangan, mengatur IJP Infrastruktur sebagai PNBP BA 15 DJPPR, di mana IJP tersebut dibayarkan Badan Usaha Pelaksana Proyek Infrastruktur Skema KPBU yang menerima Jaminan Bersama dari Pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang tertuang dalam Surat IJP Pemerintah. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan Ditjen Anggaran dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang masing-masing disampaikan melalui nota dinas nomor ND-301/AG.7/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan ND-800/SJ/2020 tanggal 22 Juni 2020 ditetapkan bahwa klasifikasi PNBP IJP Infrastruktur diubah yang tadinya merupakan PNBP K/L BA 15 menjadi PNBP BUN.

Pada tahun 2025 dan tahun 2024 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur masing-masing sebesar Rp140.621.187.060,00 dan Rp136.263.072.585,00. Rincian Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Tanggal Setoran	Unit Penyetor	Jumlah pada Tahun 2025
1	15 Jan 2025	PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek	5.110.000.000
2	25 Feb 2025	PT Citra Karya Jabar Tol	2.023.000.000
3	26 Feb 2025	PT Bhimasena Power Indonesia	64.386.117.620
4	2 Jul 2025	PT Waskita Bumi Wira	3.156.000.000
5	19 Agst 2025	PT Bhimasena Power Indonesia	62.468.069.440
6	5 Des 2025	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	350.000.000
7	11 Des 2025	PT Waskita Bumi Wira	3.128.000.000
Jumlah			**140.621.187.060**

3. PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) pada tahun 2025 sebesar Rp1.621.539.933.831,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.789.361.043,00 atau turun 1,98 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.654.329.294.874,00. Penurunan ini utamanya terjadi pada pendapatan denda dan pendapatan lain-lain. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp1.621.539.933.831,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.617.992.710.433	1.632.706.195.782
2	Pendapatan Denda	3.232.323.460	21.285.072.482
3	Pendapatan lain-lain	314.899.938	338.026.610
Jumlah		**1.621.539.933.831**	**1.654.329.294.874**

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan untuk periode yang berakhir sampai dengan tahun 2025 dan tahun 2024 masing masing adalah sebesar Rp1.617.992.710.433,00 dan Rp1.632.706.195.782,00. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari Pendapatan Bunga dari Piutang Pemberian Pinjaman, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro), Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman, dan Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman dengan rincian terdapat pada rincian berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Bunga dari Piutang Pemberian Pinjaman	1.590.335.833.457	1.590.126.930.226
2	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	10.437.958	14.142.435
3	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	27.646.439.018	41.647.586.586
4	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	917.536.535
Jumlah		**1.617.992.710.433**	**1.632.706.195.782**

Pendapatan Denda untuk periode yang berakhir sampai dengan tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.232.323.460,00 dan Rp21.285.072.482,00. Pendapatan Denda terdiri dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman dan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur Kredit Pemerintah (KUMK) dengan rincian terdapat pada tabel di bawah ini:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	3.232.323.460	21.265.522.482
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)	-	19.550.000
Jumlah		**3.232.323.460**	**21.285.072.482**

Pendapatan Lain-Lain pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp314.899.938,00 dan Rp338.026.610,00. Pendapatan Lain-Lain terdiri dari Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman. dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Pendapatan Lain-Lain sampai dengan periode tahun 2025 berasal dari Penerimaan PIR UPP yang tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutangnya (SPH) sebesar Rp314.899.938,00.

4. PNBP Lainnya pada BA BUN Transfer ke Daerah (BA BUN 999.05) pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp53.007.463.770,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp53.007.463.770,00 atau naik 100,00 persen. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Transfer ke Daerah tahun 2025 sebesar Rp53.007.463.770,00 terdiri dari Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp8.828.434.270,00 yang merupakan denda keterlambatan penyampaian laporan persyaratan dana BOSP dan Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp44.179.029.500,00. Pendapatan dari Hibah yang Belum disahkan merupakan pemotongan Dana Alokasi Umum dalam rangka penyelesaian pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/PK/2025.

5. PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp7.032.332,00 dan Rp8.129.695,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.097.363,00 atau turun 13,50 persen. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi tahun 2025 sebesar Rp7.032.332,00 terdiri dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan pendapatan denda keterlambatan pada Bank pelaksana yang terlambat menyalurkan SBUM Perumahan pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Rincian PNBP lainnya sebesar Rp7.032.332,00 pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	53.825	23.615
2	Pendapatan Denda	6.978.507	8.106.080
Jumlah		**7.032.332**	**8.129.695**

Pendapatan Denda sebesar Rp7.032.332,00 berasal dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dengan rincian pendapatan jasa giro dan pendapatan denda sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2025
1	Pendapatan jasa giro tahun 2025	9.580
2	Pendapatan denda penyaluran	6.978.507
3	Jurnal memo penyesuaian pendapatan jasa giro pada setara kas Semester II tahun 2025	67.635
4	Jurnal memo penyesuaian pendapatan jasa giro pada setara kas triwulan III tahun 2025	(2.105)
5	Jurnal koreksi atas saldo rekening Kas Lainnya karena adanya salah penulisan saldo rekening per 31 Desember 2025	(21.285)
Jumlah		**7.032.332**

(dalam rupiah)

Pendapatan pada Akun 425764 Tahun 2025 yang disetor 2025					
No	Tgl/Bln Bayar	NTPN	NTB/NTP	Nilai (Rp)	Keterangan
1	10-1-2025	C16782G502IUUFCD	250110000003	525	Jasa giro mega syariah desember 2024
2	10-1-2025	4483E6U8F7ESVFSL	215121088194	332	Jasa giro DKI SYARIAH desember 2024
3	10-1-2025	607550NA0DE64GIM	250110872925	4.333	Jasa giro SULTENG desember 2024
4	31-07-2025	1C4DD0NA0E0GHLJU8	210253259410	2.114	Jasa giro DKI SYARIAH Juni 2025
5	27-10-2025	CE0C67QLV2SHDNLU	251027000005	2.276	Jasa giro Mega Syariah september 2025
Jumlah				**9.580**	

(dalam rupiah)

Pendapatan 425811					
No	Tgl/Bln Bayar	NTPN	NTB/NTP	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2-1-2025	CFF3F2G4VQAC6EAO	012372963758	2.690.658	Pendapatan Denda penyaluran SBUM Bank Mandiri
2	11-2-2025	5998D0NA0DH7LLIOI	730133381214	1.834.836	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyaluran Sbum Bank Mandiri sesuai Berita Acara Rekon 334/BA/RKN/XII/SATKER-DJPI/2024 (20-12-2024)
3	27-2-2025	BD3097QLV24N4C5E	395516319661	2.190.438	Pendapatan Denda keterlambatan penyaluran SBUM sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 39/BA/RKN/I/SATKER-DJPI/2025 (24-1-2025)
4	23-05-2025	E577D3CIFTHIAB31	234209878604	261.753	Pendapatan Denda penyaluran SBUM Bank Mandiri
5	31-12-2025	DA37061QVDTUH890	002232200057	822	Pendapatan Denda keterlambatan penyaluran SBUM sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 84/BA/RKN/XI/SATKER- JTKPR/2025 dan 38/BA/SMD/XI/2025 (10-11-2025)
Jumlah Pendapatan 425811				**6.978.507**	

6. PNBP Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA BUN 999.08) pada tahun 2025 sebesar Rp211.604.510,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.958.278.627,00 atau turun 99,05 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp22.169.883.137,00.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	9.747.165	64.224.899
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	26.953.760	800.336.015
3	Pendapatan Denda Lainnya	-	21.305.310.723
4	Pendapatan Lain-lain	174.903.585	11.500
Jumlah		**211.604.510**	**22.169.883.137**

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga sebesar Rp9.747.165,00 terdapat pada satker Otoritas Jasa Keuangan.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp36.700.925,00 terdapat pada:

a. BP Batam berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp26.953.760,00; dan
b. SKK Migas berupa Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp9.747.165,00.

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp174.903.585,00 terdapat pada SKK Migas.

7. PNBP Lainnya dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) tahun 2025 sebesar Rp38.794.636.315.986,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.452.080.924.659,00 atau naik 6,75 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp36.342.555.391.327,00.

PNBP dari BUN Pengelola Transaksi Khusus dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	PNBP Lainnya UAPBUN TK DJA	12.652.815.811.703	13.593.321.831.754
2	PNBP Lainnya UAPBUN TK DJPb	25.440.792.152.658	21.967.426.491.569
3	PNBP Lainnya UAPBUN TK DJKN	701.028.351.625	781.807.068.004
Jumlah		**38.794.636.315.986**	**36.342.555.391.327**

a. Jumlah Pendapatan Operasional Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Anggaran tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp12.652.815.811.703,00 dan Rp13.593.321.831.754,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan DMO	12.503.925.158.920	13.502.539.703.475
2	Pendapatan Migas Lainnya-LO	24.041.710.362	29.951.518.855
3	Pendapatan Denda, Penalti-LO	36.421.559.698	14.957.953.141
4	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	88.427.382.723	45.872.656.283
Jumlah		**12.652.815.811.703**	**13.593.321.831.754**

1) Pendapatan DMO

Pendapatan DMO-LO merupakan nilai *lifting* minyak bumi yang diserahkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam rangka memenuhi kewajiban pemenuhan minyak dalam negeri (*Domestic Market Obligation*/DMO) sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan ini diakui pada saat ditetapkannya nilai DMO *Gross* oleh SKK Migas melalui penerbitan Laporan

Pengiriman Minyak Mentah DMO (Laporan A05). Realisasi Pendapatan DMO-LO pada tahun 2025 adalah Rp12.503.925.158.920,00.

2) Pendapatan Migas Lainnya-LO

Pendapatan Migas Lainnya-LO merupakan hak pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas yang dapat berasal dari tagihan kepada pihak ketiga yang diatur dalam kontrak atau ketentuan perundangan, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan ini diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari pihak ketiga oleh SKK Migas berupa penerbitan Laporan Pengiriman Migas (Laporan A0) dan/atau surat tagihan maupun surat pemberitahuan.

Realisasi pendapatan migas lainnya sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp24.041.710.362,00 antara lain berasal dari transaksi jasa pandu tunda, bonus produksi, dan pengembalian kelebihan pembayaran PDRD.

3) Pendapatan Denda, Penalti-LO

Pendapatan Denda, Penalti-LO merupakan hak pemerintah yang berasal dari tagihan denda, bunga, ataupun penalty yang terkait dengan transaksi kegiatan usaha hulu migas yang diatur dalam kontrak atau ketentuan perundangan, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan ini diakui pada saat ditetapkannya hak negara yang diakibatkan oleh adanya pengenaan denda atau *penalty*, serta bunga yang berasal dari transaksi kegiatan usaha hulu migas oleh SKK Migas dan BPMA, baik yang dilaporkan dalam Laporan Pengiriman Migas (Laporan A0), surat tagihan, ataupun surat pemberitahuan adanya hak negara dari pihak ketiga. Pendapatan denda pada tahun 2025 sebesar Rp36.120.664.290,00 yang berasal dari pengenaan bunga, denda, dan penalty atas transaksi *lifting* migas serta pengusahaan panas bumi sebesar Rp300.895.408,00.

4) Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan

Pendapatan PNBP Lainnya (Pendapatan LO) merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan PNBP Lainnya (Pendapatan LO) untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp88.427.382.723,00.

b. Jumlah Pendapatan Operasional Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp25.440.792.152.658,00 dan Rp21.967.426.491.569,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Pengelolaan Rekening	25.407.148.216.778	21.895.737.345.722
2	Pendapatan Denda dalam Pengelolaan Rekening	2.598.564.708	447.940.937
3	Pendapatan dari Retur SP2D	17.751.682.406	5.843.228.976
4	Pendapatan Anggaran Lain-lain	13.293.688.766	65.397.975.934
Jumlah		**25.440.792.152.658**	**21.967.426.491.569**

c. Sampai dengan tahun 2025 dan tahun 2024, nilai pendapatan dari kegiatan operasional pada aset yang berada dalam pengelolaan DJKN adalah Rp701.028.351.625,00 dan Rp781.807.068.004,00. Rincian pendapatan dari kegiatan operasional pada aset yang berada dalam pengelolaan DJKN dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	20.596.385.005	18.257.475.120
2	Pengelolaan Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI	3.745.417.602	4.052.683.065
3	Pengelolaan Aset Lain-lain	76.394.622.262	67.756.241.637
4	Pengelolaan BMN eks BMN *Idle*	17.020.000	39.136.667
5	Pengelolaan BMN Eks Pertamina	208.025.544.087	207.522.112.660
6	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada DJKN, KEMENKEU	-	-
7	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada PPBMN, KESDM	-	-
8	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada SKK MIGAS	47.453.858.872	85.589.910.037
9	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada BPMA, KESDM	868.577.600	4.263.702.236
10	Pengelolaan BMN PKP2B pada PPBMN, KESDM	343.926.926.197	394.325.806.582
11	Pengelolaan Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	-
12	Pengelolaan Piutang kepada Yayasan Supersemar	-	-
13	Pengelolaan Penggantian Biaya dan Margin IP PEN	-	-
Jumlah		**701.028.351.625**	**781.807.068.004**

1) Pada UAKPA Pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal dari nilai kompensasi atas ABMA/T yang diselesaikan/diterbitkan KMK pelepasan/penyelesaian atas ABMA/T adalah Rp20.596.385.005,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Nama Aset	Nilai Pendapatan	Keterangan
1	Rumah Toko (dhi. Pertokoan) a.n. Rosmina di Provinsi Sumatera Utara	195.592.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-923/MK.6/2024 tanggal 11 November 2024
2	Rumah Toko XIII (dhi. Yayasan Pendidikan Gitakirti (GIKI)) a.n. Tati Lestari di Provinsi Jawa Barat	730.569.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-88/MK.6/2025 tanggal 10 Februari 2025
3	Rumah Toko (dhi. Bangunan Wisma Olahraga dan Tempat Sembahyang Toa Pekong (Berlantai Dua)) a.n. Yayasan Laut Selatan Bintan di Provinsi Kepulauan Riau	726.098.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.6/2025 tanggal 19 Februari 2025
4	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (dhi. Kantor Dispenda Kodya II Bogor, TK/SD/SMA/ Akademi Management) a.n. Yayasan Kesatuan di Provinsi Jawa Barat	16.877.420.700	Surat Menteri Keuangan Nomor S-184/MK.6/2025 tanggal 13 Maret 2025
5	Rumah Tinggal Suriansyah (dhi. SMA Pagatan) a.n. Suharlinah di Provinsi Kalimantan Selatan	132.498.300	Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.6/2023 tanggal 14 Mei 2023 dan S-368/MK.6/2023 tanggal 05 Juni 2023
6	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (dhi. SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	124.692.700	Surat Menteri Keuangan Nomor S-432/MK.6/2023 tanggal 14 Mei 2023 tanggal 04 Juli 2023
7	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (dhi. SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	124.692.700	Surat Menteri Keuangan Nomor S-433/MK.6/2023 tanggal 14 Mei 2023 tanggal 04 Juli 2023
8	SD/SMP Letjen Jamin Ginting Berastagi (dhi. SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	686.973.105	Surat Menteri Keuangan Nomor S-477/MK.6/2024 tanggal 28 Juni 2024
9	Rumah Duka (dahulu Perkantoran; DPD Golkar, Pepabri, HWK) di Provinsi Maluku	997.848.500	Surat Menteri Keuangan Nomor S-688/MK/KN/2025 tanggal 10 Oktober 2025
Jumlah		**20.596.385.005**	

2) Pada UAKPA BLBI, selama periode 2025 terdapat pendapatan operasional per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.745.417.602,00 yang berasal dari Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti yang diakui pada tahun berjalan sebesar Rp1.462.549.297,00 serta Pendapatan Atas Saham dan Surat Berharga Lain sebesar Rp2.282.868.305,00.

3) Pendapatan pada UAKPA aset lain-lain, yang diperoleh dalam kegiatan operasional pengelolaan aset lain-lain selama tahun 2025 sebesar Rp76.394.622.262,00.

4) Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN eks BMN *idle*, selama periode tahun 2025, terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berupa pengakuan pemanfaatan sewa BMN eks BMN *idle* sebesar Rp17.020.000,00.
   a) Pendapatan sewa sebesar Rp6.000.000,00 sesuai dengan KMK 146/KM.6/2021 tentang Pelaksanaan Sewa BMN Eks BMN *Idle* dengan Sdr. Renan Amru Kafi. Untuk mengakui pendapatan sewa bulan Januari tahun 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan nilai sewa per bulan Rp.500.000,00/bulan atau Rp3.000.000,00/semester;
   b) Pendapatan sewa sebesar Rp6.000.000 sesuai dengan KMK 166/KM.6/2023 tentang Pelaksanaan Sewa BMN Eks BMN *Idle* pada KPKNL Metro. Untuk mengakui pendapatan sewa bulan Januari tahun 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan nilai sewa per bulan Rp.500.000,00/bulan atau Rp3.000.000,00/semester; dan
   c) Pendapatan sewa sebesar Rp5.020.000,00 sesuai dengan KMK nomor 179/KM.6/2024 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara *Idle* pada KPKNL Pekalongan. Untuk mengakui pendapatan sewa bulan Januari tahun 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan nilai sewa per bulan Rp418.333,00/bulan atau Rp2.510.000,00/semester.

5) Pada UAKPA TK BMN Eks pertamina, Perhitungan PNBP untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP tahun 2025 sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp208.025.544.087,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Operasional	Jumlah
1	Pendapatan sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. Pertamina EP Tahun 2025 bulan Januari s.d. Desember 2025	207.216.542.292
2	Pendapatan dari sewa Bank Mandiri Palembang untuk KCP Prabumulih (KMK 6/KM.6/KN.3/2021) bulan Januari s.d. Desember 2025	69.060.000
3	Pendapatan dari sewa Bank Mandiri Sudirman untuk aset yang berada di Jalan Cemara (KMK 09/KM.6/KN.3/2021) bulan Januari s.d. Desember 2025	136.600.000
4	Pendapatan dari sewa penyediaan infrastruktur PT PLN untuk aset yang berada di Cirebon (KMK 01/KM.6/KN.3/2022) bulan Januari s.d. Desember 2025	1.900.000
5	Pendapatan dari sewa Bass Oil Sukananti Limited (KMK 10/KM.6/KN.3/2021) bulan Januari s.d. Desember 2025	29.481.395
6	Pendapatan Sewa Bank Mandiri Prabumulih (KMK 17/KM.6/KN.4/2024) Januari s.d. Desember 2025	9.600.000
7	Pendapatan dari sewa tanah SP Randegan (KMK 34/KM.6/KN.4/2024) untuk tarif sewa tahun Ke-1 bulan Januari s.d. Juli 2025	53.019.167
8	Pendapatan dari sewa tanah SP Randegan (KMK 34/KM.6/KN.4/2024) untuk tarif sewa tahun Ke-2 bulan Agustus s.d. Desember 2025	38.135.417
9	Pendapatan atas Sewa Barang Milik Negara Eks Pertamina Kepada Rumah Sakit Pertamina Sorong - PT Pertamina Bina Medika IHC (KMK 288/MK/KN/2025 dan PRJ-2/MK/KN.04/2025 tgl 27 Okt 2025)	304.778.233
10	Pendapatan Sewa Barang Milik Negara Aset Eks Pertamina Kepada Rumah Sakit Pertamina Tanjung - PT Pertamina Bina Medika IHC (KMK	11.182.950

No	Pendapatan Operasional	Jumlah
	7/MK/WKN.12/2025 dan dan PRJ-9/MK/KN.04/2025 tgl 6 Nov 2025) bulan September 2025	
11	Pendapatan atas Sewa BMN Aset Eks Pertamina Kepada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih - PT Pertamina Binamedika IHC (KMK 11/MK/WKN.04/2025 dan PRJ-7/MK/KN.7/2025 tgl 6 Nov 2025)	105.915.600
12	Pendapatan atas Sewa BMN Aset Eks Pertamina Kepada Klinik Pertamedika Pendopo - PT Pertamina Bina Medika IHC (KMK 12/MK/WKN.04/2025 dan PRJ-6/MK/KN.4/2025 tgl 6 Nov 2025)	16.952.450
13	Pendapatan sewa PT Bass Oil Sukananti Limited KMK 16/MK/WKN.04/2025 dan perjanjian sewa PRJ-7/KN.4/2025 tgl 24 Des 2025	24.043.250
14	Pendapatan sewa kepada PT Royaltama Mulia Kencana KMK 17/MK/WKN.04/2025 dan perjanjian sewa No. PRJ-6/KN.4/2025 tgl 24 Des 2025	8.333.333
Jumlah		**208.025.544.087**

6) Pada UAKPA BUN BMN Hulu Migas pada SKK Migas, Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per tahun 2025 adalah sebesar Rp47.453.858.872,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Keterangan Transaksi	Nilai
1	PNBP Sewa Pihak Lain	11.712.147.667
2	PNBP Transfer BMN Hulu Migas	4.058.338.530
3	PNBP Pelepasan Scrap-Non Aset	-
4	PNBP BMN HM Lainnya	-
5	Penambahan Piutang	971.029.567
6	Penambahan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	10.078.898.095
7	Tambahan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	(22.824.192.873)
8	Pelunasan Piutang	(1.482.310.995)
9	Pelunasan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	(628.920.843)
10	Pengakuan Pendapatan	45.568.869.724
Jumlah		**47.453.858.872**

7) Pada UAKPA BUN BMN Hulu Migas pada BPMA, Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp868.577.600,00 yang merupakan pengakuan pendapatan sewa BMN tahun berjalan dan pendapatan dari pembayaran kerugian negara dari KKKS PT. PHE NSB.

8) Pada UAKPA BUN TK BMN PKP2B, Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir tahun 2025 adalah sebesar Rp343.926.926.197,00 yang berasal dari:
   a) Pengakuan PNBP Januari s.d Desember 2025 sebesar Rp3.451.631.696,00 atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal oleh PT Bayan dengan jangka waktu 10 tahun mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031;
   b) Pengakuan PNBP Januari s.d Desember 2025 sebesar Rp5.995.677,00 atas pemanfaatan tanah untuk tapak tower dan jalur span ROW yang tersebar di 8 (delapan) titik pada area lahan konsesi PKP2B PT KPC oleh PT PLN dengan jangka waktu 9 tahun 6 bulan mulai 13 Juni 2022 s.d 12 Desember 2031;
   c) Pengakuan PNBP Januari s.d Desember 2025 sebesar Rp2.486.770.011,00 atas pemanfaatan BMN tanah PT Kaltim Prima Coal yang digunakan untuk kegiatan niaga umum BBM oleh PT Petromine Energy dengan jangka waktu sewa mulai dari 23 Maret 2024 sampai dengan 22 Desember 2031;
   d) Pengakuan PNBP Mei s.d Desember 2025 sebesar Rp1.905.604.770,00 atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal yang dimanfaatkan dalam bentuk

sewa oleh PT Kaltim Nusantara Coal dengan jangka waktu mulai dari 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2031;

e) Pengakuan PNBP atas sewa operasi selama periode Januari s.d. Desember 2025 sebesar Rp335.696.039.050,00 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi PNBP BMN yang Berasal dari PKP2B untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 nomor 72.BA/BN.10/SJA.2/2026 tanggal 27 Januari 2026;

f) Pendapatan yang berasal dari Sanksi Ganti Rugi atas hilangnya BMN PKP2B PT Berau Coal sebesar Rp175.455.236,00 sesuai Laporan Hasil Reviu BMN PKP2B PT Berau Coal Nomor 11.Lap/PW.02/IR.II/2024 tanggal 9 Januari 2024 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor T-575/BN.10/SDB.K/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Ganti Rugi atas Hilangnya BMN yang berasal dari PKP2B; dan

g) Pendapatan yang berasal dari Kewajiban Pembayaran Ganti Rugi atas Hilangnya BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp205.429.757,00, Nomor 319.Lap/PW.02/IR.II/2025 tanggal 5 Desember 2025 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor T-1382/BN.10/SDB.K/2025 tanggal 7 Desember 2025 hal Penyampaian Hasil reviu APIP KESDM atas Barang Milik Negara (BMN) PKP2B pada PT Kaltim Prima Coal, dengan bukti setor NTPN 9C0AA2G503KCMVQ6 tanggal 30 Desember 2025.

E.2.1.4. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp18.346.886.424.369,00 dan Rp44.216.321.039.110,00. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan operasional yang berasal dari Pendapatan-LO BUN Pengelola Hibah (BA 999.02). Pendapatan Hibah pada tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar Rp25.869.434.614.741,00 atau turun 58,51 persen bila dibanding dengan tahun 2024.

Pendapatan Hibah terdiri atas Pendapatan Hibah Dalam Negeri sebesar Rp9.283.772.968.294,00 dan Pendapatan Hibah Luar Negeri sebesar Rp9.063.113.456.075,00.

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	SP3HL (Debit)	SPHL (Kredit)	Nilai Neto
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang	-	5.572.274.516.030	5.572.274.516.030
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa	-	111.746.074.155	111.746.074.155
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan	4.276.098	10.490.838.163	10.486.562.065
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	298.434.637	178.495.274.958	178.196.840.321
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	93.019.520.445	3.494.688.129.072	3.401.668.608.627
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya	22.909.500	9.423.276.596	9.400.367.096
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral	-	115.310.468.619	115.310.468.619
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral	-	324.491.617.651	324.491.617.651
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Barang	-	2.697.559.732.188	2.697.559.732.188

Akun	Uraian	SP3HL (Debit)	SPHL (Kredit)	Nilai Neto
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Jasa	-	4.533.299.173.571	4.533.299.173.571
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang Bilateral	752.647.753	382.180.096.058	381.427.448.305
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang Multilateral	5.735.007.116	878.126.096.523	872.391.089.407
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri -Langsung Bentuk Uang Lainnya	1.383.877.799	130.714.054.133	129.330.176.334
431251	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing	-	9.303.750.000	9.303.750.000
Jumlah		**101.216.673.348**	**18.448.103.097.717**	**18.346.886.424.369**

Nilai realisasi pendapatan hibah tahun 2025 sebesar Rp18.346.886.424.369,00 terdiri atas realisasi pendapatan hibah (SPHL) sebesar Rp18.448.103.097.717,00 dan realisasi pengembalian pendapatan hibah (SP3HL) sebesar Rp101.216.673.348,00.

E.2.2. Beban Operasional

Beban Operasional pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp2.213.756.186.906.768,00 dan Rp2.183.816.448.119.612,00. Beban Operasional pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp29.939.738.787.156,00 atau naik 1,37 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan yang signifikan terdapat pada Beban Persediaan dan Beban Hibah. Sementara itu, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengalami penurunan signifikan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional pada tahun 2025 sebesar Rp2.213.756.186.906.768,00 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pegawai	179.785.573.595.212	173.001.346.744.056
2	Beban Persediaan	1.439.145.251	1.476.311.019
3	Beban Barang dan Jasa	1.508.607.572.612	1.578.465.424.841
4	Beban Pemeliharaan	14.647.796	18.200.253
5	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.202.040.000	-
6	Beban Bunga	567.595.900.665.365	524.147.192.364.375
7	Beban Subsidi	300.210.430.762.924	279.267.883.221.775
8	Beban Hibah	493.977.094.757	278.430.938.953
9	Beban Transfer	878.526.664.302.990	902.646.703.693.172
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	30.928.363.201.225	27.839.399.821.259
11	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(4.252.040.754.550)	12.482.753.654.145
12	Beban Lain-Lain	258.956.054.633.186	262.572.777.745.764
Jumlah		**2.213.756.186.906.768**	**2.183.816.448.119.612**

E.2.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp179.785.573.595.212,00 dan Rp173.001.346.744.056,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai merupakan beban pegawai pada BA BUN

Pengelola Transaksi Khusus (999.99) yang seluruhnya merupakan beban pegawai yang terdiri atas beban dana pensiun, asuransi kesehatan dan program THT pada Subdit Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Direktorat Sistem Perbendaharaan. Beban Pegawai pada tahun 2025 pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp6.784.226.851.156,00 atau naik 3,92 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024 salah satunya karena peningkatan pada Belanja Pensiun dan Uang Tunggu.

Beban Pegawai pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus sebesar Rp179.785.573.595.212,00 terdiri dari:

1. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu sebesar Rp163.915.893.830.025,00;
2. Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemenhub pada PT KAI sebesar Rp651.952.203.209,00;
3. Belanja Tunjangan dan Dana Kehormatan Veteran sebesar Rp1.837.893.391.144,00;
4. Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP sebesar Rp8.015.889.615,00;
5. Belanja Asuransi Kesehatan sebesar Rp12.381.331.300.053,00;
6. Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai sebesar Rp346.055.073.761,00; dan
7. Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai sebesar Rp644.431.907.405,00.

E.2.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp1.439.145.251,00 dan Rp1.476.311.019,00. Beban Persediaan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp37.165.768,00 atau turun 2,52 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dan beban persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat. Beban Persediaan pada tahun 2025 tersebut terdapat BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08).

Rincian Beban Persediaan dari per Satker pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain (999.08) adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2025	Tahun 2024
1	**Kementerian Sekretariat Negara**	**-**	**-**
	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
2	**BP Batam**	**400.023.384**	**490.264.701**
	Beban Persediaan Konsumsi	400.023.384	489.227.701
	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	-	550.000
	Beban Persediaan bahan baku	-	-
	Beban Persediaan Lainnya	-	487.000
3	**SKK Migas**	**1.039.121.867**	**986.046.318**
	Beban Persediaan Konsumsi	1.039.092.743	985.482.044
	Beban Persediaan Lainnya	29.124	564.274
Jumlah Beban Persediaan		**1.439.145.251**	**1.476.311.019**

Sementara itu, rincian keseluruhan atas beban persediaan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Rincian Beban Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.439.116.127	1.474.709.745
2	Beban Persediaan bahan baku	-	-
3	Beban Persediaan Lainnya	29.124	1.051.274
4	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	-	550.000
5	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
Jumlah		**1.439.145.251**	**1.476.311.019**

E.2.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp1.508.607.572.612,00 dan Rp1.578.465.424.841,00. Beban Barang dan Jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp69.857.852.229,00 atau turun 4,43 persen dibandingkan tahun 2024.

Beban barang dan jasa merupakan beban barang pada BA BUN 999.08 dan BA BUN 999.99.

Beban barang dan jasa pada BA BUN 999.08 berasal dari Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp17.645.900,00.

Sementara itu, beban barang dan jasa pada BA BUN 999.99 adalah sebagai berikut:

1. Beban Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar IP PEN
   Beban yang berasal dari beban barang lainnya dalam rangka penyaluran penggantian biaya dan margin yang wajar atas pelaksanaan investasi pemerintah PEN selama tahun 2025 adalah sebesar Rp1.945.063.621,00.

   Nilai Beban sebesar Rp1.945.063.621,00 diperoleh dari realisasi belanja periode berjalan berupa penyaluran penggantian biaya dan margin periode April dan Oktober 2025 dengan nilai sebesar Rp2.749.632.804,00 dikurangi dengan kewajiban jangka pendek tahun 2024 sebesar Rp1.046.590.790,00 dan ditambah dengan beban tahun berjalan berupa besaran nilai atas tagihan penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN berdasarkan tagihan yang disampaikan masing-masing Pelaksana Investasi untuk periode penagihan bulan November dan Desember tahun 2025 sebesar Rp242.021.607,00.

2. Beban Pembayaran Kontribusi/*Trust Fund*
   Jumlah Beban Operasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp210.659.933.520,00 dengan rincian beban pembayaran kontribusi/*trust fund* kepada 3 (tiga) organisasi internasional berdasarkan kurs SPM sebesar Rp211.903.520.624,00, serta penyesuaian/koreksi beban berupa pengurangan beban sebesar Rp1.184.036.320,00 yang disebabkan adanya selisih saat pencataan hutang kepada ADF sebesar Rp46.493.889.600,00 (sesuai kurs tengah BI pada tanggal surat tagihan yaitu 7 Maret 2025) dengan nilai pembayaran/penghapusan utang sebesar Rp47.677.925.920,00 (Kurs SPM saat pembayaran tanggal 29 Desember 2025). Dengan demikian terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp210.659.933.520,00.

(dalam rupiah)

Organisasi Internasional	Tahun 2025						Beban Perbankan (Bank Charge) (IDR)	Beban Barang TA 2025	Jurnal Koreksi TA 2025	Beban Barang TA 2025 (*Adjusted*)
	Anggaran (DIPA)	Mata Uang	Tagihan	Tgl SPM	Kurs	Tagihan (IDR)				
ADF	47.743.328.000	USD	2,843,557.34	29/12/2025	16.767	47.677.925.920	-	-	46.493.889.600	46.493.889.600
AMTF	245.880.000	USD	15,000.00	17/03/2025	16.392	245.880.000	163.920	246.043.920	-	246.043.920
Pandemic Fund FIF	163.920.000.000	USD	10,000,000.00	17/03/2025	16.392	163.920.000.000	-	163.920.000.000	-	163.920.000.000
Jumlah	**211.909.208.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**211.843.805.920**	**163.920**	**164.166.043.920**	**46.493.889.600**	**210.659.933.520**

3. Beban Jasa satker Pensiun sampai dengan akhir 2025 adalah sebesar Rp1.051.992.509.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Akun	Keterangan	Jumlah
521215	Beban Biaya Operasional Penyelenggaraan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk penugasan pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero) guna penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun.	762.389.415.471
522171	Beban *Fee* Pelayanan Bank/Pos Persepsi (Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA).	286.839.768.000
522172	Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan (Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran jasa SWIFT BO Valas, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa (*fee*) Bank Kustodian	2.763.325.729
Jumlah		**1.051.992.509.200**

4. Beban Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit*
   Jumlah beban per tahun 2025 sebesar Rp0,00. Pada tahun anggaran 2025 sudah tidak dialokasikan lagi anggaran untuk transaksi belanja Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit,* sedangkan per tahun 2024 sebesar Rp1.414.519.000,00.

5. Beban Dukungan Kelayakan KPBU Air Minum (978010)
   Jumlah beban per tahun 2025 sebesar Rp0,00. Pada tahun anggaran 2025 tidak ada realisasi sedangkan per tahun 2024 sebesar Rp6.879.661.760,00.

6. Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF)
   Jumlah Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) per tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp243.992.420.371,00 dan Rp236.641.713.603,00. Jumlah beban tahun 2025 mengalami kenaikan karena dipengaruhi oleh bertambahnya nilai hasil keluaran yang dilakukan penggantian biaya, seiring dengan meningkatnya kompleksitas pekerjaan serta kemajuan tahapan pelaksanaan penugasan.

E.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp14.647.796,00 dan Rp18.200.253,00. Beban Pemeliharaan pada tahun 2025 mengalami penurunan yakni sebesar Rp3.552.457,00 atau turun 19,52 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya ke kondisi normal untuk tetap dapat dipergunakan.

Rincian perbandingan Beban Pemeliharaan pada tahun 2025 dan tahun 2024 berasal dari BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) yang sebesar Rp14.647.796,00 merupakan belanja persediaan bahan untuk pemeliharaan dan dapat dirinci berdasarkan satuan kerja sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	BP Batam	4.008.316	7.301.600
2	SKK Migas	10.639.480	10.898.653
Jumlah		**14.647.796**	**18.200.253**

E.2.2.5. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp1.202.040.000,00 dan Rp0,00. Beban Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.202.040.000,00 atau 100,00

persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada 2025 berasal dari Kementerian Sekretariat Negara.

E.2.2.6. Beban Bunga

Beban Bunga pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp567.595.900.665.365,00 dan Rp524.147.192.364.375,00. Beban Bunga pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp43.448.708.300.990,00 atau 8,29 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024.

Perbedaan nilai antara beban bunga di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan kontribusi BI sebagai pendapatan, pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon untuk Surat Berharga Negara tahun 2025.

Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp567.595.900.665.365,00 terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp518.287.422.557.721,00 dan Beban Bunga Instrumen Pinjaman sebesar Rp49.308.478.107.644,00.

Beban Bunga dari BUN Pengelola Utang (999.01) tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Beban Bunga Surat Berharga Negara

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah	356.766.702.352.140	337.023.131.570.449
2	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	246.850.520.500	231.387.637.000
3	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	48.682.767.052.986	43.910.593.062.633
4	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	95.979.275.952	82.914.760.737
5	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	81.468.560.657.966	76.094.504.215.655
6	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang	320.460.674.637	322.740.183.995
7	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	17.448.171.473.613	14.862.652.147.419
8	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	49.132.238.397	25.106.549.436
	Jumlah	**505.078.624.246.191**	**472.553.030.127.324**

b. Beban Diskon Yang Menambah Beban Bunga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara	2.419.414.481.900	1.300.860.839.000
2	Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara	4.577.682.140.400	4.433.241.879.600
3	Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara Valas	519.536.426.630	508.946.497.750
4	Beban Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	3.519.171.357.100	3.306.778.384.300
5	Beban Pembayaran *Discount* SPN Syariah	2.172.993.905.500	1.444.535.515.200
Jumlah		**13.208.798.311.530**	**10.994.363.115.850**

Nilai beban bunga atas beban diskon termasuk beban diskon atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS). Adapun realisasi nilai beban diskon dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Beban Bunga Instrumen Pinjaman

Beban Bunga Instrumen pinjaman tahun 2025 sebesar Rp49.308.478.107.644,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.708.678.986.443,00 atau naik 21,45 persen dari tahun 2024 sebesar Rp40.599.799.121.201,00. Rincian beban bunga instrumen pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	3.377.383.215.151	2.663.444.522.711
2	Beban Bunga Pinjaman Program	21.967.878.896.006	18.005.009.888.822
3	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	158.508.922.890	190.079.186.734
4	Beban Bunga Pinjaman Proyek	18.858.529.822.495	14.786.385.878.614
5	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	4.945.856.030.802	4.954.577.536.857
6	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	321.220.300	302.107.463
Jumlah		**49.308.478.107.644**	**40.599.799.121.201**

Beban Bunga Instrumen pinjaman tahun 2025 yang didalamnya termasuk utang *Commitment Fee* dan *Mark Up* terdapat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	**Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program**	**158.508.922.890**	**190.079.186.734**
	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	147.978.464.406	178.546.624.340
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari *Commitment Fee*	10.530.458.484	11.532.562.394
2	**Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek**	**4.945.856.030.802**	**4.954.577.536.857**
	Pembayaran Beban Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman Proyek	4.581.018.174.163	4.760.324.912.801
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari *Commitment Fee*	116.801.266.797	93.198.040.401
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari *Mark Up*	248.036.589.841	101.054.583.655
Jumlah		**5.104.364.953.692***	**5.144.656.723.591**

*) Selisih Rp1 karena pembulatan

E.2.2.7. Beban Subsidi

Beban Subsidi pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp300.210.430.762.924,00 dan Rp279.267.883.221.775,00. Beban subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.942.547.541.149,00 atau naik 7,50 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024.

Beban Subsidi berasal pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp300.210.430.762.924,00 jika dirinci jenis subsidi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Jenis Subsidi/PSO	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Minyak Solar	18.403.272.930.176	17.613.735.502.761
2	Minyak Tanah	4.030.034.525.862	4.398.198.129.038
3	Elpiji	82.285.065.967.850	84.040.315.895.620
4	Listrik	87.460.663.602.008	77.045.334.864.270
5	Pupuk	43.428.563.385.304	36.788.315.401.696
6	PPh-DTP	10.301.244.094.006	9.097.331.505.886
7	PT KAI	5.629.083.929.324	4.442.674.571.004
8	PT PELNI	3.262.012.062.057	3.112.430.319.763
9	PSO Lainnya	180.673.538.000	176.322.920.000

No.	Jenis Subsidi/PSO	Tahun 2025	Tahun 2024
10	Bantuan Uang Muka Perumahan	1.141.114.000.000	816.130.000.000
11	Bunga KPR	3.581.632.481.339	4.209.495.602.649
12	Bunga Kredit Program Lainnya	31.860.888.196.276	32.379.267.156.831
13	Imbalan Jasa Penjamin KUR	-	-
14	Kredit Sektor Peternakan	-	-
15	Kredit Resi Gudang	6.765.911.497	4.748.993.980
16	Beban Subsidi - Estimasi	431.287.525.165	3.451.526.637
17	Beban Subsidi PPN-DTP	3.865.615.459.425	3.565.520.710.856
18	Beban Subsidi PPnBM-DTP	4.276.582.835.646	1.094.279.326.593
19	PPh-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-
20	BM-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-
21	Bunga/Margin Prog PEN-Penanganan Pandemi Covid-19	65.930.318.989	114.365.781.222
22	Imbal Jasa Penjaminan Prog PEN - Penanganan Pandemi COVID-19	-	365.965.012.969
23	PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-
Jumlah		**300.210.430.762.924**	**279.267.883.221.775**

Beban Subsidi berasal pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp300.210.430.762.924,00 jika dirinci maka sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Nama BA	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kementerian Pekerjaan Umum	10.175.108.322	9.072.780.139
2	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.725.019.563.428	5.025.625.602.649
3	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	31.849.417.496.053	32.121.363.850.733
4	Kementerian Perhubungan	8.891.095.991.381	7.555.104.890.767
5	Kementerian Perindustrian	13.586.807	-
6	Kementerian Perdagangan	6.765.911.497	4.748.993.980
7	Kementerian Komunikasi dan Digital	180.673.538.000	176.322.920.000
8	Kementerian Pertanian	43.858.859.833.474	36.788.438.327.934
9	Kementerian Keuangan	210.688.409.733.962	197.587.205.855.573
Jumlah		**300.210.430.762.924**	**279.267.883.221.775**

Beban Subsidi sampai dengan tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum

Jumlah Beban Subsidi tahun 2025 dan tahun 2024 adalah masing masing sebesar Rp10.175.108.322,00 dan Rp9.072.780.139,00. Terdapat kenaikan beban subsidi per tahun 2025 sebesar 12,15 persen atau Rp1.102.328.183,00 dibandingkan dengan beban subsidi per tahun 2024 disebabkan tiga PDAM penerima manfaat subsidi yang mengikuti Perpres 46 tahun 2019 yaitu PDAM Kota Palembang, PDAM Kota Bogor dan Giri Menang penyerapannya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian Beban Subsidi per 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	6.582.604.050	5.621.253.502
2	Beban Subsidi - Estimasi	3.592.504.272	3.451.526.637
Jumlah		**10.175.108.322**	**9.072.780.139**

Pada Satker Ditjen Cipta Karya Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya sebesar Rp6.582.604.050,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Bln	PDAM						
		Kota Palembang	Kota Bogor	Kota Palopo	Kab. Cilacap	Giri Menang Perpres 46	Kab. Banyumas	Nilai
1	Jan	198.005.579	175.701.955	-	7.506.314	408.604.651	-	789.818.499
2	Feb	178.843.749	157.166.494	-	5.711.326	369.062.265	-	710.783.834
3	Mar	209.357.971	172.030.394	-	6.323.254	408.604.651	-	796.316.270
4	Apr	251.349.355	164.746.491	-	6.119.278	395.423.855	-	817.638.979
5	Mei	256.015.062	168.358.833	-	6.323.254	408.604.651	-	839.301.800

No.	Bln	PDAM						
		Kota Palembang	Kota Bogor	Kota Palopo	Kab. Cilacap	Giri Menang Perpres 46	Kab. Banyumas	Nilai
6	Juni	309.059.430	161.193.367	-	6.119.278	394.600.055	-	870.972.130
7	Juli	326.399.894	164.687.272	-	6.241.664	383.066.860	-	880.395.690
8	Agt	326.399.894	162.851.491	-	5.058.603	383.066.860	-	877.376.848
Jumlah		**2.055.430.934**	**1.326.736.297**	**-**	**49.402.971**	**3.151.033.848**	**-**	**6.582.604.050**

Sedangkan rincian Estimasi Beban Subsidi sebesar Rp3.592.504.272,00 sebagai berikut

a. Bulan September 2025 = Rp879.126.532,00
b. Bulan Oktober 2025 = Rp919.522.151,00
c. Bulan November 2025 = Rp883.553.408,00
d. Bulan Desember 2025 = Rp910.302.181,00

Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya merupakan realisasi pembayaran subsidi bunga yang telah dibayarkan pada periode bulan April dan Oktober 2025. Beban Subsidi-Estimasi merupakan estimasi subsidi bunga yang akan dibayarkan pada bulan periode April 2026 yang diakui adalah beban subsidi bulan September-Desember 2025.

2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Beban Subsidi untuk tahun 2025 dan tahun 2024 masing masing senilai Rp4.725.019.563.428,00 dan Rp5.025.625.602.649,00. Beban subsidi merupakan beban pemerintah dalam pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta Kredit Program Perumahan. Terdapat 2 (dua) unit eselon I yang mengelola belanja subsidi, yaitu:

a. Pada Satker Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, jumlah Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Bunga Kredit Perumahan untuk tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing senilai Rp4.722.746.481.339,00 dan Rp55.025.625.602.649,00.
   Rincian Beban Subsidi sampai dengan tahun 2025 dan tahun 2024 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	1.141.114.000.000	816.130.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	3.581.632.481.339	4.209.495.602.649
Total	**4.722.746.481.339**	**5.025.625.602.649**

b. Pada Satker Ditjen Perumahan Perkotaan, jumlah Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya untuk tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing senilai Rp2.273.082.089,00 dan Rp0,00. Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya sebesar Rp2.273.082.089,00 merupakan tagihan subsidi untuk akad kredit yang terjadi pada awal masa program (Oktober dan November 2025).

3. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Jumlah Beban Subsidi per tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp31.849.417.496.053,00 dan Rp32.121.363.850.733,00. Beban subsidi 2025 berasal dari:

a. Belanja subsidi bunga/marjin KUR tahun berjalan sebesar Rp28.600.908.741.367,00
b. Tagihan yang sudah diverifikasi dan diajukan pembayaran sebesar Rp3.248.508.754.686,00
c. Tidak ada beban subsidi IJP KUR.

4. Kementerian Perhubungan

Jumlah Beban Subsidi per tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp8.891.095.991.381,00 dan Rp7.555.104.890.767,00. Rincian beban subsidi adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Ditjen Perkeretaapian	5.629.083.929.324	4.442.674.571.004
2	Ditjen Perhubungan Laut	3.262.012.062.057	3.112.430.319.763
Jumlah		**8.891.095.991.381**	**7.555.104.890.767**

Jumlah Beban Subsidi PSO ke PT. KAI per tahun 2025 dan tahun 2024 masing masing sebesar Rp5.629.083.929.324,00 dan Rp4.442.674.571.004,00. Beban Subsidi PSO ke PT. KAI tahun 2025 sebesar Rp5.629.083.929.324,00, terdiri atas pembayaran Subsidi PSO ke PT. KAI selama tahun 2025 sebesar Rp4.634.459.689.850,00 dan kurang bayar subsidi PSO ke PT. KAI 2025 sebesar Rp994.624.239.474,00.

Jumlah Beban Subsidi PSO ke PT. PELNI per tahun 2025 dan tahun 2024 masing masing sebesar Rp3.262.012.062.057,00 dan Rp3.112.430.319.763,00. Beban Subsidi PSO ke PT. PELNI periode tahun 2025 sebesar Rp3.262.012.062.057,00, terdiri atas pembayaran Subsidi PSO ke PT. PELNI selama tahun 2025 sebesar Rp2.826.535.319.247,00 dan kurang bayar subsidi PSO ke PT. PELNI 2025 sebesar Rp435.476.742.810,00.

5. Kementerian Perdagangan

Jumlah Beban Operasional pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp6.765.911.497,00 dan Rp4.748.993.980,00. Beban subsidi pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.016.917.517,00 dari tahun 2024. Hal ini dikarenakan penambahan debitur sehingga operator mengajukan tagihan subsidi resi gudang melalui SIKP.

Beban subsidi yang tercatat merupakan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Skema Subsidi Resi Gudang dari Bank Penyalur SSRG yang telah dibayarkan serta tagihan yang telah dilakukan verifikasi sesuai dengan Berita Acara Verifikasi. Beban Subsidi Bunga/Margin SSRG sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp6.765.911.497,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Bank Penyalur	Realisasi Pembayaran
1	Bank BJB (1 Desember - 31 Desember 2024)	440.808.557
2	Bank BSI (1 Desember - 31 Desember 2024)	38.146.486
3	Bank Sulselbar (1 Desember - 31 Desember 2024)	3.996.667
4	Bank BJB (1 Januari - 31 Januari 2025)	480.493.754
5	Bank Sulselbar (1 Januari - 31 Januari 2025)	1.705.000
6	Bank Sulselbar (1 Februari - 28 Februari 2025)	1.540.000
7	Bank BJB (1 Februari - 28 Februari 2025)	388.681.864
8	Bank Aceh Syariah (1 Desember - 31 Desember 2024)	22.458.329
9	Bank Sulselbar (1 Maret - 31 Maret 2025)	1.705.000
10	Bank BJB (1 Maret - 31 Maret 2025)	389.760.552
11	Bank Sulselbar (1 April - 30 April 2025)	1.650.000
12	Bank BJB (1 April - 30 April 2025)	391.252.209
13	Bank BJB (1 Mei - 31 Mei 2025)	431.361.410
14	Bank Sulselbar (1 Mei - 31 Mei 2025)	1.705.000
15	Bank BRI (1 Desember 2024 - 31 Mei 2025)	778.374.170
16	Bank Sulselbar (1 Juni - 30 Juni 2025)	1.265.000
17	Bank BJB (1 Juni - 30 Juni 2025)	421.956.336
18	Bank BJB (1 Juli - 30 November 2025)	2.094.485.366

No.	Bank Penyalur	Realisasi Pembayaran
19	Bank BRI (1 Juni - 30 November 2025)	522.552.935
20	Bank Jatim (Desember 2024 - 30 November 2025)	341.886.164
21	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (1 Jan - 31 Desember 2025	261.138.234
22	PT. Bank Aceh Syariah (Januari - November 2025)	173.025.392
23	Bank Kalsel (Desember 2024 - November 2025)	81.373.111
24	Pembayaran Utang Subsidi atas beban Tahun 2024 dan ditagihkan Tahun 2025	(505.410.039)
Jumlah		**6.765.911.497**

6. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jumlah Beban Operasional untuk periode yang berakhir tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp180.673.538.000,00 dan Rp176.322.920.000,00. Beban Operasional pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Kementerian Komunikasi dan Digital berupa Beban Subsidi yang digunakan untuk pengelolaan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers. Beban Subsidi yang tercatat merupakan tagihan PSO LKBN ANTARA yang telah dibayarkan serta tagihan yang telah dilakukan verifikasi sesuai dengan Berita Acara Verifikasi untuk periode sampai dengan tahun 2025. Rincian per produk atas Beban Subsidi PSO LKBN ANTARA untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Produk	Total Produk	Harga Satuan	Nilai
Teks Hardnews	144.250	818.000	117.996.500.000
Teks Artikel	1.500	986.000	1.479.000.000
Foto	16.806	1.337.000	22.469.622.000
TV Features	40	633.583.000	25.343.320.000
TV Hardnews	8.000	554.000	4.432.000.000
Infografis	180	9.723.000	1.750.140.000
Photo Story	44	33.789.000	1.486.716.000
Podcast	20	285.812.000	5.716.240.000
Jumlah	**170.840**		**180.673.538.000**

7. Kementerian Pertanian

Beban Subsidi sampai dengan tahun 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing senilai Rp43.858.859.833.474,00 dan Rp36.788.438.327.934,00. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada Produsen Pupuk untuk disalurkan kepada Petani. Rincian beban Subsidi untuk per tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	
			Nilai	%
Beban Subsidi Pupuk	43.856.258.406.197	36.788.315.401.696	7.067.943.004.501	19,21
Beban Subsidi Bunga	2.601.427.277	122.926.238	2.478.501.039	2.016,25
Jumlah	**43.858.859.833.474**	**36.788.438.327.934**	**7.070.421.505.540**	**19,22**

Berdasarkan tabel di atas, beban subsidi sampai dengan 2025 senilai Rp43.858.859.833.474,00 berada pada Eselon I Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berupa penyaluran subsidi bunga kredit program (alsintan) senilai Rp2.601.427.277,00 dan penyaluran subsidi pupuk senilai Rp43.856.258.406.197,00. Penjelasan beban subsidi per tahun 2025 senilai Rp43.858.859.833.474,00 sebagai berikut:

a. Beban subsidi bunga senilai Rp2.601.427.277,00 yang terdiri dari beban penyaluran kredit periode Januari s.d November 2025 senilai Rp2.103.784.956,00 dan tagihan atas penyaluran kredit yang belum dibayarkan pada periode Desember 2025 senilai Rp497.642.320,00.

(dalam rupiah)

Nama Bank	Penyaluran Kredit (Jan-Nov 2025)	Tagihan Periode Desember 2025	Nilai
Bank Mandiri	361.250	13.360.554	13.721.804
Bank Nagari	5.126.799	14.466.173	19.592.972
BNI	2.247.778	11.193.187	13.440.965
BPD Bali	720.674.369	79.838.301	800.512.670
BPD DIY	253.114.344	30.247.602	283.361.946
BPD Jateng	153.203.934	23.500.675	176.704.609
BPD Kalsel	719.667	5.594.285	6.313.952
BPD Sulselbar	815.655.803	228.054.645	1.043.710.448
BPD Sultra	151.476.845	87.653.982	239.130.827
BPD Sumselbabel	1.204.167	3.732.916	4.937.083
Jumlah	**2.103.784.956**	**497.642.320**	**2.601.427.277***

*) Selisih Rp1 karena pembulatan

b. Beban subsidi pupuk senilai Rp43.856.258.406.197,00 terdiri dari:
   1) Penyaluran subsidi pupuk periode Januari s.d Oktober 2025 senilai Rp31.420.222.039.417,00 (Tidak termasuk kurang bayar tahun 2020 dan kurang bayar tahun 2024); dan
   2) Kurang bayar sebesar Rp12.436.036.366.780,00 terdiri atas tagihan yang sudah diverifikasi oleh KPA sebesar Rp12.008.341.345.887,00 dan tagihan yang belum diverifikasi oleh KPA (utang estimasi) sebesar Rp427.695.020.893,00.

8. Kementerian Perindustrian

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir pada tahun 2025 dan tahun 2024 adalah Rp13.586.807,00 dan Rp0,00. Beban Subsidi tersebut merupakan Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya pada satker Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional.

9. Kementerian Keuangan

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir pada tahun 2025 dan tahun 2024 adalah Rp210.688.409.733.962,00 dan Rp197.587.205.855.573,00. Rincian Beban Subsidi tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Kelompok Beban	Tahun 2025	Tahun 2024	% Naik (Turun)
Beban Subsidi Energi	192.179.037.025.896	183.097.584.391.689	4,96
Beban Subsidi Pajak DTP	18.443.442.389.077	13.757.131.543.335	34,06
Beban Subsidi Kredit Program	-	252.159.126.358	(100,00)
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan	-	365.965.012.969	(100,00)
Beban Subsidi Bunga Pinjaman Daerah	65.930.318.989	114.365.781.222	(42,35)
Jumlah	**210.688.409.733.962**	**197.587.205.855.573**	**6,63**

a. Jumlah Beban Subsidi Energi yang ditagihkan DJA sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp192.179.037.025.896,00. Jumlah Beban Subsidi dimaksud merupakan Beban Subsidi JBT, LPG Tabung 3 kg dan Listrik dengan perhitungan sebagai berikut:

   1) Beban Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 kg atas tagihan tahun 2025 sebesar Rp104.718.373.423.888,00, terdiri atas:

(dalam rupiah)

Jenis Subsidi	Pembayaran 2025	Kurang Bayar	Total Beban
Minyak Solar (PT. PPN)	14.967.828.196.700	3.255.882.160.300	18.223.710.357.000
Minyak Solar (PT. AKR)	162.017.054.367	17.545.518.809	179.562.573.176
Minyak Tanah (PT. PPN)	3.235.575.084.827	794.459.441.035	4.030.034.525.862
LPG Tabung 3kg (PT. PPN)	75.020.736.202.774	7.264.329.765.076	82.285.065.967.850
Jumlah	**93.386.156.538.668**	**11.332.216.885.220**	**104.718.373.423.888**

2) Beban Subsidi Listrik periode tahun 2025 sebesar Rp87.460.663.602.008,00, terdiri atas:
   a) Pembayaran Subsidi Listrik 2025 sebesar Rp75.196.573.853.184,00; dan
   b) Kurang Bayar Subsidi Listrik 2025 sebesar Rp12.264.089.748.824,00.

b. Jumlah Beban Operasional P-DTP sampai dengan 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp18.443.442.389.077,00 secara rinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Beban P-DTP	Total Beban
PPh DTP Panas Bumi	3.536.434.135.305
PPh DTP SBN Valas	6.290.453.510.500
PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun	1.727.239.811.888
PPN DTP KBLBB	1.164.982.752.139
PPnBM DTP KBLBB	3.831.528.480.999
PPnBM DTP KBLBB Hybrid	445.054.354.647
PPh Pasal 21 DTP Industri tertentu	474.356.448.201
PPN DTP Jasa Angkutan Udara Ekonomi	831.299.642.366
PPN DTP BKO	89.429.866.828
PPN DTP kuda dan perlengkapannya	52.663.386.204
Jumlah	**18.443.442.389.077**

c. Beban Subsidi Bunga Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Ditjen Perbendaharaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp252.159.126.358,00 terjadi penurunan signifikan disebabkan pada tahun 2025 pembayaran Subsidi Bunga untuk Cadangan Pangan Pemerintah hanya dilakukan untuk periode tagihan tahun 2024, sedangkan untuk tahun 2025 tidak ada tagihan.

d. Beban Subsidi Bunga Pinjaman Daerah di Ditjen Perimbangan Keuangan sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp65.930.318.989,00. Subsidi bunga pinjaman daerah merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode tahun 2025 sebesar Rp65.621.670.000,00 serta kekurangan tagihan sebesar Rp308.648.989,00 yang direncanakan diselesaikan pada perhitungan tagihan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah kuartal I tahun 2026.

E.2.2.8. Beban Hibah

Beban Hibah pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp493.977.094.757,00 dan Rp278.430.938.953,00. Beban Hibah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp215.546.155.804,00 atau naik 77,41 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan oleh naiknya beban hibah kepada pemerintah luar negeri. Beban Hibah sebesar tersebut berasal dari BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	418.259.737.154	183.941.706.710
2	Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	75.282.562.321	94.227.497.856
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	-	-

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
4	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya terkait Pendapatan/Belanja Hibah	434.795.282	261.734.387
Jumlah		**493.977.094.757**	**278.430.938.953**

Pada tahun 2025, terdapat pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*banking commission*) maupun realisasi belanja hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang disahkan pada BA BUN 999.02.

Beban Operasional pada tahun 2025 berasal dari pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*banking commission*) pada Satker 977263 (DJPPR) sebesar Rp434.795.282,00 dan belanja hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing pada Satker 985252 (LDKPI) sebesar Rp493.542.299.475,00.

E.2.2.9. Beban Transfer ke Daerah

Beban Transfer ke Daerah tahun 2025 merupakan kewajiban TKD yang telah dibayar atau terutang sampai dengan tanggal tahun 2025. Laporan Operasional tahun 2025 menyajikan Beban Transfer ke Daerah sebesar Rp878.526.664.302.990,00. Nilai Beban Transfer ke Daerah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp24.120.039.390.182,00 atau turun 2,67 persen dibandingkan dengan Beban Transfer ke Daerah tahun 2024 yang sebesar Rp902.646.703.693.172,00.

Rincian beban Transfer ke Daerah adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Transfer Umum	**632.113.795.682.834**	**621.796.001.652.159**
- Dana Bagi Hasil	198.821.707.619.645	192.585.390.373.161
- Dana Alokasi Umum	433.292.088.063.189	429.210.611.278.998
Dana Transfer Khusus	**162.487.035.282.956**	**183.334.806.576.472**
- Dana Alokasi Khusus Fisik	17.610.554.270.313	50.890.077.113.845
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik	144.625.407.769.133	130.237.567.201.933
- Hibah Kepada Daerah	251.073.243.510	2.207.162.260.694
Dana Desa, Insentif Fiskal, Otsus, dan Keistimewaan	**83.925.833.337.200**	**97.515.895.464.541**
- Otonomi Khusus	17.006.143.580.000	18.271.490.935.000
- Daerah Istimewa Yogyakarta	1.000.000.000.000	1.396.134.243.367
- Dana Desa	61.645.153.758.700	70.846.529.689.674
- Insentif Fiskal	4.274.535.998.500	7.001.740.596.500
Jumlah	**878.526.664.302.990**	**902.646.703.693.172**

Penjelasan Dana Transfer Umum

1. **Beban Dana Bagi Hasil (DBH)**

   Beban Transfer Dana Bagi Hasil merupakan kewajiban DBH yang telah dibayar dan masih terutang sampai dengan tahun 2025. Beban Transfer Dana Bagi Hasil tahun 2025 disajikan sebesar Rp198.821.707.619.645,00. Nilai beban tersebut meningkat sebesar Rp6.236.317.246.484,00 atau 3,24 persen dibandingkan dengan Beban DBH tahun 2024 yang sebesar Rp192.585.390.373.161,00.

   Terdapat perbedaan sebesar Rp29.931.188.500.765,00 antara Beban Dana Bagi Hasil dengan realisasi Belanja Dana Bagi Hasil tahun 2025. Perbedaan nilai tersebut disebabkan oleh penyaluran Kurang Bayar DBH yang dicatat sebagai Belanja pada LRA tetapi tidak dicatat sebagai Beban pada

LO, serta estimasi Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar DBH yang dicatat sebagai Beban pada LO tetapi tidak dicatat sebagai Belanja pada LRA. Dana Bagi Hasil tahun 2025 terdiri dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam (SDA), dan DBH Lainnya.

(dalam rupiah)

Rincian Dana Bagi Hasil	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Dana Bagi Hasil Pajak	**84.422.625.273.386**	**54.707.213.485.540**
DBH Pajak Penghasilan	50.610.870.738.561	31.216.907.809.000
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	27.464.964.488.491	18.521.270.630.000
DBH Cukai Hasil Tembakau	6.346.790.046.334	4.969.035.046.540
Beban Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	**112.299.369.300.916**	**82.437.053.313.222**
DBH SDA Minyak Bumi	8.642.468.879.658	8.706.431.546.000
DBH SDA Gas Bumi	14.241.287.624.213	6.186.433.188.000
DBH SDA Mineral dan Batu Bara	85.530.918.989.909	63.841.301.583.000
DBH SDA Panas Bumi	1.964.477.039.463	1.379.387.060.000
DBH SDA Kehutanan	1.099.017.056.484	1.371.801.174.222
DBH SDA Perikanan	821.199.711.189	951.698.762.000
Dana Bagi Hasil Lainnya	**2.099.713.045.343**	**2.824.927.382.500**
DBH Perkebunan Sawit	2.099.713.045.343	2.824.927.382.500
Jumlah	**198.821.707.619.645**	**192.585.390.373.161**

Kenaikan Beban DBH pada tahun 2025 disebabkan oleh kenaikan alokasi DBH yang disebabkan peningkatan penerimaan negara atas pajak dan SDA.

Beban DBH Pajak untuk periode tahun 2025 sebesar Rp84.422.625.273.386,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.990.197.450.689,00 atau naik sebesar 50,39 persen.

Beban DBH SDA untuk periode tahun 2025 sebesar Rp112.299.369.300.916,00. Nilai tersebut berasal dari kewajiban yang telah terbayar untuk masa periode sampai dengan tahun 2025. Jika dibandingkan dengan Beban Transfer DBH SDA tahun 2024, nilai Beban Transfer DBH SDA per tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp29.862.315.987.694,00 atau naik sebesar 36,22 persen.

Beban DBH Lainnya untuk periode tahun 2025 sebesar Rp2.099.713.045.343,00. Nilai tersebut berasal dari beban yang dibagihasilkan atas perkebunan sawit. Terdapat penurunan sebesar Rp725.214.337.157,00 atau turun 25,67 persen dari tahun 2024 sebesar Rp2.824.927.382.500,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan penerimaan negara atas perkebunan sawit.

2. Beban Dana Alokasi Umum (DAU)

Beban DAU tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp433.292.088.063.189,00 dan Rp429.210.611.278.998,00. Beban DAU per 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.081.476.784.191,00 atau 0,95 persen dari periode yang sama pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya porsi alokasi DAU *Block Grant*. Pada tahun 2025 DAU untuk THR dan Gaji Ketigabelas bagi Guru ASN Daerah dialokasikan tersendiri sebagai DAU Tambahan. Rincian Beban Dana Alokasi Umum tahun 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Rincian Dana Alokasi Umum	Tahun 2025	Tahun 2024
Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	360.515.964.881.000	343.527.595.289.000
Transfer Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	10.620.002.627.812	11.682.211.062.523
Transfer Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	1.659.888.602.000	1.649.654.425.851
Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	33.578.181.449.999	37.276.919.147.598
Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	19.251.193.436.378	12.083.638.950.842

Rincian Dana Alokasi Umum	Tahun 2025	Tahun 2024
Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	-	17.112.772.095.184
Transfer Dana Alokasi Umum THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	7.666.857.066.000	5.877.820.308.000
Jumlah	**433.292.088.063.189**	**429.210.611.278.998**

Penjelasan Dana Transfer Khusus

1. Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp17.610.554.270.313,00 dan Rp50.890.077.113.845,00. Beban transfer DAK Fisik Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp33.279.522.843.532,00 atau turun 65,39 persen karena adanya efisiensi belanja.

2. Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Beban DAK Non Fisik untuk tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp144.625.407.769.133,00 dan Rp130.237.567.201.933,00. Beban transfer DAK Non Fisik tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.387.840.567.200,00 atau 11,05 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah dibandingkan tahun sebelumnya, serta penambahan jumlah sekolah dan siswa penerima Dana BOP Kesetaraan.

Selama periode Tahun Anggaran 2025 terdapat jenis TKD yang sudah tidak lagi dianggarkan yaitu Dana Pelayanan Kepariwisataan, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, dan Dana Biaya Layanan Pengelolaan Sampah. Penghentian alokasi untuk beberapa jenis DAK Non Fisik disebabkan oleh adanya dinamika kebijakan Transfer ke Daerah. Selain itu terdapat kebijakan penyaluran langsung ke penerima pada beberapa jenis TKD DAK Non Fisik seperti Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah. Terdapat jenis DAK Non Fisik yang baru dianggarkan sejak Tahun Anggaran 2025, yaitu Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah.

Rincian beban DAK Non Fisik tahun 2025 tersaji pada tabel dibawah ini.

(dalam rupiah)

Rincian DAK Non Fisik	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Tunjangan Profesi Guru ASND	67.162.868.740.533	51.850.462.245.921
Dana Tunjangan Khusus Guru ASND	2.253.484.095.800	2.075.612.901.562
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND	383.252.500.000	1.495.768.803.108
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	11.598.174.516.419	11.310.090.376.241
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.949.698.794.665	3.030.614.238.487
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	150.664.530.477	235.646.902.491
Dana Pelayanan Kepariwisataan	-	122.535.859.602
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	160.315.293.161	162.137.147.943
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-	60.811.675.450
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	105.770.858.267	111.780.990.539
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	-	229.414.189.962
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	471.807.821.777	279.830.380.924
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	79.111.132.140	180.553.253.556
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.456.827.078.015	53.518.871.103.909
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	4.002.634.203.721	3.967.480.355.070

Rincian DAK Non Fisik	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	134.864.321.777	-
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.715.933.882.381	1.605.956.777.168
Jumlah	**144.625.407.769.133**	**130.237.567.201.933**

3. Beban Hibah kepada Daerah

Beban Hibah kepada Daerah yang tercatat pada Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal tahun 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp251.073.243.510,00 dan Rp2.207.162.260.694,00. Beban Hibah kepada Daerah mengalami penurunan sebesar 88,62 persen atau turun sebesar Rp1.956.089.017.184,00. Rincian Beban Hibah kepada Daerah tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

(dalam rupiah)

Rincian Beban Hibah kepada Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	237.027.244.682	810.103.833.952
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	14.045.998.828	101.257.208.226
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri	-	1.295.801.218.516
Jumlah	**251.073.243.510**	**2.207.162.260.694**

Rendahnya realisasi Hibah *Mass Rapid Transit* (MRT) Tahun 2025 disebabkan terbitnya PMK Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri dan PMK Nomor 109 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri serta PMK Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakukan Perpajakan Dalam Kerja Sama Operasi yang berdampak pada proses tagihan Kontraktor/Konsultan serta pergeseran jadwal pengadaan lahan pembangunan MRT Jakarta Metropolitan Koridor Timur Barat Fase 1 Tahap 1 yang semula direncakan di Tahun 2025 menjadi Tahun 2026.

Penjelasan Beban Dana Desa, Insentif Fiskal, Otsus dan Keistimewaan

1. Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus pada Laporan ini merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode tahun 2025. Jumlah Beban Dana Otonomi Khusus tahun 2025 sebesar Rp17.006.143.580.000,00. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp18.271.490.935.000,00, nilai Beban Dana Otonomi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp1.265.347.355.000,00 atau turun 6,93 persen.

Rincian Beban Dana Otonomi Khusus sebagaimana berikut:

(dalam rupiah)

Rincian Beban Dana Otonomi Khusus	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	**4.309.582.640.000**	**4.276.993.035.000**
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	4.309.582.640.000	4.276.993.035.000
Dana Tambahan Infrastruktur	**3.000.000.000.000**	**4.411.741.958.000**
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua	530.558.897.000	770.087.411.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat	436.774.856.000	636.516.027.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Daya	420.153.684.000	652.742.113.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan	588.385.327.000	861.274.294.000

Rincian Beban Dana Otonomi Khusus	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan	456.634.597.000	665.304.462.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah	567.492.639.000	825.817.651.000
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum	**4.309.582.640.000**	**4.276.993.036.000**
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua	781.495.894.000	717.359.936.000
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua Barat	497.515.870.000	485.551.411.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya	577.093.720.000	604.812.025.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Pegunungan	1.083.886.779.000	1.073.576.144.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan	527.310.024.000	547.131.349.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah	842.280.353.000	848.562.171.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya	**5.386.978.300.000**	**5.305.762.906.000**
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua	978.200.661.000	883.469.568.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat	627.774.300.000	630.041.924.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya	698.423.784.000	612.263.725.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan	1.362.514.769.000	1.395.865.798.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan	644.006.648.000	704.887.057.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah	1.076.058.138.000	1.079.234.834.000
Jumlah	**17.006.143.580.000**	**18.271.490.935.000**

2. Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK DIY) tahun 2025 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Total Beban Transfer Dana Keistimewaan tahun 2025 adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan beban DK DIY tahun 2024 yang sebesar Rp1.396.134.243.367,00, nilai Beban DK DIY mengalami penurunan sebesar Rp396.134.243.367,00 atau turun 28,37 persen karena adanya efisiensi belanja. Terdapat perubahan kebijakan penyaluran DK-DIY sebagaimana PMK Nomor 88 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan sisa DK-DIY menjadi SiLPA atau pembentukan Dana Abadi Daerah.

3. Beban Dana Desa

Beban Dana Desa untuk tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp61.645.153.758.700,00 dan Rp70.846.529.689.674,00. Beban Transfer Dana Desa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.201.375.930.974,00 atau 12,99 persen. Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2025 terdapat kebijakan penghentian penyaluran Dana Desa Tahap 2 *Non-Earmark* sesuai dengan PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

4. Insentif Fiskal

Beban Insentif Fiskal (IF) tahun 2025 yaitu sebesar Rp4.274.535.998.500,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp7.001.740.596.500,00, nilai Beban IF mengalami penurunan sebesar Rp2.727.204.598.000,00 atau 38,95 persen.

Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya pagu dibandingkan tahun sebelumnya serta kebijakan pengendalian anggaran Dana IF untuk Kinerja Tahun Berjalan. IF antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran iuran JKN, bantuan benih tanaman pangan, jalan usaha tani, serta bantuan penyediaan rumah layak huni.

E.2.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp30.928.363.201.225,00 dan Rp27.839.399.821.259,00. Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi atas Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.088.963.379.966,00 atau naik 11,10 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2025 dapat dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BA	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	459.017.714.846	273.297.938.880
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	186.861.095.297	178.798.899.293
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	30.282.484.391.082	27.387.302.983.086
Jumlah		**30.928.363.201.225**	**27.839.399.821.259**

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BA BUN 999.03 teratribusi pada aset kelolaan pada BLU LMAN (984125). Pada Tahun 2025, pembebanan penyusutan aset kelolaan sebesar Rp459.017.714.846,00 atau meningkat sebesar 67,96 persen dibandingkan dengan tahun 2024 yang membukukan sebesar Rp185.719.775.966,00. Pembebanan tersebut terdiri dari pembebanan atas penyusutan properti investasi dan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pembebanan Penyusutan Properti Investasi	457.223.912.124	270.908.603.453
2	Pembebanan Penyusutan atas Aset Kelolaan Non klasifikasi Properti Investasi	1.793.802.722	2.389.335.427
Jumlah		**459.017.714.846**	**273.297.938.880**

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BA BUN 999.08 pada tahun 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp186.861.095.297,00 dan Rp178.798.899.293,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	**BP Batam**	**167.514.307.349**	**155.115.398.129**
	a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.679.854.203	1.690.914.127
	b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.810.225.620	1.411.436.782
	c. Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	164.002.039.859	151.990.859.553
	d. Beban Penyusutan Irigasi	20.321.000	20.321.000
	e. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.866.667	1.866.667
2	**Otoritas Jasa Keuangan**	**-**	**-**
	a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-
	b. Beban Amortisasi Lisensi	-	-
3	**SKK Migas**	**19.346.787.948**	**23.683.501.164**
	a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.753.403.207	18.413.312.144
	b. Beban Penyusutan Jaringan	1.609.050	1.609.050
	c. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	132.779.895	132.779.896
	d. Beban Amortisasi *Software*	2.068.592.991	4.890.203.452

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	e. Beban Amortisasi Lisensi	356.004.744	228.089.700
	f. Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	34.398.061	17.506.922
Jumlah		**186.861.095.297**	**178.798.899.293**

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) pada Tahun 2025 yang sebesar Rp30.282.484.391.082,00 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.895.181.407.996,00 atau naik 10,57 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp27.387.302.983.086,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Atas BMN eks KKS Pertamina	77.762.815.119	71.598.747.796
2.	Atas aset PKP2B	693.355.330.970	567.148.934.086
3.	Atas Aset Lain-lain	87.203.900.509	6.165.157.745
4.	BMN *Idle*	389.500.475	488.607.289
5.	KKKS SKK Migas	29.023.227.381.935	26.373.538.145.914
6.	KKKS BPMA	356.549.915.116	356.769.529.192
7.	Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN	43.995.546.958	11.593.861.064
Jumlah		**30.282.484.391.082**	**27.387.302.983.086**

a. Pada UAKPA BUN Pengelola BMN Eks Pertamina, Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025 sebesar Rp77.762.815.119,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Beban Penyusutan	Tahun 2025
Atas 2 (Dua) Aset Tanah	-
Atas BMN eks KKS Pertamina	77.762.815.119
Jumlah	**77.762.815.119**

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tersebut. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-08/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, penyusutan BMN eks Pertamina disajikan dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN Transaksi Khusus Pengelola Aset Eks Pertamina menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari BMN setiap semester selama masa manfaat.

b. Pada UAKPA BUN TK BMN PKP2B, Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir tahun 2025 adalah sebesar Rp693.355.330.970,00, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Beban penyusutan tahun 2025 pada PT Adaro Indonesia sebesar Rp78.270.668.943,00;
   2) Beban penyusutan tahun 2025 pada PT Arutmin Indonesia sebesar Rp103.157.743.805,00;
   3) Beban penyusutan tahun 2025 pada PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp118.816.766.810,00;
   4) Beban penyusutan tahun 2025 pada PT Berau Coal sebesar Rp78.910.557.971,00;
   5) Beban penyusutan tahun 2025 pada PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp313.654.254.755,00;
   6) Beban penyusutan tahun 2025 pada PT Multi Harapan Utama sebesar Rp257.972.782,00;
   7) Beban penyusutan tahun 2025 pada PT Kendilo Coal sebesar Rp46.534.410,00;

8) Beban penyusutan tahun 2025 pada PT Tanito Harum sebesar Rp263.314.988,00; dan
9) Koreksi kurang beban penyusutan atas BMN yang tidak memenuhi syarat minimum kapitalisasi pada aplikasi SAKTI dan masuk dalam BMN Ekstrakomptabel pada PT Berau Coal yaitu sebesar Rp3.621.813,00.

c. Pada UAKPA BUN TK BMN Pengelola Aset Lain-lain, Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Rp87.203.900.509,00 yang merupakan beban penyusutan aset rampasan TLI, aset GIZ dan aset PT AAF.

d. Pada UAKPA BUN TK BMN *Idle*, Jumlah Beban Penyusutan, termasuk penyusutan Properti Investasi dan Aset Lainnya untuk periode Tahun 2025 sebesar Rp389.500.475,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

e. Pada UAKPA BUN TK BMN KKKS SKK Migas, Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir tahun 2025 dan tahun 2024 adalah Rp29.023.227.381.935,00 dan Rp24.763.899.153.619,00 yang terdiri dari:
1) Penambahan penyusutan HBM sebesar Rp29.017.934.779.323,00; dan
2) Penambahan penyusutan HBI sebesar Rp5.292.602.612,00.

f. Pada UAKPA BUN TK BMN KKKS SKK BPMA, Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp356.549.915.116,00 dan Rp356.767.251.098,00 dengan rincian sebagai berikut :
1) Penyusutan Aset tahun berjalan HBM sebesar Rp356.353.457.364,00;
2) Penyusutan Aset tahun berjalan HBI sebesar Rp196.457.752,00.

g. Pada UAKPA BUN Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN, Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir tahun 2025 adalah sebesar Rp43.995.546.958,00.

E.2.2.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar defisit Rp4.252.040.754.550,00 dan Rp12.482.753.654.145,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.734.794.408.695,00 atau turun 134,06 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Penurunan terbesar terjadi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99). Beban tersebut merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih – piutang jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BA	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	69.937.056.606	(10.362.677.871)
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	157.223.301.883	570.724.537.649
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	-	-
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	(841.048.556)	975.469.928
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	(4.478.360.064.483)	11.921.416.324.439
Jumlah		**(4.252.040.754.550)**	**12.482.753.654.145**

1. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.03 di 2025 sebesar Rp69.937.056.606,00 merupakan beban penyisihan piutang tidak tertagih, piutang PNBP dan beban dana bergulir

diragukan tertagih lainnya. Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir – Kementerian Negara/Lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam Bentuk Tagihan. Jumlah tersebut merupakan kenaikan dari tahun 2024 yang berjumlah Rp10.362.677.871,00, naik Rp80.299.734.477,00 atau defisitnya turun 774,89 persen.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN 999.03 dapat dirinci berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	KPA Direktorat PNBP DJA (984501)	761.128.188	60.912.409.391
2	KPA BLU Set BPJT (984102)	-	(326.870.726.003)
3	KPA BLU LPMUKP (984848)	(9.980.739.308)	803.509.152
4	KPA Dit SMI (961671)	94.748.499.716	231.177.523.204
5	KPA BLU LPDB KUMKM	(15.593.145.175)	23.614.606.385
6	KPA BLU BPDLH (PFB dan DNS)	1.313.185	-
Jumlah		**69.937.056.606**	**(10.362.677.871)**

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) adalah sebagai berikut:

a. KPA Direktorat PNBP DJA (984501)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp761.128.188,00 dan Rp60.912.409.391,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih tersebut terdiri dari:

1) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp525.000.000,00; dan
2) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp236.128.188,00.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-91/MK.02/2025 tanggal 24 Februari 2025 hal Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas, dilakukan penyesuaian pembayaran atas piutang Perum Perumnas sebesar Rp57.225.637.648,00 menjadi dari tahun 2025 s.d. 2032. Adapun rincian beban penyisihan piutang tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Tahun	Nilai Angsuran Restrukturisasi	Keterangan	Status Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
2025	5.000.000.000	Bagian lancar	Kurang lancar	10,0	500.000.000
2026	5.000.000.000	Bagian lancar	Lancar	0,50	25.000.000
2027	5.000.000.000	Jangka panjang	Lancar	0,50	25.000.000
2028	7.500.000.000	Jangka panjang	Lancar	0,50	37.500.000
2029	7.500.000.000	Jangka panjang	Lancar	0,50	37.500.000
2030	7.500.000.000	Jangka panjang	Lancar	0,50	37.500.000
2031	9.800.000.000	Jangka panjang	Lancar	0,50	49.000.000
2032	9.925.637.648	Jangka panjang	Lancar	0,50	49.628.188
Jumlah Penyisihan Tahun 2025					**761.128.188**

b. KPA Set BPJT (984102)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan defisit Rp326.870.726.003,00. Pada Tahun 2025 tidak dilakukan pembebanan penyisihan piutang pokok. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencadangkan investasi non permanen BLU yang tak tertagih. Beban

penyisihan piutang bernilai negatif dikarenakan adanya perubahan kualitas dana bergulir yang dilatarbelakangi oleh perjanjian atau restrukturisasi Dana Bergulir antara BUJT dan BPJT. Adapun rincian beban penyisihan dana bergulir sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	Dana Bergulir Diragukan tertagih 2024	Dana Bergulir Diragukan 2025	Beban Penyisihan
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	14.205.829.218	14.205.829.218	-
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang - Batang	17.373.017.246	17.373.017.246	-
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	9.646.505.463	9.646.505.463	-
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821	-
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	17.600.713.897	17.600.713.897	-
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	31.399.367.332	31.399.367.332	-
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	69.192.193.620	69.192.193.620	-
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	75.022.562.920	75.022.562.920	-
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	54.861.766.703	54.861.766.703	-
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	52.544.821.638	52.544.821.638	-
PT. MTD-CPP Expressway / Cibitung-Cilincing	28.599.678.962	28.599.678.962	-
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	16.849.497.873	16.849.497.873	-
Jumlah	**404.676.785.693**	**404.676.785.693**	

c. KPA BLU LPMUKP (984848)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih berasal dari saldo akhir akun-akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas penyajian nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk periode tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar defisit Rp9.980.844.328,00 dan defisit Rp803.509.152,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, beban Penyisihan Piutang tak tertagih tersebut mengalami defisit signifikan sebesar Rp10.784.353.480,00 atau turun 1.342,16 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih akibat adanya perbaikan kualitas piutang.

d. KPA Dit. SMI (961671)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih pada Direktorat SMI untuk tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp94.748.499.716,00 dan Rp231.177.523.204,00. Terdapat penurunan sebesar Rp136.429.023.488,00 atau turun 59,01 persen dari tahun 2024. Nilai beban penyisihan sebesar Rp94.748.499.716,00 berasal dari beban penyisihan piutang tak tertagih pada BLU BPDLH sebesar Rp93.204.773.505,00 dan BLU PIP sebesar Rp1.543.726.211,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	*Outstanding* Awal	Pengurangan Nilai Jaminan	Saldo Setelah Dikurangi Jaminan	Tarif (%)	Penyisihan Akhir
Lancar	623.125.816.480	103.837.393.566	519.288.422.914	0,50	2.596.442.115

Kualitas Piutang	*Outstanding* Awal	Pengurangan Nilai Jaminan	Saldo Setelah Dikurangi Jaminan	Tarif (%)	Penyisihan Akhir
Kurang Lancar	25.234.250.417	2.293.109.109	22.941.141.308	10	2.294.114.131
Diragukan	5.913.948.348	-	5.913.948.348	50	2.956.974.174
Macet (termasuk DNS)	706.902.098.731	199.320.046.183	507.582.052.548	100	507.582.052.548
Lunas Pokok	-	-	-	-	-
Jumlah	1.361.176.113.976	305.450.548.858	1.055.725.565.118		515.429.582.967
Saldo Penyisihan Tahun 2024					**422.224.809.462**
Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Desember 2025					**93.204.773.505**

Beban dana penyisihan dana bergulir pada BLU BPDLH pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp93.204.773.505,00 dan Rp183.895.719.715,00. Nilai beban penyisihan mengalami penurunan sebesar Rp90.690.946.210,00 atau turun 49,32 persen dari tahun 2024.

Pada BLU BPDLH mulai tahun 2021, dilakukan perhitungan jaminan sebagai pengurang penyisihan piutang. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, nilai perhitungan jaminan ini akan terus bertambah seiring dengan proses pendataan yang saat ini tengah dilakukan.

Beban penyisihan dana bergulir pada BLU PIP untuk tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp1.543.726.211,00 dan Rp47.281.803.489,00. Nilai beban penyisihan mengalami penurunan sebesar Rp45.738.077.278,00 atau turun 96,74 persen dari tahun 2024. Adapun rincian beban penyisihan dana bergulir pada BLU PIP adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kualitas Piutang	Nilai *Outstanding*	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
1	Lancar	8.297.334.018.725	0,5	41.486.670.094
2	Kurang lancar	111.333.334	10	11.133.333
3	Diragukan	7.719.673.408	50	3.859.836.704
4	Macet	43.840.683.844	100	43.840.683.844
Jumlah		**8.349.005.709.284**		**89.198.323.975**
Saldo penyisihan awal periode				**87.654.597.764**
Pengakuan beban periode *Tahun 2025*				**1.543.726.211**

e. KPA BLU LPDB KUMKM

Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar defisit Rp15.593.145.175,00 dan Rp23.614.606.385,00. Nilai beban penyisihan pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp39.207.751.560,00 atau turun 166,03 persen. Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir merupakan dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah piutang dana bergulir dan dana bergulir yang telah diserahkan kepada Pihak Eksekutor/Pihak Kejaksaan atas dasar jumlah piutang dana bergulir. Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir-Kementerian/Lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam Bentuk Tagihan.

f. KPA BLU BPDLH (PFB dan DNS)

Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp1.313.185,00 dan Rp0,00. Penambahan saldo beban penyisihan dana bergulir berasal dari

penyisihan dana PFB yang dikategorikan lancar (tarif 0,05 persen) dengan nilai outstanding setelah dikurangi dengan pengurang nilai jaminan sebesar Rp262.637.000,00.

2. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN 999.04 sampai dengan tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp157.223.301.883,00 dan Rp570.724.537.649,00. Beban Operasional pada LO berupa Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Pemberian Pinjaman (594231). Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dihitung berdasarkan selisih antara akumulasi penyisihan piutang tak tertagih periode Tahun Anggaran Berjalan dan akumulasi penyisihan piutang tak tertagih periode Tahun Anggaran Yang Lalu, dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang dihapuskan. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihapuskan apabila terdapat penghapusan piutang.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Penyisihan Piutang - Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	157.432.156.034	419.088.180.946
2	Beban Penyisihan Piutang - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman	(667.741.861)	170.933.892.966
3	Beban Penyisihan Piutang – Piutang Denda Penerusan Pinjaman	(11.870.436)	(8.754.676.730)
4	Beban Penyisihan Piutang - Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	8.482.528.263	(2.170.791.723)
5	Beban Penyisihan Piutang - Aset Lainnya Kredit Program	(8.011.770.117)	(8.372.067.810)
Jumlah		**157.223.301.883**	**570.724.537.649**

3. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada tahun 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar defisit Rp841.048.556,00 dan Rp975.469.928,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kementerian Negara/ Lembaga	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kementerian Pertanian	(1.000.000.000)	-
2	Kementerian Kominfo	181.590.800	-
3	MPP Kartu Prakerja	-	978.093.960
4	Otoritas Jasa Keuangan	(75.104)	75.104
5	Kementerian Keuangan	(26.823.623)	(5.169.960)
6	SKK Migas	4.259.371	2.470.824
Jumlah		**(841.048.556)**	**975.469.928**

a. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya sebesar defisit Rp814.149.829,00 terdapat pada:
   1) Satker Ditjen Ekosistem Digital pada Kementerian Kominfo sebesar Rp181.590.800,00 yang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang atas kelebihan pembayaran Bantuan/Subdisi Operasional LPU selama Tahun Anggaran 2025;
   2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian sebesar defisit Rp1.000.000.000,00 merupakan jurnal balik atas penyisihan piutang yang telah dilunasi; dan
   3) SKK Migas sebesar Rp4.259.371,00.

b. Beban Penyisihan Piutang PNBP sebesar defisit Rp26.898.727,00 terdapat pada:
   1) Satker Otoritas Jasa Keuangan sebesar defisit Rp75.104,00 yang merupakan jurnal balik atas penyisihan piutang yang telah dilunasi; dan
   2) Satker Kanwil DJPb Provinsi Papua pada Kementerian Keuangan sebesar defisit Rp26.823.623,00 yang merupakan jurnal balik atas penyisihan piutang bukan pajak tahun 2024 yang telah dilunasi.

Tata cara pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Pasal 4 (3) disebutkan bahwa selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai pengurang (dikredit ke) beban penyisihan piutang tidak tertagih dan sebagai pengurang (didebet ke) penyisihan piutang tidak tertagih. Pasal 4 (4) menyebutkan bahwa dalam hal selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo negatif (kredit), disajikan di dalam Laporan Operasional sebagai beban negatif.

4. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) per tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar defisit Rp4.478.360.064.483,00 dan Rp11.921.416.324.439,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Dana Pensiun & THT	548.889.886	538.960.073
2	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BLBI	(4.460.067.102.081)	11.714.079.497.589
3	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Satker KKKS	859.580.358	1.397.331.718
4	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Supersemar	164.031.399.321	220.855.080.513
5	Beban Penyisihan Piutang pada pengelola PNBP Migas	-	-
6	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Kas Negara	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BPLS	(183.732.831.967)	(15.454.545.454)
Jumlah		**(4.478.360.064.483)**	**11.921.416.324.439**

E.2.2.12. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp258.956.054.633.186,00 dan Rp262.572.777.745.764,00. Beban Lain-lain pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.616.723.112.578,00 atau turun 1,38 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan signifikan terjadi pada beban lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi. Beban Lain-lain bila dirinci berdasarkan pengelola sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BA	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	1.210.040.655.192	7.315.144.183.326
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	213.521.530.220.085	221.773.148.742.500
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	44.475.577.964.884	33.732.897.089.678
999.99	Eliminasi Beban Lain-lain	(251.094.206.975)	(248.412.269.740)
Jumlah		**258.956.054.633.186**	**262.572.777.745.764**

1. Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03)

Beban Lain-lain pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2025 sebesar Rp1.210.040.655.192,00 merupakan Beban Penyesuaian Nilai Investasi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang bernilai Rp7.315.144.183.326,00, terjadi penurunan sebesar Rp6.105.103.528.134,00 atau turun 83,46 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024. Rincian beban penyesuaian investasi dapat dijelaskan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Penyesuaian Nilai Investasi KPA BP BUMN	833.904.665.736	7.315.144.183.326
2	Beban Penyesuaian Nilai Investasi KPA DJKN	28.805.754.450	-

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
3	Beban Penyesuaian Nilai Investasi UAIP	347.330.235.006	-
4	Beban Penyesuaian Nilai Investasi KPA Dit. SMI	-	-
Jumlah		**1.210.040.655.192**	**7.315.144.183.326**

a. Beban Penyesuaian Nilai Investasi KPA BP BUMN

Beban penyesuaian yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah BP BUMN pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp833.904.665.736,00 dan Rp7.315.144.183.326,00. Beban penyesuaian nilai investasi lingkup KPA BP BUMN terdiri atas:

1) Beban Penyesuaian Nilai Investasi Non Permanen sebesar Rp2.669.791.667,00 merupakan selisih penyisihan nilai investasi non permanen antara periode 31 Desember 2024 sebesar defisit Rp34.218.749.997,00 dan periode 31 Desember 2025 sebesar defisit Rp31.548.958.330,00; dan
2) Beban dari Bagian Rugi Pemerintah pada Perusahaan Negara sebesar defisit Rp836.574.457.403,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	BPI Danantara	-	-
2	*Holding*	-	-
3	BUMN Persero	(6.900.484)	(7.193.258.575.990)
4	BUMN Perum	(836.567.556.919)	(122.979.357.336)
5	BUMN Minoritas	-	-
Jumlah		**(836.574.457.403)**	**(7.316.237.933.326)**

Bagian rugi pemerintah (beban) pada Tahun 2025 mengalami defisit 88,57 persen atau defisit Rp836.574.457.403,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar defisit Rp7.316.237.933.326,00. Penurunan bagian rugi pemerintah (beban) ini disebabkan oleh adanya inbreng ke *Holding* Operasional sehingga bagian rugi Persero tidak lagi dicatat pada 2025. Rugi Persero sebesar Rp6.900.484,00 berasal dari kepemilikan pemerintah pada BUMN anggota *holding* melalui BP BUMN sebesar 1 (satu) lembar saham Seri A yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Dari 10 (sepuluh) Perum, terdapat 3 (tiga) Perum yang mencatatkan rugi dengan total sebesar Rp836,57 miliar. Peningkatan rugi pada Perum sebesar 652,36 persen pada *Unaudited* 2025 sebagian besar dikontribusikan oleh Perum Bulog yang mengalami peningkatan rugi signifikan (semula pada tahun 2024 masih mencatat laba Rp49,94 miliar menjadi rugi Rp392,96 miliar) yang disebabkan oleh penurunan pendapatan dan tingginya beban keuangan atas pinjaman modal kerja sebesar Rp3.463 miliar, serta adanya koreksi atas Harga Pembelian Beras (HPB) sebesar Rp1.695 miliar.

Selain itu, peningkatan bagian rugi pemerintah juga disebabkan oleh Perum Perumnas yang sebelumnya mencatatkan bagian laba pada 2024 namun mencatatkan rugi pada *Unaudited* 2025 akibat turunnya capaian pendapatan (turun 41,51 persen *year-on-year*) dan masih tingginya beban keuangan/bunga yang perlu ditanggung, bahkan lebih tinggi dari capaian periode sebelumnya (naik 2,29 persen).

b. Beban Penyesuaian Nilai Investasi pada KPA DJKN

Beban penyesuaian nilai investasi KPA DJKN pada tahun 2025 sebesar Rp28.805.754.450,00. Sementara pada tahun 2024 juga tidak membukukan beban penyesuaian nilai investasi.

Beban penyesuaian nilai investasi tahun 2025 tersebut berasal dari beban PT Bina Karya sebesar Rp7.997.631.672,00 dan PT Tuban Petrochemical Industries sebesar Rp20.808.122.778,00 yang mencatatan rugi tahun berjalan. Nilai tersebut sesuai dengan porsi kepemilikan pemerintah pada PT Bina Karya dan PT Tuban Petrochemical Industries.

Pada periode Tahun 2025 laporan keuangan PT Bina Karya masih berstatus *Unaudited* 2025. PT Bina Karya pada *Unaudited* 2025 telah mencatatkan ekuitas positif sebesar Rp42.599.522.591,00 dari yang sebelumnya mencatatkan ekuitas negatif sebesar Rp34.490.760.583,00. Berdasarkan PMK Nomor 174 Tahun 2023, dalam hal terdapat nilai beban penyesuaian nilai investasi di LO tahun berjalan menyebabkan penyajian nilai *outstanding* Investasi permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo buku besar Investasi kredit), maka nilai *outstanding* negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK.

c. Beban Penyesuaian Nilai Investasi pada UAIP

Beban penyesuaian nilai investasi UAIP pada pada tahun 2025 sebesar Rp347.330.235.006,00. Sementara pada tahun 2024 tidak membukukan beban. Beban penyesuaian nilai investasi pada tahun 2025 berasal dari beban periode berjalan yang dibukukan oleh PTNBH Universitas Airlangga sebesar Rp48.543.231.475,00, Institut Teknologi Bandung sebesar Rp297.041.766.870,00, dan Universitas Negeri Yogyakarta sebesar Rp1.745.236.661,00.

d. Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Direktorat SMI

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Direktorat SMI pada pada tahun 2025 dan tahun 2024 sejumlah Rp0,00. Beban penyesuaian nilai investasi berasal dari beban amortisasi premium atas kepemilikan obligasi HTM pada BLU LPDP.

2. Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA BUN 999.08)

Beban Lain-Lain per 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp213.521.530.220.085,00 dan Rp221.773.148.742.500,00. Rincian atas Beban Lain-Lain untuk 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat	140.961.938.118	115.546.341.297
Beban Lain-Lain BUN Lainnya	196.723.184.688.389	216.276.752.618.467
Beban Lain-Lain	16.657.383.593.578	5.380.849.782.736
Jumlah	**213.521.530.220.085**	**221.773.148.742.500**

Beban ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat sebesar Rp140.961.938.118,00 terdapat pada:

a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar Rp126.767.248.733,00; dan
b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebesar Rp14.194.689.385,00.

Beban Lain-lain BUN lainnya sebesar Rp196.723.184.688.389,00, terdapat pada Satker Direktorat Jenderal Anggaran untuk pengakuan beban atas kekurangan penerimaan pada PT. Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo akibat penetapan JBT dan JBKP, serta kekurangan penerimaan pada PT. PLN (Persero) akibat penetapan tarif tenaga listrik.

Beban Lain-Lain sebesar Rp16.657.383.593.578,00 diantaranya sebesar Rp13.609.498.314.337,00 merupakan pengakuan beban kewajiban Pemerintah atas pelaksanaan kebijakan diskon biaya listrik sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-80/MK/AG/2026 tanggal 5 Mei 2026 yang menyatakan Pemerintah mengakui kewajiban atas program diskon biaya listrik periode Januari – Februari 2025 dengan nilai sebesar Rp13.609.498.314.337,00 sesuai Laporan Hasil Reviu BPKP nomor PE.12.03/LHP-155/D102/01/2025 tanggal 17 Oktober 2025 dan akan dicatat pada Belanja Lain-lain dengan klasifikasi jangka pendek yang penyelesaiannya dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Beban lain-lain sebesar Rp3.047.885.279.241,00 terdapat pada:

a. Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp781.204.572.372,00 merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Presiden;
b. Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp69.197.998.669,00 merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden;
c. Ditjen PPI Kemenkominfo sebesar Rp319.788.533.903,00 merupakan beban yang digunakan untuk bantuan operasional Layanan Pos Universal;
d. BP Batam sebesar Rp27.769.935.442,00 merupakan beban operasional kegiatan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun;
e. SKK Migas sebesar Rp1.849.923.190.468,00 merupakan beban operasional kegiatan SKK Migas.
f. MPPKP sebesar Rp1.048.387,00 merupakan beban operasional kegiatan MPPKP.

3. Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA BUN 999.99)

Beban Lain-lain dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp44.475.577.964.884,00 dan Rp33.732.897.089.678,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.742.680.875.206,00 atau naik 31,85 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Beban Lain-lain Pengelola Transaksi Khusus bila dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	**Satker Pengelola PNBP Pengelola Dana Pensiun, Askes, Program THT, Belanja PPN BI RTGS, Belanja Selisih Harga Beras Bulog (987361)**		
	Beban Jasa Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	143.206.449.377	119.748.067.230
2	**Satker Transaksi Khusus pada PNBP BUN (999257)**		
	Beban pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah	113.080.867.742	95.346.558.090
3	**Satker Transaksi Khusus pada KPPN KPH (999928)**		
	Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	3.175.554.507	8.908.096.804
4	**Satker Transaksi Khusus pada KPPN Jakarta III (999931)**		
	Belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik BUN		47.242.671
5	**Satker Transaksi Khusus Pengelola Kas Negara (999981)**		
	Belanja Rugi selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	546.691.031.356	718.164.669.744
6	**Satker Pengelola Migas (984572)**		
	Beban Pihak Ketiga Migas - PBJT atas Tenaga Listrik	1.534.725.561	
	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah		-
	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan Non PLN		-
	Beban Pihak Ketiga Migas-DMO Fee KKKS	7.602.999.160.059	8.481.627.613.119
	Beban Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN	7.432.137.955.623	8.164.044.154.037
	Beban Pihak Ketiga Migas-Underliftng KKKS	27.142.490.386.867	14.637.640.165.940
	Beban Pihak Ketiga Migas - Fee Penjualan	48.766.135.379	447.638.193.778

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
7	**Satker Pengelola Panas Bumi (984588)**		
	Beban pembayaran reimbursement PPN	204.900.203.458	30.734.471.326
	Beban pembayaran penggantian bonus produksi	82.997.372.974	81.852.764.970
	Beban pihak ketiga diestimasi – reimbursement PPN	446.599.796.542	306.964.375.046
	Beban pihak ketiga diestimasi – PBB panas bumi	430.838.809.356	375.813.805.470
	Beban pihak ketiga diestimasi – penggantian bonus produksi	25.065.309.108	15.954.641.713
	Beban diestimasi setoran kepada pemerintah	251.094.206.975	248.412.269.740
Jumlah		**44.475.577.964.884**	**33.732.897.089.678**

E.2.3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional pada tahun 2025 sebesar defisit Rp113.840.770.563.260,00 dan tahun 2024 sebesar Rp19.721.331.278.834,00. Surplus/(Defisit) kegiatan non operasional pada tahun 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp133.562.101.842.094,00 atau turun 677,25 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan tersebut berasal dari surplus/(defisit) Selisih Kurs belum terealisasi pada BA BUN Pengelola Utang. Defisit tahun 2025 berasal dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit kegiatan non operasional lainnya dan bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebagaimana rincian berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(970.572.056.121)	(684.927.964.114)
2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(30.216.347.500)	(129.960.500.000)
3	Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	(112.839.982.159.639)	20.536.219.742.948
Jumlah		**(113.840.770.563.260)**	**19.721.331.278.834**

E.2.3.1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar defisit Rp970.572.056.121,00 dan defisit Rp684.927.964.114,00. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar mengalami kenaikan defisit sebesar Rp285.644.092.007,00 atau defisitnya naik 41,70 persen bila dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kenaikan defisit ini terjadi utamanya karena kenaikan Beban Pelepasan Aset Non Lancar BA BUN Pengelola Transaksi Khusus yaitu pada satker Pengelola Aset KKKS SKK Migas.

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	125.649.859.003	64.958.841.329
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.096.221.915.124	749.886.805.443
Jumlah		**(970.572.056.121)**	**(684.927.964.114)**

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2025 berdasarkan BA BUN dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BA	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	15.873.915.032	(3.714.739.618)
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	(986.445.971.153)	(681.213.224.496)
Jumlah		**(970.572.056.121)**	**(684.927.964.114)**

1. Surplus Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2025 pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) sebesar Rp17.658.313.090,00 merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan

Mesin pada satker Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp17.571.239.890,00 dan dari SKK Migas sebesar Rp87.073.200. Sementara itu, Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain (999.08) sebesar Rp1.784.398.058,00 berasal dari satker BP Batam yang merupakan beban pelepasan asset.

2. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2025 terdapat pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) sebesar Rp986.445.971.153,00 terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp107.991.545.913,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp1.094.437.517.066,00.

   Untuk pendapatan dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	-	-
2	Pengelolaan Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI	8.795.505.200	1.943.083.500
3	Pengelolaan Aset Lain-lain	-	-
4	Pengelolaan BMN eks BMN *Idle*	-	-
5	Pengelolaan BMN Eks Pertamina	-	202.220.000
6	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada DJKN, KEMENKEU	-	-
7	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada PPBMN, KESDM	10.986.792.300	11.284.851.770
8	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada SKK MIGAS	83.897.695.413	18.435.149.059
9	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada BPMA, KESDM	-	-
10	Pengelolaan BMN PKP2B pada PPBMN, KESDM	4.311.553.000	32.733.099.000
11	Pengelolaan Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	-
12	Pengelolaan Piutang kepada Yayasan Supersemar	-	-
13	Pengelolaan Penggantian Biaya dan Margin IP PEN	-	-
Jumlah		**107.991.545.913**	**64.598.403.329**

   a. Pada UAKPA Pengelolaan Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI, Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tahun 2025 yaitu sebesar Rp8.795.505.200,00.

   b. Pada UAKPA BUN BMN Hulu Migas/KKS pada PPBMN, Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tahun 2025 dan 2024 yaitu sebesar Rp10.986.792.300,00 dan Rp11.284.851.770,00 yang berasal dari penjualan BMN melalui lelang pada KPKNL setempat dengan rincian sebagai berikut.
      1) Material Persediaan pada KKKS Repsol Andaman B.V sebesar Rp3.341.627.000,00.
      2) Harta Benda Modal pada KKKS Repsol Andaman B.V; sebesar Rp17.597.000,00.
      3) Material Persediaan pada KKKS Medco CBM Sekayu sebesar Rp1.757.190.400,00.
      4) Harta Benda Inventaris pada KKKS PHE Metan Tanjung II sebesar Rp18.574.000,00.
      5) Material Persediaan pada KKKS PHE Metan Tanjung II sebesar Rp121.974.100,00.
      6) Material Persediaan pada Eni Bukat sebesar Rp2.355.383.000,00.
      7) Material Persediaan pada Eni Bukat sebesar Rp509.462.000,00.
      8) Harta Benda Modal pada Eni Bukat sebesar Rp11.121.800,00 dan
      9) Material Persediaan pada Eni Bukat sebesar Rp2.853.863.000,00.

   c. Pada UAKPA BUN BMN Hulu Migas/KKS pada SKK Migas, Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp83.897.695.413,00 dan Rp18.435.149.059,00 yang berasal dari pendapatan pelepasan aset dari KKKS berikut ini.

(dalam rupiah)

No.	Nama KKKS	Jenis Aset	Risalah Lelang	
			Tanggal	Nilai Terjual
1	Medco Group Batch 2 (Medco E&P Natuna Ltd., PT Medco E&P Indonesia Ltd., Medco E&P Grissik Ltd., dan Medco Energi Bangkanai Ltd.)	HBM	24/12/2024	1.187.311.000

No.	Nama KKKS	Jenis Aset	Risalah Lelang	
			Tanggal	Nilai Terjual
2	Medco E&P Natuna	HBM	11/02/2025	52.725.000
3	Pertamina EP Filed Lirik	HBM	14/03/2025	14.148.000
4	Pertamina EP Field Cepu	MP	11/03/2025	58.316.000
5	PT Pertamina Hulu Rokan	HBM dan MP	16/04/2025	356.565.000
6	PT Pertamina Hulu Rokan	HBM	28/04/2025	76.050.000
7	PT Pertamina Hulu Rokan	HBM dan MP	04/06/2025	23.726.821.000
8	PT Pertamina Hulu Mahakam	MP	04/06/2025	3.272.305.000
9	PT Pertamina EP Field Jatibarang	MP	13/06/2025	201.542.000
10	Exxon Mobile Cepu Limited	HBM	11/06/2025	117.581.000
11	PHE Ogan Komering	MP	24/06/2025	117.368.000
12	JOBP-Medco E&P Tomori Sulawesi	MP	12/06/2025	2.220.885.000
13	Medco E&P Natuna Ltd. dan Medco E&P Grissik Ltd.	MP	11/06/2025	818.495.000
14	Petrogas (Basin)	MP	03/07/2025	24.425.013
15	Medco E&P Natuna Ltd.	HBM	07/08/2025	2.021.155.000
16	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	MP	07/08/2025	2.827.157.000
17	PHE OSES	MP	03/09/2025	16.177.000
18	PT Pertamina Hulu Rokan	HBM dan *Scrap* Non Aset	05/02/2025	7.506.143.000
19	PT Pertamina Hulu Rokan	HBM dan *Scrap* Non Aset	19/02/2025	530.085.000
20	BP Berau	MP dan *Scrap* Non Aset	28/02/2025	2.378.089.000
21	BP Berau	HBM dan *Scrap* Non Aset	28/02/2025	4.237.834.000
22	Medco Grissik dan Rimau	MP dan *Scrap* Non Aset	16/05/2025	598.227.000
23	Petrogas (Basin) dan Petrogas (Island)	HBM dan MP	30/08/2025	1.659.707.000
24	Kangean Energy Indonesia Ltd.	HBM	30/08/2025	26.608.700
25	PT Pertamina EP	MP	03-Oct-25	37.778.000
26	PT Pertamina Hulu Mahakam dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	HBM dan MP	28-Nov-25	6.449.974.100
27	PT Pertamina Hulu Rokan	HBM	5-Des-25	19.032.685.000
28	PetroChina International Jabung Ltd.	HBM dan MP	12-Des-25	2.620.417.000
29	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (lelang ulang)	HBM, HBI, dan MP	15-Des-25	1.247.502.000
30	PT Pertamina Hulu Energi OSES dan Energy Equtiy Epic Sengkang	HBM dan MP	15-Des-25	463.619.600
Jumlah				**83.897.695.413**

d. Pada UAKPA BUN BMN PKP2B, Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.311.553.000,00 dan Rp32.733.099.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Lelang pada PT Adaro Indonesia dengan nilai sebesar Rp3.797.078.000,00 sesuai Risalah Lelang nomor 41/12.03/2025-01 tanggal 26 Februari 2025 dengan nomor NTPN 17ED86U8F7IE3JRQ;

2) Lelang pada PT Multi Harapan Utama dengan nilai sebesar Rp6.609.000,00 sesuai Risalah Lelang nomor 127/13.02/2025-01 tanggal 14 Agustus 2025 dengan nomor NTPN D2A0548WOCOBQTR

3) Penjualan Lelang BMN pada PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp507.866.000,00, dengan bukti setor NTPN 34B236U8F89UDE21 tanggal 16 Oktober 2025, yang telah dicatat pada SPAN bulan Oktober 2025 sesuai Risalah Lelang Nomor RL 87/13.04/2025-01 tanggal 16 Oktober 2025.

Sementara itu untuk Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada BA BUN 999.99, pada 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.094.437.517.066,00 dan Rp745.811.627.825,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	68.791.552.000	79.641.246.000
2	Pengelolaan Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI	1.101.930.000	-
3	Pengelolaan Aset Lain-lain	1.094.302.017	465.031.402
4	Pengelolaan BMN eks BMN *Idle*	1.136.705.713	148.374.446
5	Pengelolaan BMN Eks Pertamina	-	-
6	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada DJKN, KEMENKEU	-	-
7	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada PPBMN, KESDM	245.688.997.390	109.053.692.222
8	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada SKK MIGAS	776.055.426.604	392.397.722.739
9	Pengelolaan BMN Hulu Migas pada BPMA, KESDM	-	-
10	Pengelolaan BMN PKP2B pada PPBMN, KESDM	568.603.342	164.105.561.016
11	Pengelolaan Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	-
12	Pengelolaan Piutang kepada Yayasan Supersemar	-	-
13	Pengelolaan Penggantian Biaya dan Margin IP PEN	-	-
Jumlah		**1.094.437.517.066**	**745.811.627.825**

a. Pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, hingga Tahun 2025 terdapat beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp68.791.552.000,00 karena hingga tanggal tahun 2025 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T dengan cara pelepasan kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2024 mengenai penyelesaian ABMA/T dengan cara pelepasan kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi Tahun 2025.
b. Pada UAKPA BUN TK Pengelolaan Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI, Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.101.930.000,00.
c. Pada UAKPA BUN TK Aset Lain-lain, terdapat Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.094.302.017,00, yang merupakan nilai barang gratifikasi yang dijual dan dihibahkan ke yayasan, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Total
1	Penjualan Barang Gratifikasi 10 Januari 2025	31.990.175	
2	Penjualan Barang Gratifikasi 2 Mei 2025	54.793.600	
3	Penjualan Barang Gratifikasi 20 Juni 2025	5.816.000	
4	Penjualan Barang Gratifikasi 20 Juni 2025	13.790.386	
5	Penjualan Barang Gratifikasi 20 Juni 2025	7.198.000	
6	Penjualan Barang Gratifikasi 20 Juni 2025	2.970.000	
7	Penjualan Barang Gratifikasi 20 Juni 2025	5.040.000	
8	Penjualan Barang Gratifikasi 10 Juli 2025	39.822.693	
9	Penjualan Barang Gratifikasi 22 Agustus 2025	48.268.145	
10	Penjualan Barang Gratifikasi 26 September 2025	51.828.007	
11	Penjualan Barang Gratifikasi 17 Oktober 2025	5.760.000	
12	Penjualan Barang Gratifikasi 7 November 2025	11.494.000	
13	Penjualan Barang Gratifikasi 7 November 2025	37.924.999	
14	Penjualan Barang Gratifikasi 7 November 2025	2.650.000	
15	Penjualan Barang Gratifikasi 20 November 2025	104.839.491	
16	Penjualan Barang Gratifikasi 15 Oktober 2025	550.000	
Jumlah Penjualan Gratifikasi			**424.735.496**
17	Hibah Barang Gratifikasi	92.450.475	
18	Hibah ke Desa Pantai Bahagia	157.757.086	
19	Hibah ke Pemda Hamahera imur	29.628.000	
Jumlah Hibah Gratifikasi			**279.835.561**
20	PSP Barang Gratifikasi	241.655.931	
21	Pemusnahan Barang Gratifikasi	91.313.629	
22	Pemusnahan Barang Gratifikasi	56.761.400	

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Total
Jumlah Pemusnahan Gratifikasi			**389.730.960**
Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar			**1.094.302.017**

d. Pada UAKPA BUN TK BMN *Idle*, Selama periode tahun 2025, terdapat beban kerugian pelepasan aset sebesar Rp1.136.705.713,00 yang berasal dari:
   1) Hibah 1 (satu) bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai buku Rp556.950.000,00 pada KPKNL Jambi, sesuai dengan BAST Hibah Nomor BAST-01/KNL.0401/2025 tanggal 09 April 2025.
   2) Hibah 1 (satu) bidang Tanah Persil Lainnya dengan nilai buku Rp58.500.000,00 pada KPKNL Banjarmasin, sesuai BAST Hibah Nomor BA-23/KNL.1203/2025 tanggal 24 November 2025.
   3) Penghapusan 4 (empat) unit Bangunan Lainnya dengan nilai buku total Rp33.452.547,00 pada KPKNL Pamekasan, sesuai Keputusan Penghapusan Nomor 35/MK/KN.4/2025 tanggal 18 September 2025.
   4) Penghapusan 13 (tiga belas) unit Bangunan Lainnya dengan nilai buku total Rp479.361.166,00 pada KPKNL Singkawang, sesuai keputusan Penghapusan nomor KMK 27/MK/KN.4/2025 tanggal 08 Juli 2025.
   5) Penghapusan (dua) unit Bangunan Lainnya dengan nilai buku total Rp8.442.000,00 pada KPKNL Makassar, sesuai keputusan Penghapusan nomor KMK 56/MK/KN.4/2025 tanggal 31 Desember 2025.

e. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada PPBMN, saldo Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp245.688.997.390,00 dan Rp109.053.692.222,00 berasal dari BMN berupa:
   1) Material Persediaan pada KKKS Eni Bukat Limited sebesar Rp152.187.881.494,00;
   2) Material Persediaan pada KKKS CBM Sekayu sebesar Rp6.504.257.304,00;
   3) Material Persediaan pada KKKS PHE Metana Tanjung II sebesar Rp602.290.037,00; dan
   4) Material Persediaan pada KKKS Repsol Andaman sebesar Rp86.394.568.555,00.

f. Pada Pengelolaan BMN Hulu Migas pada SKK MIGAS, saldo Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp776.055.426.604,00 dan Rp392.397.722.739,00 yang berasal dari nilai perolehan material persediaan yang telah laku dijual.

g. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN PKP2B, Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp568.603.342,00 dan Rp164.105.561.016,00 dengan rincian sebagai berikut
   1) Penghapusan pada PT Multi Harapan Utama sesuai Surat Persetujuan Penghapusan Menteri Keuangan Nomor S-329/MK/KN/2025 tanggal 8 Mei 2025 yang ditindaklanjuti
   2) dengan SK Menteri ESDM Nomor 588.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 21 Mei 2025 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama berupa *Civil Work* LKCT di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebesar Rp566.727.663,00.
   3) Penghapusan pada PT Arutmin Indonesia sesuai SK Menteri ESDM Nomor 980.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Non Tanah sebesar Rp1.811.500,00.
   4) Koreksi kurang nilai wajar rupiah BMN pada PT Kaltim Prima Coal dikarenakan penilaian ulang atas 31 (tiga puluh satu) unit BMN sesuai LHIP nomor S-186/KN.2/2025 tanggal 22 Juli 2025 sebesar Rp64.179,00.

E.2.3.2. Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar defisit Rp30.216.347.500,00 dan defisit Rp129.960.500.000,00. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2025 mengalami kenaikan defisit sebesar Rp99.744.152.500,00 atau kenaikan defisit 76,75 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2024 atas selisih antara *Gain* dan *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Debtswitch*). Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2025 berasal dari BA BUN Pengelola Utang (999.01) yang merupakan Beban *Pembayaran Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Debtswitch*) baik dalam rupiah maupun valas. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2024 dapat dilihat pada rincian berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan *gain on bond redemption* atas pembelian kembali obligasi negara jangka panjang	5.298.500.000	30.359.000.000
Belanja *loss on bond redemption* atas pembelian kembali obligasi negara	(35.514.847.500)	(160.319.500.000)
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**(30.216.347.500)**	**(129.960.500.000)**

E.2.3.3. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar defisit Rp112.839.982.159.639,00 dan Rp20.536.219.742.948,00. Surplus/(defisit) ini mengalami penurunan sebesar Rp133.376.201.902.587,00 atau turun 649,47 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Defisit sebesar Rp112.839.982.159.639,00 terdiri dari kerugian selisih kurs belum terealisasi sebesar defisit Rp145.898.281.231.567,00 dan surplus kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp33.058.299.071.928,00. Rincian Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BA	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
999.01	Pengelola Utang	(154.239.729.717.698)	(14.792.236.659.517)
999.02	Pengelola Hibah	-	404.410.273
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	1.935.737.421.410	1.305.558.944.251
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	1.894.490.238.932	(183.794.680.921)
999.05	Pengelola Transfer ke Daerah	18.349.012.982	76.857.880.275
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	290.292.902.460	39.684.616.354
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	4.854.132.410	3.956.335.276
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	37.256.023.849.865	34.085.788.896.954
Jumlah		**(112.839.982.159.639)**	**20.536.219.742.948**

Surplus/(Defisit) Dari Selisih Kurs Belum Terealisasi

Defisit Dari Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar defisit Rp145.898.281.231.567,00 apabila dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BA	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
999.01	Pengelola Utang	(154.239.729.717.698)	(14.792.236.659.517)
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	1.987.940.076.866	1.312.810.925.340
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	1.894.490.238.928	(183.794.680.921)
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	(123.888.150)	(157.995.900)
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	4.459.142.058.487	9.059.555.809.807
Jumlah		**(145.898.281.231.567)**	**(4.603.822.601.191)**

1. BA 999.01

Defisit dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Bagian Anggaran BUN Pengelola Utang (999.01) pada 2025 dan 2024 masing-masing sebesar defisit Rp154.239.729.717.698,00 dan defisit Rp14.792.236.659.517,00. Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BA BUN 999.01 pada 2025 terdiri dari Pendapatan Selisih Kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.772.721.767.050,00 yang merupakan pendapatan atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban dengan Beban Selisih Kurs yang belum terealisasi sebesar Rp156.012.451.484.748,00 yang merupakan beban atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban. Kenaikan pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi dan penurunan beban kerugian selisih kurs yang belum terealisasi disebabkan utamanya karena kenaikan nilai tukar Rupiah pada mata uang asing pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024. Pendapatan dan Beban selisih kurs dapat dirinci antara selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN sebagaimana tabel berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	**1.772.721.767.050**	**62.599.298.888.766**
Surat Berharga Negara	648.859.680.000	5.948.610.220.000
Pinjaman	1.123.862.087.050	56.650.688.668.766
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	**156.012.451.484.748**	**77.391.535.548.283**
Surat Berharga Negara	77.238.077.237.025	54.925.854.609.000
Pinjaman	78.774.374.247.723	22.465.680.939.283
Jumlah	**(154.239.729.717.698)**	**(14.792.236.659.517)**

2. BA 999.03

Surplus/(Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.987.940.076.866,00 dan sebesar Rp1.312.810.925.340,00. Surplus/(Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi terdiri dari Pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan Beban Kerugian selisih kurs yang belum terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	1.989.205.107.873	1.313.625.868.264
2	Beban selisih kurs belum terealisasi	(1.265.031.007)	(814.942.924)
Jumlah		**1.987.940.076.866**	**1.312.810.925.340**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional merupakan Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi pada UAKPA Direktorat Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan (Dit. KMKB – DJSPSK). Pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi masing-masing sebesar Rp1.989.205.107.873,00 dan Rp1.313.625.868.264,00. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.989.205.107.873,00 berasal dari peningkatan nilai investasi sebesar yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai tukar.

Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi pada Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Lembaga Keuangan Internasional	Nilai
Asian Development Bank (ADB)	548.098.572.644
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	140.692.979.343
International Development Association (IDA)	77.214.829.969
International Finance Corporation (IFC)	174.138.715.000
Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	2.138.172.660
Islamic Development Bank (IsDB)	513.269.516.406
International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	1.159.780.000
The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	467.700.361

Lembaga Keuangan Internasional	Nilai
International Fund for Agricultural Development (IFAD)	52.864.917.000
Common Fund for Commodities (CFC)	1.205.287.419
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	12.522.537.071
Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	17.227.800.000
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	378.392.300.000
ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	67.560.000.000
International Rubber Consortium Limited (IRCo)	2.252.000.000
Jumlah	**1.989.205.107.873**

Beban selisih kurs belum terealisasi pada tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp1.265.031.007,00 dan Rp814.942.924,00. Beban kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar defisit Rp1.265.031.007,00 berasal dari kenaikan nilai kewajiban jangka panjang pemerintah yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai tukar. Rincian beban selisih kurs tersebut adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	LKI	Tahun 2025	Tahun 2024	Beban Selisih Kurs
1	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	18.977.500.960	18.338.485.826	(639.015.134)
2	Common Fund for Commodities (CFC)	4.385.045.018	3.759.029.144	(626.015.874)
Jumlah		**23.362.545.978**	**22.097.514.970**	**(1.265.031.007*)**

*) Selisih Rp1 karena pembulatan

3. BA 999.04

Selisih Kurs Belum Terealisasi untuk periode 2025 dan 2024 masing-masing sebesar surplus Rp1.894.490.238.928,00 dan defisit Rp183.794.680.921,00. Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi berasal dari Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi dan Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi.

Kenaikan surplus/defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi merupakan dampak dari proses penjabaran saldo (*outstanding*) piutang pokok pemberian pinjaman dalam mata uang asing ke dalam rupiah pada setiap periode pelaporan. Penjabaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca masing-masing periode pelaporan.

Perbedaan antara nilai penjabaran pada periode berjalan dengan nilai penjabaran sebelumnya menimbulkan selisih kurs belum terealisasi. Apabila hasil penjabaran dengan kurs tengah pada tanggal Neraca menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai penjabaran sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang menambah nilai saldo piutang pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca. Sebaliknya, apabila menghasilkan nilai yang lebih rendah, maka selisih tersebut diakui sebagai beban selisih kurs belum terealisasi yang mengurangi nilai saldo piutang pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	8.376.497.928.258	5.391.957.772.443
2	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	6.482.007.689.330	5.575.752.453.364
Jumlah Surplus (Defisit)		**1.894.490.238.928**	**(183.794.680.921)**

4. BA 999.08

Surplus/(Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada tahun 2025 defisit sebesar Rp123.888.150,00 dan pada tahun 2024 defisit sebesar Rp157.995.900,00. Defisit dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Tahun 2025 mengalami

penurunan defisit sebesar Rp34.107.750,00 atau turun 21,59 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Nilai pada 2025 tersebut merupakan Beban Kerugian Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi sebesar Rp123.888.150 pada satker ICSID Sekretariat Jenderal.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	-
2	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	123.888.150	157.995.900
Jumlah Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		**(123.888.150)**	**(157.995.900)**

5. BA 999.99

Selanjutnya Surplus/(Defisit) dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.459.142.058.487,00 dan Rp9.059.555.809.807,00. Surplus/(Defisit) dari Selisih Kurs Sebelum Realisasi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.600.413.751.320,00 atau turun 50,78 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Surplus dari Selisih Kurs Belum Terealisasi terdiri dari Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp5.214.883.593.267 yang merupakan Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D dan Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp756.083.078.524,00 merupakan Beban Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D dan *Exotic Currency*. Pendapatan dan Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025
1	**Satker Pengelola TK KPPN KPH**	**316.385**
	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	199.018.687.739
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(199.018.371.354)
2	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta I**	**(24.517.205)**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	277.224.048
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(301.741.253)
3	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta II**	**4.245.485**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	9.054.596
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(4.809.111)
4	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta III**	**2**
	Pendapatan kerugian selisih kurs belum terealisasi	75.046.091
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(75.046.089)
5	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta IV**	**(3)**
	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	3.468.611
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(3.468.614)
6	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta V**	**3**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	139.405.885
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(139.405.882)
7	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta VI**	**629.552**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	820.010
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(190.458)
8	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta VII**	**1.937.320**
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	1.937.320
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-
9	**Satker Pengelola Kas Negara**	**158.703.411.204**
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	331.455.836.413
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(172.752.425.209)
10	**Satker Pengelola Suspen Penerimaan**	**(22.918.340.046)**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	3.144.986.383
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(26.063.326.429)
11	**Satker Pengelola BLBI**	**2.546.023.749.210**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.546.023.749.210
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-

No.	Uraian	Tahun 2025
12	**Satker KKKS PBMN**	**9.184.680.988**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	9.184.680.988
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-
13	**Satker KKKS SKK Migas**	**1.112.938.961.277**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.112.938.961.277
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-
14	**Satker KKKS BPMA**	**52.636.400.514**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	52.636.400.514
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-
15	**Satker Yayasan Supersemar**	**173.031.399.321**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	173.031.399.321
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-
16	**Satker Pengelola Migas**	**430.845.761.620**
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	786.984.636.495
	Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi	(356.138.874.875)
17	**Satker DJPSPK**	**(1.286.577.140)**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	298.842.110
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(1.585.419.250)
Jumlah		**4.459.142.058.487**

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp33.058.299.071.928,00 sementara tahun 2024 sebesar Rp25.140.042.344.139,00 apabila dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BA	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
999.01	Pengelola Utang	-	-
999.02	Pengelola Hibah	-	404.410.273
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	(52.202.655.456)	(7.251.981.089)
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	4	3
999.05	Pengelolaan Transfer ke Daerah	18.349.012.982	76.857.880.275
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	290.292.902.460	39.684.616.354
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	4.978.020.560	4.114.331.176
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	32.796.881.791.378	25.026.233.087.147
Jumlah		**33.058.299.071.928**	**25.140.042.344.139**

6. BA 999.01

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Utang (999.01) pada 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0.

7. BA 999.02

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada BA BUN Pengelola Hibah (999.02) terdiri atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp404.410.273,00. Surplus tersebut turun 100 persen atau turun Rp404.410.273,00 jika dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada 2024 berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp404.410.273,00 yang seluruhnya merupakan Pendapatan PNBP Lainnya berupa penerimaan kembali belanja hibah tahun anggaran yang lalu pada Satker 985252 (LDKPI).

8. BA 999.03

Surplus (Defisit) dari kegiatan Non Operasional lainnya pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar defisit Rp52.202.655.456,00 dan sebesar defisit Rp7.251.981.089,00. Adapun rincian pendapatan dan beban non operasional lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan penyesuaian nilai investasi hasil konfirmasi	3.888.071.386	3.024.045.380
2	Beban penyesuaian nilai investasi	(56.090.726.842)	(10.276.026.469)
Jumlah		**(52.202.655.456)**	**(7.251.981.089)**

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya merupakan Pendapatan penyesuaian nilai investasi hasil konfirmasi pada LKI UAKPA Dit. KMKB – DJSPSK (984393). Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp3.888.071.386,00 dan Rp3.024.045.380,00. Pengakuan pendapatan merupakan pengakuan selisih lebih antara nilai rupiah dalam konfirmasi LKI dengan nilai rupiah tercatat dalam pembukuan pemerintah.

Beban kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	KPA Dit. KMKB – DJSPSK	-	(521.370.292)
2	KPA LPDB	(56.090.726.842)	(9.754.656.177)
Jumlah		**(56.090.726.842)**	**(10.276.026.469)**

Pada KPA Dit. KMKB - DJPSPK, beban dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan defisit Rp521.370.292,00. Beban dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2024 berasal dari selisih kurang hasil konfirmasi atas investasi pada International Development Association (IDA).

Sementara itu, pada KPA LPDB, Beban dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar defisit Rp56.090.726.842,00 dan defisit Rp9.754.656.177,00. Nilai tersebut merupakan:

a. piutang koperasi yang mendapatkan Penghapusan Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebanyak 21 koperasi berdasarkan Keputusan Direksi LPDB dan Keputusan Menteri Keuangan;

b. piutang koperasi yang telah diserahkan penanganan piutang kepada pihak KPK, maka LPDB melakukan hapus buku sesuai dengan surat KPK Nomor: B/1759/EKS.01.08/26/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 Hal Informasi Piutang Uang Pengganti; dan

c. Piutang koperasi yang telah diserahkan penanganan piutang kepada Pengadilan Negeri Makassar, maka LPDB Koperasi melakukan hapus buku sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 106/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks.

Pencatatan atas penghapusan piutang koperasi tersebut sesuai dengan surat dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Nomor: S-14/PB/PB.6/2024 tanggal 25 Juni 2024 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 22: Akuntansi *Crash Program* Piutang Dana Bergulir.

Adapun rincian nilai beban dari kegiatan non operasional lainnya pada BLU LPDB Adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025
1	Beban penghapusan piutang dana bergulir atas penanganan piutang oleh KPK (Kopanti)	98.333.553.000
2	Penghapusan penyisihan piutang dana bergulir atas penanganan piutang oleh KPK (Kopanti)	(43.147.198.160)

No.	Uraian	Tahun 2025
3	Beban penghapusan piutang dana bergulir atas PSBDT	2.801.940.659
4	Penghapusan penyisihan piutang dana bergulir atas PSBDT	(2.397.643.151)
5	Beban penghapusan piutang dana bergulir Sri Wigati yang semula diakui sebagai penghapusan serah terima dengan kejaksaan menjadi *Crash Program* Tahun 2024	535.315.852
6	Penghapusan penyisihan piutang dana bergulir Sri Wigati yang semula diakui sebagai penghapusan serah terima dengan kejaksaan menjadi *Crash Program* Tahun 2024	(835.241.358)
7	Beban penghapusan penyisihan piutang dana bergulir atas penghapusan piutang atas uang pengganti Kejaksaan	8.666.666.631
8	Beban penyisihan piutang dana bergulir atas penghapusan piutang atas uang pengganti Kejaksaan	(7.866.666.631)
Jumlah		**56.090.726.842**

9. BA 999.04

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4,00 dan Rp3,00. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Pembulatan (597111) berasal dari akumulasi pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah.

10. BA 999.05

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional 2025 sebesar Rp18.349.012.982,00. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp58.508.867.293,00 atau turun sebesar 76,13 persen apabila dibandingkan dengan pendapatan dari kegiatan non operasional periode yang sama di Tahun 2024 Rp76.857.880.275,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional berasal dari transaksi Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu yang seluruhnya berasal dari satker KPPN selaku penyalur Dana Transfer Khusus.

Nilai diatas belum termasuk reklasifikasi jenis setoran dari Pendapatan TAYL menjadi Pengembalian Belanja Tahun Berjalan pada KPPN Jakarta I sebesar Rp100.327.426,00.

11. BA 999.07

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (999.07) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Belanja Subsidi untuk Periode 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp290.292.902.460,00 dan Rp39.684.616.354,00. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Belanja Subsidi untuk Periode 2025 sebesar Rp290.292.902.460,00 terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp438.708.400,00 pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Kementerian UMKM sebesar Rp288.533.063.957,00, Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.286.612.925,00, serta Kementerian Keuangan sebesar Rp301.225.578,00.

12. BA 999.08

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.978.020.560 dan Rp4.114.331.176,00. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp863.689.384,00 atau naik 20,99 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional BUN Pengelola Belanja Lain-lain berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp4.978.020.560,00. Secara detil adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Kemenko Perekonomian (MMPKP)	19.547.732	3.713.267.023
2	Kementerian Kominfo	2.675.337.098	-
3	BP Batam	2.140.648.248	136.411.500
4	SKK Migas	115.662.482	192.847.653
5	Kementerian Sekretariat Negara (Istana Kepresidenan)	16.100.000	71.805.000
6	Otoritas Jasa Keuangan	10.725.000	
Jumlah		**4.978.020.560**	**4.114.331.176**

13. BA 999.99

Selanjutnya Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.796.881.791.378,00 dan Rp25.026.233.087.147,00. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.770.648.704.231,00 atau naik 31,05 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp45.254.629.192.814,00 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp12.457.747.401.436,00.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) dirinci sebagai berikut:

a. Pada UAKPA BUN TK DJPb Satker Pensiun (987361), Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah Rp281.155.984.959,00.

b. Pada UAKPA TK Aset Lain-Lain, pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp826.848.445,00 yang merupakan nilai dari penerimaan barang gratifikasi yang diserahkan oleh KPK kepada DJKN pada Tahun 2025.

c. Pada UAKPA BUN BMN PKP2B, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9.698.108.898,00 dan \ Rp117.003.304.577,00 yang merupakan penambahan aset baru pada PT Berau Coal sebesar Rp9.698.108.898,00 yang terdiri dari 56 aset baru serta 1 line item kapitalisasi pada 28 Februari dan 30 April 2025 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN PKP2B PT Berau Coal Semester I tahun 2025 Nomor 233.BA/BN.10/SJA2.2/2025 tanggal 8 Juli 2025. Sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2022, pembelian yang dilakukan oleh PT Berau Coal selaku pemegang IUPK pada tahun 2025 tetap diakui dan dicatat sebagai Barang Milik Negara.

d. Pada Pengelolaan BMN Hulu Migas pada SKK MIGAS, Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp44.893.016.476.359,00 dan Rp33.716.767.037.052,00 yang berasal dari penambahan nilai Aset Lainnya berupa HBM, HBI dan MP sebagai berikut:

   1) HBM sebesar Rp22.395.465.786.989,00;
   2) HBI sebesar Rp6.578.181.942,00; dan
   3) MP sebesar Rp22.490.972.507.428,00.

e. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada BPMA, saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp69.569.774.775,00 dan Rp78.170.134.930,00 merupakan pengadaan aset HBM KKKS Aceh Energy dan Medco E&P Malaka, pengadaan aset Tanah dan Pembelian MP pada KKKS Medco E&P Malaka serta pengadaan aset HBI pada KKKS Pema Global Energi.

f. Pada UAKPA BUN DJSPSK (984438) saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah Rp361.999.378,00 yang merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dari transaksi pengembalian dana dari USAID *trust fund* karena berdasarkan Surat USAID nomor *Letter* 135 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa program USAID telah diberhentikan.

Sementara untuk Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) adalah sebesar Rp12.457.747.401.436,00 dan Rp9.114.909.917.873,00 yang berasal dari:

a. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada SKK Migas, Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp12.415.025.635.382,00 dan Rp9.080.482.268.092,00.

b. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada BPMA, Saldo beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp42.721.766.056,00 dan Rp34.427.649.798,00 merupakan Pemakaian *Non Capital* MP pada KKKS Medco E&P Malaka.

c. Pada UAKPA BUN TK DJA Migas, Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar defisit Rp2.

E.2.4. Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah nihil.

E.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan-LO. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema burden sharing termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian terlampir pada Lampiran LE1.

2. Pada Tahun 2025 terdapat pelaksanaan konversi sebanyak 19 (sembilan belas) *loan* ADB, 8 (delapan) *loan* dengan mata uang JPY dan 11 (sebelas) *loan* dengan mata uang JPY yang dikonversi ke mata uang IDR sebagaimana dengan rincian terlampir pada Lampiran LE2.

3. Pendapatan Hibah sebesar Rp18.346.886.424.369,00 (3.935 register) terdiri dari realisasi pendapatan hibah yang registernya diterbitkan pada tahun 2025 sebesar Rp8.129.231.238.427,00 (3.468 register), realisasi pendapatan hibah yang registernya diterbitkan pada tahun 2024 sebesar Rp1.032.210.341.594,00 (106 register), dan realisasi pendapatan hibah yang registernya diterbitkan sebelum tahun 2024 sebesar Rp9.185.444.844.348,00 (361 register).

   Dari keseluruhan register yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan nilai komitmen hibah ekuivalen sebesar Rp19.495.747.779.323,00, masih terdapat nilai hibah yang tidak terealisasi pengesahannya hingga Tahun 2025 sebesar Rp7.518.536.828.303,00 mengingat terdapat hibah yang kegiatannya bersifat *multiyears* dan/atau hibah yang kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun realisasinya tidak sebesar nilai komitmen.

   Dari keseluruhan register yang diterbitkan pada tahun 2025 dengan nilai komitmen hibah ekuivalen sebesar Rp17.696.379.010.968,00, masih terdapat nilai hibah yang tidak terealisasi pengesahannya hingga Tahun 2025 sebesar Rp9.567.147.772.541,00 mengingat terdapat hibah yang kegiatannya bersifat *multiyears* dan/atau hibah yang kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun realisasinya tidak sebesar nilai komitmen.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UAPBUN-AP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bertindak sebagai konsolidator Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN yang terdiri dari Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat (UAKBUN-P) serta Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah KPPN Khusus.

Konsolidasi Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN dilakukan atas seluruh angka realisasi bersih (neto) penerimaan dan pengeluaran kas yang dibukukan oleh KPPN dan Dit PKN selaku Kuasa BUN, baik berasal dari transaksi BA BUN maupun transaksi BA Kementerian Negara/Lembaga.

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp629.015.216.812.398,00 yang merupakan saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2024. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas per 1 Januari 2024 sebesar Rp606.014.272.515.831,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp23.000.944.296.567,00. Rincian Saldo Awal Kas per 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	1 Januari 2025	1 Januari 2024
Kas di BUN Pusat	350.032.352.563.093	342.835.699.040.576
Kas di KPPN	697.379.362.618	5.128.787.424.755
Kas pada BLU	96.973.278.750.758	92.393.578.520.721
Kas di K/L dari Hibah	10.552.112.773.536	13.992.553.217.607
Kas Escrow	160.823.830.777.318	148.155.907.631.641
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	9.936.262.585.075	3.507.746.680.531
Saldo Awal Kas	**629.015.216.812.398**	**606.014.272.515.831**

F.1.2 Kenaikan/Penurunan Kas Setelah Koreksi Pembukuan

Kenaikan (Penurunan) Kas dari berbagai aktivitas Pemerintah pada TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(243.903.591.143.629)	(154.149.780.567.127)	58,23
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(712.073.591.028.981)	(414.403.152.941.181)	71,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	828.373.227.856.597	614.280.048.971.953	34,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(44.162.059.371.134)	24.391.505.836.682	(281,06)
Koreksi:	-	-	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan	1.750.975.244.942	9.263.322.996.240	(81,10)
Penggunaan SAL	(93.146.980.793.000)	(56.381.000.000.000)	65,21
Kenaikan/Penurunan Kas Setelah Koreksi Pembukuan	**(263.162.019.235.205)**	**23.000.944.296.567**	**(1244,14)**

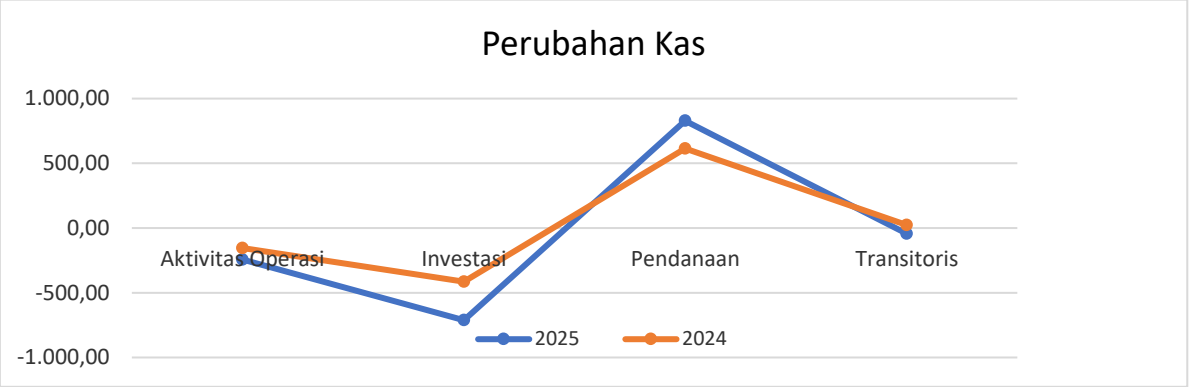

Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp1.750.975.244.942,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi SILPA	2.347.429.214.088
2	Koreksi Selisih Kurs	147.916.719.129
3	Koreksi Pembukuan	(744.370.688.275)
Jumlah Akumulasi Pembukuan		**1.750.975.244.942**

Penjelasan Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp1.750.975.244.942,00 terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp2.347.429.214.088,00 terdiri dari:

   a. Pengembalian atas Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu yang berasal dari akun:

   (dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (311212)	27.768.310.051
2	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung (311911)	6.204.200.831.299
Jumlah Pengembalian Pendapatan TAYL		**6.231.969.141.350**

   b. Penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp8.579.398.355.438,00.

2. Koreksi Selisih Kurs sebesar Rp147.916.719.129,00 merupakan saldo selisih kurs belum terealisasi setelah perhitungan selisih kurs terealisasi dan penyesuaian selisih kurs yang selanjutnya disesuaikan sebagai pendapatan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi dari proses revaluasi yaitu pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp534.114.460.862,00, dan kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar minus Rp386.197.741.733,00.

3. Penjelasan Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp744.370.688.275,00 terdiri dari koreksi Kas Hibah, koreksi Kas BLU dan koreksi kas di BUN dengan rincian berikut:

   a. Koreksi Kas Hibah sebesar Rp14.803.399.120,00 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada TA 2025 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah luar negeri TAYL dengan nilai neto sebesar Rp17.346.249.701,00, revaluasi saldo kas hibah sebesar Rp5.467.048.130,00, serta penyesuaian kas hibah sebesar minus Rp8.009.898.711,00.

   b. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp680.181.448.905,00 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo

awal BLU baru pada TA 2025, penyesuaian saldo Kas BLU akibat likuidasi, perubahan nomenklatur kode satuan kerja, kesalahan pembukuan, pengembalian kas hibah yang diterima BLU, serta amoritasi diskonto/premium yang pada TAYL telah diakui sebagai *accrued interest*. Rincian koreksi Kas BLU pada TA 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	KPPN	Jumlah
1	Palembang (014)	(324.902.555.077)
2	Pangkal Pinang (015)	12.751.808.711
3	Jakarta I (018)	(25.000)
4	Jakarta II (019)	(212.932.212.709)
5	Surakarta (028)	3.184.012.624
6	Yogyakarta (030)	1.878.145.352
7	Mataram (038)	846.851.196
8	Palangkaraya (043)	(10.348.298.816)
9	Jayapura (063)	(14.961.226.501)
10	Sorong (066)	(1.000.000.000)
11	Merauke (068)	1.361.403.467
12	Jakarta III (088)	(141.204.633.328)
13	Magelang (115)	3.514.915.350
14	Semarang II (134)	1.630.365.826
Jumlah Koreksi Kas BLU		**(680.181.448.905)**

Koreksi Kas BLU paling besar terdapat pada KPPN Palembang sebesar minus Rp324.902.555.077,00 yang merupakan penyesuaian kas pada BLU Universitas Sriwijaya yang telah likuidasi dan ditetapkan menjadi PTN-BH.

Koreksi terbesar kedua yaitu pada KPPN Jakarta II sebesar minus Rp212.932.212.709,00 yang merupakan penyesuaian saldo kas BLU pada BLU LDKPI dan LPDP dalam rangka kesalahan pembukuan dan pencatatan *accrued interest*.

c. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp78.992.638.471,00 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.

d. Koreksi Kas KPPN sebesar minus Rp19,00 merupakan koreksi atas saldo kas pada KPPN Khusus Penerimaan diakibatkan karena pembulatan.

4. Penggunaan Dana SAL pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp93.146.980.793.000,00 dan Rp56.381.000.000.000,00. Penggunaan SAL tersebut sesuai dengan alokasi dalam postur APBN Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025, pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 8 PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih dinyatakan bahwa SAL digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi. Penggunaan SAL dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya. Penggunaan Dana SAL sebesar Rp93.146.980.793.000,00 terdiri dari Pembiayaan Lainnya dari

APBN tahun 2025 yang bersumber dari Rek Lain BI SAL sebesar Rp85.600.000.000.000,00 dan bersumber dari Rekening Kas BLU sebesar Rp7.546.980.793.000,00.

F.1.3 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp365.853.197.577.193,00 dan Rp629.015.216.812.398,00. Saldo Akhir Kas pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp263.162.019.235.205,00 atau 41,84 persen dari TA 2024. Saldo Akhir Kas merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran berikutnya.

Adapun rincian Saldo Akhir Kas pada TA 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Kas pada BLU	80.033.772.437.486	96.973.278.750.758	(17,47)
Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah	1.143.927.612.103	10.552.112.773.536	(89,16)
Rekening Kas di KPPN	838.386.237.732	697.379.362.618	20,22
Rekening Kas di BUN	150.549.340.894.705	350.032.352.563.093	(56,99)
Rekening Pemerintah Lainnya	20.422.950.926.725	9.936.262.585.075	105,54
Kas Rekening Escrow	112.864.819.468.442	160.823.830.777.318	(29,82)
Jumlah Saldo Akhir Kas	**365.853.197.577.193**	**629.015.216.812.398**	**(41,84)**

Sesuai PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, Kas di Rekening Kas SAL telah dicatat sebagai bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Perlakuan yang sama terhadap Kas di Rekening Khusus yang merupakan bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Untuk Laporan Tahun 2025, transaksi keuangan pada Rekening Khusus telah dicatat sesuai Sistem Akuntansi Pusat dan dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas ini.

Adapun rincian Saldo Akhir Kas jika dibandingkan antara Neraca dengan LAK pada TA 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Neraca	LAK
Kas pada BLU	80.033.772.437.486	80.033.772.437.486
Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah	1.143.927.612.103	1.143.927.612.103
Rekening Kas di KPPN	838.386.237.732	838.386.237.732
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	123.169.863.770.107	150.549.340.894.705
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing	27.379.477.124.598	
Rekening Pemerintah Lainnya	20.422.950.926.725	20.422.950.926.725
Kas Rekening Escrow	-	112.864.819.468.442
Kas di Bendahara Pengeluaran	240.434.539.673	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	6.008.685.913.493	-
Jumlah Saldo Akhir Kas	**259.237.498.561.917**	**365.853.197.577.193**

Perbedaan rincian kas antara Neraca dan LAK dapat terjadi, antara lain disebabkan oleh:

1. Perbedaan penyajian Kas Rekening Escrow antara Neraca dan LAK, disebabkan karena pada Neraca dicatat sebagai Aset Lainnya (Dana yang Dibatasi Penggunannya); dan
2. Perbedaan penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran serta Kas Lainnya dan Setara Kas antara Neraca dan LAK, disebabkan karena kedua kas tersebut diluar penguasaan BUN sehingga tidak tersaji pada LAK.

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas BUN pada TA 2025 diuraikan sebagai berikut:

F.2.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp243.903.591.143.629,00 dan minus Rp154.149.780.567.127,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp89.753.810.576.502,00 atau 58,23 persen dari TA 2024. Penerimaan negara TA 2025 mengalami penurunan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak utamanya pada Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan. Namun demikian diiringi dengan arus kas keluar TA 2025 yang mengalami kenaikan terutama berasal dari kenaikan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah pada TA 2025.

Adapun rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Arus Kas Masuk	2.764.505.203.562.309	2.850.105.793.777.310	(3,00)
Dikurangi Arus Kas Keluar	3.008.408.794.705.938	3.004.255.574.344.437	0,14
Arus Kas Bersih	**(243.903.591.143.629)**	**(154.149.780.567.127)**	**58,23**

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih pada TA 2025 sebesar minus Rp243.903.591.143.629,00 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah.

F.2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.218.168.226.056.948,00 dan Rp2.231.839.822.879.833,00. Penerimaan Perpajakan pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.671.596.822.885,00 atau 0,61 persen dari TA 2024. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp2.139.559.564.077.267,00 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp78.608.661.979.681,00. Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan pada TA 2025 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan.

Adapun rincian Penerimaan Perpajakan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pajak Dalam Negeri			
Pajak Penghasilan (PPh)	1.023.337.095.261.721	1.061.940.526.200.605	(3,64)
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN&PNBM)	792.361.480.774.189	828.436.302.857.826	(4,35)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.274.120.880.711	32.491.020.191.825	(9,90)
Cukai	221.673.175.427.801	226.371.492.151.997	(2,08)
Pajak Lainnya	72.913.691.732.845	8.742.804.515.348	733,99
Jumlah Penerimaan Pajak Dalam Negeri	**2.139.559.564.077.267**	**2.157.982.145.917.601**	**(0,85)**
Pajak Perdagangan Internasional			

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Bea Masuk	50.172.778.440.681	52.965.349.842.955	(5,27)
Bea Keluar	28.435.883.539.000	20.892.327.119.277	36,11
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	**78.608.661.979.681**	**73.857.676.962.232**	6,43
Penerimaan Perpajakan	**2.218.168.226.056.948**	**2.231.839.822.879.833**	**(0,61)**

F.2.1.1.1 Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.023.337.095.261.721,00 dan Rp1.061.940.526.200.605,00. Pajak Penghasilan pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.603.430.938.884,00 atau 3,64 persen dari TA 2024. Adapun rincian Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
PPh Migas			
PPh Minyak Bumi	11.730.269.388.252	20.941.726.775.617	(43,99)
PPh Gas Alam	23.316.876.850.502	44.161.588.482.782	(47,20)
PPh Migas Lainnya	7.081.748.778	3.039.414.260	133,00
Jumlah PPh Migas	**35.054.227.987.532**	**65.106.354.672.659**	**(46,16)**
PPh Non Migas			
PPh Pasal 21	229.545.656.568.384	243.563.524.511.774	(5,76)
PPh Pasal 22	37.088.083.979.425	35.728.588.168.466	3,81
PPh Pasal 22 Import	76.406.771.565.068	73.757.704.583.023	3,59
PPh Pasal 23	71.155.677.247.892	64.531.207.939.817	10,27
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	20.997.495.776.215	14.396.646.388.342	45,85
PPh Pasal 25/29 Badan	318.093.732.399.251	332.645.392.712.765	(4,37)
PPh Pasal 26	82.520.338.652.191	82.848.756.083.600	(0,40)
PPh Final	141.043.119.922.171	140.871.919.690.518	0,12
PPh Non Migas Lainnya	187.023.351.353	178.789.296.200	4,61
Jumlah PPh Non Migas	**977.037.899.461.950**	**988.522.529.374.505**	**(1,16)**
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	11.244.967.812.239	8.311.642.153.441	35,29
Jumlah Pajak Penghasilan	**1.023.337.095.261.721**	**1.061.940.526.200.605**	**(3,64)**

F.2.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp792.361.480.774.189,00 dan Rp828.436.302.857.826,00. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36.074.822.083.637,00 atau 4,35% dari TA 2024. Adapun rincian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	447.853.547.163.264	536.775.874.578.398	(16,57)
PPN dan PPnBM Impor	325.364.028.731.529	280.682.900.386.455	15,92
PPN dan PPnBM Lainnya	11.134.021.304.472	10.172.775.265.753	9,45
PPN Ditanggung Pemerintah	8.009.883.574.924	804.752.627.220	895,32
Jumlah PPN dan PPnBM	**792.361.480.774.189**	**828.436.302.857.826**	**(4,35)**

F.2.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp29.274.120.880.711,00 dan Rp32.491.020.191.825,00. Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.216.899.311.114,00 atau 9,90 persen dari TA 2024. Adapun rincian Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
PBB Perkebunan	3.586.864.508.783	3.632.025.365.954	(1,24)
PBB Kehutanan	629.209.485.629	785.632.821.820	(19,91)
PBB Pertambangan	8.239.894.984.369	11.473.212.160.957	(28,18)
PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	16.108.075.671.268	15.867.515.938.594	1,52
PBB Pertambangan Panas Bumi	564.568.708.713	534.003.914.205	5,72
PBB Lainnya	145.507.521.949	198.629.990.295	(26,74)
Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan	**29.274.120.880.711**	**32.491.020.191.825**	**(9,90)**

F.2.1.1.4 Cukai

Cukai pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp221.673.175.427.801,00 dan Rp226.371.492.151.997,00. Cukai pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.698.316.724.196 atau 2,08 persen dari TA 2024. Adapun rincian Cukai adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Cukai Hasil Tembakau	211.915.846.970.441	216.852.275.618.197	(2,28)
Cukai *Ethyl* Alkohol	150.343.897.000	142.764.611.000	5,31
Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	9.282.621.013.360	9.227.388.671.300	0,60
Denda Administrasi Cukai	301.018.213.000	130.071.298.500	131,43
Cukai Lainnya	23.345.334.000	18.991.953.000	22,92
Jumlah Cukai	**221.673.175.427.801**	**226.371.492.151.997**	**(2,08)**

F.2.1.1.5 Pajak Lainnya

Pajak Lainnya pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp72.913.691.732.845,00 dan Rp8.742.804.515.348,00. Pajak Lainnya pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp64.170.887.217.497,00 atau 733,99 persen dari TA 2024. Adapun rincian Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pendapatan Pajak Lainnya			
Pendapatan Bea Materai	1.139.950.708.889	1.336.551.323.515	(14,71)
Pendapatan dari Penjualan Bea Materai	5.349.033.704.457	5.466.246.215.122	(2,14)
Pendapatan PPN Batubara	162.318.234.611	165.642.195.374	(2,01)
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	63.534.740.134.538	0	-
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	300.539.922.224	2.120.380.574	14.073,87
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	**70.486.582.704.719**	**6.970.560.114.585**	**911,20**
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak			
Bunga Penagihan PPh	1.298.051.344.697	1.363.830.072.245	(4,82)
Bunga Penagihan PPN	487.585.629.132	408.414.328.518	19,39
Bunga Penagihan PPnBM	485.717.931	0	-
Jumlah Bunga Penagihan Pajak	**1.786.122.691.760**	**1.772.244.400.763**	**0,78**
Pendapatan Denda Penagihan			
Denda Penagihan PPh	69.602.231.622	0	-
Denda Penagihan PPN	29.670.193.959	0	-
Denda Penagihan Pajak Lainnya	(14.964.646.264)	0	-
Pendapatan Denda Penagihan Pajak Lainnya	556.678.557.049	0	-
Jumlah Denda Penagihan	**640.986.336.366**	**0**	-
Jumlah Pajak Lainnya (Neto)	**72.913.691.732.845**	**8.742.804.515.348**	**733,99**

F.2.1.1.6 Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp78.608.661.979.681,00 dan Rp73.857.676.962.232,00. Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.750.985.017.449,00 atau sebesar 6,43 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Bea Masuk:			
Bea Masuk	46.702.227.475.984	48.565.705.533.208	(3,84)
Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	-	
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.411.911.630.750	1.236.850.519.582	14,15
Bea Masuk dalam Rangka KITE	718.644.099.803	926.951.114.319	(22,47)
Pendapatan Pabean Lainnya	20.289.816.000	5.696.741.960	256,17
Bea Masuk Anti *Dumping*	577.571.511.000	357.966.052.000	61,35
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	742.133.907.144	1.872.179.881.886	(60,36)
Jumlah Bea Masuk	**50.172.778.440.681**	**52.965.349.842.955**	**(5,27)**
Bea Keluar:			
Bea Keluar	28.434.392.183.000	20.927.936.260.277	35,87
Denda Administrasi Bea Keluar	1.324.584.000	(35.659.410.000)	(103,71)
Pendapatan Bunga Bea Keluar	166.772.000	50.269.000	231,76
Jumlah Bea Keluar	**28.435.883.539.000**	**20.892.327.119.277**	**36,11**
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	**78.608.661.979.681**	**73.857.676.962.232**	**6,43**

F.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp540.904.970.576.936,00 dan Rp583.878.607.181.721,00. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp42.973.636.604.785,00 atau 7,36 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penerimaan SDA	223.725.075.778.176	228.928.767.532.781	(2,27)
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	27.683.274.120.780	86.384.593.538.563	(67,95)
Penerimaan PNBP Lainnya	179.339.060.480.344	163.848.513.738.956	9,45
Pendapatan BLU	110.157.560.197.636	104.716.732.371.421	5,20
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak	**540.904.970.576.936**	**583.878.607.181.721**	**(7,36)**

F.2.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp223.725.075.778.176,00 dan Rp228.928.767.532.781,00. Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.203.691.754.605,00 atau 2,27 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pendapatan Minyak Bumi	55.757.863.739.730	77.961.123.337.930	(28,48)
Pendapatan Gas Bumi	46.692.746.308.894	32.661.085.038.989	42,96
Pendapatan Pertambangan Umum	111.175.930.655.384	107.777.558.834.527	3,15
Pendapatan Kehutanan	6.616.439.135.854	6.739.119.543.721	(1,82)
Pendapatan Perikanan	1.026.499.638.986	951.819.466.723	7,85

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.455.596.299.328	2.838.061.310.891	(13,48)
Jumlah Pendapatan SDA	**223.725.075.778.176**	**228.928.767.532.781**	**(2,27)**

F.2.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp27.683.274.120.780,00 dan Rp86.384.593.538.563,00. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp58.701.319.417.783,00 atau 67,95 persen dari TA 2024. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) berasal dari penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara. Penurunan sebesar 67,95 persen disebabkan karena kinerja BUMN mengalami penurunan akibatnya pembagian dividen yang diterima oleh negara secara tunai juga menurun. Penurunan kinerja BUMN ini terutama pada sektor perbankan.

Adapun rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	11.734.606.479.590	85.572.985.213.463	(86,29)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian Keuangan	948.667.641.190	811.608.325.100	16,89
Pendapatan dari KND Lainnya	15.000.000.000.000	-	-
Jumlah Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	**27.683.274.120.780**	**86.384.593.538.563**	**(67,95)**

F.2.1.2.3 Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp179.339.060.480.344,00 dan Rp163.848.513.738.956,00. Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.490.546.741.388,00 atau 9,45 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Pendapatan PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	28.033.478.693.165	44.894.004.934.622	(37,56)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	48.277.460.976.317	27.743.265.311.822	74,02
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	6.046.824.770.941	6.693.335.550.852	(9,66)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	3.343.047.985.230	3.074.841.592.851	8,72
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	34.205.005.327.087	31.855.957.320.485	7,37
Pendapatan Jasa Lainnya	2.079.606.832.462	2.753.114.727.970	(24,46)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	39.999.444.444.557	30.278.124.149.439	32,11
Pendapatan Denda	6.498.206.026.455	4.525.845.781.493	43,58
Pendapatan Lain-lain	10.855.975.424.130	12.030.024.369.422	(9,76)
Jumlah PNBP Lainnya	**179.339.060.480.344**	**163.848.513.738.956**	**9,45**

F.2.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp110.157.560.197.636,00 dan Rp104.716.732.371.421,00. Pendapatan Badan Layanan Umum pada

TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.440.827.826.215,00 atau 5,20 persen dari TA 2024. Adapun rincian Pendapatan Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	99.578.147.324.751	88.429.003.198.836	12,61
Pendapatan Hibah BLU	1.130.624.184.110	775.438.966.691	45,80
Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	1.658.444.656.522	1.685.792.466.002	(1,62)
Pendapatan dari Alokasi APBN	778.042.537.548	596.713.515.837	30,39
Pendapatan BLU Lainnya	7.012.301.494.705	13.229.784.224.055	(47,00)
Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum	**110.157.560.197.636**	**104.716.732.371.421**	**5,20**

F.2.1.3 Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.432.006.928.425,00 dan Rp34.387.363.715.756. Penerimaan Hibah tersebut merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Penerimaan Hibah tersebut hanya merupakan penerimaan hibah berupa uang secara langsung maupun terencana. Penerimaan Hibah pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.955.356.787.331,00 atau 84,20 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Penerimaan Hibah adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Hibah Dalam Negeri Langsung:			
Bentuk Uang-Perorangan	10.486.562.065	60.021.516.260	(82,53)
Bentuk Uang-Lembaga/Badan Usaha	178.196.840.321	233.933.403.044	(23,83)
Bentuk Uang-Pemerintah Daerah	3.401.668.608.627	31.862.055.896.086	(89,32)
Bentuk Uang-Lainnya	9.400.367.096	91.185.494.517	(89,69)
Jumlah Hibah Dalam Negeri	**3.599.752.378.109**	**32.247.196.309.907**	**(88,84)**
Hibah Luar Negeri Terencana:			
Bilateral	115.310.468.619	132.463.972.855	(12,95)
Multilateral	324.491.617.651	408.007.371.258	(20,47)
Hibah Luar Negeri Langsung:	-	-	-
Perorangan	-	1.255.020.666	(100,00)
Bilateral	381.427.448.305	254.332.863.571	49,97
Multilateral	872.391.089.407	1.278.685.180.203	(31,77)
Lainnya	129.330.176.334	65.422.997.296	97,68
Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi Hibah Langsung Dalam Mata Uang Asing	9.303.750.000	-	-
Jumlah Hibah Luar Negeri	**1.832.254.550.316**	**2.140.167.405.849**	**(14,39)**
Jumlah Hibah	**5.432.006.928.425**	**34.387.363.715.756**	**(84,20)**

F.2.1.4 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp501.046.123.448.187,00 dan Rp464.859.258.914.201,00. Belanja Pegawai pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp36.186.864.533.986,00 atau 7,78 persen dari TA 2024. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	94.904.859.456.007	94.474.584.839.706	0,46
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	73.091.117.925.110	70.478.736.226.243	3,71
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	5.153.077.583.420	1.627.058.251.782	216,71
Belanja Gaji Dokter PTT	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	25.450.199.838.044	20.450.131.425.466	24,45
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	12.555.396.770.289	6.660.298.575.577	88,51
Belanja Honorarium	1.422.103.803.879	1.464.038.800.138	(2,86)
Belanja Lembur	1.082.416.887.346	996.994.057.394	8,57
Belanja Tunj.Khusus	106.988.751.991.826	95.600.814.345.942	11,91
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	166.503.789.577.419	160.520.141.397.297	3,73
Belanja Asuransi Kesehatan	13.894.409.614.847	12.586.460.994.656	10,39
Jumlah Belanja Pegawai	**501.046.123.448.187**	**464.859.258.914.201**	**7,78**

Kenaikan Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 terutama berasal dari kenaikan Belanja Tunjangan Khusus sebesar Rp11.387.937.645.884,00 atau 11,91 persen.

F.2.1.5 Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp553.524.006.285.092,00 dan Rp523.368.042.639.998,00. Belanja Barang pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp30.155.963.645.094,00 atau 5,76 persen dari TA 2024. Belanja Barang merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan.

Adapun rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Barang	157.515.471.161.010	182.795.632.669.970	(13,83)
Belanja Jasa	43.676.545.250.464	55.343.968.818.268	(21,08)
Belanja Pemeliharaan	53.328.040.966.845	48.661.531.818.059	9,59
Belanja Perjalanan Dinas	27.029.154.373.697	53.891.864.335.902	(49,85)
Belanja Badan Layanan Umum	111.416.380.425.523	91.952.233.291.295	21,17
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	160.541.940.989.815	90.675.483.082.944	77,05
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	16.473.117.738	47.328.623.560	(65,19)
Jumlah Belanja Barang	**553.524.006.285.092**	**523.368.042.639.998**	**5,76**

F.2.1.6 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp514.394.982.025.629,00 dan Rp488.426.422.143.817,00. Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp25.968.559.881.812,00 atau 5,32 persen dari TA 2024. Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *(outstanding principal)*, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga melalui rekening pengeluaran Bank Indonesia pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Adapun rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Bunga Utang	502.327.743.282.599	475.963.129.426.967	5,54
Discount SUN	7.639.067.414.930	5.710.276.912.350	33,78
Loss On Bond Redemtion	35.514.847.500	160.319.500.000	(77,85)
Discount SBSN	4.392.656.480.600	6.592.696.304.500	(33,37)
Jumlah Pembayaran Bunga Utang	**514.394.982.025.629**	**488.426.422.143.817**	**5,32**

F.2.1.6.1 Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp502.327.743.282.599,00 dan Rp475.963.129.426.967,00. Pembayaran Bunga Utang pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp26.364.613.855.632,00 atau 5,54 persen dari TA 2024. Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga.
Adapun rincian Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Pemby. Bunga Utang Dalam Negeri-Jangka Panjang	361.732.822.884.919	344.233.666.145.424	5,08
Belanja Pemb. Imbalan SBSN Dalam Negeri	97.499.252.427.936	89.241.671.087.884	9,25
Belanja Pemb. Bunga Utang Luar Negeri-Jangka Panjang	43.095.667.969.744	42.487.792.193.659	1,43
Jumlah Pembayaran Bunga Utang	**502.327.743.282.599**	**475.963.129.426.967**	**5,54**

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp43.095.667.969.744,00 dan Rp42.487.792.193.659,00. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar Rp607.875.776.085,00 atau 1,43 persen dari TA 2024. Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan utang program dan proyek di TA 2025.

Adapun rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Bunga Pinjaman Program	20.006.015.800.703	21.708.836.497.880	(7,84)
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	23.089.330.948.741	20.778.653.588.316	11,12
Belanja Pembayaran Biaya Transfer	321.220.300	302.107.463	6,33
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	**43.095.667.969.744**	**42.487.792.193.659**	**1,43**

F.2.1.6.2 Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara

Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.639.067.414.930,00 dan Rp5.710.276.912.350,00. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.928.790.502.580,00 atau 33,78 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara	3.385.597.929.900	1.686.875.072.000	100,70
Belanja Pembayaran *Discount* Obligasi Negara	3.848.358.591.400	3.392.865.751.600	13,43
Belanja Pembayaran *Discount* Obligasi Negara Valas	405.110.893.630	630.536.088.750	(35,75)
Jumlah Pembayaran *Discount* SUN	**7.639.067.414.930**	**5.710.276.912.350**	**33,78**

F.2.1.6.3 Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption*

Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp35.514.847.500,00 dan Rp160.319.500.000,00. Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp124.804.652.500,00 atau 77,85 persen dari TA 2024. Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* merupakan belanja yang timbul saat pembelian kembali atau pelunasan atas obligasi negara saat jatuh tempo lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*).

F.2.1.6.4 Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara

Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.392.656.480.600,00 dan Rp6.592.696.304.500,00. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.200.039.823.900,00 atau 33,37 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Pembayaran *Discount* SBSN - Jangka Panjang	2.591.719.633.100	4.435.167.932.300	(41,56)
Belanja Pembayaran *Discount* SPNS	1.800.936.847.500	2.157.528.372.200	(16,53)
Jumlah Pembayaran *Discount* SBSN	**4.392.656.480.600**	**6.592.696.304.500**	**(33,37)**

F.2.1.7 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp281.759.776.982.061,00 dan Rp292.692.594.096.846,00. Belanja Subsidi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.932.817.114.785,00 atau 3,74 persen dari TA 2024. Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat.

Adapun rincian Belanja Subsidi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Subsisi Perusahaan Negara Lembaga Non Keuangan-BBM	104.132.219.671.610	101.797.951.096.583	2,29
Belanja Subsisi Perusahaan Negara Lembaga Non Keuangan-Non BBM	133.002.413.182.613	132.321.082.328.948	0,51
Belanja Subsidi Perusahaan Negara Dalam Rangka PSO	7.984.151.210.408	7.976.011.636.109	0,10
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	36.575.371.247.430	47.259.787.524.296	(22,61)
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	65.621.670.000	3.337.761.510.910	(98,03)
Jumlah Belanja Subsidi	**281.759.776.982.061**	**292.692.594.096.846**	**(3,74)**

F.2.1.8 Belanja Hibah

Belanja Hibah pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp493.977.094.757,00 dan Rp278.430.938.953,00. Belanja Hibah pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar

Rp215.546.155.804,00 atau 77,41 persen dari TA 2024. Belanja Hibah merupakan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri, Kepada Organisasi Internasional, dan Hibah Lainnya.
Adapun rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	418.259.737.154	183.941.706.710	127,39
Hibah Kepada Organisasi Internasional	75.282.562.321	94.227.497.856	(20,11)
Hibah Lainnya (*Banking Commision*)	434.795.282	261.734.387	66,12
Jumlah Belanja Hibah	**493.977.094.757**	**278.430.938.953**	**77,41**

Kenaikan Belanja Hibah salah satunya karena pada TA 2025 terdapat kenaikan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri. Adapun realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri dengan penerima terbesar antara lain pada pemerintah Palestina berupa bantuan pangan kepada Palestina melalui *World Food Programme*.

F.2.1.9 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp183.618.484.876.271,00 dan Rp154.949.830.442.829,00. Belanja Bantuan Sosial pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.668.654.433.442,00 atau 18,50 persen dari TA 2024. Belanja Bantuan Sosial merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Rehabilitasi Sosial	2.272.030.968.218	1.928.370.449.382	17,82
Jaminan Sosial	74.583.378.090.384	72.999.290.688.788	2,17
Pemberdayaan Sosial	105.924.215.174	193.850.657.286	(45,36)
Perlindungan Sosial	102.529.712.264.000	75.108.852.688.813	36,51
Penanggulangan Kemiskinan	4.950.000.000	13.438.000.000	(63,16)
Penanggulangan Bencana	4.122.489.338.495	4.706.027.958.560	(12,40)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	**183.618.484.876.271**	**154.949.830.442.829**	**18,50**

Kenaikan Belanja Bantuan Sosial pada TA 2025, didominasi oleh kenaikan belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial sebesar Rp27.420.859.575.187,00.

F.2.1.10 Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp124.530.750.146.771,00 dan Rp216.138.188.685.429,00. Belanja Lain-lain pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp91.607.438.538.658,00 atau 42,38 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	143.206.449.377	119.748.067.230	19,59
Belanja Lain-lain BUN	121.007.908.510.624	210.371.171.227.940	(42,48)
Belanja Lain-lain Lainnya	3.379.635.185.987	5.647.269.389.156	(40,15)
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice	783	1.103	(29,01)
Jumlah Belanja Lain-lain	**124.530.750.146.771**	**216.138.188.685.429**	**(42,38)**

Terdapat penurunan Belanja Lain-lain BUN dan Belanja Lain-lain Lainnya pada TA 2025 disebabkan karena pembayaran pada tahun 2024 meliputi pembayaran atas kekurangan dana kompensasi tahun

2023 *audited* dan periode triwulan I dan II serta sebagian triwulan III tahun 2024, sedangkan pembayaran pada tahun 2025 hanya meliputi pembayaran kekurangan dana kompensasi tahun 2024 *audited* dan periode triwulan I tahun 2025.

F.2.1.11 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp65.466.842.449.400,00 dan Rp54.241.430.203.000,00. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.225.412.246.400,00 atau 20,70 persen dari TA 2024. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah.

Adapun rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	40.735.535.692.200	32.733.740.472.000	24,45
Bagi Hasil PBB	24.731.306.757.200	21.507.689.731.000	14,99
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	**65.466.842.449.400**	**54.241.430.203.000**	**20,70**

F.2.1.12 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp96.870.655.441.100,00 dan Rp93.845.576.439.722,00. Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.025.079.001.378,00 atau 3,22 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Bagi Hasil Minyak Bumi	9.547.214.159.000	8.944.481.225.000	6,74
Bagi Hasil Gas Bumi	7.754.928.593.000	7.006.411.326.000	10,68
Bagi Hasil Pertambangan Umum	74.899.300.984.000	71.110.816.829.000	5,33
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	1.660.558.734.000	1.586.280.291.000	4,68
Bagi Hasil Kehutanan	1.120.991.254.100	1.420.960.624.222	(21,11)
Bagi Hasil Perikanan	714.663.707.000	951.698.762.000	(24,91)
Bagi Hasil Perkebunan Sawit	1.172.998.010.000	2.824.927.382.500	(58,48)
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	**96.870.655.441.100**	**93.845.576.439.722**	**3,22**

F.2.1.13 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai

Transfer Bagi Hasil Cukai pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.553.021.228.380,00 dan Rp5.087.556.141.540,00. Transfer Bagi Hasil Cukai pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.465.465.086.840,00 atau 28,80 persen dari TA 2024.

F.2.1.14 Transfer Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp433.292.088.063.189,00 dan Rp429.210.611.278.998,00. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.081.476.784.191,00 atau 0,95 persen dari TA 2024. Transfer Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi/kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

F.2.1.15 Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik

Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.610.554.270.313,00 dan Rp50.890.077.113.845,00. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.279.522.843.532,00 atau 65,39 persen dari TA 2024. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik adalah alokasi dari APBN kepada propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

F.2.1.16 Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Insentif Fiskal

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Insentif Fiskal pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.280.679.578.500,00 dan Rp26.693.231.531.500,00. Dana Otonomi Khusus pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.412.551.953.000 atau 16,53 persen dari TA 2024. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Insentif Fiskal merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

Rincian Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Insentif Fiskal TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Dana Otonomi Khusus Aceh	4.309.582.640.000	4.276.993.035.000	0,76
Dana Otonomi Khusus Papua	2.290.255.452.000	2.370.916.915.000	(3,40)
Dana Otonomi Khusus Papua Selatan	1.627.951.269.000	1.917.322.868.000	(15,09)
Dana Otonomi Khusus Papua Tengah	2.485.831.130.000	2.753.614.656.000	(9,72)
Dana Otonomi Khusus Papua Pegunungan	3.034.786.875.000	3.330.716.236.000	(8,88)
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	1.562.065.026.000	1.752.109.362.000	(10,85)
Dana Otonomi Khusus Papua Barat Daya	1.695.671.188.000	1.869.817.863.000	(9,31)
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.000.000.000.000	1.420.000.000.000	(29,58)
Insentif Fiskal	4.274.535.998.500	7.001.740.596.500	(38,95)
Jumlah Transfer Dana Otsus, DIY, IF	**22.280.679.578.500**	**26.693.231.531.500**	**(16,53)**

F.2.1.17 Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp145.070.625.814.078,00 dan Rp130.441.233.738.467,00. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.629.392.075.611,00 atau 11,22 persen dari TA 2024. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(Transfer Lainnya) adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Adapun rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	69.544.326.191.613	53.926.075.147.483	28,96
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	470.451.750.000	1.495.768.803.108	(68,55)
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.456.827.078.015	53.303.572.819.195	0,29
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	14.668.809.553.848	14.779.887.962.430	(0,75)
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Kepariwisataan	161.304.750.500	379.208.852.000	(57,46)
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), Pendidikan Kesetaraan dan Museum dan Taman	5.888.543.086.102	5.683.327.134.751	3,61
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	**144.190.262.410.078**	**129.567.840.718.967**	11,29
Dana Alokasi Khusus Non Fisik II			
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	130.522.518.000	129.806.000.000	0,55
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	-	248.324.714.500	-
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	510.916.636.000	297.142.612.500	71,94
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	89.299.250.000	198.119.692.500	(54,93)
Dana Bantuan Pengembangan Program Tertentu Daerah	149.625.000.000	-	-
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik II	**880.363.404.000**	**873.393.019.500**	0,80
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	**145.070.625.814.078**	**130.441.233.738.467**	**11,22**

Kenaikan Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 terutama berasal kenaikan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sebesar Rp15.618.251.044.130,00 atau 28,96 persen.

F.2.1.18 Dana Desa

Dana Desa pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp61.645.153.758.700,00 dan Rp70.925.927.774.598,00. Dana Desa pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.280.774.015.898,00 atau 13,09 persen dari TA 2024. Dana Desa merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sejak tahun 2021 Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan melalui penyaluran langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran tersebut dilakukan dengan cara pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten/Kota untuk kemudian dana pemotongan tersebut disalurkan ke RKD.

F.2.1.19 Hibah Kepada Daerah

Hibah Kepada Daerah pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp251.073.243.510,00 dan Rp2.207.162.260.694,00. Hibah Kepada Daerah pada TA 2025 mengalami

penurunan sebesar Rp1.956.089.017.184,00 atau 88,62 persen dari TA 2024. Hibah Kepada Daerah merupakan dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Adapun rincian Hibah Kepada Daerah adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	237.027.244.682	810.103.833.952	(70,74)
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	14.045.998.828	101.257.208.226	(86,13)
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	-	1.295.801.218.516	-
Jumlah Hibah Kepada Daerah	**251.073.243.510**	**2.207.162.260.694**	**(88,62)**

F.2.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih neto dari Aktivitas Investasi pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp712.073.591.028.981,00 dan minus Rp414.403.152.941.181,00. Arus Kas dari Aktivitas Investasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp297.670.438.087.800,00 atau 71,83 persen dari TA 2024. Penurunan arus kas bersih neto dari Aktivitas Investasi pada TA 2025 terutama berasal dari adanya penurunan arus kas masuk pada penerimaan investasi pemerintah serta kenaikan arus kas keluar pada belanja modal. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Adapun rincian Arus Kas bersih neto dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Arus Masuk	15.352.542.617.342	24.787.984.406.152	(38,06)
Dikurangi Arus Keluar	727.426.133.646.323	439.191.137.347.333	65,63
Arus Kas Bersih	**(712.073.591.028.981)**	**(414.403.152.941.181)**	**71,83**

F.2.2.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp620.380.885.677,00 dan Rp499.450.401.555,00. Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp120.930.484.122,00 atau 24,21 persen dari TA 2024. Pengelolaan dan Penjualan BMN merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan.

Adapun rincian Pengelolaan dan Penjualan BMN adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	8.449.235.165	10.757.463.169	(21,46)
Penjualan Peralatan dan Mesin	236.034.275.202	240.275.834.546	(1,77)
Penjualan Sewa Beli	4.106.936.488	4.314.791.972	(4,82)
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	-	6.216.198.000	-
Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	3.232.500	-	-
Pemindahtanganan BMN Lainnya	351.799.288.065	220.354.822.100	59,65

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	19.987.918.257	17.531.291.768	14,01
Jumlah Pengelolaan & Penjualan BMN	**620.380.885.677**	**499.450.401.555**	**24,21**

F.2.2.2 Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp610.174.852.295,00 dan Rp1.400.109.062.740,00. Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp789.934.210.445,00 atau 56,42 persen dari TA 2024. Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Adapun rincian Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	513.012.420.241	1.221.059.570.444	(57,99)
Penjualan/Penyelesaian Aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	97.162.432.054	179.049.492.296	(45,73)
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	**610.174.852.295**	**1.400.109.062.740**	**(56,42)**

F.2.2.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.268.707.260.033,00. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.268.707.260.033.

F.2.2.4 Penerimaan Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.121.986.879.370,00 dan Rp19.619.717.681.824,00. Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.497.730.802.454,00 atau 28,02 persen dari TA 2024. Penerimaan Investasi Pemerintah merupakan Penerimaan Kembali Investasi dan Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah.

Rincian penerimaan investasi pemerintah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penerimaan Kembali Investasi			
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	533.958.333.334	218.750.000.000	144,10
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen atas Transaksi pada Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)	-	-	-
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi	**533.958.333.334**	**218.750.000.000**	**144,10**
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah			
Penerimaan Pengembalian Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	3.981.138.401.573	4.084.647.335.605	(2,53)
Penerimaan Pembiayaan atas Pengembalian Dana Cadangan Pemerintah pada BLU	144.662.715.592	322.114.659.182	(55,09)
Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara	9.462.227.428.871	14.994.205.687.037	(36,89)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Jumlah Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	13.588.028.546.036	19.400.967.681.824	(29,96)
Jumlah	**14.121.986.879.370**	**19.619.717.681.824**	**(28,02)**

F.2.2.5. Belanja Modal

Belanja Modal pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp427.052.204.101.925,00 dan Rp355.511.133.723.811,00. Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp71.541.070.378.114,00 atau 20,12 persen dari TA 2024. Kenaikan Belanja Modal terbesar terdapat pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp123.103.979.816.845,00 dibanding dengan TA 2024. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Adapun rincian Belanja Modal sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Modal Tanah	10.989.208.196.496	18.364.728.983.726	(40,16)
Peralatan dan Mesin	301.503.671.028.632	178.399.691.211.787	69,00
Gedung dan Bangunan	36.709.868.033.396	49.410.294.553.570	(25,70)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.481.278.578.714	91.974.443.874.034	(33,15)
Lainnya	10.455.325.985.115	8.624.510.944.381	21,23
Modal BLU	5.912.852.279.572	8.737.464.156.313	(32,33)
Jumlah Belanja Modal	**427.052.204.101.925**	**355.511.133.723.811**	**20,12**

F.2.2.6 Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

Pembiayaan Pengembangan Pendidikan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.698.925.315.000,00 dan Rp15.000.000.000.000,00. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.698.925.315.000,00 atau 77,99 persen dari TA 2024.

F.2.2.7 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

F.2.2.8 Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.351.980.436.398,00 dan Rp42.149.731.758.522,00. Penyertaan Modal Negara pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.797.751.322.124,00 atau 68,32 persen dari TA 2024. Penyertaan Modal Negara adalah penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, PMN/Dana Investasi Pemerintah.

Adapun rincian Penyertaan Modal Negara adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	11.457.022.705.000	35.165.229.891.758	(67,42)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan	1.894.957.731.398	1.984.501.866.764	(4,51)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
PMN Lainnya	-	5.000.000.000.000	(100,00)
Jumlah Penyertaan Modal Negara	**13.351.980.436.398**	**42.149.731.758.522**	**(68,32)**

Penurunan Penyertaan Modal Negara pada TA 2025 disebabkan antara lain karena penurunan Penyertaan Modal Negara Lainnya dan PMN pada Organisasi/ Lembaga Keuangan. Penyertaan Modal Negara Lainnya yang dialokasikan bersifat cadangan dan terdiri dari Pembiayaan Pendidikan bersifat Cadangan dan Cadangan Pembiayaan Investasi. Pembiayaan Pendidikan bersifat Cadangan, dan dapat direalisasikan apabila terdapat kebutuhan antara lain melalui realokasi dari pos Cadangan pembiayaan Pendidikan ke pos Dana Abadi di Bidang Pendidikan kepada BLU terkait kebutuhan Dana Abadi Pendidikan (DAP) (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Sementara Cadangan Pembiayaan Investasi, merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk mengakomodasi rencana pembiayaan investasi pada BUMN dan/atau lembaga/badan lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu. Alokasi tersebut dapat digunakan setelah memperoleh hasil pemantauan kesiapan dan progres pelaksanaan kinerja BUMN dan/atau lembaga/badan lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu. Sedangkan PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan pada 3 Lembaga Keuangan Internasional dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2025
1	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	49.068.000.000
2	International Development Association (IDA)	203.844.000.000
3	Islamic Development Bank (IsDB)	1.642.045.731.398
Jumlah Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan		**1.894.957.731.398**

F.2.2.9 Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp260.323.023.793.000,00 dan Rp26.530.271.865.000,00. Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp233.792.751.928.000,00 atau 881,23 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Pengeluaran Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Investasi pemerintah	252.776.043.000.000	17.058.615.865.000	1.381,81
Pengeluaran Pembiayaan untuk Manajemen Aset Aset Negara	7.546.980.793.000	7.500.000.000.000	0,63
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove pada BLU BPDLH	-	512.670.000.000	-
Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah	-	1.458.986.000.000	-
Jumlah Pengeluaran Investasi Pemerintah	**260.323.023.793.000**	**26.530.271.865.000**	**881,23**

Kenaikan Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2025 salah satunya disebabkan karena kenaikan Investasi Pemerintah sebesar Rp235.717.427.135.000,00. Kenaikan ini disebabkan oleh terbitnya Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dimana terdapat pemindahan dana pada rekening SAL ke bank Himbara. Penempatan uang negara tersebut menggunakan mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Bank Mitra, dengan skema penempatan berupa *Deposit on Call*

konvensional/syariah tanpa lelang, jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Penempatan uang negara tersebut diakui sebagai Investasi Jangka Pendek. Selain itu, terdapat penurunan Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove pada BLU BPDLH. Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah merupakan pengeluaran dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

F.2.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp828.373.227.856.597,00 dan Rp614.280.048.971.953,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp214.093.178.884.644,00 atau 34,85 persen dari TA 2024. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Adapun rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Arus Masuk	1.746.105.026.861.978	1.335.783.989.462.128	30,72
Dikurangi Arus Keluar	917.731.799.005.381	721.503.940.490.175	27,20
Arus Kas Bersih	**828.373.227.856.597**	**614.280.048.971.953**	**34,85**

F.2.3.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.560.033.068.456.176,00 dan Rp1.151.979.645.998.052,00. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp408.053.422.458.124,00 atau 35,42 persen dari TA 2024. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penerimaan Pembiayaan DN-Perbankan	93.146.980.793.000	56.419.615.865.000	65,10
Penjualan Surat Berharga Negara-Rupiah	1.236.227.403.801.368	944.123.231.773.300	30,94
Penjualan Surat Beharga Negara-Valas	212.656.166.761.975	131.314.145.000.000	61,94
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	18.002.517.099.833	20.122.653.359.752	(10,54)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	**1.560.033.068.456.176**	**1.151.979.645.998.052**	**35,42**

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp93.146.980.793.000,00 dan Rp56.419.615.865.000,00. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan sebesar Rp36.727.364.928.000,00 atau 65,10 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)	85.600.000.000.000	56.381.000.000.000	51,82
Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU	7.546.980.793.000	38.615.865.000	19.443,73
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	**93.146.980.793.000**	**56.419.615.865.000**	**65,10**

b. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Rupiah

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp1.236.227.403.801.368,00 dan Rp944.123.231.773.300,00.

Dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	80.050.000.000.000	33.504.000.000.000	138,93
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	813.532.473.432.725	598.760.180.335.000	35,87
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	274.791.749.730.257	224.750.751.438.410	22,27
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	55.225.000.000.000	54.213.300.000.000	1,87
Penerimaan Penerbitan SBSN Dalam Rangka Pembiayaan Proyek	12.628.180.638.386	32.894.999.999.890	(61,61)
Jumlah Penerimaan SBN-Rupiah	**1.236.227.403.801.368**	**944.123.231.773.300**	**30,94**

Kenaikan terbesar pada Penerimaan SBN terdapat pada Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara dan Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara. Hal ini disebabkan antara lain karena penerbitan SBN Tahun 2025 yang lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024.

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Valas

Penerimaan pembiayaan SBN – Valuta Asing pada TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp212.656.166.761.975,00 dan Rp131.314.145.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penerbitan Penjualan Obligasi Luar Negeri-Valas	132.349.016.761.975	92.879.895.000.000	42,49
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Panjang	80.307.150.000.000	38.434.250.000.000	108,95
Jumlah Penerimaan SBSN-Valas	**212.656.166.761.975**	**131.314.145.000.000**	**61,94**

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan SBN – Valas sebesar Rp81.342.021.761.975,00 atau 61,94 persen dari TA 2024, yang berasal dari kenaikan Penerimaan Penerbitan Penjualan Obligasi Luar Negeri – Valuta Asing sebesar Rp39.469.121.761.975,00 atau 42,49 persen serta berasal dari kenaikan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas – Jangka Panjang sebesar Rp41.872.900.000.000,00 atau 108,95 persen.

d. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri pada TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp18.002.517.099.833,00 dan Rp20.122.653.359.752,00, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	17.398.152.960.882	18.649.607.994.305	(6,71)
Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	604.364.138.951	1.473.045.365.447	(58,97)
Jumlah Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	**18.002.517.099.833**	**20.122.653.359.752**	**(10,54)**

F.2.3.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp181.592.359.658.866,00 dan Rp179.765.350.519.789,00. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.827.009.139.077,00 atau 1,02 persen dari TA 2024. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari Pinjaman Program/Tunai dan Pinjaman Proyek/Kegiatan. Pinjaman Proyek/Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN.

Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pinjaman Program / Tunai	59.315.481.801.800	60.028.929.576.507	(1,19)
Pinjaman Proyek / Kegiatan	122.276.877.857.066	119.736.420.943.282	2,12
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	**181.592.359.658.866**	**179.765.350.519.789**	**1,02**

F.2.3.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.295.865.914.969,00 dan Rp4.023.538.398.833,00. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp272.327.516.136,00 atau 6,77 persen dari TA 2024. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMD, dan BUMN.

Adapun rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	20.746.114.441	268.991.443.728	(92,29)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri	4.275.119.800.528	3.754.546.955.105	13,87
Jumlah Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	**4.295.865.914.969**	**4.023.538.398.833**	**6,77**

F.2.3.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp183.732.831.967,00 dan Rp 15.454.545.454,00. Realisasi penerimaan pembiayaan lain-lain pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp168.278.286.513,00 atau sebesar 1.088,86 persen dari TA 2024.

Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain merupakan Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

F.2.3.5 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp817.379.575.137.332,00 dan Rp629.807.306.465.724,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan dalam negeri pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp187.572.268.671.608,00 atau 29,78 persen dari TA 2024. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing.

Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pelunasan SBN-Rupiah	669.992.814.810.005	526.536.261.326.963	27,25
Pelunasan SBN-Valas	139.619.202.770.000	98.167.863.026.150	42,22
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	7.767.557.557.327	5.103.182.112.611	52,21
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	**817.379.575.137.332**	**629.807.306.465.724**	**29,78**

F.2.3.6 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp95.685.853.595.651,00 dan Rp87.454.196.251.177,00. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.231.657.344.474,00 atau 9,41 persen dari TA 2024.

Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Tunai	50.109.358.231.275	47.109.598.460.079	6,37
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Kegiatan	45.576.495.364.376	40.344.597.791.098	12,97
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan LN	**95.685.853.595.651**	**87.454.196.251.177**	**9,41**

F.2.3.7 Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.666.370.272.398,00 dan Rp4.242.437.773.274,00. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp423.932.499.124,00 atau 9,99 persen dari TA 2024. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* merupakan pengeluaran pemerintah atas penerusan pinjaman luar negeri yang diberikan untuk Pemda/BUMN/BUMD. Kenaikan ini disebabkan tingginya realisasi penarikan pinjaman pada PT Pertamina (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang masing-masing telah mencapai lebih dari 90 persen dari pagu DIPA Tahun 2025. Tingkat realisasi yang tinggi tersebut mencerminkan percepatan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek pada kedua BUMN dimaksud.

F.2.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp44.162.059.371.134,00 dan Rp24.391.505.836.682,00. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris sampai dengan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp68.553.565.207.816,00 atau 281,06 persen dari TA

2024. Penurunan Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris TA 2025 terutama berasal dari Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN.

Adapun rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	(926.516.355.113)	(215.134.088.039)	330,67
Transito (Neto)	31.457.339.657.690	1.581.530.989.101	1889,04
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga	(74.695.633.991.828)	23.022.929.532.814	(424,44)
Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	2.751.318.117	2.179.402.806	26,24
Arus Kas Bersih	**(44.162.059.371.134)**	**24.391.505.836.682**	**(281,06)**

F.2.4.1 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp926.516.355.113,00 dan minus Rp215.134.088.039,00. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp711.382.267.074,00 atau 330,67 persen dari TA 2024. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun,beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada fihak ketiga yang berhak menerimanya dan transitoris Fihak Ketiga.

Adapun rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK			
Penerimaan PFK 10% Gaji	31.593.758.669.740	29.645.135.369.904	6,57
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	-	-	-
Penerimaan PFK Beras BULOG	300.898.142.144	282.505.498.347	6,51
Penerimaan PFK 3% Iuran Kesehatan Pemda	9.655.553.515.927	9.803.358.930.922	(1,51)
Penerimaan PFK Simpanan Peserta TAPERA	-	(44.232.021)	-
Potongan PFK 1% Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	19.701.797.576	12.538.453.689	57,13
Penerimaan PFK Lain-lain	931.458.359.521	586.157.850.977	58,91
Penerimaan PFK Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	83.292.958.766.234	93.742.435.847.373	(11,15)
Jumlah Penerimaan PFK	**125.794.329.251.142**	**134.072.087.719.191**	**(6,17)**
PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK			
Pengeluaran PFK 10% Gaji	24.663.283.871.087	24.010.584.471.320	2,72
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	2.595.566.031.433	2.501.393.206.460	3,76
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	300.806.028.101	282.493.331.283	6,48
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	13.821.867.120.533	13.094.545.547.212	5,55
Pengembalian Penerimaan PFK Simpanan Peserta TAPERA	-	-	-
Pengembalian Penerimaan PFK 1% Jaminan Kesehatan anggota keluarga Lain	19.710.243.273	12.519.651.016	57,43
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	924.020.996.223	551.219.809.020	67,63
Pengeluaran PFK Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	84.395.591.315.605	93.834.465.790.919	(10,06)
Jumlah Pengeluaran PFK	**126.720.845.606.255**	**134.287.221.807.230**	**(5,63)**
Jumlah PFK (Neto)	**(926.516.355.113)**	**(215.134.088.039)**	**330,67**

F.2.4.2 Transito (Neto)

Transito pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.457.339.657.690,00 dan Rp1.581.530.989.101,00. Transito pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp29.875.808.668.589,00 atau 1.889,04 persen dari TA 2024. Transito merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) TA berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima TA berjalan maupun TA yang lalu.

Adapun rincian transito adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penerimaan Transito:			
Penerimaan Transito	8.410.641.057.432	7.704.307.194.510	9,17
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	42.400.384.006.060	43.755.133.894.202	(3,10)
Penerimaan Escrow	138.530.726.313.570	44.856.854.496.729	208,83
Jumlah Penerimaan Transito	**189.341.751.377.062**	**96.316.295.585.441**	**96,58**
Pengeluaran Transito:			
Pengeluaran Transito	8.327.944.380.424	7.736.988.486.665	7,64
Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan	42.466.504.193.425	43.729.731.126.229	(2,89)
Pengeluaran Escrow	107.089.963.145.523	43.268.044.983.446	147,50
Jumlah Pengeluaran Transito	**157.884.411.719.372**	**94.734.764.596.340**	66,66
Jumlah Transito (Nettto)	**31.457.339.657.690**	**1.581.530.989.101**	**1.889,04**

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp74.695.633.991.828,00 dan Rp23.022.929.532.814,00. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp97.718.563.524.642,00 atau 424,44 persen dari TA 2024. Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul antara lain karena transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya yangmana termasuk penerimaan DBH pada rekening TDF-TKD, Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas dan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas. Adapun rincian Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA			
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	233.648.527.015	21.523.200.280	985,57
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	76.092.426.913.697	63.810.630.958.302	19,25
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.471.338.928.571.047	1.248.540.286.768.333	17,84
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	-	43.288.138.641	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	975.030.979.049.350	913.587.576.712.203	6,73
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus	4.447.726.675.796	11.123.038.319.003	(60,01)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	514.786.531.240.340	215.365.785.806.611	139,03
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Sistem Perbankan	30.653.084.966.877	30.644.849.222.042	0,03
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	**3.072.583.325.944.122**	**2.483.136.979.125.415**	**23,74**
PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA			
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	234.060.107.470	21.291.024.677	999,34
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	70.605.183.583.722	63.354.669.888.701	11,44
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.492.346.361.385.587	1.200.232.933.248.118	24,34

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	41.958.846.030.087	42.309.794.012.363	(0,83)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	974.894.375.916.142	913.417.729.764.351	6,73
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus	4.448.186.823.636	11.123.038.319.003	(60,01)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	520.786.531.240.340	210.365.785.806.611	147,56
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Sistem Perbankan	42.005.414.848.966	19.288.807.528.777	117,77
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	**3.147.278.959.935.950**	**2.460.114.049.592.601**	**27,93**
Jumlah Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	**(74.695.633.991.828)**	**23.022.929.532.814**	**(424,44)**

F.2.4.4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank pada TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp2.751.318.117,00 dan Rp2.179.402.806,00. Kiriman Uang Antar Rekening Bank pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp571.915.311,00 atau 26,24 persen dari TA 2024. Kiriman Uang (KU) antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan sebaliknya. Pemindahbukuan intern rekening BUN dan pemindahbukuan intern KPPN.

Dalam transaksi KU TA 2025 dan TA 2024 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Adapun rincian Kiriman Uang Antar Rekening Bank adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	%
Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	25.829.057.376.919.636	23.993.912.119.408.940	7,65
Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	25.829.054.625.601.519	23.993.909.940.006.134	7,65
Jumlah Kiriman Uang (Neto)	**2.751.318.117**	**2.179.402.806**	**26,24**

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A. EKUITAS AWAL	**(3.576.615.643.905.782)**	**(3.328.187.950.388.477)**
B. SURPLUS / (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	**(1.826.835.132.882.523)**	**(1.584.452.178.371.533)**
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		
1. Koreksi Nilai Persediaan	-	-
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi	40.386.034.567.048	24.873.996.185.564
3. Revaluasi Aset	-	-
4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	(2.161.267.816.232)	1.437.380.985.498
5. Koreksi SAL	8.551.629.023.703	2.074.667.959.503
6. Lain-lain	197.552.129.021.108	69.599.521.111.279
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	**244.328.524.795.627**	**97.985.566.241.844**
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**1.121.679.330.006.001**	**1.236.867.333.530.144**
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI	**-**	**-**
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L		
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran	10.398.384.605	32.325.296.274
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah	(9.408.185.161.433)	(3.440.440.444.071)
3. Mutasi Kas BLU	(16.939.506.313.272)	4.579.700.230.037
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN Di K/L	**(26.337.293.090.100)**	**1.171.585.082.240**
KENAIKAN / (PENURUNAN) EKUITAS (B+C+D+E+F)	**(487.164.571.170.995)**	**(248.427.693.517.305)**
G. EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E+F)	**(4.063.780.215.076.777)**	**(3.576.615.643.905.782)**

G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.2.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 sebesar minus Rp3.576.615.643.905.782,00 dan minus Rp3.328.187.950.388.477,00. Rincian nilai Ekuitas awal tersebut adalah:

(dalam rupiah)

Kode BA	Uraian BA BUN	Ekuitas Awal 2025	Ekuitas Awal 2024
999.00	Akuntansi Pusat	617.359.217.555.613	611.132.486.226.114
999.01	BA BUN Utang	(8.918.758.010.216.974)	(8.294.956.193.243.511)
999.02	BA BUN Hibah	-	-
999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	4.510.402.924.552.562	4.153.239.563.426.996
999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	53.254.403.050.958	53.892.237.130.103
999.05	BA BUN Transfer ke Daerah	(104.065.441.088.863)	(105.810.575.987.129)
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(25.384.885.795.876)	(28.287.401.199.194)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(67.243.759.488.744)	(72.518.435.781.776)
999.09	Badan Lainnya	31.292.147.271.351	29.854.766.285.853
999.99	BA BUN Transaksi Khusus	339.557.330.501.172	337.184.179.970.476
Jumlah Ekuitas Awal		**(3.563.586.073.658.801)**	**(3.316.269.373.172.068)**
Eliminasi		**(13.029.570.246.981)**	**(11.918.577.216.409)**
Ekuitas Awal Setelah Eliminasi		**(3.576.615.643.905.782)**	**(3.328.187.950.388.477)**

Eliminasi sebesar minus Rp13.029.570.246.981,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Eliminasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar minus Rp11.918.577.216.409,00;
2. Eliminasi pada pos Surplus/ (Defisit) tahun 2024 sebesar Rp248.412.269.740,00 berasal dari estimasi beban setoran kepada pemerintah atas PNBP pengusahaan panas bumi pada BA BUN 999.99 DJA;
3. Eliminasi pada pos Koreksi Lain-lain tahun 2024 yang berasal dari mutasi dana sebesar minus Rp1.359.405.300.312,00 dengan rincian sebagai berikut:
    a. Mutasi pemindahbukuan PNBP panas bumi dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah sebesar minus Rp381.732.009.962,00;
    b. Mutasi dana sebesar Rp7.036.071.650,00 yang merupakan penyesuaian atas dana di Rekening Penampungan-K/L dana pada Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada BUN BA 999.08;
    c. Mutasi dana sebesar minus Rp25.723.362.000,00 yang merupakan penyesuaian atas dana di Rekening Penampungan-K/L dana pada Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada BUN BA 999.99; dan
    d. Mutasi sebesar minus Rp958.986.000.000,00 merupakan eliminasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat (BA 999.00) untuk menampung dana cadangan penjaminan yang telah disajikan sebagai cadangan penjaminan.

G.2.2. SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah Surplus/(Defisit) Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp1.826.835.132.882.523,00 dan minus Rp1.584.452.178.371.533,00. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Rincian nilai Defisit Laporan Operasional adalah:

(dalam rupiah)

No	Unit		31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Kode	Uraian		
1	999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(687.120.224.468.595)	(500.172.917.887.754)
2	999.02	BA BUN Hibah	17.852.909.329.612	43.938.294.510.430
3	999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	273.971.728.488.197	313.098.106.903.883
4	999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	3.358.806.870.880	899.810.076.307
5	999.05	BA BUN Transfer ke Daerah	(878.455.307.826.238)	(902.569.845.812.897)
6	999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(299.920.130.828.132)	(279.228.190.475.726)
7	999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(213.689.284.093.821)	(221.932.009.739.198)
8	999.99	BA BUN Transaksi Khusus	(43.084.724.561.401)	(38.733.838.216.318)
Jumlah			**(1.827.086.227.089.498)**	**(1.584.700.590.641.273)**
Penyesuaian			**251.094.206.975***	**248.412.269.740**
Jumlah Akhir			**(1.826.835.132.882.523)**	**(1.584.452.178.371.533)**

*)*Keterangan:*
Eliminasi pada pos Surplus/(Defisit) LO Tahun 2025 Audited berasal dari estimasi beban setoran kepada pemerintah atas PNBP pengusahaan panas bumi pada BA BUN 999.99 DJA sebesar Rp251.094.206.975,00.

G.2.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Jumlah koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp244.328.524.795.627,00 dan Rp97.985.566.241.844,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	40.386.034.567.048	24.873.996.185.564
Revaluasi Aset	-	-
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	(2.161.267.816.232)	1.437.380.985.498
Koreksi SAL	8.551.629.023.703	2.074.667.959.503
Lain-Lain	197.780.521.446.305	70.958.926.411.591
Total	**244.556.917.220.824**	**99.344.971.542.156**
Eliminasi	**(228.392.425.197)**	**(1.359.405.300.312)**
Jumlah	**244.328.524.795.627**	**97.985.566.241.844**

G.2.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

G.2.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.386.034.567.048,00 dan Rp24.873.996.185.564,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BA	31 Desember 2025	31 Desember 2024
999.03	287.175.947.043	792.365.999.831
999.08	70.139.716.828	(15.473.936.598)
999.99	40.028.718.903.177	24.097.104.122.331
	40.386.034.567.048	**24.873.996.185.564**

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp40.386.034.567.048,00 dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BA	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi	Total
999.03		287.175.947.043	287.175.947.043
999.08	70.139.716.828		70.139.716.828
999.99		40.028.718.903.177	40.028.718.903.177
	70.139.716.828	**40.315.894.850.220**	**40.386.034.567.048**

BA 999.03 sebesar Rp287.175.947.043,00 merupakan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi yang menambah ekuitas pada KPA Satker BLU LMAN.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pengakuan Aset berupa 1 bidang tanah di Kebon Besar berdasarkan Penetapan Direktur Utama LMAN	10.524.241.000
2	Koreksi Nilai Aset Peralatan AA Maramis Berdasarkan CCO	1.268.501.546
3	Penyesuaian saldo hutang retensi per 30 Juni 2025	(795)
4	Pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset Jalan Stasiun Senen 60A Kemayoran	2.065.304.000
5	Pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset Kali Besar Timur 27k	28.322.000
6	Pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset Komplek Ruko Ciputat Mega Mall F26 Ciputat	679.195.000
7	Pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset Jalan Dharma Bhakti 87 Pekalongan Barat (1)	2.853.697.000
8	Pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset Jalan Dharma Bhakti 87 Pekalongan Barat (2)	1.760.246.000
9	Pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset Jalan Karang Anyar 20 Semarang Tengah (1)	3.937.038.000
10	Pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset Jalan Karang Anyar 20 Semarang Tengah (2)	6.109.288.000
11	Penetapan Aset Kelolaan berupa bangunan pada aset tamansari karawaci	5.476.694.000
12	Pengakuan Aset berupa lampu candelier dll berdasarkan hasil pencacahan	2.926.455.559
13	Penghapusan Bangunan Aset Jalan Karang Anyar 20 Semarang Tengah Sesuai KEP-108/LMAN/2025	(162.466.000)
14	Penghapusan Bangunan Aset Cilandak Sesuai KEP-69/LMAN/2025	(385.063.000)
15	Penghapusan Akum Penyusutan Bangunan Aset Cilandak Sesuai KEP-69/LMAN/2025	88.860.692
16	Penghapusan Bangunan Aset Jalan Surabaya Sesuai KEP-92/LMAN/2025	(392.656.000)
17	Penghapusan Akum Penyusutan Bangunan Aset Jalan Surabaya Sesuai KEP-92/LMAN/2025	252.421.714
18	Pengakuan 68 AFE tahun 2024 (Kilang LNG Badak)	107.266.831.000
19	Kapitalisasi 94 AFE berupa renovasi (Kilang LNG Badak)	142.879.037.319
20	Koreksi pembulatan nilai	8
Total Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		**287.175.947.043**

1. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp70.139.716.828,00 berasal dari:

   a. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp68.945.612.108,00 pada DKPBPB Batam terdiri dari pencatatan atas aset Tanah yang diperoleh dari Hibah yang telah memiliki sertifikat atas nama Pemerintah RI dan dicatat sebesar Rp69.968.398.000,00 dan koreksi sebesar minus Rp1.022.785.892,00 yang merupakan kesalahan pencatatan akun aset yang perlu dilakukan koreksi;

   b. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada satker BP Batam (984423) sebesar Rp1.067.389.600,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap Berwujud karena pekerjaan telah selesai dilaksanakan; dan

   c. Koreksi pencatatan aset pra APBN yang dilakukan pada tahun 2025 pada SKK Migas sebesar Rp126.715.120,00.

2. BA 999.99 sebesar Rp40.028.718.903.177,00 terdapat pada DJKN dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	UAKPABUN TK BLBI	2.270.765.915.137
2.	UAKPABUN TK PKP2B	(895.847.843.629)
3.	UAKPABUN TK EKS PERTAMINA	67.848.825.000
4.	UAKPABUN TK KKKS SKK Migas	37.997.171.383.031
5.	UAKPABUN TK BMN IDLE	212.938.454
6.	UAKPABUN KKKS PBMN	(16.162)
7.	UAKPABUN TK KKKS BPMA	588.557.920.326
8.	UAKPABUN TK Aset Lain-lain	9.781.020
Total Koreksi Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi		**40.028.718.903.177**

   a. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK BLBI per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.270.765.915.137,00 berupa koreksi perubahan nilai atas

      1) Hibah aset properti eks BDL kepada Pemkot Binjai sesuai BAST-3/MK/KN.4/2025 tanggal 6 November 2025 sebesar Rp226.590.000,00;

      2) Kenaikan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp2.268.577.388.559,00; dan

      3) Kenaikan nilai saham (nonbank) eks kelolaan PT PPA Rp2.415.116.578,00.

   b. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK PKP2B per 31 Desember 2025 sebesar minus Rp895.847.843.629,00 berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan dikarenakan hasil revaluasi dengan rincian sebagai berikut:

      1) Koreksi tambah sebesar Rp15.230.250.000,00 terdiri atas:

         Koreksi nilai wajar hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN non tanah sebesar Rp15.230.250.000,00 pada PT Kaltim Prima Coal sesuai Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara nomor S-186/KN.2/2025 tanggal 22 Juli 2025.

      2) Koreksi kurang sebesar Rp911.078.093.629,00 terdiri atas:

         a) Koreksi akumulasi penyusutan akibat penyesuaian masa manfaat dengan kode barang sesuai PMK 29/PMK.06/2010 dan KMK 295/KM.6/2019 yang seharusnya sudah habis masa manfaat sebesar Rp41.634.270.277,00 pada PT Berau Coal;

b) Koreksi akumulasi penyusutan akibat penyesuaian masa manfaat dengan kode barang sesuai PMK 29/PMK.06/2010 dan KMK 295/KM.6/2019 yang seharusnya sudah habis masa manfaat sebesar Rp10.071.611.000,00 pada PT Arutmin Indonesia;

c) Koreksi akumulasi penyusutan akibat penyesuaian masa manfaat dengan kode barang sesuai PMK 29/PMK.06/2010 dan KMK 295/KM.6/2019 yang seharusnya sudah habis masa manfaat sebesar Rp858.594.216.222,00 pada PT Kaltim Prima Coal;

d) Koreksi akumulasi penyusutan dikarenakan sudah habis masa manfaat pada PT Kaltim Prima Coal sebagaimana hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Non Tanah sebesar Rp418.554.000,00; dan

e) Koreksi terkait dengan BMN yang tidak memenuhi syarat minimum kapitalisasi dan masuk dalam BMN Ekstrakomptabel pada PT Arutmin Indonesia dan PT Berau Coal yaitu sebesar Rp359.442.130,00.

c. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK Eks Pertamina per 31 Desember 2025 sebesar Rp67.848.825.000,00 yang merupakan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Reval dari hasil inventarisasi dan penilaian sampai dengan tahun 2025.

d. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp37.997.171.383.031,00 dan Rp21.796.072.194.998,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan dikarenakan hasil revaluasi. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

1) Mutasi tambah sebesar Rp62.001.951.487.752,00 terdiri atas:

a) Koreksi tambah sebesar Rp60.347.112.292.476,00 berupa pembenahan catatan yang disebabkan ada koreksi atas saldo awal, PIS Tahun sebelumnya, *transfer in*, selisih pembulatan, dan koreksi tambah nilai perolehan:

(1) HBM sebesar Rp56.671.532.312.002,00;

(2) HBI sebesar Rp9.488.559.334,00;

(3) MP sebesar Rp1.174.461.184.391,00; dan

(4) Tanah sebesar Rp2.491.630.236.749,00.

b) Koreksi tambah atas pengembalian (*return*) Material Persediaan *capital* sebesar Rp421.543.046.965,00; dan

c) Koreksi tambah atas pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.233.296.148.311,00 terdiri atas:

(1) HBM sebesar Rp1.229.253.058.279,00; dan

(2) HBI sebesar Rp4.043.090.032,00.

2) Mutasi kurang sebesar Rp24.004.780.104.721,00 terdiri atas:

a) Koreksi kurang sebesar Rp4.413.773.325.853,00 pembenahan penyusutan aset:

(1) HBM sebesar Rp4.412.255.522.377,00; dan

(2) HBI sebesar Rp1.517.803.476,00.

b) Koreksi kurang sebesar Rp18.612.057.415.784,00 atas pembenahan pencatatan aset:

(1) HBM sebesar Rp6.390.819.147.291,00;

(2) HBI sebesar Rp8.617.950.396,00;

(3) MP sebesar Rp12.132.668.542.390,00; dan

(4) Tanah sebesar Rp79.951.775.707,00.

c) Koreksi kurang sebesar Rp929.645.519.520,00 karena pemindahtanganan tahun lalu untuk:

(1) HBM sebesar Rp153.627.680.988,00;

(2) HBI sebesar Rp396.997.449,00;

(3) MP sebesar Rp775.620.841.083,00; dan

(4) Tanah sebesar Rp0,00.

d) Koreksi sebesar Rp49.303.843.564,00 karena transfer keluar tahun lalu atas tanah KKKS PT. Pertamina Hulu Rokan.

e. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK BMN *Idle* per 31 Desember 2025 sebesar Rp212.938.454,00 yang terdiri dari:

1) Koreksi tambah sebesar Rp225.938.454,00 dengan rincian:

a) Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi yang berasal dari pencatatan BMN eks BMN *Idle* pada KPKNL Mamuju berupa 1 (satu) bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 9.022 m² yang berlokasi di Jalan Tahaya-haya, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan nilai perolehan Rp200.000.000,00. Aset ini dicatat sebagai Saldo Awal per 31 Desember 2025. Koreksi dilakukan karena substansi serah terima dan dokumen pendukung terjadi pada Tahun 2024, sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BAST-0281/87.31/KU.01.02/2024 tanggal 7 Maret 2024;

b) Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp25.925.246,00 dilakukan untuk mengoreksi kelebihan akumulasi penyusutan aset *idle*; dan

c) Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp13.208,00 dilakukan untuk mengoreksi kelebihan akumulasi penyusutan Properti Investasi.

2) Koreksi kurang sebesar Rp13.000.000,00 dengan rincian:

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar minus Rp13.000.000,00 karena terdapat 2 (dua) unit bangunan BMN eks BMN *Idle* yang dikeluarkan dari neraca dan disajikan sebagai aset ekstrakomptabel, dengan rincian sebagai berikut:

a) Satu unit bangunan BMN eks BMN Idle pada KPKNL Surabaya dengan nilai perolehan Rp8.000.000,00 yang berlokasi di Jalan Brondong, Desa Brengkok, Kec. Brondong, Kab. Lamongan; dan

b) Satu unit bangunan BMN eks BMN *Idle* pada KPKNL Medan dengan nilai perolehan Rp5.000.000,00 yang berlokasi di Jl. Thamrin, Kec. Babalan, Kab. Langkat.

f. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK KKKS PBMN per 31 Desember 2025 sebesar minus Rp16.162,00 yang berasal dari koreksi saldo awal Material Persediaan pada KKKS Medco EP Bengara disesuaikan dengan nilai aset yang tercantum dalam BAST.

g. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK KKKS BPMA per 31 Desember 2025 sebesar Rp588.557.920.326,00 yang merupakan jumlah dari koreksi nilai aset lainnya non revaluasi sebagai berikut:

1) Koreksi tambah sebesar Rp603.137.242.463,00 dengan rincian:

a) PIS Tahun Sebelumnya HBM pada KKKS Medco E&P Malaka dan Triangle Pase Inc sebesar Rp2.877.757.467,00;

b) Transfer Masuk HBM pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp438.911.891,00;

c) *Transfer In* MP pada KKKS Medco E&P Malaka yang berasal dari PT Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Lematang sebesar Rp965.209.850,00;

d) Koreksi pembenahan pencatatan HBI pada KKKS ONWA PTE Ltd dan Aceh Energi sebesar Rp21.111.336,00; dan

e) Koreksi penyusutan sebesar Rp598.834.251.919,00.

2) Koreksi kurang sebesar Rp14.579.322.137,00 dengan rincian:

a) Koreksi Saldo Awal HBM pada KKKS ONWA Pte Ltd. Sebesar Rp3.071.241,00

b) Koreksi Saldo Awal MP sebesar Rp200,00;

c) Koreksi saldo – Tanah pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp500,00;

d) Pemakaian *Capital* MP pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp11.580.756.922,00;

e) *Transfer Out Capital* MP dari Medco E&P Malaka ke KKKS Medco E&P Grissik Ltd sebesar Rp2.985.930.470,00;

f) Koreksi Pembenahan Pencatatan HBI pada KKKS ONWA PTE Ltd sebesar Rp1.159.872,00; dan

g) Koreksi Penyusutan – HBI sebesar Rp8.402.932,00.

h. Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Kesalahan Mendasar Tahun 2025 adalah sebesar Rp9.781.020,00 yang merupakan koreksi pencatatan saldo barang gratifikasi saldo awal untuk transaksi sampai dengan 31 Desember 2024 karena kesalahan pencatatan.

G.2.3.3. Revaluasi Aset

Revaluasi Aset per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

G.2.3.4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya

Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 minus sebesar Rp2.161.267.816.232,00 dan Rp1.437.380.985.498,00 merupakan mutasi saldo Ekuitas pada neraca

konsolidasian BUN yang berasal dari penambahan net aset satker Unit Badan Lainnya (UBL). Penambahan net aset satker UBL ini merupakan akumulasi dari kenaikan dan penurunan Ekuitas bersih UBL Bukan Satker tahun 2025 dengan kontra akun Aset Lainnya Pada Unit Badan Lainnya. Rincian penambahan net aset satker UBL adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Unit Badan Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Otorita Asahan	-	-
2	Yayasan Harapan Kita/Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)	-	(4.334.012.243)
3	Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia "Graha Purna Yudha" (YGVRI)	(1.007.206.713)	2.304.949.886
4	Badan Amil Zakat (Baznas)	40.411.988.535	39.709.723.945
5	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	5.927.230.303	6.235.834.197
6	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	-	-
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	129.096.876.555	1.289.991.896.203
8	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	(2.335.696.704.912)	103.472.593.510
Jumlah		**(2.161.267.816.232)**	**1.437.380.985.498**

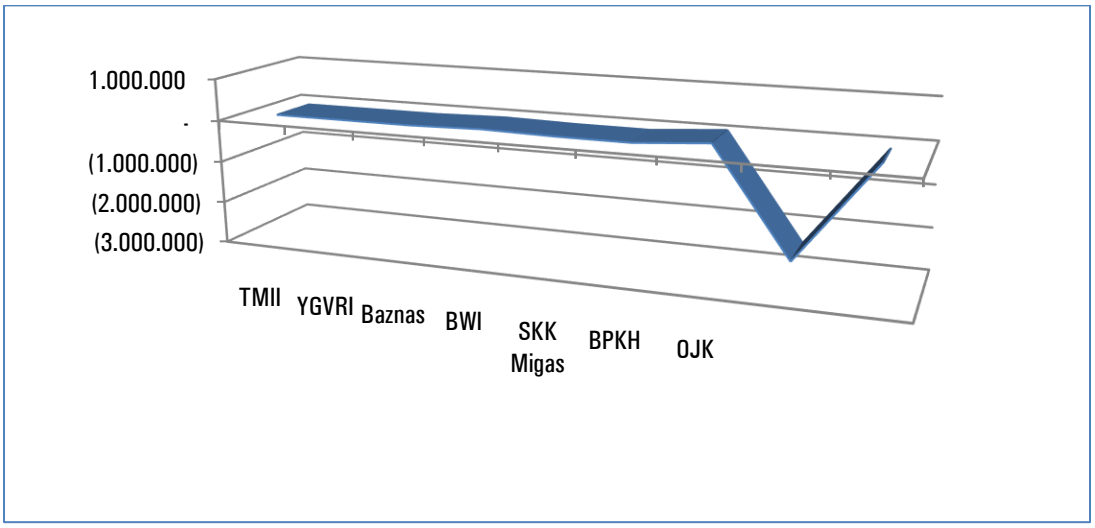

Penjelasan mutasi Ekuitas adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi Ekuitas sebesar Rp0,00 menunjukkan bahwa nilai Aset Otorita Asahan yang telah dilikuidasi periode 2022 *Audited* dan telah dilakukan penyusutan tidak mengalami perubahan. Pada periode penyusuan Laporan Keuangan BUN Tahun 2025 *Audited*, proses likuidasi pada Otorita Asahan masih berjalan.
2. Mutasi Ekuitas yang berasal dari YHK/BPP TMII per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan minus Rp4.334.012.243,00. Mutasi ekuitas sebesar Rp0,00 pada tahun 2025 karena proses likudasi telah selesai pada penyusunan Laporan Keuangan BUN Tahun 2024 *Audited*.
3. Mutasi Ekuitas yang berasal dari YGVRI per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp1.007.206.713,00 dan Rp2.304.949.886,00. Mutasi ekuitas sebesar minus Rp1.007.206.713,00 berasal dari defisit operasional YGVRI, rugi komprehensif, dan koreksi ekuitas awal tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Defisit opersional YGVRI sebesar Rp1.255.025.552,00 yang berasal dari pendapatan sebesar Rp7.595.400.197,00 dikurangi dengan beban sebesar Rp8.850.425.749,00;

b. Rugi komprehensif tahun 2025 sebesar Rp65.054.675,00; dan

c. koreksi ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp312.873.514,00. Koreksi ekuitas awal tahun 2025 dilakukan karena penyajian kembali *(restatement)* atas laporan keuangan tahun 2024 *Audited* oleh YGVRI sebagai akibat penerapan SAK EP. *Restatement* ini mengakibatkan saldo ekuitas bersih YGVRI tahun 2024 *Audited* berubah dari semula Rp6.574.375.517,00 menjadi Rp6.887.249.031,00 atau naik sebesar Rp312.873.514,00. Atas perubahan ini, tidak dilakukan perubahan saldo ekuitas pada Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited*, tetapi melakukan koreksi saldo awal tahun 2025 pada Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited*.

4. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Baznas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp40.411.988.535,00 dan Rp39.709.723.945,00. Mutasi Ekuitas sebesar Rp40.411.988.535,00 berasal dari surplus Laporan Operasional Baznas dan koreksi saldo awal dengan rincian sebagai berikut :

   a. Defisit laporan operasional pada dana zakat sebesar Rp51.696.945.486,00;

   b. Surplus laporan operasional dana infak/sedekah sebesar Rp107.261.900.446,00;

   c. Koreksi saldo awal dana infak/sedekah sebesar minus Rp7.400.000,00;

   d. Surplus laporan operasional dana amil sebesar Rp4.426.154.733,00;

   e. Koreksi saldo awal dana amil sebesar minus Rp9.783.677,00; dan

   f. Koreksi penurunan ekuitas sebesar minus Rp19.561.937.481,00 yang berasal dari perbedaan Laporan Keuangan Baznas pada Tahun anggaran 2024 *Audited* dengan Laporan Keuangan BUN Tahun 2024 *Audited*. Hal tersebut dikarenakan Aset Lainnya pada Laporan Keuangan BUN Tahun 2024 *Audited* dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Baznas Tahun 2024 *Unaudited*. Penyampaian Laporan Keuangan Baznas Tahun 2024 *Audited* dilakukan setelah masa penyusunan Laporan Keuangan BUN Tahun 2024 *Audited* berakhir.

5. Mutasi Ekuitas yang berasal dari BWI per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.927.230.303,00 dan Rp6.235.834.197,00. Mutasi Ekuitas sebesar Rp5.927.230.303,00 berasal dari surplus Laporan Operasional BWI penyesuaian saldo awal 2025 dengan rincian sebagai berikut:

   a. Surplus dana pengelolaan APBN sebesar Rp536,00;

   b. Surplus dana pengelolaan non APBN sebesar Rp147.051.715,00;

   c. Defisit dana pengelolaan non kas sebesar Rp110.707.105,00;

   d. Surplus dana pengelolaan lembaga kenazhiran sebesar Rp3.128.336.329,00;

   e. Surplus dana operasional sebesar Rp1.449.955.357,00;

   f. Surplus dana Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebesar Rp221.091.272,00;

   g. Surplus dana Lembaga Pelatihan dan Pengembangan (LPP) sebesar Rp107.418.781,00;

   h. Surplus dana Satu Wakaf sebesar Rp172.597,00; dan

i. Pengalihan LSP, LPP dan Satu Wakaf ke bawah naungan BWI diperlakukan sebagai kombinasi bisnis entitas sepengendali sesuai PSAK 338. Meskipun PSAK 338 pada umumnya mensyaratkan penyajian retrospektif, keterbatasan data historis sebelum tahun 2024 pada BWI menyebabkan BWI menerapkan penyajian secara prospektif sejak tanggal pengendalian efektif di tahun 2025 sehingga terdapat penyesuaian saldo awal 2025 akibat dari penyatuan entitas yang terdiri atas:

1) Penambahan dari penyatuan entitas sebesar Rp898.253.681,00; dan
2) Penyesuaian saldo awal dengan pembatasan dari pemberi sumber daya sebesar Rp85.657.139,00.

6. Mutasi Ekuitas yang berasal dari SKK Migas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi Ekuitas sebesar Rp0,00 pada tahun 2025 *Audited* merupakan kenaikan/penurunan Ekuitas setelah penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Penjelasan	Jumlah
I. Surplus (Defisit) Kinerja Bersih	(284.052.575.175)
II. Koreksi Ekuitas (A - B + C)	275.831.721.032
a. Ditambah Mutasi Imbalan pasca kerja SKK Migas terdiri dari selisih imbalan pasca kerja TA 2025 dikurangi imbalan pasca kerja TA 2024	277.825.501.664
b. Dikurang Mutasi Ekuitas SKK Migas satker 999.08	1.993.780.632
c. Ditambah Penyesuaian LK 2024 *Audited* LKBL dengan SKK Migas	-
III. Mutasi Penyesuaian Penyajian Ekuitas Negatif	8.220.854.143
Kenaikan/Penurunan Ekuitas setelah penyesuaian (I + II + III)	**-**

7. Mutasi Ekuitas yang berasal dari BPKH per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp129.096.876.555,00 dan Rp1.289.991.896.203,00. Mutasi Ekuitas Laporan Keuangan BPKH sebesar Rp129.096.876.555,00 terdiri dari:

a. Defisit sebesar Rp4.766.262.254,00;

b. Penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp93.218.638.903,00;

c. Koreksi aset neto senilai Rp31.111.975.394,00; dan

d. Koreksi penambahan Ekuitas sebesar Rp4,00 yang berasal dari perbedaan Laporan Keuangan BPKH pada Tahun anggaran 2024 *Audited* dengan Laporan Keuangan BUN Tahun 2024 *Audited* akibat selisih pembulatan. Hal tersebut dikarenakan Aset Lainnya Tahun Lalu pada BPKH belum berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* yang masih dalam tahap pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyampaian Laporan Keuangan BPKH Tahun 2024 *Audited* yang mendapat Opini BPK dilakukan setelah masa penyusunan Laporan Keuangan BUN Tahun 2024 *Audited* berakhir.

8. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp2.335.696.704.912,00 dan Rp103.472.593.510,00. Mutasi ekuitas merupakan kenaikan/penurunan Ekuitas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan setelah penyesuaian. Mutasi Ekuitas sebesar minus Rp2.335.696.704.912,00 merupakan penyesuaian Ekuitas dari OJK Bukan Satker dan Satker BA 999.08 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
a. surplus (defisit) OJK Bukan Satker	(1.867.820.913.033)
b. Penghasilan (beban) komprehensif lainnya - OJK Bukan Satker	(443.661.591.850)
c. Penyesuaian Aset Neto - OJK Bukan Satker	(24.229.145.758)
d. Mutasi Ekuitas OJK satker 999.08	(14.945.729)
e. Penyesuaian Saldo *Audited*	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas setelah penyesuaian (a+b+c-d+e)	**(2.335.696.704.912)**

Berdasarkan Laporan Penghasilan Komprehensif Tahun 2025 *Audited*, OJK Bukan Satker mengalami defisit per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.867.820.913.033,00 setelah sebelumnya mengalami surplus per 31 Desember 2024 sebesar Rp578.551.611.517,00. Defisit OJK Bukan Satker tahun 2025 disebabkan oleh total beban yang lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan, kondisi tersebut utamanya dipengaruhi oleh tingginya beban dari kegiatan administratif serta pengakuan Beban Pajak Penghasilan sebesar Rp1.532.604.343.405,00.

G.2.3.5. Koreksi SAL

Koreksi SAL sampai dengan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.551.629.023.703,00 dan Rp2.074.667.959.503,00. Koreksi SAL merupakan mutasi transaksi atas akun SILPA (311211) yang merupakan jurnal penyesuaian SILPA selisih kurs atas rekening milik BUN pada Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah berdasarkan Perdirjen Nomor 19 Tahun 2016 serta transaksi pada akun koreksi 311212 yang merupakan transaksi pengembalian pendapatan negara tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi transaksi pada akun SILPA (311211) merupakan jurnal penyesuaian SILPA selisih kurs atas rekening milik BUN pada Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah berdasarkan Perdirjen Nomor 19 Tahun 2016; dan
2. Mutasi transaksi pada akun Koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu (311212) merupakan transaksi pembayaran pengembalian pendapatan negara tahun anggaran yang lalu menggunakan beban SAL, yang ditatausahakan oleh Satker Pengembalian Penerimaan Negara atas Beban SAL (999254) pada Direktorat Sistem Perbendaharaan.

(dalam rupiah)

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi 2025	Jumlah Mutasi 2024
311211	SILPA	8.579.398.355.438	2.128.035.811.698
311212	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang lalu	(27.769.331.735)	(53.367.852.195)
Jumlah		**8.551.629.023.703**	**2.074.667.959.503**

G.2.3.6. Lain-lain

Pos Lain-lain sampai dengan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah Rp197.552.129.021.108,00 dan Rp69.599.521.111.279,00. Nilai Lain-lain sebesar Rp197.552.129.021.108,00 merupakan nilai koreksi lain-lain sebesar Rp197.780.521.446.305,00 ditambah eliminasi sebesar minus Rp228.392.425.197,00. Rincian nilai pos lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Unit		31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kode	Uraian		
999.00	Akuntansi Pusat	(85.205.020.713.407)	(54.918.509.819.096)
999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(10.077.399.116.880)	(4.421.635.392.466)
999.02	BA BUN Hibah	1.120.354.563.337	2.628.551.786.158
999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	198.104.333.088.105	69.519.904.203.683
999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	(1.279.520.341)	(9.799.919.288)
999.05	BA BUN Transfer ke Daerah	(1.553.222.339.886)	361.495.176.677
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(4.747.718.794.795)	(10.521.889.415.919)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(18.059.768.499)	12.143.316.695.349
999.99	BA BUN Transaksi Khusus	100.158.534.048.671	56.177.493.096.493
Jumlah		**197.780.521.446.305**	**70.958.926.411.591**
Penyesuaian*		**(228.392.425.197)**	**(1.359.405.300.312)**
Lain-lain setelah penyesuaian		**197.552.129.021.108**	**69.599.521.111.279**

*) Penyesuaian merupakan eliminasi atas transaksi yang sama yang disajikan pada dua BA BUN yang berbeda

Eliminasi pada pos koreksi lain-lain tahun 2025 berasal dari mutasi dana sebesar minus Rp228.392.425.197,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi pemindahbukuan PNBP panas bumi dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah sebesar minus Rp248.412.269.740,00;
2. Mutasi dana sebesar Rp17.999.734.731,00 yang merupakan penyelesaian utang kepada pihak ketigas atas dana di Rekening Penampungan-K/L dana pada Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) tahun 2025 pada BUN BA 999.08; dan
3. Mutasi dana sebesar Rp2.020.109.812,00 yang merupakan penyelesaian utang kepada pihak ketigas atas dana di Rekening Penampungan-K/L dana pada Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) tahun 2025 pada BUN BA 999.99.

Pos Lain-Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas pada prinsipnya berasal dari koreksi dan/atau penyesuaian yang menggunakan akun Ekuitas, koreksi nilai Utang pihak ketiga, reklasifikasi Utang diestimasi, pemotongan atas lebih salur-Piutang PNBP, dan reklasifikasi Piutang Lain-Lain.

1. Lain-Lain pada BA 999.00

Lain-Lain sebesar minus Rp85.205.020.713.407,00 pada BA 999.00 merupakan mutasi transaksi atas akun penggunaan SAL 311112 dan akun ekuitas 391111 pada *ledger* akrual.

(dalam rupiah)

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi
311111	SAL	5
311112	Penggunaan SAL	(85.600.000.000.000)
391111	Ekuitas	394.979.286.588
Jumlah		**(85.205.020.713.407)**

2. Lain-Lain pada BA 999.01

Lain-Lain sebesar minus Rp10.077.399.116.880,00 pada BA 999.01 merupakan penyesuaian atas nilai utang pinjaman dikarenakan adanya penyesuaian utang yang masih harus dibayar dan penyesuaian pinjaman luar negeri yang mempengaruhi ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Komponen Penyesuaian Ekuitas	Nominal
Utang Pinjaman Luar Negeri Proyek	(2.930.438.971.170)
Utang Pinjaman Luar Negeri Program	(7.146.960.145.710)
Total Penyesuaian	**(10.077.399.116.880)**

3. Lain-Lain pada BA 999.02

Lain-Lain sebesar Rp1.120.354.563.337,00 pada BA 999.02 merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan-kesalahan mendasar lain-lain yang berasal dari Satker 977263 (Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen) sebagai dampak pengesahan hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

4. Lain-Lain pada BA 999.03

Lain-Lain sebesar Rp198.104.333.088.105,00 pada BA 999.03 merupakan koreksi akibat adanya transaksi yang dijurnal langsung kepada ekuitas. Berikut adalah rincian mutasi lain-lain berdasarkan UAKPA dibawah UAPBUN BA 999.03:

(dalam rupiah)

No.	Nama UAKPA	Nilai
1	KPA Dit PNBP DJA	1.876.077.215.676
2	BLU LPDB KUMKM	4.136.441.423
3	KPA BLU LMAN	7.359.507.827
4	KPA BP BUMN	70.223.141.268.824
5	KPA DJKN	(7.175.683.207.571)
6	KPA Dit SMI	(5.833.885.794)
7	KPA Modal Awal BP Tapera	157.755.323
8	UAIP	132.695.286.905.641
9	KPA Badan Bank Tanah	479.599.087.750
10	KPA BLU BPDLH	91.998.999
Jumlah		**198.104.333.088.098***

*) Selisih Rp7,00 karena pembulatan

Adapun penjelasan lebih lanjut atas rincian mutasi lain-lain masing masing KPA adalah sebagai berikut:

a. Mutasi lain-lain pada KPA Dit PNBP DJA

Mutasi lain-lain pada KPA Dit PNBP DJA pada Tahun 2025 *Audited* sebesar Rp1.876.077.215.676,00 yang berasal dari:

1) Penambahan Ekuitas sebesar Rp1.793.292.242.520,00 yang berasal dari pembayaran dividen BUMN yang dicatat menggunakan metode ekuitas;

2) Penambahan Ekuitas sebesar Rp54.412.409.391,00 akibat pembayaran piutang dividen interm PT BRI TB 2024 sebesar Rp10.882.481.878.260,00 sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Bukan Pajak sebesar Rp54.412.409.391,00;

3) Penambahan Ekuitas sebesar Rp26.650.000.000,00 akibat penyesuaian jadwal pembayaran piutang Perum Perumnas yang mengakibatkan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang PNBP juga dilakukan sebesar Rp26.650.000.000,00; dan

4) Penambahan Ekuitas sebesar Rp1.722.563.765,00 akibat penyesuaian jadwal pembayaran piutang Perum Perumnas sehingga Piutang Jangka Panjang Lainnya menjadi sebesar Rp57.225.637.648,00.

b. Mutasi Lain-lain KPA BLU LPDB KUMKM

Mutasi lain-lain pada KPA BLU LPDB KUMKM sebesar Rp4.136.441.423,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Rincian Koreksi Lain-lain	Jumlah
Mutasi Tambah	
(+) Koreksi piutang Sri Wigati TL Temuan BPK, semula BAST Kejaksaan diakui sebagai *Crash Program* di TA 2025	1.115.241.358
(+) Pengalihan dari program kementerian per 31 Des 2025	7.142.902.973
Mutasi Kurang	
(-) Koreksi pencatatan atas lebih bayar piutang dana bergulir	(212.229)
(-) Koreksi penyisihan piutang Sri Wigati TL Temuan BPK, semula BAST Kejaksaan diakui sebagai *Crash Program* di TA 2025	(835.241.358)
(-) Mutasi NRB Tahun 31 Des 2025	(3.286.249.320)
Koreksi Lain-lain	**4.136.441.424***

*) Selisih Rp1,00 karena pembulatan

1) Mutasi tambah terdiri dari:

   a) Koreksi piutang Sri Wigati TL Temuan BPK, semula BAST Kejaksaan diakui sebagai *Crash Program* di TA 2025 sebesar Rp1.115.241.358,00; dan

   b) Pengalihan dari program kementerian sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp7.142.902.973,00. Nilai tersebut merupakan pembayaran tunai dari koperasi kepada LPDB yang mendapatkan program dana bergulir Kementerian Koperasi tahun 2000 s.d. 2007.

2) Mutasi kurang terdiri dari:

   a) Nilai sebesar Rp212.229,00 merupakan nilai koreksi atas pencatatan lebih bayar pada piutang dana bergulir;

   b) Koreksi penyisihan piutang Sri Wigati TL Temuan BPK, semula BAST Kejaksaan diakui sebagai *Crash Program* di TA 2025 Rp835.241.358,00; dan

   c) Mutasi Nilai Realisasi Bersih tahun 2025 sebesar Rp3.286.249.320,00. Subdivisi Akuntansi dan Pelaporan mencatat Nilai Realisasi Bersih Dana Bergulir periode 31 Desember 2025 berdasarkan surat Kementerian Koperasi Nomor B-31/SM.5.KOP/KU.02.00/2026 hal Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir Kementerian Koperasi Periode Semester II Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2026.

c. Mutasi lain-lain pada KPA BLU LMAN

Mutasi lain-lain pada KPA BLU LMAN sebesar Rp7.359.507.827,00 merupakan koreksi yang berasal dari retur dana jangka panjang yang mengatribusi pengesahan belanja modal sebelum tahun 2025.

d. Mutasi lain-lain pada KPA BP BUMN

Mutasi Lain pada KPA BP BUMN pada Tahun 2025 *Audited* adalah sebesar Rp70.223.141.268.824,00 yang terdiri dari mutasi lain-lain pada ILKPN dan mutasi di luar ILKPN dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Perusahaan	Lain-lain ILKPN
Lain-lain ILKPN		
1	BPI Danantara	3.065.522.735.000.000
2	Holding BUMN	30.155.532.539.544
3	Perusahaan Umum (Perum)	(224.651.996.068)
4	Perseroan (Persero)	(3.023.018.751.963.700)
5	Minoritas/Non BUMN	(1.562.492.417.050)
	Total	**70.872.371.162.726**
Mutasi di luar ILKPN		
1	Penyesuaian PMN LEN pada SMT I 2025	(649.229.893.901)
	Total	**(649.229.893.901)**
	Total mutasi lain-lain	**70.223.141.268.825**

*) Selisih Rp1,00 karena pembulatan

Selanjutnya Rincian mutasi dari masing masing BPI Danantara, Holding, BUMN Persero, Perum dan Minoritas dapat dilihat pada Lampiran mutasi lain LKIP. Adapun ikhtisarnya adalah sebagai berikut:

1) Mutasi lain-lain yang berasal dari ILKPN

a) BPI Danantara

Rincian mutasi lain-lain sebesar Rp3.065.522.735.000.000,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
1	OCI Reval		
2	OCI Non Reval		2.028.870.000.000
3	Dividen		
4	Mutasi BPYBDS		
5	PKBL		
6	Selisih dijelaskan terdiri dari:		
	A Selisih karena *Treasury Stock*/(ESOP)		
	B Selisih saldo awal	-	
	C Selisih Restatement	-	
	d Selisih Pencatatan Dividen	-	
	E Selisih Pencatatan tambahan modal disetor	1.027.572.480.000.000	
	F Selisih Kurs Penjabaran Lap Keuangan		
	G Penihilan Ekuitas Negatif	-	
	H Selisih karena Komponen LPE Lain	2.035.921.385.000.000	
	I Selisih karena pembulatan excel		
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		3.063.493.865.000.000
7	**Saldo akhir (1+2+3+4+5+6)**		**3.065.522.735.000.000**

b) Holding BUMN

Rincian mutasi lain-lain sebesar Rp30.155.532.539.544,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
1	OCI Reval		-
2	OCI Non Reval		17.526.440.000
3	Dividen		(809.061.427.892)
4	Mutasi BPYBDS		
5	PKBL		
6	Selisih dijelaskan terdiri dari:		
	a. Selisih karena Treasury Stock/(ESOP)	-	
	b. Selisih saldo awal	-	
	c. Selisih Restatement	-	
	d. Selisih Pencatatan Dividen	-	
	e. Selisih Pencatatan tambahan modal disetor	10.379.520.000.000	
	f. Selisih Kurs Penjabaran Lap Keuangan		
	g. Penihilan Ekuitas Negatif	-	
	h. Selisih karena Komponen LPE Lain	20.567.547.527.436	
	i. Selisih karena pembulatan excel		
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		30.947.067.527.436
7	**Saldo akhir (1+2+3+4+5+6)**		**30.155.532.539.544**

c) Perusahaan Umum (Perum)

Rincian mutasi lain-lain sebesar minus Rp224.651.996.068,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
1	OCI Reval		
2	OCI Non Reval		(115.043.856.917)
3	Dividen		(43.054.538.069)
4	Mutasi BPYBDS		
5	PKBL		
6	Selisih dijelaskan terdiri dari:		
	a Selisih karena *Treasury Stock* /(ESOP)		
	b Selisih saldo awal	(44.771.831.459)	
	c Selisih Restatement	(21.841.140.536)	
	d Selisih Pencatatan Dividen	7	
	e Selisih Pencatatan tambahan modal disetor	-	
	f Selisih Kurs Penjabaran Lap Keuangan		
	g Penihilan Ekuitas Negatif	-	
	h Selisih karena Komponen LPE Lain	59.370.906	
	i Selisih karena pembulatan excel		
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		(66.553.601.082)
7	**Saldo akhir (1+2+3+4+5+6)**		**(224.651.996.068)**

d) Perseroan (Persero)

Rincian mutasi lain-lain sebesar minus Rp3.023.018.751.963.700,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
1	OCI Reval		
2	OCI Non Reval		12.591.973
3	Dividen		(10.882.489.280.886)
4	Mutasi BPYBDS		
5	PKBL		
6	Selisih dijelaskan terdiri dari:		
	a Selisih karena *Treasury Stock* /(ESOP)	-	
	b Selisih saldo awal	(550.750)	
	c Selisih Restatement	(537)	
	d Selisih Pencatatan Dividen	10.882.475.215.265	
	e Selisih Pencatatan tambahan modal disetor	1.504.832	
	f Selisih Kurs Penjabaran Lap Keuangan	-	
	g Penihilan Ekuitas Negatif	(10.185.646.704.691)	
	h Selisih karena Komponen LPE Lain	(3.012.833.104.738.910)	
	i Selisih karena pembulatan excel	-	
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		(3.012.136.275.274.790)
7	**Saldo akhir (1+2+3+4+5+6)**		**(3.023.018.751.963.700)**

e) Minoritas

Rincian mutasi lain-lain sebesar minus Rp1.562.492.417.050,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
1	OCI Reval		
2	OCI Non Reval		
3	Dividen		
4	Mutasi BPYBDS		
5	PKBL		
6	Selisih dijelaskan terdiri dari:		
	a Selisih karena *Treasury Stock* /(ESOP)		
	b Selisih saldo awal		
	c Selisih Restatement		
	d Selisih Pencatatan Dividen		
	e Selisih Pencatatan tambahan modal disetor		
	f Selisih Kurs Penjabaran Lap Keuangan		
	g Penihilan Ekuitas Negatif		
	h Selisih karena Komponen LPE Lain	(1.562.492.417.050)	
	i Selisih karena pembulatan excel		
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		(1.562.492.417.050)
7	**Saldo akhir (1+2+3+4+5+6)**		**(1.562.492.417.050)**

2) Mutasi Lain-lain Selain dari mutasi lain-lain ILKPN

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pencairan PMN Non Tunai sebesar Rp649.229.893.901,00 kepada PT LEN Industri (Persero) berdasarkan SP2D Kementerian Keuangan Nomor 240190302000049. Sehubungan dengan pencairan tersebut, maka telah dilakukan pencatatan pada ILKPN *Audited* Tahun 2024. Namun pada periode yang sama, PT LEN Industri (Persero) masih menggunakan Laporan Keuangan *Audited* 2024 yang belum mencatatkan PMN Non Tunai tersebut. Mengingat pada Semester I 2025 PMN tersebut telah dicatatkan dalam Laporan Keuangan PT LEN Industri (Persero), maka perlu

dilakukan penyesuaian atas PMN tersebut agar tidak terjadi *overstated* dalam pengakuan nilai invetasi pemerintah.

e. Mutasi Lain-lain pada KPA DJKN

Mutasi Lain pada KPA DJKN periode Tahun 2025 *Audited* sebesar minus Rp7.175.683.207.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMI (Persero):	
	a. Dividen	(558.000.000.000)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	259.642.098.612
	Total	**(298.357.901.388)**
2	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT PII (Persero):	
	a. Dividen	(186.176.000.000)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	103.045.819.000
	Total	**(83.130.181.000)**
3	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMF (Persero)	
	a. Dividen	(107.966.770.000)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	24.521.000.000
	c. Selisih pencatatan tambahan modal disetor	295.000
	d. Selisih pencatatan dividen	770.000
	Total	**(83.444.705.000)**
4	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT GDE (Persero)	
	a. Dividen	(25.923.080.580)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	(14.961.970.223)
	Total	**(40.885.050.803)**
5	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT BIKA (Persero)	
	a. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	(939.494.856)
	b. Revaluasi aset	80.072.319.300
	c. Selisih saldo awal	(28.535.670.181)
		50.597.154.263
6	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT TPI	
	a. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	98.263.476.357
	Total	**98.263.476.357**
7	Bagian Ekuitas non laba bersih pada LPEI:	
	a. Dividen	(63.101.790.610)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	15.476.000.000
	c. Selisih pencatatan dividen	790.610
	Total	**(47.625.000.000)**
8	Bagian Ekuitas non laba bersih pada LPI/INA	
	Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	(6.771.101.000.000)
	Total	**(6.771.101.000.000)**
	TOTAL	**(7.175.683.207.571)**

f. Mutasi Lain-lain pada KPA Dit. SMI

Mutasi Lain pada KPA Dit SMI DJPb periode Tahun 2025 *Audited* adalah sebesar minus Rp5.833.885.794,00 yang berasal dari transaksi pada KPA Dit. SMI yang langsung berpengaruh terhadap ekuitas. Nilai tersebut merupakan penyesuaian akibat penghapusan secara bersyarat terhadap piutang (PSBDT) berupa keringanan yang diterima debitur yang belum dilakukan rekonsiliasi (dicatat sebagai pengurang pokok dana bergulir) pada BLU BPDLH.

g. Mutasi Lain-lain pada Modal Awal BP Tapera

Mutasi Lain pada Modal Awal BP Tapera periode Tahun 2025 *Audited* adalah sebesar Rp157.755.323,00 yang berasal dari penghasilan komprehensif lain.

h. Mutasi Lain-lain pada KPA UAIP

Mutasi Lain pada UAIP periode Tahun 2025 *Audited* adalah sebesar Rp132.695.286.905.641,00. Mutasi lain-lain terdiri dari Mutasi dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya berdasarkan ILKPN entitas dan Koreksi saldo awal PTNBH. Rincian mutasi lain-lain satker UAIP adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Mutasi	Nilai
a.	Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya berdasarkan ILKPN Entitas	129.748.963.683.730
b.	Koreksi Ekuitas:	
	Koreksi saldo awal	2.770.522.603.705
	Koreksi ekuitas lainnya	15.533.801.894
c.	Hibah	160.266.816.312
Jumlah		**132.695.286.905.641**

1) Mutasi dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya

Secara keseluruhan, nilai mutasi lain-lain yang berasal dari pendapatan/(beban) komprehensif lainnya yang tercatat pada Laporan Keuangan UAIP pada Periode Tahun 2025 *Audited* adalah Rp129.748.963.683.730,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Mutasi	Nilai
Lembaga Penjamin Simpanan	(49.978.550.000)
Bank Indonesia	130.043.664.000.000
Institut Pertanian Bogor	(180.000.000)
Universitas Airlangga	(321.107.051)
Institut Teknologi Bandung	12.859.655.432
Universitas Indonesia*	261.703.426
Universitas Gajah Mada	(1.128.714.198)
Universitas Pendidikan Indonesia	336.078.000
Universitas Sumatera Utara	(1.262.680.904)
Universitas Padjajaran	(857.172.373)
Universitas Diponegoro	(16.824.770)
Institut Teknologi Sepuluh November	51.981.642
Universitas Negeri Malang	(688.460.010)
Universitas Andalas*	1.942.841
Universitas Brawijaya	35.286.100
Universitas Negeri Padang	1.426.733.452
Universitas Terbuka	743.444.501
Universitas Negeri Surabaya	(69.101.409)
BPJS Kesehatan	(52.823.967.065)
BPJS Ketenagakerjaan*	(203.090.563.884)
Total	**129.748.963.683.730**

**Keterangan:*
menggunakan LK Unaudited 2025

2) Mutasi dari koreksi Ekuitas

a) Mutasi dari koreksi awal sebagai berikut:

Koreksi Saldo Awal sebesar Rp2.770.522.603.705,00 berasal dari BI dan 17 PTNBH dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal LK UAIP (A)	Saldo Awal Seharusnya (B)
1	Bank Indonesia	473.944.440.890.756	473.944.442.000.000
2	Institut Pertanian Bogor	2.990.843.503.969	2.991.763.000.000
3	Universitas Diponegoro	4.503.404.904.260	4.503.413.799.366
4	Universitas Hassanudin	2.653.554.569.612	2.654.743.674.697
5	Universitas Negeri Malang	2.142.369.181.646	2.150.025.126.101
6	Universitas Andalas*	1.401.297.719.035	1.526.481.751.030
7	Universitas Negeri Padang	1.403.755.330.398	1.399.596.760.033
8	Universitas Negeri Surabaya	1.977.372.725.959	1.972.427.718.999
9	Universitas Negeri Yogyakarta*	1.709.485.958.936	1.326.915.204.669
10	Universitas Negeri Semarang*	2.010.881.734.706	1.965.346.038.956
11	Universitas Negeri Jakarta	-	1.604.209.065.767
12	Universitas Sriwijaya	-	1.468.564.983.364
	Total	**494.737.406.519.277**	**497.507.929.122.982**
Total Koreksi (B-A)		**(Rp2.770.522.603.705)**	

**) Keterangan:*
berdasarkan LK Tahun 2025 Unaudited

Koreksi dilakukan sebagai dampak adanya pembaharuan data laporan keuangan pada PTNBH di atas.

b) Mutasi dari koreksi ekuitas lainnya

Secara keseluruhan, koreksi ekuitas sebesar Rp15.533.801.894,00 yang tercatat pada Laporan Keuangan UAIP Periode Tahun 2025 *Audited* adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai Koreksi Ekuitas
Universitas Padjajaran	(11.012.139.738)
Universitas Negeri Padang	(3.620.510.390)
Universitas Syiah Kuala	5.925.594.111
Universitas Terbuka	(15.599.410.408)
Universitas Negeri Yogyakarta*	14.834.361
Universitas Negeri Jakarta	38.234.243.958
BPJS Ketenagakerjaan*	1.591.190.000
Jumlah Koreksi Ekuitas	**15.533.801.894**

**) Keterangan:*
berdasarkan LK Tahun 2025 Unaudited

3) Hibah

Pada tahun 2025, terdapat hibah yang diterima PTNBH senilai Rp160.266.816.312,00, yaitu pada Universitas Negeri Padang senilai Rp160.266.816.312,00 berupa gedung, peralatan dan mesin, serta persediaan.

h. Mutasi lain-lain pada KPA Badan Bank Tanah

Mutasi Lain pada KPA Badan Bank Tanah periode Tahun 2025 *Audited* sebesar Rp479.599.087.750,00 merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan dalam pos lain-lain. Nilai tersebut merupakan nilai perolehan tanah penetapan pemerintah sebesar Rp479.599.087.750,00.

i. Mutasi lain-lain pada KPA BLU BPDLH

Mutasi Lain pada KPA BLU BPDLH sebesar Rp91.998.999,00 berasal dari pengembalian dari debitur selama tahun 2025 yang diakui sebagai pokok.

5. Lain-Lain pada BA 999.04

Lain-Lain sebesar minus Rp1.279.520.341,00 pada BA 999.04 merupakan mutasi transaksi atas akun ekuitas 391119 pada *ledger* akrual. Nilai tersebut merupakan hasil koreksi atas piutang kepada PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang sebelumnya dicatat dalam mata uang USD dan telah dikonversi ke dalam Rupiah pada tanggal pelaporan sebesar Rp163.942.037.208,00. Berdasarkan Daftar Piutang Tetap (DPT) tahun 2024, nilai piutang tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp153.989.814.243,00, sehingga terdapat penurunan nilai piutang sebesar Rp9.952.222.965,00. Selain itu, dilakukan pula koreksi atas penyisihan piutang terkait penyesuaian nilai piutang PT KKA sebesar Rp8.672.702.623,00.

6. Lain-Lain pada BA 999.05

Lain-Lain pada BA 999.05 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar minus Rp1.553.222.339.886,00 yang merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi (DKPKA/Koreksi Lainnya) pada 31 Desember 2025.

7. Lain-Lain pada BA 999.07

Lain-Lain pada BA 999.07 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar minus Rp4.747.718.794.795,00**.** Koreksi Lain-Lain tersebut terdapat pada 5 (lima) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah
1	Pekerjaan Umum	569.276.262
2	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(460.107.830)
3	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(4.502.239.681.847)
4	Perdagangan	(24.678.874)
5	Pertanian	(192.478.242.157)
6	Keuangan	(53.085.360.348)
Jumlah		**(4.747.718.794.794)***

*) Selisih Rp1 karena pembulatan

a. Kementerian Pekerjaan Umum

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp569.276.262,00. Koreksi tersebut merupakan selisih antara utang subsidi estimasi bulan September s.d Desember 2024 Rp3.451.526.638,00 dikurangi dengan nilai realisasi pencairan SP2D di bulan April 2025 atas utang estimasi tersebut Rp2.882.250.378,00. Dengan demikian, diperlukan koreksi terhadap selisih tersebut dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian PDAM	Utang Subsidi Estimasi	Realisasi SP2D	Selisih
Kota Palopo	10.197.962	(9.863.178)	334.784
Kab. Cilacap	29.862.077	(29.862.077)	-
Kab. Banyumas	5.730.365	(5.711.329)	19.036
Kota Palembang	1.225.374.687	(419.518.262)	805.856.425
Giri Menang (Perpres 46/2019)	1.464.680.922	(1.707.736.777)	(243.055.855)
Kota Bogor	715.680.625	(709.558.753)	6.121.872
Jumlah	**3.451.526.638**	**(2.882.250.376)**	**569.276.262**

b. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Koreksi lain-lain untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 senilai minus Rp460.107.830,00 yang terdiri dari:

1) Pembayaran piutang atas kelebihan bayar 40 debitur SBUM tahun 2011-2023 senilai Rp160.000.000,00;
2) Pengakuan piutang atas kelebihan bayar 1 debitur SBUM tahun 2022 senilai Rp4.000.000,00; dan
3) Koreksi kurang atas Beban Subsidi Bunga KPR Tahun 2024 *Audited* sebesar Rp296.107.830,00.

c. Kementerian Usaha **Mikro, Kecil dan Menengah**

Koreksi lain-lain sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar minus Rp4.502.239.681.847,00 yang berasal dari:

1) Pembayaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang sebelumnya tidak dicatat sebagai utang subsidi KUR tahun 2025 sebesar minus Rp3.010.169.722.021,00;
2) Pengembalian atas pendapatan yang masih harus diterima PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebesar minus Rp5.516.710.590,00;
3) Koreksi atas transaksi Belanja Subsidi YMHD yang merupakan tagihan *carry over* dan bukan beban tahun 2025 sebesar minus Rp1.577.336.384.647,00; dan
4) Koreksi atas penyajian Beban Subsidi Bunga KUR pada BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BSI berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025 sebesar Rp90.783.135.411,00.

d. Kementerian Perdagangan

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar minus Rp24.678.874,00, yang merupakan penyajian utang TA 2022 s.d. 2023 yang belum tercatat sebelumnya.

e. Kementerian Pertanian

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar minus Rp192.478.242.157,00. Rincian atas koreksi ini antara lain sebagai berikut:

1) Koreksi terhadap PT. Pusri Palembang, PT. Pupuk Kaltim dan PT. Petrokimia Gresik senilai minus Rp192.478.242.833,00 yang merupakan pajak sudah dibayarkan pada saat penyaluran subsidi pupuk tahun 2024; dan
2) Koreksi senilai Rp676,00 akibat selisih pembulatan atas pembayaran atas kurang bayar tahun 2024.

f. Kementerian Keuangan

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar minus Rp53.085.360.348,00, yang merupakan koreksi atas pembayaran tagihan periode tahun 2024 yang disajikan sebagai beban tahun 2025.

8. Lain-Lain pada BA 999.08

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar minus Rp18.059.768.499,00. Koreksi Lain-lain pada tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar minus Rp12.654.599,00 yang merupakan dampak pengembalian belanja tahun sebelumnya;

b. Satker SKK Migas sebesar minus Rp54.081.467,00 berupa koreksi atas nilai piutang tahun 2024 senilai minus Rp56.552.291,00 dan penghapusan penyisihan piutang tak tertagih senilai Rp2.470.824,00;

c. Satker DKPBPB Batam sebesar Rp6.702.300,00 yang merupakan Koreksi Pencatatan dan sebesar Rp123.014.562.724,00 yang merupakan koreksi atas transaksi Transfer Keluar berupa Tanah dan Dermaga pada Pelabuhan Tanjung Mocoh yang dikembalikan kepada KSOP Kelas II Tanjung Pinang;

d. Satker OAB Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat sebesar minus Rp2,00 yang merupakan penyesuaian atas kelebihan pencatatan piutang pembayaran denda PT Pos Indonesia pada akhir tahun 2024; dan

e. Koreksi sebesar minus Rp17.999.734.731,00 merupakan koreksi utang yang belum diterima tagihannya pada transaksi RPATA dengan rincian:

1) MPP Kartu Prakerja sebesar minus Rp2.524.964.225,00;

2) SKK Migas sebesar Rp7.883.900.971,00;

3) Satker OAB Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua sebesar minus Rp19.048.682.237,00;

4) Satker OAB Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat sebesar minus Rp3.225.620.490,00; dan

5) BPKPBPB Batam sebesar minus Rp1.084.368.750,00.

9. Lain-Lain pada BA 999.99

Koreksi Lain-lain terdapat pada UAPBUN TK DJPb, UAPBUN TK DJKN, UAPBUN TK DJA, dan UAPBUN TK DJSPSK. Jumlah Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp100.158.534.048.671,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	UAPBUN TK DJPb	93.145.646.320.381
2	UAPBUN TK DJKN	4.609.165.497.106
3	UAPBUN TK DJA	2.403.722.225.100
4	UAPBUN TK DJSPSK	6.084
Total		**100.158.534.048.671**

a. Koreksi Lain-Lain pada UAPBUN TK DJPB

Koreksi Lain-lain terdapat pada UAPBUN

TK DJPb untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp93.145.646.320.381,00 berasal dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	UAKPABUN TK PENSIUN	685.637.193
2	UAKPABUN TK PPP BUN	(2.020.109.812)
3	UAKPABUN TK KPPN JAKARTA II	7.546.980.793.000
4	UAKPABUN TK Dit. PKN	85.600.000.000.000
Total		**93.145.646.320.381**

1) UAKPABUN TK PENSIUN

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp685.637.193,00 merupakan perubahan terhadap ekuitas yang diakibatkan adanya penyesuaian penyisihan piutang tak tertagih akibat pelunasan piutang tahun 2024 sebesar Rp107.792.034.684,00, adanya koreksi IJP Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebesar Rp146.681.000,00, dan pelunasan IJP Rampung 2022 sebesar Rp4.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Deskripsi	Nilai
1	Jasa Giro Bulan Desember 2024 ASABRI	313.287.128
2	Potongan utang non TGR (non dapem Desember 2024) ASABRI	390.093.822
3	Setoran SUP (SUP bulan dan SUP Retur Des 24) ASABRI	4.016.366.129
4	Kelebihan Pencairan Des 24 ASABRI	2.208.427.643
5	SUP Retur Des 24 Taspen	21.850.882.643
6	SUP Kompensasi Des 24 Taspen	31.532.118.489
7	Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun Des 24 Taspen	38.489.743.709
8	Setoran Kas Negara Non Dapem dan Susulan Des 24 Taspen	517.782.788
9	Jasa Giro Bulan Desember 2024 Taspen	3.916.023.456
10	Kelebihan Pencairan Dana JKK TW IV 24 ASABRI	501.509.029
11	Kelebihan Pencairan Dana JKm TW IV 24 ASABRI	655.197.261
12	Kelebihan pembayaran Jamkes TW IV BPJS 2024	3.400.602.587
Jumlah Pelunasan Piutang		**107.792.034.684**
a	Jumlah Pelunasan Piutang x 0,5%	538.960.173
b	Pelunasan IJP Rampung 2022	(4.000)
c	Koreksi Jurnal IJP Kalimantan Selatan 2024	146.681.000
d	Pelunasan IJP Rampung 2022 Rp4.000 x 0,5%	20
Jumlah Koreksi Lain-Lain (a+b+c+d)		**685.637.193**

2) UAKPABUN TK PPP BUN

Koreksi Lain-Lain sebesar minus Rp2.020.109.812,00 yang berasal dari penyesuaian RPATA Tahun 2025.

3) UAKPABUN TK KPPN JAKARTA II

Koreksi lain-lain sebesar Rp7.546.980.793.000,00 yang berasal dari transaksi Pengesahan Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU oleh satker Lembaga Manajemen Aset Negera (604445).

4) UAKPABUN TK Dit. PKN

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp85.600.000.000.000,00 merupakan transaksi penggunaan SAL tahun 2025. Berikut selisih mutasi atas transaksi Penggunaan SAL (311112) dan transaksi Penggunaan SAL Earmark (311113) selama tahun 2025.

b. Koreksi Lain-Lain pada UAPBUN TK DJKN

Koreksi Lain-lain terdapat pada UAPBUN TK DJKN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp4.609.165.497.106,00 berasal dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	UAKPABUN TK BLBI	4.177.222.366.610
2	UAKPABUN TK Aset Lain-Lain	364.830.491.000
3	UAKPABUN TK Pengelola ABMA/T	67.062.543.000
4	UAKPABUN TK KKKS SKK Migas	50.096.496
Total		**4.609.165.497.106**

1) UAKPA BUN TK BLBI sebesar minus Rp4.177.222.366.610,00 berasal dari:

a) Pengelolaan aset kredit eks BPPN sebesar Rp1.949.314.977.632,00;

b) Koreksi saldo aset kredit PKPS sebesar minus Rp2,00;

c) Penyesuaian saldo minus piutang eks BDL yang berasal dari penyelesaian eks Bank Guna Internasional sebesar Rp71.092.250.645,00;

d) Pengelolaan aset properti eks BPPN sebesar Rp2.146.726.710.215,00;

e) Perubahan nilai saham eks BPPN sebesar Rp10.057.625.418,00; dan

f) Koreksi pendapatan atas pemanfaatan aset properti karena kesalahan pengakuan sebesar Rp30.802.702,00.

2) UAKPA BUN TK Aset Lain-Lain sebesar Rp364.830.491.000,00 merupakan nilai pencatatan aset GIZ berupa minibus Toyota kijang inova dengan tahun perolehan 2010 sebesar Rp183.780.000,00, Aset Eks PT AAF sebesar Rp326.390.877.000,00, dan Aset Eks Proyek Alumina Bintan sebesar Rp38.255.834.000,00.

3) UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T sebesar Rp67.062.543.000,00. Nilai tersebut timbul karena koreksi tambah pada koreksi lain-lain yang disebabkan adanya ABMA/T yang ditetapkan besaran nilai kompensasinya hingga tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp71.233.041.000,00 dan Koreksi kurang pada koreksi lain-lain yang disebabkan adanya kesalahan pencatatan pembebanan pelepasan ABMA/T Vihara Pemancar Keselamatan (dahulu Kasus Khongdjoe Kwan/Pra Bhapuri) di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.170.498.000,00, dengan rincian sebagaimana berikut:

(dalam rupiah)

No.	Nama Aset	Nilai Wajar Aset (Rp)	Keterangan
A. Koreksi Tambah			**71.233.041.000**
1.	Rumah Toko XIII (d.h Yayasan Pendidikan Gitakirti (GIKI)) a.n. Tati Lestari di Provinsi Jawa Barat	730.569.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-88/MK.6/2025 tanggal 10 Februari 2025, kompensasi 100% senilai Rp730.569.000.
2.	Rumah Toko (dh Bangunan Wisma Olahraga dan Tempat Sembahyang Toa Pekong (Berlantai Dua)) a.n. Yayasan Laut Selatan Bintan di Provinsi Kepulauan Riau	726.098.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.6/2025 tanggal 19 Februari 2025, kompensasi 100% senilai Rp726.098.000.
3.	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (dh Kantor Dispenda Kodya II Bogor, TK/SD/SMA/ Akademi Management) a.n. Yayasan Kesatuan di Provinsi Jawa Barat	56.258.069.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-184/MK.6/2025 tanggal 13 Maret 2025, kompensasi 30% senilai Rp16.877.420.700.
4.	Gereja PPIK "Jemaat Filipi" Kayu Tanam (d.h Kantor Kelurahan dan Sekretariat PKK Desa) di Provinsi Kalimantan Barat	5.978.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-496/MK/KN/2025 tanggal 10 Juli 2025, kompensasi 0% senilai Rp0.
5.	Vihara Avalokitesvara (d.h Rumah Ibadah (Klenteng)) di Provinsi Sumatera Utara	192.171.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-519/MK/KN/2025 tanggal 14 Juli 2025, kompensasi 0% senilai Rp0.
6.	Vihara Kumala Bodhi (dahulu TK/SD Pembina) di Kepulauan Bangka Belitung	213.295.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-557/MK/KN/2025 tanggal 1 Agustus 2025, kompensasi 0% senilai Rp0.
7.	Vihara Budi Dharma (dh Yayasan Budhi Dharma)) di Provinsi Jawa Barat	5.946.049.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-608/MK/KN/2025 tanggal 1 September 2025, kompensasi 0% senilai Rp0.
8.	Tempat Tinggal Suherdy Arno (dh Kantor Dipenda Kodya Dati II Bogot, TK/SD/SMP/SMA/ Akademi Management)) di Provinsi Jawa Barat	5.165.115.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-662/MK/KN/2025 tanggal 28 September 2025, kompensasi 100% senilai Rp5.165.115.000.
9.	Rumah Duka (dahulu Perkantoran; DPD Golkar, Pepabri, HWK) di Provinsi Maluku	1.995.697.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-688/MK/KN/2025 tanggal 10 Oktober 2025, kompensasi 50% senilai Rp997.848.500.
B. Koreksi Kurang			**(4.170.498.000)**
10.	Koreksi kurang pada koreksi lain-lain yang disebabkan adanya kesalahan pencatatan pembebanan pelepasan ABMA/T Vihara Pemancar Keselamatan (dahulu Kasus Khongdjoe Kwan/Pra Bhapuri) di Provinsi Jawa Barat	(4.170.498.000)	Aset dimaksud telah ditetapkan besaran kompensasinya melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-719/MK.6/2024 tanggal 24 September 2024 sebesar Nilai Wajar Rp5.166.021.000, kompensasi 0%, namun pada Laporan Keuangan Tahun 2024 tercatat pelepasan aset sebesar Rp995.523.000. Dan telah terbit

No.	Nama Aset	Nilai Wajar Aset (Rp)	Keterangan
			Keputusan Menteri Keuangan hal pelepasan aset Nomor KMK-275/KM.6/2024 tanggal 18 Oktober 2024. Sehingga, terjadi selisih sebesar Rp4.170.498.000.
Total (A-B)		**67.062.543.000**	

4) UAKPA BUN TK KKKS SKK Migas sebesar Rp50.096.496,00. Koreksi Lain-Lain terdiri dari jumlah selisih kurs pelunasan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp18.275.166,00 dan selisih kurs pelunasan piutang sebesar Rp31.821.330,00.

c. Koreksi Lain-Lain pada UAPBUN TK DJA

Koreksi lain-lain terdapat pada UAPBUN TK DJA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp2.403.722.225.100,00 merupakan beban operasional sektor hulu migas dan panas bumi dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	UAKPABUN TK MIGAS	1.774.481.226.418
2	UAKPABUN TK Panas Bumi	629.240.998.682
Total		**2.403.722.225.100**

1) Sektor Migas

Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp1.774.481.226.418,00 seluruhnya berasal dari Koreksi Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, yaitu dari koreksi atas pendapatan/beban tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Koreksi Lain-lain	Audited 2025
Koreksi Pendapatan	**211.299.604.889**
- Koreksi saldo awal gas dan pendapatan gas	(269.561.890.166)
- Koreksi Saldo Awal dan Pendapatan Minyak	(7.764.935)
- Koreksi estimasi *overlifting*	(66.136.796.804)
- Koreksi transaksi antar entitas	(109)
- Koreksi penyisihan piutang jangka pendek	547.006.056.903
Koreksi Beban Tahun lalu	**1.563.181.621.529**
- Koreksi saldo awal DMO *fee*	3.555
- Tagihan PDRD sebelum tahun 2025 yang baru ditagihkan tahun 2025	(45.154.228.179)
- Tagihan *Fee* Penjualan sebelum tahun 2025 yang baru ditagihkan tahun 2025	(109.255.863.596)
- Koreksi estimasi beban *underlifting* tahun sebelumnya	1.717.591.709.749
Total Koreksi Lainnya	**1.774.481.226.418**

2) Sektor Panas Bumi

Koreksi lain-lain disajikan sebesar Rp629.240.998.682,00 dipengaruhi oleh beberapa transaksi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Koreksi beban diestimasi setoran kepada pemerintah atas pemindahbukuan PNBP Panas Bumi TW I TA 2025 yang telah diakui pada LK Audited Tahun 2024	248.412.269.740
2	Koreksi atas beban diestimasi pengajuan *reimbursement* PPN atas pencadangan sebelum tahun 2025	438.086.516.707
3	Koreksi beban diestimasi pencadangan PBB Panas Bumi yang telah diakui pada LK TA 2024	375.813.805.470
4	Koreksi pengakuan beban diestimasi penggantian bonus produksi atas KepMenESDM Nomor 190.K/EK.01/MEM.E/2025 Bonus Produksi yang dicadangkan pada TW I TA 2025	15.954.641.711
5	Koreksi atas beban pengajuan *reimbursement* PPN atas pencadangan sebelum tahun 2025	(438.086.516.707)
6	Koreksi pengakuan beban penggantian bonus produksi atas KepMenESDM Nomor 190.K/EK.01/MEM.E/2025 Bonus Produksi yang dicadangkan pada TW I TA 2025	(15.954.641.711)
7	Koreksi atas Penyetoran Kurang Bayar SBP Hasil Internal Audit PT GDE	5.014.923.472
Total Koreksi Lain-Lain		**629.240.998.682**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP atas Kegiatan Usaha Panas Bumi, diatur bahwa atas transaksi pengajuan *reimbursement* PPN yang melewati tahun pencadangan dicatat terlebih dahulu sebagai beban pada tahun berjalan untuk kemudian dilakukan koreksi pada akhir periode. Sampai dengan 31 Desember 2025, pengajuan *reimbursement* PPN dari pengusaha yang melewati tahun pencadangan adalah sebesar Rp438.086.516.707,00. Jumlah tersebut akan dicatat sebagai:

a) koreksi lain-lain untuk menyesuaikan pengakuan beban *reimbursement* PPN tahun berjalan; dan

b) koreksi pada beban diestimasi *reimbursement* PPN tahun pencadangan terkait.

G.2.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.121.679.330.006.001,00 dan Rp1.236.867.333.530.144,00. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

BA	DKEL	DDEL	TK	TM	Total 2025	Total 2024
999.00	5.949.379.306.318.070	(5.897.294.666.661.559)	-	-	52.084.639.656.511	57.898.988.106.850
999.01	5.989.786.229.091.790	(6.168.305.225.896.350)	-	-	(178.518.996.804.560)	(119.207.263.693.240)
999.02	1.023.314.959.620	(19.996.578.852.569)	-	-	(18.973.263.892.949)	(46.566.846.296.588)

BA	DKEL	DDEL	TK	TM	Total 2025	Total 2024
999.03	260.643.565.540.156	(188.586.521.196.411)	(14.067.936.876)	121.091.001.266	72.164.067.408.135	(26.247.015.981.831)
999.04	4.877.459.760.518	(6.066.317.757.545)	-	-	(1.188.857.997.027)	(1.527.844.236.164)
999.05	864.455.066.130.208	(2.607.012.938.305)	-	-	861.848.053.191.903	903.953.485.534.486
999.07	281.759.776.982.061	(2.040.368.806.530)	-	-	279.719.408.175.531	292.652.595.294.962
999.08	123.972.434.960.226	(444.234.762.433)	(123.014.562.724)	-	123.405.185.635.069	215.078.843.273.479
999.99	543.919.085.967.701	(610.279.690.519.396)	(2.631.286.627.677)	130.985.812.760	(68.860.905.366.612)	(39.167.608.471.810)
Total	**14.019.816.239.710.350**	**(12.895.620.617.391.098)**	**(2.768.369.127.277)**	**252.076.814.026**	**1.121.679.330.006.001**	**1.236.867.333.530.140**

1. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.00

Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah sebesar Rp52.084.639.656.511,00. Transaksi Antar Entitas terdiri dari akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) yang merupakan penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transito dan akun Diterima dari Entitas Lain (DDEL) yang merupakan pengeluaran kas yang bersumber dari belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran transito dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	5.949.379.306.318.070
313121	Diterima dari Entitas Lain	(5.897.294.666.661.559)
Total		**52.084.639.656.511**

2. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.01

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp178.518.996.804.560,00 yang berasal dari Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp5.989.786.229.091.790,00 dan Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp6.168.305.225.896.350,00.

3. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.02

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp18.973.263.892.949,00 yang berasal dari Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp1.023.314.959.620,00 dan Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp19.996.578.852.569,00.

4. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.03

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp72.164.067.408.135,00 berasal dari selisih antara Diterima Dari Entitas Lain, Ditagihkan ke Entitas Lain, dan Transfer Keluar dengan rincian sebagai berikut:

a. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp260.643.565.540.156,00;
b. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar minus Rp188.586.521.196.411,00;
c. Transfer Keluar sebesar minus Rp14.067.936.876,00; dan
d. Transfer masuk sebesar Rp121.091.001.266,00.

5. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.04

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp1.188.857.997.027,00 berasal dari selisih antara Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp4.877.459.760.518,00 dan Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp6.066.317.757.545,00.

6. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.05

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp861.848.053.191.903,00 berasal dari selisih antara Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp864.455.066.130.208,00 ditambah saldo Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp2.607.012.938.305,00.

7. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.07

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp279.719.408.175.531,00 berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.07 merupakan selisih antara Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp281.759.776.982.061,00 ditambah saldo Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp2.040.368.806.530,00.

8. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.08

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp123.405.185.635.069,00 berasal dari transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar-K/L, antar-BUN, maupun K/L dengan BUN, transfer keluar/masuk dengan rincian sebagai berikut:

a. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp123.972.434.960.226,00;

b. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar minus Rp444.234.762.433,00; dan

c. Transfer keluar sebesar minus Rp123.014.562.724,00.

9. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.99

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp68.860.905.366.612,00 yang berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Rincian Transaksi Antar Entitas pada BA 999.99 terdiri dari:

a. UAPBUN TK DJPb sebesar Rp63.047.203.540.940,00 berasal dari selisih antara DDEL– DKEL atas transaksi pengeluaran dan penerimaan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian:

   1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp343.547.972.991.577,00; dan

   2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp280.500.769.450.637,00.

b. UAPBUN TK DJKN sebesar minus Rp4.105.727.398.300,00 terdiri dari:

   1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp798.946.371.471**,00**;

   2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp2.404.372.954.854**,00**;

   3) Transfer Keluar sebesar minus Rp2.631.286.627.677**,00**; dan

   4) Transfer Masuk sebesar Rp130.985.812.760,00.

c. UAPBUN TK DJA sebesar minus Rp129.361.662.793.458,00 yang terdiri dari:

   1) Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp154.062.933.305.971**,00**; dan

   2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp283.424.596.099.429,00.

d. UAPBUN TK DJSPSK sebesar Rp211.541.521.246,00 yang terdiri dari:

1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp211.903.520.624,00; dan

2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp361.999.378,00.

e. UAPBUN TK DJPK sebesar Rp1.103.747.342.589,00 yang terdiri dari:

1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp45.053.335.097.764**,00**;

2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp43.949.587.755.175,00.

f. UAPBUN TK DJPPR sebesar Rp243.992.420.371,00 yang terdiri dari:

1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp243.992.420.371,00;

2) Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp0,00.

G.2.5. KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI

Nilai Keuntungan/(Kerugian) Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kerugian selisih kurs dari Bagian Anggaran Transaksi Khusus 999.99 hasil revaluasi aset moneter yang telah direklasifikasi ke beban selisih kurs belum terealisasi.

G.2.6. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L

Nilai mutasi Ekuitas BUN di K/L pada tanggal 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp26.337.293.090.100,00 dan Rp1.171.585.082.240,00. Mutasi Kas merupakan perubahan Ekuitas yang berasal dari aset yang bukan milik Kuasa BUN, tetapi menurut ketentuan wajib disajikan dalam neraca Kuasa BUN. Rincian mutasi ekuitas BUN di K/L adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Mutasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	10.398.384.605	32.325.296.274
2	Mutasi Kas Lainnya di K/L Dari Hibah	(9.408.185.161.433)	(3.440.440.444.071)
3	Mutasi Kas BLU	(16.939.506.313.272)	4.579.700.230.037
Jumlah		**(26.337.293.090.100)**	**1.171.585.082.240**

1. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.398.384.605,00 dan Rp32.325.296.274,00 merupakan mutasi transaksi akun kas pada Bendahara Pengeluaran di *ledger* akrual dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Kisaran Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	111611	(59.457.911.153)	53.965.337.680
2	111613	69.856.295.758	(21.640.041.406)
Total		**10.398.384.605**	**32.325.296.274**

2. Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada tanggal 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp9.408.185.161.433,00 dan minus Rp3.440.440.444.071,00 yang merupakan jumlah mutasi transaksi akun kas lainnya di K/L dari hibah dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kisaran Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	111822	(9.408.185.161.433)	11.096.844.487.771
Total		**(9.408.185.161.433)**	**(3.440.440.444.071)**

3. Mutasi Kas BLU pada tanggal 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp16.939.506.313.272,00 dan Rp4.579.700.230.037,00 yang merupakan jumlah mutasi akun kas BLU dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kisaran Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	111911	(16.939.506.313.272)	4.579.700.230.037
Total		**(16.939.506.313.272)**	**4.579.700.230.037**

G.2.7. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp4.063.780.215.076.777,00 dan minus Rp3.576.615.643.905.782,00. Ekuitas akhir sebesar minus Rp4.063.780.215.076.777,00 merupakan seluruh Ekuitas akhir BABUN sebesar minus Rp4.050.773.346.611.574,00 ditambah eliminasi sebesar minus Rp13.006.868.465.203,00. Rincian nilai Ekuitas akhir adalah:

(dalam rupiah)

NO	UNIT		31 Desember 2025	31 Desember 2024
	KODE	URAIAN		
1	999.00	Akuntansi Pusat	566.453.172.432.314	617.359.217.555.613
2	999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(9.794.474.630.607.003)	(8.918.758.010.216.970)
3	999.02	BA BUN Hibah	-	-
4	999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	5.054.930.229.484.042	4.510.402.924.552.560
5	999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	55.423.072.404.470	53.254.403.050.958
6	999.05	BA BUN Transfer ke Daerah	(122.225.918.063.084)	(104.065.441.088.863)
7	999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(50.333.327.243.272)	(25.384.885.795.878)
8	999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(157.475.777.999.167)	(67.243.759.488.744)
9	999.09	Badan Lainnya	29.130.879.455.119	31.292.147.271.351
10	999.99	BA BUN Transaksi Khusus	367.798.953.525.007	339.557.330.501.172
JUMLAH			**(4.050.773.346.611.574)**	**(3.563.586.073.658.801)**
ELIMINASI			**(13.006.868.465.203)**	**(13.029.570.246.981)**
EKUITAS AKHIR			**(4.063.780.215.076.777)**	**(3.576.615.643.905.782)**

H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Demikianlah Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2025 *Audited* yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 16 Mei 2026
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LKBUN

Tahun 2025 *Audited*

Mei 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

CAPAIAN *OUTPUT* LKBUN

Tahun 2025 *Audited*

Mei 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

INFORMASI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
ATAS BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian kekuasaan pemerintahan secara umum. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Presiden:

1. Menguasakan kepada:
    a. Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal
    b. Menteri/Kepala Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang atas yang Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.
2. Menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola fiskal salah satu tugas Menteri Keuangan adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan, selain sebagai PA atas bagian anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya, juga bertindak selaku PA atas bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

Dalam rangka pertanggungjawaban tugas sebagai BUN dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran atas bagian yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu, Menteri Keuangan menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). LKBUN merupakan konsolidasi atas laporan keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN. Komponen LKBUN meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada penjelasan pasal 30 menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/Lembaga. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut mengatur kewajiban setiap entitas pelaporan untuk menyusun laporan kinerja disamping laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui entitas pelaporan meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara (BUN). Sampai saat ini laporan kinerja baru disusun pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga (K/L).

Sebagai bagian dari pengembangan Laporan Kinerja BUN (LKjBUN), pada tahapan awal, informasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran bagian anggaran BUN disajikan sebagai bagian LKBUN. Informasi kinerja BUN disusun berdasarkan klasifikasi anggaran menurut fungsi, anggaran dan realisasi belanja di *breakdown* menurut fungsi, subfungsi, program, kegiatan, KRO dan RO. Selain data realisasi belanja juga ditampilkan capaian kinerja berdasarkan capaian *output* setiap level. Level capaian *output* pada bagian anggaran BUN sampai saat ini meliputi indikator kinerja program (IKP) sebagai representasi capaian *output* level program, indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai representasi capaian *output* level kegiatan, KRO dan RO.

B. RINCIAN INFORMASI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN 2025

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM									
01.01	Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal serta urusan Luar Negeri	190.621.933.072.000	183.106.564.579.972	96,06%						
12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya	1.638.529.062.000	1.285.196.645.066	78,44%						
4096	Pengelolaan Bantuan Kemasyarakatan	1.222.413.773.000	910.740.792.379	74,50%						
9GA	Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya	1.222.413.773.000	910.740.792.379	74,50%						
001	Bantuan Kemasyarakatan Presiden	1.153.101.780.000	841.429.724.610	73,0%	1	1	Layanan	74,97	100%	
002	Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden	69.311.993.000	69.311.067.769	100,0%	1	1	Layanan	98,65	100%	
4886	Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun	246.860.461.000	233.041.824.513	94,40%						
9GA	Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya	246.860.461.000	233.041.824.513	94,40%						
001	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat DK	7.414.531.000	5.576.683.145	75,2%	1	1	Layanan	44	100%	
002	Pengusahaan Kawasan Sekretariat Dewan Kawasan PBPB Bintan dan Karimun	5.095.523.000	1.896.765.300	37,2%	1	1	Layanan	2	100%	

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
003	Layanan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kab Bintan	6.213.683.000	4.843.662.113	78,0%	1	1	Kawasan	49	100%	
004	Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kab.Bintan	77.753.119.000	76.705.007.097	98,7%	1	1	Layanan	72	100%	
005	Layanan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang	5.706.780.000	4.959.690.266	86,9%	1	1	Layanan	54,5	100%	
006	Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang	68.860.022.000	68.426.100.055	99,4%	1	1	Layanan	56,6	100%	
007	Layanan Dukungan Manejemen BP Kawasan Karimun	8.476.346.000	5.082.310.680	60,0%	1	1	Layanan	33	100%	
008	Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Karimun	67.340.457.000	65.551.605.857	97,3%	1	1	Layanan	53	100%	
4887	**Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS Provinsi Papua**	**152.614.576.000**	**126.767.248.733**	**83,1%**						
9GA	**Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya**	**152.614.576.000**	**126.767.248.733**	**83,1%**						
001	Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua	152.614.576.000	126.767.248.733	83,1%	25	25	Kabupaten	52	100%	
4888	**Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua Barat**	**16.640.252.000**	**14.646.779.441**	**88,0%**						
9GA	**Dukungan Penyelenggaraan**	**16.640.252.000**	**14.646.779.441**	**88,0%**						

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
	Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya									
001	Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat	16.640.252.000	14.646.779.441	88,0%	12	12	Kabupaten	33	100%	
13	**Program Pengelolaan Transaksi Khusus**	**188.983.404.010.000**	**181.821.367.934.906**	**96,21%**						
4899	**Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Kontribusi Sosial**	**187.652.312.042.000**	**180.634.945.029.737**	**92,26%**	**152.355.192**	**160.810.344**	**Peserta**	**105,55%**		
001	Manfaat Pensiun dan Cicilan UPSL Program THT (Peserta)	173.101.256.890.000	166.503.789.577.419	96,19%	51.201.864	52.037.148	Peserta	101,63%		
002	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (Peserta)	345.825.482.000	342.665.546.765	99,09%	23.366.016	24.291.021	Peserta	103,96%		
003	Iuran Asuransi Kesehatan (Peserta)	12.005.238.739.000	11.753.555.055.367	97,90%	50.723.508	56.394.289	Peserta	111,18%		
004	Iuran Jamkesmen dan Jamkestama (Peserta)	697.245.680.000	636.873.620.068	91,34%	91.992	88.072	Peserta	95,74%	62,357	
005	Iuran Jaminan Kematian Kerja (Peserta)	641.554.722.000	635.671.814.647	99,08%	23.366.016	24.291.021	Peserta	103,96%	17.121.071	
007	Biaya Operasional Penyelenggaraan (Peserta)	861.190.529.000	762.389.415.471	88,53%	3.605.796	3.708.793	Peserta	0,00%	1.792.857	
4900	**Pengelolaan Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog**	**143.206.450.000**	**143.206.449.377**	**100,00%**						
001	Selisih Harga Beras Bulog	143.206.450.000	143.206.449.377	100,00%	35.106.934	35.106.934	Kg	100,00%	-	
4902	**Pengelolaan Jasa Pelayanan Perbankan**	**346.016.431.000**	**300.755.499.729**	**86,92%**	120.166.372	100.681.035		83,78%		
001	PPN BI RTGS/SWIFT (Transaksi)	81.854.000	63.315.560	77,35%	12	12	Transaksi	100,00%	17	

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
003	Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi/Lainnya (Transaksi)	342.549.924.000	297.992.174.000	86,99%	120.166.276	100.680.928	Transaksi	83,78%	74.863.045	
004	PPN Atas Transaksi RTGS BO (Transaksi)	271.512.000	123.818.200	45,60%	48	48	Transaksi	100,00%	36	
005	Fee Bank Kustodian (Transaksi)	623.244.000	618.013.219	99,16%	12	12	Transaksi	100,00%	9	
006	Biaya Swift atas Layanan BO Valas (Transaksi)	2.489.897.000	1.958.178.750	78,64%	24	35	Transaksi	145,83%	18	
6987	**Pengelolaan Dana PNBP BUN Dalam Rangka Peningkatan Kinerja dan Pengawasan BUN**	**353.214.627.000**	**283.815.382.264**	**80,35%**						
001	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem IT dan Infrastruktur	257.940.102.000	220.020.199.962	85,30%	3	3	Modul Aplikasi	100,00%		
001	Pengembangan Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan Kas Negara	28.332.605.000	14.074.962.251	49,68%	20	20	Peraturan	100,00%		
001	Pengembangan Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.881.213.000	1.769.671.759	61,42%	3	3	Aplikasi	100,00%		
001	Pengawasan dan Monitoring Kegiatan BUN	9.670.829.000	7.045.403.283	72,85%	2	2	Rekomendasi	100,00%		
005	Pengembangan Kualitas SDM	54.389.878.000	40.905.145.009	75,21%	1.472	1.472	Pegawai	100,00%	159	
6615	**Pengelolaan Dukungan Investasi Pemerintah**	**2.953.978.000**	**2.749.632.804**	**93,08%**						
100	Penyaluran Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah (PEN)	2.953.978.000	2.749.632.804	93,08%	100	93,09	Persentase	93,09%	41,58%	

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
4094	**Pengelolaan Pembayaran Kontribusi dan Trust Fund ke Lembaga Internasional**	**211.909.208.000**	**211.903.520.624**	**100,00%**						
002	Trust Fund Kepada Organisasi Internasional (OI)	211.909.208.000	211.903.520.624	100,00%	3	3	Organisasi Internasional	100,00%	4	
4901	**Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Fasilitas Penyiapan Proyek**	**266.640.519.000**	**243.992.420.371**							
002	Dana Dukungan Fasilitas Penyiapan Proyek KPBU (PDF)	266.640.519.000	243.992.420.371	91,51%	21	21	Proyek	100,00%	10	
4897	**Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama**	**7.150.755.000**	**-**							
001	Dana Dukungan Kelayakan Proyek KPBU (VGF)	7.150.755.000	0	0,00%	1	-	Proyek	0,00%	1	Target output tidak tercapai karena terdapat perubahan jadwal pencairan VGF
4939	Pengelolaan Dukungan Loss Limit Atas Penjaminan Program PEN	-	**-**							
001	Alokasi Dana Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit dalam rangka PEN	-	-	-	-	-	-	-	100%	Tidak ada alokasi DIPA pada TA 2025
01.05	**Subfungsi Pinjaman Pemerintah**	**1.613.196.824.401.000**	**1.532.500.710.575.410**	**95%**						

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
06	**Program Pengelolaan Utang Negara**	**1.506.336.706.131.000**	**1.427.460.410.758.610**	94,76%						
4088	**Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang**									
001	Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	497.621.898.689.000	471.299.314.055.885	94,71%	100	100,00	Persen	100,00%	100,00%	Output kegiatan Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang tercapai dengan rincian pinjaman dan SBN
002	Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	55.232.392.780.000	43.095.667.969.744	78,03%	100	100,00	Persen	100,00%	100,00%	
003	Pembiayaan Utang Dalam Negeri	857.796.561.065.000	817.379.575.137.332	95,29%	100	100,00	Persen	100,00%	100,00%	
004	Pembiayaan Utang Luar Negeri	95.685.853.597.000	95.685.853.595.651	100%	100	100,00	Persen	100,00%	100,00%	
08	**Program Investasi Pemerintah**	**100.247.171.813.000**	**100.373.929.544.398**	**100%**						
4063	**Pengelolaan Investasi Pemerintah**	**52.776.043.000.000**	**52.776.043.000.000**	**100%**						
9CC	**Investasi Pemerintah Lainnya**	**52.776.043.000.000**	**52.776.043.000.000**	**100%**						
002	Rumah yang Dibiayai	29.200.000.000.000	29.200.000.000.000	100%	300.000	278.868	Unit Rumah	93%	200.000 Unit Rumah	-
004	Investasi Pemerintah Non Permanen kepada Perum Bulog	22.076.043.000.000	22.076.043.000.000	100%	100	100	Persen	100%		-
004	Investasi Pemerintah Non Permanen kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	100%	1	1	Layanan	100%		-
9CA	**Investasi kepada Badan Layanan Umum**									

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
004	Penyaluran Dana Rehabilitasi Mangrove								42%	Tidak ada alokasi th 2025
4098	**Pengelolaan PMN kepada BUMN**	**11.457.022.705.000**	**11.457.022.705.000**	**100%**						
9CB	**Investasi kepada BUMN dan Lembaga/Badan Lainnya**	**11.457.022.705.000**	**11.457.022.705.000**	**100%**						
001	Serapan Anggaran PMN kepada PT Hutama Karya (Persero)								95%	Tidak ada alokasi th 2025
003	Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	6.684.022.705.000	6.684.022.705.000	100%	100	100	Persen	100%	100%	-
004	Serapan Anggaran PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)								100%	Tidak ada alokasi th 2025
014	Serapan Anggaran PMN kepada PT Len Industri (Persero)								100%	Tidak ada alokasi th 2025
017	Serapan Anggaran PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero)								100%	Tidak ada alokasi th 2025
018	Serapan Anggaran PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)								100%	Tidak ada alokasi th 2025
019	Serapan Anggaran PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero)								100%	Tidak ada alokasi th 2025

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
020	Serapan Anggaran PMN kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)								100%	Tidak ada alokasi th 2025
021	Serapan Anggaran PMN kepada BPI Danantara	4.773.000.000.000	4.773.000.000.000	100%	100	100	Persen	100%		Diteruskan kepada PT KAI, PT INKA, dan PT PELNI
4103	**Pengelolaan Investasi kepada OI/LKI/BUI**	**1.768.200.000.000**	**1.894.957.731.398**	**107%**						
9CC	**Investasi Pemerintah Lainnya**	**1.768.200.000.000**	**1.894.957.731.398**	**107%**						
002	Tambahan Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	1.768.200.000.000	1.894.957.731.398	107%	3	3	Organisasi/LKI/BUI	100%	3	-
4105	**Pengelolaan Dana Dalam Rangka Pemberian Bantuan Internasional**									
9CA	Investasi kepada Badan Layanan Umum									
006	Penempatan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional								100%	Tidak ada alokasi th 2025
4860	**Pembiayaan Investasi untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional**	**7.546.980.793.000**	**7.546.980.793.000**	**100%**						
9CA	**Investasi kepada Badan Layanan Umum**	**7.546.980.793.000**	**7.546.980.793.000**	**100%**						

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
007	Tanah PSN yang Dibiayai	7.546.980.793.000	7.546.980.793.000	100%	23.373.800	15.451.398	m2	66%	35.897.234 m2	Alokasi dari penggunaan saldo Kas BLU
4904	**Pengelolaan PMN kepada Lembaga/ Badan Lainnya**									
9CB	Investasi kepada BUMN dan Lembaga/ Badan Lainnya									
009	Serapan Anggaran PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia								50%	Tidak ada alokasi th 2025
5294	**Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah**									
9CD	Kewajiban Penjaminan									
005	Jaminan pada Penjami-nan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur								7 Perjanjian Jaminan	Tidak ada alokasi th 2025
006	Jaminan pada Pembia-yaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUIMN								10 Surat Jaminan	Tidak ada alokasi th 2025
007	Jaminan pada Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera								11 Surat Jaminan	Tidak ada alokasi th 2025
008	Jaminan dalam rangka Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW								3 Jaminan	Tidak ada alokasi th 2025

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
010	Jaminan pada BUMN dalam rangka Pelaksa-naan Program PEN								7 Jumlah Jaminan	Tidak ada alokasi th 2025
5295	**Pengelolaan Dana Pembangunan Pendidikan Nasional**	**26.698.925.315.000**	**26.698.925.315.000**	**100%**						
9CA	**Investasi Kepada Badan Layanan Umum**	**26.698.925.315.000**	**26.698.925.315.000**	**100%**	**100**	**100**	**Persen**	**100%**		**-**
001	Penyaluran Dana Abadi Penelitian	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100%	100	100	Persen	100%		-
002	Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100%	100	100	Persen	100%		-
003	Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100%	100	100	Persen	100%		-
008	Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	23.698.925.315.000	23.698.925.315.000	100%	100	100	Persen	100%	100%	-
09	**Program Pemberian Pinjaman**	**6.612.946.457.000**	**4.666.370.272.398**	**70,56%**	**7**	**6**	**Proyek**	**85,71%**	**6 dari 7 Proyek**	
4065	**Pengelolaan Pemberian Pinjaman**	**6.612.946.457.000**	**4.666.370.272.398**	**70,56%**	**7**	**6**	**Proyek**	**85,71%**	**6 dari 7 Proyek**	
9DA	**Penerusan Pinjaman**	**6.612.946.457.000**	**4.666.370.272.398**	**70,56%**	**7**	**6**	**Proyek**	**85,71%**	**6 dari 7 Proyek**	
001	Alokasi Penerusan Pinjaman kepada BUMN	2.076.946.457.000	1.766.824.008.805	85,07%	6	5	Proyek	83,33%	5 dari 6 Proyek	
002	Alokasi Penerusan Pinjaman kepada Pemda	4.536.000.000.000	2.899.546.263.593	63,92%	1	1	Proyek	100%	1 dari 1 Proyek	
01.06	**Subfungsi Pembangunan Daerah**	**865.280.945.304.647**	**849.593.503.696.642**	**98,19%**						
10	**Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah**	**865.280.945.304.647**	**849.593.503.696.642**	**98,19%**						

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
4092	**Kegiatan: Pengelolaan Transfer Dana Alokasi Umum**	**438.625.121.056.000**	**433.292.088.063.189**	98,78%						
004	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	360.515.964.881.000	360.515.964.881.000	100,00%	546	546	Daerah	100,00%		
007	DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah	15.355.145.022.000	10.620.002.627.812	69,16%	534	501	Daerah	93,82%		
008	DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.699.600.000.000	1.659.888.602.000	97,66%	411	409	Daerah	99,51%		
009	DAU Dukungan Bidang Pendidikan	33.977.498.065.000	33.578.181.449.999	98,82%	546	546	Daerah	100,00%		
010	DAU Dukungan Bidang Kesehatan	19.410.056.022.000	19.251.193.436.378	99,18%	534	534	Daerah	100,00%		
011	DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	0	0,00%	534	0	Daerah	0,00%		
012	DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah	7.666.857.066.000	7.666.857.066.000	100,00%	333	333	Daerah	100,00%		
4068	**Kegiatan: Pengelolaan Transfer Dana Bagi Hasil**	**167.367.621.991.000**	**168.890.519.118.880**	100,91%						
001	DBH Pajak	68.581.493.267.000	65.539.225.289.780	95,56%	546	546	Daerah	100,00%		
004	DBH Lainnya	1.192.958.901.000	1.172.998.010.000	98,33%	354	354	Daerah	100,00%		
002	DBH SDA	83.689.193.628.000	83.661.760.058.100	99,97%						
	DBH SDA Migas	15.818.578.309.000	15.818.578.309.000	100,00%	358	358	Daerah	100,00%		
	DBH SDA Minerba	64.706.003.927.000	64.706.003.927.000	100,00%	503	503	Daerah	100,00%		
	DBH SDA Panas Bumi	1.370.453.591.000	1.370.453.591.000	100,00%	269	269	Daerah	100,00%		
	DBH SDA Kehutanan IIUPH	17.342.357.000	16.263.722.320	93,78%	25	25	Daerah	100,00%		
	DBH SDA Kehutanan PSDH	423.984.457.000	398.656.462.820	94,03%	542	527	Daerah	97,23%		
	DBH SDA Kehutanan DR	638.167.280.000	637.140.338.960	99,84%	33	32	Daerah	96,97%		
	DBH SDA Perikanan	714.663.707.000	714.663.707.000	100,00%	509	509	Daerah	100,00%		
003	KB DBH	13.903.976.195.000	18.516.535.761.000	133,17%	546	546	Daerah	100,00%		

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
4093	**Kegiatan: Pengelolaan Dana Transfer Khusus**	**18.145.089.244.647**	**17.284.906.940.861**	**95,26%**						
	Bidang Sanitasi	**1.609.432.000.000**	**1.552.866.842.445**							
	Pembangunan SPALDT				7.641	3.868	SR	50,62%		
	Pembangunan Sarana/ Prasarana pengelolaan sampah				126	66	Unit	52,29%		
	Bidang Air Minum	**2.219.373.292.000**	**2.096.658.811.689**	**99,91%**						
	Perluasan SPAM				110.066	85.751	SR	77,91%		
	Pembangunan SPAM				48.923	33.336	SR	68,14%		
	Bidang Kesehatan	**11.809.651.294.000**	**11.201.429.812.312**	**94,85%**						
	Pembangunan Balai Penyuluhan KB				41	35	Balai	85,37%		*data menggunakan data kontrak dan proporsi penyaluran per kontrak, data capaian output riil masih bergerak sampai 22 juli 2026
	Pembangunan/Renov/Rumah Dinas/Air Bersih/IPAL/ Ambulans/Pusling Roda4/ Pusling Perairan Puskesmas				1.727	996	Puskesmas	57,67%		--sda--
	Pembangunan/Renov Puskesmas Pembantu				750	721	Puskesmas	96,13%		--sda--
	Sarana Penguatan Layanan Unggulan Kanker, Jantung,				176	167	RS	94,89%		--sda--

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
	Stroke, Uronefrologi, dan KIA									
	S/P/A Peningkatan Kelas RS untuk Mendukung Layanan Program KJSU				12	10	RS	83,33%		--sda--
	S/P/A Penguatan RSUD				357	285	RS	79,83%		--sda--
	S/P/A RSJ				20	19	RS	95,00%		--sda--
	Bidang PPA	**96.961.090.000**	**83.061.174.029**	**85,66%**						
	Renovasi Rumah Perlindungan Sementara dan Penyediaan Peralatannya				21	15	paket	71,43%		--sda--
	Renovasi UPTD PPA dan penyediaan peralatannya				29	21	paket	72,41%		--sda--
	Bidang Perkim	**256.155.859.000**	**242.586.155.423**	**94,70%**						
	Pembangunan Baru, Peningkatan Kualitas dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya	256.155.859.000	242.586.155.423	94,70%	2.623	1.774	Unit	67,63%		--sda--
	Bidang Pendidikan	**2.335.850.841.772**	**2.301.188.251.937**	**98,52%**						
	PAUD	445.351.381.288	442.352.986.828	99,33%	9.368	9.230	SP	98,53%		
	SD	150.617.648.017	148.328.827.703	98,48%	2.203	1.957	SP	88,83%		
	SKB	5.899.772.964	5.899.772.964	100,00%	52	51	SP	98,08%		
	SLB	30.124.688.142	27.952.771.345	92,79%	250	248	SP	99,20%		
	SMA	64.775.065.689	57.871.841.816	89,34%	633	616	SP	97,31%		
	SMK	1.328.147.390.248	1.308.574.973.228	98,53%	708	699	SP	98,73%		
	SMP	99.941.952.538	99.526.030.951	99,58%	1.458	1.428	SP	97,94%		
	Perpustakaan	210.992.942.886	210.681.047.102	99,85%	20	11	Pembangunan gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum	55,00%		
	Bidang IKM	**46.582.936.875**	**44.118.022.270**	**94,71%**						

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
	Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM dan sarana produksi	46.582.936.875	44.118.022.270	94,71%	3	3	SIKM	100,00%		
	Bidang Perdagangan	**124.198.880.000**	**88.645.200.208**	**71,37%**						
	Sarana Perdagangan Mutu				3	3	Paket			
	Sarana Perdagangan Pasar				4	3	Paket			
9EI	**DAK Non Fisik**	**146.527.929.010.000**	**145.949.082.993.002**	**99,60%**						
001 015	Dana BOS	53.491.720.356.000	53.238.231.876.695	99,53%	46.454	46.441	Sekolah			
002 029	Dana BOP PAUD	4.038.700.320.000	3.996.477.139.802	98,95%	6.135.659	6.119.905	Peserta Didik			
010 030	Dana BOP Kesetaraan	1.741.189.650.000	1.717.126.231.937	98,62%	939.835	935.592	Peserta Didik			
003	Dana TPG	67.300.287.432.000	67.278.112.196.853	99,97%	1.476.549	1.482.394	Guru			
004	Dana Tamsil	481.344.500.000	470.451.750.000	97,74%	191.165	190.674	Guru			
005	Dana TKG	2.282.670.590.000	2.266.213.994.760	99,28%	56.995	57.700	Guru			
011 016	Dana BOP MTB	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00%	115	115	Museum dan Taman Budaya			
006 031 035	Dana BOK	12.878.672.152.000	12.681.551.642.955	98,47%	10.161	10.161	Puskesmas			
007	Dana BOKB	3.239.300.000.000	3.238.900.005.500	99,99%	6.231	6.435	Balai Penyuluhan KB			
008	Dana PK2UMK	163.700.000.000	161.304.750.500	98,54%	32.485	32.485	Peserta Pelatihan			
012	Dana Kepariwisataan			0,00%						
019	Dana PPPA	132.000.000.000	130.522.518.000	98,88%	304	304	Daerah			
020	Dana FPM			0,00%						
021	Dana KPP	516.379.010.000	510.916.636.000	98,94%	37.794	33.958	Penyuluh Pertanian	89,85%		
022	Dana PK2SIKM	91.990.000.000	89.299.250.000	97,07%	27	27	Sentra IKM			
	Hibah Ke Daerah	**1.609.040.423.000**	**251.073.243.510**	**15,60%**						

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
6952	Pengelolaan Hibah Transportasi - Hibah Mass Rapid Transit (MRT) Project	1.397.158.000.000	60.566.853.715	4,34%						
6956	Pengelolaan Hibah Sumber Daya Alam - Hibah Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)	14.051.587.000	14.045.998.828	99,96%						
6959	Pengelolaan Hibah Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian - Hibah The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)	197.830.836.000	176.460.390.967	89,20%	89,0	90,3	km	101,46%		
4067	**Pengelolaan Transfer Dana Otonomi Khusus**	**17.006.143.580.000**	**17.006.143.580.000**	**100%**						
9EA										
001	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum	4.309.582.640.000	4.309.582.640.000	100,00%	48	48	daerah	100,00%		
002	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya	5.386.978.300.000	5.386.978.300.000	100,00%	48	48	daerah	100,00%		
003	Dana Otonomi Khusus Aceh	4.309.582.640.000	4.309.582.640.000	100,00%	1	1	daerah	100,00%		
004	Dana Tambahan Infrastruktur	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	100,00%	48	48	daerah	100,00%		
5869	**Pengelolaan Transfer Insentif Fiskal**	**6.000.000.000.000**	**4.274.535.998.500**	71,24%	368	366				
9EK										
005	Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya	4.000.000.000.000	3.974.535.998.500	99,36%	318	316	daerah	99,37%		
006	Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan	2.000.000.000.000	300.000.000.000	15,00%	50	50	daerah	100,00%		

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
5322	**Pengelolaan Transfer Dana Keistimewaan DIY**	**1.000.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	**100%**						
9EA										
006	Dana Keistimewaan DIY	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%	1	1	daerah	100,00%		
5323	**Pengelolaan Transfer Dana Desa**	**69.000.000.000.000**	**61.645.153.758.700**	**89,34%**						
9EJ										
006	Dana Desa Ke Desa	69.000.000.000.000	61.645.153.758.700	89,34%	75.259	75.176	desa	99,89%		
01.90	**Subfungsi Pelayanan Umum Lainnya**	**316.031.091.947.000**	**282.253.754.076.818**	**89%**						
07	**Program Pengelolaan Hibah Negara**	**575.937.284.000**	**493.977.094.757**	**86%**						
4850	**Pengelolaan Banking Commission**	**1.082.231.000**	**434.795.282**	**40,18%**						
9BB										
002	Pembayaran Tagihan Banking Commission	1.082.231.000	434.795.282	40,18%	100	100	Persen	100,00%	100	
4849	**Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing**	**574.855.053.000**	**493.542.299.475**	**85,86%**						
9BB										
092	The Indonesian AID Scholarship (TIAS) Tahap II	69.926.131.000	42.580.741.751	60,9%	100	100	Persen	100	100	
094	Dukungan untuk Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria Tahap III	32.488.000.000	32.800.494.550	101,0%	100	100	Persen	100	100	
096	Pelatihan Komoditas Berkelanjutan untuk Negara Sehaluan/Like Minded Countries (LMCs) 2025 Pemerintah RI dalam bentuk	6.500.770.000	5.763.786.710	88,7%	100	100	Persen	100	100	

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas									
097	Pemberian Bnatuan Hibah Pemerintah Republik Indonesia Kepada Afganistan untuk Bantuan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa Pasca Sarjana Afganistan	4.456.561.000	1.923.527.815	43,2%	100	100	Persen	100	100	
098	Pemberian Hibah Kemanusiaan Pemerintah RI dalam Rangka Penanggulangan Bencana Kekeringan di Namibia	5.162.400.000	5.038.584.500	97,6%	100	100	Persen	100	100	
099	Pemberian Hibah Bantuan Kemanusiaan kepada Pemerintah Saint Vincent and the Grenadines untuk Penanganan Dampak Bencana Hurricane Beryl	4.302.000.000	4.121.744.550	95,8%	100	100	Persen	100	100	
100	Pemberian Hibah Bantuan Kemanusiaan Untuk Penanganan Bencana Alam Topan Yagi di Vietnam	17.208.000.000	16.560.083.750	96,2%	100	100	Persen	100	100	
101	Pemberian Hibah Kemanusiaan Bantuan Pangan Dalam Rangka Darurat Penanggulangan Kerawanan Pangan di Afganistan melalui World Food Programme (WFP)	59.708.576.000	56.454.378.150	94,5%	100	100	Persen	100	100	
102	Dukungan kepada ICRC Untuk Program Kesehatan,	34.416.000.000	32.670.490.050	94,9%	100	100	Persen	100	100	

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
	Air, dan Lingkungan bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Konflik Bersenjata dan kekerasan di Wilayah Penduduk (Palestina)									
103	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Palestina Melalui Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik	1.762.865.000	486.012.266	27,6%	100	100	Persen	100	100	
104	Pemberian Hibah Berupa Pemberian Beasiswa	740.940.000	178.387.990	24,1%	100	100	Persen	100	100	
105	Pemberian Hibah Berupa Pengiriman Dispatch Expert	923.375.000	851.264.511	92,2%	100	100	Persen	100	100	
107	Pemberian Hibah Berupa Pelatihan	56.388.575.000	31.813.931.535	56,4%	100	100	Persen	100	100	
108	Pemberian Hibah Berupa Pembangunan/Renovasi	31.432.949.000	24.895.312.209	79,2%	100	100	Persen	100	100	
109	Pemberian Hibah Berupa Bantuan Kemanusiaan	202.296.000.000	200.400.668.250	99,1%	100	100	Persen	100	100	
110	Pemberian Hibah Berupa Bantuan Multimodalitas	47.141.911.000	37.002.890.888	78,5%	100	100	Persen	100	100	
11	**Program Pengelolaan Subsidi**	**315.455.154.663.000**	**281.759.776.982.061**	**89,32%**						
4861	**Pengelolaan Subsidi Pajak**	**19.884.655.363.000**	**19.254.945.285.565**	96,83%						
002	Subsidi PPh DTP SBN Valas	6.388.098.021.000	6.388.098.020.252	100,00%	1	1	Wajib Pajak	100,00%	1 WP	
003	Subsidi PPH DTP Penghapusan Utang PDAM	-	-	0%					1 WP	
001	Subsidi PPh DTP Panas Bumi	4.473.364.909.000	4.473.364.907.952	100,00%	9	9	Wajib Pajak	100,00%	9 WP	
001	Subsidi PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun	4.421.317.429.000	3.803.052.076.507	86,02%	67.434	54.464	Wajib Pajak	86,02%	11.560 WP	

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
001	Subsidi PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik	1.774.410.961.000	1.774.410.959.649	100,00%	42.790	42.790	Wajib Pajak	100,00%	14.238 WP	
001	Subsidi PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik	2.150.303.248.000	2.150.283.756.289	100,00%	33.475	33.475	Wajib Pajak	100,00%	2.785 WP	
001	Subsidi PPh Pasal 21 DTP Stimulus Ekonomi Untuk Industri Tertentu	395.000.004.000	383.582.098.737	97,11%	940.475	913.295	Wajib Pajak	97,11%	-	
001	Subsidi PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid	282.160.791.000	282.153.466.179	100,00%	26.585	17.936	Wajib Pajak	43,65%	-	
4862	**Pengelolaan Subsidi Kredit Program**	**299.735.884.000**	**60.356.681.884**	20,14%						
006	Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	-	-	0%	-	-	Penjamin	100,0%	2	
005	Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)	10.279.400.000	7.271.321.536	70,74%	499	673	Debitur	100,00%	534	
008	Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	289.456.484.000	53.085.360.348	18,34%	2	1	Debitur	50,00%	14	
4863	**Pengelolaan Subsidi IJP KUR dan Bunga KUR**	**38.488.092.351.000**	**31.615.550.490.048**	**82,14%**						
001	Subsidi IJP UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	-	-	0%					2	
002	Subsidi IJP KUR	67.682.405.000	0	0,00%	2	0	Penjamin	0,00%	1	
004	Subsidi Bunga KUR	38.278.864.486.000	31.611.078.463.388	82,58%	4.178.954	4.058.291	Debitur	97,11%	4.830.785	
005	Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	26.043.649.000	2.185.357.764	8,39%	400	129	Debitur	31,26%	9	
006	Subsidi Bunga/ Margin Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	4.900.000.000	13.586.807	0,28%	347	2	Debitur	60,00%	-	

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
007	Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan Sisi Penyediaan Rumah	110.601.811.000	2.273.082.089	2,06%	7.811	256	(Debitur/Unit/ Penyalur/Penjamin)	3,28%	-	
008	Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan Sisi Permintaan Rumah	70.484.925.000	216.934.762	0,31%	22.224	649	(Debitur/Unit/ Penyalur/Penjamin)	2,92%	-	
4865	**Pengelolaan Subsidi Pupuk**	**45.343.603.284.000**	**32.711.043.845.417**	**72,14%**						
001	Subsidi Pupuk	45.343.603.284.000	32.711.043.845.417	72,14%	8.423.743	8.118.061,17	Ton	96,37%	6.808.295	
4867	**Pengelolaan Subsidi Energi**	**197.752.255.753.000**	**185.168.643.723.241**	**93,64%**						
001	Subsidi Listrik	89.746.512.366.000	81.036.424.051.631	90,29%	75,55	75,40	TeraWattHour	99,80%	68,46	
002	Subsidi Minyak Solar	19.716.793.478.000	17.584.401.914.632	89,18%	18.885.000	18.403.273	Kilo Liter	97,45%	17.620.769	
003	Subsidi Minyak Tanah	5.343.763.741.000	3.642.567.330.483	68,16%	525.000	507.799	Kilo Liter	96,72%	508.297	
004	Subsidi LPG Tabung 3 Kg	82.945.186.168.000	82.905.250.426.495	99,95%	8.170.000	8.515.283	Metrik Ton	104,23%	7.868.951	
4868	**Pengelolaan Subsidi PSO Perkeretaapian**	**4.797.057.860.000**	**4.735.021.249.849**	98,71%						
001	Subsidi PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Antarkota	278.681.977.000	278.477.867.000	99,93%	11.481.270	11.550.711	Penumpang	91,19%	11.041.726	
002	Subsidi PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Perkotaan	2.518.375.883.000	2.471.279.645.509	98,13%	405.106.396	385.813.482	Penumpang	93,07%	379.924.964	
003	Subsidi PSO Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek	2.000.000.000.000	1.985.263.737.340	99,26%	28.417.701	27.631.982	Penumpang	91,54%	21.205.106	
4869	**Pengelolaan Subsidi PSO Angkutan Laut**	**3.068.456.424.000**	**3.068.456.422.559**	100%						
001	Subsidi PSO Angkutan Laut Kelas Ekonomi	3.068.456.424.000	3.068.456.422.559	100,00%	4.265.009	4.472.918	Penumpang	104,87%	3.970.047	
4870	**Pengelolaan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers**	**184.628.830.000**	**180.673.538.000**	98%						
001	Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers	184.628.830.000	180.673.538.000	97,86%	171.035	170.840	Berita	99,89%	179,985	

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
4871	**Pengelolaan Subsidi Bunga untuk Air Bersih**	**11.038.880.000**	**9.464.854.425**	86%						
001	Subsidi Bunga Air Bersih	11.038.880.000	9.464.854.425	85,74%	6	6	PDAM	100,00%	7	
4873	**Pengelolaan Subsidi Perumahan**	**5.489.523.439.000**	**4.889.999.221.073**	**89,08%**						
001	Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	1.229.574.000.000	1.143.072.000.000	92,96%	300.000	278.865	Unit	92,96%	199,959	
002	Subsidi Bunga Kredit Perumahan	4.259.949.439.000	3.746.927.221.073	87,96%	729.069	729.035	Unit	87,96%	732,927	
6454	**Pengelolaan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah**	**65.621.670.000**	**65.621.670.000**	**100%**						
001	Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (PEN)	65.621.670.000	65.621.670.000	100,00%	25	25	Pemda	100,00%	29	
04	**EKONOMI**	**330.595.764.395.000**	**242.301.477.597.741**	**98,89%**						
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**	**330.210.540.398.000**	**241.945.370.903.799**	**98,89%**						
12	**Program Pengelolaan Belanja Lainnya**	**166.053.532.812.000**	**121.912.558.389.476**	**98,89%**						
4892	**Pengelolaan Dana Operasional SKK Migas**	**1.896.525.226.000**	**1.879.745.875.153**	**99,12%**						
9GA	Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya	1.896.525.226.000	1.879.745.875.153	99,12%						
001	Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pengembangan Industri Hulu Migas	1.646.419.431.000	1.639.025.766.002	99,6%	1	1	Layanan	100%	1	
002	Layanan Industri Hulu Migas	250.105.795.000	240.720.109.151	96,2%	4	4	Layanan	100%	4	
4966	**Pengelolaan Dana Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM**	**164.157.007.586.000**	**120.032.812.514.323**	**73,12%**						

Kode	Uraian	Realisasi Belanja			Capaian Keluaran				Capaian Keluaran TAYL	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%		
9GA	Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya	164.157.007.586.000	120.032.812.514.323	73,12%						
001	Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM	71.745.814.022.000	54.711.908.613.828	76,3%	38.030.443	42.031.944	Kilo Liter	111%	44.057.882	
001	Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik	92.411.193.564.000	65.320.903.900.495	70,7%	195	222,16	Terawat Hour	114%	204,41	
04.09	**TELEKOMUNIKASI**	**385.223.997.000**	**356.106.693.942**	**92,44%**						
12	**Program Pengelolaan Belanja Lainnya**	**385.223.997.000**	**356.106.693.942**	**92,44%**						
4893	**Pengelolaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal**	**385.223.997.000**	**356.106.693.942**	**92,44%**						
9GA	Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya	385.223.997.000	356.106.693.942	92,44%						
001	Layanan Pos Universal	385.223.997.000	356.106.693.942	92,44%	2460	2460	KPC LPU	100%	2.400	

C. Pengungkapan Informasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran atas Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun 2025

1. Fungsi Pelayanan Umum

1.1 Subfungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal serta urusan Luar Negeri

1) Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Pada tahun 2025, program Pengelolaan Belanja Lainnya pada BA BUN 999.08 mempunyai anggaran sebesar Rp168.077.285.871.000,00 yang terbagi kedalam 2 fungsi yaitu Pelayanan Umum dan Ekonomi. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp123.553.861.728.484,00 atau 73,75 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi program Pengelolaan Belanja Lainnya adalah sebesar Rp215.042.260.698.507,00 atau 99,05 persen dari pagu Rp217.097.510.520.000,00. Terjadi penurunan nominal realisasi belanja sebesar Rp91.488.398.970.023,00 atau 57,46 persen antara lain disebabkan pembayaran kompensasi tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan pembayaran kompensasi tahun 2024. Hal ini karena pembayaran pada tahun 2024 meliputi pembayaran atas kekurangan dana komspensasi tahun 2023 *audited*, triwulan I, triwulan II, dan sebagian triwulan III tahun 2024. Selanjutnya, pembayaran pada tahun 2025 hanya meliputi pembayaran kekurangan dana kompensasi tahun 2024 *audited* dan periode triwulan I tahun 2025 yang dibayarkan pada tahun 2025. Pada tahun 2025 juga tidak terdapat alokasi untuk kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Kartu Prakerja (MPPKP).

Kegiatan Pengelolaan Belanja Lainnya pada BA BUN 999.08 pada fungsi Pelayanan umum yaitu Pengelolaan Bantuan Kemasyarakatan, Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun, Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua, Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua Barat, dan kegiatan pada fungsi Ekonomi yaitu Pengelolaan Dana Operasional SKK Migas, Pengelolaan Dana Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM dan Pengelolaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal.

Kegiatan pengelolaan belanja lainnya pada fungsi pelayanan umum, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Bantuan Kemasyarakatan

Kegiatan Pengelolaan Bantuan Kemasyarakatan pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp1.222.413.773.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp910.740.792.379,00 atau 74,5 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Kegiatan Pengelolaan Bantuan Kemasyarakatan adalah sebesar Rp159.153.427.011,00 atau 88,20 persen dari pagu sebesar Rp180.440.597.000,00. Kegiatan Pengelolaan Bantuan Kemasyarakatan terdiri dari KRO Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya.

KRO Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya terdiri atas beberapa Rincian *Output* (RO) yaitu Bantuan Kemasyarakatan Presiden dan Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden.

1) Bantuan Kemasyarakatan Presiden

Bantuan Kemasyarakatan Presiden pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp1153.101.780.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp841.429.724.610,00 atau 73 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 1

(satu) layanan atau 100 persen dari target 1 (satu) layanan. Pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Bantuan Kemasyarakatan Presiden tercapai 100 persen.

2) Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden

Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp69.311.993.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp69.311.067.769,00 atau 100 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 1 (satu) layanan atau 100 persen dari target 1 (satu) layanan.

Pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden tercapai 100 persen.

b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp246.860.461.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp233.041.824.513,00 atau 94,40 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun adalah sebesar Rp238.858.879.967,00 atau 93.70 persen dari pagu Rp254.910.054.000,00. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun terdiri dari KRO Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya.

KRO Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya terdiri atas beberapa Rincian *Output* (RO) yaitu: Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat DK, Pengusahaan Kawasan SET-DK, Layananan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kab Bintan, Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kab Bintan, Layanan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang, Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang, Layanan Dukungan Manejemen BP Kawasan Karimun, dan Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Karimun.

1) Layanan Dukungan Manajemen Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun

Layanan Dukungan Manajemen Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp7.414.531.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 5.576.683.145,00 atau 75,2 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 1 (satu) layanan atau progres 44 persen dari target 1 (satu) layanan.

Pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Layanan Dukungan Manajemen Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun tercapai 100 persen.

Realisasi *Output* pada Layanan Dukungan Manajemen Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun diantaranya berupa kegiatan Bimtek.

2) Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat DK

Pengusahaan Kawasan SET-DK pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp5.095.523.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.896.765.300,00 atau 37,2 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 1 (satu) layanan atau 100 persen dari target 1 (satu) layanan.

Pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Pengusahaan Kawasan Sekretariat Dewan Kawasan PBPB Bintan dan Karimun tercapai 100 persen.

Realisasi *Output* pada Pengusahaan Kawasan SET-DK berupa pelaksanaan kegiatan promosi dan JWG di Singapore.

3) Layanan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kab Bintan

Layanan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kab Bintan pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp6.213.683.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp4.843.662.113,00 atau 78,0 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 1 (satu) kawasan atau 100 persen dari target 1 (satu) kawasan.

Pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Layanan Dukungan Manajemen BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan tercapai 100 persen.

Realisasi *Output* pada Layanan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kab Bintan berupa Rutinitas Perkantoran dan Pembayaran Honor Tim kegiatan.

4) Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kab.Bintan

Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kab.Bintan pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp77.753.119.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp76.705.007.097,00 atau 98,7 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 1 (satu) layanan atau 100 persen dari target 1 (satu) layanan.

Pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan tercapai 100 persen.

Realisasi *Output* pada Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kab.Bintan berupa Pembayaran terim 100 persen & kegiatan pembangunan pemeliharaan dan peningkatan FTZ Bintan.

5) Layanan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang

Layanan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp5.706.780.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp4.959.690.266,00 atau 86,9 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 1 (satu) layanan atau 100 persen dari target 1 (satu) layanan.

Pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Layanan Dukungan Manajemen BP Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang tercapai 100 persen.

Realisasi *Output* pada Layanan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinan berupa Administrasi Perkantoran, Rakor, Penyusunan Dokumen dan Monev.

6) Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang

Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp68.860.022.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp68.426.100.055,00 atau 99,4 persen. Capaian

kinerja/*output* ini sebesar 1 (satu) layanan atau100 persen dari target 1 (satu) layanan.

Pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang tercapai 100 persen.

Realisasi *Output* pada Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang berupa pembayaran terim 100 dan kegiatan pembangunan pemeliharaan dan peningkatan FTZ Tanjungpinang.

7) Layanan Dukungan Manejemen BP Kawasan Karimun

Layanan Dukungan Manejemen BP Kawasan Karimun pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp8.476.346.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp5.082.310.680,00 atau 60,0 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 1 (satu) layanan atau 100 persen dari target 1 (satu) layanan.

Pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Layanan Dukungan Manajemen BP Kawasan Karimun tercapai 100 persen.

Realisasi *Output* pada Layanan Dukungan Manejemen BP Kawasan Karimun berupa Rutinitas perkantoran dan belanja modal kantor.

8) Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Karimun

Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Karimun pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 67.340.457.000,00. Sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp65.551.605.857,00 atau 97,3 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 1 (satu) layanan atau 100 persen dari target 1 (satu) layanan.

Pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Karimun tercapai 100 persen.

Realisasi *Output* pada Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Karimun berupa pembayaran terim 100 dan kegiatan pembangunan pemeliharaan dan peningkatan FTZ Karimun.

c. Kegiatan Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua

1) Kegiatan Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS Papua pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp152.614.576.000,00. Sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp126.767.248.733,00 atau 83,1 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Kegiatan Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua adalah sebesar Rp106.854.376.765,00 atau 70,55 persen dari pagu sebesar Rp151.452.988.000,00. Kegiatan Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua terdiri dari KRO Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya dan RO berupa Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua.

2) Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua

Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp152.614.576.000,00. Sampai dengan tahun

2025 telah terealisasi sebesar Rp126.767.248.733,00 atau 83,1 persen. Capaian kinerja/*output* ini adalah 25 Kabupaten atau 100 persen dari target 25 Kabupaten.

Pada periode tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua tercapai 100 persen.

Realisasi *Output* pada Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua berupa Kegiatan sudah tercapai 100 persen. Telah terdapat pembayaran tagihan Uang Muka, pembayaran tagihan termin I, II, III, IV, V, dan beberapa kegiatan yang dibayar menggunakan UP/TUP.

d. Kegiatan Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua Barat

1) Kegiatan Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS Papua pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp16.640.252.000,00. Sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp14.646.779.441,00 atau 88,0 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Kegiatan Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp14.859.664.882,00 atau 60,25 persen dari pagu Rp24.663.081.000,00. Kegiatan Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua Barat terdiri dari KRO Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya dan RO berupa Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat.

2) Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat

Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp16.640.252.000,00. Sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp14.646.779.441,00 atau 88,0 persen.

Capaian kinerja/*output* ini adalah 12 Kabupaten atau 100 persen dari target 12 Kabupaten. Pada periode tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat tercapai 100 persen.

Realisasi *Output* pada Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat berupa belanja terkait pelaksanaan kegiatan OAB dan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran beras periode triwulan IV tahun 2025.

2) Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp188.983.404.010.000,00 dan sampai dengan periode 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp181.821.367.934.906,00 atau 96,21 persen dari anggaran yang ditetapkan. Indikator dari capaian kinerja pada program ini terbagi dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Kontribusi Sosial memiliki alokasi anggaran sebesar Rp187.652.312.042.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealiasi sebesar Rp180.634.945.029.737,00 atau 92,26 persen. Capaian *output* atas kegiatan ini sebanyak 160.810.344 peserta sebagai penerima manfaat pensiun dan iuran jaminan, asuransi kesehatan.

b. Kegiatan Pengelolaan Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog memiliki alokasi anggaran sebesar Rp143.206.450.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealiasi

sebesar Rp143.206.449.377,00 atau 100,00 persen. Capaian *output* atas kegiatan ini sebanyak pembayaran selisih atas 35.106.934 kg Beras Bulog.

c. Kegiatan Pengelolaan Jasa Pelayanan Perbankan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp346.016.431.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp300.755.499.729 atau 86,92 persen. Capaian *output* atas kegiatan ini 100.681.035 transaksi atas alokasi PPN RTGS BO, *Fee* Bank Kustodian, Biaya *Swift* atas layanan BO Valas.

d. Kegiatan Pengelolaan Dana PNBP BUN dalam rangka peningkatan kinerja dan pengawasan BUN memiliki alokasi anggaran sebesar Rp353.214.627.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealiasi sebesar Rp283.815.382.264,00 atau 80,35 persen. Capaian *output* atas kegiatan ini berupa 3 (tiga) modul aplikasi, 20 peraturan, 3 (tiga) aplikasi, 2 (dua) rekomendasi dan untuk pengembangan kualitas SDM sebanyak 1.472 pegawai.

e. Kegiatan Pengelolaan Dukungan Investasi Pemerintah berupa Penyaluran Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah (PEN) memiliki alokasi anggaran sebesar Rp2.953.978.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp2.749.632.804,00. Capaian *output* berupa persentase atas dana yang telah terserap sebagai dukungan investasi pemerintah dan hingga 31 Desember 2025 sebanyak 93,09 persen.

f. Kegiatan Pengelolaan Pembayaran Kontribusi dan *Trust Fund* ke Lembaga Internasional memiliki alokasi anggaran sebesar Rp211.909.208.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp211.903.520.624,00 atau 99,997 persen dan diberikan kepada 3 (tiga) organisasi internasional dari target 3 (tiga) organisasi.

g. Kegiatan Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Fasilitas Penyiapan Proyek memiliki alokasi anggaran sebesar Rp266.640.519.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp243.992.420.371,00 atau 91,51 persen untuk 21 Proyek dari 21 Proyek yang ditargetkan.

h. Kegiatan Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Dukungan Kelayakan Proyek Kerja sama memiliki alokasi anggaran sebesar Rp7.150.755.000,00, namun hingga 31 Desember 2025 tidak ada realisasi atas kegiatan ini karena terdapat perubahan jadwal pencairan Dana Dukungan Kelayakan Proyek KPBU (VGF).

i. Pada tahun 2024 terdapat kegiatan Pengelolaan Dukungan *Loss Limit* atas penjaminan Program PEN dan pada tahun 2025 tidak ada lagi alokasi DIPA untuk kegiatan dimaksud.

1.2 Subfungsi Pinjaman Pemerintah

1) Program Pengelolaan Utang Negara

Pada tahun 2025, Program Pengelolaan Utang Negara mempunyai anggaran sebesar Rp1.506.336.706.131.000,00. Sampai dengan periode Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.427.460.410.758.610,00 atau 94,76 persen. Indikator dari capaian kinerja pada Program Pengelolaan Utang Negara diwujudkan dalam bentuk Indikator Kinerja Program (Persentase Pembayaran Kewajiban Utang) yang mempunyai target 400 dan teralisasi sebesar 400 atau 100 persen dengan rincian pinjaman dan SBN. Pembayaran kewajiban utang terdiri atas:

a. Pembayaran bunga utang dalam negeri;

b. Pembayaran bunga utang luar negeri;

c. Pembiayaan utang dalam negeri; dan

d. Pembiayaan utang luar negeri.

Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Indikator Kinerja Program (Persentase Pembayaran Kewajiban Utang) sebesar 400. Program Pengelolaan Utang Negara terdiri atas satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang. Selanjutnya Kegiatan Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang terdiri atas satu Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) yaitu Pembayaran Kewajiban Utang.

2) Program Investasi Pemerintah

Program ini mempunyai anggaran dalam DIPA sebesar Rp100.247.171.813.000,00. Sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp102.289.176.180.269,00 atau 102 persen. Realisasi pada Program Investasi Pemerintah ini mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun 2024 yang dialokasikan sebesar Rp97.880.003.732.000,00 dengan realisasi sebesar Rp83.680.003.623.522,00. Program ini memiliki 5 (lima) kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Investasi Pemerintah mempunyai anggaran sebesar Rp52.776.043.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp52.776.043.000.000,00 atau 100 persen. Untuk RO Rumah yang dibiayai capaian *output* sebanyak 278.868 unit rumah atau 93 persen dari target sebesar 300.000 unit rumah. Tahun 2024 diperiode yang sama capaian *output* sebanyak 200.000 unit rumah. Untuk RO Investasi Pemerintah Non Permanen kepada Perum Bulog capaian *output* 100 persen dari target, sementara tahun 2024 tidak terdapat alokasi. Untuk RO Investasi Pemerintah Non Permanen kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) capaian *output* 1 (satu) layanan atau 100 persen dari target, sementara tahun 2024 tidak terdapat alokasi.

b. Kegiatan Pengelolaan PMN kepada BUMN mempunyai anggaran sebesar Rp11.457.022.705.000,00 dan sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp11.457.022.705.000,00 atau 100 persen dari anggaran. RO untuk kegiatan tersebut adalah Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Serapan Anggaran PMN kepada BPI Danantara, seluruhnya telah terealisasi 100 persen dari target. Sementara pada tahun 2024 RO dari kegiatan tersebut adalah Serapan Anggaran PMN kepada PT Hutama Karya (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Len Industri (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Serapan Anggaran PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero), dan Serapan Anggaran PMN kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

c. Kegiatan Pengelolaan Investasi kepada OI/LKI/BUI mempunyai anggaran sebesar 1.768.200.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.894.957.731.398,00 atau 107 persen dari target dengan *output* 3 (tiga) Organisasi/LKI/BUI. Tahun 2024 diperiode yang sama capaian *output* 3 (tiga) Organisasi/LK/BUI.

d. Kegiatan Pembiayaan Investasi untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional mempunyai anggaran sebesar Rp7.546.980.793.000,00 dan sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp7.546.980.793.000,00 atau 100 persen dari target. Realisasi RO Adalah sebesar 15.451.398 m2 atau 66 persen dari target. Sementara RO tahun 2024 adalah sebesar 23.373.800 m2.

e. Kegiatan Pengelolaan Dana Pembangunan Pendidikan Nasional mempunyai anggaran sebesar Rp26.698.925.315.000,00 dan sampai dengan *Unaudited* 2025 telah terealisasi sebesar Rp26.698.925.315.000,00 atau 100 persen dari target. Nilai tersebut untuk RO berupa Penyaluran Dana Abadi Penelitian, Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan, Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Sementara RO tahun 2024 hanya untuk Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dan telah terealisasi 100 persen.

3) Program Pemberian Pinjaman

Berdasarkan DIPA BA-BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman Tahun 2025 terdapat 2 *output* yaitu alokasi penerusan pinjaman kepada BUMN dan alokasi penerusan pinjaman kepada Pemda. Total alokasi anggaran pada DIPA BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman Tahun 2025 sebesar Rp6.612.946.457.000,00. Alokasi anggaran penerusan pinjaman kepada BUMN sebesar Rp2.076.946.457.000,00 dan alokasi anggaran penerusan pinjaman kepada Pemda sebesar Rp4.536.000.000.000,00. Total realisasi DIPA BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman Tahun 2025 sebesar Rp4.666.370.272.398,00 atau 70,56 persen dari pagu alokasi. Realisasi penerusan pinjaman kepada BUMN sebesar Rp1.766.824.008.805,00 atau 85,07 persen dari pagu alokasi. Selanjutnya, realisasi penerusan pinjaman kepada Pemda sebesar Rp2.899.546.263.593,00 atau 63,92 persen dari pagu alokasi.

Total target keluaran *output* untuk DIPA BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman Tahun 2025 sebesar 7 (tujuh) proyek yang terdiri dari 6 (enam) proyek kepada BUMN dan 1 (satu) proyek kepada Pemda. Realisasi volume keluaran DIPA BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman Tahun 2025 sebesar 5 (lima) proyek dari target 6 (enam) proyek BUMN atau sebesar 83,33 persen dan 1 (satu) proyek terealisasi dari target 1 (satu) proyek Pemda atau sebesar 100 persen sehingga total capaian *output* dari DIPA BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman Tahun 2025 sebesar 85,71 persen.

1.3 Subfungsi Pembangunan Daerah

Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah

Pada tahun 2025, program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp876.943.792.927.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp849.040.320.046.299,00 atau 96,82 persen. Indikator dari capaian kinerja pada program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah diwujudkan dalam bentuk Indikator Kinerja Program Pengalokasian TKD yang akuntabel, tepat sasaran dan penyajian laporan keuangan yang transparan yang mempunyai target 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen. Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah terdiri atas beberapa kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Alokasi Umum, kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik, Kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Bagi Hasil, Kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik, Pengelolaan Dana Transfer Khusus (DAK Non Fisik), Pengelolaan Hibah Transportasi - Hibah *Mass Rapid Transit* (MRT) *Project*, Pengelolaan Hibah Sumber Daya Alam - Hibah *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest*

Landscape (Bio CF ISFL), Pengelolaan Hibah Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian - Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND), Pengelolaan Transfer Dana Otonomi Khusus, Pengelolaan Transfer Insentif Fiskal, Pengelolaan Transfer Dana Keistimewaan DIY, dan Pengelolaan Transfer Dana Desa.

a. Kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Alokasi Umum

Kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Alokasi Umum pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp438.625.121.056.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp433.292.088.063.189,00 atau 98,78 persen. Dana Alokasi Umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya bersifat *block grant*, penggunaannya disesuaikan dengan kebijakan dan prioritas daerah. Setiap daerah dapat memiliki *output* riil yang beragam. Sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya, mensyaratkan adanya laporan penggunaan dana sebagai syarat penyaluran periode berikutnya. Namun demikian, laporan dimaksud memiliki *lag* waktu yang cukup lama dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 360.515.964.881.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 360.515.964.881.000,00 atau 100 persen. Penyaluran tersebut meliputi 546 daerah penerima atau 100 persen dari daerah penerima alokasi. Realisasi tersebut sama dengan tahun sebelumnya, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya telah disalurkan kepada 546 daerah. Karena bersifat *block grant,* penggunaan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan kebijakan dan prioritas daerah.

2) DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah

DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp15.355.145.022.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp10.620.002.627.812,00 atau 69,16 persen. Dukungan Penggajian PPPK Daerah dialokasikan untuk 534 daerah namun realisasi penyaluran meliputi 501 daerah penerima atau 93,82 persen daerah penerima alokasi. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah dialokasikan untuk 523 daerah namun realisasi penyaluran meliputi 455 daerah penerima atau 87 persen daerah penerima alokasi.

3) DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 1.699.600.000.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 1.659.888.602.000,00 atau 97,66 persen. DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dialokasikan untuk 411 daerah, namun realisasi penyaluran meliputi 409 daerah atau 99,51 persen dari daerah penerima alokasi. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan disalurkan kepada 407 daerah atau 99,03 persen dari daerah penerima alokasi sebanyak 411 daerah.

4) DAU Dukungan Bidang Pendidikan

DAU Dukungan Bidang Pendidikan pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 33.977.498.065.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 33.578.181.449.999,00 atau 98,82 persen. DAU Dukungan Bidang Pendidikan dialokasikan untuk 546 daerah dan telah disalurkan kepada 546 daerah penerima alokasi. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, DAU Dukungan Bidang Pendidikan dialokasikan dan disalurkan kepada 544 daerah.

5) DAU Dukungan Bidang Kesehatan

DAU Dukungan Bidang Kesehatan pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 19.410.056.022.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 19.251.193.436.378,00 atau 99,18 persen. DAU Dukungan Bidang Kesehatan tahun 2025 dialokasikan dan disalurkan kepada 534 daerah. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, DAU Dukungan Bidang Kesehatan dialokasikan dan disalurkan kepada 535 daerah.

6) DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum

DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2025 tidak dialokasikan dan tidak disalurkan pada tahun 2025 (berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025).

7) DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah

DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 7.666.857.066.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 7.666.857.066.000,00 atau 100 persen. DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah tahun 2025 dialokasikan dan disalurkan kepada 333 daerah. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah dialokasikan dan disalurkan kepada 350 daerah.

b. Kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Bagi Hasil

Kegiatan pengelolaan transfer Dana Bagi Hasil pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp251.056.815.619.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp252.552.279.176.980,00 atau 100,60 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, pengelolaan transfer Dana Bagi Hasil mempunyai alokasi Rp140.073.608.127.000,00 dengan realisasi sebesar 139.969.194.181.262,00 atau 99,93 persen.

1) DBH Pajak

DBH Pajak pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp68.581.493.267.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp65.539.225.289.780,00 atau 95,56 persen. DBH Pajak dialokasikan untuk 546 daerah dan telah disalurkan kepada 546 daerah penerima alokasi. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, secara keseluruhan DBH Pajak telah disalurkan ke semua daerah penerima alokasi yaitu 546 daerah kecuali untuk DBH CHT dari 444 daerah penerima alokasi hanya 345 daerah yang menerima atau 77,70 persen.

2) DBH Lainnya

DBH Lainnya pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp1.192.958.901.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 1.172.998.010.000,00 atau 98,33 persen. DBH Lainnya dialokasikan untuk 354 daerah dan telah disalurkan semua kepada 354 daerah penerima. Dari segi capaian *output* rill dari target capaian sebesar 354 daerah, menghasilkan capaian *output* 338 daerah atau sebesar 95,48 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, capaian *output* riil mencapai 343 daerah atau 98,28 persen dari target sebesar 349 daerah.

3) DBH SDA

DBH SDA pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp83.689.193.628.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp83.661.760.058.100,00 atau 99,97 persen. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, DBH SDA mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp82.510.347.548.000,00 dengan realisasi Rp82.437.053.313.222,00 atau 99,91 persen.

a. DBH SDA Migas

DBH SDA Migas pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp15.818.578.309.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp15.818.578.309.000,00 atau 100 persen. DBH SDA Migas dialokasikan untuk358 daerah dan telah disalurkan kepada 358 daerah penerima alokasi. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, DBH Minyak Bumi disalurkan sebesar 100 persen kepada daerah penerima sebanyak 346 daerah. Demikian juga untuk DBHGas Bumi disalurkan sebesar 100 persen untuk 290 daerah penerima.

b. DBH SDA Minerba

DBH SDA Minerba pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp64.706.003.927.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp64.706.003.927.000,00 atau 100 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 503 Daerah atau 100 persen dari target sebesar 503 Daerah. Dari sisi capaian *output* riil, DBH SDA Minerba menghasilkan *output* riil berupa Daerah sebanyak 503 atau 100 persen dari target sebesar 503.

c. DBH SDA Panas Bumi

DBH SDA Panas Bumi pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp1.370.453.591.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.370.453.591.000,00 atau 100 persen. DBH SDA Panas Bumi dialokasikan untuk 269 daerah penerima dan telah disalurkan kepada 269 daerah penerima atau 100 persen.

d. DBH SDA Kehutanan IIUPH

DBH SDA Kehutanan IIUPH pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp17.342.357.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp16.263.722.320,00 atau 93,78 persen. DBH SDA Kehutanan IIUPH dialokasikan kepada 25 daerah penerima dengan capaian penyaluran sebesar 100 persen atau semua daerah sudah tersalurkan. Pada periode yang sama

di tahun sebelumnya, realisasi anggaran DBH SDA Kehutanan IIUPH mencapai 86,60 persen, sedangkan *output* penyaluran mencapai 95,45 persen yaitu 21 daerah penerima dari 22 daerah yang dialokasikan. Capain penyaluran tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

e. DBH SDA Kehutanan PSDH

DBH SDA Kehutanan PSDH pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp423.984.457.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp398.656.462.820,00 atau 94,03 persen. DBH SDA Kehutanan PSDH dialokasikan untuk 542 daerah, namun realisasi penyaluran meliputi 527 daerah atau 97,23% dari daerah penerima alokasi. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, DBH SDA Kehutanan PSDH disalurkan kepada 479 daerah atau 93,55 persen dari daerah penerima alokasi sebanyak 512 daerah.

f. DBH SDA Kehutanan DR

DBH SDA Kehutanan DR pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp638.167.280.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp637.140.338.960,00 atau 99,84 persen. DBH SDA Kehutanan DR dialokasikan untuk 33 daerah, namun realisasi penyaluran meliputi 32 daerah atau 96,97 persen dari daerah penerima alokasi. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, DBH SDA Kehutanan DR disalurkan kepada 29 daerah atau 93,55 persen dari daerah penerima alokasi sebanyak 31 daerah. Realisasi penyaluran tahun 2025 meningkat sebesar 3,42 persen.

g. DBH SDA Perikanan

DBH SDA Perikanan pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp714.663.707.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp714.663.707.000,00 atau 100 persen. DBH SDA Perikanan dialokasikan untuk 509 daerah dan telah disalurkan kepada 509 daerah penerima alokasi. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, DBH SDA Perikanan dialokasikan dan disalurkan kepada jumlah daerah yang sama yaitu 509 daerah.

4) KB DBH

KB DBH pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp13.903.976.195.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp18.516.535.761.000,00 atau 133,17 persen. KB DBH dialokasikan untuk 546 daerah dan telah disalurkan kepada 546 daerah penerima alokasi.

c. Pengelolaan Transfer DAK Fisik

Kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp18.647.793.242.000,00 dibanding anggaran tahun 2024 sebesar Rp53.822.463.835.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 65,35 persen. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp17.610.554.270.313,00 atau 94,44 persen sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 94,55 persen dari pagu anggaran tahun 2024.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2024 dan TA 2025

(dalam rupiah)

Tipe	2024	2025	% Naik/(turun)
Anggaran	53.822.463.835.000	18.647.793.242.000	65,35
Realisasi	50.890.028.794.165	17.609.696.406.217	65,40
Persentase (%)	**94,55**	**94,44**	

1) DAK Fisik Bidang Sanitasi

Kegiatan Dak Fisik Bidang Sanitasi TA 2025 terdiri dari Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) dan Pembangunan Sarana/Prasarana pengelolaan sampah dengan anggaran masing-masing sebesar Rp94.741.875.617,00 dan Rp180.322.842.805,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi masing-masing sebesar Rp94.656.607.929,00 atau 99,91 persen dan Rp180.322.842.805,00 atau sebesar 99,91 persen. Sementara itu, dari sisi *output* Kegiatan Pembangunan SPALDT menargetkan terbangun sebanyak 7.641 SR dan Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana pengelolaan sampah menargetkan terabangun 126 unit. Sampai dengan akhir periode tahun 2025 capaian kinerja/*output* ini masing- masing sebesar 3.868 SR atau 50,62 persen dan 65,9 unit atau sebesar 52,29 persen. Realisasi ini masih dimungkinkan terus bertambah seiring dengan batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, yaitu tanggal 22 Juli 2026. Rincian realisasi anggaran dan capaian *output* per kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian *Output* DAK Fisik Bidang Sanitasi TA 2025

(dalam rupiah)

Kegiatan	Nominal	Keluaran
1. Pembangunan SPALDT		
Anggaran/target	94.741.875.617	7.641 SR
Realisasi	**94.656.607.929**	**3.868 SR**
Persentase (%)	99,91	50,62
2. Pembangunan Sarana/Prasarana pengelolaan sampah		
Anggaran/target	180.322.842.805	126 Unit
Realisasi	**180.160.552.246**	**66 Unit**
Persentase (%)	99,91	52,29

Catatan: data keluaran (*output*) menggunakan data kontrak dan proporsi penyaluran per kontrak, data capaian *output* riil masih bergerak sampai 22 Juli 2026).

2) DAK Fisik Bidang Air Minum

Kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik Bidang Air MInum pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.375.753.042.000,00 dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar Rp2.141.036.548.345,00 atau mengalami peningkatan sebesar 10,96 persen. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp2.260.368.257.857,00 atau 95,14 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 99,91 persen dari pagu anggaran tahun 2024.

Kegiatan Dak Fisik Bidang Air Minum TA 2025 terdiri dari Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pembangunan SPAM dengan anggaran masing-masing sebesar

Rp954.163.207.453,00 dan Rp1.186.873.340.892,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi masing-masing sebesar Rp953.304.460.566,00 atau 99,91 persen dan Rp1.185.805.154.885,00 atau sebesar 99,91 persen. Sementara itu, dari sisi *output* Kegiatan Perluasan SPAM menargetkan terbangun sebanyak 110.066 SR dan Kegiatan Pembangunan SPAM menargetkan terabangun 48.923 SR. Sampai dengan akhir periode tahun 2025 capaian kinerja/*output* ini masing-masing sebesar 85.751 SR atau 77,91 persen dan 33.336 SR atau sebesar 68,14 persen. Realisasi ini masih dimungkinkan terus bertambah seiring dengan batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, yaitu tanggal 22 Juli 2026. Rincian realisasi anggaran dan capaian *output* per kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 3. DAK Fisik Bidang Air Minum

(dalam rupiah)

Jenis	2024	2025	% Naik/(turun)
Anggaran	2.141.036.548.345	2.375.753.042.000	10,96
Realisasi	2.139.109.615.451	2.260.368.257.857	5,67
Persentase (%)	**99,91**	**95,14**	

Tabel 4. Capaian *Output* DAK Fisik Air MinumTA 2025

(dalam rupiah)

Kegiatan	Nominal	Keluaran
1. Perluasan SPAM		
Anggaran/target	954.163.207.453	110.066 SR
Realisasi	953.304.460.566	85.751 SR
Persentase (%)	**99,91**	**77,91**
2. Pembangunan SPAM		
Anggaran/target	1.186.873.340.892	48.923 SR
Realisasi	1.185.805.154.885	33.336 SR
Persentase (%)	**99,91**	**68,14**

Catatan: data keluaran (*output*) menggunakan data kontrak dan proporsi penyaluran per kontrak, data capaian *output* riil masih bergerak sampai 22 Juli 2026.

3) DAK Fisik Bidang Kesehatan

Kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik Bidang kesehatan pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp9.160.965.225.680,00 dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar Rp13.400.000.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 31,63 persen. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp9.135.364.728.059,00 atau 99,72 persen. Serapan anggaran tersebut mengaalami perbaikan jika dibandingkan dengan serapan tahun 2024 yang sebesar 93,26 persen.

Kegiatan Dak Fisik Bidang Kesehatan TA 2025 terdiri dari:

1. Pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB);
2. Pembangunan/Renovasi/Rumah Dinas/Air Bersih/Instalasi Pengelolaan Air Limbag (IPAL) /Ambulans/Puskesmas keliling (*Pusling*) Roda 4/Pusling Perairan Puskesmas;
3. Pembangunan/Renovasi Puskesmas Pembantu;

4. Sarana Penguatan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi (KJSU), dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
5. Sarana, Prasarana, Alat Kesehata (S/P/A) Peningkatan Kelas Rumah Sakit (RS) untuk Mendukung Layanan Program KJSU;
6. S/P/A Penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
7. S/P/A Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Secara umum, tingkat realisasi anggaran ketujuh kegiatan teersbut talah optimal, yaitu rata-rata 99,75 persen. Sementara itu, capaian *output* untuk kegiatan DAK Bidang kesehatan bervariasi dan berada pada rentang 57,67 persen sampai 96,13 persen dari target *output* yang ditetapkan. Realisasi ini masih dimungkinkan terus bertambah seiring dengan batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, yaitu tanggal 22 Juli 2026. Rincian realisasi anggaran dan capaian *output* per kegiatan dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 5. DAK Fisik Bidang Kesehatan

(dalam rupiah)

Jenis	2024	2025	% Naik/(turun)
Anggaran	13.400.000.000.000	9.160.965.225.680	(31,63)
Realisasi	12.496.924.270.572	9.135.364.728.059	(26,90)
Persentase (%)	**93,26**	**99,72**	

Tabel 6. Capaian *Output* DAK Kesehatan TA 2025

(dalam rupiah)

Kegiatan	Nominal	Keluaran
1. Pembangunan Balai Penyuluhan KB		
Anggaran/target	21.914.188.477	41 Balai
Realisasi	21.891.106.369	35 Balai
Persentase (%)	**99,89**	**85,37**
2. Pembangunan/Renov/Rumah Dinas Roda 4/Pusling Perairan Puskesmas		
Anggaran/target	2.235.427.058.280	1727 Puskesmas
Realisasi	2.229.170.779.977	996 Puskesmas
Persentase (%)	**99,72**	**57,67**
3. Pembangunan/Renov Puskesmas Pembantu		
Anggaran/target	560.063.808.337	750 Puskesmas
Realisasi	558.496.360.614	721 Puskesmas
Persentase (%)	**99,72**	**96,13**
4. Sarana Penguatan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan KIA		
Anggaran/target	529.919.626.669	176 RS
Realisasi	528.436.543.313	167 RS
Persentase (%)	**99,72**	**94,89**
5. S/P/A Peningkatan Kelas RS untuk Mendukung Layanan Program KJSU		
Anggaran/target	1.953.890.114.144	12 SR
Realisasi	1.948.421.771.850	10 SR
Persentase (%)	**99,72**	**63,33**
6. S/P/A Penguatan RSUD		
Anggaran/target	3.526.807.609.450	357 SR

Kegiatan	Nominal	Keluaran
Realisasi	3.516.937.150.986	285 SR
Persentase (%)	**99,72**	**79,83**
7. S/P/A RSJ		
Anggaran/target	332.942.820.323	20 SR
Realisasi	332.011.014.950	19 SR
Persentase (%)	**99,72**	**95,00**

Catatan: data keluaran (*output*) menggunakan data kontrak dan proporsi penyaluran per kontrak, data capaian *output* riil masih bergerak sampai 22 Juli 2026.

4) DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (Bidang PPA) pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp80.261.630.119,00 dan terealisasi sebesar Rp79.546.844.442,00 atau sebesar 99,11 persen. Kegiatan Dak Fisik Bidang PPA TA 2025 terdiri dua kegiatan, yaitu Renovasi Rumah Perlindungan Sementara dan Penyediaan Peralatannya dan Renovasi UPTD PPA dan penyediaan peralatannya.

Kegiatan Renovasi Rumah Perlindungan Sementara dan Penyediaan Peralatannya mendapat alokasi anggaran Rp36.979.951.345,00 dengan target *output* sebanyak 21 paket. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp36.650.619.141,00 atau sebesar 99,11 persen dengan realisasi *output* sebanyak 15 paket atau 71 persen dari yan direncanakan. Sementara itu, Renovasi UPTD PPA dan penyediaan peralatannya mendapat alokasi anggaran Rp43.281.678.774,00 dengan target *output* sebanyak 29 paket. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp42.896.225.301,00 atau sebesar 99,11 persen dengan realisasi *output* sebanyak 21 paket atau 72,41 persen dari yang direncanakan. Realisasi ini masih dimungkinkan terus bertambah seiring dengan batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, yaitu tanggal 22 Juli 2026.

Tabel 7. Capaian *Output* DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak TA 2025

(dalam rupiah)

Kegiatan	Nominal	Keluaran
1. Renovasi Rumah Perlindungan Sementara dan Penyediaan Peralatannya		
Anggaran/target	36.979.951.345	21 Paket
Realisasi	36.650.619.141	15 Paket
Persentase (%)	**99,11**	**71,43**
2. Renovasi UPTD PPA dan penyediaan peralatannya		
Anggaran/target	43.281.678.774	29 Paket
Realisasi	42.896.225.301	21 Paket
Persentase (%)	**99,11**	**72,41**

Catatan: data keluaran (*output*) menggunakan data kontrak dan proporsi penyaluran per kontrak, data capaian *output* riil masih bergerak sampai 22 Juli 2026.

5) DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman

Kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp243.335.012.173,00 dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar Rp312.734.878.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 22,19 persen. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar

Rp242.586.155.423,00 atau 99,69 persen. Serapan anggaran tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan serapan tahun 2024 yang sebesar 76,98 persen.

Pada tahun 2025, Kegitatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman berfokus pada Kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan Kualitas dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.333.5012.173,00 dan target *output* sebanyak 2.623 unit. Sampai dengan akhir tahun 2025, dari anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp242.586.155.423,00 atau sebesar 99,69 persen dan capaian *output* sebanyak 1.774 unit atau sebesar 67,63 persen. Realisasi ini masih dimungkinkan terus bertambah seiring dengan batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, yaitu tanggal 22 Juli 2026.

Tabel 8. DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman

(dalam rupiah)

Jenis	2024	2025	% Naik/(turun)
Anggaran	312.734.878.000	243.335.012.173	(22,19)
Realisasi	240.733.176.587	242.586.155.423	0,77
Persentase (%)	**76,98**	**99,69**	

Tabel 9. Capaian *Output* DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman TA 2025

(dalam rupiah)

Kegiatan	Nominal	Keluaran
1. Pembangunan Baru, Peningkatan Kualitas dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya		
Anggaran/target Realisasi	243.335.012.173 242.586.155.423	2.623 Unit 1.774 Unit
Persentase (%)	**99,69**	**67,63**

Catatan: data keluaran (*output*) menggunakan data kontrak dan proporsi penyaluran per kontrak, data capaian *output* riil masih bergerak sampai 22 Juli 2026

6) DAK Fisik Bidang Pendidikan

Kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik Bidang Pendidkkan pada tahun 2025 Rp2.301.188.251.937,00 atau 98,52 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 95,56 persen dari pagu anggaran tahun 2024.

Tabel 10. DAK Fisik Bidang Pendidikan

(dalam rupiah)

Jenis	2024	2025	% Naik/(turun)
Anggaran	15.820.300.000.000	2.335.850.841.772	(85,24)
Realisasi	15.117.195.311.790	2.301.188.251.937	(84,78)
Persentase (%)	**95,56**	**98,52**	

Kegiatan Dak Fisik Bidang Pendidikan TA 2025 terdiri dari:

a. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidian Anak Usia Dini (PAUD);

b. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Dasar (SD);

c. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

d. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Luar Biasa (SLB);

e. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Menegah Atas (SMA);

f. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Menegah Kejuruan (SMK);

g. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan

h. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan.

Secara umum, tingkat realisasi anggaran ketujuh kegiatan tersbut sangat baik, yaitu rata-rata 97,24 persen. Sementara itu, capaian *output* untuk kegiatan DAK Bidang kesehatan bervariasi dan berada pada rentang 55,00 persen sampai 99,02 persen dari target *output* yang ditetapkan. Realisasi ini masih dimungkinkan terus bertambah seiring dengan batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, yaitu tanggal 22 Juli 2026. Rincian realisasi anggaran dan capaian *output* per kegiatan dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Capaian *Output* DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2025

(dalam rupiah)

Kegiatan	Nominal	Keluaran
1. Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)		
Anggaran/target	445.351.381.288	9.368 SP
Realisasi	442.352.986.828	9.230 SP
Persentase (%)	**99,33**	**98,53**
2. Sekolah Dasar (SD)		
Anggaran/target	150.617.648.017	2.203 SP
Realisasi	148.328.827.703	1.957 SP
Persentase (%)	**98,48**	**88,83**
3. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)		
Anggaran/target	5.899.772.964	52 SP
Realisasi	5.899.772.964	51 SP
Persentase (%)	**100,00**	**98,08**
4. Sekolah Luar Biasa (SLB)		
Anggaran/target	30.124.688.142	250 SP
Realisasi	27.952.771.345	248 SP
Persentase (%)	**92,79**	**99,20**
5. Sekolah Menegah Atas (SMA)		
Anggaran/target	64.775.065.689	633 SP
Realisasi	57.871.841.816	616 SP
Persentase (%)	**89,34**	**97,31**
6. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK)		
Anggaran/target	1.328.147.390.248	708 SP
Realisasi	1.308.574.973.228	699 SP
Persentase (%)	**98,53**	**98,73**
7. Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
Anggaran/target	99.941.952.538	1.458 SP
Realisasi	99.526.030.951	1.428 SP
Persentase (%)	**99,58**	**97,94**
8. Perpustakaan		
Anggaran/target	210.992.942.886	20 SP
Realisasi	210.681.047.102	11 SP
Persentase (%)	**99,85**	**55,00**

Catatan: data keluaran (*output*) menggunakan data kontrak dan proporsi penyaluran per kontrak, data capaian *output* riil masih bergerak sampai 22 Juli 2026.

7) DAK Fisik Bidang IKM

Kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik Bidang IKM pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp46.582.936.875,00 dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar Rp400.000.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 88,35 persen. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp44.118.022.270,00 atau 94,71 persen. Serapan anggaran tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan serapan tahun 2024 yang sebesar 88,82 persen.

Pada tahun 2025, Kegitatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik Bidang IKM berfokus pada Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM dan sarana produksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.582.936.875,00 dan target *output* sebanyak 3 Sentra IKM. Sampai dengan akhir tahun 2025, dari anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp44.118.022.270,00 atau sebesar 94,71 persen dan capaian *output* sebanyak 3 sentra IKM atau sebesar 100 persen. Realisasi ini masih dimungkinkan terus bertambah seiring dengan batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, yaitu tanggal 22 Juli 2026.

Table 12. DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)

(dalam rupiah)

Jenis	2024	2025	% Naik/(turun)
Anggaran	400.000.000.000	46.582.936.875	(88,35)
Realisasi	355.295.984.662	44.118.022.270	(87,58)
Persentase (%)	**88,82%**	**94,71%**	

Table 13. Capaian *Output* DAK Fisik Bidang IKM TA 2025

(dalam rupiah)

Kegiatan	Nominal	Keluaran
1. Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM dan sarana produksi		
Anggaran/target	Rp46.582.936.875	3 Sentra IKM
Realisasi	Rp44.118.022.270	3 Sentra IKM
Persentase (%)	**94,71**	**100,00**

Catatan: data keluaran (*output*) menggunakan data kontrak dan proporsi penyaluran per kontrak, data capaian *output* riil masih bergerak sampai 22 Juli 2026.

8) DAK Fisik Bidang Perdagangan

Kegiatan Dak Fisik Bidang Perdagngan TA 2025 terdiri dua kegiatan, yaitu Sarana Perdagangan Mutu dan Sarana Perdagangan Pasar dengan target masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket dan 4 (empat) paket. Kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik Bidang Perdaganganpada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp124.198.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp88.645.200.208,00 atau sebesar 71,37 persen. Dari sisi *output*, Sarana Perdagangan Umum telah mencapai taget *output*nya, yaitu 3 (tiga) paket, sementara Sarana Perdagangan Pasar telah tercapai 3 (tiga) paket atau 75

persen dari*output* yang direncanakan. Realisasi ini masih dimungkinkan terus bertambah seiring dengan batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, yaitu tanggal 22 Juli 2026.

Table 13. Capaian *Output* DAK Fisik Bidang Perdagangan TA 2025

(dalam rupiah)

Kegiatan	Anggaran	Target Keluaran	Realisasi	Realisasi Keluaran
Sarana Perdagangan	124.198.880.000	3 Paket	88.645.200.208	3 Paket
Sarana Perdagangan Pasar		4 Paket		3 Paket

d. Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer Khusus (DAK Non Fisik)

Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer Khusus (DAK Non Fisik) pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp146.677.929.010.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp145.070.252.013.207,00 atau 98,90 persen. Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer Khusus (DAK Non Fisik) terdiri atas beberapa Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Kesetaraan, Dana Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru, Dana Tunjangan Khusus Guru, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Dana Kepariwisataan, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

1) Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp53.491.720.356.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp53.238.231.876.695,00 atau 99,53 persen. Pada periode yang sama ditahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp53.088.982.268.168,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp149.249.608.527,00 atau 0,28 persen. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Bantuan Operasional Sekolah *output* riil berupa sekolah sebanyak 46.441 atau 99,97 persen dari target sebesar 46.454.

2) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp4.038.700.320.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp3.996.477.139.802,00 atau 98,95 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp3.909.353.207.041,00 atau mengalami kenaikan yang tidak signifikan sebesar Rp87.123.932.761,00 atau 2,23 persen. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan -

Pendidikan Anak Usia Dini *output* riil berupa Peserta Didik sebanyak 6.119.905 atau 99,74 persen dari target sebesar 6.135.659.

3) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Kesetaraan

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp1.741.189.650.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.717.126.231.937,00 atau 98,62 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.467.198.023.602,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp249.928.208.335,00 atau 17,03 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan alokasi dari tahun sebelumnya. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Kesetaraan *output* riil berupa Peserta Didik sebanyak 935.592 atau 99,55 persen dari target sebesar 939.835.

4) Dana Tunjangan Profesi Guru

Dana Tunjangan Profesi Guru pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp67.300.287.432.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp67.278.112.196.853,00 atau 99,97 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp51.850.462.245.921,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.427.649.950.932,00 atau 29,75 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan alokasi karena kenaikan jumlah tenaga profesi guru. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Tunjangan Profesi Guru *output* riil berupa Guru sebanyak 1.482.394 atau 100,40 persen dari target sebesar 1.476.549.

5) Dana Tambahan Penghasilan Guru

Dana Tambahan Penghasilan Guru pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp481.344.500.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp470.451.750.000,00 atau 97,74 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.495.768.803.108,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.025.317.053.108,00 atau 68,55 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan alokasi dari tahun sebelumnya.Dari sisi capaian *output* riil, Dana Tambahan Penghasilan Guru *output* riil berupa Guru sebanyak 190.674 atau 99,74 persen dari target sebesar 191.165.

6) Dana Tunjangan Khusus Guru

Dana Tunjangan Khusus Guru pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp2.282.670.590.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp2.266.213.994.760,00 atau 99,28 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp2.075.612.901.562,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp190.601.093.198,00 atau 9,18 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan alokasi Dana TKG dari tahun sebelumnya. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Tunjangan Khusus Guru *output* riil berupa Guru sebanyak 57.700 atau 101,24 persen dari target sebesar 56.995.

7) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp169.975.000.000,00. Sampai dengan

periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp169.975.000.000,00 atau 100 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sebesar Rp49.675.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp120.300.000.000,00 atau 242,17 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan alokasi yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya *output* riil berupa Museum dan Taman Budaya sebanyak 115 atau 100 persen dari target sebesar 115.

8) Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp12.878.672.152.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp12.681.551.642.955,00 atau 98,47 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp4.375.097.720.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp8.306.453.922.955,00 atau 189,86 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh alokasi Dana BOK yang naik dari tahun sebelumnya. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Bantuan Operasional Kesehatan *output* riil berupa Puskesmas sebanyak 10.161 atau 100 persen dari target sebesar 10.161.

9) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp3.239.300.000.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp3.238.900.005.500,00 atau 99,99 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp3.237.433.806.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.466.199.500,00 atau 0,05 persen. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana *output* riil berupa Balai Penyuluhan KB sebanyak 6.435 atau 103,27 persen dari target sebesar 6.231.

10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp163.700.000.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp161.304.750.500,00 atau 98,54 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebesar Rp247.175.338.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp85.870.587.500,00 atau minus 34,74 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan alokasi di Tahun 2025 dimana alokasi di Tahun 2024 sebesar Rp250.000.000.000,00. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil *output* riil berupa Peserta Pelatihan sebanyak 32.485 atau 100 persen dari target sebesar 32.485.

11) Dana Kepariwisataan

Tidak terdapat alokasi anggaran Dana Fasilitasi Penanaman Modal pada DIPA tahun 2025.

12) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp132.000.000.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp130.522.518.000,00 atau 98,88 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp129.806.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp716.518.000,00 atau 0,55 persen. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak *output* riil berupa daerah sebanyak 304 atau 100 persen dari target sebesar 304.

13) Dana Fasilitasi Penanaman Modal

Tidak terdapat alokasi anggaran Dana Fasilitasi Penanaman Modal pada DIPA tahun 2025.

14) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp516.379.010.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp510.916.636.000,00 atau 98,94 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp297.142.612.500,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp213.774.023.500,00 atau 71,94 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan alokasi anggaran dari tahun sebelumnya. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian *output* riil berupa Penyuluh Pertanian sebanyak 33.958 atau 89,85 persen dari target sebesar 37.794.

Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp91.990.000.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp89.299.250.000,00 atau 97,07 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 27 Sentra IKM atau 100 persen dari target sebesar 27 Sentra IKM. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebesar 98 Sentra IKM atau mengalami penurunan sebesar 71 Sentra IKM. Meskipun terjadi penurunan jumlah *output*, secara persentasi anggaran mengalami kenaikan 1,01 persen dari 98,99 persen menjadi 100 persen. Hal ini disebabkan target *output* pada Tahun 2025 memang turun menjadi 27 Sentra IKM, Dimana bisa dikatakan target tercapai dengan realisasi 27 Sentra IKM.

e. Kegiatan Pengelolaan Hibah Transportasi - Hibah *Mass Rapid Transit* (MRT) *Project*

Kegiatan Pengelolaan Hibah Transportasi - Hibah *Mass Rapid Transit* (MRT) *Project* pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp1.397.158.000.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp60.566.853.715,00 atau 4,34 persen. Pendanaan *Mass Rapid Transit* (MRT) *Project* berasal dari pemerintah pusat melalui hibah (*on granting*) dan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pinjaman (*on lending*). Dengan demikian, progres penyelesaian proyek MRT merupakan *output* dari kedua jenis pendanaan tersebut yang tidak dapat diidentifikasikan secara terpisah.

f. Kegiatan Pengelolaan Hibah Sumber Daya Alam - Hibah *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio CF ISFL)

Kegiatan Pengelolaan Hibah Sumber Daya Alam - Hibah *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio CF ISFL) pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran

sebesar Rp14.051.587.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp14.045.998.828,00 atau 99,96 persen. Proyek Bio CF ISFL berfokus pada penurunan emisi karbon melalui pengelolaan bentang alam berkelanjutan. Penurunan emisi karbon dinilai oleh pihak eksternal dan baru dilakukan pada akhir proyek.

g. Kegiatan Pengelolaan Hibah Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian - Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND)

Kegiatan Pengelolaan Hibah Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian - Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND) pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 197.830.836.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 176.460.390.967,00 atau 89,20 persen. *Output* riil dari Hibah UPLAND sangat bervariasi baik dari jenis maupun nilai satuannya. Salah satu *output* riilnya berupa jalan usaha tani yang pada tahun 2025 ditargetkan sepanjang 89 km. Adapun realisasi atas capaian *output* riil sepanjang 90,3 km.

h. Kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Otonomi Khusus

Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer Otonomi Khusus pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 17.006.143.580.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 17.006.143.580.000,00 atau 100 persen dari alokasi anggaran Indikator dari capaian kinerja pada kegiatan Pengelolaan Dana Transfer Otonomi Khusus adalah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Penyaluran Dana Transfer Otonomi Khusus yang tepat sasaran yang mempunyai target 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen sebagaimana realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

1) Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum

Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum, pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp4.309.582.640.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp4.309.582.640.000,00 atau 100 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 48 daerah atau 100 persen dari target sebesar 48 daerah. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* Dana Otonomi Khusus yang bersifat Umum adalah sebesar 48 daerah atau sama dengan tahun 2025. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum memiliki *output* riil berupa 48 daerah atau 100 persen dari target sebesar 48 daerah.

2) Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya

Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp5.386.978.300.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 5.386.978.300.000,00 atau 100 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 48 daerah atau 100 persen dari target sebesar 48 daerah Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 48 daerah atau sama dengan tahun 2025. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya memiliki *output* riil berupa 48 daerah atau 100 persen dari target sebesar 48 daerah.

3) Dana Otonomi Khusus Aceh

Dana Otonomi Khusus Acehpada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp4.309.582.640.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi

sebesar Rp4.309.582.640.000,00 atau 100 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 1 (satu) daerah atau 100 persen dari target sebesar 1 (satu) daerah Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Otonomi Khsusu Aceh sebesar 1 (satu) daerah atau sama dengan tahun 2025. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Otonomi Khusus Aceh memiliki *output* riil berupa 1 (satu) daerah atau 100 persen dari target sebesar 1 (satu) daerah.

4) Dana Tambahan Infrastruktur

Dana Tambahan Infrastruktur pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000.000,00 Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp3.000.000.000.000,00 atau 100 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 48 daerah atau 100 persen dari target sebesar 48 daerah. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* KRO Dana Tambahan Infrastruktur sebesar 48 daerah atau sama dengan Tahun 2025. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Tambahan Infrastruktur memilik *output* riil berupa 48 daerah atau 100 persen dari target sebesar 48 daerah.

i. Pengelolaan Transfer Insentif Fiskal

Kegiatan Pengelolaan Transfer Insentif Fiskal pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp6.000.000.000.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 4.274.535.998.500,00 atau 71,24 persen. Indikator dari capaian kinerja pada kegiatan Pengelolaan Transfer Insentif Fiskal adalah Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Transfer Fiskal yang disalurkan yang mempunyai target 368 daerah dan terealisasi sebesar 366 daerah atau 99,37 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Transfer Insentif Fiskal yang disalurkan sebesar 99,54 persen atau mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,17 persen.

1) Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan

Dana Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya, pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp4.000.000.000.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp3.974.535.998.500,00 atau 99,37 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 316 daerah atau 100 persen dari target sebesar 318 daerah. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* Dana Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya adalah sebesar 308 daerah atau mengalami peningkatan pada Tahun 2025. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya memiliki *output* riil berupa 316 daerah atau 99,37 persen dari target sebesar 316 daerah.

2) Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan yang disalurkan

Dana Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan, pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp300.000.000.000,00 atau 15,00 persen. Capaian kinerja/*output* ini sebesar 50 daerah atau 100 persen dari target sebesar 50 daerah. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* Dana Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan adalah sebesar 50 daerah atau sama dengan Tahun 2025. Dari sisi capaian *output* riil, Dana Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan memiliki *output* riil berupa 50 daerah atau 100 persen dari target sebesar 50 daerah.

j. Pengelolaan Transfer Dana Keistimewaan DIY

Kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Keistimewaan DIY pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 atau 100 persen. Indikator dari capaian kinerja pada kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Keistimewaan DIY adalah Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Keistimewaan DIY yang disalurkan yang mempunyai target 1 (satu) daerah dan terealisasi sebesar 1 (satu) daerah atau 100 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Keistimewaan DIY yang disalurkan adalah sebesar 1 (satu) daerah atau sama dengan Tahun 2025. Dari sisi capaian *output* riil, Transfer Dana Keistimewaan DIY memiliki *output* riil berupa 1 (satu) daerah atau 100 persen dari target sebesar 1 (satu) daerah.

k. Pengelolaan Transfer Dana Desa

Kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Desa pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp69.000.000.000.000,00. Sampai dengan periode akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp61.645.153.758.700,00 atau 89,34 persen. Indikator dari capaian kinerja pada kegiatan Pengelolaan Transfer Dana Desa adalah Indikator Kinerja Kegiatan Transfer Dana Desa yang disalurkan yang mempunyai target 75.259 desa dan terealisasi sebesar 75.176 desa atau 99,89 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Transfer Dana Desa yang Disalurkan adalah sebesar 99,95 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,06 persen pada tahun 2025. Dari sisi capaian *output* riil, Transfer Dana Desa memiliki *output* riil berupa desa sebanyak 75.176 desa atau 99,89 persen dari target sebesar 75.259 desa.

1.4 Subfungsi Pelayanan Umum Lainnya

1) Program Pengelolaan Hibah Negara

a. Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah (*Banking Commission*)

Pada TA 2025 Program Pengelolaan Hibah Negara mempunyai anggaran sebesar Rp1.082.231.000,00. Sampai dengan triwulan IV TA 2025 telah terealisasi sebesar Rp434.795.282,00 atau 40,18 persen. Indikator dari capaian kinerja pada Program Pengelolaan Hibah Negara diwujudkan dalam bentuk Indikator Kinerja Program Pembayaran Tagihan *Banking Commission* yang mempunyai target sebesar 100,00% dan telah terealisasi sebesar 100,00 persen. Pada periode yang sama di TA sebelumnya, realisasi Indikator Kinerja Program Pembayaran Tagihan *Banking Commission* sebesar 100,00 persen atau tetap/tidak mengalami perubahan

b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Program Pengelolaan Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing pada Satker LDKPI 999.02 merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk pengesahan belanja hibah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sumber dana PNBP LDKPI. Pengesahan belanja dilakukan setelah seluruh kegiatan selesai dan laporan pertanggungjawaban disusun oleh Penanggung Jawab Kegiatan.

Realisasi belanja hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing pada Tahun 2025 *Unaudited* adalah sebesar Rp493.542.299.475,00 atau 85,81 persen dari DIPA TA 2025 sebesar Rp575.167.548.000,00. Realisasi belanja hibah tersebut naik

sebesar Rp73.014.461.900,00 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp215.373.094.909,00. Realisasi belanja hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing pada Tahun 2025 *Unaudited* bersumber dari PNBP hasil pengelolaan Dana Kelolaan LDKPI.

1) The Indonesian AID Scholarship (TIAS) Tahap II

   Kegiatan The Indonesian AID Scholarship (TIAS) Tahap II merupakan hibah dalam bentuk uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan berupa pemberian beasiswa—meliputi biaya pendidikan, akomodasi, serta *living allowance*—bagi mahasiswa/i asing agar dapat menempuh pendidikan pada jenjang D3, S1, dan S2 di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Sasaran penerima beasiswa mencakup mahasiswa/i dari negara-negara kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika.

   Tahun 2025, realisasi kegiatan yang bersumber dari PNBP LDKPI telah mencapai sekitar Rp 42.580.741.751,00 atau 60,90 persen dari pagu sebesar Rp 69.926.131.000,00. Capaian *output* mencapai 100 persen.

2) Dukungan untuk Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria Tahap III

   Kegiatan Dukungan untuk Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria Tahap III merupakan hibah dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada *Global Fund* sebagai pemenuhan komitmen Pemerintah Indonesia sejak tahun 2023. Tahun 2025 menjadi tahun terakhir pemenuhan komitmen tersebut sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

   Pencairan dana telah dilaksanakan melalui PNBP LDKPI sebesar Rp32,8 miliar. Namun, kegiatan ini belum dapat disahkan sebagai Belanja BUN Hibah karena masih terdapat kekurangan alokasi dalam DIPA dan saat ini sedang dalam proses reviu itjen untuk revisi *top-up* anggaran.

   Tahun 2025, realisasi kegiatan ini sebesar Rp 32.800.494.550,00 atau 100,96 persen dari pagu sebesar Rp 32.488.000.000 dan capaian ouput telah tercapai 100 persen.

3) Pelatihan Komoditas Berkelanjutan untuk Negara Sehaluan/*Like Minded Countries* (LMCs) 2025 Pemerintah RI dalam bentuk Pelatihan Peningkatan Kapasitas

   Kegiatan Pelatihan Komoditas Berkelanjutan untuk Negara Sehaluan/*Like Minded Countries* (LMCs) 2025 merupakan hibah dalam bentuk uang yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pelatihan bagi 18 negara anggota LMCs. Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan pada bulan Juli 2025.

   Pencairan dana telah dilakukan melalui PNBP LDKPI sebesar Rp5,3 miliar. Saat ini Penanggung Jawab Kegiatan sedang menyusun Laporan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya akan diajukan dalam proses pengesahan hibah.

   Tahun 2025, realisasi kegiatan ini sebesar Rp5.763.786.710,00 atau 88,66 persen dari pagu sebesar Rp6.500.770.000,00 dan capaian *ouput* telah tercapai 100 persen.

4) Pemberian Bnatuan Hibah Pemerintah Republik Indonesia Kepada Afganistan untuk Bantuan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa Pasca Sarjana Afganistan

Kegiatan Bantuan Hibah Pemerintah Republik Indonesia kepada Afghanistan untuk Dukungan Pendidikan bagi Mahasiswa Pascasarjana Afghanistan merupakan hibah dalam bentuk uang yang digunakan untuk membiayai pemberian beasiswa bagi mahasiswa/i Afghanistan yang menempuh pendidikan pascasarjana di UIII dan UMY.

Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp1.923.527.815,00 atau 43,16 persen dari pagu sebesar Rp4.456.561.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

5) Pemberian Hibah Kemanusiaan Pemerintah RI dalam Rangka Penanggulangan Bencana Kekeringan di Namibia

Kegiatan Pemberian Hibah Kemanusiaan Pemerintah Republik Indonesia dalam Rangka Penanggulangan Bencana Kekeringan di Namibia merupakan hibah dalam bentuk uang tunai yang dialokasikan untuk mendukung penanganan dampak kekeringan di Namibia. Hibah ini akan disalurkan kepada Pemerintah Namibia setelah seluruh dokumen administrasi dan perjanjian hibah diselesaikan.

Hingga saat ini, pencairan dana dari rekening LDKPI ke rekening penerima belum dapat dilakukan karena *Grant Agreement* masih dalam proses *countersign* oleh pihak Pemerintah Namibia.

Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp5.038.584.500,00 atau 97,60 persen dari pagu sebesar Rp5.162.400.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

6) Pemberian Hibah Bantuan Kemanusiaan kepada Pemerintah Saint Vincent and the Grenadines untuk Penanganan Dampak Bencana *Hurricane Beryl*

Kegiatan Pemberian Hibah Bantuan Kemanusiaan kepada Pemerintah Saint Vincent and the Grenadines untuk Penanganan Dampak Bencana *Hurricane Beryl* merupakan hibah dalam bentuk uang tunai yang diberikan untuk mendukung upaya penanganan darurat dan pemulihan pascabencana *Hurricane Beryl*.

Dana hibah sebesar Rp4,1 miliar telah dicairkan dari PNBP LDKPI dan disalurkan kepada Pemerintah Saint Vincent and the Grenadines. Hibah ini juga dalam proses pengesahan dalam Belanja BUN Hibah.

Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp4.121.744.550,00 atau 95,81 persen dari pagu sebesar Rp4.302.000.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

7) Pemberian Hibah Bantuan Kemanusiaan Untuk Penanganan Bencana Alam Topan Yagi di Vietnam

Kegiatan Pemberian Hibah Bantuan Kemanusiaan untuk Penanganan Bencana Alam Topan Yagi di Vietnam merupakan hibah dalam bentuk uang tunai yang dialokasikan untuk mendukung upaya penanganan darurat dan pemulihan pascabencana Topan Yagi di Vietnam.

Dana hibah sebesar Rp16,5 miliar telah dicairkan dari PNBP LDKPI dan disalurkan kepada Pemerintah Vietnam. Hibah ini juga telah disahkan sebagai Belanja Hibah dalam BA BUN.

Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp16.560.083.750,00 atau 96,23 persen dari pagu sebesar Rp17.208.000.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

8) Pemberian Hibah Kemanusiaan Bantuan Pangan Dalam Rangka Darurat Penanggulangan Kerawanan Pangan di Afganistan melalui *World Food Programme* (WFP)

   Kegiatan Pemberian Hibah Kemanusiaan Bantuan Pangan dalam Rangka Darurat Penanggulangan Kerawanan Pangan di Afghanistan melalui *World Food Programme* (WFP) merupakan hibah dalam bentuk uang tunai yang dialokasikan untuk mendukung penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat Afghanistan yang terdampak situasi darurat dan kerawanan pangan.

   Penyaluran hibah dilakukan melalui *World Food Programme* (WFP) sebagai lembaga pelaksana. Dana hibah sebesar Rp56,45 miliar telah dicairkan dari PNBP LDKPI. Hibah ini juga telah disahkan sebagai BA BUN Belanja Hibah.

   Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp56.454.378.150,00 atau 94,55 persen dari pagu sebesar Rp59.708.576.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

9) Dukungan kepada ICRC Untuk Program Kesehatan, Air, dan Lingkungan bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Konflik Bersenjata dan kekerasan di Wilayah Penduduk (Palestina)

   Kegiatan Dukungan kepada ICRC untuk Program Kesehatan, Air, dan Lingkungan bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Konflik Bersenjata dan Kekerasan di Wilayah Pendudukan (Palestina) merupakan hibah dalam bentuk uang tunai yang dialokasikan untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan, akses air bersih, serta perbaikan kondisi lingkungan bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik bersenjata.

   Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp32.670.490.050,00 atau 94,93 persen dari pagu sebesar Rp34.416.000.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

10) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Palestina Melalui Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik

    Kegiatan ini merupakan hibah yang digunakan untuk pemberian beasiswa kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Pada tahun 2025, beasiswa yang diberikan diperuntukkan untuk 2 (dua) mahasiswa yang berasal dari Negara Palestina untuk menempuh pendidikan Kedokteran UNAIR dan UNPAD.

    Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp486.012.266,00 atau 27,57 persen dari pagu sebesar Rp1.762.865.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

11) Pemberian Hibah Berupa Pemberian Beasiswa

    Kegiatan pemberian beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Uganda untuk dapat menumpuh pendidikan *Degree by research* di IPB.

    Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp178.387.990,00 atau 24,08 persen dari pagu sebesar Rp740.940.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

12) Pemberian Hibah Berupa Pengiriman *Dispatch Expert*

    Hibah ini diberikan dalam bentuk hibah untuk membiayai kegiatan pengiriman expert pada kegiatan *Feasibility Study* Pendirian dan Pengembangan Inkubator Bisnis untuk Industri Turunan Kelapa di Saint Lucia dan Guyana

Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp851.264.511,00 atau 92,19 persen dari pagu sebesar Rp923.375.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

13) Pemberian Hibah Berupa Pelatihan

Kegiatan hibah berupa pelatihan berikan kepada beberapa pelatihan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Personel Meteorologi Penerbangan Guinea;
b. Peningkatan Kapasitas Personel Pelayanan Penerbangan Guinea;
c. Program Pengembangan Alpukat di Palestina;
d. Peningkatan Kapasitas Negara-Negara Anggota *The Organisation of African, Caribbean and Pacific States* (OACPS) di Sektor Ekonomi Kreatif;
e. Penanggulangan Wabah Ulat Grayak;
b. Dukungan Penyelenggaraan Metrologi Legal di Timor Leste;
a. Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Statistik di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2025;
b. Pelatihan Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat untuk negara Fiji;
c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Maritim kepada Maritim *Organization of West and Central Africa* (MOWCA);
d. Pelatihan dan Pemetaan Kebutuhan Vaksin Ternak Bagi Otoritas Kesehatan Hewan di Kawasan Afrika Tahun 2025; dan
e. Peningkatan Kapasitas Pegawai Administrasi Kepabeanan Di Bidang Pengawasan Perbatasan Kawasan Asia Pasifik.

Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp31.813.931.535,00 atau 56,42 persen dari pagu sebesar Rp56.388.575.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

14) Pemberian Hibah Berupa Pembangunan/Renovasi

Kegiatan hibah berupa hibah pembangunan, sebagai berikut:

a. *Revitalisasi Agricultural Rural Farmers Training Center* (ARFTC) di Jenoi, Gambia (Carry Over 2024);
b. Pemberian Hibah Pemerintah RI kepada Komunitas Islam di Kroasia Untuk Pembangunan Islamic Center di Kota Osijek, Kroasia;
c. Revitalisasi *Farmer's Agriculture and Rural Training Center* (FARTC) di Tanzania;
d. Penyiapan *Detailed Engineering Design* (DED) untuk Renovasi Gedung Parlemen dan Manua Centre School di Vanuatu;

Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp24.895.312.209,00 atau 79,20 persen dari pagu sebesar Rp31.432.949.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

15) Pemberian Hibah Berupa Bantuan Kemanusiaaan

Kegiatan hibah ini berupa pemberian bantuan pangan kepada Palestina melalui *World Food Programme* Palestina

Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp200.400.668.250,00 atau 99,06 persen dari pagu sebesar Rp202.296.000.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

16) Pemberian Hibah Berupa Bantuan Multimodalitas

Kegiatan hibah ini berupa pemberian hibah bentuk multimodalitas, sebagai berikut:

a. Dukungan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi *Pacific Islands Forum*;

b. Pendampingan Teknologi Inseminasi Buatan Dalam Rangka Pengembangan dan Promosi Inseminasi Buatan di Negara-Negara Afrika (*Artificial Insemination Development and Advancement*);

c. Optimalisasi Program Transfer Embrio Pada Ternak untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Mutu Genetik di Negara-Negara Afrika;

d. *Timor-Leste Financial Management Program*: Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah dan Swasta Tahap II;

e. *Aquaculture Development in Timor Leste: Fighting Malnutrition and Improving Food Security*;

f. Industrialisasi Produk Bambu di Fiji; dan

g. *Timor Leste Customs Authority Menuju ASEAN Full Membership* Melalui ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* 2022.

Tahun 2025, realisasi kegiatan sebesar Rp37.002.890.888,00 atau 78,49 persen dari pagu sebesar Rp47.141.911.000,00 dan capaian *output* telah tercapai 100 persen.

2) Program Pengelolaan Subsidi

Pada tahun 2025 Program Pengelolaan Subsidi mempunyai anggaran sebesar Rp315.455.154.663.000,00 dan terealisasi sebesar Rp281.759.776.982.061,00 atau 89,32 persen. Program ini mempunyai 11 (sebelas) kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pajak mempunyai anggaran sebesar Rp19.884.655.363.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.254.945.285.565,00 atau 96,83 persen. *Output* dari kegiatan ini adalah jumlah wajib pajak yang mendapatkan subsidi atas PPh SBN Valas, PPh panas Bumi. PPN rumah tapak dan rumah susun, PPN Kendaraan bermotor listrik, PPnBM Kendaraan Bermotor listrik, PPh Pasal 21 Stimulus Ekonomi untuk Industri tertentu dan PPnBM Kendaraan Bermotor *Hybrid*. Pada tahun 2025 telah disalurkan subsidi pajak sebanyak 1.061.970 Wajib Pajak dari target 1.110.769 Wajib Pajak.

b. Kegiatan Subsidi Kredit Program mempunyai anggaran sebesar Rp299.735.884.000,00 dan terealisasi sebesar Rp60.356.681.884,00 atau 20,14 persen. *Output* kegiatan ini adalah jumlah debitur pada subsidi resi gudang, subsidi bunga pinjaman penyelenggaraan pangan pemerintah (CPP). Pada tahun 2025 telah disalurkan kepada 673 debitur dari target 499 debitur pada subsidi resi gudang, dan 1 (satu) debitur dari target 2 (dua) debitur pada subsidi bunga pinjaman penyelenggara pangan pemerintah.

c. Kegiatan Subsidi IJP KUR dan Bunga KUR mempunyai anggaran sebesar Rp38.558.577.276.000,00 dan terealisasi sebesar Rp31.615.767.424.810,00 atau 82,14 persen. *Output* kegiatan ini adalah jumlah debitur dan penjamin pada subsidi IJP KUR, subsidi bunga KUR, subsidi bunga kredit usaha alat dan mesin pertanian (alsintan), Subsidi

Bunga/Margin Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Subsidi Bunga/Margin Kredit Program Perumahan Sisi Penyediaan Rumah serta Sisi Permintaan Rumah.

Pada Tahun 2025 telah disalurkan kepada 4.058.291 debitur dari target 4.178.954 pada subsidi bunga KUR, 129 debitur dari target 400 pada subsidi bunga kredit alsintan, 2 (dua) debitur dari target 347 debitur pada Subsidi Bunga/ Margin Kredit Industri Padat Karya (KIPK) dan 256 (Debitur/Unit/ Penyalur/Penjamin) dari target 7.811 pada Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan Sisi Penyediaan Rumah serta terealisasi 649 (Debitur/Unit/ Penyalur/Penjamin) dari target 22.224 pada Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan Sisi Penyediaan Rumah.

d. Kegiatan Subsidi Pupuk mempunyai anggaran sebesar Rp44.156.510.917.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.711.043.845.417,00 atau 72,14 persen. *Output* kegiatan ini adalah jumlah ton pupuk yang disalurkan. Pada 2025 telah disalurkan 8.118.061,17 ton atau 96,37 persen dari target 8.423.743 ton pada subsidi pupuk.

e. Kegiatan Subsidi Energi mempunyai anggaran sebesar Rp197.752.255.753.000,00 dan terealisasi sebesar Rp185.168.643.723.241,00 atau 93,64 persen. *Output* kegiatan ini adalah jumlah *terawatt hour listrik*, kilo liter bahan bakar tertentu dan metrik ton LPG yang disalurkan. Pada 2025 telah disalurkan 75,40 *terawatt hour* atau 99,80 persen dari target 75,55 *terawatt hour* pada subsidi listrik, 18.403.273 kilo liter atau 97,45 persen dari target 18.885.000 kilo liter pada subsidi minyak solar, 507.799 kilo liter atau 96,72 persen dari target 525.000 kilo liter pada subsidi minyak tanah, serta 8.515.283 metrik ton atau 104,23 persen dari target 8.170.000 metrik ton pada subsidi LPG.

f. Kegiatan Subsidi PSO Perkeretaapian mempunyai anggaran sebesar Rp4.797.057.860.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.735.021.249.849,00 atau 98,71 persen. *Output* kegiatan ini adalah jumlah penumpang yang dilayani. Pada tahun 2025 telah diangkut 11.550.711 penumpang atau 91,19 persen dari target 11.481.270 penumpang pada PSO kereta api kelas ekonomi antarkota, 385.813.482 penumpang atau 93,07 persen dari target 405.106.396 penumpang pada PSO kereta api kelas ekonomi perkotaan, serta 27.631.982 penumpang atau 91,54 persen dari target 28.417.701 penumpang pada PSO kereta api ringan (LRT) Jabodebek.

g. Kegiatan Subsidi PSO Angkutan Laut mempunyai anggaran sebesar Rp3.068.456.424.000,00 dan realisasi tahun 2025 sebesar Rp 3.068.456.422.559,00 atau 100 persen. *Output* kegiatan ini adalah jumlah penumpang yang dilayani. Pada tahun 2025 telah diangkut 4.472.918 penumpang atau 104,87 persen dari target 4.265.009 penumpang pada PSO angkutan laut kelas ekonomi.

h. Kegiatan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers mempunyai anggaran sebesar Rp184.628.830.000,00 dan terealisasi sebesar Rp180.673.538.000,00 atau 97,86 persen. *Output* kegiatan ini adalah jumlah berita publik yang disiarkan. Pada 2025 telah disiarkan 170.840 berita atau 99,89 persen dari target 171.035 berita pada PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers.

i. Kegiatan Subsidi Bunga untuk Air Bersih mempunyai anggaran sebesar Rp11.038.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.464.854.425,00 atau 85,74 persen. *Output* kegiatan ini adalah jumlah PDAM yang mendapat subsidi bunga penyediaan air bersih. Pada

tahun 2025 telah terdapat 6 (enam) PDAM atau 100 persen dari target 6 (enam) PDAM pada subsidi bunga untuk air bersih.

j. Kegiatan Subsidi Perumahan mempunyai anggaran sebesar Rp5.489.523.439.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.889.999.221.073,00 atau 89,08 persen. *Output* kegiatan ini adalah jumlah unit rumah yang mendapat subsidi bantuan uang muka dan subsidi bunga kredit. Pada tahun 2025 telah terdapat 278.865 unit rumah atau 92,96 persen dari target 300.000 unit rumah pada subsidi bantuan uang muka perumahan, dan telah terdapat 729.035 unit rumah atau 87,96 persen dari target 729.069 unit rumah yang mendapatkan subsidi bunga kredit perumahan.

k. Kegiatan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp65.621.670.000,00 dan terealisasi sebesar Rp65.621.670.000,00 atau 100 persen. *Output* kegiatan ini adalah jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat subsidi bunga pinjaman. Pada tahun 2025 telah terdapat 25 Pemerintah Daerah atau 100 persen dari target 25 Pemerintah Daerah pada subsidi bunga pinjaman daerah.

2. Fungsi Ekonomi

2.1 Subfungsi Bahan Bakar Energi

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

a. Kegiatan Pengelolaan Dana Operasional SKK Migas

Kegiatan Pengelolaan Dana Operasional SKK Migas pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp1.896.525.226.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.879.745.875.153,00 atau 99,12 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Kegiatan Pengelolaan Dana Operasional SKK Migas adalah sebesar Rp1.773.065.305.608,00 atau 97,18 persen dari pagu Rp1.824.551.524.000,00. Kegiatan Pengelolaan Dana Operasional SKK Migas terdiri dari KRO Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya dan RO berupa Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pengembangan Industri Hulu Migas dan RO Layanan Industri Hulu Migas.

1) Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pengembangan Industri Hulu Migas

Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pengembangan Industri Hulu Migas pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp1.646.419.431.000,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.639.025.766.002,00 atau 99,55 persen.

Capaian kinerja/*output* ini adalah 1 (satu) Layanan atau 100 persen dari target 1 (satu) layanan. Pada periode tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pengembangan Industri Hulu Migas tercapai 100 persen.

1) Layanan Industri Hulu Migas

Layanan Industri Hulu Migas pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp250.105.795.000,00. Sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp240.720.109.151,00 atau 96,25 persen.

Capaian kinerja/*output* ini adalah 4 (empat) Layanan atau 100 persen dari target 4 (empat) layanan. Pada periode tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* RO Layanan Industri Hulu Migas tercapai 100 persen.

b. Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM

Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp164.157.007.586,00. Sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp120.032.812.514.323,00 atau 73,12 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM adalah sebesar Rp209.288.136.932.586,00 atau 100 persen dari pagu Rp209.288.136.941.000,00. Realisasi/pembayaran kompensasi tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024 dikarenakan pembayaran pada tahun 2024 meliputi pembayaran atas kekurangan dana komspensasi tahun 2023 *audited* dan periode triwulan I dan II serta sebagian triwulan III tahun 2024, sementara pembayaran pada tahun 2025 hanya meliputi pembayaran kekuarangan dana kompensasi tahun 2024 *audited* dan periode triwulan I tahun 2025 pada tahun 2025. Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM terdiri dari KRO Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya dan RO berupa Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan RO Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik.

1) Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM

Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp71.745.814.022.000,00. Sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp54.711.908.613.828,00 atau 76,26 persen.

Capaian kinerja/*output* ini adalah sebanyak 42.031.944 Kilo Liter atau 110,52 persen dari target sebanyak 38.030.443 Kilo Liter. Pada periode tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM tercapai 262,63 persen.

2) Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik

Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp92.411.193.564.000,00. Sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp65.320.903.900.495,00 atau 70,69 persen.

Capaian kinerja/*output* ini adalah sebanyak 222,16 GWh atau 113,66 persen dari target 195 GWh. Pada periode tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik tercapai 265,86 persen.

2.2 Subfungsi Telekomunikasi

Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal

Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp385.223.997.000,00. Sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp356.106.693.942,00 atau 92,44 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya,

realisasi Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal adalah sebesar Rp366.844.830.481,00 atau 99,20 persen dari pagu Rp369.802.535.000,00. Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal terdiri dari KRO Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya dan RO Layanan Pos Universal.

Layanan Pos Universal pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp385.223.997.000,00. Sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp356.106.693.942,00 atau 92,44 persen. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal adalah sebesar Rp366.844.830.481,00 atau 99,20 persen dari pagu Rp369.802.535.000,00.

Capaian kinerja/*output* ini adalah sebanyak 24.60 KPC LPU atau 100 persen dari target 2.460 KPC LPU. Pada periode tahun sebelumnya, realisasi kinerja/*output* Layanan Pos Universal tercapai 100 persen.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II LKBUN

Tahun 2025 *Audited*

Mei 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Dec-25	%	31-Dec-24	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	236.275.500.847.000	186.456.746.764.097	78,91%	274.898.283.177.566	(88.441.536.413.469)
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	230.677.583.443.000	181.024.739.835.672	78,48%	240.510.919.461.810	(59.486.179.626.138)
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	123.017.538.808.000	104.735.406.249.496	85,14%	113.330.835.745.742	(8.595.429.496.246)
4211	Pendapatan Minyak bumi	89.031.590.000.000	55.757.863.739.730	62,63%	77.961.123.337.930	(22.203.259.598.200)
42111	Pendapatan Minyak Bumi	89.031.590.000.000	55.757.863.739.730	62,63%	77.961.123.337.930	(22.203.259.598.200)
421111	Pendapatan Minyak Bumi	89.031.590.000.000	55.757.863.739.730	62,63%	77.961.123.337.930	(22.203.259.598.200)
4212	Pendapatan Gas Bumi	31.961.420.000.000	46.692.746.308.894	146,09%	32.661.085.038.989	14.031.661.269.905
42121	Pendapatan Gas Bumi	31.961.420.000.000	46.692.746.308.894	146,09%	32.661.085.038.989	14.031.661.269.905
421211	Pendapatan Gas Bumi	31.961.420.000.000	46.692.746.308.894	146,09%	32.661.085.038.989	14.031.661.269.905
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-		-	-
42131	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-		-	-
421311	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-		-	-
421312	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-		-	-
421313	Pendapatan dari Keuntungan Bersih Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK)	-	-		-	-
4215	Pendapatan Perikanan	-	-		-	-
42151	Pendapatan Perikanan	-	-		-	-
421511	Pendapatan Perikanan	-	-		-	-
421520	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	-	-		-	-
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	-	-		-	-
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	-	-		-	-
421530	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	-	-		-	-
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	-	-		-	-
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.024.528.808.000	2.284.796.200.872	112,86%	2.708.627.368.823	(423.831.167.951)
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.024.528.808.000	2.284.796.200.872	112,86%	2.708.627.368.823	(423.831.167.951)
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	-	-		-	-
421612	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi	-	-		-	-
421613	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Panas Bumi	-	-		-	-
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.024.528.808.000	2.284.796.200.872	112,86%	2.708.627.368.823	(423.831.167.951)
			-		-	
		-			-	-
422	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	90.000.000.000.000	27.683.274.120.780	30,76%	86.384.593.538.563	(58.701.319.417.783)
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	90.000.000.000.000	27.683.274.120.780	30,76%	86.384.593.538.563	(58.701.319.417.783)
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	-	-		-	-
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	-	-		-	-
422112	Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN Perbankan	-	-		-	-
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	-	-		-	-
422121	Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	-	-		-	-
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	89.171.549.000.000	11.734.606.479.590	13,16%	85.572.985.213.463	(73.838.378.733.873)
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	48.871.727.554.000	10.882.481.879.391	22,27%	49.590.787.691.195	(38.708.305.811.804)
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	40.299.821.446.000	852.124.600.199	2,11%	35.982.197.522.268	(35.130.072.922.069)

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Dec-25	%	31-Dec-24	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	828.451.000.000	15.948.667.641.190	1925,12%	811.608.325.100	15.137.059.316.090
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	-	-		-	-
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	828.451.000.000	948.667.641.190	114,51%	811.608.325.100	137.059.316.090
422211	Pendapatan dari Surplus Bank	-	15.000.000.000.000		-	15.000.000.000.000
4222	Pendapatan dari Surplus Lembaga	-	-	-	-	-
422212	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	-	-		-	-
422213	Pendapatan dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan	-	-		-	-
422219	Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya	-	-		-	-
425	Pendapatan PNBP Lainnya	17.660.044.635.000	48.606.059.465.396	275,23%	40.795.490.177.505	7.810.569.287.891
4251	Pendapatan Penjualan dan Sewa	5.425.607.726.000	5.918.842.418.906	109,09%	5.688.906.897.694	229.935.521.212
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	156.617.502.000	112.542.800.803	71,86%	61.304.693.855	51.238.106.948
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-		165.393.906	(165.393.906)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	60.489.480.000	17.658.313.090		360.438.000	17.297.875.090
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	-	-		-	-
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-		-	-
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	-	-		-	-
425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-		-	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	96.128.022.000	94.884.487.713	98,71%	60.778.861.949	34.105.625.764
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	-	-		-	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-		-	-
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-		-	-
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-		-	-
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-		-	-
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	-		-	-
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-		-	-
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	-	-		-	-
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)	-	-		-	-
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-		-	-
42513	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-		-	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung	-	-		-	-
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	740.730.224.000	718.269.250.994	96,97%	787.013.828.237	(68.744.577.243)
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	84.270.000.000	16.040.094.197	19,03%	50.022.188.329	(33.982.094.132)
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	445.730.000.000	359.335.633.043	80,62%	440.565.775.779	(81.230.142.736)
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	1.100.000.000	1.052.754.358	95,70%	1.636.254.300	(583.499.942)
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain	-	2.282.868.305		2.285.229.382	(2.361.077)
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	2.500.000.000	19.987.918.257	799,52%	17.531.291.768	2.456.626.489
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	207.130.224.000	319.569.982.834	154,28%	274.973.088.679	44.596.894.155
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	-		-	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	-		-	-

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Dec-25	%	31-Dec-24	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	4.528.260.000.000	5.088.030.367.109	112,36%	4.840.588.375.602	247.441.991.507
425161	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	-	-		-	-
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	4.466.040.000.000	5.065.195.741.158	113,42%	4.775.446.292.310	289.749.448.848
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	62.220.000.000	22.834.625.951	36,70%	65.142.083.292	(42.307.457.341)
42517	Pendapatan Iuran Badan Usaha	-	-		-	-
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM	-	-		-	-
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	-	-		-	-
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM	-	-	-	161.185.250	(161.185.250)
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	-	-	-	161.185.250	(161.185.250)
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	-	-		-	-
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	-	-		-	-
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	-	-		-	-
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	-	-		-	-
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	-	-	-	161.185.250	(161.185.250)
425236	Pendapatan Hasil Rampasan	-	-		-	-
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-		-	-
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	-	-		-	-
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	-	-		-	-
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	-	-		-	-
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-		-	-
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-		-	-
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-		-	-
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	-	-		-	-
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	-	-		-	-
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	-	-		-	-
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	-	-		-	-
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	-		-	-
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-		-	-
						-
42525	Pendapatan Perizinan	-	-		-	-
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	-	-		-	-
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	-	-		-	-
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	-	-		-	-
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan	-	-		-	-
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-		-	-
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	-	-		-	-
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	-	-		-	-
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	-	-		-	-
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	-	-		-	-
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	-	-		-	-
425264	Pendapatan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	-	-		-	-

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Dec-25	%	31-Dec-24	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	-	-		-	-
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	-	-		-	-
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	-	-		-	-
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	-	-		-	-
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	-	-		-	-
						-
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	-	-		-	-
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	-	-		-	-
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	-	-		-	-
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	-	-		-	-
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	-	-		-	-
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	-	-		-	-
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital	-	-		-	-
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya	-	-		-	-
			-			
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	-	-		-	-
425281	Pendapatan Akreditasi	-	-		-	-
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-		-	-
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	-	-		-	-
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	-	-		-	-
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	-	-		-	-
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	-	-		-	-
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan	-	-		-	-
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	-	-		-	-
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	-	-		-	-
4253	PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN	-	-		-	-
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan	-	-		-	-
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-		-	-
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	-	-		-	-
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	-	-		-	-
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	-	-		-	-
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	-	-		-	-
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	-	-		-	-
			-			
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	-	-		-	-
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	-	-		-	-
						-
42533	Pendapatan Jasa Karantina	-	-		-	-
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	-	-		-	-
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-		-	-

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Dec-25	%	31-Dec-24	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
42534	Pendapatan Jasa Agraria	-	-		-	-
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	-	-		-	-
425342	Pendapatan Peneriman Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora	-	-		-	-
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan	-	-		-	-
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	-	-		-	-
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	-	-		-	-
4254	PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI		-		-	-
42541	Pendapatan Pendidikan	-	-		-	-
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	-	-		-	-
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	-	-		-	-
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	-	-		-	-
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	-		-	-
			-			-
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-		-	-
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	-		-	-
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	-	-		-	-
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek	-	-		-	-
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	-	-		-	-
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	-	-		-	-
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	-	-		-	-
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	-	-		-	-
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	-	-		-	-
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	-	-		-	-
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	-	-		-	-
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	-	-		-	-
425451	Pendapatan Museum	-	-		-	-
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	-	-		-	-
4255	PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-		-	-
42551	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-		-	-
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-		-	-
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	-	-		-	-
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	-	-		-	-
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	-	-		-	-
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	-	-		-	-
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	-	-		-	-
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	-	-		-	-
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	-	-		-	-
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	-	-		-	-
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	-	-		-	-
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	-	-		-	-
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	-	-		-	-
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	-	-		-	-

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Dec-25	%	31-Dec-24	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos	-	-		-	-
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	-	-		-	-
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	-	-		-	-
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya	-	-		-	-
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	-	-		-	-
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	-	-		-	-
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI	-	-		-	-
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	-	-		-	-
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI	-	-		-	-
4256	PENDAPATAN JASA LAINNYA	-	-		-	-
42561	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-		-	-
425611	Pendapatan Wisata Alam	-	-		-	-
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-		-	-
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	-	-		-	-
					-	-
42562	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	-	-		-	-
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	-	-		-	-
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	-	-		-	-
						-
42569	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-		-	-
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	-	-		-	-
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	-	-		-	-
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol	-	-		-	-
425694	Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)	-	-		-	-
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-		-	-
						-
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	10.582.077.752.000	38.589.330.092.399	364,67%	28.994.741.912.984	9.594.588.179.415
42571	Pendapatan Bunga	716.340.314.000	2.859.174.636.200	399,14%	2.956.282.826.762	(97.108.190.562)
425711	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi	-	-		-	-
425712	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi	-	-		-	-
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	716.340.314.000	1.488.170.424.996	207,75%	1.686.026.616.379	(197.856.191.383)
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah	-	-		-	-
425715	Pendapatan Komitmen Pemberian Pinjaman	-	-		-	-
425716	Pendapatan Bunga Kredit Program	-	1.197.761		1.518.618	(320.857)
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	-	-		-	-
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	-	1.371.003.013.443	-	1.270.254.691.765	100.748.321.678
						-
42572	Pendapatan Gain on Bond Redemption	-	5.298.500.000	-	30.359.000.000	(25.060.500.000)
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	-	5.298.500.000	-	30.359.000.000	(25.060.500.000)
425722	Pendapatan dari Transaksi Security Lending	-	-		-	-
425723	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing	-	-		-	-
425724	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang	-	-		-	-
425725	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Valuta Asing Jangka Panjang	-	-		-	-
						-
42573	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	3.500.000.000.000	10.526.584.739.900	300,76%	3.895.699.644.400	6.630.885.095.500
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	3.050.000.000.000	9.821.745.260.100	322,02%	3.801.423.044.800	6.020.322.215.300

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Dec-25	%	31-Dec-24	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
425732	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	-	-		-	-
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	450.000.000.000	704.839.479.800	156,63%	94.276.599.600	610.562.880.200
425734	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing	-	-		-	-
						-
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	200.900.725.000	378.830.665.671	188,57%	354.464.253.582	24.366.412.089
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	129.268.725.000	140.621.187.060	108,78%	136.263.072.585	4.358.114.475
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN	-	-		-	-
425743	Pendapatan Kupon SBN	-	-		-	-
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo	71.632.000.000	232.912.239.020	325,15%	198.001.105.712	34.911.133.308
425745	Pendapatan Fee atas Transaksi Security Lending SUN	-	-		-	-
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu	-	-		-	-
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit	-	-	-	8.502.554.683	(8.502.554.683)
425748	Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah	-	5.297.239.591		11.697.520.602	(6.400.281.011)
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs	17.000.000.000	3.127.537.248.718	18397,28%	401.211.617.324	2.726.325.631.394
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	17.000.000.000	3.127.536.932.351	18397,28%	401.211.617.324	2.726.325.315.027
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	-	-		-	-
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	-	316.367		-	316.367
						-
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	11.858.204.000	99.094.275.232	835,66%	99.499.068.910	(404.793.678)
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	-		-	-
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	77.824.000	88.435.631	113,64%	88.435.656	(25)
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	5.100.923.000	67.358.320.880	1320,51%	56.132.728.050	11.225.592.830
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	6.679.457.000	31.645.482.045	473,77%	43.275.041.517	(11.629.559.472)
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	2.036.676	-	2.863.687	(827.011)
						-
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	6.135.928.509.000	21.592.784.280.845	351,91%	21.257.176.297.940	335.607.982.905
425771	Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA	-	-		-	-
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	91.168.000.000	4.323.981.471.010	4742,87%	209.182.465.754	4.114.799.005.256
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	302.031.563.000	521.666.955.527	172,72%	615.681.077.970	(94.014.122.443)
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	5.412.283.713.000	16.120.228.282.829	297,85%	20.000.988.358.484	(3.880.760.075.655)
425775	Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi	-	-		-	-
425776	Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah	330.445.233.000	375.087.089.191	113,51%	417.427.003.986	
425777	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional dan/atau Bank Penyalur Gaji	-	16.102.605.829		13.897.391.746	
425778	Pendapatan Tambahan Bunga dari Bank Indonesia atas Realisasi Program Pemerintah	-	235.717.876.459		-	
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	-	-		-	-
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	-	-		-	-
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	-		-	-
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	-	-		-	-
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	-	-		-	-

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Dec-25	%	31-Dec-24	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	-	-		-	-
						-
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	50.000.000	25.745.833		49.204.066	(23.458.233)
425791	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	-		-	-
425792	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	-	-		-	-
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	50.000.000	25.745.833		49.204.066	(23.458.233)
						-
4258	PENDAPATAN DENDA	10.056.903.000	51.742.215.329	514,49%	33.449.201.660	18.293.013.669
42581	Pendapatan Denda I	1.621.770.000	32.382.935.572	1996,76%	16.006.912.426	16.376.023.146
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.621.770.000	43.679.432	2,69%	7.207.158.787	(7.163.479.355)
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	-	-		-	-
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan	-	-		-	-
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	-	212.856.558		92.925	212.763.633
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia	-	4.234.032		3.780.480	453.552
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	-	89.482.758		6.243.793	83.238.965
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	-	2.291.991.360		437.823.739	1.854.167.621
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	-	29.439.796.024		8.351.812.702	21.087.983.322
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi	-	300.895.408		-	300.895.408
42582	Pendapatan Denda II	2.828.169.000	3.429.075.246	-	3.238.748.754	
425821	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I	-	-		-	-
425822	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB	-	-		-	-
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	2.828.169.000	3.429.075.246	121,25%	3.219.198.754	209.876.492
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program	-	-		-	-
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	-	-		-	-
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)	-	-		19.550.000	(19.550.000)
425827	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Pemberian Pinjaman	-	-		-	-
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	-	-		-	-
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-		-	-
42583	Pendapatan Denda III	5.606.964.000	15.930.204.511	284,11%	14.203.540.480	1.726.664.031
425839	Pendapatan Denda Lainnya	5.606.964.000	15.930.204.511	284,11%	14.203.540.480	1.726.664.031
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.642.302.254.000	4.046.144.738.762	246,37%	6.078.230.979.917	(2.032.086.241.155)
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	1.600.413.966.000	3.500.212.619.560	218,71%	5.607.565.878.814	(2.107.353.259.254)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-		-	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	413.966.000	3.293.937.959	795,70%	3.942.551.256	(648.613.297)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-		-	-

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Dec-25	%	31-Dec-24	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu		-		-	-
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.040.361.818.443	-	39.990.676.669	2.000.371.141.774
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	404.410.273	(404.410.273)
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-		-	-
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	18.663.831.748	-	75.406.193.790	(56.742.362.042)
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	1.600.000.000.000	1.437.893.031.410	89,87%	5.487.822.046.826	(4.049.929.015.416)
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	-	381.786.770.478	-	353.212.948.117	28.573.822.361
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	-	381.786.770.478	-	353.212.948.117	28.573.822.361
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	-	-		-	-
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	-		-	-
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan	-	-		-	-
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri	-	-		-	-
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	-	-		-	-
42598	Pendapatan Lain-Lain I	-	88.742.282.661		46.183.370.393	42.558.912.268
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	-	314.899.938		310.714.110	4.185.828
425982	Penerimaan Akumulasi Iuran Pensiun	-	-		-	-
425983	Pendapatan Dari Sisa Dana Kampanye	-	-		-	-
425984	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	-	88.427.382.723		45.872.656.283	42.554.726.440
			-			
42599	Pendapatan Lain-Lain	41.888.288.000	75.403.066.063	180,01%	71.268.782.593	143.414.331.471
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-		-	-
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	-	-		-	-
425993	Pendapatan Jasa Perbendaharaan	-	-		-	-
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi		-		-	-
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-		-	-
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN	-	-		-	-
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan		44.179.029.500		-	44.179.029.500
425998	Pendapatan dari Retur SP2D	-	17.751.682.406	-	5.843.228.976	11.908.453.430
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	41.888.288.000	13.472.354.157	32,16%	65.425.553.617	(51.953.199.460)
43	Pendapatan Hibah	5.597.917.404.000	5.432.006.928.425	97,04%	34.387.363.715.756	(28.955.356.787.331)
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	-	5.432.006.928.425		34.387.363.715.756	(28.955.356.787.331)
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	3.599.752.378.109	-	32.247.196.309.907	(28.647.443.931.798)
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	-		-	-
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan	-	-		-	-
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha	-	-		-	-
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya	-	-		-	-
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	-	-		-	-
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	-	-		-	-
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	-	-		-	-
		-	-			
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	-	3.599.752.378.109		32.247.196.309.907	(28.647.443.931.798)

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Dec-25	%	31-Dec-24	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan	-	10.486.562.065		60.021.516.260	(49.534.954.195)
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	-	178.196.840.321		233.933.403.044	(55.736.562.723)
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	-	3.401.668.608.627		31.862.055.896.086	(28.460.387.287.459)
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya	-	9.400.367.096		91.185.494.517	(81.785.127.421)
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	1.832.254.550.316		2.140.167.405.849	(307.912.855.533)
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	439.802.086.270		540.471.344.113	(100.669.257.843)
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan	-	-		-	-
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral	-	115.310.468.619		132.463.972.855	(17.153.504.236)
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral	-	324.491.617.651		408.007.371.258	(83.515.753.607)
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Lainnya	-	-		-	-
		-				
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk barang	-	-	-	-	-
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Barang – Perorangan	-	-		-	-
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Barang– Bilateral	-	-		-	-
		-				
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang	-	1.383.148.714.046	-	1.599.696.061.736	(216.547.347.690)
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Perorangan	-	-		1.255.020.666	(1.255.020.666)
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Bilateral	-	381.427.448.305		254.332.863.571	127.094.584.734
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Multilateral	-	872.391.089.407		1.278.685.180.203	(406.294.090.796)
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung - Lainnya	-	129.330.176.334		65.422.997.296	63.907.179.038
43125	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing		9.303.750.000			
431251	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing		9.303.750.000			

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN		12.683.274.120.780
DIVIDEN		12.683.274.120.780
BUMN		10.882.481.878.260
PERBANKAN		10.882.481.878.260
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.882.481.878.260
BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		948.667.641.190
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	558.000.000.000
2	PT Sarana Multigriya Finansial	107.966.770.000
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	186.176.000.000
4	PT Geo Dipa Energi (Persero)	25.923.080.580
5	PT Karabha Digjaya	7.500.000.000
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	63.101.790.610
Badan Usaha di Bawah Kementerian BUMN		852.124.601.330
1	PT Danantara Asset Management (Persero) – dividen interim	804.403.080.959
2	Perum Jasa Tirta II	18.958.000.000
3	Perum Peruri	16.740.811.007
4	Perum Jasa Tirta I	7.355.727.062
5	PT Danantara Asset Management (Persero) dulu PT BKI	4.658.346.933
6	PT Surveyor Indonesia	4.968.312
7	PT Sucofindo	922.118
8	PT Pegadaian	468.080
9	PT Dahana (Persero)	432.000
10	PT Pertamina	262.039
11	PTPN IV	186.071
12	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	185.594
13	PT Pos Indonesia	181.365
14	PT Inalum	168.160
15	PT Petrokimia Gresik	161.511
16	PT Jasa Raharja (Persero)	143.821
17	PT Pupuk Indonesia	129.604
18	PT Jamkrindo	88.429
19	PT Pupuk Kujang	82.262
20	PT Angkasa Pura I	74.569
21	PT Angkasa Pura II	50.684
22	PT Pelabuhan Indonesia	46.108
23	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	30.732

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
24	PT PLN	24.044
25	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	9.097
26	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	8.894
27	PT Pupuk Iskandar Muda	7.946
28	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.662
29	PT Bank Mandiri Tbk	467
30	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	375
31	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	237
32	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	209
33	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	204
34	PT Pupuk Kalimantan Timur	183
35	PT Jasa Marga Tbk	175
36	PT Aneka Tambang Tbk	164
37	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	106
38	PT Bank Tabungan Negara Tbk	54
39	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	26
40	PT Semen Baturaja	3
41	PT Timah Tbk	64
SETORAN SISA SURPLUS BANK INDONESIA		15.000.000.000.000
JUMLAH TOTAL		**27.683.274.120.780**

REALISASI PNBP LAINNYA PER BA BUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi
999.01 (Pengelola Utang)	10.531.887.001.706
Pendapatan Anggaran Lain-lain	9.821.745.260.100
Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	3.761.806
Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	704.839.479.800
Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	5.298.500.000
999.02 (Pengelola Hibah)	-
999.03 (Pengelola Investasi Pemerintah)	1.511.624.200.503
Pendapatan Bunga Lainnya	1.371.003.013.443
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	140.621.187.060
999.04 (Pengelola Pemberian Pinjaman)	1.559.362.354.452
Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	67.358.320.880
Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	1.488.170.424.996
Pendapatan Bunga Kredit Program	1.197.761
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	3.429.075.246
Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	88.435.631
Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	314.899.938
999.05 (Pengelola Belanja Transfer Daerah)	1.490.900.495.180
Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	44.179.029.500
Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	1.437.893.031.410
Pendapatan Denda Lainnya	8.828.434.270
999.07 (Pengelola Belanja Subsidi)	2.040.368.806.530
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	6.978.507
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	9.580
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	2.040.361.818.443
999.08 (Pengelola Belanja Lain-Lain)	43.661.265.422
Pendapatan Anggaran Lain-lain	174.903.585
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	17.658.313.090
Pendapatan Denda Lainnya	7.101.770.241
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	36.700.925
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	25.745.833
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	18.663.831.748
999.99 (Pengelola Transaksi Khusus)	31.428.235.346.339
Pendapatan Anggaran Lain-lain	13.273.693.502
Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain	2.282.868.305
Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	1.052.754.358
Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah	5.297.239.591
Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	16.120.228.282.829

REALISASI PNBP LAINNYA PER BA BUN

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi
Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	4.323.981.471.010
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	319.569.982.834
Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	16.040.094.197
Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B dan Pemegang IUPK	359.335.633.043
Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah	375.087.089.191
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional dan/atau Bank Penyalur Gaji	16.102.605.829
Pendapatan Bunga Reverse Repo	232.912.239.020
Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	521.666.955.527
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	94.884.487.713
Pendapatan dari Penutupan Rekening	2.036.676
Pendapatan dari Retur SP2D	17.751.682.406
Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	3.127.536.932.351
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	88.427.382.723
Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	2.291.991.360
Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia	4.234.032
Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	89.482.758
Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	212.856.558
Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi	300.895.408
Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	29.439.796.024
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	31.645.472.465
Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	19.987.918.257
Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	22.834.625.951
Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	5.065.195.741.158
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	316.367
Pendapatan Tambahan Bunga dari Bank Indonesia atas Realisasi Program Pemerintah	235.717.876.459
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.293.937.959
Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	381.786.770.478
Jumlah	**48.606.039.470.132**

REALISASI BELANJA SUBSIDI

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

Jenis Subsidi	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan %
Subsidi Minyak Solar	17.584.401.914.632	17.115.109.641.446	2,74%
Subsidi Minyak Tanah	3.642.567.330.483	4.469.228.489.490	(18,50%)
Subsidi Elpiji	82.905.250.426.495	80.213.612.965.648	3,36%
Subsidi Listrik	81.036.424.051.631	75.817.285.111.936	6,88%
Subsidi PPh DTP	11.245.045.026.941	8.311.642.153.441	35,29%
Subsidi BM-DTP	0	0	0,00%
Subsidi Bunga KKP dan Energi/CPP	53.085.360.348	252.159.126.358	100,00%
Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya	13.586.807	0	100,00%
Subsidi Bunga Kredit Program Perumahan	2.273.082.089	0	100,00%
Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR	0	16.135.205.138	(100,00%)
Subsidi Bunga/Marjin KUR	31.611.078.463.388	44.377.351.009.651	(28,77%)
Subsidi Kredit Resi Gudang	7.271.321.536	3.044.846.912	138,81%
Subsidi Pupuk	32.711.043.845.417	47.387.402.436.351	(30,97%)
Subsidi Bunga Alsintan	2.185.357.764	41.353.431	5184,59%
Subsidi PT KAI	4.735.021.249.849	4.595.718.339.234	3,03%
Subsidi/PSO PT. PELNI	3.068.456.422.559	3.203.970.376.875	(4,23%)
Subsidi PSO lainnya	180.673.538.000	176.322.920.000	2,47%
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	9.464.854.425	6.702.617.829	41,21%
Subsidi Bunga KPR	3.746.927.221.073	4.609.436.081.696	(18,71%)
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	1.143.072.000.000	852.348.000.000	34,11%
Subsidi PPN DTP - Rusun dan KBLBB	5.577.463.036.156	666.506.458.627	736,82%
Subsidi PPnBM DTP - KBLBB	2.432.437.222.468	138.246.168.593	1659,50%
Total Reguler	**281.694.155.312.061**	**292.212.263.302.656**	**96,40%**
Subsidi Bunga Program PEN (DJPK) - Penanganan Pandemi Covid-19	65.621.670.000	114.365.781.222	(42,62%)
Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00%
Subsidi IJP Program PEN(DJPPR) - Penanganan Pandemi Covid-19		365.965.012.969	(100,00%)
Total PEN	**65.621.670.000**	**480.330.794.191**	**(86,34%)**
Jumlah	**281.759.776.982.061**	**292.692.594.096.846**	**(3,74%)**

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	TRANSFER KE DAERAH	**876.943.792.927.000**	**849.040.693.847.170**	**96,82%**	**27.903.099.079.830**
A	**Dana Bagi Hasil**	**178.377.765.616.000**	**168.890.519.118.880**	**94,68%**	**9.487.246.497.120**
A.1.1.1	**Dana Bagi Hasil Pajak**	**81.459.715.714.000**	**72.019.863.677.780**	**88,41%**	**9.439.852.036.220**
6111	**DBH PPh Perorangan**	**45.893.851.229.000**	**40.735.535.692.200**	**88,76%**	5.158.315.536.800
611111	Belanja DBH PPh psl 21	43.402.373.655.000	38.513.828.769.900	88,74%	4.888.544.885.100
611112	Belanja DBH PPh psl 25/29 OP	2.491.477.574.000	2.221.706.922.300	89,17%	269.770.651.700
6112	**DBH PBB**	**29.002.090.481.000**	**24.731.306.757.200**	**85,27%**	**4.270.783.723.800**
611211	Belanja DBH PBB untuk Propinsi	4.611.419.809.000	3.877.026.174.800	84,07%	734.393.634.200
611212	Belanja DBH PBB untuk Kabupaten/Kota	24.390.670.672.000	20.854.280.582.400	85,50%	3.536.390.089.600
6131	**DBH Cukai**	**6.563.774.004.000**	**6.553.021.228.380**	**99,84%**	**10.752.775.620**
613111	Belanja DBH Cukai Hasil Tembakau	6.563.774.004.000	6.553.021.228.380	99,84%	10.752.775.620
A.1,1.2	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**	**96.918.049.902.000**	**96.870.655.441.100**	**99,95%**	**47.394.460.900**
6121	**DBH SDA Minyak Bumi**	**9.547.214.159.000**	**9.547.214.159.000**	**100,00%**	**-**
612111	Belanja DBH Minyak Bumi 15%	9.204.461.301.000	9.204.461.301.000	100,00%	-
612112	Belanja DBH Minyak Bumi 0,5%	-	-	0,00%	-
612113	Tambahan Belanja DBH Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	342.752.858.000	342.752.858.000	100,00%	-
6122	**DBH SDA Gas Bumi**	**7.754.928.593.000**	**7.754.928.593.000**	100,00%	-
612211	Belanja DBH Gas Bumi 30%	6.517.755.413.000	6.517.755.413.000	100,00%	-
612212	Belanja DBH Gas Bumi 0.5%	-	-	-	-
612213	Tambahan Belanja DBH Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.237.173.180.000	1.237.173.180.000	100,00%	-
6123	**DBH SDA Pertambangan Umum**	**74.899.300.984.000**	**74.899.300.984.000**	**100,00%**	**-**
612311	Belanja DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	635.697.712.000	635.697.712.000	100,00%	-
612312	Belanja DBH Pertambangan Umum - Royalti	74.263.603.272.000	74.263.603.272.000	100,00%	-

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
6124	**DBH SDA Pertambangan Panas Bumi**	**1.660.558.734.000**	**1.660.558.734.000**	**100,00%**	**-**
612411	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah	1.583.185.476.000	1.583.185.476.000	100,00%	-
612412	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi- Iuran Tetap	14.922.859.000	14.922.859.000	100,00%	-
612413	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi- Iuran Produksi (Royalti)	62.450.399.000	62.450.399.000	100,00%	-
6125	**DBH SDA Kehutanan**	**1.148.424.824.000**	**1.120.991.254.100**	**97,61%**	**27.433.569.900**
612511	Belanja DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH	25.283.620.000	24.204.985.320	95,73%	1.078.634.680
612512	Belanja DBH Kehutanan - PSDH	447.653.813.000	422.325.818.820	94,34%	25.327.994.180
612513	Belanja DBH Kehutanan - Dana Reboisasi	675.487.391.000	674.460.449.960	99,85%	1.026.941.040
6126	**DBH Perikanan**	**714.663.707.000**	**714.663.707.000**	**100,00%**	**-**
612611	Belanja DBH Perikanan	714.663.707.000	714.663.707.000	100,00%	-
6127	**DBH Lain-Lain**	**1.192.958.901.000**	**1.172.998.010.000**	**98,33%**	19.960.891.000
612711	Belanja DBH Perkebunan Sawit	1.192.958.901.000	1.172.998.010.000	98,33%	19.960.891.000
B	**Dana Alokasi Umum**	**438.625.121.056.000**	**433.292.088.063.189**	**98,78%**	**5.333.032.992.811**
621111	Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	360.515.964.881.000	360.515.964.881.000	100,00%	-
621121	Belanja Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	15.355.145.022.000	10.620.002.627.812	69,16%	4.735.142.394.188
621122	Transfer Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	1.699.600.000.000	1.659.888.602.000	97,66%	39.711.398.000
621123	Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	33.977.498.065.000	33.578.181.449.999	98,82%	399.316.615.001
621124	Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	19.410.056.022.000	19.251.193.436.378	99,18%	158.862.585.622
621125	Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	-	-	#DIV/0!	-
621126	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	7.666.857.066.000	7.666.857.066.000		-
C	**Dana Alokasi Khusus**	**166.934.762.675.000**	**162.932.253.327.901**	**97,60%**	**4.002.509.347.099**
A.2.1	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	18.647.793.242.000	17.610.554.270.313	**94,44%**	**1.037.238.971.687**
631111	Belanja DAK Fisik Reguler	-	-	-	-
631212	Belanja DAK Fisik Penugasan	18.647.793.242.000	17.610.554.270.313	94,44%	1.037.238.971.687
631311	Belanja DAK Afirmasi	-	-		-

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A.2.2	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**146.677.929.010.000**	**145.070.625.814.078**	**98,90%**	**1.607.303.195.922**
654111	Belanja Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	67.300.287.432.000	67.278.112.196.853	99,97%	22.175.235.147
654112	Belanja Dana Tunjangan Khusus Guru	2.282.670.590.000	2.266.213.994.760	99,28%	16.456.595.240
654211	Belanja Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	481.344.500.000	470.451.750.000	97,74%	10.892.750.000
654311	Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.491.720.356.000	53.456.827.078.015	99,93%	34.893.277.985
654711	Belanja Bantuan Operasional Kesehatan	12.878.672.152.000	11.429.909.548.348	88,75%	1.448.762.603.652
654712	Belanja Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.239.300.000.000	3.238.900.005.500	99,99%	399.994.500
654812	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	163.700.000.000	161.304.750.500	98,54%	2.395.249.500
654821	Belanja Dana Pelayanan Kepariwisataan	-	-	0,00%	-
654721	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	-	-	0,00%	-
655211	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132.000.000.000	130.522.518.000	98,88%	1.477.482.000
654921	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00%	-
655311	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	0,00%	-
655411	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	516.379.010.000	510.916.636.000	98,94%	5.462.374.000
654811	Belanja PK2UMK	-	-	-	-
654911	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.038.700.320.000	4.002.634.203.721	99,11%	36.066.116.279
654912	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.741.189.650.000	1.715.933.882.381	98,55%	25.255.767.619
655511	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	91.990.000.000	89.299.250.000	97,07%	2.690.750.000
655611	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	150.000.000.000	149.625.000.000		
A.2.2	**Hibah Kepada Daerah**	**1.609.040.423.000**	**251.073.243.510**	**15,60%**	**1.357.967.179.490**
671111	Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	1.594.988.836.000	237.027.244.682	14,86%	1.357.961.591.318
671121	Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	14.051.587.000	14.045.998.828	99,96%	5.588.172
671131	Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	-	-	0,00%	-
D	**DANA OTONOMI KHUSUS**	**17.006.143.580.000**	**17.006.143.580.000**	**100,00%**	**-**
641111	Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	4.309.582.640.000	4.309.582.640.000	100,00%	-

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
641211	Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua	781.495.894.000	781.495.894.000	100,00%	-
641212	Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua	530.558.897.000	530.558.897.000	100,00%	-
641213	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua	978.200.661.000	978.200.661.000	100,00%	-
641221	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan	527.310.024.000	527.310.024.000	100,00%	-
641222	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan	456.634.597.000	456.634.597.000	100,00%	-
641223	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan	644.006.648.000	644.006.648.000	100,00%	-
641231	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah	842.280.353.000	842.280.353.000	100,00%	-
641232	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah	567.492.639.000	567.492.639.000	100,00%	-
641233	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah	1.076.058.138.000	1.076.058.138.000	100,00%	-
641241	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Pegunungan	1.083.886.779.000	1.083.886.779.000	100,00%	-
641242	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan	588.385.327.000	588.385.327.000	100,00%	-
641243	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan	1.362.514.769.000	1.362.514.769.000	100,00%	-
641311	Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua Barat	497.515.870.000	497.515.870.000	100,00%	-
641312	Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	436.774.856.000	436.774.856.000	100,00%	-
641313	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat	627.774.300.000	627.774.300.000	100,00%	-
641321	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya	577.093.720.000	577.093.720.000	100,00%	-
641322	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Daya	420.153.684.000	420.153.684.000	100,00%	-
641323	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya	698.423.784.000	698.423.784.000	100,00%	-
E	**DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**	**1.000.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	**100,00%**	**-**
642111	Belanja Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%	-
F	**DANA DESA**	**69.000.000.000.000**	**61.645.153.758.700**	**89,34%**	**7.354.846.241.300**
662111	Belanja Dana Desa	69.000.000.000.000	61.645.153.758.700	89,34%	7.354.846.241.300
G	**INSENTIF FISKAL**	**6.000.000.000.000**	**4.274.535.998.500**	**71,24%**	**1.725.464.001.500**
643111	Belanja Dana Insentif Daerah (DID)	6.000.000.000.000	4.274.535.998.500	71,24%	1.725.464.001.500

REALISASI TRANSFER KE DAERAH PER JENIS TRANSFER PER PEMDA

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Kode KPPN	KPPN	Daerah	Kode Pemda	Dana Transfer Umum		Dana Transfer Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
						Dana Bagi Hasil	DAU	DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	001	BANDA ACEH	Provinsi Aceh	0600	327.802.278.000	2.254.312.872.949	109.854.191.253	930.049.093.100	-	-	-	4.309.582.640.000	-	7.931.601.075.302
2	ACEH	003	MEULABOH	Kab. Aceh Barat	0606	68.387.665.000	1.015.998.313.424	42.340.005.011	130.751.800.324	-	206.061.903.082	-	-	-	1.463.539.686.841
3	ACEH	001	BANDA ACEH	Kab. Aceh Besar	0601	327.802.278.000	2.254.312.872.949	53.027.484.129	193.215.386.212	-	386.250.524.040	-	-	-	3.214.608.545.330
4	ACEH	074	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Selatan	0605	68.387.665.000	1.015.998.313.424	26.768.814.804	163.395.177.571	-	165.213.857.054	-	-	-	1.439.763.827.853
5	ACEH	074	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Singkil	0610	11.081.007.000	425.419.156.539	13.597.148.103	112.890.367.447	-	91.895.014.000	-	-	-	654.882.693.089
6	ACEH	122	TAKENGON	Kab. Aceh Tengah	0607	68.387.665.000	1.015.998.313.424	23.501.897.194	149.913.347.613	-	199.213.568.356	7.158.908.000	-	-	1.464.173.699.587
7	ACEH	105	KUTACANE	Kab. Aceh Tenggara	0608	68.387.665.000	1.015.998.313.424	24.616.377.000	149.468.474.900	-	267.679.738.500	-	-	-	1.526.150.568.824
8	ACEH	002	L A N G S A	Kab. Aceh Timur	0604	71.832.180.000	872.444.823.243	41.591.888.163	269.000.625.780	-	340.806.452.406	-	-	-	1.595.675.969.592
9	ACEH	089	LHOKSEUMAWE	Kab. Aceh Utara	0603	327.802.278.000	2.254.312.872.949	33.815.949.478	381.667.078.597	-	528.434.838.802	-	-	-	3.526.033.017.826
10	ACEH	089	LHOKSEUMAWE	Kab. Bireuen	0611	11.081.007.000	425.419.156.539	26.648.966.747	245.188.834.827	-	418.615.242.518	-	-	-	1.126.953.207.631
11	ACEH	001	BANDA ACEH	Kab. Pidie	0602	327.802.278.000	2.254.312.872.949	21.614.646.930	228.667.897.028	-	399.620.803.158	-	-	-	3.232.018.498.065
12	ACEH	003	MEULABOH	Kab. Simeulue	0609	11.081.007.000	425.419.156.539	24.759.965.035	84.417.868.121	-	88.154.032.110	-	-	-	633.832.028.805
13	ACEH	001	BANDA ACEH	Kota Banda Aceh	0651	12.769.798.000	434.319.316.601	69.455.815.449	123.420.058.205	-	75.522.500.778	15.527.812.000	-	-	731.015.301.033
14	ACEH	001	BANDA ACEH	Kota Sabang	0652	12.769.798.000	434.319.316.601	14.074.986.403	35.770.954.116	-	14.349.540.488	13.677.689.000	-	-	524.962.284.608
15	ACEH	002	L A N G S A	Kota Langsa	0653	12.769.798.000	434.319.316.601	26.621.775.717	81.135.128.163	-	56.368.446.840	-	-	-	611.214.465.321
16	ACEH	089	LHOKSEUMAWE	Kota Lhokseumawe	0654	12.769.798.000	434.319.316.601	6.821.282.450	94.640.801.028	-	52.451.077.418	7.385.226.000	-	-	608.387.501.497
17	ACEH	105	KUTACANE	Kab. Gayo Lues	0613	20.817.714.000	397.496.815.692	8.316.409.097	76.721.516.299	-	104.792.202.360	-	-	-	608.144.657.448
18	ACEH	074	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Barat Daya	0612	11.081.007.000	425.419.156.539	30.188.046.634	94.452.191.550	-	89.348.729.746	6.911.270.000	-	-	657.400.401.469
19	ACEH	003	MEULABOH	Kab. Aceh Jaya	0614	20.882.273.760	420.631.295.383	38.324.388.491	86.448.255.014	-	118.003.100.600	-	-	-	684.289.313.248
20	ACEH	003	MEULABOH	Kab. Nagan Raya	0615	83.884.259.000	529.425.723.482	17.435.496.887	122.952.859.220	-	136.209.907.600	-	-	-	889.908.246.189
21	ACEH	002	L A N G S A	Kab. Aceh Tamiang	0616	104.867.740.000	559.447.040.826	4.520.895.762	154.990.892.730	-	161.882.032.600	-	-	-	985.708.601.918
22	ACEH	122	TAKENGON	Kab. Bener Meriah	0617	14.176.932.000	454.892.238.250	33.175.047.106	122.438.389.025	-	163.259.791.960	6.995.436.000	-	-	794.937.834.341
23	ACEH	001	BANDA ACEH	Kab. Pidie Jaya	0618	12.769.798.000	434.319.316.601	17.007.702.761	93.415.098.935	-	159.206.462.000	-	-	-	716.718.378.297
24	ACEH	074	TAPAKTUAN	Kota Subulussalam	0656	14.602.014.000	329.472.005.658	27.201.987.123	68.905.714.592	-	61.264.250.640	-	-	-	501.445.972.013
25	SUMATERA UTARA	004	M E D A N I	Provinsi Sumatera Utara	0700	645.893.807.000	3.266.089.700.575	125.818.146.885	1.865.749.486.098	-	-	5.358.460.000	-	-	5.908.909.600.558
26	SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kab. Asahan	0710	74.579.457.000	697.548.833.000	7.234.700.529	247.237.280.423	-	163.800.142.894	14.519.419.000	-	-	1.204.919.832.846
27	SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG	Kab. Dairi	0707	39.282.945.000	656.469.903.419	7.184.610.360	183.665.146.894	-	97.205.475.004	-	-	-	983.808.080.677
28	SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI	Kab. Deli Serdang	0701	645.893.807.000	3.266.089.700.575	26.530.306.350	617.504.924.605	-	296.326.072.154	19.684.209.000	-	-	4.872.029.019.684
29	SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG	Kab. Karo	0702	23.247.526.200	755.044.016.227	18.713.218.871	182.303.773.041	-	187.787.277.514	6.668.790.000	-	-	1.173.764.601.853
30	SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu	0706	39.282.945.000	656.469.903.419	8.103.161.420	186.179.553.968	-	58.742.713.244	-	-	-	948.778.277.051
31	SUMATERA UTARA	123	M E D A N II	Kab. Langkat	0703	147.988.827.000	1.388.381.776.548	1.967.414.120	395.678.982.481	-	218.146.295.324	-	-	-	2.152.163.295.473
32	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Mandailing Natal	0713	74.579.457.000	697.548.833.000	21.502.609.928	336.283.364.183	-	220.654.954.166	7.116.040.000	-	-	1.357.685.258.277
33	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias	0711	74.579.457.000	697.548.833.000	25.809.639.272	117.390.345.176	-	108.605.608.636	22.506.532.000	-	-	1.046.440.415.084
34	SUMATERA UTARA	005	PEMATANG SIANTAR	Kab. Simalungun	0705	73.798.519.800	1.506.376.373.184	52.783.147.720	369.773.885.479	-	264.200.487.148	-	-	-	2.266.932.413.331
35	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Tapanuli Selatan	0709	74.579.457.000	697.548.833.000	13.876.747.873	177.595.256.815	-	137.250.251.516	7.304.056.000	-	-	1.108.154.602.204
36	SUMATERA UTARA	106	SIBOLGA	Kab. Tapanuli Tengah	0704	147.988.827.000	1.388.381.776.548	9.300.996.765	179.131.740.847	-	123.230.738.640	-	-	-	1.848.034.079.800
37	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	Kab. Tapanuli Utara	0708	74.579.457.000	697.548.833.000	4.772.399.978	219.910.162.211	-	164.250.884.434	14.881.571.000	-	-	1.175.943.307.623
38	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	Kab. Toba Samosir	0717	22.782.214.800	577.706.637.827	44.135.981.135	144.911.886.430	-	153.554.709.106	7.134.069.000	-	-	950.225.498.298
39	SUMATERA UTARA	123	M E D A N II	Kota Binjai	0753	17.303.364.700	332.858.378.033	30.518.017.168	132.401.275.535	-	-	-	-	-	513.081.035.436
40	SUMATERA UTARA	004	M E D A N I	Kota Medan	0751	17.303.364.700	332.858.378.033	5.341.349.650	547.156.164.211	-	-	-	-	-	902.659.256.594
41	SUMATERA UTARA	005	PEMATANG SIANTAR	Kota Pematang Siantar	0754	17.303.364.700	332.858.378.033	32.989.683.261	112.259.990.489	-	-	-	-	-	495.411.416.483
42	SUMATERA UTARA	106	SIBOLGA	Kota Sibolga	0756	17.303.364.700	332.858.378.033	2.523.973.900	48.037.094.160	-	-	-	-	-	400.722.810.793
43	SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kota Tanjung Balai	0755	17.303.364.700	332.858.378.033	2.202.807.760	67.065.288.655	-	-	7.139.409.000	-	-	426.569.248.148
44	SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI	Kota Tebing Tinggi	0752	17.303.364.700	332.858.378.033	4.970.016.936	77.465.108.972	-	-	19.181.135.000	-	-	451.778.003.641
45	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	Kota Padang Sidempuan	0757	17.303.364.700	332.858.378.033	713.322.004	104.246.237.143	-	24.466.281.298	-	-	-	479.587.583.178
46	SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG	Kab. Pakpak Bharat	0715	74.579.457.000	697.548.833.000	1.591.476.251	48.164.116.517	-	36.067.265.508	-	-	-	857.951.148.276
47	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Selatan	0714	74.579.457.000	697.548.833.000	21.077.799.233	243.079.128.800	-	250.787.815.120	14.443.800.000	-	-	1.301.516.833.153
48	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	Kab. Humbang Hasundutan	0716	74.579.457.000	697.548.833.000	4.974.360.057	142.658.702.804	-	94.045.881.960	6.546.805.000	-	-	1.020.354.039.821
49	SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI	Kab. Serdang Bedagai	0720	22.782.214.800	577.706.637.827	24.950.769.349	273.806.158.325	-	196.026.532.876	15.086.442.000	-	-	1.110.358.755.177
50	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	Kab. Samosir	0712	74.579.457.000	697.548.833.000	2.728.757.985	103.174.684.263	-	65.791.640.820	-	-	-	943.823.373.068
51	SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kab. Batu Bara	0721	43.383.372.000	634.661.702.217	5.582.290.221	186.629.314.630	-	108.304.028.798	5.836.438.000	-	-	984.397.145.866
52	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Padang Lawas	0722	51.935.480.700	511.065.297.165	45.364.827.827	164.721.804.358	-	144.882.053.528	-	-	-	917.969.463.578
53	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Padang Lawas Utara	0723	62.606.159.700	526.324.512.797	9.538.075.948	149.014.370.512	-	224.808.485.390	7.623.448.000	-	-	979.915.052.347
54	SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu Selatan	0724	81.838.415.000	521.574.342.506	4.128.541.370	130.651.339.218	-	43.105.275.188	7.233.497.000	-	-	788.531.410.282
55	SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu Utara	0725	48.785.852.600	603.185.032.454	6.114.158.314	163.166.440.625	-	73.289.565.000	7.108.712.000	-	-	901.649.760.993
56	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Utara	0726	16.153.079.300	387.545.798.636	28.680.643.515	145.794.206.957	-	82.303.374.466	14.906.329.000	-	-	675.383.431.874
57	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Barat	0727	17.303.364.700	332.858.378.033	198.291.291.503	157.615.860.011	-	80.941.028.056	14.522.717.000	-	-	801.532.639.303
58	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	Kota Gunungsitoli	0761	17.826.340.700	431.597.563.363	3.459.643.965	99.549.170.025	-	57.659.010.422	-	-	-	610.091.728.475
59	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	Provinsi Sumatera Barat	0800	174.378.188.000	2.139.807.848.000	60.139.740.451	977.818.204.568	-	-	15.594.394.000	-	-	3.367.738.375.019
60	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kab. Lima Puluh Kota	0803	19.821.501.000	894.108.014.007	14.128.857.611	233.273.584.494	-	82.493.704.528	-	-	-	1.243.825.661.640
61	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kab. Agam	0801	19.821.501.000	894.108.014.007	14.276.769.310	271.727.430.776	-	98.028.894.550	-	-	-	1.297.962.609.643
62	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	Kab. Kepulauan Mentawai	0809	13.199.292.000	696.900.216.146	1.941.704.828	106.780.342.307	-	37.470.503.404	21.715.422.000	-	-	878.007.480.685
63	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	Kab. Padang Pariaman	0805	13.035.582.000	761.270.062.956	21.812.067.075	251.181.694.664	-	97.921.018.878	7.113.627.000	-	-	1.152.334.052.573
64	SUMATERA BARAT	091	LUBUK SIKAPING	Kab. Pasaman	0802	19.821.501.000	894.108.014.007	11.808.785.582	190.010.187.420	-	67.393.120.620	-	-	-	1.183.141.608.629
65	SUMATERA BARAT	142	P A I N A N	Kab. Pesisir Selatan	0806	27.254.357.000	926.347.752.162	43.469.332.898	305.388.247.132	-	156.035.442.052	-	-	-	1.458.495.131.244
66	SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG	Kab. Sijunjung	0813	48.860.987.100	431.930.387.134	26.320.144.019	159.224.610.165	-	50.152.691.400	6.986.983.000	-	-	723.475.802.818
67	SUMATERA BARAT	090	S O L O K	Kab. Solok	0804	19.821.501.000	894.108.014.007	43.200.570.880	240.661.014.521	-	76.414.856.046	-	-	-	1.274.205.956.454

REALISASI TRANSFER KE DAERAH PER JENIS TRANSFER PER PEMDA

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Kode KPPN	KPPN	Daerah	Kode Pemda	Dana Transfer Umum		Dana Transfer Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
						Dana Bagi Hasil	DAU	DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kab. Tanah Datar	0807	13.199.292.000	696.900.216.146	76.759.027.346	189.800.650.301	-	72.734.830.102	16.404.520.000	-	-	1.065.798.535.895
69	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kota Bukit Tinggi	0851	48.860.987.100	431.930.387.134	11.281.492.456	68.564.476.748	-	-	-	-	-	560.637.343.438
70	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kota Padang Panjang	0852	48.860.987.100	431.930.387.134	5.115.348.945	36.930.355.849	-	-	-	-	-	522.837.079.028
71	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	Kota Padang	0855	48.860.987.100	431.930.387.134	40.541.456.059	377.092.262.754	-	-	16.374.531.000	-	-	914.799.624.047
72	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kota Payakumbuh	0856	48.860.987.100	431.930.387.134	16.570.513.841	83.235.231.979	-	-	8.671.856.000	-	-	589.268.976.054
73	SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG	Kota Sawahlunto	0854	48.860.987.100	431.930.387.134	6.316.876.346	47.836.540.232	-	19.355.965.928	8.752.114.000	-	-	563.052.870.740
74	SUMATERA BARAT	090	S O L O K	Kota Solok	0853	48.860.987.100	431.930.387.134	6.061.189.714	51.082.101.430	-	-	20.917.821.000	-	-	558.852.486.378
75	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	Kota Pariaman	0857	48.860.987.100	431.930.387.134	2.188.772.651	66.550.360.731	-	40.945.791.400	6.963.163.000	-	-	597.439.462.016
76	SUMATERA BARAT	091	LUBUK SIKAPING	Kab. Pasaman Barat	0812	32.698.372.000	699.625.836.558	5.275.139.439	231.465.178.391	-	87.318.388.140	-	-	-	1.056.382.914.528
77	SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG	Kab. Dharmasraya	0810	13.199.292.000	696.900.216.146	8.778.269.954	146.967.176.131	-	56.185.785.000	7.201.621.000	-	-	929.232.360.231
78	SUMATERA BARAT	090	S O L O K	Kab. Solok Selatan	0811	13.199.292.000	696.900.216.146	26.942.682.193	110.925.573.090	-	42.087.151.224	7.294.478.000	-	-	897.349.392.653
79	RIAU	008	PEKANBARU	Provinsi Riau	0900	1.367.867.057.200	1.545.391.359.249	126.453.794.879	987.836.713.100	-	-	-	-	-	4.027.548.924.428
80	RIAU	120	D U M A I	Kab. Bengkalis	0902	2.323.940.939.600	446.738.558.123	20.427.213.687	310.588.096.403	-	131.595.635.328	7.845.178.000	-	-	3.241.135.621.141
81	RIAU	092	R E N G A T	Kab. Indragiri Hilir	0905	618.101.217.600	1.034.421.190.350	14.922.103.833	334.312.387.816	-	151.765.327.184	7.194.132.000	-	-	2.160.716.358.783
82	RIAU	092	R E N G A T	Kab. Indragiri Hulu	0904	224.708.204.200	722.593.445.165	15.916.151.054	235.092.586.225	-	137.803.108.240	14.190.971.000	-	-	1.350.304.465.884
83	RIAU	008	PEKANBARU	Kab. Kampar	0901	1.367.867.057.200	1.545.391.359.249	17.160.415.511	433.339.493.402	-	221.972.375.000	15.095.240.000	-	-	3.600.825.940.362
84	RIAU	092	R E N G A T	Kab. Kuantan Singingi	0912	859.480.938.900	482.500.494.970	26.992.278.298	190.468.454.765	-	162.257.201.524	-	-	-	1.721.699.368.457
85	RIAU	008	PEKANBARU	Kab. Pelalawan	0906	353.114.069.600	642.155.963.000	12.541.194.204	211.985.747.967	-	89.333.780.024	14.401.931.000	-	-	1.323.532.685.795
86	RIAU	120	D U M A I	Kab. Rokan Hilir	0908	301.377.947.600	800.122.309.141	40.778.896.622	307.894.071.933	-	108.575.368.560	-	-	-	1.558.748.593.856
87	RIAU	008	PEKANBARU	Kab. Rokan Hulu	0907	301.377.947.600	800.122.309.141	17.791.848.828	292.642.361.564	-	139.416.211.956	-	-	-	1.551.350.679.089
88	RIAU	008	PEKANBARU	Kab. Siak	0909	859.480.938.900	482.500.494.970	19.501.128.444	253.317.346.648	-	116.379.240.000	15.172.751.000	-	-	1.746.351.899.962
89	RIAU	120	D U M A I	Kota Dumai	0953	328.613.950.000	505.005.993.812	22.152.809.497	150.815.846.748	-	-	6.957.996.000	-	-	1.013.546.596.057
90	RIAU	008	PEKANBARU	Kota Pekanbaru	0951	859.480.938.900	482.500.494.970	22.842.688.295	345.483.619.340	-	-	15.652.677.000	-	-	1.725.960.418.505
91	RIAU	120	D U M A I	Kab. Kepulauan Meranti	0913	859.480.938.900	482.500.494.970	14.856.986.108	138.173.923.359	-	70.632.349.000	-	-	-	1.565.644.692.337
92	JAMBI	012	J A M B I	Provinsi Jambi	1000	510.598.094.620	1.366.496.306.000	63.489.201.154	481.803.298.674	14.045.998.828	-	-	-	-	2.436.432.899.276
93	JAMBI	012	J A M B I	Kab. Batanghari	1001	319.766.630.200	604.982.554.120	21.979.421.151	165.088.278.120	-	94.738.383.796	7.092.642.000	-	-	1.213.647.909.387
94	JAMBI	078	MUARA BUNGO	Kab. Bungo	1003	173.794.586.700	609.844.479.693	34.131.638.436	144.573.761.564	-	112.295.750.200	7.268.471.000	-	-	1.081.908.687.593
95	JAMBI	013	SUNGAI PENUH	Kab. Kerinci	1005	75.080.938.100	595.973.174.061	20.789.529.189	147.937.011.959	-	201.888.387.472	7.360.041.000	-	-	1.049.029.081.781
96	JAMBI	159	B A N G K O	Kab. Merangin	1006	125.459.303.300	701.228.244.313	38.110.722.654	192.861.991.954	-	159.905.305.542	-	-	-	1.217.565.567.763
97	JAMBI	012	J A M B I	Kab. Muaro Jambi	1009	324.547.544.700	683.367.536.619	39.424.381.366	190.093.883.300	-	120.815.653.900	7.345.234.000	-	-	1.365.594.233.885
98	JAMBI	159	B A N G K O	Kab. Sarolangun	1004	173.794.586.700	609.844.479.693	26.324.912.913	144.032.260.662	-	127.397.938.000	7.419.814.000	-	-	1.088.813.991.968
99	JAMBI	143	KUALA TUNGKAL	Kab. Tanjung Jabung Barat	1002	319.766.630.200	604.982.554.120	16.291.750.307	170.062.204.428	-	96.986.676.760	-	-	-	1.208.089.815.815
100	JAMBI	143	KUALA TUNGKAL	Kab. Tanjung Jabung Timur	1007	125.459.303.300	701.228.244.313	19.233.305.531	124.955.775.616	-	62.175.636.830	7.383.633.000	-	-	1.040.435.898.590
101	JAMBI	078	MUARA BUNGO	Kab. Tebo	1008	125.459.303.300	701.228.244.313	16.128.298.096	149.401.171.986	-	110.530.629.918	7.937.702.000	-	-	1.110.685.349.613
102	JAMBI	012	J A M B I	Kota Jambi	1051	129.359.455.730	855.652.531.149	43.719.741.319	209.074.564.290	-	-	-	-	-	1.237.806.292.488
103	JAMBI	013	SUNGAI PENUH	Kota Sungai Penuh	1052	64.314.121.400	436.063.417.566	13.953.844.591	68.930.657.843	-	47.015.901.436	7.631.633.000	-	-	637.909.575.836
104	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	Provinsi Sumatera Selatan	1100	2.403.754.949.400	1.831.481.647.222	74.582.602.273	1.105.251.755.100	-	-	6.489.293.000	-	-	5.421.560.246.995
105	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	Kab. Lahat	1106	282.645.401.400	683.870.183.408	10.590.116.535	214.567.009.656	-	240.522.891.246	7.010.619.000	-	-	1.439.206.221.245
106	SUMATERA SELATAN	160	S E K A Y U	Kab. Musi Banyuasin	1103	2.102.015.482.600	511.521.240.439	33.369.884.583	346.727.489.285	-	209.290.220.994	-	-	-	3.202.924.317.901
107	SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU	Kab. Musi Rawas	1107	282.645.401.400	683.870.183.408	27.825.540.278	185.211.258.391	-	159.748.839.638	-	-	-	1.339.301.223.115
108	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	Kab. Muara Enim	1105	282.645.401.400	683.870.183.408	15.276.835.998	290.921.588.862	-	209.043.886.996	-	-	-	1.481.757.896.664
109	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ilir	1108	282.645.401.400	683.870.183.408	13.693.594.944	387.395.473.961	-	268.245.020.734	7.046.347.000	-	-	1.642.896.021.447
110	SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu	1104	282.645.401.400	683.870.183.408	9.553.878.683	179.968.167.078	-	117.163.222.196	-	-	-	1.273.200.852.765
111	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	Kota Palembang	1151	420.813.292.400	397.891.501.000	24.165.978.515	547.027.547.894	-	-	-	-	-	1.389.898.319.809
112	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	Kota Prabumulih	1153	420.813.292.400	397.891.501.000	6.390.089.775	102.062.516.095	-	10.313.283.000	-	-	-	937.470.682.270
113	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	Kota Pagar Alam	1154	420.813.292.400	397.891.501.000	-	67.823.955.724	-	-	-	-	-	886.528.749.124
114	SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU	Kota Lubuk Linggau	1155	420.813.292.400	397.891.501.000	29.516.050.822	113.971.364.739	-	-	7.945.124.000	-	-	970.137.332.961
115	SUMATERA SELATAN	160	S E K A Y U	Kab. Banyuasin	1109	282.645.401.400	683.870.183.408	65.224.779.891	429.964.021.356	-	250.364.514.400	7.911.022.000	-	-	1.719.979.922.455
116	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	Kab. Ogan Ilir	1112	282.645.401.400	683.870.183.408	23.293.525.525	211.884.347.093	-	159.268.983.680	7.031.606.000	-	-	1.367.994.047.106
117	SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1110	282.645.401.400	683.870.183.408	45.678.042.233	293.928.721.772	-	258.431.350.040	27.621.413.000	-	-	1.592.175.111.853
118	SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1111	282.645.401.400	683.870.183.408	4.188.587.796	169.558.945.038	-	143.178.990.740	-	-	-	1.283.442.108.382
119	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	Kab. Empat Lawang	1117	210.038.261.700	458.030.306.981	24.496.355.553	115.406.220.479	-	121.140.572.986	-	-	-	929.111.717.699
120	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1118	768.138.165.500	328.447.060.240	1.451.548.180	104.460.096.406	-	58.142.439.804	5.596.234.000	-	-	1.266.235.544.130
121	SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU	Kab. Musi Rawas Utara	1119	420.813.292.400	397.891.501.000	4.278.279.585	88.854.869.441	-	72.283.742.750	9.025.306.000	-	-	993.146.991.176
122	BENGKULU	016	B E N G K U L U	Provinsi Bengkulu	2600	11.581.368.000	517.556.227.000	48.026.480.481	346.701.857.820	-	-	6.565.019.000	-	-	930.430.952.301
123	BENGKULU	121	M A N N A	Kab. Bengkulu Selatan	2602	11.581.368.000	517.556.227.000	37.314.356.561	117.405.306.037	-	105.858.598.200	7.015.031.000	-	-	796.730.886.798
124	BENGKULU	016	B E N G K U L U	Kab. Bengkulu Utara	2601	11.581.368.000	517.556.227.000	38.396.869.075	171.271.137.875	-	157.045.196.496	-	-	-	895.850.798.446
125	BENGKULU	146	C U R U P	Kab. Rejang Lebong	2603	11.581.368.000	517.556.227.000	19.394.304.716	129.567.747.255	-	75.872.767.800	-	-	-	753.972.414.771
126	BENGKULU	016	B E N G K U L U	Kota Bengkulu	2651	11.581.368.000	517.556.227.000	21.581.770.273	163.592.359.963	-	-	-	-	-	714.311.725.236
127	BENGKULU	121	M A N N A	Kab. Kaur	2605	11.581.368.000	517.556.227.000	13.402.376.356	103.495.794.877	-	138.438.320.600	-	-	-	784.474.086.833
128	BENGKULU	121	M A N N A	Kab. Seluma	2604	11.581.368.000	517.556.227.000	29.145.153.450	129.583.186.571	-	141.274.772.400	-	-	-	829.140.707.421
129	BENGKULU	181	MUKOMUKO	Kab. Mukomuko	2606	11.581.368.000	517.556.227.000	26.377.873.006	109.592.866.575	-	108.890.259.740	-	-	-	773.998.594.321
130	BENGKULU	146	C U R U P	Kab. Lebong	2607	11.581.368.000	517.556.227.000	22.110.348.491	67.763.193.732	-	62.070.839.614	7.247.559.000	-	-	688.329.535.837
131	BENGKULU	146	C U R U P	Kab. Kepahiang	2608	11.581.368.000	517.556.227.000	84.098.627.724	87.259.164.719	-	70.799.096.096	-	-	-	771.294.483.539
132	BENGKULU	016	B E N G K U L U	Kab. Bengkulu Tengah	2609	11.581.368.000	517.556.227.000	45.642.106.000	85.028.715.971	-	92.796.421.432	-	-	-	752.604.838.403
133	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Provinsi Lampung	1200	420.813.292.400	397.891.501.000	59.493.279.028	1.010.603.478.569	-	-	-	-	-	1.888.801.550.997
134	LAMPUNG	145	L I W A	Kab. Lampung Barat	1204	89.232.531.200	512.092.026.000	51.765.972.665	158.404.776.066	-	93.950.238.960	7.639.595.000	-	-	913.085.139.891

REALISASI TRANSFER KE DAERAH PER JENIS TRANSFER PER PEMDA

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Kode KPPN	KPPN	Daerah	Kode Pemda	Dana Transfer Umum		Dana Transfer Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
						Dana Bagi Hasil	DAU	DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
135	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	1201	420.813.292.400	397.891.501.000	47.388.571.996	348.185.652.570	-	174.191.242.000	15.172.793.000	-	-	1.403.643.052.966
136	LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	1202	50.915.242.310	1.579.424.255.626	35.976.334.028	509.241.940.771	-	311.431.165.200	7.877.955.000	-	-	2.494.866.892.935
137	LAMPUNG	116	KOTABUMI	Kab. Lampung Utara	1203	89.232.531.200	512.092.026.000	16.504.470.587	255.590.196.808	-	200.913.635.820	7.593.331.000	-	-	1.081.926.191.415
138	LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	1207	89.232.531.200	512.092.026.000	16.007.608.387	358.321.160.886	-	266.452.695.080	-	-	-	1.242.106.021.553
139	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tanggamus	1206	89.232.531.200	512.092.026.000	41.193.364.345	278.624.858.285	-	218.108.395.560	-	-	-	1.139.251.175.390
140	LAMPUNG	116	KOTABUMI	Kab. Tulang Bawang	1205	89.232.531.200	512.092.026.000	34.985.656.394	188.453.357.837	-	133.407.736.200	7.331.903.000	-	-	965.503.210.631
141	LAMPUNG	116	KOTABUMI	Kab. Way Kanan	1208	89.232.531.200	512.092.026.000	40.765.660.147	225.262.962.190	-	184.872.161.440	-	-	-	1.052.225.340.977
142	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	1251	89.232.531.200	512.092.026.000	17.811.317.994	334.585.875.252	-	-	-	-	-	953.721.750.446
143	LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG	Kota Metro	1252	89.232.531.200	512.092.026.000	37.785.632.055	93.468.404.613	-	-	21.120.280.000	-	-	753.698.873.868
144	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pesawaran	1209	89.232.531.200	512.092.026.000	14.935.853.766	184.674.581.259	-	133.025.673.004	7.351.641.000	-	-	941.312.306.229
145	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pringsewu	1210	89.232.531.200	512.092.026.000	35.627.782.965	193.245.496.854	-	91.795.680.026	19.869.203.000	-	-	941.862.720.045
146	LAMPUNG	116	KOTABUMI	Kab. Mesuji	1211	89.232.531.200	512.092.026.000	33.447.410.335	125.818.806.952	-	77.785.666.784	7.507.964.000	-	-	845.884.405.271
147	LAMPUNG	116	KOTABUMI	Kab. Tulang Bawang Barat	1212	89.232.531.200	512.092.026.000	12.359.653.016	127.070.319.622	-	88.379.579.400	14.931.599.000	-	-	844.065.708.238
148	LAMPUNG	145	L I W A	Kab. Pesisir Barat	1213	89.232.531.200	512.092.026.000	12.826.487.028	107.824.871.657	-	80.826.572.580	15.831.170.000	-	-	818.633.658.465
149	DKI JAKARTA	018	JAKARTA I	Provinsi DKI Jakarta	0100	-	-	-	3.344.479.784.631	60.566.853.715	-	31.797.533.000	-	-	3.436.844.171.346
150	JAWA BARAT	022	BANDUNG I	Provinsi Jawa Barat	0200	-	-	150.972.931.831	4.839.821.276.700	-	-	-	-	-	4.990.794.208.531
151	JAWA BARAT	095	BANDUNG II	Kab. Bandung	0212	-	-	46.447.696.587	1.059.683.301.234	-	320.409.151.974	13.432.133.000	-	-	1.439.972.282.795
152	JAWA BARAT	171	B E K A S I	Kab. Bekasi	0208	-	-	73.704.207.098	951.171.311.368	-	280.261.348.520	-	-	-	1.305.136.866.986
153	JAWA BARAT	023	B O G O R	Kab. Bogor	0205	-	-	90.274.891.587	1.672.040.877.301	-	617.388.010.120	5.935.710.000	-	-	2.385.639.489.008
154	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	Kab. Ciamis	0216	-	-	29.031.006.838	448.269.516.854	-	267.934.690.920	16.006.829.000	-	-	761.242.043.612
155	JAWA BARAT	128	SUKABUMI	Kab. Cianjur	0207	-	-	36.359.592.091	913.006.130.309	-	437.229.508.336	14.200.362.000	-	-	1.400.795.592.736
156	JAWA BARAT	024	C I R E B O N	Kab. Cirebon	0217	-	-	70.341.900.423	778.225.714.628	11.863.078.000	414.689.537.000	-	-	-	1.275.120.230.051
157	JAWA BARAT	096	G A R U T	Kab. Garut	0214	-	-	23.999.986.120	1.029.451.413.170	21.393.780.000	487.613.704.846	5.673.252.000	-	-	1.568.132.136.136
158	JAWA BARAT	024	C I R E B O N	Kab. Indramayu	0219	-	-	15.615.312.360	560.530.131.586	-	326.948.262.106	7.112.858.000	-	-	910.206.564.052
159	JAWA BARAT	086	KARAWANG	Kab. Karawang	0209	-	-	47.424.406.545	723.945.098.204	-	330.483.605.460	14.221.908.000	-	-	1.116.075.018.209
160	JAWA BARAT	147	KUNINGAN	Kab. Kuningan	0218	-	-	14.772.674.684	518.605.924.228	-	341.151.707.000	-	-	-	874.530.305.912
161	JAWA BARAT	147	KUNINGAN	Kab. Majalengka	0220	-	-	47.414.441.116	520.772.579.722	-	328.430.351.200	13.581.637.000	-	-	910.199.009.038
162	JAWA BARAT	021	PURWAKARTA	Kab. Purwakarta	0210	-	-	30.098.421.285	363.073.295.686	-	190.118.155.640	-	-	-	583.289.872.611
163	JAWA BARAT	021	PURWAKARTA	Kab. Subang	0211	-	-	28.710.226.017	564.638.610.800	7.115.450.000	278.118.357.440	7.182.606.000	-	-	885.765.250.257
164	JAWA BARAT	128	SUKABUMI	Kab. Sukabumi	0206	-	-	23.626.735.151	774.810.403.806	-	445.110.518.992	-	-	-	1.243.547.657.949
165	JAWA BARAT	087	SUMEDANG	Kab. Sumedang	0213	-	-	38.989.538.650	479.934.005.246	-	274.992.267.000	28.610.956.000	-	-	822.526.766.896
166	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	Kab. Tasikmalaya	0215	-	-	38.277.764.899	645.176.854.985	24.803.980.846	368.495.051.630	7.130.495.000	-	-	1.083.884.147.360
167	JAWA BARAT	095	BANDUNG II	Kota Bandung	0251	-	-	21.496.443.206	704.597.899.092	-	-	-	-	-	726.094.342.298
168	JAWA BARAT	171	B E K A S I	Kota Bekasi	0257	-	-	7.889.122.324	662.213.618.101	-	-	-	-	-	670.102.740.425
169	JAWA BARAT	023	B O G O R	Kota Bogor	0252	-	-	25.574.335.904	361.225.908.092	-	-	16.164.800.000	-	-	402.965.043.996
170	JAWA BARAT	024	C I R E B O N	Kota Cirebon	0254	-	-	59.957.638.216	164.374.570.432	-	-	-	-	-	224.332.208.648
171	JAWA BARAT	023	B O G O R	Kota Depok	0258	-	-	22.672.393.851	473.849.475.930	-	-	6.837.475.000	-	-	503.359.344.781
172	JAWA BARAT	128	SUKABUMI	Kota Sukabumi	0253	-	-	14.482.258.945	138.892.205.640	-	-	5.526.341.000	-	-	158.900.805.585
173	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	Kota Tasikmalaya	0260	-	-	27.096.369.450	256.155.775.851	-	-	-	-	-	283.252.145.301
174	JAWA BARAT	022	BANDUNG I	Kota Cimahi	0261	-	-	39.028.902.927	182.745.193.155	-	-	15.105.852.000	-	-	236.879.948.082
175	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	Kota Banjar	0262	-	-	10.386.590.330	86.195.171.701	-	16.455.945.440	7.260.689.000	-	-	120.298.396.471
176	JAWA BARAT	022	BANDUNG I	Kab. Bandung Barat	0221	-	-	12.014.160.081	528.030.002.465	-	234.366.852.420	8.201.462.000	-	-	782.612.476.966
177	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	Kab. Pangandaran	0222	-	-	32.506.746.568	165.786.617.784	-	97.052.510.952	-	-	-	295.345.875.304
178	JAWA TENGAH	026	SEMARANG I	Provinsi Jawa Tengah	0300	-	-	142.445.000.400	3.650.845.462.570	-	-	8.436.080.000	-	-	3.801.726.542.970
179	JAWA TENGAH	164	BANJARNEGARA	Kab. Banjarnegara	0318	-	-	39.728.737.313	376.790.573.132	26.254.417.000	240.703.149.324	-	-	-	683.476.876.769
180	JAWA TENGAH	029	PURWOKERTO	Kab. Banyumas	0315	-	-	62.463.712.199	600.573.147.321	-	337.807.564.926	22.647.785.000	-	-	1.023.492.209.446
181	JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN	Kab. Batang	0306	-	-	12.959.351.140	318.575.041.259	-	216.807.527.556	7.298.922.000	-	-	555.640.841.955
182	JAWA TENGAH	163	PURWODADI	Kab. Blora	0314	-	-	46.176.775.980	382.270.262.587	-	223.472.641.600	15.783.485.000	-	-	667.703.165.167
183	JAWA TENGAH	148	K L A T E N	Kab. Boyolali	0325	-	-	18.633.120.236	342.529.388.171	-	263.061.978.428	7.067.394.000	-	-	631.291.880.835
184	JAWA TENGAH	118	T E G A L	Kab. Brebes	0308	-	-	46.499.373.280	651.812.731.959	-	310.333.723.980	6.915.077.000	-	-	1.015.560.906.219
185	JAWA TENGAH	130	CILACAP	Kab. Cilacap	0316	-	-	14.575.623.266	637.285.837.706	-	301.542.017.904	7.928.807.000	-	-	961.332.285.876
186	JAWA TENGAH	129	K U D U S	Kab. Demak	0303	-	-	29.870.990.180	400.130.623.377	-	201.113.654.524	20.870.727.000	-	-	651.985.995.081
187	JAWA TENGAH	163	PURWODADI	Kab. Grobogan	0304	-	-	67.580.938.125	503.732.469.533	-	303.296.102.000	7.182.904.000	-	-	881.792.413.658
188	JAWA TENGAH	129	K U D U S	Kab. Jepara	0312	-	-	17.171.070.128	405.141.844.793	-	204.385.138.394	21.276.807.000	-	-	647.974.860.315
189	JAWA TENGAH	162	S R A G E N	Kab. Karanganyar	0328	-	-	4.661.044.344	359.176.171.666	-	169.124.959.130	16.499.104.000	-	-	549.461.279.140
190	JAWA TENGAH	027	PURWOREJO	Kab. Kebumen	0323	-	-	14.130.584.650	506.243.866.544	-	429.531.612.612	24.222.868.000	-	-	974.128.931.806
191	JAWA TENGAH	134	SEMARANG II	Kab. Kendal	0302	-	-	32.539.705.297	410.694.034.370	-	196.279.617.406	14.773.497.000	-	-	654.286.854.073
192	JAWA TENGAH	148	K L A T E N	Kab. Klaten	0324	-	-	17.623.037.485	447.625.912.564	-	358.159.295.584	15.877.103.000	-	-	839.285.348.633
193	JAWA TENGAH	129	K U D U S	Kab. Kudus	0310	-	-	20.351.001.627	249.825.782.389	-	122.938.794.042	27.910.437.000	-	-	421.026.015.058
194	JAWA TENGAH	115	MAGELANG	Kab. Magelang	0319	-	-	50.245.914.157	380.376.521.650	9.962.280.475	315.394.682.680	14.017.060.000	-	-	769.996.458.962
195	JAWA TENGAH	097	P A T I	Kab. Pati	0309	-	-	12.368.724.963	440.312.033.497	-	374.621.120.600	14.976.530.000	-	-	842.278.409.060
196	JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN	Kab. Pekalongan	0305	-	-	8.790.805.800	348.287.923.228	-	233.235.085.780	7.151.300.000	-	-	597.465.114.808
197	JAWA TENGAH	118	T E G A L	Kab. Pemalang	0311	-	-	5.302.945.654	540.767.748.918	-	238.622.983.400	5.655.294.000	-	-	790.348.971.972
198	JAWA TENGAH	029	PURWOKERTO	Kab. Purbalingga	0317	-	-	20.274.064.875	357.652.596.361	13.349.400.496	231.859.881.728	-	-	-	623.135.943.460
199	JAWA TENGAH	027	PURWOREJO	Kab. Purworejo	0322	-	-	45.878.356.752	322.794.348.239	-	307.088.516.196	6.564.101.000	-	-	682.325.322.187
200	JAWA TENGAH	097	P A T I	Kab. Rembang	0313	-	-	10.035.312.380	271.863.482.512	-	243.164.237.100	7.621.391.000	-	-	532.684.422.992
201	JAWA TENGAH	134	SEMARANG II	Kab. Semarang	0301	-	-	38.618.313.786	362.674.352.180	-	198.016.255.126	14.519.953.000	-	-	613.828.874.092

REALISASI TRANSFER KE DAERAH PER JENIS TRANSFER PER PEMDA

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Kode KPPN	KPPN	Daerah	Kode Pemda	Dana Transfer Umum		Dana Transfer Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
						Dana Bagi Hasil	DAU	DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
202	JAWA TENGAH	162	S R A G E N	Kab. Sragen	0326	-	-	12.649.973.774	374.713.681.405	-	172.010.197.600	16.066.363.000	-	-	575.440.215.779
203	JAWA TENGAH	028	SURAKARTA	Kab. Sukoharjo	0327	-	-	13.813.840.269	286.801.162.173	-	162.725.313.000	20.397.664.000	-	-	483.737.979.442
204	JAWA TENGAH	118	T E G A L	Kab. Tegal	0307	-	-	37.844.328.871	513.136.187.902	-	321.730.623.000	7.231.265.000	-	-	879.942.404.773
205	JAWA TENGAH	115	MAGELANG	Kab. Temanggung	0320	-	-	39.043.735.581	309.048.326.132	-	209.995.681.594	9.002.280.000	-	-	567.090.023.307
206	JAWA TENGAH	028	SURAKARTA	Kab. Wonogiri	0329	-	-	13.506.815.518	434.042.049.353	-	249.754.065.280	16.616.491.000	-	-	713.919.421.151
207	JAWA TENGAH	164	BANJARNEGARA	Kab. Wonosobo	0321	-	-	14.977.060.479	334.695.386.893	-	209.129.250.800	-	-	-	558.801.698.172
208	JAWA TENGAH	115	MAGELANG	Kota Magelang	0355	-	-	4.870.785.365	76.650.032.611	-	-	15.289.430.000	-	-	96.810.247.976
209	JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN	Kota Pekalongan	0353	-	-	32.857.801.676	108.820.787.141	-	-	7.216.498.000	-	-	148.895.086.817
210	JAWA TENGAH	134	SEMARANG II	Kota Salatiga	0352	-	-	28.902.315.472	89.303.670.080	-	-	8.989.406.000	-	-	127.195.391.552
211	JAWA TENGAH	026	SEMARANG I	Kota Semarang	0351	-	-	13.128.032.009	500.525.607.387	-	-	29.284.482.000	-	-	542.938.121.396
212	JAWA TENGAH	028	SURAKARTA	Kota Surakarta	0356	-	-	630.949.259	239.427.178.445	-	-	6.920.583.000	-	-	246.978.710.704
213	JAWA TENGAH	118	T E G A L	Kota Tegal	0354	-	-	26.847.813.739	120.579.033.522	-	-	-	-	-	147.426.847.261
214	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	Provinsi DI Yogyakarta	0400	-	-	49.005.271.853	539.553.529.430	-	-	8.452.393.000	-	1.000.000.000.000	1.597.011.194.283
215	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	Kab. Bantul	0401	-	-	26.035.845.622	353.769.988.576	-	120.015.275.084	22.624.496.000	-	-	522.445.605.282
216	DI JOGJAKARTA	149	WONOSARI	Kab. Gunung Kidul	0403	-	-	43.048.410.083	346.991.347.543	-	168.586.366.584	20.512.460.000	-	-	579.138.584.210
217	DI JOGJAKARTA	176	W A T E S	Kab. Kulon Progo	0404	-	-	20.712.325.097	211.284.725.518	-	97.097.074.280	14.793.600.000	-	-	343.887.724.895
218	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	Kab. Sleman	0402	-	-	11.202.037.429	367.975.618.914	-	127.357.323.000	24.219.106.000	-	-	530.754.085.343
219	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	0451	-	-	15.690.538.253	159.524.167.492	-	-	15.715.950.000	-	-	190.930.655.745
220	JAWA TIMUR	135	SURABAYA II	Provinsi Jawa Timur	0500	-	-	141.550.691.019	3.973.562.776.800	-	-	25.308.240.000	-	-	4.140.421.707.819
221	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	Kab. Bangkalan	0508	-	-	36.297.384.613	402.624.820.749	-	253.423.006.642	-	-	-	692.345.212.004
222	JAWA TIMUR	100	BANYUWANGI	Kab. Banyuwangi	0511	-	-	82.892.664.532	514.226.918.643	-	211.060.145.212	32.035.778.000	-	-	840.215.506.387
223	JAWA TIMUR	150	B L I T A R	Kab. Blitar	0521	-	-	15.226.214.425	420.748.570.037	-	223.088.886.406	7.699.226.000	-	-	666.762.896.868
224	JAWA TIMUR	073	BOJONEGORO	Kab. Bojonegoro	0527	-	-	324.899.220	445.917.302.727	-	384.664.291.200	20.443.874.000	-	-	851.350.367.147
225	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	Kab. Bondowoso	0509	-	-	6.671.427.853	299.765.708.842	-	195.938.617.464	-	-	-	502.375.754.159
226	JAWA TIMUR	031	SURABAYA I	Kab. Gresik	0501	-	-	92.058.376.986	397.243.576.877	-	315.970.754.200	22.200.037.000	-	-	827.472.745.063
227	JAWA TIMUR	131	J E M B E R	Kab. Jember	0512	-	-	15.046.355.567	643.866.226.922	-	307.788.258.682	7.026.762.000	-	-	973.727.603.171
228	JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO	Kab. Jombang	0504	-	-	7.533.278.948	378.823.447.330	-	289.003.827.612	22.757.431.000	-	-	698.117.984.890
229	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	Kab. Kediri	0517	-	-	9.323.635.350	449.849.831.899	-	372.136.360.000	15.234.136.000	-	-	846.543.963.249
230	JAWA TIMUR	073	BOJONEGORO	Kab. Lamongan	0529	-	-	11.599.257.601	424.182.437.075	-	390.009.872.120	28.598.556.000	-	-	854.390.122.796
231	JAWA TIMUR	131	J E M B E R	Kab. Lumajang	0516	-	-	13.621.572.268	328.911.667.310	-	191.486.714.934	28.673.188.000	-	-	562.693.142.512
232	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	Kab. Madiun	0522	-	-	14.392.199.148	247.476.747.716	-	192.759.795.000	22.517.566.000	-	-	477.146.307.864
233	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	Kab. Magetan	0524	-	-	12.627.656.379	277.513.402.693	-	184.061.157.240	21.162.508.000	-	-	495.364.724.312
234	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	Kab. Malang	0513	-	-	23.921.155.991	727.669.050.787	10.677.886.000	436.549.639.740	21.217.575.000	-	-	1.220.035.307.518
235	JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO	Kab. Mojokerto	0502	-	-	25.281.051.434	342.550.421.504	-	270.286.472.656	22.561.971.000	-	-	660.679.916.594
236	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	Kab. Nganjuk	0519	-	-	29.642.411.477	416.970.039.100	-	255.893.574.130	20.479.104.000	-	-	722.985.128.707
237	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	Kab. Ngawi	0523	-	-	6.957.899.048	297.338.384.381	-	216.944.662.560	15.441.720.000	-	-	536.682.665.989
238	JAWA TIMUR	099	PACITAN	Kab. Pacitan	0526	-	-	9.233.785.810	251.021.891.474	-	154.141.351.140	14.664.399.000	-	-	429.061.427.424
239	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	Kab. Pamekasan	0506	-	-	12.266.898.469	305.997.940.594	-	189.870.071.600	23.417.922.000	-	-	531.552.832.663
240	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	Kab. Pasuruan	0514	-	-	11.176.334.255	520.367.827.238	-	335.436.696.240	7.147.236.000	-	-	874.128.093.733
241	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	Kab. Ponorogo	0525	-	-	31.550.421.601	335.880.415.140	-	211.790.174.360	15.070.888.000	-	-	594.291.899.101
242	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	Kab. Probolinggo	0515	-	-	10.171.016.405	370.425.365.516	-	315.570.745.000	7.167.295.000	-	-	703.334.421.921
243	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	Kab. Sampang	0505	-	-	20.714.272.442	344.059.901.310	-	155.853.626.400	7.848.369.000	-	-	528.476.169.152
244	JAWA TIMUR	165	SIDOARJO	Kab. Sidoarjo	0503	-	-	24.988.371.499	593.188.430.632	-	307.367.596.442	14.428.969.000	-	-	939.973.367.573
245	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	Kab. Situbondo	0510	-	-	10.501.729.979	259.551.854.914	-	130.743.954.938	15.308.361.000	-	-	416.105.900.831
246	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	Kab. Sumenep	0507	-	-	27.552.115.452	341.232.362.872	11.944.255.286	313.038.419.218	7.006.290.000	-	-	700.773.442.828
247	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	Kab. Trenggalek	0520	-	-	12.134.577.997	250.781.412.438	-	154.642.022.298	31.726.484.000	-	-	449.284.496.733
248	JAWA TIMUR	166	T U B A N	Kab. Tuban	0528	-	-	14.382.698.500	402.271.172.164	-	242.343.836.566	5.709.750.000	-	-	664.707.457.230
249	JAWA TIMUR	150	B L I T A R	Kab. Tulungagung	0518	-	-	15.245.338.435	388.512.531.960	-	253.247.102.572	6.595.559.000	-	-	663.600.531.967
250	JAWA TIMUR	150	B L I T A R	Kota Blitar	0556	-	-	533.052.578	66.950.849.582	-	-	6.407.817.000	-	-	73.891.719.160
251	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	Kota Kediri	0557	-	-	8.650.906.298	113.806.558.797	-	-	8.108.479.000	-	-	130.565.944.095
252	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	Kota Madiun	0558	-	-	4.458.238.764	87.335.823.288	-	-	36.200.960.000	-	-	127.995.022.052
253	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	Kota Malang	0553	-	-	8.674.883.114	257.287.868.777	-	-	6.858.227.000	-	-	272.820.978.891
254	JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO	Kota Mojokerto	0552	-	-	1.054.596.347	68.490.951.665	-	-	6.296.448.000	-	-	75.841.996.012
255	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	Kota Pasuruan	0554	-	-	5.790.933.953	85.367.512.919	-	-	-	-	-	91.158.446.872
256	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	Kota Probolinggo	0555	-	-	5.036.732.926	89.787.286.083	-	-	14.589.713.000	-	-	109.413.732.009
257	JAWA TIMUR	135	SURABAYA II	Kota Surabaya	0551	-	-	11.631.578.252	772.583.645.991	-	-	29.199.862.000	-	-	813.415.086.243
258	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	Kota Batu	0559	-	-	612.203.039	78.593.567.973	-	22.072.705.436	13.824.166.000	-	-	115.102.642.448
259	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	Provinsi Kalimantan Barat	1300	239.726.827.900	1.990.911.466.681	49.847.341.971	711.016.690.588	-	-	-	-	-	2.991.502.327.140
260	KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG	Kab. Bengkayang	1307	180.632.033.500	956.170.068.099	32.045.840.822	183.083.468.673	-	100.728.150.364	7.438.168.000	-	-	1.460.097.729.458
261	KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU	Kab. Landak	1308	180.632.033.500	956.170.068.099	24.517.011.761	207.327.641.728	-	117.802.591.440	-	-	-	1.486.449.346.528
262	KALIMANTAN BARAT	117	PUTUSSIBAU	Kab. Kapuas Hulu	1305	180.632.033.500	956.170.068.099	54.820.117.283	189.655.363.506	-	188.999.864.222	7.329.568.000	-	-	1.577.607.014.610
263	KALIMANTAN BARAT	094	KETAPANG	Kab. Ketapang	1306	180.632.033.500	956.170.068.099	26.089.510.549	326.757.166.776	-	186.968.324.744	-	-	-	1.676.617.103.668
264	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	Kab. Mempawah	1304	22.269.746.800	598.643.089.386	29.706.655.946	132.286.658.752	-	49.473.377.574	-	-	-	832.379.528.458
265	KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG	Kab. Sambas	1301	239.726.827.900	1.990.911.466.681	106.613.435.611	286.571.201.754	-	176.061.772.404	-	-	-	2.799.884.704.350
266	KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU	Kab. Sanggau	1302	239.726.827.900	1.990.911.466.681	45.012.902.383	240.845.098.597	-	140.477.340.218	7.711.562.000	-	-	2.664.685.197.779
267	KALIMANTAN BARAT	079	S I N T A N G	Kab. Sintang	1303	239.726.827.900	1.990.911.466.681	25.324.471.626	304.686.646.483	-	256.720.859.400	-	-	-	2.817.370.272.090
268	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	Kota Pontianak	1351	57.892.592.500	975.494.842.341	38.760.274.705	201.387.437.184	-	-	7.638.759.000	-	-	1.281.173.905.730

REALISASI TRANSFER KE DAERAH PER JENIS TRANSFER PER PEMDA

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Kode KPPN	KPPN	Daerah	Kode Pemda	Dana Transfer Umum		Dana Transfer Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
						Dana Bagi Hasil	DAU	DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
269	KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG	Kota Singkawang	1352	57.892.592.500	975.494.842.341	31.146.635.874	101.679.800.103	-	-	7.429.123.000	-	-	1.173.642.993.818
270	KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU	Kab. Sekadau	1310	180.632.033.500	956.170.068.099	39.903.936.123	126.018.739.388	-	67.041.499.728	7.360.289.000	-	-	1.377.126.565.838
271	KALIMANTAN BARAT	079	SINTANG	Kab. Melawi	1309	180.632.033.500	956.170.068.099	21.790.108.300	160.599.693.989	-	144.231.420.212	-	-	-	1.463.423.324.100
272	KALIMANTAN BARAT	094	KETAPANG	Kab. Kayong Utara	1311	180.632.033.500	956.170.068.099	44.446.658.568	91.283.643.138	-	40.040.145.902	-	-	-	1.312.572.549.207
273	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	Kab. Kubu Raya	1312	57.892.592.500	975.494.842.341	195.691.441.426	254.747.229.140	-	127.174.409.880	7.046.356.000	-	-	1.618.046.871.287
274	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	Provinsi Kalimantan Tengah	1400	2.377.954.550.000	1.527.681.154.810	90.463.883.921	415.578.780.500	-	-	-	-	-	4.411.678.369.231
275	KALIMANTAN TENGAH	080	BUNTOK	Kab. Barito Selatan	1403	1.120.363.244.500	813.905.885.546	17.734.980.455	112.879.237.045	-	52.515.788.400	-	-	-	2.117.399.135.946
276	KALIMANTAN TENGAH	080	BUNTOK	Kab. Barito Utara	1402	1.120.363.244.500	813.905.885.546	15.328.636.024	122.327.283.704	-	62.650.466.182	-	-	-	2.134.575.515.956
277	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	Kab. Kapuas	1401	1.120.363.244.500	813.905.885.546	21.586.506.263	267.799.409.136	-	160.066.088.300	-	-	-	2.383.721.133.745
278	KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN	Kab. Kotawaringin Barat	1405	296.834.444.900	858.339.474.429	10.001.044.447	146.971.258.812	-	65.931.650.996	7.346.458.000	-	-	1.385.424.331.584
279	KALIMANTAN TENGAH	044	SAMPIT	Kab. Kotawaringin Timur	1404	296.834.444.900	858.339.474.429	31.167.484.465	226.756.060.255	-	139.540.564.088	13.673.191.000	-	-	1.566.311.219.137
280	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	Kota Palangkaraya	1451	449.600.483.300	454.871.095.368	7.041.635.645	136.492.373.851	-	-	15.976.445.000	-	-	1.063.982.033.164
281	KALIMANTAN TENGAH	044	SAMPIT	Kab. Katingan	1406	183.679.104.100	644.455.415.029	82.775.069.237	139.348.214.533	-	125.810.534.516	-	-	-	1.176.068.337.415
282	KALIMANTAN TENGAH	044	SAMPIT	Kab. Seruyan	1407	240.286.249.500	557.491.202.195	21.758.264.456	106.091.498.829	-	75.516.246.938	7.975.790.000	-	-	1.009.119.251.918
283	KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN	Kab. Sukamara	1408	174.394.922.700	384.625.573.910	3.488.862.340	50.612.284.914	-	22.813.589.888	-	-	-	635.935.233.752
284	KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN	Kab. Lamandau	1409	179.785.927.000	421.695.972.420	13.719.764.357	72.516.653.361	-	62.399.749.348	21.186.325.000	-	-	771.304.391.486
285	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	Kab. Gunung Mas	1410	343.662.017.400	508.767.691.160	11.384.180.659	136.329.340.777	-	77.238.315.748	7.360.767.000	-	-	1.084.742.312.744
286	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	Kab. Pulang Pisau	1411	215.571.658.300	518.721.806.000	16.908.750.392	108.711.132.341	-	70.981.109.522	13.808.580.000	-	-	944.703.036.555
287	KALIMANTAN TENGAH	080	BUNTOK	Kab. Murung Raya	1412	1.616.067.966.300	594.349.810.760	5.704.855.182	127.765.714.885	-	85.259.294.152	-	-	-	2.429.147.641.279
288	KALIMANTAN TENGAH	080	BUNTOK	Kab. Barito Timur	1413	449.600.483.300	454.871.095.368	21.585.780.190	95.076.489.055	-	74.884.275.260	14.414.214.000	-	-	1.110.432.337.173
289	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	Provinsi Kalimantan Selatan	1500	3.379.570.879.400	1.214.415.621.000	89.437.997.772	498.036.058.396	-	-	6.489.293.000	-	-	5.187.949.849.568
290	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	Kab. Banjar	1501	893.075.354.000	847.776.972.476	48.266.486.673	271.725.178.106	-	211.423.885.856	7.311.345.000	-	-	2.279.579.222.111
291	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	Kab. Barito Kuala	1506	1.064.594.602.700	454.818.467.000	50.541.007.464	196.415.946.623	-	128.368.634.628	7.373.731.000	-	-	1.902.112.389.415
292	KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI	Kab. Hulu Sungai Selatan	1504	1.064.594.602.700	454.818.467.000	28.481.803.011	126.896.446.472	-	108.842.488.300	35.978.675.000	-	-	1.819.612.482.483
293	KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI	Kab. Hulu Sungai Tengah	1505	1.064.594.602.700	454.818.467.000	50.742.422.165	134.598.981.360	-	115.959.796.462	-	-	-	1.820.714.269.687
294	KALIMANTAN SELATAN	151	TANJUNG	Kab. Hulu Sungai Utara	1509	1.064.594.602.700	454.818.467.000	5.284.608.825	112.525.140.528	-	153.325.032.184	15.226.701.000	-	-	1.805.774.552.237
295	KALIMANTAN SELATAN	081	KOTABARU	Kab. Kotabaru	1508	1.064.594.602.700	454.818.467.000	36.818.354.413	149.192.278.143	-	143.573.160.600	6.951.815.000	-	-	1.855.948.677.856
296	KALIMANTAN SELATAN	151	TANJUNG	Kab. Tabalong	1507	1.064.594.602.700	454.818.467.000	8.275.259.037	157.893.204.972	-	96.194.083.154	29.043.382.000	-	-	1.810.818.998.863
297	KALIMANTAN SELATAN	168	PELAIHARI	Kab. Tanah Laut	1502	893.075.354.000	847.776.972.476	14.910.035.652	188.450.393.545	-	105.721.818.846	7.592.690.000	-	-	2.057.527.264.519
298	KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI	Kab. Tapin	1503	1.064.594.602.700	454.818.467.000	14.868.975.002	113.216.548.327	-	86.892.825.996	22.843.013.000	-	-	1.757.234.432.025
299	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	Kota Banjarbaru	1552	2.268.507.862.200	486.954.391.654	38.570.481.911	121.101.560.502	-	-	-	-	-	2.915.134.296.267
300	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	Kota Banjarmasin	1551	2.268.507.862.200	486.954.391.654	7.823.805.153	230.644.523.345	-	-	14.040.453.000	-	-	3.007.971.035.352
301	KALIMANTAN SELATAN	151	TANJUNG	Kab. Balangan	1511	2.268.507.862.200	486.954.391.654	1.611.713.142	95.283.567.117	-	98.244.957.020	22.296.663.000	-	-	2.972.899.154.133
302	KALIMANTAN SELATAN	081	KOTABARU	Kab. Tanah Bumbu	1510	2.268.507.862.200	486.954.391.654	7.763.452.001	180.452.202.362	-	126.294.434.900	7.130.235.000	-	-	3.077.102.578.117
303	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Provinsi Kalimantan Timur	1600	6.493.519.044.500	973.503.062.403	51.666.088.879	581.958.593.400	-	-	21.414.666.000	-	-	8.122.061.455.182
304	KALIMANTAN TIMUR	153	TANJUNG REDEP	Kab. Berau	1604	2.966.189.771.800	561.054.929.000	934.635.000	144.483.915.699	-	83.623.939.844	6.999.290.000	-	-	3.763.286.481.343
305	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kab. Kutai Kartanegara	1610	2.054.900.221.640	417.776.433.000	21.740.652.286	409.610.966.362	-	160.823.537.614	15.684.292.000	-	-	3.080.536.102.902
306	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kab. Kutai Barat	1607	2.966.189.771.800	561.054.929.000	3.407.480.079	119.098.387.232	-	117.262.709.332	-	-	-	3.767.013.277.443
307	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kab. Kutai Timur	1608	5.168.637.184.000	608.944.992.085	4.755.983.671	225.558.477.337	-	134.979.742.482	-	-	-	6.142.876.379.575
308	KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN	Kab. Paser	1602	6.493.519.044.500	973.503.062.403	8.337.324.690	163.363.116.611	-	102.477.078.622	-	-	-	7.741.199.626.826
309	KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN	Kota Balikpapan	1652	1.205.424.189.000	383.482.151.200	2.160.634.738	266.299.784.674	-	-	7.893.239.000	-	-	1.865.259.998.612
310	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kota Bontang	1654	1.205.424.189.000	383.482.151.200	-	73.560.761.047	-	-	-	-	-	1.662.467.101.247
311	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kota Samarinda	1651	1.269.876.192.000	913.261.770.376	18.127.951.830	295.810.962.789	-	-	7.488.933.000	-	-	2.504.565.809.995
312	KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN	Kab. Penajam Paser Utara	1609	2.054.900.221.640	417.776.433.000	37.647.748.544	106.863.203.634	-	24.979.315.282	-	-	-	2.642.166.922.100
313	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kab. Mahakam Ulu	1613	2.054.900.221.640	417.776.433.000	-	25.266.576.381	-	33.518.953.410	-	-	-	2.531.462.184.431
314	SULAWESI UTARA	049	MANADO	Provinsi Sulawesi Utara	1700	194.121.229.700	1.476.108.406.878	162.840.443.745	412.771.837.100	-	-	15.023.051.000	-	-	2.260.864.968.423
315	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow	1703	137.017.018.600	601.101.630.660	23.090.426.003	125.427.755.973	-	140.733.095.144	-	-	-	1.027.369.926.380
316	SULAWESI UTARA	049	MANADO	Kab. Minahasa	1702	194.121.229.700	1.476.108.406.878	40.879.635.237	155.623.574.028	-	159.939.962.890	16.307.577.000	-	-	2.042.980.385.733
317	SULAWESI UTARA	083	TAHUNA	Kab. Sangihe	1704	19.275.106.700	533.321.257.088	11.170.738.433	103.451.076.273	-	93.562.090.772	7.694.206.000	-	-	768.474.475.266
318	SULAWESI UTARA	179	BITUNG	Kota Bitung	1753	32.950.397.800	352.529.247.320	15.175.685.845	78.192.585.444	-	-	7.871.735.000	-	-	486.719.651.409
319	SULAWESI UTARA	049	MANADO	Kota Manado	1751	32.950.397.800	352.529.247.320	25.089.516.833	156.505.950.040	-	-	8.127.733.000	-	-	575.202.844.993
320	SULAWESI UTARA	179	BITUNG	Kab. Kepulauan Talaud	1705	19.275.106.700	533.321.257.088	9.825.722.750	82.124.979.706	-	91.262.373.396	13.766.018.000	-	-	749.575.457.640
321	SULAWESI UTARA	049	MANADO	Kab. Minahasa Selatan	1706	19.275.106.700	533.321.257.088	83.511.566.130	114.388.713.015	6.076.476.360	98.556.373.474	-	-	-	855.129.492.767
322	SULAWESI UTARA	049	MANADO	Kota Tomohon	1752	32.950.397.800	352.529.247.320	16.346.559.693	57.829.969.892	-	-	20.386.711.000	-	-	480.042.885.705
323	SULAWESI UTARA	179	BITUNG	Kab. Minahasa Utara	1708	19.275.106.700	533.321.257.088	19.828.383.245	115.741.994.796	-	91.351.919.782	9.392.071.000	-	-	788.910.732.611
324	SULAWESI UTARA	083	TAHUNA	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1712	14.150.533.000	391.335.213.845	16.120.120.195	40.361.183.508	-	54.398.279.276	-	-	-	516.365.329.824
325	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	Kota Kotamobagu	1754	32.950.397.800	352.529.247.320	22.452.205.898	53.285.805.308	-	12.925.869.200	-	-	-	474.143.525.526
326	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1711	19.275.106.700	533.321.257.088	8.482.685.789	56.476.380.447	-	73.699.949.252	-	-	-	691.255.379.276
327	SULAWESI UTARA	049	MANADO	Kab. Minahasa Tenggara	1710	19.275.106.700	533.321.257.088	11.201.849.269	68.479.363.375	-	91.276.526.966	-	-	-	723.554.103.398
328	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1714	25.317.204.800	336.636.496.234	39.600.320.915	49.381.340.656	-	54.119.785.696	-	-	-	505.055.148.301
329	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1713	17.197.177.300	401.516.694.563	254.944.250.467	55.104.678.661	-	59.071.472.200	-	-	-	787.834.273.191
330	SULAWESI TENGAH	051	PALU	Provinsi Sulawesi Tengah	1800	676.764.878.900	1.577.551.219.918	34.559.384.455	499.893.411.800	-	-	5.675.543.000	-	-	2.794.444.438.073
331	SULAWESI TENGAH	053	LUWUK	Kab. Banggai	1804	844.575.968.600	932.185.661.637	16.558.075.630	218.074.604.807	-	201.306.060.080	-	-	-	2.212.700.370.754
332	SULAWESI TENGAH	053	LUWUK	Kab. Banggai Kepulauan	1807	56.331.549.100	453.907.110.559	28.145.817.477	105.563.611.497	-	88.956.293.206	-	-	-	732.904.381.839
333	SULAWESI TENGAH	082	TOLI - TOLI	Kab. Buol	1805	844.575.968.600	932.185.661.637	27.195.282.980	96.827.246.909	-	84.882.461.298	-	-	-	1.985.666.621.424
334	SULAWESI TENGAH	082	TOLI - TOLI	Kab. Tolitoli	1803	676.764.878.900	1.577.551.219.918	27.631.927.816	126.843.461.825	-	86.937.305.206	-	-	-	2.495.728.793.665
335	SULAWESI TENGAH	051	PALU	Kab. Donggala	1802	676.764.878.900	1.577.551.219.918	35.297.883.523	212.501.311.561	-	130.861.215.600	21.769.868.000	-	-	2.654.746.377.502

REALISASI TRANSFER KE DAERAH PER JENIS TRANSFER PER PEMDA

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Kode KPPN	KPPN	Daerah	Kode Pemda	Dana Transfer Umum		Dana Transfer Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
						Dana Bagi Hasil	DAU	DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
336	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	Kab. Morowali	1806	844.575.968.600	932.185.661.637	82.981.595.467	125.746.133.007	-	101.040.438.360	5.701.860.000	-	-	2.092.231.657.071
337	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	Kab. Poso	1801	676.764.878.900	1.577.551.219.918	36.714.361.263	135.549.677.658	-	97.948.655.200	7.331.024.000	-	-	2.531.859.816.939
338	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	Kota Palu	1851	420.285.814.400	548.599.037.518	30.899.541.724	183.156.188.127	-	-	13.689.347.000	-	-	1.196.629.928.769
339	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	Kab. Parigi Moutong	1808	78.252.880.700	719.379.559.043	50.697.770.361	250.568.744.932	-	187.222.714.240	-	-	-	1.286.121.669.276
340	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	Kab. Tojo Una Una	1809	78.252.880.700	719.379.559.043	35.153.216.144	130.783.436.692	-	98.986.435.332	14.575.435.000	-	-	1.077.130.962.911
341	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	Kab. Sigi	1812	60.490.418.300	633.239.525.265	16.091.875.982	165.293.798.266	-	119.034.921.766	21.514.135.000	-	-	1.015.664.674.579
342	SULAWESI TENGAH	053	L U W U K	Kab. Banggai Laut	1813	57.556.247.900	405.102.594.335	10.679.682.523	69.510.118.480	-	46.940.816.520	-	-	-	589.789.459.758
343	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	Kab. Morowali Utara	1814	420.285.814.400	548.599.037.518	12.652.565.086	100.299.532.712	-	96.664.470.828	14.937.448.000	-	-	1.193.438.868.544
344	SULAWESI SELATAN	136	MAKASSAR II	Provinsi Sulawesi Selatan	1900	300.027.073.700	2.798.106.765.003	128.137.556.874	1.373.765.359.300	-	-	37.539.390.000	-	-	4.637.576.144.877
345	SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG	Kab. Bantaeng	1912	13.018.623.600	632.163.039.000	5.174.537.708	133.396.840.164	-	35.898.245.554	14.573.145.000	-	-	834.224.431.026
346	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	Kab. Barru	1916	15.224.232.900	597.062.764.000	17.267.587.178	125.499.600.784	-	38.648.661.056	8.289.679.000	-	-	801.992.524.918
347	SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE	Kab. Bone	1905	9.952.892.500	800.918.172.992	26.811.715.734	421.217.469.616	-	254.472.115.842	16.769.302.000	-	-	1.530.141.668.684
348	SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG	Kab. Bulukumba	1911	13.018.623.600	632.163.039.000	107.336.824.554	224.479.906.684	-	96.314.431.860	-	-	-	1.073.312.825.698
349	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	Kab. Enrekang	1921	82.695.435.700	802.073.416.955	23.447.660.783	169.666.571.949	-	78.311.455.114	14.301.424.000	-	-	1.170.495.964.501
350	SULAWESI SELATAN	136	MAKASSAR II	Kab. Gowa	1902	9.952.892.500	800.918.172.992	36.180.958.912	319.553.149.985	-	119.149.574.620	20.396.076.000	-	-	1.306.150.825.009
351	SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG	Kab. Jeneponto	1913	13.018.623.600	632.163.039.000	17.000.927.584	185.986.312.052	-	72.837.241.200	-	-	-	921.006.143.436
352	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	Kab. Luwu	1909	9.952.892.500	800.918.172.992	15.230.218.810	226.171.539.754	-	143.332.173.416	7.164.565.000	-	-	1.202.769.562.472
353	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	Kab. Luwu Utara	1922	82.695.435.700	802.073.416.955	18.282.221.012	204.983.152.111	-	147.144.463.000	22.622.237.000	-	-	1.277.800.925.778
354	SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I	Kab. Maros	1907	9.952.892.500	800.918.172.992	39.289.157.392	204.867.945.407	-	74.033.800.860	6.006.958.000	-	-	1.135.068.927.151
355	SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I	Kab. Pangkajene Kepulauan	1918	15.767.449.000	697.264.856.386	30.262.922.353	242.072.998.201	-	61.443.151.650	7.111.125.000	-	-	1.053.922.502.590
356	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	Kota Palopo	1953	9.233.240.500	606.020.901.156	26.213.783.252	93.096.999.619	-	-	6.442.293.000	-	-	741.007.217.527
357	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	Kab. Luwu Timur	1924	82.695.435.700	802.073.416.955	44.187.310.780	157.353.111.671	-	108.683.053.000	6.943.228.000	-	-	1.201.935.556.106
358	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	Kab. Pinrang	1901	9.952.892.500	800.918.172.992	33.024.443.187	222.057.143.353	-	61.256.480.600	14.310.142.000	-	-	1.141.519.274.632
359	SULAWESI SELATAN	177	SINJAI	Kab. Sinjai	1910	13.018.623.600	632.163.039.000	29.799.307.346	166.046.498.493	-	52.604.789.952	13.491.464.000	-	-	907.123.722.391
360	SULAWESI SELATAN	155	BENTENG	Kab. Kepulauan Selayar	1914	15.224.232.900	597.062.764.000	17.690.785.769	138.440.224.458	-	58.366.159.320	6.852.700.000	-	-	833.636.866.447
361	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	Kab. Sidenreng Rappang	1917	15.767.449.000	697.264.856.386	12.327.107.560	165.830.678.784	-	53.909.784.566	12.647.349.000	-	-	957.747.225.296
362	SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE	Kab. Soppeng	1919	20.648.868.600	662.633.617.000	24.839.881.967	153.676.592.099	-	42.389.338.048	15.237.328.000	-	-	919.425.625.714
363	SULAWESI SELATAN	136	MAKASSAR II	Kab. Takalar	1915	15.224.232.900	597.062.764.000	8.423.598.807	174.053.798.961	-	76.268.700.000	14.085.609.000	-	-	885.118.703.668
364	SULAWESI SELATAN	170	M A K A L E	Kab. Tana Toraja	1906	9.952.892.500	800.918.172.992	33.774.242.150	171.809.074.563	-	72.011.299.100	-	-	-	1.088.465.681.305
365	SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE	Kab. Wajo	1903	9.952.892.500	800.918.172.992	62.025.039.489	211.792.106.379	-	102.310.435.840	21.163.892.000	-	-	1.208.162.539.200
366	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	Kota Parepare	1952	10.968.972.500	475.106.295.000	8.761.096.160	88.957.915.462	-	-	-	-	-	583.794.279.122
367	SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I	Kota Makassar	1951	82.695.435.700	802.073.416.955	6.813.716.035	525.798.878.033	-	-	7.950.814.000	-	-	1.425.332.260.723
368	SULAWESI SELATAN	170	M A K A L E	Kab. Toraja Utara	1925	82.695.435.700	802.073.416.955	17.409.268.577	186.592.404.428	-	69.259.137.286	7.048.676.000	-	-	1.165.078.338.946
369	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Provinsi Sulawesi Tenggara	2000	532.686.555.020	1.584.387.177.105	23.124.017.813	606.193.272.700	-	-	-	-	-	2.746.391.022.638
370	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kab. Buton	2002	29.212.523.500	434.393.464.458	40.624.076.626	107.027.360.655	-	57.471.210.886	-	-	-	668.728.636.125
371	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kab. Konawe	2009	32.200.992.500	687.157.643.734	20.036.190.903	218.298.432.994	-	201.069.171.820	7.890.854.000	-	-	1.166.653.285.951
372	SULAWESI TENGGARA	156	K O L A K A	Kab. Kolaka	2004	431.244.820.100	639.129.568.903	30.161.798.404	147.809.840.898	-	71.008.596.714	6.907.218.000	-	-	1.326.261.843.019
373	SULAWESI TENGGARA	157	R A H A	Kab. Muna	2003	29.212.523.500	434.393.464.458	28.388.027.110	220.241.098.399	-	100.772.176.000	-	-	-	813.007.289.467
374	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kota Kendari	2051	56.181.148.500	759.698.272.854	29.225.572.509	199.759.140.559	-	-	6.849.441.000	-	-	1.051.713.575.422
375	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kota Bau-bau	2052	27.619.220.500	549.193.753.577	10.621.387.267	101.340.474.698	-	-	6.873.937.000	-	-	695.648.773.042
376	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kab. Konawe Selatan	2005	32.200.992.500	687.157.643.734	46.242.166.890	209.048.695.475	-	224.134.866.226	7.558.760.000	-	-	1.206.343.124.825
377	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kab. Bombana	2006	32.200.992.500	687.157.643.734	29.830.325.000	130.902.374.966	-	89.395.437.808	-	-	-	969.486.774.008
378	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kab. Wakatobi	2007	32.200.992.500	687.157.643.734	16.384.824.224	96.021.389.721	-	58.111.958.000	-	-	-	889.876.808.179
379	SULAWESI TENGGARA	156	K O L A K A	Kab. Kolaka Utara	2008	32.200.992.500	687.157.643.734	32.405.691.002	98.299.168.566	-	97.268.345.380	7.189.743.000	-	-	954.521.584.182
380	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kab. Konawe Utara	2010	32.200.992.500	687.157.643.734	27.571.565.500	88.176.990.401	-	110.867.502.420	-	-	-	945.974.694.555
381	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kab. Buton Utara	2011	32.200.992.500	687.157.643.734	191.414.128.861	82.756.394.056	-	53.793.618.188	8.026.481.000	-	-	1.055.349.258.339
382	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kab. Konawe Kepulauan	2013	32.200.992.500	687.157.643.734	190.327.578.673	44.898.378.145	-	54.907.162.776	-	-	-	1.009.491.755.828
383	SULAWESI TENGGARA	156	K O L A K A	Kab. Kolaka Timur	2012	32.200.992.500	687.157.643.734	175.990.611.727	102.877.472.163	-	89.633.683.000	-	-	-	1.087.860.403.124
384	SULAWESI TENGGARA	157	R A H A	Kab. Muna Barat	2053	27.994.971.500	352.388.538.936	27.747.005.200	91.200.277.885	-	62.665.556.000	-	-	-	561.996.349.521
385	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kab. Buton Tengah	2055	66.806.161.000	374.191.726.067	190.857.448.212	98.223.168.433	-	45.139.250.760	-	-	-	775.217.754.472
386	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kab. Buton Selatan	2054	27.994.971.500	352.388.538.936	20.465.050.810	84.045.266.502	-	41.962.513.066	-	-	-	526.856.340.814
387	BALI	037	D E N P A S A R	Provinsi Bali	2200	243.280.507.500	1.404.207.938.860	84.007.989.018	663.596.745.857	-	-	12.978.586.000	-	-	2.408.071.767.235
388	BALI	037	D E N P A S A R	Kab. Badung	2207	21.836.188.000	561.942.890.959	3.220.983.324	262.437.955.207	-	50.871.076.400	31.467.944.000	-	-	931.777.037.890
389	BALI	154	AMLAPURA	Kab. Bangli	2206	21.836.188.000	561.942.890.959	13.197.776.504	116.883.949.460	-	61.560.309.692	30.352.227.000	-	-	805.773.341.615
390	BALI	132	SINGARAJA	Kab. Buleleng	2201	243.280.507.500	1.404.207.938.860	4.204.391.633	352.487.794.110	-	137.635.855.564	22.179.842.000	-	-	2.163.996.329.667
391	BALI	037	D E N P A S A R	Kab. Gianyar	2204	21.836.188.000	561.942.890.959	48.117.983.678	193.533.505.808	-	74.097.601.000	36.746.953.000	-	-	936.275.122.445
392	BALI	132	SINGARAJA	Kab. Jembrana	2202	21.534.264.100	599.430.641.933	1.292.927.617	132.222.667.085	-	44.758.813.000	14.658.841.000	-	-	813.898.154.735
393	BALI	154	AMLAPURA	Kab. Karangasem	2205	21.836.188.000	561.942.890.959	979.576.871	239.710.786.354	-	83.992.155.000	21.457.852.000	-	-	929.919.449.184
394	BALI	154	AMLAPURA	Kab. Klungkung	2203	21.836.188.000	561.942.890.959	18.913.347.670	118.546.010.521	-	49.574.837.000	29.265.985.000	-	-	800.079.259.150
395	BALI	037	D E N P A S A R	Kab. Tabanan	2208	26.704.527.200	854.244.473.355	50.524.873.013	218.728.033.987	-	122.816.563.000	29.915.665.000	-	-	1.302.934.135.555
396	BALI	037	D E N P A S A R	Kota Denpasar	2251	117.667.481.700	711.709.623.224	13.298.904.178	263.162.282.949	-	39.896.439.000	21.645.986.000	-	-	1.167.380.717.051
397	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2300	788.942.924.000	1.904.290.240.029	87.827.501.387	749.894.290.200	-	-	-	-	-	3.530.954.955.616
398	NUSA TENGGARA BARAT	071	B I M A	Kab. Bima	2304	188.719.992.300	1.609.207.206.000	38.820.786.519	305.342.183.685	-	154.098.266.180	-	-	-	2.296.188.434.684
399	NUSA TENGGARA BARAT	071	B I M A	Kab. Dompu	2306	476.361.701.600	1.040.988.448.773	21.382.923.864	159.062.698.811	-	70.492.696.000	-	-	-	1.768.288.469.048
400	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	Kab. Lombok Barat	2301	788.942.924.000	1.904.290.240.029	49.190.638.910	291.787.559.152	-	129.843.983.174	16.005.532.000	-	-	3.180.060.877.265
401	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	Kab. Lombok Tengah	2302	177.896.979.100	1.375.586.130.050	46.250.980.209	433.125.656.338	-	162.209.204.800	7.888.237.000	-	-	2.202.957.187.497
402	NUSA TENGGARA BARAT	169	S E L O N G	Kab. Lombok Timur	2303	188.719.992.300	1.609.207.206.000	114.099.400.946	560.189.305.775	6.636.733.920	273.431.183.800	7.819.426.000	-	-	2.760.103.248.741

REALISASI TRANSFER KE DAERAH PER JENIS TRANSFER PER PEMDA

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Kode KPPN	KPPN	Daerah	Kode Pemda	Dana Transfer Umum		Dana Transfer Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
						Dana Bagi Hasil	DAU	DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403	NUSA TENGGARA BARAT	101	SUMBAWA BESAR	Kab. Sumbawa	2305	476.361.701.600	1.040.988.448.773	39.460.818.745	309.119.767.169	14.965.655.500	150.779.408.000	-	-	-	2.031.675.799.787
404	NUSA TENGGARA BARAT	038	MATARAM	Kota Mataram	2351	187.938.496.300	760.077.445.000	31.555.731.244	181.056.111.609	-	-	15.109.191.000	-	-	1.175.736.975.153
405	NUSA TENGGARA BARAT	071	BIMA	Kota Bima	2352	101.488.420.500	513.647.698.000	173.553.238.098	102.304.487.120	-	-	7.477.005.000	-	-	898.470.848.718
406	NUSA TENGGARA BARAT	101	SUMBAWA BESAR	Kab. Sumbawa Barat	2307	476.361.701.600	1.040.988.448.773	5.943.939.229	106.444.460.217	-	49.739.841.000	13.112.385.000	-	-	1.692.590.775.819
407	NUSA TENGGARA BARAT	038	MATARAM	Kab. Lombok Utara	2308	476.361.701.600	1.040.988.448.773	29.782.053.601	117.018.757.496	-	55.858.418.400	25.597.621.000	-	-	1.745.607.000.870
408	NUSA TENGGARA TIMUR	039	KUPANG	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2400	51.946.190.900	1.991.159.749.528	50.956.396.248	955.828.438.450	-	-	6.700.771.000	-	-	3.056.591.546.126
409	NUSA TENGGARA TIMUR	039	KUPANG	Kab. Alor	2405	4.572.663.900	542.854.797.800	38.320.017.332	162.101.040.296	-	123.143.811.772	21.842.026.000	-	-	892.834.357.100
410	NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA	Kab. Belu	2402	4.572.663.900	542.854.797.800	24.721.135.669	129.389.076.005	-	53.497.279.390	15.381.360.000	-	-	770.416.312.764
411	NUSA TENGGARA TIMUR	040	ENDE	Kab. Ende	2408	7.134.334.140	776.574.112.880	23.635.998.907	164.545.170.423	-	178.119.387.592	-	-	-	1.150.009.003.942
412	NUSA TENGGARA TIMUR	174	LARANTUKA	Kab. Flores Timur	2407	4.361.232.000	695.523.867.811	44.388.819.471	169.983.544.681	-	149.215.003.900	-	-	-	1.063.472.467.863
413	NUSA TENGGARA TIMUR	039	KUPANG	Kab. Kupang	2401	51.946.190.900	1.991.159.749.528	15.562.109.872	220.573.973.047	-	107.356.925.206	13.632.475.000	-	-	2.400.231.423.553
414	NUSA TENGGARA TIMUR	174	LARANTUKA	Kab. Lembata	2413	3.969.093.700	656.189.107.991	30.910.664.940	103.803.683.712	-	99.230.425.956	24.105.142.000	-	-	918.208.118.299
415	NUSA TENGGARA TIMUR	111	RUTENG	Kab. Manggarai	2410	7.134.334.140	776.574.112.880	18.922.609.585	223.116.477.027	-	121.758.483.700	-	-	-	1.147.506.017.332
416	NUSA TENGGARA TIMUR	111	RUTENG	Kab. Ngada	2409	7.134.334.140	776.574.112.880	32.951.639.822	132.495.729.459	-	134.110.883.316	6.747.148.000	-	-	1.090.013.847.617
417	NUSA TENGGARA TIMUR	040	ENDE	Kab. Sikka	2406	4.572.663.900	542.854.797.800	41.157.330.685	210.282.521.293	-	119.437.317.404	7.699.143.000	-	-	926.003.774.082
418	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	Kab. Sumba Barat	2412	4.429.851.300	393.293.597.315	64.116.573.334	82.125.082.156	-	45.604.803.832	14.379.401.000	-	-	603.949.308.937
419	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	Kab. Sumba Timur	2411	7.134.334.140	776.574.112.880	30.031.380.220	177.217.628.121	-	89.651.039.260	32.828.969.000	-	-	1.113.437.463.621
420	NUSA TENGGARA TIMUR	039	KUPANG	Kab. Timor Tengah Selatan	2404	4.572.663.900	542.854.797.800	77.268.430.445	266.443.913.684	-	191.082.399.394	7.207.988.000	-	-	1.089.430.193.223
421	NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA	Kab. Timor Tengah Utara	2403	4.572.663.900	542.854.797.800	18.917.882.883	181.197.281.348	-	134.625.073.382	-	-	-	882.167.699.313
422	NUSA TENGGARA TIMUR	039	KUPANG	Kota Kupang	2451	4.877.201.800	406.955.739.739	13.000.755.466	185.621.814.308	-	-	8.858.401.000	-	-	619.313.912.313
423	NUSA TENGGARA TIMUR	039	KUPANG	Kab. Rote Ndao	2414	3.969.093.700	656.189.107.991	12.135.795.149	129.953.292.115	-	89.996.129.994	14.163.141.000	-	-	906.406.559.949
424	NUSA TENGGARA TIMUR	111	RUTENG	Kab. Manggarai Barat	2415	3.969.093.700	656.189.107.991	56.358.409.040	176.701.388.738	-	123.719.521.080	15.112.648.000	-	-	1.032.050.168.549
425	NUSA TENGGARA TIMUR	040	ENDE	Kab. Nagekeo	2417	3.969.093.700	656.189.107.991	9.123.958.310	106.260.589.923	-	67.174.039.842	-	-	-	842.716.789.766
426	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	Kab. Sumba Barat Daya	2419	4.877.201.800	406.955.739.739	48.982.077.089	198.399.281.148	-	162.180.505.064	7.651.512.000	-	-	829.046.316.840
427	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	Kab. Sumba Tengah	2418	3.388.226.000	333.332.542.361	48.566.299.405	80.215.073.096	-	49.898.385.740	14.068.155.000	-	-	529.468.681.602
428	NUSA TENGGARA TIMUR	111	RUTENG	Kab. Manggarai Timur	2420	4.877.201.800	406.955.739.739	106.170.556.914	209.477.043.987	-	132.718.697.332	13.820.780.000	-	-	874.020.019.772
429	NUSA TENGGARA TIMUR	039	KUPANG	Kab. Sabu Raijua	2421	4.877.201.800	406.955.739.739	33.419.477.085	84.138.908.179	-	53.045.291.336	15.028.755.000	-	-	597.465.373.139
430	NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA	Kab. Malaka	2422	4.877.201.800	406.955.739.739	52.856.882.792	126.749.665.665	-	87.483.673.224	-	-	-	678.923.163.220
431	MALUKU	061	AMBON	Provinsi Maluku	2100	26.928.319.500	386.097.091.085	62.957.640.141	401.094.008.500	-	-	-	-	-	877.077.059.226
432	MALUKU	104	SAUMLAKI	Kab. Kepulauan Tanimbar	2103	26.928.319.500	386.097.091.085	8.977.396.854	80.472.704.233	-	66.815.168.800	7.349.952.000	-	-	576.640.632.472
433	MALUKU	173	MASOHI	Kab. Maluku Tengah	2101	26.928.319.500	386.097.091.085	42.153.525.589	234.319.299.793	-	155.080.583.756	-	-	-	844.578.819.723
434	MALUKU	084	TUAL	Kab. Maluku Tenggara	2102	26.928.319.500	386.097.091.085	18.502.336.139	97.411.794.216	-	107.935.509.040	-	-	-	636.875.049.980
435	MALUKU	061	AMBON	Kab. Buru	2104	26.928.319.500	386.097.091.085	203.504.216.309	126.772.832.142	-	64.078.992.604	-	-	-	807.381.451.640
436	MALUKU	061	AMBON	Kota Ambon	2151	26.928.319.500	386.097.091.085	5.597.887.200	159.137.269.824	-	31.857.714.508	-	-	-	609.618.282.117
437	MALUKU	173	MASOHI	Kab. Seram Bagian Barat	2106	26.928.319.500	386.097.091.085	15.528.466.136	143.265.747.129	-	59.487.511.338	7.578.959.000	-	-	638.886.094.188
438	MALUKU	173	MASOHI	Kab. Seram Bagian Timur	2107	26.928.319.500	386.097.091.085	22.116.022.170	127.774.647.483	-	112.365.096.598	-	-	-	675.281.176.836
439	MALUKU	084	TUAL	Kab. Kepulauan Aru	2105	26.928.319.500	386.097.091.085	19.861.651.061	121.470.073.564	-	95.615.675.868	-	-	-	649.972.811.078
440	MALUKU	084	TUAL	Kota Tual	2152	26.928.319.500	386.097.091.085	39.065.228.378	53.283.975.813	-	20.379.468.910	-	-	-	525.754.083.686
441	MALUKU	104	SAUMLAKI	Kab. Maluku Barat Daya	2109	26.928.319.500	386.097.091.085	39.230.067.987	87.789.169.348	-	63.567.906.862	24.951.984.000	-	-	628.564.538.782
442	MALUKU	061	AMBON	Kab. Buru Selatan	2110	26.928.319.500	386.097.091.085	8.808.324.000	91.881.177.227	-	59.248.668.800	7.792.581.000	-	-	580.756.161.612
443	PAPUA	063	JAYAPURA	Provinsi Papua	2500	51.721.967.500	618.047.373.000	19.919.894.777	16.350.710.400	-	-	-	899.300.194.000	-	1.605.340.139.677
444	PAPUA	064	BIAK	Kab. Biak Numfor	2502	13.417.509.100	590.704.176.000	25.463.641.052	149.655.179.510	-	133.971.834.868	-	183.137.461.000	-	1.096.349.801.530
445	PAPUA	063	JAYAPURA	Kab. Jayapura	2501	51.721.967.500	618.047.373.000	43.101.954.689	158.404.984.008	-	106.911.399.566	-	217.182.672.000	-	1.195.370.350.763
446	PAPUA PEGUNUNGAN	113	WAMENA	Kab. Jayawijaya	3801	503.284.473.300	397.579.731.256	38.167.832.206	132.607.348.520	-	227.016.042.800	-	244.803.777.000	-	1.543.459.205.082
447	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	Kab. Merauke	3601	614.334.426.000	1.022.747.200.117	81.781.099.967	245.435.518.128	-	153.426.282.832	-	254.964.461.000	-	2.372.688.988.044
448	PAPUA TENGAH	141	TIMIKA	Kab. Mimika	3701	503.284.473.300	397.579.731.256	6.261.538.650	186.607.805.216	-	103.508.793.868	-	223.013.841.000	-	1.420.256.183.290
449	PAPUA TENGAH	085	NABIRE	Kab. Nabire	3702	503.284.473.300	397.579.731.256	85.162.148.324	172.225.090.989	-	52.205.728.200	14.235.394.000	213.795.468.000	-	1.438.488.034.069
450	PAPUA TENGAH	085	NABIRE	Kab. Paniai	3703	503.284.473.300	397.579.731.256	72.018.590.500	174.129.384.818	-	149.443.091.400	-	236.066.064.000	-	1.532.521.335.274
451	PAPUA TENGAH	113	WAMENA	Kab. Puncak Jaya	3704	503.284.473.300	397.579.731.256	-	40.518.258.600	-	242.565.748.400	6.984.355.000	234.613.386.000	-	1.425.545.952.556
452	PAPUA	138	SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	2504	11.225.101.400	540.457.140.000	21.854.487.573	116.211.982.217	-	80.894.821.666	-	146.614.191.000	-	917.257.723.856
453	PAPUA	063	JAYAPURA	Kota Jayapura	2551	11.581.368.000	517.556.227.000	21.525.412.704	188.184.674.072	-	11.903.393.000	9.043.181.000	177.861.285.000	-	937.655.540.776
454	PAPUA	063	JAYAPURA	Kab. Sarmi	2516	14.150.754.500	610.013.896.000	16.497.349.944	59.425.528.200	-	66.355.274.112	-	134.037.104.000	-	900.479.906.756
455	PAPUA	063	JAYAPURA	Kab. Keerom	2517	11.581.368.000	517.556.227.000	232.864.393.931	89.267.698.271	-	69.520.071.350	14.138.129.000	117.928.698.000	-	1.052.856.585.552
456	PAPUA PEGUNUNGAN	113	WAMENA	Kab. Yahukimo	3802	503.284.473.300	397.579.731.256	51.747.010.800	193.017.397.493	-	373.982.098.456	-	385.084.453.000	-	1.904.695.164.305
457	PAPUA PEGUNUNGAN	063	JAYAPURA	Kab. Pegunungan Bintang	3806	503.284.473.300	397.579.731.256	45.409.274.400	101.375.700.297	-	160.723.901.744	-	267.115.455.000	-	1.475.488.535.997
458	PAPUA PEGUNUNGAN	113	WAMENA	Kab. Tolikara	3803	503.284.473.300	397.579.731.256	21.251.034.000	93.433.070.419	-	305.832.101.200	-	285.121.688.000	-	1.606.502.098.175
459	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	Kab. Boven Digoel	3602	614.334.426.000	1.022.747.200.117	21.852.735.000	83.397.617.367	-	67.181.350.600	13.786.988.000	182.740.827.000	-	2.006.041.144.084
460	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	Kab. Mappi	3603	614.334.426.000	1.022.747.200.117	47.390.897.879	133.514.925.609	-	119.624.009.762	14.315.743.000	266.750.911.000	-	2.218.678.113.367
461	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	Kab. Asmat	3604	614.334.426.000	1.022.747.200.117	5.254.212.250	130.069.921.953	-	142.114.853.660	7.230.455.000	252.455.851.000	-	2.174.206.919.980
462	PAPUA	138	SERUI	Kab. Waropen	2523	11.581.368.000	517.556.227.000	10.029.146.405	53.132.808.987	-	58.942.708.020	-	112.410.325.000	-	763.652.583.412
463	PAPUA	064	BIAK	Kab. Supiori	2527	11.581.368.000	517.556.227.000	18.311.659.788	48.742.215.600	-	19.827.051.734	-	101.195.698.000	-	717.214.220.122
464	PAPUA	063	JAYAPURA	Kab. Mamberamo Raya	2520	11.581.368.000	517.556.227.000	5.258.410.000	53.894.112.726	-	49.790.788.048	-	200.587.824.000	-	838.668.729.774
465	PAPUA PEGUNUNGAN	113	WAMENA	Kab. Mamberamo Tengah	3804	503.284.473.300	397.579.731.256	23.181.375.783	32.956.966.083	-	39.524.728.000	-	142.287.176.000	-	1.138.814.450.422
466	PAPUA PEGUNUNGAN	113	WAMENA	Kab. Yalimo	3805	503.284.473.300	397.579.731.256	17.128.161.178	49.117.900.001	-	153.608.979.400	-	168.295.728.000	-	1.289.014.973.135
467	PAPUA PEGUNUNGAN	113	WAMENA	Kab. Lanny Jaya	3807	503.284.473.300	397.579.731.256	6.950.585.000	108.980.513.996	-	221.837.689.176	-	202.842.227.000	-	1.441.475.219.728
468	PAPUA PEGUNUNGAN	113	WAMENA	Kab. Nduga	3808	503.284.473.300	397.579.731.256	24.445.629.000	37.796.144.800	-	133.426.684.400	-	134.607.644.000	-	1.231.140.306.756
469	PAPUA TENGAH	085	NABIRE	Kab. Dogiyai	3706	503.284.473.300	397.579.731.256	18.411.836.575	91.898.971.400	-	56.440.033.920	-	155.993.577.000	-	1.223.608.623.451

REALISASI TRANSFER KE DAERAH PER JENIS TRANSFER PER PEMDA

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Kode KPPN	KPPN	Daerah	Kode Pemda	Dana Transfer Umum		Dana Transfer Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
						Dana Bagi Hasil	DAU	DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
470	PAPUA TENGAH	141	TIMIKA	Kab. Puncak	3705	503.284.473.300	397.579.731.256	11.580.075.264	30.242.793.042	-	154.743.813.800	6.963.420.000	292.612.833.000	-	1.397.007.139.662
471	PAPUA TENGAH	085	NABIRE	Kab. Intan Jaya	3707	503.284.473.300	397.579.731.256	54.600.902.648	28.074.209.325	-	86.031.345.400	-	145.464.430.000	-	1.215.035.091.929
472	PAPUA TENGAH	085	NABIRE	Kab. Deiyai	3708	503.284.473.300	397.579.731.256	11.198.132.000	69.617.227.000	-	40.731.635.990	7.221.581.000	125.023.665.000	-	1.154.656.445.546
473	MALUKU UTARA	062	TERNATE	Provinsi Maluku Utara	2800	11.581.368.000	517.556.227.000	36.325.061.193	258.001.344.200	-	-	-	-	-	823.464.000.393
474	MALUKU UTARA	062	TERNATE	Kab. Halmahera Tengah	2802	11.581.368.000	517.556.227.000	21.354.618.656	53.664.597.663	-	50.609.385.022	-	-	-	654.766.196.341
475	MALUKU UTARA	062	TERNATE	Kota Ternate	2851	95.716.290.100	304.142.600.000	6.569.269.247	108.632.635.896	-	-	-	-	-	515.060.795.243
476	MALUKU UTARA	062	TERNATE	Kab. Halmahera Barat	2807	73.319.433.000	462.354.560.698	62.486.105.767	119.641.939.257	-	104.644.549.808	-	-	-	822.446.588.530
477	MALUKU UTARA	112	TOBELO	Kab. Halmahera Timur	2806	73.319.433.000	462.354.560.698	12.447.261.655	73.812.346.495	-	77.910.564.570	-	-	-	699.844.166.418
478	MALUKU UTARA	062	TERNATE	Kab. Halmahera Selatan	2804	535.215.267.600	720.599.754.489	43.564.982.711	173.340.239.982	-	194.745.747.856	-	-	-	1.667.465.992.638
479	MALUKU UTARA	112	TOBELO	Kab. Halmahera Utara	2803	11.581.368.000	517.556.227.000	43.298.654.147	114.770.978.221	-	116.495.321.532	-	-	-	803.702.548.900
480	MALUKU UTARA	062	TERNATE	Kab. Kepulauan Sula	2805	73.319.433.000	462.354.560.698	208.050.119.303	77.514.384.403	-	65.497.128.870	7.424.986.000	-	-	894.160.612.274
481	MALUKU UTARA	062	TERNATE	Kota Tidore Kepulauan	2853	95.716.290.100	304.142.600.000	51.404.948.300	79.401.377.277	-	36.085.514.300	6.512.751.000	-	-	573.263.480.977
482	MALUKU UTARA	112	TOBELO	Kab. Pulau Morotai	2808	66.616.573.300	393.378.083.373	40.246.682.378	51.929.913.596	-	64.886.973.240	-	-	-	617.058.225.887
483	MALUKU UTARA	062	TERNATE	Kab. Pulau Taliabu	2809	95.716.290.100	304.142.600.000	-	73.685.292.200	-	44.310.559.730	-	-	-	517.854.742.030
484	BANTEN	020	SERANG	Provinsi Banten	2900	954.815.411.100	1.146.722.561.312	119.572.322.275	1.147.942.699.100	-	-	6.489.293.000	-	-	3.375.542.286.787
485	BANTEN	161	RANGKASBITUNG	Kab. Lebak	2903	127.652.313.800	1.160.343.768.000	22.474.012.574	557.388.846.900	8.029.075.086	353.136.261.000	-	-	-	2.229.024.277.360
486	BANTEN	161	RANGKASBITUNG	Kab. Pandeglang	2902	84.981.095.000	1.218.779.621.716	15.274.391.935	563.964.036.275	-	308.533.218.006	-	-	-	2.191.532.362.932
487	BANTEN	020	SERANG	Kab. Serang	2901	954.815.411.100	1.146.722.561.312	54.258.654.188	557.920.897.923	-	322.559.644.612	13.931.487.000	-	-	3.050.208.656.135
488	BANTEN	127	TANGERANG	Kab. Tangerang	2904	369.520.257.600	1.501.214.750.000	11.990.520.000	907.358.374.362	-	310.572.297.006	21.556.669.000	-	-	3.122.212.867.968
489	BANTEN	020	SERANG	Kota Cilegon	2952	402.649.195.600	1.063.680.299.000	11.934.647.531	185.512.008.421	-	-	-	-	-	1.663.776.150.552
490	BANTEN	127	TANGERANG	Kota Tangerang	2951	402.649.195.600	1.063.680.299.000	14.305.991.000	521.658.525.677	-	-	7.136.621.000	-	-	2.009.430.632.277
491	BANTEN	020	SERANG	Kota Serang	2953	95.474.568.200	669.414.847.000	13.079.042.470	267.851.699.067	-	-	12.306.243.000	-	-	1.058.126.399.737
492	BANTEN	127	TANGERANG	Kota Tangerang Selatan	2954	296.080.894.500	729.628.055.000	12.569.190.839	402.045.480.171	-	-	20.079.195.000	-	-	1.460.402.815.510
493	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Provinsi Bangka Belitung	3000	121.420.909.680	968.906.920.572	23.059.908.406	207.387.859.700	-	-	-	-	-	1.320.775.598.358
494	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka	3002	38.480.939.300	479.100.413.809	19.917.522.888	145.736.201.569	-	51.308.940.540	15.785.588.000	-	-	750.329.606.106
495	BANGKA BELITUNG	107	TANJUNG PANDAN	Kab. Belitung	3001	38.480.939.300	479.100.413.809	8.848.258.410	92.617.625.074	-	40.620.586.800	20.586.869.000	-	-	680.254.692.393
496	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Kota Pangkal Pinang	3051	41.991.581.200	431.212.873.254	61.351.629.955	99.058.732.450	-	-	6.985.539.000	-	-	640.600.355.859
497	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Selatan	3005	105.881.101.000	444.245.584.477	13.615.698.250	111.611.573.982	-	49.863.291.000	14.135.124.000	-	-	739.352.372.709
498	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Tengah	3004	105.881.101.000	444.245.584.477	39.641.432.690	102.168.851.325	-	50.211.261.800	-	-	-	742.148.231.292
499	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Barat	3003	105.881.101.000	444.245.584.477	104.075.633.363	110.996.387.360	-	51.548.870.060	-	-	-	816.747.576.260
500	BANGKA BELITUNG	107	TANJUNG PANDAN	Kab. Belitung Timur	3006	41.991.581.200	431.212.873.254	12.130.398.169	79.775.377.137	-	38.509.327.190	14.324.031.000	-	-	617.943.587.950
501	GORONTALO	050	GORONTALO	Provinsi Gorontalo	3100	33.735.306.800	1.024.183.392.000	15.391.127.525	212.957.194.600	-	-	6.703.030.000	-	-	1.292.970.050.925
502	GORONTALO	180	MARISA	Kab. Boalemo	3102	10.291.391.700	760.995.692.000	51.301.201.412	107.970.472.063	-	66.433.604.824	8.830.786.000	-	-	1.005.823.147.999
503	GORONTALO	050	GORONTALO	Kab. Gorontalo	3101	10.291.391.700	760.995.692.000	57.956.108.951	205.615.893.045	3.387.921.998	137.778.796.386	7.805.609.000	-	-	1.183.831.413.080
504	GORONTALO	050	GORONTALO	Kota Gorontalo	3151	7.475.306.000	407.199.045.231	4.740.378.662	100.481.438.092	-	-	17.196.936.000	-	-	537.093.103.985
505	GORONTALO	180	MARISA	Kab. Pohuwato	3103	10.736.075.000	520.497.600.218	53.167.597.014	105.690.957.845	-	79.434.191.428	7.807.020.000	-	-	777.333.441.505
506	GORONTALO	050	GORONTALO	Kab. Bone Bolango	3104	13.544.620.900	511.051.287.432	42.311.483.465	115.915.691.696	-	106.293.705.800	15.151.916.000	-	-	804.268.705.293
507	GORONTALO	050	GORONTALO	Kab. Gorontalo Utara	3107	7.475.306.000	407.199.045.231	26.788.906.155	99.285.304.506	-	86.765.804.432	7.397.245.000	-	-	634.911.611.324
508	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Provinsi Kepulauan Riau	3200	294.569.205.000	1.199.592.340.581	88.988.492.951	367.060.410.690	-	-	23.236.157.000	-	-	1.973.446.606.222
509	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Kab. Natuna	3203	209.605.964.200	407.035.359.504	18.847.792.362	72.451.686.160	-	51.559.789.594	13.909.893.000	-	-	773.410.484.820
510	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Kab. Kepulauan Anambas	3205	139.864.338.200	351.868.020.929	17.791.877.132	60.074.282.582	-	37.399.529.272	7.307.880.000	-	-	614.305.928.115
511	KEPULAUAN RIAU	137	BATAM	Kab. Karimun	3202	294.569.205.000	1.199.592.340.581	7.818.514.147	144.636.287.513	-	36.202.677.740	16.063.449.000	-	-	1.698.882.473.981
512	KEPULAUAN RIAU	137	BATAM	Kota Batam	3251	206.216.959.100	900.724.458.548	18.123.066.818	446.047.735.695	-	-	15.396.527.000	-	-	1.586.508.747.161
513	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Kota Tanjung Pinang	3252	61.066.637.600	497.855.534.101	16.020.346.897	102.266.567.716	-	-	7.137.634.000	-	-	684.346.720.314
514	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Kab. Lingga	3204	209.605.964.200	407.035.359.504	10.617.983.501	101.782.395.676	-	53.356.582.504	7.349.455.000	-	-	789.747.740.385
515	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Kab. Bintan	3201	294.569.205.000	1.199.592.340.581	85.797.278.489	109.188.245.606	-	30.676.901.580	27.132.990.000	-	-	1.746.956.961.256
516	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Provinsi Papua Barat	3300	1.609.304.103.000	474.239.928.000	2.079.824.893	6.411.051.900	-	-	-	687.006.936.000	-	2.779.041.843.793
517	PAPUA BARAT	067	FAK - FAK	Kab. Fak Fak	3303	64.861.709.500	592.112.214.000	38.952.934.001	102.679.150.937	-	94.421.464.072	-	133.785.001.000	-	1.026.812.473.510
518	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Kab. Manokwari	3301	64.861.709.500	592.112.214.000	20.385.657.581	144.340.184.054	-	96.614.740.814	-	133.271.439.000	-	1.051.585.944.949
519	PAPUA BARAT DAYA	066	SORONG	Kab. Sorong	3902	503.284.473.300	397.579.731.256	43.821.307.721	161.263.529.010	-	133.827.870.758	-	184.450.889.000	-	1.424.227.801.045
520	PAPUA BARAT DAYA	066	SORONG	Kota Sorong	3951	503.284.473.300	397.579.731.256	49.374.109.835	131.826.109.193	-	-	-	147.073.723.000	-	1.229.138.146.584
521	PAPUA BARAT DAYA	066	SORONG	Kab. Raja Ampat	3904	503.284.473.300	397.579.731.256	207.931.522.872	91.440.231.855	-	78.515.557.766	-	269.766.347.000	-	1.548.517.864.049
522	PAPUA BARAT DAYA	066	SORONG	Kab. Sorong Selatan	3903	503.284.473.300	397.579.731.256	22.946.212.327	106.331.297.388	-	64.517.559.000	7.294.573.000	162.876.928.000	-	1.264.830.774.271
523	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Kab. Teluk Bintuni	3306	64.861.709.500	592.112.214.000	164.500.000	81.024.305.359	-	106.649.626.454	3.766.781.500	156.532.059.000	-	1.005.111.195.813
524	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Kab. Teluk Wondama	3307	64.861.709.500	592.112.214.000	16.359.062.981	48.433.415.705	-	55.963.466.122	7.465.202.000	141.065.472.000	-	926.260.542.308
525	PAPUA BARAT	067	FAK - FAK	Kab. Kaimana	3308	64.861.709.500	592.112.214.000	17.576.394.500	77.145.469.787	-	56.241.506.550	-	70.430.609.000	-	878.367.903.337
526	PAPUA BARAT DAYA	066	SORONG	Kab. Maybrat	3906	503.284.473.300	397.579.731.256	17.830.011.000	62.273.275.666	-	129.702.276.076	-	193.052.796.000	-	1.303.722.563.298
527	PAPUA BARAT DAYA	066	SORONG	Kab. Tambrauw	3905	503.284.473.300	397.579.731.256	28.640.569.232	53.629.392.794	-	117.978.382.890	-	229.749.149.000	-	1.330.861.698.472
528	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Kab. Manokwari Selatan	3312	80.869.481.800	316.949.999.299	12.314.861.850	39.339.093.512	-	32.258.528.690	7.395.262.000	103.756.482.000	-	592.883.709.151
529	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Kab. Pegunungan Arfak	3311	80.869.481.800	316.949.999.299	2.473.839.966	45.195.684.516	-	101.170.077.766	6.983.017.000	136.217.028.000	-	689.859.128.347
530	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	Provinsi Sulawesi Barat	3400	21.059.193.300	1.045.599.290.302	13.751.462.018	232.480.863.033	-	-	6.554.777.000	-	-	1.319.445.585.653
531	SULAWESI BARAT	059	MAJENE	Kab. Majene	3401	5.605.326.300	544.377.621.460	24.111.344.842	146.896.901.961	-	47.727.678.768	-	-	-	768.718.873.331
532	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	Kab. Mamuju	3402	18.365.853.500	666.526.036.777	61.630.973.738	179.202.363.655	-	79.493.477.356	6.922.089.000	-	-	1.012.140.794.026
533	SULAWESI BARAT	059	MAJENE	Kab. Polewali Mandar	3404	7.834.453.500	877.060.462.766	49.451.827.977	242.300.751.779	-	95.147.473.614	-	-	-	1.271.794.969.636
534	SULAWESI BARAT	059	MAJENE	Kab. Mamasa	3405	11.646.537.000	455.946.169.797	40.919.149.832	140.208.950.246	-	124.018.255.704	-	-	-	772.739.062.579
535	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	Kab. Pasangkayu	3403	18.365.853.500	666.526.036.777	64.242.799.177	93.654.971.588	-	50.407.693.232	-	-	-	893.197.354.274
536	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	Kab. Mamuju Tengah	3406	7.520.807.600	368.880.985.984	32.134.009.341	88.626.087.571	-	47.980.745.620	-	-	-	545.142.636.116

REALISASI TRANSFER KE DAERAH PER JENIS TRANSFER PER PEMDA

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Kode KPPN	KPPN	Daerah	Kode Pemda	Dana Transfer Umum		Dana Transfer Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
						Dana Bagi Hasil	DAU	DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
537	KALIMANTAN UTARA	185	TANJUNG SELOR	Provinsi Kalimantan Utara	3500	614.334.426.000	1.022.747.200.117	10.015.353.200	128.854.828.500	-	-	-	-	-	1.775.951.807.817
538	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	Provinsi Papua Tengah	3700	1.015.521.592.800	469.271.828.000	-	7.353.285.700	-	-	-	859.247.866.000	-	2.351.394.572.500
539	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	Provinsi Papua Selatan	3600	614.334.426.000	1.022.747.200.117	-	3.276.044.000	-	-	-	671.039.219.000	-	2.311.396.889.117
540	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	Provinsi Papua Pegunungan	3800	503.284.473.300	397.579.731.256	-	4.266.228.000	-	-	-	1.204.628.727.000	-	2.109.759.159.556
541	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	Provinsi Papua Barat Daya	3900	503.284.473.300	397.579.731.256	-	4.508.311.702	-	-	-	508.701.356.000	-	1.414.073.872.258
542	KALIMANTAN UTARA	185	TANJUNG SELOR	Kab. Bulungan	3501	614.334.426.000	1.022.747.200.117	10.367.730.416	102.190.326.618	-	58.424.661.888	7.704.515.000	-	-	1.815.768.860.039
543	KALIMANTAN UTARA	185	TANJUNG SELOR	Kab. Malinau	3503	614.334.426.000	1.022.747.200.117	6.238.928.742	80.530.704.134	-	99.581.782.976	-	-	-	1.823.433.041.969
544	KALIMANTAN UTARA	152	NUNUKAN	Kab. Nunukan	3502	614.334.426.000	1.022.747.200.117	5.462.803.294	130.787.259.811	-	156.830.668.840	7.233.684.000	-	-	1.937.396.042.062
545	KALIMANTAN UTARA	048	T A R A K A N	Kota Tarakan	3551	614.334.426.000	1.022.747.200.117	568.175.976	106.948.362.602	-	-	-	-	-	1.744.598.164.695
546	KALIMANTAN UTARA	048	T A R A K A N	Kab. Tana Tidung	3504	614.334.426.000	1.022.747.200.117	13.058.305.370	26.546.668.436	-	26.568.977.400	6.996.098.000	-	-	1.710.251.675.323
Jumlah						144.177.734.038.800	309.934.520.474.932	17.610.554.270.313	145.070.625.814.078	251.073.243.510	61.645.153.758.700	4.274.535.998.500	17.006.143.580.000	1.000.000.000.000	700.970.341.178.833

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN		Daerah	Kode Pemda	Tahun 2025					
							Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
							DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ACEH	001	BANDA ACEH	990015	Provinsi Aceh	0600	145.790.060.000	182.012.218.000	327.802.278.000	145.790.060.000	182.012.218.000	327.802.278.000
2	ACEH	003	MEULABOH	990078	Kab. Aceh Barat	0606	35.443.530.000	85.038.166.000	120.481.696.000	35.443.530.000	85.038.166.000	120.481.696.000
3	ACEH	001	BANDA ACEH	990022	Kab. Aceh Besar	0601	17.198.853.000	7.270.595.000	24.469.448.000	17.198.853.000	7.270.595.000	24.469.448.000
4	ACEH	074	TAPAKTUAN	990061	Kab. Aceh Selatan	0605	6.945.237.000	9.729.947.000	16.675.184.000	6.945.237.000	9.729.947.000	16.675.184.000
5	ACEH	074	TAPAKTUAN	980007	Kab. Aceh Singkil	0610	13.005.211.000	9.687.783.000	22.692.994.000	13.005.211.000	9.687.783.000	22.692.994.000
6	ACEH	122	TAKENGON	990082	Kab. Aceh Tengah	0607	11.155.165.000	17.798.061.000	28.953.226.000	11.155.165.000	17.798.061.000	28.953.226.000
7	ACEH	105	KUTACANE	990099	Kab. Aceh Tenggara	0608	6.197.185.000	6.861.595.000	13.058.780.000	6.197.185.000	6.861.595.000	13.058.780.000
8	ACEH	002	L A N G S A	990057	Kab. Aceh Timur	0604	53.592.538.000	18.239.642.000	71.832.180.000	53.592.538.000	18.239.642.000	71.832.180.000
9	ACEH	089	LHOKSEUMAWE	990040	Kab. Aceh Utara	0603	53.790.582.000	14.597.083.000	68.387.665.000	53.790.582.000	14.597.083.000	68.387.665.000
10	ACEH	089	LHOKSEUMAWE	980053	Kab. Bireuen	0611	9.268.514.000	7.530.862.000	16.799.376.000	9.268.514.000	7.530.862.000	16.799.376.000
11	ACEH	001	BANDA ACEH	990036	Kab. Pidie	0602	9.142.527.000	13.533.269.000	22.675.796.000	9.142.527.000	13.533.269.000	22.675.796.000
12	ACEH	003	MEULABOH	993372	Kab. Simeulue	0609	5.260.935.000	8.102.798.000	13.363.733.000	2.978.209.000	8.102.798.000	11.081.007.000
13	ACEH	001	BANDA ACEH	990104	Kota Banda Aceh	0651	38.288.078.000	5.329.303.000	43.617.381.000	34.563.027.900	5.329.303.000	39.892.330.900
14	ACEH	001	BANDA ACEH	990111	Kota Sabang	0652	5.295.998.000	5.315.032.000	10.611.030.000	3.025.897.500	5.315.032.000	8.340.929.500
15	ACEH	002	L A N G S A	994672	Kota Langsa	0653	11.570.770.000	8.618.482.000	20.189.252.000	11.570.770.000	8.618.482.000	20.189.252.000
16	ACEH	089	LHOKSEUMAWE	994686	Kota Lhokseumawe	0654	14.685.393.000	7.318.821.000	22.004.214.000	14.685.393.000	7.318.821.000	22.004.214.000
17	ACEH	105	KUTACANE	997430	Kab. Gayo Lues	0613	7.640.677.000	13.177.037.000	20.817.714.000	7.640.677.000	13.177.037.000	20.817.714.000
18	ACEH	074	TAPAKTUAN	997426	Kab. Aceh Barat Daya	0612	7.270.847.000	14.832.911.000	22.103.758.000	4.047.710.860	14.832.911.000	18.880.621.860
19	ACEH	003	MEULABOH	997447	Kab. Aceh Jaya	0614	6.356.087.000	15.034.996.000	21.391.083.000	5.847.277.760	15.034.996.000	20.882.273.760
20	ACEH	003	MEULABOH	997451	Kab. Nagan Raya	0615	26.589.195.000	57.295.064.000	83.884.259.000	26.589.195.000	57.295.064.000	83.884.259.000
21	ACEH	002	L A N G S A	997468	Kab. Aceh Tamiang	0616	91.296.643.000	13.571.097.000	104.867.740.000	91.296.643.000	13.571.097.000	104.867.740.000
22	ACEH	122	TAKENGON	987532	Kab. Bener Meriah	0617	6.481.044.000	7.695.888.000	14.176.932.000	6.481.044.000	7.695.888.000	14.176.932.000
23	ACEH	001	BANDA ACEH	963311	Kab. Pidie Jaya	0618	6.069.954.000	6.699.844.000	12.769.798.000	6.069.954.000	6.699.844.000	12.769.798.000
24	ACEH	074	TAPAKTUAN	963327	Kota Subulussalam	0656	7.274.298.000	7.327.716.000	14.602.014.000	7.274.298.000	7.327.716.000	14.602.014.000
25	SUMATERA UTARA	004	M E D A N I	990125	Provinsi Sumatera Utara	0700	500.709.817.000	145.183.990.000	645.893.807.000	500.709.817.000	145.183.990.000	645.893.807.000
26	SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN	990221	Kab. Asahan	0710	73.762.472.000	11.630.274.000	85.392.746.000	66.911.787.900	11.630.274.000	78.542.061.900
27	SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG	990192	Kab. Dairi	0707	13.443.479.000	8.565.966.000	22.009.445.000	12.256.994.900	8.565.966.000	20.822.960.900
28	SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI	990132	Kab. Deli Serdang	0701	82.796.765.000	8.578.335.000	91.375.100.000	82.796.765.000	8.578.335.000	91.375.100.000
29	SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG	990146	Kab. Karo	0702	16.818.159.000	7.927.656.000	24.745.815.000	15.319.870.200	7.927.656.000	23.247.526.200
30	SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT	990188	Kab. Labuhanbatu	0706	48.425.048.000	26.553.712.000	74.978.760.000	34.864.543.100	26.382.588.600	61.247.131.700
31	SUMATERA UTARA	123	M E D A N II	990150	Kab. Langkat	0703	135.185.577.000	12.803.250.000	147.988.827.000	135.185.577.000	12.803.250.000	147.988.827.000
32	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	941915	Kab. Mandailing Natal	0713	55.345.366.000	34.275.619.000	89.620.985.000	55.345.366.000	34.275.619.000	89.620.985.000
33	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	990235	Kab. Nias	0711	11.653.075.000	6.520.715.000	18.173.790.000	10.755.867.900	6.520.715.000	17.276.582.900
34	SUMATERA UTARA	005	PEMATANG SIANTAR	990171	Kab. Simalungun	0705	69.742.328.000	10.400.131.000	80.142.459.000	63.398.388.800	10.400.131.000	73.798.519.800
35	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	990214	Kab. Tapanuli Selatan	0709	67.738.152.000	209.201.105.000	276.939.257.000	67.738.152.000	209.201.105.000	276.939.257.000
36	SUMATERA UTARA	106	SIBOLGA	990167	Kab. Tapanuli Tengah	0704	18.997.050.000	20.285.895.000	39.282.945.000	18.997.050.000	20.285.895.000	39.282.945.000
37	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	990200	Kab. Tapanuli Utara	0708	55.309.511.000	19.269.946.000	74.579.457.000	55.309.511.000	19.269.946.000	74.579.457.000
38	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	941922	Kab. Toba Samosir	0717	17.018.382.000	7.234.975.000	24.253.357.000	15.547.239.800	7.234.975.000	22.782.214.800
39	SUMATERA UTARA	123	M E D A N II	990260	Kota Binjai	0753	19.351.631.000	7.779.861.000	27.131.492.000	19.351.631.000	7.779.861.000	27.131.492.000
40	SUMATERA UTARA	004	M E D A N I	990242	Kota Medan	0751	272.158.246.000	5.859.669.000	278.017.915.000	272.158.246.000	5.859.669.000	278.017.915.000
41	SUMATERA UTARA	005	PEMATANG SIANTAR	990277	Kota Pematang Siantar	0754	28.967.635.000	5.920.182.000	34.887.817.000	18.460.031.000	5.920.182.000	24.380.213.000
42	SUMATERA UTARA	106	SIBOLGA	990298	Kota Sibolga	0756	14.270.422.000	5.847.331.000	20.117.753.000	14.270.422.000	5.847.331.000	20.117.753.000
43	SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN	990281	Kota Tanjung Balai	0755	12.882.021.000	6.079.253.000	18.961.274.000	11.803.285.100	6.079.253.000	17.882.538.100
44	SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI	990256	Kota Tebing Tinggi	0752	14.229.878.000	6.039.899.000	20.269.777.000	14.229.878.000	6.039.899.000	20.269.777.000
45	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	994690	Kota Padang Sidempuan	0757	16.852.776.000	18.186.935.000	35.039.711.000	16.852.776.000	18.186.935.000	35.039.711.000
46	SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG	998147	Kab. Pakpak Bharat	0715	10.383.434.000	7.016.888.000	17.400.322.000	10.383.434.000	7.016.888.000	17.400.322.000
47	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	998130	Kab. Nias Selatan	0714	13.746.005.000	10.179.579.000	23.925.584.000	13.746.005.000	10.179.579.000	23.925.584.000
48	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	998151	Kab. Humbang Hasundutan	0716	13.234.443.000	7.709.406.000	20.943.849.000	13.234.443.000	7.709.406.000	20.943.849.000
49	SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI	987418	Kab. Serdang Bedagai	0720	50.552.335.000	9.564.825.000	60.117.160.000	50.552.335.000	9.564.825.000	60.117.160.000
50	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	987528	Kab. Samosir	0712	12.382.572.000	6.512.562.000	18.895.134.000	11.381.636.300	6.512.562.000	17.894.198.300
51	SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN	963333	Kab. Batu Bara	0721	34.660.881.000	8.722.491.000	43.383.372.000	34.660.881.000	8.722.491.000	43.383.372.000
52	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	975013	Kab. Padang Lawas	0722	32.933.289.000	22.029.569.000	54.962.858.000	29.905.911.700	22.029.569.000	51.935.480.700
53	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	975163	Kab. Padang Lawas Utara	0723	28.544.775.000	36.639.252.000	65.184.027.000	25.966.907.700	36.639.252.000	62.606.159.700
54	SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT	977267	Kab. Labuhanbatu Selatan	0724	74.324.684.000	28.132.041.000	102.456.725.000	53.706.374.000	28.132.041.000	81.838.415.000
55	SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT	977117	Kab. Labuhanbatu Utara	0725	37.549.604.000	21.828.420.000	59.378.024.000	26.957.432.600	21.828.420.000	48.785.852.600
56	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	978536	Kab. Nias Utara	0726	11.214.004.000	5.839.859.000	17.053.863.000	10.313.220.300	5.839.859.000	16.153.079.300
57	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	978397	Kab. Nias Barat	0727	11.834.096.000	6.409.134.000	18.243.230.000	10.894.230.700	6.409.134.000	17.303.364.700
58	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	978401	Kota Gunungsitoli	0761	14.031.675.000	4.928.012.000	18.959.687.000	12.898.328.700	4.928.012.000	17.826.340.700
59	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	990303	Provinsi Sumatera Barat	0800	141.976.743.000	32.401.445.000	174.378.188.000	141.976.743.000	32.401.445.000	174.378.188.000
60	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	990331	Kab. Lima Puluh Kota	0803	9.193.350.000	19.436.190.000	28.629.540.000	9.193.350.000	19.436.190.000	28.629.540.000
61	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	990310	Kab. Agam	0801	14.595.966.000	5.225.535.000	19.821.501.000	14.595.966.000	5.225.535.000	19.821.501.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN		Daerah	Kode Pemda	Tahun 2025					
							Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
							DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	0809	7.884.208.000	6.811.320.000	14.695.528.000	7.884.208.000	6.811.320.000	14.695.528.000
63	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	990352	Kab. Padang Pariaman	0805	9.265.458.000	3.770.124.000	13.035.582.000	9.265.458.000	3.770.124.000	13.035.582.000
64	SUMATERA BARAT	091	LUBUK SIKAPING	990324	Kab. Pasaman	0802	7.255.185.000	5.758.001.000	13.013.186.000	7.255.185.000	5.758.001.000	13.013.186.000
65	SUMATERA BARAT	142	P A I N A N	990366	Kab. Pesisir Selatan	0806	18.972.851.000	8.281.506.000	27.254.357.000	18.972.851.000	8.281.506.000	27.254.357.000
66	SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG	990387	Kab. Sijunjung	0813	9.215.237.000	20.790.011.000	30.005.248.000	8.347.367.000	20.790.011.000	29.137.378.000
67	SUMATERA BARAT	090	S O L O K	990345	Kab. Solok	0804	7.377.600.000	6.992.257.000	14.369.857.000	7.377.600.000	6.992.257.000	14.369.857.000
68	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	990370	Kab. Tanah Datar	0807	8.528.710.000	4.670.582.000	13.199.292.000	8.528.710.000	4.670.582.000	13.199.292.000
69	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	990391	Kota Bukit Tinggi	0851	12.588.397.000	2.376.012.000	14.964.409.000	11.349.933.800	2.376.012.000	13.725.945.800
70	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	990409	Kota Padang Panjang	0852	6.438.194.000	2.253.078.000	8.691.272.000	6.438.194.000	2.253.078.000	8.691.272.000
71	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	990434	Kota Padang	0855	96.072.959.000	3.590.638.000	99.663.597.000	96.072.959.000	3.590.638.000	99.663.597.000
72	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	990441	Kota Payakumbuh	0856	8.076.358.000	2.437.948.000	10.514.306.000	7.303.637.200	2.437.948.000	9.741.585.200
73	SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG	990420	Kota Sawahlunto	0854	12.347.120.000	16.012.114.000	28.359.234.000	11.330.385.000	16.012.114.000	27.342.499.000
74	SUMATERA BARAT	090	S O L O K	990413	Kota Solok	0853	8.687.854.000	3.812.887.000	12.500.741.000	8.687.854.000	3.812.887.000	12.500.741.000
75	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	997611	Kota Pariaman	0857	6.860.559.000	3.267.262.000	10.127.821.000	6.860.559.000	3.267.262.000	10.127.821.000
76	SUMATERA BARAT	091	LUBUK SIKAPING	987595	Kab. Pasaman Barat	0812	23.142.070.000	9.556.302.000	32.698.372.000	23.142.070.000	9.556.302.000	32.698.372.000
77	SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG	987574	Kab. Dharmasraya	0810	18.535.592.000	25.113.758.000	43.649.350.000	16.769.613.800	25.113.758.000	41.883.371.800
78	SUMATERA BARAT	090	S O L O K	987581	Kab. Solok Selatan	0811	34.542.940.000	17.615.562.000	52.158.502.000	31.322.859.100	17.538.128.000	48.860.987.100
79	RIAU	008	PEKANBARU	990455	Provinsi Riau	0900	983.921.955.000	473.770.932.000	1.457.692.887.000	894.096.125.200	473.770.932.000	1.367.867.057.200
80	RIAU	120	D U M A I	990476	Kab. Bengkalis	0902	1.744.967.671.000	737.503.723.000	2.482.471.394.000	1.586.437.216.600	737.503.723.000	2.323.940.939.600
81	RIAU	092	R E N G A T	990502	Kab. Indragiri Hilir	0905	101.925.267.000	174.968.822.000	276.894.089.000	92.660.622.100	174.968.822.000	267.629.444.100
82	RIAU	092	R E N G A T	990497	Kab. Indragiri Hulu	0904	135.533.219.000	101.466.474.000	236.999.693.000	123.241.730.200	101.466.474.000	224.708.204.200
83	RIAU	008	PEKANBARU	990462	Kab. Kampar	0901	383.569.750.000	270.409.025.000	653.978.775.000	349.698.289.800	268.402.927.800	618.101.217.600
84	RIAU	092	R E N G A T	980138	Kab. Kuantan Singingi	0912	75.111.791.000	111.423.989.000	186.535.780.000	68.276.074.200	111.423.989.000	179.700.063.200
85	RIAU	008	PEKANBARU	980074	Kab. Pelalawan	0906	211.888.815.000	161.185.898.000	373.074.713.000	191.928.171.600	161.185.898.000	353.114.069.600
86	RIAU	120	D U M A I	980095	Kab. Rokan Hilir	0908	463.862.875.000	332.222.097.000	796.084.972.000	424.013.292.000	332.029.532.340	756.042.824.340
87	RIAU	008	PEKANBARU	980081	Kab. Rokan Hulu	0907	123.347.486.000	189.356.437.000	312.703.923.000	112.021.510.600	189.356.437.000	301.377.947.600
88	RIAU	008	PEKANBARU	980100	Kab. Siak	0909	620.203.962.000	294.900.662.000	915.104.624.000	564.580.276.900	294.900.662.000	859.480.938.900
89	RIAU	120	D U M A I	980142	Kota Dumai	0953	101.263.485.000	237.612.234.000	338.875.719.000	91.920.811.600	236.693.138.400	328.613.950.000
90	RIAU	008	PEKANBARU	990519	Kota Pekanbaru	0951	193.703.421.000	93.855.179.000	287.558.600.000	175.267.043.900	93.855.179.000	269.122.222.900
91	RIAU	120	D U M A I	978417	Kab. Kepulauan Meranti	0913	114.179.756.000	93.839.569.000	208.019.325.000	103.948.654.300	93.839.569.000	197.788.223.300
92	JAMBI	012	J A M B I	990530	Provinsi Jambi	1000	203.882.898.000	325.448.641.000	529.331.539.000	185.149.453.620	325.448.641.000	510.598.094.620
93	JAMBI	012	J A M B I	990544	Kab. Batanghari	1001	89.555.721.000	238.801.521.000	328.357.242.000	80.965.109.200	238.801.521.000	319.766.630.200
94	JAMBI	078	MUARA BUNGO	990565	Kab. Bungo	1003	30.780.857.000	145.977.660.000	176.758.517.000	27.816.926.700	145.977.660.000	173.794.586.700
95	JAMBI	013	SUNGAI PENUH	990586	Kab. Kerinci	1005	16.444.394.000	61.473.016.000	77.917.410.000	15.042.038.600	60.038.899.500	75.080.938.100
96	JAMBI	159	B A N G K O	990572	Kab. Merangin	1006	16.655.188.000	113.342.391.000	129.997.579.000	12.116.912.300	113.342.391.000	125.459.303.300
97	JAMBI	012	J A M B I	980184	Kab. Muaro Jambi	1009	114.291.132.000	220.582.668.000	334.873.800.000	103.964.876.700	220.582.668.000	324.547.544.700
98	JAMBI	159	B A N G K O	980163	Kab. Sarolangun	1004	60.127.368.000	198.835.822.000	258.963.190.000	54.469.142.900	198.835.822.000	253.304.964.900
99	JAMBI	143	KUALA TUNGKAL	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	1002	274.796.857.000	658.953.114.000	933.749.971.000	251.738.953.600	658.953.114.000	910.692.067.600
100	JAMBI	143	KUALA TUNGKAL	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	1007	73.507.559.000	223.045.405.000	296.552.964.000	66.896.962.200	223.045.405.000	289.942.367.200
101	JAMBI	078	MUARA BUNGO	980170	Kab. Tebo	1008	36.925.463.000	135.567.569.000	172.493.032.000	33.465.549.800	135.567.569.000	169.033.118.800
102	JAMBI	012	J A M B I	990590	Kota Jambi	1051	86.796.908.000	50.784.613.000	137.581.521.000	78.574.842.730	50.784.613.000	129.359.455.730
103	JAMBI	013	SUNGAI PENUH	977562	Kota Sungai Penuh	1052	14.501.119.000	51.205.229.000	65.706.348.000	13.108.892.400	51.205.229.000	64.314.121.400
104	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	990608	Provinsi Sumatera Selatan	1100	945.592.492.000	1.546.336.989.000	2.491.929.481.000	857.417.960.400	1.546.336.989.000	2.403.754.949.400
105	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	990661	Kab. Lahat	1106	233.228.358.000	993.200.508.000	1.226.428.866.000	213.001.987.500	993.200.508.000	1.206.202.495.500
106	SUMATERA SELATAN	160	S E K A Y U	990633	Kab. Musi Banyuasin	1103	1.171.145.888.000	1.039.812.631.000	2.210.958.519.000	1.062.202.851.600	1.039.812.631.000	2.102.015.482.600
107	SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU	990675	Kab. Musi Rawas	1107	300.997.696.000	340.312.218.000	641.309.914.000	272.648.022.700	340.312.218.000	612.960.240.700
108	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	990654	Kab. Muara Enim	1105	735.951.902.000	1.363.907.545.000	2.099.859.447.000	536.206.307.300	1.363.907.545.000	1.900.113.852.300
109	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	1108	141.026.430.000	126.859.982.000	267.886.412.000	128.875.005.300	126.859.982.000	255.734.987.300
110	SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	1104	121.633.457.000	171.876.534.000	293.509.991.000	110.768.867.400	171.876.534.000	282.645.401.400
111	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	990696	Kota Palembang	1151	191.430.249.000	172.713.394.000	364.143.643.000	173.265.096.300	172.713.394.000	345.978.490.300
112	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	994712	Kota Prabumulih	1153	141.190.143.000	181.871.092.000	323.061.235.000	75.199.491.500	181.871.092.000	257.070.583.500
113	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	994729	Kota Pagar Alam	1154	44.017.571.000	212.014.695.000	256.032.266.000	40.394.366.400	212.014.695.000	252.409.061.400
114	SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU	994733	Kota Lubuk Linggau	1155	44.606.886.000	114.361.010.000	158.967.896.000	40.862.541.100	114.361.010.000	155.223.551.100
115	SUMATERA SELATAN	160	S E K A Y U	997557	Kab. Banyuasin	1109	116.838.542.000	325.813.575.000	442.652.117.000	106.539.591.000	325.813.575.000	432.353.166.000
116	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	987560	Kab. Ogan Ilir	1112	87.964.023.000	159.296.993.000	247.261.016.000	79.723.974.300	159.296.993.000	239.020.967.300
117	SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA	987549	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1110	50.856.624.000	114.817.057.000	165.673.681.000	46.680.116.900	114.817.057.000	161.497.173.900
118	SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA	987553	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1111	44.820.882.000	154.849.715.000	199.670.597.000	41.202.997.300	154.849.715.000	196.052.712.300
119	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	963342	Kab. Empat Lawang	1117	45.703.755.000	168.276.977.000	213.980.732.000	41.761.284.700	168.276.977.000	210.038.261.700
120	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	999011	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1118	582.035.410.000	240.043.275.000	822.078.685.000	528.094.890.500	240.043.275.000	768.138.165.500
121	SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU	999015	Kab. Musi Rawas Utara	1119	87.570.106.000	340.706.299.000	428.276.405.000	80.106.993.400	340.706.299.000	420.813.292.400
122	BENGKULU	016	B E N G K U L U	990718	Provinsi Bengkulu	2600	48.203.651.000	72.256.798.000	120.460.449.000	25.220.126.000	72.256.798.000	97.476.924.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN		Daerah	Kode Pemda	Tahun 2025					
							Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
							DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	BENGKULU	121	M A N N A	990739	Kab. Bengkulu Selatan	2602	5.933.293.000	95.409.745.000	101.343.038.000	5.368.063.200	95.409.745.000	100.777.808.200
124	BENGKULU	016	B E N G K U L U	990722	Kab. Bengkulu Utara	2601	31.553.671.000	107.666.638.000	139.220.309.000	28.680.136.000	107.666.638.000	136.346.774.000
125	BENGKULU	146	C U R U P	990743	Kab. Rejang Lebong	2603	6.143.670.000	23.838.015.000	29.981.685.000	5.557.230.200	23.838.015.000	29.395.245.200
126	BENGKULU	016	B E N G K U L U	990750	Kota Bengkulu	2651	25.566.405.000	13.818.249.000	39.384.654.000	23.053.802.600	13.818.249.000	36.872.051.600
127	BENGKULU	121	M A N N A	998215	Kab. Kaur	2605	5.779.027.000	83.402.332.000	89.181.359.000	5.219.692.400	83.402.332.000	88.622.024.400
128	BENGKULU	121	M A N N A	998201	Kab. Seluma	2604	9.894.973.000	98.821.653.000	108.716.626.000	9.023.717.100	98.821.653.000	107.845.370.100
129	BENGKULU	181	MUKOMUKO	998503	Kab. Mukomuko	2606	20.433.092.000	23.445.356.000	43.878.448.000	18.556.187.500	23.445.356.000	42.001.543.500
130	BENGKULU	146	C U R U P	987600	Kab. Lebong	2607	7.578.771.000	63.565.616.000	71.144.387.000	6.862.717.200	63.519.012.800	70.381.730.000
131	BENGKULU	146	C U R U P	987617	Kab. Kepahiang	2608	5.729.350.000	13.228.425.000	18.957.775.000	5.202.873.700	13.228.425.000	18.431.298.700
132	BENGKULU	016	B E N G K U L U	977710	Kab. Bengkulu Tengah	2609	16.403.191.000	43.382.108.000	59.785.299.000	15.081.648.200	43.382.108.000	58.463.756.200
133	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	990764	Provinsi Lampung	1200	140.391.933.000	47.850.176.000	188.242.109.000	127.151.356.300	47.848.411.300	174.999.767.600
134	LAMPUNG	145	L I W A	990807	Kab. Lampung Barat	1204	8.449.397.000	9.377.199.000	17.826.596.000	6.203.565.800	9.377.199.000	15.580.764.800
135	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	990771	Kab. Lampung Selatan	1201	28.386.663.000	11.731.240.000	40.117.903.000	23.237.225.800	11.731.240.000	34.968.465.800
136	LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG	990785	Kab. Lampung Tengah	1202	41.711.012.000	12.786.580.000	54.497.592.000	38.128.662.310	12.786.580.000	50.915.242.310
137	LAMPUNG	116	KOTABUMI	990792	Kab. Lampung Utara	1203	17.519.688.000	7.412.220.000	24.931.908.000	15.955.831.700	7.412.220.000	23.368.051.700
138	LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG	980191	Kab. Lampung Timur	1207	40.106.975.000	32.582.767.000	72.689.742.000	36.802.816.200	32.582.767.000	69.385.583.200
139	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	993351	Kab. Tanggamus	1206	41.820.385.000	33.185.781.000	75.006.166.000	37.853.592.400	33.185.781.000	71.039.373.400
140	LAMPUNG	116	KOTABUMI	993347	Kab. Tulang Bawang	1205	22.421.720.000	11.342.082.000	33.763.802.000	20.347.105.500	11.342.082.000	31.689.187.500
141	LAMPUNG	116	KOTABUMI	980206	Kab. Way Kanan	1208	19.738.619.000	8.989.638.000	28.728.257.000	17.978.791.800	8.989.638.000	26.968.429.800
142	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	990811	Kota Bandar Lampung	1251	68.381.102.000	6.782.095.000	75.163.197.000	48.730.227.200	6.782.095.000	55.512.322.200
143	LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG	980210	Kota Metro	1252	13.618.506.000	9.223.708.000	22.842.214.000	12.362.735.000	9.223.708.000	21.586.443.000
144	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	975311	Kab. Pesawaran	1209	11.702.774.000	9.095.665.000	20.798.439.000	10.661.463.000	9.095.665.000	19.757.128.000
145	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	978423	Kab. Pringsewu	1210	10.083.245.000	8.672.241.000	18.755.486.000	7.371.510.500	8.672.241.000	16.043.751.500
146	LAMPUNG	116	KOTABUMI	978432	Kab. Mesuji	1211	20.257.761.000	9.846.729.000	30.104.490.000	18.383.014.700	9.846.729.000	28.229.743.700
147	LAMPUNG	116	KOTABUMI	978448	Kab. Tulang Bawang Barat	1212	10.241.504.000	7.818.703.000	18.060.207.000	9.332.398.900	7.818.703.000	17.151.101.900
148	LAMPUNG	145	L I W A	999003	Kab. Pesisir Barat	1213	7.798.807.000	10.284.953.000	18.083.760.000	5.734.461.100	10.284.953.000	16.019.414.100
149	DKI JAKARTA	018	JAKARTA I	990828	Provinsi DKI Jakarta	0100	23.292.631.321.000	79.859.301.000	23.372.490.622.000	21.063.764.453.600	79.859.301.000	21.143.623.754.600
150	JAWA BARAT	022	BANDUNG I	990881	Provinsi Jawa Barat	0200	2.057.677.432.000	371.918.103.000	2.429.595.535.000	1.876.985.410.600	368.544.454.000	2.245.529.864.600
151	JAWA BARAT	095	BANDUNG II	991003	Kab. Bandung	0212	236.775.746.000	333.200.029.000	569.975.775.000	217.160.087.300	332.700.029.000	549.860.116.300
152	JAWA BARAT	171	B E K A S I	990963	Kab. Bekasi	0208	637.945.574.000	22.894.679.000	660.840.253.000	578.291.867.100	22.394.679.000	600.686.546.100
153	JAWA BARAT	023	B O G O R	990938	Kab. Bogor	0205	284.496.778.000	186.634.700.000	471.131.478.000	258.519.311.500	186.634.700.000	445.154.011.500
154	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	991045	Kab. Ciamis	0216	56.521.420.000	17.692.791.000	74.214.211.000	52.143.542.800	17.192.791.000	69.336.333.800
155	JAWA BARAT	128	SUKABUMI	990959	Kab. Cianjur	0207	79.071.783.000	57.281.389.000	136.353.172.000	72.303.607.260	57.281.389.000	129.584.996.260
156	JAWA BARAT	024	C I R E B O N	991052	Kab. Cirebon	0217	84.492.365.000	16.547.237.000	101.039.602.000	77.289.022.670	16.547.237.000	93.836.259.670
157	JAWA BARAT	096	G A R U T	991024	Kab. Garut	0214	159.763.589.000	162.981.780.000	322.745.369.000	148.898.664.200	162.981.780.000	311.880.444.200
158	JAWA BARAT	024	C I R E B O N	991070	Kab. Indramayu	0219	198.260.666.000	29.952.791.000	228.213.457.000	180.799.824.900	29.702.791.000	210.502.615.900
159	JAWA BARAT	086	KARAWANG	990970	Kab. Karawang	0209	523.453.970.000	24.690.720.000	548.144.690.000	414.938.125.460	24.690.720.000	439.628.845.460
160	JAWA BARAT	147	KUNINGAN	991066	Kab. Kuningan	0218	56.758.212.000	17.111.635.000	73.869.847.000	43.385.941.500	17.111.635.000	60.497.576.500
161	JAWA BARAT	147	KUNINGAN	991087	Kab. Majalengka	0220	81.779.683.000	16.950.238.000	98.729.921.000	76.224.443.400	16.700.238.000	92.924.681.400
162	JAWA BARAT	021	PURWAKARTA	990984	Kab. Purwakarta	0210	111.323.518.000	22.066.313.000	133.389.831.000	101.639.502.100	21.566.313.000	123.205.815.100
163	JAWA BARAT	021	PURWAKARTA	990991	Kab. Subang	0211	178.401.597.000	34.567.604.000	212.969.201.000	162.611.433.500	34.567.604.000	197.179.037.500
164	JAWA BARAT	128	SUKABUMI	990942	Kab. Sukabumi	0206	125.378.643.000	160.673.099.000	286.051.742.000	114.117.679.100	159.776.120.000	273.893.799.100
165	JAWA BARAT	087	SUMEDANG	991010	Kab. Sumedang	0213	94.123.153.000	40.096.431.000	134.219.584.000	88.669.065.100	40.096.431.000	128.765.496.100
166	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	991031	Kab. Tasikmalaya	0215	61.481.734.000	30.814.755.000	92.296.489.000	56.599.533.400	30.310.061.500	86.909.594.900
167	JAWA BARAT	095	BANDUNG II	991091	Kota Bandung	0251	404.402.595.000	29.545.224.000	433.947.819.000	365.608.298.300	29.545.224.000	395.153.522.300
168	JAWA BARAT	171	B E K A S I	993330	Kota Bekasi	0257	197.459.912.000	21.149.771.000	218.609.683.000	179.643.385.600	20.649.771.000	200.293.156.600
169	JAWA BARAT	023	B O G O R	991109	Kota Bogor	0252	108.178.537.000	21.512.146.000	129.690.683.000	98.797.298.200	21.012.146.000	119.809.444.200
170	JAWA BARAT	024	C I R E B O N	991120	Kota Cirebon	0254	70.723.789.000	15.982.375.000	86.706.164.000	64.881.522.700	15.982.375.000	80.863.897.700
171	JAWA BARAT	023	B O G O R	980032	Kota Depok	0258	132.960.246.000	21.330.007.000	154.290.253.000	121.098.093.300	20.830.007.000	141.928.100.300
172	JAWA BARAT	128	SUKABUMI	991113	Kota Sukabumi	0253	56.124.599.000	27.663.472.000	83.788.071.000	51.541.359.200	27.413.472.000	78.954.831.200
173	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	994740	Kota Tasikmalaya	0260	63.587.559.000	16.718.055.000	80.305.614.000	58.515.825.200	16.218.055.000	74.733.880.200
174	JAWA BARAT	022	BANDUNG I	994754	Kota Cimahi	0261	68.754.123.000	28.631.790.000	97.385.913.000	63.184.834.300	28.631.790.000	91.816.624.300
175	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	998126	Kota Banjar	0262	50.854.859.000	17.498.781.000	68.353.640.000	47.000.892.400	17.498.781.000	64.499.673.400
176	JAWA BARAT	022	BANDUNG I	963302	Kab. Bandung Barat	0221	86.386.084.000	30.362.513.000	116.748.597.000	79.287.372.500	29.862.513.000	109.149.885.500
177	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	999002	Kab. Pangandaran	0222	51.969.987.000	17.547.183.000	69.517.170.000	48.041.789.000	16.841.149.000	64.882.938.000
178	JAWA TENGAH	026	SEMARANG I	991141	Provinsi Jawa Tengah	0300	1.035.280.012.000	3.498.424.000	1.038.778.436.000	973.009.523.700	3.498.424.000	976.507.947.700
179	JAWA TENGAH	164	BANJARNEGARA	991329	Kab. Banjarnegara	0318	40.397.446.000	1.075.347.000	41.472.793.000	38.044.605.100	1.075.347.000	39.119.952.100
180	JAWA TENGAH	029	PURWOKERTO	991290	Kab. Banyumas	0315	56.560.159.000	1.291.259.000	57.851.418.000	52.462.342.300	1.291.259.000	53.753.601.300
181	JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN	991202	Kab. Batang	0306	41.651.643.000	1.394.390.000	43.046.033.000	39.035.906.600	1.394.390.000	40.430.296.600
182	JAWA TENGAH	163	PURWODADI	991286	Kab. Blora	0314	129.120.284.000	132.916.701.000	262.036.985.000	118.736.569.800	132.916.701.000	251.653.270.800
183	JAWA TENGAH	148	K L A T E N	991396	Kab. Boyolali	0325	56.858.194.000	1.104.680.000	57.962.874.000	54.618.749.000	1.104.680.000	55.723.429.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN		Daerah	Kode Pemda	Tahun 2025					
							Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
							DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	JAWA TENGAH	118	T E G A L	991223	Kab. Brebes	0308	40.383.888.000	1.367.858.000	41.751.746.000	37.937.893.500	1.367.858.000	39.305.751.500
185	JAWA TENGAH	130	CILACAP	991308	Kab. Cilacap	0316	69.245.959.000	2.118.378.000	71.364.337.000	64.036.433.500	2.118.378.000	66.154.811.500
186	JAWA TENGAH	129	K U D U S	991176	Kab. Demak	0303	79.975.586.000	1.227.350.000	81.202.936.000	77.881.846.400	1.227.350.000	79.109.196.400
187	JAWA TENGAH	163	PURWODADI	991180	Kab. Grobogan	0304	67.225.985.000	1.942.916.000	69.168.901.000	64.080.389.400	1.942.916.000	66.023.305.400
188	JAWA TENGAH	129	K U D U S	991265	Kab. Jepara	0312	55.517.717.000	2.339.162.000	57.856.879.000	51.520.316.320	2.339.162.000	53.859.478.320
189	JAWA TENGAH	162	S R A G E N	991422	Kab. Karanganyar	0328	49.151.083.000	1.055.623.000	50.206.706.000	46.401.467.700	1.055.623.000	47.457.090.700
190	JAWA TENGAH	027	PURWOREJO	991375	Kab. Kebumen	0323	37.363.888.000	1.314.399.000	38.678.287.000	35.597.426.200	1.314.399.000	36.911.825.200
191	JAWA TENGAH	134	SEMARANG II	991162	Kab. Kendal	0302	64.671.295.000	1.405.948.000	66.077.243.000	61.998.493.600	1.405.948.000	63.404.441.600
192	JAWA TENGAH	148	K L A T E N	991382	Kab. Klaten	0324	52.072.515.000	1.009.651.000	53.082.166.000	49.781.539.700	1.009.651.000	50.791.190.700
193	JAWA TENGAH	129	K U D U S	991244	Kab. Kudus	0310	371.542.088.000	1.090.454.000	372.632.542.000	362.317.805.400	1.090.454.000	363.408.259.400
194	JAWA TENGAH	115	MAGELANG	991333	Kab. Magelang	0319	47.028.222.000	1.140.449.000	48.168.671.000	41.398.963.800	1.140.449.000	42.539.412.800
195	JAWA TENGAH	097	P A T I	991230	Kab. Pati	0309	48.916.056.000	1.855.514.000	50.771.570.000	46.332.744.400	1.855.514.000	48.188.258.400
196	JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN	991197	Kab. Pekalongan	0305	32.567.162.000	1.146.697.000	33.713.859.000	30.891.591.800	1.146.697.000	32.038.288.800
197	JAWA TENGAH	118	T E G A L	991251	Kab. Pemalang	0311	36.390.759.000	1.559.198.000	37.949.957.000	34.528.405.900	1.559.198.000	36.087.603.900
198	JAWA TENGAH	029	PURWOKERTO	991312	Kab. Purbalingga	0317	35.213.189.000	1.078.458.000	36.291.647.000	33.463.498.900	1.078.458.000	34.541.956.900
199	JAWA TENGAH	027	PURWOREJO	991361	Kab. Purworejo	0322	34.060.764.000	1.140.236.000	35.201.000.000	32.449.809.100	1.140.236.000	33.590.045.100
200	JAWA TENGAH	097	P A T I	991272	Kab. Rembang	0313	81.319.922.000	2.788.408.000	84.108.330.000	79.202.288.600	2.788.408.000	81.990.696.600
201	JAWA TENGAH	134	SEMARANG II	991155	Kab. Semarang	0301	52.016.447.000	1.298.149.000	53.314.596.000	48.760.472.300	1.298.149.000	50.058.621.300
202	JAWA TENGAH	162	S R A G E N	991401	Kab. Sragen	0326	39.205.352.000	1.087.886.000	40.293.238.000	36.651.692.240	1.087.886.000	37.739.578.240
203	JAWA TENGAH	028	SURAKARTA	991418	Kab. Sukoharjo	0327	46.731.351.000	1.013.093.000	47.744.444.000	43.907.512.700	1.013.093.000	44.920.605.700
204	JAWA TENGAH	118	T E G A L	991219	Kab. Tegal	0307	39.391.329.000	1.372.318.000	40.763.647.000	32.337.438.600	1.372.318.000	33.709.756.600
205	JAWA TENGAH	115	MAGELANG	991340	Kab. Temanggung	0320	81.162.256.000	1.080.409.000	82.242.665.000	79.428.839.900	1.080.409.000	80.509.248.900
206	JAWA TENGAH	028	SURAKARTA	991439	Kab. Wonogiri	0329	45.011.155.000	1.127.343.000	46.138.498.000	43.273.206.500	1.127.343.000	44.400.549.500
207	JAWA TENGAH	164	BANJARNEGARA	991354	Kab. Wonosobo	0321	42.874.931.000	1.103.006.000	43.977.937.000	41.116.851.400	1.103.006.000	42.219.857.400
208	JAWA TENGAH	115	MAGELANG	991485	Kota Magelang	0355	33.675.663.000	1.019.826.000	34.695.489.000	31.821.874.000	1.019.826.000	32.841.700.000
209	JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN	991464	Kota Pekalongan	0353	43.638.497.000	1.055.038.000	44.693.535.000	41.530.008.100	1.055.038.000	42.585.046.100
210	JAWA TENGAH	134	SEMARANG II	991450	Kota Salatiga	0352	34.967.345.000	1.021.620.000	35.988.965.000	32.987.745.300	1.021.620.000	34.009.365.300
211	JAWA TENGAH	026	SEMARANG I	991443	Kota Semarang	0351	248.433.501.000	1.111.241.000	249.544.742.000	226.962.904.400	1.111.241.000	228.074.145.400
212	JAWA TENGAH	028	SURAKARTA	991492	Kota Surakarta	0356	67.028.811.000	1.014.295.000	68.043.106.000	62.024.679.900	1.014.295.000	63.038.974.900
213	JAWA TENGAH	118	T E G A L	991471	Kota Tegal	0354	38.361.928.000	1.066.237.000	39.428.165.000	31.469.860.900	1.066.237.000	32.536.097.900
214	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	991507	Provinsi DI Yogyakarta	0400	115.027.032.000	29.968.000	115.057.000.000	104.257.074.600	29.968.000	104.287.042.600
215	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	991511	Kab. Bantul	0401	33.976.071.000	892.944.000	34.869.015.000	31.113.926.000	892.944.000	32.006.870.000
216	DI JOGJAKARTA	149	WONOSARI	991532	Kab. Gunung Kidul	0403	22.650.147.000	1.103.607.000	23.753.754.000	20.763.991.500	1.103.607.000	21.867.598.500
217	DI JOGJAKARTA	176	W A T E S	991549	Kab. Kulon Progo	0404	24.045.145.000	988.499.000	25.033.644.000	22.040.091.000	988.499.000	23.028.590.000
218	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	991528	Kab. Sleman	0402	64.901.643.000	847.046.000	65.748.689.000	58.836.045.600	847.046.000	59.683.091.600
219	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	991553	Kota Yogyakarta	0451	60.107.916.000	834.807.000	60.942.723.000	54.334.992.900	834.807.000	55.169.799.900
220	JAWA TIMUR	135	SURABAYA II	991560	Provinsi Jawa Timur	0500	2.322.342.980.000	739.266.492.000	3.061.609.472.000	2.195.773.293.200	739.266.492.000	2.935.039.785.200
221	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	991642	Kab. Bangkalan	0508	60.256.117.000	33.758.899.000	94.015.016.000	57.744.645.300	33.758.899.000	91.503.544.300
222	JAWA TIMUR	100	BANYUWANGI	991670	Kab. Banyuwangi	0511	107.385.844.000	145.820.471.000	253.206.315.000	100.633.269.700	145.820.471.000	246.453.740.700
223	JAWA TIMUR	150	B L I T A R	991773	Kab. Blitar	0521	67.581.420.000	33.211.180.000	100.792.600.000	59.234.895.300	33.211.180.000	92.446.075.300
224	JAWA TIMUR	073	BOJONEGORO	991837	Kab. Bojonegoro	0527	1.197.082.811.000	1.947.389.127.000	3.144.471.938.000	1.111.494.676.000	1.947.389.127.000	3.058.883.803.000
225	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	991659	Kab. Bondowoso	0509	98.914.777.000	47.323.456.000	146.238.233.000	90.700.462.300	47.323.456.000	138.023.918.300
226	JAWA TIMUR	031	SURABAYA I	991574	Kab. Gresik	0501	254.099.058.000	70.451.615.000	324.550.673.000	234.765.142.500	70.451.615.000	305.216.757.500
227	JAWA TIMUR	131	J E M B E R	991684	Kab. Jember	0512	205.853.679.000	47.603.906.000	253.457.585.000	200.013.842.200	47.603.906.000	247.617.748.200
228	JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO	991600	Kab. Jombang	0504	105.270.872.000	155.648.617.000	260.919.489.000	89.487.648.000	155.648.617.000	245.136.265.000
229	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	991731	Kab. Kediri	0517	128.359.657.000	33.131.460.000	161.491.117.000	109.629.225.500	33.131.460.000	142.760.685.500
230	JAWA TIMUR	073	BOJONEGORO	991858	Kab. Lamongan	0529	112.212.393.000	159.819.809.000	272.032.202.000	103.021.750.800	159.819.809.000	262.841.559.800
231	JAWA TIMUR	131	J E M B E R	991727	Kab. Lumajang	0516	66.777.094.000	33.225.485.000	100.002.579.000	63.913.134.600	33.225.485.000	97.138.619.600
232	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	991780	Kab. Madiun	0522	65.027.369.000	159.022.993.000	224.050.362.000	62.306.046.800	159.022.993.000	221.329.039.800
233	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	991802	Kab. Magetan	0524	61.599.228.000	32.906.632.000	94.505.860.000	59.249.462.600	32.906.632.000	92.156.094.600
234	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	991691	Kab. Malang	0513	229.598.771.000	33.819.167.000	263.417.938.000	223.260.953.400	33.819.167.000	257.080.120.400
235	JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO	991581	Kab. Mojokerto	0502	85.621.682.000	36.129.564.000	121.751.246.000	81.171.799.500	36.129.564.000	117.301.363.500
236	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	991752	Kab. Nganjuk	0519	72.289.034.000	156.003.081.000	228.292.115.000	69.232.591.300	156.003.081.000	225.235.672.300
237	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	991794	Kab. Ngawi	0523	73.756.821.000	156.298.502.000	230.055.323.000	70.878.735.800	156.298.502.000	227.177.237.800
238	JAWA TIMUR	099	PACITAN	991820	Kab. Pacitan	0526	59.955.021.000	33.143.596.000	93.098.617.000	57.784.574.900	33.143.596.000	90.928.170.900
239	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	991621	Kab. Pamekasan	0506	142.766.372.000	33.607.000.000	176.373.372.000	140.307.558.800	33.607.000.000	173.914.558.800
240	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	991706	Kab. Pasuruan	0514	532.132.729.000	32.924.658.000	565.057.387.000	524.247.265.300	32.924.658.000	557.171.923.300
241	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	991816	Kab. Ponorogo	0525	72.629.121.000	33.388.510.000	106.017.631.000	69.716.877.900	33.388.510.000	103.105.387.900
242	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	991710	Kab. Probolinggo	0515	138.464.583.000	33.500.186.000	171.964.769.000	135.267.028.300	33.500.186.000	168.767.214.300
243	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	991617	Kab. Sampang	0505	67.030.361.000	33.560.598.000	100.590.959.000	64.881.793.600	33.560.598.000	98.442.391.600
244	JAWA TIMUR	165	SIDOARJO	991595	Kab. Sidoarjo	0503	194.798.535.000	34.677.465.000	229.476.000.000	180.026.223.700	34.677.465.000	214.703.688.700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN		Daerah	Kode Pemda	Tahun 2025					
							Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
							DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	991663	Kab. Situbondo	0510	103.368.872.000	48.687.547.000	152.056.419.000	100.779.332.900	48.687.547.000	149.466.879.900
246	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	991638	Kab. Sumenep	0507	94.606.582.000	38.841.133.000	133.447.715.000	91.738.573.300	38.841.133.000	130.579.706.300
247	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	991769	Kab. Trenggalek	0520	59.660.732.000	33.960.297.000	93.621.029.000	57.279.395.000	33.960.297.000	91.239.692.000
248	JAWA TIMUR	166	T U B A N	991841	Kab. Tuban	0528	120.105.574.000	441.039.770.000	561.145.344.000	112.829.146.800	441.039.770.000	553.868.916.800
249	JAWA TIMUR	150	B L I T A R	991748	Kab. Tulungagung	0518	79.443.321.000	33.366.146.000	112.809.467.000	76.250.181.400	33.366.146.000	109.616.327.400
250	JAWA TIMUR	150	B L I T A R	991912	Kota Blitar	0556	58.816.942.000	32.937.889.000	91.754.831.000	51.708.113.200	32.937.889.000	84.646.002.200
251	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	991926	Kota Kediri	0557	217.001.593.000	32.855.205.000	249.856.798.000	211.544.629.300	32.855.205.000	244.399.834.300
252	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	991930	Kota Madiun	0558	70.201.948.000	32.676.201.000	102.878.149.000	66.792.409.600	32.676.201.000	99.468.610.600
253	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	991883	Kota Malang	0553	157.506.071.000	32.582.847.000	190.088.918.000	119.030.764.000	32.582.847.000	151.613.611.000
254	JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO	991879	Kota Mojokerto	0552	60.974.855.000	32.623.706.000	93.598.561.000	58.366.928.100	32.623.706.000	90.990.634.100
255	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	991890	Kota Pasuruan	0554	59.820.307.000	32.611.978.000	92.432.285.000	47.508.371.000	32.611.978.000	80.120.349.000
256	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	991905	Kota Probolinggo	0555	60.346.041.000	32.737.328.000	93.083.369.000	52.907.385.900	32.737.328.000	85.644.713.900
257	JAWA TIMUR	135	SURABAYA II	991862	Kota Surabaya	0551	626.821.713.000	35.753.971.000	662.575.684.000	571.208.812.700	35.753.971.000	606.962.783.700
258	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	994761	Kota Batu	0559	57.576.824.000	33.885.863.000	91.462.687.000	55.346.668.200	33.885.863.000	89.232.531.200
259	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	991947	Provinsi Kalimantan Barat	1300	187.968.410.000	105.892.412.000	293.860.822.000	133.834.415.900	105.892.412.000	239.726.827.900
260	KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG	980227	Kab. Bengkayang	1307	27.218.294.000	12.563.924.000	39.782.218.000	14.933.684.500	12.563.924.000	27.497.608.500
261	KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU	980231	Kab. Landak	1308	31.657.205.000	18.800.285.000	50.457.490.000	16.552.682.500	18.800.285.000	35.352.967.500
262	KALIMANTAN BARAT	117	PUTUSSIBAU	991993	Kab. Kapuas Hulu	1305	32.961.601.000	128.991.407.000	161.953.008.000	29.997.250.200	128.991.407.000	158.988.657.200
263	KALIMANTAN BARAT	094	KETAPANG	992008	Kab. Ketapang	1306	160.519.481.000	119.088.668.000	279.608.149.000	145.954.561.800	119.088.668.000	265.043.229.800
264	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	991989	Kab. Mempawah	1304	17.155.296.000	9.574.528.000	26.729.824.000	12.695.218.800	9.574.528.000	22.269.746.800
265	KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG	991951	Kab. Sambas	1301	27.633.500.000	11.342.301.000	38.975.801.000	19.945.589.900	11.342.301.000	31.287.890.900
266	KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU	991968	Kab. Sanggau	1302	71.710.244.000	55.209.454.000	126.919.698.000	37.478.881.500	55.209.454.000	92.688.335.500
267	KALIMANTAN BARAT	079	S I N T A N G	991972	Kab. Sintang	1303	50.874.164.000	136.142.997.000	187.017.161.000	46.103.582.900	134.528.450.600	180.632.033.500
268	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	992012	Kota Pontianak	1351	59.355.587.000	6.748.588.000	66.104.175.000	29.865.525.000	6.748.588.000	36.614.113.000
269	KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG	994775	Kota Singkawang	1352	16.418.578.000	7.422.172.000	23.840.750.000	9.045.172.000	7.422.172.000	16.467.344.000
270	KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU	987507	Kab. Sekadau	1310	25.353.113.000	15.893.629.000	41.246.742.000	23.061.894.400	15.893.629.000	38.955.523.400
271	KALIMANTAN BARAT	079	S I N T A N G	987492	Kab. Melawi	1309	23.148.584.000	56.284.657.000	79.433.241.000	21.013.083.400	56.284.657.000	77.297.740.400
272	KALIMANTAN BARAT	094	KETAPANG	963358	Kab. Kayong Utara	1311	19.578.203.000	15.284.415.000	34.862.618.000	17.885.885.600	15.284.415.000	33.170.300.600
273	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	975616	Kab. Kubu Raya	1312	45.059.055.000	16.984.892.000	62.043.947.000	40.907.700.500	16.984.892.000	57.892.592.500
274	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	992029	Provinsi Kalimantan Tengah	1400	376.281.431.000	2.034.141.338.000	2.410.422.769.000	343.813.212.000	2.034.141.338.000	2.377.954.550.000
275	KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K	992054	Kab. Barito Selatan	1403	74.075.690.000	552.739.801.000	626.815.491.000	68.689.745.200	551.695.422.700	620.385.167.900
276	KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K	992040	Kab. Barito Utara	1402	336.343.839.000	2.184.947.868.000	2.521.291.707.000	310.523.640.800	2.183.148.107.200	2.493.671.748.000
277	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	992033	Kab. Kapuas	1401	304.836.701.000	839.640.423.000	1.144.477.124.000	280.722.821.500	839.640.423.000	1.120.363.244.500
278	KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN	992075	Kab. Kotawaringin Barat	1405	84.507.765.000	155.098.684.000	239.606.449.000	77.142.564.700	155.098.684.000	232.241.248.700
279	KALIMANTAN TENGAH	044	S A M P I T	992061	Kab. Kotawaringin Timur	1404	145.458.629.000	163.779.706.000	309.238.335.000	133.054.738.900	163.779.706.000	296.834.444.900
280	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	992082	Kota Palangkaraya	1451	40.364.364.000	138.259.915.000	178.624.279.000	21.416.015.500	138.259.915.000	159.675.930.500
281	KALIMANTAN TENGAH	044	S A M P I T	997472	Kab. Katingan	1406	45.665.062.000	149.314.758.000	194.979.820.000	34.364.346.100	149.314.758.000	183.679.104.100
282	KALIMANTAN TENGAH	044	S A M P I T	997489	Kab. Seruyan	1407	97.233.208.000	151.389.696.000	248.622.904.000	88.896.553.500	151.389.696.000	240.286.249.500
283	KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN	997493	Kab. Sukamara	1408	32.320.797.000	144.561.902.000	176.882.699.000	29.833.020.700	144.561.902.000	174.394.922.700
284	KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN	997501	Kab. Lamandau	1409	51.927.536.000	149.063.317.000	200.990.853.000	30.722.610.000	149.063.317.000	179.785.927.000
285	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	997515	Kab. Gunung Mas	1410	48.689.750.000	299.084.766.000	347.774.516.000	44.577.251.400	299.084.766.000	343.662.017.400
286	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	997522	Kab. Pulang Pisau	1411	38.970.715.000	179.717.618.000	218.688.333.000	35.854.040.300	179.717.618.000	215.571.658.300
287	KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K	997536	Kab. Murung Raya	1412	271.681.776.000	1.412.610.663.000	1.684.292.439.000	203.457.303.300	1.412.610.663.000	1.616.067.966.300
288	KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K	997540	Kab. Barito Timur	1413	75.331.338.000	381.149.713.000	456.481.051.000	68.450.770.300	381.149.713.000	449.600.483.300
289	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	992164	Provinsi Kalimantan Selatan	1500	481.215.993.000	2.934.893.490.000	3.416.109.483.000	444.677.389.400	2.934.893.490.000	3.379.570.879.400
290	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	992171	Kab. Banjar	1501	68.398.763.000	829.730.410.000	898.129.173.000	63.344.944.000	829.730.410.000	893.075.354.000
291	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	992228	Kab. Barito Kuala	1506	35.467.600.000	426.928.069.000	462.395.669.000	32.786.369.600	426.928.069.000	459.714.438.600
292	KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	1504	88.722.111.000	578.878.980.000	667.601.091.000	80.834.951.100	578.878.980.000	659.713.931.100
293	KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	1505	27.434.869.000	413.441.873.000	440.876.742.000	25.358.965.200	413.441.873.000	438.800.838.200
294	KALIMANTAN SELATAN	151	T A N J U N G	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	1509	29.945.801.000	542.840.010.000	572.785.811.000	27.846.861.800	542.840.010.000	570.686.871.800
295	KALIMANTAN SELATAN	081	KOTABARU	992249	Kab. Kotabaru	1508	176.632.993.000	1.477.381.115.000	1.654.014.108.000	159.923.428.600	1.477.381.115.000	1.637.304.543.600
296	KALIMANTAN SELATAN	151	T A N J U N G	992232	Kab. Tabalong	1507	197.150.764.000	1.619.654.402.000	1.816.805.166.000	184.568.793.400	1.619.654.402.000	1.804.223.195.400
297	KALIMANTAN SELATAN	168	PELAIHARI	992185	Kab. Tanah Laut	1502	125.192.081.000	999.698.720.000	1.124.890.801.000	115.167.278.800	999.698.720.000	1.114.865.998.800
298	KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI	992192	Kab. Tapin	1503	178.244.296.000	898.509.964.000	1.076.754.260.000	166.084.638.700	898.509.964.000	1.064.594.602.700
299	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	980248	Kota Banjarbaru	1552	53.650.350.000	350.196.153.000	403.846.503.000	49.413.260.800	350.196.153.000	399.609.413.800
300	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	992260	Kota Banjarmasin	1551	91.699.879.000	279.525.009.000	371.224.888.000	83.671.375.400	279.525.009.000	363.196.384.400
301	KALIMANTAN SELATAN	151	T A N J U N G	998236	Kab. Balangan	1511	391.350.495.000	1.683.144.270.000	2.074.494.765.000	324.175.515.500	1.683.144.270.000	2.007.319.785.500
302	KALIMANTAN SELATAN	081	KOTABARU	998222	Kab. Tanah Bumbu	1510	422.240.628.000	1.874.324.270.000	2.296.564.898.000	394.183.592.200	1.874.324.270.000	2.268.507.862.200
303	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	992096	Provinsi Kalimantan Timur	1600	1.133.074.540.000	5.841.609.360.000	6.974.683.900.000	651.909.684.500	5.841.609.360.000	6.493.519.044.500
304	KALIMANTAN TIMUR	153	TANJUNG REDEP	992139	Kab. Berau	1604	241.304.801.000	2.746.432.800.000	2.987.737.601.000	222.699.879.000	2.743.489.892.800	2.966.189.771.800
305	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	992101	Kab. Kutai Kartanegara	1610	1.772.326.259.000	4.972.598.067.000	6.744.924.326.000	1.319.026.694.000	4.972.598.067.000	6.291.624.761.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN		Daerah	Kode Pemda	Tahun 2025					
							Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
							DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
306	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	980273	Kab. Kutai Barat	1607	296.749.957.000	1.538.845.141.000	1.835.595.098.000	198.898.193.000	1.538.845.141.000	1.737.743.334.000
307	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	980280	Kab. Kutai Timur	1608	830.965.334.000	4.642.974.123.000	5.473.939.457.000	525.663.061.000	4.642.974.123.000	5.168.637.184.000
308	KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN	992118	Kab. Paser	1602	320.588.476.000	1.795.664.689.000	2.116.253.165.000	259.431.243.100	1.795.468.978.540	2.054.900.221.640
309	KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN	992150	Kota Balikpapan	1652	265.413.354.000	878.396.727.000	1.143.810.081.000	241.734.998.200	878.396.727.000	1.120.131.725.200
310	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	980294	Kota Bontang	1654	241.858.809.000	1.185.253.790.000	1.427.112.599.000	137.177.440.000	1.185.253.790.000	1.322.431.230.000
311	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	992143	Kota Samarinda	1651	220.431.395.000	1.100.166.773.000	1.320.598.168.000	169.709.419.000	1.100.166.773.000	1.269.876.192.000
312	KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN	997561	Kab. Penajam Paser Utara	1609	148.222.060.000	974.632.806.000	1.122.854.866.000	138.134.263.000	974.632.806.000	1.112.767.069.000
313	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	999006	Kab. Mahakam Ulu	1613	83.641.863.000	1.156.961.128.000	1.240.602.991.000	48.463.061.000	1.156.961.128.000	1.205.424.189.000
314	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	993021	Provinsi Sulawesi Utara	1700	81.508.877.000	120.475.060.000	201.983.937.000	73.646.169.700	120.475.060.000	194.121.229.700
315	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	993059	Kab. Bolaang Mongondow	1703	13.975.770.000	124.371.906.000	138.347.676.000	12.645.112.600	124.371.906.000	137.017.018.600
316	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	993042	Kab. Minahasa	1702	16.776.599.000	35.103.556.000	51.880.155.000	11.976.302.300	35.103.556.000	47.079.858.300
317	SULAWESI UTARA	083	T A H U N A	993063	Kab. Sangihe	1704	6.519.889.000	13.387.550.000	19.907.439.000	5.887.556.700	13.387.550.000	19.275.106.700
318	SULAWESI UTARA	179	BITUNG	993091	Kota Bitung	1753	18.082.929.000	55.276.514.000	73.359.443.000	16.479.236.900	55.276.514.000	71.755.750.900
319	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	993070	Kota Manado	1751	47.982.043.000	18.206.598.000	66.188.641.000	43.250.439.700	18.206.598.000	61.457.037.700
320	SULAWESI UTARA	179	BITUNG	997412	Kab. Kepulauan Talaud	1705	4.712.409.000	12.644.167.000	17.356.576.000	4.263.133.800	12.644.167.000	16.907.300.800
321	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	998240	Kab. Minahasa Selatan	1706	6.994.080.000	20.976.647.000	27.970.727.000	6.350.142.000	20.976.647.000	27.326.789.000
322	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	998257	Kota Tomohon	1752	13.900.562.000	25.427.728.000	39.328.290.000	12.592.550.200	25.427.728.000	38.020.278.200
323	SULAWESI UTARA	179	BITUNG	987485	Kab. Minahasa Utara	1708	25.142.026.000	78.327.194.000	103.469.220.000	23.072.973.200	78.327.194.000	101.400.167.200
324	SULAWESI UTARA	083	T A H U N A	963389	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1712	4.220.159.000	11.957.693.000	16.177.852.000	2.192.840.000	11.957.693.000	14.150.533.000
325	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	963395	Kota Kotamobagu	1754	8.325.674.000	19.115.157.000	27.440.831.000	7.545.431.400	19.114.786.000	26.660.217.400
326	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	963409	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1711	4.717.614.000	20.483.467.000	25.201.081.000	4.282.487.800	20.483.467.000	24.765.954.800
327	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	963415	Kab. Minahasa Tenggara	1710	4.761.866.000	12.899.653.000	17.661.519.000	4.297.524.300	12.899.653.000	17.197.177.300
328	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	975022	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1714	4.786.309.000	20.982.309.000	25.768.618.000	4.334.895.800	20.982.309.000	25.317.204.800
329	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	977860	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1713	11.262.656.000	22.755.443.000	34.018.099.000	10.194.954.800	22.755.443.000	32.950.397.800
330	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	992960	Provinsi Sulawesi Tengah	1800	273.324.816.000	428.027.799.000	701.352.615.000	248.737.079.900	428.027.799.000	676.764.878.900
331	SULAWESI TENGAH	053	L U W U K	993000	Kab. Banggai	1804	371.257.292.000	573.512.996.000	944.770.288.000	271.062.972.600	573.512.996.000	844.575.968.600
332	SULAWESI TENGAH	053	L U W U K	980337	Kab. Banggai Kepulauan	1807	14.169.858.000	43.396.473.000	57.566.331.000	12.935.076.100	43.396.473.000	56.331.549.100
333	SULAWESI TENGAH	082	TOLI - TOLI	980316	Kab. Buol	1805	19.539.973.000	45.387.246.000	64.927.219.000	17.891.477.000	45.387.246.000	63.278.723.000
334	SULAWESI TENGAH	082	TOLI - TOLI	992998	Kab. Tolitoli	1803	16.753.500.000	46.133.020.000	62.886.520.000	15.279.435.400	46.133.020.000	61.412.455.400
335	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	992981	Kab. Donggala	1802	19.064.156.000	48.902.671.000	67.966.827.000	17.438.790.600	48.815.504.000	66.254.294.600
336	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	980320	Kab. Morowali	1806	224.579.402.000	380.097.371.000	604.676.773.000	204.898.051.800	379.445.602.400	584.343.654.200
337	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	992977	Kab. Poso	1801	15.886.425.000	66.834.914.000	82.721.339.000	11.417.966.700	66.834.914.000	78.252.880.700
338	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	993017	Kota Palu	1851	40.290.239.000	71.291.235.000	111.581.474.000	36.593.333.800	71.291.235.000	107.884.568.800
339	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	997582	Kab. Parigi Moutong	1808	17.420.109.000	49.453.526.000	66.873.635.000	15.997.281.190	49.453.526.000	65.450.807.190
340	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	987471	Kab. Tojo Una Una	1809	14.511.446.000	169.917.132.000	184.428.578.000	10.522.946.900	169.917.132.000	180.440.078.900
341	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	975172	Kab. Sigi	1812	15.925.961.000	45.840.342.000	61.766.303.000	14.650.076.300	45.840.342.000	60.490.418.300
342	SULAWESI TENGAH	053	L U W U K	999009	Kab. Banggai Laut	1813	13.867.213.000	44.944.220.000	58.811.433.000	12.612.027.900	44.944.220.000	57.556.247.900
343	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	999013	Kab. Morowali Utara	1814	42.510.418.000	381.704.088.000	424.214.506.000	38.581.726.400	381.704.088.000	420.285.814.400
344	SULAWESI SELATAN	136	MAKASSAR II	992722	Provinsi Sulawesi Selatan	1900	245.917.914.000	77.580.758.000	323.498.672.000	222.446.315.700	77.580.758.000	300.027.073.700
345	SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG	992846	Kab. Bantaeng	1912	9.776.166.000	4.301.587.000	14.077.753.000	8.886.671.600	4.301.587.000	13.188.258.600
346	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	992888	Kab. Barru	1916	8.271.399.000	4.546.802.000	12.818.201.000	4.489.036.000	4.546.802.000	9.035.838.000
347	SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE	992778	Kab. Bone	1905	21.816.274.000	10.018.596.000	31.834.870.000	19.938.251.100	10.018.596.000	29.956.847.100
348	SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG	992832	Kab. Bulukumba	1911	14.802.748.000	4.578.151.000	19.380.899.000	13.544.158.600	4.578.151.000	18.122.309.600
349	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	992935	Kab. Enrekang	1921	8.952.649.000	4.560.715.000	13.513.364.000	4.780.613.500	4.560.715.000	9.341.328.500
350	SULAWESI SELATAN	136	MAKASSAR II	992740	Kab. Gowa	1902	14.041.638.000	4.192.110.000	18.233.748.000	12.748.077.500	4.192.110.000	16.940.187.500
351	SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG	992850	Kab. Jeneponto	1913	10.371.563.000	3.979.729.000	14.351.292.000	9.425.603.900	3.979.729.000	13.405.332.900
352	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	992811	Kab. Luwu	1909	9.605.459.000	9.516.900.000	19.122.359.000	5.218.075.500	9.516.900.000	14.734.975.500
353	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	980341	Kab. Luwu Utara	1922	9.941.932.000	16.868.843.000	26.810.775.000	9.022.661.900	16.868.843.000	25.891.504.900
354	SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I	992799	Kab. Maros	1907	19.174.156.000	4.307.270.000	23.481.426.000	17.468.049.200	4.307.270.000	21.775.319.200
355	SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	1918	21.021.133.000	9.952.725.000	30.973.858.000	19.075.113.000	9.947.624.000	29.022.737.000
356	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	997604	Kota Palopo	1953	12.123.463.000	4.501.019.000	16.624.482.000	10.957.804.200	4.501.019.000	15.458.823.200
357	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	928282	Kab. Luwu Timur	1924	66.357.496.000	205.650.625.000	272.008.121.000	36.083.689.000	205.455.726.100	241.539.415.100
358	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	992736	Kab. Pinrang	1901	9.788.217.000	4.777.738.000	14.565.955.000	5.175.154.500	4.777.738.000	9.952.892.500
359	SULAWESI SELATAN	177	SINJAI	992825	Kab. Sinjai	1910	10.207.762.000	5.145.440.000	15.353.202.000	7.873.183.600	5.145.440.000	13.018.623.600
360	SULAWESI SELATAN	155	BENTENG	992867	Kab. Kepulauan Selayar	1914	7.582.087.000	8.325.901.000	15.907.988.000	6.898.331.900	8.325.901.000	15.224.232.900
361	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	992892	Kab. Sidenreng Rappang	1917	9.578.584.000	8.888.356.000	18.466.940.000	6.883.330.000	8.884.119.000	15.767.449.000
362	SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE	992914	Kab. Soppeng	1919	12.567.691.000	8.912.357.000	21.480.048.000	11.736.511.600	8.912.357.000	20.648.868.600
363	SULAWESI SELATAN	136	MAKASSAR II	992871	Kab. Takalar	1915	15.543.009.000	4.181.825.000	19.724.834.000	14.065.640.700	4.181.825.000	18.247.465.700
364	SULAWESI SELATAN	170	M A K A L E	992782	Kab. Tana Toraja	1906	8.711.852.000	4.504.352.000	13.216.204.000	6.349.722.800	4.504.352.000	10.854.074.800
365	SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE	992757	Kab. Wajo	1903	42.250.766.000	44.554.337.000	86.805.103.000	38.141.098.700	44.554.337.000	82.695.435.700
366	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	992956	Kota Parepare	1952	12.990.638.000	4.136.254.000	17.126.892.000	6.832.718.500	4.136.254.000	10.968.972.500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN		Daerah	Kode Pemda	Tahun 2025					
							Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
							DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
367	SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I	992942	Kota Makassar	1951	145.073.983.000	4.327.885.000	149.401.868.000	72.854.111.000	4.327.885.000	77.181.996.000
368	SULAWESI SELATAN	170	M A K A L E	975327	Kab. Toraja Utara	1925	8.745.825.000	4.462.818.000	13.208.643.000	4.770.422.500	4.462.818.000	9.233.240.500
369	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	993106	Provinsi Sulawesi Tenggara	2000	107.634.706.000	474.877.842.000	582.512.548.000	58.246.244.000	474.440.311.020	532.686.555.020
370	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	993127	Kab. Buton	2002	5.996.476.000	26.002.109.000	31.998.585.000	3.210.414.500	26.002.109.000	29.212.523.500
371	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	993110	Kab. Konawe	2009	22.457.659.000	232.566.265.000	255.023.924.000	11.927.635.500	231.094.708.200	243.022.343.700
372	SULAWESI TENGGARA	156	K O L A K A	993148	Kab. Kolaka	2004	51.993.809.000	393.348.072.000	445.341.881.000	37.896.748.100	393.348.072.000	431.244.820.100
373	SULAWESI TENGGARA	157	R A H A	993131	Kab. Muna	2003	6.895.327.000	28.593.179.000	35.488.506.000	3.649.441.500	28.551.551.000	32.200.992.500
374	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	993326	Kota Kendari	2051	37.212.584.000	36.462.376.000	73.674.960.000	19.718.772.500	36.462.376.000	56.181.148.500
375	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	994782	Kota Bau-bau	2052	8.227.786.000	23.256.663.000	31.484.449.000	4.362.557.500	23.256.663.000	27.619.220.500
376	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	998304	Kab. Konawe Selatan	2005	29.631.518.000	134.276.064.000	163.907.582.000	17.468.242.500	134.276.064.000	151.744.306.500
377	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	987642	Kab. Bombana	2006	30.787.967.000	251.337.702.000	282.125.669.000	23.017.112.300	251.337.702.000	274.354.814.300
378	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	987638	Kab. Wakatobi	2007	5.973.713.000	25.431.584.000	31.405.297.000	3.656.158.500	25.431.584.000	29.087.742.500
379	SULAWESI TENGGARA	156	K O L A K A	987443	Kab. Kolaka Utara	2008	13.884.670.000	111.906.112.000	125.790.782.000	10.825.318.900	111.906.112.000	122.731.430.900
380	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	963364	Kab. Konawe Utara	2010	96.679.787.000	356.510.504.000	453.190.291.000	54.078.492.000	356.336.414.000	410.414.906.000
381	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	963370	Kab. Buton Utara	2011	4.984.146.000	25.208.441.000	30.192.587.000	2.702.831.500	25.147.256.000	27.850.087.500
382	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	999014	Kab. Konawe Kepulauan	2013	5.592.750.000	37.675.158.000	43.267.908.000	4.304.203.200	37.675.158.000	41.979.361.200
383	SULAWESI TENGGARA	156	K O L A K A	999012	Kab. Kolaka Timur	2012	6.874.529.000	77.942.845.000	84.817.374.000	5.410.816.400	77.942.845.000	83.353.661.400
384	SULAWESI TENGGARA	157	R A H A	999915	Kab. Muna Barat	2053	4.916.180.000	25.325.215.000	30.241.395.000	2.669.756.500	25.325.215.000	27.994.971.500
385	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	999016	Kab. Buton Tengah	2055	13.635.383.000	59.044.284.000	72.679.667.000	7.761.877.000	59.044.284.000	66.806.161.000
386	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	999017	Kab. Buton Selatan	2054	4.738.470.000	24.386.441.000	29.124.911.000	2.576.599.500	24.351.720.000	26.928.319.500
387	BALI	037	D E N P A S A R	992274	Provinsi Bali	2200	267.679.054.000	16.854.000	267.695.908.000	243.264.339.500	16.168.000	243.280.507.500
388	BALI	037	D E N P A S A R	992342	Kab. Badung	2207	141.460.492.000	1.098.182.000	142.558.674.000	128.961.210.860	1.098.182.000	130.059.392.860
389	BALI	154	AMLAPURA	992338	Kab. Bangli	2206	20.393.862.000	836.461.000	21.230.323.000	18.574.904.400	836.461.000	19.411.365.400
390	BALI	132	SINGARAJA	992281	Kab. Buleleng	2201	30.680.206.000	1.383.417.000	32.063.623.000	27.853.866.800	1.383.417.000	29.237.283.800
391	BALI	037	D E N P A S A R	992317	Kab. Gianyar	2204	36.719.716.000	880.133.000	37.599.849.000	26.953.576.300	880.133.000	27.833.709.300
392	BALI	132	SINGARAJA	992295	Kab. Jembrana	2202	22.393.088.000	1.149.587.000	23.542.675.000	20.384.677.100	1.149.587.000	21.534.264.100
393	BALI	154	AMLAPURA	992321	Kab. Karangasem	2205	22.645.529.000	1.181.732.000	23.827.261.000	20.603.534.500	1.181.732.000	21.785.266.500
394	BALI	154	AMLAPURA	992300	Kab. Klungkung	2203	22.648.137.000	1.219.692.000	23.867.829.000	20.616.496.000	1.219.692.000	21.836.188.000
395	BALI	037	D E N P A S A R	992359	Kab. Tabanan	2208	28.354.555.000	943.253.000	29.297.808.000	25.761.274.200	943.253.000	26.704.527.200
396	BALI	037	D E N P A S A R	992363	Kota Denpasar	2251	128.995.876.000	890.178.000	129.886.054.000	116.777.303.700	890.178.000	117.667.481.700
397	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	992370	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2300	314.707.278.000	487.191.897.000	801.899.175.000	301.751.027.000	487.191.897.000	788.942.924.000
398	NUSA TENGGARA BARAT	071	B I M A	992410	Kab. Bima	2304	35.047.263.000	67.841.447.000	102.888.710.000	34.039.775.500	67.747.950.800	101.787.726.300
399	NUSA TENGGARA BARAT	071	B I M A	992431	Kab. Dompu	2306	37.350.030.000	66.834.405.000	104.184.435.000	36.170.927.100	66.834.405.000	103.005.332.100
400	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	992384	Kab. Lombok Barat	2301	46.378.658.000	66.591.483.000	112.970.141.000	45.055.338.300	66.591.483.000	111.646.821.300
401	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	992391	Kab. Lombok Tengah	2302	113.551.066.000	65.838.904.000	179.389.970.000	112.078.322.100	65.818.657.000	177.896.979.100
402	NUSA TENGGARA BARAT	169	S E L O N G	992406	Kab. Lombok Timur	2303	124.018.612.000	66.168.665.000	190.187.277.000	122.551.327.300	66.168.665.000	188.719.992.300
403	NUSA TENGGARA BARAT	101	SUMBAWA BESAR	992427	Kab. Sumbawa	2305	44.083.115.000	434.082.263.000	478.165.378.000	42.279.438.600	434.082.263.000	476.361.701.600
404	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	992448	Kota Mataram	2351	126.763.163.000	65.387.233.000	192.150.396.000	122.551.263.300	65.387.233.000	187.938.496.300
405	NUSA TENGGARA BARAT	071	B I M A	997625	Kota Bima	2352	37.206.902.000	65.511.976.000	102.718.878.000	35.976.444.500	65.511.976.000	101.488.420.500
406	NUSA TENGGARA BARAT	101	SUMBAWA BESAR	987450	Kab. Sumbawa Barat	2307	357.687.056.000	983.385.125.000	1.341.072.181.000	331.408.568.100	983.359.797.000	1.314.768.365.100
407	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	975477	Kab. Lombok Utara	2308	35.783.030.000	66.029.362.000	101.812.392.000	34.736.852.800	66.029.362.000	100.766.214.800
408	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	992452	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2400	55.484.943.000	1.719.972.000	57.204.915.000	50.253.128.300	1.693.062.600	51.946.190.900
409	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	992502	Kab. Alor	2405	3.309.656.000	2.858.968.000	6.168.624.000	3.014.209.400	2.858.968.000	5.873.177.400
410	NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA	992473	Kab. Belu	2402	3.943.169.000	999.455.000	4.942.624.000	3.573.208.900	999.455.000	4.572.663.900
411	NUSA TENGGARA TIMUR	040	E N D E	992537	Kab. Ende	2408	6.910.511.000	3.094.572.000	10.005.083.000	4.967.836.700	3.094.572.000	8.062.408.700
412	NUSA TENGGARA TIMUR	174	LARANTUKA	992520	Kab. Flores Timur	2407	3.873.317.000	2.162.511.000	6.035.828.000	2.202.934.000	2.158.298.000	4.361.232.000
413	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	992469	Kab. Kupang	2401	4.808.392.000	2.766.395.000	7.574.787.000	4.367.939.140	2.766.395.000	7.134.334.140
414	NUSA TENGGARA TIMUR	174	LARANTUKA	980379	Kab. Lembata	2413	3.160.285.000	2.148.371.000	5.308.656.000	1.754.255.000	2.148.371.000	3.902.626.000
415	NUSA TENGGARA TIMUR	111	R U T E N G	992558	Kab. Manggarai	2410	5.560.686.000	2.287.227.000	7.847.913.000	5.059.697.100	2.287.227.000	7.346.924.100
416	NUSA TENGGARA TIMUR	111	R U T E N G	992541	Kab. Ngada	2409	3.801.672.000	1.422.387.000	5.224.059.000	2.725.638.600	1.422.387.000	4.148.025.600
417	NUSA TENGGARA TIMUR	040	E N D E	992516	Kab. Sikka	2406	5.914.354.000	2.505.939.000	8.420.293.000	3.148.544.000	2.505.939.000	5.654.483.000
418	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	992579	Kab. Sumba Barat	2412	3.596.878.000	1.159.173.000	4.756.051.000	3.270.678.300	1.159.173.000	4.429.851.300
419	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	992562	Kab. Sumba Timur	2411	7.550.080.000	2.459.047.000	10.009.127.000	6.836.115.700	2.459.047.000	9.295.162.700
420	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	2404	4.360.785.000	1.295.908.000	5.656.693.000	3.983.323.800	1.295.908.000	5.279.231.800
421	NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA	992480	Kab. Timor Tengah Utara	2403	3.372.994.000	1.532.559.000	4.905.553.000	2.436.534.700	1.532.559.000	3.969.093.700
422	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	993368	Kota Kupang	2451	28.024.146.000	959.792.000	28.983.938.000	25.370.027.400	959.792.000	26.329.819.400
423	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	997578	Kab. Rote Ndao	2414	2.927.379.000	2.137.881.000	5.065.260.000	2.659.924.800	2.137.881.000	4.797.805.800
424	NUSA TENGGARA TIMUR	111	R U T E N G	998510	Kab. Manggarai Barat	2415	6.956.825.000	2.873.998.000	9.830.823.000	6.429.689.500	2.873.998.000	9.303.687.500
425	NUSA TENGGARA TIMUR	040	E N D E	963430	Kab. Nagekeo	2417	3.024.796.000	1.521.107.000	4.545.903.000	2.217.639.400	1.521.107.000	3.738.746.400
426	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	963446	Kab. Sumba Barat Daya	2419	3.248.639.000	1.296.137.000	4.544.776.000	2.967.265.500	1.296.137.000	4.263.402.500
427	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	963452	Kab. Sumba Tengah	2418	2.446.569.000	1.167.164.000	3.613.733.000	2.221.062.000	1.167.164.000	3.388.226.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN		Daerah	Kode Pemda	Tahun 2025					
							Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
							DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
428	NUSA TENGGARA TIMUR	111	R U T E N G	975911	Kab. Manggarai Timur	2420	3.291.250.000	1.430.052.000	4.721.302.000	1.853.013.000	1.430.052.000	3.283.065.000
429	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	978542	Kab. Sabu Raijua	2421	2.766.159.000	1.685.514.000	4.451.673.000	2.519.085.560	1.685.514.000	4.204.599.560
430	NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA	999007	Kab. Malaka	2422	2.889.403.000	1.135.010.000	4.024.413.000	2.630.192.700	1.135.010.000	3.765.202.700
431	MALUKU	061	A M B O N	993152	Provinsi Maluku	2100	38.617.306.000	41.509.859.000	80.127.165.000	19.697.203.000	41.509.859.000	61.207.062.000
432	MALUKU	104	SAUMLAKI	980358	Kab. Kepulauan Tanimbar	2103	4.799.864.000	6.460.078.000	11.259.942.000	4.329.293.200	6.413.085.580	10.742.378.780
433	MALUKU	173	M A S O H I	993169	Kab. Maluku Tengah	2101	10.628.664.000	9.258.847.000	19.887.511.000	9.640.302.400	9.258.847.000	18.899.149.400
434	MALUKU	084	T U A L	993173	Kab. Maluku Tenggara	2102	4.263.613.000	3.315.823.000	7.579.436.000	3.859.847.300	3.315.823.000	7.175.670.300
435	MALUKU	061	A M B O N	980362	Kab. Buru	2104	6.341.314.000	3.494.360.000	9.835.674.000	5.878.848.800	2.575.803.200	8.454.652.000
436	MALUKU	061	A M B O N	993202	Kota Ambon	2151	26.046.853.000	2.403.352.000	28.450.205.000	13.287.949.500	2.403.352.000	15.691.301.500
437	MALUKU	173	M A S O H I	987439	Kab. Seram Bagian Barat	2106	4.837.795.000	4.936.123.000	9.773.918.000	4.434.516.600	4.936.123.000	9.370.639.600
438	MALUKU	173	M A S O H I	987422	Kab. Seram Bagian Timur	2107	17.412.682.000	8.539.399.000	25.952.081.000	15.731.722.800	8.539.399.000	24.271.121.800
439	MALUKU	084	T U A L	987621	Kab. Kepulauan Aru	2105	4.936.719.000	6.320.882.000	11.257.601.000	4.472.251.900	6.320.882.000	10.793.133.900
440	MALUKU	084	T U A L	976061	Kota Tual	2152	3.551.362.000	3.037.813.000	6.589.175.000	3.248.628.800	3.037.813.000	6.286.441.800
441	MALUKU	104	SAUMLAKI	975772	Kab. Maluku Barat Daya	2109	5.603.189.000	16.118.247.000	21.721.436.000	5.072.827.000	16.118.247.000	21.191.074.000
442	MALUKU	061	A M B O N	975622	Kab. Buru Selatan	2110	3.578.120.000	4.011.322.000	7.589.442.000	1.848.029.500	3.029.172.300	4.877.201.800
443	PAPUA	063	JAYAPURA	993216	Provinsi Papua	2500	49.176.045.000	28.071.483.000	77.247.528.000	25.730.403.500	25.991.564.000	51.721.967.500
444	PAPUA	064	B I A K	993237	Kab. Biak Numfor	2502	9.114.466.000	5.003.223.000	14.117.689.000	8.414.286.100	5.003.223.000	13.417.509.100
445	PAPUA	063	JAYAPURA	993220	Kab. Jayapura	2501	16.570.819.000	7.346.374.000	23.917.193.000	15.212.269.100	7.346.374.000	22.558.643.100
446	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	993290	Kab. Jayawijaya	3801	7.871.734.000	2.430.509.000	10.302.243.000	6.181.879.000	2.430.509.000	8.612.388.000
447	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	993283	Kab. Merauke	3601	39.192.574.000	14.644.808.000	53.837.382.000	28.952.267.500	14.644.808.000	43.597.075.500
448	PAPUA TENGAH	141	T I M I K A	993401	Kab. Mimika	3701	838.573.422.000	1.535.745.240.000	2.374.318.662.000	758.612.249.500	1.534.560.582.700	2.293.172.832.200
449	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	993305	Kab. Nabire	3702	36.008.570.000	116.179.929.000	152.188.499.000	32.666.247.200	115.990.756.600	148.657.003.800
450	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	993393	Kab. Paniai	3703	25.660.160.000	180.861.827.000	206.521.987.000	23.322.364.400	180.861.827.000	204.184.191.400
451	PAPUA TENGAH	113	W A M E N A	993389	Kab. Puncak Jaya	3704	23.703.135.000	112.056.798.000	135.759.933.000	16.665.514.700	112.056.798.000	128.722.312.700
452	PAPUA	138	S E R U I	993258	Kab. Kepulauan Yapen	2504	7.302.822.000	5.428.622.000	12.731.444.000	5.796.479.400	5.428.622.000	11.225.101.400
453	PAPUA	063	JAYAPURA	993312	Kota Jayapura	2551	39.267.457.000	5.668.968.000	44.936.425.000	27.829.681.600	5.668.968.000	33.498.649.600
454	PAPUA	063	JAYAPURA	998392	Kab. Sarmi	2516	10.106.704.000	8.623.552.000	18.730.256.000	5.527.202.500	8.623.552.000	14.150.754.500
455	PAPUA	063	JAYAPURA	998400	Kab. Keerom	2517	11.963.419.000	7.063.261.000	19.026.680.000	6.349.139.000	5.232.229.000	11.581.368.000
456	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	998477	Kab. Yahukimo	3802	4.060.067.000	3.353.917.000	7.413.984.000	3.795.364.200	3.353.917.000	7.149.281.200
457	PAPUA PEGUNUNGAN	063	JAYAPURA	998421	Kab. Pegunungan Bintang	3806	3.078.254.000	4.019.415.000	7.097.669.000	1.666.303.000	4.019.415.000	5.685.718.000
458	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	998414	Kab. Tolikara	3803	2.493.970.000	2.547.183.000	5.041.153.000	1.369.193.500	2.547.183.000	3.916.376.500
459	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	998388	Kab. Boven Digoel	3602	17.435.165.000	9.817.677.000	27.252.842.000	15.952.967.900	9.817.677.000	25.770.644.900
460	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	998367	Kab. Mappi	3603	7.203.577.000	8.314.500.000	15.518.077.000	6.555.054.800	8.314.500.000	14.869.554.800
461	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	998371	Kab. Asmat	3604	7.372.049.000	107.179.764.000	114.551.813.000	5.603.736.200	107.179.764.000	112.783.500.200
462	PAPUA	138	S E R U I	998460	Kab. Waropen	2523	4.862.373.000	34.464.012.000	39.326.385.000	2.553.881.000	33.964.012.000	36.517.893.000
463	PAPUA	064	B I A K	987511	Kab. Supiori	2527	5.452.598.000	4.052.084.000	9.504.682.000	5.051.615.400	4.052.084.000	9.103.699.400
464	PAPUA	063	JAYAPURA	963461	Kab. Mamberamo Raya	2520	5.367.731.000	4.423.049.000	9.790.780.000	2.826.701.000	3.752.817.200	6.579.518.200
465	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	976219	Kab. Mamberamo Tengah	3804	2.142.418.000	3.072.544.000	5.214.962.000	1.198.592.500	3.072.544.000	4.271.136.500
466	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	976369	Kab. Yalimo	3805	2.469.451.000	3.099.424.000	5.568.875.000	1.397.690.500	3.099.424.000	4.497.114.500
467	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	976514	Kab. Lanny Jaya	3807	2.073.808.000	2.493.217.000	4.567.025.000	1.166.466.000	2.493.217.000	3.659.683.000
468	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	976664	Kab. Nduga	3808	2.098.164.000	99.683.547.000	101.781.711.000	1.178.584.500	99.433.547.000	100.612.131.500
469	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	976962	Kab. Dogiyai	3706	25.348.777.000	181.096.729.000	206.445.506.000	23.041.071.800	181.096.729.000	204.137.800.800
470	PAPUA TENGAH	141	T I M I K A	976812	Kab. Puncak	3705	24.981.031.000	180.843.277.000	205.824.308.000	13.249.554.500	180.843.277.000	194.092.831.500
471	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	978567	Kab. Intan Jaya	3707	25.358.285.000	173.039.292.000	198.397.577.000	18.329.911.300	173.039.292.000	191.369.203.300
472	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	978573	Kab. Deiyai	3708	25.458.475.000	173.033.315.000	198.491.790.000	18.477.450.000	173.033.315.000	191.510.765.000
473	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	980011	Provinsi Maluku Utara	2800	197.254.311.000	624.370.622.000	821.624.933.000	179.689.045.300	623.817.141.260	803.506.186.560
474	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	993194	Kab. Halmahera Tengah	2802	172.890.269.000	683.978.895.000	856.869.164.000	157.057.981.200	683.978.895.000	841.036.876.200
475	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	980028	Kota Ternate	2851	29.763.145.000	53.680.723.000	83.443.868.000	27.056.031.200	53.680.723.000	80.736.754.200
476	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	993180	Kab. Halmahera Barat	2807	14.906.092.000	132.250.025.000	147.156.117.000	13.634.205.500	132.250.025.000	145.884.230.500
477	MALUKU UTARA	112	TOBELO	998346	Kab. Halmahera Timur	2806	139.920.161.000	694.056.867.000	833.977.028.000	128.919.967.500	694.056.867.000	822.976.834.500
478	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	998325	Kab. Halmahera Selatan	2804	121.419.279.000	424.572.944.000	545.992.223.000	110.977.528.400	424.237.739.200	535.215.267.600
479	MALUKU UTARA	112	TOBELO	998311	Kab. Halmahera Utara	2803	33.248.159.000	54.501.286.000	87.749.445.000	30.136.666.800	54.501.286.000	84.637.952.800
480	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	998332	Kab. Kepulauan Sula	2805	16.926.711.000	57.681.347.000	74.608.058.000	15.638.086.000	57.681.347.000	73.319.433.000
481	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	998350	Kota Tidore Kepulauan	2853	20.671.403.000	217.677.244.000	238.348.647.000	19.081.452.700	217.327.663.680	236.409.116.380
482	MALUKU UTARA	112	TOBELO	978551	Kab. Pulau Morotai	2808	13.072.582.000	54.777.752.000	67.850.334.000	11.912.793.300	54.703.780.000	66.616.573.300
483	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	999010	Kab. Pulau Taliabu	2809	22.215.674.000	75.429.333.000	97.645.007.000	20.415.227.900	75.301.062.200	95.716.290.100
484	BANTEN	020	S E R A N G	993809	Provinsi Banten	2900	1.053.808.060.000	1.905.953.000	1.055.714.013.000	952.909.458.100	1.905.953.000	954.815.411.100
485	BANTEN	161	RANGKASBITUNG	990917	Kab. Lebak	2903	99.280.280.000	19.171.493.000	118.451.773.000	90.101.599.900	19.171.493.000	109.273.092.900
486	BANTEN	161	RANGKASBITUNG	990900	Kab. Pandeglang	2902	88.551.304.000	4.573.593.000	93.124.897.000	80.407.502.000	4.573.593.000	84.981.095.000
487	BANTEN	020	S E R A N G	990895	Kab. Serang	2901	138.066.501.000	2.682.502.000	140.749.003.000	124.969.811.800	2.682.502.000	127.652.313.800
488	BANTEN	127	TANGERANG	990921	Kab. Tangerang	2904	402.883.244.000	6.470.636.000	409.353.880.000	363.549.621.600	5.970.636.000	369.520.257.600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN		Daerah	Kode Pemda	Tahun 2025					
							Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
							DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
489	BANTEN	020	S E R A N G	980049	Kota Cilegon	2952	189.219.096.000	1.154.216.000	190.373.312.000	171.324.365.700	1.154.216.000	172.478.581.700
490	BANTEN	127	TANGERANG	991134	Kota Tangerang	2951	444.201.903.000	959.306.000	445.161.209.000	401.689.889.600	959.306.000	402.649.195.600
491	BANTEN	020	S E R A N G	975461	Kota Serang	2953	104.301.942.000	1.031.417.000	105.333.359.000	94.443.151.200	1.031.417.000	95.474.568.200
492	BANTEN	127	TANGERANG	978454	Kota Tangerang Selatan	2954	320.568.927.000	6.460.579.000	327.029.506.000	290.120.315.500	5.960.579.000	296.080.894.500
493	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	993813	Provinsi Bangka Belitung	3000	57.307.567.000	69.718.752.000	127.026.319.000	51.708.726.900	69.712.182.780	121.420.909.680
494	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	990629	Kab. Bangka	3002	32.408.516.000	69.491.373.000	101.899.889.000	29.282.306.000	69.491.373.000	98.773.679.000
495	BANGKA BELITUNG	107	TANJUNG PANDAN	990612	Kab. Belitung	3001	21.012.126.000	19.450.829.000	40.462.955.000	19.030.110.300	19.450.829.000	38.480.939.300
496	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	990701	Kota Pangkal Pinang	3051	24.963.281.000	17.864.842.000	42.828.123.000	22.480.054.100	17.864.842.000	40.344.896.100
497	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	998189	Kab. Bangka Selatan	3005	19.599.787.000	30.446.475.000	50.046.262.000	17.691.456.400	30.446.475.000	48.137.931.400
498	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	998172	Kab. Bangka Tengah	3004	14.633.363.000	36.364.786.000	50.998.149.000	13.241.344.400	36.364.786.000	49.606.130.400
499	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	998168	Kab. Bangka Barat	3003	25.535.417.000	82.795.114.000	108.330.531.000	23.085.987.000	82.795.114.000	105.881.101.000
500	BANGKA BELITUNG	107	TANJUNG PANDAN	998193	Kab. Belitung Timur	3006	20.737.843.000	23.212.605.000	43.950.448.000	18.778.976.200	23.212.605.000	41.991.581.200
501	GORONTALO	050	GORONTALO	993820	Provinsi Gorontalo	3100	20.772.312.000	14.992.402.000	35.764.714.000	18.742.904.800	14.992.402.000	33.735.306.800
502	GORONTALO	180	MARISA	980302	Kab. Boalemo	3102	5.423.562.000	3.830.129.000	9.253.691.000	4.909.563.800	3.830.129.000	8.739.692.800
503	GORONTALO	050	GORONTALO	993038	Kab. Gorontalo	3101	8.418.335.000	2.690.258.000	11.108.593.000	7.601.133.700	2.690.258.000	10.291.391.700
504	GORONTALO	050	GORONTALO	993084	Kota Gorontalo	3151	13.033.098.000	1.583.214.000	14.616.312.000	11.747.958.800	1.583.214.000	13.331.172.800
505	GORONTALO	180	MARISA	998261	Kab. Pohuwato	3103	6.253.418.000	5.089.169.000	11.342.587.000	5.646.906.000	5.089.169.000	10.736.075.000
506	GORONTALO	050	GORONTALO	998278	Kab. Bone Bolango	3104	5.500.438.000	8.583.309.000	14.083.747.000	4.961.311.900	8.583.309.000	13.544.620.900
507	GORONTALO	050	GORONTALO	963421	Kab. Gorontalo Utara	3107	5.469.127.000	2.671.197.000	8.140.324.000	5.018.256.500	2.457.049.500	7.475.306.000
508	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	998840	Provinsi Kepulauan Riau	3200	257.211.387.000	61.149.657.000	318.361.044.000	233.419.548.000	61.149.657.000	294.569.205.000
509	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	980121	Kab. Natuna	3203	126.823.056.000	92.869.372.000	219.692.428.000	116.736.592.200	92.869.372.000	209.605.964.200
510	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	977412	Kab. Kepulauan Anambas	3205	88.201.197.000	58.814.039.000	147.015.236.000	81.050.299.200	58.814.039.000	139.864.338.200
511	KEPULAUAN RIAU	137	B A T A M	980117	Kab. Karimun	3202	52.733.462.000	35.797.123.000	88.530.585.000	47.816.211.200	35.797.123.000	83.613.334.200
512	KEPULAUAN RIAU	137	B A T A M	990523	Kota Batam	3251	207.373.841.000	18.356.369.000	225.730.210.000	187.860.590.100	18.356.369.000	206.216.959.100
513	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	994708	Kota Tanjung Pinang	3252	36.621.090.000	17.798.938.000	54.420.028.000	33.204.519.900	17.798.938.000	51.003.457.900
514	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	987464	Kab. Lingga	3204	28.785.531.000	25.478.026.000	54.263.557.000	26.410.508.800	25.478.026.000	51.888.534.800
515	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	990480	Kab. Bintan	3201	42.570.327.000	22.182.894.000	64.753.221.000	38.898.061.600	22.168.576.000	61.066.637.600
516	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	998854	Provinsi Papua Barat	3300	276.802.681.000	1.464.790.313.000	1.741.592.994.000	144.513.790.000	1.464.790.313.000	1.609.304.103.000
517	PAPUA BARAT	067	FAK - FAK	993279	Kab. Fak Fak	3303	69.870.280.000	64.547.639.000	134.417.919.000	63.847.726.800	64.547.639.000	128.395.365.800
518	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	993241	Kab. Manokwari	3301	46.931.952.000	38.087.877.000	85.019.829.000	27.479.901.500	37.381.808.000	64.861.709.500
519	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	993262	Kab. Sorong	3902	117.068.788.000	69.631.068.000	186.699.856.000	106.794.269.600	69.562.310.000	176.356.579.600
520	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	980383	Kota Sorong	3951	22.142.573.000	14.441.700.000	36.584.273.000	14.466.008.500	14.441.700.000	28.907.708.500
521	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	998456	Kab. Raja Ampat	3904	35.744.380.000	91.848.237.000	127.592.617.000	22.338.808.000	91.848.237.000	114.187.045.000
522	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	998442	Kab. Sorong Selatan	3903	8.918.222.000	42.765.480.000	51.683.702.000	5.158.992.500	42.494.182.400	47.653.174.900
523	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	998481	Kab. Teluk Bintuni	3306	1.186.726.155.000	424.288.541.000	1.611.014.696.000	856.948.000.800	418.382.274.200	1.275.330.275.000
524	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	998498	Kab. Teluk Wondama	3307	31.770.141.000	96.662.247.000	128.432.388.000	22.640.685.900	96.662.247.000	119.302.932.900
525	PAPUA BARAT	067	FAK - FAK	998435	Kab. Kaimana	3308	35.922.461.000	173.501.109.000	209.423.570.000	25.520.268.800	173.501.109.000	199.021.377.800
526	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	978582	Kab. Maybrat	3906	8.279.535.000	40.438.625.000	48.718.160.000	4.749.928.500	40.157.670.200	44.907.598.700
527	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	978598	Kab. Tambrauw	3905	8.101.997.000	41.437.880.000	49.539.877.000	6.067.961.000	41.173.707.700	47.241.668.700
528	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	999004	Kab. Manokwari Selatan	3312	30.579.595.000	58.600.156.000	89.179.751.000	15.970.572.000	58.600.156.000	74.570.728.000
529	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	999005	Kab. Pegunungan Arfak	3311	30.181.561.000	59.342.787.000	89.524.348.000	21.526.694.800	59.342.787.000	80.869.481.800
530	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	955383	Provinsi Sulawesi Barat	3400	18.625.296.000	4.187.621.000	22.812.917.000	16.871.572.300	4.187.621.000	21.059.193.300
531	SULAWESI BARAT	059	M A J E N E	992804	Kab. Majene	3401	3.904.521.000	2.086.196.000	5.990.717.000	3.519.130.300	2.086.196.000	5.605.326.300
532	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	992761	Kab. Mamuju	3402	12.573.091.000	6.981.201.000	19.554.292.000	11.409.338.500	6.956.515.000	18.365.853.500
533	SULAWESI BARAT	059	M A J E N E	992921	Kab. Polewali Mandar	3404	5.832.570.000	2.578.225.000	8.410.795.000	5.256.228.500	2.578.225.000	7.834.453.500
534	SULAWESI BARAT	059	M A J E N E	997599	Kab. Mamasa	3405	3.577.269.000	1.652.537.000	5.229.806.000	3.235.146.000	1.652.537.000	4.887.683.000
535	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	998299	Kab. Pasangkayu	3403	12.092.639.000	5.415.532.000	17.508.171.000	6.303.746.000	5.342.791.000	11.646.537.000
536	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	999008	Kab. Mamuju Tengah	3406	4.077.064.000	3.832.730.000	7.909.794.000	3.688.077.600	3.832.730.000	7.520.807.600
537	KALIMANTAN UTARA	185	TANJUNG SELOR	999001	Provinsi Kalimantan Utara	3500	146.960.370.000	480.568.579.000	627.528.949.000	133.765.847.000	480.568.579.000	614.334.426.000
538	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	999916	Provinsi Papua Tengah	3700	281.506.253.000	762.506.371.000	1.044.012.624.000	253.526.970.800	761.994.622.000	1.015.521.592.800
539	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	999917	Provinsi Papua Selatan	3600	22.958.265.000	44.519.242.000	67.477.507.000	17.062.854.900	44.519.242.000	61.582.096.900
540	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	999918	Provinsi Papua Pegunungan	3800	10.901.123.000	3.363.217.000	14.264.340.000	6.208.937.500	3.363.217.000	9.572.154.500
541	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	999919	Provinsi Papua Barat Daya	3900	50.098.225.000	229.493.586.000	279.591.811.000	29.030.953.500	229.493.586.000	258.524.539.500
542	KALIMANTAN UTARA	185	TANJUNG SELOR	992122	Kab. Bulungan	3501	154.491.275.000	709.979.077.000	864.470.352.000	140.674.018.700	709.979.077.000	850.653.095.700
543	KALIMANTAN UTARA	185	TANJUNG SELOR	980269	Kab. Malinau	3503	84.668.284.000	1.364.909.225.000	1.449.577.509.000	78.311.080.600	1.364.909.225.000	1.443.220.305.600
544	KALIMANTAN UTARA	152	NUNUKAN	980252	Kab. Nunukan	3502	83.098.482.000	492.705.496.000	575.803.978.000	75.536.426.700	491.258.577.200	566.795.003.900
545	KALIMANTAN UTARA	048	T A R A K A N	941901	Kota Tarakan	3551	126.069.794.000	105.129.784.000	231.199.578.000	114.444.187.700	105.129.784.000	219.573.971.700
546	KALIMANTAN UTARA	048	T A R A K A N	975766	Kab. Tana Tidung	3504	230.265.361.000	293.967.262.000	524.232.623.000	209.317.211.300	293.967.262.000	503.284.473.300
Jumlah							81.459.715.714.000	96.918.049.902.000	178.377.765.616.000	72.019.863.677.780	96.870.655.441.100	168.890.519.118.880

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN	Daerah	Kode Pemda	PPh Perorangan		PBB		CHT		Total	
						Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8		7	8	9	10		11
1	ACEH	001	BANDA ACEH	Provinsi Aceh	0600	87.921.007.000	87.921.007.000	51.421.189.000	51.421.189.000	6.447.864.000	6.447.864.000	145.790.060.000	145.790.060.000
2	ACEH	003	MEULABOH	Kab. Aceh Barat	0606	8.063.828.000	8.063.828.000	27.013.345.000	27.013.345.000	366.357.000	366.357.000	35.443.530.000	35.443.530.000
3	ACEH	001	BANDA ACEH	Kab. Aceh Besar	0601	9.398.815.000	9.398.815.000	4.171.707.000	4.171.707.000	3.628.331.000	3.628.331.000	17.198.853.000	17.198.853.000
4	ACEH	074	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Selatan	0605	3.818.645.000	3.818.645.000	2.758.876.000	2.758.876.000	367.716.000	367.716.000	6.945.237.000	6.945.237.000
5	ACEH	074	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Singkil	0610	3.530.033.000	3.530.033.000	9.108.007.000	9.108.007.000	367.171.000	367.171.000	13.005.211.000	13.005.211.000
6	ACEH	122	TAKENGON	Kab. Aceh Tengah	0607	4.540.206.000	4.540.206.000	3.092.325.000	3.092.325.000	3.522.634.000	3.522.634.000	11.155.165.000	11.155.165.000
7	ACEH	105	KUTACANE	Kab. Aceh Tenggara	0608	3.522.283.000	3.522.283.000	2.307.767.000	2.307.767.000	367.135.000	367.135.000	6.197.185.000	6.197.185.000
8	ACEH	002	L A N G S A	Kab. Aceh Timur	0604	5.731.153.000	5.731.153.000	47.434.695.000	47.434.695.000	426.690.000	426.690.000	53.592.538.000	53.592.538.000
9	ACEH	089	LHOKSEUMAWE	Kab. Aceh Utara	0603	10.581.001.000	10.581.001.000	42.763.313.000	42.763.313.000	446.268.000	446.268.000	53.790.582.000	53.790.582.000
10	ACEH	089	LHOKSEUMAWE	Kab. Bireuen	0611	5.840.422.000	5.840.422.000	3.061.014.000	3.061.014.000	367.078.000	367.078.000	9.268.514.000	9.268.514.000
11	ACEH	001	BANDA ACEH	Kab. Pidie	0602	6.018.386.000	6.018.386.000	2.450.391.000	2.450.391.000	673.750.000	673.750.000	9.142.527.000	9.142.527.000
12	ACEH	003	MEULABOH	Kab. Simeulue	0609	3.009.677.000	1.575.897.500	1.893.150.000	1.044.203.500	358.108.000	358.108.000	5.260.935.000	2.978.209.000
13	ACEH	001	BANDA ACEH	Kota Banda Aceh	0651	35.548.509.000	31.998.367.900	2.371.123.000	2.196.214.000	368.446.000	368.446.000	38.288.078.000	34.563.027.900
14	ACEH	001	BANDA ACEH	Kota Sabang	0652	3.039.582.000	1.575.340.500	1.888.700.000	1.082.841.000	367.716.000	367.716.000	5.295.998.000	3.025.897.500
15	ACEH	002	L A N G S A	Kota Langsa	0653	7.953.929.000	7.953.929.000	3.250.133.000	3.250.133.000	366.708.000	366.708.000	11.570.770.000	11.570.770.000
16	ACEH	089	LHOKSEUMAWE	Kota Lhokseumawe	0654	11.834.591.000	11.834.591.000	2.320.063.000	2.320.063.000	530.739.000	530.739.000	14.685.393.000	14.685.393.000
17	ACEH	105	KUTACANE	Kab. Gayo Lues	0613	2.897.640.000	2.897.640.000	2.490.419.000	2.490.419.000	2.252.618.000	2.252.618.000	7.640.677.000	7.640.677.000
18	ACEH	074	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Barat Daya	0612	3.665.794.000	1.898.197.500	3.238.153.000	1.793.309.500	366.900.000	356.203.860	7.270.847.000	4.047.710.860
19	ACEH	003	MEULABOH	Kab. Aceh Jaya	0614	3.200.541.000	2.916.386.000	2.789.189.000	2.575.230.900	366.357.000	355.660.860	6.356.087.000	5.847.277.760
20	ACEH	003	MEULABOH	Kab. Nagan Raya	0615	6.511.345.000	6.511.345.000	19.700.881.000	19.700.881.000	376.969.000	376.969.000	26.589.195.000	26.589.195.000
21	ACEH	002	L A N G S A	Kab. Aceh Tamiang	0616	6.082.396.000	6.082.396.000	84.846.531.000	84.846.531.000	367.716.000	367.716.000	91.296.643.000	91.296.643.000
22	ACEH	122	TAKENGON	Kab. Bener Meriah	0617	3.400.026.000	3.400.026.000	2.644.918.000	2.644.918.000	436.100.000	436.100.000	6.481.044.000	6.481.044.000
23	ACEH	001	BANDA ACEH	Kab. Pidie Jaya	0618	3.446.876.000	3.446.876.000	1.947.830.000	1.947.830.000	675.248.000	675.248.000	6.069.954.000	6.069.954.000
24	ACEH	074	TAPAKTUAN	Kota Subulussalam	0656	3.204.127.000	3.204.127.000	3.703.815.000	3.703.815.000	366.356.000	366.356.000	7.274.298.000	7.274.298.000
25	SUMATERA UTARA	004	M E D A N I	Provinsi Sumatera Utara	0700	364.187.959.000	364.187.959.000	127.958.032.000	127.958.032.000	8.563.826.000	8.563.826.000	500.709.817.000	500.709.817.000
26	SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kab. Asahan	0710	15.117.767.000	13.715.339.700	58.310.181.000	52.861.924.200	334.524.000	334.524.000	73.762.472.000	66.911.787.900
27	SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG	Kab. Dairi	0707	8.066.029.000	7.293.447.700	4.536.559.000	4.122.656.200	840.891.000	840.891.000	13.443.479.000	12.256.994.900
28	SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI	Kab. Deli Serdang	0701	51.416.627.000	51.416.627.000	31.045.380.000	31.045.380.000	334.758.000	334.758.000	82.796.765.000	82.796.765.000
29	SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG	Kab. Karo	0702	10.689.043.000	9.620.650.300	4.557.023.000	4.127.126.900	1.572.093.000	1.572.093.000	16.818.159.000	15.319.870.200
30	SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu	0706	13.527.583.000	9.562.726.900	34.562.941.000	24.967.292.200	334.524.000	334.524.000	48.425.048.000	34.864.543.100
31	SUMATERA UTARA	123	M E D A N II	Kab. Langkat	0703	15.670.900.000	15.670.900.000	119.180.153.000	119.180.153.000	334.524.000	334.524.000	135.185.577.000	135.185.577.000
32	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Mandailing Natal	0713	10.961.475.000	10.961.475.000	44.039.513.000	44.039.513.000	344.378.000	344.378.000	55.345.366.000	55.345.366.000
33	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias	0711	7.500.932.000	6.888.238.100	3.817.619.000	3.533.105.800	334.524.000	334.524.000	11.653.075.000	10.755.867.900
34	SUMATERA UTARA	005	PEMATANG SIANTAR	Kab. Simalungun	0705	18.278.950.000	16.568.948.900	50.345.190.000	45.711.251.900	1.118.188.000	1.118.188.000	69.742.328.000	63.398.388.800
35	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Tapanuli Selatan	0709	17.571.506.000	17.571.506.000	49.730.040.000	49.730.040.000	436.606.000	436.606.000	67.738.152.000	67.738.152.000
36	SUMATERA UTARA	106	SIBOLGA	Kab. Tapanuli Tengah	0704	9.746.049.000	9.746.049.000	8.916.477.000	8.916.477.000	334.524.000	334.524.000	18.997.050.000	18.997.050.000
37	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	Kab. Tapanuli Utara	0708	10.616.829.000	10.616.829.000	42.434.042.000	42.434.042.000	2.258.640.000	2.258.640.000	55.309.511.000	55.309.511.000
38	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	Kab. Toba Samosir	0717	12.475.930.000	11.340.367.800	4.207.928.000	3.872.348.000	334.524.000	334.524.000	17.018.382.000	15.547.239.800
39	SUMATERA UTARA	123	M E D A N II	Kota Binjai	0753	12.667.053.000	12.667.053.000	6.350.054.000	6.350.054.000	334.524.000	334.524.000	19.351.631.000	19.351.631.000
40	SUMATERA UTARA	004	M E D A N I	Kota Medan	0751	266.118.877.000	266.118.877.000	5.639.149.000	5.639.149.000	400.220.000	400.220.000	272.158.246.000	272.158.246.000
41	SUMATERA UTARA	005	PEMATANG SIANTAR	Kota Pematang Siantar	0754	18.101.170.000	9.050.585.000	3.091.058.000	1.634.039.000	7.775.407.000	7.775.407.000	28.967.635.000	18.460.031.000
42	SUMATERA UTARA	106	SIBOLGA	Kota Sibolga	0756	10.373.136.000	10.373.136.000	3.562.762.000	3.562.762.000	334.524.000	334.524.000	14.270.422.000	14.270.422.000
43	SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kota Tanjung Balai	0755	8.839.184.000	8.050.272.000	3.708.313.000	3.418.489.100	334.524.000	334.524.000	12.882.021.000	11.803.285.100
44	SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI	Kota Tebing Tinggi	0752	10.346.566.000	10.346.566.000	3.548.788.000	3.548.788.000	334.524.000	334.524.000	14.229.878.000	14.229.878.000
45	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	Kota Padang Sidempuan	0757	12.395.631.000	12.395.631.000	4.122.621.000	4.122.621.000	334.524.000	334.524.000	16.852.776.000	16.852.776.000
46	SUMATERA UTARA	119	SIDIKALANG	Kab. Pakpak Bharat	0715	6.510.576.000	6.510.576.000	3.527.430.000	3.527.430.000	345.428.000	345.428.000	10.383.434.000	10.383.434.000
47	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Selatan	0714	7.960.825.000	7.960.825.000	5.450.656.000	5.450.656.000	334.524.000	334.524.000	13.746.005.000	13.746.005.000
48	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	Kab. Humbang Hasundutan	0716	8.197.827.000	8.197.827.000	4.367.039.000	4.367.039.000	669.577.000	669.577.000	13.234.443.000	13.234.443.000
49	SUMATERA UTARA	124	TEBING TINGGI	Kab. Serdang Bedagai	0720	12.441.935.000	12.441.935.000	37.775.876.000	37.775.876.000	334.524.000	334.524.000	50.552.335.000	50.552.335.000
50	SUMATERA UTARA	125	BALIGE	Kab. Samosir	0712	7.591.580.000	6.948.842.400	4.456.468.000	4.098.269.900	334.524.000	334.524.000	12.382.572.000	11.381.636.300
51	SUMATERA UTARA	076	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kab. Batu Bara	0721	20.096.685.000	20.096.685.000	14.229.672.000	14.229.672.000	334.524.000	334.524.000	34.660.881.000	34.660.881.000
52	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Padang Lawas	0722	8.705.353.000	7.895.060.000	23.798.629.000	21.581.544.700	429.307.000	429.307.000	32.933.289.000	29.905.911.700
53	SUMATERA UTARA	006	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Padang Lawas Utara	0723	8.061.199.000	7.344.333.600	20.149.052.000	18.288.050.100	334.524.000	334.524.000	28.544.775.000	25.966.907.700
54	SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu Selatan	0724	11.272.624.000	8.165.900.200	62.718.043.000	45.206.456.800	334.017.000	334.017.000	74.324.684.000	53.706.374.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN	Daerah	Kode Pemda	PPh Perorangan		PBB		CHT		Total	
						Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8		7	8	9	10		11
55	SUMATERA UTARA	075	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu Utara	0725	8.317.730.000	5.822.411.000	28.897.350.000	20.800.497.600	334.524.000	334.524.000	37.549.604.000	26.957.432.600
56	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Utara	0726	7.107.783.000	6.503.089.300	3.771.697.000	3.475.607.000	334.524.000	334.524.000	11.214.004.000	10.313.220.300
57	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Barat	0727	7.680.234.000	7.038.578.000	3.819.338.000	3.521.128.700	334.524.000	334.524.000	11.834.096.000	10.894.230.700
58	SUMATERA UTARA	007	GUNUNG SITOLI	Kota Gunungsitoli	0761	9.825.752.000	8.980.387.700	3.871.399.000	3.583.417.000	334.524.000	334.524.000	14.031.675.000	12.898.328.700
59	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	Provinsi Sumatera Barat	0800	119.708.401.000	119.708.401.000	21.580.617.000	21.580.617.000	687.725.000	687.725.000	141.976.743.000	141.976.743.000
60	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kab. Lima Puluh Kota	0803	5.690.798.000	5.690.798.000	3.047.947.000	3.047.947.000	454.605.000	454.605.000	9.193.350.000	9.193.350.000
61	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kab. Agam	0801	8.672.969.000	8.672.969.000	5.649.201.000	5.649.201.000	273.796.000	273.796.000	14.595.966.000	14.595.966.000
62	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	Kab. Kepulauan Mentawai	0809	4.364.332.000	4.364.332.000	3.472.206.000	3.472.206.000	47.670.000	47.670.000	7.884.208.000	7.884.208.000
63	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	Kab. Padang Pariaman	0805	7.791.917.000	7.791.917.000	1.425.871.000	1.425.871.000	47.670.000	47.670.000	9.265.458.000	9.265.458.000
64	SUMATERA BARAT	091	LUBUK SIKAPING	Kab. Pasaman	0802	5.711.906.000	5.711.906.000	1.491.298.000	1.491.298.000	51.981.000	51.981.000	7.255.185.000	7.255.185.000
65	SUMATERA BARAT	142	P A I N A N	Kab. Pesisir Selatan	0806	7.645.229.000	7.645.229.000	11.281.451.000	11.281.451.000	46.171.000	46.171.000	18.972.851.000	18.972.851.000
66	SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG	Kab. Sijunjung	0813	5.129.612.000	4.635.337.700	4.037.955.000	3.664.359.300	47.670.000	47.670.000	9.215.237.000	8.347.367.000
67	SUMATERA BARAT	090	S O L O K	Kab. Solok	0804	5.395.701.000	5.395.701.000	1.837.966.000	1.837.966.000	143.933.000	143.933.000	7.377.600.000	7.377.600.000
68	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kab. Tanah Datar	0807	6.823.418.000	6.823.418.000	1.440.064.000	1.440.064.000	265.228.000	265.228.000	8.528.710.000	8.528.710.000
69	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kota Bukit Tinggi	0851	11.357.846.000	10.225.899.100	1.182.791.000	1.076.274.700	47.760.000	47.760.000	12.588.397.000	11.349.933.800
70	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kota Padang Panjang	0852	5.200.656.000	5.200.656.000	1.189.868.000	1.189.868.000	47.670.000	47.670.000	6.438.194.000	6.438.194.000
71	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	Kota Padang	0855	87.911.246.000	87.911.246.000	8.114.043.000	8.114.043.000	47.670.000	47.670.000	96.072.959.000	96.072.959.000
72	SUMATERA BARAT	011	BUKITTINGGI	Kota Payakumbuh	0856	6.799.887.000	6.132.805.300	1.228.473.000	1.122.833.900	47.998.000	47.998.000	8.076.358.000	7.303.637.200
73	SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG	Kota Sawahlunto	0854	5.538.303.000	5.001.076.900	6.728.389.000	6.248.880.100	80.428.000	80.428.000	12.347.120.000	11.330.385.000
74	SUMATERA BARAT	090	S O L O K	Kota Solok	0853	7.419.539.000	7.419.539.000	1.220.555.000	1.220.555.000	47.760.000	47.760.000	8.687.854.000	8.687.854.000
75	SUMATERA BARAT	010	P A D A N G	Kota Pariaman	0857	5.632.966.000	5.632.966.000	1.179.833.000	1.179.833.000	47.760.000	47.760.000	6.860.559.000	6.860.559.000
76	SUMATERA BARAT	091	LUBUK SIKAPING	Kab. Pasaman Barat	0812	6.388.014.000	6.388.014.000	16.706.296.000	16.706.296.000	47.760.000	47.760.000	23.142.070.000	23.142.070.000
77	SUMATERA BARAT	077	SIJUNJUNG	Kab. Dharmasraya	0810	5.897.125.000	5.307.551.300	12.590.707.000	11.414.302.500	47.760.000	47.760.000	18.535.592.000	16.769.613.800
78	SUMATERA BARAT	090	S O L O K	Kab. Solok Selatan	0811	6.449.704.000	5.846.112.300	28.045.566.000	25.429.076.800	47.670.000	47.670.000	34.542.940.000	31.322.859.100
79	RIAU	008	PEKANBARU	Provinsi Riau	0900	248.451.679.000	224.477.961.300	735.469.259.000	669.618.132.900	1.017.000	31.000	983.921.955.000	894.096.125.200
80	RIAU	120	D U M A I	Kab. Bengkalis	0902	49.360.324.000	44.640.602.200	1.695.607.234.000	1.541.796.614.400	113.000	-	1.744.967.671.000	1.586.437.216.600
81	RIAU	092	R E N G A T	Kab. Indragiri Hilir	0905	18.294.915.000	16.556.863.000	83.630.239.000	76.103.759.100	113.000	-	101.925.267.000	92.660.622.100
82	RIAU	092	R E N G A T	Kab. Indragiri Hulu	0904	18.619.673.000	16.837.499.100	116.913.433.000	106.404.231.100	113.000	-	135.533.219.000	123.241.730.200
83	RIAU	008	PEKANBARU	Kab. Kampar	0901	19.956.809.000	18.034.608.100	363.612.828.000	331.663.681.700	113.000	-	383.569.750.000	349.698.289.800
84	RIAU	092	R E N G A T	Kab. Kuantan Singingi	0912	16.114.980.000	14.596.435.400	58.996.698.000	53.679.638.800	113.000	-	75.111.791.000	68.276.074.200
85	RIAU	008	PEKANBARU	Kab. Pelalawan	0906	35.265.918.000	31.822.177.800	176.622.784.000	160.105.993.800	113.000	-	211.888.815.000	191.928.171.600
86	RIAU	120	D U M A I	Kab. Rokan Hilir	0908	17.425.810.000	15.785.606.500	446.436.952.000	408.227.685.500	113.000	-	463.862.875.000	424.013.292.000
87	RIAU	008	PEKANBARU	Kab. Rokan Hulu	0907	18.666.813.000	16.873.619.600	104.680.560.000	95.147.891.000	113.000	-	123.347.486.000	112.021.510.600
88	RIAU	008	PEKANBARU	Kab. Siak	0909	35.962.762.000	32.546.528.100	584.241.087.000	532.033.748.800	113.000	-	620.203.962.000	564.580.276.900
89	RIAU	120	D U M A I	Kota Dumai	0953	40.010.710.000	36.159.294.600	61.252.662.000	55.761.517.000	113.000	-	101.263.485.000	91.920.811.600
90	RIAU	008	PEKANBARU	Kota Pekanbaru	0951	132.313.634.000	119.339.194.900	61.388.301.000	55.926.363.000	1.486.000	1.486.000	193.703.421.000	175.267.043.900
91	RIAU	120	D U M A I	Kab. Kepulauan Meranti	0913	14.509.249.000	13.131.118.100	99.670.394.000	90.817.536.200	113.000	-	114.179.756.000	103.948.654.300
92	JAMBI	012	J A M B I	Provinsi Jambi	1000	68.928.463.000	62.090.034.400	134.453.040.000	122.572.530.300	501.395.000	486.888.920	203.882.898.000	185.149.453.620
93	JAMBI	012	J A M B I	Kab. Batanghari	1001	6.718.241.000	6.066.462.800	82.774.922.000	74.836.088.400	62.558.000	62.558.000	89.555.721.000	80.965.109.200
94	JAMBI	078	MUARA BUNGO	Kab. Bungo	1003	10.021.364.000	9.040.799.300	20.696.936.000	18.774.012.400	62.557.000	2.115.000	30.780.857.000	27.816.926.700
95	JAMBI	013	SUNGAI PENUH	Kab. Kerinci	1005	5.246.969.000	4.765.910.900	10.863.523.000	9.942.225.700	333.902.000	333.902.000	16.444.394.000	15.042.038.600
96	JAMBI	159	B A N G K O	Kab. Merangin	1006	5.933.166.000	4.159.428.000	10.654.896.000	7.954.725.300	67.126.000	2.759.000	16.655.188.000	12.116.912.300
97	JAMBI	012	J A M B I	Kab. Muaro Jambi	1009	9.428.832.000	8.527.642.600	104.801.858.000	95.437.234.100	60.442.000	-	114.291.132.000	103.964.876.700
98	JAMBI	159	B A N G K O	Kab. Sarolangun	1004	6.827.280.000	6.172.101.900	53.239.646.000	48.297.041.000	60.442.000	-	60.127.368.000	54.469.142.900
99	JAMBI	143	KUALA TUNGKAL	Kab. Tanjung Jabung Barat	1002	7.776.006.000	6.999.753.800	266.960.070.000	244.738.860.800	60.781.000	339.000	274.796.857.000	251.738.953.600
100	JAMBI	143	KUALA TUNGKAL	Kab. Tanjung Jabung Timur	1007	7.641.334.000	6.881.602.500	65.805.783.000	60.015.359.700	60.442.000	-	73.507.559.000	66.896.962.200
101	JAMBI	078	MUARA BUNGO	Kab. Tebo	1008	5.906.341.000	5.337.774.500	30.958.680.000	28.067.333.300	60.442.000	60.442.000	36.925.463.000	33.465.549.800
102	JAMBI	012	J A M B I	Kota Jambi	1051	44.627.745.000	40.170.524.900	41.709.804.000	37.958.739.600	459.359.000	445.578.230	86.796.908.000	78.574.842.730
103	JAMBI	013	SUNGAI PENUH	Kota Sungai Penuh	1052	5.568.708.000	5.012.681.400	8.858.230.000	8.096.211.000	74.181.000	-	14.501.119.000	13.108.892.400
104	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	Provinsi Sumatera Selatan	1100	259.201.074.000	234.142.191.400	686.302.287.000	623.186.638.000	89.131.000	89.131.000	945.592.492.000	857.417.960.400
105	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	Kab. Lahat	1106	22.593.211.000	20.498.001.000	210.514.428.000	192.383.267.500	120.719.000	120.719.000	233.228.358.000	213.001.987.500
106	SUMATERA SELATAN	160	S E K A Y U	Kab. Musi Banyuasin	1103	29.446.738.000	26.837.821.500	1.141.691.949.000	1.035.357.829.100	7.201.000	7.201.000	1.171.145.888.000	1.062.202.851.600
107	SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU	Kab. Musi Rawas	1107	12.817.788.000	11.673.108.800	288.172.822.000	260.974.790.900	7.086.000	123.000	300.997.696.000	272.648.022.700
108	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	Kab. Muara Enim	1105	48.252.382.000	33.800.993.200	687.692.557.000	502.405.314.100	6.963.000	-	735.951.902.000	536.206.307.300

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN	Daerah	Kode Pemda	PPh Perorangan		PBB		CHT		Total	
						Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8		7	8	9	10		11
109	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ilir	1108	20.064.353.000	18.195.507.800	120.955.114.000	110.679.497.500	6.963.000	-	141.026.430.000	128.875.005.300
110	SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu	1104	14.739.420.000	13.411.464.000	106.887.074.000	97.357.403.400	6.963.000	-	121.633.457.000	110.768.867.400
111	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	Kota Palembang	1151	161.950.109.000	146.244.472.500	29.473.177.000	27.020.623.800	6.963.000	-	191.430.249.000	173.265.096.300
112	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	Kota Prabumulih	1153	21.904.694.000	11.495.267.000	119.278.486.000	63.704.224.500	6.963.000	-	141.190.143.000	75.199.491.500
113	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	Kota Pagar Alam	1154	10.207.001.000	9.314.676.800	33.803.607.000	31.079.689.600	6.963.000	-	44.017.571.000	40.394.366.400
114	SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU	Kota Lubuk Linggau	1155	13.830.483.000	12.574.053.900	30.769.440.000	28.288.487.200	6.963.000	-	44.606.886.000	40.862.541.100
115	SUMATERA SELATAN	160	S E K A Y U	Kab. Banyuasin	1109	20.236.742.000	18.413.075.400	96.594.837.000	88.126.515.600	6.963.000	-	116.838.542.000	106.539.591.000
116	SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	Kab. Ogan Ilir	1112	11.556.987.000	10.438.444.200	76.399.836.000	69.285.293.100	7.200.000	237.000	87.964.023.000	79.723.974.300
117	SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1110	12.212.578.000	11.148.053.400	38.637.083.000	35.532.063.500	6.963.000	-	50.856.624.000	46.680.116.900
118	SUMATERA SELATAN	109	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1111	10.615.507.000	9.711.406.000	34.181.609.000	31.467.825.300	23.766.000	23.766.000	44.820.882.000	41.202.997.300
119	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	Kab. Empat Lawang	1117	9.552.940.000	8.709.442.300	36.143.852.000	33.051.842.400	6.963.000	-	45.703.755.000	41.761.284.700
120	SUMATERA SELATAN	144	L A H A T	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1118	12.959.071.000	11.834.393.600	569.069.376.000	516.260.496.900	6.963.000	-	582.035.410.000	528.094.890.500
121	SUMATERA SELATAN	070	LUBUK LINGGAU	Kab. Musi Rawas Utara	1119	11.045.638.000	10.114.274.100	76.517.505.000	69.992.719.300	6.963.000	-	87.570.106.000	80.106.993.400
122	BENGKULU	016	B E N G K U L U	Provinsi Bengkulu	2600	33.837.839.000	17.114.564.000	14.365.812.000	8.105.562.000	-	-	48.203.651.000	25.220.126.000
123	BENGKULU	121	M A N N A	Kab. Bengkulu Selatan	2602	4.112.939.000	3.714.458.300	1.820.354.000	1.653.604.900	-	-	5.933.293.000	5.368.063.200
124	BENGKULU	016	B E N G K U L U	Kab. Bengkulu Utara	2601	4.869.926.000	4.385.083.000	26.683.745.000	24.295.053.000	-	-	31.553.671.000	28.680.136.000
125	BENGKULU	146	C U R U P	Kab. Rejang Lebong	2603	4.266.219.000	3.843.226.800	1.877.451.000	1.714.003.400	-	-	6.143.670.000	5.557.230.200
126	BENGKULU	016	B E N G K U L U	Kota Bengkulu	2651	23.945.517.000	21.566.530.600	1.620.888.000	1.487.272.000	-	-	25.566.405.000	23.053.802.600
127	BENGKULU	121	M A N N A	Kab. Kaur	2605	2.837.657.000	2.561.596.600	2.941.370.000	2.658.095.800	-	-	5.779.027.000	5.219.692.400
128	BENGKULU	121	M A N N A	Kab. Seluma	2604	3.362.984.000	3.047.863.600	6.531.989.000	5.975.853.500	-	-	9.894.973.000	9.023.717.100
129	BENGKULU	181	MUKOMUKO	Kab. Mukomuko	2606	4.363.586.000	3.931.906.400	16.069.506.000	14.624.281.100	-	-	20.433.092.000	18.556.187.500
130	BENGKULU	146	C U R U P	Kab. Lebong	2607	2.935.783.000	2.648.568.100	4.642.988.000	4.214.149.100	-	-	7.578.771.000	6.862.717.200
131	BENGKULU	146	C U R U P	Kab. Kepahiang	2608	3.862.089.000	3.497.983.000	1.867.261.000	1.704.890.700	-	-	5.729.350.000	5.202.873.700
132	BENGKULU	016	B E N G K U L U	Kab. Bengkulu Tengah	2609	3.480.786.000	3.149.674.200	12.922.405.000	11.931.974.000	-	-	16.403.191.000	15.081.648.200
133	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Provinsi Lampung	1200	106.729.255.000	96.352.049.300	32.337.547.000	29.474.176.000	1.325.131.000	1.325.131.000	140.391.933.000	127.151.356.300
134	LAMPUNG	145	L I W A	Kab. Lampung Barat	1204	5.676.498.000	4.087.397.100	2.646.239.000	1.989.508.700	126.660.000	126.660.000	8.449.397.000	6.203.565.800
135	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	1201	16.728.361.000	13.665.634.000	11.532.778.000	9.446.067.800	125.524.000	125.524.000	28.386.663.000	23.237.225.800
136	LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	1202	15.155.060.000	13.693.883.700	26.404.669.000	24.288.034.100	151.283.000	146.744.510	41.711.012.000	38.128.662.310
137	LAMPUNG	116	KOTABUMI	Kab. Lampung Utara	1203	8.854.425.000	7.981.271.900	8.539.374.000	7.848.670.800	125.889.000	125.889.000	17.519.688.000	15.955.831.700
138	LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	1207	8.230.942.000	7.467.212.900	31.421.379.000	28.880.949.300	454.654.000	454.654.000	40.106.975.000	36.802.816.200
139	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tanggamus	1206	7.562.298.000	6.841.606.600	34.084.172.000	30.838.070.800	173.915.000	173.915.000	41.820.385.000	37.853.592.400
140	LAMPUNG	116	KOTABUMI	Kab. Tulang Bawang	1205	8.600.811.000	7.794.431.500	13.702.874.000	12.434.639.000	118.035.000	118.035.000	22.421.720.000	20.347.105.500
141	LAMPUNG	116	KOTABUMI	Kab. Way Kanan	1208	7.928.941.000	7.180.198.000	11.654.853.000	10.643.768.800	154.825.000	154.825.000	19.738.619.000	17.978.791.800
142	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	1251	64.688.763.000	45.686.776.800	2.534.772.000	1.885.883.400	1.157.567.000	1.157.567.000	68.381.102.000	48.730.227.200
143	LAMPUNG	126	METRO LAMPUNG	Kota Metro	1252	11.456.058.000	10.368.078.300	2.047.335.000	1.879.543.700	115.113.000	115.113.000	13.618.506.000	12.362.735.000
144	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pesawaran	1209	6.336.848.000	5.754.441.100	5.120.125.000	4.661.220.900	245.801.000	245.801.000	11.702.774.000	10.661.463.000
145	LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pringsewu	1210	7.497.973.000	5.365.654.900	2.350.700.000	1.771.283.600	234.572.000	234.572.000	10.083.245.000	7.371.510.500
146	LAMPUNG	116	KOTABUMI	Kab. Mesuji	1211	5.655.460.000	5.141.412.800	14.461.062.000	13.100.362.900	141.239.000	141.239.000	20.257.761.000	18.383.014.700
147	LAMPUNG	116	KOTABUMI	Kab. Tulang Bawang Barat	1212	5.470.546.000	4.976.230.900	4.650.217.000	4.235.427.000	120.741.000	120.741.000	10.241.504.000	9.332.398.900
148	LAMPUNG	145	L I W A	Kab. Pesisir Barat	1213	5.012.981.000	3.635.621.000	2.665.145.000	1.978.159.100	120.681.000	120.681.000	7.798.807.000	5.734.461.100
149	DKI JAKARTA	018	JAKARTA I	Provinsi DKI Jakarta	0100	23.239.995.269.000	21.015.141.042.200	50.275.485.000	46.262.844.400	2.360.567.000	2.360.567.000	23.292.631.321.000	21.063.764.453.600
150	JAWA BARAT	022	BANDUNG I	Provinsi Jawa Barat	0200	1.738.863.784.000	1.572.085.617.800	148.783.456.000	134.869.600.800	170.030.192.000	170.030.192.000	2.057.677.432.000	1.876.985.410.600
151	JAWA BARAT	095	BANDUNG II	Kab. Bandung	0212	94.606.122.000	85.753.524.500	114.338.298.000	103.575.236.800	27.831.326.000	27.831.326.000	236.775.746.000	217.160.087.300
152	JAWA BARAT	171	B E K A S I	Kab. Bekasi	0208	579.606.847.000	524.710.421.000	50.158.713.000	45.401.432.100	8.180.014.000	8.180.014.000	637.945.574.000	578.291.867.100
153	JAWA BARAT	023	B O G O R	Kab. Bogor	0205	209.400.917.000	189.703.295.500	66.734.983.000	60.455.138.000	8.360.878.000	8.360.878.000	284.496.778.000	258.519.311.500
154	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	Kab. Ciamis	0216	41.134.065.000	37.389.350.100	7.028.710.000	6.395.547.700	8.358.645.000	8.358.645.000	56.521.420.000	52.143.542.800
155	JAWA BARAT	128	SUKABUMI	Kab. Cianjur	0207	55.100.779.000	50.012.279.200	15.256.845.000	13.831.158.300	8.714.159.000	8.460.169.760	79.071.783.000	72.303.607.260
156	JAWA BARAT	024	C I R E B O N	Kab. Cirebon	0217	62.244.492.000	56.423.954.600	11.137.026.000	10.078.396.300	11.110.847.000	10.786.671.770	84.492.365.000	77.289.022.670
157	JAWA BARAT	096	G A R U T	Kab. Garut	0214	52.348.015.000	47.566.353.100	64.666.895.000	58.583.632.100	42.748.679.000	42.748.679.000	159.763.589.000	148.898.664.200
158	JAWA BARAT	024	C I R E B O N	Kab. Indramayu	0219	63.370.193.000	57.453.166.600	126.715.944.000	115.172.129.300	8.174.529.000	8.174.529.000	198.260.666.000	180.799.824.900
159	JAWA BARAT	086	KARAWANG	Kab. Karawang	0209	312.824.730.000	224.970.200.400	59.968.128.000	43.710.858.600	150.661.112.000	146.257.066.460	523.453.970.000	414.938.125.460
160	JAWA BARAT	147	KUNINGAN	Kab. Kuningan	0218	41.923.701.000	30.154.011.900	5.810.061.000	4.207.479.600	9.024.450.000	9.024.450.000	56.758.212.000	43.385.941.500
161	JAWA BARAT	147	KUNINGAN	Kab. Majalengka	0220	43.753.073.000	39.660.404.700	16.139.783.000	14.677.211.700	21.886.827.000	21.886.827.000	81.779.683.000	76.224.443.400
162	JAWA BARAT	021	PURWAKARTA	Kab. Purwakarta	0210	93.898.210.000	85.067.250.100	9.249.996.000	8.396.940.000	8.175.312.000	8.175.312.000	111.323.518.000	101.639.502.100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN	Daerah	Kode Pemda	PPh Perorangan		PBB		CHT		Total	
						Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8		7	8	9	10		11
163	JAWA BARAT	021	PURWAKARTA	Kab. Subang	0211	62.151.589.000	56.351.324.500	107.772.069.000	97.782.170.000	8.477.939.000	8.477.939.000	178.401.597.000	162.611.433.500
164	JAWA BARAT	128	SUKABUMI	Kab. Sukabumi	0206	62.141.321.000	56.314.067.000	55.057.676.000	49.862.196.100	8.179.646.000	7.941.416.000	125.378.643.000	114.117.679.100
165	JAWA BARAT	087	SUMEDANG	Kab. Sumedang	0213	52.467.401.000	47.598.830.500	6.436.344.000	5.850.826.600	35.219.408.000	35.219.408.000	94.123.153.000	88.669.065.100
166	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	Kab. Tasikmalaya	0215	43.025.652.000	39.088.464.200	10.069.829.000	9.124.816.200	8.386.253.000	8.386.253.000	61.481.734.000	56.599.533.400
167	JAWA BARAT	095	BANDUNG II	Kota Bandung	0251	389.906.110.000	351.606.464.000	5.515.339.000	5.020.688.300	8.981.146.000	8.981.146.000	404.402.595.000	365.608.298.300
168	JAWA BARAT	171	B E K A S I	Kota Bekasi	0257	175.112.952.000	158.617.394.700	14.031.391.000	12.710.421.900	8.315.569.000	8.315.569.000	197.459.912.000	179.643.385.600
169	JAWA BARAT	023	B O G O R	Kota Bogor	0252	95.024.701.000	86.077.777.600	4.919.403.000	4.485.087.600	8.234.433.000	8.234.433.000	108.178.537.000	98.797.298.200
170	JAWA BARAT	024	C I R E B O N	Kota Cirebon	0254	57.756.719.000	52.318.378.000	4.578.590.000	4.174.664.700	8.388.480.000	8.388.480.000	70.723.789.000	64.881.522.700
171	JAWA BARAT	023	B O G O R	Kota Depok	0258	119.117.429.000	107.746.007.600	5.471.204.000	4.980.472.700	8.371.613.000	8.371.613.000	132.960.246.000	121.098.093.300
172	JAWA BARAT	128	SUKABUMI	Kota Sukabumi	0253	43.763.638.000	39.564.614.800	4.184.815.000	3.800.598.400	8.176.146.000	8.176.146.000	56.124.599.000	51.541.359.200
173	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	Kota Tasikmalaya	0260	50.623.908.000	45.967.300.700	4.801.780.000	4.386.653.500	8.161.871.000	8.161.871.000	63.587.559.000	58.515.825.200
174	JAWA BARAT	022	BANDUNG I	Kota Cimahi	0261	56.058.299.000	50.876.372.900	4.517.188.000	4.129.825.400	8.178.636.000	8.178.636.000	68.754.123.000	63.184.834.300
175	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	Kota Banjar	0262	37.833.205.000	34.401.373.400	4.801.478.000	4.379.343.000	8.220.176.000	8.220.176.000	50.854.859.000	47.000.892.400
176	JAWA BARAT	022	BANDUNG I	Kab. Bandung Barat	0221	66.857.606.000	60.656.204.500	9.614.856.000	8.717.546.000	9.913.622.000	9.913.622.000	86.386.084.000	79.287.372.500
177	JAWA BARAT	025	TASIKMALAYA	Kab. Pangandaran	0222	37.206.133.000	33.842.825.500	6.265.789.000	5.700.898.500	8.498.065.000	8.498.065.000	51.969.987.000	48.041.789.000
178	JAWA TENGAH	026	SEMARANG I	Provinsi Jawa Tengah	0300	587.373.900.000	529.801.160.600	48.232.184.000	43.534.435.100	399.673.928.000	399.673.928.000	1.035.280.012.000	973.009.523.700
179	JAWA TENGAH	164	BANJARNEGARA	Kab. Banjarnegara	0318	16.115.377.000	14.547.851.700	8.179.951.000	7.394.635.400	16.102.118.000	16.102.118.000	40.397.446.000	38.044.605.100
180	JAWA TENGAH	029	PURWOKERTO	Kab. Banyumas	0315	35.878.322.000	32.354.390.800	5.800.016.000	5.226.130.500	14.881.821.000	14.881.821.000	56.560.159.000	52.462.342.300
181	JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN	Kab. Batang	0306	20.168.638.000	18.154.804.100	6.084.782.000	5.482.879.500	15.398.223.000	15.398.223.000	41.651.643.000	39.035.906.600
182	JAWA TENGAH	163	PURWODADI	Kab. Blora	0314	15.200.424.000	13.705.124.000	91.014.698.000	82.126.283.800	22.905.162.000	22.905.162.000	129.120.284.000	118.736.569.800
183	JAWA TENGAH	148	K L A T E N	Kab. Boyolali	0325	19.558.795.000	17.653.755.300	3.392.243.000	3.057.837.700	33.907.156.000	33.907.156.000	56.858.194.000	54.618.749.000
184	JAWA TENGAH	118	T E G A L	Kab. Brebes	0308	18.155.531.000	16.386.222.100	6.818.707.000	6.142.021.400	15.409.650.000	15.409.650.000	40.383.888.000	37.937.893.500
185	JAWA TENGAH	130	CILACAP	Kab. Cilacap	0316	41.585.806.000	37.623.414.000	12.581.912.000	11.334.778.500	15.078.241.000	15.078.241.000	69.245.959.000	64.036.433.500
186	JAWA TENGAH	129	K U D U S	Kab. Demak	0303	19.153.308.000	17.280.483.200	2.245.095.000	2.024.180.200	58.577.183.000	58.577.183.000	79.975.586.000	77.881.846.400
187	JAWA TENGAH	163	PURWODADI	Kab. Grobogan	0304	15.796.202.000	14.233.491.900	16.598.160.000	15.015.274.500	34.831.623.000	34.831.623.000	67.225.985.000	64.080.389.400
188	JAWA TENGAH	129	K U D U S	Kab. Jepara	0312	27.151.523.000	24.450.618.100	6.585.519.000	5.930.126.400	21.780.675.000	21.139.571.820	55.517.717.000	51.520.316.320
189	JAWA TENGAH	162	S R A G E N	Kab. Karanganyar	0328	24.542.631.000	22.152.185.600	3.638.512.000	3.279.342.100	20.969.940.000	20.969.940.000	49.151.083.000	46.401.467.700
190	JAWA TENGAH	027	PURWOREJO	Kab. Kebumen	0323	15.205.912.000	13.686.470.900	2.513.924.000	2.266.903.300	19.644.052.000	19.644.052.000	37.363.888.000	35.597.426.200
191	JAWA TENGAH	134	SEMARANG II	Kab. Kendal	0302	19.363.672.000	17.502.605.500	8.253.453.000	7.441.718.100	37.054.170.000	37.054.170.000	64.671.295.000	61.998.493.600
192	JAWA TENGAH	148	K L A T E N	Kab. Klaten	0324	21.604.974.000	19.501.869.800	1.922.694.000	1.734.822.900	28.544.847.000	28.544.847.000	52.072.515.000	49.781.539.700
193	JAWA TENGAH	129	K U D U S	Kab. Kudus	0310	93.948.277.000	84.904.589.000	1.841.893.000	1.661.298.400	275.751.918.000	275.751.918.000	371.542.088.000	362.317.805.400
194	JAWA TENGAH	115	MAGELANG	Kab. Magelang	0319	17.098.918.000	12.171.626.200	2.386.130.000	1.684.163.600	27.543.174.000	27.543.174.000	47.028.222.000	41.398.963.800
195	JAWA TENGAH	097	P A T I	Kab. Pati	0309	20.098.622.000	18.140.937.100	6.364.142.000	5.738.515.300	22.453.292.000	22.453.292.000	48.916.056.000	46.332.744.400
196	JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN	Kab. Pekalongan	0305	12.825.080.000	11.598.689.900	4.894.063.000	4.444.882.900	14.848.019.000	14.848.019.000	32.567.162.000	30.891.591.800
197	JAWA TENGAH	118	T E G A L	Kab. Pemalang	0311	13.923.928.000	12.569.948.400	5.943.115.000	5.434.741.500	16.523.716.000	16.523.716.000	36.390.759.000	34.528.405.900
198	JAWA TENGAH	029	PURWOKERTO	Kab. Purbalingga	0317	15.700.313.000	14.167.202.100	2.214.916.000	1.998.336.800	17.297.960.000	17.297.960.000	35.213.189.000	33.463.498.900
199	JAWA TENGAH	027	PURWOREJO	Kab. Purworejo	0322	14.036.785.000	12.665.373.700	2.443.396.000	2.203.852.400	17.580.583.000	17.580.583.000	34.060.764.000	32.449.809.100
200	JAWA TENGAH	097	P A T I	Kab. Rembang	0313	14.724.805.000	13.295.273.100	8.064.991.000	7.376.889.500	58.530.126.000	58.530.126.000	81.319.922.000	79.202.288.600
201	JAWA TENGAH	134	SEMARANG II	Kab. Semarang	0301	27.691.100.000	25.081.935.800	6.516.610.000	5.869.799.500	17.808.737.000	17.808.737.000	52.016.447.000	48.760.472.300
202	JAWA TENGAH	162	S R A G E N	Kab. Sragen	0326	16.609.869.000	14.953.698.300	3.361.366.000	3.029.864.200	19.234.117.000	18.668.129.740	39.205.352.000	36.651.692.240
203	JAWA TENGAH	028	SURAKARTA	Kab. Sukoharjo	0327	26.582.162.000	23.964.000.200	2.102.720.000	1.897.043.500	18.046.469.000	18.046.469.000	46.731.351.000	43.907.512.700
204	JAWA TENGAH	118	T E G A L	Kab. Tegal	0307	19.982.964.000	14.207.228.100	4.362.594.000	3.084.439.500	15.045.771.000	15.045.771.000	39.391.329.000	32.337.438.600
205	JAWA TENGAH	115	MAGELANG	Kab. Temanggung	0320	15.421.216.000	13.915.198.600	2.323.623.000	2.096.224.300	63.417.417.000	63.417.417.000	81.162.256.000	79.428.839.900
206	JAWA TENGAH	028	SURAKARTA	Kab. Wonogiri	0329	14.926.693.000	13.462.446.600	2.781.711.000	2.508.008.900	27.302.751.000	27.302.751.000	45.011.155.000	43.273.206.500
207	JAWA TENGAH	164	BANJARNEGARA	Kab. Wonosobo	0321	12.641.357.000	11.409.168.400	5.520.757.000	4.994.866.000	24.712.817.000	24.712.817.000	42.874.931.000	41.116.851.400
208	JAWA TENGAH	115	MAGELANG	Kota Magelang	0355	17.713.592.000	15.976.081.300	1.212.343.000	1.096.064.700	14.749.728.000	14.749.728.000	33.675.663.000	31.821.874.000
209	JAWA TENGAH	072	PEKALONGAN	Kota Pekalongan	0353	19.931.135.000	17.955.038.500	1.765.216.000	1.632.823.600	21.942.146.000	21.942.146.000	43.638.497.000	41.530.008.100
210	JAWA TENGAH	134	SEMARANG II	Kota Salatiga	0352	18.914.514.000	17.065.583.600	1.356.470.000	1.225.800.700	14.696.361.000	14.696.361.000	34.967.345.000	32.987.745.300
211	JAWA TENGAH	026	SEMARANG I	Kota Semarang	0351	218.333.521.000	197.354.276.400	4.995.351.000	4.503.999.000	25.104.629.000	25.104.629.000	248.433.501.000	226.962.904.400
212	JAWA TENGAH	028	SURAKARTA	Kota Surakarta	0356	48.757.087.000	43.901.714.500	1.536.908.000	1.388.149.400	16.734.816.000	16.734.816.000	67.028.811.000	62.024.679.900
213	JAWA TENGAH	118	T E G A L	Kota Tegal	0354	22.264.870.000	15.779.607.100	1.403.164.000	996.359.800	14.693.894.000	14.693.894.000	38.361.928.000	31.469.860.900
214	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	Provinsi DI Yogyakarta	0400	108.207.372.000	97.515.612.800	812.173.000	733.974.800	6.007.487.000	6.007.487.000	115.027.032.000	104.257.074.600
215	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	Kab. Bantul	0401	28.203.659.000	25.431.880.000	928.994.000	838.628.000	4.843.418.000	4.843.418.000	33.976.071.000	31.113.926.000
216	DI JOGJAKARTA	149	WONOSARI	Kab. Gunung Kidul	0403	18.735.533.000	16.936.477.300	896.332.000	809.232.200	3.018.282.000	3.018.282.000	22.650.147.000	20.763.991.500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN	Daerah	Kode Pemda	PPh Perorangan		PBB		CHT		Total	
						Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8		7	8	9	10		11
217	DI JOGJAKARTA	176	W A T E S	Kab. Kulon Progo	0404	20.203.662.000	18.274.338.400	811.187.000	735.456.600	3.030.296.000	3.030.296.000	24.045.145.000	22.040.091.000
218	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	Kab. Sleman	0402	60.160.720.000	54.194.765.800	1.021.766.000	922.122.800	3.719.157.000	3.719.157.000	64.901.643.000	58.836.045.600
219	DI JOGJAKARTA	030	YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	0451	57.575.825.000	51.862.798.600	624.742.000	564.845.300	1.907.349.000	1.907.349.000	60.107.916.000	54.334.992.900
220	JAWA TIMUR	135	SURABAYA II	Provinsi Jawa Timur	0500	1.066.436.935.000	963.012.063.400	280.113.871.000	256.969.055.800	975.792.174.000	975.792.174.000	2.322.342.980.000	2.195.773.293.200
221	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	Kab. Bangkalan	0508	20.099.786.000	18.178.540.800	7.072.683.000	6.482.456.500	33.083.648.000	33.083.648.000	60.256.117.000	57.744.645.300
222	JAWA TIMUR	100	BANYUWANGI	Kab. Banyuwangi	0511	30.940.378.000	28.034.677.800	40.034.694.000	36.187.819.900	36.410.772.000	36.410.772.000	107.385.844.000	100.633.269.700
223	JAWA TIMUR	150	B L I T A R	Kab. Blitar	0521	19.046.350.000	13.726.432.300	11.248.692.000	8.222.085.000	37.286.378.000	37.286.378.000	67.581.420.000	59.234.895.300
224	JAWA TIMUR	073	BOJONEGORO	Kab. Bojonegoro	0527	30.678.453.000	27.756.563.500	1.044.082.783.000	961.416.537.500	122.321.575.000	122.321.575.000	1.197.082.811.000	1.111.494.676.000
225	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	Kab. Bondowoso	0509	18.110.930.000	12.853.376.300	10.920.706.000	7.963.945.000	69.883.141.000	69.883.141.000	98.914.777.000	90.700.462.300
226	JAWA TIMUR	031	SURABAYA I	Kab. Gresik	0501	144.893.294.000	131.892.511.500	75.470.373.000	69.137.240.000	33.735.391.000	33.735.391.000	254.099.058.000	234.765.142.500
227	JAWA TIMUR	131	J E M B E R	Kab. Jember	0512	38.800.195.000	35.086.281.900	22.731.470.000	20.605.546.300	144.322.014.000	144.322.014.000	205.853.679.000	200.013.842.200
228	JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO	Kab. Jombang	0504	24.615.880.000	12.355.098.000	7.905.845.000	4.383.403.000	72.749.147.000	72.749.147.000	105.270.872.000	89.487.648.000
229	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	Kab. Kediri	0517	26.623.004.000	13.816.105.000	12.875.928.000	6.952.395.500	88.860.725.000	88.860.725.000	128.359.657.000	109.629.225.500
230	JAWA TIMUR	073	BOJONEGORO	Kab. Lamongan	0529	23.129.347.000	16.548.299.800	9.707.606.000	7.098.011.000	79.375.440.000	79.375.440.000	112.212.393.000	103.021.750.800
231	JAWA TIMUR	131	J E M B E R	Kab. Lumajang	0516	19.655.361.000	17.796.668.800	11.212.173.000	10.206.905.800	35.909.560.000	35.909.560.000	66.777.094.000	63.913.134.600
232	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	Kab. Madiun	0522	19.131.485.000	17.354.434.200	10.594.064.000	9.649.792.600	35.301.820.000	35.301.820.000	65.027.369.000	62.306.046.800
233	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	Kab. Magetan	0524	19.864.579.000	18.004.590.200	6.048.716.000	5.558.939.400	35.685.933.000	35.685.933.000	61.599.228.000	59.249.462.600
234	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	Kab. Malang	0513	44.076.949.000	39.877.317.800	22.908.800.000	20.770.613.600	162.613.022.000	162.613.022.000	229.598.771.000	223.260.953.400
235	JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO	Kab. Mojokerto	0502	39.867.244.000	36.077.942.500	7.557.878.000	6.897.297.000	38.196.560.000	38.196.560.000	85.621.682.000	81.171.799.500
236	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	Kab. Nganjuk	0519	23.675.392.000	21.426.291.500	9.074.968.000	8.267.625.800	39.538.674.000	39.538.674.000	72.289.034.000	69.232.591.300
237	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	Kab. Ngawi	0523	20.094.476.000	18.200.848.400	11.030.044.000	10.045.586.400	42.632.301.000	42.632.301.000	73.756.821.000	70.878.735.800
238	JAWA TIMUR	099	PACITAN	Kab. Pacitan	0526	18.371.470.000	16.672.198.400	5.870.759.000	5.399.584.500	35.712.792.000	35.712.792.000	59.955.021.000	57.784.574.900
239	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	Kab. Pamekasan	0506	20.951.349.000	18.953.077.700	5.589.545.000	5.129.003.100	116.225.478.000	116.225.478.000	142.766.372.000	140.307.558.800
240	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	Kab. Pasuruan	0514	76.083.416.000	68.917.885.400	8.314.812.000	7.594.878.900	447.734.501.000	447.734.501.000	532.132.729.000	524.247.265.300
241	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	Kab. Ponorogo	0525	22.577.529.000	20.453.825.700	9.026.987.000	8.238.447.200	41.024.605.000	41.024.605.000	72.629.121.000	69.716.877.900
242	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	Kab. Probolinggo	0515	27.292.574.000	24.746.894.200	7.559.672.000	6.907.797.100	103.612.337.000	103.612.337.000	138.464.583.000	135.267.028.300
243	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	Kab. Sampang	0505	17.334.453.000	15.679.735.800	5.833.158.000	5.339.307.800	43.862.750.000	43.862.750.000	67.030.361.000	64.881.793.600
244	JAWA TIMUR	165	SIDOARJO	Kab. Sidoarjo	0503	141.795.724.000	128.150.885.100	11.337.643.000	10.210.170.600	41.665.168.000	41.665.168.000	194.798.535.000	180.026.223.700
245	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	Kab. Situbondo	0510	19.498.581.000	17.629.531.900	8.240.678.000	7.520.188.000	75.629.613.000	75.629.613.000	103.368.872.000	100.779.332.900
246	JAWA TIMUR	036	PAMEKASAN	Kab. Sumenep	0507	19.921.326.000	18.054.365.700	10.905.513.000	9.904.464.600	63.779.743.000	63.779.743.000	94.606.582.000	91.738.573.300
247	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	Kab. Trenggalek	0520	18.638.351.000	16.878.725.400	7.290.421.000	6.668.709.600	33.731.960.000	33.731.960.000	59.660.732.000	57.279.395.000
248	JAWA TIMUR	166	T U B A N	Kab. Tuban	0528	32.613.421.000	29.611.097.500	45.821.625.000	41.547.521.300	41.670.528.000	41.670.528.000	120.105.574.000	112.829.146.800
249	JAWA TIMUR	150	B L I T A R	Kab. Tulungagung	0518	26.527.448.000	24.023.513.300	8.201.644.000	7.512.439.100	44.714.229.000	44.714.229.000	79.443.321.000	76.250.181.400
250	JAWA TIMUR	150	B L I T A R	Kota Blitar	0556	20.248.369.000	14.412.211.600	5.395.936.000	4.123.264.600	33.172.637.000	33.172.637.000	58.816.942.000	51.708.113.200
251	JAWA TIMUR	034	K E D I R I	Kota Kediri	0557	51.233.077.000	46.222.192.400	5.524.735.000	5.078.655.900	160.243.781.000	160.243.781.000	217.001.593.000	211.544.629.300
252	JAWA TIMUR	033	M A D I U N	Kota Madiun	0558	31.734.558.000	28.749.078.100	5.376.554.000	4.952.495.500	33.090.836.000	33.090.836.000	70.201.948.000	66.792.409.600
253	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	Kota Malang	0553	74.269.916.000	38.142.444.000	5.758.488.000	3.410.653.000	77.477.667.000	77.477.667.000	157.506.071.000	119.030.764.000
254	JAWA TIMUR	098	MOJOKERTO	Kota Mojokerto	0552	22.301.527.000	20.142.500.900	5.495.042.000	5.046.141.200	33.178.286.000	33.178.286.000	60.974.855.000	58.366.928.100
255	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	Kota Pasuruan	0554	21.380.828.000	11.203.644.500	5.348.671.000	3.213.918.500	33.090.808.000	33.090.808.000	59.820.307.000	47.508.371.000
256	JAWA TIMUR	035	BONDOWOSO	Kota Probolinggo	0555	21.805.769.000	15.650.960.300	5.326.631.000	4.042.784.600	33.213.641.000	33.213.641.000	60.346.041.000	52.907.385.900
257	JAWA TIMUR	135	SURABAYA II	Kota Surabaya	0551	561.715.936.000	506.691.295.800	7.030.945.000	6.442.684.900	58.074.832.000	58.074.832.000	626.821.713.000	571.208.812.700
258	JAWA TIMUR	032	M A L A N G	Kota Batu	0559	18.488.020.000	16.752.953.000	6.011.918.000	5.516.829.200	33.076.886.000	33.076.886.000	57.576.824.000	55.346.668.200
259	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	Provinsi Kalimantan Barat	1300	107.860.931.000	76.191.264.200	79.623.823.000	57.159.495.700	483.656.000	483.656.000	187.968.410.000	133.834.415.900
260	KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG	Kab. Bengkayang	1307	6.967.826.000	3.805.964.500	19.677.985.000	10.555.237.000	572.483.000	572.483.000	27.218.294.000	14.933.684.500
261	KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU	Kab. Landak	1308	6.683.534.000	3.478.169.000	24.927.225.000	13.028.067.500	46.446.000	46.446.000	31.657.205.000	16.552.682.500
262	KALIMANTAN BARAT	117	PUTUSSIBAU	Kab. Kapuas Hulu	1305	8.608.511.000	7.820.877.800	24.306.643.000	22.129.925.400	46.447.000	46.447.000	32.961.601.000	29.997.250.200
263	KALIMANTAN BARAT	094	KETAPANG	Kab. Ketapang	1306	20.653.784.000	18.720.654.200	139.819.251.000	127.187.461.600	46.446.000	46.446.000	160.519.481.000	145.954.561.800
264	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	Kab. Mempawah	1304	7.979.614.000	5.851.485.400	8.975.008.000	6.643.059.400	200.674.000	200.674.000	17.155.296.000	12.695.218.800
265	KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG	Kab. Sambas	1301	8.511.218.000	6.255.730.100	19.075.836.000	13.643.413.800	46.446.000	46.446.000	27.633.500.000	19.945.589.900
266	KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU	Kab. Sanggau	1302	12.039.802.000	6.312.120.500	59.623.996.000	31.120.315.000	46.446.000	46.446.000	71.710.244.000	37.478.881.500
267	KALIMANTAN BARAT	079	S I N T A N G	Kab. Sintang	1303	10.792.257.000	9.792.370.200	40.035.461.000	36.264.766.700	46.446.000	46.446.000	50.874.164.000	46.103.582.900
268	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	Kota Pontianak	1351	54.805.718.000	27.416.563.000	4.503.347.000	2.402.440.000	46.522.000	46.522.000	59.355.587.000	29.865.525.000
269	KALIMANTAN BARAT	093	SINGKAWANG	Kota Singkawang	1352	11.394.466.000	6.081.928.500	4.977.607.000	2.916.738.500	46.505.000	46.505.000	16.418.578.000	9.045.172.000
270	KALIMANTAN BARAT	167	SANGGAU	Kab. Sekadau	1310	7.687.627.000	6.990.681.400	17.618.980.000	16.024.707.000	46.506.000	46.506.000	25.353.113.000	23.061.894.400

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN	Daerah	Kode Pemda	PPh Perorangan		PBB		CHT		Total	
						Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8		7	8	9	10		11
271	KALIMANTAN BARAT	079	S I N T A N G	Kab. Melawi	1309	6.278.956.000	5.720.060.200	16.823.182.000	15.246.577.200	46.446.000	46.446.000	23.148.584.000	21.013.083.400
272	KALIMANTAN BARAT	094	KETAPANG	Kab. Kayong Utara	1311	6.353.363.000	5.816.097.000	13.178.246.000	12.023.194.600	46.594.000	46.594.000	19.578.203.000	17.885.885.600
273	KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	Kab. Kubu Raya	1312	18.151.670.000	16.484.760.700	26.860.803.000	24.376.357.800	46.582.000	46.582.000	45.059.055.000	40.907.700.500
274	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	Provinsi Kalimantan Tengah	1400	97.003.949.000	87.699.167.500	279.277.482.000	256.114.044.500	-	-	376.281.431.000	343.813.212.000
275	KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K	Kab. Barito Selatan	1403	7.829.481.000	7.092.700.100	66.246.209.000	61.597.045.100	-	-	74.075.690.000	68.689.745.200
276	KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K	Kab. Barito Utara	1402	10.067.281.000	9.082.568.400	326.276.558.000	301.441.072.400	-	-	336.343.839.000	310.523.640.800
277	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	Kab. Kapuas	1401	10.149.953.000	9.241.490.800	294.686.748.000	271.481.330.700	-	-	304.836.701.000	280.722.821.500
278	KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN	Kab. Kotawaringin Barat	1405	20.669.155.000	18.742.204.100	63.838.610.000	58.400.360.600	-	-	84.507.765.000	77.142.564.700
279	KALIMANTAN TENGAH	044	S A M P I T	Kab. Kotawaringin Timur	1404	24.816.935.000	22.584.713.400	120.641.694.000	110.470.025.500	-	-	145.458.629.000	133.054.738.900
280	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	Kota Palangkaraya	1451	25.532.564.000	12.795.627.500	14.831.800.000	8.620.388.000	-	-	40.364.364.000	21.416.015.500
281	KALIMANTAN TENGAH	044	S A M P I T	Kab. Katingan	1406	6.801.689.000	5.093.438.000	38.863.373.000	29.270.908.100	-	-	45.665.062.000	34.364.346.100
282	KALIMANTAN TENGAH	044	S A M P I T	Kab. Seruyan	1407	8.605.379.000	7.889.641.900	88.627.829.000	81.006.911.600	-	-	97.233.208.000	88.896.553.500
283	KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN	Kab. Sukamara	1408	5.584.646.000	5.104.674.200	26.736.151.000	24.728.346.500	-	-	32.320.797.000	29.833.020.700
284	KALIMANTAN TENGAH	102	PANGKALAN BUN	Kab. Lamandau	1409	6.301.058.000	3.641.264.500	45.626.478.000	27.081.345.500	-	-	51.927.536.000	30.722.610.000
285	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	Kab. Gunung Mas	1410	6.786.754.000	6.181.212.500	41.902.996.000	38.396.038.900	-	-	48.689.750.000	44.577.251.400
286	KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	Kab. Pulang Pisau	1411	6.661.007.000	6.094.790.400	32.309.708.000	29.759.249.900	-	-	38.970.715.000	35.854.040.300
287	KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K	Kab. Murung Raya	1412	13.149.568.000	9.488.666.800	258.532.208.000	193.968.636.500	-	-	271.681.776.000	203.457.303.300
288	KALIMANTAN TENGAH	080	B U N T O K	Kab. Barito Timur	1413	13.855.420.000	12.519.126.700	61.475.918.000	55.931.643.600	-	-	75.331.338.000	68.450.770.300
289	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	Provinsi Kalimantan Selatan	1500	174.799.018.000	158.566.566.600	306.412.436.000	286.110.822.800	4.539.000	-	481.215.993.000	444.677.389.400
290	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	Kab. Banjar	1501	19.315.043.000	17.552.148.000	49.083.248.000	45.792.796.000	472.000	-	68.398.763.000	63.344.944.000
291	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	Kab. Barito Kuala	1506	10.634.083.000	9.654.505.500	24.833.045.000	23.131.864.100	472.000	-	35.467.600.000	32.786.369.600
292	KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI	Kab. Hulu Sungai Selatan	1504	9.875.795.000	8.926.622.900	78.845.844.000	71.908.328.200	472.000	-	88.722.111.000	80.834.951.100
293	KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI	Kab. Hulu Sungai Tengah	1505	10.476.129.000	9.495.557.500	16.958.268.000	15.863.407.700	472.000	-	27.434.869.000	25.358.965.200
294	KALIMANTAN SELATAN	151	T A N J U N G	Kab. Hulu Sungai Utara	1509	10.163.265.000	9.236.324.700	19.782.064.000	18.610.537.100	472.000	-	29.945.801.000	27.846.861.800
295	KALIMANTAN SELATAN	081	KOTABARU	Kab. Kotabaru	1508	21.148.691.000	19.150.213.100	155.483.830.000	140.773.215.500	472.000	-	176.632.993.000	159.923.428.600
296	KALIMANTAN SELATAN	151	T A N J U N G	Kab. Tabalong	1507	21.099.641.000	19.250.982.900	176.050.651.000	165.317.810.500	472.000	-	197.150.764.000	184.568.793.400
297	KALIMANTAN SELATAN	168	PELAIHARI	Kab. Tanah Laut	1502	19.124.752.000	17.369.528.600	106.066.857.000	97.797.750.200	472.000	-	125.192.081.000	115.167.278.800
298	KALIMANTAN SELATAN	110	BARABAI	Kab. Tapin	1503	15.807.789.000	14.388.091.300	162.436.035.000	151.696.547.400	472.000	-	178.244.296.000	166.084.638.700
299	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	Kota Banjarbaru	1552	34.214.078.000	31.097.191.500	19.434.576.000	18.316.069.300	1.696.000	-	53.650.350.000	49.413.260.800
300	KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN	Kota Banjarmasin	1551	71.784.856.000	64.916.425.800	19.909.445.000	18.754.949.600	5.578.000	-	91.699.879.000	83.671.375.400
301	KALIMANTAN SELATAN	151	T A N J U N G	Kab. Balangan	1511	18.577.755.000	13.316.631.300	372.772.268.000	310.858.884.200	472.000	-	391.350.495.000	324.175.515.500
302	KALIMANTAN SELATAN	081	KOTABARU	Kab. Tanah Bumbu	1510	36.665.587.000	33.364.888.500	385.574.569.000	360.818.703.700	472.000	-	422.240.628.000	394.183.592.200
303	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Provinsi Kalimantan Timur	1600	485.418.475.000	261.416.995.500	647.636.957.000	390.492.689.000	19.108.000	-	1.133.074.540.000	651.909.684.500
304	KALIMANTAN TIMUR	153	TANJUNG REDEP	Kab. Berau	1604	69.558.009.000	63.934.399.700	171.744.137.000	158.765.479.300	2.655.000	-	241.304.801.000	222.699.879.000
305	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kab. Kutai Kartanegara	1610	103.130.034.000	75.997.899.300	1.669.193.570.000	1.243.028.794.700	2.655.000	-	1.772.326.259.000	1.319.026.694.000
306	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kab. Kutai Barat	1607	50.048.067.000	28.298.053.000	246.699.197.000	170.600.102.000	2.693.000	38.000	296.749.957.000	198.898.193.000
307	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kab. Kutai Timur	1608	101.696.922.000	54.663.513.500	729.265.757.000	470.999.547.500	2.655.000	-	830.965.334.000	525.663.061.000
308	KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN	Kab. Paser	1602	52.293.653.000	39.171.026.300	268.292.168.000	220.260.216.800	2.655.000	-	320.588.476.000	259.431.243.100
309	KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN	Kota Balikpapan	1652	218.620.937.000	198.638.501.600	46.789.762.000	43.096.496.600	2.655.000	-	265.413.354.000	241.734.998.200
310	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kota Bontang	1654	101.643.782.000	55.126.063.000	140.212.372.000	82.051.377.000	2.655.000	-	241.858.809.000	137.177.440.000
311	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kota Samarinda	1651	96.841.126.000	70.426.943.800	123.561.600.000	99.282.475.200	28.669.000	-	220.431.395.000	169.709.419.000
312	KALIMANTAN TIMUR	047	BALIKPAPAN	Kab. Penajam Paser Utara	1609	41.143.079.000	38.160.509.000	107.076.326.000	99.973.754.000	2.655.000	-	148.222.060.000	138.134.263.000
313	KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	Kab. Mahakam Ulu	1613	27.146.407.000	14.847.721.000	56.492.801.000	33.615.340.000	2.655.000	-	83.641.863.000	48.463.061.000
314	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	Provinsi Sulawesi Utara	1700	67.425.397.000	60.778.900.400	14.083.480.000	12.867.269.300	-	-	81.508.877.000	73.646.169.700
315	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow	1703	4.552.938.000	4.115.701.000	9.422.832.000	8.529.411.600	-	-	13.975.770.000	12.645.112.600
316	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	Kab. Minahasa	1702	6.852.186.000	4.796.530.200	9.924.413.000	7.179.772.100	-	-	16.776.599.000	11.976.302.300
317	SULAWESI UTARA	083	T A H U N A	Kab. Sangihe	1704	5.046.269.000	4.541.642.100	1.473.620.000	1.345.914.600	-	-	6.519.889.000	5.887.556.700
318	SULAWESI UTARA	179	BITUNG	Kota Bitung	1753	7.896.623.000	7.134.481.900	10.186.306.000	9.344.755.000	-	-	18.082.929.000	16.479.236.900
319	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	Kota Manado	1751	46.679.115.000	42.063.220.300	1.302.928.000	1.187.219.400	-	-	47.982.043.000	43.250.439.700
320	SULAWESI UTARA	179	BITUNG	Kab. Kepulauan Talaud	1705	3.480.131.000	3.140.174.400	1.232.278.000	1.122.959.400	-	-	4.712.409.000	4.263.133.800
321	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	Kab. Minahasa Selatan	1706	5.037.532.000	4.550.567.000	1.956.548.000	1.799.575.000	-	-	6.994.080.000	6.350.142.000
322	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	Kota Tomohon	1752	5.179.868.000	4.675.599.900	8.720.694.000	7.916.950.300	-	-	13.900.562.000	12.592.550.200
323	SULAWESI UTARA	179	BITUNG	Kab. Minahasa Utara	1708	8.815.732.000	7.934.158.800	16.326.294.000	15.138.814.400	-	-	25.142.026.000	23.072.973.200
324	SULAWESI UTARA	083	T A H U N A	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1712	3.100.432.000	1.577.871.500	1.119.727.000	614.968.500	-	-	4.220.159.000	2.192.840.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN	Daerah	Kode Pemda	PPh Perorangan		PBB		CHT		Total	
						Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8		7	8	9	10		11
325	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	Kota Kotamobagu	1754	7.227.967.000	6.543.222.800	1.097.707.000	1.002.208.600	-	-	8.325.674.000	7.545.431.400
326	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1711	3.409.320.000	3.090.836.600	1.308.294.000	1.191.651.200	-	-	4.717.614.000	4.282.487.800
327	SULAWESI UTARA	049	M A N A D O	Kab. Minahasa Tenggara	1710	3.529.508.000	3.181.335.000	1.232.358.000	1.116.189.300	-	-	4.761.866.000	4.297.524.300
328	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1714	3.468.992.000	3.134.743.900	1.317.317.000	1.200.151.900	-	-	4.786.309.000	4.334.895.800
329	SULAWESI UTARA	158	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1713	2.932.925.000	2.651.150.000	8.329.731.000	7.543.804.800	-	-	11.262.656.000	10.194.954.800
330	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	Provinsi Sulawesi Tengah	1800	163.262.775.000	148.445.385.900	109.890.951.000	100.120.604.000	171.090.000	171.090.000	273.324.816.000	248.737.079.900
331	SULAWESI TENGAH	053	L U W U K	Kab. Banggai	1804	20.511.408.000	14.925.095.100	350.680.182.000	256.134.064.500	65.702.000	3.813.000	371.257.292.000	271.062.972.600
332	SULAWESI TENGAH	053	L U W U K	Kab. Banggai Kepulauan	1807	7.571.051.000	6.904.000.200	6.580.985.000	6.030.365.900	17.822.000	710.000	14.169.858.000	12.935.076.100
333	SULAWESI TENGAH	082	TOLI - TOLI	Kab. Buol	1805	8.665.896.000	7.947.654.900	10.856.965.000	9.943.822.100	17.112.000	-	19.539.973.000	17.891.477.000
334	SULAWESI TENGAH	082	TOLI - TOLI	Kab. Tolitoli	1803	9.219.179.000	8.394.612.100	7.516.500.000	6.884.114.300	17.821.000	709.000	16.753.500.000	15.279.435.400
335	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	Kab. Donggala	1802	8.692.204.000	7.933.825.500	10.354.840.000	9.504.965.100	17.112.000	-	19.064.156.000	17.438.790.600
336	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	Kab. Morowali	1806	128.007.014.000	116.661.459.800	96.555.276.000	88.236.592.000	17.112.000	-	224.579.402.000	204.898.051.800
337	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	Kab. Poso	1801	9.010.211.000	6.439.432.700	6.858.755.000	4.978.187.000	17.459.000	347.000	15.886.425.000	11.417.966.700
338	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	Kota Palu	1851	30.890.126.000	27.959.229.400	9.382.860.000	8.633.963.400	17.253.000	141.000	40.290.239.000	36.593.333.800
339	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	Kab. Parigi Moutong	1808	9.749.817.000	8.908.369.600	7.461.540.000	6.886.208.700	208.752.000	202.702.890	17.420.109.000	15.997.281.190
340	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	Kab. Tojo Una Una	1809	7.890.333.000	5.712.417.900	6.603.291.000	4.809.819.000	17.822.000	710.000	14.511.446.000	10.522.946.900
341	SULAWESI TENGAH	051	P A L U	Kab. Sigi	1812	8.501.845.000	7.793.455.200	7.407.004.000	6.839.509.100	17.112.000	17.112.000	15.925.961.000	14.650.076.300
342	SULAWESI TENGAH	053	L U W U K	Kab. Banggai Laut	1813	7.379.748.000	6.707.357.500	6.469.643.000	5.903.960.400	17.822.000	710.000	13.867.213.000	12.612.027.900
343	SULAWESI TENGAH	052	P O S O	Kab. Morowali Utara	1814	11.887.896.000	10.840.471.700	30.605.410.000	27.741.254.700	17.112.000	-	42.510.418.000	38.581.726.400
344	SULAWESI SELATAN	136	MAKASSAR II	Provinsi Sulawesi Selatan	1900	214.304.782.000	193.226.321.000	25.443.156.000	23.050.018.700	6.169.976.000	6.169.976.000	245.917.914.000	222.446.315.700
345	SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG	Kab. Bantaeng	1912	8.257.790.000	7.476.099.500	1.170.423.000	1.062.619.100	347.953.000	347.953.000	9.776.166.000	8.886.671.600
346	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	Kab. Barru	1916	6.801.970.000	3.540.439.000	1.106.659.000	585.827.000	362.770.000	362.770.000	8.271.399.000	4.489.036.000
347	SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE	Kab. Bone	1905	12.432.578.000	11.226.524.200	7.739.772.000	7.067.802.900	1.643.924.000	1.643.924.000	21.816.274.000	19.938.251.100
348	SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG	Kab. Bulukumba	1911	9.370.541.000	8.475.029.400	3.950.837.000	3.587.759.200	1.481.370.000	1.481.370.000	14.802.748.000	13.544.158.600
349	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	Kab. Enrekang	1921	6.430.363.000	3.271.892.000	2.111.949.000	1.098.384.500	410.337.000	410.337.000	8.952.649.000	4.780.613.500
350	SULAWESI SELATAN	136	MAKASSAR II	Kab. Gowa	1902	11.211.533.000	10.136.973.400	2.424.129.000	2.205.128.100	405.976.000	405.976.000	14.041.638.000	12.748.077.500
351	SULAWESI SELATAN	056	BANTAENG	Kab. Jeneponto	1913	7.992.182.000	7.230.605.000	1.990.416.000	1.806.033.900	388.965.000	388.965.000	10.371.563.000	9.425.603.900
352	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	Kab. Luwu	1909	7.770.038.000	4.072.741.500	1.485.506.000	795.419.000	349.915.000	349.915.000	9.605.459.000	5.218.075.500
353	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	Kab. Luwu Utara	1922	7.312.331.000	6.607.355.800	2.294.277.000	2.079.982.100	335.324.000	335.324.000	9.941.932.000	9.022.661.900
354	SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I	Kab. Maros	1907	12.651.661.000	11.460.909.400	5.197.439.000	4.682.083.800	1.325.056.000	1.325.056.000	19.174.156.000	17.468.049.200
355	SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I	Kab. Pangkajene Kepulauan	1918	11.508.442.000	10.441.858.600	9.177.367.000	8.297.930.400	335.324.000	335.324.000	21.021.133.000	19.075.113.000
356	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	Kota Palopo	1953	10.693.168.000	9.629.577.100	1.094.971.000	992.903.100	335.324.000	335.324.000	12.123.463.000	10.957.804.200
357	SULAWESI SELATAN	058	P A L O P O	Kab. Luwu Timur	1924	26.671.394.000	13.786.505.500	39.350.777.000	21.961.858.500	335.325.000	335.325.000	66.357.496.000	36.083.689.000
358	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	Kab. Pinrang	1901	8.084.358.000	4.124.546.000	1.368.535.000	715.284.500	335.324.000	335.324.000	9.788.217.000	5.175.154.500
359	SULAWESI SELATAN	177	SINJAI	Kab. Sinjai	1910	6.927.875.000	4.925.128.100	1.212.582.000	880.750.500	2.067.305.000	2.067.305.000	10.207.762.000	7.873.183.600
360	SULAWESI SELATAN	155	BENTENG	Kab. Kepulauan Selayar	1914	6.028.647.000	5.456.434.100	1.218.116.000	1.106.573.800	335.324.000	335.324.000	7.582.087.000	6.898.331.900
361	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	Kab. Sidenreng Rappang	1917	7.742.127.000	5.467.658.100	1.501.133.000	1.080.347.900	335.324.000	335.324.000	9.578.584.000	6.883.330.000
362	SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE	Kab. Soppeng	1919	7.120.488.000	6.429.052.300	1.775.833.000	1.636.089.300	3.671.370.000	3.671.370.000	12.567.691.000	11.736.511.600
363	SULAWESI SELATAN	136	MAKASSAR II	Kab. Takalar	1915	7.397.865.000	6.680.633.700	7.686.009.000	6.925.872.000	459.135.000	459.135.000	15.543.009.000	14.065.640.700
364	SULAWESI SELATAN	170	M A K A L E	Kab. Tana Toraja	1906	6.888.622.000	4.942.870.000	1.487.906.000	1.071.528.800	335.324.000	335.324.000	8.711.852.000	6.349.722.800
365	SULAWESI SELATAN	055	WATAMPONE	Kab. Wajo	1903	8.824.669.000	7.983.414.600	33.072.555.000	29.804.142.100	353.542.000	353.542.000	42.250.766.000	38.141.098.700
366	SULAWESI SELATAN	057	PARE - PARE	Kota Parepare	1952	11.554.188.000	5.914.595.500	1.094.139.000	575.812.000	342.311.000	342.311.000	12.990.638.000	6.832.718.500
367	SULAWESI SELATAN	054	MAKASSAR I	Kota Makassar	1951	142.935.620.000	71.572.067.500	1.799.806.000	943.486.500	338.557.000	338.557.000	145.073.983.000	72.854.111.000
368	SULAWESI SELATAN	170	M A K A L E	Kab. Toraja Utara	1925	6.995.249.000	3.671.636.000	1.414.679.000	762.889.500	335.897.000	335.897.000	8.745.825.000	4.770.422.500
369	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Provinsi Sulawesi Tenggara	2000	61.989.629.000	32.753.905.500	45.644.800.000	25.492.338.500	277.000	-	107.634.706.000	58.246.244.000
370	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kab. Buton	2002	3.009.727.000	1.537.800.500	2.986.728.000	1.672.614.000	21.000	-	5.996.476.000	3.210.414.500
371	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kab. Konawe	2009	6.966.384.000	3.793.751.000	15.491.254.000	8.133.884.500	21.000	-	22.457.659.000	11.927.635.500
372	SULAWESI TENGGARA	156	K O L A K A	Kab. Kolaka	2004	13.991.762.000	10.264.848.500	38.002.026.000	27.631.899.600	21.000	-	51.993.809.000	37.896.748.100
373	SULAWESI TENGGARA	157	R A H A	Kab. Muna	2003	4.462.688.000	2.309.675.500	2.432.618.000	1.339.766.000	21.000	-	6.895.327.000	3.649.441.500
374	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kota Kendari	2051	34.295.606.000	17.858.119.500	2.916.957.000	1.860.653.000	21.000	-	37.212.584.000	19.718.772.500
375	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kota Bau-bau	2052	6.040.157.000	3.152.199.500	2.187.608.000	1.210.358.000	21.000	-	8.227.786.000	4.362.557.500
376	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kab. Konawe Selatan	2005	5.108.833.000	2.727.795.500	24.522.277.000	14.740.447.000	408.000	-	29.631.518.000	17.468.242.500
377	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kab. Bombana	2006	6.851.714.000	5.129.116.700	23.936.232.000	17.887.995.600	21.000	-	30.787.967.000	23.017.112.300
378	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kab. Wakatobi	2007	3.268.109.000	1.911.916.000	2.705.583.000	1.744.242.500	21.000	-	5.973.713.000	3.656.158.500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN	Daerah	Kode Pemda	PPh Perorangan		PBB		CHT		Total	
						Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8		7	8	9	10		11
379	SULAWESI TENGGARA	156	K O L A K A	Kab. Kolaka Utara	2008	3.531.491.000	2.699.437.100	10.353.158.000	8.125.881.800	21.000	-	13.884.670.000	10.825.318.900
380	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kab. Konawe Utara	2010	3.851.977.000	2.095.763.000	92.827.789.000	51.982.729.000	21.000	-	96.679.787.000	54.078.492.000
381	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kab. Buton Utara	2011	2.575.457.000	1.373.422.000	2.408.668.000	1.329.409.500	21.000	-	4.984.146.000	2.702.831.500
382	SULAWESI TENGGARA	060	K E N D A R I	Kab. Konawe Kepulauan	2013	2.570.885.000	1.945.980.800	3.021.844.000	2.358.222.400	21.000	-	5.592.750.000	4.304.203.200
383	SULAWESI TENGGARA	156	K O L A K A	Kab. Kolaka Timur	2012	3.274.708.000	2.531.625.100	3.599.800.000	2.879.191.300	21.000	-	6.874.529.000	5.410.816.400
384	SULAWESI TENGGARA	157	R A H A	Kab. Muna Barat	2053	2.616.002.000	1.401.264.500	2.300.157.000	1.268.492.000	21.000	-	4.916.180.000	2.669.756.500
385	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kab. Buton Tengah	2055	3.186.659.000	1.832.553.500	10.448.703.000	5.929.323.500	21.000	-	13.635.383.000	7.761.877.000
386	SULAWESI TENGGARA	103	B A U - B A U	Kab. Buton Selatan	2054	2.400.182.000	1.289.621.500	2.338.267.000	1.286.978.000	21.000	-	4.738.470.000	2.576.599.500
387	BALI	037	D E N P A S A R	Provinsi Bali	2200	265.350.580.000	241.078.712.700	1.475.997.000	1.333.149.800	852.477.000	852.477.000	267.679.054.000	243.264.339.500
388	BALI	037	D E N P A S A R	Kab. Badung	2207	140.557.313.000	128.131.593.200	708.648.000	640.204.600	194.531.000	189.413.060	141.460.492.000	128.961.210.860
389	BALI	154	AMLAPURA	Kab. Bangli	2206	19.645.588.000	17.883.205.700	591.218.000	534.642.700	157.056.000	157.056.000	20.393.862.000	18.574.904.400
390	BALI	132	SINGARAJA	Kab. Buleleng	2201	29.440.653.000	26.710.398.300	987.821.000	891.736.500	251.732.000	251.732.000	30.680.206.000	27.853.866.800
391	BALI	037	D E N P A S A R	Kab. Gianyar	2204	35.619.708.000	26.053.325.400	690.100.000	490.342.900	409.908.000	409.908.000	36.719.716.000	26.953.576.300
392	BALI	132	SINGARAJA	Kab. Jembrana	2202	20.682.926.000	18.814.405.500	1.424.248.000	1.284.357.600	285.914.000	285.914.000	22.393.088.000	20.384.677.100
393	BALI	154	AMLAPURA	Kab. Karangasem	2205	21.638.356.000	19.676.650.200	832.834.000	752.545.300	174.339.000	174.339.000	22.645.529.000	20.603.534.500
394	BALI	154	AMLAPURA	Kab. Klungkung	2203	21.960.064.000	19.981.332.500	554.439.000	501.529.500	133.634.000	133.634.000	22.648.137.000	20.616.496.000
395	BALI	037	D E N P A S A R	Kab. Tabanan	2208	27.045.243.000	24.566.150.200	1.137.550.000	1.028.236.400	171.762.000	166.887.600	28.354.555.000	25.761.274.200
396	BALI	037	D E N P A S A R	Kota Denpasar	2251	127.665.359.000	115.520.077.800	758.256.000	684.964.900	572.261.000	572.261.000	128.995.876.000	116.777.303.700
397	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2300	79.518.099.000	71.800.528.400	67.445.592.000	62.206.911.600	167.743.587.000	167.743.587.000	314.707.278.000	301.751.027.000
398	NUSA TENGGARA BARAT	071	B I M A	Kab. Bima	2304	5.845.218.000	5.294.552.000	5.832.811.000	5.375.989.500	23.369.234.000	23.369.234.000	35.047.263.000	34.039.775.500
399	NUSA TENGGARA BARAT	071	B I M A	Kab. Dompu	2306	7.126.927.000	6.439.446.700	6.014.105.000	5.522.482.400	24.208.998.000	24.208.998.000	37.350.030.000	36.170.927.100
400	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	Kab. Lombok Barat	2301	9.063.385.000	8.195.005.100	5.806.201.000	5.351.261.200	31.509.072.000	31.509.072.000	46.378.658.000	45.055.338.300
401	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	Kab. Lombok Tengah	2302	10.411.467.000	9.398.804.400	5.887.165.000	5.427.083.700	97.252.434.000	97.252.434.000	113.551.066.000	112.078.322.100
402	NUSA TENGGARA BARAT	169	S E L O N G	Kab. Lombok Timur	2303	9.945.159.000	8.968.491.900	6.199.045.000	5.708.427.400	107.874.408.000	107.874.408.000	124.018.612.000	122.551.327.300
403	NUSA TENGGARA BARAT	101	SUMBAWA BESAR	Kab. Sumbawa	2305	9.797.084.000	8.832.654.000	10.012.234.000	9.172.987.600	24.273.797.000	24.273.797.000	44.083.115.000	42.279.438.600
404	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	Kota Mataram	2351	38.707.179.000	34.906.174.600	5.395.025.000	4.984.129.700	82.660.959.000	82.660.959.000	126.763.163.000	122.551.263.300
405	NUSA TENGGARA BARAT	071	B I M A	Kota Bima	2352	8.688.744.000	7.853.035.200	5.209.857.000	4.815.108.300	23.308.301.000	23.308.301.000	37.206.902.000	35.976.444.500
406	NUSA TENGGARA BARAT	101	SUMBAWA BESAR	Kab. Sumbawa Barat	2307	28.255.205.000	25.606.363.100	306.099.650.000	282.470.004.000	23.332.201.000	23.332.201.000	357.687.056.000	331.408.568.100
407	NUSA TENGGARA BARAT	038	M A T A R A M	Kab. Lombok Utara	2308	6.789.848.000	6.165.443.200	5.487.720.000	5.065.947.600	23.505.462.000	23.505.462.000	35.783.030.000	34.736.852.800
408	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2400	48.955.838.000	44.130.004.500	4.379.664.000	3.973.682.800	2.149.441.000	2.149.441.000	55.484.943.000	50.253.128.300
409	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	Kab. Alor	2405	2.353.134.000	2.133.574.400	798.948.000	723.061.000	157.574.000	157.574.000	3.309.656.000	3.014.209.400
410	NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA	Kab. Belu	2402	3.147.954.000	2.839.183.200	652.955.000	591.765.700	142.260.000	142.260.000	3.943.169.000	3.573.208.900
411	NUSA TENGGARA TIMUR	040	E N D E	Kab. Ende	2408	4.018.151.000	2.812.705.700	2.763.694.000	2.026.465.000	128.666.000	128.666.000	6.910.511.000	4.967.836.700
412	NUSA TENGGARA TIMUR	174	LARANTUKA	Kab. Flores Timur	2407	2.635.549.000	1.318.803.000	743.635.000	389.998.000	494.133.000	494.133.000	3.873.317.000	2.202.934.000
413	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	Kab. Kupang	2401	3.108.751.000	2.797.875.900	1.539.747.000	1.414.736.500	159.894.000	155.326.740	4.808.392.000	4.367.939.140
414	NUSA TENGGARA TIMUR	174	LARANTUKA	Kab. Lembata	2413	2.263.044.000	1.203.496.000	728.027.000	381.545.000	169.214.000	169.214.000	3.160.285.000	1.754.255.000
415	NUSA TENGGARA TIMUR	111	R U T E N G	Kab. Manggarai	2410	3.232.721.000	2.917.583.700	1.953.731.000	1.767.879.400	374.234.000	374.234.000	5.560.686.000	5.059.697.100
416	NUSA TENGGARA TIMUR	111	R U T E N G	Kab. Ngada	2409	2.735.196.000	1.999.740.900	925.138.000	666.112.300	141.338.000	59.785.400	3.801.672.000	2.725.638.600
417	NUSA TENGGARA TIMUR	040	E N D E	Kab. Sikka	2406	4.949.576.000	2.550.421.500	768.760.000	402.104.500	196.018.000	196.018.000	5.914.354.000	3.148.544.000
418	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	Kab. Sumba Barat	2412	2.742.777.000	2.482.486.900	706.437.000	640.527.400	147.664.000	147.664.000	3.596.878.000	3.270.678.300
419	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	Kab. Sumba Timur	2411	4.193.836.000	3.783.276.300	3.166.491.000	2.863.086.400	189.753.000	189.753.000	7.550.080.000	6.836.115.700
420	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	Kab. Timor Tengah Selatan	2404	2.738.793.000	2.478.545.500	1.435.919.000	1.318.705.300	186.073.000	186.073.000	4.360.785.000	3.983.323.800
421	NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA	Kab. Timor Tengah Utara	2403	2.446.301.000	1.733.414.900	787.645.000	564.071.800	139.048.000	139.048.000	3.372.994.000	2.436.534.700
422	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	Kota Kupang	2451	26.366.882.000	23.776.845.900	686.101.000	622.018.500	971.163.000	971.163.000	28.024.146.000	25.370.027.400
423	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	Kab. Rote Ndao	2414	2.083.754.000	1.882.241.400	689.033.000	623.091.400	154.592.000	154.592.000	2.927.379.000	2.659.924.800
424	NUSA TENGGARA TIMUR	111	R U T E N G	Kab. Manggarai Barat	2415	5.072.183.000	4.615.677.000	759.845.000	689.215.500	1.124.797.000	1.124.797.000	6.956.825.000	6.429.689.500
425	NUSA TENGGARA TIMUR	040	E N D E	Kab. Nagekeo	2417	2.147.988.000	1.549.843.200	742.165.000	533.153.200	134.643.000	134.643.000	3.024.796.000	2.217.639.400
426	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	Kab. Sumba Barat Daya	2419	2.183.520.000	1.976.011.300	788.204.000	714.339.200	276.915.000	276.915.000	3.248.639.000	2.967.265.500
427	NUSA TENGGARA TIMUR	041	WAINGAPU	Kab. Sumba Tengah	2418	1.500.826.000	1.353.101.100	809.246.000	731.463.900	136.497.000	136.497.000	2.446.569.000	2.221.062.000
428	NUSA TENGGARA TIMUR	111	R U T E N G	Kab. Manggarai Timur	2420	2.313.466.000	1.253.790.000	811.864.000	433.303.000	165.920.000	165.920.000	3.291.250.000	1.853.013.000
429	NUSA TENGGARA TIMUR	039	K U P A N G	Kab. Sabu Raijua	2421	1.900.122.000	1.724.166.600	713.797.000	647.068.800	152.240.000	147.850.160	2.766.159.000	2.519.085.560
430	NUSA TENGGARA TIMUR	172	ATAMBUA	Kab. Malaka	2422	2.033.255.000	1.839.239.400	691.279.000	626.084.300	164.869.000	164.869.000	2.889.403.000	2.630.192.700
431	MALUKU	061	A M B O N	Provinsi Maluku	2100	31.582.682.000	16.006.350.000	7.034.624.000	3.690.853.000	-	-	38.617.306.000	19.697.203.000
432	MALUKU	104	SAUMLAKI	Kab. Kepulauan Tanimbar	2103	2.653.728.000	2.388.622.400	2.146.136.000	1.940.670.800	-	-	4.799.864.000	4.329.293.200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN	Daerah	Kode Pemda	PPh Perorangan		PBB		CHT		Total	
						Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8		7	8	9	10		11
433	MALUKU	173	M A S O H I	Kab. Maluku Tengah	2101	5.030.697.000	4.551.633.400	5.597.967.000	5.088.669.000	-	-	10.628.664.000	9.640.302.400
434	MALUKU	084	T U A L	Kab. Maluku Tenggara	2102	3.281.520.000	2.970.566.700	982.093.000	889.280.600	-	-	4.263.613.000	3.859.847.300
435	MALUKU	061	A M B O N	Kab. Buru	2104	2.738.020.000	2.500.025.800	3.603.294.000	3.378.823.000	-	-	6.341.314.000	5.878.848.800
436	MALUKU	061	A M B O N	Kota Ambon	2151	25.110.992.000	12.799.271.500	935.861.000	488.678.000	-	-	26.046.853.000	13.287.949.500
437	MALUKU	173	M A S O H I	Kab. Seram Bagian Barat	2106	2.877.022.000	2.638.278.400	1.960.773.000	1.796.238.200	-	-	4.837.795.000	4.434.516.600
438	MALUKU	173	M A S O H I	Kab. Seram Bagian Timur	2107	2.615.401.000	2.403.414.900	14.797.281.000	13.328.307.900	-	-	17.412.682.000	15.731.722.800
439	MALUKU	084	T U A L	Kab. Kepulauan Aru	2105	2.652.366.000	2.408.616.800	2.284.353.000	2.063.635.100	-	-	4.936.719.000	4.472.251.900
440	MALUKU	084	T U A L	Kota Tual	2152	2.501.801.000	2.288.584.700	1.049.561.000	960.044.100	-	-	3.551.362.000	3.248.628.800
441	MALUKU	104	SAUMLAKI	Kab. Maluku Barat Daya	2109	3.753.534.000	3.399.972.900	1.849.655.000	1.672.854.100	-	-	5.603.189.000	5.072.827.000
442	MALUKU	061	A M B O N	Kab. Buru Selatan	2110	1.762.820.000	926.445.000	1.815.300.000	921.584.500	-	-	3.578.120.000	1.848.029.500
443	PAPUA	063	JAYAPURA	Provinsi Papua	2500	41.061.872.000	20.538.701.000	8.114.150.000	5.191.702.500	23.000	-	49.176.045.000	25.730.403.500
444	PAPUA	064	B I A K	Kab. Biak Numfor	2502	7.047.546.000	6.441.724.900	2.066.888.000	1.972.561.200	32.000	-	9.114.466.000	8.414.286.100
445	PAPUA	063	JAYAPURA	Kab. Jayapura	2501	7.138.695.000	6.528.529.400	9.432.121.000	8.683.739.700	3.000	-	16.570.819.000	15.212.269.100
446	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	Kab. Jayawijaya	3801	6.053.392.000	4.576.053.100	1.818.342.000	1.605.825.900	-	-	7.871.734.000	6.181.879.000
447	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	Kab. Merauke	3601	11.468.806.000	8.463.297.100	27.723.768.000	20.488.970.400	-	-	39.192.574.000	28.952.267.500
448	PAPUA TENGAH	141	T I M I K A	Kab. Mimika	3701	172.971.793.000	155.826.140.300	665.601.566.000	602.786.109.200	63.000	-	838.573.422.000	758.612.249.500
449	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	Kab. Nabire	3702	14.738.723.000	13.385.484.600	21.269.840.000	19.280.762.600	7.000	-	36.008.570.000	32.666.247.200
450	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	Kab. Paniai	3703	11.760.076.000	10.677.907.200	13.900.077.000	12.644.457.200	7.000	-	25.660.160.000	23.322.364.400
451	PAPUA TENGAH	113	W A M E N A	Kab. Puncak Jaya	3704	10.775.696.000	7.543.502.300	12.927.432.000	9.122.012.400	7.000	-	23.703.135.000	16.665.514.700
452	PAPUA	138	S E R U I	Kab. Kepulauan Yapen	2504	4.967.519.000	3.758.526.500	2.335.300.000	2.037.952.900	3.000	-	7.302.822.000	5.796.479.400
453	PAPUA	063	JAYAPURA	Kota Jayapura	2551	37.139.312.000	25.997.518.400	2.128.142.000	1.832.163.200	3.000	-	39.267.457.000	27.829.681.600
454	PAPUA	063	JAYAPURA	Kab. Sarmi	2516	3.332.358.000	1.773.832.500	6.774.343.000	3.753.370.000	3.000	-	10.106.704.000	5.527.202.500
455	PAPUA	063	JAYAPURA	Kab. Keerom	2517	3.279.323.000	1.643.133.500	8.684.093.000	4.706.005.500	3.000	-	11.963.419.000	6.349.139.000
456	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	Kab. Yahukimo	3802	1.754.770.000	1.629.388.700	2.305.297.000	2.165.975.500	-	-	4.060.067.000	3.795.364.200
457	PAPUA PEGUNUNGAN	063	JAYAPURA	Kab. Pegunungan Bintang	3806	1.323.539.000	662.630.000	1.754.715.000	1.003.673.000	-	-	3.078.254.000	1.666.303.000
458	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	Kab. Tolikara	3803	1.355.239.000	678.478.000	1.138.731.000	690.715.500	-	-	2.493.970.000	1.369.193.500
459	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	Kab. Boven Digoel	3602	4.048.340.000	3.703.004.500	13.386.825.000	12.249.963.400	-	-	17.435.165.000	15.952.967.900
460	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	Kab. Mappi	3603	3.099.081.000	2.814.916.800	4.104.496.000	3.740.138.000	-	-	7.203.577.000	6.555.054.800
461	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	Kab. Asmat	3604	3.446.133.000	2.590.647.300	3.925.916.000	3.013.088.900	-	-	7.372.049.000	5.603.736.200
462	PAPUA	138	S E R U I	Kab. Waropen	2523	2.857.986.000	1.430.339.000	2.004.384.000	1.123.542.000	3.000	-	4.862.373.000	2.553.881.000
463	PAPUA	064	B I A K	Kab. Supiori	2527	3.464.623.000	3.172.837.100	1.987.972.000	1.878.778.300	3.000	-	5.452.598.000	5.051.615.400
464	PAPUA	063	JAYAPURA	Kab. Mamberamo Raya	2520	2.862.779.000	1.452.876.500	2.504.949.000	1.373.824.500	3.000	-	5.367.731.000	2.826.701.000
465	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	Kab. Mamberamo Tengah	3804	1.046.632.000	524.174.500	1.095.786.000	674.418.000	-	-	2.142.418.000	1.198.592.500
466	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	Kab. Yalimo	3805	1.389.332.000	730.848.000	1.080.119.000	666.842.500	-	-	2.469.451.000	1.397.690.500
467	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	Kab. Lanny Jaya	3807	1.052.331.000	533.229.500	1.021.477.000	633.236.500	-	-	2.073.808.000	1.166.466.000
468	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	Kab. Nduga	3808	822.809.000	412.261.500	1.275.355.000	766.323.000	-	-	2.098.164.000	1.178.584.500
469	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	Kab. Dogiyai	3706	11.278.903.000	10.243.365.700	14.069.867.000	12.797.706.100	7.000	-	25.348.777.000	23.041.071.800
470	PAPUA TENGAH	141	T I M I K A	Kab. Puncak	3705	11.338.094.000	5.977.549.500	13.642.930.000	7.272.005.000	7.000	-	24.981.031.000	13.249.554.500
471	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	Kab. Intan Jaya	3707	11.520.862.000	8.299.901.200	13.837.416.000	10.030.010.100	7.000	-	25.358.285.000	18.329.911.300
472	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	Kab. Deiyai	3708	11.386.678.000	8.239.498.600	14.071.790.000	10.237.951.400	7.000	-	25.458.475.000	18.477.450.000
473	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	Provinsi Maluku Utara	2800	133.782.175.000	121.660.900.400	63.472.136.000	58.028.144.900	-	-	197.254.311.000	179.689.045.300
474	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	Kab. Halmahera Tengah	2802	97.250.069.000	88.754.850.000	75.640.200.000	68.303.131.200	-	-	172.890.269.000	157.057.981.200
475	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	Kota Ternate	2851	24.353.344.000	22.079.484.000	5.409.801.000	4.976.547.200	-	-	29.763.145.000	27.056.031.200
476	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	Kab. Halmahera Barat	2807	9.021.104.000	8.224.100.000	5.884.988.000	5.410.105.500	-	-	14.906.092.000	13.634.205.500
477	MALUKU UTARA	112	TOBELO	Kab. Halmahera Timur	2806	10.506.750.000	9.547.577.700	129.413.411.000	119.372.389.800	-	-	139.920.161.000	128.919.967.500
478	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	Kab. Halmahera Selatan	2804	39.439.318.000	35.932.395.900	81.979.961.000	75.045.132.500	-	-	121.419.279.000	110.977.528.400
479	MALUKU UTARA	112	TOBELO	Kab. Halmahera Utara	2803	16.181.073.000	14.640.108.200	17.067.086.000	15.496.558.600	-	-	33.248.159.000	30.136.666.800
480	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	Kab. Kepulauan Sula	2805	8.988.689.000	8.258.676.100	7.938.022.000	7.379.409.900	-	-	16.926.711.000	15.638.086.000
481	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	Kota Tidore Kepulauan	2853	13.510.131.000	12.362.363.500	7.161.272.000	6.719.089.200	-	-	20.671.403.000	19.081.452.700
482	MALUKU UTARA	112	TOBELO	Kab. Pulau Morotai	2808	7.949.797.000	7.233.975.700	5.122.785.000	4.678.817.600	-	-	13.072.582.000	11.912.793.300
483	MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	Kab. Pulau Taliabu	2809	8.661.048.000	7.969.670.300	13.554.626.000	12.445.557.600	-	-	22.215.674.000	20.415.227.900
484	BANTEN	020	S E R A N G	Provinsi Banten	2900	1.045.734.387.000	946.364.988.800	7.237.775.000	6.544.469.300	835.898.000	-	1.053.808.060.000	952.909.458.100
485	BANTEN	161	RANGKASBITUNG	Kab. Lebak	2903	83.909.839.000	76.331.000.100	15.221.173.000	13.770.599.800	149.268.000	-	99.280.280.000	90.101.599.900
486	BANTEN	161	RANGKASBITUNG	Kab. Pandeglang	2902	80.252.456.000	73.027.743.700	8.149.580.000	7.379.758.300	149.268.000	-	88.551.304.000	80.407.502.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN	Daerah	Kode Pemda	PPh Perorangan		PBB		CHT		Total	
						Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8		7	8	9	10		11
487	BANTEN	020	S E R A N G	Kab. Serang	2901	133.233.552.000	120.738.878.300	4.683.681.000	4.230.933.500	149.268.000	-	138.066.501.000	124.969.811.800
488	BANTEN	127	TANGERANG	Kab. Tangerang	2904	399.099.066.000	361.008.564.300	2.815.275.000	2.541.057.300	968.903.000	-	402.883.244.000	363.549.621.600
489	BANTEN	020	S E R A N G	Kota Cilegon	2952	187.820.126.000	170.188.900.400	1.249.702.000	1.135.465.300	149.268.000	-	189.219.096.000	171.324.365.700
490	BANTEN	127	TANGERANG	Kota Tangerang	2951	442.040.341.000	399.903.801.700	1.976.758.000	1.786.087.900	184.804.000	-	444.201.903.000	401.689.889.600
491	BANTEN	020	S E R A N G	Kota Serang	2953	102.842.675.000	93.256.423.200	1.309.999.000	1.186.728.000	149.268.000	-	104.301.942.000	94.443.151.200
492	BANTEN	127	TANGERANG	Kota Tangerang Selatan	2954	318.463.175.000	288.576.228.200	1.707.074.000	1.544.087.300	398.678.000	-	320.568.927.000	290.120.315.500
493	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Provinsi Bangka Belitung	3000	40.758.294.000	36.758.777.200	16.549.273.000	14.949.949.700	-	-	57.307.567.000	51.708.726.900
494	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka	3002	10.614.976.000	9.609.413.700	21.793.540.000	19.672.892.300	-	-	32.408.516.000	29.282.306.000
495	BANGKA BELITUNG	107	TANJUNG PANDAN	Kab. Belitung	3001	8.038.397.000	7.248.000.500	12.973.729.000	11.782.109.800	-	-	21.012.126.000	19.030.110.300
496	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Kota Pangkal Pinang	3051	22.558.162.000	20.302.345.800	2.405.119.000	2.177.708.300	-	-	24.963.281.000	22.480.054.100
497	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Selatan	3005	5.164.394.000	4.669.228.800	14.435.393.000	13.022.227.600	-	-	19.599.787.000	17.691.456.400
498	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Tengah	3004	7.735.999.000	6.999.923.100	6.897.364.000	6.241.421.300	-	-	14.633.363.000	13.241.344.400
499	BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Barat	3003	8.761.485.000	7.923.115.200	16.773.932.000	15.162.871.800	-	-	25.535.417.000	23.085.987.000
500	BANGKA BELITUNG	107	TANJUNG PANDAN	Kab. Belitung Timur	3006	6.810.424.000	6.140.564.200	13.927.419.000	12.638.412.000	-	-	20.737.843.000	18.778.976.200
501	GORONTALO	050	GORONTALO	Provinsi Gorontalo	3100	18.626.184.000	16.783.690.700	2.145.976.000	1.959.214.100	152.000	-	20.772.312.000	18.742.904.800
502	GORONTALO	180	MARISA	Kab. Boalemo	3102	2.974.453.000	2.693.457.400	2.449.071.000	2.216.106.400	38.000	-	5.423.562.000	4.909.563.800
503	GORONTALO	050	GORONTALO	Kab. Gorontalo	3101	6.056.903.000	5.452.413.400	2.361.204.000	2.148.720.300	228.000	-	8.418.335.000	7.601.133.700
504	GORONTALO	050	GORONTALO	Kota Gorontalo	3151	12.348.869.000	11.125.803.300	684.191.000	622.155.500	38.000	-	13.033.098.000	11.747.958.800
505	GORONTALO	180	MARISA	Kab. Pohuwato	3103	3.606.324.000	3.249.854.900	2.647.056.000	2.397.051.100	38.000	-	6.253.418.000	5.646.906.000
506	GORONTALO	050	GORONTALO	Kab. Bone Bolango	3104	4.618.416.000	4.161.396.600	881.984.000	799.915.300	38.000	-	5.500.438.000	4.961.311.900
507	GORONTALO	050	GORONTALO	Kab. Gorontalo Utara	3107	2.929.719.000	2.647.422.100	2.539.370.000	2.370.834.400	38.000	-	5.469.127.000	5.018.256.500
508	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Provinsi Kepulauan Riau	3200	218.309.561.000	197.703.123.700	38.798.675.000	35.653.910.500	103.151.000	62.513.800	257.211.387.000	233.419.548.000
509	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Kab. Natuna	3203	22.118.115.000	20.235.011.500	104.683.450.000	96.480.089.700	21.491.000	21.491.000	126.823.056.000	116.736.592.200
510	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Kab. Kepulauan Anambas	3205	27.521.805.000	25.119.086.900	60.658.153.000	55.931.139.300	21.239.000	73.000	88.201.197.000	81.050.299.200
511	KEPULAUAN RIAU	137	B A T A M	Kab. Karimun	3202	37.700.045.000	34.187.512.100	15.012.178.000	13.628.626.100	21.239.000	73.000	52.733.462.000	47.816.211.200
512	KEPULAUAN RIAU	137	B A T A M	Kota Batam	3251	201.547.552.000	182.520.081.200	5.671.558.000	5.246.735.100	154.731.000	93.773.800	207.373.841.000	187.860.590.100
513	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Kota Tanjung Pinang	3252	32.192.394.000	29.156.056.100	4.407.205.000	4.048.138.800	21.491.000	325.000	36.621.090.000	33.204.519.900
514	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Kab. Lingga	3204	20.920.883.000	19.124.406.800	7.843.409.000	7.264.863.000	21.239.000	21.239.000	28.785.531.000	26.410.508.800
515	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	Kab. Bintan	3201	33.839.028.000	30.860.080.500	8.709.783.000	8.016.465.100	21.516.000	21.516.000	42.570.327.000	38.898.061.600
516	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Provinsi Papua Barat	3300	27.602.506.000	13.833.786.500	249.200.175.000	130.680.003.500	-	-	276.802.681.000	144.513.790.000
517	PAPUA BARAT	067	FAK - FAK	Kab. Fak Fak	3303	4.879.447.000	4.468.814.800	64.990.833.000	59.378.912.000	-	-	69.870.280.000	63.847.726.800
518	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Kab. Manokwari	3301	12.112.476.000	6.130.908.500	34.819.476.000	21.348.993.000	-	-	46.931.952.000	27.479.901.500
519	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	Kab. Sorong	3902	6.205.590.000	5.616.666.300	110.863.198.000	101.177.603.300	-	-	117.068.788.000	106.794.269.600
520	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	Kota Sorong	3951	11.757.614.000	5.982.434.000	10.384.959.000	8.483.574.500	-	-	22.142.573.000	14.466.008.500
521	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	Kab. Raja Ampat	3904	3.825.877.000	2.247.335.500	31.918.503.000	20.091.472.500	-	-	35.744.380.000	22.338.808.000
522	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	Kab. Sorong Selatan	3903	2.447.463.000	1.262.738.500	6.470.759.000	3.896.254.000	-	-	8.918.222.000	5.158.992.500
523	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Kab. Teluk Bintuni	3306	18.899.874.000	13.239.411.900	1.167.826.281.000	843.708.588.900	-	-	1.186.726.155.000	856.948.000.800
524	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Kab. Teluk Wondama	3307	2.975.800.000	2.105.537.500	28.794.341.000	20.535.148.400	-	-	31.770.141.000	22.640.685.900
525	PAPUA BARAT	067	FAK - FAK	Kab. Kaimana	3308	3.286.768.000	2.312.483.500	32.635.693.000	23.207.785.300	-	-	35.922.461.000	25.520.268.800
526	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	Kab. Maybrat	3906	2.075.804.000	1.041.148.500	6.203.731.000	3.708.780.000	-	-	8.279.535.000	4.749.928.500
527	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	Kab. Tambrauw	3905	1.973.233.000	1.414.195.600	6.128.764.000	4.653.765.400	-	-	8.101.997.000	6.067.961.000
528	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Kab. Manokwari Selatan	3312	2.805.901.000	1.415.626.500	27.773.694.000	14.554.945.500	-	-	30.579.595.000	15.970.572.000
529	PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	Kab. Pegunungan Arfak	3311	3.300.948.000	2.374.413.600	26.880.613.000	19.152.281.200	-	-	30.181.561.000	21.526.694.800
530	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	Provinsi Sulawesi Barat	3400	15.130.813.000	13.681.951.700	3.494.483.000	3.189.620.600	-	-	18.625.296.000	16.871.572.300
531	SULAWESI BARAT	059	M A J E N E	Kab. Majene	3401	3.004.163.000	2.704.063.600	900.358.000	815.066.700	-	-	3.904.521.000	3.519.130.300
532	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	Kab. Mamuju	3402	9.710.786.000	8.790.586.800	2.862.305.000	2.618.751.700	-	-	12.573.091.000	11.409.338.500
533	SULAWESI BARAT	059	M A J E N E	Kab. Polewali Mandar	3404	4.728.433.000	4.257.760.700	1.104.137.000	998.467.800	-	-	5.832.570.000	5.256.228.500
534	SULAWESI BARAT	059	M A J E N E	Kab. Mamasa	3405	2.505.095.000	2.265.444.900	1.072.174.000	969.701.100	-	-	3.577.269.000	3.235.146.000
535	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	Kab. Pasangkayu	3403	3.192.347.000	1.663.548.500	8.900.292.000	4.640.197.500	-	-	12.092.639.000	6.303.746.000
536	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	Kab. Mamuju Tengah	3406	2.201.685.000	1.991.561.900	1.875.379.000	1.696.515.700	-	-	4.077.064.000	3.688.077.600
537	KALIMANTAN UTARA	185	TANJUNG SELOR	Provinsi Kalimantan Utara	3500	30.062.531.000	27.119.022.400	116.897.632.000	106.646.824.600	207.000	-	146.960.370.000	133.765.847.000
538	PAPUA SELATAN	068	MERAUKE	Provinsi Papua Tengah	3700	144.975.467.000	130.479.937.800	136.530.741.000	123.047.033.000	45.000	-	281.506.253.000	253.526.970.800
539	PAPUA TENGAH	085	N A B I R E	Provinsi Papua Selatan	3600	11.506.719.000	8.057.022.600	11.451.546.000	9.005.832.300	-	-	22.958.265.000	17.062.854.900
540	PAPUA PEGUNUNGAN	113	W A M E N A	Provinsi Papua Pegunungan	3800	7.866.716.000	3.944.277.500	3.034.407.000	2.264.660.000	-	-	10.901.123.000	6.208.937.500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	P/K	KPPN	Daerah	Kode Pemda	PPh Perorangan		PBB		CHT		Total	
						Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8		7	8	9	10		11
541	PAPUA BARAT DAYA	066	S O R O N G	Provinsi Papua Barat Daya	3900	16.059.299.000	8.064.811.500	34.038.926.000	20.966.142.000	-	-	50.098.225.000	29.030.953.500
542	KALIMANTAN UTARA	185	TANJUNG SELOR	Kab. Bulungan	3501	15.170.798.000	13.676.413.400	139.320.412.000	126.997.605.300	65.000	-	154.491.275.000	140.674.018.700
543	KALIMANTAN UTARA	185	TANJUNG SELOR	Kab. Malinau	3503	6.108.917.000	5.507.185.600	78.559.302.000	72.803.895.000	65.000	-	84.668.284.000	78.311.080.600
544	KALIMANTAN UTARA	152	NUNUKAN	Kab. Nunukan	3502	6.357.793.000	5.730.719.300	76.740.624.000	69.805.707.400	65.000	-	83.098.482.000	75.536.426.700
545	KALIMANTAN UTARA	048	T A R A K A N	Kota Tarakan	3551	17.695.696.000	15.969.032.300	108.373.786.000	98.475.155.400	312.000	-	126.069.794.000	114.444.187.700
546	KALIMANTAN UTARA	048	T A R A K A N	Kab. Tana Tidung	3504	6.161.848.000	5.577.207.500	224.103.448.000	203.740.003.800	65.000	-	230.265.361.000	209.317.211.300
Jumlah						**45.893.851.229.000**	**40.735.535.692.200**	**29.002.090.481.000**	**24.731.306.757.200**	**6.563.774.004.000**	**6.553.021.228.380**	**81.459.715.714.000**	**72.019.863.677.780**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	ACEH	Provinsi Aceh	0600	59.036.457.000	47.321.784.000	62.479.543.000	168.803.000	1.002.550.000	-	12.003.081.000	182.012.218.000
2	ACEH	Kab. Aceh Barat	0606	182.432.000	304.708.000	81.036.157.000	9.473.000	18.891.000	1.052.090.000	2.434.415.000	85.038.166.000
3	ACEH	Kab. Aceh Besar	0601	182.432.000	304.392.000	3.550.520.000	341.275.000	15.688.000	1.775.553.000	1.100.735.000	7.270.595.000
4	ACEH	Kab. Aceh Selatan	0605	182.432.000	305.855.000	5.690.207.000	9.499.000	15.662.000	1.559.684.000	1.966.608.000	9.729.947.000
5	ACEH	Kab. Aceh Singkil	0610	178.709.000	294.845.000	3.508.506.000	9.232.000	32.485.000	2.298.526.000	3.365.480.000	9.687.783.000
6	ACEH	Kab. Aceh Tengah	0607	268.115.000	832.764.000	14.502.507.000	9.255.000	59.854.000	833.805.000	1.291.761.000	17.798.061.000
7	ACEH	Kab. Aceh Tenggara	0608	226.391.000	301.558.000	3.610.815.000	9.509.000	22.541.000	851.176.000	1.839.605.000	6.861.595.000
8	ACEH	Kab. Aceh Timur	0604	1.975.678.000	8.269.511.000	3.500.616.000	9.475.000	21.773.000	1.317.010.000	3.145.579.000	18.239.642.000
9	ACEH	Kab. Aceh Utara	0603	1.148.322.000	6.290.386.000	3.399.765.000	9.271.000	13.565.000	1.043.823.000	2.691.951.000	14.597.083.000
10	ACEH	Kab. Bireuen	0611	288.332.000	949.183.000	3.501.202.000	9.475.000	16.831.000	1.123.791.000	1.642.048.000	7.530.862.000
11	ACEH	Kab. Pidie	0602	182.432.000	305.143.000	10.733.138.000	51.625.000	17.383.000	1.073.560.000	1.169.988.000	13.533.269.000
12	ACEH	Kab. Simeulue	0609	182.432.000	305.365.000	3.514.171.000	9.487.000	21.363.000	2.819.959.000	1.250.021.000	8.102.798.000
13	ACEH	Kota Banda Aceh	0651	178.709.000	296.420.000	3.400.425.000	50.572.000	10.087.000	884.711.000	508.379.000	5.329.303.000
14	ACEH	Kota Sabang	0652	182.432.000	305.225.000	3.509.889.000	9.484.000	4.770.000	1.303.232.000	-	5.315.032.000
15	ACEH	Kota Langsa	0653	799.438.000	850.114.000	3.478.251.000	9.482.000	5.216.000	898.074.000	2.577.907.000	8.618.482.000
16	ACEH	Kota Lhokseumawe	0654	282.447.000	922.275.000	3.404.796.000	9.301.000	4.673.000	910.631.000	1.784.698.000	7.318.821.000
17	ACEH	Kab. Gayo Lues	0613	843.397.000	855.125.000	8.732.092.000	9.514.000	19.581.000	851.176.000	1.866.152.000	13.177.037.000
18	ACEH	Kab. Aceh Barat Daya	0612	182.432.000	304.774.000	11.288.146.000	9.483.000	6.429.000	1.033.480.000	2.008.167.000	14.832.911.000
19	ACEH	Kab. Aceh Jaya	0614	182.432.000	305.814.000	10.785.147.000	51.625.000	56.003.000	1.424.368.000	2.229.607.000	15.034.996.000
20	ACEH	Kab. Nagan Raya	0615	182.432.000	305.233.000	51.360.625.000	9.484.000	16.100.000	1.142.538.000	4.278.652.000	57.295.064.000
21	ACEH	Kab. Aceh Tamiang	0616	4.778.455.000	855.125.000	3.517.683.000	9.469.000	14.706.000	1.048.749.000	3.346.910.000	13.571.097.000
22	ACEH	Kab. Bener Meriah	0617	379.601.000	1.448.220.000	3.510.894.000	9.479.000	77.890.000	851.176.000	1.418.628.000	7.695.888.000
23	ACEH	Kab. Pidie Jaya	0618	182.432.000	304.392.000	3.484.927.000	9.499.000	4.779.000	963.356.000	1.750.459.000	6.699.844.000
24	ACEH	Kota Subulussalam	0656	182.432.000	304.398.000	3.637.101.000	9.474.000	30.948.000	851.176.000	2.312.187.000	7.327.716.000
25	SUMATERA UTARA	Provinsi Sumatera Utara	0700	185.625.000	19.504.000	102.643.784.000	5.241.751.000	12.559.151.000	-	24.534.175.000	145.183.990.000
26	SUMATERA UTARA	Kab. Asahan	0710	11.050.000	1.029.000	3.934.164.000	125.675.000	74.284.000	1.055.854.000	6.428.218.000	11.630.274.000
27	SUMATERA UTARA	Kab. Dairi	0707	11.280.000	1.050.000	4.650.345.000	128.832.000	205.733.000	851.176.000	2.717.550.000	8.565.966.000
28	SUMATERA UTARA	Kab. Deli Serdang	0701	67.393.000	5.805.000	3.927.583.000	125.282.000	75.109.000	990.118.000	3.387.045.000	8.578.335.000
29	SUMATERA UTARA	Kab. Karo	0702	52.769.000	5.926.000	4.021.998.000	128.450.000	82.756.000	851.176.000	2.784.581.000	7.927.656.000
30	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhanbatu	0706	16.186.100.000	1.029.000	3.934.272.000	125.512.000	81.985.600	1.006.790.000	5.046.900.000	26.382.588.600
31	SUMATERA UTARA	Kab. Langkat	0703	1.124.765.000	65.962.000	4.039.286.000	128.718.000	163.620.000	1.162.479.000	6.118.420.000	12.803.250.000
32	SUMATERA UTARA	Kab. Mandailing Natal	0713	11.280.000	1.050.000	15.524.633.000	13.070.259.000	505.007.000	1.539.183.000	3.624.207.000	34.275.619.000
33	SUMATERA UTARA	Kab. Nias	0711	11.280.000	1.050.000	4.029.534.000	128.513.000	237.937.000	1.225.993.000	886.408.000	6.520.715.000
34	SUMATERA UTARA	Kab. Simalungun	0705	11.155.000	1.029.000	3.938.460.000	125.626.000	168.370.000	833.805.000	5.321.686.000	10.400.131.000
35	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Selatan	0709	11.280.000	1.050.000	203.104.036.000	1.109.359.000	630.168.000	911.768.000	3.433.444.000	209.201.105.000
36	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Tengah	0704	10.819.000	1.007.000	14.618.551.000	122.037.000	327.300.000	1.898.234.000	3.307.947.000	20.285.895.000
37	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Utara	0708	11.280.000	1.050.000	15.024.577.000	128.880.000	552.869.000	851.176.000	2.700.114.000	19.269.946.000
38	SUMATERA UTARA	Kab. Toba Samosir	0717	11.280.000	1.050.000	4.021.964.000	128.474.000	145.688.000	851.176.000	2.075.343.000	7.234.975.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
39	SUMATERA UTARA	Kota Binjai	0753	113.406.000	5.805.000	3.917.300.000	125.153.000	76.590.000	833.805.000	2.707.802.000	7.779.861.000
40	SUMATERA UTARA	Kota Medan	0751	11.155.000	1.029.000	3.927.085.000	125.456.000	64.794.000	855.082.000	875.068.000	5.859.669.000
41	SUMATERA UTARA	Kota Pematang Siantar	0754	11.050.000	1.029.000	3.927.197.000	125.459.000	76.304.000	833.805.000	945.338.000	5.920.182.000
42	SUMATERA UTARA	Kota Sibolga	0756	11.050.000	1.029.000	3.929.858.000	125.542.000	83.963.000	843.882.000	852.007.000	5.847.331.000
43	SUMATERA UTARA	Kota Tanjung Balai	0755	11.050.000	1.029.000	3.928.340.000	125.336.000	69.142.000	833.805.000	1.110.551.000	6.079.253.000
44	SUMATERA UTARA	Kota Tebing Tinggi	0752	11.050.000	1.029.000	3.922.394.000	125.323.000	68.534.000	833.805.000	1.077.764.000	6.039.899.000
45	SUMATERA UTARA	Kota Padang Sidempuan	0757	11.050.000	1.029.000	14.392.738.000	125.274.000	92.715.000	833.805.000	2.730.324.000	18.186.935.000
46	SUMATERA UTARA	Kab. Pakpak Bharat	0715	11.280.000	1.050.000	4.146.438.000	129.484.000	334.762.000	851.176.000	1.542.698.000	7.016.888.000
47	SUMATERA UTARA	Kab. Nias Selatan	0714	11.280.000	1.050.000	4.032.245.000	128.780.000	724.991.000	3.621.192.000	1.660.041.000	10.179.579.000
48	SUMATERA UTARA	Kab. Humbang Hasundutan	0716	11.280.000	1.050.000	4.031.807.000	128.521.000	327.226.000	851.176.000	2.358.346.000	7.709.406.000
49	SUMATERA UTARA	Kab. Serdang Bedagai	0720	11.155.000	1.029.000	3.912.430.000	125.002.000	76.321.000	1.164.815.000	4.274.073.000	9.564.825.000
50	SUMATERA UTARA	Kab. Samosir	0712	11.280.000	1.050.000	4.022.077.000	128.465.000	489.688.000	851.176.000	1.008.826.000	6.512.562.000
51	SUMATERA UTARA	Kab. Batu Bara	0721	11.050.000	1.029.000	3.920.280.000	125.079.000	76.977.000	1.237.104.000	3.350.972.000	8.722.491.000
52	SUMATERA UTARA	Kab. Padang Lawas	0722	638.684.000	1.029.000	14.416.490.000	1.086.883.000	558.244.000	833.805.000	4.494.434.000	22.029.569.000
53	SUMATERA UTARA	Kab. Padang Lawas Utara	0723	16.513.441.000	1.029.000	14.417.193.000	125.848.000	520.270.000	833.805.000	4.227.666.000	36.639.252.000
54	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhanbatu Selatan	0724	15.747.368.000	1.007.000	3.814.871.000	121.828.000	961.269.000	816.435.000	6.669.263.000	28.132.041.000
55	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhanbatu Utara	0725	11.280.000	1.050.000	14.705.169.000	128.424.000	131.576.000	921.687.000	5.929.234.000	21.828.420.000
56	SUMATERA UTARA	Kab. Nias Utara	0726	11.050.000	1.029.000	3.946.665.000	125.888.000	69.648.000	1.685.579.000	-	5.839.859.000
57	SUMATERA UTARA	Kab. Nias Barat	0727	11.050.000	1.029.000	3.936.305.000	125.741.000	233.960.000	1.214.641.000	886.408.000	6.409.134.000
58	SUMATERA UTARA	Kota Gunungsitoli	0761	10.819.000	1.007.000	3.812.569.000	121.843.000	65.386.000	916.388.000	-	4.928.012.000
59	SUMATERA BARAT	Provinsi Sumatera Barat	0800	-	-	8.228.708.000	5.061.199.000	9.031.855.000	-	10.079.683.000	32.401.445.000
60	SUMATERA BARAT	Kab. Lima Puluh Kota	0803	11.657.654.000	1.603.835.000	2.593.098.000	216.062.000	298.023.000	851.176.000	2.216.342.000	19.436.190.000
61	SUMATERA BARAT	Kab. Agam	0801	-	-	639.170.000	216.592.000	33.625.000	1.028.446.000	3.307.702.000	5.225.535.000
62	SUMATERA BARAT	Kab. Kepulauan Mentawai	0809	-	-	490.029.000	218.260.000	1.169.667.000	4.933.364.000	-	6.811.320.000
63	SUMATERA BARAT	Kab. Padang Pariaman	0805	-	-	458.711.000	219.390.000	41.252.000	1.060.775.000	1.989.996.000	3.770.124.000
64	SUMATERA BARAT	Kab. Pasaman	0802	345.630.000	-	642.849.000	1.199.143.000	183.400.000	851.176.000	2.535.803.000	5.758.001.000
65	SUMATERA BARAT	Kab. Pesisir Selatan	0806	-	-	923.347.000	1.149.929.000	83.156.000	2.261.435.000	3.863.639.000	8.281.506.000
66	SUMATERA BARAT	Kab. Sijunjung	0813	11.320.337.000	1.612.866.000	3.935.896.000	224.174.000	550.407.000	851.176.000	2.295.155.000	20.790.011.000
67	SUMATERA BARAT	Kab. Solok	0804	-	-	2.163.359.000	1.328.669.000	67.806.000	851.176.000	2.581.247.000	6.992.257.000
68	SUMATERA BARAT	Kab. Tanah Datar	0807	-	-	2.236.704.000	224.063.000	54.374.000	851.176.000	1.304.265.000	4.670.582.000
69	SUMATERA BARAT	Kota Bukit Tinggi	0851	-	-	456.069.000	209.143.000	37.807.000	833.805.000	839.188.000	2.376.012.000
70	SUMATERA BARAT	Kota Padang Panjang	0852	-	-	464.452.000	211.631.000	39.507.000	833.805.000	703.683.000	2.253.078.000
71	SUMATERA BARAT	Kota Padang	0855	-	-	553.020.000	224.484.000	46.399.000	1.433.453.000	1.333.282.000	3.590.638.000
72	SUMATERA BARAT	Kota Payakumbuh	0856	-	-	568.000.000	209.843.000	38.468.000	833.805.000	787.832.000	2.437.948.000
73	SUMATERA BARAT	Kota Sawahlunto	0854	-	-	13.269.608.000	218.569.000	63.907.000	833.805.000	1.626.225.000	16.012.114.000
74	SUMATERA BARAT	Kota Solok	0853	-	-	456.069.000	218.554.000	42.694.000	833.805.000	2.261.765.000	3.812.887.000
75	SUMATERA BARAT	Kota Pariaman	0857	-	-	456.069.000	209.792.000	38.182.000	938.585.000	1.624.634.000	3.267.262.000
76	SUMATERA BARAT	Kab. Pasaman Barat	0812	-	-	829.190.000	1.172.740.000	99.701.000	1.277.775.000	6.176.896.000	9.556.302.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
77	SUMATERA BARAT	Kab. Dharmasraya	0810	2.118.985.000	-	16.621.702.000	1.126.461.000	332.398.000	833.805.000	4.080.407.000	25.113.758.000
78	SUMATERA BARAT	Kab. Solok Selatan	0811	-	-	615.775.000	12.474.254.000	33.186.000	851.176.000	3.563.737.000	17.538.128.000
79	RIAU	Provinsi Riau	0900	347.892.454.000	20.898.005.000	32.032.284.000	-	40.203.426.000	-	32.744.763.000	473.770.932.000
80	RIAU	Kab. Bengkalis	0902	712.093.038.000	3.550.339.000	3.324.737.000	-	5.805.074.000	2.117.129.000	10.613.406.000	737.503.723.000
81	RIAU	Kab. Indragiri Hilir	0905	67.252.793.000	48.780.688.000	39.769.296.000	-	7.329.062.000	1.814.955.000	10.022.028.000	174.968.822.000
82	RIAU	Kab. Indragiri Hulu	0904	54.116.533.000	7.314.004.000	23.288.072.000	-	5.106.442.000	851.176.000	10.790.247.000	101.466.474.000
83	RIAU	Kab. Kampar	0901	218.362.849.000	23.565.436.000	4.536.586.000	-	3.677.820.800	833.805.000	17.426.431.000	268.402.927.800
84	RIAU	Kab. Kuantan Singingi	0912	64.141.969.000	8.279.013.000	23.017.866.000	-	4.914.823.000	833.805.000	10.236.513.000	111.423.989.000
85	RIAU	Kab. Pelalawan	0906	74.233.421.000	52.480.604.000	8.397.787.000	-	12.629.565.000	1.218.141.000	12.226.380.000	161.185.898.000
86	RIAU	Kab. Rokan Hilir	0908	310.534.009.000	3.430.318.000	3.217.233.000	-	3.437.924.340	1.579.334.000	9.830.714.000	332.029.532.340
87	RIAU	Kab. Rokan Hulu	0907	160.957.414.000	4.517.316.000	3.583.682.000	-	3.827.422.000	833.805.000	15.636.798.000	189.356.437.000
88	RIAU	Kab. Siak	0909	262.868.685.000	8.410.533.000	3.309.339.000	-	7.724.011.000	991.624.000	11.596.470.000	294.900.662.000
89	RIAU	Kota Dumai	0953	221.615.560.000	3.458.263.000	3.242.232.000	-	1.531.161.400	1.083.498.000	5.762.424.000	236.693.138.400
90	RIAU	Kota Pekanbaru	0951	74.458.174.000	8.205.493.000	3.206.904.000	-	2.942.912.000	833.805.000	4.207.891.000	93.855.179.000
91	RIAU	Kab. Kepulauan Meranti	0913	77.433.550.000	3.953.362.000	3.322.483.000	-	3.309.011.000	1.802.990.000	4.018.173.000	93.839.569.000
92	JAMBI	Provinsi Jambi	1000	57.168.018.000	150.607.446.000	98.994.645.000	-	6.015.490.000	-	12.663.042.000	325.448.641.000
93	JAMBI	Kab. Batanghari	1001	32.046.841.000	109.766.092.000	86.142.584.000	-	3.410.951.000	833.805.000	6.601.248.000	238.801.521.000
94	JAMBI	Kab. Bungo	1003	10.660.245.000	26.347.494.000	101.986.071.000	-	500.987.000	833.805.000	5.649.058.000	145.977.660.000
95	JAMBI	Kab. Kerinci	1005	10.614.964.000	26.440.058.000	19.329.291.000	912.100.000	474.565.000	833.805.000	1.434.116.500	60.038.899.500
96	JAMBI	Kab. Merangin	1006	10.524.385.000	25.286.199.000	71.107.744.000	-	593.183.000	816.435.000	5.014.445.000	113.342.391.000
97	JAMBI	Kab. Muaro Jambi	1009	38.675.586.000	117.041.293.000	55.404.462.000	-	1.607.369.000	833.805.000	7.020.153.000	220.582.668.000
98	JAMBI	Kab. Sarolangun	1004	19.978.505.000	70.802.232.000	101.653.688.000	-	941.351.000	851.176.000	4.608.870.000	198.835.822.000
99	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Barat	1002	162.966.315.000	458.919.192.000	25.737.958.000	-	4.342.032.000	1.045.676.000	5.941.941.000	658.953.114.000
100	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Timur	1007	50.872.812.000	122.860.523.000	42.023.667.000	-	1.500.057.000	1.448.696.000	4.339.650.000	223.045.405.000
101	JAMBI	Kab. Tebo	1008	25.651.069.000	65.715.093.000	35.953.286.000	-	2.379.685.000	833.805.000	5.034.631.000	135.567.569.000
102	JAMBI	Kota Jambi	1051	10.833.265.000	25.763.355.000	9.942.625.000	-	446.953.000	833.805.000	2.964.610.000	50.784.613.000
103	JAMBI	Kota Sungai Penuh	1052	10.904.832.000	26.977.890.000	10.499.678.000	-	441.455.000	851.176.000	1.530.198.000	51.205.229.000
104	SUMATERA SELATAN	Provinsi Sumatera Selatan	1100	43.335.101.000	226.431.433.000	1.243.294.633.000	3.018.399.000	11.950.198.000	-	18.307.225.000	1.546.336.989.000
105	SUMATERA SELATAN	Kab. Lahat	1106	4.717.514.000	33.842.315.000	948.957.775.000	726.877.000	719.334.000	833.805.000	3.402.888.000	993.200.508.000
106	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Banyuasin	1103	115.371.778.000	678.218.814.000	232.721.873.000	149.793.000	2.664.292.000	833.805.000	9.852.276.000	1.039.812.631.000
107	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas	1107	19.875.692.000	113.554.082.000	198.855.916.000	327.213.000	1.201.109.000	851.176.000	5.647.030.000	340.312.218.000
108	SUMATERA SELATAN	Kab. Muara Enim	1105	6.447.811.000	40.286.705.000	1.305.023.212.000	5.967.340.000	908.406.000	833.805.000	4.440.266.000	1.363.907.545.000
109	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ilir	1108	4.027.903.000	22.244.318.000	84.430.504.000	150.112.000	4.578.689.000	2.016.824.000	9.411.632.000	126.859.982.000
110	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu	1104	9.539.818.000	23.628.234.000	133.608.108.000	567.509.000	490.061.000	833.805.000	3.208.999.000	171.876.534.000
111	SUMATERA SELATAN	Kota Palembang	1151	15.695.136.000	28.927.088.000	124.249.368.000	290.228.000	395.554.000	833.805.000	2.322.215.000	172.713.394.000
112	SUMATERA SELATAN	Kota Prabumulih	1153	4.405.887.000	50.392.341.000	122.561.009.000	289.909.000	358.584.000	833.805.000	3.029.557.000	181.871.092.000
113	SUMATERA SELATAN	Kota Pagar Alam	1154	4.132.403.000	24.049.426.000	179.372.037.000	1.194.668.000	406.383.000	851.176.000	2.008.602.000	212.014.695.000
114	SUMATERA SELATAN	Kota Lubuk Linggau	1155	4.349.772.000	24.425.707.000	81.417.169.000	155.853.000	378.818.000	833.805.000	2.799.886.000	114.361.010.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
115	SUMATERA SELATAN	Kab. Banyuasin	1109	29.237.390.000	96.560.218.000	189.020.552.000	291.669.000	1.640.198.000	1.680.637.000	7.382.911.000	325.813.575.000
116	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Ilir	1112	4.726.005.000	24.494.006.000	125.286.888.000	315.406.000	728.114.000	833.805.000	2.912.769.000	159.296.993.000
117	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1110	4.635.300.000	22.257.496.000	82.839.891.000	177.989.000	669.628.000	833.805.000	3.402.948.000	114.817.057.000
118	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1111	4.677.857.000	22.949.528.000	123.657.306.000	388.470.000	374.540.000	833.805.000	1.968.209.000	154.849.715.000
119	SUMATERA SELATAN	Kab. Empat Lawang	1117	4.375.529.000	25.251.933.000	135.031.637.000	181.565.000	409.692.000	833.805.000	2.192.816.000	168.276.977.000
120	SUMATERA SELATAN	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1118	16.126.081.000	69.129.663.000	149.181.818.000	297.255.000	687.402.000	851.176.000	3.769.880.000	240.043.275.000
121	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas Utara	1119	20.838.332.000	69.674.420.000	243.912.667.000	150.355.000	922.289.000	833.805.000	4.374.431.000	340.706.299.000
122	BENGKULU	Provinsi Bengkulu	2600	-	-	63.256.503.000	65.019.000	311.835.000	-	8.623.441.000	72.256.798.000
123	BENGKULU	Kab. Bengkulu Selatan	2602	25.758.000	664.965.000	90.571.600.000	113.683.000	44.348.000	1.002.673.000	2.986.718.000	95.409.745.000
124	BENGKULU	Kab. Bengkulu Utara	2601	-	-	100.777.376.000	12.145.000	196.113.000	1.844.014.000	4.836.990.000	107.666.638.000
125	BENGKULU	Kab. Rejang Lebong	2603	370.018.000	2.337.302.000	17.853.327.000	58.209.000	64.680.000	833.805.000	2.320.674.000	23.838.015.000
126	BENGKULU	Kota Bengkulu	2651	-	-	10.334.388.000	9.375.000	19.028.000	1.031.497.000	2.423.961.000	13.818.249.000
127	BENGKULU	Kab. Kaur	2605	42.557.000	657.410.000	78.165.751.000	259.447.000	52.671.000	1.161.520.000	3.062.976.000	83.402.332.000
128	BENGKULU	Kab. Seluma	2604	26.596.000	666.811.000	93.544.382.000	31.496.000	43.791.000	1.132.350.000	3.376.227.000	98.821.653.000
129	BENGKULU	Kab. Mukomuko	2606	-	-	16.197.207.000	9.915.000	219.699.000	1.220.441.000	5.798.094.000	23.445.356.000
130	BENGKULU	Kab. Lebong	2607	1.102.769.000	2.376.601.000	57.477.950.000	12.984.000	69.904.800	851.176.000	1.627.628.000	63.519.012.800
131	BENGKULU	Kab. Kepahiang	2608	-	-	10.599.131.000	68.062.000	19.037.000	833.805.000	1.708.390.000	13.228.425.000
132	BENGKULU	Kab. Bengkulu Tengah	2609	-	-	38.919.514.000	19.160.000	34.547.000	883.958.000	3.524.929.000	43.382.108.000
133	LAMPUNG	Provinsi Lampung	1200	29.489.308.000	-	464.516.000	10.481.952.000	341.697.300	-	7.070.938.000	47.848.411.300
134	LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	1204	4.218.284.000	-	157.465.000	2.182.912.000	133.594.000	851.176.000	1.833.768.000	9.377.199.000
135	LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	1201	7.040.871.000	-	12.367.000	761.522.000	42.668.000	1.874.059.000	1.999.753.000	11.731.240.000
136	LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	1202	7.040.871.000	-	5.536.000	2.140.810.000	80.493.000	833.805.000	2.685.065.000	12.786.580.000
137	LAMPUNG	Kab. Lampung Utara	1203	4.046.110.000	-	6.418.000	554.748.000	224.068.000	816.435.000	1.764.441.000	7.412.220.000
138	LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	1207	28.509.658.000	-	2.317.000	585.037.000	30.342.000	1.459.552.000	1.995.861.000	32.582.767.000
139	LAMPUNG	Kab. Tanggamus	1206	4.132.197.000	-	225.331.000	25.933.548.000	117.036.000	1.617.313.000	1.160.356.000	33.185.781.000
140	LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang	1205	7.040.871.000	-	477.000	565.775.000	374.235.000	1.103.370.000	2.257.354.000	11.342.082.000
141	LAMPUNG	Kab. Way Kanan	1208	4.132.197.000	-	103.427.000	567.272.000	501.901.000	833.805.000	2.851.036.000	8.989.638.000
142	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	1251	4.132.197.000	-	2.477.000	584.519.000	30.193.000	860.076.000	1.172.633.000	6.782.095.000
143	LAMPUNG	Kota Metro	1252	7.040.871.000	-	11.000	565.709.000	28.413.000	833.805.000	754.899.000	9.223.708.000
144	LAMPUNG	Kab. Pesawaran	1209	4.132.197.000	-	3.420.000	2.140.209.000	50.840.000	1.233.399.000	1.535.600.000	9.095.665.000
145	LAMPUNG	Kab. Pringsewu	1210	4.132.197.000	-	3.584.000	2.121.211.000	38.101.000	833.805.000	1.543.343.000	8.672.241.000
146	LAMPUNG	Kab. Mesuji	1211	4.132.197.000	-	329.174.000	565.895.000	529.504.000	833.805.000	3.456.154.000	9.846.729.000
147	LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang Barat	1212	4.132.197.000	-	11.000	565.757.000	392.622.000	833.805.000	1.894.311.000	7.818.703.000
148	LAMPUNG	Kab. Pesisir Barat	1213	4.218.284.000	-	3.594.000	2.166.882.000	48.711.000	1.751.439.000	2.096.043.000	10.284.953.000
149	DKI JAKARTA	Provinsi DKI Jakarta	0100	75.870.934.000	-	-	-	-	3.988.367.000	-	79.859.301.000
150	JAWA BARAT	Provinsi Jawa Barat	0200	50.324.691.000	11.987.510.000	18.525.385.000	287.047.421.000	659.447.000	-	-	368.544.454.000
151	JAWA BARAT	Kab. Bandung	0212	3.546.864.000	1.128.997.000	904.372.000	326.186.854.000	99.137.000	833.805.000	-	332.700.029.000
152	JAWA BARAT	Kab. Bekasi	0208	3.753.024.000	2.679.668.000	1.931.688.000	13.015.383.000	33.917.000	980.999.000	-	22.394.679.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
153	JAWA BARAT	Kab. Bogor	0205	3.747.367.000	1.308.068.000	32.560.194.000	146.625.284.000	124.951.000	833.805.000	1.435.031.000	186.634.700.000
154	JAWA BARAT	Kab. Ciamis	0216	3.753.866.000	1.015.604.000	935.380.000	10.382.370.000	254.395.000	851.176.000	-	17.192.791.000
155	JAWA BARAT	Kab. Cianjur	0207	3.669.461.000	1.006.409.000	2.514.557.000	47.377.347.000	260.110.000	1.110.360.000	1.343.145.000	57.281.389.000
156	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	0217	3.644.760.000	1.003.459.000	921.687.000	9.836.576.000	74.313.000	1.066.442.000	-	16.547.237.000
157	JAWA BARAT	Kab. Garut	0214	3.670.041.000	988.809.000	1.041.658.000	154.974.203.000	91.870.000	1.114.355.000	1.100.844.000	162.981.780.000
158	JAWA BARAT	Kab. Indramayu	0219	14.870.015.000	2.166.038.000	904.925.000	9.913.030.000	103.273.000	1.495.510.000	250.000.000	29.702.791.000
159	JAWA BARAT	Kab. Karawang	0209	5.283.773.000	2.398.791.000	1.964.703.000	13.331.701.000	74.626.000	1.137.126.000	500.000.000	24.690.720.000
160	JAWA BARAT	Kab. Kuningan	0218	3.755.076.000	1.016.421.000	939.814.000	10.395.884.000	153.264.000	851.176.000	-	17.111.635.000
161	JAWA BARAT	Kab. Majalengka	0220	3.660.035.000	1.011.662.000	906.135.000	9.942.171.000	96.430.000	833.805.000	250.000.000	16.700.238.000
162	JAWA BARAT	Kab. Purwakarta	0210	3.749.033.000	1.260.281.000	1.976.405.000	13.547.944.000	198.845.000	833.805.000	-	21.566.313.000
163	JAWA BARAT	Kab. Subang	0211	4.069.714.000	3.130.061.000	910.060.000	23.351.890.000	96.948.000	999.678.000	2.009.253.000	34.567.604.000
164	JAWA BARAT	Kab. Sukabumi	0206	3.662.404.000	983.649.000	6.415.908.000	146.313.304.000	193.483.000	1.310.393.000	896.979.000	159.776.120.000
165	JAWA BARAT	Kab. Sumedang	0213	3.662.309.000	1.177.804.000	918.077.000	32.864.306.000	140.130.000	833.805.000	500.000.000	40.096.431.000
166	JAWA BARAT	Kab. Tasikmalaya	0215	3.658.038.000	981.525.000	908.663.000	23.078.193.000	161.625.000	1.017.324.000	504.693.500	30.310.061.500
167	JAWA BARAT	Kota Bandung	0251	3.633.516.000	964.131.000	896.873.000	23.173.544.000	43.355.000	833.805.000	-	29.545.224.000
168	JAWA BARAT	Kota Bekasi	0257	3.471.352.000	1.438.652.000	1.923.389.000	12.969.627.000	30.316.000	816.435.000	-	20.649.771.000
169	JAWA BARAT	Kota Bogor	0252	3.637.356.000	975.722.000	1.981.287.000	13.552.032.000	31.944.000	833.805.000	-	21.012.146.000
170	JAWA BARAT	Kota Cirebon	0254	3.611.815.000	949.469.000	887.567.000	9.644.206.000	31.087.000	858.231.000	-	15.982.375.000
171	JAWA BARAT	Kota Depok	0258	3.609.110.000	1.014.182.000	1.964.770.000	13.376.599.000	31.541.000	833.805.000	-	20.830.007.000
172	JAWA BARAT	Kota Sukabumi	0253	3.646.232.000	972.723.000	1.311.878.000	20.355.411.000	43.423.000	833.805.000	250.000.000	27.413.472.000
173	JAWA BARAT	Kota Tasikmalaya	0260	3.635.935.000	965.765.000	899.660.000	9.834.316.000	48.574.000	833.805.000	-	16.218.055.000
174	JAWA BARAT	Kota Cimahi	0261	3.519.663.000	926.888.000	866.535.000	22.460.675.000	41.594.000	816.435.000	-	28.631.790.000
175	JAWA BARAT	Kota Banjar	0262	3.653.666.000	986.741.000	910.420.000	10.020.817.000	51.014.000	833.805.000	1.042.318.000	17.498.781.000
176	JAWA BARAT	Kab. Bandung Barat	0221	3.546.864.000	1.127.456.000	907.812.000	23.254.937.000	191.639.000	833.805.000	-	29.862.513.000
177	JAWA BARAT	Kab. Pangandaran	0222	3.658.503.000	990.010.000	914.519.000	10.058.948.000	128.471.000	1.090.698.000	-	16.841.149.000
178	JAWA TENGAH	Provinsi Jawa Tengah	0300	270.579.000	591.284.000	135.821.000	218.862.000	2.281.878.000	-	-	3.498.424.000
179	JAWA TENGAH	Kab. Banjarnegara	0318	58.223.000	33.778.000	2.889.000	19.930.000	126.722.000	833.805.000	-	1.075.347.000
180	JAWA TENGAH	Kab. Banyumas	0315	61.496.000	34.270.000	74.066.000	74.407.000	213.215.000	833.805.000	-	1.291.259.000
181	JAWA TENGAH	Kab. Batang	0306	57.117.000	33.611.000	775.000	10.741.000	325.882.000	966.264.000	-	1.394.390.000
182	JAWA TENGAH	Kab. Blora	0314	127.656.992.000	2.400.558.000	735.000	9.815.000	1.997.425.000	851.176.000	-	132.916.701.000
183	JAWA TENGAH	Kab. Boyolali	0325	61.435.000	42.615.000	8.376.000	28.326.000	130.123.000	833.805.000	-	1.104.680.000
184	JAWA TENGAH	Kab. Brebes	0308	60.831.000	34.170.000	1.230.000	36.174.000	217.483.000	1.017.970.000	-	1.367.858.000
185	JAWA TENGAH	Kab. Cilacap	0316	145.766.000	34.316.000	21.445.000	14.300.000	226.143.000	1.176.408.000	500.000.000	2.118.378.000
186	JAWA TENGAH	Kab. Demak	0303	64.785.000	43.186.000	-	18.174.000	123.660.000	977.545.000	-	1.227.350.000
187	JAWA TENGAH	Kab. Grobogan	0304	141.985.000	323.284.000	17.155.000	18.766.000	607.921.000	833.805.000	-	1.942.916.000
188	JAWA TENGAH	Kab. Jepara	0312	53.688.000	33.095.000	1.482.000	9.194.000	272.925.000	1.968.778.000	-	2.339.162.000
189	JAWA TENGAH	Kab. Karanganyar	0328	62.032.000	34.351.000	568.000	9.741.000	115.126.000	833.805.000	-	1.055.623.000
190	JAWA TENGAH	Kab. Kebumen	0323	62.948.000	34.422.000	1.408.000	13.569.000	140.389.000	1.061.663.000	-	1.314.399.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
191	JAWA TENGAH	Kab. Kendal	0302	55.112.000	33.377.000	449.000	29.561.000	269.038.000	1.018.411.000	-	1.405.948.000
192	JAWA TENGAH	Kab. Klaten	0324	60.078.000	34.124.000	2.970.000	9.604.000	69.070.000	833.805.000	-	1.009.651.000
193	JAWA TENGAH	Kab. Kudus	0310	61.071.000	42.627.000	389.000	9.266.000	143.296.000	833.805.000	-	1.090.454.000
194	JAWA TENGAH	Kab. Magelang	0319	61.919.000	34.334.000	3.206.000	107.242.000	99.943.000	833.805.000	-	1.140.449.000
195	JAWA TENGAH	Kab. Pati	0309	84.848.000	174.846.000	1.526.000	9.260.000	563.482.000	1.021.552.000	-	1.855.514.000
196	JAWA TENGAH	Kab. Pekalongan	0305	56.408.000	33.504.000	310.000	10.892.000	173.031.000	872.552.000	-	1.146.697.000
197	JAWA TENGAH	Kab. Pemalang	0311	62.076.000	34.290.000	4.626.000	17.764.000	469.883.000	970.559.000	-	1.559.198.000
198	JAWA TENGAH	Kab. Purbalingga	0317	62.990.000	34.562.000	1.686.000	18.599.000	126.816.000	833.805.000	-	1.078.458.000
199	JAWA TENGAH	Kab. Purworejo	0322	63.801.000	34.685.000	5.566.000	13.680.000	107.799.000	914.705.000	-	1.140.236.000
200	JAWA TENGAH	Kab. Rembang	0313	742.549.000	166.639.000	16.563.000	9.569.000	738.649.000	1.114.439.000	-	2.788.408.000
201	JAWA TENGAH	Kab. Semarang	0301	64.760.000	43.182.000	1.438.000	202.470.000	152.494.000	833.805.000	-	1.298.149.000
202	JAWA TENGAH	Kab. Sragen	0326	64.621.000	43.161.000	1.242.000	9.646.000	135.411.000	833.805.000	-	1.087.886.000
203	JAWA TENGAH	Kab. Sukoharjo	0327	58.990.000	33.960.000	921.000	9.564.000	75.853.000	833.805.000	-	1.013.093.000
204	JAWA TENGAH	Kab. Tegal	0307	62.783.000	34.464.000	3.783.000	16.831.000	337.597.000	916.860.000	-	1.372.318.000
205	JAWA TENGAH	Kab. Temanggung	0320	64.771.000	34.696.000	-	54.904.000	92.233.000	833.805.000	-	1.080.409.000
206	JAWA TENGAH	Kab. Wonogiri	0329	60.643.000	34.007.000	61.169.000	14.252.000	97.011.000	860.261.000	-	1.127.343.000
207	JAWA TENGAH	Kab. Wonosobo	0321	62.050.000	34.286.000	394.000	22.556.000	149.915.000	833.805.000	-	1.103.006.000
208	JAWA TENGAH	Kota Magelang	0355	61.201.000	34.293.000	-	13.466.000	77.061.000	833.805.000	-	1.019.826.000
209	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	0353	53.807.000	33.180.000	-	9.166.000	101.278.000	857.607.000	-	1.055.038.000
210	JAWA TENGAH	Kota Salatiga	0352	55.656.000	33.459.000	-	21.699.000	77.001.000	833.805.000	-	1.021.620.000
211	JAWA TENGAH	Kota Semarang	0351	54.326.000	33.258.000	-	18.575.000	107.280.000	897.802.000	-	1.111.241.000
212	JAWA TENGAH	Kota Surakarta	0356	59.344.000	34.013.000	-	9.578.000	77.555.000	833.805.000	-	1.014.295.000
213	JAWA TENGAH	Kota Tegal	0354	59.197.000	33.991.000	-	10.946.000	104.437.000	857.666.000	-	1.066.237.000
214	DI JOGJAKARTA	Provinsi DI Yogyakarta	0400	-	-	26.249.000	134.000	3.585.000	-	-	29.968.000
215	DI JOGJAKARTA	Kab. Bantul	0401	-	-	661.000	120.000	1.613.000	890.550.000	-	892.944.000
216	DI JOGJAKARTA	Kab. Gunung Kidul	0403	-	-	3.323.000	138.000	8.073.000	1.092.073.000	-	1.103.607.000
217	DI JOGJAKARTA	Kab. Kulon Progo	0404	-	-	39.415.000	8.365.000	5.453.000	935.266.000	-	988.499.000
218	DI JOGJAKARTA	Kab. Sleman	0402	-	-	1.010.000	8.607.000	3.624.000	833.805.000	-	847.046.000
219	DI JOGJAKARTA	Kota Yogyakarta	0451	-	-	-	105.000	897.000	833.805.000	-	834.807.000
220	JAWA TIMUR	Provinsi Jawa Timur	0500	602.872.243.000	77.409.826.000	55.258.403.000	332.875.000	3.393.145.000	-	-	739.266.492.000
221	JAWA TIMUR	Kab. Bangkalan	0508	25.978.127.000	4.578.198.000	1.893.243.000	11.938.000	100.010.000	1.197.383.000	-	33.758.899.000
222	JAWA TIMUR	Kab. Banyuwangi	0511	26.733.745.000	4.106.407.000	112.297.565.000	166.576.000	742.185.000	1.773.993.000	-	145.820.471.000
223	JAWA TIMUR	Kab. Blitar	0521	25.960.118.000	4.028.823.000	1.917.932.000	12.805.000	291.310.000	1.000.192.000	-	33.211.180.000
224	JAWA TIMUR	Kab. Bojonegoro	0527	1.932.838.040.000	11.011.212.000	1.954.656.000	13.476.000	720.567.000	851.176.000	-	1.947.389.127.000
225	JAWA TIMUR	Kab. Bondowoso	0509	26.046.538.000	4.012.900.000	15.554.557.000	339.133.000	536.523.000	833.805.000	-	47.323.456.000
226	JAWA TIMUR	Kab. Gresik	0501	41.268.636.000	25.683.870.000	1.920.117.000	14.411.000	145.507.000	1.419.074.000	-	70.451.615.000
227	JAWA TIMUR	Kab. Jember	0512	26.098.683.000	3.972.786.000	15.471.138.000	54.259.000	632.987.000	1.374.053.000	-	47.603.906.000
228	JAWA TIMUR	Kab. Jombang	0504	148.216.246.000	4.363.587.000	1.904.554.000	15.161.000	315.264.000	833.805.000	-	155.648.617.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
229	JAWA TIMUR	Kab. Kediri	0517	26.078.287.000	3.993.231.000	1.912.169.000	12.793.000	301.175.000	833.805.000	-	33.131.460.000
230	JAWA TIMUR	Kab. Lamongan	0529	150.520.350.000	5.924.318.000	1.912.591.000	14.497.000	465.571.000	982.482.000	-	159.819.809.000
231	JAWA TIMUR	Kab. Lumajang	0516	26.008.297.000	4.010.280.000	1.914.533.000	12.793.000	298.472.000	981.110.000	-	33.225.485.000
232	JAWA TIMUR	Kab. Madiun	0522	151.304.085.000	4.484.526.000	1.957.484.000	34.597.000	391.125.000	851.176.000	-	159.022.993.000
233	JAWA TIMUR	Kab. Magetan	0524	25.976.929.000	4.008.131.000	1.913.117.000	17.768.000	156.882.000	833.805.000	-	32.906.632.000
234	JAWA TIMUR	Kab. Malang	0513	26.123.616.000	4.018.181.000	1.918.491.000	37.382.000	533.914.000	1.187.583.000	-	33.819.167.000
235	JAWA TIMUR	Kab. Mojokerto	0502	27.470.782.000	5.590.327.000	1.923.992.000	70.511.000	240.147.000	833.805.000	-	36.129.564.000
236	JAWA TIMUR	Kab. Nganjuk	0519	148.216.246.000	4.409.994.000	1.948.307.000	17.976.000	576.753.000	833.805.000	-	156.003.081.000
237	JAWA TIMUR	Kab. Ngawi	0523	148.282.782.000	4.518.458.000	1.914.416.000	13.206.000	735.835.000	833.805.000	-	156.298.502.000
238	JAWA TIMUR	Kab. Pacitan	0526	25.987.249.000	3.965.151.000	1.961.178.000	16.429.000	122.134.000	1.091.455.000	-	33.143.596.000
239	JAWA TIMUR	Kab. Pamekasan	0506	26.045.891.000	4.439.131.000	1.898.965.000	12.007.000	173.462.000	1.037.544.000	-	33.607.000.000
240	JAWA TIMUR	Kab. Pasuruan	0514	25.834.551.000	3.957.171.000	1.920.012.000	57.355.000	224.916.000	930.653.000	-	32.924.658.000
241	JAWA TIMUR	Kab. Ponorogo	0525	26.115.468.000	4.039.466.000	1.924.079.000	99.692.000	376.000.000	833.805.000	-	33.388.510.000
242	JAWA TIMUR	Kab. Probolinggo	0515	25.992.327.000	3.965.499.000	1.902.099.000	45.053.000	470.426.000	1.124.782.000	-	33.500.186.000
243	JAWA TIMUR	Kab. Sampang	0505	26.036.413.000	4.266.047.000	1.904.535.000	12.055.000	101.160.000	1.240.388.000	-	33.560.598.000
244	JAWA TIMUR	Kab. Sidoarjo	0503	26.295.914.000	5.414.602.000	1.893.339.000	16.779.000	103.553.000	953.278.000	-	34.677.465.000
245	JAWA TIMUR	Kab. Situbondo	0510	26.841.837.000	4.048.282.000	15.760.104.000	56.141.000	496.341.000	1.484.842.000	-	48.687.547.000
246	JAWA TIMUR	Kab. Sumenep	0507	26.231.755.000	5.056.270.000	1.913.596.000	12.096.000	252.242.000	5.375.174.000	-	38.841.133.000
247	JAWA TIMUR	Kab. Trenggalek	0520	26.126.224.000	4.040.203.000	2.277.267.000	16.893.000	381.791.000	1.117.919.000	-	33.960.297.000
248	JAWA TIMUR	Kab. Tuban	0528	432.141.132.000	5.241.578.000	1.961.150.000	12.144.000	603.618.000	1.080.148.000	-	441.039.770.000
249	JAWA TIMUR	Kab. Tulungagung	0518	26.051.100.000	3.991.369.000	1.908.099.000	16.592.000	386.976.000	1.012.010.000	-	33.366.146.000
250	JAWA TIMUR	Kota Blitar	0556	26.083.066.000	3.993.559.000	1.909.454.000	12.124.000	105.881.000	833.805.000	-	32.937.889.000
251	JAWA TIMUR	Kota Kediri	0557	26.017.341.000	3.989.056.000	1.906.668.000	12.091.000	96.244.000	833.805.000	-	32.855.205.000
252	JAWA TIMUR	Kota Madiun	0558	25.875.814.000	3.957.516.000	1.894.948.000	13.021.000	101.097.000	833.805.000	-	32.676.201.000
253	JAWA TIMUR	Kota Malang	0553	25.788.878.000	3.951.560.000	1.891.263.000	12.613.000	104.728.000	833.805.000	-	32.582.847.000
254	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	0552	25.838.172.000	3.954.937.000	1.893.352.000	14.390.000	89.050.000	833.805.000	-	32.623.706.000
255	JAWA TIMUR	Kota Pasuruan	0554	25.802.322.000	3.952.481.000	1.893.938.000	14.335.000	91.858.000	857.044.000	-	32.611.978.000
256	JAWA TIMUR	Kota Probolinggo	0555	25.919.133.000	3.960.485.000	1.896.783.000	12.006.000	100.196.000	848.725.000	-	32.737.328.000
257	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	0551	27.336.748.000	5.497.619.000	1.887.705.000	11.899.000	101.614.000	918.386.000	-	35.753.971.000
258	JAWA TIMUR	Kota Batu	0559	26.833.473.000	4.047.709.000	1.946.683.000	54.664.000	152.158.000	851.176.000	-	33.885.863.000
259	KALIMANTAN BARAT	Provinsi Kalimantan Barat	1300	-	-	53.268.025.000	-	29.580.445.000	-	23.043.942.000	105.892.412.000
260	KALIMANTAN BARAT	Kab. Bengkayang	1307	-	-	5.436.102.000	-	702.458.000	1.309.694.000	5.115.670.000	12.563.924.000
261	KALIMANTAN BARAT	Kab. Landak	1308	-	-	9.947.544.000	-	837.592.000	833.805.000	7.181.344.000	18.800.285.000
262	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kapuas Hulu	1305	-	-	120.127.220.000	-	2.681.197.000	851.176.000	5.331.814.000	128.991.407.000
263	KALIMANTAN BARAT	Kab. Ketapang	1306	-	-	92.219.330.000	-	6.025.942.000	2.709.382.000	18.134.014.000	119.088.668.000
264	KALIMANTAN BARAT	Kab. Mempawah	1304	-	-	3.975.050.000	-	696.587.000	1.431.156.000	3.471.735.000	9.574.528.000
265	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sambas	1301	-	-	3.506.440.000	-	677.336.000	1.604.588.000	5.553.937.000	11.342.301.000
266	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sanggau	1302	-	-	41.579.055.000	-	2.456.228.000	833.805.000	10.340.366.000	55.209.454.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
267	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sintang	1303	-	-	123.371.143.000	-	2.421.819.600	851.176.000	7.884.312.000	134.528.450.600
268	KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	1351	-	-	3.374.922.000	-	597.350.000	833.805.000	1.942.511.000	6.748.588.000
269	KALIMANTAN BARAT	Kota Singkawang	1352	-	-	3.418.713.000	-	558.449.000	911.748.000	2.533.262.000	7.422.172.000
270	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sekadau	1310	-	-	7.364.955.000	-	1.656.647.000	833.805.000	6.038.222.000	15.893.629.000
271	KALIMANTAN BARAT	Kab. Melawi	1309	-	-	47.760.663.000	-	3.160.476.000	851.176.000	4.512.342.000	56.284.657.000
272	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kayong Utara	1311	-	-	6.022.435.000	-	1.082.817.000	3.743.736.000	4.435.427.000	15.284.415.000
273	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kubu Raya	1312	-	-	7.473.924.000	-	1.678.031.000	1.683.805.000	6.149.132.000	16.984.892.000
274	KALIMANTAN TENGAH	Provinsi Kalimantan Tengah	1400	37.946.000	438.351.000	1.772.474.742.000	-	237.325.007.000	-	23.865.292.000	2.034.141.338.000
275	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Selatan	1403	44.524.000	150.600.000	547.457.022.000	-	635.598.700	851.176.000	2.556.502.000	551.695.422.700
276	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Utara	1402	154.942.000	1.485.522.000	2.173.960.346.000	-	2.699.641.200	851.176.000	3.996.480.000	2.183.148.107.200
277	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kapuas	1401	13.525.000	150.600.000	826.698.248.000	-	4.874.087.000	954.794.000	6.949.169.000	839.640.423.000
278	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Barat	1405	5.452.000	56.668.000	140.609.474.000	-	2.533.897.000	1.397.098.000	10.496.095.000	155.098.684.000
279	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Timur	1404	5.339.000	55.511.000	136.784.185.000	-	9.110.399.000	1.158.494.000	16.665.778.000	163.779.706.000
280	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya	1451	5.360.000	55.511.000	132.711.425.000	-	1.742.747.000	833.805.000	2.911.067.000	138.259.915.000
281	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Katingan	1406	5.430.000	56.668.000	135.680.487.000	-	6.347.736.000	1.154.337.000	6.070.100.000	149.314.758.000
282	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Seruyan	1407	5.409.000	56.668.000	129.840.928.000	-	7.389.978.000	1.404.727.000	12.691.986.000	151.389.696.000
283	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Sukamara	1408	5.429.000	56.668.000	135.427.426.000	-	2.181.098.000	1.151.428.000	5.739.853.000	144.561.902.000
284	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Lamandau	1409	5.452.000	56.668.000	137.461.366.000	-	3.712.501.000	851.176.000	6.976.154.000	149.063.317.000
285	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Gunung Mas	1410	5.408.000	56.668.000	289.229.487.000	-	3.752.862.000	851.176.000	5.189.165.000	299.084.766.000
286	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Pulang Pisau	1411	5.429.000	56.668.000	169.196.681.000	-	2.880.325.000	1.276.373.000	6.302.142.000	179.717.618.000
287	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Murung Raya	1412	13.579.000	150.600.000	1.403.824.432.000	-	4.887.964.000	851.176.000	2.882.912.000	1.412.610.663.000
288	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Timur	1413	37.190.000	55.511.000	374.592.377.000	-	1.025.754.000	833.805.000	4.605.076.000	381.149.713.000
289	KALIMANTAN SELATAN	Provinsi Kalimantan Selatan	1500	120.185.000	-	2.911.213.340.000	-	14.208.122.000	-	9.351.843.000	2.934.893.490.000
290	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Banjar	1501	18.558.000	-	825.546.487.000	-	744.139.000	869.462.000	2.551.764.000	829.730.410.000
291	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Barito Kuala	1506	18.180.000	-	422.539.375.000	-	377.115.000	900.410.000	3.092.989.000	426.928.069.000
292	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Selatan	1504	18.180.000	-	575.446.690.000	-	279.881.000	833.805.000	2.300.424.000	578.878.980.000
293	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Tengah	1505	18.180.000	-	411.173.303.000	-	250.432.000	833.805.000	1.166.153.000	413.441.873.000
294	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Utara	1509	47.613.000	-	539.958.902.000	-	205.110.000	833.805.000	1.794.580.000	542.840.010.000
295	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Kotabaru	1508	39.575.000	-	1.466.338.554.000	-	1.642.495.000	3.842.781.000	5.517.710.000	1.477.381.115.000
296	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tabalong	1507	422.563.000	100.021.000	1.614.891.930.000	-	946.831.000	851.176.000	2.441.881.000	1.619.654.402.000
297	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah Laut	1502	18.180.000	-	994.037.724.000	-	650.393.000	1.528.526.000	3.463.897.000	999.698.720.000
298	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tapin	1503	18.180.000	-	894.016.339.000	-	173.262.000	833.805.000	3.468.378.000	898.509.964.000
299	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarbaru	1552	18.180.000	-	347.480.929.000	-	219.141.000	833.805.000	1.644.098.000	350.196.153.000
300	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarmasin	1551	18.180.000	-	276.800.809.000	-	157.925.000	833.805.000	1.714.290.000	279.525.009.000
301	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Balangan	1511	68.200.000	-	1.679.785.021.000	-	420.994.000	833.805.000	2.036.250.000	1.683.144.270.000
302	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah Bumbu	1510	18.558.000	-	1.866.839.647.000	-	1.246.746.000	1.204.821.000	5.014.498.000	1.874.324.270.000
303	KALIMANTAN TIMUR	Provinsi Kalimantan Timur	1600	92.659.074.000	220.577.790.000	5.353.219.165.000	-	158.574.202.000	-	16.579.129.000	5.841.609.360.000
304	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Berau	1604	16.960.086.000	45.204.701.000	2.665.673.077.000	-	4.414.360.800	3.367.337.000	7.870.331.000	2.743.489.892.800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
305	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Kartanegara	1610	126.984.691.000	228.286.352.000	4.600.018.598.000	-	7.283.482.000	1.880.970.000	8.143.974.000	4.972.598.067.000
306	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Barat	1607	26.673.779.000	56.550.857.000	1.443.654.923.000	-	4.404.982.000	851.176.000	6.709.424.000	1.538.845.141.000
307	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Timur	1608	24.161.115.000	56.013.449.000	4.536.930.600.000	-	8.562.914.000	2.148.070.000	15.157.975.000	4.642.974.123.000
308	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Paser	1602	20.048.244.000	45.418.184.000	1.717.937.382.000	-	3.066.130.540	1.470.383.000	7.528.655.000	1.795.468.978.540
309	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	1652	56.720.086.000	55.008.703.000	760.903.094.000	-	1.584.811.000	1.001.998.000	3.178.035.000	878.396.727.000
310	KALIMANTAN TIMUR	Kota Bontang	1654	26.830.296.000	54.849.880.000	1.097.620.489.000	-	2.263.795.000	983.413.000	2.705.917.000	1.185.253.790.000
311	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	1651	23.347.078.000	54.380.768.000	1.017.142.922.000	-	1.522.590.000	834.209.000	2.939.206.000	1.100.166.773.000
312	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Penajam Paser Utara	1609	45.296.410.000	57.072.622.000	864.961.036.000	-	2.443.196.000	1.075.029.000	3.784.513.000	974.632.806.000
313	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Mahakam Ulu	1613	24.297.547.000	56.526.715.000	1.067.356.989.000	-	4.961.004.000	851.176.000	2.967.697.000	1.156.961.128.000
314	SULAWESI UTARA	Provinsi Sulawesi Utara	1700	-	-	107.934.279.000	12.062.204.000	478.577.000	-	-	120.475.060.000
315	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow	1703	-	-	122.311.418.000	880.131.000	18.791.000	1.161.566.000	-	124.371.906.000
316	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa	1702	-	-	15.556.938.000	18.448.042.000	1.525.000	1.097.051.000	-	35.103.556.000
317	SULAWESI UTARA	Kab. Sangihe	1704	-	-	9.309.276.000	750.379.000	2.100.000	3.325.795.000	-	13.387.550.000
318	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	1753	-	-	53.512.104.000	669.106.000	1.493.000	1.093.811.000	-	55.276.514.000
319	SULAWESI UTARA	Kota Manado	1751	-	-	15.469.974.000	1.698.768.000	1.525.000	1.036.331.000	-	18.206.598.000
320	SULAWESI UTARA	Kab. Kepulauan Talaud	1705	-	-	9.346.571.000	759.896.000	2.148.000	2.535.552.000	-	12.644.167.000
321	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa Selatan	1706	-	-	17.230.307.000	2.615.789.000	1.255.000	1.129.296.000	-	20.976.647.000
322	SULAWESI UTARA	Kota Tomohon	1752	-	-	9.110.280.000	15.481.614.000	2.029.000	833.805.000	-	25.427.728.000
323	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa Utara	1708	-	-	75.100.418.000	1.662.667.000	7.379.000	1.556.730.000	-	78.327.194.000
324	SULAWESI UTARA	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1712	-	-	9.334.892.000	756.916.000	2.133.000	1.863.752.000	-	11.957.693.000
325	SULAWESI UTARA	Kota Kotamobagu	1754	-	-	17.543.240.000	737.270.000	471.000	833.805.000	-	19.114.786.000
326	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1711	-	-	18.438.612.000	765.530.000	11.629.000	1.267.696.000	-	20.483.467.000
327	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa Tenggara	1710	-	-	10.126.077.000	1.729.789.000	8.503.000	1.035.284.000	-	12.899.653.000
328	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1714	-	-	18.888.367.000	936.216.000	14.694.000	1.143.032.000	-	20.982.309.000
329	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1713	-	-	20.559.380.000	768.118.000	54.900.000	1.373.045.000	-	22.755.443.000
330	SULAWESI TENGAH	Provinsi Sulawesi Tengah	1800	6.726.894.000	125.976.030.000	284.485.052.000	-	5.068.240.000	-	5.771.583.000	428.027.799.000
331	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai	1804	22.121.130.000	453.894.159.000	91.058.655.000	-	99.752.000	3.617.476.000	2.721.824.000	573.512.996.000
332	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai Kepulauan	1807	1.130.085.000	15.965.118.000	23.699.639.000	-	53.083.000	2.548.548.000	-	43.396.473.000
333	SULAWESI TENGAH	Kab. Buol	1805	1.131.781.000	15.981.448.000	24.142.491.000	-	209.516.000	1.518.437.000	2.403.573.000	45.387.246.000
334	SULAWESI TENGAH	Kab. Tolitoli	1803	1.129.705.000	15.961.462.000	24.985.532.000	-	110.576.000	2.059.396.000	1.886.349.000	46.133.020.000
335	SULAWESI TENGAH	Kab. Donggala	1802	1.131.242.000	16.060.049.000	26.617.820.000	-	-	2.386.699.000	2.619.694.000	48.815.504.000
336	SULAWESI TENGAH	Kab. Morowali	1806	1.131.451.000	16.062.062.000	355.819.062.000	-	279.329.400	3.162.769.000	2.990.929.000	379.445.602.400
337	SULAWESI TENGAH	Kab. Poso	1801	1.131.478.000	16.062.320.000	45.807.867.000	-	122.461.000	1.119.828.000	2.590.960.000	66.834.914.000
338	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	1851	1.130.495.000	15.969.063.000	52.447.970.000	-	55.450.000	907.601.000	780.656.000	71.291.235.000
339	SULAWESI TENGAH	Kab. Parigi Moutong	1808	1.130.217.000	15.966.390.000	28.006.080.000	-	205.640.000	2.631.327.000	1.513.872.000	49.453.526.000
340	SULAWESI TENGAH	Kab. Tojo Una Una	1809	6.144.759.000	110.453.353.000	48.474.262.000	-	117.867.000	3.233.949.000	1.492.942.000	169.917.132.000
341	SULAWESI TENGAH	Kab. Sigi	1812	1.131.455.000	16.062.095.000	26.188.993.000	-	80.873.000	851.176.000	1.525.750.000	45.840.342.000
342	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai Laut	1813	1.130.752.000	15.971.543.000	23.708.301.000	-	53.083.000	4.080.541.000	-	44.944.220.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
343	SULAWESI TENGAH	Kab. Morowali Utara	1814	6.144.759.000	109.856.041.000	260.671.362.000	-	481.949.000	1.460.397.000	3.089.580.000	381.704.088.000
344	SULAWESI SELATAN	Provinsi Sulawesi Selatan	1900	292.000	12.133.650.000	60.491.013.000	-	879.832.000	-	4.075.971.000	77.580.758.000
345	SULAWESI SELATAN	Kab. Bantaeng	1912	67.000	965.174.000	1.893.457.000	-	10.849.000	932.040.000	500.000.000	4.301.587.000
346	SULAWESI SELATAN	Kab. Barru	1916	68.000	970.587.000	1.940.915.000	-	8.660.000	1.126.572.000	500.000.000	4.546.802.000
347	SULAWESI SELATAN	Kab. Bone	1905	134.000	5.382.814.000	2.163.164.000	-	9.442.000	1.304.198.000	1.158.844.000	10.018.596.000
348	SULAWESI SELATAN	Kab. Bulukumba	1911	66.000	943.536.000	1.854.694.000	-	9.445.000	1.270.410.000	500.000.000	4.578.151.000
349	SULAWESI SELATAN	Kab. Enrekang	1921	68.000	968.213.000	1.900.440.000	-	14.341.000	851.176.000	826.477.000	4.560.715.000
350	SULAWESI SELATAN	Kab. Gowa	1902	64.000	940.690.000	1.850.901.000	-	66.650.000	833.805.000	500.000.000	4.192.110.000
351	SULAWESI SELATAN	Kab. Jeneponto	1913	65.000	959.243.000	1.885.104.000	-	10.928.000	1.124.389.000	-	3.979.729.000
352	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu	1909	130.000	5.258.802.000	2.220.116.000	-	18.658.000	1.193.027.000	826.167.000	9.516.900.000
353	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Utara	1922	70.000	976.525.000	12.014.800.000	-	24.380.000	1.064.147.000	2.788.921.000	16.868.843.000
354	SULAWESI SELATAN	Kab. Maros	1907	67.000	950.287.000	1.890.267.000	-	62.572.000	904.077.000	500.000.000	4.307.270.000
355	SULAWESI SELATAN	Kab. Pangkajene Kepulauan	1918	67.000	949.222.000	1.933.685.000	-	-	6.564.650.000	500.000.000	9.947.624.000
356	SULAWESI SELATAN	Kota Palopo	1953	69.000	955.254.000	1.869.895.000	-	10.691.000	852.966.000	812.144.000	4.501.019.000
357	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Timur	1924	70.000	977.776.000	201.018.628.000	-	85.172.100	1.193.699.000	2.180.381.000	205.455.726.100
358	SULAWESI SELATAN	Kab. Pinrang	1901	67.000	947.196.000	1.866.006.000	-	11.683.000	1.124.743.000	828.043.000	4.777.738.000
359	SULAWESI SELATAN	Kab. Sinjai	1910	68.000	967.911.000	1.899.148.000	-	9.859.000	1.107.762.000	1.160.692.000	5.145.440.000
360	SULAWESI SELATAN	Kab. Kepulauan Selayar	1914	64.000	940.122.000	1.843.712.000	-	9.657.000	5.532.346.000	-	8.325.901.000
361	SULAWESI SELATAN	Kab. Sidenreng Rappang	1917	134.000	5.382.641.000	1.857.954.000	-	694.000	833.805.000	808.891.000	8.884.119.000
362	SULAWESI SELATAN	Kab. Soppeng	1919	134.000	5.384.691.000	1.858.326.000	-	9.922.000	833.805.000	825.479.000	8.912.357.000
363	SULAWESI SELATAN	Kab. Takalar	1915	64.000	941.546.000	1.857.623.000	-	48.118.000	1.334.474.000	-	4.181.825.000
364	SULAWESI SELATAN	Kab. Tana Toraja	1906	67.000	967.012.000	2.169.789.000	-	16.308.000	851.176.000	500.000.000	4.504.352.000
365	SULAWESI SELATAN	Kab. Wajo	1903	905.000	39.880.160.000	1.846.404.000	-	9.818.000	1.185.314.000	1.631.736.000	44.554.337.000
366	SULAWESI SELATAN	Kota Parepare	1952	64.000	941.187.000	1.845.009.000	-	9.557.000	840.437.000	500.000.000	4.136.254.000
367	SULAWESI SELATAN	Kota Makassar	1951	64.000	935.289.000	1.836.793.000	-	230.641.000	1.325.098.000	-	4.327.885.000
368	SULAWESI SELATAN	Kab. Toraja Utara	1925	67.000	968.165.000	2.051.896.000	-	6.630.000	851.176.000	584.884.000	4.462.818.000
369	SULAWESI TENGGARA	Provinsi Sulawesi Tenggara	2000	-	-	461.763.060.000	-	9.543.054.020	-	3.134.197.000	474.440.311.020
370	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton	2002	-	-	23.947.109.000	-	103.019.000	1.451.981.000	500.000.000	26.002.109.000
371	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe	2009	-	-	228.792.433.000	-	253.796.700	1.169.114.000	879.364.500	231.094.708.200
372	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka	2004	-	-	389.727.372.000	-	347.201.000	1.666.814.000	1.606.685.000	393.348.072.000
373	SULAWESI TENGGARA	Kab. Muna	2003	-	-	25.904.828.000	-	-	1.453.093.000	1.193.630.000	28.551.551.000
374	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	2051	-	-	34.626.504.000	-	99.526.000	854.495.000	881.851.000	36.462.376.000
375	SULAWESI TENGGARA	Kota Bau-bau	2052	-	-	22.331.005.000	-	53.743.000	871.915.000	-	23.256.663.000
376	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe Selatan	2005	-	-	131.541.000.000	-	122.154.000	1.553.301.000	1.059.609.000	134.276.064.000
377	SULAWESI TENGGARA	Kab. Bombana	2006	-	-	248.196.683.000	-	103.615.000	2.175.331.000	862.073.000	251.337.702.000
378	SULAWESI TENGGARA	Kab. Wakatobi	2007	-	-	22.665.895.000	-	44.859.000	2.720.830.000	-	25.431.584.000
379	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka Utara	2008	-	-	109.723.179.000	-	166.581.000	1.378.657.000	637.695.000	111.906.112.000
380	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe Utara	2010	-	-	353.596.412.000	-	93.891.000	1.421.903.000	1.224.208.000	356.336.414.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
381	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton Utara	2011	-	-	23.075.603.000	-	4.248.000	1.567.405.000	500.000.000	25.147.256.000
382	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe Kepulauan	2013	-	-	36.263.444.000	-	81.239.000	1.330.475.000	-	37.675.158.000
383	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka Timur	2012	-	-	75.401.741.000	-	131.890.000	851.176.000	1.558.038.000	77.942.845.000
384	SULAWESI TENGGARA	Kab. Muna Barat	2053	-	-	22.605.184.000	-	40.261.000	1.468.641.000	1.211.129.000	25.325.215.000
385	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton Tengah	2055	-	-	57.089.928.000	-	48.505.000	1.405.851.000	500.000.000	59.044.284.000
386	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton Selatan	2054	-	-	22.877.240.000	-	2.961.000	1.471.519.000	-	24.351.720.000
387	BALI	Provinsi Bali	2200	-	-	2.740.000	-	13.428.000	-	-	16.168.000
388	BALI	Kab. Badung	2207	-	-	-	-	2.281.000	1.095.901.000	-	1.098.182.000
389	BALI	Kab. Bangli	2206	-	-	-	-	2.656.000	833.805.000	-	836.461.000
390	BALI	Kab. Buleleng	2201	-	-	-	-	7.997.000	1.375.420.000	-	1.383.417.000
391	BALI	Kab. Gianyar	2204	-	-	-	-	1.805.000	878.328.000	-	880.133.000
392	BALI	Kab. Jembrana	2202	-	-	-	-	20.859.000	1.128.728.000	-	1.149.587.000
393	BALI	Kab. Karangasem	2205	-	-	4.437.000	-	2.723.000	1.174.572.000	-	1.181.732.000
394	BALI	Kab. Klungkung	2203	-	-	-	-	1.852.000	1.217.840.000	-	1.219.692.000
395	BALI	Kab. Tabanan	2208	-	-	-	-	3.527.000	939.726.000	-	943.253.000
396	BALI	Kota Denpasar	2251	-	-	-	-	1.779.000	888.399.000	-	890.178.000
397	NUSA TENGGARA BARAT	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2300	-	-	485.957.641.000	-	1.234.256.000	-	-	487.191.897.000
398	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Bima	2304	-	-	64.887.217.000	-	40.069.800	2.820.664.000	-	67.747.950.800
399	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Dompu	2306	-	-	65.181.896.000	-	158.920.000	1.493.589.000	-	66.834.405.000
400	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Barat	2301	-	-	65.273.080.000	-	16.042.000	1.302.361.000	-	66.591.483.000
401	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Tengah	2302	-	-	64.794.305.000	-	-	1.024.352.000	-	65.818.657.000
402	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Timur	2303	-	-	64.714.977.000	-	23.506.000	1.430.182.000	-	66.168.665.000
403	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Sumbawa	2305	-	-	430.957.376.000	-	78.801.000	3.046.086.000	-	434.082.263.000
404	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Mataram	2351	-	-	64.511.243.000	-	14.704.000	861.286.000	-	65.387.233.000
405	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Bima	2352	-	-	64.620.290.000	-	38.308.000	853.378.000	-	65.511.976.000
406	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Sumbawa Barat	2307	-	-	981.940.942.000	-	-	1.418.855.000	-	983.359.797.000
407	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Utara	2308	-	-	64.821.956.000	-	22.035.000	1.185.371.000	-	66.029.362.000
408	NUSA TENGGARA TIMUR	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2400	-	-	448.048.000	1.131.656.000	113.358.600	-	-	1.693.062.600
409	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Alor	2405	-	-	3.367.000	101.062.000	4.331.000	2.750.208.000	-	2.858.968.000
410	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Belu	2402	-	-	27.289.000	44.612.000	4.333.000	923.221.000	-	999.455.000
411	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ende	2408	-	-	1.829.000	1.477.617.000	4.418.000	1.610.708.000	-	3.094.572.000
412	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Flores Timur	2407	-	-	1.042.000	78.991.000	116.000	2.078.149.000	-	2.158.298.000
413	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Kupang	2401	-	-	217.031.000	45.941.000	160.706.000	2.342.717.000	-	2.766.395.000
414	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Lembata	2413	-	-	1.047.000	164.812.000	4.418.000	1.978.094.000	-	2.148.371.000
415	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai	2410	-	-	34.863.000	1.075.547.000	5.856.000	1.170.961.000	-	2.287.227.000
416	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ngada	2409	-	-	1.111.000	225.004.000	4.425.000	1.191.847.000	-	1.422.387.000
417	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sikka	2406	-	-	1.595.000	304.890.000	4.418.000	2.195.036.000	-	2.505.939.000
418	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Barat	2412	-	-	1.045.000	45.433.000	25.044.000	1.087.651.000	-	1.159.173.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
419	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Timur	2411	-	-	1.037.000	44.346.000	4.328.000	2.409.336.000	-	2.459.047.000
420	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Selatan	2404	-	-	13.571.000	45.753.000	30.945.000	1.205.639.000	-	1.295.908.000
421	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Utara	2403	-	-	434.875.000	45.821.000	30.948.000	1.020.915.000	-	1.532.559.000
422	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	2451	-	-	6.672.000	43.990.000	32.083.000	877.047.000	-	959.792.000
423	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Rote Ndao	2414	-	-	1.063.000	44.668.000	4.331.000	2.087.819.000	-	2.137.881.000
424	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai Barat	2415	-	-	6.642.000	184.893.000	7.221.000	2.675.242.000	-	2.873.998.000
425	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Nagekeo	2417	-	-	5.185.000	293.968.000	4.422.000	1.217.532.000	-	1.521.107.000
426	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Barat Daya	2419	-	-	1.030.000	44.014.000	9.509.000	1.241.584.000	-	1.296.137.000
427	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Tengah	2418	-	-	1.081.000	44.636.000	9.529.000	1.111.918.000	-	1.167.164.000
428	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai Timur	2420	-	-	1.111.000	187.492.000	4.418.000	1.237.031.000	-	1.430.052.000
429	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sabu Raijua	2421	-	-	62.439.000	44.165.000	4.328.000	1.574.582.000	-	1.685.514.000
430	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Malaka	2422	-	-	23.911.000	45.457.000	4.417.000	1.061.225.000	-	1.135.010.000
431	MALUKU	Provinsi Maluku	2100	736.843.000	-	3.934.486.000	-	36.002.485.000	-	836.045.000	41.509.859.000
432	MALUKU	Kab. Kepulauan Tanimbar	2103	144.020.000	-	403.544.000	-	739.328.580	5.126.193.000	-	6.413.085.580
433	MALUKU	Kab. Maluku Tengah	2101	1.249.283.000	-	768.667.000	-	875.724.000	4.746.989.000	1.618.184.000	9.258.847.000
434	MALUKU	Kab. Maluku Tenggara	2102	144.020.000	-	399.954.000	-	164.954.000	2.606.895.000	-	3.315.823.000
435	MALUKU	Kab. Buru	2104	141.080.000	-	417.915.000	-	393.667.200	1.623.141.000	-	2.575.803.200
436	MALUKU	Kota Ambon	2151	144.020.000	-	429.835.000	-	252.367.000	1.077.130.000	500.000.000	2.403.352.000
437	MALUKU	Kab. Seram Bagian Barat	2106	144.020.000	-	663.078.000	-	358.446.000	3.270.579.000	500.000.000	4.936.123.000
438	MALUKU	Kab. Seram Bagian Timur	2107	2.428.231.000	-	503.496.000	-	550.068.000	3.959.215.000	1.098.389.000	8.539.399.000
439	MALUKU	Kab. Kepulauan Aru	2105	141.080.000	-	388.566.000	-	522.222.000	5.269.014.000	-	6.320.882.000
440	MALUKU	Kota Tual	2152	144.020.000	-	399.082.000	-	164.954.000	2.329.757.000	-	3.037.813.000
441	MALUKU	Kab. Maluku Barat Daya	2109	144.020.000	-	9.122.185.000	-	172.676.000	6.679.366.000	-	16.118.247.000
442	MALUKU	Kab. Buru Selatan	2110	144.020.000	-	402.379.000	-	420.921.300	2.061.852.000	-	3.029.172.300
443	PAPUA	Provinsi Papua	2500	-	-	5.430.610.000	-	20.560.954.000	-	-	25.991.564.000
444	PAPUA	Kab. Biak Numfor	2502	-	-	1.654.976.000	-	338.146.000	3.010.101.000	-	5.003.223.000
445	PAPUA	Kab. Jayapura	2501	-	-	1.619.418.000	-	1.925.876.000	1.242.183.000	2.558.897.000	7.346.374.000
446	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Jayawijaya	3801	-	-	1.579.333.000	-	-	851.176.000	-	2.430.509.000
447	PAPUA SELATAN	Kab. Merauke	3601	-	-	1.584.192.000	-	5.266.082.000	4.081.890.000	3.712.644.000	14.644.808.000
448	PAPUA TENGAH	Kab. Mimika	3701	-	-	1.530.761.522.000	-	1.036.954.200	2.268.752.000	493.354.500	1.534.560.582.700
449	PAPUA TENGAH	Kab. Nabire	3702	-	-	111.082.187.000	-	283.758.600	2.541.025.000	2.083.786.000	115.990.756.600
450	PAPUA TENGAH	Kab. Paniai	3703	-	-	179.328.958.000	-	199.064.000	833.805.000	500.000.000	180.861.827.000
451	PAPUA TENGAH	Kab. Puncak Jaya	3704	-	-	111.090.702.000	-	114.920.000	851.176.000	-	112.056.798.000
452	PAPUA	Kab. Kepulauan Yapen	2504	-	-	1.666.129.000	-	338.146.000	3.424.347.000	-	5.428.622.000
453	PAPUA	Kota Jayapura	2551	-	-	1.573.922.000	-	646.456.000	1.077.042.000	2.371.548.000	5.668.968.000
454	PAPUA	Kab. Sarmi	2516	-	-	2.361.683.000	-	3.467.386.000	2.294.483.000	500.000.000	8.623.552.000
455	PAPUA	Kab. Keerom	2517	-	-	2.543.653.000	-	1.837.400.000	851.176.000	-	5.232.229.000
456	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Yahukimo	3802	-	-	1.714.496.000	-	288.245.000	851.176.000	500.000.000	3.353.917.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
457	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Pegunungan Bintang	3806	-	-	2.143.641.000	-	524.598.000	851.176.000	500.000.000	4.019.415.000
458	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Tolikara	3803	-	-	1.689.464.000	-	6.543.000	851.176.000	-	2.547.183.000
459	PAPUA SELATAN	Kab. Boven Digoel	3602	-	-	1.685.564.000	-	4.693.655.000	851.176.000	2.587.282.000	9.817.677.000
460	PAPUA SELATAN	Kab. Mappi	3603	-	-	1.671.319.000	-	4.386.734.000	1.316.048.000	940.399.000	8.314.500.000
461	PAPUA SELATAN	Kab. Asmat	3604	-	-	102.746.061.000	-	2.089.128.000	1.844.575.000	500.000.000	107.179.764.000
462	PAPUA	Kab. Waropen	2523	-	-	30.731.028.000	-	1.169.160.000	2.063.824.000	-	33.964.012.000
463	PAPUA	Kab. Supiori	2527	-	-	1.705.662.000	-	338.146.000	2.008.276.000	-	4.052.084.000
464	PAPUA	Kab. Mamberamo Raya	2520	-	-	1.679.917.000	-	287.242.200	1.785.658.000	-	3.752.817.200
465	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Mamberamo Tengah	3804	-	-	1.669.095.000	-	552.273.000	851.176.000	-	3.072.544.000
466	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Yalimo	3805	-	-	1.695.282.000	-	52.966.000	851.176.000	500.000.000	3.099.424.000
467	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Lanny Jaya	3807	-	-	1.642.041.000	-	-	851.176.000	-	2.493.217.000
468	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Nduga	3808	-	-	98.275.565.000	-	91.547.000	816.435.000	250.000.000	99.433.547.000
469	PAPUA TENGAH	Kab. Dogiyai	3706	-	-	179.322.383.000	-	440.541.000	833.805.000	500.000.000	181.096.729.000
470	PAPUA TENGAH	Kab. Puncak	3705	-	-	179.304.013.000	-	205.459.000	833.805.000	500.000.000	180.843.277.000
471	PAPUA TENGAH	Kab. Intan Jaya	3707	-	-	171.549.458.000	-	190.770.000	799.064.000	500.000.000	173.039.292.000
472	PAPUA TENGAH	Kab. Deiyai	3708	-	-	171.543.494.000	-	190.757.000	799.064.000	500.000.000	173.033.315.000
473	MALUKU UTARA	Provinsi Maluku Utara	2800	-	-	612.865.269.000	65.009.000	10.193.631.260	-	693.232.000	623.817.141.260
474	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Tengah	2802	-	-	680.116.245.000	33.060.000	491.115.000	2.838.475.000	500.000.000	683.978.895.000
475	MALUKU UTARA	Kota Ternate	2851	-	-	52.052.905.000	9.328.000	73.972.000	1.544.518.000	-	53.680.723.000
476	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Barat	2807	-	-	130.424.045.000	9.523.000	149.206.000	1.667.251.000	-	132.250.025.000
477	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Timur	2806	-	-	690.709.185.000	9.543.000	527.606.000	2.810.533.000	-	694.056.867.000
478	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Selatan	2804	-	-	412.891.728.000	127.380.000	143.659.200	9.017.638.000	2.057.334.000	424.237.739.200
479	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Utara	2803	-	-	52.122.781.000	9.323.000	73.972.000	2.295.210.000	-	54.501.286.000
480	MALUKU UTARA	Kab. Kepulauan Sula	2805	-	-	54.555.107.000	9.352.000	417.435.000	2.699.453.000	-	57.681.347.000
481	MALUKU UTARA	Kota Tidore Kepulauan	2853	-	-	215.350.359.000	33.807.000	179.120.680	1.514.377.000	250.000.000	217.327.663.680
482	MALUKU UTARA	Kab. Pulau Morotai	2808	-	-	52.613.669.000	9.538.000	526.000	2.080.047.000	-	54.703.780.000
483	MALUKU UTARA	Kab. Pulau Taliabu	2809	-	-	72.932.238.000	9.271.000	54.973.200	2.304.580.000	-	75.301.062.200
484	BANTEN	Provinsi Banten	2900	-	-	393.030.000	439.444.000	166.605.000	-	906.874.000	1.905.953.000
485	BANTEN	Kab. Lebak	2903	-	-	1.874.168.000	14.376.086.000	173.276.000	1.128.220.000	1.619.743.000	19.171.493.000
486	BANTEN	Kab. Pandeglang	2902	-	-	167.251.000	521.240.000	273.640.000	2.359.147.000	1.252.315.000	4.573.593.000
487	BANTEN	Kab. Serang	2901	-	-	84.229.000	540.479.000	96.360.000	1.461.434.000	500.000.000	2.682.502.000
488	BANTEN	Kab. Tangerang	2904	-	-	1.299.769.000	3.732.325.000	32.423.000	906.119.000	-	5.970.636.000
489	BANTEN	Kota Cilegon	2952	-	-	3.347.000	155.369.000	23.806.000	971.694.000	-	1.154.216.000
490	BANTEN	Kota Tangerang	2951	-	-	217.000	119.349.000	23.305.000	816.435.000	-	959.306.000
491	BANTEN	Kota Serang	2953	-	-	3.895.000	160.203.000	23.806.000	843.513.000	-	1.031.417.000
492	BANTEN	Kota Tangerang Selatan	2954	-	-	1.323.873.000	3.776.978.000	25.923.000	833.805.000	-	5.960.579.000
493	BANGKA BELITUNG	Provinsi Bangka Belitung	3000	1.360.548.000	-	61.758.337.000	-	712.595.780	-	5.880.702.000	69.712.182.780
494	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka	3002	399.835.000	-	63.223.542.000	-	377.218.000	1.529.400.000	3.961.378.000	69.491.373.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
495	BANGKA BELITUNG	Kab. Belitung	3001	399.835.000	-	12.293.399.000	-	243.372.000	2.726.950.000	3.787.273.000	19.450.829.000
496	BANGKA BELITUNG	Kota Pangkal Pinang	3051	399.835.000	-	13.884.745.000	-	126.967.000	857.683.000	2.595.612.000	17.864.842.000
497	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka Selatan	3005	399.835.000	-	24.296.182.000	-	243.679.000	2.237.437.000	3.269.342.000	30.446.475.000
498	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka Tengah	3004	399.835.000	-	30.715.854.000	-	294.680.000	2.040.994.000	2.913.423.000	36.364.786.000
499	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka Barat	3003	399.835.000	-	76.525.985.000	-	335.120.000	1.793.178.000	3.740.996.000	82.795.114.000
500	BANGKA BELITUNG	Kab. Belitung Timur	3006	408.165.000	-	15.620.325.000	-	278.991.000	3.164.810.000	3.740.314.000	23.212.605.000
501	GORONTALO	Provinsi Gorontalo	3100	-	-	1.956.888.000	-	11.513.433.000	-	1.522.081.000	14.992.402.000
502	GORONTALO	Kab. Boalemo	3102	-	-	12.947.000	-	433.038.000	1.243.189.000	2.140.955.000	3.830.129.000
503	GORONTALO	Kab. Gorontalo	3101	-	-	169.267.000	-	245.193.000	1.032.328.000	1.243.470.000	2.690.258.000
504	GORONTALO	Kota Gorontalo	3151	-	-	16.630.000	-	200.767.000	865.817.000	500.000.000	1.583.214.000
505	GORONTALO	Kab. Pohuwato	3103	-	-	318.104.000	-	1.684.580.000	1.510.549.000	1.575.936.000	5.089.169.000
506	GORONTALO	Kab. Bone Bolango	3104	-	-	6.832.248.000	-	180.592.000	1.070.469.000	500.000.000	8.583.309.000
507	GORONTALO	Kab. Gorontalo Utara	3107	-	-	53.309.000	-	113.133.500	1.549.707.000	740.900.000	2.457.049.500
508	KEPULAUAN RIAU	Provinsi Kepulauan Riau	3200	4.259.588.000	47.112.646.000	6.633.014.000	-	1.987.975.000	-	1.156.434.000	61.149.657.000
509	KEPULAUAN RIAU	Kab. Natuna	3203	10.565.146.000	75.720.618.000	1.128.798.000	-	52.003.000	5.402.807.000	-	92.869.372.000
510	KEPULAUAN RIAU	Kab. Kepulauan Anambas	3205	6.704.849.000	47.072.546.000	660.381.000	-	23.477.000	4.352.786.000	-	58.814.039.000
511	KEPULAUAN RIAU	Kab. Karimun	3202	1.846.023.000	13.371.228.000	16.084.385.000	-	7.496.000	2.622.481.000	1.865.510.000	35.797.123.000
512	KEPULAUAN RIAU	Kota Batam	3251	1.849.141.000	13.371.228.000	651.297.000	-	44.531.000	2.440.172.000	-	18.356.369.000
513	KEPULAUAN RIAU	Kota Tanjung Pinang	3252	1.810.241.000	13.371.228.000	710.801.000	-	133.706.000	943.898.000	829.064.000	17.798.938.000
514	KEPULAUAN RIAU	Kab. Lingga	3204	1.903.660.000	13.649.795.000	4.517.612.000	-	57.544.000	5.349.415.000	-	25.478.026.000
515	KEPULAUAN RIAU	Kab. Bintan	3201	1.850.950.000	13.371.228.000	658.755.000	-	32.777.000	4.273.158.000	1.981.708.000	22.168.576.000
516	PAPUA BARAT	Provinsi Papua Barat	3300	122.776.525.000	1.292.536.573.000	3.553.875.000	-	44.825.307.000	-	1.098.033.000	1.464.790.313.000
517	PAPUA BARAT	Kab. Fak Fak	3303	2.035.403.000	52.868.378.000	550.620.000	-	4.966.791.000	3.157.716.000	968.731.000	64.547.639.000
518	PAPUA BARAT	Kab. Manokwari	3301	1.321.100.000	32.090.153.000	594.324.000	-	302.601.000	1.450.159.000	1.623.471.000	37.381.808.000
519	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Sorong	3902	22.555.935.000	6.010.411.000	37.085.938.000	-	-	2.451.122.000	1.458.904.000	69.562.310.000
520	PAPUA BARAT DAYA	Kota Sorong	3951	3.608.950.000	1.128.785.000	8.156.004.000	-	15.065.000	1.032.896.000	500.000.000	14.441.700.000
521	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Raja Ampat	3904	3.608.950.000	1.128.785.000	74.407.567.000	-	50.951.000	12.151.984.000	500.000.000	91.848.237.000
522	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Sorong Selatan	3903	4.621.215.000	25.925.721.000	8.137.728.000	-	116.270.400	1.511.031.000	2.182.217.000	42.494.182.400
523	PAPUA BARAT	Kab. Teluk Bintuni	3306	14.065.154.000	396.750.978.000	1.718.376.000	-	2.531.257.200	2.367.097.000	949.412.000	418.382.274.200
524	PAPUA BARAT	Kab. Teluk Wondama	3307	2.083.992.000	53.969.803.000	34.443.445.000	-	2.669.178.000	2.995.829.000	500.000.000	96.662.247.000
525	PAPUA BARAT	Kab. Kaimana	3308	2.082.034.000	53.969.803.000	106.612.420.000	-	6.626.960.000	3.709.892.000	500.000.000	173.501.109.000
526	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Maybrat	3906	4.621.215.000	25.925.721.000	8.139.149.000	-	120.409.200	851.176.000	500.000.000	40.157.670.200
527	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Tambrauw	3905	4.621.215.000	25.925.721.000	8.139.537.000	-	113.216.700	1.874.018.000	500.000.000	41.173.707.700
528	PAPUA BARAT	Kab. Manokwari Selatan	3312	2.035.403.000	52.868.378.000	552.060.000	-	1.484.737.000	1.159.578.000	500.000.000	58.600.156.000
529	PAPUA BARAT	Kab. Pegunungan Arfak	3311	2.081.880.000	53.969.803.000	571.786.000	-	1.368.142.000	851.176.000	500.000.000	59.342.787.000
530	SULAWESI BARAT	Provinsi Sulawesi Barat	3400	-	-	877.889.000	-	107.559.000	-	3.202.173.000	4.187.621.000
531	SULAWESI BARAT	Kab. Majene	3401	-	-	267.024.000	-	14.223.000	1.296.874.000	508.075.000	2.086.196.000
532	SULAWESI BARAT	Kab. Mamuju	3402	-	-	1.686.992.000	-	-	2.670.407.000	2.599.116.000	6.956.515.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
533	SULAWESI BARAT	Kab. Polewali Mandar	3404	-	-	223.641.000	-	14.389.000	1.089.709.000	1.250.486.000	2.578.225.000
534	SULAWESI BARAT	Kab. Mamasa	3405	-	-	268.099.000	-	18.141.000	851.176.000	515.121.000	1.652.537.000
535	SULAWESI BARAT	Kab. Pasangkayu	3403	-	-	196.664.000	-	-	1.402.419.000	3.743.708.000	5.342.791.000
536	SULAWESI BARAT	Kab. Mamuju Tengah	3406	-	-	273.643.000	-	95.504.000	1.131.002.000	2.332.581.000	3.832.730.000
537	KALIMANTAN UTARA	Provinsi Kalimantan Utara	3500	826.262.000	267.204.000	417.421.749.000	-	58.215.531.000	-	3.837.833.000	480.568.579.000
538	PAPUA SELATAN	Provinsi Papua Tengah	3700	-	-	755.040.806.000	-	6.442.067.000	-	511.749.000	761.994.622.000
539	PAPUA TENGAH	Provinsi Papua Selatan	3600	-	-	6.871.254.000	-	35.690.583.000	-	1.957.405.000	44.519.242.000
540	PAPUA PEGUNUNGAN	Provinsi Papua Pegunungan	3800	-	-	3.363.217.000	-	-	-	-	3.363.217.000
541	PAPUA BARAT DAYA	Provinsi Papua Barat Daya	3900	173.266.402.000	19.485.218.000	34.429.359.000	-	1.162.233.000	-	1.150.374.000	229.493.586.000
542	KALIMANTAN UTARA	Kab. Bulungan	3501	392.475.000	192.654.000	697.869.866.000	-	5.115.654.000	1.947.450.000	4.460.978.000	709.979.077.000
543	KALIMANTAN UTARA	Kab. Malinau	3503	6.329.759.000	12.851.683.000	1.334.437.951.000	-	6.061.018.000	851.176.000	4.377.638.000	1.364.909.225.000
544	KALIMANTAN UTARA	Kab. Nunukan	3502	392.475.000	93.693.000	481.505.853.000	-	2.445.154.200	1.423.451.000	5.397.951.000	491.258.577.200
545	KALIMANTAN UTARA	Kota Tarakan	3551	3.925.586.000	1.240.415.000	97.984.086.000	-	941.403.000	1.038.294.000	-	105.129.784.000
546	KALIMANTAN UTARA	Kab. Tana Tidung	3504	392.475.000	179.952.000	286.819.906.000	-	2.651.640.000	1.174.532.000	2.748.757.000	293.967.262.000
Jumlah				**9.547.214.159.000**	**7.754.928.593.000**	**74.899.300.984.000**	**1.660.558.734.000**	**1.120.991.254.100**	**714.663.707.000**	**1.172.998.010.000**	**96.870.655.441.100**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
1	ACEH	Provinsi Aceh	1.735.433.014.000	121.050.651.949	180.998.240.000	106.721.459.000	-		110.109.508.000	2.318.667.187.000	2.254.312.872.949
2	ACEH	Kab. Aceh Barat	490.641.817.000	7.510.253.127	49.598.861.000	46.101.697.000	-		-	594.961.215.000	593.852.628.127
3	ACEH	Kab. Aceh Besar	647.868.668.000	14.601.193.512	64.657.726.000	62.980.009.000	-		17.442.016.000	811.533.520.000	807.549.612.512
4	ACEH	Kab. Aceh Selatan	510.865.113.000	1.106.600.173	61.644.189.000	45.087.761.000	-		14.876.140.000	634.796.341.000	633.579.803.173
5	ACEH	Kab. Aceh Singkil	339.036.624.000	20.630.454.523	54.495.040.000	32.672.793.000	-		15.607.934.000	475.544.349.000	462.442.845.523
6	ACEH	Kab. Aceh Tengah	516.590.040.000	13.374.326.324	53.796.774.000	35.475.965.000	-		17.499.471.000	639.624.213.000	636.736.576.324
7	ACEH	Kab. Aceh Tenggara	461.705.530.000	944.742.624	60.888.803.000	39.088.641.000	-		13.729.606.000	581.359.812.000	576.357.322.624
8	ACEH	Kab. Aceh Timur	669.449.237.000	9.294.333.243	83.789.568.000	64.255.263.000	-		45.656.422.000	884.964.752.000	872.444.823.243
9	ACEH	Kab. Aceh Utara	764.573.762.000	13.377.882.424	129.514.850.000	74.818.356.000	-		33.713.463.000	1.023.249.893.000	1.015.998.313.424
10	ACEH	Kab. Bireuen	740.935.986.000	6.694.257.468	78.874.967.000	52.068.285.000	-		24.587.638.000	910.777.404.000	903.161.133.468
11	ACEH	Kab. Pidie	731.574.150.000	1.237.324.035	72.301.631.000	72.910.245.000	-		23.567.930.000	902.723.556.000	901.591.280.035
12	ACEH	Kab. Simeulue	353.133.785.000	6.411.525.539	42.916.306.000	22.957.540.000	-		-	433.420.475.000	425.419.156.539
13	ACEH	Kota Banda Aceh	504.897.497.000	-	41.686.854.000	34.469.820.000	-		-	603.765.164.000	581.054.171.000
14	ACEH	Kota Sabang	330.994.647.000	3.961.490.140	11.208.933.000	20.126.026.000	-		-	366.975.881.000	366.291.096.140
15	ACEH	Kota Langsa	379.773.854.000	26.188.512.875	26.078.672.000	26.023.825.000	-		8.409.721.000	470.556.555.000	466.474.584.875
16	ACEH	Kota Lhokseumawe	348.271.906.000	28.690.822.154	29.899.145.000	35.585.843.000	-		11.284.250.000	474.607.608.000	453.731.966.154
17	ACEH	Kab. Gayo Lues	327.661.913.000	3.826.289.692	38.009.529.000	27.999.084.000	-		-	407.191.187.000	397.496.815.692
18	ACEH	Kab. Aceh Barat Daya	359.661.174.000	1.800.812.282	40.721.583.000	31.576.723.000	-		10.387.532.000	446.296.346.000	444.147.824.282
19	ACEH	Kab. Aceh Jaya	348.723.199.000	9.200.501.383	26.668.963.000	27.302.063.000	-		8.736.569.000	431.851.174.000	420.631.295.383
20	ACEH	Kab. Nagan Raya	443.481.535.000	1.884.135.482	46.575.845.000	37.484.208.000	-		-	531.723.236.000	529.425.723.482
21	ACEH	Kab. Aceh Tamiang	449.922.896.000	9.067.694.826	50.704.385.000	31.519.446.000	-		18.232.619.000	562.343.505.000	559.447.040.826
22	ACEH	Kab. Bener Meriah	339.506.126.000	31.300.533.250	40.177.245.000	30.268.821.000	-		13.639.513.000	462.453.151.000	454.892.238.250
23	ACEH	Kab. Pidie Jaya	351.368.951.000	3.080.226.601	35.812.541.000	33.721.224.000	-		10.336.374.000	434.417.142.000	434.319.316.601
24	ACEH	Kota Subulussalam	243.570.835.000	3.745.438.658	53.303.758.000	22.199.906.000	-		6.652.068.000	333.160.607.000	329.472.005.658
25	SUMATERA UTARA	Provinsi Sumatera Utara	2.736.651.082.000	6.680.230.575	279.765.238.000	115.800.158.000	-		127.192.992.000	3.273.348.296.000	3.266.089.700.575
26	SUMATERA UTARA	Kab. Asahan	788.746.506.000	5.614.246.305	85.094.085.000	58.838.658.000	5.400.000.000		21.849.616.000	972.404.114.000	965.543.111.305
27	SUMATERA UTARA	Kab. Dairi	532.916.259.000	12.976.022.178	43.693.704.000	32.801.506.000	1.600.000.000		18.516.639.000	663.371.577.000	642.504.130.178
28	SUMATERA UTARA	Kab. Deli Serdang	1.657.366.868.000	1.142.209.320	122.406.748.000	37.655.118.000	2.800.000.000		52.002.841.000	1.910.935.047.000	1.873.373.784.320
29	SUMATERA UTARA	Kab. Karo	635.247.750.000	2.117.701.227	72.799.072.000	27.781.727.000	2.000.000.000		15.097.766.000	757.572.590.000	755.044.016.227
30	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhanbatu	606.340.638.000	6.387.798.807	33.409.880.000	41.811.540.000	4.600.000.000		16.168.550.000	726.012.179.000	708.718.406.807
31	SUMATERA UTARA	Kab. Langkat	1.132.208.030.000	30.222.010.548	122.099.910.000	55.669.285.000	7.400.000.000		40.782.541.000	1.390.683.692.000	1.388.381.776.548
32	SUMATERA UTARA	Kab. Mandailing Natal	632.417.527.000	39.707.323.579	87.987.353.000	61.717.775.000	5.400.000.000		35.253.371.000	866.915.640.000	862.483.349.579
33	SUMATERA UTARA	Kab. Nias	306.753.978.000	7.274.491.123	65.814.964.000	27.789.203.000	-		8.717.920.000	421.397.987.000	416.350.556.123
34	SUMATERA UTARA	Kab. Simalungun	1.229.679.273.000	39.532.567.184	133.730.639.000	60.644.477.000	5.400.000.000		37.389.417.000	1.529.103.894.000	1.506.376.373.184
35	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Selatan	494.117.025.000	17.483.244.333	66.585.302.000	48.831.464.000	7.200.000.000		18.631.723.000	668.600.531.000	652.848.758.333
36	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Tengah	515.056.655.000	9.287.271.419	67.603.995.000	37.738.775.000	11.200.000.000		15.583.207.000	656.591.339.000	656.469.903.419
37	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Utara	586.029.870.000	-	52.691.025.000	34.780.355.000	2.200.000.000		21.847.583.000	697.548.833.000	697.548.833.000
38	SUMATERA UTARA	Kab. Toba Samosir	469.468.465.000	9.153.307.827	42.253.964.000	39.429.150.000	2.600.000.000		14.801.751.000	581.632.595.000	577.706.637.827
39	SUMATERA UTARA	Kota Binjai	509.931.906.000	4.274.573.000	39.147.878.000	23.325.363.000	7.400.000.000		13.827.092.000	597.906.812.000	597.906.812.000
40	SUMATERA UTARA	Kota Medan	1.776.581.782.000	15.625.946.901	187.521.664.000	86.903.344.000	30.200.000.000		-	2.106.714.841.000	2.096.832.736.901
41	SUMATERA UTARA	Kota Pematang Siantar	506.803.154.000	13.251.177.000	41.209.162.000	34.273.615.000	10.600.000.000		10.957.324.000	617.094.432.000	617.094.432.000
42	SUMATERA UTARA	Kota Sibolga	350.344.206.000	7.151.396.468	31.206.009.000	25.726.451.000	3.400.000.000		-	424.615.492.000	417.828.062.468
43	SUMATERA UTARA	Kota Tanjung Balai	350.343.099.000	2.585.734.878	28.870.753.000	35.643.564.000	3.100.000.000		-	436.535.309.000	420.543.150.878
44	SUMATERA UTARA	Kota Tebing Tinggi	357.134.806.000	11.588.294.536	30.964.694.000	25.311.193.000	7.000.000.000		7.707.549.000	442.354.429.000	439.706.536.536
45	SUMATERA UTARA	Kota Padang Sidempuan	404.359.565.000	1.184.800.176	48.743.553.000	40.643.989.000	7.400.000.000		9.818.855.000	513.028.908.000	512.150.762.176
46	SUMATERA UTARA	Kab. Pakpak Bharat	267.735.403.000	3.532.108.238	28.391.124.000	14.333.759.000	-		829.210.000	315.866.077.000	314.821.604.238

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
47	SUMATERA UTARA	Kab. Nias Selatan	521.902.529.000	1.772.660.583	103.118.529.000	51.786.324.000	400.000.000		10.086.450.000	691.243.166.000	689.066.492.583
48	SUMATERA UTARA	Kab. Humbang Hasundutan	455.727.983.000	3.827.325.246	40.402.590.000	25.200.601.000	200.000.000		15.143.961.000	541.321.410.000	540.502.460.246
49	SUMATERA UTARA	Kab. Serdang Bedagai	758.880.553.000	5.941.785.594	86.221.908.000	36.102.473.000	1.200.000.000		25.542.292.000	914.916.639.000	913.889.011.594
50	SUMATERA UTARA	Kab. Samosir	367.555.072.000	2.396.294.653	31.397.592.000	21.322.581.000	1.200.000.000		10.276.340.000	434.539.350.000	434.147.879.653
51	SUMATERA UTARA	Kab. Batu Bara	516.100.613.000	1.802.206.217	60.848.155.000	37.257.574.000	2.000.000.000		16.653.154.000	635.182.634.000	634.661.702.217
52	SUMATERA UTARA	Kab. Padang Lawas	398.934.420.000	7.746.316.165	53.088.187.000	36.383.675.000	200.000.000		14.712.699.000	512.634.763.000	511.065.297.165
53	SUMATERA UTARA	Kab. Padang Lawas Utara	404.587.780.000	2.814.200.797	68.294.770.000	38.286.800.000	400.000.000		11.940.962.000	526.483.928.000	526.324.512.797
54	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhanbatu Selatan	402.686.364.000	1.790.380.506	64.962.936.000	39.335.284.000	400.000.000		12.399.378.000	523.092.110.000	521.574.342.506
55	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhanbatu Utara	483.412.730.000	13.322.210.454	55.363.050.000	35.452.873.000	1.600.000.000		14.034.169.000	611.932.629.000	603.185.032.454
56	SUMATERA UTARA	Kab. Nias Utara	297.802.632.000	9.627.798.636	42.848.755.000	26.952.604.000	200.000.000		10.114.009.000	406.190.585.000	387.545.798.636
57	SUMATERA UTARA	Kab. Nias Barat	263.102.853.000	3.148.557.033	35.898.862.000	22.119.090.000	-		8.589.016.000	337.143.861.000	332.858.378.033
58	SUMATERA UTARA	Kota Gunungsitoli	347.016.733.000	398.553.363	52.071.039.000	22.386.505.000	600.000.000		9.124.733.000	431.663.638.000	431.597.563.363
59	SUMATERA BARAT	Provinsi Sumatera Barat	1.813.526.490.000	27.877.651.000	131.151.789.000	72.190.878.000	-		95.061.040.000	2.139.807.849.000	2.139.807.848.000
60	SUMATERA BARAT	Kab. Lima Puluh Kota	629.953.136.000	13.835.580.287	67.320.090.000	29.237.080.000	-		26.166.146.000	766.615.278.000	766.512.032.287
61	SUMATERA BARAT	Kab. Agam	773.645.573.000	4.763.689.007	50.266.849.000	33.141.883.000	-		32.290.020.000	895.616.797.000	894.108.014.007
62	SUMATERA BARAT	Kab. Kepulauan Mentawai	378.739.222.000	9.734.728.835	65.730.629.000	31.303.775.000	-		5.150.580.000	513.764.079.000	490.658.934.835
63	SUMATERA BARAT	Kab. Padang Pariaman	638.430.057.000	9.974.133.956	44.182.570.000	41.112.104.000	-		27.571.198.000	766.396.323.000	761.270.062.956
64	SUMATERA BARAT	Kab. Pasaman	509.272.437.000	7.007.219.906	43.187.685.000	34.576.025.000	-		-	602.856.714.000	594.043.366.906
65	SUMATERA BARAT	Kab. Pesisir Selatan	767.897.432.000	5.876.813.162	84.292.205.000	32.865.684.000	-		35.415.618.000	930.808.901.000	926.347.752.162
66	SUMATERA BARAT	Kab. Sijunjung	439.657.761.000	12.098.581.816	39.468.282.000	29.542.927.000	-		19.342.382.000	554.355.732.000	540.109.933.816
67	SUMATERA BARAT	Kab. Solok	608.100.357.000	15.451.391.194	48.371.871.000	40.561.406.000	-		-	713.434.985.000	712.485.025.194
68	SUMATERA BARAT	Kab. Tanah Datar	610.919.786.000	200.929.146	38.288.819.000	26.034.245.000	-		21.456.437.000	696.978.064.000	696.900.216.146
69	SUMATERA BARAT	Kota Bukit Tinggi	410.191.454.000	2.787.765.000	17.440.108.000	25.912.633.000	4.800.000.000		-	461.131.960.000	461.131.960.000
70	SUMATERA BARAT	Kota Padang Panjang	337.314.137.000	1.319.542.000	28.805.149.000	14.434.743.000	3.200.000.000		1.745.394.000	386.818.965.000	386.818.965.000
71	SUMATERA BARAT	Kota Padang	1.051.651.224.000	79.027.294.360	86.746.026.000	26.707.046.000	20.800.000.000		39.724.317.000	1.339.439.124.000	1.304.655.907.360
72	SUMATERA BARAT	Kota Payakumbuh	382.943.041.000	3.363.903.000	35.246.919.000	24.544.785.000	9.400.000.000		7.217.663.000	462.716.311.000	462.716.311.000
73	SUMATERA BARAT	Kota Sawahlunto	354.678.128.000	1.590.258.999	10.550.719.000	12.483.657.000	2.000.000.000		-	382.035.642.000	381.302.762.999
74	SUMATERA BARAT	Kota Solok	357.664.921.000	2.152.089.201	28.878.603.000	14.703.023.000	2.600.000.000		-	407.452.057.000	405.998.636.201
75	SUMATERA BARAT	Kota Pariaman	330.312.834.000	16.488.409.706	28.279.706.000	22.797.283.000	3.200.000.000		6.069.632.000	418.369.841.000	407.147.864.706
76	SUMATERA BARAT	Kab. Pasaman Barat	524.110.235.000	25.981.662.558	72.751.425.000	51.932.296.000	-		24.850.218.000	701.521.825.000	699.625.836.558
77	SUMATERA BARAT	Kab. Dharmasraya	426.787.552.000	8.673.034.239	34.559.893.000	26.554.670.000	-		-	499.378.415.000	496.575.149.239
78	SUMATERA BARAT	Kab. Solok Selatan	348.474.993.000	1.949.183.134	38.085.151.000	30.576.167.000	-		12.844.893.000	435.347.652.000	431.930.387.134
79	RIAU	Provinsi Riau	1.300.221.238.000	52.833.192.249	135.560.921.000	56.776.008.000	-		-	1.610.759.408.000	1.545.391.359.249
80	RIAU	Kab. Bengkalis	397.800.040.000	4.510.934.123	32.001.005.000	8.626.579.000	3.800.000.000		-	453.843.312.000	446.738.558.123
81	RIAU	Kab. Indragiri Hilir	813.096.648.000	10.124.649.797	93.986.429.000	85.143.771.000	7.800.000.000		-	1.023.258.224.000	1.010.151.497.797
82	RIAU	Kab. Indragiri Hulu	578.799.017.000	8.401.589.165	77.708.118.000	54.484.721.000	3.200.000.000		-	732.567.874.000	722.593.445.165
83	RIAU	Kab. Kampar	823.678.759.000	60.246.022.350	110.377.766.000	38.521.803.000	1.596.840.000		-	1.061.853.541.000	1.034.421.190.350
84	RIAU	Kab. Kuantan Singingi	504.610.917.000	-	62.039.100.000	35.209.725.000	2.200.000.000		-	660.047.358.000	604.059.742.000
85	RIAU	Kab. Pelalawan	515.431.174.000	-	71.813.163.000	46.566.170.000	2.800.000.000		5.545.456.000	648.544.591.000	642.155.963.000
86	RIAU	Kab. Rokan Hilir	516.503.645.000	30.472.456.973	73.073.870.000	38.406.549.000	5.000.000.000		96.994.000	683.493.144.000	663.553.514.973
87	RIAU	Kab. Rokan Hulu	612.548.404.000	37.014.918.141	90.568.480.000	58.790.507.000	1.200.000.000		-	816.121.391.000	800.122.309.141
88	RIAU	Kab. Siak	398.392.390.000	14.680.216.970	51.756.950.000	17.670.938.000	-		-	492.131.481.000	482.500.494.970
89	RIAU	Kota Dumai	398.446.663.000	37.322.974.812	33.497.128.000	28.539.228.000	7.200.000.000		-	512.045.655.000	505.005.993.812
90	RIAU	Kota Pekanbaru	927.402.559.000	8.130.981.240	71.100.083.000	21.000.616.000	16.600.000.000		-	1.044.234.240.000	1.044.234.239.240
91	RIAU	Kab. Kepulauan Meranti	340.114.867.000	3.578.320.707	38.391.245.000	23.349.909.000	1.000.000.000		-	409.825.434.000	406.434.341.707
92	JAMBI	Provinsi Jambi	1.170.253.176.000	35.683.394.000	109.838.295.000	50.721.441.000	-		-	1.366.496.306.000	1.366.496.306.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
93	JAMBI	Kab. Batanghari	440.558.885.000	47.430.086.120	63.011.944.000	33.621.902.000	2.800.000.000		17.559.737.000	624.811.948.000	604.982.554.120
94	JAMBI	Kab. Bungo	485.204.372.000	11.621.028.693	61.604.713.000	49.014.366.000	2.400.000.000		-	623.197.180.000	609.844.479.693
95	JAMBI	Kab. Kerinci	483.535.143.000	6.378.779.061	58.198.322.000	33.984.176.000	400.000.000		13.476.754.000	603.533.221.000	595.973.174.061
96	JAMBI	Kab. Merangin	553.363.379.000	16.676.829.313	72.452.621.000	40.392.610.000	1.000.000.000		17.342.805.000	720.421.710.000	701.228.244.313
97	JAMBI	Kab. Muaro Jambi	520.901.054.000	39.657.692.619	61.556.516.000	40.604.468.000	1.000.000.000		19.647.806.000	689.949.574.000	683.367.536.619
98	JAMBI	Kab. Sarolangun	420.083.741.000	45.490.915.652	43.063.066.000	31.580.911.000	1.800.000.000		12.027.086.000	592.327.146.000	554.045.719.652
99	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Barat	453.884.204.000	12.672.955.717	53.075.780.000	31.064.448.000	4.000.000.000		-	554.801.689.000	554.697.387.717
100	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Timur	429.562.267.000	6.969.413.000	32.478.353.000	38.143.802.000	4.000.000.000		11.953.639.000	523.107.474.000	523.107.474.000
101	JAMBI	Kab. Tebo	460.873.005.000	4.363.021.008	55.296.112.000	32.754.768.000	1.399.998.000		11.778.204.000	571.394.639.000	566.465.108.008
102	JAMBI	Kota Jambi	680.624.866.000	69.549.078.149	55.595.760.000	17.284.569.000	13.600.000.000		18.998.258.000	862.650.837.000	855.652.531.149
103	JAMBI	Kota Sungai Penuh	348.534.588.000	12.019.453.566	32.053.441.000	35.631.349.000	800.000.000		7.024.586.000	472.774.098.000	436.063.417.566
104	SUMATERA SELATAN	Provinsi Sumatera Selatan	1.460.071.216.000	73.280.675.222	150.838.762.000	43.774.289.000	-		103.516.705.000	1.868.838.077.000	1.831.481.647.222
105	SUMATERA SELATAN	Kab. Lahat	533.376.009.000	51.075.731.868	69.915.503.000	42.358.086.000	3.400.000.000		22.697.434.000	743.797.032.000	722.822.763.868
106	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Banyuasin	355.676.786.000	87.526.161.439	33.027.465.000	32.690.828.000	2.600.000.000		-	583.685.042.000	511.521.240.439
107	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas	517.290.684.000	3.090.312.548	59.184.562.000	35.179.724.000	2.600.000.000		21.232.542.000	638.786.367.000	638.577.824.548
108	SUMATERA SELATAN	Kab. Muara Enim	473.992.405.000	64.485.071.459	47.967.748.000	54.467.953.000	2.000.000.000		32.924.886.000	730.557.829.000	675.838.063.459
109	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ilir	912.617.225.000	12.324.797.873	121.673.068.000	64.991.410.000	2.600.000.000		40.630.422.000	1.155.986.323.000	1.154.836.922.873
110	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu	545.557.277.000	16.807.093.228	67.147.099.000	30.759.080.180	2.800.000.000		20.799.634.000	696.819.065.000	683.870.183.408
111	SUMATERA SELATAN	Kota Palembang	1.291.495.805.000	107.942.239.596	104.362.463.000	66.940.035.000	21.400.000.000		47.936.057.000	1.640.076.626.000	1.640.076.599.596
112	SUMATERA SELATAN	Kota Prabumulih	349.853.602.000	44.278.153.777	30.819.292.000	17.200.544.000	6.600.000.000		3.097.712.000	460.482.932.000	451.849.303.777
113	SUMATERA SELATAN	Kota Pagar Alam	322.983.931.000	6.744.426.024	24.597.260.000	22.321.486.000	7.000.000.000		8.955.215.000	402.352.169.000	392.602.318.024
114	SUMATERA SELATAN	Kota Lubuk Linggau	418.760.301.000	6.133.083.000	34.424.547.000	9.498.931.000	14.400.000.000		11.632.624.000	494.849.486.000	494.849.486.000
115	SUMATERA SELATAN	Kab. Banyuasin	897.942.540.000	106.683.986.118	82.508.118.000	45.019.692.000	5.000.000.000		44.837.624.000	1.190.535.599.000	1.181.991.960.118
116	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Ilir	504.638.809.000	13.682.297.558	68.292.826.000	50.116.233.000	2.800.000.000		23.908.997.000	679.771.803.000	663.439.162.558
117	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	790.548.445.000	28.405.317.158	58.754.841.000	36.982.616.000	1.400.000.000		29.555.808.000	950.601.966.000	945.647.027.158
118	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	537.550.423.000	1.986.279.601	57.672.337.000	38.800.544.000	1.400.000.000		18.607.955.000	656.726.099.000	656.017.538.601
119	SUMATERA SELATAN	Kab. Empat Lawang	362.672.298.000	5.274.534.981	46.691.084.000	28.575.090.000	1.800.000.000		13.017.300.000	463.790.676.000	458.030.306.981
120	SUMATERA SELATAN	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	242.959.239.000	15.584.545.240	38.275.247.000	19.024.500.000	1.200.000.000		11.403.529.000	354.005.282.000	328.447.060.240
121	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas Utara	313.275.998.000	4.646.275.000	40.826.102.000	29.972.832.000	1.400.000.000		7.770.294.000	397.891.501.000	397.891.501.000
122	BENGKULU	Provinsi Bengkulu	1.116.318.122.000	9.603.832.056	107.696.505.000	14.036.180.000	-		33.902.905.000	1.285.892.538.000	1.281.557.544.056
123	BENGKULU	Kab. Bengkulu Selatan	436.870.619.000	9.021.457.627	47.581.440.000	17.603.963.000	3.200.000.000		13.382.934.000	527.861.812.000	527.660.413.627
124	BENGKULU	Kab. Bengkulu Utara	583.783.777.000	2.091.143.500	69.055.279.000	13.041.180.000	1.000.000.000		20.380.396.000	691.906.907.000	689.351.775.500
125	BENGKULU	Kab. Rejang Lebong	483.991.919.000	8.278.212.926	58.156.720.000	11.710.440.000	6.800.000.000		13.118.713.000	601.655.451.000	582.056.004.926
126	BENGKULU	Kota Bengkulu	558.245.939.000	30.491.214.704	44.943.107.000	25.430.226.000	13.400.000.000		15.605.662.000	702.117.665.000	688.116.148.704
127	BENGKULU	Kab. Kaur	361.204.472.000	5.040.470.354	43.758.908.000	15.548.668.001	300.000.000		11.943.648.000	444.691.047.000	437.796.166.355
128	BENGKULU	Kab. Seluma	404.152.082.000	6.197.074.644	47.366.381.000	19.854.573.000	4.000.000.000		14.147.716.000	517.491.329.000	495.717.826.644
129	BENGKULU	Kab. Mukomuko	386.210.610.000	16.104.654.339	47.837.117.000	17.542.048.000	300.000.000		10.337.182.000	482.273.627.000	478.331.611.339
130	BENGKULU	Kab. Lebong	289.513.375.000	6.039.814.365	48.990.995.000	21.851.570.000	2.200.000.000		8.995.196.000	394.336.470.000	377.590.950.365
131	BENGKULU	Kab. Kepahiang	374.345.278.000	-	38.170.320.000	17.234.313.000	2.400.000.000		9.690.665.000	441.840.576.000	441.840.576.000
132	BENGKULU	Kab. Bengkulu Tengah	297.044.879.000	30.888.628.802	53.500.065.000	23.853.754.000	200.000.000		8.406.286.000	419.803.483.000	413.893.612.802
133	LAMPUNG	Provinsi Lampung	1.750.022.821.000	109.196.814.749	154.369.021.000	27.067.590.000	-		74.705.222.000	2.165.833.901.000	2.115.361.468.749
134	LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	474.740.845.000	5.405.833.483	32.897.621.000	21.624.945.000	1.000.000.000		16.111.790.000	552.856.755.000	551.781.034.483
135	LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	1.038.317.634.000	3.716.553.571	114.749.900.000	24.175.512.000	800.000.000		25.650.117.000	1.207.410.183.000	1.207.409.716.571
136	LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	1.342.905.747.000	1.802.298.626	150.786.164.000	31.832.883.000	2.000.000.000		50.097.163.000	1.581.989.456.000	1.579.424.255.626
137	LAMPUNG	Kab. Lampung Utara	841.096.240.000	1.237.134.715	88.418.663.000	19.663.181.000	3.000.000.000		23.671.875.000	978.242.791.000	977.087.093.715
138	LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	1.052.928.434.000	5.292.899.801	116.042.978.000	51.227.109.000	-		33.546.693.000	1.260.714.627.000	1.259.038.113.801

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
139	LAMPUNG	Kab. Tanggamus	717.150.846.000	4.088.342.025	78.936.084.000	16.875.817.000	600.000.000		29.196.344.000	847.869.994.000	846.847.433.025
140	LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang	543.385.961.000	3.705.927.752	66.220.417.000	12.256.516.000	800.000.000		15.874.183.000	646.087.274.000	642.243.004.752
141	LAMPUNG	Kab. Way Kanan	572.666.373.000	7.789.058.798	69.843.293.000	26.797.678.000	1.200.000.000		19.309.927.000	699.109.821.000	697.606.329.798
142	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	1.045.615.721.000	4.765.516.274	78.854.278.000	24.670.245.000	25.200.000.000		27.066.045.000	1.208.375.702.000	1.206.171.805.274
143	LAMPUNG	Kota Metro	417.450.881.000	7.233.406.178	35.165.166.000	8.614.914.000	4.400.000.000		8.164.327.000	482.716.136.000	481.028.694.178
144	LAMPUNG	Kab. Pesawaran	581.094.418.000	7.526.966.000	40.397.825.000	39.960.884.000	-		18.568.066.000	687.548.159.000	687.548.159.000
145	LAMPUNG	Kab. Pringsewu	560.974.715.000	24.926.479.735	41.820.868.000	13.021.864.000	1.000.000.000		19.124.673.000	669.139.756.000	660.868.599.735
146	LAMPUNG	Kab. Mesuji	379.982.742.000	5.438.296.776	47.057.520.000	8.626.561.000	-		11.724.836.000	454.895.393.000	452.829.955.776
147	LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang Barat	408.756.547.000	2.999.687.119	47.918.135.000	9.434.520.000	600.000.000		11.956.553.000	484.775.607.000	481.665.442.119
148	LAMPUNG	Kab. Pesisir Barat	339.914.455.000	17.208.427.581	43.593.625.000	25.444.598.000	400.000.000		10.266.879.000	443.733.725.000	436.827.984.581
149	DKI JAKARTA	Provinsi DKI Jakarta	184.807.802.000	57.326.109.556	12.902.299.000	7.733.491.997	53.197.094.000		-	348.572.105.000	315.966.796.553
150	JAWA BARAT	Provinsi Jawa Barat	3.477.145.032.000	87.006.472.469	317.639.943.000	106.920.266.000	-		-	3.996.117.553.000	3.988.711.713.469
151	JAWA BARAT	Kab. Bandung	2.217.499.319.000	27.877.651.000	211.869.127.000	121.130.820.000	2.000.000.000		-	2.580.376.917.000	2.580.376.917.000
152	JAWA BARAT	Kab. Bekasi	1.072.345.215.000	187.690.933.000	196.385.706.000	70.185.039.000	1.600.000.000		-	1.528.206.893.000	1.528.206.893.000
153	JAWA BARAT	Kab. Bogor	2.175.087.049.000	81.101.936.869	227.633.521.000	187.175.145.000	3.800.000.000		-	2.677.816.527.000	2.674.797.651.869
154	JAWA BARAT	Kab. Ciamis	1.085.823.581.000	2.942.253.041	39.271.702.000	57.656.271.000	1.400.000.000		45.165.925.000	1.232.802.185.000	1.232.259.732.041
155	JAWA BARAT	Kab. Cianjur	1.370.071.512.000	89.812.500.000	241.281.517.000	170.810.703.000	1.200.000.000		61.826.506.000	1.935.002.738.000	1.935.002.738.000
156	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	1.457.034.908.000	32.637.801.786	197.404.705.000	86.066.371.000	2.400.000.000		-	1.790.297.991.000	1.775.543.785.786
157	JAWA BARAT	Kab. Garut	1.638.037.565.000	37.170.202.000	180.840.435.000	186.762.578.000	4.200.000.000		80.225.450.000	2.127.236.230.000	2.127.236.230.000
158	JAWA BARAT	Kab. Indramayu	1.203.389.612.000	14.139.178.664	175.065.779.000	107.836.881.000	1.600.000.000		13.010.749.000	1.523.414.224.000	1.515.042.199.664
159	JAWA BARAT	Kab. Karawang	1.371.586.763.000	12.372.731.564	125.736.464.000	71.767.247.000	2.400.000.000		-	1.585.847.464.000	1.583.863.205.564
160	JAWA BARAT	Kab. Kuningan	1.123.611.626.000	12.013.046.870	46.865.106.000	28.134.985.000	3.000.000.000		-	1.215.202.072.000	1.213.624.763.870
161	JAWA BARAT	Kab. Majalengka	1.075.787.680.000	11.078.722.398	90.849.377.000	58.267.363.000	2.600.000.000		56.171.945.000	1.295.292.053.000	1.294.755.087.398
162	JAWA BARAT	Kab. Purwakarta	723.541.130.000	9.272.458.080	70.625.005.000	81.728.484.000	1.800.000.000		-	890.123.405.000	886.967.077.080
163	JAWA BARAT	Kab. Subang	1.171.962.077.000	25.322.200.000	106.455.321.000	62.364.996.000	1.600.000.000		48.108.492.000	1.415.813.086.000	1.415.813.086.000
164	JAWA BARAT	Kab. Sukabumi	1.604.898.347.000	26.646.104.315	150.238.154.000	88.359.335.000	1.000.000.000		51.766.156.000	1.922.908.380.000	1.922.908.096.315
165	JAWA BARAT	Kab. Sumedang	1.044.094.966.000	8.419.309.203	44.432.626.000	53.805.587.000	1.400.000.000		-	1.153.025.729.000	1.152.152.488.203
166	JAWA BARAT	Kab. Tasikmalaya	1.312.463.220.000	5.807.149.888	115.537.260.000	111.609.487.000	-		60.567.351.000	1.605.985.162.000	1.605.984.467.888
167	JAWA BARAT	Kota Bandung	1.626.378.687.000	16.260.148.650	69.095.225.000	88.061.511.000	30.200.000.000		-	1.832.088.210.000	1.829.995.571.650
168	JAWA BARAT	Kota Bekasi	1.258.994.483.000	156.486.549.000	50.496.424.000	-	11.200.000.000		-	1.477.177.456.000	1.477.177.456.000
169	JAWA BARAT	Kota Bogor	756.729.494.000	5.645.224.000	70.049.238.000	43.485.470.000	13.600.000.000		-	889.509.426.000	889.509.426.000
170	JAWA BARAT	Kota Cirebon	559.248.842.000	18.399.250.000	27.031.794.000	13.963.712.000	4.400.000.000		-	623.043.598.000	623.043.598.000
171	JAWA BARAT	Kota Depok	1.027.277.414.000	8.920.848.000	83.305.373.000	25.805.836.000	12.499.930.000		-	1.157.909.471.000	1.157.809.401.000
172	JAWA BARAT	Kota Sukabumi	441.972.887.000	3.467.688.718	43.339.132.000	24.571.354.000	6.600.000.000		9.985.196.000	529.953.275.000	529.936.257.718
173	JAWA BARAT	Kota Tasikmalaya	669.157.104.000	2.936.446.000	61.658.441.000	56.863.630.000	13.800.000.000		20.664.134.000	825.079.755.000	825.079.755.000
174	JAWA BARAT	Kota Cimahi	514.675.717.000	22.538.996.488	23.419.523.000	29.642.687.000	3.000.000.000		-	602.555.620.000	593.276.923.488
175	JAWA BARAT	Kota Banjar	322.257.818.000	24.638.624.683	28.935.741.000	17.541.743.000	1.800.000.000		8.675.465.000	407.850.407.000	403.849.391.683
176	JAWA BARAT	Kab. Bandung Barat	1.095.278.699.000	9.435.674.631	101.242.198.000	95.079.440.000	-		-	1.301.427.209.000	1.301.036.011.631
177	JAWA BARAT	Kab. Pangandaran	494.982.221.000	8.130.982.000	35.218.127.000	25.479.977.000	-		-	563.811.307.000	563.811.307.000
178	JAWA TENGAH	Provinsi Jawa Tengah	3.642.612.929.000	97.130.383.000	185.898.217.000	53.530.243.000	-		-	3.979.171.772.000	3.979.171.772.000
179	JAWA TENGAH	Kab. Banjarnegara	873.295.064.000	15.304.890.906	31.824.079.000	23.235.975.000	2.400.000.000		38.118.855.000	986.994.446.000	984.178.863.906
180	JAWA TENGAH	Kab. Banyumas	1.276.854.777.000	15.163.546.299	100.406.001.000	34.985.875.000	6.000.000.000		60.875.028.000	1.504.508.929.000	1.494.285.227.299
181	JAWA TENGAH	Kab. Batang	787.374.210.000	7.821.702.596	30.541.313.000	20.504.405.000	1.800.000.000		32.279.197.000	882.209.840.000	880.320.827.596
182	JAWA TENGAH	Kab. Blora	867.417.170.000	39.074.759.719	34.340.751.000	23.337.164.000	4.800.000.000		40.730.668.000	1.034.326.186.000	1.009.700.512.719
183	JAWA TENGAH	Kab. Boyolali	939.537.820.000	25.547.814.697	33.044.329.000	25.663.926.000	1.200.000.000		33.020.802.000	1.061.998.602.000	1.058.014.691.697
184	JAWA TENGAH	Kab. Brebes	1.349.199.800.000	9.398.706.564	106.295.883.000	76.199.275.000	1.000.000.000		59.487.366.000	1.603.333.384.000	1.601.581.030.564

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
185	JAWA TENGAH	Kab. Cilacap	1.360.492.467.000	20.429.147.399	51.217.720.000	36.459.720.000	3.000.000.000		62.221.049.000	1.548.238.020.000	1.533.820.103.399
186	JAWA TENGAH	Kab. Demak	894.517.558.000	15.007.469.000	33.739.561.000	21.201.369.200	1.200.000.000		36.886.267.000	1.004.375.982.000	1.002.552.224.200
187	JAWA TENGAH	Kab. Grobogan	1.151.335.407.000	9.174.015.879	44.596.000.000	30.207.007.000	1.400.000.000		50.821.231.000	1.298.106.315.000	1.287.533.660.879
188	JAWA TENGAH	Kab. Jepara	982.597.625.000	14.198.743.463	36.805.087.000	26.375.042.000	2.200.000.000		38.958.631.000	1.115.557.440.000	1.101.135.128.463
189	JAWA TENGAH	Kab. Karanganyar	899.311.760.000	4.579.831.857	68.909.169.000	23.319.761.000	3.000.000.000		36.970.624.000	1.037.439.961.000	1.036.091.145.857
190	JAWA TENGAH	Kab. Kebumen	1.135.281.360.000	15.146.857.000	88.612.618.000	30.807.786.000	2.200.000.000		50.250.967.000	1.322.299.588.000	1.322.299.588.000
191	JAWA TENGAH	Kab. Kendal	867.294.633.000	19.552.928.969	76.230.347.000	23.838.803.000	4.000.000.000		40.866.806.000	1.066.907.955.000	1.031.783.517.969
192	JAWA TENGAH	Kab. Klaten	1.193.052.951.000	7.273.034.136	43.756.309.000	-	2.000.000.000		44.553.695.000	1.295.094.800.000	1.290.635.989.136
193	JAWA TENGAH	Kab. Kudus	764.090.268.000	9.374.139.238	26.393.951.000	20.578.606.000	1.800.000.000		24.370.127.000	853.494.915.000	846.607.091.238
194	JAWA TENGAH	Kab. Magelang	979.404.019.000	12.618.199.335	33.384.975.000	53.437.929.000	1.000.000.000		34.958.430.000	1.115.543.394.000	1.114.803.552.335
195	JAWA TENGAH	Kab. Pati	1.132.175.248.000	11.813.492.655	39.576.108.000	30.943.103.000	1.000.000.000		45.684.814.000	1.274.445.928.000	1.261.192.765.655
196	JAWA TENGAH	Kab. Pekalongan	852.836.811.000	7.868.564.437	69.284.981.000	22.891.468.000	2.600.000.000		32.655.310.000	989.491.426.000	988.137.134.437
197	JAWA TENGAH	Kab. Pemalang	1.095.337.369.000	19.154.325.549	96.595.423.000	61.669.631.000	2.200.000.000		52.176.338.000	1.332.232.318.000	1.327.133.086.549
198	JAWA TENGAH	Kab. Purbalingga	830.047.273.000	8.657.338.799	28.450.712.000	21.876.530.000	3.000.000.000		36.188.360.000	930.946.249.000	928.220.213.799
199	JAWA TENGAH	Kab. Purworejo	924.627.985.000	17.910.601.256	35.629.377.000	23.724.021.000	5.000.000.000		34.511.188.000	1.045.794.692.000	1.041.403.172.256
200	JAWA TENGAH	Kab. Rembang	717.688.291.000	45.346.808.840	30.792.859.000	18.611.230.000	1.400.000.000		23.810.558.000	847.184.740.000	837.649.746.840
201	JAWA TENGAH	Kab. Semarang	905.872.925.000	24.021.243.000	34.064.729.000	23.960.999.000	5.400.000.000		35.168.352.000	1.028.488.248.000	1.028.488.248.000
202	JAWA TENGAH	Kab. Sragen	974.508.866.000	8.883.678.000	73.216.887.000	25.175.193.000	2.400.000.000		35.909.865.000	1.120.094.489.000	1.120.094.489.000
203	JAWA TENGAH	Kab. Sukoharjo	880.891.279.000	11.282.654.532	30.254.869.000	-	3.400.000.000		31.645.196.000	959.061.526.000	957.473.998.532
204	JAWA TENGAH	Kab. Tegal	1.119.935.912.000	17.127.041.105	89.103.691.000	30.820.434.000	1.200.000.000		45.488.911.000	1.305.134.049.000	1.303.675.989.105
205	JAWA TENGAH	Kab. Temanggung	765.015.809.000	8.149.071.897	27.931.589.000	20.029.569.000	4.600.000.000		31.431.364.000	857.696.866.000	857.157.402.897
206	JAWA TENGAH	Kab. Wonogiri	1.062.553.948.000	8.425.625.289	36.121.866.000	27.386.950.000	8.600.000.000		48.139.228.000	1.195.346.935.000	1.191.227.617.289
207	JAWA TENGAH	Kab. Wonosobo	778.073.760.000	10.082.417.000	29.741.449.000	19.996.517.000	5.800.000.000		32.011.344.000	875.705.487.000	875.705.487.000
208	JAWA TENGAH	Kota Magelang	427.366.116.000	4.557.800.862	22.485.071.000	9.171.937.000	3.400.000.000		-	467.069.399.000	466.980.924.862
209	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	446.618.816.000	3.141.414.265	17.821.109.000	11.716.394.000	5.400.000.000		9.241.158.000	494.282.183.000	493.938.891.265
210	JAWA TENGAH	Kota Salatiga	458.135.299.000	2.086.269.939	17.772.974.000	-	4.600.000.000		8.521.894.000	491.120.991.000	491.116.436.939
211	JAWA TENGAH	Kota Semarang	1.165.539.019.000	49.324.858.000	50.006.725.000	-	35.400.000.000		-	1.300.270.602.000	1.300.270.602.000
212	JAWA TENGAH	Kota Surakarta	824.726.366.000	11.725.371.511	39.654.389.000	-	10.800.000.000		19.114.738.000	906.515.197.000	906.020.864.511
213	JAWA TENGAH	Kota Tegal	453.401.836.000	21.557.672.686	19.650.681.000	-	5.400.000.000		2.753.394.000	511.481.041.000	502.763.583.686
214	DI JOGJAKARTA	Provinsi DI Yogyakarta	1.204.880.401.000	48.637.209.000	77.288.206.000	15.234.079.000	-		-	1.346.039.895.000	1.346.039.895.000
215	DI JOGJAKARTA	Kab. Bantul	936.108.412.000	11.634.224.154	36.623.753.000	22.127.169.000	-		30.744.841.000	1.041.540.899.000	1.037.238.399.154
216	DI JOGJAKARTA	Kab. Gunung Kidul	895.741.934.000	8.793.224.900	30.731.949.000	21.344.186.000	-		41.279.698.000	999.528.655.000	997.890.991.900
217	DI JOGJAKARTA	Kab. Kulon Progo	673.611.564.000	3.248.738.486	25.693.019.000	15.327.586.000	200.000.000		21.785.924.000	741.380.525.000	739.866.831.486
218	DI JOGJAKARTA	Kab. Sleman	959.053.078.000	11.835.793.470	41.304.914.000	23.677.905.000	-		31.165.912.000	1.068.885.089.000	1.067.037.602.470
219	DI JOGJAKARTA	Kota Yogyakarta	633.270.540.000	3.252.393.000	30.609.126.000	15.076.195.000	9.000.000.000		-	691.208.254.000	691.208.254.000
220	JAWA TIMUR	Provinsi Jawa Timur	3.874.696.706.000	60.446.772.683	320.640.730.000	59.026.467.000	-		-	4.331.863.773.000	4.314.810.675.683
221	JAWA TIMUR	Kab. Bangkalan	829.991.895.000	12.514.128.245	129.263.528.000	46.113.213.000	1.600.000.000		34.566.999.000	1.056.171.402.000	1.054.049.763.245
222	JAWA TIMUR	Kab. Banyuwangi	1.310.809.086.000	14.201.082.035	44.588.541.000	67.413.773.000	5.600.000.000		45.801.992.000	1.488.477.457.000	1.488.414.474.035
223	JAWA TIMUR	Kab. Blitar	1.089.816.571.000	21.293.527.678	34.254.491.000	28.580.297.000	5.600.000.000		47.214.466.000	1.231.670.817.000	1.226.759.352.678
224	JAWA TIMUR	Kab. Bojonegoro	818.986.442.000	78.754.243.812	31.814.622.000	37.379.342.000	2.200.000.000		46.522.247.000	1.042.311.170.000	1.015.656.896.812
225	JAWA TIMUR	Kab. Bondowoso	739.120.385.000	6.657.633.518	58.990.514.000	58.064.485.000	2.000.000.000		33.010.027.000	899.316.393.000	897.843.044.518
226	JAWA TIMUR	Kab. Gresik	896.467.938.000	8.244.279.349	34.734.009.000	23.940.362.000	5.200.000.000		32.210.588.000	1.005.910.938.000	1.000.797.176.349
227	JAWA TIMUR	Kab. Jember	1.571.441.711.000	42.039.400.458	118.697.849.000	87.695.129.000	4.400.000.000		54.390.142.000	1.883.087.583.000	1.878.664.231.458
228	JAWA TIMUR	Kab. Jombang	988.488.553.000	8.381.881.000	67.053.746.000	26.597.657.000	800.000.000		34.121.280.000	1.125.443.117.000	1.125.443.117.000
229	JAWA TIMUR	Kab. Kediri	1.170.188.594.000	18.342.105.923	41.771.948.000	30.652.610.000	200.000.000		37.457.305.000	1.300.017.127.000	1.298.612.562.923
230	JAWA TIMUR	Kab. Lamongan	1.092.349.327.000	40.295.147.775	39.766.415.000	65.689.324.000	2.400.000.000		46.028.958.000	1.316.880.638.000	1.286.529.171.775

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
231	JAWA TIMUR	Kab. Lumajang	836.570.285.000	14.873.826.238	62.428.437.000	46.293.016.000	1.400.000.000		-	961.861.827.000	961.565.564.238
232	JAWA TIMUR	Kab. Madiun	831.753.185.000	8.099.100.520	24.178.306.000	21.059.920.000	1.600.000.000		25.187.406.000	916.370.223.000	911.877.917.520
233	JAWA TIMUR	Kab. Magetan	881.637.994.000	23.231.376.000	28.170.215.000	23.726.561.000	5.600.000.000		28.603.813.000	990.969.959.000	990.969.959.000
234	JAWA TIMUR	Kab. Malang	1.621.992.243.000	112.251.392.299	66.355.212.000	92.881.638.000	2.400.000.000		65.852.374.000	1.964.300.220.000	1.961.732.859.299
235	JAWA TIMUR	Kab. Mojokerto	914.040.138.000	9.919.798.000	31.587.801.000	23.087.377.000	1.000.000.000		32.316.179.000	1.011.951.293.000	1.011.951.293.000
236	JAWA TIMUR	Kab. Nganjuk	1.019.243.279.000	3.615.010.345	70.841.006.000	25.749.259.000	4.000.000.000		45.248.205.000	1.169.356.322.000	1.168.696.759.345
237	JAWA TIMUR	Kab. Ngawi	1.004.084.444.000	5.141.439.557	31.236.114.000	26.824.293.000	800.000.000		30.150.655.000	1.103.317.311.000	1.098.236.945.557
238	JAWA TIMUR	Kab. Pacitan	731.322.470.000	7.155.082.015	21.775.820.000	16.993.120.000	1.000.000.000		28.586.372.000	806.833.046.000	806.832.864.015
239	JAWA TIMUR	Kab. Pamekasan	737.151.539.000	6.956.256.486	57.894.184.000	60.377.737.000	2.200.000.000		29.456.689.000	894.792.966.000	894.036.405.486
240	JAWA TIMUR	Kab. Pasuruan	1.055.829.834.000	35.374.228.114	87.049.545.000	60.673.801.000	4.800.000.000		51.895.297.000	1.346.065.180.000	1.295.622.705.114
241	JAWA TIMUR	Kab. Ponorogo	1.017.568.016.000	9.291.225.296	30.061.146.000	27.454.131.000	5.200.000.000		37.544.277.000	1.133.880.451.000	1.127.118.795.296
242	JAWA TIMUR	Kab. Probolinggo	888.928.761.000	992.994.526	68.297.703.000	76.275.102.000	1.000.000.000		40.232.088.000	1.075.732.603.000	1.075.726.648.526
243	JAWA TIMUR	Kab. Sampang	686.217.588.000	3.275.624.000	95.088.559.000	59.268.959.000	1.200.000.000		35.287.418.000	880.338.148.000	880.338.148.000
244	JAWA TIMUR	Kab. Sidoarjo	1.202.653.783.000	20.779.744.350	51.146.364.000	30.987.187.000	5.600.000.000		-	1.317.451.887.000	1.311.167.078.350
245	JAWA TIMUR	Kab. Situbondo	672.130.000.000	10.570.276.000	52.419.123.000	53.173.353.000	800.000.000		27.352.953.000	816.445.705.000	816.445.705.000
246	JAWA TIMUR	Kab. Sumenep	974.043.570.000	8.018.999.755	94.226.003.000	92.020.478.000	800.000.000		34.091.136.000	1.203.869.722.000	1.203.200.186.755
247	JAWA TIMUR	Kab. Trenggalek	807.184.182.000	33.962.561.749	26.787.071.000	21.898.477.000	1.000.000.000		27.350.395.000	927.616.335.000	918.182.686.749
248	JAWA TIMUR	Kab. Tuban	973.210.527.000	13.480.375.394	34.595.240.000	54.246.229.000	3.400.000.000		37.669.787.000	1.121.126.099.000	1.116.602.158.394
249	JAWA TIMUR	Kab. Tulungagung	1.086.646.220.000	11.761.886.349	35.617.726.000	25.992.558.000	2.800.000.000		40.744.746.000	1.203.904.797.000	1.203.563.136.349
250	JAWA TIMUR	Kota Blitar	421.413.834.000	3.661.449.842	17.617.904.000	9.098.559.000	4.200.000.000		6.244.711.000	463.244.515.000	462.236.457.842
251	JAWA TIMUR	Kota Kediri	576.851.906.000	4.328.958.992	25.974.865.000	13.651.883.000	9.200.000.000		9.661.253.000	639.962.951.000	639.668.865.992
252	JAWA TIMUR	Kota Madiun	490.928.793.000	5.134.880.633	17.466.570.000	10.421.000.000	5.400.000.000		-	530.628.223.000	529.351.243.633
253	JAWA TIMUR	Kota Malang	737.312.875.000	50.587.297.151	32.865.490.000	19.162.352.000	11.400.000.000		18.324.410.000	888.740.670.000	869.652.424.151
254	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	392.063.585.000	2.935.046.800	18.629.064.000	9.096.763.000	3.600.000.000		5.961.896.000	433.091.560.000	432.286.354.800
255	JAWA TIMUR	Kota Pasuruan	412.722.811.000	2.265.546.804	20.136.519.000	20.927.278.000	6.800.000.000		7.532.481.000	470.628.078.000	470.384.635.804
256	JAWA TIMUR	Kota Probolinggo	439.042.741.000	2.440.701.716	18.494.846.000	21.937.778.000	5.800.000.000		8.695.306.000	496.781.667.000	496.411.372.716
257	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	1.290.899.899.000	48.994.972.000	58.283.528.000	35.539.203.000	30.600.000.000		-	1.464.317.602.000	1.464.317.602.000
258	JAWA TIMUR	Kota Batu	469.214.950.000	4.646.275.000	18.395.374.000	11.454.562.000	1.000.000.000		7.380.865.000	512.092.026.000	512.092.026.000
259	KALIMANTAN BARAT	Provinsi Kalimantan Barat	1.627.679.337.000	30.074.933.681	198.456.477.000	80.782.801.000	-		53.917.918.000	1.996.124.993.000	1.990.911.466.681
260	KALIMANTAN BARAT	Kab. Bengkayang	531.446.627.000	19.564.243.884	48.054.378.000	27.443.687.000	400.000.000		16.336.208.000	666.879.737.000	643.245.143.884
261	KALIMANTAN BARAT	Kab. Landak	604.764.014.000	32.139.624.667	74.657.255.000	32.775.363.000	-		13.979.741.000	770.223.062.000	758.315.997.667
262	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kapuas Hulu	741.508.403.000	38.648.620.239	89.248.839.000	59.071.136.000	800.000.000		16.775.065.000	960.649.757.000	946.052.063.239
263	KALIMANTAN BARAT	Kab. Ketapang	933.292.789.000	10.744.725.930	108.238.598.000	98.602.572.000	900.000.000		26.414.888.000	1.183.449.241.000	1.178.193.572.930
264	KALIMANTAN BARAT	Kab. Mempawah	491.666.490.000	15.633.898.386	48.437.223.000	41.505.478.000	1.400.000.000		-	601.222.590.000	598.643.089.386
265	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sambas	934.425.062.000	3.577.470.201	104.351.347.000	48.049.754.000	-		-	1.093.934.964.000	1.090.403.633.201
266	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sanggau	689.327.196.000	36.764.434.083	86.665.716.000	61.296.907.000	1.200.000.000		-	919.288.545.000	875.254.253.083
267	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sintang	779.310.876.000	19.385.768.099	94.292.766.000	59.980.658.000	3.200.000.000		-	959.202.578.000	956.170.068.099
268	KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	747.409.605.000	19.212.348.000	53.402.162.000	62.014.499.000	5.800.000.000		-	887.838.614.000	887.838.614.000
269	KALIMANTAN BARAT	Kota Singkawang	444.038.571.000	5.756.697.954	48.912.827.000	8.486.111.000	5.200.000.000		-	518.085.054.000	512.394.206.954
270	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sekadau	386.350.767.000	19.463.691.046	52.072.544.000	45.145.670.000	-		12.010.410.000	536.791.852.000	515.043.082.046
271	KALIMANTAN BARAT	Kab. Melawi	451.471.467.000	12.154.835.980	54.890.680.000	46.633.929.000	-		-	565.410.923.000	565.150.911.980
272	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kayong Utara	359.303.427.000	17.434.867.910	60.213.145.000	41.772.935.000	-		9.143.908.000	491.787.696.000	487.868.282.910
273	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kubu Raya	785.968.322.000	14.299.718.341	85.061.097.000	90.165.705.000	-		-	976.643.989.000	975.494.842.341
274	KALIMANTAN TENGAH	Provinsi Kalimantan Tengah	1.222.137.933.000	58.134.748.810	145.163.235.000	82.801.570.000	-		19.443.668.000	1.542.418.586.000	1.527.681.154.810
275	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Selatan	372.794.572.000	27.211.934.552	39.651.364.000	42.628.515.000	1.400.000.000		-	515.686.582.000	483.686.385.552
276	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Utara	419.155.966.000	-	47.287.009.000	34.244.090.000	2.000.000.000		-	537.812.906.000	502.687.065.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
277	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kapuas	652.652.817.000	19.483.765.546	68.185.727.000	70.183.576.000	3.400.000.000		-	820.255.410.000	813.905.885.546
278	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Barat	556.482.781.000	28.065.800.574	43.643.551.000	27.131.900.000	2.600.000.000		-	669.839.430.000	657.924.032.574
279	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Timur	680.173.071.000	15.989.057.429	89.471.915.000	69.305.431.000	3.400.000.000		-	860.331.502.000	858.339.474.429
280	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya	573.892.130.000	2.307.381.169	34.686.909.000	43.806.898.000	6.000.000.000		-	660.732.306.000	660.693.318.169
281	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Katingan	502.854.873.000	33.442.744.029	65.241.836.000	41.515.962.000	1.400.000.000		-	665.141.777.000	644.455.415.029
282	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Seruyan	475.352.627.000	9.756.688.195	40.185.455.000	31.596.432.000	600.000.000		-	557.491.692.000	557.491.202.195
283	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Sukamara	342.553.040.000	4.707.383.910	22.521.555.000	14.243.595.000	600.000.000		-	385.122.018.000	384.625.573.910
284	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Lamandau	350.894.159.000	17.158.246.420	26.361.836.000	26.681.731.000	600.000.000		-	427.192.964.000	421.695.972.420
285	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Gunung Mas	399.657.114.000	9.049.259.160	56.693.563.000	40.767.755.000	2.600.000.000		-	525.714.342.000	508.767.691.160
286	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Pulang Pisau	417.973.380.000	16.726.591.000	29.955.414.000	40.621.398.000	800.000.000		12.645.023.000	518.721.806.000	518.721.806.000
287	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Murung Raya	470.858.830.000	15.316.530.760	60.801.488.000	45.572.962.000	1.800.000.000		-	600.870.773.000	594.349.810.760
288	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Timur	370.539.605.000	39.111.694.368	25.689.534.000	18.930.262.000	600.000.000		-	468.029.997.000	454.871.095.368
289	KALIMANTAN SELATAN	Provinsi Kalimantan Selatan	1.038.653.672.000	34.684.444.000	104.887.303.000	36.190.202.000	-		-	1.214.415.621.000	1.214.415.621.000
290	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Banjar	698.817.994.000	21.524.763.476	43.381.203.000	81.453.012.000	2.600.000.000		-	853.339.993.000	847.776.972.476
291	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Barito Kuala	508.661.644.000	7.431.603.366	35.585.553.000	40.522.087.000	1.200.000.000		-	601.720.157.000	593.400.887.366
292	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Selatan	436.012.016.000	13.758.827.581	25.834.168.000	23.077.281.000	800.000.000		-	510.139.641.000	499.482.292.581
293	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Tengah	503.340.366.000	4.059.379.355	13.017.546.000	25.177.092.000	1.600.000.000		-	551.962.927.000	547.194.383.355
294	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Utara	447.754.886.000	13.938.518.201	21.121.728.000	24.946.235.000	1.000.000.000		-	508.761.675.000	508.761.367.201
295	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Kotabaru	490.061.095.000	5.807.844.000	57.923.536.000	51.495.075.000	798.962.000		-	606.087.550.000	606.086.512.000
296	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tabalong	427.375.782.000	18.817.415.000	28.752.971.000	10.318.920.000	2.000.000.000		-	487.265.088.000	487.265.088.000
297	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah Laut	472.731.353.000	17.562.920.000	31.591.763.000	23.990.589.000	1.000.000.000		6.806.000	546.883.431.000	546.883.431.000
298	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tapin	405.301.512.000	9.292.550.000	19.212.105.000	20.112.300.000	900.000.000		-	462.122.504.000	454.818.467.000
299	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarbaru	424.525.431.000	3.456.351.230	29.778.364.000	10.221.626.000	4.000.000.000		-	472.010.127.000	471.981.772.230
300	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarmasin	754.263.921.000	9.664.252.000	48.194.553.000	61.542.729.000	10.400.000.000		-	884.065.455.000	884.065.455.000
301	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Balangan	327.535.755.000	12.312.629.000	20.608.386.000	15.796.949.000	600.000.000		11.995.328.000	388.849.047.000	388.849.047.000
302	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah Bumbu	385.739.568.000	44.167.703.654	46.210.009.000	9.837.111.000	1.000.000.000		-	490.699.078.000	486.954.391.654
303	KALIMANTAN TIMUR	Provinsi Kalimantan Timur	776.415.352.000	115.264.590.403	73.184.031.000	8.639.089.000	-		-	1.049.286.349.000	973.503.062.403
304	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Berau	446.423.020.000	36.984.350.000	56.007.816.000	21.639.743.000	-		-	563.054.929.000	561.054.929.000
305	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Kartanegara	416.290.621.000	102.114.279.330	31.114.233.500	25.869.353.000	8.800.000.000		33.074.032.000	650.646.756.000	617.262.518.830
306	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Barat	443.565.022.000	24.249.175.747	36.460.975.000	14.221.402.000	800.000.000		-	538.866.692.000	519.296.574.747
307	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Timur	437.936.019.000	62.946.740.085	68.840.165.000	38.822.068.000	400.000.000		-	625.969.941.000	608.944.992.085
308	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Paser	309.164.117.000	63.338.023.000	26.289.562.000	17.984.801.000	999.930.000		-	417.776.503.000	417.776.433.000
309	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	541.488.560.000	46.926.633.694	39.515.180.000	14.916.485.000	6.800.000.000		-	649.647.605.000	649.646.858.694
310	KALIMANTAN TIMUR	Kota Bontang	238.165.373.000	6.316.746.077	14.372.880.000	5.855.623.000	3.000.000.000		-	272.759.317.000	267.710.622.077
311	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	762.783.147.000	41.595.093.376	55.124.963.000	41.958.567.000	11.800.000.000		-	922.775.704.000	913.261.770.376
312	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Penajam Paser Utara	224.936.227.000	13.932.083.388	19.229.462.000	6.208.099.000	4.800.000.000		-	309.813.984.000	269.105.871.388
313	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Mahakam Ulu	334.513.184.000	12.758.937.200	31.500.144.000	4.709.886.000	-		-	386.609.196.000	383.482.151.200
314	SULAWESI UTARA	Provinsi Sulawesi Utara	1.163.372.071.000	81.072.229.878	151.674.714.000	37.614.178.000	-		42.375.214.000	1.503.735.785.000	1.476.108.406.878
315	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow	485.083.172.000	12.670.135.660	64.520.990.000	26.084.707.000	400.000.000		12.342.626.000	603.020.799.000	601.101.630.660
316	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa	606.345.856.000	3.562.848.897	41.571.262.000	11.519.253.000	8.600.000.000		14.878.372.000	706.419.428.000	686.477.591.897
317	SULAWESI UTARA	Kab. Sangihe	437.159.340.000	3.963.791.088	43.710.648.000	35.539.591.000	4.400.000.000		8.547.887.000	545.898.206.000	533.321.257.088
318	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	438.467.799.000	1.334.423.251	42.220.509.000	23.337.215.000	13.800.000.000		7.012.086.000	526.696.119.000	526.172.032.251
319	SULAWESI UTARA	Kota Manado	732.279.022.000	12.443.766.262	47.139.314.000	18.985.692.000	17.400.000.000		13.688.945.000	858.160.491.000	841.936.739.262
320	SULAWESI UTARA	Kab. Kepulauan Talaud	421.449.883.000	2.440.684.346	32.680.527.000	43.690.228.000	1.100.000.000		6.706.153.000	509.700.407.000	508.067.475.346
321	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa Selatan	477.017.618.000	1.989.383.740	42.789.875.000	24.450.143.000	2.000.000.000		11.029.464.000	559.610.238.000	559.276.483.740
322	SULAWESI UTARA	Kota Tomohon	375.311.713.000	3.001.983.834	22.204.651.000	17.216.535.000	8.800.000.000		416.540.000	428.549.251.000	426.951.422.834

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
323	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa Utara	417.515.732.000	15.539.138.007	62.982.086.000	23.346.339.000	1.200.000.000		9.895.069.000	535.266.680.000	530.478.364.007
324	SULAWESI UTARA	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	315.517.808.000	3.941.245.845	41.072.739.000	25.068.088.000	2.000.000.000		3.735.333.000	394.828.008.000	391.335.213.845
325	SULAWESI UTARA	Kota Kotamobagu	332.728.033.000	10.075.035.657	32.480.217.000	8.944.687.000	3.600.000.000		5.258.491.000	400.458.191.000	393.086.463.657
326	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow Utara	310.902.216.000	13.465.381.445	35.934.710.000	26.257.863.000	100.000.000		6.693.273.000	398.991.328.000	393.353.443.445
327	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa Tenggara	315.441.850.000	15.517.707.563	31.882.833.000	30.218.966.000	1.800.000.000		6.655.338.000	405.866.460.000	401.516.694.563
328	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow Timur	270.983.555.000	3.510.788.234	31.128.615.000	26.718.284.000	-		4.295.254.000	336.773.034.000	336.636.496.234
329	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	275.341.389.000	3.309.429.320	40.566.825.000	27.962.189.000	-		5.349.415.000	355.306.439.000	352.529.247.320
330	SULAWESI TENGAH	Provinsi Sulawesi Tengah	1.245.594.960.000	57.896.413.918	158.979.905.000	62.278.343.000	-		52.801.598.000	1.643.478.040.000	1.577.551.219.918
331	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai	775.257.834.000	21.764.317.637	83.155.547.000	19.434.356.000	9.200.000.000		23.373.607.000	942.364.486.000	932.185.661.637
332	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai Kepulauan	357.265.993.000	9.549.236.559	40.580.516.000	34.825.504.000	600.000.000		11.085.861.000	455.694.785.000	453.907.110.559
333	SULAWESI TENGAH	Kab. Buol	392.496.117.000	19.103.629.453	60.043.849.000	29.354.755.000	1.400.000.000		11.640.954.000	516.076.227.000	514.039.304.453
334	SULAWESI TENGAH	Kab. Tolitoli	490.084.624.000	8.367.685.117	53.281.308.000	52.781.980.000	1.200.000.000		12.090.716.000	618.498.865.000	617.806.313.117
335	SULAWESI TENGAH	Kab. Donggala	514.464.304.000	18.620.354.006	74.500.124.000	61.572.723.000	1.800.000.000		21.872.881.000	755.752.162.000	692.830.386.006
336	SULAWESI TENGAH	Kab. Morowali	402.870.475.000	18.909.056.487	53.025.406.000	20.226.607.000	1.400.000.000		12.173.700.000	517.573.839.000	508.605.244.487
337	SULAWESI TENGAH	Kab. Poso	565.081.001.000	43.517.967.043	57.956.038.000	30.585.735.000	5.600.000.000		16.638.818.000	723.643.886.000	719.379.559.043
338	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	574.632.006.000	34.245.785.933	66.404.971.000	15.834.097.000	9.200.000.000		18.480.808.000	751.792.776.000	718.797.667.933
339	SULAWESI TENGAH	Kab. Parigi Moutong	555.403.952.000	92.453.318.877	120.823.754.000	70.595.058.000	1.000.000.000		21.367.709.000	879.901.919.000	861.643.791.877
340	SULAWESI TENGAH	Kab. Tojo Una Una	421.561.820.000	47.918.363.279	56.292.347.000	35.832.246.000	2.400.000.000		9.945.435.000	605.924.550.000	573.950.211.279
341	SULAWESI TENGAH	Kab. Sigi	470.091.077.000	30.001.895.265	75.629.233.000	40.634.687.000	-		16.882.633.000	663.955.154.000	633.239.525.265
342	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai Laut	320.701.257.000	14.966.015.335	39.195.105.000	23.864.697.000	600.000.000		5.775.520.000	407.002.558.000	405.102.594.335
343	SULAWESI TENGAH	Kab. Morowali Utara	437.997.246.000	30.041.365.518	34.103.679.000	34.845.545.000	600.000.000		11.011.202.000	583.717.035.000	548.599.037.518
344	SULAWESI SELATAN	Provinsi Sulawesi Selatan	2.254.205.144.000	166.623.323.003	296.694.247.000	80.584.051.000	-		-	2.919.993.953.000	2.798.106.765.003
345	SULAWESI SELATAN	Kab. Bantaeng	424.054.680.000	3.609.099.250	43.677.380.000	32.979.306.000	4.200.000.000		15.380.998.000	525.380.035.000	523.901.463.250
346	SULAWESI SELATAN	Kab. Barru	458.181.500.000	-	30.072.348.000	21.833.013.000	3.000.000.000		14.542.669.000	532.995.978.000	527.629.530.000
347	SULAWESI SELATAN	Kab. Bone	1.139.992.706.000	1.161.569.000	106.948.634.000	60.652.867.000	8.800.000.000		45.385.136.000	1.362.940.912.000	1.362.940.912.000
348	SULAWESI SELATAN	Kab. Bulukumba	707.122.823.000	1.610.446.011	68.755.351.000	36.217.419.000	5.400.000.000		25.756.408.000	844.924.660.000	844.862.447.011
349	SULAWESI SELATAN	Kab. Enrekang	513.299.821.000	779.218.879	30.662.458.000	22.453.462.000	3.400.000.000		20.648.587.000	592.253.144.000	591.243.546.879
350	SULAWESI SELATAN	Kab. Gowa	946.548.707.000	-	94.337.151.000	46.930.779.000	9.200.000.000		31.226.415.000	1.128.243.052.000	1.128.243.052.000
351	SULAWESI SELATAN	Kab. Jeneponto	592.864.958.000	3.241.980.796	45.922.567.500	25.669.698.000	6.200.000.000		18.681.609.000	758.062.125.000	692.580.813.296
352	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu	620.924.431.000	12.018.764.984	63.349.212.000	47.655.724.000	4.000.000.000		22.276.118.000	780.135.904.000	770.224.249.984
353	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Utara	630.981.623.000	3.168.111.693	59.564.719.000	31.327.762.000	1.400.000.000		22.377.482.000	769.022.350.000	748.819.697.693
354	SULAWESI SELATAN	Kab. Maros	682.685.222.000	3.160.458.433	74.164.481.000	32.889.193.000	4.600.000.000		20.899.824.000	819.884.995.000	818.399.178.433
355	SULAWESI SELATAN	Kab. Pangkajene Kepulauan	638.659.603.000	2.834.228.000	77.413.927.000	66.928.554.000	7.600.000.000		23.716.163.000	817.152.475.000	817.152.475.000
356	SULAWESI SELATAN	Kota Palopo	446.881.435.000	917.220.600	48.303.649.000	22.227.024.000	4.800.000.000		9.336.232.000	538.671.478.000	532.465.560.600
357	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Timur	484.930.845.000	41.725.808.400	33.283.421.000	22.810.739.000	600.000.000		-	584.240.641.000	583.350.813.400
358	SULAWESI SELATAN	Kab. Pinrang	678.929.211.000	5.632.149.992	68.557.836.000	17.606.391.000	8.000.000.000		22.192.585.000	802.836.220.000	800.918.172.992
359	SULAWESI SELATAN	Kab. Sinjai	538.227.396.000	-	35.533.111.000	37.454.520.000	2.600.000.000		18.348.012.000	632.163.051.000	632.163.039.000
360	SULAWESI SELATAN	Kab. Kepulauan Selayar	494.221.532.000	1.858.510.000	50.767.542.000	35.201.688.000	1.400.000.000		13.613.492.000	597.062.764.000	597.062.764.000
361	SULAWESI SELATAN	Kab. Sidenreng Rappang	574.331.727.000	7.542.681.386	60.600.250.000	29.028.418.000	7.600.000.000		18.161.780.000	697.737.000.000	697.264.856.386
362	SULAWESI SELATAN	Kab. Soppeng	579.228.227.000	-	30.980.698.000	27.922.738.000	4.200.000.000		20.301.954.000	662.633.617.000	662.633.617.000
363	SULAWESI SELATAN	Kab. Takalar	544.131.321.000	910.027.612	59.599.842.000	41.765.680.000	4.800.000.000		15.570.884.000	667.261.610.000	666.777.754.612
364	SULAWESI SELATAN	Kab. Tana Toraja	494.817.485.000	8.445.105.430	56.796.739.000	24.218.497.000	9.400.000.000		15.332.591.000	616.896.969.000	609.010.417.430
365	SULAWESI SELATAN	Kab. Wajo	639.379.691.000	10.809.964.955	65.330.728.000	51.694.420.000	9.600.000.000		25.258.613.000	804.389.179.000	802.073.416.955
366	SULAWESI SELATAN	Kota Parepare	385.466.105.000	21.038.334.000	43.050.436.000	21.151.420.000	4.400.000.000		-	475.106.295.000	475.106.295.000
367	SULAWESI SELATAN	Kota Makassar	1.498.813.271.000	35.603.831.446	121.764.823.000	41.165.181.000	15.300.000.000		51.519.422.000	1.833.631.796.000	1.764.166.528.446
368	SULAWESI SELATAN	Kab. Toraja Utara	487.373.557.000	28.518.684.156	41.066.543.000	25.067.759.000	8.000.000.000		15.994.358.000	615.531.980.000	606.020.901.156

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
369	SULAWESI TENGGARA	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.298.925.500.000	84.749.385.105	104.807.007.000	32.474.930.000	-		63.430.355.000	1.735.132.845.000	1.584.387.177.105
370	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton	323.822.501.000	15.264.686.458	47.548.004.000	34.308.779.000	2.400.000.000		11.049.494.000	448.470.006.000	434.393.464.458
371	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe	538.426.882.000	32.595.458.796	68.843.094.000	46.032.965.000	11.595.848.000		21.253.924.000	743.566.241.000	718.748.171.796
372	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka	541.247.150.000	5.908.277.903	57.053.559.000	12.981.381.000	7.000.000.000		14.939.201.000	640.190.704.000	639.129.568.903
373	SULAWESI TENGGARA	Kab. Muna	562.578.647.000	8.293.052.734	49.603.035.000	39.035.263.000	5.200.000.000		22.447.646.000	688.157.141.000	687.157.643.734
374	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	624.897.437.000	11.361.256.854	73.569.735.000	16.196.754.000	13.000.000.000		20.673.090.000	759.790.084.000	759.698.272.854
375	SULAWESI TENGGARA	Kota Bau-bau	463.838.111.000	2.873.996.577	40.745.493.000	22.881.344.000	8.600.000.000		10.254.809.000	563.316.602.000	549.193.753.577
376	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe Selatan	596.924.164.000	10.147.217.443	93.211.353.000	15.341.390.000	3.000.000.000		19.797.818.000	740.145.958.000	738.421.942.443
377	SULAWESI TENGGARA	Kab. Bombana	383.860.483.000	20.954.701.000	47.959.648.000	29.535.095.000	4.400.000.000		12.464.584.000	499.174.511.000	499.174.511.000
378	SULAWESI TENGGARA	Kab. Wakatobi	370.588.586.000	4.097.331.607	44.127.663.000	38.083.936.000	5.200.000.000		10.195.224.000	472.674.419.000	472.292.740.607
379	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka Utara	449.971.160.000	2.967.132.235	29.401.459.000	21.231.686.000	1.200.000.000		9.779.345.000	514.557.266.000	514.550.782.235
380	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe Utara	329.265.818.000	8.752.762.431	52.265.135.000	22.233.040.000	2.200.000.000		6.616.790.000	433.489.021.000	421.333.545.431
381	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton Utara	303.922.811.000	16.502.154.291	42.784.322.000	30.662.878.000	2.400.000.000		7.126.293.000	414.773.955.000	403.398.458.291
382	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe Kepulauan	266.511.955.000	7.295.397.413	20.511.248.000	23.502.196.000	1.400.000.000		3.238.670.000	326.895.914.000	322.459.466.413
383	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka Timur	356.552.532.000	14.174.177.346	21.403.232.000	16.946.371.000	3.200.000.000		11.504.642.000	427.530.379.000	423.780.954.346
384	SULAWESI TENGGARA	Kab. Muna Barat	274.923.670.000	15.659.749.936	25.829.209.000	26.382.585.000	1.000.000.000		8.593.325.000	363.491.334.000	352.388.538.936
385	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton Tengah	294.145.068.000	2.571.112.067	36.551.888.000	29.412.005.000	2.000.000.000		9.511.653.000	374.756.850.000	374.191.726.067
386	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton Selatan	290.175.682.000	6.197.502.085	50.416.363.000	29.313.347.000	2.000.000.000		7.994.197.000	387.449.786.000	386.097.091.085
387	BALI	Provinsi Bali	1.226.822.935.000	91.326.598.860	83.598.041.000	-	-		2.460.364.000	1.404.208.526.000	1.404.207.938.860
388	BALI	Kab. Badung	254.752.296.000	127.679.642.000	35.338.979.000	-	3.200.000.000		-	420.970.917.000	420.970.917.000
389	BALI	Kab. Bangli	524.279.458.000	213.373.574	33.353.995.000	10.042.234.000	800.000.000		-	568.870.620.000	568.689.060.574
390	BALI	Kab. Buleleng	811.359.689.000	82.033.012.833	71.090.788.000	22.460.537.000	3.800.000.000		35.009.571.000	1.039.526.780.000	1.025.753.597.833
391	BALI	Kab. Gianyar	519.688.738.000	91.289.906.256	28.638.115.000	-	1.200.000.000		-	705.626.161.000	640.816.759.256
392	BALI	Kab. Jembrana	530.867.428.000	10.904.424.933	31.671.034.000	11.590.099.000	2.000.000.000		12.397.656.000	602.697.356.000	599.430.641.933
393	BALI	Kab. Karangasem	659.760.618.000	53.401.333.791	49.717.454.000	16.095.888.000	600.000.000		-	788.341.122.000	779.575.293.791
394	BALI	Kab. Klungkung	487.291.769.000	36.850.176.959	36.600.945.000	-	1.200.000.000		-	567.420.281.000	561.942.890.959
395	BALI	Kab. Tabanan	794.639.014.000	6.278.359.355	53.327.100.000	-	-		-	856.886.962.000	854.244.473.355
396	BALI	Kota Denpasar	541.812.529.000	85.528.624.224	66.544.131.000	14.624.339.000	3.200.000.000		-	711.709.633.000	711.709.623.224
397	NUSA TENGGARA BARAT	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.608.420.021.000	8.287.244.029	170.554.027.000	41.676.444.000	-		75.352.504.000	1.904.366.291.000	1.904.290.240.029
398	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Bima	940.742.930.000	50.802.688.000	91.191.141.000	43.150.542.000	-		35.959.161.000	1.166.032.441.000	1.161.846.462.000
399	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Dompu	528.135.785.000	33.959.690.923	78.274.440.000	37.673.610.000	1.800.000.000		16.582.724.000	696.430.831.000	696.426.249.923
400	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Barat	888.315.683.000	5.198.803.125	67.688.491.000	41.038.055.000	600.000.000		28.251.624.000	1.031.910.779.000	1.031.092.656.125
401	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Tengah	1.145.182.085.000	36.585.896.050	93.968.417.000	54.083.692.000	2.400.000.000		43.366.040.000	1.377.680.475.000	1.375.586.130.050
402	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Timur	1.344.992.741.000	34.847.064.000	112.372.149.000	62.836.777.000	3.000.000.000		51.158.475.000	1.609.207.206.000	1.609.207.206.000
403	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Sumbawa	907.818.706.000	10.685.240.773	52.691.077.000	39.633.914.000	1.600.000.000		28.559.511.000	1.053.209.345.000	1.040.988.448.773
404	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Mataram	670.359.197.000	13.543.892.000	35.229.824.000	14.951.598.000	10.000.000.000		15.992.934.000	760.077.445.000	760.077.445.000
405	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Bima	433.728.061.000	16.192.269.000	25.262.120.000	19.188.725.000	8.200.000.000		11.076.523.000	513.647.698.000	513.647.698.000
406	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Sumbawa Barat	358.635.090.000	43.731.513.910	12.714.380.000	8.739.911.000	1.400.000.000		-	450.095.172.000	425.220.894.910
407	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Utara	394.210.070.000	21.837.493.000	31.799.510.000	18.593.996.000	-		9.815.337.000	476.256.406.000	476.256.406.000
408	NUSA TENGGARA TIMUR	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.542.866.521.000	146.233.190.528	260.918.641.000	41.141.397.000	-		-	2.029.253.589.000	1.991.159.749.528
409	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Alor	498.559.640.000	31.123.601.042	73.118.023.000	35.616.476.000	3.400.000.000		-	659.628.709.000	641.817.740.042
410	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Belu	445.372.314.000	12.163.173.800	60.978.856.000	10.307.090.000	2.400.000.000		11.633.364.000	557.012.773.000	542.854.797.800
411	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ende	563.011.308.000	8.710.267.490	71.332.770.000	25.708.175.000	4.600.000.000		-	692.529.904.000	673.362.520.490
412	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Flores Timur	592.679.555.000	32.233.383.811	52.958.374.000	13.452.555.000	4.200.000.000		-	708.103.808.000	695.523.867.811
413	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Kupang	583.787.771.000	58.333.110.880	86.500.846.000	44.552.385.000	3.400.000.000		-	788.283.601.000	776.574.112.880
414	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Lembata	409.310.456.000	17.809.011.041	34.786.016.000	18.112.702.000	1.400.000.000		-	488.606.135.000	481.418.185.041

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
415	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai	571.979.138.000	26.029.307.288	60.891.101.000	12.281.151.000	5.200.000.000		-	697.185.844.000	676.380.697.288
416	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ngada	433.818.004.000	21.911.271.501	23.291.253.000	8.804.817.000	3.200.000.000		13.805.399.000	508.590.143.000	504.830.744.501
417	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sikka	583.441.594.000	31.272.419.847	56.803.579.000	13.478.134.000	2.600.000.000		15.839.121.000	730.473.182.000	703.434.847.847
418	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Barat	308.184.804.000	19.535.587.315	48.888.391.000	14.484.815.000	2.200.000.000		-	409.000.007.000	393.293.597.315
419	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Timur	522.410.940.000	29.563.444.434	75.233.325.000	23.901.128.000	3.200.000.000		15.043.759.000	679.700.656.000	669.352.596.434
420	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Selatan	658.663.615.000	47.833.714.882	115.428.075.000	49.637.262.000	2.400.000.000		-	915.592.981.000	873.962.666.882
421	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Utara	538.740.635.000	10.983.702.991	79.533.390.000	24.731.380.000	2.200.000.000		-	670.759.919.000	656.189.107.991
422	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	657.460.173.000	66.455.977.300	36.173.289.000	15.334.494.000	10.200.000.000		-	787.259.119.000	785.623.933.300
423	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Rote Ndao	374.553.918.000	8.882.093.547	39.497.939.000	24.982.240.000	1.400.000.000		-	464.339.183.000	449.316.190.547
424	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai Barat	488.014.347.000	37.207.468.986	62.447.333.000	10.967.178.000	1.000.000.000		-	604.082.715.000	599.636.326.986
425	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Nagekeo	413.862.761.000	4.222.558.194	24.052.046.000	8.811.829.000	3.200.000.000		-	473.250.938.000	454.149.194.194
426	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Barat Daya	447.064.235.000	29.124.649.403	89.804.542.000	30.355.008.000	400.000.000		12.074.202.000	616.589.412.000	608.822.636.403
427	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Tengah	283.383.043.000	20.659.296.361	18.297.263.000	5.652.852.000	-		5.340.088.000	342.595.258.000	333.332.542.361
428	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai Timur	487.438.655.000	16.930.306.715	50.577.321.000	33.198.412.000	3.400.000.000		-	596.684.195.000	591.544.694.715
429	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sabu Raijua	291.632.558.000	1.232.570.913	45.025.517.000	26.242.376.000	1.000.000.000		6.728.166.000	373.602.233.000	371.861.187.913
430	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Malaka	376.805.334.000	8.974.001.384	57.969.855.000	26.980.754.000	-		-	486.009.500.000	470.729.944.384
431	MALUKU	Provinsi Maluku	1.314.028.852.000	7.347.614.814	190.209.112.000	65.018.221.000	-		-	1.584.180.021.000	1.576.603.799.814
432	MALUKU	Kab. Kepulauan Tanimbar	438.249.943.000	15.740.783.275	68.188.787.000	43.066.666.000	400.000.000		-	588.562.406.000	565.646.179.275
433	MALUKU	Kab. Maluku Tengah	809.301.106.000	29.017.621.084	100.117.898.000	82.607.171.000	1.200.000.000		24.769.927.000	1.083.415.657.000	1.047.013.723.084
434	MALUKU	Kab. Maluku Tenggara	374.868.933.000	5.487.088.600	47.848.072.000	34.658.557.000	200.000.000		3.804.397.000	481.010.472.000	466.867.047.600
435	MALUKU	Kab. Buru	395.458.939.000	4.630.645.578	55.192.338.000	34.400.600.000	-		-	490.627.407.000	489.682.522.578
436	MALUKU	Kota Ambon	600.439.872.000	17.963.542.632	34.224.063.000	44.168.520.000	4.000.000.000		-	732.640.525.000	700.795.997.632
437	MALUKU	Kab. Seram Bagian Barat	526.895.633.000	1.435.515.909	53.307.173.000	47.056.145.000	-		-	629.349.775.000	628.694.466.909
438	MALUKU	Kab. Seram Bagian Timur	415.980.765.000	15.394.508.636	62.931.893.000	41.228.159.000	-		-	552.293.041.000	535.535.325.636
439	MALUKU	Kab. Kepulauan Aru	430.740.364.000	45.776.926.124	72.263.581.000	44.260.482.000	400.000.000		-	595.799.838.000	593.441.353.124
440	MALUKU	Kota Tual	321.017.725.000	10.487.622.089	37.435.403.000	31.694.615.000	600.000.000		2.530.211.000	417.810.287.000	403.765.576.089
441	MALUKU	Kab. Maluku Barat Daya	379.133.589.000	23.601.082.977	58.945.629.000	33.978.366.000	200.000.000		-	521.638.197.000	495.858.666.977
442	MALUKU	Kab. Buru Selatan	330.012.092.000	5.828.678.739	42.280.803.000	28.834.166.000	-		-	424.358.437.000	406.955.739.739
443	PAPUA	Provinsi Papua	588.630.194.000	-	3.375.149.000	26.042.030.000	-		-	618.047.373.000	618.047.373.000
444	PAPUA	Kab. Biak Numfor	481.472.947.000	-	75.251.353.000	31.179.876.000	2.800.000.000		-	619.627.239.000	590.704.176.000
445	PAPUA	Kab. Jayapura	573.904.344.000	-	60.647.192.000	39.350.349.000	1.000.000.000		9.611.032.000	726.794.021.000	684.512.917.000
446	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Jayawijaya	613.290.292.000	-	34.024.762.000	31.466.645.000	400.000.000		-	738.835.831.000	679.181.699.000
447	PAPUA SELATAN	Kab. Merauke	1.019.410.368.000	-	156.421.623.000	42.651.299.000	2.200.000.000		-	1.220.683.290.000	1.220.683.290.000
448	PAPUA TENGAH	Kab. Mimika	521.983.326.000	14.322.355.800	77.915.549.000	38.402.223.000	3.800.000.000		-	683.313.559.000	656.423.453.800
449	PAPUA TENGAH	Kab. Nabire	593.909.376.000	3.353.708.856	65.122.670.000	37.781.105.000	1.800.000.000		-	711.390.408.000	701.966.859.856
450	PAPUA TENGAH	Kab. Paniai	434.367.014.000	-	110.600.618.000	35.478.935.000	500.000.000		-	588.415.980.000	580.946.567.000
451	PAPUA TENGAH	Kab. Puncak Jaya	645.161.334.000	-	22.205.219.000	71.391.716.000	600.000.000		734.820.000	754.031.915.000	740.093.089.000
452	PAPUA	Kab. Kepulauan Yapen	428.318.797.000	-	69.460.442.000	41.677.901.000	1.000.000.000		-	579.969.064.000	540.457.140.000
453	PAPUA	Kota Jayapura	641.299.121.000	10.555.474.926	52.489.381.000	30.751.699.000	5.000.000.000		-	781.764.334.000	740.095.675.926
454	PAPUA	Kab. Sarmi	500.172.015.000		71.016.662.000	38.425.219.000	400.000.000		-	613.033.975.000	610.013.896.000
455	PAPUA	Kab. Keerom	433.756.232.000	-	55.376.877.000	28.423.118.000	-		-	525.245.812.000	517.556.227.000
456	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Yahukimo	633.900.447.000	-	81.823.163.000	56.592.554.000	200.000.000		1.326.230.000	778.488.669.000	773.842.394.000
457	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Pegunungan Bintang	630.570.902.000	-	52.000.658.000	54.984.991.000	-		-	745.687.533.000	737.556.551.000
458	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Tolikara	628.471.271.000	-	32.110.551.000	63.385.677.000	800.000.000		-	731.179.359.000	724.767.499.000
459	PAPUA SELATAN	Kab. Boven Digoel	560.930.992.000	1.227.253.012	80.527.771.000	38.217.417.000	-		-	683.950.753.000	680.903.433.012
460	PAPUA SELATAN	Kab. Mappi	502.600.010.000	-	102.356.066.000	39.814.040.000	400.000.000		-	694.179.027.000	645.170.116.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
461	PAPUA SELATAN	Kab. Asmat	688.119.203.000	-	126.000.560.000	61.467.269.000	-		-	879.768.680.000	875.587.032.000
462	PAPUA	Kab. Waropen	445.935.380.000	6.793.067.246	57.544.546.000	42.254.792.000	-		-	558.047.347.000	552.527.785.246
463	PAPUA	Kab. Supiori	330.142.332.000	1.700.384.042	53.976.159.000	27.442.834.000	-		-	422.879.651.000	413.261.709.042
464	PAPUA	Kab. Mamberamo Raya	511.875.556.000	-	63.563.759.000	40.291.791.000	-		-	632.085.995.000	615.731.106.000
465	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Mamberamo Tengah	497.089.115.000	-	42.718.222.000	45.918.891.000	-		-	594.763.233.000	585.726.228.000
466	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Yalimo	505.893.844.000	-	41.336.496.000	52.603.825.000	-		-	610.288.284.000	599.834.165.000
467	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Lanny Jaya	540.765.506.000	-	59.262.629.000	53.502.759.000	200.000.000		-	655.264.165.000	653.730.894.000
468	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Nduga	498.059.365.000	-	24.167.577.000	49.019.943.000	-		464.810.000	574.499.460.000	571.711.695.000
469	PAPUA TENGAH	Kab. Dogiyai	381.867.296.000	-	57.429.117.000	36.816.951.000	-		-	493.639.114.000	476.113.364.000
470	PAPUA TENGAH	Kab. Puncak	688.277.183.000	-	10.916.004.000	73.562.510.000	-		1.416.254.000	777.703.120.000	774.171.951.000
471	PAPUA TENGAH	Kab. Intan Jaya	568.500.874.000	-	18.059.835.000	59.439.980.000	-		-	655.618.479.000	646.000.689.000
472	PAPUA TENGAH	Kab. Deiyai	380.606.978.000	-	76.693.162.000	23.880.236.000	-		-	486.570.055.000	481.180.376.000
473	MALUKU UTARA	Provinsi Maluku Utara	982.170.652.000	31.540.590.579	129.156.214.000	48.313.163.000	-		18.596.458.000	1.219.253.805.000	1.209.777.077.579
474	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Tengah	347.207.361.000	9.035.193.188	34.564.763.000	34.231.621.000	-		-	433.868.673.000	425.038.938.188
475	MALUKU UTARA	Kota Ternate	558.017.106.000	8.130.982.000	58.717.924.000	12.933.657.000	15.600.000.000		9.430.548.000	662.830.217.000	662.830.217.000
476	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Barat	416.825.166.000	7.502.686.442	48.424.547.000	38.801.931.000	-		-	514.831.002.000	511.554.330.442
477	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Timur	339.311.753.000	13.431.072.964	41.237.779.000	30.223.096.000	-		-	452.774.956.000	424.203.700.964
478	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Selatan	564.106.171.000	27.492.422.489	81.857.658.000	40.710.020.000	-		6.433.483.000	747.070.925.000	720.599.754.489
479	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Utara	397.868.039.000	5.759.282.940	58.577.342.000	39.263.794.000	-		-	516.780.033.000	501.468.457.940
480	MALUKU UTARA	Kab. Kepulauan Sula	366.668.923.000	6.339.725.698	50.963.413.000	34.435.575.000	-		3.946.924.000	475.529.191.000	462.354.560.698
481	MALUKU UTARA	Kota Tidore Kepulauan	447.686.547.000	19.957.976.085	37.097.618.000	21.081.052.000	8.000.000.000		7.712.332.000	559.886.088.000	541.535.525.085
482	MALUKU UTARA	Kab. Pulau Morotai	321.505.744.000	6.883.355.373	34.217.383.000	30.771.601.000	-		-	410.585.665.000	393.378.083.373
483	MALUKU UTARA	Kab. Pulau Taliabu	259.020.412.000	-	29.057.253.000	16.064.935.000	-		-	345.597.408.000	304.142.600.000
484	BANTEN	Provinsi Banten	809.119.261.000	197.656.432.312	94.757.611.000	45.189.257.000	-		-	1.167.199.457.000	1.146.722.561.312
485	BANTEN	Kab. Lebak	880.135.339.000	10.722.800.601	136.331.325.000	107.787.383.000	1.000.000.000		51.423.237.000	1.189.454.541.000	1.187.400.084.601
486	BANTEN	Kab. Pandeglang	946.820.075.000	6.825.388.716	147.077.616.000	115.456.542.000	2.600.000.000		-	1.223.569.921.000	1.218.779.621.716
487	BANTEN	Kab. Serang	901.347.105.000	10.523.813.000	141.646.930.000	106.825.920.000	-		-	1.160.343.768.000	1.160.343.768.000
488	BANTEN	Kab. Tangerang	1.166.495.964.000	34.847.064.000	189.346.206.000	104.925.516.000	5.600.000.000		-	1.501.214.750.000	1.501.214.750.000
489	BANTEN	Kota Cilegon	541.030.976.000	4.004.088.479	52.521.643.000	43.325.810.000	8.600.000.000		-	652.447.842.000	649.482.517.479
490	BANTEN	Kota Tangerang	842.716.139.000	96.382.333.000	39.311.909.000	25.540.622.000	20.800.000.000		38.929.296.000	1.063.680.299.000	1.063.680.299.000
491	BANTEN	Kota Serang	505.507.048.000	4.646.275.000	86.510.471.000	59.351.053.000	13.400.000.000		-	669.414.847.000	669.414.847.000
492	BANTEN	Kota Tangerang Selatan	492.381.061.000	130.467.408.000	62.053.931.000	33.925.655.000	10.800.000.000		-	729.628.055.000	729.628.055.000
493	BANGKA BELITUNG	Provinsi Bangka Belitung	897.389.414.000	7.781.225.572	52.297.184.000	11.439.097.000	-		-	1.023.051.251.000	968.906.920.572
494	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka	494.604.309.000	-	37.715.925.000	10.576.440.000	3.800.000.000		-	554.827.656.000	546.696.674.000
495	BANGKA BELITUNG	Kab. Belitung	431.797.566.000	7.158.086.809	29.825.805.000	8.918.956.000	1.400.000.000		-	489.709.683.000	479.100.413.809
496	BANGKA BELITUNG	Kota Pangkal Pinang	366.402.377.000	3.816.754.267	32.182.092.000	9.031.555.000	8.400.000.000		-	470.005.742.000	419.832.778.267
497	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka Selatan	362.816.094.000	23.653.834.745	48.612.138.000	26.137.139.000	600.000.000		-	474.406.317.000	461.819.205.745
498	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka Tengah	399.414.008.000	7.890.152.427	33.261.131.000	17.669.729.000	1.400.000.000		-	462.106.062.000	459.635.020.427
499	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka Barat	400.470.052.000	1.844.967.477	32.358.058.000	8.372.507.000	1.200.000.000		-	472.369.092.000	444.245.584.477
500	BANGKA BELITUNG	Kab. Belitung Timur	378.948.344.000	18.372.046.254	26.411.620.000	7.480.863.000	-		-	438.079.394.000	431.212.873.254
501	GORONTALO	Provinsi Gorontalo	869.726.743.000	-	105.828.566.000	26.188.330.000	-		22.439.753.000	1.025.646.969.000	1.024.183.392.000
502	GORONTALO	Kab. Boalemo	379.443.941.000	2.323.138.000	41.249.851.000	27.671.335.000	-		8.362.439.000	459.050.704.000	459.050.704.000
503	GORONTALO	Kab. Gorontalo	636.317.254.000	8.502.684.000	62.960.529.000	31.941.215.000	2.800.000.000		18.474.010.000	760.995.692.000	760.995.692.000
504	GORONTALO	Kota Gorontalo	484.915.431.000	3.572.245.801	32.064.139.000	12.371.149.000	10.000.000.000		10.510.106.000	554.507.100.000	553.433.070.801
505	GORONTALO	Kab. Pohuwato	419.406.230.000	19.267.617.218	49.663.858.000	20.517.511.000	600.000.000		11.042.384.000	530.942.913.000	520.497.600.218
506	GORONTALO	Kab. Bone Bolango	422.676.082.000	5.756.245.432	48.732.672.000	21.520.154.000	1.000.000.000		11.366.134.000	512.543.231.000	511.051.287.432

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	DAU Block Grant	DAU Specific Grant					DAU Tambahan	Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Kelurahan	Bidang Pekerjaan Umum			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1	2	4	7	9	11	13	15	17		18	19
507	GORONTALO	Kab. Gorontalo Utara	318.716.921.000	3.800.887.231	50.124.215.000	24.823.304.000	-		9.733.718.000	409.693.861.000	407.199.045.231
508	KEPULAUAN RIAU	Provinsi Kepulauan Riau	1.028.022.258.000	83.539.891.581	74.094.740.000	13.935.451.000	-		-	1.199.592.477.000	1.199.592.340.581
509	KEPULAUAN RIAU	Kab. Natuna	332.626.205.000	11.992.223.504	39.948.786.000	21.068.145.000	1.400.000.000		-	408.285.020.000	407.035.359.504
510	KEPULAUAN RIAU	Kab. Kepulauan Anambas	242.706.717.000	49.594.085.929	39.185.321.000	19.981.897.000	400.000.000		-	372.023.818.000	351.868.020.929
511	KEPULAUAN RIAU	Kab. Karimun	358.681.624.000	41.872.232.000	46.122.523.000	17.918.821.000	5.800.000.000		-	470.395.200.000	470.395.200.000
512	KEPULAUAN RIAU	Kota Batam	761.669.790.000	50.030.318.548	64.364.068.000	18.260.282.000	6.400.000.000		-	910.526.305.000	900.724.458.548
513	KEPULAUAN RIAU	Kota Tanjung Pinang	441.792.313.000	10.535.217.732	32.432.937.999	19.843.160.000	3.600.000.000		-	508.206.163.000	508.203.628.731
514	KEPULAUAN RIAU	Kab. Lingga	336.108.461.000	30.013.196.809	45.016.837.000	34.517.737.000	1.800.000.000		-	463.961.542.000	447.456.231.809
515	KEPULAUAN RIAU	Kab. Bintan	413.586.122.000	29.423.303.101	33.620.085.000	18.226.024.000	3.000.000.000		-	507.163.581.000	497.855.534.101
516	PAPUA BARAT	Provinsi Papua Barat	454.621.134.000	-	1.393.029.000	18.225.765.000	-		-	477.490.331.000	474.239.928.000
517	PAPUA BARAT	Kab. Fak Fak	550.283.470.000	7.720.699.350	77.656.386.000	37.553.644.000	1.400.000.000		9.163.809.000	695.803.979.000	683.778.008.350
518	PAPUA BARAT	Kab. Manokwari	480.021.785.000	-	78.518.842.000	31.771.587.000	1.800.000.000		-	603.844.059.000	592.112.214.000
519	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Sorong	424.223.895.000	-	53.996.368.000	27.942.687.000	5.200.000.000		-	554.340.996.000	511.362.950.000
520	PAPUA BARAT DAYA	Kota Sorong	508.139.790.000	1.308.846.455	58.364.314.000	24.715.411.000	8.200.000.000		-	622.186.263.000	600.728.361.455
521	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Raja Ampat	466.759.906.000	33.798.722.134	76.284.359.000	42.899.633.000	800.000.000		-	650.639.475.000	620.542.620.134
522	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Sorong Selatan	325.240.801.000	15.575.883.298	35.174.100.000	26.256.768.000	400.000.000		-	426.674.020.000	402.647.552.298
523	PAPUA BARAT	Kab. Teluk Bintuni	367.771.774.000	13.177.097.780	50.758.178.000	29.089.523.000	400.000.000		-	477.151.621.000	461.196.572.780
524	PAPUA BARAT	Kab. Teluk Wondama	335.466.391.000	-	51.474.179.000	30.264.304.000	100.000.000		-	442.048.718.000	417.304.874.000
525	PAPUA BARAT	Kab. Kaimana	475.464.590.000	1.496.520.501	85.472.440.000	41.212.336.000	400.000.000		-	608.937.994.000	604.045.886.501
526	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Maybrat	321.324.367.000	4.297.243.553	21.311.954.000	18.247.598.000	200.000.000		-	371.607.732.000	365.381.162.553
527	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Tambrauw	344.677.173.000	-	39.555.034.000	26.827.677.000	-		-	432.023.878.000	411.059.884.000
528	PAPUA BARAT	Kab. Manokwari Selatan	257.416.119.000	7.383.114.352	36.903.945.000	23.163.290.000	-		-	336.904.784.000	324.866.468.352
529	PAPUA BARAT	Kab. Pegunungan Arfak	265.438.464.000	3.755.251.299	27.167.762.000	20.588.522.000	-		-	331.779.849.000	316.949.999.299
530	SULAWESI BARAT	Provinsi Sulawesi Barat	841.107.992.000	420.535.302	138.111.378.000	42.477.947.000	-		23.481.438.000	1.045.996.500.000	1.045.599.290.302
531	SULAWESI BARAT	Kab. Majene	399.410.099.000	27.160.380.460	53.784.932.000	44.130.902.000	4.000.000.000		15.891.308.000	551.135.050.000	544.377.621.460
532	SULAWESI BARAT	Kab. Mamuju	530.906.248.000	9.224.215.777	65.518.297.000	42.743.668.000	2.600.000.000		15.533.608.000	673.563.784.000	666.526.036.777
533	SULAWESI BARAT	Kab. Polewali Mandar	701.368.828.000	8.412.422.766	81.092.682.000	55.906.968.000	4.600.000.000		25.679.562.000	882.586.866.000	877.060.462.766
534	SULAWESI BARAT	Kab. Mamasa	424.215.418.000	1.143.847.664	56.321.280.000	32.275.132.000	2.600.000.000		9.889.556.000	527.392.210.000	526.445.233.664
535	SULAWESI BARAT	Kab. Pasangkayu	363.084.787.000	4.186.437.797	52.446.307.000	27.126.754.000	800.000.000		8.301.884.000	461.516.910.000	455.946.169.797
536	SULAWESI BARAT	Kab. Mamuju Tengah	299.616.375.000	4.071.373.984	33.833.611.000	23.097.088.000	-		8.262.538.000	370.036.672.000	368.880.985.984
537	KALIMANTAN UTARA	Provinsi Kalimantan Utara	917.989.898.000	26.029.880.117	66.430.549.000	12.296.873.000	-		-	1.022.792.217.000	1.022.747.200.117
538	PAPUA SELATAN	Provinsi Papua Tengah	440.242.999.000	-	2.926.107.000	26.102.722.000	-		-	469.271.828.000	469.271.828.000
539	PAPUA TENGAH	Provinsi Papua Selatan	378.938.552.000	-	4.593.731.000	19.955.166.000	-		-	403.488.449.000	403.487.449.000
540	PAPUA PEGUNUNGAN	Provinsi Papua Pegunungan	383.500.983.000	-	1.293.854.000	18.274.693.000	-		-	403.069.530.000	403.069.530.000
541	PAPUA BARAT DAYA	Provinsi Papua Barat Daya	459.226.943.000	237.609.420	3.460.988.000	21.372.705.000	-		-	485.045.646.000	484.298.245.420
542	KALIMANTAN UTARA	Kab. Bulungan	443.197.102.000	31.390.235.000	57.780.666.000	23.108.915.000	1.400.000.000		-	556.876.918.000	556.876.918.000
543	KALIMANTAN UTARA	Kab. Malinau	622.834.908.000	8.104.229.868	70.970.771.000	25.682.182.000	-		-	733.078.216.000	727.592.090.868
544	KALIMANTAN UTARA	Kab. Nunukan	437.770.288.000	22.232.533.960	52.644.153.000	23.644.250.000	1.600.000.000		-	541.724.295.000	537.891.224.960
545	KALIMANTAN UTARA	Kota Tarakan	422.306.630.000	12.255.363.339	31.040.235.000	10.880.898.000	4.000.000.000		2.442.352.000	486.722.996.000	482.925.478.339
546	KALIMANTAN UTARA	Kab. Tana Tidung	340.233.407.000	5.381.538.256	38.264.051.000	13.700.735.000	-		-	402.661.605.000	397.579.731.256
Jumlah			**360.515.964.881.000**	**10.620.002.627.812**	**33.578.181.449.999**	**19.251.193.436.378**	**1.659.888.602.000**	**-**	**7.666.857.066.000**	**438.625.121.056.000**	**433.292.088.063.189**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
1	ACEH	BANDA ACEH	Provinsi Aceh	0600	122.745.459.000	109.854.191.253	930.089.398.000	930.049.093.100	1.052.834.857.000	1.039.903.284.353
2	ACEH	MEULABOH	Kab. Aceh Barat	0606	42.991.940.000	42.340.005.011	132.758.141.000	130.751.800.324	175.750.081.000	173.091.805.335
3	ACEH	BANDA ACEH	Kab. Aceh Besar	0601	53.846.513.000	53.027.484.129	195.595.176.000	193.215.386.212	249.441.689.000	246.242.870.341
4	ACEH	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Selatan	0605	28.986.051.000	26.768.814.804	167.066.047.000	163.395.177.571	196.052.098.000	190.163.992.375
5	ACEH	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Singkil	0610	14.274.062.000	13.597.148.103	113.591.265.000	112.890.367.447	127.865.327.000	126.487.515.550
6	ACEH	TAKENGON	Kab. Aceh Tengah	0607	24.940.909.000	23.501.897.194	153.340.724.000	149.913.347.613	178.281.633.000	173.415.244.807
7	ACEH	KUTACANE	Kab. Aceh Tenggara	0608	24.968.597.000	24.616.377.000	149.600.323.000	149.468.474.900	174.568.920.000	174.084.851.900
8	ACEH	L A N G S A	Kab. Aceh Timur	0604	41.962.377.000	41.591.888.163	271.663.181.000	269.000.625.780	313.625.558.000	310.592.513.943
9	ACEH	LHOKSEUMAWE	Kab. Aceh Utara	0603	34.607.208.000	33.815.949.478	385.275.998.000	381.667.078.597	419.883.206.000	415.483.028.075
10	ACEH	LHOKSEUMAWE	Kab. Bireuen	0611	27.149.621.000	26.648.966.747	249.258.154.000	245.188.834.827	276.407.775.000	271.837.801.574
11	ACEH	BANDA ACEH	Kab. Pidie	0602	21.777.722.000	21.614.646.930	231.365.688.000	228.667.897.028	253.143.410.000	250.282.543.958
12	ACEH	MEULABOH	Kab. Simeulue	0609	26.878.175.000	24.759.965.035	86.890.055.000	84.417.868.121	113.768.230.000	109.177.833.156
13	ACEH	BANDA ACEH	Kota Banda Aceh	0651	71.747.576.000	69.455.815.449	124.332.148.000	123.420.058.205	196.079.724.000	192.875.873.654
14	ACEH	BANDA ACEH	Kota Sabang	0652	15.908.226.000	14.074.986.403	38.229.383.000	35.770.954.116	54.137.609.000	49.845.940.519
15	ACEH	L A N G S A	Kota Langsa	0653	26.738.778.000	26.621.775.717	81.504.675.000	81.135.128.163	108.243.453.000	107.756.903.880
16	ACEH	LHOKSEUMAWE	Kota Lhokseumawe	0654	6.934.508.000	6.821.282.450	95.180.608.000	94.640.801.028	102.115.116.000	101.462.083.478
17	ACEH	KUTACANE	Kab. Gayo Lues	0613	8.403.920.000	8.316.409.097	77.223.352.000	76.721.516.299	85.627.272.000	85.037.925.396
18	ACEH	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Barat Daya	0612	30.792.664.000	30.188.046.634	96.165.149.000	94.452.191.550	126.957.813.000	124.640.238.184
19	ACEH	MEULABOH	Kab. Aceh Jaya	0614	38.560.555.000	38.324.388.491	87.890.562.000	86.448.255.014	126.451.117.000	124.772.643.505
20	ACEH	MEULABOH	Kab. Nagan Raya	0615	17.694.475.000	17.435.496.887	123.812.423.000	122.952.859.220	141.506.898.000	140.388.356.107
21	ACEH	L A N G S A	Kab. Aceh Tamiang	0616	4.582.259.000	4.520.895.762	156.922.160.000	154.990.892.730	161.504.419.000	159.511.788.492
22	ACEH	TAKENGON	Kab. Bener Meriah	0617	33.536.898.000	33.175.047.106	124.776.882.000	122.438.389.025	158.313.780.000	155.613.436.131
23	ACEH	BANDA ACEH	Kab. Pidie Jaya	0618	17.382.868.000	17.007.702.761	94.496.202.000	93.415.098.935	111.879.070.000	110.422.801.696
24	ACEH	TAPAKTUAN	Kota Subulussalam	0656	27.640.103.000	27.201.987.123	70.466.458.000	68.905.714.592	98.106.561.000	96.107.701.715
25	SUMATERA UTARA	M E D A N I	Provinsi Sumatera Utara	0700	130.127.257.000	125.818.146.885	1.866.616.053.000	1.865.749.486.098	1.996.743.310.000	1.991.567.632.983
26	SUMATERA UTARA	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kab. Asahan	0710	7.316.701.000	7.234.700.529	248.554.659.000	247.237.280.423	255.871.360.000	254.471.980.952
27	SUMATERA UTARA	SIDIKALANG	Kab. Dairi	0707	8.313.268.000	7.184.610.360	185.355.416.000	183.665.146.894	193.668.684.000	190.849.757.254
28	SUMATERA UTARA	TEBING TINGGI	Kab. Deli Serdang	0701	27.057.062.000	26.530.306.350	622.579.754.000	617.504.924.605	649.636.816.000	644.035.230.955
29	SUMATERA UTARA	SIDIKALANG	Kab. Karo	0702	19.060.542.000	18.713.218.871	184.155.376.000	182.303.773.041	203.215.918.000	201.016.991.912
30	SUMATERA UTARA	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu	0706	9.655.761.000	8.103.161.420	187.929.969.000	186.179.553.968	197.585.730.000	194.282.715.388
31	SUMATERA UTARA	M E D A N II	Kab. Langkat	0703	6.276.681.000	1.967.414.120	402.292.794.000	395.678.982.481	408.569.475.000	397.646.396.601
32	SUMATERA UTARA	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Mandailing Natal	0713	22.422.971.000	21.502.609.928	337.057.316.000	336.283.364.183	359.480.287.000	357.785.974.111
33	SUMATERA UTARA	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias	0711	25.961.490.000	25.809.639.272	119.759.045.000	117.390.345.176	145.720.535.000	143.199.984.448
34	SUMATERA UTARA	PEMATANG SIANTAR	Kab. Simalungun	0705	56.157.160.000	52.783.147.720	383.031.212.000	369.773.885.479	439.188.372.000	422.557.033.199
35	SUMATERA UTARA	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Tapanuli Selatan	0709	19.109.964.000	13.876.747.873	178.811.064.000	177.595.256.815	197.921.028.000	191.472.004.688
36	SUMATERA UTARA	SIBOLGA	Kab. Tapanuli Tengah	0704	9.560.326.000	9.300.996.765	183.598.444.000	179.131.740.847	193.158.770.000	188.432.737.612
37	SUMATERA UTARA	BALIGE	Kab. Tapanuli Utara	0708	4.805.395.000	4.772.399.978	221.093.844.000	219.910.162.211	225.899.239.000	224.682.562.189

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
38	SUMATERA UTARA	BALIGE	Kab. Toba Samosir	0717	46.882.967.000	44.135.981.135	148.692.773.000	144.911.886.430	195.575.740.000	189.047.867.565
39	SUMATERA UTARA	M E D A N II	Kota Binjai	0753	31.191.689.000	30.518.017.168	132.779.074.000	132.401.275.535	163.970.763.000	162.919.292.703
40	SUMATERA UTARA	M E D A N I	Kota Medan	0751	6.335.406.000	5.341.349.650	558.391.154.000	547.156.164.211	564.726.560.000	552.497.513.861
41	SUMATERA UTARA	PEMATANG SIANTAR	Kota Pematang Siantar	0754	33.968.307.000	32.989.683.261	114.828.755.000	112.259.990.489	148.797.062.000	145.249.673.750
42	SUMATERA UTARA	SIBOLGA	Kota Sibolga	0756	2.549.978.000	2.523.973.900	49.537.884.000	48.037.094.160	52.087.862.000	50.561.068.060
43	SUMATERA UTARA	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kota Tanjung Balai	0755	2.752.711.000	2.202.807.760	67.969.636.000	67.065.288.655	70.722.347.000	69.268.096.415
44	SUMATERA UTARA	TEBING TINGGI	Kota Tebing Tinggi	0752	5.131.598.000	4.970.016.936	79.266.300.000	77.465.108.972	84.397.898.000	82.435.125.908
45	SUMATERA UTARA	PADANG SIDEMPUAN	Kota Padang Sidempuan	0757	3.327.710.000	713.322.004	104.848.798.000	104.246.237.143	108.176.508.000	104.959.559.147
46	SUMATERA UTARA	SIDIKALANG	Kab. Pakpak Bharat	0715	1.608.255.000	1.591.476.251	48.809.231.000	48.164.116.517	50.417.486.000	49.755.592.768
47	SUMATERA UTARA	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Selatan	0714	25.965.573.000	21.077.799.233	244.956.520.000	243.079.128.800	270.922.093.000	264.156.928.033
48	SUMATERA UTARA	BALIGE	Kab. Humbang Hasundutan	0716	5.131.400.000	4.974.360.057	144.454.465.000	142.658.702.804	149.585.865.000	147.633.062.861
49	SUMATERA UTARA	TEBING TINGGI	Kab. Serdang Bedagai	0720	26.622.998.000	24.950.769.349	274.638.198.000	273.806.158.325	301.261.196.000	298.756.927.674
50	SUMATERA UTARA	BALIGE	Kab. Samosir	0712	3.081.263.000	2.728.757.985	104.476.148.000	103.174.684.263	107.557.411.000	105.903.442.248
51	SUMATERA UTARA	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kab. Batu Bara	0721	5.643.844.000	5.582.290.221	188.844.108.000	186.629.314.630	194.487.952.000	192.211.604.851
52	SUMATERA UTARA	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Padang Lawas	0722	46.458.611.000	45.364.827.827	165.369.580.000	164.721.804.358	211.828.191.000	210.086.632.185
53	SUMATERA UTARA	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Padang Lawas Utara	0723	10.993.699.000	9.538.075.948	149.841.108.000	149.014.370.512	160.834.807.000	158.552.446.460
54	SUMATERA UTARA	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu Selatan	0724	4.206.221.000	4.128.541.370	134.178.494.000	130.651.339.218	138.384.715.000	134.779.880.588
55	SUMATERA UTARA	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu Utara	0725	7.215.137.000	6.114.158.314	167.810.075.000	163.166.440.625	175.025.212.000	169.280.598.939
56	SUMATERA UTARA	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Utara	0726	28.873.083.000	28.680.643.515	147.063.485.000	145.794.206.957	175.936.568.000	174.474.850.472
57	SUMATERA UTARA	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Barat	0727	204.741.441.000	198.291.291.503	158.607.257.000	157.615.860.011	363.348.698.000	355.907.151.514
58	SUMATERA UTARA	GUNUNG SITOLI	Kota Gunungsitoli	0761	3.479.264.000	3.459.643.965	100.298.381.000	99.549.170.025	103.777.645.000	103.008.813.990
59	SUMATERA BARAT	P A D A N G	Provinsi Sumatera Barat	0800	73.140.495.000	60.139.740.451	978.839.958.000	977.818.204.568	1.051.980.453.000	1.037.957.945.019
60	SUMATERA BARAT	BUKITTINGGI	Kab. Lima Puluh Kota	0803	14.364.998.000	14.128.857.611	237.540.698.000	233.273.584.494	251.905.696.000	247.402.442.105
61	SUMATERA BARAT	BUKITTINGGI	Kab. Agam	0801	16.072.042.000	14.276.769.310	274.147.445.000	271.727.430.776	290.219.487.000	286.004.200.086
62	SUMATERA BARAT	P A D A N G	Kab. Kepulauan Mentawai	0809	2.431.037.000	1.941.704.828	109.461.867.000	106.780.342.307	111.892.904.000	108.722.047.135
63	SUMATERA BARAT	P A D A N G	Kab. Padang Pariaman	0805	22.864.258.000	21.812.067.075	255.653.801.000	251.181.694.664	278.518.059.000	272.993.761.739
64	SUMATERA BARAT	LUBUK SIKAPING	Kab. Pasaman	0802	12.036.444.000	11.808.785.582	192.689.072.000	190.010.187.420	204.725.516.000	201.818.973.002
65	SUMATERA BARAT	P A I N A N	Kab. Pesisir Selatan	0806	44.880.521.000	43.469.332.898	309.018.819.000	305.388.247.132	353.899.340.000	348.857.580.030
66	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	Kab. Sijunjung	0813	27.920.475.000	26.320.144.019	159.711.807.000	159.224.610.165	187.632.282.000	185.544.754.184
67	SUMATERA BARAT	S O L O K	Kab. Solok	0804	43.912.720.000	43.200.570.880	245.234.904.000	240.661.014.521	289.147.624.000	283.861.585.401
68	SUMATERA BARAT	BUKITTINGGI	Kab. Tanah Datar	0807	79.754.621.000	76.759.027.346	192.325.791.000	189.800.650.301	272.080.412.000	266.559.677.647
69	SUMATERA BARAT	BUKITTINGGI	Kota Bukit Tinggi	0851	12.515.504.000	11.281.492.456	69.901.453.000	68.564.476.748	82.416.957.000	79.845.969.204
70	SUMATERA BARAT	BUKITTINGGI	Kota Padang Panjang	0852	5.633.448.000	5.115.348.945	37.642.826.000	36.930.355.849	43.276.274.000	42.045.704.794
71	SUMATERA BARAT	P A D A N G	Kota Padang	0855	43.399.953.000	40.541.456.059	381.555.302.000	377.092.262.754	424.955.255.000	417.633.718.813
72	SUMATERA BARAT	BUKITTINGGI	Kota Payakumbuh	0856	19.055.674.000	16.570.513.841	86.118.996.000	83.235.231.979	105.174.670.000	99.805.745.820
73	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	Kota Sawahlunto	0854	6.355.359.000	6.316.876.346	49.688.615.000	47.836.540.232	56.043.974.000	54.153.416.578
74	SUMATERA BARAT	S O L O K	Kota Solok	0853	6.295.116.000	6.061.189.714	51.550.070.000	51.082.101.430	57.845.186.000	57.143.291.144

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
75	SUMATERA BARAT	P A D A N G	Kota Pariaman	0857	2.217.951.000	2.188.772.651	67.032.703.000	66.550.360.731	69.250.654.000	68.739.133.382
76	SUMATERA BARAT	LUBUK SIKAPING	Kab. Pasaman Barat	0812	5.464.931.000	5.275.139.439	235.002.981.000	231.465.178.391	240.467.912.000	236.740.317.830
77	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	Kab. Dharmasraya	0810	10.058.006.000	8.778.269.954	147.941.705.000	146.967.176.131	157.999.711.000	155.745.446.085
78	SUMATERA BARAT	S O L O K	Kab. Solok Selatan	0811	27.521.099.000	26.942.682.193	112.906.418.000	110.925.573.090	140.427.517.000	137.868.255.283
79	RIAU	PEKANBARU	Provinsi Riau	0900	137.171.782.000	126.453.794.879	988.070.516.000	987.836.713.100	1.125.242.298.000	1.114.290.507.979
80	RIAU	D U M A I	Kab. Bengkalis	0902	20.669.768.000	20.427.213.687	311.961.802.000	310.588.096.403	332.631.570.000	331.015.310.090
81	RIAU	R E N G A T	Kab. Indragiri Hilir	0905	16.798.343.000	14.922.103.833	340.814.155.000	334.312.387.816	357.612.498.000	349.234.491.649
82	RIAU	R E N G A T	Kab. Indragiri Hulu	0904	19.365.049.000	15.916.151.054	238.437.468.000	235.092.586.225	257.802.517.000	251.008.737.279
83	RIAU	PEKANBARU	Kab. Kampar	0901	17.914.749.000	17.160.415.511	437.372.929.000	433.339.493.402	455.287.678.000	450.499.908.913
84	RIAU	R E N G A T	Kab. Kuantan Singingi	0912	27.644.256.000	26.992.278.298	193.377.989.000	190.468.454.765	221.022.245.000	217.460.733.063
85	RIAU	PEKANBARU	Kab. Pelalawan	0906	12.765.353.000	12.541.194.204	214.830.072.000	211.985.747.967	227.595.425.000	224.526.942.171
86	RIAU	D U M A I	Kab. Rokan Hilir	0908	45.261.740.000	40.778.896.622	310.851.586.000	307.894.071.933	356.113.326.000	348.672.968.555
87	RIAU	PEKANBARU	Kab. Rokan Hulu	0907	18.644.802.000	17.791.848.828	294.932.035.000	292.642.361.564	313.576.837.000	310.434.210.392
88	RIAU	PEKANBARU	Kab. Siak	0909	20.478.107.000	19.501.128.444	256.314.971.000	253.317.346.648	276.793.078.000	272.818.475.092
89	RIAU	D U M A I	Kota Dumai	0953	22.388.236.000	22.152.809.497	152.090.973.000	150.815.846.748	174.479.209.000	172.968.656.245
90	RIAU	PEKANBARU	Kota Pekanbaru	0951	49.084.477.000	22.842.688.295	348.052.016.000	345.483.619.340	397.136.493.000	368.326.307.635
91	RIAU	D U M A I	Kab. Kepulauan Meranti	0913	15.151.875.000	14.856.986.108	139.257.952.000	138.173.923.359	154.409.827.000	153.030.909.467
92	JAMBI	J A M B I	Provinsi Jambi	1000	72.291.431.000	63.489.201.154	481.853.557.000	481.803.298.674	554.144.988.000	545.292.499.828
93	JAMBI	J A M B I	Kab. Batanghari	1001	22.444.124.000	21.979.421.151	167.247.886.000	165.088.278.120	189.692.010.000	187.067.699.271
94	JAMBI	MUARA BUNGO	Kab. Bungo	1003	35.252.895.000	34.131.638.436	148.141.116.000	144.573.761.564	183.394.011.000	178.705.400.000
95	JAMBI	SUNGAI PENUH	Kab. Kerinci	1005	21.117.136.000	20.789.529.189	148.685.953.000	147.937.011.959	169.803.089.000	168.726.541.148
96	JAMBI	B A N G K O	Kab. Merangin	1006	40.485.936.000	38.110.722.654	198.524.679.000	192.861.991.954	239.010.615.000	230.972.714.608
97	JAMBI	J A M B I	Kab. Muaro Jambi	1009	40.482.118.000	39.424.381.366	193.031.813.000	190.093.883.300	233.513.931.000	229.518.264.666
98	JAMBI	B A N G K O	Kab. Sarolangun	1004	26.564.588.000	26.324.912.913	145.549.032.000	144.032.260.662	172.113.620.000	170.357.173.575
99	JAMBI	KUALA TUNGKAL	Kab. Tanjung Jabung Barat	1002	16.494.303.000	16.291.750.307	172.203.660.000	170.062.204.428	188.697.963.000	186.353.954.735
100	JAMBI	KUALA TUNGKAL	Kab. Tanjung Jabung Timur	1007	19.304.354.000	19.233.305.531	128.654.263.000	124.955.775.616	147.958.617.000	144.189.081.147
101	JAMBI	MUARA BUNGO	Kab. Tebo	1008	16.182.122.000	16.128.298.096	151.563.220.000	149.401.171.986	167.745.342.000	165.529.470.082
102	JAMBI	J A M B I	Kota Jambi	1051	45.358.307.000	43.719.741.319	213.118.208.000	209.074.564.290	258.476.515.000	252.794.305.609
103	JAMBI	SUNGAI PENUH	Kota Sungai Penuh	1052	14.137.087.000	13.953.844.591	70.264.192.000	68.930.657.843	84.401.279.000	82.884.502.434
104	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	Provinsi Sumatera Selatan	1100	75.594.291.000	74.582.602.273	1.105.375.529.000	1.105.251.755.100	1.180.969.820.000	1.179.834.357.373
105	SUMATERA SELATAN	L A H A T	Kab. Lahat	1106	12.330.187.000	10.590.116.535	217.562.499.000	214.567.009.656	229.892.686.000	225.157.126.191
106	SUMATERA SELATAN	S E K A Y U	Kab. Musi Banyuasin	1103	35.072.538.000	33.369.884.583	358.047.243.000	346.727.489.285	393.119.781.000	380.097.373.868
107	SUMATERA SELATAN	LUBUK LINGGAU	Kab. Musi Rawas	1107	28.123.863.000	27.825.540.278	187.789.551.000	185.211.258.391	215.913.414.000	213.036.798.669
108	SUMATERA SELATAN	L A H A T	Kab. Muara Enim	1105	15.494.164.000	15.276.835.998	295.873.974.000	290.921.588.862	311.368.138.000	306.198.424.860
109	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ilir	1108	14.063.531.000	13.693.594.944	391.230.213.000	387.395.473.961	405.293.744.000	401.089.068.905
110	SUMATERA SELATAN	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu	1104	10.069.888.000	9.553.878.683	182.650.629.000	179.968.167.078	192.720.517.000	189.522.045.761
111	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	Kota Palembang	1151	24.436.822.000	24.165.978.515	551.065.019.000	547.027.547.894	575.501.841.000	571.193.526.409

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
112	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	Kota Prabumulih	1153	6.419.276.000	6.390.089.775	103.942.179.000	102.062.516.095	110.361.455.000	108.452.605.870
113	SUMATERA SELATAN	L A H A T	Kota Pagar Alam	1154	659.526.000	-	69.232.579.000	67.823.955.724	69.892.105.000	67.823.955.724
114	SUMATERA SELATAN	LUBUK LINGGAU	Kota Lubuk Linggau	1155	29.967.685.000	29.516.050.822	114.327.687.000	113.971.364.739	144.295.372.000	143.487.415.561
115	SUMATERA SELATAN	S E K A Y U	Kab. Banyuasin	1109	65.980.142.000	65.224.779.891	434.097.921.000	429.964.021.356	500.078.063.000	495.188.801.247
116	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	Kab. Ogan Ilir	1112	23.498.362.000	23.293.525.525	216.092.552.000	211.884.347.093	239.590.914.000	235.177.872.618
117	SUMATERA SELATAN	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1110	47.590.913.000	45.678.042.233	295.211.546.000	293.928.721.772	342.802.459.000	339.606.764.005
118	SUMATERA SELATAN	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1111	4.224.355.000	4.188.587.796	172.700.549.000	169.558.945.038	176.924.904.000	173.747.532.834
119	SUMATERA SELATAN	L A H A T	Kab. Empat Lawang	1117	24.781.092.000	24.496.355.553	116.793.158.000	115.406.220.479	141.574.250.000	139.902.576.032
120	SUMATERA SELATAN	L A H A T	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1118	1.501.577.000	1.451.548.180	105.847.479.000	104.460.096.406	107.349.056.000	105.911.644.586
121	SUMATERA SELATAN	LUBUK LINGGAU	Kab. Musi Rawas Utara	1119	4.332.657.000	4.278.279.585	89.608.277.000	88.854.869.441	93.940.934.000	93.133.149.026
122	BENGKULU	B E N G K U L U	Provinsi Bengkulu	2600	49.488.469.000	48.026.480.481	347.016.360.000	346.701.857.820	396.504.829.000	394.728.338.301
123	BENGKULU	M A N N A	Kab. Bengkulu Selatan	2602	37.535.544.000	37.314.356.561	119.891.691.000	117.405.306.037	157.427.235.000	154.719.662.598
124	BENGKULU	B E N G K U L U	Kab. Bengkulu Utara	2601	39.599.522.000	38.396.869.075	177.991.426.000	171.271.137.875	217.590.948.000	209.668.006.950
125	BENGKULU	C U R U P	Kab. Rejang Lebong	2603	22.750.031.000	19.394.304.716	135.222.966.000	129.567.747.255	157.972.997.000	148.962.051.971
126	BENGKULU	B E N G K U L U	Kota Bengkulu	2651	21.850.569.000	21.581.770.273	167.227.609.000	163.592.359.963	189.078.178.000	185.174.130.236
127	BENGKULU	M A N N A	Kab. Kaur	2605	13.487.932.000	13.402.376.356	107.898.771.000	103.495.794.877	121.386.703.000	116.898.171.233
128	BENGKULU	M A N N A	Kab. Seluma	2604	29.844.853.000	29.145.153.450	133.124.859.000	129.583.186.571	162.969.712.000	158.728.340.021
129	BENGKULU	MUKOMUKO	Kab. Mukomuko	2606	27.189.170.000	26.377.873.006	115.481.502.000	109.592.866.575	142.670.672.000	135.970.739.581
130	BENGKULU	C U R U P	Kab. Lebong	2607	23.752.956.000	22.110.348.491	70.803.415.000	67.763.193.732	94.556.371.000	89.873.542.223
131	BENGKULU	C U R U P	Kab. Kepahiang	2608	85.709.826.000	84.098.627.724	89.370.486.000	87.259.164.719	175.080.312.000	171.357.792.443
132	BENGKULU	B E N G K U L U	Kab. Bengkulu Tengah	2609	46.726.271.000	45.642.106.000	90.022.428.000	85.028.715.971	136.748.699.000	130.670.821.971
133	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	Provinsi Lampung	1200	60.159.863.000	59.493.279.028	1.010.871.655.000	1.010.603.478.569	1.071.031.518.000	1.070.096.757.597
134	LAMPUNG	L I W A	Kab. Lampung Barat	1204	52.150.977.000	51.765.972.665	158.621.594.000	158.404.776.066	210.772.571.000	210.170.748.731
135	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	1201	47.744.503.000	47.388.571.996	348.530.822.000	348.185.652.570	396.275.325.000	395.574.224.566
136	LAMPUNG	METRO LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	1202	36.843.076.000	35.976.334.028	520.888.523.000	509.241.940.771	557.731.599.000	545.218.274.799
137	LAMPUNG	KOTABUMI	Kab. Lampung Utara	1203	27.255.244.000	16.504.470.587	260.320.639.000	255.590.196.808	287.575.883.000	272.094.667.395
138	LAMPUNG	METRO LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	1207	16.319.325.000	16.007.608.387	365.513.947.000	358.321.160.886	381.833.272.000	374.328.769.273
139	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tanggamus	1206	46.411.415.000	41.193.364.345	281.050.340.000	278.624.858.285	327.461.755.000	319.818.222.630
140	LAMPUNG	KOTABUMI	Kab. Tulang Bawang	1205	35.746.193.000	34.985.656.394	190.064.098.000	188.453.357.837	225.810.291.000	223.439.014.231
141	LAMPUNG	KOTABUMI	Kab. Way Kanan	1208	41.705.755.000	40.765.660.147	228.939.783.000	225.262.962.190	270.645.538.000	266.028.622.337
142	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	1251	20.855.863.000	17.811.317.994	341.576.811.000	334.585.875.252	362.432.674.000	352.397.193.246
143	LAMPUNG	METRO LAMPUNG	Kota Metro	1252	45.387.893.000	37.785.632.055	95.215.722.000	93.468.404.613	140.603.615.000	131.254.036.668
144	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pesawaran	1209	15.251.189.000	14.935.853.766	185.790.265.000	184.674.581.259	201.041.454.000	199.610.435.025
145	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pringsewu	1210	36.757.133.000	35.627.782.965	194.966.424.000	193.245.496.854	231.723.557.000	228.873.279.819
146	LAMPUNG	KOTABUMI	Kab. Mesuji	1211	33.793.360.000	33.447.410.335	128.196.230.000	125.818.806.952	161.989.590.000	159.266.217.287
147	LAMPUNG	KOTABUMI	Kab. Tulang Bawang Barat	1212	12.633.590.000	12.359.653.016	133.046.895.000	127.070.319.622	145.680.485.000	139.429.972.638
148	LAMPUNG	L I W A	Kab. Pesisir Barat	1213	13.140.993.000	12.826.487.028	108.513.289.000	107.824.871.657	121.654.282.000	120.651.358.685

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
149	DKI JAKARTA	JAKARTA I	Provinsi DKI Jakarta	0100	-	-	3.349.948.785.000	3.344.479.784.631	3.349.948.785.000	3.344.479.784.631
150	JAWA BARAT	BANDUNG I	Provinsi Jawa Barat	0200	153.640.882.000	150.972.931.831	4.847.620.645.000	4.839.821.276.700	5.001.261.527.000	4.990.794.208.531
151	JAWA BARAT	BANDUNG II	Kab. Bandung	0212	47.955.792.000	46.447.696.587	1.070.309.128.000	1.059.683.301.234	1.118.264.920.000	1.106.130.997.821
152	JAWA BARAT	B E K A S I	Kab. Bekasi	0208	75.929.842.000	73.704.207.098	961.260.911.000	951.171.311.368	1.037.190.753.000	1.024.875.518.466
153	JAWA BARAT	B O G O R	Kab. Bogor	0205	92.501.549.000	90.274.891.587	1.687.115.107.000	1.672.040.877.301	1.779.616.656.000	1.762.315.768.888
154	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	Kab. Ciamis	0216	29.182.760.000	29.031.006.838	452.118.837.000	448.269.516.854	481.301.597.000	477.300.523.692
155	JAWA BARAT	SUKABUMI	Kab. Cianjur	0207	40.277.396.000	36.359.592.091	915.118.572.000	913.006.130.309	955.395.968.000	949.365.722.400
156	JAWA BARAT	C I R E B O N	Kab. Cirebon	0217	72.293.519.000	70.341.900.423	785.694.801.000	778.225.714.628	857.988.320.000	848.567.615.051
157	JAWA BARAT	G A R U T	Kab. Garut	0214	26.221.278.000	23.999.986.120	1.035.336.511.000	1.029.451.413.170	1.061.557.789.000	1.053.451.399.290
158	JAWA BARAT	C I R E B O N	Kab. Indramayu	0219	16.484.936.000	15.615.312.360	568.387.998.000	560.530.131.586	584.872.934.000	576.145.443.946
159	JAWA BARAT	KARAWANG	Kab. Karawang	0209	49.185.899.000	47.424.406.545	736.155.053.000	723.945.098.204	785.340.952.000	771.369.504.749
160	JAWA BARAT	KUNINGAN	Kab. Kuningan	0218	15.066.652.000	14.772.674.684	523.777.549.000	518.605.924.228	538.844.201.000	533.378.598.912
161	JAWA BARAT	KUNINGAN	Kab. Majalengka	0220	48.901.516.000	47.414.441.116	522.551.313.000	520.772.579.722	571.452.829.000	568.187.020.838
162	JAWA BARAT	PURWAKARTA	Kab. Purwakarta	0210	30.969.025.000	30.098.421.285	365.769.470.000	363.073.295.686	396.738.495.000	393.171.716.971
163	JAWA BARAT	PURWAKARTA	Kab. Subang	0211	30.870.970.000	28.710.226.017	574.220.609.000	564.638.610.800	605.091.579.000	593.348.836.817
164	JAWA BARAT	SUKABUMI	Kab. Sukabumi	0206	31.936.583.000	23.626.735.151	780.693.512.000	774.810.403.806	812.630.095.000	798.437.138.957
165	JAWA BARAT	SUMEDANG	Kab. Sumedang	0213	39.443.078.000	38.989.538.650	484.591.623.000	479.934.005.246	524.034.701.000	518.923.543.896
166	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	Kab. Tasikmalaya	0215	40.132.744.000	38.277.764.899	647.739.177.000	645.176.854.985	687.871.921.000	683.454.619.884
167	JAWA BARAT	BANDUNG II	Kota Bandung	0251	23.194.354.000	21.496.443.206	727.982.062.000	704.597.899.092	751.176.416.000	726.094.342.298
168	JAWA BARAT	B E K A S I	Kota Bekasi	0257	8.076.043.000	7.889.122.324	673.355.564.000	662.213.618.101	681.431.607.000	670.102.740.425
169	JAWA BARAT	B O G O R	Kota Bogor	0252	25.697.193.000	25.574.335.904	362.421.484.000	361.225.908.092	388.118.677.000	386.800.243.996
170	JAWA BARAT	C I R E B O N	Kota Cirebon	0254	60.684.822.000	59.957.638.216	165.906.371.000	164.374.570.432	226.591.193.000	224.332.208.648
171	JAWA BARAT	B O G O R	Kota Depok	0258	22.960.640.000	22.672.393.851	478.550.004.000	473.849.475.930	501.510.644.000	496.521.869.781
172	JAWA BARAT	SUKABUMI	Kota Sukabumi	0253	16.918.396.000	14.482.258.945	139.758.338.000	138.892.205.640	156.676.734.000	153.374.464.585
173	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	Kota Tasikmalaya	0260	28.123.089.000	27.096.369.450	257.204.270.000	256.155.775.851	285.327.359.000	283.252.145.301
174	JAWA BARAT	BANDUNG I	Kota Cimahi	0261	40.438.834.000	39.028.902.927	183.979.798.000	182.745.193.155	224.418.632.000	221.774.096.082
175	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	Kota Banjar	0262	11.503.152.000	10.386.590.330	86.637.134.000	86.195.171.701	98.140.286.000	96.581.762.031
176	JAWA BARAT	BANDUNG I	Kab. Bandung Barat	0221	13.131.194.000	12.014.160.081	530.859.153.000	528.030.002.465	543.990.347.000	540.044.162.546
177	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	Kab. Pangandaran	0222	33.407.985.000	32.506.746.568	166.575.128.000	165.786.617.784	199.983.113.000	198.293.364.352
178	JAWA TENGAH	SEMARANG I	Provinsi Jawa Tengah	0300	150.668.769.000	142.445.000.400	3.651.189.765.000	3.650.845.462.570	3.801.858.534.000	3.793.290.462.970
179	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	Kab. Banjarnegara	0318	46.822.874.000	39.728.737.313	380.298.877.000	376.790.573.132	427.121.751.000	416.519.310.445
180	JAWA TENGAH	PURWOKERTO	Kab. Banyumas	0315	64.096.363.000	62.463.712.199	602.043.131.000	600.573.147.321	666.139.494.000	663.036.859.520
181	JAWA TENGAH	PEKALONGAN	Kab. Batang	0306	13.715.926.000	12.959.351.140	320.220.946.000	318.575.041.259	333.936.872.000	331.534.392.399
182	JAWA TENGAH	PURWODADI	Kab. Blora	0314	48.808.411.000	46.176.775.980	383.483.483.000	382.270.262.587	432.291.894.000	428.447.038.567
183	JAWA TENGAH	K L A T E N	Kab. Boyolali	0325	19.306.218.000	18.633.120.236	344.774.024.000	342.529.388.171	364.080.242.000	361.162.508.407
184	JAWA TENGAH	T E G A L	Kab. Brebes	0308	47.416.596.000	46.499.373.280	652.712.297.000	651.812.731.959	700.128.893.000	698.312.105.239
185	JAWA TENGAH	CILACAP	Kab. Cilacap	0316	14.992.911.000	14.575.623.266	637.754.006.000	637.285.837.706	652.746.917.000	651.861.460.972

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
186	JAWA TENGAH	K U D U S	Kab. Demak	0303	32.349.425.000	29.870.990.180	401.719.437.000	400.130.623.377	434.068.862.000	430.001.613.557
187	JAWA TENGAH	PURWODADI	Kab. Grobogan	0304	71.275.171.000	67.580.938.125	505.355.856.000	503.732.469.533	576.631.027.000	571.313.407.658
188	JAWA TENGAH	K U D U S	Kab. Jepara	0312	17.756.660.000	17.171.070.128	407.698.325.000	405.141.844.793	425.454.985.000	422.312.914.921
189	JAWA TENGAH	S R A G E N	Kab. Karanganyar	0328	5.473.998.000	4.661.044.344	360.209.374.000	359.176.171.666	365.683.372.000	363.837.216.010
190	JAWA TENGAH	PURWOREJO	Kab. Kebumen	0323	14.495.981.000	14.130.584.650	508.368.773.000	506.243.866.544	522.864.754.000	520.374.451.194
191	JAWA TENGAH	SEMARANG II	Kab. Kendal	0302	33.352.241.000	32.539.705.297	412.281.270.000	410.694.034.370	445.633.511.000	443.233.739.667
192	JAWA TENGAH	K L A T E N	Kab. Klaten	0324	19.393.851.000	17.623.037.485	449.043.750.000	447.625.912.564	468.437.601.000	465.248.950.049
193	JAWA TENGAH	K U D U S	Kab. Kudus	0310	23.052.616.000	20.351.001.627	250.729.453.000	249.825.782.389	273.782.069.000	270.176.784.016
194	JAWA TENGAH	MAGELANG	Kab. Magelang	0319	51.538.832.000	50.245.914.157	382.017.965.000	380.376.521.650	433.556.797.000	430.622.435.807
195	JAWA TENGAH	P A T I	Kab. Pati	0309	12.869.474.000	12.368.724.963	444.225.765.000	440.312.033.497	457.095.239.000	452.680.758.460
196	JAWA TENGAH	PEKALONGAN	Kab. Pekalongan	0305	9.711.463.000	8.790.805.800	349.600.520.000	348.287.923.228	359.311.983.000	357.078.729.028
197	JAWA TENGAH	T E G A L	Kab. Pemalang	0311	5.779.378.000	5.302.945.654	543.468.642.000	540.767.748.918	549.248.020.000	546.070.694.572
198	JAWA TENGAH	PURWOKERTO	Kab. Purbalingga	0317	21.921.456.000	20.274.064.875	358.930.757.000	357.652.596.361	380.852.213.000	377.926.661.236
199	JAWA TENGAH	PURWOREJO	Kab. Purworejo	0322	47.763.621.000	45.878.356.752	327.341.068.000	322.794.348.239	375.104.689.000	368.672.704.991
200	JAWA TENGAH	P A T I	Kab. Rembang	0313	11.029.136.000	10.035.312.380	274.557.257.000	271.863.482.512	285.586.393.000	281.898.794.892
201	JAWA TENGAH	SEMARANG II	Kab. Semarang	0301	40.284.455.000	38.618.313.786	364.673.692.000	362.674.352.180	404.958.147.000	401.292.665.966
202	JAWA TENGAH	S R A G E N	Kab. Sragen	0326	13.079.954.000	12.649.973.774	376.133.479.000	374.713.681.405	389.213.433.000	387.363.655.179
203	JAWA TENGAH	SURAKARTA	Kab. Sukoharjo	0327	16.077.649.000	13.813.840.269	287.569.800.000	286.801.162.173	303.647.449.000	300.615.002.442
204	JAWA TENGAH	T E G A L	Kab. Tegal	0307	38.402.919.000	37.844.328.871	514.732.013.000	513.136.187.902	553.134.932.000	550.980.516.773
205	JAWA TENGAH	MAGELANG	Kab. Temanggung	0320	40.629.956.000	39.043.735.581	311.318.348.000	309.048.326.132	351.948.304.000	348.092.061.713
206	JAWA TENGAH	SURAKARTA	Kab. Wonogiri	0329	14.483.799.000	13.506.815.518	435.071.367.000	434.042.049.353	449.555.166.000	447.548.864.871
207	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	Kab. Wonosobo	0321	15.373.207.000	14.977.060.479	337.190.695.000	334.695.386.893	352.563.902.000	349.672.447.372
208	JAWA TENGAH	MAGELANG	Kota Magelang	0355	8.069.515.000	4.870.785.365	77.221.197.000	76.650.032.611	85.290.712.000	81.520.817.976
209	JAWA TENGAH	PEKALONGAN	Kota Pekalongan	0353	37.611.051.000	32.857.801.676	109.826.085.000	108.820.787.141	147.437.136.000	141.678.588.817
210	JAWA TENGAH	SEMARANG II	Kota Salatiga	0352	29.640.219.000	28.902.315.472	89.780.134.000	89.303.670.080	119.420.353.000	118.205.985.552
211	JAWA TENGAH	SEMARANG I	Kota Semarang	0351	15.211.477.000	13.128.032.009	500.991.759.000	500.525.607.387	516.203.236.000	513.653.639.396
212	JAWA TENGAH	SURAKARTA	Kota Surakarta	0356	861.641.000	630.949.259	240.196.626.000	239.427.178.445	241.058.267.000	240.058.127.704
213	JAWA TENGAH	T E G A L	Kota Tegal	0354	27.249.067.000	26.847.813.739	121.116.048.000	120.579.033.522	148.365.115.000	147.426.847.261
214	DI JOGJAKARTA	YOGYAKARTA	Provinsi DI Yogyakarta	0400	50.518.850.000	49.005.271.853	539.696.944.000	539.553.529.430	590.215.794.000	588.558.801.283
215	DI JOGJAKARTA	YOGYAKARTA	Kab. Bantul	0401	27.386.403.000	26.035.845.622	354.684.641.000	353.769.988.576	382.071.044.000	379.805.834.198
216	DI JOGJAKARTA	WONOSARI	Kab. Gunung Kidul	0403	50.070.479.000	43.048.410.083	348.973.129.000	346.991.347.543	399.043.608.000	390.039.757.626
217	DI JOGJAKARTA	W A T E S	Kab. Kulon Progo	0404	21.147.873.000	20.712.325.097	212.880.515.000	211.284.725.518	234.028.388.000	231.997.050.615
218	DI JOGJAKARTA	YOGYAKARTA	Kab. Sleman	0402	11.752.548.000	11.202.037.429	369.863.814.000	367.975.618.914	381.616.362.000	379.177.656.343
219	DI JOGJAKARTA	YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	0451	16.752.958.000	15.690.538.253	160.608.452.000	159.524.167.492	177.361.410.000	175.214.705.745
220	JAWA TIMUR	SURABAYA II	Provinsi Jawa Timur	0500	150.386.849.000	141.550.691.019	3.974.490.693.000	3.973.562.776.800	4.124.877.542.000	4.115.113.467.819
221	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	Kab. Bangkalan	0508	38.358.244.000	36.297.384.613	404.757.810.000	402.624.820.749	443.116.054.000	438.922.205.362
222	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	Kab. Banyuwangi	0511	84.721.071.000	82.892.664.532	518.308.930.000	514.226.918.643	603.030.001.000	597.119.583.175

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
223	JAWA TIMUR	B L I T A R	Kab. Blitar	0521	17.969.263.000	15.226.214.425	422.498.162.000	420.748.570.037	440.467.425.000	435.974.784.462
224	JAWA TIMUR	BOJONEGORO	Kab. Bojonegoro	0527	524.900.000	324.899.220	448.688.776.000	445.917.302.727	449.213.676.000	446.242.201.947
225	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	Kab. Bondowoso	0509	7.675.494.000	6.671.427.853	303.549.823.000	299.765.708.842	311.225.317.000	306.437.136.695
226	JAWA TIMUR	SURABAYA I	Kab. Gresik	0501	109.254.038.000	92.058.376.986	398.554.729.000	397.243.576.877	507.808.767.000	489.301.953.863
227	JAWA TIMUR	J E M B E R	Kab. Jember	0512	21.968.635.000	15.046.355.567	647.395.740.000	643.866.226.922	669.364.375.000	658.912.582.489
228	JAWA TIMUR	MOJOKERTO	Kab. Jombang	0504	7.832.499.000	7.533.278.948	381.208.773.000	378.823.447.330	389.041.272.000	386.356.726.278
229	JAWA TIMUR	K E D I R I	Kab. Kediri	0517	11.311.784.000	9.323.635.350	458.088.112.000	449.849.831.899	469.399.896.000	459.173.467.249
230	JAWA TIMUR	BOJONEGORO	Kab. Lamongan	0529	12.017.817.000	11.599.257.601	426.572.301.000	424.182.437.075	438.590.118.000	435.781.694.676
231	JAWA TIMUR	J E M B E R	Kab. Lumajang	0516	15.371.491.000	13.621.572.268	331.135.497.000	328.911.667.310	346.506.988.000	342.533.239.578
232	JAWA TIMUR	M A D I U N	Kab. Madiun	0522	14.696.772.000	14.392.199.148	249.520.103.000	247.476.747.716	264.216.875.000	261.868.946.864
233	JAWA TIMUR	M A D I U N	Kab. Magetan	0524	13.002.564.000	12.627.656.379	279.027.691.000	277.513.402.693	292.030.255.000	290.141.059.072
234	JAWA TIMUR	M A L A N G	Kab. Malang	0513	25.665.754.000	23.921.155.991	729.859.457.000	727.669.050.787	755.525.211.000	751.590.206.778
235	JAWA TIMUR	MOJOKERTO	Kab. Mojokerto	0502	25.511.212.000	25.281.051.434	345.158.529.000	342.550.421.504	370.669.741.000	367.831.472.938
236	JAWA TIMUR	K E D I R I	Kab. Nganjuk	0519	31.843.555.000	29.642.411.477	418.113.515.000	416.970.039.100	449.957.070.000	446.612.450.577
237	JAWA TIMUR	M A D I U N	Kab. Ngawi	0523	7.849.159.000	6.957.899.048	298.781.045.000	297.338.384.381	306.630.204.000	304.296.283.429
238	JAWA TIMUR	PACITAN	Kab. Pacitan	0526	18.580.731.000	9.233.785.810	252.713.224.000	251.021.891.474	271.293.955.000	260.255.677.284
239	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	Kab. Pamekasan	0506	16.247.316.000	12.266.898.469	308.219.201.000	305.997.940.594	324.466.517.000	318.264.839.063
240	JAWA TIMUR	M A L A N G	Kab. Pasuruan	0514	12.583.670.000	11.176.334.255	528.995.100.000	520.367.827.238	541.578.770.000	531.544.161.493
241	JAWA TIMUR	M A D I U N	Kab. Ponorogo	0525	32.734.428.000	31.550.421.601	337.889.518.000	335.880.415.140	370.623.946.000	367.430.836.741
242	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	Kab. Probolinggo	0515	10.398.711.000	10.171.016.405	371.903.658.000	370.425.365.516	382.302.369.000	380.596.381.921
243	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	Kab. Sampang	0505	21.325.063.000	20.714.272.442	346.576.512.000	344.059.901.310	367.901.575.000	364.774.173.752
244	JAWA TIMUR	SIDOARJO	Kab. Sidoarjo	0503	28.549.836.000	24.988.371.499	594.266.800.000	593.188.430.632	622.816.636.000	618.176.802.131
245	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	Kab. Situbondo	0510	11.076.898.000	10.501.729.979	260.418.187.000	259.551.854.914	271.495.085.000	270.053.584.893
246	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	Kab. Sumenep	0507	27.755.948.000	27.552.115.452	345.481.728.000	341.232.362.872	373.237.676.000	368.784.478.324
247	JAWA TIMUR	K E D I R I	Kab. Trenggalek	0520	12.270.943.000	12.134.577.997	255.772.492.000	250.781.412.438	268.043.435.000	262.915.990.435
248	JAWA TIMUR	T U B A N	Kab. Tuban	0528	21.247.337.000	14.382.698.500	404.533.271.000	402.271.172.164	425.780.608.000	416.653.870.664
249	JAWA TIMUR	B L I T A R	Kab. Tulungagung	0518	17.988.173.000	15.245.338.435	395.428.474.000	388.512.531.960	413.416.647.000	403.757.870.395
250	JAWA TIMUR	B L I T A R	Kota Blitar	0556	658.260.000	533.052.578	67.129.425.000	66.950.849.582	67.787.685.000	67.483.902.160
251	JAWA TIMUR	K E D I R I	Kota Kediri	0557	9.786.395.000	8.650.906.298	114.588.622.000	113.806.558.797	124.375.017.000	122.457.465.095
252	JAWA TIMUR	M A D I U N	Kota Madiun	0558	4.567.123.000	4.458.238.764	87.484.968.000	87.335.823.288	92.052.091.000	91.794.062.052
253	JAWA TIMUR	M A L A N G	Kota Malang	0553	8.744.209.000	8.674.883.114	260.489.027.000	257.287.868.777	269.233.236.000	265.962.751.891
254	JAWA TIMUR	MOJOKERTO	Kota Mojokerto	0552	1.823.662.000	1.054.596.347	69.236.019.000	68.490.951.665	71.059.681.000	69.545.548.012
255	JAWA TIMUR	M A L A N G	Kota Pasuruan	0554	6.296.137.000	5.790.933.953	86.026.185.000	85.367.512.919	92.322.322.000	91.158.446.872
256	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	Kota Probolinggo	0555	5.851.647.000	5.036.732.926	90.288.124.000	89.787.286.083	96.139.771.000	94.824.019.009
257	JAWA TIMUR	SURABAYA II	Kota Surabaya	0551	13.300.000.000	11.631.578.252	778.015.507.000	772.583.645.991	791.315.507.000	784.215.224.243
258	JAWA TIMUR	M A L A N G	Kota Batu	0559	1.049.909.000	612.203.039	78.843.564.000	78.593.567.973	79.893.473.000	79.205.771.012
259	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	Provinsi Kalimantan Barat	1300	51.897.197.000	49.847.341.971	711.661.695.000	711.016.690.588	763.558.892.000	760.864.032.559

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
260	KALIMANTAN BARAT	SINGKAWANG	Kab. Bengkayang	1307	33.656.534.000	32.045.840.822	185.991.076.000	183.083.468.673	219.647.610.000	215.129.309.495
261	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	Kab. Landak	1308	24.737.254.000	24.517.011.761	208.171.008.000	207.327.641.728	232.908.262.000	231.844.653.489
262	KALIMANTAN BARAT	PUTUSSIBAU	Kab. Kapuas Hulu	1305	56.294.603.000	54.820.117.283	193.577.167.000	189.655.363.506	249.871.770.000	244.475.480.789
263	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	Kab. Ketapang	1306	26.137.612.000	26.089.510.549	332.252.945.000	326.757.166.776	358.390.557.000	352.846.677.325
264	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	Kab. Mempawah	1304	31.261.355.000	29.706.655.946	136.017.519.000	132.286.658.752	167.278.874.000	161.993.314.698
265	KALIMANTAN BARAT	SINGKAWANG	Kab. Sambas	1301	107.369.954.000	106.613.435.611	290.765.370.000	286.571.201.754	398.135.324.000	393.184.637.365
266	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	Kab. Sanggau	1302	45.840.007.000	45.012.902.383	248.296.340.000	240.845.098.597	294.136.347.000	285.858.000.980
267	KALIMANTAN BARAT	S I N T A N G	Kab. Sintang	1303	27.698.420.000	25.324.471.626	308.517.274.000	304.686.646.483	336.215.694.000	330.011.118.109
268	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	Kota Pontianak	1351	43.106.828.000	38.760.274.705	206.097.001.000	201.387.437.184	249.203.829.000	240.147.711.889
269	KALIMANTAN BARAT	SINGKAWANG	Kota Singkawang	1352	31.430.809.000	31.146.635.874	102.480.941.000	101.679.800.103	133.911.750.000	132.826.435.977
270	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	Kab. Sekadau	1310	40.488.126.000	39.903.936.123	128.471.246.000	126.018.739.388	168.959.372.000	165.922.675.511
271	KALIMANTAN BARAT	S I N T A N G	Kab. Melawi	1309	21.994.135.000	21.790.108.300	162.925.160.000	160.599.693.989	184.919.295.000	182.389.802.289
272	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	Kab. Kayong Utara	1311	48.722.772.000	44.446.658.568	91.709.823.000	91.283.643.138	140.432.595.000	135.730.301.706
273	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	Kab. Kubu Raya	1312	211.445.634.000	195.691.441.426	256.880.796.000	254.747.229.140	468.326.430.000	450.438.670.566
274	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	Provinsi Kalimantan Tengah	1400	91.651.920.000	90.463.883.921	415.914.917.000	415.578.780.500	507.566.837.000	506.042.664.421
275	KALIMANTAN TENGAH	B U N T O K	Kab. Barito Selatan	1403	18.022.668.000	17.734.980.455	115.697.632.000	112.879.237.045	133.720.300.000	130.614.217.500
276	KALIMANTAN TENGAH	B U N T O K	Kab. Barito Utara	1402	16.629.509.000	15.328.636.024	128.614.292.000	122.327.283.704	145.243.801.000	137.655.919.728
277	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	Kab. Kapuas	1401	22.152.913.000	21.586.506.263	271.956.191.000	267.799.409.136	294.109.104.000	289.385.915.399
278	KALIMANTAN TENGAH	PANGKALAN BUN	Kab. Kotawaringin Barat	1405	10.203.914.000	10.001.044.447	149.851.477.000	146.971.258.812	160.055.391.000	156.972.303.259
279	KALIMANTAN TENGAH	S A M P I T	Kab. Kotawaringin Timur	1404	31.838.713.000	31.167.484.465	235.596.832.000	226.756.060.255	267.435.545.000	257.923.544.720
280	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	Kota Palangkaraya	1451	7.247.530.000	7.041.635.645	137.998.944.000	136.492.373.851	145.246.474.000	143.534.009.496
281	KALIMANTAN TENGAH	S A M P I T	Kab. Katingan	1406	83.474.442.000	82.775.069.237	142.302.629.000	139.348.214.533	225.777.071.000	222.123.283.770
282	KALIMANTAN TENGAH	S A M P I T	Kab. Seruyan	1407	21.875.097.000	21.758.264.456	110.272.372.000	106.091.498.829	132.147.469.000	127.849.763.285
283	KALIMANTAN TENGAH	PANGKALAN BUN	Kab. Sukamara	1408	4.167.374.000	3.488.862.340	51.525.790.000	50.612.284.914	55.693.164.000	54.101.147.254
284	KALIMANTAN TENGAH	PANGKALAN BUN	Kab. Lamandau	1409	14.199.655.000	13.719.764.357	75.933.342.000	72.516.653.361	90.132.997.000	86.236.417.718
285	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	Kab. Gunung Mas	1410	11.518.994.000	11.384.180.659	139.581.448.000	136.329.340.777	151.100.442.000	147.713.521.436
286	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	Kab. Pulang Pisau	1411	17.109.446.000	16.908.750.392	112.950.838.000	108.711.132.341	130.060.284.000	125.619.882.733
287	KALIMANTAN TENGAH	B U N T O K	Kab. Murung Raya	1412	7.676.753.000	5.704.855.182	130.829.064.000	127.765.714.885	138.505.817.000	133.470.570.067
288	KALIMANTAN TENGAH	B U N T O K	Kab. Barito Timur	1413	22.270.527.000	21.585.780.190	95.844.855.000	95.076.489.055	118.115.382.000	116.662.269.245
289	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	Provinsi Kalimantan Selatan	1500	94.018.332.000	89.437.997.772	498.138.335.000	498.036.058.396	592.156.667.000	587.474.056.168
290	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	Kab. Banjar	1501	49.598.156.000	48.266.486.673	274.609.902.000	271.725.178.106	324.208.058.000	319.991.664.779
291	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	Kab. Barito Kuala	1506	53.853.882.000	50.541.007.464	200.406.509.000	196.415.946.623	254.260.391.000	246.956.954.087
292	KALIMANTAN SELATAN	BARABAI	Kab. Hulu Sungai Selatan	1504	28.850.442.000	28.481.803.011	130.926.050.000	126.896.446.472	159.776.492.000	155.378.249.483
293	KALIMANTAN SELATAN	BARABAI	Kab. Hulu Sungai Tengah	1505	51.634.120.000	50.742.422.165	143.433.455.000	134.598.981.360	195.067.575.000	185.341.403.525
294	KALIMANTAN SELATAN	T A N J U N G	Kab. Hulu Sungai Utara	1509	5.852.394.000	5.284.608.825	114.573.799.000	112.525.140.528	120.426.193.000	117.809.749.353
295	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	Kab. Kotabaru	1508	37.151.689.000	36.818.354.413	155.240.518.000	149.192.278.143	192.392.207.000	186.010.632.556
296	KALIMANTAN SELATAN	T A N J U N G	Kab. Tabalong	1507	9.526.014.000	8.275.259.037	162.279.010.000	157.893.204.972	171.805.024.000	166.168.464.009

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
297	KALIMANTAN SELATAN	PELAIHARI	Kab. Tanah Laut	1502	17.872.893.000	14.910.035.652	194.435.750.000	188.450.393.545	212.308.643.000	203.360.429.197
298	KALIMANTAN SELATAN	BARABAI	Kab. Tapin	1503	14.888.518.000	14.868.975.002	114.914.865.000	113.216.548.327	129.803.383.000	128.085.523.329
299	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	Kota Banjarbaru	1552	39.445.898.000	38.570.481.911	121.992.049.000	121.101.560.502	161.437.947.000	159.672.042.413
300	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	Kota Banjarmasin	1551	8.946.999.000	7.823.805.153	234.535.999.000	230.644.523.345	243.482.998.000	238.468.328.498
301	KALIMANTAN SELATAN	T A N J U N G	Kab. Balangan	1511	1.618.201.000	1.611.713.142	99.214.668.000	95.283.567.117	100.832.869.000	96.895.280.259
302	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	Kab. Tanah Bumbu	1510	8.053.203.000	7.763.452.001	181.709.824.000	180.452.202.362	189.763.027.000	188.215.654.363
303	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	Provinsi Kalimantan Timur	1600	72.197.874.000	51.666.088.879	582.040.425.000	581.958.593.400	654.238.299.000	633.624.682.279
304	KALIMANTAN TIMUR	TANJUNG REDEP	Kab. Berau	1604	978.979.000	934.635.000	151.466.469.000	144.483.915.699	152.445.448.000	145.418.550.699
305	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	Kab. Kutai Kartanegara	1610	23.405.276.000	21.740.652.286	421.301.754.000	409.610.966.362	444.707.030.000	431.351.618.648
306	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	Kab. Kutai Barat	1607	5.425.881.000	3.407.480.079	126.594.819.000	119.098.387.232	132.020.700.000	122.505.867.311
307	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	Kab. Kutai Timur	1608	5.097.899.000	4.755.983.671	228.507.868.000	225.558.477.337	233.605.767.000	230.314.461.008
308	KALIMANTAN TIMUR	BALIKPAPAN	Kab. Paser	1602	8.704.760.000	8.337.324.690	168.469.528.000	163.363.116.611	177.174.288.000	171.700.441.301
309	KALIMANTAN TIMUR	BALIKPAPAN	Kota Balikpapan	1652	2.586.563.000	2.160.634.738	269.500.206.000	266.299.784.674	272.086.769.000	268.460.419.412
310	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	Kota Bontang	1654	2.682.928.000	-	74.305.382.000	73.560.761.047	76.988.310.000	73.560.761.047
311	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	Kota Samarinda	1651	18.543.613.000	18.127.951.830	306.478.520.000	295.810.962.789	325.022.133.000	313.938.914.619
312	KALIMANTAN TIMUR	BALIKPAPAN	Kab. Penajam Paser Utara	1609	38.854.687.000	37.647.748.544	114.516.937.000	106.863.203.634	153.371.624.000	144.510.952.178
313	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	Kab. Mahakam Ulu	1613	-	-	28.997.328.000	25.266.576.381	28.997.328.000	25.266.576.381
314	SULAWESI UTARA	M A N A D O	Provinsi Sulawesi Utara	1700	165.741.618.000	162.840.443.745	412.842.289.000	412.771.837.100	578.583.907.000	575.612.280.845
315	SULAWESI UTARA	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow	1703	23.731.322.000	23.090.426.003	129.025.919.000	125.427.755.973	152.757.241.000	148.518.181.976
316	SULAWESI UTARA	M A N A D O	Kab. Minahasa	1702	41.770.373.000	40.879.635.237	160.402.243.000	155.623.574.028	202.172.616.000	196.503.209.265
317	SULAWESI UTARA	T A H U N A	Kab. Sangihe	1704	11.362.980.000	11.170.738.433	107.697.498.000	103.451.076.273	119.060.478.000	114.621.814.706
318	SULAWESI UTARA	BITUNG	Kota Bitung	1753	15.220.897.000	15.175.685.845	79.993.067.000	78.192.585.444	95.213.964.000	93.368.271.289
319	SULAWESI UTARA	M A N A D O	Kota Manado	1751	39.766.659.000	25.089.516.833	158.992.460.000	156.505.950.040	198.759.119.000	181.595.466.873
320	SULAWESI UTARA	BITUNG	Kab. Kepulauan Talaud	1705	10.032.407.000	9.825.722.750	86.548.042.000	82.124.979.706	96.580.449.000	91.950.702.456
321	SULAWESI UTARA	M A N A D O	Kab. Minahasa Selatan	1706	86.416.576.000	83.511.566.130	117.697.073.000	114.388.713.015	204.113.649.000	197.900.279.145
322	SULAWESI UTARA	M A N A D O	Kota Tomohon	1752	16.617.492.000	16.346.559.693	58.878.535.000	57.829.969.892	75.496.027.000	74.176.529.585
323	SULAWESI UTARA	BITUNG	Kab. Minahasa Utara	1708	20.184.520.000	19.828.383.245	116.717.436.000	115.741.994.796	136.901.956.000	135.570.378.041
324	SULAWESI UTARA	T A H U N A	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1712	17.292.314.000	16.120.120.195	44.389.540.000	40.361.183.508	61.681.854.000	56.481.303.703
325	SULAWESI UTARA	KOTAMOBAGU	Kota Kotamobagu	1754	22.643.070.000	22.452.205.898	54.632.299.000	53.285.805.308	77.275.369.000	75.738.011.206
326	SULAWESI UTARA	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1711	10.053.613.000	8.482.685.789	58.610.224.000	56.476.380.447	68.663.837.000	64.959.066.236
327	SULAWESI UTARA	M A N A D O	Kab. Minahasa Tenggara	1710	12.363.595.000	11.201.849.269	72.094.005.000	68.479.363.375	84.457.600.000	79.681.212.644
328	SULAWESI UTARA	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1714	39.743.393.000	39.600.320.915	51.325.728.000	49.381.340.656	91.069.121.000	88.981.661.571
329	SULAWESI UTARA	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1713	256.027.992.000	254.944.250.467	56.098.574.000	55.104.678.661	312.126.566.000	310.048.929.128
330	SULAWESI TENGAH	P A L U	Provinsi Sulawesi Tengah	1800	56.071.519.000	34.559.384.455	499.901.792.000	499.893.411.800	555.973.311.000	534.452.796.255
331	SULAWESI TENGAH	L U W U K	Kab. Banggai	1804	17.036.053.000	16.558.075.630	220.922.053.000	218.074.604.807	237.958.106.000	234.632.680.437
332	SULAWESI TENGAH	L U W U K	Kab. Banggai Kepulauan	1807	29.090.709.000	28.145.817.477	107.191.548.000	105.563.611.497	136.282.257.000	133.709.428.974
333	SULAWESI TENGAH	TOLI - TOLI	Kab. Buol	1805	28.506.819.000	27.195.282.980	98.758.480.000	96.827.246.909	127.265.299.000	124.022.529.889

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
334	SULAWESI TENGAH	TOLI - TOLI	Kab. Tolitoli	1803	27.976.871.000	27.631.927.816	130.131.512.000	126.843.461.825	158.108.383.000	154.475.389.641
335	SULAWESI TENGAH	P A L U	Kab. Donggala	1802	36.053.558.000	35.297.883.523	217.651.211.000	212.501.311.561	253.704.769.000	247.799.195.084
336	SULAWESI TENGAH	P O S O	Kab. Morowali	1806	86.988.340.000	82.981.595.467	127.452.380.000	125.746.133.007	214.440.720.000	208.727.728.474
337	SULAWESI TENGAH	P O S O	Kab. Poso	1801	37.079.695.000	36.714.361.263	140.765.693.000	135.549.677.658	177.845.388.000	172.264.038.921
338	SULAWESI TENGAH	P A L U	Kota Palu	1851	32.755.887.000	30.899.541.724	184.665.048.000	183.156.188.127	217.420.935.000	214.055.729.851
339	SULAWESI TENGAH	P A L U	Kab. Parigi Moutong	1808	57.831.124.000	50.697.770.361	252.935.927.000	250.568.744.932	310.767.051.000	301.266.515.293
340	SULAWESI TENGAH	P O S O	Kab. Tojo Una Una	1809	35.416.803.000	35.153.216.144	132.463.120.000	130.783.436.692	167.879.923.000	165.936.652.836
341	SULAWESI TENGAH	P A L U	Kab. Sigi	1812	16.304.125.000	16.091.875.982	169.358.647.000	165.293.798.266	185.662.772.000	181.385.674.248
342	SULAWESI TENGAH	L U W U K	Kab. Banggai Laut	1813	11.457.542.000	10.679.682.523	70.402.046.000	69.510.118.480	81.859.588.000	80.189.801.003
343	SULAWESI TENGAH	P O S O	Kab. Morowali Utara	1814	12.912.521.000	12.652.565.086	101.857.989.000	100.299.532.712	114.770.510.000	112.952.097.798
344	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR II	Provinsi Sulawesi Selatan	1900	142.127.296.000	128.137.556.874	1.374.904.815.000	1.373.765.359.300	1.517.032.111.000	1.501.902.916.174
345	SULAWESI SELATAN	BANTAENG	Kab. Bantaeng	1912	5.205.080.000	5.174.537.708	134.291.884.000	133.396.840.164	139.496.964.000	138.571.377.872
346	SULAWESI SELATAN	PARE - PARE	Kab. Barru	1916	18.455.581.000	17.267.587.178	128.787.058.000	125.499.600.784	147.242.639.000	142.767.187.962
347	SULAWESI SELATAN	WATAMPONE	Kab. Bone	1905	27.515.201.000	26.811.715.734	430.372.423.000	421.217.469.616	457.887.624.000	448.029.185.350
348	SULAWESI SELATAN	BANTAENG	Kab. Bulukumba	1911	108.956.278.000	107.336.824.554	226.384.382.000	224.479.906.684	335.340.660.000	331.816.731.238
349	SULAWESI SELATAN	PARE - PARE	Kab. Enrekang	1921	24.061.927.000	23.447.660.783	170.871.693.000	169.666.571.949	194.933.620.000	193.114.232.732
350	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR II	Kab. Gowa	1902	36.721.351.000	36.180.958.912	323.474.496.000	319.553.149.985	360.195.847.000	355.734.108.897
351	SULAWESI SELATAN	BANTAENG	Kab. Jeneponto	1913	17.631.228.000	17.000.927.584	192.067.884.000	185.986.312.052	209.699.112.000	202.987.239.636
352	SULAWESI SELATAN	P A L O P O	Kab. Luwu	1909	15.728.893.000	15.230.218.810	227.973.684.000	226.171.539.754	243.702.577.000	241.401.758.564
353	SULAWESI SELATAN	P A L O P O	Kab. Luwu Utara	1922	19.665.147.000	18.282.221.012	206.943.920.000	204.983.152.111	226.609.067.000	223.265.373.123
354	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR I	Kab. Maros	1907	39.839.470.000	39.289.157.392	207.824.024.000	204.867.945.407	247.663.494.000	244.157.102.799
355	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR I	Kab. Pangkajene Kepulauan	1918	31.154.804.000	30.262.922.353	243.130.733.000	242.072.998.201	274.285.537.000	272.335.920.554
356	SULAWESI SELATAN	P A L O P O	Kota Palopo	1953	28.774.888.000	26.213.783.252	94.984.402.000	93.096.999.619	123.759.290.000	119.310.782.871
357	SULAWESI SELATAN	P A L O P O	Kab. Luwu Timur	1924	44.892.026.000	44.187.310.780	159.255.953.000	157.353.111.671	204.147.979.000	201.540.422.451
358	SULAWESI SELATAN	PARE - PARE	Kab. Pinrang	1901	33.538.477.000	33.024.443.187	224.930.264.000	222.057.143.353	258.468.741.000	255.081.586.540
359	SULAWESI SELATAN	SINJAI	Kab. Sinjai	1910	31.069.882.000	29.799.307.346	170.746.403.000	166.046.498.493	201.816.285.000	195.845.805.839
360	SULAWESI SELATAN	BENTENG	Kab. Kepulauan Selayar	1914	17.816.004.000	17.690.785.769	142.368.084.000	138.440.224.458	160.184.088.000	156.131.010.227
361	SULAWESI SELATAN	PARE - PARE	Kab. Sidenreng Rappang	1917	12.890.741.000	12.327.107.560	167.177.118.000	165.830.678.784	180.067.859.000	178.157.786.344
362	SULAWESI SELATAN	WATAMPONE	Kab. Soppeng	1919	25.824.168.000	24.839.881.967	155.402.591.000	153.676.592.099	181.226.759.000	178.516.474.066
363	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR II	Kab. Takalar	1915	8.594.530.000	8.423.598.807	175.230.083.000	174.053.798.961	183.824.613.000	182.477.397.768
364	SULAWESI SELATAN	M A K A L E	Kab. Tana Toraja	1906	35.131.785.000	33.774.242.150	178.782.582.000	171.809.074.563	213.914.367.000	205.583.316.713
365	SULAWESI SELATAN	WATAMPONE	Kab. Wajo	1903	65.938.112.000	62.025.039.489	214.384.567.000	211.792.106.379	280.322.679.000	273.817.145.868
366	SULAWESI SELATAN	PARE - PARE	Kota Parepare	1952	8.996.916.000	8.761.096.160	90.805.106.000	88.957.915.462	99.802.022.000	97.719.011.622
367	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR I	Kota Makassar	1951	7.216.697.000	6.813.716.035	536.286.989.000	525.798.878.033	543.503.686.000	532.612.594.068
368	SULAWESI SELATAN	M A K A L E	Kab. Toraja Utara	1925	17.697.657.000	17.409.268.577	192.915.379.000	186.592.404.428	210.613.036.000	204.001.673.005
369	SULAWESI TENGGARA	K E N D A R I	Provinsi Sulawesi Tenggara	2000	51.173.497.000	23.124.017.813	606.291.387.000	606.193.272.700	657.464.884.000	629.317.290.513
370	SULAWESI TENGGARA	B A U - B A U	Kab. Buton	2002	41.258.549.000	40.624.076.626	110.268.218.000	107.027.360.655	151.526.767.000	147.651.437.281

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
371	SULAWESI TENGGARA	K E N D A R I	Kab. Konawe	2009	20.456.953.000	20.036.190.903	221.303.559.000	218.298.432.994	241.760.512.000	238.334.623.897
372	SULAWESI TENGGARA	K O L A K A	Kab. Kolaka	2004	30.390.669.000	30.161.798.404	150.500.242.000	147.809.840.898	180.890.911.000	177.971.639.302
373	SULAWESI TENGGARA	R A H A	Kab. Muna	2003	28.718.860.000	28.388.027.110	224.031.272.000	220.241.098.399	252.750.132.000	248.629.125.509
374	SULAWESI TENGGARA	K E N D A R I	Kota Kendari	2051	34.922.311.000	29.225.572.509	201.441.057.000	199.759.140.559	236.363.368.000	228.984.713.068
375	SULAWESI TENGGARA	B A U - B A U	Kota Bau-bau	2052	11.095.123.000	10.621.387.267	105.084.606.000	101.340.474.698	116.179.729.000	111.961.861.965
376	SULAWESI TENGGARA	K E N D A R I	Kab. Konawe Selatan	2005	46.790.947.000	46.242.166.890	213.344.780.000	209.048.695.475	260.135.727.000	255.290.862.365
377	SULAWESI TENGGARA	K E N D A R I	Kab. Bombana	2006	36.187.985.000	29.830.325.000	134.923.558.000	130.902.374.966	171.111.543.000	160.732.699.966
378	SULAWESI TENGGARA	B A U - B A U	Kab. Wakatobi	2007	16.820.890.000	16.384.824.224	98.921.331.000	96.021.389.721	115.742.221.000	112.406.213.945
379	SULAWESI TENGGARA	K O L A K A	Kab. Kolaka Utara	2008	33.326.987.000	32.405.691.002	99.932.135.000	98.299.168.566	133.259.122.000	130.704.859.568
380	SULAWESI TENGGARA	K E N D A R I	Kab. Konawe Utara	2010	29.208.222.000	27.571.565.500	89.515.593.000	88.176.990.401	118.723.815.000	115.748.555.901
381	SULAWESI TENGGARA	B A U - B A U	Kab. Buton Utara	2011	194.773.015.000	191.414.128.861	84.138.239.000	82.756.394.056	278.911.254.000	274.170.522.917
382	SULAWESI TENGGARA	K E N D A R I	Kab. Konawe Kepulauan	2013	191.287.747.000	190.327.578.673	45.083.166.000	44.898.378.145	236.370.913.000	235.225.956.818
383	SULAWESI TENGGARA	K O L A K A	Kab. Kolaka Timur	2012	190.028.968.000	175.990.611.727	104.518.929.000	102.877.472.163	294.547.897.000	278.868.083.890
384	SULAWESI TENGGARA	R A H A	Kab. Muna Barat	2053	28.147.943.000	27.747.005.200	93.008.945.000	91.200.277.885	121.156.888.000	118.947.283.085
385	SULAWESI TENGGARA	B A U - B A U	Kab. Buton Tengah	2055	196.027.619.000	190.857.448.212	99.610.636.000	98.223.168.433	295.638.255.000	289.080.616.645
386	SULAWESI TENGGARA	B A U - B A U	Kab. Buton Selatan	2054	38.239.434.000	20.465.050.810	86.024.330.000	84.045.266.502	124.263.764.000	104.510.317.312
387	BALI	D E N P A S A R	Provinsi Bali	2200	90.134.667.000	84.007.989.018	663.748.417.000	663.596.745.857	753.883.084.000	747.604.734.875
388	BALI	D E N P A S A R	Kab. Badung	2207	3.561.622.000	3.220.983.324	266.641.316.000	262.437.955.207	270.202.938.000	265.658.938.531
389	BALI	AMLAPURA	Kab. Bangli	2206	14.611.387.000	13.197.776.504	121.325.031.000	116.883.949.460	135.936.418.000	130.081.725.964
390	BALI	SINGARAJA	Kab. Buleleng	2201	4.500.941.000	4.204.391.633	354.011.168.000	352.487.794.110	358.512.109.000	356.692.185.743
391	BALI	D E N P A S A R	Kab. Gianyar	2204	49.519.683.000	48.117.983.678	198.449.920.000	193.533.505.808	247.969.603.000	241.651.489.486
392	BALI	SINGARAJA	Kab. Jembrana	2202	1.407.804.000	1.292.927.617	133.233.911.000	132.222.667.085	134.641.715.000	133.515.594.702
393	BALI	AMLAPURA	Kab. Karangasem	2205	1.124.124.000	979.576.871	241.151.876.000	239.710.786.354	242.276.000.000	240.690.363.225
394	BALI	AMLAPURA	Kab. Klungkung	2203	21.909.791.000	18.913.347.670	120.231.859.000	118.546.010.521	142.141.650.000	137.459.358.191
395	BALI	D E N P A S A R	Kab. Tabanan	2208	51.825.455.000	50.524.873.013	222.408.734.000	218.728.033.987	274.234.189.000	269.252.907.000
396	BALI	D E N P A S A R	Kota Denpasar	2251	13.536.578.000	13.298.904.178	265.952.396.000	263.162.282.949	279.488.974.000	276.461.187.127
397	NUSA TENGGARA BARAT	M A T A R A M	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2300	101.797.577.000	87.827.501.387	750.187.346.000	749.894.290.200	851.984.923.000	837.721.791.587
398	NUSA TENGGARA BARAT	B I M A	Kab. Bima	2304	40.830.524.000	38.820.786.519	307.084.444.000	305.342.183.685	347.914.968.000	344.162.970.204
399	NUSA TENGGARA BARAT	B I M A	Kab. Dompu	2306	26.716.786.000	21.382.923.864	159.391.356.000	159.062.698.811	186.108.142.000	180.445.622.675
400	NUSA TENGGARA BARAT	M A T A R A M	Kab. Lombok Barat	2301	51.752.520.000	49.190.638.910	293.167.410.000	291.787.559.152	344.919.930.000	340.978.198.062
401	NUSA TENGGARA BARAT	M A T A R A M	Kab. Lombok Tengah	2302	46.919.753.000	46.250.980.209	438.270.424.000	433.125.656.338	485.190.177.000	479.376.636.547
402	NUSA TENGGARA BARAT	S E L O N G	Kab. Lombok Timur	2303	119.910.017.000	114.099.400.946	564.443.874.000	560.189.305.775	684.353.891.000	674.288.706.721
403	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BESAR	Kab. Sumbawa	2305	40.311.323.000	39.460.818.745	315.968.616.000	309.119.767.169	356.279.939.000	348.580.585.914
404	NUSA TENGGARA BARAT	M A T A R A M	Kota Mataram	2351	31.831.939.000	31.555.731.244	183.923.603.000	181.056.111.609	215.755.542.000	212.611.842.853
405	NUSA TENGGARA BARAT	B I M A	Kota Bima	2352	182.393.298.000	173.553.238.098	102.564.308.000	102.304.487.120	284.957.606.000	275.857.725.218
406	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BESAR	Kab. Sumbawa Barat	2307	6.030.129.000	5.943.939.229	107.505.529.000	106.444.460.217	113.535.658.000	112.388.399.446

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
407	NUSA TENGGARA BARAT	M A T A R A M	Kab. Lombok Utara	2308	30.136.828.000	29.782.053.601	117.484.486.000	117.018.757.496	147.621.314.000	146.800.811.097
408	NUSA TENGGARA TIMUR	K U P A N G	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2400	51.732.870.000	50.956.396.248	956.454.489.000	955.828.438.450	1.008.187.359.000	1.006.784.834.698
409	NUSA TENGGARA TIMUR	K U P A N G	Kab. Alor	2405	42.329.176.000	38.320.017.332	169.556.050.000	162.101.040.296	211.885.226.000	200.421.057.628
410	NUSA TENGGARA TIMUR	ATAMBUA	Kab. Belu	2402	25.068.091.000	24.721.135.669	132.738.820.000	129.389.076.005	157.806.911.000	154.110.211.674
411	NUSA TENGGARA TIMUR	E N D E	Kab. Ende	2408	26.952.826.000	23.635.998.907	173.170.694.000	164.545.170.423	200.123.520.000	188.181.169.330
412	NUSA TENGGARA TIMUR	LARANTUKA	Kab. Flores Timur	2407	46.510.262.000	44.388.819.471	174.090.708.000	169.983.544.681	220.600.970.000	214.372.364.152
413	NUSA TENGGARA TIMUR	K U P A N G	Kab. Kupang	2401	18.629.770.000	15.562.109.872	225.495.387.000	220.573.973.047	244.125.157.000	236.136.082.919
414	NUSA TENGGARA TIMUR	LARANTUKA	Kab. Lembata	2413	34.267.771.000	30.910.664.940	105.339.354.000	103.803.683.712	139.607.125.000	134.714.348.652
415	NUSA TENGGARA TIMUR	R U T E N G	Kab. Manggarai	2410	19.579.526.000	18.922.609.585	231.175.968.000	223.116.477.027	250.755.494.000	242.039.086.612
416	NUSA TENGGARA TIMUR	R U T E N G	Kab. Ngada	2409	34.230.713.000	32.951.639.822	135.775.468.000	132.495.729.459	170.006.181.000	165.447.369.281
417	NUSA TENGGARA TIMUR	E N D E	Kab. Sikka	2406	52.342.166.000	41.157.330.685	216.001.989.000	210.282.521.293	268.344.155.000	251.439.851.978
418	NUSA TENGGARA TIMUR	WAINGAPU	Kab. Sumba Barat	2412	64.453.230.000	64.116.573.334	83.633.986.000	82.125.082.156	148.087.216.000	146.241.655.490
419	NUSA TENGGARA TIMUR	WAINGAPU	Kab. Sumba Timur	2411	30.366.812.000	30.031.380.220	184.124.679.000	177.217.628.121	214.491.491.000	207.249.008.341
420	NUSA TENGGARA TIMUR	K U P A N G	Kab. Timor Tengah Selatan	2404	77.733.870.000	77.268.430.445	278.335.977.000	266.443.913.684	356.069.847.000	343.712.344.129
421	NUSA TENGGARA TIMUR	ATAMBUA	Kab. Timor Tengah Utara	2403	25.590.657.000	18.917.882.883	187.459.600.000	181.197.281.348	213.050.257.000	200.115.164.231
422	NUSA TENGGARA TIMUR	K U P A N G	Kota Kupang	2451	13.635.228.000	13.000.755.466	187.729.412.000	185.621.814.308	201.364.640.000	198.622.569.774
423	NUSA TENGGARA TIMUR	K U P A N G	Kab. Rote Ndao	2414	12.800.411.000	12.135.795.149	132.771.728.000	129.953.292.115	145.572.139.000	142.089.087.264
424	NUSA TENGGARA TIMUR	R U T E N G	Kab. Manggarai Barat	2415	56.746.782.000	56.358.409.040	179.560.246.000	176.701.388.738	236.307.028.000	233.059.797.778
425	NUSA TENGGARA TIMUR	E N D E	Kab. Nagekeo	2417	10.381.917.000	9.123.958.310	108.696.198.000	106.260.589.923	119.078.115.000	115.384.548.233
426	NUSA TENGGARA TIMUR	WAINGAPU	Kab. Sumba Barat Daya	2419	49.552.846.000	48.982.077.089	203.132.151.000	198.399.281.148	252.684.997.000	247.381.358.237
427	NUSA TENGGARA TIMUR	WAINGAPU	Kab. Sumba Tengah	2418	49.034.686.000	48.566.299.405	81.173.254.000	80.215.073.096	130.207.940.000	128.781.372.501
428	NUSA TENGGARA TIMUR	R U T E N G	Kab. Manggarai Timur	2420	106.581.352.000	106.170.556.914	216.887.466.000	209.477.043.987	323.468.818.000	315.647.600.901
429	NUSA TENGGARA TIMUR	K U P A N G	Kab. Sabu Raijua	2421	34.755.164.000	33.419.477.085	85.026.776.000	84.138.908.179	119.781.940.000	117.558.385.264
430	NUSA TENGGARA TIMUR	ATAMBUA	Kab. Malaka	2422	53.302.620.000	52.856.882.792	128.194.009.000	126.749.665.665	181.496.629.000	179.606.548.457
431	MALUKU	A M B O N	Provinsi Maluku	2100	72.526.208.000	62.957.640.141	401.175.626.000	401.094.008.500	473.701.834.000	464.051.648.641
432	MALUKU	SAUMLAKI	Kab. Kepulauan Tanimbar	2103	9.149.974.000	8.977.396.854	83.681.007.000	80.472.704.233	92.830.981.000	89.450.101.087
433	MALUKU	M A S O H I	Kab. Maluku Tengah	2101	43.555.251.000	42.153.525.589	245.479.763.000	234.319.299.793	289.035.014.000	276.472.825.382
434	MALUKU	T U A L	Kab. Maluku Tenggara	2102	19.638.189.000	18.502.336.139	98.659.027.000	97.411.794.216	118.297.216.000	115.914.130.355
435	MALUKU	A M B O N	Kab. Buru	2104	209.725.495.000	203.504.216.309	127.631.882.000	126.772.832.142	337.357.377.000	330.277.048.451
436	MALUKU	A M B O N	Kota Ambon	2151	6.185.379.000	5.597.887.200	170.369.789.000	159.137.269.824	176.555.168.000	164.735.157.024
437	MALUKU	M A S O H I	Kab. Seram Bagian Barat	2106	16.228.912.000	15.528.466.136	154.311.306.000	143.265.747.129	170.540.218.000	158.794.213.265
438	MALUKU	M A S O H I	Kab. Seram Bagian Timur	2107	22.698.074.000	22.116.022.170	131.209.716.000	127.774.647.483	153.907.790.000	149.890.669.653
439	MALUKU	T U A L	Kab. Kepulauan Aru	2105	20.812.897.000	19.861.651.061	130.728.699.000	121.470.073.564	151.541.596.000	141.331.724.625
440	MALUKU	T U A L	Kota Tual	2152	40.325.424.000	39.065.228.378	54.281.606.000	53.283.975.813	94.607.030.000	92.349.204.191
441	MALUKU	SAUMLAKI	Kab. Maluku Barat Daya	2109	40.010.800.000	39.230.067.987	93.641.472.000	87.789.169.348	133.652.272.000	127.019.237.335
442	MALUKU	A M B O N	Kab. Buru Selatan	2110	10.361.473.000	8.808.324.000	92.870.335.000	91.881.177.227	103.231.808.000	100.689.501.227
443	PAPUA	JAYAPURA	Provinsi Papua	2500	20.642.550.000	19.919.894.777	16.598.448.000	16.350.710.400	37.240.998.000	36.270.605.177

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
444	PAPUA	B I A K	Kab. Biak Numfor	2502	25.815.115.000	25.463.641.052	151.287.893.000	149.655.179.510	177.103.008.000	175.118.820.562
445	PAPUA	JAYAPURA	Kab. Jayapura	2501	48.556.577.000	43.101.954.689	160.789.374.000	158.404.984.008	209.345.951.000	201.506.938.697
446	PAPUA PEGUNUNGAN	W A M E N A	Kab. Jayawijaya	3801	38.926.474.000	38.167.832.206	144.822.210.000	132.607.348.520	183.748.684.000	170.775.180.726
447	PAPUA SELATAN	MERAUKE	Kab. Merauke	3601	82.718.668.000	81.781.099.967	252.251.107.000	245.435.518.128	334.969.775.000	327.216.618.095
448	PAPUA TENGAH	T I M I K A	Kab. Mimika	3701	38.621.585.000	6.261.538.650	187.495.452.000	186.607.805.216	226.117.037.000	192.869.343.866
449	PAPUA TENGAH	N A B I R E	Kab. Nabire	3702	86.827.200.000	85.162.148.324	176.982.100.000	172.225.090.989	263.809.300.000	257.387.239.313
450	PAPUA TENGAH	N A B I R E	Kab. Paniai	3703	76.672.896.000	72.018.590.500	175.693.519.000	174.129.384.818	252.366.415.000	246.147.975.318
451	PAPUA TENGAH	W A M E N A	Kab. Puncak Jaya	3704	223.704.000	-	40.757.614.000	40.518.258.600	40.981.318.000	40.518.258.600
452	PAPUA	S E R U I	Kab. Kepulauan Yapen	2504	22.183.280.000	21.854.487.573	116.921.116.000	116.211.982.217	139.104.396.000	138.066.469.790
453	PAPUA	JAYAPURA	Kota Jayapura	2551	23.781.736.000	21.525.412.704	188.506.197.000	188.184.674.072	212.287.933.000	209.710.086.776
454	PAPUA	JAYAPURA	Kab. Sarmi	2516	16.537.075.000	16.497.349.944	60.551.481.000	59.425.528.200	77.088.556.000	75.922.878.144
455	PAPUA	JAYAPURA	Kab. Keerom	2517	239.483.219.000	232.864.393.931	91.359.801.000	89.267.698.271	330.843.020.000	322.132.092.202
456	PAPUA PEGUNUNGAN	W A M E N A	Kab. Yahukimo	3802	51.898.512.000	51.747.010.800	193.710.805.000	193.017.397.493	245.609.317.000	244.764.408.293
457	PAPUA PEGUNUNGAN	JAYAPURA	Kab. Pegunungan Bintang	3806	45.779.260.000	45.409.274.400	102.234.998.000	101.375.700.297	148.014.258.000	146.784.974.697
458	PAPUA PEGUNUNGAN	W A M E N A	Kab. Tolikara	3803	21.335.722.000	21.251.034.000	98.062.297.000	93.433.070.419	119.398.019.000	114.684.104.419
459	PAPUA SELATAN	MERAUKE	Kab. Boven Digoel	3602	24.842.136.000	21.852.735.000	89.871.572.000	83.397.617.367	114.713.708.000	105.250.352.367
460	PAPUA SELATAN	MERAUKE	Kab. Mappi	3603	49.039.940.000	47.390.897.879	141.465.172.000	133.514.925.609	190.505.112.000	180.905.823.488
461	PAPUA SELATAN	MERAUKE	Kab. Asmat	3604	5.255.057.000	5.254.212.250	142.833.474.000	130.069.921.953	148.088.531.000	135.324.134.203
462	PAPUA	S E R U I	Kab. Waropen	2523	10.045.877.000	10.029.146.405	53.564.811.000	53.132.808.987	63.610.688.000	63.161.955.392
463	PAPUA	B I A K	Kab. Supiori	2527	18.526.946.000	18.311.659.788	49.341.902.000	48.742.215.600	67.868.848.000	67.053.875.388
464	PAPUA	JAYAPURA	Kab. Mamberamo Raya	2520	5.471.678.000	5.258.410.000	54.321.344.000	53.894.112.726	59.793.022.000	59.152.522.726
465	PAPUA PEGUNUNGAN	W A M E N A	Kab. Mamberamo Tengah	3804	23.260.373.000	23.181.375.783	33.017.218.000	32.956.966.083	56.277.591.000	56.138.341.866
466	PAPUA PEGUNUNGAN	W A M E N A	Kab. Yalimo	3805	17.275.273.000	17.128.161.178	52.602.924.000	49.117.900.001	69.878.197.000	66.246.061.179
467	PAPUA PEGUNUNGAN	W A M E N A	Kab. Lanny Jaya	3807	7.049.436.000	6.950.585.000	112.970.040.000	108.980.513.996	120.019.476.000	115.931.098.996
468	PAPUA PEGUNUNGAN	W A M E N A	Kab. Nduga	3808	24.503.776.000	24.445.629.000	40.360.025.000	37.796.144.800	64.863.801.000	62.241.773.800
469	PAPUA TENGAH	N A B I R E	Kab. Dogiyai	3706	18.732.928.000	18.411.836.575	95.169.270.000	91.898.971.400	113.902.198.000	110.310.807.975
470	PAPUA TENGAH	T I M I K A	Kab. Puncak	3705	11.678.460.000	11.580.075.264	35.382.346.000	30.242.793.042	47.060.806.000	41.822.868.306
471	PAPUA TENGAH	N A B I R E	Kab. Intan Jaya	3707	55.368.931.000	54.600.902.648	30.773.536.000	28.074.209.325	86.142.467.000	82.675.111.973
472	PAPUA TENGAH	N A B I R E	Kab. Deiyai	3708	11.381.642.000	11.198.132.000	69.653.463.000	69.617.227.000	81.035.105.000	80.815.359.000
473	MALUKU UTARA	T E R N A T E	Provinsi Maluku Utara	2800	36.881.198.000	36.325.061.193	258.492.685.000	258.001.344.200	295.373.883.000	294.326.405.393
474	MALUKU UTARA	T E R N A T E	Kab. Halmahera Tengah	2802	21.514.462.000	21.354.618.656	56.229.246.000	53.664.597.663	77.743.708.000	75.019.216.319
475	MALUKU UTARA	T E R N A T E	Kota Ternate	2851	6.872.517.000	6.569.269.247	110.114.936.000	108.632.635.896	116.987.453.000	115.201.905.143
476	MALUKU UTARA	T E R N A T E	Kab. Halmahera Barat	2807	63.788.761.000	62.486.105.767	120.969.959.000	119.641.939.257	184.758.720.000	182.128.045.024
477	MALUKU UTARA	TOBELO	Kab. Halmahera Timur	2806	13.186.032.000	12.447.261.655	75.597.909.000	73.812.346.495	88.783.941.000	86.259.608.150
478	MALUKU UTARA	T E R N A T E	Kab. Halmahera Selatan	2804	43.941.783.000	43.564.982.711	176.882.715.000	173.340.239.982	220.824.498.000	216.905.222.693
479	MALUKU UTARA	TOBELO	Kab. Halmahera Utara	2803	46.653.260.000	43.298.654.147	125.822.905.000	114.770.978.221	172.476.165.000	158.069.632.368
480	MALUKU UTARA	T E R N A T E	Kab. Kepulauan Sula	2805	209.144.343.000	208.050.119.303	77.624.682.000	77.514.384.403	286.769.025.000	285.564.503.706

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
481	MALUKU UTARA	T E R N A T E	Kota Tidore Kepulauan	2853	52.668.998.000	51.404.948.300	80.345.365.000	79.401.377.277	133.014.363.000	130.806.325.577
482	MALUKU UTARA	TOBELO	Kab. Pulau Morotai	2808	40.976.616.000	40.246.682.378	52.961.950.000	51.929.913.596	93.938.566.000	92.176.595.974
483	MALUKU UTARA	T E R N A T E	Kab. Pulau Taliabu	2809	200.000.000	-	75.009.645.000	73.685.292.200	75.209.645.000	73.685.292.200
484	BANTEN	S E R A N G	Provinsi Banten	2900	124.996.201.000	119.572.322.275	1.152.944.114.000	1.147.942.699.100	1.277.940.315.000	1.267.515.021.375
485	BANTEN	RANGKASBITUNG	Kab. Lebak	2903	24.291.965.000	22.474.012.574	562.349.031.000	557.388.846.900	586.640.996.000	579.862.859.474
486	BANTEN	RANGKASBITUNG	Kab. Pandeglang	2902	17.247.772.000	15.274.391.935	566.534.874.000	563.964.036.275	583.782.646.000	579.238.428.210
487	BANTEN	S E R A N G	Kab. Serang	2901	56.211.015.000	54.258.654.188	558.806.350.000	557.920.897.923	615.017.365.000	612.179.552.111
488	BANTEN	TANGERANG	Kab. Tangerang	2904	13.515.392.000	11.990.520.000	908.737.853.000	907.358.374.362	922.253.245.000	919.348.894.362
489	BANTEN	S E R A N G	Kota Cilegon	2952	43.181.673.000	11.934.647.531	186.214.053.000	185.512.008.421	229.395.726.000	197.446.655.952
490	BANTEN	TANGERANG	Kota Tangerang	2951	15.000.000.000	14.305.991.000	523.012.842.000	521.658.525.677	538.012.842.000	535.964.516.677
491	BANTEN	S E R A N G	Kota Serang	2953	13.465.532.000	13.079.042.470	271.801.957.000	267.851.699.067	285.267.489.000	280.930.741.537
492	BANTEN	TANGERANG	Kota Tangerang Selatan	2954	12.894.584.000	12.569.190.839	405.725.791.000	402.045.480.171	418.620.375.000	414.614.671.010
493	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	Provinsi Bangka Belitung	3000	28.721.306.000	23.059.908.406	207.400.264.000	207.387.859.700	236.121.570.000	230.447.768.106
494	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka	3002	22.731.974.000	19.917.522.888	147.728.959.000	145.736.201.569	170.460.933.000	165.653.724.457
495	BANGKA BELITUNG	TANJUNG PANDAN	Kab. Belitung	3001	10.821.511.000	8.848.258.410	94.241.360.000	92.617.625.074	105.062.871.000	101.465.883.484
496	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	Kota Pangkal Pinang	3051	61.999.180.000	61.351.629.955	99.972.433.000	99.058.732.450	161.971.613.000	160.410.362.405
497	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Selatan	3005	13.999.031.000	13.615.698.250	112.809.804.000	111.611.573.982	126.808.835.000	125.227.272.232
498	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Tengah	3004	41.628.933.000	39.641.432.690	104.251.850.000	102.168.851.325	145.880.783.000	141.810.284.015
499	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Barat	3003	106.819.018.000	104.075.633.363	112.771.955.000	110.996.387.360	219.590.973.000	215.072.020.723
500	BANGKA BELITUNG	TANJUNG PANDAN	Kab. Belitung Timur	3006	15.927.944.000	12.130.398.169	80.556.803.000	79.775.377.137	96.484.747.000	91.905.775.306
501	GORONTALO	GORONTALO	Provinsi Gorontalo	3100	16.105.787.000	15.391.127.525	213.015.824.000	212.957.194.600	229.121.611.000	228.348.322.125
502	GORONTALO	MARISA	Kab. Boalemo	3102	54.710.936.000	51.301.201.412	110.075.571.000	107.970.472.063	164.786.507.000	159.271.673.475
503	GORONTALO	GORONTALO	Kab. Gorontalo	3101	59.478.116.000	57.956.108.951	208.575.558.000	205.615.893.045	268.053.674.000	263.572.001.996
504	GORONTALO	GORONTALO	Kota Gorontalo	3151	5.193.992.000	4.740.378.662	102.434.001.000	100.481.438.092	107.627.993.000	105.221.816.754
505	GORONTALO	MARISA	Kab. Pohuwato	3103	54.314.405.000	53.167.597.014	108.589.650.000	105.690.957.845	162.904.055.000	158.858.554.859
506	GORONTALO	GORONTALO	Kab. Bone Bolango	3104	43.490.086.000	42.311.483.465	121.247.745.000	115.915.691.696	164.737.831.000	158.227.175.161
507	GORONTALO	GORONTALO	Kab. Gorontalo Utara	3107	27.494.634.000	26.788.906.155	102.555.588.000	99.285.304.506	130.050.222.000	126.074.210.661
508	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	Provinsi Kepulauan Riau	3200	92.350.324.000	88.988.492.951	367.214.176.000	367.060.410.690	459.564.500.000	456.048.903.641
509	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	Kab. Natuna	3203	20.936.453.000	18.847.792.362	75.663.221.000	72.451.686.160	96.599.674.000	91.299.478.522
510	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	Kab. Kepulauan Anambas	3205	19.151.454.000	17.791.877.132	60.893.487.000	60.074.282.582	80.044.941.000	77.866.159.714
511	KEPULAUAN RIAU	B A T A M	Kab. Karimun	3202	8.204.346.000	7.818.514.147	149.399.964.000	144.636.287.513	157.604.310.000	152.454.801.660
512	KEPULAUAN RIAU	B A T A M	Kota Batam	3251	20.774.811.000	18.123.066.818	448.004.228.000	446.047.735.695	468.779.039.000	464.170.802.513
513	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	Kota Tanjung Pinang	3252	16.171.481.000	16.020.346.897	106.631.939.000	102.266.567.716	122.803.420.000	118.286.914.613
514	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	Kab. Lingga	3204	10.789.170.000	10.617.983.501	107.111.337.000	101.782.395.676	117.900.507.000	112.400.379.177
515	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	Kab. Bintan	3201	86.528.131.000	85.797.278.489	112.882.946.000	109.188.245.606	199.411.077.000	194.985.524.095
516	PAPUA BARAT	MANOKWARI	Provinsi Papua Barat	3300	2.351.250.000	2.079.824.893	6.688.256.000	6.411.051.900	9.039.506.000	8.490.876.793
517	PAPUA BARAT	FAK - FAK	Kab. Fak Fak	3303	44.029.407.000	38.952.934.001	105.221.884.000	102.679.150.937	149.251.291.000	141.632.084.938

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	KPPN	Daerah	Kode Pemda	DAK Fisik		Total DAK Nonfisik		Total Pagu	Total Realisasi
					Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	40	41	7	8
518	PAPUA BARAT	MANOKWARI	Kab. Manokwari	3301	21.252.258.000	20.385.657.581	147.085.144.000	144.340.184.054	168.337.402.000	164.725.841.635
519	PAPUA BARAT DAYA	S O R O N G	Kab. Sorong	3902	48.051.046.000	43.821.307.721	164.046.775.000	161.263.529.010	212.097.821.000	205.084.836.731
520	PAPUA BARAT DAYA	S O R O N G	Kota Sorong	3951	52.129.614.000	49.374.109.835	132.892.007.000	131.826.109.193	185.021.621.000	181.200.219.028
521	PAPUA BARAT DAYA	S O R O N G	Kab. Raja Ampat	3904	210.919.336.000	207.931.522.872	91.868.978.000	91.440.231.855	302.788.314.000	299.371.754.727
522	PAPUA BARAT DAYA	S O R O N G	Kab. Sorong Selatan	3903	23.019.900.000	22.946.212.327	107.684.737.000	106.331.297.388	130.704.637.000	129.277.509.715
523	PAPUA BARAT	MANOKWARI	Kab. Teluk Bintuni	3306	200.000.000	164.500.000	90.969.771.000	81.024.305.359	91.169.771.000	81.188.805.359
524	PAPUA BARAT	MANOKWARI	Kab. Teluk Wondama	3307	16.513.649.000	16.359.062.981	50.401.203.000	48.433.415.705	66.914.852.000	64.792.478.686
525	PAPUA BARAT	FAK - FAK	Kab. Kaimana	3308	17.668.417.000	17.576.394.500	79.635.083.000	77.145.469.787	97.303.500.000	94.721.864.287
526	PAPUA BARAT DAYA	S O R O N G	Kab. Maybrat	3906	17.830.162.000	17.830.011.000	63.502.858.000	62.273.275.666	81.333.020.000	80.103.286.666
527	PAPUA BARAT DAYA	S O R O N G	Kab. Tambrauw	3905	28.946.040.000	28.640.569.232	56.262.060.000	53.629.392.794	85.208.100.000	82.269.962.026
528	PAPUA BARAT	MANOKWARI	Kab. Manokwari Selatan	3312	12.324.670.000	12.314.861.850	39.687.218.000	39.339.093.512	52.011.888.000	51.653.955.362
529	PAPUA BARAT	MANOKWARI	Kab. Pegunungan Arfak	3311	2.654.656.000	2.473.839.966	49.433.548.000	45.195.684.516	52.088.204.000	47.669.524.482
530	SULAWESI BARAT	MAMUJU	Provinsi Sulawesi Barat	3400	13.772.926.000	13.751.462.018	232.554.889.000	232.480.863.033	246.327.815.000	246.232.325.051
531	SULAWESI BARAT	M A J E N E	Kab. Majene	3401	24.453.962.000	24.111.344.842	148.671.336.000	146.896.901.961	173.125.298.000	171.008.246.803
532	SULAWESI BARAT	MAMUJU	Kab. Mamuju	3402	62.517.793.000	61.630.973.738	184.475.113.000	179.202.363.655	246.992.906.000	240.833.337.393
533	SULAWESI BARAT	M A J E N E	Kab. Polewali Mandar	3404	53.751.711.000	49.451.827.977	246.395.095.000	242.300.751.779	300.146.806.000	291.752.579.756
534	SULAWESI BARAT	M A J E N E	Kab. Mamasa	3405	41.304.885.000	40.919.149.832	147.161.334.000	140.208.950.246	188.466.219.000	181.128.100.078
535	SULAWESI BARAT	MAMUJU	Kab. Pasangkayu	3403	65.213.106.000	64.242.799.177	96.016.224.000	93.654.971.588	161.229.330.000	157.897.770.765
536	SULAWESI BARAT	MAMUJU	Kab. Mamuju Tengah	3406	32.185.425.000	32.134.009.341	90.101.939.000	88.626.087.571	122.287.364.000	120.760.096.912
537	KALIMANTAN UTARA	TANJUNG SELOR	Provinsi Kalimantan Utara	3500	10.724.423.000	10.015.353.200	128.902.254.000	128.854.828.500	139.626.677.000	138.870.181.700
538	PAPUA SELATAN	MERAUKE	Provinsi Papua Tengah	3700	-	-	10.372.746.000	7.353.285.700	10.372.746.000	7.353.285.700
539	PAPUA TENGAH	N A B I R E	Provinsi Papua Selatan	3600	-	-	3.376.891.000	3.276.044.000	3.376.891.000	3.276.044.000
540	PAPUA PEGUNUNGAN	W A M E N A	Provinsi Papua Pegunungan	3800	-	-	4.266.228.000	4.266.228.000	4.266.228.000	4.266.228.000
541	PAPUA BARAT DAYA	S O R O N G	Provinsi Papua Barat Daya	3900	-	-	7.368.602.000	4.508.311.702	7.368.602.000	4.508.311.702
542	KALIMANTAN UTARA	TANJUNG SELOR	Kab. Bulungan	3501	10.924.894.000	10.367.730.416	106.466.639.000	102.190.326.618	117.391.533.000	112.558.057.034
543	KALIMANTAN UTARA	TANJUNG SELOR	Kab. Malinau	3503	6.297.941.000	6.238.928.742	84.724.778.000	80.530.704.134	91.022.719.000	86.769.632.876
544	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	Kab. Nunukan	3502	5.516.081.000	5.462.803.294	133.688.434.000	130.787.259.811	139.204.515.000	136.250.063.105
545	KALIMANTAN UTARA	T A R A K A N	Kota Tarakan	3551	599.948.000	568.175.976	108.070.079.000	106.948.362.602	108.670.027.000	107.516.538.578
546	KALIMANTAN UTARA	T A R A K A N	Kab. Tana Tidung	3504	13.268.698.000	13.058.305.370	27.783.773.000	26.546.668.436	41.052.471.000	39.604.973.806
Jumlah					**18.647.793.242.000**	**17.610.554.270.313**	**146.677.929.010.000**	**145.070.625.814.078**	**165.325.722.252.000**	**162.681.180.084.391**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
1	ACEH	Provinsi Aceh	0600	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ACEH	Kab. Aceh Barat	0606	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ACEH	Kab. Aceh Besar	0601	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ACEH	Kab. Aceh Selatan	0605	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ACEH	Kab. Aceh Singkil	0610	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ACEH	Kab. Aceh Tengah	0607	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ACEH	Kab. Aceh Tenggara	0608	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ACEH	Kab. Aceh Timur	0604	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ACEH	Kab. Aceh Utara	0603	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ACEH	Kab. Bireuen	0611	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ACEH	Kab. Pidie	0602	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ACEH	Kab. Simeulue	0609	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ACEH	Kota Banda Aceh	0651	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ACEH	Kota Sabang	0652	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ACEH	Kota Langsa	0653	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ACEH	Kota Lhokseumawe	0654	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ACEH	Kab. Gayo Lues	0613	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ACEH	Kab. Aceh Barat Daya	0612	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ACEH	Kab. Aceh Jaya	0614	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ACEH	Kab. Nagan Raya	0615	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ACEH	Kab. Aceh Tamiang	0616	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ACEH	Kab. Bener Meriah	0617	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ACEH	Kab. Pidie Jaya	0618	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ACEH	Kota Subulussalam	0656	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SUMATERA UTARA	Provinsi Sumatera Utara	0700	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SUMATERA UTARA	Kab. Asahan	0710	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SUMATERA UTARA	Kab. Dairi	0707	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SUMATERA UTARA	Kab. Deli Serdang	0701	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SUMATERA UTARA	Kab. Karo	0702	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhanbatu	0706	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SUMATERA UTARA	Kab. Langkat	0703	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SUMATERA UTARA	Kab. Mandailing Natal	0713	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SUMATERA UTARA	Kab. Nias	0711	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUMATERA UTARA	Kab. Simalungun	0705	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Selatan	0709	-	-	-	-	-	-	-	-
36	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Tengah	0704	-	-	-	-	-	-	-	-
37	SUMATERA UTARA	Kab. Tapanuli Utara	0708	-	-	-	-	-	-	-	-
38	SUMATERA UTARA	Kab. Toba Samosir	0717	-	-	-	-	-	-	-	-
39	SUMATERA UTARA	Kota Binjai	0753	-	-	-	-	-	-	-	-
40	SUMATERA UTARA	Kota Medan	0751	-	-	-	-	-	-	-	-
41	SUMATERA UTARA	Kota Pematang Siantar	0754	-	-	-	-	-	-	-	-
42	SUMATERA UTARA	Kota Sibolga	0756	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SUMATERA UTARA	Kota Tanjung Balai	0755	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
44	SUMATERA UTARA	Kota Tebing Tinggi	0752	-	-	-	-	-	-	-	-
45	SUMATERA UTARA	Kota Padang Sidempuan	0757	-	-	-	-	-	-	-	-
46	SUMATERA UTARA	Kab. Pakpak Bharat	0715	-	-	-	-	-	-	-	-
47	SUMATERA UTARA	Kab. Nias Selatan	0714	-	-	-	-	-	-	-	-
48	SUMATERA UTARA	Kab. Humbang Hasundutan	0716	-	-	-	-	-	-	-	-
49	SUMATERA UTARA	Kab. Serdang Bedagai	0720	-	-	-	-	-	-	-	-
50	SUMATERA UTARA	Kab. Samosir	0712	-	-	-	-	-	-	-	-
51	SUMATERA UTARA	Kab. Batu Bara	0721	-	-	-	-	-	-	-	-
52	SUMATERA UTARA	Kab. Padang Lawas	0722	-	-	-	-	-	-	-	-
53	SUMATERA UTARA	Kab. Padang Lawas Utara	0723	-	-	-	-	-	-	-	-
54	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhanbatu Selatan	0724	-	-	-	-	-	-	-	-
55	SUMATERA UTARA	Kab. Labuhanbatu Utara	0725	-	-	-	-	-	-	-	-
56	SUMATERA UTARA	Kab. Nias Utara	0726	-	-	-	-	-	-	-	-
57	SUMATERA UTARA	Kab. Nias Barat	0727	-	-	-	-	-	-	-	-
58	SUMATERA UTARA	Kota Gunungsitoli	0761	-	-	-	-	-	-	-	-
59	SUMATERA BARAT	Provinsi Sumatera Barat	0800	-	-	-	-	-	-	-	-
60	SUMATERA BARAT	Kab. Lima Puluh Kota	0803	-	-	-	-	-	-	-	-
61	SUMATERA BARAT	Kab. Agam	0801	-	-	-	-	-	-	-	-
62	SUMATERA BARAT	Kab. Kepulauan Mentawai	0809	-	-	-	-	-	-	-	-
63	SUMATERA BARAT	Kab. Padang Pariaman	0805	-	-	-	-	-	-	-	-
64	SUMATERA BARAT	Kab. Pasaman	0802	-	-	-	-	-	-	-	-
65	SUMATERA BARAT	Kab. Pesisir Selatan	0806	-	-	-	-	-	-	-	-
66	SUMATERA BARAT	Kab. Sijunjung	0813	-	-	-	-	-	-	-	-
67	SUMATERA BARAT	Kab. Solok	0804	-	-	-	-	-	-	-	-
68	SUMATERA BARAT	Kab. Tanah Datar	0807	-	-	-	-	-	-	-	-
69	SUMATERA BARAT	Kota Bukit Tinggi	0851	-	-	-	-	-	-	-	-
70	SUMATERA BARAT	Kota Padang Panjang	0852	-	-	-	-	-	-	-	-
71	SUMATERA BARAT	Kota Padang	0855	-	-	-	-	-	-	-	-
72	SUMATERA BARAT	Kota Payakumbuh	0856	-	-	-	-	-	-	-	-
73	SUMATERA BARAT	Kota Sawahlunto	0854	-	-	-	-	-	-	-	-
74	SUMATERA BARAT	Kota Solok	0853	-	-	-	-	-	-	-	-
75	SUMATERA BARAT	Kota Pariaman	0857	-	-	-	-	-	-	-	-
76	SUMATERA BARAT	Kab. Pasaman Barat	0812	-	-	-	-	-	-	-	-
77	SUMATERA BARAT	Kab. Dharmasraya	0810	-	-	-	-	-	-	-	-
78	SUMATERA BARAT	Kab. Solok Selatan	0811	-	-	-	-	-	-	-	-
79	RIAU	Provinsi Riau	0900	-	-	-	-	-	-	-	-
80	RIAU	Kab. Bengkalis	0902	-	-	-	-	-	-	-	-
81	RIAU	Kab. Indragiri Hilir	0905	-	-	-	-	-	-	-	-
82	RIAU	Kab. Indragiri Hulu	0904	-	-	-	-	-	-	-	-
83	RIAU	Kab. Kampar	0901	-	-	-	-	-	-	-	-
84	RIAU	Kab. Kuantan Singingi	0912	-	-	-	-	-	-	-	-
85	RIAU	Kab. Pelalawan	0906	-	-	-	-	-	-	-	-
86	RIAU	Kab. Rokan Hilir	0908	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
87	RIAU	Kab. Rokan Hulu	0907	-	-	-	-	-	-	-	-
88	RIAU	Kab. Siak	0909	-	-	-	-	-	-	-	-
89	RIAU	Kota Dumai	0953	-	-	-	-	-	-	-	-
90	RIAU	Kota Pekanbaru	0951	-	-	-	-	-	-	-	-
91	RIAU	Kab. Kepulauan Meranti	0913	-	-	-	-	-	-	-	-
92	JAMBI	Provinsi Jambi	1000	-	-	14.051.587.000	14.045.998.828	-	-	14.051.587.000	14.045.998.828
93	JAMBI	Kab. Batanghari	1001	-	-	-	-	-	-	-	-
94	JAMBI	Kab. Bungo	1003	-	-	-	-	-	-	-	-
95	JAMBI	Kab. Kerinci	1005	-	-	-	-	-	-	-	-
96	JAMBI	Kab. Merangin	1006	-	-	-	-	-	-	-	-
97	JAMBI	Kab. Muaro Jambi	1009	-	-	-	-	-	-	-	-
98	JAMBI	Kab. Sarolangun	1004	-	-	-	-	-	-	-	-
99	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Barat	1002	-	-	-	-	-	-	-	-
100	JAMBI	Kab. Tanjung Jabung Timur	1007	-	-	-	-	-	-	-	-
101	JAMBI	Kab. Tebo	1008	-	-	-	-	-	-	-	-
102	JAMBI	Kota Jambi	1051	-	-	-	-	-	-	-	-
103	JAMBI	Kota Sungai Penuh	1052	-	-	-	-	-	-	-	-
104	SUMATERA SELATAN	Provinsi Sumatera Selatan	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
105	SUMATERA SELATAN	Kab. Lahat	1106	-	-	-	-	-	-	-	-
106	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Banyuasin	1103	-	-	-	-	-	-	-	-
107	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas	1107	-	-	-	-	-	-	-	-
108	SUMATERA SELATAN	Kab. Muara Enim	1105	-	-	-	-	-	-	-	-
109	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ilir	1108	-	-	-	-	-	-	-	-
110	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu	1104	-	-	-	-	-	-	-	-
111	SUMATERA SELATAN	Kota Palembang	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
112	SUMATERA SELATAN	Kota Prabumulih	1153	-	-	-	-	-	-	-	-
113	SUMATERA SELATAN	Kota Pagar Alam	1154	-	-	-	-	-	-	-	-
114	SUMATERA SELATAN	Kota Lubuk Linggau	1155	-	-	-	-	-	-	-	-
115	SUMATERA SELATAN	Kab. Banyuasin	1109	-	-	-	-	-	-	-	-
116	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Ilir	1112	-	-	-	-	-	-	-	-
117	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
118	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1111	-	-	-	-	-	-	-	-
119	SUMATERA SELATAN	Kab. Empat Lawang	1117	-	-	-	-	-	-	-	-
120	SUMATERA SELATAN	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1118	-	-	-	-	-	-	-	-
121	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas Utara	1119	-	-	-	-	-	-	-	-
122	BENGKULU	Provinsi Bengkulu	2600	-	-	-	-	-	-	-	-
123	BENGKULU	Kab. Bengkulu Selatan	2602	-	-	-	-	-	-	-	-
124	BENGKULU	Kab. Bengkulu Utara	2601	-	-	-	-	-	-	-	-
125	BENGKULU	Kab. Rejang Lebong	2603	-	-	-	-	-	-	-	-
126	BENGKULU	Kota Bengkulu	2651	-	-	-	-	-	-	-	-
127	BENGKULU	Kab. Kaur	2605	-	-	-	-	-	-	-	-
128	BENGKULU	Kab. Seluma	2604	-	-	-	-	-	-	-	-
129	BENGKULU	Kab. Mukomuko	2606	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
130	BENGKULU	Kab. Lebong	2607	-	-	-	-	-	-	-	-
131	BENGKULU	Kab. Kepahiang	2608	-	-	-	-	-	-	-	-
132	BENGKULU	Kab. Bengkulu Tengah	2609	-	-	-	-	-	-	-	-
133	LAMPUNG	Provinsi Lampung	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
134	LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	1204	-	-	-	-	-	-	-	-
135	LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
136	LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
137	LAMPUNG	Kab. Lampung Utara	1203	-	-	-	-	-	-	-	-
138	LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	1207	-	-	-	-	-	-	-	-
139	LAMPUNG	Kab. Tanggamus	1206	-	-	-	-	-	-	-	-
140	LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang	1205	-	-	-	-	-	-	-	-
141	LAMPUNG	Kab. Way Kanan	1208	-	-	-	-	-	-	-	-
142	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	1251	-	-	-	-	-	-	-	-
143	LAMPUNG	Kota Metro	1252	-	-	-	-	-	-	-	-
144	LAMPUNG	Kab. Pesawaran	1209	-	-	-	-	-	-	-	-
145	LAMPUNG	Kab. Pringsewu	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
146	LAMPUNG	Kab. Mesuji	1211	-	-	-	-	-	-	-	-
147	LAMPUNG	Kab. Tulang Bawang Barat	1212	-	-	-	-	-	-	-	-
148	LAMPUNG	Kab. Pesisir Barat	1213	-	-	-	-	-	-	-	-
149	DKI JAKARTA	Provinsi DKI Jakarta	0100	-	-	-	-	1.397.158.000.000	60.566.853.715	1.397.158.000.000	60.566.853.715
150	JAWA BARAT	Provinsi Jawa Barat	0200	-	-	-	-	-	-	-	-
151	JAWA BARAT	Kab. Bandung	0212	-	-	-	-	-	-	-	-
152	JAWA BARAT	Kab. Bekasi	0208	-	-	-	-	-	-	-	-
153	JAWA BARAT	Kab. Bogor	0205	-	-	-	-	-	-	-	-
154	JAWA BARAT	Kab. Ciamis	0216	-	-	-	-	-	-	-	-
155	JAWA BARAT	Kab. Cianjur	0207	-	-	-	-	-	-	-	-
156	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	0217	13.439.040.000	11.863.078.000	-	-	-	-	13.439.040.000	11.863.078.000
157	JAWA BARAT	Kab. Garut	0214	21.627.050.000	21.393.780.000	-	-	-	-	21.627.050.000	21.393.780.000
158	JAWA BARAT	Kab. Indramayu	0219	-	-	-	-	-	-	-	-
159	JAWA BARAT	Kab. Karawang	0209	-	-	-	-	-	-	-	-
160	JAWA BARAT	Kab. Kuningan	0218	-	-	-	-	-	-	-	-
161	JAWA BARAT	Kab. Majalengka	0220	-	-	-	-	-	-	-	-
162	JAWA BARAT	Kab. Purwakarta	0210	-	-	-	-	-	-	-	-
163	JAWA BARAT	Kab. Subang	0211	14.035.250.000	7.115.450.000	-	-	-	-	14.035.250.000	7.115.450.000
164	JAWA BARAT	Kab. Sukabumi	0206	-	-	-	-	-	-	-	-
165	JAWA BARAT	Kab. Sumedang	0213	-	-	-	-	-	-	-	-
166	JAWA BARAT	Kab. Tasikmalaya	0215	25.130.750.000	24.803.980.846	-	-	-	-	25.130.750.000	24.803.980.846
167	JAWA BARAT	Kota Bandung	0251	-	-	-	-	-	-	-	-
168	JAWA BARAT	Kota Bekasi	0257	-	-	-	-	-	-	-	-
169	JAWA BARAT	Kota Bogor	0252	-	-	-	-	-	-	-	-
170	JAWA BARAT	Kota Cirebon	0254	-	-	-	-	-	-	-	-
171	JAWA BARAT	Kota Depok	0258	-	-	-	-	-	-	-	-
172	JAWA BARAT	Kota Sukabumi	0253	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
173	JAWA BARAT	Kota Tasikmalaya	0260	-	-	-	-	-	-	-	-
174	JAWA BARAT	Kota Cimahi	0261	-	-	-	-	-	-	-	-
175	JAWA BARAT	Kota Banjar	0262	-	-	-	-	-	-	-	-
176	JAWA BARAT	Kab. Bandung Barat	0221	-	-	-	-	-	-	-	-
177	JAWA BARAT	Kab. Pangandaran	0222	-	-	-	-	-	-	-	-
178	JAWA TENGAH	Provinsi Jawa Tengah	0300	-	-	-	-	-	-	-	-
179	JAWA TENGAH	Kab. Banjarnegara	0318	29.461.281.000	26.254.417.000	-	-	-	-	29.461.281.000	26.254.417.000
180	JAWA TENGAH	Kab. Banyumas	0315	-	-	-	-	-	-	-	-
181	JAWA TENGAH	Kab. Batang	0306	-	-	-	-	-	-	-	-
182	JAWA TENGAH	Kab. Blora	0314	-	-	-	-	-	-	-	-
183	JAWA TENGAH	Kab. Boyolali	0325	-	-	-	-	-	-	-	-
184	JAWA TENGAH	Kab. Brebes	0308	-	-	-	-	-	-	-	-
185	JAWA TENGAH	Kab. Cilacap	0316	-	-	-	-	-	-	-	-
186	JAWA TENGAH	Kab. Demak	0303	-	-	-	-	-	-	-	-
187	JAWA TENGAH	Kab. Grobogan	0304	-	-	-	-	-	-	-	-
188	JAWA TENGAH	Kab. Jepara	0312	-	-	-	-	-	-	-	-
189	JAWA TENGAH	Kab. Karanganyar	0328	-	-	-	-	-	-	-	-
190	JAWA TENGAH	Kab. Kebumen	0323	-	-	-	-	-	-	-	-
191	JAWA TENGAH	Kab. Kendal	0302	-	-	-	-	-	-	-	-
192	JAWA TENGAH	Kab. Klaten	0324	-	-	-	-	-	-	-	-
193	JAWA TENGAH	Kab. Kudus	0310	-	-	-	-	-	-	-	-
194	JAWA TENGAH	Kab. Magelang	0319	12.504.200.000	9.962.280.475	-	-	-	-	12.504.200.000	9.962.280.475
195	JAWA TENGAH	Kab. Pati	0309	-	-	-	-	-	-	-	-
196	JAWA TENGAH	Kab. Pekalongan	0305	-	-	-	-	-	-	-	-
197	JAWA TENGAH	Kab. Pemalang	0311	-	-	-	-	-	-	-	-
198	JAWA TENGAH	Kab. Purbalingga	0317	13.454.500.000	13.349.400.496	-	-	-	-	13.454.500.000	13.349.400.496
199	JAWA TENGAH	Kab. Purworejo	0322	-	-	-	-	-	-	-	-
200	JAWA TENGAH	Kab. Rembang	0313	-	-	-	-	-	-	-	-
201	JAWA TENGAH	Kab. Semarang	0301	-	-	-	-	-	-	-	-
202	JAWA TENGAH	Kab. Sragen	0326	-	-	-	-	-	-	-	-
203	JAWA TENGAH	Kab. Sukoharjo	0327	-	-	-	-	-	-	-	-
204	JAWA TENGAH	Kab. Tegal	0307	-	-	-	-	-	-	-	-
205	JAWA TENGAH	Kab. Temanggung	0320	-	-	-	-	-	-	-	-
206	JAWA TENGAH	Kab. Wonogiri	0329	-	-	-	-	-	-	-	-
207	JAWA TENGAH	Kab. Wonosobo	0321	-	-	-	-	-	-	-	-
208	JAWA TENGAH	Kota Magelang	0355	-	-	-	-	-	-	-	-
209	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	0353	-	-	-	-	-	-	-	-
210	JAWA TENGAH	Kota Salatiga	0352	-	-	-	-	-	-	-	-
211	JAWA TENGAH	Kota Semarang	0351	-	-	-	-	-	-	-	-
212	JAWA TENGAH	Kota Surakarta	0356	-	-	-	-	-	-	-	-
213	JAWA TENGAH	Kota Tegal	0354	-	-	-	-	-	-	-	-
214	DI JOGJAKARTA	Provinsi DI Yogyakarta	0400	-	-	-	-	-	-	-	-
215	DI JOGJAKARTA	Kab. Bantul	0401	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
216	DI JOGJAKARTA	Kab. Gunung Kidul	0403	-	-	-	-	-	-	-	-
217	DI JOGJAKARTA	Kab. Kulon Progo	0404	-	-	-	-	-	-	-	-
218	DI JOGJAKARTA	Kab. Sleman	0402	-	-	-	-	-	-	-	-
219	DI JOGJAKARTA	Kota Yogyakarta	0451	-	-	-	-	-	-	-	-
220	JAWA TIMUR	Provinsi Jawa Timur	0500	-	-	-	-	-	-	-	-
221	JAWA TIMUR	Kab. Bangkalan	0508	-	-	-	-	-	-	-	-
222	JAWA TIMUR	Kab. Banyuwangi	0511	-	-	-	-	-	-	-	-
223	JAWA TIMUR	Kab. Blitar	0521	-	-	-	-	-	-	-	-
224	JAWA TIMUR	Kab. Bojonegoro	0527	-	-	-	-	-	-	-	-
225	JAWA TIMUR	Kab. Bondowoso	0509	-	-	-	-	-	-	-	-
226	JAWA TIMUR	Kab. Gresik	0501	-	-	-	-	-	-	-	-
227	JAWA TIMUR	Kab. Jember	0512	-	-	-	-	-	-	-	-
228	JAWA TIMUR	Kab. Jombang	0504	-	-	-	-	-	-	-	-
229	JAWA TIMUR	Kab. Kediri	0517	-	-	-	-	-	-	-	-
230	JAWA TIMUR	Kab. Lamongan	0529	-	-	-	-	-	-	-	-
231	JAWA TIMUR	Kab. Lumajang	0516	-	-	-	-	-	-	-	-
232	JAWA TIMUR	Kab. Madiun	0522	-	-	-	-	-	-	-	-
233	JAWA TIMUR	Kab. Magetan	0524	-	-	-	-	-	-	-	-
234	JAWA TIMUR	Kab. Malang	0513	11.035.000.000	10.677.886.000	-	-	-	-	11.035.000.000	10.677.886.000
235	JAWA TIMUR	Kab. Mojokerto	0502	-	-	-	-	-	-	-	-
236	JAWA TIMUR	Kab. Nganjuk	0519	-	-	-	-	-	-	-	-
237	JAWA TIMUR	Kab. Ngawi	0523	-	-	-	-	-	-	-	-
238	JAWA TIMUR	Kab. Pacitan	0526	-	-	-	-	-	-	-	-
239	JAWA TIMUR	Kab. Pamekasan	0506	-	-	-	-	-	-	-	-
240	JAWA TIMUR	Kab. Pasuruan	0514	-	-	-	-	-	-	-	-
241	JAWA TIMUR	Kab. Ponorogo	0525	-	-	-	-	-	-	-	-
242	JAWA TIMUR	Kab. Probolinggo	0515	-	-	-	-	-	-	-	-
243	JAWA TIMUR	Kab. Sampang	0505	-	-	-	-	-	-	-	-
244	JAWA TIMUR	Kab. Sidoarjo	0503	-	-	-	-	-	-	-	-
245	JAWA TIMUR	Kab. Situbondo	0510	-	-	-	-	-	-	-	-
246	JAWA TIMUR	Kab. Sumenep	0507	12.501.000.000	11.944.255.286	-	-	-	-	12.501.000.000	11.944.255.286
247	JAWA TIMUR	Kab. Trenggalek	0520	-	-	-	-	-	-	-	-
248	JAWA TIMUR	Kab. Tuban	0528	-	-	-	-	-	-	-	-
249	JAWA TIMUR	Kab. Tulungagung	0518	-	-	-	-	-	-	-	-
250	JAWA TIMUR	Kota Blitar	0556	-	-	-	-	-	-	-	-
251	JAWA TIMUR	Kota Kediri	0557	-	-	-	-	-	-	-	-
252	JAWA TIMUR	Kota Madiun	0558	-	-	-	-	-	-	-	-
253	JAWA TIMUR	Kota Malang	0553	-	-	-	-	-	-	-	-
254	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	0552	-	-	-	-	-	-	-	-
255	JAWA TIMUR	Kota Pasuruan	0554	-	-	-	-	-	-	-	-
256	JAWA TIMUR	Kota Probolinggo	0555	-	-	-	-	-	-	-	-
257	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	0551	-	-	-	-	-	-	-	-
258	JAWA TIMUR	Kota Batu	0559	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
259	KALIMANTAN BARAT	Provinsi Kalimantan Barat	1300	-	-	-	-	-	-	-	-
260	KALIMANTAN BARAT	Kab. Bengkayang	1307	-	-	-	-	-	-	-	-
261	KALIMANTAN BARAT	Kab. Landak	1308	-	-	-	-	-	-	-	-
262	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kapuas Hulu	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
263	KALIMANTAN BARAT	Kab. Ketapang	1306	-	-	-	-	-	-	-	-
264	KALIMANTAN BARAT	Kab. Mempawah	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
265	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sambas	1301	-	-	-	-	-	-	-	-
266	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sanggau	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
267	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sintang	1303	-	-	-	-	-	-	-	-
268	KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	1351	-	-	-	-	-	-	-	-
269	KALIMANTAN BARAT	Kota Singkawang	1352	-	-	-	-	-	-	-	-
270	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sekadau	1310	-	-	-	-	-	-	-	-
271	KALIMANTAN BARAT	Kab. Melawi	1309	-	-	-	-	-	-	-	-
272	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kayong Utara	1311	-	-	-	-	-	-	-	-
273	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kubu Raya	1312	-	-	-	-	-	-	-	-
274	KALIMANTAN TENGAH	Provinsi Kalimantan Tengah	1400	-	-	-	-	-	-	-	-
275	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Selatan	1403	-	-	-	-	-	-	-	-
276	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Utara	1402	-	-	-	-	-	-	-	-
277	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kapuas	1401	-	-	-	-	-	-	-	-
278	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Barat	1405	-	-	-	-	-	-	-	-
279	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Timur	1404	-	-	-	-	-	-	-	-
280	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya	1451	-	-	-	-	-	-	-	-
281	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Katingan	1406	-	-	-	-	-	-	-	-
282	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Seruyan	1407	-	-	-	-	-	-	-	-
283	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Sukamara	1408	-	-	-	-	-	-	-	-
284	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Lamandau	1409	-	-	-	-	-	-	-	-
285	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Gunung Mas	1410	-	-	-	-	-	-	-	-
286	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Pulang Pisau	1411	-	-	-	-	-	-	-	-
287	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Murung Raya	1412	-	-	-	-	-	-	-	-
288	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Timur	1413	-	-	-	-	-	-	-	-
289	KALIMANTAN SELATAN	Provinsi Kalimantan Selatan	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
290	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Banjar	1501	-	-	-	-	-	-	-	-
291	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Barito Kuala	1506	-	-	-	-	-	-	-	-
292	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Selatan	1504	-	-	-	-	-	-	-	-
293	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Tengah	1505	-	-	-	-	-	-	-	-
294	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Utara	1509	-	-	-	-	-	-	-	-
295	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Kotabaru	1508	-	-	-	-	-	-	-	-
296	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tabalong	1507	-	-	-	-	-	-	-	-
297	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah Laut	1502	-	-	-	-	-	-	-	-
298	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tapin	1503	-	-	-	-	-	-	-	-
299	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarbaru	1552	-	-	-	-	-	-	-	-
300	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarmasin	1551	-	-	-	-	-	-	-	-
301	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Balangan	1511	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
302	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah Bumbu	1510	-	-	-	-	-	-	-	-
303	KALIMANTAN TIMUR	Provinsi Kalimantan Timur	1600	-	-	-	-	-	-	-	-
304	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Berau	1604	-	-	-	-	-	-	-	-
305	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Kartanegara	1610	-	-	-	-	-	-	-	-
306	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Barat	1607	-	-	-	-	-	-	-	-
307	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai Timur	1608	-	-	-	-	-	-	-	-
308	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Paser	1602	-	-	-	-	-	-	-	-
309	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	1652	-	-	-	-	-	-	-	-
310	KALIMANTAN TIMUR	Kota Bontang	1654	-	-	-	-	-	-	-	-
311	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	1651	-	-	-	-	-	-	-	-
312	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Penajam Paser Utara	1609	-	-	-	-	-	-	-	-
313	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Mahakam Ulu	1613	-	-	-	-	-	-	-	-
314	SULAWESI UTARA	Provinsi Sulawesi Utara	1700	-	-	-	-	-	-	-	-
315	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow	1703	-	-	-	-	-	-	-	-
316	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa	1702	-	-	-	-	-	-	-	-
317	SULAWESI UTARA	Kab. Sangihe	1704	-	-	-	-	-	-	-	-
318	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	1753	-	-	-	-	-	-	-	-
319	SULAWESI UTARA	Kota Manado	1751	-	-	-	-	-	-	-	-
320	SULAWESI UTARA	Kab. Kepulauan Talaud	1705	-	-	-	-	-	-	-	-
321	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa Selatan	1706	9.567.850.000	6.076.476.360	-	-	-	-	9.567.850.000	6.076.476.360
322	SULAWESI UTARA	Kota Tomohon	1752	-	-	-	-	-	-	-	-
323	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa Utara	1708	-	-	-	-	-	-	-	-
324	SULAWESI UTARA	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1712	-	-	-	-	-	-	-	-
325	SULAWESI UTARA	Kota Kotamobagu	1754	-	-	-	-	-	-	-	-
326	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1711	-	-	-	-	-	-	-	-
327	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa Tenggara	1710	-	-	-	-	-	-	-	-
328	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1714	-	-	-	-	-	-	-	-
329	SULAWESI UTARA	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1713	-	-	-	-	-	-	-	-
330	SULAWESI TENGAH	Provinsi Sulawesi Tengah	1800	-	-	-	-	-	-	-	-
331	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai	1804	-	-	-	-	-	-	-	-
332	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai Kepulauan	1807	-	-	-	-	-	-	-	-
333	SULAWESI TENGAH	Kab. Buol	1805	-	-	-	-	-	-	-	-
334	SULAWESI TENGAH	Kab. Tolitoli	1803	-	-	-	-	-	-	-	-
335	SULAWESI TENGAH	Kab. Donggala	1802	-	-	-	-	-	-	-	-
336	SULAWESI TENGAH	Kab. Morowali	1806	-	-	-	-	-	-	-	-
337	SULAWESI TENGAH	Kab. Poso	1801	-	-	-	-	-	-	-	-
338	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	1851	-	-	-	-	-	-	-	-
339	SULAWESI TENGAH	Kab. Parigi Moutong	1808	-	-	-	-	-	-	-	-
340	SULAWESI TENGAH	Kab. Tojo Una Una	1809	-	-	-	-	-	-	-	-
341	SULAWESI TENGAH	Kab. Sigi	1812	-	-	-	-	-	-	-	-
342	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai Laut	1813	-	-	-	-	-	-	-	-
343	SULAWESI TENGAH	Kab. Morowali Utara	1814	-	-	-	-	-	-	-	-
344	SULAWESI SELATAN	Provinsi Sulawesi Selatan	1900	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
345	SULAWESI SELATAN	Kab. Bantaeng	1912	-	-	-	-	-	-	-	-
346	SULAWESI SELATAN	Kab. Barru	1916	-	-	-	-	-	-	-	-
347	SULAWESI SELATAN	Kab. Bone	1905	-	-	-	-	-	-	-	-
348	SULAWESI SELATAN	Kab. Bulukumba	1911	-	-	-	-	-	-	-	-
349	SULAWESI SELATAN	Kab. Enrekang	1921	-	-	-	-	-	-	-	-
350	SULAWESI SELATAN	Kab. Gowa	1902	-	-	-	-	-	-	-	-
351	SULAWESI SELATAN	Kab. Jeneponto	1913	-	-	-	-	-	-	-	-
352	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu	1909	-	-	-	-	-	-	-	-
353	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Utara	1922	-	-	-	-	-	-	-	-
354	SULAWESI SELATAN	Kab. Maros	1907	-	-	-	-	-	-	-	-
355	SULAWESI SELATAN	Kab. Pangkajene Kepulauan	1918	-	-	-	-	-	-	-	-
356	SULAWESI SELATAN	Kota Palopo	1953	-	-	-	-	-	-	-	-
357	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Timur	1924	-	-	-	-	-	-	-	-
358	SULAWESI SELATAN	Kab. Pinrang	1901	-	-	-	-	-	-	-	-
359	SULAWESI SELATAN	Kab. Sinjai	1910	-	-	-	-	-	-	-	-
360	SULAWESI SELATAN	Kab. Kepulauan Selayar	1914	-	-	-	-	-	-	-	-
361	SULAWESI SELATAN	Kab. Sidenreng Rappang	1917	-	-	-	-	-	-	-	-
362	SULAWESI SELATAN	Kab. Soppeng	1919	-	-	-	-	-	-	-	-
363	SULAWESI SELATAN	Kab. Takalar	1915	-	-	-	-	-	-	-	-
364	SULAWESI SELATAN	Kab. Tana Toraja	1906	-	-	-	-	-	-	-	-
365	SULAWESI SELATAN	Kab. Wajo	1903	-	-	-	-	-	-	-	-
366	SULAWESI SELATAN	Kota Parepare	1952	-	-	-	-	-	-	-	-
367	SULAWESI SELATAN	Kota Makassar	1951	-	-	-	-	-	-	-	-
368	SULAWESI SELATAN	Kab. Toraja Utara	1925	-	-	-	-	-	-	-	-
369	SULAWESI TENGGARA	Provinsi Sulawesi Tenggara	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
370	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton	2002	-	-	-	-	-	-	-	-
371	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
372	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka	2004	-	-	-	-	-	-	-	-
373	SULAWESI TENGGARA	Kab. Muna	2003	-	-	-	-	-	-	-	-
374	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	2051	-	-	-	-	-	-	-	-
375	SULAWESI TENGGARA	Kota Bau-bau	2052	-	-	-	-	-	-	-	-
376	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe Selatan	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
377	SULAWESI TENGGARA	Kab. Bombana	2006	-	-	-	-	-	-	-	-
378	SULAWESI TENGGARA	Kab. Wakatobi	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
379	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
380	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe Utara	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
381	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton Utara	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
382	SULAWESI TENGGARA	Kab. Konawe Kepulauan	2013	-	-	-	-	-	-	-	-
383	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka Timur	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
384	SULAWESI TENGGARA	Kab. Muna Barat	2053	-	-	-	-	-	-	-	-
385	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton Tengah	2055	-	-	-	-	-	-	-	-
386	SULAWESI TENGGARA	Kab. Buton Selatan	2054	-	-	-	-	-	-	-	-
387	BALI	Provinsi Bali	2200	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
388	BALI	Kab. Badung	2207	-	-	-	-	-	-	-	-
389	BALI	Kab. Bangli	2206	-	-	-	-	-	-	-	-
390	BALI	Kab. Buleleng	2201	-	-	-	-	-	-	-	-
391	BALI	Kab. Gianyar	2204	-	-	-	-	-	-	-	-
392	BALI	Kab. Jembrana	2202	-	-	-	-	-	-	-	-
393	BALI	Kab. Karangasem	2205	-	-	-	-	-	-	-	-
394	BALI	Kab. Klungkung	2203	-	-	-	-	-	-	-	-
395	BALI	Kab. Tabanan	2208	-	-	-	-	-	-	-	-
396	BALI	Kota Denpasar	2251	-	-	-	-	-	-	-	-
397	NUSA TENGGARA BARAT	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2300	-	-	-	-	-	-	-	-
398	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Bima	2304	-	-	-	-	-	-	-	-
399	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Dompu	2306	-	-	-	-	-	-	-	-
400	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Barat	2301	-	-	-	-	-	-	-	-
401	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Tengah	2302	-	-	-	-	-	-	-	-
402	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Timur	2303	8.520.415.000	6.636.733.920	-	-	-	-	8.520.415.000	6.636.733.920
403	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Sumbawa	2305	15.328.050.000	14.965.655.500	-	-	-	-	15.328.050.000	14.965.655.500
404	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Mataram	2351	-	-	-	-	-	-	-	-
405	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Bima	2352	-	-	-	-	-	-	-	-
406	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Sumbawa Barat	2307	-	-	-	-	-	-	-	-
407	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Utara	2308	-	-	-	-	-	-	-	-
408	NUSA TENGGARA TIMUR	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2400	-	-	-	-	-	-	-	-
409	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Alor	2405	-	-	-	-	-	-	-	-
410	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Belu	2402	-	-	-	-	-	-	-	-
411	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ende	2408	-	-	-	-	-	-	-	-
412	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Flores Timur	2407	-	-	-	-	-	-	-	-
413	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Kupang	2401	-	-	-	-	-	-	-	-
414	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Lembata	2413	-	-	-	-	-	-	-	-
415	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai	2410	-	-	-	-	-	-	-	-
416	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ngada	2409	-	-	-	-	-	-	-	-
417	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sikka	2406	-	-	-	-	-	-	-	-
418	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Barat	2412	-	-	-	-	-	-	-	-
419	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Timur	2411	-	-	-	-	-	-	-	-
420	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Selatan	2404	-	-	-	-	-	-	-	-
421	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Utara	2403	-	-	-	-	-	-	-	-
422	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	2451	-	-	-	-	-	-	-	-
423	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Rote Ndao	2414	-	-	-	-	-	-	-	-
424	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai Barat	2415	-	-	-	-	-	-	-	-
425	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Nagekeo	2417	-	-	-	-	-	-	-	-
426	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Barat Daya	2419	-	-	-	-	-	-	-	-
427	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sumba Tengah	2418	-	-	-	-	-	-	-	-
428	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Manggarai Timur	2420	-	-	-	-	-	-	-	-
429	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sabu Raijua	2421	-	-	-	-	-	-	-	-
430	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Malaka	2422	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
431	MALUKU	Provinsi Maluku	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
432	MALUKU	Kab. Kepulauan Tanimbar	2103	-	-	-	-	-	-	-	-
433	MALUKU	Kab. Maluku Tengah	2101	-	-	-	-	-	-	-	-
434	MALUKU	Kab. Maluku Tenggara	2102	-	-	-	-	-	-	-	-
435	MALUKU	Kab. Buru	2104	-	-	-	-	-	-	-	-
436	MALUKU	Kota Ambon	2151	-	-	-	-	-	-	-	-
437	MALUKU	Kab. Seram Bagian Barat	2106	-	-	-	-	-	-	-	-
438	MALUKU	Kab. Seram Bagian Timur	2107	-	-	-	-	-	-	-	-
439	MALUKU	Kab. Kepulauan Aru	2105	-	-	-	-	-	-	-	-
440	MALUKU	Kota Tual	2152	-	-	-	-	-	-	-	-
441	MALUKU	Kab. Maluku Barat Daya	2109	-	-	-	-	-	-	-	-
442	MALUKU	Kab. Buru Selatan	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
443	PAPUA	Provinsi Papua	2500	-	-	-	-	-	-	-	-
444	PAPUA	Kab. Biak Numfor	2502	-	-	-	-	-	-	-	-
445	PAPUA	Kab. Jayapura	2501	-	-	-	-	-	-	-	-
446	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Jayawijaya	3801	-	-	-	-	-	-	-	-
447	PAPUA SELATAN	Kab. Merauke	3601	-	-	-	-	-	-	-	-
448	PAPUA TENGAH	Kab. Mimika	3701	-	-	-	-	-	-	-	-
449	PAPUA TENGAH	Kab. Nabire	3702	-	-	-	-	-	-	-	-
450	PAPUA TENGAH	Kab. Paniai	3703	-	-	-	-	-	-	-	-
451	PAPUA TENGAH	Kab. Puncak Jaya	3704	-	-	-	-	-	-	-	-
452	PAPUA	Kab. Kepulauan Yapen	2504	-	-	-	-	-	-	-	-
453	PAPUA	Kota Jayapura	2551	-	-	-	-	-	-	-	-
454	PAPUA	Kab. Sarmi	2516	-	-	-	-	-	-	-	-
455	PAPUA	Kab. Keerom	2517	-	-	-	-	-	-	-	-
456	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Yahukimo	3802	-	-	-	-	-	-	-	-
457	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Pegunungan Bintang	3806	-	-	-	-	-	-	-	-
458	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Tolikara	3803	-	-	-	-	-	-	-	-
459	PAPUA SELATAN	Kab. Boven Digoel	3602	-	-	-	-	-	-	-	-
460	PAPUA SELATAN	Kab. Mappi	3603	-	-	-	-	-	-	-	-
461	PAPUA SELATAN	Kab. Asmat	3604	-	-	-	-	-	-	-	-
462	PAPUA	Kab. Waropen	2523	-	-	-	-	-	-	-	-
463	PAPUA	Kab. Supiori	2527	-	-	-	-	-	-	-	-
464	PAPUA	Kab. Mamberamo Raya	2520	-	-	-	-	-	-	-	-
465	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Mamberamo Tengah	3804	-	-	-	-	-	-	-	-
466	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Yalimo	3805	-	-	-	-	-	-	-	-
467	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Lanny Jaya	3807	-	-	-	-	-	-	-	-
468	PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Nduga	3808	-	-	-	-	-	-	-	-
469	PAPUA TENGAH	Kab. Dogiyai	3706	-	-	-	-	-	-	-	-
470	PAPUA TENGAH	Kab. Puncak	3705	-	-	-	-	-	-	-	-
471	PAPUA TENGAH	Kab. Intan Jaya	3707	-	-	-	-	-	-	-	-
472	PAPUA TENGAH	Kab. Deiyai	3708	-	-	-	-	-	-	-	-
473	MALUKU UTARA	Provinsi Maluku Utara	2800	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
474	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Tengah	2802	-	-	-	-	-	-	-	-
475	MALUKU UTARA	Kota Ternate	2851	-	-	-	-	-	-	-	-
476	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Barat	2807	-	-	-	-	-	-	-	-
477	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Timur	2806	-	-	-	-	-	-	-	-
478	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Selatan	2804	-	-	-	-	-	-	-	-
479	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Utara	2803	-	-	-	-	-	-	-	-
480	MALUKU UTARA	Kab. Kepulauan Sula	2805	-	-	-	-	-	-	-	-
481	MALUKU UTARA	Kota Tidore Kepulauan	2853	-	-	-	-	-	-	-	-
482	MALUKU UTARA	Kab. Pulau Morotai	2808	-	-	-	-	-	-	-	-
483	MALUKU UTARA	Kab. Pulau Taliabu	2809	-	-	-	-	-	-	-	-
484	BANTEN	Provinsi Banten	2900	-	-	-	-	-	-	-	-
485	BANTEN	Kab. Lebak	2903	6.365.000.000	8.029.075.086	-	-	-	-	6.365.000.000	8.029.075.086
486	BANTEN	Kab. Pandeglang	2902	-	-	-	-	-	-	-	-
487	BANTEN	Kab. Serang	2901	-	-	-	-	-	-	-	-
488	BANTEN	Kab. Tangerang	2904	-	-	-	-	-	-	-	-
489	BANTEN	Kota Cilegon	2952	-	-	-	-	-	-	-	-
490	BANTEN	Kota Tangerang	2951	-	-	-	-	-	-	-	-
491	BANTEN	Kota Serang	2953	-	-	-	-	-	-	-	-
492	BANTEN	Kota Tangerang Selatan	2954	-	-	-	-	-	-	-	-
493	BANGKA BELITUNG	Provinsi Bangka Belitung	3000	-	-	-	-	-	-	-	-
494	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka	3002	-	-	-	-	-	-	-	-
495	BANGKA BELITUNG	Kab. Belitung	3001	-	-	-	-	-	-	-	-
496	BANGKA BELITUNG	Kota Pangkal Pinang	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
497	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka Selatan	3005	-	-	-	-	-	-	-	-
498	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka Tengah	3004	-	-	-	-	-	-	-	-
499	BANGKA BELITUNG	Kab. Bangka Barat	3003	-	-	-	-	-	-	-	-
500	BANGKA BELITUNG	Kab. Belitung Timur	3006	-	-	-	-	-	-	-	-
501	GORONTALO	Provinsi Gorontalo	3100	-	-	-	-	-	-	-	-
502	GORONTALO	Kab. Boalemo	3102	-	-	-	-	-	-	-	-
503	GORONTALO	Kab. Gorontalo	3101	4.861.450.000	3.387.921.998	-	-	-	-	4.861.450.000	3.387.921.998
504	GORONTALO	Kota Gorontalo	3151	-	-	-	-	-	-	-	-
505	GORONTALO	Kab. Pohuwato	3103	-	-	-	-	-	-	-	-
506	GORONTALO	Kab. Bone Bolango	3104	-	-	-	-	-	-	-	-
507	GORONTALO	Kab. Gorontalo Utara	3107	-	-	-	-	-	-	-	-
508	KEPULAUAN RIAU	Provinsi Kepulauan Riau	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
509	KEPULAUAN RIAU	Kab. Natuna	3203	-	-	-	-	-	-	-	-
510	KEPULAUAN RIAU	Kab. Kepulauan Anambas	3205	-	-	-	-	-	-	-	-
511	KEPULAUAN RIAU	Kab. Karimun	3202	-	-	-	-	-	-	-	-
512	KEPULAUAN RIAU	Kota Batam	3251	-	-	-	-	-	-	-	-
513	KEPULAUAN RIAU	Kota Tanjung Pinang	3252	-	-	-	-	-	-	-	-
514	KEPULAUAN RIAU	Kab. Lingga	3204	-	-	-	-	-	-	-	-
515	KEPULAUAN RIAU	Kab. Bintan	3201	-	-	-	-	-	-	-	-
516	PAPUA BARAT	Provinsi Papua Barat	3300	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KE DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Daerah	Kode Pemda	UPLAND		Bio CF ISFL		MRT		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	9	10	17	18	19	20	23	24
517	PAPUA BARAT	Kab. Fak Fak	3303	-	-	-	-	-	-	-	-
518	PAPUA BARAT	Kab. Manokwari	3301	-	-	-	-	-	-	-	-
519	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Sorong	3902	-	-	-	-	-	-	-	-
520	PAPUA BARAT DAYA	Kota Sorong	3951	-	-	-	-	-	-	-	-
521	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Raja Ampat	3904	-	-	-	-	-	-	-	-
522	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Sorong Selatan	3903	-	-	-	-	-	-	-	-
523	PAPUA BARAT	Kab. Teluk Bintuni	3306	-	-	-	-	-	-	-	-
524	PAPUA BARAT	Kab. Teluk Wondama	3307	-	-	-	-	-	-	-	-
525	PAPUA BARAT	Kab. Kaimana	3308	-	-	-	-	-	-	-	-
526	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Maybrat	3906	-	-	-	-	-	-	-	-
527	PAPUA BARAT DAYA	Kab. Tambrauw	3905	-	-	-	-	-	-	-	-
528	PAPUA BARAT	Kab. Manokwari Selatan	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
529	PAPUA BARAT	Kab. Pegunungan Arfak	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
530	SULAWESI BARAT	Provinsi Sulawesi Barat	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
531	SULAWESI BARAT	Kab. Majene	3401	-	-	-	-	-	-	-	-
532	SULAWESI BARAT	Kab. Mamuju	3402	-	-	-	-	-	-	-	-
533	SULAWESI BARAT	Kab. Polewali Mandar	3404	-	-	-	-	-	-	-	-
534	SULAWESI BARAT	Kab. Mamasa	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
535	SULAWESI BARAT	Kab. Pasangkayu	3403	-	-	-	-	-	-	-	-
536	SULAWESI BARAT	Kab. Mamuju Tengah	3406	-	-	-	-	-	-	-	-
537	KALIMANTAN UTARA	Provinsi Kalimantan Utara	3500	-	-	-	-	-	-	-	-
538	PAPUA SELATAN	Provinsi Papua Tengah	3700	-	-	-	-	-	-	-	-
539	PAPUA TENGAH	Provinsi Papua Selatan	3600	-	-	-	-	-	-	-	-
540	PAPUA PEGUNUNGAN	Provinsi Papua Pegunungan	3800	-	-	-	-	-	-	-	-
541	PAPUA BARAT DAYA	Provinsi Papua Barat Daya	3900	-	-	-	-	-	-	-	-
542	KALIMANTAN UTARA	Kab. Bulungan	3501	-	-	-	-	-	-	-	-
543	KALIMANTAN UTARA	Kab. Malinau	3503	-	-	-	-	-	-	-	-
544	KALIMANTAN UTARA	Kab. Nunukan	3502	-	-	-	-	-	-	-	-
545	KALIMANTAN UTARA	Kota Tarakan	3551	-	-	-	-	-	-	-	-
546	KALIMANTAN UTARA	Kab. Tana Tidung	3504	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				197.830.836.000	176.460.390.967	14.051.587.000	14.045.998.828	1.397.158.000.000	60.566.853.715	1.609.040.423.000	251.073.243.510

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

(Dalam Rupiah)

Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus Reguler	Otonomi Khusus Spesifik	Otonomi Khusus Tambahan Infrastruktur	Otonomi Khusus Aceh	Dana Keistimewaan Yogyakarta	Total Pagu	Total Realisasi
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
PAPUA	Provinsi Papua	2500	-	-	234.448.768.000	293.460.198.000	371.391.228.000	-		899.300.194.000	899.300.194.000
PAPUA	Kab. Biak Numfor	2502	133.971.834.868	-	80.214.956.000	91.686.021.000	11.236.484.000	-		369.977.372.000	317.109.295.868
PAPUA	Kab. Jayapura	2501	106.911.399.566	-	85.326.598.000	110.636.069.000	21.220.005.000	-		339.502.472.000	324.094.071.566
PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Jayawijaya	3801	227.016.042.800	-	107.431.116.000	131.583.753.000	5.788.908.000	-		504.965.837.000	471.819.819.800
PAPUA SELATAN	Kab. Merauke	3601	153.426.282.832	-	98.404.221.000	132.896.846.000	23.663.394.000	-		447.947.061.000	408.390.743.832
PAPUA TENGAH	Kab. Mimika	3701	103.508.793.868	-	99.557.264.000	93.435.135.000	30.021.442.000	-		353.192.515.000	326.522.634.868
PAPUA TENGAH	Kab. Nabire	3702	52.205.728.200	14.235.394.000	91.226.366.000	97.073.697.000	25.495.405.000	-		301.783.615.000	280.236.590.200
PAPUA TENGAH	Kab. Paniai	3703	149.443.091.400	-	95.416.350.000	116.948.136.000	23.701.578.000	-		414.684.348.000	385.509.155.400
PAPUA TENGAH	Kab. Puncak Jaya	3704	242.565.748.400	6.984.355.000	78.940.578.000	118.774.392.000	36.898.416.000	-		517.115.214.000	484.163.489.400
PAPUA	Kab. Kepulauan Yapen	2504	80.894.821.666	-	55.582.244.000	77.877.783.000	13.154.164.000	-		266.440.819.000	227.509.012.666
PAPUA	Kota Jayapura	2551	11.903.393.000	9.043.181.000	77.030.400.000	89.855.791.000	10.975.094.000	-		198.807.859.000	198.807.859.000
PAPUA	Kab. Sarmi	2516	66.355.274.112	-	52.258.686.000	68.565.383.000	13.213.035.000	-		220.537.739.000	200.392.378.112
PAPUA	Kab. Keerom	2517	69.520.071.350	14.138.129.000	44.071.525.000	57.466.581.000	16.390.592.000	-		214.020.310.000	201.586.898.350
PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Yahukimo	3802	373.982.098.456	-	160.592.719.000	196.697.135.000	27.794.599.000	-		822.579.908.000	759.066.551.456
PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Pegunungan Bintang	3806	160.723.901.744	-	112.534.221.000	137.834.136.000	16.747.098.000	-		504.806.981.000	427.839.356.744
PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Tolikara	3803	305.832.101.200	-	121.616.173.000	148.957.889.000	14.547.626.000	-		706.621.182.000	590.953.789.200
PAPUA SELATAN	Kab. Boven Digoel	3602	67.181.350.600	13.786.988.000	74.241.478.000	85.489.191.000	23.010.158.000	-		309.954.984.000	263.709.165.600
PAPUA SELATAN	Kab. Mappi	3603	119.624.009.762	14.315.743.000	93.922.304.000	106.976.808.000	65.851.799.000	-		448.803.733.000	400.690.663.762
PAPUA SELATAN	Kab. Asmat	3604	142.114.853.660	7.230.455.000	102.549.014.000	125.441.809.000	24.465.028.000	-		470.448.884.000	401.801.159.660
PAPUA	Kab. Waropen	2523	58.942.708.020	-	47.046.740.000	57.154.734.000	8.208.851.000	-		197.005.858.000	171.353.033.020
PAPUA	Kab. Supiori	2527	19.827.051.734	-	42.130.095.000	51.181.747.000	7.883.856.000	-		129.599.094.000	121.022.749.734
PAPUA	Kab. Mamberamo Raya	2520	49.790.788.048	-	63.385.882.000	80.316.354.000	56.885.588.000	-		280.387.981.000	250.378.612.048
PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Mamberamo Tengah	3804	39.524.728.000	-	47.811.523.000	81.242.382.000	13.233.271.000	-		196.059.516.000	181.811.904.000
PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Yalimo	3805	153.608.979.400	-	77.506.597.000	84.110.391.000	6.678.740.000	-		394.503.142.000	321.904.707.400
PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Lanny Jaya	3807	221.837.689.176	-	84.922.933.000	104.015.286.000	13.904.008.000	-		507.512.429.000	424.679.916.176
PAPUA PEGUNUNGAN	Kab. Nduga	3808	133.426.684.400	-	46.305.463.000	69.319.366.000	18.982.815.000	-		350.052.055.000	268.034.328.400
PAPUA TENGAH	Kab. Dogiyai	3706	56.440.033.920	-	51.317.836.000	69.928.099.000	34.747.642.000	-		240.110.352.000	212.433.610.920
PAPUA TENGAH	Kab. Puncak	3705	154.743.813.800	6.963.420.000	93.225.048.000	114.262.343.000	85.125.442.000	-		485.322.839.000	454.320.066.800
PAPUA TENGAH	Kab. Intan Jaya	3707	86.031.345.400	-	34.043.000.000	77.489.640.000	33.931.790.000	-		243.126.215.000	231.495.775.400
PAPUA TENGAH	Kab. Deiyai	3708	40.731.635.990	7.221.581.000	45.869.805.000	65.329.255.000	13.824.605.000	-		196.001.596.000	172.976.881.990
PAPUA BARAT	Provinsi Papua Barat	3300	-	-	149.254.761.000	188.332.290.000	349.419.885.000	-		687.006.936.000	687.006.936.000
PAPUA BARAT	Kab. Fak Fak	3303	94.421.464.072	-	52.490.034.000	73.107.316.000	8.187.651.000	-		247.345.494.000	228.206.465.072
PAPUA BARAT	Kab. Manokwari	3301	96.614.740.814	-	69.332.967.000	52.948.990.000	10.989.482.000	-		256.940.982.000	229.886.179.814
PAPUA BARAT DAYA	Kab. Sorong	3902	133.827.870.758	-	67.727.701.000	86.438.239.000	30.284.949.000	-		356.047.154.000	318.278.759.758
PAPUA BARAT DAYA	Kota Sorong	3951	-	-	62.179.485.000	68.281.864.000	16.612.374.000	-		147.073.723.000	147.073.723.000
PAPUA BARAT DAYA	Kab. Raja Ampat	3904	78.515.557.766	-	87.398.851.000	108.046.822.000	74.320.674.000	-		363.774.829.000	348.281.904.766
PAPUA BARAT DAYA	Kab. Sorong Selatan	3903	64.517.559.000	7.294.573.000	50.467.513.000	54.936.491.000	57.472.924.000	-		267.995.009.000	234.689.060.000
PAPUA BARAT	Kab. Teluk Bintuni	3306	106.649.626.454	3.766.781.500	61.857.433.000	75.536.637.000	19.137.989.000	-		273.884.878.000	266.948.466.954
PAPUA BARAT	Kab. Teluk Wondama	3307	55.963.466.122	7.465.202.000	53.292.538.000	71.796.102.000	15.976.832.000	-		211.492.086.000	204.494.140.122
PAPUA BARAT	Kab. Kaimana	3308	56.241.506.550	-	15.395.088.000	42.565.296.000	12.470.225.000	-		153.840.401.000	126.672.115.550
PAPUA BARAT DAYA	Kab. Maybrat	3906	129.702.276.076	-	61.130.873.000	72.289.190.000	59.632.733.000	-		377.908.132.000	322.755.072.076
PAPUA BARAT DAYA	Kab. Tambrauw	3905	117.978.382.890	-	75.061.181.000	98.904.043.000	55.783.925.000	-		394.124.297.000	347.727.531.890
PAPUA BARAT	Kab. Manokwari Selatan	3312	32.258.528.690	7.395.262.000	42.741.102.000	55.017.007.000	5.998.373.000	-		158.794.619.000	143.410.272.690

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

(Dalam Rupiah)

Provinsi	Daerah	Kode Pemda	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus Reguler	Otonomi Khusus Spesifik	Otonomi Khusus Tambahan Infrastruktur	Otonomi Khusus Aceh	Dana Keistimewaan Yogyakarta	Total Pagu	Total Realisasi
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
PAPUA BARAT	Kab. Pegunungan Arfak	3311	101.170.077.766	6.983.017.000	53.151.947.000	68.470.662.000	14.594.419.000	-		266.751.455.000	244.370.122.766
PAPUA SELATAN	Provinsi Papua Tengah	3700	-	-	252.684.106.000	322.817.441.000	283.746.319.000	-		859.247.866.000	859.247.866.000
PAPUA TENGAH	Provinsi Papua Selatan	3600	-	-	158.193.007.000	193.201.994.000	319.644.218.000	-		671.039.219.000	671.039.219.000
PAPUA PEGUNUNGAN	Provinsi Papua Pegunungan	3800	-	-	325.166.034.000	408.754.431.000	470.708.262.000	-		1.204.628.727.000	1.204.628.727.000
PAPUA BARAT DAYA	Provinsi Papua Barat Daya	3900	-	-	173.128.116.000	209.527.135.000	126.046.105.000	-		508.701.356.000	508.701.356.000
Jumlah			**61.645.153.758.700**	**4.274.535.998.500**	**4.309.582.640.000**	**5.386.978.300.000**	**3.000.000.000.000**	**4.309.582.640.000**	**1.000.000.000.000**	**93.006.143.580.000**	**83.925.833.337.200**

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
1	Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah (502000000980)	1,298,254,191,184	2,369,109,429,171	1,070,855,237,987	2,472,358,264,985	(103,248,835,814)	terdapat pembulatan sebesar Rp7 dan penyesuaian lebih/kurang saji melalui rekonsiliasi kas atas saldo RKUN terhadap transaksi penampungan/pembayaran/penihilan RPATA dengan netto sebesar (Rp103.248.835.821)
2	RPKBUNP SPAN BRI (032901003295305)	849,362,120,023	565,023,501,431	(284,338,618,592)	565,023,501,431	-	
3	RPKBUNP SPAN-MDRI (1190006666612)	966,933,194,068	807,265,949,697	(159,667,244,371)	807,265,949,697	-	
4	RPKBUNPspan-BNI (0296474176)	289,985,351,236	367,591,895,470	77,606,544,234	367,591,895,470	-	
5	RPKBUNPSPAN-BTN (0001401390005105)	26,483,180,784	23,857,175,145	(2,626,005,639)	23,857,175,145	-	
6	RPKBUNP SPAN BSI (7815160066)	267,179,893,508	286,121,834,970	18,941,941,462	286,121,834,970	-	
7	RPKBUNP GAJI BRI (032901003297307)	5,344,034,394,938	5,870,634,603,893	526,600,208,955	5,870,634,603,893	-	
8	RPKBUNP GAJI-MDRI (1190006666638)	1,677,595,159,556	1,959,232,225,010	281,637,065,454	1,959,232,225,010	-	
9	RPKBUNPgaji-BNI (0296474303)	975,507,737,008	948,269,414,106	(27,238,322,902)	948,269,414,106	-	
10	RPKBUNPGAJI-BTN (0001401390005121)	151,053,675,679	172,706,574,696	21,652,899,017	172,706,574,696	-	
11	RPKBUNP GAJI BPD BALI (0100121637790)	25,934,831,509	31,358,578,200	5,423,746,691	31,358,578,200	-	
12	RPKBUNP GAJI BPD SUMSEL BABEL (1403001111)	3,685,660,205	5,417,071,430	1,731,411,225	5,417,071,430	-	
13	RPKBUNP GAJI BANK NAGARI (21000101014496)	42,243,841,170	42,748,827,050	504,985,880	42,748,827,050	-	
14	RPKBUNP GAJI BPD JATIM (0011280005)	5,431,315,300	5,285,494,100	(145,821,200)	5,285,494,100	-	
15	RPKBUNP GAJI BANK ACEH SYARIAH (01001870000401)	35,342,261,120	45,282,962,120	9,940,701,000	45,282,962,120	-	

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
16	RPKBUNP GAJI BPD JABAR BANTEN (0011120171302)	34,243,774,419	20,441,080,827	(13,802,693,592)	20,441,080,827	-	
17	RPKBUNP GAJI BPD DIY (001111001492)	24,914,029,530	26,635,737,200	1,721,707,670	26,635,737,200	-	
18	RPKBUNP GAJI BJB SYARIAH (0080102004312)	25,308,046,628	47,970,264,468	22,662,217,840	47,970,264,468	-	
19	RPKBUNP GAJI BANK SUMUT (10001060198471)	886,027,560	1,148,837,520	262,809,960	1,148,837,520	-	
20	RPKBUNP GAJI BANK JATENG (1034026021)	98,676,508,751	142,909,911,600	44,233,402,849	142,909,911,600	-	
21	RPKBUNP GAJI BANK KALBAR (0108888334)	755,440,177	680,424,300	(75,015,877)	680,424,300	-	
22	RPKBUNP GAJI BANK NTT (01601010000195)	1,518,560,700	-	(1,518,560,700)	-	-	
23	RPKBUNP GAJI BANK SULTRA (00101010060451)	46,057,875	461,226,975	415,169,100	461,226,975	-	
24	RPKBUNP GAJI BANK BENGKULU (0010103000110)	40,491,345	26,424,445	(14,066,900)	26,424,445	-	
25	RPKBUNP GAJI BPD PAPUA (1000101000010)	81,130,950	149,473,900	68,342,950	149,473,900	-	
26	RPKBUNP GAJI BANK BPD BANTEN (0111000000)	17,134,100	8,902,100	(8,232,000)	8,902,100	-	
27	RPKBUNP GAJI BANK MANTAP (2014104009093)	36,443,700	25,089,900	(11,353,800)	25,089,900	-	
28	RPKBUNP GAJI BANK JAMBI (3001893806)	66,110,365	52,392,808	(13,717,557)	52,392,808	-	
29	RPKBUNP GAJI BANKKALTIMTARA (0011104304)	1,894,619,030	2,483,681,100	589,062,070	2,483,681,100	-	
30	RPKBUNP GAJI BANK SULTENG (0010101000009)	32,606,928	32,606,928	-	32,606,928	-	
31	RPKBUNP GAJI BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 (100200292649)	146,085,900	165,273,200	19,187,300	165,273,200	-	
32	RPKBUNP GAJI BSI (7185168028)	1,046,254,132,770	1,276,179,355,878	229,925,223,108	1,276,179,355,878	-	

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
33	RPKBUNP GAJI BRK SYARIAH (1010000003)	1,881,456,100	3,587,582,550	1,706,126,450	3,587,582,550	-	
34	RPKBUNP GAJI BANK MUAMALAT INDONESIA (3010217817)	8,420,851,010	10,219,269,960	1,798,418,950	10,219,269,960	-	
35	RPKBUNP GAJI BANK KBBS (8810001101)	-	336,127,000	336,127,000	336,127,000	-	
36	Rek Lain BI Penampungan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pembangunan Hutan (519000143980)	2,874,137,905,125	3,027,557,575,055	153,419,669,930	3,027,557,575,055	-	
37	Rek Lain BI RIBUN Imbal Hasil (519000698980)	1,318,079,197,015	2,063,555,922,621	745,476,725,606	2,063,555,922,621	-	
38	Rekening Khusus DepKeu (Rupiah) Untuk Monetisasi Non Project Type Grant Aid 2001 (510000270980)	1,981,190	1,981,190	-	1,981,190	(0)	pembulatan
39	NON PROJECT GRANT AID TAHUN 2002 (510000275980)	2,261,518	2,261,518	-	2,261,518	(0)	pembulatan
40	NON PROJECT GRANT AID TAHUN 2003 (510000276980)	3,180,126	3,180,126	-	3,180,126	-	
41	Rekening Penerimaan Hibah Jepang melalui Program Second Kennedy Round (SKR) (519000121980)	643,832,834	-	(643,832,834)	-	-	
42	Rekening Kementerian Keuangan Dalam Rangka Refund (519000132980)	519,179,551	519,179,551	-	519,179,551	(0)	pembulatan
43	RKPHLN ISPHERE (0807208888)	156,323,978,117	-	(156,323,978,117)	-	-	
44	REKSUS SBSN DJ BIMAS (7185168128)	3,012,224,559	-	(3,012,224,559)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
45	REKSUS SBSN DJ PHU (7185168713)	4,841,524,725	-	(4,841,524,725)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
46	REKSUS SBSN PERKERETAAPIAN (7185168217)	35,709,313,502	-	(35,709,313,502)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
47	REKSUS SBSN PERHUB UDARA (7185168117)	163,083,082,862	-	(163,083,082,862)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
48	REKSUS SBSN PERHUB LAUT (7185168225)	52,086,878,401	-	(52,086,878,401)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
49	REKSUS SBSN PERHUB DARAT (7185168136)	36,690,787,803	-	(36,690,787,803)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
50	REKSUS SBSN PERKERETAAPIAN 2 (7185168934)	910,148,553,373	-	(910,148,553,373)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
51	REKSUS SBSN DJ Bina Marga 2 (7185168276)	689,159,198,563	-	(689,159,198,563)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
52	REKSUS SBSN DIKTI (7185168004)	222,548,561,946	-	(222,548,561,946)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
53	REKSUS SBSN DJ SDA 2 (7815160058)	16,115,457,271	-	(16,115,457,271)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
54	REKSUS SBSN KEPOLISIAN NEGARA RI (7185167008)	7,486,208,770	-	(7,486,208,770)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
55	REKSUS SBSN MARKAS BESAR TNI (7185166885)	6,069,496,011	-	(6,069,496,011)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
56	REKSUS SBSN MARKAS BESAR TNI AD (7185168284)	4,229,734,067	-	(4,229,734,067)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
57	REKSUS SBSN MARKAS BESAR TNI AU (7185168306)	3,244,089,028	-	(3,244,089,028)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
58	REKSUS SBSN MARKAS BESAR TNI AL (7185161026)	3,996,357,490	-	(3,996,357,490)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
59	REKSUS SBSN DJ PKH (7185167113)	13,174,342,218	-	(13,174,342,218)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
60	REKSUS SBSN BATAN (7185167137)	2,054,858,610	-	(2,054,858,610)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
61	REKSUS SBSN DJ PENDIDIKAN VOKASI (7185167229)	37,057,141,217	-	(37,057,141,217)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
62	REKSUS SBSN BPP SDM KLHK (7185167334)	9,640,762,588	-	(9,640,762,588)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
63	REKSUS SBSN DJ PENDIS (7185167385)	42,297,949,582	-	(42,297,949,582)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
64	REKSUS SBSN BPP PERTANIAN (7185167601)	3,717,083,216	-	(3,717,083,216)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
65	REKSUS SBSN BPP SDM PERTANIAN (7185167598)	837,452,460	-	(837,452,460)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
66	REKSUS SBSN BPSDM INDUSTRI (7185167164)	1,334,128,686	-	(1,334,128,686)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
67	REKSUS SBSN BPSDM PERHUBUNGAN (7185167342)	4,944,832,240	-	(4,944,832,240)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
68	REKSUS SBSN DJ CIPTA KARYA (7218482807)	8,932,262,226	-	(8,932,262,226)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
69	REKSUS SBSN BAKAMLA (7218484012)	4,142,684,540	-	(4,142,684,540)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
70	REKSUS SBSN PERKERETAAPIAN 3 (7218484233)	3,444,652,858,908	-	(3,444,652,858,908)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
71	REKSUS SBSN SDA 3 (7218484527)	79,146,277,336	-	(79,146,277,336)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
72	REKSUS SBSN DJ BINA MARGA 3 (7257867441)	126,191,834,772	-	(126,191,834,772)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
73	REKSUS SBSN KEJAKSAAN RI (7257867972)	10,976,184,887	-	(10,976,184,887)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
74	REKSUS SBSN KEMENHAN (7257868367)	11,574,604,971	-	(11,574,604,971)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
75	REKSUS SBSN SU BPS (7257868553)	5,318,992,666	-	(5,318,992,666)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
76	REKSUS SBSN SU BKN (7257868901)	12,803,949,519	-	(12,803,949,519)	-	-	Tutup Jadi *single* reksus
77	REKSUS SBSN BSI (7296945964)	-	2,964,950,723,025	2,964,950,723,025	2,964,950,723,025	-	Rek Baru 2025
78	Sub RKUN Penempatan IDR (518000122980)	-	50,036,681,450,795	50,036,681,450,795	50,036,681,450,799	(4)	pembulatan
79	Rek Lain BI SAL (500000002980)	157,278,533,057,481	50,043,172,297,078	(107,235,360,760,403)	50,043,172,297,078	-	
80	RPGL BU SKN RTGS IN TRANSIT BMRI (1190011591532)	114,230,000,000	-	(114,230,000,000)	-	-	
Total		**180,923,940,557,096**	**123,169,863,770,107**	**(57,754,076,786,989)**	**123,273,112,605,926**	**(103,248,835,819)**	

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM VALUTA ASING

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
1	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta USD (600502411980)	537,263,479,023	139,532,675,973	(397,730,803,050)	139,532,675,973	0.20	pembulatan
2	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen (600502111980)	21,666,604,858	24,310,393,419	2,643,788,561	24,310,393,419	(0.31)	pembulatan
3	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO (600502991980)	23,223,159,124	3,892,027,285	(19,331,131,839)	3,892,027,285	(0.27)	pembulatan
4	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta CNH (600502115980)	-	-	-	-	-	
5	Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta AUD (600502311980)	-	-	-	-	-	
6	Rek Lain BI Penerimaan Penyetoran Retur SP2D Dalam Valuta JPY (609010111980)	-	-	-	-	-	
7	Rek Lain BI Penerimaan Penyetoran Retur SP2D Dalam Valuta USD (609025411980)	-	-	-	-	-	
8	Rek Lain BI Penerimaan Penyetoran Retur SP2D Dalam Valuta EURO (609004991980)	-	-	-	-	-	
9	Sub RKUN Penempatan USD (608001411980)	-	7,204,406,363,062	7,204,406,363,062	7,204,406,363,062	0.40	pembulatan
10	Sub RKUN Penempatan YEN (608000111980)	-	14,698,741,215,978	14,698,741,215,978	14,698,741,215,978	0.48	pembulatan
11	Sub RKUN Penempatan EUR (608000991980)	21,602,777,733,225	3,738,408,555,028	(17,864,369,178,197)	3,738,408,555,028	(0.02)	pembulatan
12	Sub RKUN Penempatan CNH (608000115980)	-	38,557,804,479	38,557,804,479	38,557,804,479	0.02	pembulatan
13	Sub RKUN Penempatan AUD (608000311980)	-	132,736,119,574	132,736,119,574	132,736,119,574	(0.10)	pembulatan
14	Rek Lain BI SAL USD (609028411980)	135,969,518,719,521	-	(135,969,518,719,521)	-	-	
15	Rek Lain BI Pengelolaan SAL USD (609029411980)	-	-	-	-	-	
16	Menkeu utk Penerimaan Hibah EductSector Support Prog(ESSP) d/Uni Eropa d/val EUR-DCI-ASIE/2009/021 (609001991980)	-	-	-	-	-	
17	Reksus Kementerian Keuangan Dalam Rangka Refund (600504411980)	323	334	11	334	(0.40)	pembulatan
18	Reksus Kemenkeu u/ Loan Proy.Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu-Integrated Village Economic Trans. (TEKAD) No.2000003165 (601002991980)	-	73,658,706,367	73,658,706,367	73,658,706,367	(0.21)	pembulatan
19	REKSUS KHUSUS UNTUK PROYEK THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEMS INUPLAND AREAS (UPLANDs) LOAN IFAD NO 2000003230 (601005991980)	51,156,364,721	48,854,893,166	(2,301,471,555)	48,854,893,166	(0.27)	pembulatan
20	Reksus Kemenkeu utk Procurement of Multi Purposes Research Vessels Pinjaman AFD No CID 1077 02 L (601006991980)	3,491,877,574	1,965,613,176	(1,526,264,398)	1,965,613,176	(0.07)	pembulatan

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM VALUTA ASING

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
21	REKSUS DEPKEU U/PROY.PENGEMB.PRAS.PEDESAAN(P2D) RURAL AREAS INFRAST.DEVELOPMENT PROJECT.(III) IP-506 JBIC DLM.VAL.JPY (601045111980)	-	-	-	-	-	
22	REKSUS DEPKEU UNTUK PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT-III (OVER SEAS PROGRAM), PROJECT LOAN JBIC-535 A (601048111980)	-	-	-	-	-	
23	REKSUS DEPKEU UNTUK PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT-III (DOMES TIC PROGRAM) PROJECT LOAN JBIC-535 B (601049111980)	-	-	-	-	-	
24	Reksus Kemenkeu Untuk PHRDP IV Domestic Study Program Loan JICA No.IP-568 (601057111980)	31,354,198	32,373,176	1,018,978	32,373,176	(0.29)	pembulatan
25	Reksus Kemenkeu Untuk PHRDP IV Overseas Study Program Loan JICA No.IP-568 (601057111980)	11,966,269,289	213,579	(11,966,055,710)	213,579	0.40	pembulatan
26	Reksus Kemenkeu Untuk Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II) Loan JICA NO.IP-564(601059111980)	-	-	-	-	-	
27	Reksus Kemenkeu untuk Kegiatan CSWMDR Slice II Pinjaman JICA No. IP-567 (601060111980)	198,554,869	205,007,691	6,452,822	205,007,691	0.22	pembulatan
28	Reksus Kemenkeu u/Urban Sanitation&Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project 2780-INO dlm Val USD (601304411980)	-	-	-	-	-	
29	Reksus Kemenkeu untuk Pinjaman ADB No.3094-INO Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) (601319411980)	37,308,290	38,608,319	1,300,029	38,608,319	(0.20)	pembulatan
30	Reksus Kemenkeu untuk Pinjaman ADB No.3440-INO Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) Project (601328411980)	4,945,499,685	-	(4,945,499,685)	-	-	
31	Reksus Kemenkeu untuk Co-Financing DOISP Phase II LN 8711-ID dan LN 0010-1-IDN (601329411980)	-	-	-	-	-	
32	Reksus Kemenkeu untuk Proyek READSI Pinjaman IFAD No.2000001960 (601331411980)	14,429,931,092	-	(14,429,931,092)	-	-	
33	Reksus Kemenkeu untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP) IBRD 8872-ID (601333411980)	3,683,374,787	-	(3,683,374,787)	-	-	

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM VALUTA ASING

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
34	Reksus Kemenkeu untuk SIMURP Loan AIIB L0060A dan IBRD 8891-ID (601334411980)	68,556,995,925	-	(68,556,995,925)	-	-	
35	Reksus Kemenkeu untuk One Map Project Loan IBRD 8897-ID (601336411980)	735,859,578	-	(735,859,578)	-	-	
36	Reksus Kemenkeu untuk Indonesian Tourism Development Project (ITDP) Loan IBRD 8861-ID (601337411980)	-	-	-	-	-	
37	Reksus Kemenkeu untuk Pinjaman No.3749-INO untuk program Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth Project (AKSI) (601338411980)	-	-	-	-	-	
38	Reksus Kemenkeu untuk Loan Proyek Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme (YESS) No.2000002604 (601339411980)	-	20,252,457,808	20,252,457,808	20,252,457,808	-	
39	Reksus Kemenkeu Loan IBRD 8992 - Realizing Education's Promise: Support to Indonesia's Ministry of Religious Affairs for Improved (601340411980)	-	-	-	-	-	
40	REKSUS KEMENKEU UTK LOAN ADB 3793-INO-EMERGENCY ASSIST. FOR REHABILITATION AND RECONS. LOAN 1 PUBLIC WORKS INFRASTRUCTURE (601341411980)	-	-	-	-	-	
41	Reksus Kemenkeu IBRD 8976 - National Urban Development Project (601342411980)	-	954,316,405	954,316,405	954,316,405	0.20	pembulatan
42	Reksus Kemenkeu IBRD 8941-ID - Inst Strengt for Imprv Village Servc Delivery Project (601343411980)	-	-	-	-	-	
43	Reksus Kemenkeu IBRD 9024-ID-Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (601344411980)	-	220,169,821,414	220,169,821,414	220,169,821,414	(0.40)	pembulatan
44	Reksus Kemenkeu untuk Loan IsDB nomor IDN-1024: The Development of Integrated Farming Systems In Upland Areas (UPLANDs) (601345411980)	4,227,122,465	106,389,740,714	102,162,618,249	106,389,740,714	(0.40)	pembulatan
45	Reksus Kemenkeu untuk Pinjaman ADB no. 3872-INO : State Accountability Revitalization Project Additional Financing (601346411980)	-	6,811,411,490	6,811,411,490	6,811,411,490	(0.40)	pembulatan
46	Reksus Kemenkeu IBRD 8979-ID-Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (601347411980)	6,537,026,389	-	(6,537,026,389)	-	-	
47	Reksus Kemenkeu IBRD 8980-IDRIP (601348411980)	74,967,422,363	19,364,397,580	(55,603,024,783)	19,364,397,580	-	
48	Reksus Kemenkeu untuk Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units Project Pinjaman IsDB IDN-1031 (601349411980)	670,629,892	1,161,900,054	491,270,162	1,161,900,054	0.40	pembulatan

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM VALUTA ASING

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
49	Reksus Kemenkeu Utk Pinjaman 4110 INO (601350411980)	3,497,713,731	14,260,892,958	10,763,179,227	14,260,892,958	(0.40)	Pembulatan
50	Reksus Kemenkeu Utk Pinjaman No IBRD 9341 ID (601351411980)	73,277,327	33,989,659,299	33,916,381,972	33,989,659,299	(0.20)	pembulatan
51	Reksus Kemenkeu Utk Pinjaman No IBRD 9340 (601352411980)	6,672,102,787	167,863,727,486	161,191,624,699	167,863,727,486	(0.40)	pembulatan
52	Reksus Kemenkeu Untuk Hibah ADB Technical Assistance (TA) No. 8358 INO Minimum Service Standards Capacity Development Program (602003991980)	-	-	-	-	-	
53	Reksus Kemenkeu Untuk Proyek Water Hibah and Sanitation Hibah Phase II No. 62031 Dlm Val AUD (602005311980)	52,137,689,036	57,995,398,897	5,857,709,861	57,995,398,897	0.44	pembulatan
54	Reksus Kemenkeu untuk Forest Programme III - Sulawawesi Hibah KFW No.2012 67 004 (602005991980)	-	978,360,810	978,360,810	978,360,810	(0.05)	pembulatan
55	Reksus Kemenkeu u/ Grant Proy.Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu-Integrated Village Economic Trans. (TEKAD) No.2000003164 (602007991980)	165,671,336	32,317,624	(133,353,712)	32,317,624	0.15	pembulatan
56	Reksus Kemenkeu Untuk Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi Hibah KfW No. 2015067 668 (602008991980)	2,214,794,170	7,955,302,732	5,740,508,562	7,955,302,732	0.21	pembulatan
57	Reksus Kemenkeu Untuk Kegiatan Palembang City Sewerage Project (PCSP) No.73826 (602009311980)	14,756,927,458	12,491,631,771	(2,265,295,687)	12,491,631,771	(0.07)	pembulatan
58	Reksus Kemenkeu untuk Forest Programme V – Social Forestry Support Programme Hibah KfW No.201767383 (602009991980)	4,593,153,983	2,233,478,045	(2,359,675,938)	2,233,478,045	(0.30)	pembulatan
59	Reksus Kemenkeu untuk Forest Programme VI – Protection of Mangrove Forest Hibah KfW No. 2017 67 595 (602010991980)	40,212,574	2,084,430,809	2,044,218,235	2,084,430,809	(0.39)	pembulatan
60	REKSUS DEPKEU U/JFPR ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR, GRANT NO.9132-INO DLM VAL.USD (602140411980)	-	-	-	-	-	
61	Reksus Kemenkeu Untuk Ozone Project Trust Fund (Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) Phase-out in Polyurethane Foam Sector Project (602172411980)	-	-	-	-	-	
62	Reksus Kemenkeu untuk Hibah ADB No.0379 (EF)-INO Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) (602179411980)	-	-	-	-	-	
63	Reksus Kemenkeu u/ Proyek Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation Project (FIP-1) 0501-INO (602189411980)	-	-	-	-	-	

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM VALUTA ASING

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
64	Reksus Kemenkeu untuk TF 0A7565 Investing in Nutrition and Early Years (602190411980)	-	-	-	-	-	
65	Reksus Kemenkeu untuk Grant Proyek Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme (YESS) No.2000002603 (602193411980)	1,887,938,664	1,772,355,112	(115,583,552)	1,772,355,112	-	
66	Reksus Kemenkeu Grant ADB 0379-INO Coral Reef Rehab & Manag Prog - Coral Triangle Initv (COREMAP-CTI) PROJECT-AMENDMENT (602194411980)	-	-	-	-	-	
67	Reksus Kemenkeu TF0B3897 TF0B3998 dan TF0B3999 BioCFplus-ISFL (602195411980)	3,533,378,854	3,914,407,314	381,028,460	3,914,407,314	(0.40)	pembulatan
68	Reksus Kemenkeu TFB2430 (602196411980)	27,833,349,162	-	(27,833,349,162)	-	-	
69	REKSUS KEMENKEU TFB5420-PFM MDTF III (602199411980)	12,881,700,623	-	(12,881,700,623)	-	-	
70	Reksus Kemenkeu utk Indonesia EITI Transition and Mainstreaming Support Projects TF0B6149 (602200411980)	-	-	-	-	-	
71	Reksus Kemenkeu Utk Hibah No. TF B7496 (602202411980)	3,514,998,166	1,212,167,730	(2,302,830,436)	1,212,167,730	(0.40)	pembulatan
72	Reksus Kemenkeu Utk Hibah No. TF B8114 (602203411980)	34,981,706,344	25,356,219,082	(9,625,487,262)	25,356,219,082	0.40	pembulatan
73	Reksus Kemenkeu Utk Pinjaman 4272 INO (601061111980)	25,604,107,266	11,277,671,549	(14,326,435,717)	11,277,671,549	0.49	pembulatan
74	Reksus Kernenkeu utk Pinjaman No IDN1054 (601008991980)	4,041,183,003	624,951,044	(3,416,231,959)	624,951,044	(0.08)	pembulatan
75	Reksus Kemenkeu Untuk Pinjaman No CID 1109 11 (601007991980)	-	26,105,485,853	26,105,485,853	26,105,485,853	(0.16)	pembulatan
76	Reksus Kemenkeu Utk Pinjaman 4283 INO (601062111980)	-	6,876,294,485	6,876,294,485	6,876,294,485	0.37	pembulatan
77	Reksus Kemenkeu utk Hibah LAUTRA TF C0495 (602205411980)	-	2,210,483,818	2,210,483,818	2,210,483,818	(0.40)	pembulatan
78	Reksus Kemenkeu utk Pinjaman NUFReP No IBRD 9459 ID (601355411980)	87,384,657,384	24,270,255,249	(63,114,402,135)	24,270,255,249	0.20	pembulatan
79	Reksus Kemenkeu utk Pinjaman DIGITAL No IBRD 9520 ID (601354411980)	19,202,989,216	16,687,609,013	(2,515,380,203)	16,687,609,013	0.20	pembulatan
80	Reksus Kemenkeu utk Hibah LAUTRA TF C0368 (602204411980)	12,882,554,036	20,663,526,699	7,780,972,663	20,663,526,699	(0.20)	pembulatan
81	Reksus Kemenkeu utk Hibah INEY 2 TF C1687 TF C3114 (602206411980)	-	50,918,163,718	50,918,163,718	50,918,163,718	(0.40)	pembulatan
82	Reksus Kemenkeu utk Pinjaman IFAD HDDAP No 2000004715 (601010991980)	78,557,831	5,923,577,582	5,845,019,751	5,923,577,582	(0.45)	pembulatan
83	Reksus Kemenkeu untuk Pinjaman IHSS No IBRD 9626 ID (601012991980)	20,943,769,601	83,314,328,969	62,370,559,368	83,314,328,969	0.15	pembulatan
84	Reksus Kemenkeu utk Hibah PFM III Enhancing BPK Performance Audit Capacity (602207411980)	1,819,159,769	-	(1,819,159,769)	-	-	
85	Reksus Kemenkeu utk Pinjaman No INO 4338 (601009991980)	167,300,276	13,194,698,544	13,027,398,268	13,194,698,544	0.34	pembulatan

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM VALUTA ASING

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
86	Reksus Kemenkeu utk Pinjaman IsDB IFPIFM No IDN1055 (601011991980)	585,234,614	4,964,780,590	4,379,545,976	4,964,780,590	0.32	pembulatan
87	Reksus Kemenkeu utk Pinjaman LAUTRA No IBRD 9498 ID (601353411980)	-	33,792,366,643	33,792,366,643	33,792,366,643	(0.20)	pembulatan
88	Reksus Kemenkeu utk Pinjaman IsDB SIHREN No IDN 1070 (601014991980)	-	4,017,749,322	4,017,749,322	4,017,749,322	0.01	pembulatan
89	Reksus Kemenkeu Utk Pinjaman ADB FMNJP no 4410 INO (601063111980)	1,687,183,937	6,789,538,751	5,102,354,814	6,789,538,751	0.48	pembulatan
90	Reksus Kemenkeu untuk Hibah SINERGIS TF C4755 (602208411980)	13,988,666,134	5,512,645,530	(8,476,020,604)	5,512,645,530	0.40	pembulatan
91	Reksus Kemenkeu untuk Hibah Gender Responsive PFM (602209411980)	1,273,086,937	1,818,260,875	545,173,938	1,818,260,875	(0.20)	pembulatan
92	Reksus Kemenkeu untuk Pinjaman LISTRAFNo IBRD 9636 (601013991980)	-	46,099,724,186	46,099,724,186	46,099,724,186	0.39	pembulatan
93	Reksus Kemenkeu untuk Pinjaman ILASPP No IBRD 9732 (601065111980)	-	142,637,424,251	142,637,424,251	142,637,424,251	(0.38)	Rek Baru 2025. selisih karena pembulatan.
94	Reksus Kemenkeu Utk Pinjaman ADB IFP IFM Phase IIN (601064111980)	-	12,331,174	12,331,174	12,331,174	(0.05)	Rek Baru 2025. selisih karena pembulatan.
95	Reksus Kemenkeu untuk Hibah I SEHAT TF C6069 (602211411980)	-	40,950,078,761	40,950,078,761	40,950,078,761	0.20	Rek Baru 2025. selisih karena pembulatan.
96	Reksus Kemenkeu untuk Hibah Eco Fishing Port No CI (602012991980)	-	8,847,199,052	8,847,199,052	8,847,199,052	(0.28)	Rek Baru 2025. selisih karena pembulatan.
97	Reksus Kemenkeu utk ADB Nomor 10295 REG (602210411980)	-	9,383,013,200	9,383,013,200	9,383,013,200	-	Rek Baru 2025.
98	RPKBUNP VALAS USD CITIBANK (0107862501)	-	-	-	-	-	
99	RPKBUNP SPAN VALAS USD BRI (032902000451306)	-	-	-	-	-	
100	RPKBUNP SPAN VALAS USD BNI (1811922358)	-	-	-	-	-	
101	RPKBUNP SPAN VALAS USD BMRI (1190011600671)	-	-	-	-	-	
Total		**158,758,528,351,410**	**27,379,477,124,598**	**(131,379,051,226,812)**	**27,379,477,124,600**	**(2)**	

REKENING PEMERINTAH LAINNYA

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
1	RR RKPHLN ISPHERE (0807209994)	1,198,172,746	-	(1,198,172,746)	-	-	
2	RR REKSUS SBSN DJ PENDIS (7185167407)	70,131,627	-	(70,131,627)	-	-	Tutup jadi single reksus
3	RR REKSUS SBSN PERHUB LAUT (7185168187)	2,790,000	-	(2,790,000)	-	-	Tutup jadi single reksus
4	RR REKSUS SBSN DJ PHU (7185168268)	2,450,000	-	(2,450,000)	-	-	Tutup jadi single reksus
5	RR REKSUS SBSN BSI (7296946828)	-	1,118,724,888	1,118,724,888	1,118,724,888	-	Rek Baru 2025
6	RPL BUN PIR SPH (1160094009835)	-	(1)	(1)	-	(1)	Pembulatan
7	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali) (020601000015302)	-	1	1	-	1	Pembulatan
8	RPL BUN PIR SPH (020601000023305)	-	7	7	-	7	Pembulatan
9	Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi (508000084980)	2,082,717,172,958	2,219,320,306,167	136,603,133,209	2,219,320,306,162	5	Pembulatan
10	Rek Lain BI Pembangunan Daerah (519000102980)	-	3	3	-	3	Pembulatan
11	Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas (600000411980)	7,622,914,791,421	12,486,025,790,463	4,863,110,999,042	12,486,025,790,462	1	Pembulatan
12	RETUR GAJI BRI (032901003298303)	2,690,900	21,610,300	18,919,400	21,610,300	-	
13	RPGL BU RETUR RPKBUNP SPAN VALAS USD BRI (032902000453308)	-	418,000	418,000	418,000	-	
14	RETUR SPAN BRI (032901003296301)	205,267,310,693	59,079,998,308	(146,187,312,385)	59,079,998,306	2	Pembulatan
15	RETUR SPAN-MDRI (1190006666620)	18,144,216,150	293,044,648,784	274,900,432,634	293,044,648,763	21	Pembulatan
16	RETURspan-BNI (0296474245)	3,909,582,467	2,235,323,087,835	2,231,413,505,368	2,235,323,087,835	-	
17	RETURSPAN-BTN (0001401390005113)	1,860,106,096	3,113,553,952,671	3,111,693,846,575	3,113,553,952,669	2	Pembulatan
18	RR RPKBUNP VALAS USD CITIBANK (0107862528)	-	1,732,667,517	1,732,667,517	1,732,667,517	0	Pembulatan

REKENING PEMERINTAH LAINNYA

No.	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan
19	RPGL BU RETUR RPKBUNP SPAN BSI (7815160074)	173,170,017	13,729,721,782	13,556,551,765	13,729,721,782	-	
Total		**9,936,262,585,075**	**20,422,950,926,725**	**10,486,688,341,650**	**20,422,950,926,686**	**40**	**-**

RINCIAN KAS DI KPPN

Kode KPPN	KPPN	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2025 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2025	Selisih antara Saldo 31 Desember 2025 dengan Rekening Koran	Keterangan	
140	PINJAMAN HIBAH	-	333,056,838	333,056,838	333,056,838	-		
901	KHUSUS PENERIMAAN	697,379,362,618	838,053,180,894	140,673,818,276	943,298,252,781	(105,245,071,887)	Saldo rekening koran Rupiah terdiri dari: a. IDR sebesar Rp935.545.856.757 b. saldo rekening koran USD sebesar USD463.196,08 ekuivalen IDR7.744.637.812 Terdapat selisih sebesar minus Rp105.245.071.887 pada saldo IDR dengan rincian sebagai berikut:	
							RK ONLY	(14,984,558,495)
							DUPLIKASI	(974,902,766)
							SETTLEMENT ONLY	29,599,569
							PENDEBETAN RK	40,445,696
							PERBEDAAN PENCATATAN	(89,407,002,746)
							BEDA NOMINAL	51,346,855
							TOTAL SELISIH	**(105,245,071,887)**
TOTAL		**697,379,362,618**	**838,386,237,732**	**141,006,875,114**	**943,631,309,619**	**(105,245,071,887)**		

RINCIAN KAS DI KPPN PER BANK

No.	Kode Bank	Nama Bank	KPPN	Nominal (Rupiah)
1	E1887	Bank Indonesia	KPPN Pinjaman Hibah	148,431,800
2	E1892	Bank Indonesia	KPPN Pinjaman Hibah	184,625,038
3	I0054	Bank Indonesia	KPPN Khusus Penerimaan	7
4	M9002	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KPPN Khusus Penerimaan	217,436,150,245
5	M9003	PT POS INDONESIA (PERSERO)	KPPN Khusus Penerimaan	1,428,120,805
6	M9004	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	KPPN Khusus Penerimaan	38,022,088,570
7	M9005	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	KPPN Khusus Penerimaan	34,673,226,175
8	M9009	PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	KPPN Khusus Penerimaan	57,905,764,268
9	M9010	PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG	KPPN Khusus Penerimaan	28,769,566,518
10	M9012	PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK	KPPN Khusus Penerimaan	21,315,534
11	M9013	PT BANK CENTRAL ASIA, TBK	KPPN Khusus Penerimaan	36,677,041,630
12	M9019	PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	KPPN Khusus Penerimaan	2,566,554,414
13	M9020	PT BPD SUMATERA BARAT	KPPN Khusus Penerimaan	8,436,601,063
14	M9021	PT BPD SULAWESI UTARA GORONTALO	KPPN Khusus Penerimaan	11,710,119,959
15	M9022	PT BPD SUMATERA UTARA	KPPN Khusus Penerimaan	33,054,237,066
16	M9025	PT BPD JAWA TIMUR TBK	KPPN Khusus Penerimaan	8,126,499,762
17	M9027	PT BANK DBS INDONESIA	KPPN Khusus Penerimaan	216,834,942
18	M9030	PT BANK PERMATA TBK	KPPN Khusus Penerimaan	414,198,891
19	M9031	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	KPPN Khusus Penerimaan	1,418,081,785
20	M9032	PT BPD BALI	KPPN Khusus Penerimaan	1,938,760,221
21	M9038	PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA	KPPN Khusus Penerimaan	3,320,886,326
22	M9040	PT BANK HSBC INDONESIA (d/h: BANK EKONOMI RAHARJA)	KPPN Khusus Penerimaan	458,506,783
23	M9041	PT BANK DANAMON INDONESIA TBK	KPPN Khusus Penerimaan	2,463,614,280
24	M9042	PT BPD BENGKULU	KPPN Khusus Penerimaan	5,936,361,508
25	M9046	PT BANK ANZ INDONESIA	KPPN Khusus Penerimaan	(12,932,206,035)
26	M9047	PT BANK DKI	KPPN Khusus Penerimaan	115,371,376,025
27	M9048	PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	KPPN Khusus Penerimaan	16,792,303,012
28	M9049	STANDARD CHARTERED BANK	KPPN Khusus Penerimaan	70,401,306
29	M9050	PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KPPN Khusus Penerimaan	5,187,313
30	M9061	PT BPD SULAWESI TENGAH	KPPN Khusus Penerimaan	8,666,423,274
31	M9062	PT BANK SINARMAS TBK	KPPN Khusus Penerimaan	15,496,575
32	M9063	PT BPD KALIMANTAN TENGAH	KPPN Khusus Penerimaan	31,916,124,898
33	M9066	PT BANK OCBC NISP TBK	KPPN Khusus Penerimaan	3,037,400,491
34	M9067	PT BANK ICBC INDONESIA	KPPN Khusus Penerimaan	121,030,285
35	M9068	PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA	KPPN Khusus Penerimaan	7,534,778,685
36	M9069	PT BPD KALIMANTAN BARAT	KPPN Khusus Penerimaan	18,087,838,530
37	M9072	PT BPD PAPUA	KPPN Khusus Penerimaan	21,782,676,413
38	M9076	PT BPD SULAWESI TENGGARA	KPPN Khusus Penerimaan	5,822,218,594
39	M9080	PT BANK CIMB NIAGA	KPPN Khusus Penerimaan	1,143,980,742
40	M9081	PT BPD JAMBI	KPPN Khusus Penerimaan	13,323,790,914
41	M9085	PT BANK MEGA TBK	KPPN Khusus Penerimaan	15,248,909
42	M9086	PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK	KPPN Khusus Penerimaan	80,662,719
43	M9088	PT BANK MESTIKA DHARMA TBK	KPPN Khusus Penerimaan	26,320,187
44	M9095	PT BANK ACEH SYARIAH	KPPN Khusus Penerimaan	16,734,668,820
45	M9096	PT BANK MEGA SYARIAH	KPPN Khusus Penerimaan	18,810,674
46	M9098	PT BPD LAMPUNG	KPPN Khusus Penerimaan	21,939,191,153
47	M9099	PT BPD BANTEN TBK	KPPN Khusus Penerimaan	8,305,851,629
48	M9106	PT Bank NTB SYARIAH	KPPN Khusus Penerimaan	13,644,223,099
49	M9108	PT BPD JAWA TENGAH	KPPN Khusus Penerimaan	23,067,221,603
50	M9111	PT TOKOPEDIA	KPPN Khusus Penerimaan	3,839,406,724
51	M9112	PT FINNET INDONESIA	KPPN Khusus Penerimaan	584,492,506
52	M9113	PT BUKALAPAK.COM	KPPN Khusus Penerimaan	14,496,396

RINCIAN KAS DI KPPN PER BANK

No.	Kode Bank	Nama Bank	KPPN	Nominal (Rupiah)
53	M9116	PT BANK NATIONALNOBU TBK	KPPN Khusus Penerimaan	34,477,580
54	M9117	PT Achilles Advanced Systems	KPPN Khusus Penerimaan	133,388,822
55	M9119	PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE	KPPN Khusus Penerimaan	234,398,288
56	M9120	PT BIMASAKTI MULTI SINERGI	KPPN Khusus Penerimaan	37,021,930
57	M9122	PT BPD KALIMANTAN SELATAN	KPPN Khusus Penerimaan	7,270,908,103
58	M9123	PT BANK SYARIAH INDONESIA	KPPN Khusus Penerimaan	2,565,159,473
59	M9127	PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH	KPPN Khusus Penerimaan	5,379,456,921
60	M9129	PT VISIONET INTERNASIONAL(OVO)	KPPN Khusus Penerimaan	34,117,494
61	M9130	PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA	KPPN Khusus Penerimaan	547,039,803
62	M9131	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL	KPPN Khusus Penerimaan	48,628,482
63	M9034	Bank Mandiri (USD)	KPPN Khusus Penerimaan	2,753,835,196
64	M9035	Bank Rakyat Indonesia (USD)	KPPN Khusus Penerimaan	1,975,916,962
65	M9006	Bank Negara Indonesia (USD)	KPPN Khusus Penerimaan	3,014,885,647
Total				**838,386,237,732**

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	31 Desember 2025		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	29,122,000	(24,573,000)	4,549,000
004	MEDAN I	2,331,000	(2,331,000)	-
006	PADANG SIDEMPUAN	1,000,000	(1,000,000)	-
007	GUNUNG SITOLI	-	33,843,000	33,843,000
008	PEKANBARU	25,000,000	35,810,500	60,810,500
009	TANJUNG PINANG	-	104,874,911	104,874,911
010	PADANG	7,385,000	(7,385,000)	-
011	BUKITTINGGI	-	10,800	10,800
012	JAMBI	145,353,597	(145,353,597)	-
014	PALEMBANG	141,437,000	(141,437,000)	-
015	PANGKAL PINANG	-	1,500,000	1,500,000
016	BENGKULU	-	88,042,499	88,042,499
017	BANDAR LAMPUNG	-	147,809,000	147,809,000
018	JAKARTA I	138,492,535,864	69,052,840,673	207,545,376,537
019	JAKARTA II	1,097,333,515	871,329,109	1,968,662,624
020	SERANG	12,372,000	(1,478,000)	10,894,000
022	BANDUNG I	2,489,500	159,401,091	161,890,591
026	SEMARANG I	-	440,446,994	440,446,994
031	SURABAYA I	127,000,000	(127,000,000)	-
032	MALANG	47,485,638	(47,485,638)	-
037	DENPASAR	327,109,319	(38,283,319)	288,826,000
039	KUPANG	882,279,638	(309,876,088)	572,403,550
042	PONTIANAK	19,562,000	44,173,681	63,735,681
043	PALANGKARAYA	59,367,001	(59,367,001)	-
045	BANJARMASIN	-	115,437,726	115,437,726
046	SAMARINDA	8,332,432	12,506,303	20,838,735
047	BALIKPAPAN	2,140,000	(2,140,000)	-
049	MANADO	198,546,684	1,917,107,040	2,115,653,724
050	GORONTALO	22,963,000	(5,300,884)	17,662,116
051	PALU	267,004,117	(222,515,855)	44,488,262
053	LUWUK	-	9,881,100	9,881,100
060	KENDARI	58,451,000	(44,113,000)	14,338,000
061	AMBON	583,449,166	(293,521,052)	289,928,114
062	TERNATE	483,939,500	(477,037,487)	6,902,013
063	JAYAPURA	103,727,169	19,202,831	122,930,000
065	MANOKWARI	693,810,531	(651,822,420)	41,988,111
066	SORONG	258,962,660	(191,359,660)	67,603,000
067	FAK FAK	46,892,000	(46,892,000)	-
068	MERAUKE	16,300,623	(16,300,623)	-
085	NABIRE	14,994,163	(14,994,163)	-
088	JAKARTA III	9,068,440,614	(68,349,164)	9,000,091,450
105	KUTACANE	-	91,368,671	91,368,671
111	RUTENG	12,207,000	(12,207,000)	-
113	WAMENA	14,930,845,655	(14,919,704,755)	11,140,900
121	MANNA	4,153,000	(4,153,000)	-
123	MEDAN II	8,899,549	(8,899,549)	-
127	TANGERANG	190,087,154	311,313,346	501,400,500
133	JAKARTA IV	8,083,253,879	(5,029,129,000)	3,054,124,879
135	SURABAYA II	2,534,400,824	(2,534,400,824)	-
136	MAKASSAR II	23,078,000	(23,078,000)	-
137	BATAM	-	894,069	894,069
139	JAKARTA V	4,200,958,468	2,065,655,503	6,266,613,971
141	TIMIKA	-	25,576,096	25,576,096

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	31 Desember 2025		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
143	KUALA TUNGKAL	13,477,000	(13,477,000)	-
159	BANGKO	-	250,000	250,000
160	SEKAYU	9,287,720	(9,287,720)	-
165	SIDOARJO	10,000,000	(10,000,000)	-
172	ATAMBUA	-	82,626,000	82,626,000
175	JAKARTA VI	45,598,052,023	(43,671,704,127)	1,926,347,896
178	MAMUJU	-	5,625,000	5,625,000
182	JAKARTA VII	1,170,338,065	3,936,815,588	5,107,153,653
Jumlah		**230,036,155,068**	**10,398,384,605**	**240,434,539,673**

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kode BA	Nama BA	31 Desember 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	132,479,164,274	4,179,867,324	136,659,031,598
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	5,832,658,156	64,889,369,853	70,722,028,009
138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	-	9,152,173,632	9,152,173,632
137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	-	2,893,317,239	2,893,317,239
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1,658,417,193	1,098,403,431	2,756,820,624
025	KEMENTERIAN AGAMA	6,656,800,070	(3,978,310,484)	2,678,489,586
152	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	-	2,341,396,898	2,341,396,898
145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	-	2,197,631,648	2,197,631,648
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	50,000,000	2,031,284,243	2,081,284,243
104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	-	1,772,915,886	1,772,915,886
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	660,630,504	942,012,054	1,602,642,558
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,583,097,010	(85,423,141)	1,497,673,869
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	618,460,202	39,471,297	657,931,499
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1,697,557,192	(1,128,871,823)	568,685,369
127	BADAN KARANTINA INDONESIA	-	561,394,085	561,394,085
146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	512,923,048	512,923,048
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	500,000,000	-	500,000,000
143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	-	379,068,985	379,068,985
144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	-	219,481,100	219,481,100
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	464,018,624	(264,682,658)	199,335,966
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	106,882,635	67,614,114	174,496,749
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	176,069,674	(14,002,744)	162,066,930
065	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	104,475,690	17,395,898	121,871,588
027	KEMENTERIAN SOSIAL	18,147,490	97,280,780	115,428,270
107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	-	95,579,096	95,579,096
149	KEMENTERIAN KOPERASI	-	87,307,120	87,307,120
140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	-	69,876,755	69,876,755
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	215,583,279	(147,983,279)	67,600,000
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	120,095,000	(75,634,632)	44,460,368
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	-	15,855,161	15,855,161
125	BADAN PANGAN NASIONAL	-	11,140,900	11,140,900
129	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	-	2,250,000	2,250,000
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	112,599,303	(111,821,518)	777,785
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	119,257,010	(118,589,010)	668,000
005	MAHKAMAH AGUNG	2,160,000	(2,149,200)	10,800

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kode BA	Nama BA	31 Desember 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	3,738,126,916	(3,738,126,916)	-
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	9,061,181,177	(9,061,181,177)	-
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	3,543,359,616	(3,543,359,616)	-
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	263,374,984	(263,374,984)	-
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	894,640,902	(894,640,902)	-
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	364,804,144	(364,804,144)	-
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	390,232,916	(390,232,916)	-
054	BADAN PUSAT STATISTIK	6,230,000	(6,230,000)	-
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	495,957	(495,957)	-
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	74,859,775	(74,859,775)	-
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	41,477,233,276	(41,477,233,276)	-
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	16,763,297,761	(16,763,297,761)	-
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	282,244,338	(282,244,338)	-
Jumlah		**230,036,155,068**	**10,887,460,296**	**240,923,615,364**

RINCIAN KAS HIBAH PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	31 Desember 2025		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	78,741,439,409	(78,741,439,409)	-
002	LANGSA	5,637,301,523	(5,032,710,525)	604,590,998
003	MEULABOH	16,780,559,286	(16,780,559,286)	-
004	MEDAN I	150,934,034,762	(150,934,034,762)	-
005	PEMATANG SIANTAR	25,262,959,787	(25,262,959,787)	-
006	PADANG SIDEMPUAN	48,876,588,426	(48,876,588,426)	-
007	GUNUNG SITOLI	36,527,433,015	(36,527,433,015)	-
008	PEKANBARU	160,797,351,829	(160,797,351,829)	-
009	TANJUNG PINANG	112,927,925,895	(112,927,925,895)	-
010	PADANG	109,206,803,388	(109,206,803,388)	-
011	BUKITTINGGI	20,719,480,792	(20,719,480,792)	-
012	JAMBI	107,444,643,897	(107,444,643,897)	-
013	SUNGAI PENUH	4,007,648,473	(4,007,648,473)	-
014	PALEMBANG	302,868,864,041	(302,868,864,041)	-
015	PANGKAL PINANG	89,654,781,780	(89,654,781,780)	-
016	BENGKULU	54,271,712,239	(54,271,712,239)	-
017	BANDAR LAMPUNG	207,966,767,220	(207,966,767,220)	-
019	JAKARTA II	174,204,200	233,697,320	407,901,520
020	SERANG	263,854,810,373	(263,854,810,373)	-
021	PURWAKARTA	10,673,108,400	(10,673,108,400)	-
022	BANDUNG I	274,554,870,229	(274,554,870,229)	-
023	BOGOR	56,156,879,364	(56,156,879,364)	-
024	CIREBON	30,937,532,425	(30,937,532,425)	-
025	TASIKMALAYA	41,385,163,673	(41,385,163,673)	-
026	SEMARANG I	131,588,949,772	(114,079,894,777)	17,509,054,995
027	PURWOREJO	5,913,403,988	(5,913,403,988)	-
028	SURAKARTA	12,479,441,513	(12,479,441,513)	-
029	PURWOKERTO	12,325,224,844	(12,325,224,844)	-
030	YOGYAKARTA	38,298,172,616	(38,298,172,616)	-
031	SURABAYA I	369,453,853,913	(369,453,853,913)	-
032	MALANG	59,706,061,210	(59,706,061,210)	-
033	MADIUN	49,433,677,745	(49,433,677,745)	-
034	KEDIRI	59,514,216,860	(59,514,216,860)	-
035	BONDOWOSO	38,492,029,570	(38,492,029,570)	-
036	PAMEKASAN	45,793,121,358	(45,793,121,358)	-
037	DENPASAR	181,675,297,874	(181,675,297,874)	-
038	MATARAM	60,870,195,838	(59,313,075,750)	1,557,120,088
039	KUPANG	282,359,922,310	(282,109,922,310)	250,000,000
040	ENDE	14,995,408,971	(14,995,408,971)	-
041	WAINGAPU	13,505,094,203	(13,505,094,203)	-
042	PONTIANAK	192,584,563,178	(192,584,563,178)	-
043	PALANGKARAYA	81,881,413,278	(81,881,413,278)	-
044	SAMPIT	8,334,300,598	(8,334,300,598)	-
045	BANJARMASIN	126,787,002,930	(126,787,002,930)	-
046	SAMARINDA	301,252,156,783	(301,252,156,783)	-
047	BALIKPAPAN	96,814,478,461	(69,884,187,751)	26,930,290,710
048	TARAKAN	7,772,201,082	(7,772,201,082)	-
049	MANADO	61,894,413,448	(61,894,413,448)	-
050	GORONTALO	43,195,505,722	(42,305,910,722)	889,595,000
051	PALU	119,180,527,588	(119,180,352,431)	175,157
052	POSO	23,357,307,880	(23,357,307,880)	-
053	LUWUK	29,062,923,582	(29,062,923,582)	-

RINCIAN KAS HIBAH PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	31 Desember 2025		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
054	MAKASSAR I	301,029,465,155	(301,029,465,155)	-
055	WATAMPONE	19,135,295,113	(19,135,295,113)	-
056	BANTAENG	12,621,111,467	(12,621,111,467)	-
057	PARE PARE	26,085,617,600	(26,085,617,600)	-
058	PALOPO	16,892,849,237	(16,892,849,237)	-
059	MAJENE	20,049,723,218	(20,049,723,218)	-
060	KENDARI	199,091,597,214	(199,091,597,214)	-
061	AMBON	130,566,559,027	(130,500,159,027)	66,400,000
062	TERNATE	94,502,101,473	(94,498,476,473)	3,625,000
063	JAYAPURA	206,343,638,640	(206,343,584,436)	54,204
064	BIAK	13,997,782,221	(13,996,303,409)	1,478,812
065	MANOKWARI	245,848,909,480	(245,478,034,026)	370,875,454
066	SORONG	30,991,873,346	(30,491,873,346)	500,000,000
067	FAK FAK	16,601,797,852	(16,601,797,852)	-
068	MERAUKE	41,245,839,397	(40,450,073,617)	795,765,780
070	LUBUK LINGGAU	20,691,898,735	(20,691,898,735)	-
071	BIMA	8,772,026,375	(8,772,026,375)	-
072	PEKALONGAN	12,865,824,184	(12,865,824,184)	-
073	BOJONEGORO	40,230,805,013	(40,230,805,013)	-
074	TAPAKTUAN	13,379,919,283	(13,379,919,283)	-
075	RANTAU PRAPAT	24,853,162,707	(24,853,162,707)	-
076	TANJUNG BALAI ASAHAN	21,197,124,927	(21,197,124,927)	-
077	SIJUNJUNG	11,028,710,344	(11,028,710,344)	-
078	MUARA BUNGO	7,984,712,805	(7,984,712,805)	-
079	SINTANG	7,501,184,881	(7,501,184,881)	-
080	BUNTOK	16,348,897,934	(16,348,897,934)	-
081	KOTABARU	21,276,880,020	(21,276,880,020)	-
082	TOLI TOLI	5,761,238,441	(5,761,238,441)	-
083	TAHUNA	3,613,644,294	(3,613,644,294)	-
084	TUAL	7,556,717,822	(7,556,717,822)	-
085	NABIRE	35,186,265,566	(35,186,265,566)	-
086	KARAWANG	7,813,537,539	(7,813,537,539)	-
087	SUMEDANG	2,655,855,815	(2,655,855,815)	-
089	LHOKSEUMAWE	18,326,262,851	(18,326,262,851)	-
090	SOLOK	7,770,063,813	(7,770,063,813)	-
091	LUBUK SIKAPING	9,438,552,785	(9,438,552,785)	-
092	RENGAT	28,944,420,235	(28,944,420,235)	-
093	SINGKAWANG	23,007,816,170	(23,007,816,170)	-
094	KETAPANG	22,199,177,554	(22,199,177,554)	-
095	BANDUNG II	144,406,570,375	(144,406,570,375)	-
096	GARUT	9,154,325,976	(9,154,325,976)	-
097	PATI	6,338,346,240	(6,338,346,240)	-
098	MOJOKERTO	38,516,069,209	(38,516,069,209)	-
099	PACITAN	7,927,134,869	(7,927,134,869)	-
100	BANYUWANGI	30,297,763,510	(30,297,763,510)	-
101	SUMBAWA BESAR	8,275,333,103	(8,275,333,103)	-
102	PANGKALAN BUN	10,746,908,438	(10,746,908,438)	-
103	BAU BAU	41,634,747,276	(41,634,747,276)	-
104	SAUMLAKI	8,607,616,584	(8,607,616,584)	-
105	KUTACANE	11,822,600,140	(11,822,600,140)	-
106	SIBOLGA	10,870,331,744	(10,672,188,744)	198,143,000
107	TANJUNG PANDAN	11,348,826,825	(11,348,826,825)	-
109	BATURAJA	15,585,782,931	(15,585,782,931)	-

RINCIAN KAS HIBAH PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	31 Desember 2025		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
110	BARABAI	30,175,396,416	(30,175,396,416)	-
111	RUTENG	27,903,061,001	(27,903,061,001)	-
112	TOBELO	12,237,305,607	(12,237,305,607)	-
113	WAMENA	62,293,281,351	(62,293,281,351)	-
115	MAGELANG	17,070,767,446	(17,070,767,446)	-
116	KOTABUMI	31,792,465,427	(31,792,465,427)	-
117	PUTUSSIBAU	13,790,098,311	(13,790,098,311)	-
118	TEGAL	28,982,457,240	(28,982,457,240)	-
119	SIDIKALANG	23,676,211,762	(23,676,211,762)	-
120	DUMAI	51,089,788,090	(51,089,788,090)	-
121	MANNA	12,808,112,730	(12,808,112,730)	-
122	TAKENGON	1,012,507,429	(1,012,507,429)	-
123	MEDAN II	383,833,263,153	(383,833,263,153)	-
124	TEBING TINGGI	54,916,069,584	(54,916,069,584)	-
125	BALIGE	29,823,886,257	(29,823,886,257)	-
126	METRO LAMPUNG	28,909,070,094	(28,909,070,094)	-
127	TANGERANG	28,522,435,598	(28,522,435,598)	-
128	SUKABUMI	46,289,182,700	(46,289,182,700)	-
129	KUDUS	30,751,299,868	(30,751,299,868)	-
130	CILACAP	9,250,622,720	(9,250,622,720)	-
131	JEMBER	38,273,186,124	(38,273,186,124)	-
132	SINGARAJA	23,381,650,490	(23,381,650,490)	-
133	JAKARTA IV	466,255,209,929	(466,255,209,929)	-
134	SEMARANG II	238,285,228,333	(238,285,228,333)	-
135	SURABAYA II	9,734,576,650	(9,734,576,650)	-
136	MAKASSAR II	9,628,333,000	(9,628,333,000)	-
137	BATAM	12,274,475,361	(12,274,475,361)	-
138	SERUI	5,537,115,834	(5,528,137,433)	8,978,401
139	JAKARTA V	-	68,866,663,742	68,866,663,742
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	987,265,254,172	(246,748,501,230)	740,516,752,942
141	TIMIKA	23,539,113,966	(23,539,113,966)	-
142	PAINAN	4,760,949,982	(4,760,949,982)	-
143	KUALA TUNGKAL	12,430,244,852	(12,430,244,852)	-
144	LAHAT	37,655,335,221	(37,655,335,221)	-
145	LIWA	6,616,146,242	(6,616,146,242)	-
146	CURUP	11,787,667,508	(11,787,667,508)	-
147	KUNINGAN	10,767,611,228	(10,767,611,228)	-
148	KLATEN	12,763,056,191	(12,763,056,191)	-
149	WONOSARI	4,820,872,927	(4,820,872,927)	-
150	BLITAR	36,815,923,745	(36,815,923,745)	-
151	TANJUNG	27,703,445,794	(27,703,445,794)	-
152	NUNUKAN	4,940,795,799	(4,940,795,799)	-
153	TANJUNG REDEP	10,001,789,697	(10,001,789,697)	-
154	AMLAPURA	34,597,127,584	(34,597,127,584)	-
155	BENTENG	6,675,021,334	(6,675,021,334)	-
156	KOLAKA	29,698,372,577	(29,698,372,577)	-
157	RAHA	22,377,938,860	(22,377,938,860)	-
158	KOTAMOBAGU	16,291,254,754	(16,291,254,754)	-
159	BANGKO	14,497,248,569	(14,497,248,569)	-
160	SEKAYU	44,933,621,039	(44,933,621,039)	-
161	RANGKASBITUNG	11,983,021,844	(11,983,021,844)	-
162	SRAGEN	12,874,100,723	(12,874,100,723)	-
163	PURWODADI	18,692,320,764	(18,692,320,764)	-

RINCIAN KAS HIBAH PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	31 Desember 2025		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
164	BANJARNEGARA	12,839,085,206	(12,839,085,206)	-
165	SIDOARJO	21,985,026,593	(21,985,026,593)	-
166	TUBAN	12,547,163,121	(12,547,163,121)	-
167	SANGGAU	24,799,976,498	(24,799,976,498)	-
168	PELAIHARI	12,729,347,487	(12,729,347,487)	-
169	SELONG	603,490,056	(603,490,056)	-
170	MAKALE	8,028,196,295	(8,028,196,295)	-
171	BEKASI	71,601,780,005	(71,601,780,005)	-
172	ATAMBUA	11,861,356,482	(11,861,356,482)	-
173	MASOHI	13,563,331,618	(13,563,331,618)	-
174	LARANTUKA	13,530,833,627	(13,530,833,627)	-
175	JAKARTA VI	74,356,453,485	(72,123,355,884)	2,233,097,601
176	WATES	9,106,481,355	(9,106,481,355)	-
177	SINJAI	6,230,270,239	(6,230,270,239)	-
178	MAMUJU	29,011,024,410	(29,011,024,410)	-
179	BITUNG	15,761,748,026	(15,761,748,026)	-
180	MARISA	7,974,869,173	(7,974,869,173)	-
181	MUKOMUKO	3,257,749,597	(3,257,749,597)	-
182	JAKARTA VII	219,820,003,776	62,397,044,923	282,217,048,699
185	TANJUNG SELOR	61,694,343,316	(61,694,343,316)	-
Jumlah		**10,552,112,773,536**	**(9,408,185,161,433)**	**1,143,927,612,103**

RINCIAN KAS HIBAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kode BA	Nama BA	31 Desember 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	573,088,460,416	(51,869,672,528)	521,218,787,888
027	KEMENTERIAN SOSIAL	219,820,003,776	62,396,914,948	282,216,918,724
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	237,152,919,019	(41,210,195,854)	195,942,723,165
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	71,400,998,087	-	71,400,998,087
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	50,448,540,412	18,418,123,330	68,866,663,742
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	258,029,703,901	(210,916,140,272)	47,113,563,629
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	-	41,650,000,000	41,650,000,000
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3,763,629,263	19,997,016,413	23,760,645,676
143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	-	22,932,434,591	22,932,434,591
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	62,230,201,976	(47,845,293,245)	14,384,908,731
124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	8,237,167,328	1,000,916,518	9,238,083,846
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6,944,323,745,821	(6,935,589,945,130)	8,733,800,691
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7,582,386,889	(1,148,839,108)	6,433,547,781
144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	-	5,695,948,524	5,695,948,524
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	2,073,113,220,390	(2,069,439,447,467)	3,673,772,923
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5,512,269,446	(3,681,173,858)	1,831,095,588
145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	-	1,665,000,000	1,665,000,000
139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	-	591,500,000	591,500,000
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	4,005,214,634	(3,479,665,773)	525,548,861
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2,199,497,177	(1,799,004,014)	400,493,163
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	187,893,000	187,893,000
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	50,000,000	(49,885,993)	114,007
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	10,824,885,000	(10,824,885,000)	-
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1,095,223,952	(1,095,223,952)	-
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	5,822,520,150	(5,822,520,150)	-
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	13,407,052,899	(13,407,052,899)	-
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	5,133,000	(5,133,000)	-
Jumlah		**10,552,112,773,536**	**(9,223,648,330,919)**	**1,328,464,442,617**

RINCIAN KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	31 Desember 2025		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	136,440,903,248	43,599,281,374	180,040,184,622
004	MEDAN I	521,738,731,484	158,319,064,383	680,057,795,867
005	PEMATANG SIANTAR	-	2,257,732,981	2,257,732,981
006	PADANG SIDEMPUAN	2,351,227,565	2,289,020,627	4,640,248,192
008	PEKANBARU	132,322,404,260	44,054,664,962	176,377,069,222
009	TANJUNG PINANG	6,832,331,909	1,570,313,429	8,402,645,338
010	PADANG	107,141,585,231	104,135,049,213	211,276,634,444
011	BUKITTINGGI	186,780,026,460	63,591,254,139	250,371,280,599
012	JAMBI	162,621,331,607	106,104,419,103	268,725,750,710
014	PALEMBANG	691,608,000,926	(236,964,190,541)	454,643,810,385
015	PANGKAL PINANG	9,296,837,957	21,141,379,281	30,438,217,238
016	BENGKULU	105,870,093,180	29,160,355,612	135,030,448,792
017	BANDAR LAMPUNG	274,017,740,480	140,594,701,048	414,612,441,528
018	JAKARTA I	7,795,885,163,372	(2,658,823,657,602)	5,137,061,505,770
019	JAKARTA II	69,058,708,163,401	(19,604,563,787,964)	49,454,144,375,437
020	SERANG	252,378,063,568	127,935,300,151	380,313,363,719
022	BANDUNG I	973,173,818,764	165,219,160,392	1,138,392,979,156
023	BOGOR	131,290,511,370	30,268,667,793	161,559,179,163
024	CIREBON	74,403,637,493	24,187,454,292	98,591,091,785
025	TASIKMALAYA	67,448,870,143	12,002,838,743	79,451,708,886
026	SEMARANG I	135,794,293,906	31,445,593,901	167,239,887,807
028	SURAKARTA	612,403,693,815	145,658,962,450	758,062,656,265
029	PURWOKERTO	98,191,863,068	132,741,069,814	230,932,932,882
030	YOGYAKARTA	1,194,442,692,127	195,486,021,296	1,389,928,713,423
031	SURABAYA I	204,178,886,239	164,052,932,879	368,231,819,118
032	MALANG	405,945,561,496	91,276,279,982	497,221,841,478
033	MADIUN	6,713,296,578	3,974,710,034	10,688,006,612
034	KEDIRI	67,277,545,635	4,286,908,883	71,564,454,518
035	BONDOWOSO	78,982,570,441	147,006,785,300	225,989,355,741
036	PAMEKASAN	69,408,829,350	35,518,563,358	104,927,392,708
037	DENPASAR	270,880,909,377	69,445,908,155	340,326,817,532
038	MATARAM	210,728,952,474	34,493,004,390	245,221,956,864
039	KUPANG	112,074,486,928	100,003,858,908	212,078,345,836
042	PONTIANAK	212,737,597,713	12,176,962,898	224,914,560,611
043	PALANGKARAYA	34,584,755,315	28,460,559,155	63,045,314,470
045	BANJARMASIN	261,904,443,769	14,837,469,813	276,741,913,582
046	SAMARINDA	139,723,899,141	57,785,319,164	197,509,218,305
047	BALIKPAPAN	34,267,115,334	(1,877,875,518)	32,389,239,816
048	TARAKAN	20,963,436,298	10,859,571,111	31,823,007,409
049	MANADO	241,587,411,260	119,947,484,240	361,534,895,500
050	GORONTALO	14,257,792,268	7,629,876,059	21,887,668,327
051	PALU	192,779,842,180	85,421,224,087	278,201,066,267
054	MAKASSAR I	509,324,421,122	192,057,792,738	701,382,213,860
058	PALOPO	25,005,688	56,854,093	81,859,781
060	KENDARI	94,546,664,407	48,980,780,392	143,527,444,799
061	AMBON	61,014,493,276	30,134,618,048	91,149,111,324
062	TERNATE	109,558,645,543	50,272,695,075	159,831,340,618
063	JAYAPURA	124,051,080,477	102,913,757,931	226,964,838,408
065	MANOKWARI	5,024,348,920	5,214,040,987	10,238,389,907
066	SORONG	36,295,832,113	16,402,496,400	52,698,328,513
068	MERAUKE	3,523,722,833	13,966,482,331	17,490,205,164
072	PEKALONGAN	12,479,251,536	24,154,366,335	36,633,617,871
073	BOJONEGORO	7,633,468,394	(3,979,310,248)	3,654,158,146

RINCIAN KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	31 Desember 2025		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
086	KARAWANG	278,945,904,002	58,810,674,421	337,756,578,423
088	JAKARTA III	1,230,640,676,169	21,158,654,124	1,251,799,330,293
089	LHOKSEUMAWE	67,668,607,896	51,558,013,794	119,226,621,690
095	BANDUNG II	113,614,802,159	66,724,502,145	180,339,304,304
096	GARUT	542,680,503	3,558,314,199	4,100,994,702
098	MOJOKERTO	4,560,727,406	(1,623,889,810)	2,936,837,596
100	BANYUWANGI	6,575,004,667	(1,429,300,498)	5,145,704,169
111	RUTENG	192,649,713	98,044,314	290,694,027
115	MAGELANG	153,720,150,874	69,358,291,892	223,078,442,766
118	TEGAL	36,477,669,374	6,938,881,553	43,416,550,927
123	MEDAN II	187,152,674,880	4,448,085,437	191,600,760,317
124	TEBING TINGGI	11,858,700,691	3,323,873,693	15,182,574,384
127	TANGERANG	66,071,798,712	8,816,863,487	74,888,662,199
128	SUKABUMI	5,092,160,612	1,644,166,755	6,736,327,367
129	KUDUS	2,060,041,640	1,285,454,656	3,345,496,296
131	JEMBER	322,259,840,242	101,875,216,330	424,135,056,572
132	SINGARAJA	20,467,197,449	37,200,715,655	57,667,913,104
133	JAKARTA IV	1,288,340,542,834	374,544,319,524	1,662,884,862,358
134	SEMARANG II	820,962,499,582	284,176,077,707	1,105,138,577,289
135	SURABAYA II	470,039,792,404	64,647,573,030	534,687,365,434
136	MAKASSAR II	215,892,862,645	88,783,704,345	304,676,566,990
137	BATAM	927,243,325,682	519,982,774,039	1,447,226,099,721
139	JAKARTA V	16,748,700,068	10,024,494,608	26,773,194,676
141	TIMIKA	11,856,814,575	3,212,441,712	15,069,256,287
148	KLATEN	232,547,913,685	93,348,403,195	325,896,316,880
150	BLITAR	257,131,115,699	43,125,046,781	300,256,162,480
153	TANJUNG REDEP	4,257,106,972	5,516,232,030	9,773,339,002
163	PURWODADI	158,448,688,159	64,004,078,459	222,452,766,618
165	SIDOARJO	18,912,963,255	4,255,224,376	23,168,187,631
171	BEKASI	77,785,689,608	48,705,865,634	126,491,555,242
175	JAKARTA VI	1,558,592,659,203	130,574,740,984	1,689,167,400,187
178	MAMUJU	3,948,736,572	(117,386,159)	3,831,350,413
182	JAKARTA VII	2,129,051,801,387	439,181,422,990	2,568,233,224,377
Jumlah		**96,973,278,750,758**	**(16,845,403,638,741)**	**80,127,875,112,017**

RINCIAN KAS PADA BLU PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kode BA	Nama BA	31 Desember 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	68.933.652.959.427	(19.673.253.812.732)	49.260.399.146.695
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	6.273.531.460.080	1.634.766.892.485	7.908.298.352.565
139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	-	6.430.942.216.789	6.430.942.216.789
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	6.778.270.447.046	(2.888.001.108.464)	3.890.269.338.582
025	KEMENTERIAN AGAMA	2.442.365.670.635	288.638.640.913	2.731.004.311.548
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.524.461.209.969	361.175.441.585	1.885.636.651.554
149	KEMENTERIAN KOPERASI	-	1.508.515.034.723	1.508.515.034.723
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)	855.234.483.479	466.324.894.399	1.321.559.377.878
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	998.572.414.289	237.120.608.469	1.235.693.022.758
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.136.354.252.832	(50.974.148.044)	1.085.380.104.788
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	577.097.812.030	112.550.956.724	689.648.768.754
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	320.387.215.423	142.698.113.000	463.085.328.423
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	234.107.196.390	181.757.304.545	415.864.500.935
142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	-	361.572.928.108	361.572.928.108
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	191.453.281.515	86.113.116.079	277.566.397.594
138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	-	227.350.907.934	227.350.907.934
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	207.579.666.192	(29.918.734.647)	177.660.931.545
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	132.802.396.559	40.369.035.382	173.171.431.941
140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	-	33.415.426.231	33.415.426.231
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	13.186.465.952	11.898.590.357	25.085.056.309
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)	10.093.383.576	3.729.941.435	13.823.325.011
150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	-	10.298.721.210	10.298.721.210
147	KEMENTERIAN PARIWISATA	-	1.633.830.142	1.633.830.142
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	4.933.255.688.770	(4.933.255.688.770)	-
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.083.587.930	(2.083.587.930)	-
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.408.789.158.664	(1.408.789.158.664)	-
Jumlah		**96.973.278.750.758**	**(16.845.403.638.741)**	**80.127.875.112.017**

UANG MUKA REKENING KHUSUS

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
1	ADB	2,406,879,670	189,391,819	2,217,487,851
2	IFAD	1,727,967,062	1,338,906,116	389,060,946
3	JBIC/OECF	-	-	-
4	BANK DUNIA	74,760,147,336	46,045,990,247	28,714,157,089
5	IDB	1,401,625,443	44,160,000	1,357,465,443
6	AUSTRALIA	-	-	-
7	UNI EROPA	367,044,338	17,997,299	349,047,039
8	KFW	693,023,395	348,423,530	344,599,865
9	SBSN	-	-	-
JUMLAH		**81,356,687,244**	**47,984,869,011**	**33,371,818,233**

RINCIAN PIUTANG PNBP DIVIDEN DAN DENDA

PER 31 DESEMBER 2025

Total Piutang	Jumlah	Total Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Total *Net Realizable Value*
Piutang Jangka Pendek dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	42.435.993.522	42.435.993.522	-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	5.000.000.000	25.000.000	4.975.000.000
Piutang Jangka Panjang	47.225.637.648	236.128.188	46.989.509.460
Jumlah	**94.661.631.170**	**42.697.121.710**	**51.964.509.460**

Lancar

No	Nama BUMN	Tahun Buku	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (5%)	*Net Realizable Value*	Keterangan
1	Perum Perumnas	1991-1997	47.225.637.648	236.128.188	46.989.509.460	Penjadawalan pembayaran sesuai surat Menkeu nomor S-91/MK.02/2025 tanggal 24 Februari 2025
2	Perum Perumnas	1991-1997	5.000.000.000	25.000.000	4.975.000.000	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah			**52.225.637.648**	**261.128.188**	**51.964.509.460**	

Kurang Lancar

No	Nama BUMN	Tahun Buku	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (10%)	*Net Realizable Value*	Keterangan
1	Perum Perumnas	1991-1997	5.000.000.000	500.000.000	4.500.000.000	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
2						
Jumlah			**5.000.000.000**	**500.000.000**	**4.500.000.000**	

Diragukan

No	Nama BUMN	Tahun Buku	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (50%)	*Net Realizable Value*	Keterangan
					-	
Jumlah			**-**	**-**	**-**	

RINCIAN PIUTANG PNBP DIVIDEN DAN DENDA

PER 31 DESEMBER 2025

Macet

No	Nama BUMN	Tahun Buku	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (100%)	*Net Realizable Value*	Keterangan
1	PT Balai Pustaka	2004	196.749.799	196.749.799	-	
2	PT Istaka karya	2003	8.391.154.934	8.391.154.934	-	Telah diserahkan ke PUPNC
3	PT Industri Sandang Nusantara	1980-2001	33.132.436.990	33.132.436.990	-	Telah diserahkan ke PUPNC
4	PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715.651.799	715.651.799	-	Akan ditempuh proses PPNTO (Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal)
Jumlah			**42.435.993.522**	**42.435.993.522**	**-**	

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
1	Kab. Aceh Barat	19,670,616,000	-
2	Kab. Aceh Barat Daya	7,242,942,000	-
3	Kab. Aceh Besar	6,940,384,000	-
4	Kab. Aceh Jaya	8,939,655,000	-
5	Kab. Aceh Selatan	9,180,021,000	-
6	Kab. Aceh Singkil	13,594,836,000	-
7	Kab. Aceh Tamiang	29,511,036,000	-
8	Kab. Aceh Tengah	9,469,812,000	97,538,445
9	Kab. Aceh Tenggara	7,603,343,000	-
10	Kab. Aceh Timur	22,495,388,000	-
11	Kab. Aceh Utara	20,136,903,000	754,355,860
12	Kab. Agam	11,014,497,000	-
13	Kab. Alor	5,090,285,000	-
14	Kab. Asahan	26,812,597,000	-
15	Kab. Asmat	21,594,823,000	111,328,647
16	Kab. Badung	953,879,000	-
17	Kab. Balangan	50,631,919,000	45,282,433
18	Kab. Bandung	973,147,000	538,236,183
19	Kab. Bandung Barat	1,898,279,000	-
20	Kab. Banggai	6,930,668,000	-
21	Kab. Banggai Kepulauan	1,680,214,000	-
22	Kab. Banggai Laut	2,543,150,000	-
23	Kab. Bangka	179,398,556,000	-
24	Kab. Bangka Barat	49,827,926,000	101,399,427
25	Kab. Bangka Selatan	69,023,253,000	-
26	Kab. Bangka Tengah	121,752,197,000	-
27	Kab. Bangkalan	2,068,001,000	4,190,800
28	Kab. Bangli	1,386,697,000	-
29	Kab. Banjar	7,431,856,000	-
30	Kab. Banjarnegara	3,913,916,000	-
31	Kab. Bantaeng	1,200,222,000	-
32	Kab. Bantul	1,424,403,000	-
33	Kab. Banyuasin	12,554,419,000	-
34	Kab. Banyumas	8,285,480,000	-
35	Kab. Banyuwangi	98,686,045,000	394,631,800
36	Kab. Barito Kuala	4,194,389,000	-
37	Kab. Barito Selatan	29,402,576,000	294,535,200
38	Kab. Barito Timur	4,366,572,000	-
39	Kab. Barito Utara	4,884,503,000	183,094,160
40	Kab. Barru	2,261,269,000	-
41	Kab. Batang	12,317,992,000	-

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
42	Kab. Batanghari	11,762,149,000	-
43	Kab. Batu Bara	13,203,618,000	-
44	Kab. Bekasi	2,184,122,000	61,269,930
45	Kab. Belitung	98,595,562,000	-
46	Kab. Belitung Timur	119,098,400,000	-
47	Kab. Belu	3,602,863,000	146,765,329
48	Kab. Bener Meriah	6,730,475,000	-
49	Kab. Bengkalis	12,384,488,000	580,603,040
50	Kab. Bengkayang	34,803,658,000	-
51	Kab. Bengkulu Selatan	3,320,642,000	-
52	Kab. Bengkulu Tengah	55,439,471,000	-
53	Kab. Bengkulu Utara	29,524,260,000	-
54	Kab. Berau	10,240,020,000	-
55	Kab. Biak Numfor	25,149,172,000	-
56	Kab. Bima	7,110,178,000	-
57	Kab. Bintan	41,885,818,000	-
58	Kab. Bireuen	9,527,439,000	-
59	Kab. Blitar	3,153,126,000	-
60	Kab. Blora	48,355,349,000	-
61	Kab. Boalemo	6,628,486,000	-
62	Kab. Bogor	2,710,521,000	344,443
63	Kab. Bojonegoro	140,394,101,000	664,279,000
64	Kab. Bolaang Mongondow	18,193,768,000	-
65	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	32,832,791,000	-
66	Kab. Bolaang Mongondow Timur	16,343,746,000	-
67	Kab. Bolaang Mongondow Utara	11,217,601,000	-
68	Kab. Bombana	2,720,327,000	123,519,900
69	Kab. Bondowoso	3,288,846,000	646,550,733
70	Kab. Bone	4,281,627,000	409,169,600
71	Kab. Bone Bolango	3,374,395,000	-
72	Kab. Boven Digoel	31,143,669,000	-
73	Kab. Boyolali	4,866,514,000	-
74	Kab. Brebes	8,342,187,000	-
75	Kab. Buleleng	2,731,519,000	-
76	Kab. Bulukumba	6,444,577,000	-
77	Kab. Bulungan	9,096,010,000	3,436,642,705
78	Kab. Bungo	20,824,391,000	896,220
79	Kab. Buol	7,678,368,000	-
80	Kab. Buru	11,033,523,000	-
81	Kab. Buru Selatan	16,665,790,000	-
82	Kab. Buton	695,991,000	-

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
83	Kab. Buton Selatan	562,581,000	540,864,200
84	Kab. Buton Tengah	618,213,000	-
85	Kab. Buton Utara	602,973,000	-
86	Kab. Ciamis	1,083,804,000	-
87	Kab. Cianjur	2,061,973,000	-
88	Kab. Cilacap	18,641,289,000	428,069,000
89	Kab. Cirebon	5,381,971,000	-
90	Kab. Dairi	17,658,623,000	111,218,445
91	Kab. Deiyai	17,261,469,000	-
92	Kab. Deli Serdang	24,309,350,000	336,470,880
93	Kab. Demak	3,516,921,000	75,846,000
94	Kab. Dharmasraya	10,605,815,000	-
95	Kab. Dogiyai	18,660,421,000	-
96	Kab. Dompu	2,583,857,000	-
97	Kab. Donggala	8,969,204,000	-
98	Kab. Empat Lawang	4,464,035,000	-
99	Kab. Ende	5,522,966,000	1,374,286,176
100	Kab. Enrekang	4,681,056,000	-
101	Kab. Fak Fak	52,379,133,000	-
102	Kab. Flores Timur	4,327,839,000	-
103	Kab. Garut	2,306,446,000	902,631,872
104	Kab. Gayo Lues	7,024,154,000	-
105	Kab. Gianyar	883,247,000	-
106	Kab. Gorontalo	3,198,496,000	-
107	Kab. Gorontalo Utara	5,566,294,000	-
108	Kab. Gowa	2,223,224,000	-
109	Kab. Gresik	522,789,000	-
110	Kab. Grobogan	14,164,454,000	-
111	Kab. Gunung kidul	2,229,811,000	-
112	Kab. Gunung Mas	7,477,590,000	1,213,231,731
113	Kab. Halmahera Barat	527,613,000	-
114	Kab. Halmahera Selatan	8,641,973,000	1,710,059
115	Kab. Halmahera Tengah	2,145,697,000	-
116	Kab. Halmahera Timur	979,473,000	-
117	Kab. Halmahera Utara	50,632,858,000	-
118	Kab. Hulu Sungai Selatan	2,831,366,000	-
119	Kab. Hulu Sungai Tengah	1,805,684,000	-
120	Kab. Hulu Sungai Utara	2,735,463,000	103,013,889
121	Kab. Humbang Hasundutan	14,804,501,000	205,929,877
122	Kab. Indragiri Hilir	58,352,887,000	332,830,500
123	Kab. Indragiri Hulu	37,603,145,000	7,643,000

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
124	Kab. Indramayu	26,643,903,000	-
125	Kab. Intan Jaya	18,235,434,000	-
126	Kab. Jayapura	29,607,756,000	-
127	Kab. Jayawijaya	24,280,245,000	-
128	Kab. Jember	861,210,000	-
129	Kab. Jembrana	1,837,295,000	-
130	Kab. Jeneponto	2,955,524,000	1,108,320
131	Kab. Jepara	9,379,083,000	-
132	Kab. Jombang	14,159,302,000	-
133	Kab. Kaimana	62,789,333,000	369,839,300
134	Kab. Kampar	54,632,421,000	2,399,000
135	Kab. Kapuas	76,964,340,000	357,747,600
136	Kab. Kapuas Hulu	12,867,231,000	158,178,260
137	Kab. Karanganyar	4,046,679,000	-
138	Kab. Karangasem	2,513,757,000	-
139	Kab. Karawang	2,163,857,000	-
140	Kab. Karimun	42,634,759,000	418,218,723
141	Kab. Karo	15,586,967,000	-
142	Kab. Katingan	21,091,073,000	-
143	Kab. Kaur	4,298,851,000	-
144	Kab. Kayong Utara	26,003,475,000	-
145	Kab. Kebumen	6,200,092,000	-
146	Kab. Kediri	624,051,000	-
147	Kab. Keerom	34,160,984,000	-
148	Kab. Kendal	8,107,814,000	359,432,600
149	Kab. Kepahiang	8,585,735,000	403,519,435
150	Kab. Kepulauan Anambas	35,035,164,000	439,104,813
151	Kab. Kepulauan Aru	11,845,164,000	-
152	Kab. Kepulauan Mentawai	12,530,476,000	-
153	Kab. Kepulauan Meranti	1,056,556,000	-
154	Kab. Kepulauan Selayar	7,724,238,000	475,902,064
155	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	11,614,850,000	-
156	Kab. Kepulauan Sula	814,407,000	-
157	Kab. Kepulauan Talaud	12,470,267,000	315,364,673
158	Kab. Kepulauan Tanimbar	13,705,092,000	-
159	Kab. Kepulauan Yapen	22,475,617,000	-
160	Kab. Kerinci	3,464,209,000	1,219,690,325
161	Kab. Ketapang	142,728,786,000	-
162	Kab. Klaten	4,433,938,000	-
163	Kab. Klungkung	1,215,025,000	-
164	Kab. Kolaka	2,280,359,000	79,787,978

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
165	Kab. Kolaka Timur	1,879,091,000	-
166	Kab. Kolaka Utara	1,012,057,000	-
167	Kab. Konawe	2,309,127,000	-
168	Kab. Konawe Kepulauan	500,854,000	-
169	Kab. Konawe Selatan	9,985,544,000	735,024,400
170	Kab. Konawe Utara	3,357,049,000	-
171	Kab. Kotabaru	8,664,814,000	-
172	Kab. Kotawaringin Barat	31,920,148,000	9,785,800
173	Kab. Kotawaringin Timur	108,271,876,000	-
174	Kab. Kuantan Singingi	29,211,368,000	-
175	Kab. Kubu Raya	35,990,095,000	-
176	Kab. Kudus	24,827,950,000	-
177	Kab. Kulon Progo	1,294,500,000	-
178	Kab. Kuningan	599,562,000	-
179	Kab. Kupang	6,251,355,000	-
180	Kab. Kutai Barat	10,260,611,000	43,922,197
181	Kab. Kutai Kartanegara	644,648,974,000	-
182	Kab. Kutai Timur	31,256,558,000	1,029,017,461
183	Kab. Labuhanbatu	14,644,363,000	-
184	Kab. Labuhanbatu Selatan	21,497,858,000	-
185	Kab. Labuhanbatu Utara	25,184,968,000	-
186	Kab. Lahat	6,018,398,000	913,493,735
187	Kab. Lamandau	18,081,817,000	-
188	Kab. Lamongan	11,957,897,000	-
189	Kab. Lampung Barat	9,924,293,000	-
190	Kab. Lampung Selatan	10,522,671,000	-
191	Kab. Lampung Tengah	13,828,677,000	-
192	Kab. Lampung Timur	9,619,373,000	558,904,900
193	Kab. Lampung Utara	11,399,318,000	-
194	Kab. Landak	32,313,328,000	3,000
195	Kab. Langkat	63,982,971,000	-
196	Kab. Lanny Jaya	19,406,291,000	-
197	Kab. Lebak	5,356,716,000	-
198	Kab. Lebong	3,476,589,000	380,950,508
199	Kab. Lembata	4,089,215,000	119,621,000
200	Kab. Lima Puluh Kota	11,028,753,000	-
201	Kab. Lingga	35,526,766,000	-
202	Kab. Lombok Barat	1,117,727,000	-
203	Kab. Lombok Tengah	2,940,564,000	-
204	Kab. Lombok Timur	368,616,000	-
205	Kab. Lombok Utara	292,202,000	-

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
206	Kab. Lumajang	878,329,000	-
207	Kab. Luwu	5,584,527,000	-
208	Kab. Luwu Timur	8,834,394,000	-
209	Kab. Luwu Utara	12,220,456,000	-
210	Kab. Madiun	12,417,269,000	-
211	Kab. Magelang	4,423,406,000	792,450,114
212	Kab. Magetan	698,947,000	-
213	Kab. Mahakam Ulu	6,514,962,000	9,381,926,151
214	Kab. Majalengka	3,082,524,000	-
215	Kab. Majene	4,321,235,000	-
216	Kab. Malaka	2,657,674,000	-
217	Kab. Malang	3,082,939,000	-
218	Kab. Malinau	14,988,918,000	-
219	Kab. Maluku Barat Daya	14,919,928,000	642,713,130
220	Kab. Maluku Tengah	29,226,488,000	52,898,968
221	Kab. Maluku Tenggara	7,554,923,000	-
222	Kab. Mamasa	5,029,857,000	-
223	Kab. Mamberamo Raya	52,596,700,000	-
224	Kab. Mamberamo Tengah	20,931,929,000	-
225	Kab. Mamuju	8,985,053,000	-
226	Kab. Mamuju Tengah	12,903,353,000	-
227	Kab. Mandailing Natal	33,658,810,000	909,616,600
228	Kab. Manggarai	2,829,149,000	-
229	Kab. Manggarai Barat	3,898,054,000	-
230	Kab. Manggarai Timur	2,783,887,000	-
231	Kab. Manokwari	30,711,535,000	-
232	Kab. Manokwari Selatan	49,389,668,000	-
233	Kab. Mappi	25,494,319,000	-
234	Kab. Maros	8,666,256,000	-
235	Kab. Maybrat	41,931,693,000	67,121,200
236	Kab. Melawi	15,420,558,000	-
237	Kab. Mempawah	17,954,598,000	-
238	Kab. Merangin	6,212,358,000	30,001,450
239	Kab. Merauke	39,184,872,000	1,259,655,537
240	Kab. Mesuji	14,489,941,000	-
241	Kab. Mimika	784,394,016,000	-
242	Kab. Minahasa	12,044,782,000	-
243	Kab. Minahasa Selatan	10,613,971,000	16,565,459
244	Kab. Minahasa Tenggara	8,986,155,000	-
245	Kab. Minahasa Utara	62,787,374,000	850,957,210
246	Kab. Mojokerto	1,347,021,000	-

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
247	Kab. Morowali	11,538,219,000	-
248	Kab. Morowali Utara	4,260,461,000	-
249	Kab. Muara Enim	14,713,007,000	-
250	Kab. Muaro Jambi	12,791,695,000	11,713,800
251	Kab. Mukomuko	18,917,935,000	199,000,000
252	Kab. Muna	2,601,992,000	-
253	Kab. Muna Barat	1,973,448,000	-
254	Kab. Murung Raya	3,590,940,000	1,346,250
255	Kab. Musi Banyuasin	12,266,674,000	-
256	Kab. Musi Rawas	7,021,301,000	-
257	Kab. Musi Rawas Utara	7,429,268,000	-
258	Kab. Nabire	36,850,116,000	-
259	Kab. Nagan Raya	9,988,061,000	-
260	Kab. Nagekeo	2,748,999,000	-
261	Kab. Natuna	31,897,217,000	-
262	Kab. Nduga	14,640,460,000	-
263	Kab. Ngada	2,628,276,000	-
264	Kab. Nganjuk	16,557,865,000	-
265	Kab. Ngawi	18,370,808,000	-
266	Kab. Nias	9,096,087,000	-
267	Kab. Nias Barat	9,208,762,000	1,812,504,792
268	Kab. Nias Selatan	23,812,341,000	316,844,823
269	Kab. Nias Utara	16,563,152,000	281,718,880
270	Kab. Nunukan	74,432,268,000	-
271	Kab. Ogan Ilir	21,722,833,000	156,302,500
272	Kab. Ogan Komering Ilir	20,611,362,000	301,794,600
273	Kab. Ogan Komering Ulu	14,095,160,000	-
274	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	7,714,466,000	116,950,000
275	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	13,146,980,000	-
276	Kab. Pacitan	3,390,722,000	-
277	Kab. Padang Lawas	18,968,206,000	-
278	Kab. Padang Lawas Utara	15,872,288,000	259,052,770
279	Kab. Padang Pariaman	7,982,355,000	-
280	Kab. Pakpak Bharat	10,588,593,000	135,119,940
281	Kab. Pamekasan	2,831,564,000	-
282	Kab. Pandeglang	20,286,126,000	-
283	Kab. Pangandaran	2,151,762,000	-
284	Kab. Pangkajene Kepulauan	15,251,743,000	-
285	Kab. Paniai	25,907,798,000	-
286	Kab. Parigi Moutong	6,122,982,000	250,460,239
287	Kab. Pasaman	8,734,722,000	-

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
288	Kab. Pasaman Barat	21,860,325,000	-
289	Kab. Pasangkayu	15,700,762,000	-
290	Kab. Paser	10,288,201,000	501
291	Kab. Pasuruan	722,970,000	-
292	Kab. Pati	7,768,809,000	-
293	Kab. Pegunungan Arfak	43,451,862,000	-
294	Kab. Pegunungan Bintang	32,791,384,000	-
295	Kab. Pekalongan	5,905,637,000	-
296	Kab. Pelalawan	20,073,526,000	-
297	Kab. Pemalang	7,097,891,000	-
298	Kab. Penajam Paser Utara	51,822,270,000	-
299	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5,072,823,000	-
300	Kab. Pesawaran	10,400,700,000	109,878,000
301	Kab. Pesisir Barat	11,571,507,000	-
302	Kab. Pesisir Selatan	15,396,828,000	-
303	Kab. Pidie	7,829,939,000	-
304	Kab. Pidie Jaya	6,786,328,000	-
305	Kab. Pinrang	5,017,926,000	-
306	Kab. Pohuwato	7,155,181,000	-
307	Kab. Polewali Mandar	7,720,350,000	-
308	Kab. Ponorogo	3,421,967,000	-
309	Kab. Poso	6,091,202,000	-
310	Kab. Pringsewu	9,500,313,000	-
311	Kab. Probolinggo	3,713,914,000	-
312	Kab. Pulang Pisau	15,238,157,000	-
313	Kab. Pulau Morotai	696,542,000	-
314	Kab. Pulau Taliabu	986,781,000	14,873,200
315	Kab. Puncak	15,976,238,000	-
316	Kab. Puncak Jaya	28,495,329,000	-
317	Kab. Purbalingga	3,001,526,000	-
318	Kab. Purwakarta	935,959,000	-
319	Kab. Purworejo	3,774,717,000	200
320	Kab. Raja Ampat	21,564,927,000	-
321	Kab. Rejang Lebong	7,971,432,000	323,204,000
322	Kab. Rembang	10,820,628,000	-
323	Kab. Rokan Hilir	18,583,622,000	68,854,100
324	Kab. Rokan Hulu	36,654,654,000	-
325	Kab. Rote Ndao	3,767,839,000	-
326	Kab. Sabu Raijua	2,884,518,000	-
327	Kab. Sambas	22,999,407,000	214,715,944
328	Kab. Samosir	7,368,334,000	47,683,458

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
329	Kab. Sampang	2,034,699,000	-
330	Kab. Sanggau	145,234,839,000	1,014,858,600
331	Kab. Sangihe	15,380,824,000	-
332	Kab. Sarmi	37,781,831,000	-
333	Kab. Sarolangun	10,661,492,000	-
334	Kab. Sekadau	36,747,318,000	-
335	Kab. Seluma	5,013,306,000	-
336	Kab. Semarang	6,835,983,000	386,334,650
337	Kab. Seram Bagian Barat	13,062,301,000	-
338	Kab. Seram Bagian Timur	48,894,206,000	150,000,000
339	Kab. Serang	1,842,357,000	-
340	Kab. Serdang Bedagai	14,265,939,000	14,479
341	Kab. Seruyan	20,285,318,000	-
342	Kab. Siak	21,636,754,000	-
343	Kab. Sidenreng Rappang	4,378,240,000	-
344	Kab. Sidoarjo	19,476,973,000	-
345	Kab. Sigi	3,578,205,000	-
346	Kab. Sijunjung	12,577,139,000	139,889,200
347	Kab. Sikka	3,907,629,000	690,000,000
348	Kab. Simalungun	20,577,750,000	-
349	Kab. Simeulue	8,157,750,000	-
350	Kab. Sinjai	1,963,716,000	-
351	Kab. Sintang	24,111,679,000	2,513,297,675
352	Kab. Situbondo	1,199,316,000	802,300
353	Kab. Sleman	3,752,365,000	-
354	Kab. Solok	10,235,196,000	-
355	Kab. Solok Selatan	14,840,958,000	-
356	Kab. Soppeng	4,935,477,000	-
357	Kab. Sorong	46,573,754,000	15,000,000
358	Kab. Sorong Selatan	49,304,246,000	-
359	Kab. Sragen	4,805,960,000	-
360	Kab. Subang	14,379,339,000	286,984,000
361	Kab. Sukabumi	2,782,140,000	-
362	Kab. Sukamara	9,256,245,000	-
363	Kab. Sukoharjo	2,071,786,000	-
364	Kab. Sumba Barat	2,528,175,000	-
365	Kab. Sumba Barat Daya	3,370,340,000	-
366	Kab. Sumba Tengah	2,895,989,000	114,623,500
367	Kab. Sumba Timur	5,423,907,000	14,400,000
368	Kab. Sumbawa	4,754,977,000	-
369	Kab. Sumbawa Barat	357,557,000	-

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
370	Kab. Sumedang	913,588,000	-
371	Kab. Sumenep	9,518,659,000	-
372	Kab. Supiori	21,850,745,000	-
373	Kab. Tabalong	14,371,851,000	-
374	Kab. Tabanan	1,368,015,000	-
375	Kab. Takalar	2,718,793,000	-
376	Kab. Tambrauw	42,525,975,000	-
377	Kab. Tana Tidung	170,235,351,000	-
378	Kab. Tana Toraja	2,171,647,000	127,962,452
379	Kab. Tanah Bumbu	7,149,620,000	-
380	Kab. Tanah Datar	8,185,096,000	-
381	Kab. Tanah Laut	113,836,873,000	85,453,295
382	Kab. Tangerang	191,838,000	-
383	Kab. Tanggamus	38,291,252,000	641,595,346
384	Kab. Tanjung Jabung Barat	9,889,699,000	-
385	Kab. Tanjung Jabung Timur	10,509,597,000	-
386	Kab. Tapanuli Selatan	167,185,455,000	-
387	Kab. Tapanuli Tengah	16,167,046,000	-
388	Kab. Tapanuli Utara	12,550,198,000	10,550,887
389	Kab. Tapin	4,219,998,000	95,013,292
390	Kab. Tasikmalaya	2,319,607,000	566,005,000
391	Kab. Tebo	11,165,088,000	-
392	Kab. Tegal	4,657,341,000	-
393	Kab. Teluk Bintuni	444,142,045,000	-
394	Kab. Teluk Wondama	44,446,490,000	-
395	Kab. Temanggung	3,945,862,000	-
396	Kab. Timor Tengah Selatan	5,745,189,000	182,068,120
397	Kab. Timor Tengah Utara	4,567,608,000	-
398	Kab. Toba Samosir	12,794,301,000	-
399	Kab. Tojo Una Una	2,499,332,000	-
400	Kab. Tolikara	20,087,646,000	-
401	Kab. ToliToli	7,627,823,000	-
402	Kab. Toraja Utara	3,220,386,000	-
403	Kab. Trenggalek	5,222,977,000	-
404	Kab. Tuban	56,172,757,000	-
405	Kab. Tulang Bawang	10,826,419,000	-
406	Kab. Tulang Bawang Barat	9,041,621,000	-
407	Kab. Tulungagung	4,152,493,000	-
408	Kab. Wajo	27,590,003,000	-
409	Kab. Wakatobi	854,219,000	-
410	Kab. Waropen	27,662,363,000	-

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
411	Kab. Way Kanan	12,289,802,000	-
412	Kab. Wonogiri	5,209,320,000	-
413	Kab. Wonosobo	4,649,741,000	-
414	Kab. Yahukimo	29,093,535,000	-
415	Kab. Yalimo	18,942,974,000	-
416	Kota Ambon	5,718,685,000	-
417	Kota Balikpapan	53,269,948,000	-
418	Kota Banda Aceh	2,427,204,000	-
419	Kota Bandar Lampung	7,873,259,000	-
420	Kota Bandung	13,589,503,000	-
421	Kota Banjar	790,274,000	-
422	Kota Banjarbaru	2,431,647,000	-
423	Kota Banjarmasin	3,333,702,000	-
424	Kota Batam	26,436,333,000	-
425	Kota Batu	666,181,000	-
426	Kota Bau-Bau	234,890,000	-
427	Kota Bekasi	782,657,000	-
428	Kota Bengkulu	6,588,116,000	-
429	Kota Bima	610,314,000	-
430	Kota Binjai	13,941,537,000	-
431	Kota Bitung	165,864,626,000	-
432	Kota Blitar	646,844,000	-
433	Kota Bogor	478,942,000	-
434	Kota Bontang	25,415,351,000	-
435	Kota Bukit Tinggi	2,960,121,000	-
436	Kota Cilegon	200,221,000	-
437	Kota Cimahi	549,502,000	-
438	Kota Cirebon	471,065,000	-
439	Kota Denpasar	212,752,000	-
440	Kota Depok	496,871,000	-
441	Kota Dumai	8,330,737,000	-
442	Kota Gorontalo	2,217,865,000	-
443	Kota Gunungsitoli	7,684,294,000	-
444	Kota Jambi	2,486,232,000	-
445	Kota Jayapura	34,808,484,000	-
446	Kota Kediri	24,217,953,000	-
447	Kota Kendari	3,484,424,000	-
448	Kota Kotamobagu	10,569,360,000	-
449	Kota Kupang	1,524,830,000	-
450	Kota Langsa	8,366,807,000	63,043,000
451	Kota Lhokseumawe	20,794,064,000	-

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
452	Kota Lubuk Linggau	8,011,888,000	-
453	Kota Madiun	638,620,000	-
454	Kota Magelang	977,724,000	-
455	Kota Makassar	2,415,034,000	-
456	Kota Malang	640,468,000	-
457	Kota Manado	13,581,192,000	-
458	Kota Mataram	2,451,642,000	-
459	Kota Medan	2,340,851,000	-
460	Kota Metro	4,355,261,000	-
461	Kota Mojokerto	658,702,000	-
462	Kota Padang	11,755,744,000	-
463	Kota Padang Panjang	2,500,330,000	-
464	Kota Padang sidempuan	14,618,981,000	-
465	Kota Pagar Alam	2,493,367,000	-
466	Kota Palangkaraya	8,780,204,000	-
467	Kota Palembang	3,343,291,000	-
468	Kota Palopo	3,657,847,000	-
469	Kota Palu	980,675,000	-
470	Kota Pangkal Pinang	57,476,552,000	-
471	Kota ParePare	1,473,810,000	-
472	Kota Pariaman	8,238,834,000	-
473	Kota Pasuruan	653,993,000	-
474	Kota Payakumbuh	2,942,903,000	-
475	Kota Pekalongan	2,304,258,000	-
476	Kota Pekanbaru	6,720,144,000	-
477	Kota Pematang Siantar	9,714,989,000	-
478	Kota Pontianak	18,496,917,000	-
479	Kota Prabumulih	20,749,274,000	-
480	Kota Probolinggo	659,649,000	-
481	Kota Sabang	2,918,092,000	-
482	Kota Salatiga	1,247,097,000	-
483	Kota Samarinda	47,159,134,000	-
484	Kota Sawahlunto	11,693,317,000	-
485	Kota Semarang	389,045,000	-
486	Kota Serang	164,728,000	-
487	Kota Sibolga	6,873,167,000	-
488	Kota Singkawang	14,888,854,000	-
489	Kota Solok	8,673,598,000	-
490	Kota Sorong	22,206,929,000	-
491	Kota Subulussalam	7,664,101,000	-
492	Kota Sukabumi	449,082,000	-

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
493	Kota Sungai Penuh	1,939,584,000	-
494	Kota Surabaya	643,258,000	-
495	Kota Surakarta	5,926,310,000	-
496	Kota Tangerang	159,203,000	-
497	Kota Tangerang Selatan	164,607,000	-
498	Kota Tanjung Balai	10,190,585,000	-
499	Kota Tanjung Pinang	34,543,953,000	-
500	Kota Tarakan	20,102,974,000	-
501	Kota Tasikmalaya	495,890,000	-
502	Kota Tebing Tinggi	6,723,867,000	-
503	Kota Tegal	1,585,246,000	-
504	Kota Ternate	1,866,045,000	-
505	Kota Tidore Kepulauan	538,604,000	150,526,025
506	Kota Tomohon	7,080,367,000	-
507	Kota Tual	6,345,979,000	-
508	Kota Yogyakarta	3,424,626,000	-
509	Provinsi Aceh	221,021,961,000	-
510	Provinsi Bali	-	-
511	Provinsi Bangka Belitung	257,453,139,000	-
512	Provinsi Banten	867,832,000	-
513	Provinsi Bengkulu	36,391,290,000	-
514	Provinsi DI Yogyakarta	1,322,360,000	-
515	Provinsi DKI Jakarta	842,892,000	-
516	Provinsi Gorontalo	3,756,492,000	-
517	Provinsi Jambi	21,615,291,000	-
518	Provinsi Jawa Barat	9,134,405,000	-
519	Provinsi Jawa Tengah	15,952,798,000	-
520	Provinsi Jawa Timur	47,058,910,000	-
521	Provinsi Kalimantan Barat	173,300,552,000	-
522	Provinsi Kalimantan Selatan	12,984,799,000	-
523	Provinsi Kalimantan Tengah	26,883,146,000	-
524	Provinsi Kalimantan Timur	85,178,909,000	-
525	Provinsi Kalimantan Utara	47,990,002,000	-
526	Provinsi Kepulauan Riau	119,596,532,000	-
527	Provinsi Lampung	46,019,769,000	-
528	Provinsi Maluku	69,756,601,000	-
529	Provinsi Maluku Utara	2,356,998,000	-
530	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2,169,210,000	-
531	Provinsi Nusa Tenggara Timur	8,092,124,000	-
532	Provinsi Papua	334,426,194,000	-
533	Provinsi Papua Barat	988,661,014,000	-

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Dana Transfer Khusus	DDIOK
		Dana Bagi Hasil	Dana Desa
534	Provinsi Papua Barat Daya	582,305,513,000	-
535	Provinsi Papua Pegunungan	2,959,273,000	-
536	Provinsi Papua Selatan	6,865,927,000	-
537	Provinsi Papua Tengah	30,725,202,000	-
538	Provinsi Riau	55,025,122,000	-
539	Provinsi Sulawesi Barat	10,140,594,000	-
540	Provinsi Sulawesi Selatan	15,715,446,000	-
541	Provinsi Sulawesi Tengah	7,091,578,000	-
542	Provinsi Sulawesi Tenggara	4,742,198,000	-
543	Provinsi Sulawesi Utara	83,634,095,000	-
544	Provinsi Sumatera Barat	41,420,599,000	-
545	Provinsi Sumatera Selatan	24,712,508,000	-
546	Provinsi Sumatera Utara	125,285,910,000	-
Total		**13,327,956,551,000***	**48,493,741,213**

*) Selisih Rp1 karena pembulatan

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
1	Provinsi Aceh	6,982,382,998
2	Kab. Aceh Barat	10,291,801,090
3	Kab. Aceh Besar	9,265,542,813
4	Kab. Aceh Selatan	10,155,503,458
5	Kab. Aceh Singkil	4,788,266,346
6	Kab. Aceh Tengah	5,662,296,267
7	Kab. Aceh Tenggara	2,980,092,613
8	Kab. Aceh Timur	7,712,661,602
9	Kab. Aceh Utara	10,827,917,236
10	Kab. Bireuen	10,872,496,965
11	Kab. Pidie	9,727,759,726
12	Kab. Simeulue	3,870,261,346
13	Kota Banda Aceh	6,246,361,308
14	Kota Sabang	2,266,261,288
15	Kota Langsa	1,113,048,141
16	Kota Lhokseumawe	2,990,536,921
17	Kab. Gayo Lues	1,630,274,770
18	Kab. Aceh Barat Daya	2,912,083,273
19	Kab. Aceh Jaya	3,609,534,911
20	Kab. Nagan Raya	6,488,872,897
21	Kab. Aceh Tamiang	6,819,791,193
22	Kab. Bener Meriah	4,379,199,644
23	Kab. Pidie Jaya	4,442,179,156
24	Kota Subulussalam	5,530,505,904
25	Provinsi Sumatera Utara	6,569,858,958
26	Kab. Asahan	5,349,824,158
27	Kab. Dairi	4,901,764,798
28	Kab. Deli Serdang	16,152,820,998

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
29	Kab. Karo	8,004,863,557
30	Kab. Labuhanbatu	4,655,299,057
31	Kab. Langkat	11,724,666,204
32	Kab. Mandailing Natal	8,539,905,393
33	Kab. Nias	6,860,231,608
34	Kab. Simalungun	19,762,430,319
35	Kab. Tapanuli Selatan	7,957,251,097
36	Kab. Tapanuli Tengah	8,989,370,904
37	Kab. Tapanuli Utara	24,186,723,421
38	Kab. Toba Samosir	3,915,100,503
39	Kota Binjai	3,430,880,376
40	Kota Medan	24,285,851,791
41	Kota Pematang Siantar	4,488,433,938
42	Kota Sibolga	2,835,681,032
43	Kota Tanjung Balai	1,500,491,369
44	Kota Tebing Tinggi	4,375,561,112
45	Kota Padang Sidempuan	15,486,775,309
46	Kab. Pakpak Bharat	3,568,596,618
47	Kab. Nias Selatan	18,443,632,697
48	Kab. Humbang Hasundutan	4,507,198,685
49	Kab. Serdang Bedagai	22,649,766,403
50	Kab. Samosir	2,465,769,173
51	Kab. Batu Bara	6,486,346,979
52	Kab. Padang Lawas	3,989,581,363
53	Kab. Padang Lawas Utara	3,141,855,758
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	3,083,832,054
55	Kab. Labuhanbatu Utara	5,068,826,428
56	Kab. Nias Utara	6,914,493,256

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
57	Kab. Nias Barat	3,678,393,297
58	Kota Gunungsitoli	2,496,388,589
59	Provinsi Sumatera Barat	12,717,784,374
60	Kab. Lima Puluh Kota	6,511,810,427
61	Kab. Agam	8,603,726,260
62	Kab. Kepulauan Mentawai	6,752,649,933
63	Kab. Padang Pariaman	10,669,355,162
64	Kab. Pasaman	5,202,561,445
65	Kab. Pesisir Selatan	8,981,546,305
66	Kab. Sijunjung	4,247,268,970
67	Kab. Solok	10,928,558,194
68	Kab. Tanah Datar	8,259,630,726
69	Kota Bukit Tinggi	1,841,417,517
70	Kota Padang Panjang	1,537,232,791
71	Kota Padang	8,349,194,523
72	Kota Payakumbuh	3,230,165,755
73	Kota Sawahlunto	3,050,950,247
74	Kota Solok	1,845,081,163
75	Kota Pariaman	1,475,706,397
76	Kab. Pasaman Barat	9,050,368,550
77	Kab. Dharmasraya	3,773,102,459
78	Kab. Solok Selatan	2,586,016,439
79	Provinsi Riau	5,841,709,995
80	Kab. Bengkalis	6,253,987,048
81	Kab. Indragiri Hilir	7,507,216,963
82	Kab. Indragiri Hulu	12,759,319,611
83	Kab. Kampar	10,335,437,483
84	Kab. Kuantan Singingi	13,282,410,192

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
85	Kab. Pelalawan	6,430,056,194
86	Kab. Rokan Hilir	3,685,139,187
87	Kab. Rokan Hulu	5,991,608,775
88	Kab. Siak	17,522,214,286
89	Kota Dumai	917,136,399
90	Kota Pekanbaru	6,195,923,585
91	Kab. Kepulauan Meranti	4,527,248,450
92	Provinsi Jambi	3,569,529,202
93	Kab. Batanghari	6,275,395,669
94	Kab. Bungo	6,477,958,779
95	Kab. Kerinci	7,561,723,920
96	Kab. Merangin	15,305,275,779
97	Kab. Muaro Jambi	7,716,816,774
98	Kab. Sarolangun	7,378,273,814
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	6,631,489,582
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	5,379,283,578
101	Kab. Tebo	7,383,831,006
102	Kota Jambi	9,909,300,115
103	Kota Sungai Penuh	4,261,292,859
104	Provinsi Sumatera Selatan	4,662,927,272
105	Kab. Lahat	12,235,980,869
106	Kab. Musi Banyuasin	11,306,631,233
107	Kab. Musi Rawas	3,166,913,873
108	Kab. Muara Enim	10,405,363,450
109	Kab. Ogan Komering Ilir	12,352,229,655
110	Kab. Ogan Komering Ulu	20,247,065,977
111	Kota Palembang	10,875,129,450
112	Kota Prabumulih	4,821,314,576

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
113	Kota Pagar Alam	1,480,030,266
114	Kota Lubuk Linggau	2,701,580,696
115	Kab. Banyuasin	7,029,934,072
116	Kab. Ogan Ilir	5,407,126,012
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	10,234,458,984
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	7,720,446,547
119	Kab. Empat Lawang	4,988,132,200
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5,235,502,507
121	Kab. Musi Rawas Utara	1,648,367,477
122	Provinsi Bengkulu	1,901,925,998
123	Kab. Bengkulu Selatan	6,160,064,344
124	Kab. Bengkulu Utara	12,674,270,485
125	Kab. Rejang Lebong	8,470,267,525
126	Kota Bengkulu	10,619,848,984
127	Kab. Kaur	4,519,199,393
128	Kab. Seluma	2,843,653,716
129	Kab. Mukomuko	5,778,792,907
130	Kab. Lebong	3,627,478,042
131	Kab. Kepahiang	2,310,560,356
132	Kab. Bengkulu Tengah	6,487,575,788
133	Provinsi Lampung	1,880,066,105
134	Kab. Lampung Barat	3,563,842,015
135	Kab. Lampung Selatan	4,849,861,568
136	Kab. Lampung Tengah	17,137,622,109
137	Kab. Lampung Utara	15,824,120,278
138	Kab. Lampung Timur	11,702,168,904
139	Kab. Tanggamus	6,401,104,577
140	Kab. Tulang Bawang	5,979,253,589

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
141	Kab. Way Kanan	5,433,855,468
142	Kota Bandar Lampung	35,350,535,460
143	Kota Metro	2,664,542,318
144	Kab. Pesawaran	5,663,701,932
145	Kab. Pringsewu	4,467,529,358
146	Kab. Mesuji	3,173,918,728
147	Kab. Tulang Bawang Barat	4,726,915,254
148	Kab. Pesisir Barat	2,765,611,710
149	Provinsi DKI Jakarta	30,929,277,241
150	Provinsi Jawa Barat	28,034,288,395
151	Kab. Bandung	20,078,815,632
152	Kab. Bekasi	16,556,287,578
153	Kab. Bogor	19,612,198,500
154	Kab. Ciamis	54,311,910,035
155	Kab. Cianjur	8,452,546,672
156	Kab. Cirebon	12,439,288,976
157	Kab. Garut	9,310,634,254
158	Kab. Indramayu	9,333,550,842
159	Kab. Karawang	12,312,489,277
160	Kab. Kuningan	51,582,685,197
161	Kab. Majalengka	6,594,956,932
162	Kab. Purwakarta	5,296,987,595
163	Kab. Subang	14,558,209,417
164	Kab. Sukabumi	13,355,840,017
165	Kab. Sumedang	8,860,968,564
166	Kab. Tasikmalaya	11,270,636,139
167	Kota Bandung	14,611,379,537
168	Kota Bekasi	19,464,227,038

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
169	Kota Bogor	1,893,781,714
170	Kota Cirebon	1,616,030,814
171	Kota Depok	5,488,276,092
172	Kota Sukabumi	1,816,071,732
173	Kota Tasikmalaya	5,858,041,802
174	Kota Cimahi	2,115,824,577
175	Kota Banjar	588,357,971
176	Kab. Bandung Barat	11,846,839,036
177	Kab. Pangandaran	19,986,893,232
178	Provinsi Jawa Tengah	12,247,593,088
179	Kab. Banjarnegara	6,572,658,440
180	Kab. Banyumas	9,228,938,451
181	Kab. Batang	5,958,947,662
182	Kab. Blora	1,953,511,033
183	Kab. Boyolali	7,711,221,094
184	Kab. Brebes	15,125,657,583
185	Kab. Cilacap	8,257,638,366
186	Kab. Demak	10,618,223,941
187	Kab. Grobogan	6,643,989,738
188	Kab. Jepara	6,106,216,480
189	Kab. Karanganyar	5,082,232,784
190	Kab. Kebumen	6,634,308,017
191	Kab. Kendal	11,593,536,314
192	Kab. Klaten	15,726,535,190
193	Kab. Kudus	6,374,040,172
194	Kab. Magelang	9,569,338,110
195	Kab. Pati	7,842,143,900
196	Kab. Pekalongan	4,771,693,134

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
197	Kab. Pemalang	4,393,380,140
198	Kab. Purbalingga	5,331,675,044
199	Kab. Purworejo	9,705,067,374
200	Kab. Rembang	6,338,089,074
201	Kab. Semarang	23,242,735,845
202	Kab. Sragen	9,061,425,978
203	Kab. Sukoharjo	3,675,608,671
204	Kab. Tegal	5,820,087,609
205	Kab. Temanggung	6,815,006,654
206	Kab. Wonogiri	5,424,693,557
207	Kab. Wonosobo	5,649,626,745
208	Kota Magelang	1,414,047,437
209	Kota Pekalongan	1,803,616,281
210	Kota Salatiga	4,098,534,715
211	Kota Semarang	5,829,588,342
212	Kota Surakarta	5,347,863,831
213	Kota Tegal	917,654,080
214	Provinsi DI Yogyakarta	2,052,522,276
215	Kab. Bantul	3,081,848,553
216	Kab. Gunung Kidul	6,568,061,951
217	Kab. Kulon Progo	4,375,979,719
218	Kab. Sleman	4,466,300,892
219	Kota Yogyakarta	3,380,907,025
220	Provinsi Jawa Timur	55,470,961,281
221	Kab. Bangkalan	10,212,540,502
222	Kab. Banyuwangi	18,294,625,780
223	Kab. Blitar	11,572,301,516
224	Kab. Bojonegoro	7,663,346,416

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
225	Kab. Bondowoso	11,926,376,776
226	Kab. Gresik	21,179,705,752
227	Kab. Jember	36,703,752,982
228	Kab. Jombang	6,471,054,608
229	Kab. Kediri	10,327,329,502
230	Kab. Lamongan	7,371,825,822
231	Kab. Lumajang	8,048,201,334
232	Kab. Madiun	4,459,834,585
233	Kab. Magetan	2,779,693,552
234	Kab. Malang	4,159,808,922
235	Kab. Mojokerto	5,465,206,424
236	Kab. Nganjuk	12,991,080,916
237	Kab. Ngawi	6,159,505,211
238	Kab. Pacitan	13,833,963,483
239	Kab. Pamekasan	7,996,402,455
240	Kab. Pasuruan	13,521,482,460
241	Kab. Ponorogo	4,219,359,735
242	Kab. Probolinggo	6,986,356,505
243	Kab. Sampang	6,847,660,329
244	Kab. Sidoarjo	28,900,065,952
245	Kab. Situbondo	5,617,401,749
246	Kab. Sumenep	5,580,780,965
247	Kab. Trenggalek	6,316,484,267
248	Kab. Tuban	4,691,552,905
249	Kab. Tulungagung	10,252,440,051
250	Kota Blitar	1,015,061,334
251	Kota Kediri	2,073,597,206
252	Kota Madiun	2,212,835,432

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
253	Kota Malang	29,717,012,725
254	Kota Mojokerto	1,205,400,871
255	Kota Pasuruan	1,880,207,601
256	Kota Probolinggo	1,856,183,037
257	Kota Surabaya	2,845,894,758
258	Kota Batu	1,111,957,113
259	Provinsi Kalimantan Barat	1,349,962,089
260	Kab. Bengkayang	9,358,233,943
261	Kab. Landak	3,136,825,681
262	Kab. Kapuas Hulu	10,249,897,037
263	Kab. Ketapang	9,515,577,625
264	Kab. Mempawah	4,953,890,648
265	Kab. Sambas	6,977,017,103
266	Kab. Sanggau	15,649,186,370
267	Kab. Sintang	10,864,825,561
268	Kota Pontianak	4,650,607,685
269	Kota Singkawang	4,393,866,008
270	Kab. Sekadau	5,671,747,312
271	Kab. Melawi	3,881,490,149
272	Kab. Kayong Utara	2,068,230,873
273	Kab. Kubu Raya	5,509,098,113
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1,870,486,675
275	Kab. Barito Selatan	4,509,860,612
276	Kab. Barito Utara	7,067,503,758
277	Kab. Kapuas	12,731,905,005
278	Kab. Kotawaringin Barat	3,769,657,630
279	Kab. Kotawaringin Timur	13,899,484,512
280	Kota Palangkaraya	2,938,607,709

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
281	Kab. Katingan	2,959,580,219
282	Kab. Seruyan	4,274,233,500
283	Kab. Sukamara	1,934,458,463
284	Kab. Lamandau	4,093,416,960
285	Kab. Gunung Mas	3,390,855,242
286	Kab. Pulang Pisau	12,990,365,784
287	Kab. Murung Raya	2,925,859,786
288	Kab. Barito Timur	3,247,555,634
289	Provinsi Kalimantan Selatan	4,544,888,982
290	Kab. Banjar	12,940,246,984
291	Kab. Barito Kuala	4,559,281,406
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	5,257,620,406
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	10,115,020,894
294	Kab. Hulu Sungai Utara	5,954,954,982
295	Kab. Kotabaru	4,249,133,866
296	Kab. Tabalong	5,025,568,619
297	Kab. Tanah Laut	9,080,779,596
298	Kab. Tapin	2,646,248,043
299	Kota Banjarbaru	1,665,354,866
300	Kota Banjarmasin	3,129,388,501
301	Kab. Balangan	3,339,771,339
302	Kab. Tanah Bumbu	8,770,986,452
303	Provinsi Kalimantan Timur	11,287,451,263
304	Kab. Berau	7,207,544,098
305	Kab. Kutai Kartanegara	14,369,371,799
306	Kab. Kutai Barat	6,536,984,931
307	Kab. Kutai Timur	2,897,422,706
308	Kab. Paser	4,631,098,188

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
309	Kota Balikpapan	5,774,828,599
310	Kota Bontang	1,814,733,538
311	Kota Samarinda	7,416,875,528
312	Kab. Penajam Paser Utara	2,374,047,081
313	Kab. Mahakam Ulu	2,070,735,618
314	Provinsi Sulawesi Utara	4,096,691,620
315	Kab. Bolaang Mongondow	5,807,175,942
316	Kab. Minahasa	9,336,407,903
317	Kab. Sangihe	7,087,475,327
318	Kota Bitung	3,012,287,712
319	Kota Manado	5,293,896,520
320	Kab. Kepulauan Talaud	6,305,759,678
321	Kab. Minahasa Selatan	7,172,762,266
322	Kota Tomohon	4,343,976,631
323	Kab. Minahasa Utara	2,995,769,482
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	3,796,488,117
325	Kota Kotamobagu	1,593,489,005
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3,287,968,978
327	Kab. Minahasa Tenggara	4,399,972,164
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3,974,646,500
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3,790,741,339
330	Provinsi Sulawesi Tengah	5,883,085,047
331	Kab. Banggai	6,915,572,980
332	Kab. Banggai Kepulauan	4,501,850,340
333	Kab. Buol	4,463,724,982
334	Kab. Tolitoli	3,123,609,617
335	Kab. Donggala	6,281,795,975
336	Kab. Morowali	4,235,948,806

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
337	Kab. Poso	4,283,482,721
338	Kota Palu	3,144,154,997
339	Kab. Parigi Moutong	4,135,874,176
340	Kab. Tojo Una Una	3,221,042,617
341	Kab. Sigi	2,529,874,249
342	Kab. Banggai Laut	3,048,822,028
343	Kab. Morowali Utara	3,528,474,849
344	Provinsi Sulawesi Selatan	7,429,312,602
345	Kab. Bantaeng	1,759,850,547
346	Kab. Barru	4,566,622,983
347	Kab. Bone	12,095,667,762
348	Kab. Bulukumba	4,477,183,105
349	Kab. Enrekang	29,773,497,431
350	Kab. Gowa	5,453,938,910
351	Kab. Jeneponto	4,474,196,784
352	Kab. Luwu	4,613,346,165
353	Kab. Luwu Utara	20,643,775,120
354	Kab. Maros	3,443,415,937
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	4,461,967,190
356	Kota Palopo	15,320,544,583
357	Kab. Luwu Timur	3,036,656,237
358	Kab. Pinrang	4,482,062,059
359	Kab. Sinjai	5,358,952,216
360	Kab. Kepulauan Selayar	4,397,177,616
361	Kab. Sidenreng Rappang	12,632,559,900
362	Kab. Soppeng	4,945,699,786
363	Kab. Takalar	5,891,914,737
364	Kab. Tana Toraja	15,443,513,257

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
365	Kab. Wajo	7,821,484,882
366	Kota Parepare	3,163,498,111
367	Kota Makassar	11,789,423,814
368	Kab. Toraja Utara	11,941,747,051
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	27,488,589,742
370	Kab. Buton	6,536,075,614
371	Kab. Konawe	7,888,834,222
372	Kab. Kolaka	4,261,488,426
373	Kab. Muna	5,148,163,969
374	Kota Kendari	3,334,776,671
375	Kota Bau-bau	5,143,755,648
376	Kab. Konawe Selatan	13,020,077,230
377	Kab. Bombana	5,789,557,816
378	Kab. Wakatobi	6,355,266,727
379	Kab. Kolaka Utara	1,540,525,965
380	Kab. Konawe Utara	2,982,262,219
381	Kab. Buton Utara	5,759,764,581
382	Kab. Konawe Kepulauan	788,140,194
383	Kab. Kolaka Timur	14,695,891,403
384	Kab. Muna Barat	2,108,157,117
385	Kab. Buton Tengah	3,494,006,097
386	Kab. Buton Selatan	2,224,547,760
387	Provinsi Bali	4,351,967,478
388	Kab. Badung	4,104,176,238
389	Kab. Bangli	6,819,111,962
390	Kab. Buleleng	6,170,223,381
391	Kab. Gianyar	7,641,668,755
392	Kab. Jembrana	10,705,277,048

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
393	Kab. Karangasem	7,846,072,659
394	Kab. Klungkung	3,488,922,901
395	Kab. Tabanan	9,715,025,110
396	Kota Denpasar	18,274,520,423
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,813,424,009
398	Kab. Bima	4,307,159,738
399	Kab. Dompu	4,435,159,565
400	Kab. Lombok Barat	4,589,181,237
401	Kab. Lombok Tengah	11,951,203,904
402	Kab. Lombok Timur	11,426,625,763
403	Kab. Sumbawa	21,184,320,838
404	Kota Mataram	5,079,576,618
405	Kota Bima	2,355,918,906
406	Kab. Sumbawa Barat	2,149,546,098
407	Kab. Lombok Utara	2,832,550,385
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,230,296,230
409	Kab. Alor	10,977,119,734
410	Kab. Belu	5,406,302,033
411	Kab. Ende	15,244,505,013
412	Kab. Flores Timur	11,575,756,401
413	Kab. Kupang	13,405,120,707
414	Kab. Lembata	7,901,027,418
415	Kab. Manggarai	8,996,424,209
416	Kab. Ngada	8,996,283,874
417	Kab. Sikka	14,855,810,782
418	Kab. Sumba Barat	3,298,418,839
419	Kab. Sumba Timur	8,358,651,518
420	Kab. Timor Tengah Selatan	21,612,963,994

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
421	Kab. Timor Tengah Utara	8,846,101,583
422	Kota Kupang	3,423,885,956
423	Kab. Rote Ndao	9,129,446,421
424	Kab. Manggarai Barat	6,909,775,254
425	Kab. Nagekeo	7,230,847,411
426	Kab. Sumba Barat Daya	14,594,567,725
427	Kab. Sumba Tengah	3,812,498,992
428	Kab. Manggarai Timur	8,537,744,335
429	Kab. Sabu Raijua	2,840,641,586
430	Kab. Malaka	4,529,461,834
431	Provinsi Maluku	11,971,805,305
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,987,505,843
433	Kab. Maluku Tengah	11,221,422,727
434	Kab. Maluku Tenggara	1,718,490,724
435	Kab. Buru	2,635,709,573
436	Kota Ambon	5,672,344,667
437	Kab. Seram Bagian Barat	6,073,955,549
438	Kab. Seram Bagian Timur	11,475,442,935
439	Kab. Kepulauan Aru	19,987,380,122
440	Kota Tual	3,239,161,340
441	Kab. Maluku Barat Daya	7,362,095,919
442	Kab. Buru Selatan	5,603,638,119
443	Provinsi Papua	3,465,527,216
444	Kab. Biak Numfor	2,721,372,604
445	Kab. Jayapura	8,635,722,418
446	Kab. Jayawijaya	2,633,847,730
447	Kab. Merauke	8,062,166,870
448	Kab. Mimika	5,261,367,463

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
449	Kab. Nabire	3,006,027,614
450	Kab. Paniai	5,224,366,774
451	Kab. Puncak Jaya	3,341,300,400
452	Kab. Kepulauan Yapen	10,004,111,348
453	Kota Jayapura	3,691,758,676
454	Kab. Sarmi	2,000,862,002
455	Kab. Keerom	2,186,457,170
456	Kab. Yahukimo	2,801,350,100
457	Kab. Pegunungan Bintang	2,158,882,949
458	Kab. Tolikara	2,682,260,842
459	Kab. Boven Digoel	6,770,885,760
460	Kab. Mappi	13,641,204,553
461	Kab. Asmat	20,872,269,378
462	Kab. Waropen	106,558,301
463	Kab. Supiori	789,861,500
464	Kab. Mamberamo Raya	677,225,538
465	Kab. Mamberamo Tengah	7,196,548,430
466	Kab. Yalimo	3,233,699,557
467	Kab. Lanny Jaya	1,347,145,383
468	Kab. Nduga	1,810,603,031
469	Kab. Dogiyai	1,305,903,300
470	Kab. Puncak	152,888,200
471	Kab. Intan Jaya	197,792,716
472	Kab. Deiyai	1,691,118,434
473	Provinsi Maluku Utara	603,163,335
474	Kab. Halmahera Tengah	2,021,571,358
475	Kota Ternate	1,693,081,238
476	Kab. Halmahera Barat	19,260,003,590

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
477	Kab. Halmahera Timur	4,391,735,686
478	Kab. Halmahera Selatan	4,990,946,373
479	Kab. Halmahera Utara	16,780,211,304
480	Kab. Kepulauan Sula	8,652,059,665
481	Kota Tidore Kepulauan	2,438,323,015
482	Kab. Pulau Morotai	3,787,543,344
483	Kab. Pulau Taliabu	1,621,728,050
484	Provinsi Banten	10,133,455,214
485	Kab. Lebak	7,528,444,126
486	Kab. Pandeglang	26,716,981,615
487	Kab. Serang	5,355,977,885
488	Kab. Tangerang	8,771,140,853
489	Kota Cilegon	1,587,945,211
490	Kota Tangerang	4,647,925,835
491	Kota Serang	3,213,944,573
492	Kota Tangerang Selatan	4,970,465,671
493	Provinsi Bangka Belitung	829,398,608
494	Kab. Bangka	3,552,781,746
495	Kab. Belitung	2,417,774,244
496	Kota Pangkal Pinang	896,272,191
497	Kab. Bangka Selatan	5,530,379,657
498	Kab. Bangka Tengah	2,778,047,775
499	Kab. Bangka Barat	1,806,401,427
500	Kab. Belitung Timur	1,816,634,377
501	Provinsi Gorontalo	3,452,525,801
502	Kab. Boalemo	2,465,391,439
503	Kab. Gorontalo	3,817,100,658
504	Kota Gorontalo	3,016,629,861

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
505	Kab. Pohuwato	2,692,388,876
506	Kab. Bone Bolango	8,014,527,857
507	Kab. Gorontalo Utara	6,689,143,562
508	Provinsi Kepulauan Riau	3,870,301,865
509	Kab. Natuna	3,676,552,493
510	Kab. Kepulauan Anambas	3,294,221,224
511	Kab. Karimun	4,282,583,722
512	Kota Batam	4,421,472,566
513	Kota Tanjung Pinang	3,967,296,224
514	Kab. Lingga	5,456,639,698
515	Kab. Bintan	3,763,505,743
516	Provinsi Papua Barat	7,804,370,681
517	Kab. Fak Fak	6,091,305,143
518	Kab. Manokwari	4,739,064,440
519	Kab. Sorong	10,602,540,923
520	Kota Sorong	2,731,854,396
521	Kab. Raja Ampat	3,887,357,241
522	Kab. Sorong Selatan	2,615,913,523
523	Kab. Teluk Bintuni	4,192,022,539
524	Kab. Teluk Wondama	2,172,835,534
525	Kab. Kaimana	3,446,950,601
526	Kab. Maybrat	3,335,414,680
527	Kab. Tambrauw	4,964,954,316
528	Kab. Manokwari Selatan	7,552,698,102
529	Kab. Pegunungan Arfak	30,714,061,134
530	Provinsi Sulawesi Barat	603,546,564
531	Kab. Majene	4,048,893,873
532	Kab. Mamuju	4,767,155,896

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH - DAK NON FISIK

No	Pemda	Piutang TKD
		DAK Non Fisik
533	Kab. Polewali Mandar	9,658,802,388
534	Kab. Mamasa	4,041,277,734
535	Kab. Pasangkayu	2,033,986,691
536	Kab. Mamuju Tengah	4,048,928,322
537	Provinsi Kalimantan Utara	1,008,491,513
538	Kab. Bulungan	3,390,335,057
539	Kab. Malinau	3,780,618,918
540	Kab. Nunukan	6,385,496,856
541	Kota Tarakan	4,494,021,867
542	Kab. Tana Tidung	1,705,397,637
543	Provinsi Papua Selatan	848,429,067
544	Provinsi Papua Tengah	1,433,474,368
545	Provinsi Papua Pegunungan	802,525,000
546	Provinsi Papua Barat Daya	347,241,549
Total		**3,903,739,769,666***

*) Selisih Rp1 karena pembulatan

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Uraian	Debitur di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Saldo 31 Desember 2025	Mutasi	Saldo 31 Desember 2024 (*Audited*)
JUMLAH	**51,743,338,444,095**	**33,775,431,802,564**	**18,001,757,320,527**	**103,520,527,567,186** *	**1,842,789,799,755**	**101,677,737,767,431**

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a Asset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2025 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	Saldo 31 Desember 2024 (Audited) nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	1,749,215,128	29,246,876,941,498	10,052,864	1,147,232,244,473	1,739,162,264	28,099,644,697,025
Dollar Australia (AUD)	1,219,499	13,636,847,751	-	1,377,362,671	1,219,499	12,259,485,080
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	1,785,135	17,229,441,194	-	979,628,336	1,785,135	16,249,812,858
Dollar Singapura (SGD)	412,424	5,361,531,877	-	457,724,941	412,424	4,903,806,936
Euro (EUR)	64,285,968	1,261,564,549,795	-	180,102,925,005	64,285,968	1,081,461,624,790
Gulden Belanda (NLG)	195,945	1,744,913,181	-	249,106,530	195,945	1,495,806,650
Italian Lira (ITL)	777,963,520	7,884,725,987	-	1,125,635,794	777,963,520	6,759,090,194
Mark Jerman (DEM)	1,562,424	15,676,929,647	-	2,238,062,955	1,562,424	13,438,866,692
Poundsterling (GBP)	349,627	7,866,631,213	-	770,464,926	349,627	7,096,166,287
Rupiah (IDR)	18,054,536,415,847	18,054,536,415,847	1,255,607,272,654	1,255,607,272,654	16,798,929,143,194	16,798,929,143,194
Yen Jepang (JPY)	5,718,051,714	610,626,739,875	-	20,214,124,446	5,708,440,804	590,412,615,430
Jumlah	**18,062,851,457,230**	**49,243,005,667,864**	**1,255,617,325,518**	**2,610,354,552,730**	**16,807,224,520,802**	**46,632,651,115,134**

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2025 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	Saldo 31 Desember 2024 (Audited) nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	67,783,442	1,133,339,151,243	(31,331,165)	(468,055,552,440)	99,114,607	1,601,394,703,683
Dollar Australia (AUD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Singapura (SGD)	-	-	(1,539,000)	(18,299,017,800)	1,539,000	18,299,017,800
Euro (EUR)	-	-	-	-	-	-
Gulden Belanda (NLG)	-	-	-	-	-	-
Italian Lira (ITL)	-	-	-	-	-	-
Mark Jerman (DEM)	-	-	(230,000)	(1,978,297,756)	230,000	1,978,297,756
Poundsterling (GBP)	-	-	-	-	-	-
Rupiah (IDR)	1,366,993,624,988	1,366,993,624,988	(126,129,789,173)	(126,129,789,173)	1,493,123,414,161	1,493,123,414,161
Yen Jepang (JPY)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**1,367,061,408,430**	**2,500,332,776,231**	**(126,162,889,338)**	**(614,462,657,169)**	**1,493,224,297,768**	**3,114,795,433,400**

*Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2025 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	Saldo 31 Desember 2024 (Audited) nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	1,816,998,570	30,380,216,092,741	(21,278,301)	679,176,692,033	1,838,276,871	29,701,039,400,708
Dollar Australia (AUD)	1,219,499	13,636,847,751	-	1,377,362,671	1,219,499	12,259,485,080
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	1,785,135	17,229,441,194	-	979,628,336	1,785,135	16,249,812,858
Dollar Singapura (SGD)	412,424	5,361,531,877	(1,539,000)	(17,841,292,859)	1,951,424	23,202,824,736
Euro (EUR)	64,285,968	1,261,564,549,795	-	180,102,925,005	64,285,968	1,081,461,624,790
Gulden Belanda (NLG)	195,945	1,744,913,181	-	249,106,530	195,945	1,495,806,650
Italian Lira (ITL)	777,963,520	7,884,725,987	-	1,125,635,794	777,963,520	6,759,090,194
Mark Jerman (DEM)	1,562,424	15,676,929,647	(230,000)	259,765,199	1,792,424	15,417,164,448
Poundsterling (GBP)	349,627	7,866,631,213	-	770,464,926	349,627	7,096,166,287
Rupiah (IDR)	19,421,530,040,835	19,421,530,040,835	1,129,477,483,481	1,129,477,483,480	18,292,052,557,355	18,292,052,557,355
Yen Jepang (JPY)	5,718,051,714	610,626,739,875	-	20,214,124,446	5,708,440,804	590,412,615,430
Jumlah	**19,429,912,865,660**	**51,743,338,444,095**	**1,129,454,436,180**	**1,995,891,895,561**	**18,300,448,818,570**	**49,747,446,548,535**

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2025	Mutasi	Saldo 31 Desember 2024 (*Audited*)	KPKNL
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	-	-	-	KPKNL Jakarta I
Setiawan Harjono, Hendarawan Harjono	Bank Aspac (BBKU)	3,545,548,399,548	-	3,545,548,399,548	KPKNL Jakarta I
Hindarto Tantular/Anton Tantular	Bank Central Dagang (BBKU)	1,469,211,618,969	-	1,469,211,618,969	KPKNL Jakarta I
Sjamsul Nursalim	Bank Dewa Rutji (BBKU)	-	-	-	KPKNL Jakarta I
Kaharudin Ongko	Bank Arya Panduartha (BBKU)	359,435,826,604	-	359,435,826,604	KPKNL Jakarta I
Sujanto Gondokusumo	Bank Dharmala (BBKU)	800,549,777,850	-	800,549,777,850	KPKNL Jakarta I
Kwan Benny Ahadi	Bank Orient (BBKU)	142,512,244,912	-	142,512,244,912	KPKNL Jakarta I
Andri Tedjadharma PT Centris Mekar Lestari Prasetyo Utomo Paul Banuara	Bank Centris (BBKU), PT	4,542,284,242,763	-	4,542,284,242,763	KPKNL Jakarta I
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean &	Bank Namura	168,780,363,636	-	168,780,363,636	KPKNL Jakarta II
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4,893,525,874,667	(2)	4,893,525,874,669	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	66,770,254,545	-	66,770,254,545	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Bahari	401,640,027,273	-	401,640,027,273	KPKNL Jakarta II
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509,986,363,636	-	509,986,363,636	KPKNL Jakarta II
Fadel Muhammad	Bank Intan	136,430,000,000	-	136,430,000,000	KPKNL Jakarta II
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596,694,000,000	-	596,694,000,000	KPKNL Jakarta II
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4,308,730,000,000	-	4,308,730,000,000	KPKNL Jakarta II
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577,675,636,364	-	577,675,636,364	KPKNL Jakarta V
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155,727,000,000	-	155,727,000,000	KPKNL Jakarta V
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790,557,000,000	-	790,557,000,000	KPKNL Jakarta V
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	106,292,363,636	-	106,292,363,636	KPKNL Jakarta V
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188,483,118,182	-	188,483,118,182	KPKNL Jakarta V
Samadikun Hartono	Bank Modern	2,301,633,133,695	-	2,301,633,133,695	KPKNL Jakarta V
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7,712,964,556,283	(12,000,000,000)	7,724,964,556,283	KPKNL Jakarta V
Jumlah		**33,775,431,802,564**	**(12,000,000,002)**	**33,787,431,802,566**	

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

3. **a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)**

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2025 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	Saldo 31 Desember 2024 (Audited) nilai konversi
Rupiah (IDR)	5,096,500,732,591	4,899,199,147,552	358,890,046,631	358,890,046,631	4,540,309,100,921	4,540,309,100,921
Dollar Amerika (USD)	538,162,588	9,386,747,187,646	(64,408,874)	(724,581,290,457)	625,817,199	10,111,328,478,103
Dollar Australia (AUD)	169,938	1,900,305,837	48,932	683,845,829	121,006	1,216,460,007
Dollar Hongkong (HKD)	13,048,834	28,029,938,952	13,048,834	28,029,938,952	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	252,281	2,434,920,345	252,281	2,434,920,345	-	-
Dollar Singapura (SGD)	984,813	12,802,610,603	984,813	12,802,610,603	-	-
Euro (EUR)	43,767,845	858,911,561,089	43,690,145	857,604,439,630	77,700	1,307,121,459
Gulden Belanda (NLG)	136,642	1,216,813,429	136,642	1,216,813,429	-	-
Poundsterling (GBP)	188,772	4,247,388,877	188,772	4,247,388,877	-	-
Yen Jepang (JPY)	1,000,043,783	106,793,975,556	1,630,039	3,530,038,841	998,413,744	103,263,936,714
Krona Swedia (SEK)	43,357	78,655,757	43,357	78,655,757	-	-
Krone Denmark (DKK)	86,826	228,149,153	86,826	228,149,153	-	-
Mark Jerman (DEM)	115,246	1,156,348,656	115,246	1,156,348,656	-	-
Franc Perancis (FRF)	1,428,156	4,272,611,836	1,428,156	4,272,611,836	-	-
Ringgit Malaysia (MYR)	173,080	712,958,059	173,080	712,958,059	-	-
Italian Lira (ITL)	-	-		-	-	-
Jumlah		**15,308,732,573,348**	**358,887,464,880**	**551,307,476,143**	**4,541,933,530,570**	**14,757,425,097,205**

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2025 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi konversi	Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	Saldo 31 Desember 2024 (Audited) nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271,003,330,924	271,003,330,924	-	-	271,003,330,924	271,003,330,924
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1,980,529,395,026	1,980,529,395,026	-	-	1,980,529,395,026	1,980,529,395,026
	Dollar Amerika	26,403,989	441,474,690,228	-	33,823,509,461	26,403,989	407,651,180,767
Eraska Tristi	Rupiah	-	-	(893,182,300)	(893,182,300)	893,182,300	893,182,300
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17,331,000	17,331,000	-	-	17,331,000	17,331,000
Total		**2,251,576,460,939**	**2,693,024,747,178**	**(893,182,300)**	**32,930,327,161**	**2,252,469,643,239**	**2,660,094,420,018**

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Catatan Kurs Penutup JISDOR

	Kurs Mata Uang Asing	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Dollar Amerika (USD)	16,720.00	16,157.00
2	Dollar Australia (AUD)	11,182	10,053
3	Dollar Hongkong (HKD)	2,148	2,081
4	Dollar Selandia Baru (NZD)	9,652	9,103
5	Dollar Singapura (SGD)	13,000	11,890
6	Euro (EUR)	19,624	16,823
7	Gulden Belanda (NLG)	8,905	7,634
8	Poundsterling (GBP)	22,500	20,296
9	Rupiah (IDR)	1	1
10	Yen Jepang (JPY)	107	103
11	Deutschmark (DEM)	10,034	8,601
12	Krona Swedia (SEK)	1,814	1,469
13	Krone Denmark (DKK)	2,628	2,256
14	Franc Perancis (FRF)	2,992	2,565
15	Ringgit Malaysia (MYR)	4,119	3,612
16	Italian Lira (ITL)	10	9

*) Selisih Rp1 karena pembulatan

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	*Grand Total* (31 Desember 2025)	Mutasi	Grand Total (31 Desember 2024)
TOTAL	**101,073,301,171,198**	**1,855,219,376,738**	**102,928,520,547,936**	**2,138,746,185,804**	**100,789,774,362,132**

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2025 (Dalam Rupiah)	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)
Dollar Amerika (USD)	4,012,653,675	67,091,569,441,897	-	2,259,124,018,887	4,012,653,675	64,832,445,423,010
Dollar Singapore (SGD)	79,397	1,032,170,026	-	88,118,466	79,397	944,051,560
Rupiah (IDR)	33,958,008,415,829	33,958,008,415,829	(55,145,158,825)	(55,145,158,825)	34,013,153,574,654	34,013,153,574,654
Yen Jepang (JPY)	141,216,723	15,080,434,944	-	474,671,769	141,216,723	14,605,763,175
Mark Jerman (DEM)	758,513	7,610,708,501	-	1,086,516,629	758,513	6,524,191,872
Jumlah		**101,073,301,171,198**		**2,205,628,166,927**		**98,867,673,004,271**

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKN

(dalam rupiah)

Nama Debitur	Bank Asal	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2025 (Dalam Rupiah)	Mutasi	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)
Dirgantara Indonesia PT (Demand Loan Normal Biasa)	Mandiri	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	-	-
Dirgantara Indonesia PT (Demand Loan Normal Biasa)	Mandiri	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	-	-
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	91,489,249,097	91,489,249,097	-	-	91,489,249,097
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	1,212,685,353,878	1,212,685,353,878	-	-	1,212,685,353,878
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	-	-	-	-	-
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	-	-	-	-	-
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	-	-	-	-	-
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	Rupiah (IDR)	336,356,387,482	336,356,387,482	(70,873,524,391)	(70,873,524,391)	407,229,911,873
Jumlah		**Rupiah (IDR)**	**1,640,530,990,457**	**1,640,530,990,457**	**(70,873,524,391)**	**(70,873,524,391)**	**1,711,404,514,848**
		Dollar Amerika (USD)					

*Piutang yang tidak terkonversi berupa denda dan penalti MYB Tuban Petro selama 10 tahun

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

Group Texmaco (dalam perkara)*

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2025 (Dalam Rupiah)	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
Jumlah				**-**		**-**		**-**

* telah dilakukan penyerahan ke PUPN

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2025	Mutasi	Saldo 31 Desember 2024
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24,561,586,875	-	24,561,586,875
2	Abdul Hadi	Rupiah	4,911,933	-	4,911,933
3	Faridah	Rupiah	2,528,941	-	2,528,941
4	Haryanto	Rupiah	59,267	-	59,267
5	Zainal Abidin	Rupiah	252,041	-	252,041
Junlah			**24,569,339,058**	**-**	**24,569,339,058**

Debitur Dikembalikan ke Kantor Pusat

NO	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2025 (Dalam Rupiah)	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)
1	Rupiah (IDR)	71,578,010,895	71,578,010,895	-	-	71,578,010,895	71,578,010,895
2	Dollar Amerika (USD)	7,089,775	118,541,036,328	-	3,991,543,269	7,089,775	114,549,493,059
JUMLAH			**190,119,047,223**		**3,991,543,269**		**186,127,503,954**

Catatan Kurs Penutup JISDOR

No.	Kurs Mata Uang Asing	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Dollar Amerika (USD)	16,720.00	16,157.00
2	Dollar Australia (AUD)	11,182.34	10,052.89
3	Dollar Hongkong (HKD)	2,148.08	2,081.10
4	Dollar Selandia Baru (NZD)	9,651.62	9,102.85
5	Dollar Singapura (SGD)	13,000.04	11,890.20
6	Euro (EUR)	19,624.26	16,822.67
7	Gulden Belanda (NLG)	8,905.10	7,633.79
8	Poundsterling (GBP)	22,500.10	20,296.42
9	Rupiah (IDR)	1.00	1.00
10	Yen Jepang (JPY)	106.79	103.43
11	Deutschmark (DEM)	10,033.72	8,601.29
12	Krona Swedia (SEK)	1,814.15	1,468.90
13	Krone Denmark (DKK)	2,627.65	2,255.71
14	Franc Perancis (FRF)	2,943.64	2,564.60
15	Ringgit Malaysia (MYR)	4,119.24	3,611.71
16	Italian Lira (ITL)	10.14	8.69

RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI (BDL)

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas ke Rek. BUN. 502.000000980					Total Pengembalian s.d. 2025	Saldo Hak Tagih 2025
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2024	Pengembalian Periode Semester I 2025	Pengembalian Periode Semester II 2025	Pengembalian Periode Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = Jumlah 4 s.d. 8	11 = 3 - 9
	BDL eks Dana Talangan								
1	PT. Bank Anrico	210.080.728.376	9.532.957.340	63.655.424.775	1.482.875	1.075.677	2.558.552	73.190.940.667	136.889.787.709
2	PT. Bank Guna Internasional	251.055.008.000	183.555.008.000	58.636.880.278	19.079.653	8.844.040.069	8.863.119.722	251.055.008.000	0
3	PT. Bank Harapan Sentosa	3.866.182.312.852	585.728.056.499	108.610.752.584	137.557.897	36.804.804	174.362.701	694.513.171.784	3.171.669.141.069
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	201.802.166.935	25.098.188.837	10.470.560.601		0	0	35.568.749.438	166.233.417.497
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	201.812.614.291	46.872.202.071	54.677.407.690	1.536.746.227	484.545.455	2.021.291.682	103.570.901.443	98.241.712.849
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	336.763.209.867	31.186.000.000	10.099.486.567		0	0	41.285.486.567	295.477.723.300
7	PT. Bank Pasific	2.133.366.434.840	332.023.076.268	321.552.235.617	1.500.000.000	1.454.545.456	2.954.545.456	656.529.857.341	1.476.836.577.499
8	PT. Sejahtera Bank Umum	1.687.349.515.373	857.387.217.394	591.395.698.832	15.355.353.750	2.167.556.799	17.522.910.549	1.466.305.826.775	221.043.688.598
9	PT. South East Asia Bank	899.399.023.306	99.302.719.381	112.389.354.375	1.209.793.344	545.454.546	1.755.247.890	213.447.321.646	685.951.701.660
10	PT. Bank Dwipa Semesta	110.105.997.131	6.970.134.600	28.025.558.872		0	0	34.995.693.472	75.110.303.659
11	PT. Astria Raya Bank	578.918.260.699	131.949.603.600	281.632.039.621	30.971.364.821	4.951.942.964	35.923.307.785	449.504.951.006	129.413.309.692
12	PT. Bank Pinaesaan	681.084.490.920	18.456.680.100	51.229.876.334	2.333.573.936	36.375.000	2.369.948.936	72.056.505.370	609.027.985.550
13	PT. Bank Jakarta	210.994.000.000	120.959.930.062	90.034.069.938		0	0	210.994.000.000	0
14	PT. Bank Industri	511.470.229.327	279.124.000.000	86.043.765.434	45.454.545	281.419.920	326.874.465	365.494.639.899	145.975.589.428
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	8.554.789.643	2.500.000.000	0		0	0	2.500.000.000	6.054.789.643
	Total BDL Eks Dana Talangan	**11.888.938.781.558**	**2.730.645.774.151**	**1.868.453.111.517**	**53.110.407.048**	**18.803.760.690**	**71.914.167.738**	**4.671.013.053.406**	**7.217.925.728.152**

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas ke Rek. BUN. 502.000000980					Total Pengembalian s.d. 2025	Saldo Hak Tagih 2025
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2024	Pengembalian Periode Semester I 2025	Pengembalian Periode Semester II 2025	Pengembalian Periode Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	10 = Jumlah 4 s.d. 9	11 = 3 - 10
	BDL eks Dana Penjaminan								
1	PT Bank Asiatic	886.579.224.444	5.000.000.000	84.740.761.974	18.169.092	5.067.450.301	5.085.619.393	94.826.381.367	791.752.843.077
2	PT Bank Dagang Bali	1.331.516.911.477	-	552.808.337.169	7.228.378.611	200.553.774.540	207.782.153.151	760.590.490.320	570.926.421.157
3	PT Bank Global Internasional	804.234.270.396	-	384.545.381.162	3.093.156.000	3.899.027.142	6.992.183.142	391.537.564.304	412.696.706.091
4	PT Bank Ratu	71.817.985.352	-	71.817.985.352			0	71.817.985.352	0
5	PT Bank Prasidha Utama	227.134.559.144	4.000.000.000	18.380.977.761			0	22.380.977.761	204.753.581.383
	Total BDL Eks Dana Penjaminan	**3.321.282.950.813**	**9.000.000.000**	**1.112.293.443.418**	**10.339.703.703**	**209.520.251.983**	**219.859.955.686**	**1.341.153.399.104**	**1.980.129.551.709**

TOTAL SALDO PIUTANG BDL	**15.210.221.732.371**	**TOTAL PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI**	**63.450.110.751**	**228.324.012.673**	**291.774.123.424**	**6.012.166.452.510**	**9.198.055.279.861**

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH ATAS ASET KREDIT EKS BPPN

PER 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	Formula Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			Keterangan
			Saldo 31 Desember 2025	Nilai Agunan/*Recovery Rate*	Jumlah Penyisihan	
1	**Aset kredit eks BPPN**					
	a. **Selain Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham**	Saldo piutang 31 Desember 2025 - (Saldo piutang 31 Desember 2025 x *Recovery Rate*)	69.556.436.826.497		68.231.585.951.629	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014
	b. **Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham**	100% x (Saldo piutang 31 Desember 2025 - nilai agunan)	33.775.431.802.564	5.778.004.660.224	27.997.427.142.340	
2	**Aset kredit eks kelolaan PT PPA**	Saldo piutang 31 Desember 2025 - (Saldo piutang 31 Desember 2025 x *Recovery Rate*)	102.928.520.547.936		102.599.622.572.892	
3	**Aset kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA**	Saldo piutang 31 Desember 2025 - (Saldo piutang 31 Desember 2025 x *Recovery Rate*)				
4	**Piutang eks BDL**	100% x (Saldo piutang 31 Desember 2025 - nilai agunan)	9.126.963.029.216	823.078.315.959	8.303.884.713.257	Peraturan Menteri Keuangan No.69/PMK.06/2014
5	**Piutang pada PT PPA**	5‰ x (saldo piutang 31 Desember 2025)	-	-	-	
Jumlah			**215.387.352.206.213**	**6.601.082.976.183**	**207.132.520.380.118**	

ASET INVENTARIS EKS BPPN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024		Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025	
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar
1	**Aset Inventaris**	**10,059**	**5,209,616,797**	**(86)**	**(3,367,967)**	**9,973**	**5,206,248,830**
	a. Digunakan Instansi	9,497	5,068,982,677	(86)	(3,367,967)	9,411	5,065,614,710
	b. Tidak Digunakan *(idle)*	562	140,634,120	-	-	562	140,634,120

ASET INVENTARIS EKS BPPN YANG DIPERGUNAKAN INSTANSI PEMERINTAH

No.	Instansi Yang Menggunakan	Saldo 31 Desember 2024		Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025	
		Jumlah Aset (unit)	Nilai	Jumlah Aset (unit)	Nilai	Jumlah Aset (unit)	Nilai
1	Kantor Pusat DJKN	1,621	450,583,000	-	-	1,621	450,583,000
2	KPKNL Jakarta IV	17	5,200,000	-	-	17	5,200,000
3	KPKNL Pekalongan	-	-	-	-	-	-
4	KPKNL Tangerang	1	69,248	-	-	1	69,248
5	Komisi Hukum Nasional	239	49,532,000	-	-	239	49,532,000
6	POLRI	18	33,700,000	-	-	18	33,700,000
7	Menko Perekonomian	-	-	-	-	-	-
8	TU Menteri Depkeu	-	-	-	-	-	-
9	KPK	2	1,519,950	-	-	2	1,519,950
10	TIMTAS TIPIKOR	167	51,056,622	-	-	167	51,056,622
11	DJAPK	133	86,748,000	-	-	133	86,748,000
12	Biro Umum, Depkeu	131	15,592,697	-	-	131	15,592,697
13	Bapeki/BKF	425	176,375,000	-	-	425	176,375,000
14	Biro Hukum, Depkeu	240	128,865,000	-	-	240	128,865,000
15	Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	68	69,719,582	-	-	68	69,719,582
16	KPPN Sidoarjo	3	2,400,000	-	-	3	2,400,000
17	KPPN Pamekasan	98	12,244,749	-	-	98	12,244,749
18	KPPN Tuban	85	20,245,886	-	-	85	20,245,886
19	KPPN Pacitan	12	4,800,000	-	-	12	4,800,000
20	KPPN Bondowoso	126	7,425,000	-	-	126	7,425,000
21	Depkumham	230	61,152,532	-	-	230	61,152,532
22	Kanwil DJPBN Denpasar	202	11,770,000	-	-	202	11,770,000
23	Hibah melalui Menkominfo	-	-	-	-	-	-
24	Biro Perlengkapan, Setjen Depkeu	23	7,116,414	-	-	23	7,116,414
25	Gudang Ciledug, Biro Umum Setjen	1,465	440,788,055	-	-	1,465	440,788,055
26	Gudang Jati Uwung, Biro Umum Setjen	3,959	3,411,977,907	-	-	3,959	3,411,977,907
27	Gedung D lantai 20 eks LPS (Gd.A Lt.2) DJPK	135	15,563,068	-	-	135	15,563,068
28	Jl. Raden Intan, Lampung (Kanwil V DJKN)	86	3,367,967	(86)	(3,367,967)	-	-
29	Jl. Diponegoro 30A, Medan (Kanwil II DJKN)	-	-	-	-	-	-
30	Kanwil XI DJKN, GKN II, Jl. Dinoyo Surabaya	-	-	-	-	-	-
31	Jl. A Yani No.68 GKN, (KPPN Balikpapan)	11	1,170,000	-	-	11	1,170,000
JUMLAH		**9,497**	**5,068,982,677**	**(86)**	**(3,367,967)**	**9,411**	**5,065,614,710**

ASET INVENTARIS EKS BPPN YANG TIDAK DIGUNAKAN (*IDLE*)

No.	Lokasi Aset	Saldo 31 Desember 2025	
		Jumlah Aset (unit)	Nilai Wajar (Rp)
1	Gedung Pondok Indah	0	0
2	Gudang Cut Mutia	0	0
3	Gudang Tabrani	0	0
4	Gudang Aspac	0	0
5	Gudang Semanan Blok A-5	0	0
6	Gudang Semanan Blok A-10	0	0
7	Gudang Semanan Blok A-11	0	0
8	Gudang Semanan Blok A-15	0	0
9	Gudang Semanan Blok A-8	0	0
10	Gudang Semanan Blok B-6	0	0
11	Gudang Semanan Blok B-8	0	0
12	Gudang Semanan Blok B-9	0	0
13	Gudang Balindo	0	0
14	Tim TKAAK Gedung PAIK	0	0
15	Gedung Danahutama	5	13,000,000
16	Jl. Ikan Bawal, Lampung	0	0
17	Jl. A Yani 102A, Medan (eks Unibank)	0	0
18	Jl. Pemuda No.18, Medan (eks Pesona)	0	0
19	Jl. Industri, Tanjung Morawa, Medan	0	0
20	Jl. Kol. Sugiono 3 FGH, Medan (eks Dharmala)	0	0
21	Jl. Yos Sudarso 60 AA BB, Medan (eks Unibank)	0	0
22	Jl. Jend. Gatot Subroto 285 Medan (eks Unibank)	0	0
23	Jl. Pusat Pasar 98 Medan (eks Unibank)	0	0
24	Jl. Canaya Raya Blok D/3, Medan (eks Unibank)	3	159,174
25	Tanjung Morawa, Medan (eks Pabrik Rotan)	0	0
26	Jl. Yos Sudarso 219 Medan (eks BUN)	0	0
27	Jl. Jend. Gatot Subroto 81 Medan (eks Dharmala)	0	0
28	Jl. Pemuda, Semarang	0	0
29	Jl. Raya Darmo Surabaya (eks BUS)	340	92,939,886
30	Jl. Wijaya Kusuma Sby (eks Bank Papan)	214	34,535,060
31	Jl. A Yani, Bandung	0	0
32	Jl. Tanjungpura, Pontianak	0	0
33	Jl. Diponegoro No.148, Denpasar	0	0
34	Jl. Selaparang, Lombok	0	0
35	Jl. Sultan Hasanudin, Makassar	0	0
36	Jl. Sam Ratulangi, Manado	0	0
37	Jl. Jend. Sudirman, Pekanbaru	0	0
38	Jl. Imam Bonjol Blok A, Batam	0	0
39	Eks TL Bank Prasidha (Lantai 2 & 7 Gd. PAIK)	0	0
Jumlah		**562**	**140,634,120**

JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2024		Mutasi Tahun 2025		Saldo Per 31 Desember 2025	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	873	1.216.797.033.458	(30)	274.467.605.565	843	1.491.264.666.024
2	Temuan BPK	363	1.619.564.206.869	(2)	576.889.485.207	361	2.196.453.692.076
3	BJDA (Verifikasi 2009)	62	229.922.917.300	(4)	203.479.950.879	58	433.402.868.179
4	*Settlement*	-	-	-	-	-	-
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-	-	-	-	-
	Sinar Bonana	2	46.613.347.327	-	-	2	46.613.347.327
6	Griya Potensa	2	295.000.000	-	-	2	295.000.000
7	*Covernote*	80	204.669.928.661	(10)	(21.207.838.153)	70	183.462.090.508
Jumlah		**1.382**	**3.317.862.433.615**	**(46)**	**1.033.629.203.498**	**1.336**	**4.351.491.664.114**

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Neraca (Temuan BPK)	Jl. Stasiun Senen No. 60A, Gn. Sahari Selatan, Kemayoran	Serahkelola LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-1/KN.4/2025 tanggal 13 Januari 2025	1	628.000.000	(1)	(628.000.000)	-	-
2	Neraca (Covernote)	Jl. Darmo Permai Utama No. 70, Pradahkalikendal	Laku terjual pada masa BPPN sesuai RL 327/2000 tanggal 28 Juli 2000	1	308.452.153	(1)	(308.452.153)	-	-
3	Neraca (Temuan BPK)	Kompek Ruko Merdeka Mall No.3 dan 3A Jl. Merdeka , Kebon Kelapa, Bogor Tengah	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-0081/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2025	2	3.250.000.000	-	(1.694.747.000)	2	1.555.253.000
4	Neraca (Temuan BPK)	Komplek Ruko Depok Mall Blok B3 No.32 Jl. Margonda Raya, Kemiri Muka, Beji	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-0125/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2025. Selanjutnya laku lelang pada KPKNL Bogor sesuai RL Nomor RL Nomor 689/08.03/2025-01 tanggal 11 Desember 2025	1	2.556.000.000	(1)	(2.556.000.000)	-	-
5	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. KEMBANG INDAH III G3 NO. 1, KEL. PURI INDAH	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta V Nomor LAP-0034/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2025 tanggal 19 Maret 2025	1	325.954.417	-	3.660.724.583	1	3.986.679.000
6	Neraca (BJDA Verifikasi 2009)	Jalan Sultan Iskandar Muda RT 009/ RW 009 No. 11 E (d/h Jalan Arteri Pondok Pinang, Pejompongan) Kel. Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta V Nomor LAP-0036/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2025 tanggal 19 Maret 2025	1	14.005.658.000	-	636.453.000	1	14.642.111.000
7	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Jalan Gito Gati (d.h. Jalan Palagan Rejodani), Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0038/1/PRO-01/KNL.0905/01.01.00/2025 tanggal 7 Maret 2025	1	168.000.000	-	8.325.080.000	1	8.493.080.000
8	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	GRAHA BINTARO Blok GR.03 No 86 Pondok Aren Pondok Kacang Barat Tangerang Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LP-0012/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2025 tanggal 5 Maret 2025	1	62.485.793	-	1.033.191.207	1	1.095.677.000
9	Neraca (Temuan BPK)	Jl. Swadarma Raya No.58, Ulujami, KEBAYORAN LAMA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta V Nomor Lap-0049/KNL.0705/2025 tanggal 14 April 2025	1	4.279.800.000	-	12.783.053.000	1	17.062.853.000
10	Neraca (Covernote)	Kavling 1327 Springvale, Perumahan Permata Sentul, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-00140/1/KNL.0803/2025 tanggal 17 April 2025. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertahanan c.q. BAIS TNI sesuai Kepdirjen Nomor KEP-71/KN/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	2.207.288.000	(1)	(2.207.288.000)	-	-
11	Neraca (Covernote)	Kavling 1360 Springvale, Perumahan Permata Sentul, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-00141/KNL.0803/2025 tanggal 17 April 2025. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertahanan c.q. BAIS TNI sesuai Kepdirjen Nomor KEP-71/KN/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	1.789.630.000	(1)	(1.789.630.000)	-	-
12	Neraca (Covernote)	Kavling 1396 Springvale, Perumahan Permata Sentul, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-00142/KNL.0803/2025 tanggal 17 April 2025. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertahanan c.q. BAIS TNI sesuai Kepdirjen Nomor KEP-71/KN/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	2.034.868.000	(1)	(2.034.868.000)	-	-

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
13	Neraca (Covernote)	Kavling 1388 Springvale, Perumahan Permata Sentul, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-00143/KNL.0803/2025 tanggal 17 April 2025. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertahanan c.q. BAIS TNI sesuai Kepdirjen Nomor KEP-71/KN/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	3.302.459.000	(1)	(3.302.459.000)	-	-
14	Neraca (Covernote)	Kavling 1310 Springvale, Perumahan Permata Sentul, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-00144/KNL.0803/2025 tanggal 17 April 2025. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertahanan c.q. BAIS TNI sesuai Kepdirjen Nomor KEP-71/KN/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	2.979.338.000	(1)	(2.979.338.000)	-	-
15	Neraca (Covernote)	Kavling 1350 Springvale, Perumahan Permata Sentul, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-00145/KNL.0803/2025 tanggal 17 April 2025. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertahanan c.q. BAIS TNI sesuai Kepdirjen Nomor KEP-71/KN/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	2.472.648.000	(1)	(2.472.648.000)	-	-
16	Neraca (Covernote)	Kavling 1361 Springvale, Perumahan Permata Sentul, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-00146/KNL.0803/2025 tanggal 17 April 2025. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertahanan c.q. BAIS TNI sesuai Kepdirjen Nomor KEP-71/KN/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	1.783.879.000	(1)	(1.783.879.000)	-	-
17	Neraca (Covernote)	Kavling 1362 Springvale, Perumahan Permata Sentul, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-00144/KNL.0803/2025 tanggal 17 April 2025. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertahanan c.q. BAIS TNI sesuai Kepdirjen Nomor KEP-71/KN/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	1.923.511.000	(1)	(1.923.511.000)	-	-
18	Neraca (Covernote)	Kavling 1372 Springvale, Perumahan Permata Sentul, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-00148/KNL.0803/2025 tanggal 17 April 2025. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertahanan c.q. BAIS TNI sesuai Kepdirjen Nomor KEP-71/KN/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	2.405.765.000	(1)	(2.405.765.000)	-	-
19	Neraca (Temuan BPK)	Kelurahan Meruya Udik, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Dicatatkan pada Neraca kemudian PSP ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Sesuai Kepdirjen KEP-32/KN/2025 tanggal 19 Maret 2025 Dan BAST Nomor BA-118/KN/2025 tanggal 26 Juni 2025	-	-	-	-	-	-
20	Neraca (Temuan BPK)	Kelurahan Meruya Udik, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Dicatatkan pada Neraca kemudian PSP Sebagian ke Badan Keamanan Laut Sesuai KepdirjenKEP-38/KN/2025 tanggal 25 Maret 2025 Dan BAST Nomor BA-122/KN/2025 tanggal 26 Juni 2025	-	-	1	549.459.345.424	1	549.459.345.424
21	Neraca (Temuan BPK)	Paradise Hills Golf, Jalan Gading Golf Timur No.89, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Perubahan nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0027/1/KNL.0603/2025 tanggal 16 Mei 2025	1	4.117.200.000	-	11.869.464.000	1	15.986.664.000
22	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Cilandak KKO Nomor 52, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PSP kepada Badan Siber dan Sandi Negara sesuai KEP-105/KN/2024 tanggal 11 September 2024 dan BA-01/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025	2	34.880.762.000	(2)	(34.880.762.000)	-	-

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
23	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	GRAHA BINTARO, ALAMAT BLOK GR24/10, GR24/20, E10/1, E10/03, E10/07, E10/17, E10/19, E1023, E10/25, E10/27, E10/1, E10/03, E10/07, F03/16, HE03/18, HE03/19, HE04/01, HE04/02, HE05/01, HE05/02, HF01/14, HF02/01, HF01/02, HF02/28, HF02/29, GR21/81, PONDOK KACANG BARAT	Sebanyak 3 (tiga) bidang Blok GR24/10, Blok GR24/20, dan Blok GR21/81 senilai Rp2.542.744.000,00 dilakukan PSP aset ke Kementerian keuangan sesuai Kepdirjen Nomor KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) bidang senilai Rp31.316.736.000,00 dilakukan PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai Kepdirjen Nomor KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	26	33.859.507.000	(26)	(33.859.507.000)	-	-
24	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	GRAHA BINTARO Blok E 10 No 17 Paku Jaya Serpong Tangerang Jawa Barat	Koreksi nilai menjadi 0, karena nilai telah termasuk ke nomor register 03.01.02.00000739-A sesuai laporan penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LAP-0044/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024.	1	43.740.055	(1)	(43.740.055)	-	-
25	Neraca (Temuan BPK)	Komplek Ruko Segitiga Emas Blok B No.18 Jl. A. Tani No.221-223, Merdeka, Sumurbatu	PSP kepada Ombudsman sesuai KEP-142/KN/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-117/KN/2025 tanggal 26 Juni 2025	1	3.137.178.000	(1)	(3.137.178.000)	-	-
26	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Jalan Sidodadi, Kelurahan Deli Tua (d.h. Desa Deli Tua), Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PSP kepada Kejaksaan Agung RI c.q. Kejaksaan Negeri Medan sesuai KEP-30/KN/2025 tanggal 17 Maret 2025 telah diubah dengan KEP-55/KN/2025 tanggal 6 Mei 2025 dan BAST Nomor BA-119/KN/2025 tanggal 26 Juni 2025	1	10.799.498.000	(1)	(10.799.498.000)	-	-
27	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. KELAPA KEL SEPANG JAYA KEC KEDATON BANDAR LAMPUNG (JL. KAVLINGAN)	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 204/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	75.700.000	-	1.060.878.000	1	1.136.578.000
28	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. LEGIAN NO. 188 KUTA BADUNG BALI	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Denpasar Nomor 0173/1/PRO-01/KNL.1401/01.01.00/2024	1	3.394.654.801	-	68.701.597.199	1	72.096.252.000
29	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	MUARA BARU, PENJARINGAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta V Nomor 0137/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2024	1	21.833.236.934	-	191.153.383.066	1	212.986.620.000
30	Neraca (BJDA Verifikasi 2009)	Jl. Letjen S. Parman Tanjung Duren Grogol	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta V Nomor 0138/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2024	1	19.120.163.000	-	191.304.837.000	1	210.425.000.000
31	Neraca (Temuan BPK)	Tower Bougenville, Kebon Kosong, KEMAYORAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta V Nomor 0194/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2024	1	516.000.000	-	340.633.000	1	856.633.000
32	Neraca (Temuan BPK)	Rusun Taman Kemayoran Condominium Lt.VIII Blok.C Blok A.I, Kebon Kosong, KEMAYORAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta V Nomor 0195/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2024	1	508.700.000	-	347.933.000	1	856.633.000
33	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL.PANCUR BATU NO.1A DAN 1,MEDAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0265/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	194.029.316	-	1.066.528.684	1	1.260.558.000
34	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL.PANCUR BATU NO.1 A SIDODADI MEDAN TIMUR	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0264/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	1.253.827.000	-	429.513.000	1	1.683.340.000
35	Neraca (BJDA Verifikasi 2009)	Jl. Jenderal A. Yani No. 74 Kesawan Medan	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0262/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	5.657.918.000	-	13.860.979.179	1	19.518.897.179
36	Neraca (BJDA Verifikasi 2009)	Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan, Sumut	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0270/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	3.705.980.000	-	7.858.009.000	1	11.563.989.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
37	Neraca (BJDA Verifikasi 2009)	Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Pasar Kliwon, Solo	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surakarta Nomor 0087/1/PRO-01/KNL.0902/01.01.00/2024	1	2.516.297.300	-	11.446.807.700	1	13.963.105.000
38	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Jl. Sirna Galih No. 3 RT 2 RW 1, Desa Megamendung, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0247/1/KNL.0803/2025 tanggal 21 Mei 2025	1	2.145.338.667	-	(212.646.667)	1	1.932.692.000
39	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D11, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.119.389.000	1	1.119.389.000
40	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D12, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.119.389.000	1	1.119.389.000
41	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D16, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.119.389.000	1	1.119.389.000
42	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D17, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.119.389.000	1	1.119.389.000
43	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D15, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.119.389.000	1	1.119.389.000
44	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D18, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.119.389.000	1	1.119.389.000
45	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D19, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.119.389.000	1	1.119.389.000
46	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D20, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.119.389.000	1	1.119.389.000
47	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D21, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.119.389.000	1	1.119.389.000
48	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D51, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.386.578.000	1	1.386.578.000
49	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D52, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.386.578.000	1	1.386.578.000
50	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D53, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.386.578.000	1	1.386.578.000
51	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D55, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.386.578.000	1	1.386.578.000
52	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D56, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.386.578.000	1	1.386.578.000
53	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D57, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.386.578.000	1	1.386.578.000
54	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D58, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.386.578.000	1	1.386.578.000
55	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D59, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.386.578.000	1	1.386.578.000
56	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. HR. MUHAMAD D60, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0096/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2025 tanggal 20 Maret 2025	1	-	-	1.386.578.000	1	1.386.578.000
57	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Jl. Pemuda No. 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor LAP-0415/1/KNL.0201/2025 tanggal 16 Desember 2025	2	20.197.032.452	-	2.195.165.548	2	22.392.198.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
58	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Jalan Medan-Binjai, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor LP-0421/1/KNL.0201/2025 tanggal 16 Desember 2025	1	1.225.133.000	-	(663.438.000)	1	561.695.000
59	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. CIMAHI NO. 10, MENTENG, JAKARTA PUSAT	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta V Nomor LP-0174/1/KNL.0705/2025 tanggal 21 Oktober 2025	1	1.500.000.000	-	34.310.493.000	1	35.810.493.000
60	Neraca (Temuan BPK)	Jl. Pinangsia I No.14 Rt 012/Rw 05, Pinangsia, TAMAN SARI	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta V Nomor LP-0175/1/KNL.0705/2025 tanggal 21 Oktober 2025	1	432.400.000	-	667.982.000	1	1.100.382.000
61	Neraca (BJDA Verifikasi 2009)	Jalan Sukorejo, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0281/1/KPKNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	236.699.000	-	1.632.003.000	1	1.868.702.000
62	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Jalan K.H. Noer Ali, Komplek Rumah Toko Bumi Satria Kencana, Kavling C-3, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor LP-0077/1/KNL.0802/2025 tanggal 6 November 2025	1	300.000.000	-	1.008.769.000	1	1.308.769.000
63	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL. VETERAN NO. 28 RT 003/06, KEL. BINTARO, KEC. KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Jakarta V Nomor LP-0270/1/KNL.0705/2025 tanggal 5 Desember 2025	1	50.000.000	-	14.267.731.000	1	14.317.731.000
64	Neraca (Temuan BPK)	Desa Bengle, Kecamatan Majalaya (d.h. Klari), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 11 bidang). Selanjutnya perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	1	3.712.000.000	-	(3.363.623.225)	1	348.376.775
65	Neraca (Temuan BPK)	Desa Bengle, Kecamatan Majalaya (d.h. Klari), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 11 bidang)	1	-	-	1.138.518.519	1	1.138.518.519
66	Neraca (Temuan BPK)	Desa Bengle, Kecamatan Majalaya (d.h. Klari), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 11 bidang). Selanjutnya perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	1	-	-	1.171.495.448	1	1.171.495.448
67	Neraca (Temuan BPK)	Desa Bengle, Kecamatan Majalaya (d.h. Klari), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 11 bidang), selanjutnya perubahan nilai sebagian luas 7.487 m2 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	1	-	-	1.353.189.642	1	1.353.189.642
68	Neraca (Temuan BPK)	Desa Bengle, Kecamatan Majalaya (d.h. Klari), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 11 bidang)	1	-	-	51.555.556	1	51.555.556

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
69	Neraca (Temuan BPK)	Desa Bengle, Kecamatan Majalaya (d.h. Klari), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 11 bidang). Selanjutnya perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	1	-	-	1.016.506.182	1	1.016.506.182
70	Neraca (Temuan BPK)	Desa Bengle, Kecamatan Majalaya (d.h. Klari), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 11 bidang)	1	-	-	570.415.954	1	570.415.954
71	Neraca (Temuan BPK)	Desa Bengle, Kecamatan Majalaya (d.h. Klari), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 11 bidang), selanjutnya perubahan nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	1	-	-	742.831.440	1	742.831.440
72	Neraca (Temuan BPK)	Desa Bengle, Kecamatan Majalaya (d.h. Klari), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 11 bidang), selanjutnya perubahan nilai sebagian luas 6.802 m2 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	1	-	-	1.007.862.201	1	1.007.862.201
73	Neraca (Temuan BPK)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Majalaya (d.h. Klari), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 11 bidang), selanjutnya perubahan nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	1	-	-	1.090.510.066	1	1.090.510.066
74	Neraca (Temuan BPK)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Majalaya (d.h. Klari), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 11 bidang), selanjutnya perubahan nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0181/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	1	-	-	468.932.000	1	468.932.000
75	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	JL.INDUSTRI NO. 71, DS. T. MORAWA, MEDAN	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor LAP-0423/1 /KNL.0201/2025, LAP-0425/1 /KNL.0201/2025, LAP-0426/1 /KNL.0201/2025, dan LAP-0428/1 /KNL.0201/2025 tanggal 16 Desember 2025	9	53.989.450.000	-	5.160.467.000	9	59.149.917.000
76	Neraca (Temuan BPK)	Jl. Madu No.4A RT 005/03, Mangga Besar, TAMAN SARI	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta V Nomor LP-0302/1/KNL.0705/2025 tanggal 29 Desember 2025	1	2.727.150.000	-	4.188.806.000	1	6.915.956.000
77	Neraca (BJDA Verifikasi 2009)	Desa Bongkaran, Pabean, Cantian, Surabaya	PSP ke Kepolisian RI sesuai KEP-133/KN/2025 tanggal 10 November 2025 dan BAST Nomor BA-267/KN/2025 tanggal 13 November 2025	4	23.259.138.000	(4)	(23.259.138.000)	-	-
78	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Karasak Utara IV Nomor 14, Karasak	Double catat dengan aset nomor register 03.01.02.00000263	1	-	(1)	-	-	-
79	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok bihbul, Sayati	Laku terjual pada masa BPPN sesuai Risalah Lelang KPKNL Bandung Nomor 205/2000	1	-	(1)	-	-	-
80	CaLK (kepemilikan tidak ada)	-	double catat dengan aset PPA PRK-B003018	1	-	(1)	-	-	-
81	CaLK (kepemilikan tidak ada)	-	double catat dengan aset PPA PRK-B003020	1	-	(1)	-	-	-
82	CaLK (kepemilikan tidak ada)	-	double catat dengan aset PPA PRK-B003019	1	-	(1)	-	-	-
83	CaLK (Dok Copy)	Jalan Vikamas Tengah I Blok H-VI Kav. no.10 Selatan, Kapuk Muara	Laku Lelang Sesuai Risalah Lelang KPKNL Jakarta IV Nomor 044/2013 tanggal 21 Februari 2013	1	-	(1)	-	-	-

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
84	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Cilandak KKO Nomor 52, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PSP kepada Badan Siber dan Sandi Negara sesuai KEP-105/KN/2024 tanggal 11 September 2024 dan BA-01/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025	1	5.055.043.000	(1)	(5.055.043.000)	-	-
85	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Cilandak KKO Nomor 52, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PSP kepada Badan Siber dan Sandi Negara sesuai KEP-105/KN/2024 tanggal 11 September 2024 dan BA-01/KN/2025 tanggal 30 Januari 2025	1	8.982.666.000	(1)	(8.982.666.000)	-	-
86	CaLK (Tidak Ada Keterangan)	Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Situbondo, Jawa Timur, TANJUNG KAMAL	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jember Nomor 0059/1/PRO-01/KNL.1004/01.01.00/2024	1	-	-	40.793.000.000	1	40.793.000.000
87	CaLK (Dok Copy)	CIMAHI	Double catat dengan aset PPA Nomor PRK-C000001	1	-	(1)	-	-	-
88	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Limau Manis	Double catat dengan aset PPA Nomor PRK-B001340	1	-	(1)	-	-	-
89	CaLK (Dok Copy)	Cileuleung, Mekar Jaya, Cikampek	Koreksi pencatatan, terjual dalam Program Penjualan Aset Properti 5	1	-	(1)	-	-	-
90	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Bara	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0532/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	505.345.000	1	505.345.000
91	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0533/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	901.436.000	1	901.436.000
92	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0534/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	183.553.000	1	183.553.000
93	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0535/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	250.554.000	1	250.554.000
94	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0536/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	540.056.000	1	540.056.000
95	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0537/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	133.578.000	1	133.578.000
96	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0538/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	1.788.903.000	1	1.788.903.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
97	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0539/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	388.694.000	1	388.694.000
98	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0540/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	1.126.676.000	1	1.126.676.000
99	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0541/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	316.565.000	1	316.565.000
100	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0542/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	420.879.000	1	420.879.000
101	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0543/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	73.867.000	1	73.867.000
102	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0544/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	311.088.000	1	311.088.000
103	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0545/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	80.703.000	1	80.703.000
104	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Gn. Leutik, Desa Kutamekar (dh. Cikutamahi), Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0524/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	354.468.000	1	354.468.000
105	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0546/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	119.494.000	1	119.494.000
106	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0547/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	152.854.000	1	152.854.000
107	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0548/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	257.927.000	1	257.927.000
108	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0549/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	145.247.000	1	145.247.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
109	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0550/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	440.533.000	1	440.533.000
110	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0551/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	1.349.440.000	1	1.349.440.000
111	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0525/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	237.868.000	1	237.868.000
112	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Tg. Babadan, Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0526/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	60.852.000	1	60.852.000
113	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Tg. Babadan, Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0527/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	320.379.000	1	320.379.000
114	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Tg. Babadan, Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0528/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	135.861.000	1	135.861.000
115	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0552/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	97.191.000	1	97.191.000
116	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0553/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	1.406.263.000	1	1.406.263.000
117	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0554/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	845.803.000	1	845.803.000
118	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0555/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	494.226.000	1	494.226.000
119	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Cipeuteuy, Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0529/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	83.725.000	1	83.725.000
120	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0556/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	20.483.000	1	20.483.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
121	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0557/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	113.902.000	1	113.902.000
122	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0558/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	39.111.000	1	39.111.000
123	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0559/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	69.789.000	1	69.789.000
124	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0560/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	184.863.000	1	184.863.000
125	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0561/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	1.977.459.000	1	1.977.459.000
126	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Jalan Gamulang, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0562/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	143.101.000	1	143.101.000
127	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kutamekar (dh. Cikutamahi), Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0530/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	125.760.000	1	125.760.000
128	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Tg. Babadan, Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor C.390 SPPT.0743.7/1995 Persil Nomor 328)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0531/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	147.728.000	1	147.728.000
129	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0563/1/KNL.0803/2025 tanggal 10 November 2025	1	-	-	110.037.000	1	110.037.000
130	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 44, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0452/1/KNL.0803/2015 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	1.103.395.000	1	1.103.395.000
131	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 49, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0453/1/KNL.0803/2016 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	1.049.571.000	1	1.049.571.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
132	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 50, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0454/1/KNL.0803/2017 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	888.099.000	1	888.099.000
133	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 51, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0455/1/KNL.0803/2018 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	918.855.000	1	918.855.000
134	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 52, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0456/1/KNL.0803/2019 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	903.477.000	1	903.477.000
135	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 53, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0457/1/KNL.0803/2020 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	788.140.000	1	788.140.000
136	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 56, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Bara	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0458/1/KNL.0803/2021 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	888.099.000	1	888.099.000
137	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 57, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0459/1/KNL.0803/2025 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	895.788.000	1	895.788.000
138	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 64, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0460/1/KNL.0803/2023 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	815.052.000	1	815.052.000
139	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 61, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0461/1/KNL.0803/2024 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	1.111.085.000	1	1.111.085.000
140	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 66, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0462/1/KNL.0803/2025 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	1.032.271.000	1	1.032.271.000
141	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Kavling 67, Villa Yasmin, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0463/1/KNL.0803/2025 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	861.187.000	1	861.187.000
142	CaLK (Dok Copy)	Jalan Agropolitan, Desa Sindangjaya (d.h. Desa Sindanglaya), Kecamatan Cipanas (d.h. Kecamatan Pacet), Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0464/1/KNL.0803/2025 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	269.730.000	1	269.730.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
143	CaLK (Dok Copy)	Jalan Agropolitan, Desa Sindangjaya (d.h. Desa Sindanglaya), Kecamatan Cipanas (d.h. Kecamatan Pacet), Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0465/1/KNL.0803/2025 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	906.719.000	1	906.719.000
144	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Villa Green Apple, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0466/1/KNL.0803/2025 tanggal 23 Oktober 2025	1	-	-	7.507.021.000	1	7.507.021.000
145	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.765 SPPT 1994/1452 Persil Nomor 379)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-479/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	131.615.000	1	131.615.000
146	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Tg. Lega, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor C.468 SPPT.0892.7/1995 Persil Nomor 58)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-480/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	149.374.000	1	149.374.000
147	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.504 SPPT 973.7/95 Persil Nomor 71B)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-481/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	61.925.000	1	61.925.000
148	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Tg. Calung Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.550 SPPT.1049.7/1995 Persil Nomor 114)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-482/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	102.150.000	1	102.150.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
149	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Gamuleng, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.103 SPPT 0216/1994 Persil Nomor 112)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-483/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	115.593.000	1	115.593.000
150	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Cigombong, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.648 SPPT 1208.7/1995 Persil Nomor 32)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-484/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	141.216.000	1	141.216.000
151	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Ps. Gombong, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.1004 SPPT.1852/1994 Persil Nomor 32)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-485/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	202.537.000	1	202.537.000
152	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Cigombong, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.1005 SPPT.1854/1994 Persil Nomor 33)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-486/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	99.646.000	1	99.646.000
153	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Cikole, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.505 SPPT 975/1994 Persil Nomor 59)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-487/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	85.515.000	1	85.515.000
154	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Ps. Gombong, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.73 SPPT 0158.7/1995 Persil Nomor 33)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-488/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	138.721.000	1	138.721.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
155	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor SPPT 1995/158 Persil Nomor 64)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-489/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	61.242.000	1	61.242.000
156	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Cigombong, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.935 SPPT 1771.7/1995 Persil Nomor 92)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-490/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	56.619.000	1	56.619.000
157	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Tegal Lega, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.256 SPPT 501/1994 Persil Nomor 33)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-491/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	184.894.000	1	184.894.000
158	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Cigombong, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.397 SPPT 0766/1994 Persil Nomor 23)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-492/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	51.091.000	1	51.091.000
159	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok P. Gombong, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.92 SPPT 0199/94 Persil Nomor 58)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-493/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	56.790.000	1	56.790.000
160	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor SPPT 1994/1850 Persil Nomor 921)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-494/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	64.821.000	1	64.821.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
161	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Gamuleng, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks. Girik Hak Milik Adat Nomor C.940 SPPT 1778/1994 Persil Nomor 112)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-495/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	72.045.000	1	72.045.000
162	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Tg. Calung, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor C.265 SPPT.0520.7/1996 Persil Nomor 55)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-496/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	346.999.000	1	346.999.000
163	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Tg. Calung, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor C.96 SPPT.0206/1994 Persil Nomor 58)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-497/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	58.105.000	1	58.105.000
164	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Tg. Lega, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor C.90 SPPT.0197/1994 Persil Nomor 57)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-498/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	62.622.000	1	62.622.000
165	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Ciungkuk, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor C.459 SPPT.0878/1994 Persil Nomor 59)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-499/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	195.327.000	1	195.327.000
166	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor SPPT 1994/05 Persil Nomor 37)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-500/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	352.875.000	1	352.875.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
167	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Cikole, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor C.505 SPPT.974/1994 Persil Nomor 60)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-501/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	152.929.000	1	152.929.000
168	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Cigombong, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor C.967 SPPT.1811.7/1996 Persil Nomor 32)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-502/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	53.690.000	1	53.690.000
169	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Cigombong, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor C.1004 SPPT.1853/1994 Persil Nomor 35)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-503/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	63.457.000	1	63.457.000
170	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Blok Ps. Gombong, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor C.565 SPPT.1066/1994 Persil Nomor 33)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-504/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	551.027.000	1	551.027.000
171	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Eks Girik Hak Milik Adat Nomor SPPT 1994/149 Persil Nomor 48)	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-505/1/KNL.0803/2025 tanggal 7 November 2025	1	-	-	355.472.000	1	355.472.000
172	CaLK (Dok Copy)	Jl. Patra Tomang I No.11	double pencatatan dengan aset PPA PRK-B002253	1	-	(1)	-	-	-
173	CaLK (Dok Copy)	Bareng, Bareng	double pencatatan dengan aset PPA PRK-0015771 yang telah Laku Lelang melalui KPKNL Malang sesuai RL No. 485/47/2022 tgl 8 Juli 2022	1	-	(1)	-	-	-
174	CaLK (Dok Copy)	PETISAH TENGAH, PETISAH TENGAH	koreksi pencatatan karena telah laku lelang dengan Risalah Lelang Nomor 336/2012 tanggal 9 Mei 2012	1	-	(1)	-	-	-
175	CaLK (Dok Copy)	PETISAH TENGAH, PETISAH TENGAH	koreksi pencatatan karena telah laku lelang dengan Risalah Lelang Nomor 336/2012 tanggal 9 Mei 2012	1	-	(1)	-	-	-
176	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Gawanan, GAWANAN	Koreksi pencatatan karena telah laku terjual pada PPAP sesuai Akta Jual Beli Nomor 318/Clm/2003	1	-	(1)	-	-	-
177	CaLK (kepemilikan tidak ada)	Gawanan, GAWANAN	Koreksi pencatatan karena telah laku terjual pada PPAP sesuai Akta Jual Beli Nomor 319/Clm/2003	1	-	(1)	-	-	-
178	CaLK (Dok Copy)	Jln. T. Cik Ditiro, Madras Hulu	Koreksi pencatatan karena double catat dengan aset BPPN kode register 03.01.02.00000808	1	-	(1)	-	-	-
179	CaLK (Dok Copy)	Jln. T. Cik Ditiro, Madras Hulu	Koreksi pencatatan karena double catat dengan aset BPPN kode register 03.01.02.00000808	1	-	(1)	-	-	-

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
180	CaLK (Dok Copy)	Jalan Pekalipan Nomor 17, Pekalipan	Koreksi pencatatan karena telah laku terjual pada masa BPPN	1	-	(1)	-	-	-
181	CaLK (tidak ada Keterangan)	Jalan Permata Timur Raya Blok B Kav No 1, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Jakarta V Nomor LP-0272/1/KNL.0705/2025 tanggal 5 Desember 2025	1	-	-	4.593.791.000	1	4.593.791.000
182	CaLK (Dok Copy)	Jalan Hasanuddin No. 7, Kel. Barru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulsel	Dicatatkan pada Neraca, selanjutnya dilakukan serah kelola ke LMAN sesuai Kepdirjen No. KEP-134/KN/2025 dan BAST Nomor BA-46/KN.4/2025 tanggal 24 Desember 2025	-		-	-	-	-
1. Jumlah Mutasi Pada *Face* Laporan				**114**	**301.872.468.888**	**(46)**	**1.033.629.230.498**	**68**	**1.335.501.699.386**
2. Jumlah Mutasi Pada CaLK				**104**	**14.037.709.000**	**(20)**	**71.712.129.000**	**84**	**85.749.838.000**
TOTAL				**218**	**315.910.177.888**	**(66)**	**1.105.341.359.498**	**220**	**2.756.753.236.772**

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
1	BIRA	RUMAH	JAWA BARAT	BOGOR	JL. CENDERAWASIH RT 4 RW 06 NO. 32 DS. CIPAYUNG	1.670	471	SHM	571.512.000	1
2	DAGANG INDUSTRI	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	KEL.KALI SARI KEC. PASAR REBO JAKTIM (JL. KAMPUNG KALI SARI RT 007/02)	955	300	SHM	418.000.000	1
3	DANAMON	RUMAH	LAMPUNG	PRINGSEWU	JL. WISMA RINI PRINGSEWU LAMPUNG SELATAN	1.263	1.200	SHM	71.850.000	1
4	DANAMON	RUMAH	LAMPUNG	PRINGSEWU	JL. SUDIRMAN NO.21/40 PRINGSEWU LAMPUNG SELATAN	1.046	1.000	SHM	71.500.000	2
5	BDNI	TANAH	JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. TANAH JAJAR TUNGGAL KEC. KARANG PILANG	3.705	-	SHM	-	1
6	PESONA	RUMAH	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL. PEKUBURAN KEL PETISAH TENGAH KEC.MEDAN BARAT, MEDAN	524	-	SHGB	1.323.006.484	1
7	DANAMON	RUMAH	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. SUKARNO HATTA GG. H AKWIN KEL KOPO	362		SHM	40.000.000	1
8	SUBENTRA	RUKO	JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. INDUSTRI RAYA NO. 3 (D/A. JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 8 BLOK B 10, GUNUNG SAHARI UTARA	68	-	HGB	2.871.000.000	1
9	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	DS TEGAL LEGA , TELUK JAMBE - KARAWANG	4.255	-	SHM	-	1
10	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	DS TEGAL LEGA , TELUK JAMBE - KARAWANG	3.560	-	SHM	640.800.000	1
11	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	DS TEGAL LEGA , TELUK JAMBE - KARAWANG	1.075	-	SHM	193.500.000	1
12	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	5.145	-	SHM	874.650.000	1
13	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	4.715	-	SHM	848.700.000	1
14	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	3.695	-	SHM	665.100.000	1
15	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	1.875	-	SHM	337.500.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
16	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	4.100	-	SHM	738.000.000	1
17	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	15.150	-	SHM	3.030.000.000	1
18	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	1.940	-	SHM	-	1
19	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	840	-	SHM	160.200.000	1
20	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	2.210	-	SHM	-	1
21	PESONA	PABRIK	BANDUNG	BANDUNG	JL. LEUWI GAJAH NO.153, DS BATUJAJAR CIMAHI BANDUNG	14.370	5.597	SHM	5.000.000.000	3
22	BUN	RUMAH	JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. VETERAN NO. 28 RT 003/06, KEL. BINTARO, KEC. KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN	881	322	SHM	14.317.731.000	1
23	PESONA	RUMAH	MAKASSAR	MAKASSAR	JL. URIP SUMOHARJO NO. 55B DESA PANAIKANG KEC. PANKUKANG, UJUNG PANDANG	412	-	SHM	204.464.067	1
24	DUTA	HOTEL	DENPASAR	DENPASAR	JL. LEGIAN NO. 188 KUTA BADUNG BALI	2.400	3.713	SHM	72.096.252.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
25	PAPAN	TANAH	BANDAR LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	JL. KELAPA KEL SEPANG JAYA KEC KEDATON BANDAR LAMPUNG (JL. KAVLINGAN)	400	-	SHM	1.136.578.000	1
26	ASPAC	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	JL. RAYA PANGKALAN KM 14 DESA WANAJAYA RT06/03	199.105	-	OTHER	37.638.209.236	37
27	ASPAC	RUMAH	JAWA BARAT	CIREBON	PERUM. PILANG PERDANA ESTATE CEREBON	120	45	SHGB	16.828.000	1
28	BUN	TANAH	SUMATERA UTARA	MEDAN	DESA SIBAGANDING	10.202	-	SHM	58.750.000	1
29	TIARA	PABRIK	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. PERSATUAN NO. 68, MELONG	1.129	800	SHM	340.925.000	2
30	BALI	PABRIK	BANTEN	TANGERANG	JL.GEMBOR RAYA DESA PASIR JAYA,JATIUWUNG	23.125	5.016	HGB & SHM	91.548.928.000	2
31	DUTA	GEDUNG	BANTEN	TANGERANG	JL. DAAN MOGOT NO. 50	650		n/a	-	1
32	BDNI	RUMAH	JAWA TENGAH	SEMARANG	JL. TEUKU UMAR NO.27,KEL KARANGREJO KEC. SEMARANG SELATAN	4.871	NA	SHM	-	1
33	BDNI	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. KH MOH. MANSYUR NO.240 B TAMBORA	113	200	HGB	5.059.300.000	1
34	BDNI	TANAH	JAWA TENGAH	REMBANG	DESA TANJUNGAN KRAGAN	10.880	-	AJB	1.455.200.000	7
35	DAGANG INDUSTRI	TANAH	JAWA BARAT	BANDUNG	PERUMAHAN VILA BUKIT MAS TAHAP II JL. BOJONG KONENG DS. CIBEUNYING KEC. CIMENYAN	15.887	-	HGB	1.500.933.521	1
36	BUN	TANAH	JAWA BARAT	SUMEDANG	BLOK KARYA BHAKTI DESA SUKAJADI WADO, SUMEDANG	23.157	-	SHM	2.227.060.000	4
37	BDNI	TANAH	BANTEN	SERANG	DESA SAWAH LUHUR, KEC. KASEMEN	4.240	-	SHM	212.000.000	1
38	BDNI	TANAH	BANTEN	SERANG	DESA SAWAH LUHUR, KEC. KASEMEN	7.115	-	SHM	355.750.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
39	BDNI	TANAH	BANTEN	SERANG	DESA SAWAH LUHUR, KEC. KASEMEN	20.450	-	SHM	2.045.000.000	1
40	TATA	TANAH	BANTEN	PANDEGLANG	BLOK CIKUJANG, DS. TANJUNG JAYA, KEC.PANIMBANGAN	19.400	-	SHM	4.609.949.317	1
41	TATA	TANAH	BANTEN	PANDEGLANG	BLOK CIKUJANG, DS. TANJUNG JAYA, KEC.PANIMBANGAN	19.500	-	SHM	253.500.000	1
42	DHARMALA	RUKO	JAWA BARAT	BEKASI	Jalan K.H. Noer Ali, Komplek Rumah Toko Bumi Satria Kencana, Kavling C-3, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	170	191	SHGB	1.308.769.000	1
43	SERVITIA	GEDUNG	BANTEN	TANGERANG	JL. KEMBANG INDAH III G3 NO. 1, KEL. PURI INDAH	200	-	HGB	3.986.679.000	1
44	BIRA	RUMAH	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. MUNDINGLAYA NO. 11 RT 005/04 BANDUNG DS. BALUBUR	442	400	SHM	698.513.966	1
45	NIAGA	GEDUNG	JAWA TIMUR	MALANG	TOKO "OEN", JL. BASUKI RAHMAT 5	1.350	842	HGB	934.850.000	1
46	DAGANG INDUSTRI	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	JL. RAYA KALIBATA NO. 4 C RT 009 / 05 KEL. CAWANG KEC. KRAMAT JATI	154	172	SHM	396.000.000	1
47	LAUTAN BERLIAN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. DR. SUSILO IV NO. 19 KEL GROGOL, KEC PETAMBURAN	275	200	HGB	407.574.066	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
48	BDNI	RUMAH	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. VANDEVENTER NO. 5 KEBON PISANG, SUMUR BATU	220	86	SHM	5.678.200.000	1
49	UNIBANK	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA UTARA	JL. PLUIT UTARA IV NO.10 BLOK J KAV.18 RT/RW 003/05, PLUIT	220	-	HGB	105.416.667	1
50	SERVITIA	RUKO	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL.PANCUR BATU NO.1A DAN 1,MEDAN	214	571	SHGB	1.260.558.000	1
51	BDNI	TANAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	JL.AP.PETTARANI PANAKUKKANG MAKASSAR	3.966	-	HGB	1.939.734.672	1
52	DANAMON	TANAH	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	JL. PALEMBANG-SEKAYU KM-14 PALEMBANG	6.160		SHM	41.130.000	1
53	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM, NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK A NO. 3, 4 , 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	6.999.177.000	1
54	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK B-3;4;5;6;7;8;11;12;13; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	7.540.654.000	1
55	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK D-7;8;9;10; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	3.189.122.000	1
56	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK E-4;5;6;7;8; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	3.631.934.000	1
57	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK F-2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 , KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	7.662.719.000	1
58	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK H-11;12;13;16;17;18; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	3.202.654.000	1
59	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK I -11;12;13;14;15;25; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	2.833.695.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
60	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK J -3 S/D J-20, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	7.662.222.000	1
61	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK K-4 & K-5; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	1.158.240.000	1
62	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK L-5;8;9;11;12;13;14 , KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	5.606.446.000	1
63	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL.NUSA INDAH BLOK H25, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	931.366.000	1
64	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL.NUSA INDAH BLOK H26, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	595.881.000	1
65	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI, JL NUSA INDAH BLOK H-27, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	548.043.000	1
66	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK H-2, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	614.675.000	1
67	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK H-5, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	669.670.000	1
68	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK I-1, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	684.017.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
69	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK I -2;3;4;5;6;7; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	4.390.978.000	1
70	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK I -17;18;19;20;21;22;23;24; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	4.057.737.000	1
71	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK K-3; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	881.485.000	1
72	MASHILL	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. HOS COKROAMINOTO NO. 67 A, JAKARTA PUSAT	272	102	HGB	892.200.000	1
73	DEWARUTJI	GEDUNG	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. S. PARMAN, JAKARTA	2.945	7.080	HGB	24.215.002.546	2
74	BALI	GEDUNG	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL.PINANGSIA TIMUR NO.22 B	162	356	HGB	779.440.000	1
75	BALI	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL.SWADARMA RAYA NO.34 SRENGSENG	145	209	SHM	168.225.000	1
76	TIARA	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. FACHRUDIN NO. 55, TANAH ABANG	85	480	HGB	1.700.000.000	1
77	BCA	TANAH	JAWA TIMUR	MALANG	LINGKUNGAN III, KEC. KLOJEN, MALANG	5.680		SHM	184.528.079	1
78	BNN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. PENGAIRAN (ADHI KARYA) NO. 24 KEDOYA SELATAN - KEBON JERUK	593	200	SHM	437.915.200	1
79	SERVITIA	RUKO	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL.PANCUR BATU NO.1 A SIDODADI MEDAN TIMUR	115	243	HGB	1.683.340.000	1
80	DHARMALA	PABRIK	BANTEN	TANGERANG	DESA KUTA JAYA, KEC. PASAR KEMIS, KAB. TANGERANG	46.540	-	SHM	10.473.230.000	9
81	CENTRAL DAGANG	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	KOMPL. RUKO KOTA GROGOL PERMAI BLOK B/10, JL. LATUMENTEN NO. 19	74	-	HGB	345.000.000	1
82	BNN	TANAH	SUMATERA BARAT	PARIAMAN	KASANG TENGAH, BATANG ANAI, PD. PARIAMAN	24.965		SHM	87.377.500	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
83	BNN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. MESJID ASSURUR GG. P1 (P - SATU) NO. 36 RT. 01 / 01, KEBUN JERUK	190	54	SHM	31.643.816	1
84	HASTIN	RUKO	BANTEN	TANGERANG	JL. PASAR KEMIS	23.775	99	HGB	285.000.000	1
85	PAPAN	RUMAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	JL.SYEH YUSUF BLOK A1 NO 9	1.449	-	SHM	-	1
86	PAPAN	RUMAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	BLOK A4 NO 4	233	63	SHM	-	1
87	PAPAN	RUMAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	BLOK D8 NO 10	108	63	SHM	46.503.967	1
88	MASHILL	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. POS PENGUMBEN RAYA RT.06/03, KEL. SRENGSENG, KEMBANGAN	4.950	-	SHM	2.741.910.463	1
89	NIAGA	TANAH	JAWA BARAT	BANDUNG	DESA BOJONG MALAKA DAN ANDIR	167.427		SHM	2.021.000.000	17
90	POS NUSANTARA	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. KRAMAT BATU NO. 7 RT. 02 / 05 - FATMAWATI , CILANDAK, GANDARIA SELATAN	298	150	SHM	108.665.000	1
91	CENTRAL DAGANG	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA UTARA	MUARA BARU, PENJARINGAN	13.970	-	HGB	212.986.620.000	1
92	SUBENTRA	TANAH	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL. TEUKU CIK DITIRO NO. 108 MADRAS HULU	3.295	-	HGB	3.707.827.258	2
93	UPPINDO	TANAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	JL. URIP SUMAHARJO, KEL. PAMPANG, KEC. PANAKUKKANG, UJUNG PANDANG	6.504	-	SHM	1.449.090.945	1
94	ASPAC	TANAH	BALI	BADUNG	JL.BATUBELIG, GEROBOKAN KUTA BADUNG	10.600	-	SHM	263.940.000.000	1
95	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D11, SURABAYA	68	-	SHGB	1.119.389.000	1
96	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D12, SURABAYA	68	-	SHGB	1.119.389.000	1
97	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D16, SURABAYA	68	-	SHGB	1.119.389.000	1
98	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D17, SURABAYA	68	-	SHGB	1.119.389.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
99	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D15, SURABAYA	68	-	SHGB	1.119.389.000	1
100	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D18, SURABAYA	68	-	SHGB	1.119.389.000	1
101	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D19, SURABAYA	68	-	SHGB	1.119.389.000	1
102	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D20, SURABAYA	68	-	SHGB	1.119.389.000	1
103	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D21, SURABAYA	68	-	SHGB	1.119.389.000	1
104	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D51, SURABAYA	68	-	SHGB	1.386.578.000	1
105	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D52, SURABAYA	68	-	SHGB	1.386.578.000	1
106	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D53, SURABAYA	68	-	SHGB	1.386.578.000	1
107	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D55, SURABAYA	68	-	SHGB	1.386.578.000	1
108	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D56, SURABAYA	68	-	SHGB	1.386.578.000	1
109	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D57, SURABAYA	68	-	SHGB	1.386.578.000	1
110	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D58, SURABAYA	68	-	SHGB	1.386.578.000	1
111	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D59, SURABAYA	68	-	SHGB	1.386.578.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
112	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D60, SURABAYA	68	-	SHGB	1.386.578.000	1
113	BUN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	JL. PEGANGSAAN II NO. 98 - KEL. PEGANGSAAN, JAKARTA	1.673	-	GIRIK	996.550.000	2
114	BUN	RUMAH	JAWA TIMUR	SIDOARJO	JL. HANGTUAH RAYA NO. 31, SIDOKLUMPUK, SIDOARJO	1.639	-	SHGB	528.819.000	1
115	ASPAC	RUMAH	JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. PATEMON BARAT NO. 95A, KEL. KUPANG KRAJAN, KEC. SAWAHAN, SURABAYA	234	294	SHGB	82.600.000	1
116	BNN	RUMAH	BALI	BADUNG	JL. DAHLIA NO. 22, KEL. TONJA	590	134	SHM	275.691.100	1
117	NIAGA	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL.INTAN UJUNG, CILANDAK	900	278	HM	548.000.000	1
118	UPPINDO	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. CIMAHI NO. 10, MENTENG, JAKARTA PUSAT	691	445	HGB	35.810.493.000	1
119	BUN	GEDUNG	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL.INDUSTRI NO. 71, DS. T. MORAWA	63.517	50.884	SHGB dan SHM	59.149.917.000	9
120	BUN	RUMAH	JAWA TENGAH	SLEMAN	JL. PALAGAN REJODANI, DS. SARIHARDJO, KEC. NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA	1.496	NA	SHM	8.493.080.000	1
121	LAUTAN BERLIAN	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	Billy dan Moon Park Kampung Tipar Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur	64.551		Surat Penyerahan Hak (SPH) dan Girik	82.237.974.000	41
122	LAUTAN BERLIAN	TANAH	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah	145.030		SHM	1.740.360.000	2
123	BIRA	TANAH	BANTEN	TANGERANG	Desa Bojong dan Budi Mulya Tangerang	858.408		Girik	37.000.000.000	583
124	BIRA	GEDUNG	BANTEN	TANGERANG	Plaza Shinta, Jalan Teuku Umar, Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten	34.753	19.208	SHM dan SHGB	343.241.566.000	2
125	BNN		BALI	GIANYAR	Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	5.150		SHM	11.306.316.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
126	Bank Nasional Komersil (d/h Bank Perniagaan)	Tanah	Jawa Timur	Surabaya	Kelurahan Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Prov Jawa Timur	111		SHM	75.000.000	1
127	Bank Umum Nasional	Tanah	Jakarta	Jakarta Utara	Jalan Pluit Karang Molek IX Nomor 11 Blok B.II Kaveling Nomor 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	187		SHGB	275.000.000	1
128	Bank Perniagaan	Tanah	Sulawesi Selatan	Makassar	Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.099		SHM	71.435.000	1
129	PT. Overseas Express Bank	Gedung	SUMATERA UTARA	MEDAN	Jl. Pemuda No. 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.	782	2.205	SHGB	22.392.198.000,00	2
130	PT Continental Bank (Bank Dana Asia)	Ruko	SUMATERA UTARA	MEDAN	Jalan Medan-Binjai, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	60	180	SHGB	561.695.000	1
131	PT. Bank Dagang Nasional Indonesia	Villa	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	Jl. Sirna Galih No. 3 RT 2 RW 1, Desa Megamendung, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, MEGAMENDUNG	2.093	141	SHGB	1.932.692.000	1
132	JAYA	TANAH	BANTEN	KOTA TANGERANG	GRAHA BINTARO Blok G 04 No 07 Paku Ja	126	-	SHGB	60.563.153	1
133	JAYA	TANAH	BANTEN	KOTA TANGERANG	GRAHA BINTARO Blok GR.03 No 86 Pondo	130	-	SHGB	1.095.677.000	1
						2.566.916	**103.994**		**1.491.264.666.023** *	**843**

*) Selisih Rp1 karena pembulatan

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
1	03.01.02.00000843	Meunasah Blang	ACEH UTARA	DISTA ACEH	SHM	1	1.508	-	39.800.000
2	03.01.02.00000845	Polonia	MEDAN	SUMATERA UTARA	SHGB	1	876	-	29.269.350.000
3	03.01.02.00000846	Jl. Kebon Sirih	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	SHM	1	972	-	503.200.000
4	03.01.02.00000847	Jalan HM.Saleh	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	SHM	1	117.845	-	57.737.900.000
5	03.01.02.00000848	Jalan Kartini,Pringsewu	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG	SHM	1	679	-	631.700.000
6	03.01.02.00000849	Lemb. 3 Kt. E/5, Tanjungkarang, Tanjungkarang-Telukbetung, Telukbetung Utara, Sumur Batu	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	SHM	1	12.544	-	9.865.000.000
7	03.01.02.00000850	Jl. Haji Salim RT/RW 008/06	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHM	1	500	-	1.185.600.000
8	03.01.02.00000851	Guntur	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHM	1	330	-	3.203.700.000
9	03.01.02.00000852	Gg. Buntuk (Kp.Rambutan)	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	Hak Pakai	1	119	-	181.200.000
10	03.01.02.00000853	Jalan H Murtadho Gang VI	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHM	1	225	-	691.800.000
11	03.01.02.00000854	Kalideres Village Kav Blok C 6 persil No.18	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	189	-	674.600.000
12	03.01.02.00000855	Komp.Kali Deres Permai Blok G 1 No.12	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	299	-	1.067.200.000
13	03.01.02.00000856	Komp.Kalideres Permai Blok C 8 No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	430	-	1.534.700.000
14	03.01.02.00000857	Komp.Kalideres Permai Blok G 1 No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	299	-	1.067.200.000
15	03.01.02.00000858	Kalideres Permai Village PT Duta Anggada Blok B 4	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.033	-	2.069.200.000
16	03.01.02.00000859	Kalideres Permai Village PT Duta Anggada Blok B 4	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	913	-	2.327.600.000
17	03.01.02.00000860	Kalideres Village Blok C 6 Kav No.11	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	236	-	842.300.000
18	03.01.02.00000861	Kalideres Village Blok C 8 Kav No.12	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	256	-	913.700.000
19	03.01.02.00000862	Kalideres Village Blok H.5 No.8	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	-	638.908.000
20	03.01.02.00000863	Komp Kali Deres Permai Blok G4 Kav.No.7	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	145	-	773.460.000
21	03.01.02.00000864	Komp Kali Deres Permai Blok H 3 Kav.No.10	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	-	781.100.000
22	03.01.02.00000865	Komp Kalideres Permai	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	237	-	820.000.000
23	03.01.02.00000866	Komp Kalideres Permai	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.281	-	3.499.000.000
24	03.01.02.00000867	Komp Kalideres Village Blok H 3 Kav No.6	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	165	-	588.900.000
25	03.01.02.00000868	Komp Kalideres Village Blok H 5 Kav No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	143	-	510.400.000
26	03.01.02.00000869	Komp Kalideres Village Blok H.3 Kav No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	-	638.900.000
27	03.01.02.00000870	Komp Kalideres Village Blok H.5 Kav. No 9	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	-	809.540.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
28	03.01.02.00000871	Komp Perum Kalideres Permai Blok G 2 No.11	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	150	-	677.600.000
29	03.01.02.00000872	-	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	150	-	227.500.000
30	03.01.02.00000873	Jalan Semanan	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	1.203	-	1.563.900.000
31	03.01.02.00000874	Jalan Daan Mogot II No. 23	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	88	-	1.237.500.000
32	03.01.02.00000875	Tomang Barat Blok P Kaveling Nomor 460	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	180	-	753.423.000
33	03.01.02.00000876	Meruya Udik	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	4.924		738.600.000
34	03.01.02.00000877	Jln.Utan Jati-Perumahan Citra 2 blok. I/6	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	8.295	-	20.768.600.000
35	03.01.02.00000878	Perumahan Citra 2 Blok. I/6	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.015	-	2.541.300.000
36	03.01.02.00000879	PEGADUNGAN RT.005/011	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	600	-	604.800.000
37	03.01.02.00000880	Perkavelingan Dep.Hankam.Blok.L.1.Kav.no.18	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	272	-	686.900.000
38	03.01.02.00000881	Jalan Nuh no 43 Rt 005/05	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	Hak Pakai	1	400	-	1.200.000.000
39	03.01.02.00000882	Kemanggisan Pulo RT 02/RW 11	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	305		1.235.790.000
40	03.01.02.00000883	Kampung Malaka RT 009/05	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHM	1	1.625	-	896.900.000
41	03.01.02.00000884	-	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	67	-	1.389.000.000
42	03.01.02.00000885	Jalan Bumi Asih V Blok A No.6 Kav.22 Perum. Bumi Karang Indah	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	180	134	1.028.380.000
43	03.01.02.00000886	-	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.560	-	17.670.600.000
44	03.01.02.00000887	-	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	4.727	-	41.156.300.000
45	03.01.02.00000888	Jl. Swadarma Raya No.58	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHM	1	1.320	-	17.062.853.000
46	03.01.02.00000889	Jalan Komp. Tanjung Barat Indah Blok. O Kav. No.11	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	210	-	1.236.580.000
47	03.01.02.00000890	Gang Eddy III/9 Rt 014/06	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	Girik	1	215	-	1.843.600.000
48	03.01.02.00000891	Jl. Tebet Dalam I.J RT 004/01	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	140	-	1.312.400.000
49	03.01.02.00000892	Komplek Perumahan Bukit Permai Cibubur Jalan O. RT/RW 004/11	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	300	-	1.014.000.000
50	03.01.02.00000893	Kel. Pondok Kelapa Blok C2 No. 4	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	220	-	1.070.300.000
51	03.01.02.00000894	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	312	-	2.841.200.000
52	03.01.02.00000895	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	212	-	

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
53	03.01.02.00000896	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	316	-	
54	03.01.02.00000897	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	128	-	
55	03.01.02.00000898	Jl. Mundu III No. 3 RT. 012/04	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	722	-	1.467.100.000
56	03.01.02.00000899	Komp. Pertamina Blok U, Kav. No. 475 dan No. 476 Jl. Jl. Mundu II No. 4, RT. 0012/04 Blok H, Persil 474+476	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	362	-	2.073.100.000
57	03.01.02.00000900	Jl Ir.H.Juanda II, No.5.A	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	304	-	1.517.000.000
58	03.01.02.00000902	JalanPatrice Lumuba	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	123	-	2.658.000.000
59	03.01.02.00000903	JALAN BAMBU BETUNG I NO. 10	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	150	-	414.200.000
60	03.01.02.00000904	Perumahan Citra Garden 2 Blok I.1 No.16	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	90	-	1.050.000.000
61	03.01.02.00000905	-	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	2.715	-	4.472.900.000
62	03.01.02.00000906	Jl. Madu No.4A RT 005/03	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	382	-	6.915.956.000
63	03.01.02.00000907	Jl. Pinangsia I No.14 Rt 012/Rw 05	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	32	-	1.100.382.000
64	03.01.02.00000908	Jalan Kelapa Molek VII Blok NI No.17	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	90	-	595.900.000
65	03.01.02.00000909	Jl Pademangan Timur No. 7 Blok C Rt 0014/01	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	141	-	934.180.000
66	03.01.02.00000910	Desa Sunter Jaya	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	78	-	1.735.100.000
67	03.01.02.00000911	Pasar Regional Jatinegara	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SIPTB	1	-	9	487.100.000
68	03.01.02.00000912	Rusun Taman Kemayoran Condominium Lt.VIII Blok.C Blok A.I	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHMSRS	1	-	90	856.633.000
69	03.01.02.00000913	Tower Bougenville	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHMSRS	1	-	90	856.633.000
70	03.01.02.00000914	Pasar Regional Tanah Abang Blok A, Lantai L01, Los CKS, No. 016	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SIPTB	1	-	4	960.300.000
71	03.01.02.00000915	Blok C lantai dasar Pasar Grogol	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	Lainnya (Non Tanah dan/atau Bangunan)	1	-	-	36.000.000
72	03.01.02.00000916	Jl. Taman Sari VIII/90 RT/RW 006/06	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SIPTB	1	-	4	750.000.000
73	03.01.02.00000917	Desa Sorongan	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	7.259.700.000
74	03.01.02.00000918	Desa Sorongan	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
75	03.01.02.00000919	Blok : Pamatang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
76	03.01.02.00000920	Blok Pamatang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
77	03.01.02.00000921	Blok Pamatang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
78	03.01.02.00000922	Blok Pamatang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
79	03.01.02.00000923	Blok Pematang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
80	03.01.02.00000924	Desa Sorongan	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
81	03.01.02.00000925	Sorongan Rt.000 rw.00	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
82	03.01.02.00000926	Pagelaran	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	157	-	2.200.000
83	03.01.02.00000927	Pagelaran	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	10.490	-	743.200.000
84	03.01.02.00000928	Pandeglang	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	14.293	-	644.400.000
85	03.01.02.00000929	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	10.830	-	315.400.000
86	03.01.02.00000930	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	14.665	-	
87	03.01.02.00000931	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	2.405	-	
88	03.01.02.00000932	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	6.840	-	
89	03.01.02.00000933	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	3.154	-	
90	03.01.02.00000934	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	4.405	-	
91	03.01.02.00000935	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	4.750	-	
92	03.01.02.00000936	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	3.265	-	
93	03.01.02.00000937	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	8.280	-	
94	03.01.02.00000938	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	9.105	-	
95	03.01.02.00000939	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	19.320	-	
96	03.01.02.00000940	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	12.250	-	
97	03.01.02.00000941	-	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	1.560	-	278.000.000
98	03.01.02.00000942	Cipayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	280		268.200.000
99	03.01.02.00000943	RT VIII/5	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	8.112	-	9.543.700.000
100	03.01.02.00000944	KEDAUNG	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	58		52.700.000
101	03.01.02.00000945	Desa Wanakerta	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	5.955	-	483.000.000
102	03.01.02.00000946	desa Wanakerta	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	4.014	-	311.500.000
103	03.01.02.00000947	pengarengan	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	3.585	-	170.100.000
104	03.01.02.00000948	Gaga	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	2.130	-	962.800.000
105	03.01.02.00000949	Kiarapayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	1.840	-	4.404.100.000
106	03.01.02.00000950	Kiarapayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	5.210	-	
107	03.01.02.00000951	Kiarapayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	2.685	-	
108	03.01.02.00000952	Desa Karang Suraga	SERANG	BANTEN	SHGB	1	110.387	-	5.640.800.000
109	03.01.02.00000953	Desa Karang Suraga	SERANG	BANTEN	SHGB	1	1.810	-	294.600.000
110	03.01.02.00000954	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	5.901	-	11.840.500.000
111	03.01.02.00000955	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	3.515	-	
112	03.01.02.00000956	Desa Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	173.366	-	
113	03.01.02.00000957	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	20.187	-	
114	03.01.02.00000958	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	110.187	-	
115	03.01.02.00000959	Desa Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	39.678	-	
116	03.01.02.00000960	-	SERANG	BANTEN	SHM	1	14.400	-	2.162.900.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
117	03.01.02.00000961	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	92	-	379.100.000
118	03.01.02.00000962	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	84	-	519.100.000
119	03.01.02.00000963	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	87	-	537.700.000
120	03.01.02.00000964	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	91	-	562.400.000
121	03.01.02.00000965	Blok E.3/2	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	315	-	489.500.000
122	03.01.02.00000966	Blok F.1/52	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	149	-	378.300.000
123	03.01.02.00000967	Blok F.1/52	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	92	-	
124	03.01.02.00000968	Blok F.1/71	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	380	-	771.200.000
125	03.01.02.00000969	Blok F.1/71	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	130	-	
126	03.01.02.00000970	Kroncong	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	15.070	-	3.621.900.000
127	03.01.02.00000971	Kroncong	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	445	-	
128	03.01.02.00000972	Jalan Gading Golf Timur No.89	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	1.025	-	15.986.664.000
129	03.01.02.00000973	Pondok Kacang Timur	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	91	-	284.100.000
130	03.01.02.00000974	Perumahan Villa Bintaro Regency Blok G No.15	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	153	-	306.400.000
131	03.01.02.00000975	Blok DC 8/2	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	137	-	695.800.000
132	03.01.02.00000976	-	SERANG	BANTEN	SHGB	1	235	-	9.500.000
133	03.01.02.00000977	Batujaya	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHM	1	130	-	168.200.000
134	03.01.02.00000978	Blok: A.5/12	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	144	70	258.400.000
135	03.01.02.00000979	Bojong Rt.01 Rw.01	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHM	1	410	249	662.800.000
136	03.01.02.00000980	Kp. Pulo 004/08	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	Girik	1	2.000	-	236.000.000
137	03.01.02.00000981	Kalisuren	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	3.640	-	364.000.000
138	03.01.02.00000982	Blok 07 desa karadenan	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	Girik	1	1.550	-	145.500.000
139	03.01.02.00000983	Desa Karadenan Blok 007 Rt.01/ Rw.07	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	7.687	-	8.156.500.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
140	03.01.02.00000984	Blok Ciherang	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.460	-	292.000.000
141	03.01.02.00000985	Cilember	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.624	-	158.700.000
142	03.01.02.00000986	Cilember	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	660	-	69.100.000
143	03.01.02.00000987	Cilember	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	3.410	-	347.000.000
144	03.01.02.00000988	-	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.145	-	684.000.000
145	03.01.02.00000989	Cibuluh	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	Girik	1	4.460	-	437.500.000
146	03.01.02.00000990	Kapling Blok K/18	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	671	-	4.423.718.000
147	03.01.02.00000991	Desa Bedahan, Kec. Sawangan	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.435	-	215.250.000
148	03.01.02.00000992	-	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	1.600	-	948.600.000
149	03.01.02.00000993	-	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	3.830		
150	03.01.02.00000994	-	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	2.010		
151	03.01.02.00000995	Blok Cipanggulan	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	11.230	-	1.048.600.000
152	03.01.02.00000996	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	953.485	-	27.343.000.000
153	03.01.02.00000997	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	551.585		
154	03.01.02.00000998	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.344.025		
155	03.01.02.00000999	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.026.720		
156	03.01.02.00001000	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	652.490		
157	03.01.02.00001001	Cipendawa	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	104	-	136.700.000
158	03.01.02.00001002	Kav C-6 Nomor 10	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	114	-	133.300.000
159	03.01.02.00001003	VILLA YASMIN	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	56	-	78.500.000
160	03.01.02.00001004	VILLA YASMIN	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	10	-	13.500.000
161	03.01.02.00001005	Blok Gunung Batu	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	10.000	-	37.000.000
162	03.01.02.00001006	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.210	-	1.209.000.000
163	03.01.02.00001007	Desa Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.500		
164	03.01.02.00001008	Desa Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.480		
165	03.01.02.00001009	Desa Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	405		
166	03.01.02.00001010	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.730		
167	03.01.02.00001011	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	650		
168	03.01.02.00001012	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.400		
169	03.01.02.00001013	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.050		

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
170	03.01.02.00001014	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.910		
171	03.01.02.00001015	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.870		
172	03.01.02.00001016	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.200		
173	03.01.02.00001017	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.350		
174	03.01.02.00001018	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.120		
175	03.01.02.00001019	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	950		
176	03.01.02.00001020	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.520		
177	03.01.02.00001021	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.540		
178	03.01.02.00001022	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	10.800		
179	03.01.02.00001023	Desa Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.315		
180	03.01.02.00001024	Desa Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.325		
181	03.01.02.00001025	Desa Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.290		
182	03.01.02.00001026	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	300		
183	03.01.02.00001027	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	550		
184	03.01.02.00001028	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.100		
185	03.01.02.00001029	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.560		
186	03.01.02.00001030	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.420		
187	03.01.02.00001031	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	800		
188	03.01.02.00001032	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.410		
189	03.01.02.00001033	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	980		
190	03.01.02.00001034	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	565		
191	03.01.02.00001035	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	480		
192	03.01.02.00001036	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	720		
193	03.01.02.00001037	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.180		
194	03.01.02.00001038	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.830		
195	03.01.02.00001039	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.340		
196	03.01.02.00001040	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.730		
197	03.01.02.00001041	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.760		
198	03.01.02.00001042	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.070		
199	03.01.02.00001043	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.650		
200	03.01.02.00001044	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.070		
201	03.01.02.00001045	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.430		
202	03.01.02.00001046	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	3.240		
203	03.01.02.00001047	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	4.030		
204	03.01.02.00001048	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.340		
205	03.01.02.00001049	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.010		

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
206	03.01.02.00001050	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.440		
207	03.01.02.00001051	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.010		
208	03.01.02.00001052	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.800	-	465.000.000
209	03.01.02.00001053	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.155		-
210	03.01.02.00001054	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	2.495	-	348.376.775
211	03.01.02.00001055	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	34.450		1.138.518.519
212	03.01.02.00001056	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	8.390		1.171.495.448
213	03.01.02.00001057	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	16.800		1.353.189.642
214	03.01.02.00001058	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	1.560		51.555.556
215	03.01.02.00001059	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	7.280		1.016.506.182
216	03.01.02.00001060	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	17.260		570.415.954
217	03.01.02.00001061	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	5.320		742.831.440
218	03.01.02.00001062	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	8.560		1.007.862.201
219	03.01.02.00001063	Desa Lemah Mulya	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	7.810		1.090.510.066
220	03.01.02.00001064	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	2.395		468.932.000
221	03.01.02.00001065	Klari	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	899	-	
222	03.01.02.00001066	Sumur Kondang	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	3.445		
223	03.01.02.00001067	Sumur Kondang	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	890		
224	03.01.02.00001068	Babakan	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	2.180		
225	03.01.02.00001069	Babakan	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	900		
226	03.01.02.00001070	Babakan	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	795		
227	03.01.02.00001071	Klari	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	5.990		
228	03.01.02.00001072	Sumur Kondang	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	2.740		
229	03.01.02.00001073	Kampung Jatimulya	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	7.830	-	861.000.000
230	03.01.02.00001074	Pahlawan Setia	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	8.700	-	1.679.000.000
231	03.01.02.00001075	Desa Telajung	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	4.655	-	1.282.000.000
232	03.01.02.00001076	cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	978	-	1.350.000.000
233	03.01.02.00001077	Cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	1.004		
234	03.01.02.00001078	Cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	2.477		
235	03.01.02.00001079	Cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	747		

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
236	03.01.02.00001080	KAYURINGIN JAYA	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	136	-	186.000.000
237	03.01.02.00001082	Katulampa Blok N No.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.050	-	7.078.882.000
238	03.01.02.00001083	Katulampa Blok N No.15	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.119	-	7.539.796.000
239	03.01.02.00001084	Blok I.1 No.5	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	682	-	4.611.794.000
240	03.01.02.00001085	Blok I.1 no.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	671	-	4.537.686.000
241	03.01.02.00001086	Blok I.1 No.8	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	682	-	4.611.794.000
242	03.01.02.00001087	Blok I.3 No.17	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	276	-	1.746.233.000
243	03.01.02.00001088	Blok I.3 No.18	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	282	-	1.784.164.000
244	03.01.02.00001089	Blok I.3 No.19	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	290	-	1.834.738.000
245	03.01.02.00001090	Blok I.3 No.20	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	-	1.841.059.000
246	03.01.02.00001091	Blok I.3 No.22	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	-	1.841.059.000
247	03.01.02.00001092	Blok I.3 No.23	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	-	1.841.059.000
248	03.01.02.00001093	Blok I.3 No.23A	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	294	-	1.860.024.000
249	03.01.02.00001094	Blok I.3 No.25	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	-	1.841.059.000
250	03.01.02.00001095	Blok I.3 No.26	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	294	-	1.860.024.000
251	03.01.02.00001096	TH XII No.10	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	188	-	1.189.755.000
252	03.01.02.00001097	TH XII No.11	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	162	-	1.025.289.000
253	03.01.02.00001098	TH XII No.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	167	-	1.056.919.000
254	03.01.02.00001099	TH XII No.12 A	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	173	-	1.094.874.000
255	03.01.02.00001100	TH XII No.12 B	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	217	-	1.373.170.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
256	03.01.02.00001101	TH XII No.8	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	161	-	1.018.963.000
257	03.01.02.00001102	-	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	340	-	34.000.000
258	03.01.02.00001103	Perumahan Taman Raflesia C-3	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	SHGB	1	155	-	305.700.000
259	03.01.02.00001104	-	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	SHM	1	295	-	590.000.000
260	03.01.02.00001105	Bantar Gebang	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	111	-	222.480.000
261	03.01.02.00001106	Jakasetia	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	120	-	319.720.000
262	03.01.02.00001107	Kav. No.G-11	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	250	-	573.680.000
263	03.01.02.00001108	Kav. No.G-7	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	233	-	514.960.000
264	03.01.02.00001109	Jati Kramat	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	11.781	-	9.223.000.000
265	03.01.02.00001110	Jatimekar	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	400	-	427.000.000
266	03.01.02.00001111	Kampung Jatiasih	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	600	-	682.000.000
267	03.01.02.00001112	Jatimekar	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	955	-	1.009.000.000
268	03.01.02.00001113	Margahayu	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	900	-	666.000.000
269	03.01.02.00001114	Pengasinan	DEPOK	JAWA BARAT	SHM	1	495	-	67.600.000
270	03.01.02.00001115	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	-	379.700.000
271	03.01.02.00001116	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	-	379.700.000
272	03.01.02.00001117	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	-	379.700.000
273	03.01.02.00001118	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	-	379.700.000
274	03.01.02.00001119	Kopo	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	185	-	59.500.000
275	03.01.02.00001120	-	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.015	-	1.770.580.000
276	03.01.02.00001121	Perumahan Citra Indah Blok D-10, Kav No. 15	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	135	88	145.820.000
277	03.01.02.00001122	Kapling Blok K/28	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.097	-	7.392.895.000
278	03.01.02.00001123	Tanah Baru	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	25.020	-	138.718.539.000
279	03.01.02.00001124	KOMPLEK GREEN HILL BLOK D 2 NO. 3	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	638	-	336.200.000
280	03.01.02.00001125	Rengasdengklok Selatan	KARAWANG	JAWA BARAT	SHGB	1	50	-	104.000.000
281	03.01.02.00001126	No. Kav A.9-6	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	85	-	335.000.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
282	03.01.02.00001127	-	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	518	-	733.000.000
283	03.01.02.00001128	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	1.864.773.000
284	03.01.02.00001129	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	3.991.500.000
285	03.01.02.00001130	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	46.420.735.000
286	03.01.02.00001131	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	4.540.191.000
287	03.01.02.00001132	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	101.276.000
288	03.01.02.00001133	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	386.141.000
289	03.01.02.00001134	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	204.474.000
290	03.01.02.00001135	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	106.945.000
291	03.01.02.00001136	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	1.850.912.000
292	03.01.02.00001137	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	139.354.000
293	03.01.02.00001138	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	514.800.000
294	03.01.02.00001139	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	109.985.000
295	03.01.02.00001140	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	632.900.000
296	03.01.02.00001141	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	638.901.000
297	03.01.02.00001142	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	1.147.950.000
298	03.01.02.00001143	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	434.535.000
299	03.01.02.00001144	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	270.418.000
300	03.01.02.00001145	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	470.731.000
301	03.01.02.00001146	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	2.048.508.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
302	03.01.02.00001147	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	33.885	-	108.645.022.000
303	03.01.02.00001148	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	207.261.642.000
304	03.01.02.00001149	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	29.193.564.000
305	03.01.02.00001150	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	2.943.000.000
306	03.01.02.00001151	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	3.752.377.000
307	03.01.02.00001152	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	683.616.000
308	03.01.02.00001153	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	995.698.000
309	03.01.02.00001155	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	880.472.000
310	03.01.02.00001156	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	2.354.949.000
311	03.01.02.00001157	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	3.312.025.000
312	03.01.02.00001158	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	4.805.860.000
313	03.01.02.00001159	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	926.100.000
314	03.01.02.00001160	Katulampa Blok A/6	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	7.846	-	42.979.496.000
315	03.01.02.00001161	Katulampa Blok C.3 No.3	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	18.107	-	110.830.194.000
316	03.01.02.00001162	Blok I.6 No.17	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	259	-	1.638.753.000
317	03.01.02.00001163	Blok I.3 No.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	316	-	1.999.086.000
318	03.01.02.00001164	Blok I.3 No.3A	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	298	-	1.885.309.000
319	03.01.02.00001166	Blok I.6 No.18	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	256	-	1.619.785.000
320	03.01.02.00001167	Blok I.6 No.19	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	235	-	1.600.816.000
321	03.01.02.00001168	Blok I.6 No.20	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	255	-	1.613.462.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
322	03.01.02.00001169	Blok I.6 No.21	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	409	-	2.586.748.000
323	03.01.02.00001170	Blok I.6 No.23	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	252	-	1.594.493.000
324	03.01.02.00001171	Blok. TH. VII No.5	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	185	-	1.170.779.000
325	03.01.02.00001172	Blok. TH. VIII No.2	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	185	-	1.170.779.000
326	03.01.02.00001173	Cihampar	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	129.130	-	351.796.644.000
327	03.01.02.00001174	TH XII No.9	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	202	-	1.278.304.000
328	03.01.02.00001176	Jakasetia	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	173	-	493.000.000
329	03.01.02.00001177	Kav. No. L - 3	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	175	-	416.000.000
330	03.01.02.00001178	Bojong Rawa Lumbu Nomor 149	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	390	105	465.000.000
331	03.01.02.00001179	Desa/Kelurahan Bojong Rawalumbu	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	105	-	
332	03.01.02.00001180	-	DEPOK	JAWA BARAT	SHGB	1	34.100	-	32.705.300.000
333	03.01.02.00001182	Jatingaleh	KAB. SEMARANG	JAWA TENGAH	SHM	1	4.871	-	2.472.032.500
334	03.01.02.00001183	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	6.700	-	43.500.000
335	03.01.02.00001184	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	6.700	-	
336	03.01.02.00001185	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	6.700	-	
337	03.01.02.00001186	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	1.470	-	
338	03.01.02.00001187	-	PASURUAN	JAWA TIMUR	SHM	1	2.515	-	679.100.000
339	03.01.02.00001188	Benoa	BADUNG	B A L I	SHM	1	33.150	-	2.984.000.000
340	03.01.02.00001189	Benoa	BADUNG	B A L I	SHM	1	53.100	-	4.779.000.000
341	03.01.02.00001190	Aikmel	LOMBOK TIMUR	NUSA TENGGARA BARAT	SHM	1	3.856	-	11.600.000
342	03.01.02.00001191	Kuala Mandor A	PONTIANAK (KAB)	KALIMANTAN BARAT	SHM	1	120.020	-	512.820.000
343	03.01.02.00001192	Kuala Mandor B	PONTIANAK (KAB)	KALIMANTAN BARAT	SHM	1	170.940	-	2.558.800.000
344	03.01.02.00001193	RT .1 Gunung Ulin	KOTA BARU	KALIMANTAN SELATAN	SHM	1	5.566	-	43.100.000
345	03.01.02.00001194	Pematang Panjang	BANJAR	KALIMANTAN SELATAN	SHM	1	19.998	-	329.100.000
346	03.01.02.00001195	-	KOTA BARU	KALIMANTAN SELATAN	SHM	1	300	-	176.820.000
347	03.01.02.00001196	Jalan Gunung Lokon No. 8, Kel. Wanea, Kec. Wanea	MANADO	SULAWESI UTARA	SHM	1	315	-	731.092.000
348	03.01.02.00001197	SUKA SARI PLAZA JL. SILIWANGI NO. 31 RUKO NO. 8 SUKASARI	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	77	220	231.937.036

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
349	03.01.02.00001198	JL. RAYA TAMAN CIMANGGU PERIKANAN BOGOR RT 01/05	BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	261	1.025	127.459.550
350	03.01.02.00001199	KOMP TMN YASMIN, JL. SEROJA I NO 4	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	162	96	125.000.000
351	03.01.02.00001200	PERUM BUKIT CIMANGGU BLOK M I NO. 18	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	380	250	340.806.526
352	03.01.02.00001201	TAMAN BARANANGSIANG INDAH BLOK P3 NO. 2	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	140	138	119.249.490
353	03.01.02.00001202	PERUM PAKUAN 2 JL. DAHLIA II NO. 11	BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	126	174	320.272.500
354	03.01.02.00001203	VILLA GREEN APPLE GARDEN T-3	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	225	116	211.493.267
355	03.01.02.00001204	PERUM ARCO JL. RAYA ARCO NO. 11 BLOK B24	DEPOK	JAWA BARAT	SHM	1	775	174	118.000.000
356	03.01.02.00001205	Kompek Ruko Merdeka Mall No.3 dan 3A Jl. Merdeka	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	2	170		1.555.253.000
357	03.01.02.00001208	JL.PENEGAK RT 0010/02 PAL MERIAM MATRAMAN JAKARTA TIMUR	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.498		16.938.800.000
358	03.01.02.00001209		Bekasi	JAWA BARAT	SHM	1	7.900		
359	03.01.02.00001210		Bekasi	JAWA BARAT	SHM	1	2.010		
360	03.01.02.00001643		Jakarta Barat	DKI JAKARTA	SHGB	1	113.408		549.459.345.424
Jumlah						**361**			**2.196.453.692.076**

BJDA (VERIFIKASI 2009)

No	No. Register	Alamat pada Bukti Kepemilikan	Luas (m2)		Nilai Wajar (Rp)	Jumlah dok. kepemilikan
			Tanah	Bangunan		
1	03.01.02.00001211	Jl. Semangka Raya, Grogol Petamburan, Jakbar	357	192	1.925.687.000	1
2	03.01.02.00001212	Jl. Lingkar Luar Komp. Greenhill Permata	83	648	688.972.000	1
3	03.01.02.00001213	Jl. Letjen S. Parman Tanjung Duren Grogol	3.196		210.425.000.000	1
4	03.01.02.00001214	Menteng Jakpus	1.041	205	12.726.398.000	1
5	03.01.02.00001215	Jl. KH. Agus Salim Kebon Sirih Menteng	746		7.341.648.000	1
6	03.01.02.00001216	Kalideres Jakarta Barat	143		200.343.000	1
7	03.01.02.00001217	Kalideres Jakarta Barat	195		267.150.000	1
8	03.01.02.00001218	Kalideres Jakarta Barat	87		116.928.000	1
9	03.01.02.00001219	Kalideres Jakarta Barat	240		354.960.000	1
10	03.01.02.00001220	Kalideres Jakarta Barat	87		116.928.000	1
11	03.01.02.00001221	Kalideres Jakarta Barat	179		245.588.000	1
12	03.01.02.00001222	Kalideres Jakarta Barat	165		226.380.000	1
13	03.01.02.00001223	Kalideres Jakarta Barat	145		207.205.000	1
14	03.01.02.00001224	Kalideres Jakarta Barat	143		204.490.000	1
15	03.01.02.00001225	Kalideres Jakarta Barat	240		354.960.000	1
16	03.01.02.00001226	Jl. Jenderal A. Yani No. 74 Kesawan Medan	443	440	19.518.897.179	1
17	03.01.02.00001227	Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan, Sumut	581	581	11.563.989.000	1
18	03.01.02.00001228	Melawai, Kebayoran Baru, Jaksel	379	300	5.730.910.000	1
19	03.01.02.00001229	Jl. Palatahan, Melawai, Kebayoran Baru	379	550	6.612.462.000	1
20	03.01.02.00001230	Bukit Duri, Tebet, Jaksel	286	201	2.442.551.000	1
21	03.01.02.00001231	Jl. Iskandar Muda Jaksel	283	280	14.642.111.000	1
22	03.01.02.00001232	Pejagalan Penjaringan Jakut	74	74	532.892.000	1
23	03.01.02.00001233	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	45.150		146.573.000	1
24	03.01.02.00001234	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	15.960		50.820.000	1
25	03.01.02.00001235	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	40.310		130.861.000	1
26	03.01.02.00001236	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	14.550		44.437.000	1
27	03.01.02.00001237	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	15.180		46.361.000	1
28	03.01.02.00001238	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	18.180		58.057.000	1
29	03.01.02.00001239	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	28.940		93.346.000	1
30	03.01.02.00001240	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	65.690		213.253.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2009)

No	No. Register	Alamat pada Bukti Kepemilikan	Luas (m2)		Nilai Wajar (Rp)	Jumlah dok. kepemilikan
			Tanah	Bangunan		
31	03.01.02.00001241	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	22.230		117.962.000	1
32	03.01.02.00001242	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	9.340		28.525.000	1
33	03.01.02.00001243	Kalideres Jakarta Barat	143		166.566.000	1
34	03.01.02.00001244	Kalideres Jakarta Barat	179		212.222.000	1
35	03.01.02.00001245	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000	1
36	03.01.02.00001246	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000	1
37	03.01.02.00001247	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000	1
38	03.01.02.00001248	Kalideres Jakarta Barat	768		998.400.000	1
39	03.01.02.00001249	Kalideres Jakarta Barat	318		386.529.000	1
40	03.01.02.00001250	Kalideres Jakarta Barat	258		309.239.000	1
41	03.01.02.00001251	Kalideres Jakarta Barat	254		304.444.000	1
42	03.01.02.00001252	Kalideres Jakarta Barat	151	160	395.204.000	1
43	03.01.02.00001253	Kalideres Jakarta Barat	250		319.150.000	1
44	03.01.02.00001254	Kalideres Jakarta Barat	471		624.546.000	1
45	03.01.02.00001255	Kalideres Jakarta Barat	220		266.552.000	1
46	03.01.02.00001256	Kalideres Jakarta Barat	240		300.144.000	1
47	03.01.02.00001257	Kalideres Jakarta Barat	240		300.144.000	1
48	03.01.02.00001258	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000	1
49	03.01.02.00001259	Kreo Ciledug Tangerang	525	351	650.337.000	1
50	03.01.02.00001260	Jl. Yos Sudarso, Panjang Utara, Bandar Lampung	41.605	11014	71.571.961.000	1
51	03.01.02.00001261	Desa Sukorejo, Sidoarjo, Jatim	406	200	1.868.702.000	1
52	03.01.02.00001267	Cijayanti, Citeureup, Bogor	2.280		8.252.117.000	1
53	03.01.02.00001268	Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Pasar Kliwon, Solo	553		13.963.105.000	1
54	03.01.02.00001269	Desa Margajaya, Bekasi Selatan, Bekasi	114	114	971.740.000	1
55	03.01.02.00001270	Komp. Puri Jatisampurna, Kel. Jatiraden, Bekasi	145		72.500.000	1
56	03.01.02.00001271	Jl. Cimuncang, Cibeunying Kidul, Bandung	5.840	1003	32.703.878.000	1
57	03.01.02.00001272	Jl. Jend. Sudirman, Palembang	54	54	403.982.000	1
58	03.01.02.00001273	Jl. Jend. Sudirman, Palembang	80	80	599.318.000	1
			340.444	**16.447**	**433.402.868.179**	**58**

SINAR BONANA

No.	No. Register	Kab/Kota	Provinsi	Nomor Dok.	Luas Tanah	Nilai Wajar
1	03.01.02.00001313	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	19	4.914	44.983.894.101
2	03.01.02.00001315	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	366	178	1.629.453.225
					5.092	**46.613.347.327**

GRIYA POTENSA

No	No. Register	Jenis Properti	Jenis Hak	Nomor Hak	Luas		Nilai
					Tanah	Bangunan	
1	03.01.02.00001316	Tanah	HGB	05538	96 m2	-	131.000.000
2	03.01.02.00001317	Tanah	HGB	06354 dan 05531	120 m2	-	164.000.000
							295.000.000

COVERNOTE

No.	No. Register	Kabupaten	Luas Tanah	Kepemilikan	Nomor	Jumlah Dokumen	Tanggal Sertifikat	Nilai
1	03.01.02.00001318	JAKARTA UTARA	66	Hak Pakai	20	1	01/02/1978	0
2	03.01.02.00001319	JAKARTA UTARA	66	Hak Pakai	40	1	31/08/1993	0
3	03.01.02.00001321	SEMARANG	0	SHGB	2227	1		125.000.000
4	03.01.02.00001328	JAKARTA PUSAT	1410	SHGB	615/Petojo Selatan	1	30/06/2000	76.843.616.000
5	03.01.02.00001329	SIDOARJO	774	SHM (Sertifikat Hak Milik)	182	1		120.981.413
6	03.01.02.00001330	KOTA MAGELANG	105	SHGB	1776	1	02/09/1997	37.327.391
7	03.01.02.00001332	MAGELANG	0	SHGB	113	1		0
8	03.01.02.00001333		663	SHM (Sertifikat Hak Milik)	669	1		0
9	03.01.02.00001334		243	SHM (Sertifikat Hak Milik)	687	1		0
10	03.01.02.00001335		133	SHM (Sertifikat Hak Milik)	666	1		0
11	03.01.02.00001336		681	SHM (Sertifikat Hak Milik)	847	1		0
12	03.01.02.00001337	JAKARTA BARAT	138	SHGB	1073	1		3.354.748.000
13	03.01.02.00001338	PASURUAN	45	SHM (Sertifikat Hak Milik)	271	1	30/12/1997	0
14	03.01.02.00001339	JAKARTA UTARA	167	SHGB	4785	1		0
15	03.01.02.00001340	JAKARTA BARAT	1806	SHM (Sertifikat Hak Milik)	624/Kapuk	1		0
16	03.01.02.00001341	KAB. TANGERANG	0	SHGB		1		635.255.000
17	03.01.02.00001342	KOTA BEKASI	1690	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1394	1		0
18	03.01.02.00001343	KOTA BEKASI	500	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1395	1		0
19	03.01.02.00001344	KOTA BOGOR	170	SHGB	5/Curug	1		174.490.000
20	03.01.02.00001345	KAB. TANGERANG	195	SHGB	350 / Jalupang	1		677.246.250
21	03.01.02.00001346	KAB. TANGERANG	155	SHGB	514 / Jalupang	1		
22	03.01.02.00001347	KAB. TANGERANG	250	SHGB	1009 / Lengkong Gudang	1		125.188.000
23	03.01.02.00001348	KAB. TANGERANG	90	SHGB	2048 / Kutajaya	1		23.530.500
24	03.01.02.00001349	DEPOK	232	SHGB	127 / Depok	1		258.461.891
25	03.01.02.00001350	KOTA BEKASI	201	SHGB	6062 / Jatibening	1		175.000.000
26	03.01.02.00001351	KOTA BOGOR	85	SHGB	35 / Kedung Waringin	1		7.260.000
27	03.01.02.00001352	KOTA BOGOR	321	SHGB	437 / Baranangsiang	1		0
28	03.01.02.00001353	KOTA TANGERANG	102	SHGB	288 / Bugel	1		54.667.890
29	03.01.02.00001354	DEPOK	70	SHGB	3654 / Sukmajaya	1		104.058.173
30	03.01.02.00001355	KABUPATEN BOGOR	1322	SHM (Sertifikat Hak Milik)	85 / Tugujaya	1		40.000.000
31	03.01.02.00001356	KOTA BEKASI	240	SHU	2760 / Jakasetia	1		27.053.750
32	03.01.02.00001357	KABUPATEN BOGOR	2013060	SHGU	3/CIKOPOMAYAK	1		20.130.600.000
33	03.01.02.00001358	KAB. TANGERANG	328	SHGB	749	1		0
34	03.01.02.00001359	KAB. TANGERANG	1505	SHGB	746	1		0
35	03.01.02.00001360	KAB. TANGERANG	2470	SHGB	1025	1		0
36	03.01.02.00001361	KAB. TANGERANG	1662	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1024	1		0
37	03.01.02.00001362	KAB. TANGERANG	2915	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1023	1		0
38	03.01.02.00001363	KAB. TANGERANG	2830	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1022	1		0
39	03.01.02.00001364	KAB. TANGERANG	7060	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1021	1		0

COVERNOTE

No.	No. Register	Kabupaten	Luas Tanah	Kepemilikan	Nomor	Jumlah Dokumen	Tanggal Sertifikat	Nilai
40	03.01.02.00001365	KAB. TANGERANG	1470	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1020	1		0
41	03.01.02.00001366	KAB. TANGERANG	665	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1019	1		0
42	03.01.02.00001367	KAB. TANGERANG	1890	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1018	1		0
43	03.01.02.00001368	KAB. TANGERANG	2880	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1017	1		0
44	03.01.02.00001369-B	KAB. TANGERANG	300000	SHU	1	0		46.516.380.000
45	03.01.02.00001369-C	KAB. TANGERANG	2291955	SHU	1	1		22.919.550.000
46	03.01.02.00001388	KABUPATEN BANDUNG	0	Girik	Persil No.44 S.II Kohir No.1254	1		0
47	03.01.02.00001389	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1041/Cigugur	1		0
48	03.01.02.00001390	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1071/Cigugur	1		0
49	03.01.02.00001391	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1072/Cigugur	1		0
50	03.01.02.00001392	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1073/Cigugur	1		0
51	03.01.02.00001393	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	731	1		0
52	03.01.02.00001394	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1096/Cigugur	1		0
53	03.01.02.00001395	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	645/Cigugur	1		0
54	03.01.02.00001396	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	536/Cigugur	1		0
55	03.01.02.00001397	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	760/Cigugur	1		0
56	03.01.02.00001398	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1095/Cigugur	1		0
57	03.01.02.00001399	JAKARTA SELATAN	889	SHM (Sertifikat Hak Milik)	314	1	08/05/1991	0
58	03.01.02.00001400	KAB. SEMARANG	721	SHM (Sertifikat Hak Milik)	52	1		0
59	03.01.02.00001401	KAB. SEMARANG	478	SHGB	245	1		0
60	03.01.02.00001402	KAB. SEMARANG	294	SHGB	161	1		0
61	03.01.02.00001403	KAB. SEMARANG	244	SHGB	244	1		0
62	03.01.02.00001404	JAKARTA UTARA	193	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1730	1	25/07/1983	0
63	03.01.02.00001405	JAKARTA UTARA	194	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1661	1	23/05/1983	0
64	03.01.02.00001406	GRESIK	13740	SHGB	30	1	10/04/1990	799.582.250
65	03.01.02.00001407	GRESIK	5055	SHGB	38	1	24/01/1984	
66	03.01.02.00001408	MAKASSAR	0	SHGB	209	1	11/01/1985	0
67	03.01.02.00001409	SIDOARJO	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	329	1		0
68	03.01.02.00001410	JAKARTA BARAT	141	SHGB	1249	1	20/11/1986	1.098.900.000
69	03.01.02.00001411	JAKARTA BARAT	387	SHGB	114/Mangga Besar	1		8.525.055.000
70	03.01.02.00001412	SIDOARJO	1478	SHM (Sertifikat Hak Milik)	286	1		0
71	03.01.02.00001413	JAKARTA TIMUR	0	SHGB	609/Ujung Menteng	1		688.139.000
						70		183.462.090.508

RINCIAN ASET NOSTRO

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2025
Rekening Nostro tercatat dalam Neraca						
1	Bank Dewa Rutji	Bank Ganesha	Bank dalam negeri	2.920.898.206	(584.179.642)	2.336.718.564
2	BIRA	ClearStream Banking SA sebesar USD258.438,5	Bank luar negeri	-	-	-
3	Bank Bahari	Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD350.526,24	Bank luar negeri	-	-	-
Total				**2.920.898.206**	**(584.179.642)**	**2.336.718.564**
Rekening Nostro tercatat dalam CaLK						
1	Bank Central Dagang BBKU	Bank CIC, Jakarta	Bank dalam negeri	2.044.749	-	2.044.749
2	BUN	BRI Cut Mutiah		83.311.328	-	83.311.328
3	BUN	Citibank		8.776.916.074	-	8.776.916.074
4	BDNI	BPR Tri Sejahtera Makmur, Jkt		97.686.238	-	97.686.238
5	BDNI	Bank Ganesha, Jkt		706.429.119	-	706.429.119
6	Bank Dewa Rutji	Bank Ganesha, Jkt		196.059.779	-	196.059.779
7	Bank Kharisma BBKU	Bank Aspac	telah dikuidasi (BBO/BBKU)	287.761	-	287.761
8	Bank Budi Internasional BBKU	Bank Astria (dalam likuidasi)		6.601.374	-	6.601.374
9	Bank Aken BBKU	Bank Central Dagang		625.070	-	625.070
10	SANHO	Bank Central Dagang		2.994.990	-	2.994.990
11	HOKINDO	Bank Modern		6.207.878	-	6.207.878
12	SURYA	Bank Umum Majapahit		122.086.331	-	122.086.331
13	SANHO	Bank Umum Servitia		4.887.591	-	4.887.591
14	BDNI	BDNI Finance, Hongkong		1.020.060.448	-	1.020.060.448
15	HOKINDO	Bank Pelita		6.017.123	-	6.017.123
16	ARYA PANDUARTA	Bank Bahari		11.739.034	-	11.739.034
17	Bank Kharisma BBKU	Indover Bank	Bank Indover	141.402.439	-	141.402.439
18	Bank Hastin Internasional BBKU	Indover Bank		361.433.694	-	361.433.694
19	BUS	Indover Bank		2.864.035	-	2.864.035
20	BDI	Indover Bank		268.237.425	-	268.237.425
21	Bank Sahid Gajah Perkasa BBKU	Indover Bank		109.652.043	-	109.652.043
22	BUN	Indover Bank		925.492.301	-	925.492.301
23	BUN	Indover Bank		531.317.596	-	531.317.596
24	Bank BIRA BBKU	Indover Bank, Amsterdam		24.530.232	-	24.530.232
25	Bank Modern BBO	Indover Bank, Amsterdam		32.416.251	-	32.416.251
26	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Amsterdam		16.993.382	-	16.993.382
27	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		45.288.112	-	45.288.112
28	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		24.849.498	-	24.849.498
29	Bank Mashill Utama BBKU	Indover Bank, Amsterdam		354.542.691	-	354.542.691
30	Bank Central Dagang BBKU	Indover Bank, Amsterdam		92.060.252	-	92.060.252
31	Bank Ficorinvent BBKU	Indover Bank, Amsterdam		77.574.756	-	77.574.756
32	DHARMALA	Indover Bank, Amsterdam		1.139.267	-	1.139.267

RINCIAN ASET NOSTRO

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2025
33	BDNI	Indover Bank, Amsterdam	Bank Indover	11.664.932	-	11.664.932
34	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		108.150.697	-	108.150.697
35	PESONA	Indover Bank, Amsterdam		120.045.720	-	120.045.720
36	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		341.740.942	-	341.740.942
37	Bank Modern BBO	Indover Bank, Hamburg		195.403.135	-	195.403.135
38	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Hamburg		956.004.466	-	956.004.466
39	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Hamburg		2.996.776	-	2.996.776
40	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		254.274.895	-	254.274.895
41	PESONA	Indover Bank, Hamburg	Bank Indover	27.358.123	-	27.358.123
42	BDNI	Indover Ing Bank		122.424.187	-	122.424.187
43	BDNI	Bank Indonesia	Bank Indonesia	406.733.525.331	-	406.733.525.331
44	BDNI	Rekening Nostro (Unidentified)	tidak diketahui	2.359.921.198	-	2.359.921.198
45	BDNI	Keppel Bank, Singapore	Bank luar negeri	2.257.377.868	-	2.257.377.868
46	BDNI	Indovina Bank (Khusus Deviden)		1.758.722.655	-	1.758.722.655
47	BDNI	American Express Bank, NY		1.834.239.835	-	1.834.239.835
48	BDNI	ANZ Banking Group Bank		666.429.512	-	666.429.512
49	PESONA	Banca Comerciale		61.815.827	-	61.815.827
50	DHARMALA	Banco Ambrosiano (BAVE)		44.241.247	-	44.241.247
51	BDNI	Bank Boston, NA Singapore		2.270.532	-	2.270.532
52	SURYA	Bank Brussel Lambert		378.699.549	-	378.699.549
53	SURYA	Bank Credit Suisse		234.342.412	-	234.342.412
54	Bank Yama BBKU	Bank Mashill		58.834.914	-	58.834.914
55	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		65.028.724	-	65.028.724
56	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		41.766.482	-	41.766.482
57	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		6.616.463.903	-	6.616.463.903
58	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		266.632.029	-	266.632.029
59	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		339.690.834	-	339.690.834
60	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		357.108.818	-	357.108.818
61	HOKINDO	Bank Pacific		6.463.800	-	6.463.800
62	BDNI	Banque Worms, Singapore		208.766.445	-	208.766.445
63	BDNI	Banque Worms, Singapore		327.222.391	-	327.222.391
64	BDNI	BBMB, Kuala Lumpur		1.675.911	-	1.675.911
65	BUN	BCCI London		1.312.775.084	-	1.312.775.084
66	BUN	BNP Singapore		490.837.088	-	490.837.088
67	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore		4.122.299	-	4.122.299
68	BUN	Chemical Bank		909.494.195	-	909.494.195
69	BUN	National Australia Bank		980.037.418	-	980.037.418
70	BUN	National Australia Bank (Draft)		103.609.247	-	103.609.247
71	BUN	National Westminster		1.708.457.513	-	1.708.457.513
72	Bank Ficorinvent BBKU	National Westmonster Bank, London		1.332.284.085	-	1.332.284.085
73	BDNI	Security Pasific Nat'l Bank Singapore		25.528.726	-	25.528.726
74	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, New York		72.226.081	-	72.226.081
75	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Sidney		566.327.486	-	566.327.486
76	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Tokyo		456.068.075	-	456.068.075
77	BDNI	Sumitotmo Bank Ltd, Tokyo		1.550.878.033	-	1.550.878.033

RINCIAN ASET NOSTRO

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2025
78	BUN	Summa Hanlebank	Bank luar negeri	219.893.773	-	219.893.773
79	BUN	Swiss Bank Corporation		457.663.217	-	457.663.217
80	BDNI	The Dai Ichi Kangyo Bank, NY		449.662.819	-	449.662.819
81	Bank Modern BBO	UBOC, New York		25.317.209	-	25.317.209
82	BUN	UMBC KualaLumpur		230.472.902	-	230.472.902
83	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of California		124.810.098	-	124.810.098
84	Bank Metropolitan BBKU	Union Bank of California		22.488.860	-	22.488.860
85	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of Switzerland, Zurich		93.484.495	-	93.484.495
86	Bank Modern BBO	United Bank of Swiss, Switzerland		51.007.391	-	51.007.391
87	BDNI	United Pasific Bank, LA		1.926.555.302	-	1.926.555.302
88	PESONA	Westpac Bank Sidney		7.752.796	-	7.752.796
89	Masih dalam penelusuran			508.554.149	-	508.554.149
Total				**454.445.361.291**		**454.445.361.291**

SURAT BERHARGA NON SAHAM EKS BPPN

No.	Nama Aset	Nominal	Mata Uang	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2025
	a. Corporate Bonds					
1	DGS International Finance Co.	0.01	USD	-	-	-
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	101.88	USD	74,074,763,624	2,581,177,937	76,655,941,560
3	TPE International Finance Co. Bv	1.00	USD	4,039,250,000	140,750,000	4,180,000,000
4	Ciputra Surya	38,750,000.00	IDR	38,750,000	-	38,750,000
5	Jakarta International Hotel	800,000,000.00	IDR	800,000,000	-	800,000,000
6	Mulia Glass	38,125,000.00	IDR	38,125,000	-	38,125,000
7	Mulia Keramik	38,125,000.00	IDR	38,125,000	-	38,125,000
8	Polysindo Eka Perkasa	2.10	USD	1,017,891,000	35,469,000	1,053,360,000
9	TPE International Finance Co. Bv	1.00	USD	323,140,000	11,260,000	334,400,000
10	Bank Papan	100.00	IDR	500,000,000	-	500,000,000
11	Polysindo Eka Perkasa	2.10	USD	1,357,188,000	47,292,000	1,404,480,000
12	Polysindo Eka Perkasa	88.21	USD	2,593,965,634	90,388,231	2,684,353,866
Total				**84,821,198,258**	**2,906,337,168**	**87,727,535,426**
	b. Medium Term Notes					
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	93.92	USD	2,761,837,026	96,237,807	2,858,074,833
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	90.00	USD	290,826,000,000	10,134,000,000	300,960,000,000
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	90.00	USD	13,967,791,128	486,715,752	14,454,506,880
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	90.00	USD	14,044,569,192	489,391,128	14,533,960,320
5	Hutama Karya	100.00	USD	16,157,000,000	563,000,000	16,720,000,000
6	Hutama Karya	100.00	USD	16,157,000,000	563,000,000	16,720,000,000
7	Hutama Karya	100.00	USD	16,157,000,000	563,000,000	16,720,000,000
8	Hutama Karya	100.00	USD	80,785,000,000	2,815,000,000	83,600,000,000
Total				**450,856,197,346**	**15,710,344,687**	**466,566,542,033**
	c. Non-Convertible Debentures					
1	Polysindo Eka Perkasa	100.00	IDR	5,000,000,000	-	5,000,000,000
Total				**5,000,000,000**	**-**	**5,000,000,000**
Total (a+b+c)				**540,677,395,604**	**18,616,681,855**	**559,294,077,458**

Catatan:	
Kurs JISDOR	**31 Desember 2025**
1 Dollar Amerika	16,720.00

ASET SAHAM EKS BPPN

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2025	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	32,137,300	36	1,124,805,500	32,137,300	1,156,942,800	Aktif	Nilai saham berdasarkan harga penutupan tanggal 30 Juni 2025 pada situs BEI (https://www.idx.co.id/id/data-pasar/ringkasan-perdagangan/ringkasan-saham/)
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	37,459,700	36	1,311,089,500	37,459,700	1,348,549,200	Aktif	Nilai saham berdasarkan harga penutupan tanggal 30 Juni 2025 pada situs BEI (https://www.idx.co.id/id/data-pasar/ringkasan-perdagangan/ringkasan-saham/)
3	PT Aster Dharma Ind.	-	Scripless	40,000	850	34,000,000	-	34,000,000	Status Emiten Tidak Diketahui. Saham sudah tidak tercatat di bursa (delisted) berdasar surat dari KSEI no:KSEI-6222/DIR/0620 tgl 8 September 2020: pembatalan pendaftaran saham Aster Dharma dari penitipan kolektif KSEI	1. Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 Desember 2022.
4	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	46,250	75	3,468,750	-	3,468,750	BBO	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.
5	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	363	75	27,225	-	27,225	BBO	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.
6	PT Bank Ficorinvest	-	Sertifikat	400	50	20,000	-	20,000	BBKU	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.
7	PT Bank PDFCI	-	Sertifikat	250	350	87,500	-	87,500	BTO	1. Nilai per tanggal 28 April 2006 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.
8	PT Bank Surya	-	Sertifikat	800	300	240,000	-	240,000	BBO	
9	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scripless	11,304,425	134	293,915,050	1,220,877,900	1,514,792,950	Aktif	
10	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scripless	41,421,439	134	1,076,957,414	4,473,515,412	5,550,472,826	Aktif	
11	PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL)	Manufaktur Ban	Sertifikat	200	1,045	224,000	(15,000)	209,000	Aktif	
12	PT Holcim Indonesia, Tbk (PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk) (SMCB)	Manufaktur Semen	Sertifikat	13,898,500	775	10,423,875,000	347,462,500	10,771,337,500	Aktif	
13	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk (LMPI)	Manufaktur Plastik	Scripless	57,901,002	139	7,874,536,272	173,703,006	8,048,239,278	Aktif	

ASET SAHAM EKS BPPN

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2025	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian
14	PT Star Pacipic, Tbk (d/h PT Asuransi Lippo Life) (LPLI)	Investasi dan bisnis media	Sertifikat	100	350	25,400	9,600	35,000	Aktif	
15	PT Merck, Tbk. (MERK)	Farmasi dan Kimia	Sertifikat	100	3,350	360,000	(25,000)	335,000	Aktif	
16	PT Multi Sarana R. Agung	Perkebunan dan Pengolahan Coklat	Sertifikat	94,600	675	63,855,000	-	63,855,000	Status Emiten Tidak Diketahui. Saham delisted	
17	PT Perdana Inti Investama	Pembiayaan	Sertifikat	49,251,500	50	2,462,575,000	-	2,462,575,000	Status Emiten Tidak Diketahui	
18	PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk (PRAS)	Manufaktur velg Kendaraan (Industri Otomotif)	Sertifikat	2,500	97	242,500	-	242,500	Pailit	
19	PT Sreeya Sewu Indonesia (PT Sierad Produce, Tbk (SIPD)	Peternakan	Scripless	1,918,865	1,125	1,583,063,625	575,659,500	2,158,723,125	Aktif	
20	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	Sertifikat	2,800	2,300	1,519,000	4,921,000	6,440,000	Aktif	
21	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	Scripless	1,392,000	2,300	755,160,000	2,446,440,000	3,201,600,000	Aktif	
22	PT Trias Sentosa, Tbk (TRST)	Manufaktur polypropylene dan polyester film	Sertifikat	100	515	60,000	(8,500)	51,500	Aktif	
Total						**27,010,106,736**	**9,312,137,418**	**36,322,244,154**		

ASET SAHAM EKS BPPN

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2025	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian
1	PT Karabha Digdaya	Pengembagan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga golf	100.00%	10,000	0	-	-	-	Aktif	Telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020
2	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods	0.00%	312	2,000,000	312,000	623,688,000	624,000,000	Aktif	Nilai saham terbaru berdasarkan surat penawaran pembelian saham yang disampaikan oleh PT Aqua Golden Mississipi nomor 646/AGM/LGL-Letter/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024
3	PT Kabelindo Murni, Tbk (KBLM)	Manufaktur Kabel	6.24%	69,882,400	292	20,265,896,000	(20,265,896,000)	-	Aktif	Saham telah terjual melalui lelang pada 14 Agustus 2025 dengan Nilai Penjualan Rp27.000.000.000,00 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 109/07.05/2025-01. Saham telah dihapuskan melalui Keputusan Dirjen KN Nomor KEP-162/KN/2025 tanggal 29 Desember 2025
4	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	Perhotelan	0.02%	1,218	100,000	-	121,800,000	121,800,000	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan surat Presiden Direktur PT Permadani Khatulistiwa Nusantara nomor 013/LEG/PKN-LTR/11/2022 tanggal 22 November 2022
5	PT Sarana Maluku Ventura	Pembiayaan	0.00%	-	0	-	-	-	Tidak Aktif	Sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-618/PL.021/2025 tanggal 21 Juli 2025, PT Sarana Maluku Ventura telah dicabut izin usahanya sesuai KEP-21/D.05/2022 tanggal 12 April 2022
Total						**20,266,208,000**	**(19,520,408,000)**	**745,800,000**		

Total Aset Saham Eks BPPN	**47,276,314,736**	**(10,208,270,582)**	**37,068,044,154**

ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO)

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan dalam Neraca			Saldo Per 31 Desember 2024		Mutasi Tahun 2025		Saldo Per 31 Desember 2025	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	624	2.267.395.841.927,00	207	1.832.771.700.816	(21)	998.603.417.219	186	2.831.375.118.035
BS	1162	1.780.494.999.019,00	857	2.228.007.771.680	(107)	235.479.520.583	750	2.463.487.292.264
BT	323	865.910.243.344,00	249	914.765.733.344	283	(20.245.130.258)	532	894.520.603.086
BD (Dokumen berupa *Covernote*)	37	123.953.401.452,00	26	129.272.431.000	(3)	(2.152.983.000)	23	127.119.448.000
JUMLAH	**2.146**	**5.037.754.485.742**	**1.339**	**5.104.817.636.841**	**152**	**1.211.684.824.544**	**1.491**	**6.316.502.461.385**
Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang diungkap dalam CaLK								
BD (Dokumen berupa AJB, APHT, Copy Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	666	2.204.710.941.833,00	520	2.281.800.621.455	(30)	(593.057.625.208)	490	1.688.742.996.247
JUMLAH	**666**	**2.204.710.941.833**	**520**	**2.281.800.621.455**	**(30)**	**(593.057.625.208)**	**490**	**1.688.742.996.247**
JUMLAH TOTAL	**2.812**	**7.242.465.427.575**	**1.859**	**7.386.618.258.296**	**122**	**618.627.199.336**	**1.981**	**8.005.245.457.632**

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Neraca (BS)	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 08, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Serahkelola LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-1/KN.4/2025 tanggal 13 Januari 2025	2	853.576.000	(2)	(853.576.000)	-	-
2	Neraca (BS)	Jalan Karang Anyar 20, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Serahkelola LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-1/KN.4/2025 tanggal 13 Januari 2025	2	5.947.750.000	(2)	(5.947.750.000)	-	-
3	Neraca (BD)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 26, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Serahkelola LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-1/KN.4/2025 tanggal 13 Januari 2025	1	1.006.177.000	(1)	(1.006.177.000)	-	-
4	Neraca (BS)	Blok F-08 No. 01, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.502.964.000	(1)	(1.502.964.000)	-	-
5	Neraca (BS)	Blok F-08 No. 21, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.093.065.000	(1)	(1.093.065.000)	-	-
6	Neraca (BS)	Blok F-08 No. 25, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.502.964.000	(1)	(1.502.964.000)	-	-
7	Neraca (BS)	Blok GR 26 No. 37, Parigi Baru, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.526.766.000	(1)	(1.526.766.000)	-	-
8	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 04, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	539.185.000	(1)	(539.185.000)	-	-
9	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 46, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.048.415.000	(1)	(1.048.415.000)	-	-
10	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 49, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.048.415.000	(1)	(1.048.415.000)	-	-
11	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 50, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.048.415.000	(1)	(1.048.415.000)	-	-
12	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 51, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.048.415.000	(1)	(1.048.415.000)	-	-
13	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 52, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.048.415.000	(1)	(1.048.415.000)	-	-
14	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 54, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.048.278.000	(1)	(1.048.278.000)	-	-
15	Neraca (BS)	Blok GR 21 No. 25, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-
16	Neraca (BS)	Blok GR 21 No. 12, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-
17	Neraca (BS)	Blok GR 21 No. 14, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-
18	Neraca (BS)	337/PONDOK KACANG BARAT, luas 164 m2, terletak di GRAHA RAYA BINTARO Blok GR 10 NO.28 (D/H GRAHA BINTARO, BINTARO JAYA), Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.202.827.000	(1)	(1.202.827.000)	-	-
19	Neraca (BS)	338/PONDOK KACANG BARAT, luas 164 m2, terletak di GRAHA RAYA BINTARO Blok GR 10 NO.30 (D/H GRAHA BINTARO, BINTARO JAYA), Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan.	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	1.202.827.000	(1)	(1.202.827.000)	-	-
20	Neraca (BS)	Blok GR 21 No. 22, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
21	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU I BLOK A-3 NO. 18, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	681.529.000	(1)	(681.529.000)	-	-
22	Neraca (BS)	JL. JOMBANG BARU UTAMA BLOK C-4 NO. 23, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	455.905.000	(1)	(455.905.000)	-	-
23	Neraca (BS)	JL. JOMBANG BARU UTAMA BLOK C-4 NO.24, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	479.347.000	(1)	(479.347.000)	-	-
24	Neraca (BS)	JL. JOMBANG BARU VII BLOK C-4 NO.32, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	490.975.000	(1)	(490.975.000)	-	-
25	Neraca (BS)	JL. JOMBANG BARU VII BLOK C-4 NO. 33, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	490.975.000	(1)	(490.975.000)	-	-
26	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU IV BLOK D-4 NO. 9, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	555.326.000	(1)	(555.326.000)	-	-
27	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU IV BLOK D-4 NO. 10, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	589.965.000	(1)	(589.965.000)	-	-
28	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU IV BLOK D-4 NO. 11, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	589.965.000	(1)	(589.965.000)	-	-
29	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU V BLOK D-5 NO. 9, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	647.868.000	(1)	(647.868.000)	-	-
30	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU I BLOK A-3, NO. 17, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	2	681.529.000	(2)	(681.529.000)	-	-
31	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU V BLOK D-6 NO. 6, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	647.868.000	(1)	(647.868.000)	-	-
32	Neraca (BS)	Jalan Komplek Perumahan Universitas Tirtayasa, Rt 01/ Rw 007 Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten	Hibah ke Pemerintah Kota Serang sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen-144/KN/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan BAST Nomor tanggal 19 Februari 2025	1	6.934.316.000	(1)	(6.934.316.000)	-	-
33	Neraca (BT)	Desa Wonorejo/Desa Wonosari, Kec. Lawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Malang Nomor LAP-0017/PRO-06/KNL.1003/06.00.00/2025. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertanian sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-99/KN/2025 tanggal 14 Agustus 2025 (Belum BAST).	1	312.390.800	-	11.622.710.200	1	11.935.101.000
34	Neraca (BT)	Desa Wonorejo/Desa Wonosari, Kec. Lawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Malang Nomor LAP-0018/PRO-06/KNL.1003/06.00.00/2025	1	60.660.000	-	3.086.226.000	1	3.146.886.000
35	Neraca (BT)	Desa Turirejo, Lawang, Malang, Jawa Timur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Malang Nomor LAP-0019/PRO-06/KNL.1003/06.00.00/2025	1	437.710.000	-	1.286.464.000	1	1.724.174.000
36	Neraca (AT)	Perum Villa Nusa Permai Blok H2 No. 8, RT/RW 01/01, Desa Sukamulya, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-0069/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2025 tanggal 14 Februari 2025	1	76.260.000	-	24.793.000	1	101.053.000
37	Neraca (BS)	Perum. Green Hill Blok D.2 No. 1, Desa Ciherang, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-0070/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2025 tanggal 14 Februari 2025	1	972.520.000	-	1.108.498.000	1	2.081.018.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
38	Neraca (BS)	Jl. TGH. Faisal Kel. Bertais Kec. Cakranegara Kab. Lombok Barat NTB	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Mataram Nomor LAP-0033/1/PRO-01/KNL.1403/01.01.00/2025. Selanjutnya laku lelang pada KPKNL Mataran sesuai RL Nomor RL Nomor 217/14.03/2025-01 tanggal 4 Desember 2025	1	178.800.000	(1)	(178.800.000)	-	-
39	Neraca (BS)	JALAN PANE NO.66A, TOMUAN, PEMATANG SIANTAR	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pematang Siantar Nomor LAP-0021/1/PRO-01/KNL.0202/06.00.00/2025 tanggal 24 Maret 2025	1	334.600.000	-	(96.764.000)	1	237.836.000
40	Neraca (BS)	Kampung Lio No. 55 RT. 07 / RW. 19, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Depok	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LAP-0083/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2025 tanggal 28 Februari 2025	1	156.700.000	-	277.687.000	1	434.387.000
41	Neraca (BS)	Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pinasungkulan, Kec. Ranowulu, Kota Bitung	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor LAP-0056/1/PRO-01/KNL.1601/01.03.01/2025 tanggal 7 Maret 2025	1	93.000.000	-	1.459.050.000	1	1.552.050.000
42	Neraca (BS)	JL. KEBUN, KEL. PINASUNGKULAN, KEC. RANOWULU, KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA.	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor LAP-0057/1/PRO-01/KNL.1601/01.03.01/2025 tanggal 7 Maret 2025	1	8.900.000	-	342.814.000	1	351.714.000
43	Neraca (BS)	JL. TRANS SULAWESI, KEL. PINASUNGKULAN, KEC. RANOWULU, KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA.	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor LAP-0058/1/PRO-01/KNL.1601/01.03.01/2025 tanggal 7 Maret 2025. Selanjutnya Laku terjual lelang pada KPKNL Manado sesuai RL Nomor 236/16.01/2025-01 Tgl. 09 Oktober 2025	1	29.700.000	(1)	(29.700.000)	-	-
44	Neraca (BS)	KEL. PINASUNGKULAN, KEC. RANOWULU, KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA.	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor LAP-0059/1/PRO-01/KNL.1601/01.03.01/2025 tanggal 7 Maret 2025. Selanjutnya Laku terjual lelang pada KPKNL Manado sesuai RL Nomor 236/16.01/2025-01 Tgl. 09 Oktober 2025	1	36.000.000	(1)	(36.000.000)	-	-
45	Neraca (BS)	JL. LINGKAR SELATAN, DESA MAKALISUNG TONSEA,KEC KEMA, KAB. MINAHASA, PROVINSI SULAWESI UTARA.	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor LAP-0060/1/PRO-01/KNL.1601/01.03.01/2025 tanggal 7 Maret 2025. Selanjutnya Laku terjual lelang pada KPKNL Manado sesuai RL Nomor 236/16.01/2025-01 Tgl. 09 Oktober 2025	1	50.200.000	(1)	(50.200.000)	-	-
46	Neraca (BS)	KEL. MULYAMEKAR KEC. PURWAKARTA JAWA BARAT Blok JENGKOL PERSIL 56 / D RT 015 / 05	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LAP-0043/1/PRO-01/KNL.0804/01.01.00/2025 tanggal 26 Maret 2025. Selanjutnya Laku terjual lelang pada KPKNL Purwakarta sesuai RL Nomor 185/08.04/2025-01 tanggal 9 Oktober 2025	1	196.300.000	(1)	(196.300.000)	-	-
47	Neraca (BS)	KEL. MULYAMEKAR KEC. PURWAKARTA JAWA BARAT Blok KP. CIGELAM PS 57 / D RT 015 / 05	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LAP-0042/1/PRO-01/KNL.0804/01.01.00/2025 tanggal 26 Maret 2025. Selanjutnya Laku terjual lelang pada KPKNL Purwakarta sesuai RL Nomor 185/08.04/2025-01 tanggal 9 Oktober 2025	1	209.000.000	(1)	(209.000.000)	-	-
48	Neraca (BT)	KEL. MULYAMEKAR KEC. PURWAKARTA JAWA BARAT BLOK SADANG PERSIL 59 / D RT 015 / 05	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LAP-0044/1/PRO-01/KNL.0804/01.01.00/2025 tanggal 26 Maret 2025. Selanjutnya Laku terjual lelang pada KPKNL Purwakarta sesuai RL Nomor 185/08.04/2025-01 tanggal 9 Oktober 2025	1	50.250.000	(1)	(50.250.000)	-	-
49	Neraca (AT)	Perumahan Lippo Karawaci Blok A, C, H, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LAP-0196/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024 s.d LAP-0207/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024 tanggal 19 Desember 2024	36	915.823.230.921	-	635.531.551.079	36	1.551.354.782.000
50	Neraca (AT)	Perumahan Lippo Karawaci Blok B, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LAP-0017/1/PRO-01/KNL.0603/01.03.03/2025 tanggal 25 Maret 2025. Perubahan jumlah dokumen menjadi 6, karena sertifikasi menjadi hak pakai. Selanjutnya telah terbit KMK NOMOR KEP-399/MK/KN/2025 tanggal 5 November 2025 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada Bank Tanah (Belum BAST)	4	199.843.388.442	2	272.808.805.558	6	472.652.194.000
51	Neraca (BD)	Perumahan Tigaraksa Blok AF.18 No. 109, Desa Kaduagung, Kec. Tiga Raksa, Tangerang, Banten	Pemindahan kategori dari BD menjadi BS karena telah ditemukan asli dokumen kepemilikan	1	277.600.000	(1)	(277.600.000)	-	-
52	Neraca (BS)	Perumahan Tigaraksa Blok AF.18 No. 109, Desa Kaduagung, Kec. Tiga Raksa, Tangerang, Banten	Pemindahan kategori dari BD menjadi BS karena telah ditemukan asli dokumen kepemilikan. Selanjutnya Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LP-0020/1/KNL.0603/2025 tanggal 21 April 2025	-	-	1	254.562.000	1	254.562.000
53	Neraca (BD)	Perumahan Tiga raksa Blok AF 18 No. 56, Desa Kaduagung, Kec. Tiga raksa, Tangerang, Banten	Pemindahan kategori dari BD menjadi BS karena telah ditemukan asli dokumen kepemilikan	1	379.500.000	(1)	(379.500.000)	-	-
54	Neraca (BS)	Perumahan Tiga raksa Blok AF 18 No. 56, Desa Kaduagung, Kec. Tiga raksa, Tangerang, Banten	Pemindahan kategori dari BD menjadi BS karena telah ditemukan asli dokumen kepemilikan. Selanjutnya Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LP-0021/1/KNL.0603/2025 tanggal 21 April 2025	-	-	1	436.031.000	1	436.031.000
55	Neraca (AT)	Perum Pondok Jati Indah Blok A6 No. 5 dan Blok A6 No. 6, Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih, Bekasi	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor LP-0033/KNL.0802/2025 tanggal 30 April 2025	1	96.000.000	-	289.525.483	1	385.525.483
56	Neraca (AT)	Perum Pondok Jati Indah Blok A6 No. 5 dan Blok A6 No. 6, Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih, Bekasi	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor LP-0033/KNL.0802/2025 tanggal 30 April 2025	1	147.200.000	-	213.182.517	1	360.382.517
57	Neraca (BS)	Jalan Rasuna Said, Kelurahan Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung (d/h) Jalan Raya Cuku Balak Desa Bandar Agung Pardasuka Kab. Tanggamus	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor LP-0132/1/KNL.0502/2025 tanggal 24 April 2025. Selanjutnya Laku terjual lelang pada KPKNL Bandar Lampung sesuai RL Nomor 360/05.02/2025-01 Tanggal 16 Oktober 2025	1	147.606.059	(1)	(147.606.059)	-	-
58	Neraca (BS)	Dusun Hutan Tua, Desa Baru Ranji, Kecamatan MerbauMataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (d/h) Desa Baru Raji, Merbau Mataram	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor LP-0133/1/KNL.0502/2025 tanggal 24 April 2025	1	171.312.000	-	132.924.000	1	304.236.000
59	Neraca (BS)	Jalan Tengah, Blok Pasar, Kel. Ciganjeng, Kec. Padaherang Kab. Ciamis	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tasikmalaya Nomor LP-0022/1/KNL.0805/2025 tanggal 8 Mei 2025	1	84.600.000	-	13.499.000	1	98.099.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
60	Neraca (BS)	Jalan Utara II Blok R 12 No. 8, Kel. Pedurenan, Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi, 17156	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor LP-0038/1/KNL.0802/2025 tanggal 9 Mei 2025	1	145.700.000	-	285.764.000	1	431.464.000
61	Neraca (BS)	PERUM SOLO BARU KAV.JB 1 S/D JB 67 (NOMOR GANJIL) - SHGB Nomor 1433/Madegondo seluas 9.098	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surakarta Nomor LP-0056/1/KNL.0902/2025 tanggal 8 Mei 2025	1	37.571.852.000	-	2.256.612.000	1	39.828.464.000
62	Neraca (AT)	Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Tuban	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LP-0174/1/KNL.1001/2025 tanggal 19 Mei 2025	1	67.500.000	-	1.645.885.000	1	1.713.385.000
63	Neraca (AT)	Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Tuban	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LP-0173/1/KNL.1001/2025 tanggal 19 Mei 2025. Selanjutnya Laku terjual lelang pada KPKNL Surabaya sesuai RL Nomor 845/10.01/2025-01 tanggal 9 Oktober 2025	1	226.600.000	(1)	(226.600.000)	-	-
64	Neraca (AT)	Jl. Raya Kesamben No. 14-16 Desa Kesambeno, Kecamatan Plumpang, Tuban	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LP-0172/1/KNL.1001/2025 tanggal 19 Mei 2025. Selanjutnya Laku terjual lelang pada KPKNL Surabaya sesuai RL Nomor 845/10.01/2025-01 tanggal 9 Oktober 2025	1	415.200.000	(1)	(415.200.000)	-	-
65	Neraca (BS)	Jalan Desa Delegen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LP-0178/1/KNL.1001/2025 tanggal 19 Mei 2025	1	1.363.820.000	-	4.764.825.000	1	6.128.645.000
66	Neraca (BS)	Jalan Mayjen. Sungkono GG.XIV B No.57 RT/RW 006/02, Desa Radegansari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LP-0179/1/KNL.1001/2025 dan LP-0180/1/KNL.1001/2025 tanggal 19 Mei 2025. Laku terjual lelang pada KPKNL Surabaya sesuai RL Nomor 845/10.01/2025-01 tanggal 9 Oktober 2025	2	4.199.056.000	(2)	(4.199.056.000)	-	-
67	Neraca (BS)	Desa Randugong Kelurahan Randugong, Kecamatan Kejayan, Pasuruan	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0041/1/KNL.1002/2025 tanggal 6 Mei 2025	8	3.953.150.000	-	168.524.000	8	4.121.674.000
68	Neraca (BS)	Jl. Raya Bibis Timur No. 3, Desa Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0041/1/KNL.1002/2025 tanggal 30 April 2025. Selanjutnya laku lelang pada KPKNL Sidoarjo sesuai RL Nomor 564/10.02/2025-01 tanggal 4 Desember 2025	1	818.187.000	(1)	(818.187.000)	-	-
69	Neraca (BS)	Jl. Dukuh, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0037/1/KNL.1002/2025 tanggal 30 April 2025	1	630.202.000	-	(37.935.000)	1	592.267.000
70	Neraca (BS)	Perumahan Vila Mas Garden Blok E No. 292 - 291, Kel. Perwira, Kec. Bekasi Utara, Bekasi	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor LP-0036/1/KNL.0802/2025 tanggal 5 Mei 2025	2	78.000.000	-	580.263.000	2	658.263.000
71	Neraca (BS)	Jalan Roomo No. 27 RT/RW 05/01 Desa Radegansari, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LP-0108/1/KNL.1001/2025 tanggal 17 April 2025	1	298.750.000	-	334.044.000	1	632.794.000
72	Neraca (BS)	JL. PUNCAK PERMAI UTARA VI/4, SURABAYA KEL. PRADAH KENDAL KEC. DUKUH PAKIS, SURABAYA	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LP-0106/1/KNL.1001/2025 tanggal 17 April 2025	1	3.515.400.000	-	4.103.455.000	1	7.618.855.000
73	Neraca (AT)	DI JL PEKAPURAN A GANG IX NO. 13 (D/H JL KI HAJAR DEWANTORO), KEL KARANG MEKAR, KEC BANJARMASIN TIMUR, KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor LAP-314.1.PRO-01.KNL.1203.01.01.00.2024 tanggal 27 September 2024	2	30.300.000	-	57.254.000	2	87.554.000
74	Neraca (BS)	JALAN MARTAPURA LAMA KM. 16,4, DESA PEJAMBUAN, KEC. SUNGAI TABUK, KAB BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor LP-0085/1/KNL.1203/2025 tanggal 8 April 2025	1	159.000.000	-	(124.455.000)	1	34.545.000
75	Neraca (AT)	JL VETERAN GANG IX, KEL KURIPAN, KEC BANJAR TIMUR, KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor LAP-315.1.PRO-01.KNL.1203.01.01.00.2024 tanggal 27 September 2024	1	45.500.000	-	36.613.000	1	82.113.000
76	Neraca (BS)	Jl.Gajahmada, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LP-0052/1/KNL.1002/2025 tanggal 10 Juni 2025	1	9.745.031.000	-	204.530.000	1	9.949.561.000
77	Neraca (AT)	Perumahan Lippo Karawaci Blok DG, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LP-0030/1/KNL.0603/2025 dan LP-0031/1/KNL.0603/2025 tanggal 16 Mei 2025	4	48.036.682.031	-	58.251.704.969	4	106.288.387.000
78	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 14 lantai 14 No. H Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	PSP kepada Kepolisian Negara RI sesuai Kepdirjen Nomor 71/KN.2024 tanggal 21 Juni 2024 dan BAST Nomor BA-118/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.087.349.000	(1)	(1.087.349.000)	-	-
79	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 19 No. H Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	PSP kepada Kepolisian Negara RI sesuai Kepdirjen Nomor 71/KN.2024 tanggal 21 Juni 2024 dan BAST Nomor BA-118/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.087.349.000	(1)	(1.087.349.000)	-	-
80	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 28 No. C Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	PSP kepada Kepolisian Negara RI sesuai Kepdirjen Nomor 71/KN.2024 tanggal 21 Juni 2024 dan BAST Nomor BA-118/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.129.085.000	(1)	(1.129.085.000)	-	-
81	Neraca (BS)	JL. T. AMIR HAMZAH NO. 484, JATIMAKMUR - BINJAI UTARA	PSP ke Badan Pusat Statistik sesuai KEP-129/KN/2024 tanggal 19 November 2024 dan BAST Nomor BA-116/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	5.083.918.000	(1)	(5.083.918.000)	-	-
82	Neraca (BS)	Komplek Pergudangan Paya Rumput, Jalan Pulau Nias, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumetara Utara	PSP ke Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Polda Sumut sesuai KEP-34/KN/2025 tanggal 19 Maret 2025 dan BAST Nomor BA-118/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	3	75.708.786.000	(3)	(75.708.786.000)	-	-

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
83	Neraca (BS)	Perum Solo Baru Kav. JB 1 s.d. 67 (Nomor Ganjil) Kelurahan/Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah SHGB No. 1432/Madegondo seuas 5.130	PSP ke Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai KEP-48/KN/2025 tanggal 30 April 2025 dan BAST Nomor BA-121/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	23.049.794.000	(1)	(23.049.794.000)	-	-
84	Neraca (BT)	Ruko Manyar Indah, Jalan Ngagel Jaya Selatan Blok E-12, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LAP-0235/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai KEP-40/KN/2025 tanggal 26 Maret 2025 dan BAST Nomor BA-121/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	897.600.000	(1)	(897.600.000)	-	-
85	Neraca (BS)	Jalan Raya Sapan, Kelurahan Bojong Emas, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	PSP ke Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Polda Jabar sesuai KEP-56/KN/2025 tanggal 6 Mei 2025 dan BAST Nomor BA-118/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	3	5.621.284.000	(3)	(5.621.284.000)	-	-
86	Neraca (BT)	Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-58/KN/2025 tanggal 6 Mei 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	2	87.584.147.000	(2)	(87.584.147.000)	-	-
87	Neraca (AT)	Jalan Ir. H Juanda Nomor 144/246, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Provinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor LP-0028/1/KNL.0802/2025 tanggal 8 April 2025. Selanjutnya PSP ke Kementerian Perdagangan sesuai KEP-65/KN/2025 tanggal 22 Mei 2025 dan BAST Nomor BA-124/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	2.001.380.000	(1)	(2.001.380.000)	-	-
88	Neraca (BS)	Blok F-09 No. 01, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.120.392.000	(1)	(1.120.392.000)	-	-
89	Neraca (BS)	Blok F-09 No. 02, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.120.392.000	(1)	(1.120.392.000)	-	-
90	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 08, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	539.185.000	(1)	(539.185.000)	-	-
91	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 09, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	539.185.000	(1)	(539.185.000)	-	-
92	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 10, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	539.185.000	(1)	(539.185.000)	-	-
93	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 11, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	539.185.000	(1)	(539.185.000)	-	-
94	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 15, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-
95	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 16, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-
96	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 17, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-
97	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 18, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-
98	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 19, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-
99	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 20, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.105.523.000	(1)	(1.105.523.000)	-	-
100	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 21, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.105.523.000	(1)	(1.105.523.000)	-	-
101	Neraca (BS)	Blok GR 19 No.23, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-
102	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 24, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
103	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 25, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	786.311.000	(1)	(786.311.000)	-	-
104	Neraca (BS)	Blok F-04 No. 01, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.748.904.000	(1)	(1.748.904.000)	-	-
105	Neraca (BS)	Blok F-07 No. 23, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.093.065.000	(1)	(1.093.065.000)	-	-
106	Neraca (BS)	Blok F-07 No. 24, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.502.964.000	(1)	(1.502.964.000)	-	-
107	Neraca (BS)	Blok F-07 No. 25, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	PSP ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-70/KN/2025 tanggal 9 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-123/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.502.964.000	(1)	(1.502.964.000)	-	-
108	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 1222/DAMAI, LUAS 14.930M2, TERLETAK DI JL. JEND. SUDIRMAN, KEL. DAMAI, KEC. BALIKPAPAN TIMUR, KODYA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Balikpapan Nomor 0196/1/PRO-01/KNL.1301/01.01.00/2024	1	9.886.800.000	-	34.807.677.000	1	44.694.477.000
109	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 2713/BATU AMPAR, LUAS 365M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI KOMPLEKS PERUMAHAN BANGUN REKSA ASRI BLOK B-0, JALAN SOEKARNO-HATTA, KELURAHAN BATU AMPAR, KEC BALIKPAPAN UTARA, KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Balikpapan Nomor 0163/1/PRO-01/KNL.1301/01.01.00/2024	1	468.500.000	-	715.728.000	1	1.184.228.000
110	Neraca (BS)	Kompleks Perumahan Bangun Reksa Asri Blok C, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Batu Ampar, Kec Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Balikpapan Nomor 0165/1/PRO-01/KNL.1301/01.01.00/2024	1	162.800.000	-	1.100.686.000	1	1.263.486.000
111	Neraca (AT)	SEBIDANG TANAH SHGB NO. 1067, LUAS 216M2, BERIKUT BANGUNAN RUMAH DI ATASNYA, TERLETAK DI KOMP. PERUMAHAN BATU AMPAR LESTARI ,JL FLAMBOYAN NO. A 4/5, KELURAHAN BATU AMPAR, KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA, KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Balikpapan Nomor 0166/1/PRO-01/KNL.1301/01.01.00/2024	1	377.700.000	-	534.025.000	1	911.725.000
112	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 2712, LUAS 360M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI KOMPLEKS PERUMAHAN BANGUN REKSA ASRI BLOK B-50, JALAN SOEKARNO-HATTA, KELURAHAN BATU AMPAR, KEC BALIKPAPAN UTARA, KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Balikpapan Nomor 0164/1/PRO-01/KNL.1301/01.01.00/2024	1	397.500.000	-	545.612.000	1	943.112.000
113	Neraca (BS)	JL. DESA SUKATANI RT/RW 02/03, SUKATANI - KALIANDA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 207/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	1.452.831.000	-	3.830.690.000	1	5.283.521.000
114	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.64, LUAS 320 M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. DESA SIDOREJO NO. 83 RT/RW 003/02, DUSUN II, DESA SIDOREJO, KEC. SIDOMULYO, KAB. LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 195/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	110.863.200	-	24.635.800	1	135.499.000
115	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.99, LUAS 2.725 M2, TERLETAK DI JL.RAYA CANDI MAS GG.LUMAYAN, DESA CANDIMAS, KEC. NATAR, KAB. LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 193/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	283.400.000	-	678.120.000	1	961.520.000
116	Neraca (BT)	CAMPANG RAYA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 208/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	983.000.000	-	1.343.279.000	1	2.326.279.000
117	Neraca (BS)	Desa Sidomakmur, Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 206/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	314.213.000	-	1.690.466.000	1	2.004.679.000
118	Neraca (BS)	RAJABASA BANDAR LAMPUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 8201/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	44.743.000	-	1.016.695.000	1	1.061.438.000
119	Neraca (BS)	RAJABASA BANDAR LAMPUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 7201/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	58.802.000	-	1.351.603.000	1	1.410.405.000
120	Neraca (BS)	RAJABASA BANDAR LAMPUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 9201/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	78.108.000	-	730.330.000	1	808.438.000
121	Neraca (AT)	GG. NUNYAI, KEL. RAJABASA, BANDAR LAMPUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 0203/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	216.116.702	-	1.065.669.298	1	1.281.786.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
122	Neraca (AT)	GG MARWAN ,KEL. SUKAJAWA, TANJUNGKARANG BARAT, BANDAR LAMPUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 205/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	244.810.007	-	496.011.993	1	740.822.000
123	Neraca (AT)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.96, LUAS 4.670 M2, TERLETAK DI JL. DR. DANAU REJO, KELURAHAN BRANTI RAYA, KEC. NATAR, KAB. LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 194/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	172.323.000	-	2.888.134.000	1	3.060.457.000
124	Neraca (BS)	JAGABAYA II KEC. SUKARAME, BANDAR LAMPUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 200/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	112.700.000	-	219.620.000	1	332.320.000
125	Neraca (BS)	DESA KEDAMAIAN, DAN DESA CAMPANG RAYA, KEC. TANJUNG KARANG TIMUR, KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 0255/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024. Selanjutnya ditetapkan status penggunaan kepada Kementerian Pertahanan sesuai KEP-116/KN/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025	12	122.682.504.000	(12)	(122.682.504.000)	-	-
126	Neraca (AT)	Komplek Gading Tutuka Jl.Gading Barat Blok N3 No.1 Desa Cingcin Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandung Nomor 0272/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2024	1	253.670.000	-	543.900.000	1	797.570.000
127	Neraca (AT)	Komplek Gading Tutuka Jl. Raya Gading Boulevard Blok F3A-3 Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandung Nomor 0273/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2024	1	193.720.000	-	375.031.000	1	568.751.000
128	Neraca (AT)	Komp. Gading Tutuka JL. Raya Gading Boulevard Blok E3A-4 Desa Cingcin, Kec. Katapang, Kab. Bandung	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandung Nomor 0275/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2024	1	209.270.000	-	402.412.000	1	611.682.000
129	Neraca (AT)	Komp. Gading Tutuka JL. Raya Gading Boulevard Blok F2-27 Desa Cingcin, Kec. Katapang, Kab. Bandung	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandung Nomor 0276/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2024	1	265.060.000	-	558.428.000	1	823.488.000
130	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.558, LUAS 8.404M2, TERLETAK DI JL. MARTAPURA LAMA KM. 16,6, DESA PEJAMBUAN, KEC. SUNGAI TABUK, KAB. BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor 0319/1/PRO-01/KNL.1203/01.01.00/2024	1	78.000.000	-	1.387.445.000	1	1.465.445.000
131	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 554, LUAS 16.043M2, TERLETAK DI JALAN MARTAPURA LAMA KM. 16.8, DESA PEJAMBUAN, KEC. SUNGAI TABUK, KAB BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor 0318/1/PRO-01/KNL.1203/01.01.00/2024	1	169.000.000	-	2.837.638.000	1	3.006.638.000
132	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.553/PEJAMBUAN, LUAS 18.546M2, TERLETAK DI JL. MARTAPURA LAMA KM. 16,6, DESA PENJAMBUAN, KEC. SUNGAI TABUK, KAB. BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor 0317/1/PRO-01/KNL.1203/01.01.00/2024	1	108.600.000	-	(35.452.000)	1	73.148.000
133	Neraca (BS)	JL. MARTAPURA LAMA KM. 16,7, DESA PENJAMBUAN, KEC. SUNGAI TABUK, KAB. BANJAR	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor 0316/1/PRO-01/KNL.1203/01.01.00/2024	1	-	-	10.094.000	1	10.094.000
134	Neraca (BS)	Perum Duta Indah, Jalan Palem IV Blok H3 No.1, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0241/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	490.420.000	-	796.765.000	1	1.287.185.000
135	Neraca (BS)	Kampung Cibuluh (Blok 16), Kel. Bojongmanggu, Kec. Cibarusah, Bekasi	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0243/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	289.200.000	-	2.925.685.000	1	3.214.885.000
136	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok C No. 26 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0233/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	174.900.000	-	680.368.000	1	855.268.000
137	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok C No. 27 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0233/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	174.900.000	-	680.368.000	1	855.268.000
138	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok C No. 30 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0233/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	174.900.000	-	680.368.000	1	855.268.000
139	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok C No. 31 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0233/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	174.900.000	-	680.368.000	1	855.268.000
140	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok B No. 11 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0233/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	343.200.000	(1)	(343.200.000)	-	-
141	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok B No. 12 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0233/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	343.200.000	(1)	(343.200.000)	-	-

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
142	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok B No. 15 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0233/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	174.900.000	(1)	(174.900.000)	-	-
143	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok B No. 16 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0233/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	343.200.000	(1)	(343.200.000)	-	-
144	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok B No. 17 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0233/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	174.900.000	(1)	(174.900.000)	-	-
145	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok B No. 18 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0234/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	174.900.000	(1)	(174.900.000)	-	-
146	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok B No. 6 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0234/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	174.900.000	(1)	(174.900.000)	-	-
147	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok B No. 7 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0234/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	174.900.000	(1)	(174.900.000)	-	-
148	Neraca (AT)	Sebidang tanah sertipikat SHGB No. 4524/BEKASI JAYA, luas 57, berikut bangunan ruko di atasnya, terletak di JL. IR. H. JUANDA NO. 137 Blok B NO. 8 RT/RW 05/01 BEKASI JAYA - BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0234/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	174.900.000	(1)	(174.900.000)	-	-
149	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok B No. 9 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0234/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	174.900.000	(1)	(174.900.000)	-	-
150	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok D No.10, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	174.900.000	(1)	(174.900.000)	-	-
151	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok D No.11, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	174.900.000	(1)	(174.900.000)	-	-
152	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok D No.12, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	174.900.000	-	804.579.000	1	979.479.000
153	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok D No.15, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	174.900.000	-	804.579.000	1	979.479.000
154	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok D No.16, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	174.900.000	-	804.579.000	1	979.479.000
155	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok D No.17, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	174.900.000	-	804.579.000	1	979.479.000
156	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok D No.19, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	174.900.000	-	804.579.000	1	979.479.000
157	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok D No.9, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	174.900.000	-	804.579.000	1	979.479.000
158	Neraca (BT)	Pertokoan Sumber Arta, Jalan Inspeksi Kalimalang Blok I No.4, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0242/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	709.800.000	-	272.660.000	1	982.460.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
159	Neraca (BT)	Perum. Graha Asri (d.h Puri Asri) Blok D 6 No. 16, Kel. Telajung, Kec. Setu, Kab. Bekasi, 17320	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0237/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	56.200.000	-	222.938.000	1	279.138.000
160	Neraca (BT)	PERUM GRAHA ASRI(D/H PURI ASRI) BLOK C10 NO. 5, DESA TELAJUNG, KEC. SETU, KAB. BEKASI	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0238/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	81.540.000	-	290.644.000	1	372.184.000
161	Neraca (BT)	Jalan Suluki / Cempaka No. 8A RT. 03 / RW 04, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0239/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	2	4.630.500.000	-	5.575.393.000	2	10.205.893.000
162	Neraca (AT)	JL.JEJALEN RAYA RT 02/02.DS MANGUN JAYA TAMBUN, KEC. TAMBUN, KAB. BEKASI 17510	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0244/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	520.400.000	-	2.900.548.000	1	3.420.948.000
163	Neraca (BS)	PERUM DUTA INDAH, JL. KENANGA 1 BLOK I/6 NO. 1 RT/RW 07/15, JATIMAKMUR - PONDOK GEDE	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0240/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024	1	344.720.000	-	1.116.053.000	1	1.460.773.000
164	Neraca (AT)	Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok B No. 10 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor 0233/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian HAM sesuai Kepdirjen Nomor KEP-127/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-265/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	343.200.000	(1)	(343.200.000)	-	-
165	Neraca (BS)	2 (DUA) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 1466 DAN 1467, LUAS KESELURUHAN 19.337M2, TERLETAK DI GANG KUBURAN CINA RT. 002 / RW. 08 KEL. SEKETENG, KEC.UMASIMA, KAB. SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bima Nomor 136/1/PRO-01/KNL.1404/01.01.00/2024	2	52.200.000	-	356.071.000	2	408.271.000
166	Neraca (BS)	Perum Reny Jaya Blok D.2 No. 4 RT. 02 RW 07, Kel. Pondok Petir, Kec. Sawangan, Depok	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0317/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	2	347.800.000	-	116.652.000	2	464.452.000
167	Neraca (AT)	Taman Palem Gardenia Blok DD Puncak RT/RW 02/04, Desa Palasari, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0539/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	4.773.600.000	-	(1.907.195.000)	1	2.866.405.000
168	Neraca (BS)	Jalan Kampung Babakan Kemasan No. 47 Rt. 01/02, Cilebut Barat - Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0210/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	423.355.770	-	829.019.230	1	1.252.375.000
169	Neraca (BT)	Jalan Ciburial No. 15 RT/RW 01/05, Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0536/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	2.851.700.000	-	4.614.534.000	1	7.466.234.000
170	Neraca (BS)	VILLA BATU TULIS BLOK B1/2 RT/RW 05/07, BATU TULIS - BOGOR SELATAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0211/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	59.200.000	-	218.791.000	1	277.991.000
171	Neraca (BS)	Masuk ± 500 m ke arah timur dari Jalan Raya Ciseeng-Parung, desa bojong sempu, Kec. Parung, Kab. Bogor	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0218/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	1.024.000.000	-	1.202.576.000	1	2.226.576.000
172	Neraca (BS)	Komplek Villa Orchid I Permai Blok A No. 5, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0541/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	167.970.000	-	260.899.000	1	428.869.000
173	Neraca (BS)	Perum. Bumi Cimanggis Indah Blok A.2 No. 3, Kel. Sukatani, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Prop. Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0246/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	305.000.000	-	236.470.000	1	541.470.000
174	Neraca (BS)	2 (DUA) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 134 DAN 559/CIBOGOR, LUAS KESELURUHAN 75M2, BERIKUT BANGUNAN RUKO DI ATASNYA, TERLETAK DI JALAN DEWI SARTIKA NO.9N, KEL. CIBOGOR, KEC. BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0212/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	2	972.500.000	-	1.718.000	2	974.218.000
175	Neraca (BS)	3 (tiga) bidang tanah sertipikat SHM No. 141, 142, dan 150/GANDUL, luas keseluruhan 2.250 m2, berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, terletak di JL. RAJAWALI Blok F-9 NO. 150 GRIYA CINERE 1, DESA GANDUL, KEC. SAWANGAN, BOGOR	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0313/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	3	2.880.000.000	-	7.414.853.000	3	10.294.853.000
176	Neraca (BS)	Jalan Cilengsar II No. 24, Desa Cipanas, Kec. Pacet, Kab. Cianjur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0542/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	613.080.000	-	1.586.835.000	1	2.199.915.000
177	Neraca (BS)	Taman Permata Gadog B.5 No. 6, Desa Gadog, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 543/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	155.990.000	-	141.102.000	1	297.092.000
178	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 5295/SUKATANI, LUAS 175M2, TERLETAK DI PERUM. BUMI CIMANGGIS INDAH BLOK A.2 NO. 19, KEL. SUKATANI, KEC. CIMANGGIS, KOTA DEPOK, PROP. JAWA BARAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0247/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	376.300.000	-	340.907.000	1	717.207.000
179	Neraca (BS)	Jalan Irian Blok H No. 181, Kel. Limo, Kec. Sawangan Kota / Kab. Depok, 16515	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0315/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	2.488.000.000	-	3.332.187.000	1	5.820.187.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
180	Neraca (BS)	Jl. Komplek Villa Bukit Nagrak Kav.22 Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0437/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	2	292.020.000	-	102.336.000	2	394.356.000
181	Neraca (BS)	Jl. Komplek Villa Bukit Nagrak Kav.26 Desa Balekambang Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 4370/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	2	292.020.000	-	102.336.000	2	394.356.000
182	Neraca (BS)	Komplek Green Apple Blok 1 No.91 Desa Sindanglaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0544/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	563.510.000	-	(75.144.000)	1	488.366.000
183	Neraca (BS)	Desa Sukanagalih, Desa Cibadak, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Prop. Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0545/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	2	9.099.750.000	-	(801.992.000)	2	8.297.758.000
184	Neraca (BS)	KOMPLEK PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA BLOK H 1 NO. 4, KEL. KATULAMPA, KEC. BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0208/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	3.874.586.000	-	649.352.000	1	4.523.938.000
185	Neraca (BS)	JL KAMPUNG BEBEK, BUMI PANGKALAN INDAH RT 02 RW 07, DESA KEDUNG HALANG, KEC. KEDUNG HALANG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0214/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	6.575.930.000	-	26.615.000	1	6.602.545.000
186	Neraca (BS)	JL. PIPA GAS ALAM CIBUBUR , DESA CURUG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	2	9.815.000.000	-	(603.152.000)	2	9.211.848.000
187	Neraca (BS)	JL. PIPA GAS ALAM CIBUBUR , DESA CURUG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	2	11.739.000.000	-	5.026.563.000	2	16.765.563.000
188	Neraca (BS)	JL. PIPA GAS ALAM CIBUBUR , DESA CURUG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	2	11.739.000.000	-	(9.343.920.000)	2	2.395.080.000
189	Neraca (BS)	Jl. Raya Pajajaran Rt.01 / RW.03, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0215/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	1.113.200.000	-	3.374.061.000	1	4.487.261.000
190	Neraca (BS)	JL. H. MUHAMMAD NUR (JL. INPRES) NO. 98 RT/RW 01/05, DESA CIBEUREUM, KEC. CISARUA, KAB BOGOR, JAWA BARAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0216/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	938.445.000	-	565.072.000	1	1.503.517.000
191	Neraca (BS)	Jalan Kampung, Kel. Jampang, Kec. Parung, Kab. Bogor	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0219/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024. Selanjutnya Laku terjual lelang pada KPKNL Bogor sesuai RL Nomor 773/08.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025	5	1.212.000.000	(5)	(1.212.000.000)	-	-
192	Neraca (BS)	Jalan Krukut Raya, Kel. Krukut, Kec. Limo, Depok	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0250/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	574.000.000	-	1.947.172.000	1	2.521.172.000
193	Neraca (BS)	KOMPLEK PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA BLOK H-1 NO. 3, Kel. KATULAMPA, KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0207/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	8.155.647.000	-	1.196.517.000	1	9.352.164.000
194	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO.1223, LUAS 475 M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI PERUMAHAN BILLABONG PARK VIEW BLOK D4 NO. 7, CIMANGGIS - BOJONG GEDE, BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0209/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	324.868.216	-	571.991.784	1	896.860.000
195	Neraca (AT)	Jalan Komplek Rose Garden F8, Desa Cipendawa, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0546/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	717.960.000	-	484.906.000	1	1.202.866.000
196	Neraca (BS)	Masuk ± 500 m ke arah timur dari Jalan Raya Ciseeng-Parung, Kel. Ciseeng, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0217/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	843.375.000	-	3.037.927.000	1	3.881.302.000
197	Neraca (BS)	Jalan Haji Bona Kampung Sasak Blok Rawa RT. 01/RW 08, Kel. Limo, Kec. Limo, Depok	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0248/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	1.069.000.000	-	4.691.756.000	1	5.760.756.000
198	Neraca (BS)	± 150 meter dari jalan Dwi Karya Desa Berekah Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 436/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	3	205.390.000	-	569.353.000	3	774.743.000
199	Neraca (BS)	JL. Vihara, DS. Cipanas, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0548/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	352.170.000	-	1.047.456.000	1	1.399.626.000
200	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 1506, LUAS 605M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL.MESJID BOGOR BARU BLOK A7/17 KEL. TEGAL LEGA, KEC. BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 213/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	1.665.801.592	-	2.091.464.408	1	3.757.266.000
201	Neraca (BS)	2 (DUA) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO 8 DAN 9, LUAS KESELURUHAN 1.203M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI RT/RW 02/01,JL. KAMPUNG KANDIH , DESA KAMPUNG KANDIH, KEC. LUBUK SIKAPING, KAB. PASAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bukittinggi Nomor 0063/1/PRO-01/KNL.0302/01.01.00/2024	2	718.140.000	-	(443.572.000)	2	274.568.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
202	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 58, LUAS 674M2, TERLETAK DI KEL.LABUH BASILANG, KEC. PAYAKUMBUH BARAT, KODYA PAYAKUMBUH, PROVINSI SUMATERA BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bukittinggi Nomor 0062/1/PRO-01/KNL.0302/01.01.00/2024	1	202.200.000	-	371.104.000	1	573.304.000
203	Neraca (BT)	JL. MAKMUR NO. 166 RT/RW 001/06, MAJALENGKA KULON	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 184/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	665.490.000	-	(289.888.000)	1	375.602.000
204	Neraca (BS)	Jl. Raya Villa Intan, Desa Jadimulya Kecamatan Cirebon Utara, Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 276/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	2	110.000.000	-	116.981.000	2	226.981.000
205	Neraca (BS)	Gang Makam Blok Grogol No.4 RT.01/RW.03 Desa Grogol, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 0277/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	171.600.000	-	269.115.000	1	440.715.000
206	Neraca (BS)	Sebidang tanah sertipikat SHM No. 193, luas 155 m2, terletak JL.KEBON JERUK XVII, Jakarta Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0157/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	940.000.000	-	829.132.000	1	1.769.132.000
207	Neraca (BS)	JL. PASAR SENEN DALAM VI NO. 11 RT/RW 14/04, SENEN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0149/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	1.943.500.000	-	(294.305.000)	1	1.649.195.000
208	Neraca (AT)	SEBIDANG TANAH SERTIPIKAT SHM NO. 311, LUAS 2.112 M2, TERLETAK DI JL. JAGAKARSA KEBAGUSAN GG. LANGGAR III RT/RW 11/03, KEL. JAGAKARSA, KEC. PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0156/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	3.194.300.000	-	12.363.723.000	1	15.558.023.000
209	Neraca (BS)	PERUM PD. GADING UTAMA, JL. PEGANGSAAN INDAH BARAT III BLOK H NO.22, KEL. PEGANGSAAN DUA, KEC. KLP GADING	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 245/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	904.040.000	-	1.029.847.000	1	1.933.887.000
210	Neraca (BS)	PERUMAHAN CITRA GARDEN L BLOK B-5 NO.08 - KALIDERES	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0260/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	667.019.695	-	290.267.305	1	957.287.000
211	Neraca (BT)	Sebidang tanah sertipikat SHGB No. 1909/Rawa Buaya, luas 195 m2, berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, terletak di PERUMAHAN BOJONG INDAH JL. DURIAN 1/7 NO. 1 RT.06/RW.08 KEL. RAWA BUAYA, JAKARTA BARAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0258/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	1.588.350.000	-	368.595.000	1	1.956.945.000
212	Neraca (BS)	JL. KRAMAT VII NO. 30, KEL. KENARI, KEC. SENEN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0151/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	1.472.967.279	-	2.054.598.721	1	3.527.566.000
213	Neraca (BS)	JL. KRAMAT VII NO. 32, KEL. KENARI, KEC. SENEN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 150/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	1.526.412.295	-	2.131.124.705	1	3.657.537.000
214	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIPIKAT SHP NO. 42/PETOJO, LUAS 940M2, BERIKUT BANGUNAN RUMAH DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. KAJI NO. 16, KEL. PETOJO, KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0242/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	6.068.600.000	-	26.918.097.000	1	32.986.697.000
215	Neraca (AT)	KOMPLEKS DISKUM CIPINANG MUARA RT/RW 01/12, CIPINANG MUARA - JATINEGARA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0267/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024. selanjutnya koreksi karena salah aset, seharusnya laporan ini untuk aset PRK-B001315	1	1.380.000.000	-	-	1	1.380.000.000
216	Neraca (AT)	PERUMAHAN BOJONG INDAH, JL. MANGGIS RAYA NO. 31, RT.003/06, KEL. RAWA BUAYA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0204/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	483.020.000	-	1.572.954.000	1	2.055.974.000
217	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIPIKAT SHM NO. 896, LUAS 475 M2, BERIKUT BANGUNAN RUMAH DI ATASNYA, TERLETAK DI JL DASA RAYA NO. 51, KEL. GANDARIA UTARA, KEC. KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0205/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	3.111.250.000	-	2.231.599.000	1	5.342.849.000
218	Neraca (BS)	JL. MT. HARYONO KV 12-13, KEL. BIDARACINA, KEC. JATINEGARA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0261/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024. selanjutnya koreksi karena salah aset, seharusnya laporan ini untuk aset PRK-B001316	1	154.567.500.000	-	-	1	154.567.500.000
219	Neraca (BS)	JL. TAMAN KB. JERUK B1/33 MERUYA UDIK	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0259/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024. selanjutnya koreksi karena salah aset, seharusnya laporan ini untuk aset PRK-B001740	1	1.228.100.000	-	-	1	1.228.100.000
220	Neraca (BS)	KAMPUNG CURUG, PONDOK KELAPA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0276/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	2	4.952.500.000	-	(474.309.000)	2	4.478.191.000
221	Neraca (BS)	JL. GADING MAS BARAT RAYA NO.1 RT/RW O5 / 011, KELAPA GADING	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0265/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	3.382.647.000	-	3.745.534.000	1	7.128.181.000
222	Neraca (BT)	JL. TANGKAS III BLOK I 1, PETUKANGAN SELATAN, PESANGGRAHAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0275/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	702.000.000	-	965.058.000	1	1.667.058.000
223	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIPIKAT SHM NO. 5, LUAS 2.865M2, TERLETAK DI KEL. JOGLO, KEC. KEMBANGAN, JAKARTA BARAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0266/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	5.965.200.000	-	36.542.330.000	1	42.507.530.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
224	Neraca (BS)	PERUMAHAN MENTENG METROPOLITAN BLOK D4 NO. 24 UJUNG MENTENG - CAKUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0252/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	584.028.000	-	413.487.000	1	997.515.000
225	Neraca (BS)	PERUMAHAN MENTENG METROPOLITAN BLOK D5 NO. 31 UJUNG MENTENG - CAKUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0251/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	503.750.000	-	552.950.000	1	1.056.700.000
226	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.86, LUAS 1.972M2, TERLETAK DI JL. RANTAU (MASUK MELALUI KOMPLEKS PERTAMINA) RT/RW 12/04, BAJUBANG, KEC. MUARA BULIAN, KAB. BATANGHARI, PROVINSI JAMBI.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jambi Nomor 0190/1/PRO-01/KNL.0401/01.01.00/2024	1	71.800.000	-	85.434.000	1	157.234.000
227	Neraca (BS)	JL. R. BACHRUN, LORONG HALAKITA RT/RW 11/04, SUNGAI PUTRI - TELANAIPURA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jambi Nomor 0167/1/PRO-01/KNL.0401/01.01.00/2024	1	896.100.000	-	(346.888.000)	1	549.212.000
228	Neraca (BT)	JL. KAPT. PATIMURA LORONG ABDUL HAMID RT 19/07, SIMPANG IV SIPIN - TELANAIPURA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jambi Nomor 170/1/PRO-01/KNL.0401/01.01.00/2024	1	4.840.580.000	-	9.512.091.000	1	14.352.671.000
229	Neraca (BS)	2 (DUA BIDANG) TANAH SERTIPIKAT SHM NO. 15 DAN 16 LUAS KESELURUHAN 92.289 M2, TERLETAK DI DESA SUNGAI JERAT, KEC. JAMBI LUAR KOTA, KAB. MUARO JAMBI, PROPINSI JAMBI	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jambi Nomor 0165/1/PRO-01/KNL.0401/01.01.00/2024	2	381.700.000	-	237.716.999	2	619.416.999
230	Neraca (BS)	2 (DUA) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 5218 DAN 5219, LUAS KESELURUHAN 140M2, BERIKUT BANGUNAN RUKO DI ATASNYA, TERLETAK DI KOMPLEKS PERTOKOAN TERMINAL SIMPANG RIMBO JL. LINGKAR BARAT BLOK B NO. 1 DAN 2, RT/RW 07/03, KENALI BESAR, KOTA BARU, PROVINSI JAMBI.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jambi Nomor 0166/1/PRO-01/KNL.0401/01.01.00/2024	2	344.700.000	-	76.234.000	2	420.934.000
231	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.210, LUAS 14.304 M2, TERLETAK DI JL. LINTAS TIMUR AUR DURI RT/RW 11/08, PENYENGAT RENDAH, TELANAIPURA, JAMBI, PROVINSI JAMBI.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jambi Nomor 0169/1/PRO-01/KNL.0401/01.01.00/2024	1	874.300.000	-	916.418.000	1	1.790.718.000
232	Neraca (BT)	DESA PIJOAN, M.BULIAN JAMBI	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jambi Nomor 0188/1/PRO-01/KNL.0401/01.01.00/2024	2	96.000.000	-	1.308.708.000	2	1.404.708.000
233	Neraca (BT)	JL.JAMBI-KUMPEH UW KM.13 , JAMBI LUAR KOTA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jambi Nomor 164/1/PRO-01/KNL.0401/01.01.00/2024	2	231.272.600	-	4.146.087.399	2	4.377.359.999
234	Neraca (BS)	LRG. RIZQI 1 RT.13 KEL. PEMATANG SUKUR	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jambi Nomor 0168/1/PRO-01/KNL.0401/01.01.00/2024	1	652.890.000	-	3.221.497.000	1	3.874.387.000
235	Neraca (BT)	JL. KOL. ABUNJANI NO. 34, SELAMAT, TELAN/AI PURA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jambi Nomor 171/1/PRO-01/KNL.0401/01.01.00/2024	1	477.550.000	-	959.977.000	1	1.437.527.000
236	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO.529/TANJUNG RIA, LUAS 700M2, TERLETAK DI JL. PASIFIK INDAH, KEL TANJUNG RIA, KEC JAYAPURA UTARA, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jayapura Nomor 0147/1/PRO-01/KNL.1702/01.01.00/2024	1	364.000.000	-	(272.789.000)	1	91.211.000
237	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 242/ANGKASA, LUAS 750M2, TERLETAK DI KEL ANGKASA, KEC JAYAPURA UTARA, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jayapura Nomor 0148/1/PRO-01/KNL.1702/01.01.00/2024	1	520.000.000	-	(423.294.000)	1	96.706.000
238	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 591/ARGAPURA, LUAS 750M2, TERLETAK DI JL KS. TUBUN BELAKANG, KEL ARGAPURA, KEC JAYAPURA SELATAN, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jayapura Nomor 0149/1/PRO-01/KNL.1702/01.01.00/2024	1	807.100.000	-	(320.391.000)	1	486.709.000
239	Neraca (BT)	Jl Kelapa II, Desa Kelapa Lima, Kec. Merauke, Kab. Dati II Merauke	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jayapura Nomor 0151/1/PRO-01/KNL.1702/01.01.00/2024	1	30.400.000	-	1.687.049.000	1	1.717.449.000
240	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 539/DOBONSOLO, LUAS 1.500M2, TERLETAK DI DESA DOBONSOLO, KEC SENTANI, KAB JAYAPURA, PROVINSI PAPUA BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jayapura Nomor 0150/1/PRO-01/KNL.1702/01.01.00/2024	1	197.500.000	-	960.282.000	1	1.157.782.000
241	Neraca (AT)	Kol. Sugiyono No. 5 (D/h Jl. Damarwulan) RT 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Probolinggo	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jember Nomor 0061/1/PRO-01/KNL.1004/01.01.00/2024	1	11.071.242.474	-	(7.235.408.474)	1	3.835.834.000
242	Neraca (BS)	Jl. Raya Pajarakan Kraksan, Kelurahan Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, Probolinggo	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jember Nomor 0060/1/PRO-01/KNL.1004/01.01.00/2024	1	194.300.000	-	255.663.000	1	449.963.000
243	Neraca (BS)	JALAN BAKTI NO.72, DESA KISARAN TIMUR	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Kisaran Nomor 208/1/PRO-01/KNL.0203/01.01.00/2024	1	804.900.000	-	1.131.379.000	1	1.936.279.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
244	Neraca (BS)	DESA ALUE PAPEUN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0192/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	3	158.801.919	-	(20.450.919)	3	138.351.000
245	Neraca (BS)	JL. LORONG PIM DAN LORONG TAMBAK, TAMBON TUNONG - DEWANTARA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0190/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	2	533.900.000	-	354.956.000	2	888.856.000
246	Neraca (BS)	JL. LORONG (PASE) DS. MONGEUDONG, BANDA SAKTI DAN JL. EXXON MOBIL (CLUSTER2), DS. NIBONG BAROH, TANAH LUAS	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0185/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	2	961.100.000	-	529.102.000	2	1.490.202.000
247	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 80 LUAS 9.520M2, TERLETAK DI JL. SANDI, COT GIREK KANDANG, MUARA DUA, LHOKSEUMAWE (D.H. ACEH UTARA)	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0186/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	777.400.000	-	7.915.346.000	1	8.692.746.000
248	Neraca (BS)	DESA TAMBON BAROH, DEWANTARA - ACEH UTARA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0191/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	1.110.619.391	-	647.882.609	1	1.758.502.000
249	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 511, LUAS 756M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. BLANG MALO (TGK NATAR), DESA TUMPOK TEUNGOH, BANDA SAKTI, LHOKSEUMAWE (D.H. ACEH UTARA).	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0188/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	415.500.000	-	549.431.000	1	964.931.000
250	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. LOH RAMBIDING, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0113/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	15.400.000	-	50.474.000	1	65.874.000
251	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. LOH RAMBIDING, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0113/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	15.400.000	-	50.474.000	1	65.874.000
252	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. LOH RAMBIDING, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0113/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	15.400.000	-	50.474.000	1	65.874.000
253	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. TENGKU SEUMATANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0116/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	21.700.000	-	43.467.000	1	65.167.000
254	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. TENGKU SEUMATANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0117/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	21.700.000	-	40.778.000	1	62.478.000
255	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. TENGKU SEUMATANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0117/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	21.700.000	-	41.446.000	1	63.146.000
256	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. TENGKU SEUMATANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0118/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	21.700.000	-	44.174.000	1	65.874.000
257	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. TENGKU SEUMATANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0118/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	21.700.000	-	44.174.000	1	65.874.000
258	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. TENGKU SEUMATANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0117/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	24.900.000	-	38.916.000	1	63.816.000
259	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. TENGKU SEUMATANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0118/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	21.700.000	-	44.174.000	1	65.874.000
260	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. TENGKU SYAUDAN, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0120/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	21.700.000	-	59.375.000	1	81.075.000
261	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. TENGKU SYAUDAN, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0121/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	27.200.000	-	37.660.000	1	64.860.000
262	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. TENGKU CIK DI PALOH, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0114/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	49.700.000	-	107.929.000	1	157.629.000
263	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	41.093.000	1	53.893.000
264	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	41.093.000	1	53.893.000
265	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	15.000.000	-	38.893.000	1	53.893.000
266	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	27.780.000	1	40.580.000
267	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	16.000.000	-	51.365.000	1	67.365.000
268	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	41.093.000	1	53.893.000
269	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	41.093.000	1	53.893.000
270	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	41.093.000	1	53.893.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
271	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	37.925.000	1	50.725.000
272	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	41.093.000	1	53.893.000
273	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	34.679.000	1	47.479.000
274	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	27.780.000	1	40.580.000
275	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. TENGKU CIK DI PALOH, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0119/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	246.736.000	1	259.536.000
276	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	27.780.000	1	40.580.000
277	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	16.000.000	-	37.893.000	1	53.893.000
278	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. RAJA LANANG, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0112/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	1	12.800.000	-	41.093.000	1	53.893.000
279	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. LOH RAMBIDING, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0113/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	15.400.000	-	50.474.000	1	65.874.000
280	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. LOH RAMBIDING, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0113/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	15.400.000	-	50.474.000	1	65.874.000
281	Neraca (BT)	PERUMAHAN TAMAN SAKTI PERMAI, JL. LOH RAMBIDING, PADANG SAKTI - MUARA DUA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0113/1/PRO-06/KNL.0102/01.01.00/2024	1	15.400.000	-	50.474.000	1	65.874.000
282	Neraca (BS)	Jl. Dermojoyo No 1 A, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Madiun Nomor 0114/1/PRO-01/KNL.1006/01.01.00/2024	1	680.000.000	-	(293.286.000)	1	386.714.000
283	Neraca (BS)	Jl. Irian Timur Raya, Kel. Kanigoro Kec. Kanigoro - Blitar	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Malang Nomor 0115/1/PRO-01/KNL.1003/01.01.00/2024	1	594.900.000	-	384.633.000	1	979.533.000
284	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.815/MOJOLANGU, LUAS 466 M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. SIMPANG BOROBUDUR UTARA IV NO. 16 KEL. MOJOLANGU, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Malang Nomor 0137/1/PRO-01/KNL.1003/06.00.00/2024	1	2.098.000.000	-	(135.557.000)	1	1.962.443.000
285	Neraca (BT)	Desa Wonorejo, Kec. Lawang, Kab. Malang	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Malang Nomor 0140/1/PRO-06/KNL.1003/06.00.00/2024	1	41.310.000	-	538.229.000	1	579.539.000
286	Neraca (BT)	Desa Wonorejo, Kec. Lawang, Kab. Malang	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Malang Nomor 0140/1/PRO-06/KNL.1003/06.00.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertanian sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-99/KN/2025 tanggal 14 Agustus 2025 (Belum BAST).	1	12.888.000	-	1.336.736.000	1	1.349.624.000
287	Neraca (BT)	Desa Wonorejo, Kec. Lawang, Kab. Malang	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Malang Nomor 0140/1/PRO-06/KNL.1003/06.00.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertanian sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-99/KN/2025 tanggal 14 Agustus 2025 (Belum BAST).	1	13.246.000	-	729.573.000	1	742.819.000
288	Neraca (BT)	Desa Wonorejo, Kec. Lawang, Kab. Malang	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Malang Nomor 0140/1/PRO-06/KNL.1003/06.00.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian Pertanian sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-99/KN/2025 tanggal 14 Agustus 2025	1	927.110.000	-	(190.313.000)	1	736.797.000
289	Neraca (AT)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 320/TITIWUNGEN, LUAS 635M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. SAM RATULANGI 17 NO. 8 (DH. 56), KEL. TITIWUNGAN, KEC. SARIO, KOTA MANADO, PROVINSI SULAWESI UTARA.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor 0329/1/PRO-01/KNL.1601/01.01.00/2024	1	880.860.000	-	2.922.257.000	1	3.803.117.000
290	Neraca (BS)	Jl. Lingkungan II, Desa Sinombayuga, Kec. Posigadan, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor 0351/1/PRO-01/KNL.1601/01.01.00/2024	1	26.000.000	-	42.310.000	1	68.310.000
291	Neraca (AT)	Jl. Lingkungan I No. 45, Kel. Batukota, Kec. Malalayang, Kota Manado	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor 0330/1/PRO-01/KNL.1601/01.01.00/2024	1	225.000.000	-	438.293.000	1	663.293.000
292	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT NO. 105, LUAS 7.200M2, TERLETAK DI JL. BERINGIN 1, KEL. RANOWANGKO, KEC TONDANO TIMUR, KAB MINAHASA, PROVINSI SULAWESI UTARA.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor 0349/1/PRO-01/KNL.1601/01.01.00/2024	1	36.000.000	-	(14.813.000)	1	21.187.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
293	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 274, LUAS 274M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. MANGUNI XI NO. 139, KEL. PERKAMIL, KEC. TIKALA, KOTA MANADO, PROVINSI SULAWESI UTARA.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor 0331/1/PRO-01/KNL.1601/01.01.00/2024	1	78.680.000	-	649.556.000	1	728.236.000
294	Neraca (AT)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT NO. 130, LUAS 315M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. BERINGIN 1, KEL. RANOWANGKO, KEC TONDANO TIMUR, KAB MINAHASA, PROVINSI SULAWESI UTARA.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor 0335/1/PRO-01/KNL.1601/01.01.00/2024	1	151.180.000	-	305.128.000	1	456.308.000
295	Neraca (BS)	Desa Tatelu, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Manado Nomor 0348/1/PRO-01/KNL.1601/01.01.00/2024	1	125.000.000	-	285.124.000	1	410.124.000
296	Neraca (BS)	JL. CINTA RAJA NO. 8 (D/H NO. 26) RT/RW DUSUN 8, ARA CONDONG - STABAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0271/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Polda Sumut sesuai KEP-28/KN/2025 tanggal 6 Maret 2025 dan BAST Nomor BA-118/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	852.400.000	(1)	(852.400.000)	-	-
297	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 9 LUAS 3.120M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. BATANG KUIS KE LUBUK PAKAM RT/RW DUSUN II, DESA TANJUNG SARI, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0272/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	1.268.700.000	-	5.991.308.000	1	7.260.008.000
298	Neraca (BS)	JL. TENGAH DESA HELVETIA, SUNGGAL	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0279/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	2	3.886.300.000	-	16.835.655.000	2	20.721.955.000
299	Neraca (BS)	JL. SEI BATANG SERANGAN NO. 19 D RT/RW LINGKUNGAN II, DESA SEI SIKAMBING D, MEDAN PETISAH [D/H MEDAN BARAT]	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0267/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	3.551.142.064	-	1.209.562.936	1	4.760.705.000
300	Neraca (BS)	JALAN IMAM BONJOL NO.64, KELURAHAN RAMBUNG TIMUR, BINJAI SELATAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0278/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	350.600.000	-	42.501.000	1	393.101.000
301	Neraca (AT)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 1591 LUAS 93M2, BERIKUT BANGUNAN RUKO DI ATASNYA, TERLETAK DI JALAN AHMAD YANI NO. 102 A, KELURAHAN KESAWAN, MEDAN BARAT, MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0263/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	1.869.100.000	-	3.065.763.629	1	4.934.863.629
302	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO.590, LUAS 56 M2, BERIKUT BANGUNAN RUKO DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. LETDA SUDJONO GANG SUKA NO.1, KELURAHAN MEDAN ESTATE, PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0280/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	350.300.000	-	(121.225.000)	1	229.075.000
303	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 235, LUAS 14.989M2, TERLETAK DI JL. MEKATANI, DESA PATUMBAK KAMPUNG, KEC. PATUMBAK, KAB. DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0274/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	1.284.300.000	-	1.781.734.000	1	3.066.034.000
304	Neraca (BS)	JALAN T. AMIR HAMZAH NO.30, DESA SAMBIREJO	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0276/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	758.600.000	-	856.598.000	1	1.615.198.000
305	Neraca (BS)	JALAN IBADAH , DUSUN IV, DESA BANYUMAS, STABAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0273/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	163.600.000	-	177.692.000	1	341.292.000
306	Neraca (BS)	JALAN T. AMIR HAMZAH NO. 246, DESA SAMBIREJO, BINJAI	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0277/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	1.168.900.000	-	1.012.022.000	1	2.180.922.000
307	Neraca (BS)	JALAN DUSUN 5, BUMI AYU, DESA SAMBIREJO, BINJAI	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0275/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	797.200.000	-	1.237.796.000	1	2.034.996.000
308	Neraca (BT)	JALAN GB YOSUA, KELURAHAN SIDODADI.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0269/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024	1	2.085.400.000	-	8.351.068.000	1	10.436.468.000
309	Neraca (BS)	JALAN MT HARYONO NO. 218, KELURAHAN PUSAT PASAR, MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0266/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024. Selanjutnya dilakukan penilaian kembali sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan LP-417/KNL.0201/2025 tanggal 16 Desember 2025	1	1.717.700.000	-	213.066.000	1	1.930.766.000
310	Neraca (BT)	JALAN IRIAN BARAT NO.35/37, KELURAHAN GANG BUNTU, MEDAN TIMUR	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan Nomor 0268/1/PRO-06/KNL.0201/06.00.00/2024. Selanjutnya dilakukan penilaian kembali sesuai Laporan Penilaian KPKNL Medan LP-419/KNL.0201/2025 tanggal 16 Desember 2025	1	906.400.000	-	415.214.000	1	1.321.614.000
311	Neraca (BS)	DESA WANA LABUHAN MARINGGAI, WANA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Metro Nomor 0255/1/PRO-01/KNL.0503/01.01.00/2024	1	164.420.409	-	574.932.591	1	739.353.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
312	Neraca (BT)	JL. PESANTREN MULYOJATI RT/RW 03/03, MULYOJATI - METRO BARAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Metro Nomor 0341/1/PRO-01/KNL.0503/01.01.00/2024	1	1.452.000.000	-	1.548.609.000	1	3.000.609.000
313	Neraca (BS)	JL. RAYA SEKAMPUNG DUSUN V RT/RW 08, SUMBER GEDE - SEKAMPUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Metro Nomor 0238/1/PRO-01/KNL.0503/01.01.00/2024	1	159.331.300	-	2.454.281.700	1	2.613.613.000
314	Neraca (BS)	JL. BANYU URIP (JL. KALI CINTA) RT/RW 03, KOTA BUMI ILIR - KOTA BUMI	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Metro Nomor 0249/1/PRO-01/KNL.0503/01.01.00/2024	3	75.840.000	-	159.767.000	3	235.607.000
315	Neraca (BS)	DUSUN KENANGA NO.24 RT/RW 03/01 BANJAREJO KEC. BATANG HARI LAMPUNG TIMUR	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Metro Nomor 0237/1/PRO-01/KNL.0503/01.01.00/2024	1	14.495.000	-	378.836.000	1	393.331.000
316	Neraca (BT)	DESA BINTUNGAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Padang Nomor 0090/1/PRO-01/KNL.0301/01.01.00/2024	1	1.099.640.000	-	1.340.157.000	1	2.439.797.000
317	Neraca (BS)	JL. LINGKUNGAN RT/RW 01/01, AMPALU - LUBUK BEGALUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Padang Nomor 0101/1/PRO-01/KNL.0301/01.01.00/2024	1	70.000.000	-	243.412.000	1	313.412.000
318	Neraca (BS)	DESA KEL. AMPALU KEC. LUBUK BEGALUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Padang Nomor 0102/1/PRO-01/KNL.0301/01.01.00/2024	1	37.500.000	-	143.753.000	1	181.253.000
319	Neraca (BS)	JL. LINGKUNGAN PERUMAHAN LIMAU MANIS, LIMAU MANIS - PAUH	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Padang Nomor 0128/1/PRO-01/KNL.0301/01.01.00/2024	1	270.480.000	-	(18.077.000)	1	252.403.000
320	Neraca (BS)	JL.JL.ANAK AIR KEL.ANAK AIR,KEC.KOTO TANGAH(BELAKANG PESANTREN SABBIHISMA)	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Padang Nomor 0127/1/PRO-01/KNL.0301/01.01.00/2024	2	1.718.400.000	-	1.304.467.000	2	3.022.867.000
321	Neraca (BS)	3 (TIGA) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 116, 118, DAN 114, LUAS KESELURUHAN 663M2, TERLETAK DI JL. RAWANG TIMUR RT/RW 02/01, KEL. RAWANG TIMUR, KEC. PADANG SELATAN, KODYA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Padang Nomor 0098/1/PRO-01/KNL.0301/01.01.00/2024	3	225.420.000	-	497.857.000	3	723.277.000
322	Neraca (BS)	DESA NEGARI LIMAU MANIS KEC. PAUH	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Padang Nomor 0129/1/PRO-01/KNL.0301/01.01.00/2024	1	147.000.000	-	776.000	1	147.776.000
323	Neraca (AT)	ANAK AIR KOTO TANGAH PADANG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Padang Nomor 0126/1/PRO-01/KNL.0301/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Mahkamah Agung sesuai KEP-31/KN/2025 tanggal 17 Maret 2025 dan BAST Nomor BA-120/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	59.200.000	(1)	(59.200.000)	-	-
324	Neraca (AT)	DESA NAGARI LIMAU MANIS PAUH PADANG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Padang Nomor 0130/1/PRO-01/KNL.0301/01.01.00/2024	1	409.150.000	-	3.895.000	1	413.045.000
325	Neraca (BS)	KEL. MATA AIR BARAT KEC. PADANG SELATAN KODYA PADANG (JL. ST. SYAHRIR SAMPING KANTOR CAMAT PADANG)	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Padang Nomor 0097/1/PRO-01/KNL.0301/01.01.00/2024	1	195.570.000	-	503.034.000	1	698.604.000
326	Neraca (BS)	JL. LORONG TOMBAK NO. 223 RT/RW 004/51, 20 ILIR - ILIR TIMUR I	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Palembang Nomor 0283/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2024	1	65.900.000	-	1.673.546.000	1	1.739.446.000
327	Neraca (BS)	JL. SWADAYA RT.03 LK.V.KEL. KENTEN TALANG KELAPA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Palembang Nomor 0290/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2024	1	869.470.251	-	627.991.749	1	1.497.462.000
328	Neraca (BS)	JL. SWADAYA RT. 03 LK.V. KEL. KENTEN KEC. TALANG KELAPA MUSI BANYUASIN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Palembang Nomor 0291/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2024	3	4.678.405.000	-	1.254.065.000	3	5.932.470.000
329	Neraca (BS)	JL.SWADAYA RT.03 LK.V.KEL. KENTEN KEC. TALANG KELAPA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Palembang Nomor 0292/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2024	5	6.860.762.749	-	1.163.534.251	5	8.024.297.000
330	Neraca (BS)	DESA PEMATANG PALAS KEC. BANYUASIN I	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Palembang Nomor 0218/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2024	4	380.400.000	-	(95.940.000)	4	284.460.000
331	Neraca (BS)	DESA PEMATANG PALAS KEC.BANYUAIN I	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Palembang Nomor 0217/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2024	3	292.000.000	-	(42.075.000)	3	249.925.000
332	Neraca (BS)	DESA PEMATANG PALAS KEC. BANYUAIN I	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Palembang Nomor 0219/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2024	3	289.100.000	-	(72.921.000)	3	216.179.000
333	Neraca (BS)	Desa Pematang Palas, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Palembang Nomor 0220/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2024	4	2.007.483.000	-	(1.736.374.000)	4	271.109.000
334	Neraca (BT)	JL. MAYOR RUSLAN NO.798 RT/RW. 013/04 KEL. 20 ILIR I, KEC ILIR TIMUR I	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Palembang Nomor 0234/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2024	1	355.892.857	-	939.675.143	1	1.295.568.000
335	Neraca (BS)	Jl. Wahid Hasyim No. 47, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pamekasan Nomor 0082/1/PRO-01/KNL.1005/01.01.00/2024	1	340.100.000	-	761.319.000	1	1.101.419.000
336	Neraca (BS)	Jl. Raya Blega No.16, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pamekasan Nomor 80/1/PRO-01/KNL.1005/01.01.00/2024	1	652.500.000	-	792.699.000	1	1.445.199.000
337	Neraca (BT)	Jl. Trunojoyo No. 29, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pamekasan Nomor 0081/1/PRO-01/KNL.1005/01.01.00/2024	1	759.800.000	-	2.057.269.000	1	2.817.069.000
338	Neraca (BT)	Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pekalongan Nomor 0054/1/PRO-01/KNL.0903/01.01.00/2024	1	2.609.000.000	-	(1.973.967.000)	1	635.033.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
339	Neraca (BS)	JL. KEMBANG HARAPAN GG. SELIANGGURI NO. 28 RT/RW 02/05, CINTA RAJA - SAIL	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pekanbaru Nomor 74/1/PRO-01/KNL.0303/01.01.00/2024	1	601.202.400	-	2.038.509.600	1	2.639.712.000
340	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 351, LUAS 481M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. NILAM GG. KARYA NO. 14, 16, 18, 20 RT/RW 001/001, SUKARAMAI - PEKAN BARU KOTA, PEKANBARU, PROVINSI RIAU.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pekanbaru Nomor 75/1/PRO-01/KNL.0303/01.01.00/2024	1	1.427.630.421	-	619.043.579	1	2.046.674.000
341	Neraca (AT)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 151, LUAS 180M2, BERIKUT BANGUNAN RUKO DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. JEND SUDIRMAN NO. 69 / 10 - 11, PEKANBARU, PROVINSI RIAU.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pekanbaru Nomor 73/1/PRO-01/KNL.0303/01.01.00/2024	1	1.722.988.000	-	2.040.715.000	1	3.763.703.000
342	Neraca (BT)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 2858, LUAS 585M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. PAPALA III D (WADUK PERMAI), KEL BENOA MELAYU BARAT, KEC PONTIANAK SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pontianak Nomor 0162/1/PRO-01/KNL.1101/01.01.00/2024. Berdasarkan hasil penilaian, SHGB terbit diatas HPL Pemprov Kalimantan Barat dan saat ini telah menjadi Barang Milik Daerah Pemprov Kalimantan Barat, sehingga tanah tidak dilakukan penilaian	1	613.400.000	-	(476.410.000)	1	136.990.000
343	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 238, LUAS KESELURUHAN 95.270M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL DESA MEGA TIMUR, DESA MEGA TIMUR, KEC SUNGAI AMBAWANG, KAB. KUBU RAYA (DH. KAB. PONTIANAK), PROVINSI KALIMANTAN BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pontianak Nomor 0164/1/PRO-01/KNL.1101/01.01.00/2024	1	2.235.300.000	-	18.009.575.000	1	20.244.875.000
344	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 1435, LUAS 88M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI GANG MERANTI 15, KEL DARAT SEKIP, KEC PONTIANAK BARAT, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pontianak Nomor 0160/1/PRO-01/KNL.1101/01.01.00/2024	1	85.860.000	-	322.425.000	1	408.285.000
345	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 1434, LUAS 293M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI GANG MERANTI 15, KEL DARAT SEKIP, KEC PONTIANAK BARAT, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Pontianak Nomor 0161/1/PRO-01/KNL.1101/01.01.00/2024	1	279.720.000	-	1.137.147.000	1	1.416.867.000
346	Neraca (BS)	BLOK CIMUMPUT, JATIMEKAR - JATILUHUR	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor 0154/1/PRO-01/KNL.0804/01.01.00/2024	1	735.800.000	-	4.323.528.000	1	5.059.328.000
347	Neraca (AT)	Jl Rengas Dengklok 19-A, Pasar Rengas Dengklok, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kec. Rengas Dengklok, Kab. Karawang, Prop. Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor 0125/1/PRO-01/KNL.0804/01.01.00/2024	1	53.100.000	-	148.404.000	1	201.504.000
348	Neraca (AT)	Jl Rengas Dengklok 18-A, Pasar Rengas Dengklok, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kec. Rengas Dengklok, Kab. Karawang, Prop. Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor 01265/1/PRO-01/KNL.0804/01.01.00/2024	1	53.100.000	-	148.404.000	1	201.504.000
349	Neraca (AT)	Jl Rengas Dengklok 17-A, Pasar Rengas Dengklok, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kec. Rengas Dengklok, Kab. Karawang, Prop. Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor 0126/1/PRO-01/KNL.0804/01.01.00/2024	1	53.100.000	-	151.604.000	1	204.704.000
350	Neraca (AT)	Jl Rengas Dengklok 16-A, Pasar Rengas Dengklok, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kec. Rengas Dengklok, Kab. Karawang, Prop. Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor 0126/1/PRO-01/KNL.0804/01.01.00/2024	1	53.100.000	-	151.604.000	1	204.704.000
351	Neraca (AT)	Jl Rengas Dengklok 15-A, Pasar Rengas Dengklok, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kec. Rengas Dengklok, Kab. Karawang, Prop. Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Purwakarta Nomor 0126/1/PRO-01/KNL.0804/01.01.00/2024	1	54.000.000	-	150.704.000	1	204.704.000
352	Neraca (BS)	Jl. Bukit Agung U-38, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Semarang	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Semarang Nomor 247/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2024	1	892.865.000	-	647.268.000	1	1.540.133.000
353	Neraca (AT)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO.1801, LUAS 86 M2, BERIKUT BANGUNAN RUKO DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. JATI RAYA BLOK E5, KELURAHAN BANYUMANIK, KECAMATAN SEMARANG SELATAN, SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Semarang Nomor 248/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2024	1	759.600.000	-	731.421.000	1	1.491.021.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
354	Neraca (AT)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO.1020, LUAS 350 M2, BERIKUT BANGUNAN RUKO DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. PURI ANJASMARA EI/8A, KELURAHAN TAWANGREJOSARI, KECAMATAN SEMARANG BARAT, SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Semarang Nomor 0243/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai KEP-121/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-266/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	1.811.640.000	(1)	(1.811.640.000)	-	-
355	Neraca (BS)	l. Raya Semarang - Demak KM 7.8 (Raya Kaligawe KM 7.8), Desa Trimulyo, Kec.Genuk Kodya Semarang Jawa Tengah	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Semarang Nomor 0252/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2024	2	4.784.100.000	-	(1.143.901.000)	2	3.640.199.000
356	Neraca (BS)	4 (EMPAT) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 1143, 1591, 1592, LUAS KESELURUHAN 13.482M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA TERLETAK DI JALAN GEBANG SARI NO.3 KEL.GEBANG SARI, KEC.GENUK KODYA SEMARANG, , PROVINSI JAWA TENGAH.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Semarang Nomor 0251/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2024	3	8.250.000.000	-	41.560.637.000	3	49.810.637.000
357	Neraca (BS)	3 (TIGA) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM DAN SHGB NO, 132, 58, 207/MUKTIHARJO LOR, LUAS KESELURUHAN 1.352M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. INDUSTRI IV NO.121 - 124, KEL.MUKTIHARJO LOR, KEC.GENUK KOTAMADYA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Semarang Nomor 0250/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2024	3	1.715.140.000	-	3.407.490.000	3	5.122.630.000
358	Neraca (AT)	Komp. Perumahan Taman Ketapang Timur Kav 149, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Semarang	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Semarang Nomor 0245/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2024	1	450.000.000	-	595.192.000	1	1.045.192.000
359	Neraca (BS)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO.206, LUAS 264 M2, TERLETAK DI KOMP. PERUMAHAN TAMAN MAJAPAHIT BLOK EH KAV 122, JL TAMAN BUGENVIL SELATAN, KELURAHAN PEDURUNGAN LOR, KECAMATAN PEDURUNGAN, SEMARANG, , PROVINSI JAWA TENGAH.	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Semarang Nomor 0246/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2024	1	396.000.000	-	587.089.000	1	983.089.000
360	Neraca (AT)	Jl.Kapas Utara XIII blok H, Desa Gebangsari Kec.Genuk Kotamadya Semarang, Jawa Tengah	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Semarang Nomor 0249/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2024	1	133.200.000	-	1.045.367.000	1	1.178.567.000
361	Neraca (BS)	Desa Sawahan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,Jawa Tengah	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Semarang Nomor 223/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2024	1	261.465.000	-	348.602.000	1	610.067.000
362	Neraca (BS)	Jalan Yudhistira II, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Semarang Nomor 0253/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2024	1	17.288.851.000	-	31.543.480.000	1	48.832.331.000
363	Neraca (BS)	Jalan Desa Jelekungkang, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Daerah TK II Bangli	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Singaraja Nomor 0048/1/PRO-01/KNL.1402/01.01.00/2024	1	345.000.000	-	90.002.000	1	435.002.000
364	Neraca (BS)	Jalan Desa Umanyar, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Daerah TK II Bangli	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Singaraja Nomor 0049/1/PRO-01/KNL.1402/01.01.00/2024	1	275.000.000	-	148.748.000	1	423.748.000
365	Neraca (BS)	Jl. Raya Ketintang No. 108 Desa Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 139/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	1	1.470.075.000	-	2.317.919.000	1	3.787.994.000
366	Neraca (BS)	Jalan Puncak Permai Utara VI / 02, Kel. Prada Kali Kendal, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 0150/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	1	1.474.200.000	-	1.649.469.000	1	3.123.669.000
367	Neraca (BS)	Jalan Puncak Permai Utara VI/08, Kelurahan Prada Kali Kendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 0152/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	1	2.402.400.000	-	2.628.285.000	1	5.030.685.000
368	Neraca (BS)	Jl. Simogunung Barat III A No. 10 Desa Simomulyo, Kec. Tandes, Surabaya - Jawa Timur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 0161/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	1	641.700.000	-	1.430.288.000	1	2.071.988.000
369	Neraca (BT)	Jl. Jagalan No. 115 B, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Surabaya - Jawa Timur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 0179/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	1	1.060.200.000	-	1.912.112.000	1	2.972.312.000
370	Neraca (BS)	Jl. Ketintang PTT III No. 3 Desa Ketintang, Kec. Wonocolo, Surabaya - Jawa Timur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 138/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	1	556.100.000	-	388.449.000	1	944.549.000
371	Neraca (BS)	Jl. Kapas Krampung No. 20 dan 20I Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, .Surabaya - Jawa Timur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 0178/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	2	12.049.500.000	-	(6.269.524.000)	2	5.779.976.000
372	Neraca (BS)	Jl. Raya Romokalisari No. 1, Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 0142/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	1	35.457.600.000	-	169.766.796.000	1	205.224.396.000
373	Neraca (BS)	Jl. Menur GG ABM No. 2, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya - Jawa Timur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 0176/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	1	883.900.000	-	2.375.593.000	1	3.259.493.000
374	Neraca (BT)	Jl. Petemon Barat No. 47, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya - Jawa Timur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 0162/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	1	3.005.330.000	-	1.650.589.000	1	4.655.919.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
375	Neraca (BS)	Komplek Ruko Manyar Indah Blok C-22, Jl. Ngagel Jaya, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 141/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024. Selanjutnya PSP ke Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai KEP-40/KN/2025 tanggal 26 Maret 2025 dan BAST Nomor BA-121/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	747.600.000	(1)	(747.600.000)	-	-
376	Neraca (BT)	Jl. Kalijudan IX Kel. Kalijudan, Kec. Sukolilo, Surabaya - Jawa Timur	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 0177/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	1	26.424.723.000	-	(5.290.195.000)	1	21.134.528.000
377	Neraca (AT)	Jl. Raya Babat - Lamongan, Ds. Sumurgenuk, Kec. Babat, Lamongan	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor 0137/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024	1	652.960.000	-	890.106.000	1	1.543.066.000
378	Neraca (BD)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F.22, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0123/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.202.000.000	-	(70.756.000)	1	1.131.244.000
379	Neraca (BD)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F.5, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 131/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.202.000.000	-	(74.937.000)	1	1.127.063.000
380	Neraca (BD)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F.6, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0117/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.202.000.000	-	(141.270.000)	1	1.060.730.000
381	Neraca (BD)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F.7, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0118/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.202.000.000	-	(135.549.000)	1	1.066.451.000
382	Neraca (BD)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F.8, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0119/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.202.000.000	-	(67.194.000)	1	1.134.806.000
383	Neraca (AT)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok A.5, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0127/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	2.242.000.000	-	928.731.000	1	3.170.731.000
384	Neraca (AT)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B.17, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0128/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.774.000.000	-	493.513.000	1	2.267.513.000
385	Neraca (AT)	KOMPLEK RUKO CIPUTAT MEGA MAL BLOK B NO.18, JL. IR. H. JUANDA NO.34 - CIPUTAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0129/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.774.000.000	-	(462.965.000)	1	1.311.035.000
386	Neraca (AT)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B.19, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0130/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.774.000.000	-	15.274.000	1	1.789.274.000
387	Neraca (BS)	Blok Kampung Mulyasari, Kel. Sindanghayu, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tasikmalaya Nomor 100/1/PRO-01/KNL.0805/01.01.00/2024	1	170.580.000	-	1.045.378.000	1	1.215.958.000
388	Neraca (BT)	Jl. Situ Gede, Blok Cibatuireng, Kelurahan Cibatuireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tasikmalaya Nomor 0111/1/PRO-01/KNL.0805/01.01.00/2024	1	91.400.000	-	301.337.000	1	392.737.000
389	Neraca (BS)	Blok Sindangkersa RT/RW 011/03 Desa Rajadatu, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tasikmalaya Nomor 101/1/PRO-01/KNL.0805/01.01.00/2024	1	7.112.000	-	111.130.000	1	118.242.000
390	Neraca (BS)	JL. BANDA ACEH - MEDAN (LHOKSEUMAWE - BIREUN), DESA MEURIA PALOH, KEC.MUARA DUA, LHOKSEUMAWE (D.H. ACEH UTARA)	Laku Lelang pada KPKNL Lhokseumawe sesuai RL Nomor 92/01.02/2025-01 Tanggal 23 Juni 2025	1	463.426.000	(1)	(463.426.000)	-	-
391	Neraca (BT)	Blok JA Kav. 40, 42, 36, dan 38, Desa Madegondo, Kec. Grogol	Penambahan 4 aset karena ditemukan dokumen sertifikat asli. Selanjutnya Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surakarta Nomor LP-0141/1/KNL.0902/2025 s.d LP-0144/1/KNL.0902/2025 tanggal 3 November 2025	-	-	4	8.740.117.000	4	8.740.117.000
392	Neraca (BS)	JL. KAPT.ABDULLAH NO.15 RT/RW.16/07 KEL. PLAJU DARAT KEC. PLAJU	Hibah ke Pemerintah Kota Palembang sesuai KEP-57KN.4/2025 tanggal 6 Mei 2025 dan BAST Nomor BA-5/KN/KN.4/2025 tanggal 20 Juni 2025	1	1.601.058.000	(1)	(1.601.058.000)	-	-
393	Neraca (BS)	JL. SAMANHUDI, BHAKTI KARYA - BINJAI SELATAN	Hibah ke Pemerintah Kota Binjai sesuai KEP-18/KN.4/2025 tanggal 19 Februari 2025 dan BAST Nomor BA-6/KN/KN.4/2025 tanggal 20 Juni 2025	1	1.809.896.000	(1)	(1.809.896.000)	-	-
394	Neraca (BS)	Desa Cibadak, Kec. Cibeber, Kabupaten Cianjur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor LP-0246/1/KNL.0803/2025 tanggal 21 Mei 2025	1	192.800.000	-	209.228.000	1	402.028.000
395	Neraca (BS)	Jl. Raya Laswi No.169, Desa Ciparay, Kec. Baleendah, Kab.Bandung, Prov. Jawa Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandung Nomor LP-0167/1/KNL.0801/2025 tanggal 30 Juni 2025	1	417.500.000	-	3.042.943.000	1	3.460.443.000
396	Neraca (BS)	Jl. Raya Sumber beras, Desa Sumber beras, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jember Nomor LP-0099/1/KNL.1004/2025 tanggal 22 Juli 2025	1	2.704.300.000	-	(664.074.000)	1	2.040.226.000
397	Neraca (BS)	Perum Alfa Indah Blok F II No. 1, Kel. Joglo, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor LP-0146/1/KNL.0703/2025 tanggal 6 Agustus 2025	1	2.125.488.000	-	3.750.756.000	1	5.876.244.000
398	Neraca (BS)	Perum Irigasi Danita Blok C-1 No. 9, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Bekasi 17122	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor LP-0057/1/KNL.0802/2025 tanggal 28 Agustus 2025	1	243.380.000	-	206.513.000	1	449.893.000
399	Neraca (BS)	Jalan Martapura Lama (Masuk Jalan Desa), Desa Pejambuan, Kec Sungai Tabuk, Kab Banjar	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor LP-0104/1/KNL.1203/2025 tanggal 16 Juni 2025	1	469.000.000	-	122.979.000	1	591.979.000
400	Neraca (BS)	Jalan Martapura Lama (Masuk Jalan Desa), Desa Pejambuan, Kec Sungai Tabuk, Kab Banjar	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor LP-0103/1/KNL.1203/2025 tanggal 16 Juni 2025	1	36.900.000	-	40.640.000	1	77.540.000
401	Neraca (BS)	Jl Martapura Lama (Masuk Jalan AMD), Desa Pejambuan, Kec Sungai Tabuk, Kab Banjar	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor LP-0102/1/KNL.1203/2025 tanggal 16 Juni 2025	1	-	-	267.067.000	1	267.067.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
402	Neraca (BS)	Jalan Sentul Nyapah, Blok I Bidang IV, Desa Pematang, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Banten	Laku Lelang pada KPKNL Serang sesuai RL nomor 156.06.01/2025 tanggal 3 Juli 2025	8	1.472.934.000	(8)	(1.472.934.000)	-	-
403	Neraca (AT)	Jl. TGH. Faisal Kel. Bertais Kec. Cakranegara Kab. Lombok Barat NTB	Laku Lelang pada KPKNL Mataram sesuai RL nomor 146.14.03/2025 tanggal 4 September 2025	1	456.013.833	(1)	(456.013.833)	-	-
404	Neraca (BT)	Jalan raya Cinangka-Pabuaran, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang	Penambahan jumlah aset karena penyesuaian jumlah dokumen	1	17.882.000	34	-	35	17.882.000
405	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai dasar bawah No. G Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.	Koreksi aset nomor urut 86, karena tertukar aset	1	1.322.338.000	1	1.322.338.000	2	2.644.676.000
406	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 27 No. B Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	PSP kepada Kepolisian Negara RI sesuai Kepdirjen Nomor 71/KN.2024 tanggal 21 Juni 2024 dan BAST Nomor BA-118/KN/2025 Tanggal 26 Juni 2025	1	1.129.085.000	(1)	(1.129.085.000)	-	-
407	Neraca (BT)	Jalan Desa Cibening, Kecamatan Setu,Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penambahan jumlah dokumen sesuai dengan dokumen yang dikuasai. Selanjutnya PSP sebagian (31 SHM) ke Kementerian Pertahanan sesuai Kepdirjen Nomor KEP-94/KN/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025. PSP sebagian (4 SHM) ke Kementerian Agama sesuai KEP-125/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-268/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	180.000.000.000	250	(16.055.100.000)	251	163.944.900.000
408	Neraca (AT)	Perum Taman Kartini Blok F1/21, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Bekasi	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor LP-0066/1/KNL.0802/2025 tanggal 19 September 2025	1	246.200.000	-	630.159.000	1	876.359.000
409	Neraca (AT)	I. Raya Jenu, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Tuban	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LP-0323/1/KNL.1001/2025 tanggal 15 Oktober 2025	1	209.780.000	-	124.042.000	1	333.822.000
410	Neraca (BS)	KOMPLEK PERGUDANGAN SEMANAN MEGAH BLOK A NO.10, KALIDERES	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0265/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024. Selanjutnya dilakukan serahkelola ke LMAN sesuai Kepdirjen Nomor Kepdirjen No. KEP-134/KN/2025 tanggal 11 November 2025 dan BAST Nomor BA-46/KN.4/2025 tanggal 24 Desember 2025	4	952.700.000	(4)	(952.700.000)	-	-
411	Neraca (BT)	Jl. Cirendeu Raya No. 56, Desa Pisangan, Kec. Ciputat, Tangerang	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LP-0099/1/KNL.0603/2025 tanggal 10 Oktober 2025. Selanjutnya dilakukan serahkelola ke LMAN sesuai Kepdirjen Nomor Kepdirjen No. KEP-134/KN/2025 tanggal 11 November 2025 dan BA-46/KN.4/2025 tanggal 24 Desember 2025	1	1.250.000.000	(1)	(1.250.000.000)	-	-
412	Neraca (BS)	PERUMAHAN PATRA TOMANG, JALAN PATRA TOMANG I NO.11, KEL. DURI KEPA, KEC. KEBON JERUK, JAKARTA BARAT	Serahkelola ke LMAN sesuai Kepdirjen Nomor Kepdirjen No. KEP-134/KN/2025 tanggal 11 November 2025 dan BAST Nomor BA-46/KN.4/2025 tanggal 24 Desember 2025	1	4.977.963.000	(1)	(4.977.963.000)	-	-
413	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-7A Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0290/1/KNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	395.241.000	-	3.489.000	1	398.730.000
414	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-6B Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0289/1/KNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	230.165.000	-	9.688.000	1	239.853.000
415	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-6A Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0289/1/KNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	230.165.000	-	9.688.000	1	239.853.000
416	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-7B Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0291/1/KNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	364.393.000	-	3.217.000	1	367.610.000
417	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-6 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0289/1/KNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	230.165.000	-	9.688.000	1	239.853.000
418	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-4 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0288/1/KNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	230.165.000	-	9.688.000	1	239.853.000
419	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-3 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0288/1/KNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	228.222.000	-	11.631.000	1	239.853.000
420	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-1 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0294/1/KNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	401.058.000	-	3.507.000	1	404.565.000
421	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-12 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0292/1/KNL.1002/2025	1	394.513.000	-	327.000	1	394.840.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
422	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok G-1 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0286/1/KNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	396.505.000	-	280.000	1	396.785.000
423	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok G-5 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0287/1/KNL.1002/2025	1	230.165.000	-	9.688.000	1	239.853.000
424	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok F-29 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0284/1/KNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	230.201.000	-	9.652.000	1	239.853.000
425	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok F-38 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0285/1/KNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	230.201.000	-	9.652.000	1	239.853.000
426	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok B-19 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0282/1/KPKNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	338.021.000	-	15.762.000	1	353.783.000
427	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok B-31	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0283/1/KPKNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	400.343.000	-	332.000	1	400.675.000
428	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok J-7 Desa Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor LP-0293/1/KPKNL.1002/2025 tanggal 17 Oktober 2025	1	230.201.000	-	9.652.000	1	239.853.000
429	Neraca (BT)	JL. TANAH KUSIR II BLOK H6 (D/H. DHARMA PUTRA H6) RT/RW 010/09, KEBAYORAN LAMA SELATAN - KEBAYORAN LAMA	Perubahan Nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Jakarta III Nomor LP-0259/1/KNL.0703/2025 tanggal 11 Desember 2025	1	12.371.000.000	-	(2.822.265.000)	1	9.548.735.000
430	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sebagian luas 44.760 m2 sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025.	17	44.577.650.000	(16)	(37.215.208.871)	1	7.362.441.129
431	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sebagian luas 10.205 m2 sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	1.708.425.463	1	1.708.425.463
432	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sebagian luas 2.220 m2 sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	1.131.878.984	1	1.131.878.984
433	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sebagian luas 10.700 m2 sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	1.841.159.966	1	1.841.159.966
434	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	8.173.296.707	1	8.173.296.707
435	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset	-	-	1	613.600.000	1	613.600.000
436	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sebagian luas 42.586 m2 sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	8.091.826.665	1	8.091.826.665
437	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sebagian luas 62.180 m2 sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	9.835.848.288	1	9.835.848.288
438	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset	-	-	1	1.965.600.000	1	1.965.600.000
439	Neraca (BS)	Desa Bengle, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	239.465.415	1	239.465.415
440	Neraca (BS)	Desa Bengle, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	1.127.540.011	1	1.127.540.011

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
441	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sebagian luas 927 m2 sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	267.638.251	1	267.638.251
442	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	900.389.960	1	900.389.960
443	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	1.273.956.008	1	1.273.956.008
444	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset	-	-	1	326.950.000	1	326.950.000
445	Neraca (BS)	Desa Lemah Mulya, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang)	-	-	1	871.000.000	1	871.000.000
446	Neraca (BS)	Desa Cibolangsari, Kecamatan Klari	Penyesuaian Nilai Proporsional (sebelumnya 1 nilai pada 17 bidang) dan penambahan kode aset. Selanjutnya perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta Nomor LP-0182/1/KNL.0804/2025 tanggal 4 November 2025	-	-	1	651.345.929	1	651.345.929
447	Neraca (BS)	Jalan Gatot Subroto KM 2,5 Kelurahan Cimone, Kecamatan Cimone, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Perubahan penilaian sesuai laporan penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LP-0133/1/KNL.0603/2025 tanggal 19 Desember 2025	1	2.265.900.000	-	4.300.836.000	1	6.566.736.000
448	Neraca (BS)	Jalan Gatot Subroto KM 2,5 Kelurahan Cimone, Kecamatan Cimone, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Perubahan penilaian sesuai laporan penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LP-0133/1/KNL.0603/2025 tanggal 19 Desember 2025	1	2.643.600.000	-	5.017.592.000	1	7.661.192.000
449	Neraca (BS)	Komplek DPR Blok B-209 & 210 Kel. Nerogtog, Kec. Pinang, Tangerang 15145	Perubahan penilaian sesuai laporan penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LP-0134/1/KNL.0603/2025 tanggal 19 Desember 2025	1	712.700.000	-	6.412.887.000	1	7.125.587.000
450	Neraca (BT)	Perumahan Alam Raya Jl.Jurumudi Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Tangerang	Perubahan penilaian sesuai laporan penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LP-0135/1/KNL.0603/2025 tanggal 19 Desember 2025	3	-	-	14.874.340.000	3	14.874.340.000
451	Neraca (AT)	Jalan Raya Tagog No. 256 Rt. 004/ RW. 02, Kec. Cimahi Tengah, Jawa Barat	Perubahan penilaian sesuai laporan penilaian KPKNL Bandung Nomor LP-0348/1/KNL.0801/2025 tanggal 22 Desember 2025	1	110.500.000	-	1.220.592.000	1	1.331.092.000
452	Neraca (BS)	DESA GEULANGGANG TEUNGOH KEC. JEUMPA KAB. ACEH UTARA	Koreksi pencatatan karena double Catat dengan PRK-0015334	1	786.240.000	(1)	(786.240.000)	-	-
453	Neraca (BS)	DESA KOTO LUAR, KEC. PAUH PADANG, PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT.	Perubahan penilaian sesuai laporan penilaian KPKNL Padang Nomor Lap-0081/1//PRO-01/KNL.0103/01.01.00/2022 tanggal 22 Desember 2022. Selanjutnya PSP 1 bidang tanah SHM 613 seluas 27.999 m2 ke Badan Intelijen Negara sesuai KEP-131/KN/2025 tanggal 4 November 2025 dan BA-269/KN/2025 tanggal 13 November 2025	7	8.928.920.000	(1)	5.155.752.818	6	14.084.672.818
454	Neraca (BT)	JL. INDRAGIRI BLOK U NO. 680-681 RT/RW 16/01, SEMPER BARAT - CILINCING	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0267/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	1.317.500.000	-	2.375.633.000	1	3.693.133.000
455	Neraca (BT)	PERUMAHAN BOJONG INDAH, JL. TAMAN JERUK I NO.19, RT.010 RW.006, KEL RAWA BUAYA, KEC. CENGKARENG, JAKARTA BARAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0259/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	584.000.000	-	883.491.000	1	1.467.491.000
456	Neraca (BT)	JL. GADING MAS BARAT BLOK I NO. 8 RT/RW 05/11, KEL. PEGANGSAAN DUA, KEC. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0261/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	6.400.000.000	-	(244.977.000)	1	6.155.023.000
457	Neraca (AT)	JL. CIPUTAT RAYA NO. 68 G,H, DESA CIRENDEU, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN.	Perubahan Nilai sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LP-0108/1/KNL.0603/2025 tanggal 12 Oktober 2025. Selanjutnya serahkelola ke LMAN sesuai Kepdirjen Nomor Kep-156/KN/2025 tanggal 23 Desember 2025 (Belum BAST)	2	2.060.000.000	-	2.441.278.000	2	4.501.278.000
458	Neraca (BS)	JL.TABANAS IV/7 KEDAUNG, PAMULANG	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Tangerang II Nomor LP-0136/1/KNL.0603/2025 tanggal 31 Desember 2025	1	851.180.000	-	1.366.783.000	1	2.217.963.000
459	CaLK (BD)	KOMPLEX PAKUWAN BLOK C NO. 6 JL. JELAMBAR SELATAN XVII KEL. JELAMBAR KEC. GROGOL PETAMBURAN, WILAYAH JAKARTA BARAT	Koreksi karena Laku Lelang Sesuai Risalah Lelang KPKNL Jakarta IV Nomor 044/2013 tanggal 21 Februari 2013	1	3.639.820.000	(1)	(3.639.820.000)	-	-
460	CaLK (BD)	Jl. Raya Pondok Gede Blok A-4, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Gede, Bekasi	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor LP-0035/1/KNL.0802/2025 tanggal 5 Mei 2025	1	861.000.000	-	1.684.688.000	1	2.545.688.000
461	CaLK (BD)	Jl. Baruk Utara I, Blok ND / 20, Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya - Jawa Timur	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Surabaya Nomor LP-0110/1/KNL.1001/2025 tanggal 17 April 2025	1	1.804.410.000	-	1.328.034.000	1	3.132.444.000
462	CaLK (BD)	Desa Giri Tunggal, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 202/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	641.870.000	-	2.989.377.000	1	3.631.247.000
463	CaLK (BD)	SUKA MAJU,TELUK BETUNG, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 199/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024	1	17.955.000.000	-	(12.883.979.000)	1	5.071.021.000
464	CaLK (BD)	Perum Bukit Cinere Indah, Jalan Puri Pesanggrahan 4 Blok NR No. 1, Kel. Cinere, Kec. Limo, Depok	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor 0314/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024	1	3.204.000.000	-	7.755.858.000	1	10.959.858.000
465	CaLK (BD)	JL. A YANI NO. 83, KEL BENTENG PASAR ATAS, GUGUK PARJANG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bukittinggi Nomor 0061/1/PRO-01/KNL.0302/01.01.00/2024	1	6.616.930.208	-	5.222.679.792	1	11.839.610.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
466	CaLK (BD)	JALAN MUTIARA I PERUM VILA INTAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 275/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	90.000.000	-	32.447.000	1	122.447.000
467	CaLK (BD)	Blok Zein, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 183/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	-	-	342.384.000	1	342.384.000
468	CaLK (BD)	JALAN INTAN BLOK G.1 NO.1	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 258/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	63.140.000	-	8.479.000	1	71.619.000
469	CaLK (BD)	JLN. INTAN 1 BLOK G NO.10	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 266/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.700.000	-	69.568.000	1	124.268.000
470	CaLK (BD)	JLN. INTAN BLOK G.1 NO.11	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 267/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.800.000	-	71.042.000	1	125.842.000
471	CaLK (BD)	JLN. INTAN 1 BLOK G NO.12	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 0268/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.520.000	-	23.197.000	1	77.717.000
472	CaLK (BD)	JL. INTAN 1 BLOK G NO.13	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 0269/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	38.150.000	-	6.085.000	1	44.235.000
473	CaLK (BD)	JLN. INTAN 1 BLOK G NO.14	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 270/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.050.000	-	77.790.000	1	131.840.000
474	CaLK (BD)	JL. INTAN 1 BLOK G NO.2	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 0259/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.240.000	-	3.344.000	1	57.584.000
475	CaLK (BD)	JLN. INTAN I BLOK G NO.3	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 0260/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.240.000	-	72.653.000	1	126.893.000
476	CaLK (BD)	JLN MUTIARA 1 BLOK G NO.4	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 0261/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	53.960.000	-	28.607.000	1	82.567.000
477	CaLK (BD)	JLN INTAN I BLOK G NO.5	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 0262/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	53.490.000	-	(5.178.000)	1	48.312.000
478	CaLK (BD)	JLN MUTIARA I BLOK G NO.6	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 0263/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	57.340.000	-	6.314.000	1	63.654.000
479	CaLK (BD)	JLN INTAN I BLOK G NO.7	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 0264/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.520.000	-	72.153.000	1	126.673.000
480	CaLK (BD)	JLN.KEBANTENGAN BLOK G NO.28	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 0265/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.700.000	-	22.639.000	1	77.339.000
481	CaLK (BD)	JLN KEBANTENGAN BLOK G 29	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 271/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.700.000	-	30.892.000	1	85.592.000
482	CaLK (BD)	JALAN KEBANTENGAN G.30	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 272/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.700.000	-	30.892.000	1	85.592.000
483	CaLK (BD)	JALAN KEBANTENGAN G 31	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 273/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.700.000	-	30.892.000	1	85.592.000
484	CaLK (BD)	JLN KEBANTENGAN G 32	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Cirebon Nomor 274/1/PRO-01/KNL.0806/01.01.00/2024	1	54.700.000	-	11.096.000	1	65.796.000
485	CaLK (BD)	Jl. WR. Supratman No. 77 X, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Denpasar Nomor 166/1/PRO-01/KNL.1401/01.01.00/2024	1	12.560.365.000	-	-	1	12.560.365.000
486	CaLK (BD)	JALAN ASEMKA NO. 10, KEL. PINANGSIA, KEC. TAMAN SARI	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0158/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	1.350.560.000	-	39.635.000	1	1.390.195.000
487	CaLK (BD)	JL. KAMPUNG BALI XI NO. 6, NO. 8, NO. 10, NO. 12, DAN NO. 14, KEL. KAMPUNG BALI, KEC. TANAH ABANG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0243/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	9.094.400.000	-	1.224.316.000	1	10.318.716.000
488	CaLK (BD)	JL. TANJUNG DUREN TIMUR LLL NO. 3, RT. 18 / RW. 05, KEL. TANJUNG DUREN SELATAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0203/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	1.762.950.000	-	(825.817.000)	1	937.133.000
489	CaLK (BD)	JL. KEBON KACANG III NO. 70, RT.001/RW.03, KEL. KEBON KACANG, KEC. TANAH ABANG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0269/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	5.251.500.000	-	557.461.000	1	5.808.961.000
490	CaLK (BD)	JALAN KEMAYORAN UTARA NO.15	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0270/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	3.263.840.000	-	3.306.145.000	1	6.569.985.000
491	CaLK (BD)	JL. DR SAHARJO NO. 72, PASAR MANGGIS, SETIABUDI	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0271/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	4.860.000.000	-	4.127.322.000	1	8.987.322.000
492	CaLK (BD)	JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK D1 NO.5 B, KEL. SUNTER AGUNG, KEC. TANJUNG PRIOK	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0250/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024	1	6.800.000.000	-	19.698.000	1	6.819.698.000
493	CaLK (BD)	JL. SIMPANG LORONG PRAJA, KOTA PANTON LABU - TANAH JAMBO AYE	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Lhokseumawe Nomor 0183/1/PRO-01/KNL.0102/01.01.00/2024	2	124.500.000	-	944.121.000	2	1.068.621.000
494	CaLK (BD)	JL. BANDAR MAS DUSUN II LABUHAN MARINGGAI-LAMPUNG TENGAH	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Metro Nomor 0254/1/PRO-01/KNL.0503/01.01.00/2024	1	168.000.000	-	499.549.000	1	667.549.000
495	CaLK (BD)	DESA BENGKULU KEC.GUNUNG LABUHAN WAY KANAN	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Metro Nomor 0257/1/PRO-01/KNL.0503/01.01.00/2024	1	61.000.000	-	1.189.235.000	1	1.250.235.000

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
496	CaLK (BD)	JALAN RAYA TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Metro Nomor 0258/1/PRO-01/KNL.0503/01.01.00/2024	1	1.429.000.000	-	(545.712.000)	1	883.288.000
497	CaLK (BD)	DESA TULUNG MILI RT 03 RW 01 LK.5 KOTABUMI LAMPUNG UTARA	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Metro Nomor 0248/1/PRO-01/KNL.0503/01.01.00/2024	1	8.000.000	-	(3.432.000)	1	4.568.000
498	CaLK (BD)	JL. SUKA MAJU KENTEN LAUT28,RT06/03	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Palembang Nomor 0235/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2024	1	32.817.600.000	-	(572.400.000)	1	32.245.200.000
499	CaLK (BD)	Jl. Kesatrian, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Karang Asem, Kabupaten Karang Asem	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Singaraja Nomor 50/1/PRO-01/KNL.1402/01.01.00/2024	1	252.200.000	-	962.562.000	1	1.214.762.000
500	CaLK (BD)	KOMPLEK RUKO MEGA MAL BLOK F NO.20, JL. IR.H. JUANDA - CIPUTAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0120/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.202.000.000	-	(69.391.000)	1	1.132.609.000
501	CaLK (BD)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F.21, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0122/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.202.000.000	-	(72.716.000)	1	1.129.284.000
502	CaLK (BD)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F.23, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0124/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.202.000.000	-	(65.571.000)	1	1.136.429.000
503	CaLK (BD)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F.25, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0125/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.202.000.000	-	(61.685.000)	1	1.140.315.000
504	CaLK (BD)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok A.5, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II Nomor 0121/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2024	1	1.202.000.000	-	(68.152.000)	1	1.133.848.000
505	CaLK (BD)	Jalan Harjawar Puncak, Desa Palasari, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur	Perubahan jumlah aset sebelumnya 16 dokumen dan penyesuaian luasan sesuai sertifikat. Terindikasi dokumen ditambahkan karena eks debitur sama, namun dokumen lain sudah masuk ke aset BPPN: 10/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000043, 15/LEBAKSITU aset nomor 03.01.02.00000037, 194/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000930, 286/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000936, 288/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000939, 290/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000932, 291/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000933, 292/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000934, 293/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000931, 297/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000929, 298/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000935, 7/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000042, 85/CIMANGEUNTEUNG aset nomor 03.01.02.00000036, 89/LEBAKSITU aset nomor 03.01.02.00000039, 97/CIMANGENTEUNG aset nomor 03.01.02.00000035 di wilayah KPKNL Serang.	16	2.890.860.000	(15)	-	1	2.890.860.000
506	CaLK (BD) & Neraca	PERUMAHAN MODERN LAND BLOK G1 NO. 284, JL. VILLA GOLF RAYA	PSP kepada Kementerian Keuangan c.q. DJBC sesuai Kepdirjen Nomor KEP-93/KN/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	14.069.583.000	(1)	(14.069.583.000)	-	-
507	CaLK (BD) & Neraca	PERUMAHAN MODERN LAND BLOK G1 NO. 285, JL. VILLA GOLF RAYA	PSP kepada Kementerian Keuangan c.q. DJBC sesuai Kepdirjen Nomor KEP-93/KN/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan BAST Nomor BA-02/KN/2025 tanggal 5 Februari 2025	1	13.585.617.000	(1)	(13.585.617.000)	-	-
508	CaLK (BD) & Neraca	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 64A, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor LAP-0058/1/PRO-01/KNL.0703/01.03.01/2025 tanggal 21 Februari 2025. Selanjutnya PSP ke Badan Narkotika Nasional sesuai Kepdirjen Nomor KEP-96/KN/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dan BAST Nomor BA-263/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	15.514.140.000	(1)	(15.514.140.000)	-	-
509	CaLK (BD) & Neraca	Jalan Untung Suropati Nomor 14, Kelurahan Semarapura Tengah (d.h. Desa Klungkung), Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Denpasar Nomor 0165/1/PRO-01/KNL.1401/01.01.00/2024 tanggal 28 Juni 2024. Selanjutnya PSP ke Badan Narkotika Nasional sesuai KEP-72/KN/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan BAST Nomor BA-263/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	1.641.500.000	(1)	(1.641.500.000)	-	-
510	CaLK (BD) & Neraca	JL. RE. MARTADINATA KEL. SUKAMAJU KEC. TELUK BETUNG BARAT BANDAR LAMPUNG	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor 198/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024. Selanjutnya Hibah ke Pemprov Lampung sesuai KEP-141/KN.4/2025 tanggal 7 Desember 2025 dan BAST Nomor BA-277/KN/2025 tanggal 16 Desember 2025	1	18.642.450.000	(1)	(18.642.450.000)	-	-
511	CaLK (BD) & Neraca	JL. IMAM BONJOL, KOMP. TERMINAL TEGAL, DENPASAR	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Denpasar Nomor 0177/1/PRO-01/KNL.1401/01.01.00/2024. Selanjutnya Hibah ke Pemkot Denpasar sesuai KEP-95/KN.4/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dan BAST Nomor BA-267/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	84.197.000	(1)	(84.197.000)	-	-
512	CaLK (BD) & Neraca	2 (dua) bidang tanah sertipikat SHGB No. 2811 dan SHM No. 2327/KAPUK, luas keseluruhan 263 m2, berikut bangunan ruko di atasnya, terletak di JL. KAMAL MUARA RAYA NO.18-A (D/H JL.KAPUK KAMAL RAYA NO. 18-A), JAKARTA BARAT	Perubahan Nilai Hasil IP Tahun 2024 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Jakarta III Nomor 0274/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024. Selanjutnya dilakukan serahkelola LMAN sesuai Kepdirjen Nomor Kepdirjen No. KEP-134/KN/2025 tanggal 11 November 2025 dan BAST Nomor BA-46/KN.4/2025 tanggal 24 Desember 2025	2	6.930.000.000	(2)	(6.930.000.000)	-	-

DAFTAR PERUBAHAN ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2024		Mutasi		31 Desember 2025	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
513	CaLK (BD) & Neraca	Jl. Urip Sumoharjo (d/h Jl. Gn Bawakaraeng), Kel. Marimongan Baru, Kec Bontoala	Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Makassar Nomor LP-0214/1/KNL.1502/2025 tanggal 7 Oktober 2025. Serahkelola ke LMAN sesuai Kepdirjen Nomor Kepdirjen No. KEP-134/KN/2025 tanggal 11 November 2025 dan BAST Nomor BA-46/KN.4/2025 tanggal 24 Desember 2025	2	4.651.000.000	(2)	(4.651.000.000)	-	-
514	CaLK (BD) & Neraca	RUKO BINTARO JAYA SEKTOR IX BLOK B NO. 1, KEL. PONDOK PUCUNG, KEC. PODOK AREN.	Laku terjual lelang pada KPKNL Tangerang II sesuai RL Nomor RL Nomor 260/06.03/2025-01 tanggal 23 Oktober 2025	1	740.500.000	(1)	(740.500.000)	-	-
515	CaLK (BD) & Neraca	Jl. Tangkuban Perahu, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar	Ditetapkan status penggunaan ke Kepolisian RI sesuai KEP-119/KN/2025 tanggal 30 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-267/KN/2025 tanggal 13 November 2025	2	31.992.777.000	(2)	(31.992.777.000)	-	-
516	CaLK (BD) & Neraca	DESA RAGAJAYA, CIPAYUNG JAYA, CITAYAM, KEC. BOJONG GEDE, DESA PASIR PUTIH, BEDAHAN, PENGASINAN, KEC. SAWANGAN	PSP Sebagian seluas 486.202 m2 ke Kementerian Pertahanan sesuai KEP-122/KN/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST Nomor BA-264/KN/2025 tanggal 13 November 2025	1	451.122.401.890	(1)	(451.122.401.890)	-	-
517	CaLK (BD) & Neraca	DESA RAGAJAYA, CIPAYUNG JAYA, CITAYAM, KEC. BOJONG GEDE, DESA PASIR PUTIH, BEDAHAN, PENGASINAN, KEC. SAWANGAN	PSP Sebagian seluas 51.798 m2 ke Kementerian PU sesuai KEP-143/KN/2025 tanggal 9 Desember 2025 dan BAST Nomor BA-276/KN/2025 tanggal 16 Desember 2025		48.060.761.110		(48.060.761.110)		-
1. Jumlah Mutasi Pada *Face* Laporan				**601**	**2.446.361.300.677**	**153**	**1.211.684.824.544**	**754**	**3.658.046.125.221**
2. Jumlah Mutasi Pada CaLK				**77**	**731.473.382.208**	**(30)**	**(593.057.625.208)**	**47**	**138.415.757.000**
TOTAL				**678**	**3.177.834.682.885**	**123**	**618.627.199.336**	**801**	**3.796.461.882.221**

SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Emiten	Total *Nominal Value* Per 31 Desember 2024	Mutasi	Total Nominal Value Per 31 Desember 2025
1.	Dharmala Intiutama (0016060906)	355,454,000,000	12,386,000,000	367,840,000,000
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	248,108,063,706	8,645,468,828	256,753,532,534
3.	Ongko Intl Fin (290304)	484,710,000,000	16,890,000,000	501,600,000,000
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	24,235,500,000	844,500,000	25,080,000,000
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	32,314,000,000	1,126,000,000	33,440,000,000
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	32,314,000,000	1,126,000,000	33,440,000,000
7.	Indonesia Bermuda	16,157,000,000	563,000,000	16,720,000,000
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408)	4,934,713	0	4,934,713
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507)	4,934,713	0	4,934,713
Total		**1,193,302,433,132**	**41,580,968,828**	**1,234,883,401,960**

*Nilai disajikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembalian Aset tanggal 27 Februari 2009

*Nilai nominal berdasarkan kurs Kurs Penutup JISDOR per 31 Desember 2025

ASET SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2025	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	Asuransi	Intan	-	-	n/a	223,500	-	223,500	Dicabut ijin usahanya tahun 2007	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-425/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan tidak tercatat sebagai badan hukum 2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan asuransi telah dicabut melalui KEP-056/KM.10/2007 tanggal 5 April 2007 karena sanksi
2	PT Bunas Multifinance	Pembiayaan	BUN	750,000		0	75,000,000	-	75,000,000	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-017/KM.12/2006 tanggal 12 Juli 2006 karena sanksi
3	PT Danaloka Pratama	Pembiayaan	***BDNI***	380		0	141,550,000	-	141,550,000	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melaluiSurat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021.tidak tercatat sebagai lembaga pembiayaan yang berizin di industri keuangan non bank OJK
4	PT Pama Indonesia Ltd	Pembiayaan	BDNI	1,500		0	28,310,000	-	28,310,000	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui 2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021.tidak tercatat sebagai lembaga pembiayaan yang berizin di industri keuangan non bank OJK
5	PT Pama Ventura Indonesia	Jasa Modal Ventura	BDNI	200		0	234,871	-	234,871	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-447/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui 2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-131/KM.12/2006 tanggal 24 November 2006 karena sanksi

ASET SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2025	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
6	PT Servitia Finance	Pembiayaan	BUS	24,750		1	1,500,000,000	-	1,500,000,000	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-024/KM.12/2006 tanggal 12 Juli 2006 karena sanksi
7	PT Aplikanusa Lintasarta	Teknologi Informasi dan Komunikasi	19 Bank	400		0	400,540,829	-	400,540,829	Aktif	Sesuai Surat Yayasan Perbanas Nomor 13/Keu/YP/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021	Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Menteng, Gedung Menara Thamrin Lt. 19, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10250	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih aktif beroperasi
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	450		0	385,154,000	-	385,154,000	Dicabut ijin usahanya tahun 2013	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-449/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui, 2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan Modal Ventura telah dicabut melalui KEP-119/D.05/2013 tanggal 24 Oktober 2013 karena sanksi
9	PT Dbs Securities Indonesia	Jasa Keuangan dan Perbankan Investasi	BDNI	330		0	-	-	-	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021.telah berubah nama menjadi PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	208,179		0	208,179,000	(156,190,000)	51,989,000	Aktif	Nilai berdasarkan Laporan Penilaian LP-0113/2/KN.5/2025 tanggal 9 Mei 2025 dengan tanggal penilaian 14 Maret 2025	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668388, 668389, Fax : (0741) 668 390	-
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI-BNN	551,793		0	551,793,000	(343,488,000)	208,305,000	Aktif	Nilai berdasarkan Laporan Penilaian LP-0120/2/KN.5/2025 tanggal 28 Mei 2025 dengan tanggal penilaian 17 April 2025	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121. Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883	-

ASET SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2025	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	210,437		0	210,437,000	(10,011,460)	200,425,540	Aktif	Nilai berdasarkan Laporan Penilaian LP-0114/2/KN.5/2025 tanggal 9 Mei 2025 dengan tanggal penilaian 7 Maret 2025	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	1. saham per 31 des 2020 tercatat 207.861.000 (207.861 lembar) sesuai surat 180/SKV-L/Kopr/XI/2020tanggal 5 Nop 2020, ada pembagian dividen saham sebanyak 14.795 lembar saham. 2. Sesuai Surat Kalsel Ventura Nomor 051/SKV-L/Korp/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, tambahan dividen saham Kemenkeu (14.795 lembar) belum dicatatkan pada sistem AHU karena data belum terverifikasi (belum menyerahkan NPWP an Menkeu), sehingga jumlah saham masih tercatat sebanyak 193.066 lembar
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63,106		0	63,106,000	-	63,106,000	Aktif	Sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-618/PL.021/2025 tanggal 21 Juli 2025, PT Sarana Maluku Ventura telah dicabut izin usahanya sesuai KEP-21/D.05/2022 tanggal 12 April 2022	Jalan Jend Sudirman, hative kecil, Kompleks Pondok Permai (Aster) RT.004/RW.05,Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97128	
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	20 Bank	1,115		0	-	-	-	Likuidasi	Nilai Buku saham per 31-12-2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI Tahun 2018 (unaudited).	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920Phone : (021) 521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax : (021) 521 0755	Telah dilikuidasi dengan nilai likuidasi sebesar Rp3.365.184.715 yang diterima oleh DJKN pada November 2020. Nilai mutasi dicatat sebesar Rp4.038.531.683,65 sehingga terdapat selisih Rp673.346.969 yang dicatat sebagai dampak kumulatif pengurang ekuitas
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (PT Perta Life Insurance)	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4,500		0	4,500,000,000	(774,952,000)	3,725,048,000	Aktif	Nilai berdasarkan Laporan Penilaian LP-0116/2/KN.5/2025 tanggal 9 Mei 2025 dengan tanggal penilaian 7 Maret 2025	Tamansari Parama Boutique Office Lantai 11. Jalan KH Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta 10430	
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1,800,000		0	335,020,000	-	335,020,000	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepem-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK Nomor S-1169/NB.111/2021 tanggal 5 April 2021, dicabut izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi kerugian melalui KEP-546/KM.10/2011 tanggal 11 Juli 2011 karena sanksi	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011 karena sanksi
17	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61,553		0	61,553,000	-	61,553,000	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepem-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai surat Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya (OJK) Nomor S-93/PL.021/2025 tanggal 5 Februari 2025, dicabut izin usaha di bidang perusahaan modal ventura melalui KEP-3/D.06/2025 tanggal 05 Februari 2025	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado	-

ASET SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2025	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
18	PT Sarana Sumbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	1,056,056		0	1,056,056,000	-	1,056,056,000	Aktif	- Berdasar Surat dirut SSV No. 05/SSBV-DIR/VII/2022 tgl 12 Juli 2022. surat 07/DIR-SSBV/II/2022 tgl 25-2-2022, kenaikan lembar saham akibat dividen saham per 30-11-2020 '- Pernyataan Kepemilikan Saham tanggal 31 Desember 2024 oleh Direktur Utama PT Sarana Sumatera Barat Ventura	Gedung Rangkiang Ventura. Jalan Khatib Sulaiman No.9 Kav. 5 s/d 7 Padang - Sumatera Barat.	-
19	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82,471		0	82,471,000	-	82,471,000	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepem-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-618/PL.021/2025 tanggal 21 Juli 2025, PT Sarana Papua Ventura telah dicabut izin usahanya sesuai KEP-12/D.06/2022 tanggal 24 Maret 2025	Jl.Abe Tasangkapura No. 58, RT001/ RW.011, Kelurahan Ardipura, Japsel. Jayapura-Papua. Telp: 0967-5162490	-
20	PT SMBC Indonesia Finance	-	BDNI	3,750,000		0	3,750,000,000	-	3,750,000,000	Dicabut ijin usahanya tahun 2010	Sesuai surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK Nomor S-1169/NB.111/2021 tanggal 5 April 2021, dicabut izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan melalui KEP-546/KM.10/2010 tanggal 20 September 2010 karena sanksi	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-546/KM.10/2010 tanggal 20 September 2010 karena sanksi
21	PT Asia Natural Resources Tbk	Perdagangan hasil tambang	-	22,006,500		0	1,100,325,000	-	1,100,325,000	Aktif (Delisting dari BEI)	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022		Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT ASIA di bursa telah di-suspend oleh BEI. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.
22	PT Jembo Cable Company Tbk (JECC.JK)	Manufaktur kabel	-	3,272,500	1,140	0	399,245,000	3,331,405,000	3,730,650,000	Aktif	1. Nilai saham berdasarkan harga penutupan tanggal 31 Desember 2025 pada situS BEI 2. Terjadi stock split 1:5 pada 13 Juni 2024 sesuai Laporan Tahunan PT Jembo Cable Company Tbk 2024, sehingga jumlah saham dari sebelumnya 654.500 lembar saham menjadi 3.272.500 lembar saham	Jl. Pajajaran, Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung Tangerang 15137	Pada tahun 2016, aset saham PT Jemblo Cable tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.
23	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Jasa Sarana Olahraga terutama Golf	-	57	71,462,334	13.87%	3,705,000,000	368,353,038	4,073,353,038	Aktif	Nilai berdasarkan Laporan Penilaian LP-0115/2/KN.5/2025 tanggal 16 Mei 2025 dengan tanggal penilaian 14 Maret 2025	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560	Aset saham PT SEPG direklasifasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero).
24	PT Bima Prima Perdana (Grup Texmaco)	-	-			1	-	-	-	Tidak Aktif			

ASET SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2024	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2025	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
25	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga	-	273,000		1	-	-	-	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.03 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.
Total							**18,554,198,200**	**2,415,116,578**	**20,969,314,778**				

DAFTAR ABMA/T YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN/DILUNASI KOMPENSASINYA SEJAK AWAL PENGURUSAN PELEPASAN ABMA/T

No.	Nama Aset	Nilai Wajar Aset	Keterangan
1	ABMA/T Perumahan di Jl. Pelita RT.006/09 DKI Jakarta	1,047,674,100	Surat Menteri Keuangan Nomor S-517/MK.6/2019 tanggal 25 Juli 2019. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.047.674.100,00
2	ABMA/T SMA Muhammadiyah 3 Genteng Jawa Timur	2,663,674,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-468/MK.6/2012 Tanggal 10 Agustus 2012. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp1.331.837.000,00
3	ABMA/T Home Industry Atas Nama Iwan Jakarta Pusat DKI Jakarta	2,334,060,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-410/MK.6/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp2.334.060.000,00
4	ABMA/T Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen (dh. Kantor DPD Golkar) Kebumen Jawa Tengah	4,116,771,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.6/2017 tanggal 9 Februari 2017. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp4.116.771.000,00
5	ABMA/T Rumah Nyoman Sidharta Suryanata Grogol Petamburan Provinsi DKI Jakarta	1,469,468,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-288/MK.6/2017 tanggal 14 November 2017. Besaran Kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.469.468.000,00
6	SD Al Wasliyah dan SMA Teladan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara	743,560,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-193/MK.6/2018 tanggal 16 Mei 2018. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp371.780.000,00
7	ABMA/T Yayasan Pendidikan Angkatan 45	4,144,299,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-496/MK.6/2019 tanggal 22 Juli 2019. Kompensasi 50% senilai Rp2.072.149.500,00
8	ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	4,373,822,000	Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Sulawesi Selatan u.p. Sekretaris Daerah Nomor S-4514/A/2001 tanggal 12 November 2001 Surat Kepala Kanwil XXIII Ditjen Anggaran Makasar Nomor S-1349/W.A.23/ BD.05/2002 tanggal 19 Juni 2002 Besaran Kompensasi senilai Rp2.186.911.000,00

DAFTAR ABMA/T YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN/DILUNASI KOMPENSASINYA SEJAK AWAL PENGURUSAN PELEPASAN ABMA/T

No.	Nama Aset	Nilai Wajar Aset	Keterangan
9	ABMA/T Rumah Tinggal di Jalan Sumatera Nomor 27 (d.h 13-15), Bandung	7,503,853,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-243/MK.6/2020 tanggal 22 Juni 2020 Kompensasi 100% senilai Rp7.503.853.000
10	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Sudjanto (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	167,368,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-627/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp167.368.000,00
11	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Suherman Khouw (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	15,953,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp15.953.000,00
12	ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.h ABMA/T SMA Pagatan)	120,453,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.6/2023 tanggal 14 Mei 2023 dan S-368/MK.6/2023 tanggal 05 Juni 2023 Kompensasi 100%+10% senilai Rp132.498.300,00
13	ABMA/T Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan)	113,357,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-432/MK.6/2023 tanggal 4 Juli 2023. Kompensasi 100%+10% senilai Rp124.692.700,00
14	ABMA/T Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan)	113,357,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-433/MK.6/2023 tanggal 4 Juli 2023. Kompensasi 100%+10% senilai Rp124.692.700,00
15	ABMA/T SD/SMP Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) Sumatera Utara	2,180,867,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-447/MK.6/2024 Tanggal 28 Juni 2024. Besaran kompensasi sebesar 30% + 5% senilai Rp686.973.105,00
16	ABMA/T Vihara Pemancar Keselamatan (d.h Kasus Khingdjoe Kwan/Pra Bhapuri) Jawa Barat	4,170,498,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-719/MK.6/2024 Tanggal 24 September 2024. Besaran kompensasi sebesar 0% senilai Rp0.00. *Koreksi atas selisih kesalahan beban pelepasan aset.

DAFTAR ABMA/T YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN/DILUNASI KOMPENSASINYA SEJAK AWAL PENGURUSAN PELEPASAN ABMA/T

No.	Nama Aset	Nilai Wajar Aset	Keterangan
17	ABMA/T Rumah Toko a.n. Rosmina (d.h Pertokoan) Sumatera Utara	195,592,000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-923/MK.6/2024 Tanggal 11 November 2024. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp195.592.000,00
TOTAL		**35,474,626,100**	

DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITETAPKAN BESARAN KOMPENSASINYA

No.	Nama Aset	Nilai Wajar Aset
1	Rumah Toko XIII (d.h Yayasan Pendidikan Gitakirti (GIKI)) a.n. Tati Lestari di Provinsi Jawa Barat	730.569.000
2	Rumah Toko (dh Bangunan Wisma Olahraga dan Tempat Sembahyang Toa Pekong (Berlantai Dua)) a.n. Yayasan Laut Selatan Bintan di Provinsi Kepulauan Riau	726.098.000
3	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (dh Kantor Dispenda Kodya II Bogor, TK/SD/SMA/ Akademi Management) a.n. Yayasan Kesatuan di Provinsi Jawa Barat	56.258.069.000
4	Gereja PPIK "Jemaat Filipi" Kayu Tanam (d.h Kantor Kelurahan dan Sekretariat PKK Desa) di Kalimantan Barat	5.978.000
5	Vihara Avalokitesvara (d.h Rumah Ibadah (Klenteng)) di Sumatera Utara	192.171.000
6	Vihara Kumala Bodhi (dahulu TK/SD Pembina) di Kepulauan Bangka Belitung	213.295.000
7	Vihara Budi Dharma (dh Yayasan Budhi Dharma)) di Jawa Barat	5.946.049.000
8	Tempat Tinggal Suherdy Arno (dh Kantor Dipenda Kodya Dati II Bogot, TK/SD/SMP/SMA/Akademi Management)) di Jawa Barat	5.165.115.000
9	Rumah Duka (dahulu Perkantoran; DPD Golkar, Pepabri, HWK) di Provinsi Maluku	1.995.697.000
TOTAL		**71.233.041.000**

DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITERBITKAN KMK PENYELESAIAN DAN/ATAU KOREKSI PENETAPAN KEMBALI

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Rumah Toko (dahulu Pertokoan) Luas Tanah 68 m² di Jalan Husni Thamrin Nomor 36 (d.h Jalan Binjai dan Jalan Belitung), Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota (d.h Kecamatan Pekan Binjai), Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara	195.592.000	KMK-21/KM.6/2025 tanggal 21 Januari 2025. Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
2	Rumah Toko XIII (dahulu Yayasan Pendidikan Gitakirti (GIKI)) Luas Tanah 67 m² di Jalan Cibalok Blok L/9 Ruko XIII atau Jalan Pengadilan Nomor 9 Ruko 13 (dahulu Jalan Pengadilan, Bogor), Kelurahan Pabaton (dahulu Kel. Pabatan (Tanah Sareal)), Kecamatan Bogor Tengah (dahulu Kecamatan Kota Bogor Utara), Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	730.569.000	KMK-100/KM.6/2025 tanggal 25 Maret 2025. Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
3	Rumah Toko (dahulu Bangunan Wisma Olahraga dan Tempat Sembahyang Toa Pekong (Berlantai Dua) Luas Tanah 206 m² dan Luas Bangunan 200 m2 di Jalan Temiang (dahulu Jalan Temiang Tanjung Pinang), Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	726.098.000	KMK-113/KM.6/2025 tanggal 26 Maret 2025. Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
4	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (dahulu Kantor Dispenda Kodya Dati II Bogor, TK/SD/SMP/SMA/Akademi Management) Total Luas Tanah 6.504 m2 serta Total Luas Bangunan 3.731,25 m2 di Jalan Rangga Gading/Jalan Kampung Cincau (dahulu Jalan Suryakencana Nomor 162 (Gedung Dalem), Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	56.258.069.000	KMK-186/MK/KN/2025 tanggal 22 Mei 2025. Besaran kompensasi sebesar 30% dari nilai wajar aset
5	Rumah Tinggal Suriansyah (dahulu SMA Pagatan) Luas Tanah 289 m2 di Jalan H M Nurung, Kelurahan Pagatan Kota, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan	120.453.000	KMK-213/MK/KN/2025 tanggal 13 Juni 2025. Besaran kompensasi sebesar 100% + 10% dari nilai wajar aset
6	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (dahulu SMA Pagatan) Luas Tanah 299 m2 di Jalan H M Nurung, Kelurahan Pagatan Kota, Kecamatan Kusan Hilir, Kebupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan	113.357.000	KMK-250/MK/KN/2025 tanggal 7 Juli 2025. Besaran kompensasi sebesar 100% + 10% dari nilai wajar aset
7	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja/Subianto (dahulu SMA Pagatan) Luas Tanah 299 m2 di Jalan H M Nurung, Kelurahan Pagatan Kota, Kecamatan Kusan Hilir, Kebupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan	113.357.000	KMK-248/MK/KN/2025 tanggal 7 Juli 2025. Besaran kompensasi sebesar 100% + 10% dari nilai wajar aset
8	Gereja PPIK “Jemaat Filipi” Kayu Tanam (dahulu Kantor Kelurahan dan Sekretariat PKK Desa) Luas Tanah 300 m2 di Jalan Raya Mandor KM.80, Desa Kayu Tanam, Kecamtan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat	5.978.000	KMK-273/MK/KN/2025 tanggal 28 Juli 2025. Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajar aset
9	SD/SMP Letjen Jamin Ginting Berastagi (dahulu SD Letjen Jamin Ginting) Luas Tanah 1.630 m2 di Jalan Veteran Gang Serasai Kelurahan Gundaling II (dahulu Desa Gundling II) Kecamatan Berastagi (dahulu Kecamatan Kabanjahe) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara	2.180.867.000	KMK-285/MK/KN/2025 tanggal 1 Agustus 2025. Besaran kompensasi sebesar 100% + 5% dari nilai wajar aset

DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITERBITKAN KMK PENYELESAIAN DAN/ATAU KOREKSI PENETAPAN KEMBALI

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
10	Vihara Avalokitesvara (dahulu Rumah Ibadah (Klenteng)) Luas Tanah 400 m2 di Jalan Pasar Sirombu, Desa Sirombu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat (dahulu Kabupaten Nias), Provinsi Sumatera Utara	192.171.000	KMK-313/MK/KN/2025 tanggal 28 Agustus 2025. Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajar aset
11	Pembina) Luas Tanah 292 m2 di Jalan Denpasar (dahulu Jalan Pasir Putih), Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalpinang II), Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	213.295.000	KMK-340/MK/KN/2025 tanggal 15 September 2025 Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajar aset
12	Vihara Budi Dharma (dahulu Yayasan Budhi Dharma) Luas Tanah 738 m2 di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 181 (dahulu Jalan Jend. Sudirman No. 191, Purwakarta) RT 020/RW 010, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinis Jawa Barat	5.946.049.000	KMK-360/MK/KN/2025 tanggal 29 Agustus 2025. Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajar aset
13	Rumah Duka (dahulu Perkantoran; DPD Golkar, Pepabri, HWK) di Provinsi Maluku	1.995.697.000	KMK-409/MK/KN/2025 tanggal 14 November 2025. Besaran kompensasi sebesar 50% dari nilai wajar aset
14	ABMA/T Vihara Pemancar Keselamatan (d.h Kasus Khingdjoe Kwan/Pra Bhapuri) Jawa Barat	4.170.498.000	KMK-275/KM.6/2024 tanggal 18 Oktober 2024. Besaran kompensasi sebesar 0% senilai Rp0.00. Koreksi atas selisih kesalahan beban pelepasan aset.
TOTAL		**72.962.050.000**	

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN *IDLE* YANG DIHAPUS, DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2010199999	Tanah Persil Lainnya	KPKNL Batam	Kota Batam	Komplek Perkantoran Sekupang, Jl. Ir. Sutami, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam	1000	01/01/2017	1.702.875.000	-	1.702.875.000	1-PSP ke ATR/BPN sesuai BAST-01/KNL.0304/2025
2	2010199999	Tanah Persil Lainnya	KPKNL Palembang	Palembang	Jl. Seroja Kamboja, Kelurahan 20 Ilir, Kec. Ilir Timur	4939	01/01/2013	1.840.735.160	-	1.840.735.160	1-PSP ke Kemenkes sesuai BAST-01/KNL.0402/2025
3	2010199999	Tanah Persil Lainnya	KPKNL Surabaya	Surabaya	Jalan Medokan Asri Barat X, Komp. Medokan Asri Barat, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya	2000	18/2/1994	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1-PSP ke Ombudsman sesuai BA-29/KNL.1001/2025
4	2010199999	Tanah Persil Lainnya	KPKNL Bima	Dompu	Jalan Udang, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu	2000	01/01/2008	1.293.000.000	-	1.293.000.000	1-PSP ke Bawaslu sesuai BA-15/KNL.1404/2025
5	2010199999	Tanah Persil Lainnya	KPKNL Lhokseumawe	Lhokseumawe	Jl. Medan-Banda Aceh, Kota Lhokseumawe	6000	01/01/1990	8.664.912.000	-	8.664.912.000	1-PSP ke Kemendiksaintek sesuai BA-51/KNL.0102/2025
6	2010199999	Tanah Persil Lainnya	KPKNL Lahat	Kota Pagar Alam	Jalan Lintas Pagar Alam-Bengkulu, Ulu Urah, Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	899	01/01/2006	1.111.399.000	-	1.111.399.000	1-PSP ke Bawaslu sesuai BAST-001/IDLE/KNL.0403/2025
7	2010199999	Tanah Persil Lainnya	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Jaya Negara Nomor 48, Pecoro, Rambipuji	841	01/01/1979	846.891.000	-	846.891.000	1-PSP ke Kemenag sesuai BAST-13/KNL.1004/2025
8	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Jambi	Kab. Tanjung Jabang Barat	Jl. Zainal Abidin, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabang Barat	2256	01/01/2004	556.950.000	-	556.950.000	3-Hibah ke Pemkab Tanjung Balai Barat sesuai BAST-01_KNL.0401_2025
9	2010199999	Tanah Persil Lainnya	KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Jl. Veteran Gg. Kenari III Nomor 5	153	01/01/2007	58.500.000	-	58.500.000	3-Hibah ke Pemkot Banjarmasin sesuai BA-23/KNL.1203/2025
TOTAL TANAH						**20.088**		**17.075.262.160**	**-**	**17.075.262.160**	
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Batam	Kota Batam	Komplek Perkantoran Sekupang, Jl. Ir. Sutami, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam	150	01/01/1986	148.346.000	86.913.300	61.432.700	1-PSP ke ATR/BPN sesuai BAST-01/KNL.0304/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Bima	Dompu	Jalan Udang, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu	197	01/01/2008	116.834.000	40.841.104	75.992.896	1-PSP ke Bawaslu sesuai BA-15/KNL.1404/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Lahat	Kota Pagar Alam	Jalan Lintas Pagar Alam-Bengkulu, Ulu Urah, Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	100	01/01/2006	15.866.000	6.021.868	9.844.132	1-PSP ke Bawaslu sesuai BAST-001/IDLE/KNL.0403/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Jaya Negara Nomor 48, Pecoro, Rambipuji	160	01/01/1979	44.360.161	35.640.718	8.719.443	1-PSP ke Kemenag sesuai BAST-13/KNL.1004/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Pamekasan	Sumenep	Jl. Pelabuhan Bintaro, Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep	70	01/01/1987	16.124.493	8.790.246	7.334.247	2-Penghapusan ke sesuai 35/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Pamekasan	Sumenep	Jl. Pelabuhan Dungkek, RT. 005/RW. 003, Dungkek, Kab. Sumenep	70	01/01/1987	18.815.681	10.257.340	8.558.341	2-Penghapusan ke sesuai 35/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Pamekasan	Sumenep	Jl. Raya Kamal, Desa Banyuanyar, Kab. Sampang	70	01/01/1988	20.308.000	10.670.923	9.637.077	2-Penghapusan ke sesuai 35/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Pamekasan	Sumenep	Kec. Gayam, Kab. Sumenep	70	01/01/1993	14.275.450	6.352.568	7.922.882	2-Penghapusan ke sesuai 35/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Singkawang	Sambas	Jl. Pelabuhan, Kec. Pemangkat	157,5	01/01/1972	15.117.825	15.117.825	-	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Singkawang	Sambas	Jl. Bakti Raya Kampung Jawai, Kec. Jawai	54	01/01/1987	10.184.248	10.184.248	-	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Singkawang	Bengkayang	Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya (Teluk Suak)	54	01/01/1987	11.777.060	6.641.571	5.135.489	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN *IDLE* YANG DIHAPUS, DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Singkawang	Sambas	Desa Kuala Tebas, Kec. Tebas	70	01/01/1988	143.298.193	77.893.126	65.405.067	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Singkawang	Sambas	Jl. Tanjung Batu, Kec. Pemangkat	64	01/01/1998	30.813.718	12.300.333	18.513.385	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Singkawang	Sambas	Jl. Penjajap, Kec. Pemangkat	54	01/01/1987	10.467.376	5.902.986	4.564.390	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Singkawang	Sambas	Jl. Kuala Selakau, Kec. Selakau	54	01/01/1959	25.132.000	25.132.000	-	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Singkawang	Sambas	Jl. Siaga Parit Baru Sebangkau, Kec.Pemangkat	54	01/01/1959	9.656.000	9.656.000	-	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Singkawang	Bengkayang	Kampung Sei Raya, Kec Sei Raya	54	01/01/1959	15.317.000	15.317.000	-	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4040199999	Tugu/Tanda Batas Lainnya	KPKNL Singkawang	Kab. Sambas	Jalan Bukit Raya, Kec. Jawai, Kab. Sambas	160	01/01/2009	179.567.000	60.828.320	118.738.680	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4040199999	Tugu/Tanda Batas Lainnya	KPKNL Singkawang	Kab. Sambas	Jalan Kuala, Desa Kuala, Kec. Selakau, Kab. Sambas	160	01/01/2009	168.684.000	57.141.705	111.542.295	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4040199999	Tugu/Tanda Batas Lainnya	KPKNL Singkawang	Kab. Sambas	Jalan Siaga Parit Baru, Desa Parit Baru, Kec. Selakau, Kab. Sambas	103	01/01/2009	108.590.000	36.784.862	71.805.138	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4040199999	Tugu/Tanda Batas Lainnya	KPKNL Singkawang	Kab. Sambas	Jalan Pelabuhan Penjajab, Desa Penjajab, Kec. Pemangkat Kota, Kab. Sambas	120	01/01/2009	126.513.000	42.856.278	83.656.722	2-Penghapusan ke sesuai KMK 27/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Makasar	Bulukumba	Jalan Yos Sudarso No.11 Kel. Bentenge, Kec. Ujung Bulu, Bulukumba Sulawesi Selatan	36	01/01/2007	6.700.000	2.479.000	4.221.000	2-Penghapusan ke sesuai KMK 56/MK/KN.4/2025
	4010130999	Bangunan Lainnya	KPKNL Makasar	Bulukumba	Jalan Yos Sudarso No.11 Kel. Bentenge, Kec. Ujung Bulu, Bulukumba Sulawesi Selatan	36	01/01/2007	6.700.000	2.479.000	4.221.000	2-Penghapusan ke sesuai KMK 56/MK/KN.4/2025
TOTAL BANGUNAN						**2.118**		**1.263.447.205***	**586.202.321**	**677.244.884**	
TOTAL						**22.206**		**18.338.709.365**	**586.202.321**	**17.752.507.044**	

*) Terdapat selisih sebesar Rp13.000.000 berupa reklasifikasi aset menjadi aset ekstrakomptabel

RINCIAN UTANG PFK PAJAK ROKOK PER PEMERINTAH DAERAH

No	Daerah	Utang Awal Pajak Rokok (*Audited* TA 2024)	Penerimaan Pajak Rokok TA 2025 (SKPPR Triwulan I s.d. IV 2025 + Restitusi Triwulan I s.d. IV)	Penyetoran Pajak Rokok TA 2025	Utang Akhir Pajak Rokok (per 31 Desember 2025)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)
1	Provinsi Aceh	64.172.681.790	374.037.777.037	438.210.458.827	-
2	Provinsi Sumatera Utara	180.637.650.488	1.044.056.182.207	1.224.693.832.695	-
3	Provinsi Sumatera Barat	66.869.245.059	388.674.625.558	455.543.870.617	-
4	Provinsi Riau	79.692.921.041	467.947.734.832	547.640.655.873	-
5	Provinsi Kepulauan Riau	25.219.633.776	149.068.657.189	174.288.290.965	-
6	Provinsi Jambi	43.699.571.707	254.860.768.367	298.560.340.074	-
7	Provinsi Sumatera Selatan	103.364.071.656	602.519.007.286	705.883.078.942	-
8	Provinsi Bangka Belitung	17.620.162.095	103.246.645.289	102.553.470.040	18.313.337.344
9	Provinsi Bengkulu	50.399.757.988	142.016.973.366	167.226.520.723	25.190.210.631
10	Provinsi Lampung	105.571.108.767	609.875.537.324	715.446.646.091	-
11	Provinsi DKI Jakarta	133.119.683.267	747.691.810.432	880.811.493.699	-
12	Provinsi Jawa Barat	581.398.275.171	3.390.185.883.385	3.971.584.158.556	-
13	Provinsi Banten	145.208.829.583	847.942.435.192	993.151.264.775	-
14	Provinsi Jawa Tengah	445.078.768.676	2.570.436.888.431	3.015.515.657.107	-
15	Provinsi DI Yogyakarta	43.514.558.287	250.527.654.736	294.042.213.023	-
16	Provinsi Jawa Timur	486.383.697.904	2.801.021.557.558	3.287.405.255.462	-
17	Provinsi Kalimantan Barat	64.807.931.672	375.900.226.252	440.708.157.924	-
18	Provinsi Kalimantan Tengah	31.977.461.523	187.001.732.525	218.979.194.048	-
19	Provinsi Kalimantan Selatan	49.326.935.204	286.470.970.630	335.797.905.834	-
20	Provinsi Kalimantan Timur	46.570.182.466	271.949.614.507	318.519.796.973	-
21	Provinsi Kalimantan Utara	8.616.910.617	51.080.139.065	59.697.049.682	-
22	Provinsi Sulawesi Utara	31.384.984.633	177.477.235.591	208.862.220.224	-
23	Provinsi Gorontalo	14.376.604.157	83.536.591.734	97.913.195.891	-
24	Provinsi Sulawesi Tengah	36.635.143.590	213.871.106.133	250.506.249.723	-
25	Provinsi Sulawesi Selatan	109.649.179.853	635.231.289.047	744.880.468.900	-
26	Provinsi Sulawesi Barat	17.093.727.079	98.084.806.553	115.178.533.632	-
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	160.953.031.570	187.038.394.647	214.955.089.957	133.036.336.260
28	Provinsi Bali	50.751.450.577	292.834.064.601	343.585.515.178	-
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	65.408.454.154	380.474.530.985	445.882.985.139	-
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	65.367.674.968	381.105.508.931	446.473.183.899	-
31	Provinsi Maluku	22.294.427.932	129.277.691.808	151.572.119.740	-
32	Provinsi Maluku Utara	79.975.225.475	92.317.304.194	64.085.733.449	108.206.796.220
33	Provinsi Papua	12.632.997.809	73.421.404.899	73.031.306.874	13.023.095.834
34	Provinsi Papua Barat	6.593.796.198	38.267.600.412	44.861.396.610	-
35	Provinsi Papua Selatan	6.178.181.582	36.652.788.386	42.830.969.968	-
36	Provinsi Papua Tengah	15.852.618.353	91.488.713.383	107.341.331.736	-
37	Provinsi Papua Pegunungan	17.140.769.160	98.486.679.812	115.627.448.972	-
38	Provinsi Papua Barat Daya	26.029.708.679	41.371.257.175	37.974.491.726	29.426.474.128
39	Restitusi Pajak Rokok	-	166.169.812	166.169.812	-
40	Penerimaan Pajak Rokok Bulan Desember 2026 dikurangi Restitusi Desember 2025	-	2.080.712.261.500	87.840.000	2.080.624.421.500
	Total	**3.511.568.014.506**	**21.048.328.220.771**	**22.152.075.563.360**	**2.407.820.671.917**

RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PADA UAPBUN AP

Kode KPPN	KPPN	31 Desember 2025		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	(25.332.975)	25.332.975	-
002	LANGSA	(39.553.153)	39.553.153	-
004	MEDAN I	(928.920.176)	928.920.176	-
008	PEKANBARU	(174.954.742)	174.954.742	-
009	TANJUNG PINANG	(841.916.397)	841.916.397	-
010	PADANG	(466.472.927)	466.472.927	-
012	JAMBI	(28.891.559)	28.891.559	-
014	PALEMBANG	(242.055.185)	242.055.185	-
017	BANDAR LAMPUNG	(72.639.893)	72.639.893	-
018	JAKARTA I	(1.177.276.683)	371.147.641	(806.129.042)
019	JAKARTA II	(1.041.330.646)	(5.470.216.711.504)	(5.471.258.042.150)
020	SERANG	(313.116.128)	313.116.128	-
021	PURWAKARTA	(8.160.200)	8.160.200	-
022	BANDUNG I	(185.231.601)	185.231.601	-
023	BOGOR	(19.402.637)	19.402.637	-
024	CIREBON	(1.400.000)	1.400.000	-
026	SEMARANG I	(59.778.711)	59.778.711	-
028	SURAKARTA	(26.000.450)	26.000.450	-
030	YOGYAKARTA	(7.362.570)	7.362.570	-
031	SURABAYA I	(15.771.269)	15.771.269	-
032	MALANG	(3.781.000)	3.781.000	-
034	KEDIRI	(2.960.875)	2.960.875	-
035	BONDOWOSO	(13.770.000)	13.770.000	-
037	DENPASAR	(120.895.582)	120.895.582	-
042	PONTIANAK	(9.032.500)	9.032.500	-
043	PALANGKARAYA	(56.682.363)	56.682.363	-
046	SAMARINDA	(153.583.912)	153.583.912	-
047	BALIKPAPAN	(155.484.600)	155.484.600	-
049	MANADO	(28.639.869)	28.639.869	-
050	GORONTALO	(1.809.600)	1.809.600	-
051	PALU	(557.844.789)	557.844.789	-
052	POSO	(75.665.270)	75.665.270	-
053	LUWUK	(3.781.081)	3.781.081	-
054	MAKASSAR I	(1.803.200)	1.803.200	-
055	WATAMPONE	(5.385.000)	5.385.000	-
060	KENDARI	(208.708.468)	208.708.468	-
061	AMBON	(11.102.500)	11.102.500	-
062	TERNATE	(12.787.700)	12.787.700	-
063	JAYAPURA	(13.770.000)	13.770.000	-
064	BIAK	(13.770.000)	13.770.000	-
065	MANOKWARI	(378.457.745)	378.457.745	-
066	SORONG	(10.105.540)	10.105.540	-
067	FAK FAK	(32.130.000)	32.130.000	-
068	MERAUKE	(7.050.000)	7.050.000	-
070	LUBUK LINGGAU	(4.896.000)	4.896.000	-
071	BIMA	(41.321.061)	41.321.061	-
072	PEKALONGAN	(41.310.000)	41.310.000	-
074	TAPAKTUAN	(80.653.558)	80.653.558	-
075	RANTAU PRAPAT	(117.000)	117.000	-
084	TUAL	(485.081.441)	485.081.441	-
088	JAKARTA III	(2.471.459.860)	(4.812.774.665)	(7.284.234.525)
089	LHOKSEUMAWE	(123.325.495)	123.325.495	-
093	SINGKAWANG	(16.158.652)	16.158.652	-
095	BANDUNG II	(32.960.079)	32.960.079	-

RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PADA UAPBUN AP

Kode KPPN	KPPN	31 Desember 2025		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
098	MOJOKERTO	(15.405.400)	15.405.400	-
103	BAU BAU	(24.420.000)	24.420.000	-
110	BARABAI	(13.770.000)	13.770.000	-
113	WAMENA	(44.550.000)	44.550.000	-
116	KOTABUMI	(15.390.000)	15.390.000	-
120	DUMAI	(64.089.552)	64.089.552	-
121	MANNA	(13.770.000)	13.770.000	-
123	MEDAN II	(16.900.000)	16.900.000	-
124	TEBING TINGGI	(6.912.000)	6.912.000	-
126	METRO LAMPUNG	(17.045.425)	17.045.425	-
127	TANGERANG	(135.439.861)	135.439.861	-
133	JAKARTA IV	(1.539.584.217)	1.295.322.707	(244.261.510)
134	SEMARANG II	(200.986.526.937)	200.986.526.937	-
136	MAKASSAR II	(842.832.183)	842.832.183	-
139	JAKARTA V	(8.520.364.619)	(177.234.873.204)	(185.755.237.823)
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(6.402.194.224)	5.647.555.385	(754.638.839)
141	TIMIKA	(18.360.000)	18.360.000	-
158	KOTAMOBAGU	(9.847.700)	9.847.700	-
161	RANGKASBITUNG	(5.700.000)	5.700.000	-
165	SIDOARJO	(2.910.000)	2.910.000	-
169	SELONG	(15.000.000)	15.000.000	-
175	JAKARTA VI	(1.016.607.460)	(2.127.714.165)	(3.144.321.625)
178	MAMUJU	(172.413.028)	172.413.028	-
180	MARISA	(54.533.330)	54.533.330	-
182	JAKARTA VII	(493.303.489)	(3.327.241.304)	(3.820.544.793)
185	TANJUNG SELOR	(5.940.350)	5.940.350	-
999	DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA	(11.705.465.030.212)	11.656.716.068.723	(48.748.961.489)
Jumlah		**(11.936.770.692.629)**	**6.214.954.320.833**	**(5.721.816.371.796)**

RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
1	Kab. Tanjung Jabung Barat	1
2	Kab. Lahat	1
3	Kab. Muara Enim	1
4	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1
5	Kab. Musi Rawas Utara	1
6	Provinsi DKI Jakarta	1
7	Kab. Bojonegoro	1.026.753.845.659
8	Provinsi Kalimantan Tengah	1
9	Kab. Barito Selatan	10.200.552.344
10	Kab. Barito Utara	1.395.867.313.049
11	Kab. Kapuas	43.524.466.000
12	Kab. Murung Raya	864.625.176.571
13	Kab. Barito Timur	1
14	Provinsi Kalimantan Selatan	1
15	Kab. Banjar	10.380.284.513
16	Kab. Hulu Sungai Selatan	1
17	Kab. Hulu Sungai Tengah	99.730.245.108
18	Kab. Hulu Sungai Utara	1
19	Kab. Kotabaru	73.639.652.094
20	Kab. Tabalong	26.189.600.422
21	Kota Banjarbaru	1
22	Kab. Tanah Bumbu	70.122.305.560
23	Kab. Berau	63.153.988.047
24	Kab. Kutai Kartanegara	1
25	Kab. Kutai Barat	1.145.781.473.302
26	Kab. Paser	86.357.115.276
27	Kota Balikpapan	99.141.424.000
28	Kota Bontang	128.190.202.000
29	Kota Samarinda	1
30	Kab. Penajam Paser Utara	1
31	Kab. Mahakam Ulu	955.355.319.046
32	Kab. Banggai	1
33	Kab. Morowali	1
34	Kab. Morowali Utara	1
35	Provinsi Sulawesi Tenggara	49.696.399.334
36	Kab. Sumbawa Barat	29.571.039.501
37	Provinsi Maluku Utara	1
38	Kab. Halmahera Tengah	1
39	Kab. Halmahera Selatan	1
40	Kota Tidore Kepulauan	1
41	Provinsi Papua Barat	15.912.457.236
42	Kab. Bulungan	1
43	Kab. Nunukan	65.357.678.000

RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
44	Provinsi Papua Selatan	28.484.342.103
TOTAL		**6.288.034.879.188**

RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DJSPSK

No.	Organisasi Internasional	Mata Uang	Sisa utang jangka pendek lain-lain 31 Desember 2024		Transaksi TA 2025				Selisih Konfirmasi Pembayaran (*Bank Charges*)		Penyesuaian Saldo Utang (Jurnal Manual)				Saldo Utang jangka pendek lain-lain 31 Desember 2025 (Setelah Revaluasi)		Penghapusan Utang (Koreksi)		Saldo Utang jangka pendek lain-lain 31 Desember 2025 (Setelah Revaluasi)	
					Penambahan Utang		Pengurangan Utang				Penambahan Utang		Pengurangan Utang							
			Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR
1	ISFD	USD	-	-	-	-	-	-							-	-			-	-
2	OFID	USD	-	-	-	-	-	-							-	-			-	-
3	AMRO	USD	51.30	828,854	-	-	-	-							51.30	857,736			51.30	857,736
4	OECD BEPS Project	EUR	-	-	-	-	-	-							-	-			-	-
5	GFTEI	EUR	0.31	5,215	-	-	-	-							0.31	6,084	0.31	6,084	-	-
6	AMTF	USD	65.00	1,050,205	15,000.00	245,880,000	15,000.00	245,880,000	10.00	163,920					75.00	1,254,000			75.00	1,254,000
7	USAID Trust Fund	IDR	-	-	-	-	-	-							-	-			-	-
8	GGGI	USD	-	-	-	-	-	-							-	-			-	-
9	Fasilitas KSS	USD	19.50	315,062	-	-	-	-							19.50	326,040			19.50	326,040
10	GCF	USD	-	-	-	-	-	-							-	-			-	-
11	APTERR	USD	-	-	-	-	-	-							-	-			-	-
12	AAHTF	USD	17.50	282,748	-	-	-	-							17.50	292,600			17.50	292,600
13	APTCF	USD	295.00	4,766,315	-	-	-	-							295.00	4,932,400			295.00	4,932,400
14	GIH	USD	20.00	323,140	-	-	-	-							20.00	334,400			20.00	334,400
15	ASEAN ICT Fund	USD	60.00	969,420	-	-	-	-							60.00	1,003,200			60.00	1,003,200
16	TCF IAEA	EUR	-	-	-	-	-	-							-	-			-	-
17	ATHPC Fund	USD	10.00	161,570	-	-	-	-							10.00	167,200			10.00	167,200
18	ADF	USD	-	-	2,843,557.34	47,677,925,920	2,843,557.34	47,737,640,624			2,846,100.00	46,493,889,600	2,843,557.34	47,677,925,920	2,542.66	42,513,275			2,542.66	42,513,275
19	SOMTC Polri	USD	10.00	161,570	-	-	-	-							10.00	167,200			10.00	167,200
20	Pandemic Fund FIF	USD	-	-	10,000,000.00	163,920,000,000	10,000,000.00	163,920,000,000							-	-			-	-
TOTAL				**8,864,098**		**211,843,805,920**		**211,903,520,623**		**163,920**		**46,493,889,600**				**51,854,135**		**6,083**		**51,848,051**

*) Selisih Rp1 karena pembulatan

Kurs Jisdor 31 Desember 2025	
EUR	19,624.26
USD	16,720.00

Kurs Jisdor 31 Desember 2024	
EUR	16,822.67
USD	16,157.00

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
1	Provinsi Aceh	113,647,088,000	1,150,246,800	114,797,334,800
2	Kab. Aceh Barat	41,495,331,000	1,554,558,300	43,049,889,300
3	Kab. Aceh Barat Daya	10,254,551,000	201,750,000	10,456,301,000
4	Kab. Aceh Besar	14,240,554,000	2,138,553,600	16,379,107,600
5	Kab. Aceh Jaya	7,600,709,000	2,957,052,500	10,557,761,500
6	Kab. Aceh Selatan	6,394,595,000	137,472,300	6,532,067,300
7	Kab. Aceh Singkil	7,106,567,000	234,775,600	7,341,342,600
8	Kab. Aceh Tamiang	50,274,038,000	83,877,600	50,357,915,600
9	Kab. Aceh Tengah	12,211,775,000	166,321,800	12,378,096,800
10	Kab. Aceh Tenggara	5,685,408,000	-	5,685,408,000
11	Kab. Aceh Timur	35,213,450,000	1,354,500,000	36,567,950,000
12	Kab. Aceh Utara	29,346,311,000	1,417,216,400	30,763,527,400
13	Kab. Bener Meriah	6,671,486,000	4,158,160,200	10,829,646,200
14	Kab. Bireuen	7,230,327,000	-	7,230,327,000
15	Kab. Gayo Lues	8,711,337,000	258,500,000	8,969,837,000
16	Kab. Nagan Raya	24,554,780,000	316,500,000	24,871,280,000
17	Kab. Pidie	7,488,487,000	1,107,837,800	8,596,324,800
18	Kab. Pidie Jaya	5,612,251,000	820,183,300	6,432,434,300
19	Kab. Simeulue	4,149,563,000	225,500,000	4,375,063,000
20	Kota Banda Aceh	24,026,126,000	3,234,455,000	27,260,581,000
21	Kota Langsa	7,768,469,000	656,042,000	8,424,511,000
22	Kota Lhokseumawe	11,348,896,000	374,497,600	11,723,393,600
23	Kota Sabang	4,126,307,000	-	4,126,307,000
24	Kota Subulussalam	5,435,921,000	177,811,300	5,613,732,300
25	Provinsi Sumatera Utara	339,352,455,000	5,989,236,000	345,341,691,000
26	Kab. Asahan	45,008,672,000	1,855,802,200	46,864,474,200
27	Kab. Batu Bara	28,033,483,000	45,750,000	28,079,233,000
28	Kab. Dairi	14,479,243,000	4,108,521,700	18,587,764,700
29	Kab. Deli Serdang	46,798,646,000	1,062,282,200	47,860,928,200
30	Kab. Humbang Hasundutan	16,231,358,000	544,372,050	16,775,730,050
31	Kab. Karo	15,333,844,000	1,035,335,400	16,369,179,400
32	Kab. Labuhanbatu	48,342,283,000	71,612,400	48,413,895,400
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	64,611,337,000	-	64,611,337,000
34	Kab. Labuhanbatu Utara	32,564,224,000	5,648,680,000	38,212,904,000
35	Kab. Langkat	67,392,852,000	2,761,067,800	70,153,919,800
36	Kab. Mandailing Natal	57,372,968,000	-	57,372,968,000
37	Kab. Nias	15,874,186,000	20,499,640,100	36,373,826,100
38	Kab. Nias Barat	15,450,301,000	536,665,520	15,986,966,520
39	Kab. Nias Selatan	15,895,312,000	1,053,074,100	16,948,386,100
40	Kab. Nias Utara	13,533,640,000	2,132,491,100	15,666,131,100
41	Kab. Padang Lawas	36,898,970,000	863,164,800	37,762,134,800
42	Kab. Padang Lawas Utara	52,743,962,000	315,720,400	53,059,682,400
43	Kab. Pakpak Bharat	15,066,693,000	427,000,000	15,493,693,000
44	Kab. Samosir	14,770,678,000	279,559,800	15,050,237,800
45	Kab. Serdang Bedagai	32,684,372,000	11,127,227,000	43,811,599,000
46	Kab. Simalungun	43,288,670,000	689,500,000	43,978,170,000
47	Kab. Tapanuli Selatan	213,572,129,000	443,180,892	214,015,309,892
48	Kab. Tapanuli Tengah	28,795,108,000	1,053,703,400	29,848,811,400

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
49	Kab. Tapanuli Utara	43,829,100,000	20,070,581,200	63,899,681,200
50	Kab. Toba Samosir	16,703,702,000	250,845,600	16,954,547,600
51	Kota Binjai	18,424,895,000	736,000,000	19,160,895,000
52	Kota Gunungsitoli	16,665,595,000	1,709,864,100	18,375,459,100
53	Kota Medan	138,641,090,000	266,616,600	138,907,706,600
54	Kota Padang Sidempuan	27,756,820,000	-	27,756,820,000
55	Kota Pematang Siantar	20,587,716,000	2,647,261,000	23,234,977,000
56	Kota Sibolga	15,334,052,000	1,777,190,100	17,111,242,100
57	Kota Tanjung Balai	16,746,784,000	-	16,746,784,000
58	Kota Tebing Tinggi	17,079,009,000	243,249,713	17,322,258,713
59	Provinsi Sumatera Barat	70,700,061,000	186,493,900	70,886,554,900
60	Kab. Agam	6,554,663,000	586,872,960	7,141,535,960
61	Kab. Dharmasraya	22,021,537,000	642,250,000	22,663,787,000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	4,767,215,000	1,590,399,000	6,357,614,000
63	Kab. Lima Puluh Kota	20,047,657,000	1,042,430,200	21,090,087,200
64	Kab. Padang Pariaman	6,028,653,000	1,102,500,000	7,131,153,000
65	Kab. Pasaman	6,003,138,000	411,168,000	6,414,306,000
66	Kab. Pasaman Barat	12,061,126,000	966,025,000	13,027,151,000
67	Kab. Pesisir Selatan	11,042,789,000	1,233,908,000	12,276,697,000
68	Kab. Sijunjung	17,980,492,000	83,462,000	18,063,954,000
69	Kab. Solok	4,941,093,000	508,077,000	5,449,170,000
70	Kab. Solok Selatan	22,007,359,000	-	22,007,359,000
71	Kab. Tanah Datar	5,732,422,000	3,286,552,500	9,018,974,500
72	Kota Bukit Tinggi	7,893,472,000	-	7,893,472,000
73	Kota Padang	39,383,014,000	150,000,000	39,533,014,000
74	Kota Padang Panjang	4,230,534,000	142,500,000	4,373,034,000
75	Kota Pariaman	3,789,231,000	-	3,789,231,000
76	Kota Payakumbuh	5,226,281,000	1,971,464,400	7,197,745,400
77	Kota Sawahlunto	14,109,283,000	1,525,026,200	15,634,309,200
78	Kota Solok	5,314,098,000	6,382,200	5,320,480,200
79	Provinsi Riau	768,581,056,000	9,364,675,700	777,945,731,700
80	Kab. Bengkalis	1,041,762,198,000	123,136,400	1,041,885,334,400
81	Kab. Indragiri Hilir	184,470,247,000	-	184,470,247,000
82	Kab. Indragiri Hulu	139,924,154,000	5,034,173,400	144,958,327,400
83	Kab. Kampar	410,757,605,000	919,350,700	411,676,955,700
84	Kab. Kepulauan Meranti	137,208,876,000	7,217,109,217	144,425,985,217
85	Kab. Kuantan Singingi	125,795,243,000	1,147,368,600	126,942,611,600
86	Kab. Pelalawan	222,772,326,000	21,471,600	222,793,797,600
87	Kab. Rokan Hilir	539,290,431,000	2,810,762,700	542,101,193,700
88	Kab. Rokan Hulu	197,750,688,000	14,829,170,500	212,579,858,500
89	Kab. Siak	511,529,902,000	1,750,000	511,531,652,000
90	Kota Dumai	143,218,954,000	107,898,900	143,326,852,900
91	Kota Pekanbaru	178,611,757,000	148,501,400	178,760,258,400
92	Provinsi Jambi	281,710,114,000	2,599,151,800	284,309,265,800
93	Kab. Batanghari	185,867,611,000	1,045,953,300	186,913,564,300
94	Kab. Bungo	96,998,228,000	23,721,600	97,021,949,600
95	Kab. Kerinci	55,572,340,000	2,593,848,000	58,166,188,000
96	Kab. Merangin	95,267,967,000	37,005,600	95,304,972,600

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
97	Kab. Muaro Jambi	210,077,012,000	-	210,077,012,000
98	Kab. Sarolangun	143,905,376,000	3,852,609,500	147,757,985,500
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	522,160,705,000	3,987,775,200	526,148,480,200
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	300,064,911,000	-	300,064,911,000
101	Kab. Tebo	97,015,211,000	84,000,000	97,099,211,000
102	Kota Jambi	69,156,810,000	172,994,400	69,329,804,400
103	Kota Sungai Penuh	48,760,860,000	2,358,031,800	51,118,891,800
104	Provinsi Sumatera Selatan	1,018,009,896,000	1,171,405,800	1,019,181,301,800
105	Kab. Banyuasin	270,371,168,000	-	270,371,168,000
106	Kab. Empat Lawang	110,389,259,000	1,213,728,100	111,602,987,100
107	Kab. Lahat	512,783,270,000	11,991,900	512,795,261,900
108	Kab. Muara Enim	678,966,498,000	3,767,081,300	682,733,579,300
109	Kab. Musi Banyuasin	1,114,240,284,000	4,828,925,900	1,119,069,209,900
110	Kab. Musi Rawas	293,447,423,000	13,323,721,700	306,771,144,700
111	Kab. Musi Rawas Utara	222,643,866,000	6,739,411,700	229,383,277,700
112	Kab. Ogan Ilir	101,518,601,000	8,500,000	101,527,101,000
113	Kab. Ogan Komering Ilir	168,860,847,000	-	168,860,847,000
114	Kab. Ogan Komering Ulu	148,574,644,000	103,500,000	148,678,144,000
115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	106,078,464,000	1,109,844,100	107,188,308,100
116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	103,944,673,000	-	103,944,673,000
117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	338,750,847,000	1,904,000,000	340,654,847,000
118	Kota Lubuk Linggau	93,698,928,000	4,502,706,100	98,201,634,100
119	Kota Pagar Alam	122,815,838,000	2,182,984,800	124,998,822,800
120	Kota Palembang	172,265,541,000	2,767,646,900	175,033,187,900
121	Kota Prabumulih	142,083,070,000	173,168,063	142,256,238,063
122	Provinsi Bengkulu	44,107,600,000	9,203,600	44,116,803,600
123	Kab. Bengkulu Selatan	57,489,469,000	90,250,000	57,579,719,000
124	Kab. Bengkulu Tengah	36,967,842,000	31,562,500	36,999,404,500
125	Kab. Bengkulu Utara	44,775,431,000	553,500,000	45,328,931,000
126	Kab. Kaur	53,125,677,000	96,108,000	53,221,785,000
127	Kab. Kepahiang	7,327,035,000	23,514,600	7,350,549,600
128	Kab. Lebong	52,274,861,000	289,256,000	52,564,117,000
129	Kab. Mukomuko	17,963,659,000	-	17,963,659,000
130	Kab. Rejang Lebong	10,643,405,000	-	10,643,405,000
131	Kab. Seluma	56,033,841,000	-	56,033,841,000
132	Kota Bengkulu	17,638,377,000	84,787,001	17,723,164,001
133	Provinsi Lampung	110,563,345,000	408,412,800	110,971,757,800
134	Kab. Lampung Barat	12,150,688,000	546,170,500	12,696,858,500
135	Kab. Lampung Selatan	22,129,043,000	-	22,129,043,000
136	Kab. Lampung Tengah	28,707,980,000	2,365,784,000	31,073,764,000
137	Kab. Lampung Timur	43,016,271,000	1,909,294,700	44,925,565,700
138	Kab. Lampung Utara	14,442,263,000	2,255,471,600	16,697,734,600
139	Kab. Mesuji	15,529,827,000	1,237,221,600	16,767,048,600
140	Kab. Pesawaran	13,383,386,000	1,105,076,400	14,488,462,400
141	Kab. Pesisir Barat	12,352,174,000	406,042,400	12,758,216,400
142	Kab. Pringsewu	12,686,972,000	27,685,012,300	40,371,984,300
143	Kab. Tanggamus	57,993,436,000	-	57,993,436,000
144	Kab. Tulang Bawang	18,669,966,000	15,000,000	18,684,966,000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
145	Kab. Tulang Bawang Barat	11,585,041,000	142,883,700	11,727,924,700
146	Kab. Way Kanan	15,208,451,000	696,712,200	15,905,163,200
147	Kota Bandar Lampung	40,006,776,000	-	40,006,776,000
148	Kota Metro	14,466,875,000	490,750,000	14,957,625,000
149	Provinsi DKI Jakarta	11,401,417,497,000	2,037,870,900	11,403,455,367,900
150	Provinsi Jawa Barat	1,222,143,480,000	4,324,245,480	1,226,467,725,480
151	Kab. Bandung	291,896,180,000	5,845,749,600	297,741,929,600
152	Kab. Bandung Barat	70,759,057,000	6,968,540,400	77,727,597,400
153	Kab. Bekasi	310,509,507,000	12,901,564,600	323,411,071,600
154	Kab. Bogor	307,347,727,000	49,218,995,200	356,566,722,200
155	Kab. Ciamis	49,278,273,000	3,690,598,750	52,968,871,750
156	Kab. Cianjur	87,559,931,000	4,921,140,400	92,481,071,400
157	Kab. Cirebon	55,582,967,000	-	55,582,967,000
158	Kab. Garut	172,024,613,000	3,262,554,000	175,287,167,000
159	Kab. Indramayu	101,283,832,000	2,558,250,000	103,842,082,000
160	Kab. Karawang	244,586,039,000	42,726,074,900	287,312,113,900
161	Kab. Kuningan	45,654,401,000	1,091,494,400	46,745,895,400
162	Kab. Majalengka	54,335,151,000	993,500,000	55,328,651,000
163	Kab. Pangandaran	46,970,560,000	745,669,300	47,716,229,300
164	Kab. Purwakarta	79,053,176,000	1,409,955,000	80,463,131,000
165	Kab. Subang	110,011,373,000	42,736,200	110,054,109,200
166	Kab. Sukabumi	197,490,331,000	165,972,000	197,656,303,000
167	Kab. Sumedang	72,749,215,000	27,000,000	72,776,215,000
168	Kab. Tasikmalaya	58,833,504,000	497,282,000	59,330,786,000
169	Kota Bandung	204,747,834,000	-	204,747,834,000
170	Kota Banjar	46,801,793,000	123,750,000	46,925,543,000
171	Kota Bekasi	116,873,854,000	130,000,000	117,003,854,000
172	Kota Bogor	79,604,451,000	115,520,000	79,719,971,000
173	Kota Cimahi	60,102,000,000	44,250,000	60,146,250,000
174	Kota Cirebon	56,397,691,000	455,406,900	56,853,097,900
175	Kota Depok	84,356,675,000	217,061,500	84,573,736,500
176	Kota Sukabumi	54,526,074,000	1,853,864,700	56,379,938,700
177	Kota Tasikmalaya	52,728,687,000	18,514,188,600	71,242,875,600
178	Provinsi Jawa Tengah	432,276,078,000	1,071,277,400	433,347,355,400
179	Kab. Banjarnegara	16,171,732,000	5,399,900	16,177,131,900
180	Kab. Banyumas	26,471,633,000	385,593,700	26,857,226,700
181	Kab. Batang	16,115,230,000	577,500,000	16,692,730,000
182	Kab. Blora	110,171,184,000	-	110,171,184,000
183	Kab. Boyolali	20,484,537,000	2,161,280,124	22,645,817,124
184	Kab. Brebes	16,111,057,000	11,678,424,400	27,789,481,400
185	Kab. Cilacap	32,314,905,000	22,885,900	32,337,790,900
186	Kab. Demak	26,061,424,000	74,692,200	26,136,116,200
187	Kab. Grobogan	21,577,849,000	96,712,800	21,674,561,800
188	Kab. Jepara	20,012,310,000	3,393,798,000	23,406,108,000
189	Kab. Karanganyar	19,749,334,000	21,379,800	19,770,713,800
190	Kab. Kebumen	13,174,578,000	2,158,743,200	15,333,321,200
191	Kab. Kendal	24,622,623,000	8,050,076,000	32,672,699,000
192	Kab. Klaten	21,201,560,000	6,793,731,000	27,995,291,000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
193	Kab. Kudus	132,022,191,000	19,221,600	132,041,412,600
194	Kab. Magelang	18,832,286,000	5,486,265,200	24,318,551,200
195	Kab. Pati	16,904,065,000	2,326,250,000	19,230,315,000
196	Kab. Pekalongan	12,607,375,000	793,284,000	13,400,659,000
197	Kab. Pemalang	14,836,527,000	26,613,900	14,863,140,900
198	Kab. Purbalingga	13,418,107,000	19,221,600	13,437,328,600
199	Kab. Purworejo	12,800,535,000	5,442,605,050	18,243,140,050
200	Kab. Rembang	27,658,444,000	1,165,943,200	28,824,387,200
201	Kab. Semarang	21,930,418,000	21,044,088,000	42,974,506,000
202	Kab. Sragen	14,484,536,000	20,971,600	14,505,507,600
203	Kab. Sukoharjo	18,309,190,000	-	18,309,190,000
204	Kab. Tegal	17,324,516,000	58,000,000	17,382,516,000
205	Kab. Temanggung	27,226,386,000	3,107,409,000	30,333,795,000
206	Kab. Wonogiri	17,063,336,000	-	17,063,336,000
207	Kab. Wonosobo	16,134,774,000	3,720,437,460	19,855,211,460
208	Kota Magelang	13,700,616,000	-	13,700,616,000
209	Kota Pekalongan	17,749,357,000	638,250,000	18,387,607,000
210	Kota Salatiga	17,108,131,000	2,453,680,600	19,561,811,600
211	Kota Semarang	119,233,325,000	1,695,096,000	120,928,421,000
212	Kota Surakarta	31,233,496,000	2,218,093,800	33,451,589,800
213	Kota Tegal	15,105,602,000	353,788,000	15,459,390,000
214	Provinsi DI Yogyakarta	59,058,126,000	155,250,000	59,213,376,000
215	Kab. Bantul	16,354,001,000	1,897,178,400	18,251,179,400
216	Kab. gunung kidul	13,544,906,000	46,792,200	13,591,698,200
217	Kab. Kulon Progo	14,617,353,000	657,394,500	15,274,747,500
218	Kab. Sleman	31,188,984,000	1,621,406,947	32,810,390,947
219	Kota Yogyakarta	27,840,709,000	5,399,900	27,846,108,900
220	Provinsi Jawa Timur	1,349,504,158,000	24,391,227,800	1,373,895,385,800
221	Kab. Bangkalan	49,070,159,000	158,551,200	49,228,710,200
222	Kab. Banyuwangi	181,217,229,000	10,839,192,532	192,056,421,532
223	Kab. Blitar	52,519,256,000	4,326,967,500	56,846,223,500
224	Kab. Bojonegoro	1,594,021,780,000	3,587,503,600	1,597,609,283,600
225	Kab. Bondowoso	73,601,296,000	94,560,600	73,695,856,600
226	Kab. Gresik	164,668,157,000	16,087,166,200	180,755,323,200
227	Kab. Jember	111,068,470,000	12,555,477,600	123,623,947,600
228	Kab. Jombang	118,160,481,000	79,500,000	118,239,981,000
229	Kab. Kediri	71,848,314,000	245,250,000	72,093,564,000
230	Kab. Lamongan	125,362,365,000	4,571,658,408	129,934,023,408
231	Kab. Lumajang	50,883,518,000	703,750,000	51,587,268,000
232	Kab. Madiun	116,429,680,000	43,500,000	116,473,180,000
233	Kab. Magetan	49,989,819,000	541,054,000	50,530,873,000
234	Kab. Malang	96,302,822,000	2,889,967,300	99,192,789,300
235	Kab. Mojokerto	62,634,545,000	13,000,000	62,647,545,000
236	Kab. Nganjuk	116,907,037,000	9,298,557,000	126,205,594,000
237	Kab. Ngawi	115,840,223,000	1,462,982,800	117,303,205,800
238	Kab. Pacitan	48,148,921,000	10,706,159,100	58,855,080,100
239	Kab. Pamekasan	71,490,812,000	100,043,700	71,590,855,700
240	Kab. Pasuruan	180,771,477,000	9,616,652,800	190,388,129,800

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
241	Kab. Ponorogo	52,824,388,000	76,500,000	52,900,888,000
242	Kab. Probolinggo	72,643,846,000	3,417,284,500	76,061,130,500
243	Kab. Sampang	49,372,065,000	2,469,386,400	51,841,451,400
244	Kab. Sidoarjo	108,905,366,000	2,172,264,600	111,077,630,600
245	Kab. Situbondo	74,500,127,000	401,878,300	74,902,005,300
246	Kab. Sumenep	58,353,089,000	498,491,701	58,851,580,701
247	Kab. Trenggalek	50,904,106,000	184,500,000	51,088,606,000
248	Kab. Tuban	266,837,691,000	158,898,600	266,996,589,600
249	Kab. Tulungagung	58,181,503,000	41,970,600	58,223,473,600
250	Kota Batu	51,135,974,000	507,040,000	51,643,014,000
251	Kota Blitar	49,204,299,000	94,500,000	49,298,799,000
252	Kota Kediri	100,371,098,000	994,016,200	101,365,114,200
253	Kota Madiun	56,506,431,000	24,279,187,500	80,785,618,500
254	Kota Malang	82,251,089,000	114,750,000	82,365,839,000
255	Kota Mojokerto	48,866,395,000	207,000,000	49,073,395,000
256	Kota Pasuruan	47,641,179,000	76,000,000	47,717,179,000
257	Kota Probolinggo	47,915,449,000	575,381,800	48,490,830,800
258	Kota Surabaya	339,964,003,000	32,238,300	339,996,241,300
259	Provinsi Kalimantan Barat	114,660,814,000	23,029,800	114,683,843,800
260	Kab. Bengkayang	18,666,196,000	3,723,017,500	22,389,213,500
261	Kab. Kapuas Hulu	95,444,124,000	229,500,000	95,673,624,000
262	Kab. Kayong Utara	17,615,808,000	101,471,600	17,717,279,600
263	Kab. Ketapang	124,721,862,000	563,121,000	125,284,983,000
264	Kab. Kubu Raya	31,977,899,000	56,500,000	32,034,399,000
265	Kab. Landak	24,713,486,000	160,138,900	24,873,624,900
266	Kab. Melawi	64,025,730,000	6,020,285,500	70,046,015,500
267	Kab. Mempawah	16,455,589,000	-	16,455,589,000
268	Kab. Sambas	20,450,847,000	569,000,000	21,019,847,000
269	Kab. Sanggau	39,742,891,000	63,750,000	39,806,641,000
270	Kab. Sekadau	18,939,776,000	1,499,361,260	20,439,137,260
271	Kab. Sintang	90,204,202,000	-	90,204,202,000
272	Kota Pontianak	32,580,894,000	920,583,800	33,501,477,800
273	Kota Singkawang	14,957,978,000	-	14,957,978,000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	815,830,106,000	730,379,500	816,560,485,500
275	Kab. Barito Selatan	193,223,478,000	463,750,000	193,687,228,000
276	Kab. Barito Timur	248,835,707,000	-	248,835,707,000
277	Kab. Barito Utara	1,018,847,961,000	716,147,800	1,019,564,108,800
278	Kab. Gunung Mas	82,744,256,000	25,111,370	82,769,367,370
279	Kab. Kapuas	178,372,208,000	5,166,344,600	183,538,552,600
280	Kab. Katingan	60,096,047,000	283,000,000	60,379,047,000
281	Kab. Kotawaringin Barat	82,222,111,000	31,000,000	82,253,111,000
282	Kab. Kotawaringin Timur	131,802,319,000	15,750,000	131,818,069,000
283	Kab. Lamandau	54,399,649,000	186,757,420	54,586,406,420
284	Kab. Murung Raya	487,142,339,000	292,858,800	487,435,197,800
285	Kab. Pulang Pisau	56,048,350,000	493,500,000	56,541,850,000
286	Kab. Seruyan	82,128,016,000	9,015,191,200	91,143,207,200
287	Kab. Sukamara	51,083,269,000	48,603,600	51,131,872,600
288	Kota Palangkaraya	45,950,839,000	40,034,000	45,990,873,000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
289	Provinsi Kalimantan Selatan	1,073,559,610,000	788,609,500	1,074,348,219,500
290	Kab. Balangan	709,305,200,000	9,927,369,700	719,232,569,700
291	Kab. Banjar	293,463,809,000	834,428,600	294,298,237,600
292	Kab. Barito Kuala	179,971,337,000	16,199,700	179,987,536,700
293	Kab. Hulu Sungai Selatan	259,348,406,000	368,747,400	259,717,153,400
294	Kab. Hulu Sungai Tengah	146,933,750,000	1,567,259,400	148,501,009,400
295	Kab. Hulu Sungai Utara	203,521,053,000	85,721,600	203,606,774,600
296	Kab. Kotabaru	803,614,602,000	776,677,400	804,391,279,400
297	Kab. Tabalong	612,746,540,000	1,566,331,100	614,312,871,100
298	Kab. Tanah Bumbu	929,146,613,000	-	929,146,613,000
299	Kab. Tanah Laut	351,832,989,000	262,250,000	352,095,239,000
300	Kab. Tapin	391,895,571,000	79,000,000	391,974,571,000
301	Kota Banjarbaru	160,837,601,000	2,500,000	160,840,101,000
302	Kota Banjarmasin	144,712,632,000	5,863,515,400	150,576,147,400
303	Provinsi Kalimantan Timur	2,002,168,357,000	10,916,763,031	2,013,085,120,031
304	Kab. Berau	861,831,186,000	65,852,400	861,897,038,400
305	Kab. Kutai Barat	523,337,240,000	2,516,715,000	525,853,955,000
306	Kab. Kutai Kartanegara	3,002,576,503,000	1,549,992,800	3,004,126,495,800
307	Kab. Kutai Timur	1,330,356,631,000	2,660,971,600	1,333,017,602,600
308	Kab. Mahakam Ulu	390,929,733,000	1,168,965,600	392,098,698,600
309	Kab. Paser	825,146,750,000	2,068,090,880	827,214,840,880
310	Kab. Penajam Paser Utara	390,700,250,000	659,977,600	391,360,227,600
311	Kota Balikpapan	425,489,341,000	748,750,000	426,238,091,000
312	Kota Bontang	427,991,663,000	132,241,400	428,123,904,400
313	Kota Samarinda	427,708,222,000	-	427,708,222,000
314	Provinsi Sulawesi Utara	142,799,885,000	4,125,359,500	146,925,244,500
315	Kab. Bolaang Mongondow	116,967,081,000	248,675,100	117,215,756,100
316	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	25,136,590,000	486,904,200	25,623,494,200
317	Kab. Bolaang Mongondow Timur	20,999,314,000	234,000,000	21,233,314,000
318	Kab. Bolaang Mongondow Utara	21,018,812,000	136,971,600	21,155,783,600
319	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	12,145,663,000	318,825,000	12,464,488,000
320	Kab. Kepulauan Talaud	12,473,607,000	69,730,400	12,543,337,400
321	Kab. Minahasa	31,468,351,000	284,271,000	31,752,622,000
322	Kab. Minahasa Selatan	21,459,887,000	25,281,000	21,485,168,000
323	Kab. Minahasa Tenggara	14,780,108,000	19,221,600	14,799,329,600
324	Kab. Minahasa Utara	82,080,326,000	600,246,000	82,680,572,000
325	Kab. Sangihe	12,913,218,000	248,110,800	13,161,328,800
326	Kota Bitung	63,422,997,000	-	63,422,997,000
327	Kota Kotamobagu	21,484,392,000	158,250,000	21,642,642,000
328	Kota Manado	40,530,168,000	1,707,214,600	42,237,382,600
329	Kota Tomohon	21,810,780,000	925,250,000	22,736,030,000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	523,757,888,000	105,805,800	523,863,693,800
331	Kab. Banggai	477,458,472,000	637,683,600	478,096,155,600
332	Kab. Banggai Kepulauan	44,303,500,000	243,571,200	44,547,071,200
333	Kab. Banggai Laut	46,114,117,000	-	46,114,117,000
334	Kab. Buol	47,272,195,000	92,562,600	47,364,757,600
335	Kab. Donggala	62,664,601,000	3,773,466,700	66,438,067,700
336	Kab. Morowali	388,530,419,000	2,101,681,800	390,632,100,800

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
337	Kab. Morowali Utara	359,790,895,000	158,748,700	359,949,643,700
338	Kab. Parigi Moutong	60,656,953,000	224,115,000	60,881,068,000
339	Kab. Poso	62,574,009,000	78,559,200	62,652,568,200
340	Kab. Sigi	58,366,940,000	9,362,700	58,376,302,700
341	Kab. Tojo Una Una	125,173,989,000	-	125,173,989,000
342	Kab. Tolitoli	48,513,366,000	692,787,900	49,206,153,900
343	Kota Palu	135,632,557,000	1,135,528,200	136,768,085,200
344	Provinsi Sulawesi Selatan	154,508,213,000	882,646,900	155,390,859,900
345	Kab. Bantaeng	9,484,761,000	43,978,700	9,528,739,700
346	Kab. Barru	6,258,034,000	54,500,000	6,312,534,000
347	Kab. Bone	22,818,056,000	387,883,000	23,205,939,000
348	Kab. Bulukumba	11,218,986,000	247,854,854	11,466,840,854
349	Kab. Enrekang	8,270,200,000	24,514,076,100	32,784,276,100
350	Kab. Gowa	10,369,638,000	157,547,900	10,527,185,900
351	Kab. Jeneponto	8,121,370,000	63,755,700	8,185,125,700
352	Kab. Kepulauan Selayar	7,634,774,000	82,223,000	7,716,997,000
353	Kab. Luwu	14,983,926,000	12,382,333,000	27,366,259,000
354	Kab. Luwu Timur	120,548,868,000	158,429,622	120,707,297,622
355	Kab. Luwu Utara	16,483,082,000	931,720,500	17,414,802,500
356	Kab. Maros	14,466,220,000	120,750,000	14,586,970,000
357	Kab. Pangkajene Kepulauan	18,410,817,000	26,391,600	18,437,208,600
358	Kab. Pinrang	8,315,133,000	44,500,000	8,359,633,000
359	Kab. Sidenreng Rappang	14,795,406,000	218,750,000	15,014,156,000
360	Kab. Sinjai	8,781,284,000	224,664,400	9,005,948,400
361	Kab. Soppeng	16,022,041,000	8,896,567,450	24,918,608,450
362	Kab. Takalar	13,225,290,000	1,294,221,600	14,519,511,600
363	Kab. Tana Toraja	8,277,213,000	160,984,428	8,438,197,428
364	Kab. Toraja Utara	7,967,451,000	1,148,730,800	9,116,181,800
365	Kab. Wajo	74,363,315,000	324,278,000	74,687,593,000
366	Kota Makassar	67,960,898,000	128,726,986	68,089,624,986
367	Kota Palopo	9,275,275,000	6,258,814,200	15,534,089,200
368	Kota Parepare	9,879,725,000	284,449,800	10,164,174,800
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	368,816,226,000	22,446,821,903	391,263,047,903
370	Kab. Bombana	157,211,155,000	-	157,211,155,000
371	Kab. Buton	22,539,369,000	63,001,600	22,602,370,600
372	Kab. Buton Selatan	22,299,535,000	39,048,000	22,338,583,000
373	Kab. Buton Tengah	42,940,032,000	876,486,000	43,816,518,000
374	Kab. Buton Utara	23,063,433,000	31,384,800	23,094,817,800
375	Kab. Kolaka	233,634,649,000	766,636,200	234,401,285,200
376	Kab. Kolaka Timur	58,448,924,000	608,500,000	59,057,424,000
377	Kab. Kolaka Utara	130,560,989,000	55,459,000	130,616,448,000
378	Kab. Konawe	290,947,242,000	485,595,400	291,432,837,400
379	Kab. Konawe Kepulauan	34,915,813,000	45,806,000	34,961,619,000
380	Kab. Konawe Selatan	78,968,202,000	1,640,416,200	80,608,618,200
381	Kab. Konawe Utara	223,488,114,000	4,288,802,600	227,776,916,600
382	Kab. Muna	24,586,059,000	107,000,000	24,693,059,000
383	Kab. Muna Barat	22,484,761,000	12,197,397,800	34,682,158,800
384	Kab. Wakatobi	22,227,375,000	19,221,600	22,246,596,600

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
385	Kota Bau-bau	24,226,761,000	-	24,226,761,000
386	Kota Kendari	51,956,518,000	882,838,800	52,839,356,800
387	Provinsi Bali	180,125,380,000	1,688,632,800	181,814,012,800
388	Kab. Badung	102,135,225,000	2,154,685,700	104,289,910,700
389	Kab. Bangli	15,242,008,000	244,500,000	15,486,508,000
390	Kab. Buleleng	20,296,474,000	1,550,871,200	21,847,345,200
391	Kab. Gianyar	25,265,119,000	964,221,600	26,229,340,600
392	Kab. Jembrana	16,119,231,000	10,284,125,300	26,403,356,300
393	Kab. Karangasem	16,394,070,000	6,486,670,800	22,880,740,800
394	Kab. Klungkung	16,637,691,000	159,000,000	16,796,691,000
395	Kab. Tabanan	18,537,902,000	6,782,849,600	25,320,751,600
396	Kota Denpasar	75,659,543,000	14,160,754,000	89,820,297,000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	618,191,791,000	4,400,079,600	622,591,870,600
398	Kab. Bima	81,107,389,000	2,142,840,200	83,250,229,200
399	Kab. Dompu	81,245,521,000	133,544,600	81,379,065,600
400	Kab. Lombok Barat	83,723,477,000	60,721,600	83,784,198,600
401	Kab. Lombok Tengah	103,113,841,000	589,305,700	103,703,146,700
402	Kab. Lombok Timur	103,777,901,000	1,980,195,400	105,758,096,400
403	Kab. Lombok Utara	82,954,099,000	8,278,717,200	91,232,816,200
404	Kab. Sumbawa	423,798,510,000	653,471,200	424,451,981,200
405	Kab. Sumbawa Barat	1,274,593,738,000	19,221,600	1,274,612,959,600
406	Kota Bima	80,502,146,000	609,850,800	81,111,996,800
407	Kota Mataram	114,743,405,000	267,695,700	115,011,100,700
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	32,078,241,000	535,624,200	32,613,865,200
409	Kab. Alor	2,389,944,000	5,232,460,700	7,622,404,700
410	Kab. Belu	2,109,718,000	32,399,400	2,142,117,400
411	Kab. Ende	4,600,275,000	4,418,529,700	9,018,804,700
412	Kab. Flores Timur	2,052,171,000	4,923,655,700	6,975,826,700
413	Kab. Kupang	3,060,851,000	1,251,184,560	4,312,035,560
414	Kab. Lembata	1,881,074,000	5,318,119,900	7,199,193,900
415	Kab. Malaka	1,432,669,000	1,725,388,100	3,158,057,100
416	Kab. Manggarai	3,291,697,000	3,987,267,000	7,278,964,000
417	Kab. Manggarai Barat	5,045,688,000	5,075,732,600	10,121,420,600
418	Kab. Manggarai Timur	1,882,800,000	-	1,882,800,000
419	Kab. Nagekeo	1,838,080,000	2,502,417,500	4,340,497,500
420	Kab. Ngada	2,995,464,000	4,032,030,374	7,027,494,374
421	Kab. Rote Ndao	1,424,006,000	1,190,455,100	2,614,461,100
422	Kab. Sabu Raijua	1,679,559,000	334,086,136	2,013,645,136
423	Kab. Sikka	3,473,085,000	6,152,215,000	9,625,300,000
424	Kab. Sumba Barat	2,189,405,000	523,862,294	2,713,267,294
425	Kab. Sumba Barat Daya	1,574,064,000	4,249,605,300	5,823,669,300
426	Kab. Sumba Tengah	1,321,732,000	7,063,228,300	8,384,960,300
427	Kab. Sumba Timur	4,178,266,000	1,492,615,400	5,670,881,400
428	Kab. Timor Tengah Selatan	2,267,749,000	3,876,241,900	6,143,990,900
429	Kab. Timor Tengah Utara	2,886,290,000	-	2,886,290,000
430	Kota Kupang	15,768,536,000	539,169,400	16,307,705,400
431	Provinsi Maluku	23,846,318,000	7,040,968,800	30,887,286,800
432	Kab. Buru	6,017,208,000	736,594,300	6,753,802,300

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
433	Kab. Buru Selatan	2,516,048,000	1,541,018,700	4,057,066,700
434	Kab. Kepulauan Aru	3,034,315,000	264,487,260	3,298,802,260
435	Kab. Maluku Barat Daya	7,787,456,000	152,625,600	7,940,081,600
436	Kab. Maluku Tengah	8,429,510,000	-	8,429,510,000
437	Kab. Maluku Tenggara	4,509,397,000	1,742,240,800	6,251,637,800
438	Kab. Kepulauan Tanimbar	4,563,568,000	1,054,676,640	5,618,244,640
439	Kab. Seram Bagian Barat	5,795,075,000	10,199,169,900	15,994,244,900
440	Kab. Seram Bagian Timur	9,635,086,000	2,091,645,640	11,726,731,640
441	Kota Ambon	13,163,408,000	505,669,500	13,669,077,500
442	Kota Tual	3,640,075,000	3,680,234,400	7,320,309,400
443	Provinsi Papua	33,778,941,000	-	33,778,941,000
444	Kab. Asmat	112,418,710,000	141,067,400	112,559,777,400
445	Kab. Biak Numfor	9,311,830,000	35,598,000	9,347,428,000
446	Kab. Boven Digoel	9,257,576,000	387,000,000	9,644,576,000
447	Kab. Deiyai	154,331,447,000	6,959,775,700	161,291,222,700
448	Kab. Dogiyai	163,055,434,000	190,926,600	163,246,360,600
449	Kab. Intan Jaya	156,774,844,000	361,712,600	157,136,556,600
450	Kab. Jayapura	15,167,372,000	210,000,000	15,377,372,000
451	Kab. Jayawijaya	10,233,861,000	531,000,000	10,764,861,000
452	Kab. Keerom	11,330,477,000	946,764,800	12,277,241,800
453	Kab. Kepulauan Yapen	8,998,029,000	-	8,998,029,000
454	Kab. Lanny Jaya	4,150,634,000	1,528,674,900	5,679,308,900
455	Kab. Mamberamo Raya	4,675,387,000	5,982,720	4,681,369,720
456	Kab. Mamberamo Tengah	4,013,174,000	281,181,600	4,294,355,600
457	Kab. Mappi	6,160,769,000	-	6,160,769,000
458	Kab. Merauke	24,323,499,000	365,008,800	24,688,507,800
459	Kab. Mimika	1,618,408,702,000	1,045,024,520	1,619,453,726,520
460	Kab. Nabire	118,739,242,000	4,628,827,900	123,368,069,900
461	Kab. Nduga	98,077,162,000	1,152,000,000	99,229,162,000
462	Kab. Paniai	165,742,907,000	11,662,600	165,754,569,600
463	Kab. Pegunungan Bintang	5,415,957,000	211,526,100	5,627,483,100
464	Kab. Puncak	156,219,353,000	369,000,000	156,588,353,000
465	Kab. Puncak Jaya	105,092,981,000	-	105,092,981,000
466	Kab. Sarmi	7,440,929,000	2,127,218,600	9,568,147,600
467	Kab. Supiori	6,063,778,000	-	6,063,778,000
468	Kab. Tolikara	5,020,780,000	-	5,020,780,000
469	Kab. Waropen	47,290,691,000	425,483,600	47,716,174,600
470	Kab. Yahukimo	9,316,642,000	240,057,300	9,556,699,300
471	Kab. Yalimo	5,370,841,000	32,532,000	5,403,373,000
472	Kota Jayapura	17,343,236,000	1,042,590,000	18,385,826,000
473	Provinsi Maluku Utara	616,075,362,000	272,079,300	616,347,441,300
474	Kab. Halmahera Barat	144,486,926,000	190,500,000	144,677,426,000
475	Kab. Halmahera Selatan	454,601,874,000	29,816,400	454,631,690,400
476	Kab. Halmahera Tengah	561,939,612,000	16,880,274,200	578,819,886,200
477	Kab. Halmahera Timur	563,653,173,000	1,181,001,600	564,834,174,600
478	Kab. Halmahera Utara	110,769,978,000	36,506,400	110,806,484,400
479	Kab. Kepulauan Sula	62,020,941,000	5,069,560,500	67,090,501,500
480	Kab. Pulau Morotai	58,920,103,000	6,924,793,200	65,844,896,200

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
481	Kab. Pulau Taliabu	71,712,479,000	22,796,400	71,735,275,400
482	Kota Ternate	68,980,959,000	223,500,000	69,204,459,000
483	Kota Tidore Kepulauan	189,432,964,000	1,161,982,300	190,594,946,300
484	Provinsi Banten	577,509,325,000	4,637,099,600	582,146,424,600
485	Kab. Lebak	87,196,950,000	180,496,400	87,377,446,400
486	Kab. Pandeglang	60,446,003,000	4,483,000,000	64,929,003,000
487	Kab. Serang	85,764,511,000	529,750,000	86,294,261,000
488	Kab. Tangerang	197,973,710,000	75,014,700	198,048,724,700
489	Kota Cilegon	117,777,885,000	380,187,000	118,158,072,000
490	Kota Serang	64,258,492,000	63,760,500	64,322,252,500
491	Kota Tangerang	254,988,607,000	562,781,800	255,551,388,800
492	Kota Tangerang Selatan	162,250,953,000	2,270,803,600	164,521,756,600
493	Provinsi Bangka Belitung	85,692,490,000	510,899,500	86,203,389,500
494	Kab. Bangka	55,343,265,000	679,000,000	56,022,265,000
495	Kab. Bangka Barat	76,446,464,000	178,000,000	76,624,464,000
496	Kab. Bangka Selatan	42,455,193,000	359,000,000	42,814,193,000
497	Kab. Bangka Tengah	35,617,496,000	4,355,072,700	39,972,568,700
498	Kab. Belitung	21,281,113,000	1,106,884,040	22,387,997,040
499	Kab. Belitung Timur	23,598,868,000	135,000,000	23,733,868,000
500	Kota Pangkal Pinang	22,010,912,000	156,000,000	22,166,912,000
501	Provinsi Gorontalo	33,785,064,000	1,757,995,248	35,543,059,248
502	Kab. Boalemo	3,182,567,000	77,250,000	3,259,817,000
503	Kab. Bone Bolango	14,435,355,000	604,489,100	15,039,844,100
504	Kab. Gorontalo	4,576,375,000	19,221,600	4,595,596,600
505	Kab. Gorontalo Utara	4,476,833,000	-	4,476,833,000
506	Kab. Pohuwato	9,105,939,000	239,250,000	9,345,189,000
507	Kota Gorontalo	6,539,821,000	3,771,572,900	10,311,393,900
508	Provinsi Kepulauan Riau	159,118,844,000	403,317,400	159,522,161,400
509	Kab. Bintan	37,345,551,000	-	37,345,551,000
510	Kab. Karimun	50,947,403,000	576,000,000	51,523,403,000
511	Kab. Kepulauan Anambas	62,607,388,000	847,500,000	63,454,888,000
512	Kab. Lingga	34,907,786,000	82,997,800	34,990,783,800
513	Kab. Natuna	96,126,225,000	558,310,507	96,684,535,507
514	Kota Batam	131,263,814,000	574,895,200	131,838,709,200
515	Kota Tanjung Pinang	26,053,245,000	230,659,200	26,283,904,200
516	Provinsi Papua Barat	860,993,935,000	3,171,120,000	864,165,055,000
517	Kab. Fak Fak	82,878,115,000	1,577,250,000	84,455,365,000
518	Kab. Kaimana	177,441,074,000	1,529,877,000	178,970,951,000
519	Kab. Manokwari	55,693,413,000	5,294,165,600	60,987,578,600
520	Kab. Manokwari Selatan	67,647,461,000	687,359,800	68,334,820,800
521	Kab. Maybrat	23,680,333,000	1,826,599,800	25,506,932,800
522	Kab. Pegunungan Arfak	54,311,582,000	22,826,400	54,334,408,400
523	Kab. Raja Ampat	60,237,017,000	1,064,469,300	61,301,486,300
524	Kab. Sorong	95,404,088,000	-	95,404,088,000
525	Kab. Sorong Selatan	30,984,849,000	1,182,000,000	32,166,849,000
526	Kab. Tambrauw	25,290,850,000	3,147,502,800	28,438,352,800
527	Kab. Teluk Bintuni	644,848,356,000	6,013,103,340	650,861,459,340
528	Kab. Teluk Wondama	104,742,911,000	2,416,434,000	107,159,345,000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
529	Kota Sorong	25,532,805,000	36,578,700	25,569,383,700
530	Provinsi Sulawesi Barat	10,842,322,000	133,755,600	10,976,077,600
531	Kab. Majene	2,895,005,000	2,530,979,300	5,425,984,300
532	Kab. Mamasa	2,809,274,000	527,879,300	3,337,153,300
533	Kab. Mamuju	8,712,560,000	4,228,475,800	12,941,035,800
534	Kab. Mamuju Tengah	2,917,202,000	1,147,744,200	4,064,946,200
535	Kab. Pasangkayu	5,719,113,000	46,018,200	5,765,131,200
536	Kab. Polewali Mandar	4,112,864,000	1,642,353,900	5,755,217,900
537	Provinsi Kalimantan Utara	227,400,863,000	627,577,200	228,028,440,200
538	Kab. Bulungan	413,554,228,000	405,201,900	413,959,429,900
539	Kab. Malinau	495,601,206,000	264,517,910	495,865,723,910
540	Kab. Nunukan	249,886,171,000	1,301,231,500	251,187,402,500
541	Kab. Tana Tidung	349,279,196,000	3,824,083,500	353,103,279,500
542	Kota Tarakan	81,853,565,000	48,000,000	81,901,565,000
543	Provinsi Papua Barat Daya	146,042,721,000	-	146,042,721,000
544	Provinsi Papua Selatan	29,075,184,000	-	29,075,184,000
545	Provinsi Papua Tengah	740,837,438,000	-	740,837,438,000
546	Provinsi Papua Pegunungan	12,798,973,000	-	12,798,973,000
Total		**83,587,272,319,000**	**1,162,003,801,061**	**84,749,276,120,061**

UTANG SBN JANGKA PENDEK DAN BAGIAN LANCAR SBN JANGKA PANJANG RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	*Outstanding*	Tingkat Bunga (%)	*Unamortized Premium (+)/ Discount(-)*	*Book Value*
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			**716,166,747,000,000**		**(2,496,858,839,000)**	**713,669,888,161,000**
A.SURAT UTANG NEGARA			**552,256,175,000,000**		**(1,645,382,398,000)**	**550,610,792,602,000**
Zero Coupon			**71,800,000,000,000**		**(1,777,321,584,000)**	**70,022,678,416,000**
1	SPN01260103	1/3/2026	2,000,000,000,000		(745,200,000)	1,999,254,800,000
2	SPN01260117	1/17/2026	850,000,000,000		(1,814,438,000)	848,185,562,000
3	SPN03260218	2/18/2026	1,750,000,000,000		(10,533,748,000)	1,739,466,252,000
4	SPN12260108	1/8/2026	4,350,000,000,000		(5,848,247,000)	4,344,151,753,000
5	SPN12260205	2/5/2026	5,000,000,000,000		(27,974,714,000)	4,972,025,286,000
6	SPN12260305	3/5/2026	5,000,000,000,000		(49,456,077,000)	4,950,543,923,000
7	SPN12260423	4/23/2026	2,000,000,000,000		(36,592,753,000)	1,963,407,247,000
8	SPN12260507	5/7/2026	4,000,000,000,000		(81,047,325,000)	3,918,952,675,000
9	SPN12260604	6/4/2026	4,000,000,000,000		(95,811,773,000)	3,904,188,227,000
10	SPN12260702	7/2/2026	4,000,000,000,000		(110,701,245,000)	3,889,298,755,000
11	SPN12260730	7/30/2026	2,000,000,000,000		(60,776,112,000)	1,939,223,888,000
12	SPN12260813	8/13/2026	4,500,000,000,000		(136,703,077,000)	4,363,296,923,000
13	SPN12260910	9/10/2026	12,100,000,000,000		(395,908,318,000)	11,704,091,682,000
14	SPN12261008	10/8/2026	8,000,000,000,000		(275,677,366,000)	7,724,322,634,000
15	SPN12261105	11/5/2026	7,250,000,000,000		(270,153,844,000)	6,979,846,156,000
16	SPN12261203	12/3/2026	5,000,000,000,000		(217,577,347,000)	4,782,422,653,000
Fixed Coupon			**325,956,175,000,000**		**131,939,186,000**	**326,088,114,186,000**
1	FR0037	9/15/2026	2,417,000,000,000	12.00000	(5,492,743,000)	2,411,507,257,000
2	FR0056	9/15/2026	119,699,000,000,000	8.37500	119,973,301,000	119,818,973,301,000
3	FR0084	2/15/2026	37,452,372,000,000	7.25000	(4,671,071,000)	37,447,700,929,000
4	FR0086	4/15/2026	134,525,000,000,000	5.50000	22,129,699,000	134,547,129,699,000
5	ORI023T3	7/15/2026	20,000,000,000,000	5.90000	-	20,000,000,000,000
6	ORI024T3	10/15/2026	11,862,803,000,000	6.10000	-	11,862,803,000,000
Variable Coupon			**154,500,000,000,000**		**-**	**154,500,000,000,000**
1	VR0035	8/10/2026	20,525,000,000,000	4.66026	-	20,525,000,000,000
2	VR0039	8/28/2026	4,245,000,000,000	4.74040	-	4,245,000,000,000
3	VR0043	9/28/2026	21,100,000,000,000	4.87435	-	21,100,000,000,000
4	VR0047	10/12/2026	11,550,000,000,000	4.70360	-	11,550,000,000,000
5	VR0051	10/26/2026	5,717,500,000,000	4.70360	-	5,717,500,000,000
6	VR0055	11/16/2026	4,370,000,000,000	4.60000	-	4,370,000,000,000
7	VR0059	11/23/2026	6,750,000,000,000	4.60000	-	6,750,000,000,000
8	VR0063	12/14/2026	25,742,500,000,000	4.87435	-	25,742,500,000,000
9	VR0066	12/2/2026	14,500,000,000,000	4.74040	-	14,500,000,000,000
10	VR0070	12/30/2026	40,000,000,000,000	4.87435	-	40,000,000,000,000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			**163,910,572,000,000**		**(851,476,441,000)**	**163,059,095,559,000**
Zero Return			**25,925,000,000,000**		**(383,462,481,000)**	**25,541,537,519,000**
1	SPNS01062026	6/1/2026	3,450,000,000,000		(69,064,166,000)	3,380,935,834,000
2	SPNS04052026	5/4/2026	2,500,000,000,000		(41,992,462,000)	2,458,007,538,000
3	SPNS06042026	4/6/2026	2,725,000,000,000		(38,970,931,000)	2,686,029,069,000
4	SPNS09032026	3/9/2026	3,400,000,000,000		(34,749,404,000)	3,365,250,596,000
5	SPNS10022026	2/10/2026	2,650,000,000,000		(16,845,796,000)	2,633,154,204,000
6	SPNS10082026	8/10/2026	4,550,000,000,000		(126,130,509,000)	4,423,869,491,000
7	SPNS12012026	1/12/2026	4,650,000,000,000		(7,882,279,000)	4,642,117,721,000
8	SPNS13072026	7/13/2026	2,000,000,000,000		(47,826,934,000)	1,952,173,066,000
Fixed Coupon			**137,985,572,000,000**		**(468,013,960,000)**	**137,517,558,040,000**
1	PBS021	11/15/2026	13,185,000,000,000	8.50000	48,813,805,000	13,233,813,805,000
2	PBS032	7/15/2026	90,307,000,000,000	4.87500	(516,827,765,000)	89,790,172,235,000
3	SR-018T3	3/10/2026	16,949,759,000,000	6.25000	-	16,949,759,000,000
4	SR-019T3	9/10/2026	17,543,813,000,000	5.95000	-	17,543,813,000,000

UTANG SBN JANGKA PENDEK DAN BAGIAN LANCAR SBN JANGKA PANJANG RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	*Outstanding*	Tingkat Bunga (%)	*Unamortized Premium (+)/ Discount(-)*	*Book Value*
II. SBN YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN			**60,010,444,003,339**		**-**	**60,010,444,003,339**
A.SURAT UTANG NEGARA			**30,007,289,003,339**		**-**	**30,007,289,003,339**
			15,649,964,003,339		**-**	**15,649,964,003,339**
1	SRBI01	1/1/2026	15,000,000,000,000	0.10000	-	15,000,000,000,000
2	SRBI01	2/1/2026	317,055,611,385	0.10000	-	317,055,611,385
3	SRBI01	8/1/2026	332,908,391,954	0.10000	-	332,908,391,954
Variable Coupon			**14,357,325,000,000**		**-**	**14,357,325,000,000**
1	SBR013T2	7/10/2026	14,357,325,000,000	6.45000	-	14,357,325,000,000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			**30,003,155,000,000**		**-**	**30,003,155,000,000**
Variable Coupon			**30,003,155,000,000**		**-**	**30,003,155,000,000**
1	ST012T2	5/10/2026	14,420,966,000,000	6.40000	-	14,420,966,000,000
2	ST013T2	11/10/2026	15,434,816,000,000	6.40000	-	15,434,816,000,000
3	SWR005	10/10/2026	147,373,000,000	6.50000	-	147,373,000,000
Total			**776,177,191,003,339**		**(2,496,858,839,000)**	**773,680,332,164,339**

Akun	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
216121	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah *SUN Diperdagangkan (Fixed Coupon + Variable Coupon) + SUN Tidak Diperdagangkan*	**510,463,464,003,339**
216141	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah *SBSN Diperdagangkan + SBSB Tidak Diperdagangkan*	**167,988,727,000,000**

BAGIAN LANCAR SBN JANGKA PANJANG VALAS

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	*Issued Principle Outstanding*	Tingkat Bunga (%)	*Accrued Indexation*	*Indexed Principal Outstanding*	*Unamortized Premium (+)/ Discount(-)*	Nilai Buku
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			**96,379,218,639,000**		**16,956,186,981,000**	**113,335,405,620,000**	**(3,296,450,000)**	**113,332,109,170,000**
A.SURAT UTANG NEGARA			**55,166,468,639,000**		**8,008,936,981,000**	**63,175,405,620,000**	**(3,296,450,000)**	**63,172,109,170,000**
Denominasi Euro			**12,075,502,500,000**		**2,642,692,500,000**	**14,718,195,000,000**	**(3,045,816,000)**	**14,715,149,184,000**
1	RIEUR0926	18-09-2026	12,075,502,500,000	1.45000	2,642,692,500,000	14,718,195,000,000	(3,045,816,000)	14,715,149,184,000
Denominasi US Dollars			**31,298,375,479,000**		**6,672,125,881,000**	**37,970,501,360,000**	**(250,634,000)**	**37,970,250,726,000**
1	USDFR0002	24-06-2026	2,659,200,000,000	4.05000	684,800,000,000	3,344,000,000,000	-	3,344,000,000,000
2	RI0126	08-01-2026	28,639,175,479,000	4.75000	5,987,325,881,000	34,626,501,360,000	(250,634,000)	34,626,250,726,000
Denominasi Yen			**11,792,590,660,000**		**(1,305,881,400,000)**	**10,486,709,260,000**	**-**	**10,486,709,260,000**
1	RIJPY0526	22-05-2026	592,448,400,000	0.96000	(111,896,550,000)	480,551,850,000	-	480,551,850,000
2	RIJPY0526A	27-05-2026	6,169,845,240,000	0.57000	(1,172,106,000,000)	4,997,739,240,000	-	4,997,739,240,000
3	RIJPY0526B	26-05-2026	5,030,297,020,000	0.74000	(21,878,850,000)	5,008,418,170,000	-	5,008,418,170,000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			**41,212,750,000,000**		**8,947,250,000,000**	**50,160,000,000,000**	**-**	**50,160,000,000,000**
Denominasi US Dollars			**41,212,750,000,000**		**8,947,250,000,000**	**50,160,000,000,000**	**-**	**50,160,000,000,000**
1	SNI0626	09-06-2026	17,827,500,000,000	1.50000	3,072,500,000,000	20,900,000,000,000	-	20,900,000,000,000
2	SNI26	29-03-2026	23,385,250,000,000	4.55000	5,874,750,000,000	29,260,000,000,000	-	29,260,000,000,000
Total			**96,379,218,639,000**		**16,956,186,981,000**	**113,335,405,620,000**	**(3,296,450,000)**	**113,332,109,170,000**

Akun	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
216131	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing *SUN Diperdagangkan*	**63,175,405,620,000**
216151	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing *SBSN Diperdagangkan*	**50,160,000,000,000**

OUTSTANDING UTANG PDN

Creditor Name	*CU Base*	Jml *Loan*	*Outstanding Base*	Bagian Lancar IDR *)	Utang Jangka Panjang IDR *)	Total Posisi Utang IDR *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
BANK DKI	IDR	18	2,824,883,112,079	512,184,321,332	2,312,698,790,747	2,824,883,112,079
BANK MANDIRI	IDR	281	45,487,591,120,909	9,433,290,111,114	36,054,301,009,795	45,487,591,120,909
PT. BNI (PERSERO)	IDR	85	9,321,472,689,799	2,589,762,587,504	6,731,710,102,295	9,321,472,689,799
PT. BTN (PERSERO)	IDR	42	3,855,095,689,290	799,230,181,910	3,055,865,507,380	3,855,095,689,290
Total		**426**	**61,489,042,612,077**	**13,334,467,201,860**	**48,154,575,410,217**	**61,489,042,612,077**

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 16.720,-

Akun	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025
216112	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	**13,334,467,201,860**

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI

Creditor Name	CU Base	Jml Loan	Outstanding Base	Bagian Lancar IDR *)	Utang Jangka Panjang IDR *)	Total Posisi Utang IDR *)
A. Outstanding Utang Program Pinjaman Luar Negeri per Kreditor						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
ADB	EUR	13	2,660,933,690	5,189,914,691,493	47,028,939,876,173	52,218,854,567,666
	IDR	9	38,688,091,667,491	5,313,241,666,448	33,374,850,001,043	38,688,091,667,491
	JPY	15	521,919,583,336	2,273,944,702,784	53,461,482,257,959	55,735,426,960,743
	USD	10	1,654,209,626	2,120,007,224,558	25,538,377,716,644	27,658,384,941,202
AFD	EUR	14	1,264,720,330	2,698,094,938,743	22,121,105,640,734	24,819,200,579,477
AIIB	EUR	2	939,800,000	-	18,442,879,548,000	18,442,879,548,000
	USD	3	1,302,750,000	2,016,014,000,000	19,765,966,000,000	21,781,980,000,000
AUSTRALIA	AUD	1	1,000,000,000	1,118,234,000,000	10,064,106,000,000	11,182,340,000,000
EXIM BANK KOREA	USD	2	160,000,000	209,000,000,000	2,466,200,000,000	2,675,200,000,000
IBRD	EUR	7	3,933,861,327	942,244,911,657	76,256,872,574,121	77,199,117,485,778
	JPY	3	142,923,400,640	1,695,396,614,725	13,567,293,293,240	15,262,689,907,965
	USD	42	11,477,325,108	18,193,135,683,094	173,707,740,122,666	191,900,875,805,760
JICA	JPY	23	262,596,804,000	3,497,857,785,279	24,544,671,096,119	28,042,528,881,397
KfW	EUR	15	2,856,097,258	7,653,796,460,690	48,394,998,709,505	56,048,795,170,196
	USD	5	142,652,059	1,303,191,224,474	1,081,951,200,000	2,385,142,424,474
Total		164	39,642,923,804,864	54,224,073,903,945	569,817,434,036,204	624,041,507,940,149

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 16.720,-

Creditor Name	CU Base	Jml Loan	Outstanding Base	Bagian Lancar IDR *)	Utang Jangka Panjang IDR *)	Total Posisi Utang *)
B. Outstanding Utang Proyek Pinjaman Luar Negeri per Kreditor						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
ADB	EUR	2	2,435,617	-	47,797,178,717	47,797,178,717
	IDR	19	11,893,242,744,158	1,807,519,595,121	10,085,723,149,037	11,893,242,744,158
	JPY	9	13,106,150,654	-	1,399,596,654,035	1,399,596,654,035
	SDR	11	30,889,820	372,497,110,304	335,444,131,101	707,941,241,406
	USD	30	1,384,367,032	1,882,912,116,020	21,263,704,661,528	23,146,616,777,548
AFD	EUR	4	40,211,846	71,260,167,494	729,034,038,646	800,294,206,140
	USD	5	25,705,453	114,095,180,302	315,700,000,713	429,795,181,015
AIIB	EUR	1	7,335,422	-	143,952,236,780	143,952,236,780
	USD	5	538,000,793	952,887,297,511	8,042,485,966,967	8,995,373,264,478
AUSTRALIA	AUD	2	400,700,323	131,120,430,289	4,349,646,822,849	4,480,767,253,139
B A W A G	EUR	2	434,661	8,529,893,980	-	8,529,893,980
BANCO SANTANDER	EUR	2	86,935,635	27,179,547,899	1,678,867,947,971	1,706,047,495,870
	USD	1	23,025,112	-	384,979,877,656	384,979,877,656
BANK MANDIRI SIN	USD	15	1,105,807,424	3,828,165,226,855	14,660,934,894,232	18,489,100,121,087
BBVA	EUR	3	85,571,825	-	1,679,283,752,090	1,679,283,752,090
BBVAIT Hongkong	EUR	1	56,126,250	-	1,101,436,122,825	1,101,436,122,825
BELGIUM	EUR	1	720,720	1,767,948,406	12,375,640,608	14,143,589,014
BLG	EUR	1	5,020,000	49,256,892,600	49,256,892,600	98,513,785,200
BNI LONDON	EUR	1	14,178,175	-	278,236,189,974	278,236,189,974
	USD	7	528,603,284	1,504,676,251,602	7,333,570,654,370	8,838,246,905,972
BNI New York	USD	7	312,180,054	1,750,571,718,491	3,469,078,783,386	5,219,650,501,877
BNI SEOUL	USD	1	3,187,465	53,294,409,115	-	53,294,409,115
BNP PARIBAS, PARIS	EUR	10	4,253,143,758	833,454,946,310	82,631,343,983,554	83,464,798,929,864
BNPP SINGAPORE	USD	3	45,421,340	390,468,738,651	368,976,069,326	759,444,807,977
BPIFAE	EUR	27	255,163,729	572,357,156,942	4,435,042,203,719	5,007,399,360,662
BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	2	116,405,851	363,493,377,986	1,920,885,307,559	2,284,378,685,545
	USD	8	359,889,068	1,396,659,772,429	4,620,685,450,885	6,017,345,223,314
BSI DUBAI	USD	1	15,242,238	-	254,850,211,000	254,850,211,000
CASA OF FRANCE	EUR	1	329,120,000	-	6,458,736,451,200	6,458,736,451,200
	USD	2	80,486,116	497,076,341,133	848,651,512,034	1,345,727,853,166
CCB (Asia) Hong Kong	USD	3	80,004,528	-	1,337,675,711,838	1,337,675,711,838
Ceska Sporitelna	EUR	1	83,584,661	-	1,640,287,113,589	1,640,287,113,589
CIDA	CAD	11	24,481,937	54,463,313,636	244,225,372,176	298,688,685,813
COMMERZBANK GERMANY	EUR	3	201,523,301	444,042,966,241	3,510,702,689,426	3,954,745,655,667
CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	7	1,506,052,007	4,458,541,391,406	25,096,614,775,530	29,555,156,166,936
	USD	1	14,166,667	236,866,666,054	-	236,866,666,054
CTBC Bank Singapore	USD	1	2,247,094	-	37,571,407,500	37,571,407,500
CZECH EXPORT BANK	USD	1	65,237,415	218,153,915,760	872,615,663,040	1,090,769,578,800
DEUTSCHE BANK AG, HK	EUR	1	53,651,217	-	1,052,865,421,912	1,052,865,421,912
DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	1	1,405,022	13,786,257,339	13,786,256,554	27,572,513,894
DZ BANK AG HONG KONG	EUR	2	31,281,806	132,249,605,263	481,632,693,857	613,882,299,120
	USD	2	173,565,894	35,497,017,459	2,866,524,729,385	2,902,021,746,844
EKSFIN EXPORT FINANA	USD	1	50,830,000	169,975,520,000	679,902,080,000	849,877,600,000
ERSTE BANK, VIENNA	EUR	2	98,144,421	254,389,346,355	1,671,622,279,086	1,926,011,625,441
EXIM BANK KOREA	KRW	16	360,291,098,150	226,952,899,740	3,948,820,927,819	4,175,773,827,559
	USD	5	265,715,511	1,235,397,706,875	3,207,365,638,566	4,442,763,345,442
EXIM BANK OF CHINA	USD	19	1,421,537,417	3,110,606,684,882	20,657,498,930,033	23,768,105,614,915
EXIMBANK HUNGARY	USD	1	30,193,967	34,816,767,269	470,026,358,129	504,843,125,398

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI

Creditor Name	*CU Base*	Jml *Loan*	*Outstanding Base*	Bagian Lancar IDR *)	Utang Jangka Panjang IDR *)	Total Posisi Utang IDR *)
HSBC SINGAPORE	USD	2	36,584,243	154,505,340,000	457,183,194,600	611,688,534,600
IBRD	EUR	2	24,217,617	-	475,252,813,570	475,252,813,570
	JPY	1	4,045,000,000	-	431,962,718,500	431,962,718,500
	USD	60	5,027,660,490	8,399,591,863,318	75,663,120,760,999	84,062,712,624,318
ICO	EUR	10	98,364,540	64,849,136,833	1,865,482,176,598	1,930,331,313,431
	USD	9	10,612,256	34,301,958,803	143,134,964,192	177,436,922,995
IDA	SDR	29	285,921	-	6,552,820,750	6,552,820,750
	USD	10	868,771	2,696,257,502	11,829,598,968	14,525,856,470
IDB	ACU	20	28,616,578	194,301,441,234	461,541,011,206	655,842,452,440
	EUR	3	103,487,902	-	2,030,873,493,740	2,030,873,493,740
	USD	35	1,209,660,848	2,700,279,212,990	17,525,250,159,902	20,225,529,372,892
IFAD	EUR	5	108,589,438	149,609,716,265	1,981,377,645,553	2,130,987,361,818
	SDR	8	75,647,023	144,502,809,235	1,589,196,089,492	1,733,698,898,727
	USD	2	84,411,358	193,480,496,000	1,217,877,412,101	1,411,357,908,101
ING BANK AMSTERDAM	EUR	3	52,175,391	409,561,372,687	614,342,057,460	1,023,903,430,147
JAICAF	JPY	2	174,895,000	18,676,914,624	-	18,676,914,624
JICA	JPY	139	949,068,696,621	5,217,753,831,949	96,132,627,932,120	101,350,381,764,069
KDB SINGAPORE	USD	4	97,498,989	360,950,631,175	1,269,232,465,574	1,630,183,096,749
KfW	EUR	44	436,931,172	1,243,590,555,635	7,330,860,361,284	8,574,450,916,919
MIZUHO SINGAPORE	USD	1	40,825,139	-	682,596,330,099	682,596,330,099
MUFG HONGKONG	USD	2	10,493,448	-	175,450,446,213	175,450,446,213
MUFG SINGAPORE	EUR	1	74,935,147	197,233,176,519	1,273,313,626,637	1,470,546,803,156
	USD	5	211,607,765	903,997,926,286	2,634,083,904,179	3,538,081,830,466
NIB	EUR	3	4,385,294	12,715,837,556	73,342,306,582	86,058,144,138
PT BNI TOKYO BRANCH	USD	5	149,008,460	860,900,243,614	1,630,521,211,097	2,491,421,454,711
PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	6	146,425,538	498,031,524,613	2,375,461,308,645	2,873,492,833,258
	USD	33	1,702,062,509	4,110,918,343,171	24,347,566,809,315	28,458,485,152,486
PT MANDIRI HONGKONG	EUR	1	7,185,242	56,402,020,513	84,603,031,359	141,005,051,872
	USD	20	1,024,150,550	1,377,962,116,282	15,745,835,083,396	17,123,797,199,678
PT. BNI-HONG KONG	USD	11	826,403,502	2,954,810,936,263	10,862,655,615,003	13,817,466,551,266
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	1	12,599,493	-	247,255,726,500	247,255,726,500
RUSIA FED.	USD	7	108,818,292	203,936,017,780	1,615,505,824,460	1,819,441,842,240
S C B L. SINGAPORE	USD	1	14,437,898	-	241,401,661,248	241,401,661,248
SFD	SAR	5	370,437,573	168,695,804,060	1,482,851,956,849	1,651,547,760,909
SOCGEN, Singapore	EUR	1	12,750,000	-	250,209,315,000	250,209,315,000
SOCIETE GENERALE	EUR	1	53,979,955	117,701,855,203	941,614,820,430	1,059,316,675,633
UBS, ZURICH	CHF	1	9,585,412	67,363,588,177	134,727,176,354	202,090,764,531
UNICREDIT BANK AUSTR	EUR	24	190,395,675	273,131,053,341	3,463,243,171,025	3,736,374,224,366
UNICREDIT CZECH	EUR	1	117,326,871	-	2,302,453,020,705	2,302,453,020,705
US DEP TREASURY	USD	1	19,737,619	94,695,485,298	235,317,506,222	330,012,991,519
US EXIM	USD	2	8,219,779	49,484,059,557	87,950,639,304	137,434,698,861
USAID	USD	53	10,180,828	68,150,625,866	102,072,813,110	170,223,438,977
Total		**836**	**13,246,660,080,982**	**58,539,766,330,073**	**526,887,745,814,146**	**585,427,512,144,218**

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 16.720,-

Akun	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025*
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri *Bagian Lancar Utang Program + Bagian Lancar Utang Proyek*	**112,763,840,234,017**

*) Selisih Rp1 karena pembulatan

UNAMORTIZED DISCOUNT / *PREMIUM* BAGIAN LANCAR OBLIGASI NEGARA RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	*Unamortized Discount*	*Unamortized Premium*
1	FR0037	15-Sep-2026	(5,492,743,000)	-
2	FR0056	15-Sep-2026	(72,760,302,000)	192,733,603,000
3	FR0084	15-Feb-2026	(4,671,071,000)	-
4	FR0086	15-Apr-2026	(20,066,646,000)	42,196,345,000
Total			**(102,990,762,000)**	**234,929,948,000**

Akun	Uraian	31 Desember 2025
213122	*Discount* Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	(102,990,762,000)
213131	Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah	234,929,948,000

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM BAGIAN LANCAR OBLIGASI NEGARA VALAS

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	*Unamortized Discount*	*Unamortized Premium*
1	RI0126	8-Jan-2026	(250,634,000)	-
2	RIEUR0926	18-Sep-2026	(3,045,816,000)	-
Total			**(3,296,450,000)**	**-**

Akun	Uraian	31 Desember 2025
213124	*Discount* Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing	(3,296,450,000)

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM BAGIAN LANCAR SBSN RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	*Unamortized Discount*	*Unamortized Premium*
1	PBS021	15-Nov-2026	(482,787,000)	49,296,592,000
2	PBS032	15-Jul-2026	(517,924,364,000)	1,096,599,000
Total			**(518,407,151,000)**	**50,393,191,000**

Akun	Uraian	31 Desember 2025
213126	*Discount* Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	(518,407,151,000)
213133	Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	50,393,191,000

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PENGELOLAAN ASET YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN BLBI

No	Penyewa	Sisa Bulan	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama P.)	1	3,336,667
2	Iting Sarwati	5	8,198,333
3	Wahid Asngari	67	13,958,333
4	H. Samsul, S.E.	48	49,687,500
5	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama P.)	10	15,280,833
6	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama P.)	10	7,640,833
7	Dede Ajat	8	1,416,000
8	Narsan	70	7,700,000
9	Bank Nagari Payakumbuh	11	14,964,583
10	Yorni Wahid	11	1,833,333
11	Ricky Wijaya	63	24,885,045
12	Ricky Wijaya	64	23,700,180
13	Ricky Wijaya	63	24,885,045
14	PT Indomarco Prismatama Makassar	17	205,861,500
15	Ridho Azhari	17	3,553,000
16	Ricky Wijaya	62	31,173,816
17	Ahmad Kosasih	3	3,796,364
18	Dra. Hj. Srijati Pohan, M.Psi.	14	30,276,167
19	Suliono	19	45,125,000
20	Abdul Basid SP	23	50,731,483
21	Yuliana Lingga	87	5,894,250
22	Nana Dudu	6	2,485,500
23	Kusmantono, S. PD	2	623,667
24	PT Geotronix Pratama Indonesia	13	133,926,361
25	Sugiyanto (Ketua RW 11)	14	2,705,908
26	Lilis Sondari Maryuti	4	406,333
27	PT Atra Widiya Agung	4	3,970,435
28	Yayasan Dian Didaktika	102	520,200,000
29	Milyardi Salim	42	82,631,500
30	Wibowo	10	2,102,500
31	William Wijaya	12	15,234,000
32	Yayasan Syalom Probolinggo	11	53,019,083
33	ST. Rohmah	12	4,231,000
34	Harianto	8	800,000
35	Robbie Iriawan	2	836,500
36	NG Deni	14	113,848,000
37	Nur Syamsu Hidayat	2	2,235,000
38	R. Aziz May Ardhi Basoeki	15	31,011,875
39	Mukhammad Ervan S.	5	1,272,991
40	Agus Ari Wibowo	17	60,248,000
41	So'im	18	37,214,250
42	Dahlan	6	37,831,000

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PENGELOLAAN ASET YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN BLBI

No	Penyewa	Sisa Bulan	Pendapatan Diterima Dimuka
43	LB LIA Payakumbuh	19	136,181,708
44	Buyung	19	37,848,792
45	Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi	8	26,971,333
46	Johannes Hutauruk	57	92,053,100
47	Kino	9	11,721,750
48	Prayitno Catur Nugroho	9	15,249,750
49	Herlina	9	750,000
50	Titik Sutarsinah	59	2,950,000
51	Jonathan Wijaya	23	58,574,292
52	Syarif Chanafi	12	57,252,000
53	Suteni	12	6,089,000
54	Elang Gunalan	12	6,089,000
55	Sukiyono	12	6,089,000
56	Ida Saodah	12	6,089,000
57	Hadi Purwadi	12	6,089,000
58	Saeful Islam	12	6,089,000
59	Luh Eka Agustiani	12	18,913,000
60	Casmadi	24	2,126,000
Jumlah			**2,177,857,893**

SALDO AWAL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ABMA/T

No.	Nama Aset	Nilai Kewajiban	Keterangan
1	ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa di Provinsi Sulawesi Selatan	2.186.911.000	Pembayaran secara bertahap sebanyak 99 kali selama 11 tahun sejak tahun 2002 s.d. 2011
2	SD/SMP Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	343.486.554	Pembayaran berkala selama 1 tahun dengan pembayaran setiap bulan Rp57.247.759,00. Sampai dengan Tahun 2024 telah dilakukan pembayaran sebanyak 6 kali.
3	ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.H SMA Pagatan) di Kalimantan Selatan	88.332.208	Pembayaran berkala selama 2 tahun dengan pembayaran setiap bulan Rp5.520.763,00. Sampai dengan Tahun 2024 telah dilakukan pembayaran sebanyak 16 kali.
4	ABMA/T Rumah Tinggal Prawirawidjajaa /Subianto (d.H SMA Pagatan) di Kalimantan Selatan	88.323.993	Pembayaran berkala selama 2 tahun dengan pembayaran setiap bulan Rp5.195.529,00. Sampai dengan Tahun 2024 telah dilakukan pembayaran sebanyak 17 kali.
5	ABMA/T Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.H SMA Pagatan) di Kalimantan Selatan	88.323.993	Pembayaran berkala selama 2 tahun dengan pembayaran setiap bulan Rp5.195.529,00. Sampai dengan Tahun 2024 telah dilakukan pembayaran sebanyak 17 kali.
TOTAL		**2.795.377.748**	

DAFTAR PEMBAYARAN/PELUNASAN KOMPENSASI ABMA/T

No.	Nama Aset	Nilai Pembayaran	Keterangan
1	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran berkala Ke-delapan belas
2	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran Berkala Ke-delapan belas
3	Rumah Toko an. Rosmina (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara)	195.592.000	-
4	SD/SMP Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	57.247.759	Pembayaran berkala Ke-tujuh
5	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.520.763	Pembayaran Berkala ke-tujuh belas
6	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran berkala Ke-sembilan belas
7	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran Berkala Ke-sembilan belas
8	SD/SMP Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	57.247.759	Pembayaran berkala Ke-delapan
9	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.520.763	Pembayaran Berkala ke-delapan belas
10	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran berkala Ke-dua puluh
11	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran Berkala Ke-dua puluh
12	Rumah Toko (dh Bangunan Wisma Olahraga dan Tempat Sembahyang Toa Pekong (Berlantai Dua)) di Provinsi Kepulauan Riau	726.098.000	-
13	Rumah Toko XIII (dh Yayasan Pendidikan Gitakirti (GIKI) di Jawa Barat	730.569.000	-
14	SD/SMP Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	57.247.759	Pembayaran berkala Ke-sembilan
15	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (dh Kantor Dispenda Kodya II Bogor, TK/SD/SMA/Akademi Management) di Provinsi Jawa Barat	16.877.420.700	-
16	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran Berkala Ke-dua puluh satu
17	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran berkala Ke-dua puluh satu
18	SD/SMP Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	57.247.759	Pembayaran berkala Ke-sepuluh
19	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.520.763	Pembayaran Berkala ke-sembilan belas
20	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran Berkala Ke-dua puluh dua
21	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran berkala Ke-dua puluh dua
22	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	27.603.803	Pembayaran Berkala ke-dua puluh s.d. dua puluh empat

DAFTAR PEMBAYARAN/PELUNASAN KOMPENSASI ABMA/T

No.	Nama Aset	Nilai Pembayaran	Keterangan
23	SD/SMP Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	57.247.759	Pembayaran berkala Ke-sebelas
24	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran Berkala Ke-dua puluh dua
25	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.529	Pembayaran berkala Ke-dua puluh dua
26	SD/SMP Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	57.247.756	Pembayaran berkala Ke-dua belas
27	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.533	Pembayaran Berkala Ke-dua puluh empat
28	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	5.195.533	Pembayaran berkala Ke-dua puluh empat
29	Rumah Duka (dahulu Perkantoran; DPD Golkar, Pepabri, HWK) di Provinsi Maluku	997.848.500	
TOTAL		**19.987.918.257**	

DAFTAR KOMPENSASI ATAS ABMA/T YANG TELAH DITERBITKAN KMK PENYELESAIAN

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Rumah Toko (d.h Pertokoan) a.n. Rosmina di Provinsi Sumatera Utara	195.592.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-923/MK.6/2024 tanggal 11 November 2024
2	Rumah Toko XIII (d.h Yayasan Pendidikan Gitakirti (GIKI)) a.n. Tati Lestari di Provinsi Jawa Barat	730.569.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-88/MK.6/2025 tanggal 10 Februari 2025
3	Rumah Toko (dh Bangunan Wisma Olahraga dan Tempat Sembahyang Toa Pekong (Berlantai Dua)) a.n. Yayasan Laut Selatan Bintan di Provinsi Kepulauan Riau	726.098.000	Surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.6/2025 tanggal 19 Februari 2025
4	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (dh Kantor Dispenda Kodya II Bogor, TK/SD/SMA/Akademi Management) a.n. Yayasan Kesatuan di Provinsi Jawa Barat	16.877.420.700	Surat Menteri Keuangan Nomor S-184/MK.6/2025 tanggal 13 Maret 2025
5	Rumah Tinggal Suriansyah (dh SMA Pagatan) a.n. Suharlinah di Provinsi Kalimantan Selatan	132.498.300	Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.6/2023 tanggal 14 Mei 2023 dan S-368/MK.6/2023 tanggal 05 Juni 2023
6	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	124.692.700	Surat Menteri Keuangan Nomor S-432/MK.6/2023 tanggal 14 Mei 2023 tanggal 04 Juli 2023
7	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	124.692.700	Surat Menteri Keuangan Nomor S-433/MK.6/2023 tanggal 14 Mei 2023 tanggal 04 Juli 2023
8	SD/SMP Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	686.973.105	Surat Menteri Keuangan Nomor S-477/MK.6/2024 tanggal 28 Juni 2024
9	Rumah Duka (dahulu Perkantoran; DPD Golkar, Pepabri, HWK) di Provinsi Maluku	997.848.500	Surat Menteri Keuangan Nomor S-688/MK/KN/2025 tanggal 10 Oktober 2025
TOTAL		**20.596.385.005**	

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA ATAS ASET EKS PERTAMINA

No.	Pendapatan Diterima di Muka	Jumlah (Rupiah)
1	Saldo Awal Pendapatan Diterima di Muka tahun 2025	299.660.562
2	Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Palembang untuk KCP Prabumulih (KMK 6/KM.6/KN.3/2021) bulan Januari s.d. Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan Januari s.d. Desember 2025.	(69.060.000)
	Mengakui Kewajiban Jangka Panjang 2026 sebagai Pendapatan diterima di muka pada akhir tahun 2025.	69.060.000
3	Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Sudirman untuk aset yang berada di Jalan Cemara (KMK 09/KM.6/KN.3/2021) bulan Januari s.d. Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan Januari s.d. Desember 2025	(136.600.000)
	Mengakui Kewajiban Jangka Panjang 2026 sebagai Pendapatan diterima di muka pada akhir tahun 2025	136.600.000
4	Pendapatan diterima di muka sewa penyediaan infrastruktur PT PLN (KMK 01/KM.6/KN.3/2022) untuk aset yang berada di Cirebon bulan bulan Januari s.d. Desember 2025 yang diakui sebagai pendapatan Januari s.d. Desember 2025.	(1.900.000)
	Mengakui Kewajiban Jangka Panjang 2026 sebagai Pendapatan diterima di muka pada akhir tahun 2025	1.900.000
5	Pendapatan diterima di muka dari sewa Bass Oil Sukananti Limited (KMK 10/KM.6/KN.3/2021) bulan Januari s.d. Juli 2025 (sewa berakhir di bulan Juli 2025) yang diakui sebagai pendapatan Januari s.d. Juli 2025.	(29.481.395)
6	Pendapatan diterima di muka atas Perpanjangan Sewa Bank Mandiri Prabumulih (KMK 17/KM.6/KN.4/2024) bulan Januari s.d. Desember 2025 (sewa berakhir bulan Desember 2025) yang diakui sebagai pendapatan Januari s.d. Desember 2025.	(9.600.000)
7	Pendapatan diterima di muka atas sewa tanah SP Randegan (KMK 34/KM.6/KN.4/2024) untuk periode bulan Januari s.d. Juli 2025 (sewa tahun pertama berakhir bulan Juli 2025) yang diakui sebagai pendapatan Januari s.d. Juli 2025.	(53.019.167)
8	Pendapatan diterima di muka atas Sewa Barang Milik Negara Eks Pertamina Kepada Rumah Sakit Pertamina Sorong - PT Pertamina Bina Medika IHC (KMK 288/MK/KN/2025) yang diakui pada Triwulan III 2025	457.167.350
	Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka atas Sewa Rumah Sakit Pertamina Sorong sesuai perjanjian Sewa No PRJ-2/MK/KN.04/2025 tgl 27 Okt 2025 jangka waktu sewa dimulai tanggal 27 Oktober 2025 s.d. 27 Oktober 2035	(457.167.350)
	Mengakui Kewajiban Jangka Panjang 2026 sebagai Pendapatan diterima di muka pada akhir tahun 2025	1.828.669.400
9	Pendapatan diterima di muka atas Sewa Barang Milik Negara Aset Eks Pertamina Kepada Rumah Sakit Pertamina Tanjung - PT Pertamina Bina Medika IHC (KMK 7/MK/WKN.12/2025) yang diakui pada Triwulan III 2025.	16.774.425
	Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka atas Sewa Kepada Rumah Sakit Pertamina Tanjung sesuai perjanjian sewa No. PRJ-9/MK/KN.04/2025 tgl 6 Nov 2025 jangka waktu sewa terhitung mulai 6 November 2025 s.d. 6 November 2035	(16.774.425)
	Mengakui Kewajiban Jangka Panjang 2026 sebagai Pendapatan diterima di muka pada akhir tahun 2025	67.097.700
10	Pendapatan diterima di muka atas Sewa BMN Aset Eks Pertamina Kepada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih - PT Pertamina Binamedika IHC (KMK 11/MK/WKN.04/2025) yang diakui pada Triwulan III.	158.873.400
	Penyesuaian Pendapatan diterima di muka atas Sewa Rumah Sakit Pertamina Prabumulih sesuai perjanjian sewa No. PRJ-7/MK/KN.04/2025 tgl 6 Nov 2025 jangka waktu sewa terhitung mulai 6 November 2025 s.d. 6 November 2035	(158.873.400)
	Mengakui Kewajiban Jangka Panjang 2026 sebagai Pendapatan diterima di muka pada akhir tahun 2025	635.493.900

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA ATAS ASET EKS PERTAMINA

No.	Pendapatan Diterima di Muka	Jumlah (Rupiah)
11	Pendapatan diterima di muka atas Sewa BMN Aset Eks Pertamina Kepada Klinik Pertamedika Pendopo - PT Pertamina Bina Medika IHC (KMK 12/MK/WKN.04/2025) yang diakui Triwulan III 2025.	25.428.675
	Penyesuaian Pendapatan diterima di muka Sewa Klinik Pertamedika Pendopo sesuai perjanjian sewa No PRJ-6/MK/KN.4/2025 tgl 6 Nov 2025 jangka waktu sewa mulai 6 November 2025 s.d. 6 November 2035.	(25.428.675)
	Mengakui Kewajiban Jangka Panjang 2026 sebagai Pendapatan diterima di muka pada akhir tahun 2025	101.714.700
12	Pendapatan diterima di muka atas Sewa tahun Ke-2 KMK 34/KM.6/KN.4/2024 tentang Persetujuan Sewa BMN Eks Pertamina kepada PT DGAS Alam Semesta bulan Oktober s.d. Desember 2025	22.881.250
	Pendapatan diterima di muka yang diakui sebagai pendapatan bulan Oktober s.d. Desember 2025	(22.881.250)
	Mengakui Kewajiban Jangka Panjang 2026 sebagai Pendapatan diterima di muka pada akhir tahun 2025	53.389.583
13	Mengakui Kewajiban Jangka Panjang 2026 atas sewa PT Bass Oil Sukananti Limited sesuai 16/MK/WKN.04/2025 sebagai Pendapatan diterima di muka pada akhir tahun 2025	57.703.800
14	Mengakui Kewajiban Jangka Panjang 2026 atas Sewa PT Royaltama Mulia Kencana sesuai 17/MK/WKN.04/2025 sebagai Pendapatan diterima di muka pada akhir tahun 2025	50.000.000
15	Pendapatan diterima di muka atas Pembayaran sewa aset eks Pertamina oleh Pertamina EP Tahun 2025 sesuai Perjanjian PRJ-1/MK.6/2022 Oktober s.d. Desember 2025	51.804.135.573
	Pendapatan diterima di muka yang diakui sebagai pendapatan Oktober s.d. Desember 2025.	(51.804.135.573)
TOTAL		**3.001.629.083**

KLASIFIKASI UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JATUH TEMPO (UMUR UTANG)

(Dalam Rupiah)

Maturity Profile	JML PDN	Outstanding PDN	JML PLN	Outstanding PLN	Total Outstanding Pinjaman	JML SBN Rupiah	Outstanding SBN Rupiah	JML SBN Valas	Outstanding SBN Valas	Total *Outstanding* SBN
0-5 TAHUN	400	59,664,640,288,577	571	269,863,032,688,540	329,527,672,977,117	157	3,115,499,913,000,000	49	626,100,404,930,000	3,741,600,317,930,000
6-10 TAHUN	26	1,824,402,323,500	235	566,239,919,908,857	568,064,322,232,357	22	1,661,876,143,000,000	36	405,712,220,990,000	2,067,588,363,990,000
11-15 TAHUN			113	274,200,567,612,056	274,200,567,612,056	17	877,115,202,000,000	7	91,997,320,900,000	969,112,522,900,000
16-20 TAHUN			41	28,494,168,054,207	28,494,168,054,207	10	473,981,362,892,705	7	131,950,722,460,000	605,932,085,352,705
21-25 TAHUN			24	24,435,570,584,415	24,435,570,584,415	5	341,107,818,000,000	9	178,904,000,000,000	520,011,818,000,000
26-30 TAHUN			14	11,270,162,335,124	11,270,162,335,124	2	190,878,835,000,000	9	127,908,000,000,000	318,786,835,000,000
LEBIH DARI 30 TAHUN			11	34,965,598,901,168	34,965,598,901,168	1	89,797,225,000,000	3	40,964,000,000,000	130,761,225,000,000
Total	**426**	**61,489,042,612,077**	**1,009**	**1,209,469,020,084,370**	**1,270,958,062,696,440**	**214**	**6,750,256,498,892,700**	**120**	**1,603,536,669,280,000**	**8,353,793,168,172,700**

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM OBLIGASI NEGARA RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	*Unamortized Discount*	*Unamortized Premium*
1	FR0042	15-Jul-2027	(18,673,086,000)	8,801,660,000
2	FR0045	15-May-2037	(24,316,247,000)	406,015,056,000
3	FR0047	15-Feb-2028	(197,676,182,000)	7,551,379,000
4	FR0050	15-Jul-2038	(301,639,518,000)	91,429,358,000
5	FR0052	15-Aug-2030	(118,376,198,000)	44,507,916,000
6	FR0054	15-Jul-2031	(169,369,650,000)	174,212,986,000
7	FR0057	15-May-2041	(19,637,779,000)	803,668,541,000
8	FR0058	15-Jun-2032	(20,932,867,000)	1,898,714,395,000
9	FR0059	15-May-2027	(178,577,055,000)	197,755,567,000
10	FR0062	15-Apr-2042	(276,081,052,000)	77,051,849,000
11	FR0064	15-May-2028	(1,241,471,403,000)	69,814,953,000
12	FR0065	15-May-2033	(2,310,988,754,000)	438,016,301,000
13	FR0067	15-Feb-2044	(283,069,254,000)	753,623,547,000
14	FR0068	15-Mar-2034	(1,204,838,981,000)	916,838,979,000
15	FR0071	15-Mar-2029	(60,879,735,000)	944,967,342,000
16	FR0072	15-May-2036	(396,766,314,000)	1,670,060,115,000
17	FR0073	15-May-2031	(85,346,399,000)	1,614,943,370,000
18	FR0074	15-Aug-2032	(218,244,999,000)	382,117,720,000
19	FR0075	15-May-2038	(1,255,889,926,000)	810,120,241,000
20	FR0076	15-May-2048	(2,274,917,749,000)	1,560,920,392,000
21	FR0078	15-May-2029	(88,746,295,000)	912,998,269,000
22	FR0079	15-Apr-2039	(142,118,198,000)	940,487,250,000
23	FR0080	15-Jun-2035	(557,759,506,000)	1,208,389,747,000
24	FR0082	15-Sep-2030	(1,633,481,713,000)	589,615,364,000
25	FR0083	15-Apr-2040	(530,128,796,000)	3,029,806,683,000
26	FR0085	15-Apr-2031	(82,310,871,000)	-
27	FR0087	15-Feb-2031	(562,050,998,000)	881,956,280,000
28	FR0088	15-Jun-2036	(498,384,518,000)	17,416,468,000
29	FR0089	15-Aug-2051	(822,274,653,000)	578,890,154,000
30	FR0090	15-Apr-2027	(462,784,289,000)	17,882,230,000
31	FR0091	15-Apr-2032	(2,829,113,732,000)	473,685,110,000
32	FR0092	15-Jun-2042	(472,842,334,000)	1,442,206,760,000
33	FR0093	15-Jul-2037	(426,795,759,000)	-
34	FR0094	15-Jan-2028	(72,980,006,000)	-

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM OBLIGASI NEGARA RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	*Unamortized Discount*	*Unamortized Premium*
35	FR0095	15-Aug-2028	(481,447,004,000)	182,382,050,000
36	FR0096	15-Feb-2033	(496,533,321,000)	1,781,875,482,000
37	FR0097	15-Jun-2043	(111,912,973,000)	1,637,074,443,000
38	FR0098	15-Jun-2038	(129,514,539,000)	2,494,024,899,000
39	FR0099	15-Jan-2029	(4,085,852,000)	6,872,501,000
40	FR0100	15-Feb-2034	(1,962,194,933,000)	90,298,169,000
41	FR0101	15-Apr-2029	(222,214,391,000)	595,928,781,000
42	FR0102	15-Jul-2054	(801,369,881,000)	418,723,257,000
43	FR0103	15-Jul-2035	(1,669,059,907,000)	598,956,493,000
44	FR0104	15-Jul-2030	(861,239,332,000)	445,925,953,000
45	FR0105	15-Jul-2064	(824,901,108,000)	499,166,624,000
46	FR0106	15-Aug-2040	(120,910,385,000)	3,129,658,212,000
47	FR0107	15-Aug-2045	(121,355,873,000)	2,309,927,349,000
48	FR0108	15-Apr-2036	(38,217,707,000)	839,808,270,000
49	FR0109	15-Mar-2031	(32,090,546,000)	552,215,073,000
50	FRSDG001	15-Oct-2030	(9,168,827,000)	289,138,442,000
Total			**(27,725,681,395,000)**	**38,836,441,980,000**

No.	Akun	Uraian	31 Desember 2025
1	**221251**	*Discount* Obligasi Negara - dalam rupiah	(27,725,681,395,000)
2	**221261**	Premium Obligasi Negara - dalam rupiah	38,836,441,980,000

UNAMORTIZED DISCOUNT / *PREMIUM* OBLIGASI NEGARA VALAS

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	*Unamortized Discount*	*Unamortized Premium*
1	RI0035	12-Oct-2035	-	363,288,255,000
2	RI0037	17-Feb-2037	(76,694,166,000)	-
3	RI0038	17-Jan-2038	(169,637,831,000)	-
4	RI0127	8-Jan-2027	(6,965,114,000)	-
5	RI0128	11-Jan-2028	(14,440,265,000)	-
6	RI0128A	11-Jan-2028	(69,587,042,000)	-
7	RI0130	15-Jan-2030	(25,676,859,000)	-
8	RI0133	11-Jan-2033	(265,614,284,000)	-
9	RI0135	15-Jan-2035	(61,148,365,000)	-
10	RI0142	17-Jan-2042	(158,803,449,000)	114,976,963,000
11	RI0144	15-Jan-2044	(183,886,825,000)	-
12	RI0145	15-Jan-2045	(181,460,393,000)	-
13	RI0146	8-Jan-2046	(81,043,416,000)	-
14	RI0147	8-Jan-2047	(106,571,975,000)	-
15	RI0148	11-Jan-2048	(144,726,576,000)	-
16	RI0153	11-Jan-2053	(149,794,876,000)	-
17	RI0229	11-Feb-2029	(14,065,726,000)	-
18	RI0230	14-Feb-2030	(17,615,795,000)	-
19	RI0234	10-Feb-2034	(96,540,178,000)	-
20	RI0249	11-Feb-2049	(51,485,422,000)	-
21	RI0250	14-Feb-2050	(80,838,569,000)	-
22	RI0254	10-Feb-2054	(198,227,415,000)	-
23	RI0329	10-Mar-2029	(55,021,430,000)	-
24	RI0331	12-Mar-2031	(42,011,074,000)	-
25	RI0332	31-Mar-2032	(37,378,654,000)	-
26	RI0351	12-Mar-2051	(235,183,868,000)	-
27	RI0352	31-Mar-2052	(78,429,479,000)	-
28	RI0371	12-Mar-2071	(77,514,360,000)	-
29	RI0428	24-Apr-2028	(7,845,338,000)	-
30	RI0431	16-Apr-2031	(23,158,795,000)	-
31	RI0436	16-Apr-2036	(82,461,065,000)	-
32	RI0443	15-Apr-2043	(166,855,215,000)	-
33	RI0470	15-Apr-2070	(137,876,325,000)	-
34	RI0727	18-Jul-2027	(8,450,817,000)	-
35	RI0731	28-Jul-2031	(34,526,726,000)	-
36	RI0747	18-Jul-2047	(75,633,277,000)	-
37	RI0927	20-Sep-2027	(42,928,529,000)	-
38	RI0929	18-Sep-2029	(17,025,827,000)	-

UNAMORTIZED DISCOUNT / *PREMIUM* OBLIGASI NEGARA VALAS

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	*Unamortized Discount*	*Unamortized Premium*
39	RI0932	20-Sep-2032	(166,312,036,000)	-
40	RI0934	10-Sep-2034	(60,690,314,000)	-
41	RI0952	20-Sep-2052	(96,931,728,000)	-
42	RI0954	10-Sep-2054	(72,501,328,000)	-
43	RI0961	23-Sep-2061	(146,844,064,000)	-
44	RI1030	15-Oct-2030	(50,469,558,000)	-
45	RI1049	30-Oct-2049	(99,694,622,000)	-
46	RI1050	15-Oct-2050	(179,040,554,000)	-
47	RIAUD0830	14-Aug-2030	(6,073,416,000)	-
48	RIAUD0835	14-Aug-2035	(19,381,911,000)	-
49	RIEUR0133	15-Jan-2033	(29,186,067,000)	-
50	RIEUR0137	15-Jan-2037	(125,155,276,000)	-
51	RIEUR0227	14-Feb-2027	(8,721,585,000)	-
52	RIEUR0333	12-Mar-2033	(85,371,410,000)	-
53	RIEUR0334	23-Mar-2034	(31,969,143,000)	-
54	RIEUR0628	14-Jun-2028	(67,669,258,000)	-
55	RIEUR0729	28-Jul-2029	(19,776,110,000)	-
56	RIEUR0932	10-Sep-2032	(53,280,432,000)	-
57	RIEUR1031	30-Oct-2031	(10,002,866,000)	-
58	RIEUR1033	16-Oct-2033	(1,578,133,000)	-
59	USDFR0003	15-Jan-2032	(164,068,704,000)	-
Total			**(4,771,843,835,000)**	**478,265,218,000**

No.	Akun	Uraian	31 Desember 2025
1	**221252**	*Discount* Obligasi Negara - dalam valuta asing	(4,771,843,835,000)
2	**221262**	Premium Obligasi Negara - dalam valuta asing	478,265,218,000

UNAMORTIZED DISCOUNT / *PREMIUM* SBSN RUPIAH

No	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	*Unamortized Discount*	*Unamortized Premium*
1	IFR0006	15-Mar-30	(2,029,953,000)	5,486,126,000.00
2	IFR0010	15-Feb-36	(9,419,433,000)	158,168,432,000.00
3	PBS003	15-Jan-27	(538,562,515,000)	77,056,656,000.00
4	PBS004	15-Feb-37	(2,994,486,829,000)	0.00
5	PBS005	15-Apr-43	(3,454,646,763,000)	0
6	PBS007	15-Sep-40	(9,748,030,000)	348,618,594,000.00
7	PBS012	15-Nov-31	(29,002,155,000)	1,354,994,943,000.00
8	PBS015	15-Jul-47	(696,944,587,000)	344,763,359,000.00
9	PBS018	15-May-28	(16,706,236,000)	121,731,666,000.00
10	PBS020	15-Oct-27	(4,820,739,000)	912,634,000.00
11	PBS022	15-Apr-34	(13,432,214,000)	368,074,083,000.00
12	PBS023	15-May-30	(2,137,798,000)	55,724,696,000.00
13	PBS024	15-May-32	(10,032,239,000)	4,830,550,000.00
14	PBS025	15-May-33	(14,370,529,000)	1,207,149,552,000.00
15	PBS028	15-Oct-46	(91,519,733,000)	3,061,545,195,000.00
16	PBS029	15-Mar-34	(1,804,551,360,000)	19,342,245,000.00
17	PBS030	15-Jul-28	(1,061,909,418,000)	115,566,250,000.00
18	PBS033	15-Jun-47	(1,389,267,553,000)	71,728,558,000.00
19	PBS034	15-Jun-39	(736,369,034,000)	108,915,221,000.00
20	PBS035	15-Mar-42	(50,579,302,000)	4,493,295,000.00
21	PBS037	15-Mar-36	(270,557,435,000)	303,120,199,000.00
22	PBS038	15-Dec-49	(1,610,471,659,000)	199,167,342,000.00
23	PBS039	15-Jul-41	(559,793,217,000)	28,647,411,000.00
24	PBS040	15-Nov-30	(156,423,659,000)	0.00
25	PBSG001	15-Sep-29	(55,655,139,000)	295,267,416,000.00
26	PBSG002	15-Oct-33	(42,346,183,000)	0.00
27	SW002	30-Jun-27	(641,864,000)	0.00
28	SW006	3-Jul-28	(428,302,000)	0.00
Total			**(15,626,853,878,000)**	**8,255,304,423,000**

No.	Akun	Uraian	31 Desember 2025
1	**221253**	*Discount* SBSN - dalam rupiah	(15,626,853,878,000)
2	**221263**	Premium SBSN - dalam rupiah	8,255,304,423,000

DAFTAR SERI SBN YANG DITERBITKAN SEBAGAI PEMBIAYAAN SBN DITANGGUHKAN

No.	Seri	Tanggal	Amt	AccInt	AmtNet	Disc - Prem	TotCash	Saldo Akhir Neraca	Selisih Kurs	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (7)	(7)	(8) = (5) + (6)	(9)	(10)	(11)
1	SNI1230	12/1/2025	18,327,100,000,000	-	18,327,100,000,000	-	18,327,100,000,000	18,392,000,000,000	(64,900,000,000)	*Bookbuilding*
2	SNI1235	12/1/2025	14,994,900,000,000	-	14,994,900,000,000	-	14,994,900,000,000	15,048,000,000,000	(53,100,000,000)	*Bookbuilding*
TOTAL			**33,322,000,000,000**	**-**	**33,322,000,000,000**	**-**	**33,322,000,000,000**	**33,440,000,000,000**	**(118,000,000,000)**	

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG ATAS ASET EKS PERTAMINA

No.	Kewajiban Jangka Panjang	Jumlah (Rupiah)
1	Saldo Awal Kewajiban Jangka Panjang tahun 2025	350,451,667
2	Kewajiban jangka panjang atas Sewa RUMAH SAKIT PERTAMINA SORONG KMK 288/MK/KN/2025 dan perjanjian Sewa No PRJ-2/MK/KN.04/2025 tgl 27 Okt 2025 jangka waktu sewa dimulai tanggal 27 Oktober 2025 s.d. 27 Oktober 2035.	17,981,915,767
	Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang Menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka yang diselesaikan Januari s.d. Desember 2026.	(1,828,669,400)
3	Kewajiban jangka panjang atas Sewa RUMAH SAKIT PERTAMINA TANJUNG KMK 7/MK/WKN.12/2025 jangka waktu 10 tahun (120 bulan) dan perjanjian sewa No. PRJ-9/MK/KN.04/2025 tgl 6 Nov 2025 jangka waktu sewa terhitung mulai 6 November 2025 s.d. 6 November 2035.	659,794,050
	Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang Menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka yang diselesaikan Januari s.d. Desember 2026.	(67,097,700)
4	Kewajiban jangka panjang atas Sewa RUMAH SAKIT PERTAMINA PRABUMULIH KMK 11/MK/WKN.04/2025 jangka waktu 10 tahun (120 bulan) dan perjanjian sewa No. PRJ-9/MK/KN.04/2025 tgl 6 Nov 2025 jangka waktu sewa terhitung mulai 6 November 2025 s.d. 6 November 2035.	6,249,020,400
	Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang Menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka yang diselesaikan Januari s.d. Desember 2026.	(635,493,900)
5	Kewajiban jangka panjang atas Sewa KLINIK PERTAMEDIKA Pendopo KMK 12/MK/WKN.04/2025 jangka waktu 10 tahun (120 bulan) dan perjanjian sewa PRJ-6/MK/KN.4/2025 tgl 6 Nov 2025 jangka waktu sewa mulai 6 November 2025 s.d. 6 November 2035.	1,000,194,550
	Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang Menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka yang diselesaikan Januari s.d. Desember 2026.	(101,714,700)
6	Kewajiban jangka panjang atas sewa tanah SP Randegan KMK 34/KM.6/KN.4/2024 jangka waktu 10 tahun Ke-2 sebesar (Agustus 2025-Juli 2026)	53,389,583
	Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang Menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka yang diselesaikan Januari s.d. Desember 2026.	(53,389,583)
7	Kewajiban jangka panjang sewa PT Bass Oil Sukananti Limited KMK 16/MK/WKN.04/2025 jangka waktu 5 tahun (60 bulan) perjanjian sewa PRJ-7/KN.4/2025 tgl 24 Des 2025 dengan jangka waktu mulai 1 Agustus 2025 s.d. 31 Juli 2030.	264,475,750
	Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang Menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka yang diselesaikan Januari s.d. Desember 2026.	(57,703,800)
8	Kewajiban jangka panjang sewa kepada PT Royaltama Mulia Kencana KMK 17/MK/WKN.04/2025 jangka waktu 5 tahun (60 bulan) perjanjian sewa No. PRJ-6/KN.4/2025 tgl 24 Des 2025 dengan jangka waktu sewa mulai 4 November 2025 s.d. 3 November 2030.	241,666,667
	Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang Menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka yang diselesaikan Januari s.d. Desember 2026.	(50,000,000)
9	Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi kewajiban jangka pendek/pendapatan diterima di muka (bulan Januari s.d. Desember 2026) atas Sewa KCP Prabumulih (KMK 6/KM.6/KN.3/2021)	(69,060,000)
	Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka (bulan Januari s.d. Desember 2026) atas sewa Bank Mandiri Sudirman untuk aset yang berada di Jalan Cemara (KMK 09/KM.6/KN.3/2021)	(136,600,000)
	Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka (bulan Januari s.d. Desember 2026) atas sewa penyediaan infrastruktur PT PLN untuk aset yang berada di Cirebon (KMK 01/KM.6/KN.3/2022)	(1,900,000)
TOTAL		**23,799,279,351**

OUTSTANDING UTANG PROGRAM PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR

Creditor Name	*CU Base*	Jml *Loan*	*Outstanding Base*	Bagian Lancar IDR *)	Utang Jangka Panjang IDR *)	Total Posisi Utang IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	EUR	13	2,660,933,690	5,189,914,691,493	47,028,939,876,173	52,218,854,567,666
	IDR	9	38,688,091,667,491	5,313,241,666,448	33,374,850,001,043	38,688,091,667,491
	JPY	15	521,919,583,336	2,273,944,702,784	53,461,482,257,959	55,735,426,960,743
	USD	10	1,654,209,626	2,113,731,742,000	25,544,653,199,202	27,658,384,941,202
AFD	EUR	14	1,264,720,330	2,698,094,938,743	22,121,105,640,734	24,819,200,579,477
AIIB	EUR	2	939,800,000	-	18,442,879,548,000	18,442,879,548,000
	USD	3	1,302,750,000	2,016,014,000,000	19,765,966,000,000	21,781,980,000,000
AUSTRALIA	AUD	1	1,000,000,000	1,118,234,000,000	10,064,106,000,000	11,182,340,000,000
EXIM BANK KOREA	USD	2	160,000,000	209,000,000,000	2,466,200,000,000	2,675,200,000,000
IBRD	EUR	7	3,933,861,327	942,244,911,657	76,256,872,574,121	77,199,117,485,778
	JPY	3	142,923,400,640	1,695,396,614,725	13,567,293,293,240	15,262,689,907,965
	USD	42	11,477,325,108	18,193,135,683,094	173,707,740,122,666	191,900,875,805,760
JICA	JPY	23	262,596,804,000	3,497,857,785,279	24,544,671,096,119	28,042,528,881,398
KfW	EUR	15	2,856,097,258	7,653,796,460,690	48,394,998,709,505	56,048,795,170,195
	USD	5	142,652,059	1,303,191,224,474	1,081,951,200,000	2,385,142,424,474
Total		**164**	**39,642,923,804,865**	**54,217,798,421,387**	**569,823,709,518,762**	**624,041,507,940,149**

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 16.720,-

OUTSTANDING UTANG PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR

Creditor Name	*CU Base*	Jml *Loan*	*Outstanding Base*	Bagian Lancar IDR *)	Utang Jangka Panjang IDR *)	Total Posisi Utang IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	EUR	2	2,435,617	-	47,797,178,717	47,797,178,717
	IDR	19	11,893,242,744,158	1,807,519,595,121	10,085,723,149,037	11,893,242,744,158
	JPY	9	13,106,150,654	-	1,399,596,654,035	1,399,596,654,035
	SDR	11	30,889,820	372,497,110,304	335,444,131,101	707,941,241,405
	USD	30	1,384,367,032	1,889,187,598,578	21,257,429,178,970	23,146,616,777,548
AFD	EUR	4	40,780,860	71,260,167,494	729,034,038,646	800,294,206,140
	USD	5	25,705,453	114,095,180,302	315,700,000,713	429,795,181,015
AIIB	EUR	1	7,335,422	-	143,952,236,780	143,952,236,780
	USD	5	538,000,793	952,887,297,511	8,042,485,966,967	8,995,373,264,478
AUSTRALIA	AUD	2	400,700,323	131,120,430,289	4,349,646,822,849	4,480,767,253,138
B A W A G	EUR	2	434,661	8,529,893,980	-	8,529,893,980
BANCO SANTANDER	EUR	2	86,935,635	27,179,547,899	1,678,867,947,971	1,706,047,495,870
	USD	1	23,025,112	-	384,979,877,656	384,979,877,656
BANK MANDIRI SIN	USD	15	1,105,807,424	3,828,165,226,855	14,660,934,894,232	18,489,100,121,087
BBVA	EUR	3	85,571,825	-	1,679,283,752,090	1,679,283,752,090
BBVAIT Hongkong	EUR	1	56,126,250	-	1,101,436,122,825	1,101,436,122,825
BELGIUM	EUR	1	720,720	1,767,948,406	12,375,640,608	14,143,589,014
BLG	EUR	1	5,020,000	49,256,892,600	49,256,892,600	98,513,785,200
BNI LONDON	EUR	1	14,178,175	-	278,236,189,974	278,236,189,974
	USD	7	528,603,284	1,504,676,251,602	7,333,570,654,370	8,838,246,905,972
BNI New York	USD	7	312,180,054	1,750,571,718,491	3,469,078,783,386	5,219,650,501,877
BNI SEOUL	USD	1	3,187,465	53,294,409,115	-	53,294,409,115
BNP PARIBAS, PARIS	EUR	10	4,253,143,758	833,454,946,310	82,631,343,983,554	83,464,798,929,864
BNPP SINGAPORE	USD	3	45,421,340	390,468,738,651	368,976,069,326	759,444,807,977
BPIFAE	EUR	27	255,163,729	572,357,156,942	4,435,042,203,719	5,007,399,360,661
BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	2	116,405,851	363,493,377,986	1,920,885,307,559	2,284,378,685,545
	USD	8	359,889,068	1,396,659,772,429	4,620,685,450,885	6,017,345,223,314
BSI DUBAI	USD	1	15,242,238	-	254,850,211,000	254,850,211,000
CASA OF FRANCE	EUR	1	329,120,000	-	6,458,736,451,200	6,458,736,451,200
	USD	2	80,486,116	497,076,341,133	848,651,512,034	1,345,727,853,167
CCB (Asia) Hong Kong	USD	3	80,004,528	-	1,337,675,711,838	1,337,675,711,838
Ceska Sporitelna	EUR	1	83,584,661	-	1,640,287,113,589	1,640,287,113,589
CIDA	CAD	11	24,481,937	54,463,313,636	244,225,372,176	298,688,685,812
COMMERZBANK GERMANY	EUR	3	201,523,301	444,042,966,241	3,510,702,689,426	3,954,745,655,667
CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	7	1,506,052,007	4,458,541,391,406	25,096,614,775,530	29,555,156,166,936
	USD	1	14,166,667	236,866,666,054	-	236,866,666,054

OUTSTANDING UTANG PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR

Creditor Name	*CU Base*	Jml *Loan*	*Outstanding Base*	Bagian Lancar IDR *)	Utang Jangka Panjang IDR *)	Total Posisi Utang IDR *)
CTBC Bank Singapore	USD	1	2,247,094	-	37,571,407,500	37,571,407,500
CZECH EXPORT BANK	USD	1	65,237,415	218,153,915,760	872,615,663,040	1,090,769,578,800
DEUTSCHE BANK AG, HK	EUR	1	53,651,217	-	1,052,865,421,912	1,052,865,421,912
DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	1	1,405,022	13,786,257,339	13,786,256,554	27,572,513,893
DZ BANK AG HONG KONG	EUR	2	31,281,806	132,249,605,263	481,632,693,857	613,882,299,120
	USD	2	173,565,894	35,497,017,459	2,866,524,729,385	2,902,021,746,844
EKSFIN EXPORT FINANA	USD	1	50,830,000	169,975,520,000	679,902,080,000	849,877,600,000
ERSTE BANK, VIENNA	EUR	2	98,144,421	254,389,346,355	1,671,622,279,086	1,926,011,625,441
EXIM BANK KOREA	KRW	16	360,291,098,150	226,952,899,740	3,948,820,927,819	4,175,773,827,559
	USD	5	265,715,511	1,235,397,706,875	3,207,365,638,566	4,442,763,345,441
EXIM BANK OF CHINA	USD	19	1,421,537,417	3,110,606,684,882	20,657,498,930,033	23,768,105,614,915
EXIMBANK HUNGARY	USD	1	30,193,967	34,816,767,269	470,026,358,129	504,843,125,398
HSBC SINGAPORE	USD	2	36,584,243	154,505,340,000	457,183,194,600	611,688,534,600
IBRD	EUR	2	24,217,617	-	475,252,813,570	475,252,813,570
	JPY	1	4,045,000,000	-	431,962,718,500	431,962,718,500
	USD	60	5,027,674,200	8,399,591,863,318	75,663,120,760,999	84,062,712,624,317
ICO	EUR	10	98,364,540	64,849,136,833	1,865,482,176,598	1,930,331,313,431
	USD	9	10,612,256	34,301,958,803	143,134,964,192	177,436,922,995
IDA	SDR	29	285,921	-	6,552,820,750	6,552,820,750
	USD	10	868,771	2,696,257,502	11,829,598,968	14,525,856,470
IDB	ACU	20	28,616,578	194,301,441,234	461,541,011,206	655,842,452,440
	EUR	3	103,487,902	-	2,030,873,493,740	2,030,873,493,740
	USD	35	1,209,660,848	2,700,279,212,990	17,525,250,159,902	20,225,529,372,892
IFAD	EUR	5	108,589,438	149,609,716,265	1,981,377,645,553	2,130,987,361,818
	SDR	8	75,647,023	144,502,809,235	1,589,196,089,492	1,733,698,898,727
	USD	2	84,411,358	193,480,496,000	1,217,877,412,101	1,411,357,908,101
ING BANK AMSTERDAM	EUR	3	52,175,391	409,561,372,687	614,342,057,460	1,023,903,430,147
JAICAF	JPY	2	174,895,000	18,676,914,624	-	18,676,914,624
JICA	JPY	139	949,068,696,621	5,217,753,831,949	96,132,627,932,120	101,350,381,764,069
KDB SINGAPORE	USD	4	97,498,989	360,950,631,175	1,269,232,465,574	1,630,183,096,749
KfW	EUR	44	436,931,172	1,243,590,555,635	7,330,860,361,284	8,574,450,916,919
MIZUHO SINGAPORE	USD	1	40,825,139	-	682,596,330,099	682,596,330,099
MUFG HONGKONG	USD	2	10,493,448	-	175,450,446,213	175,450,446,213
MUFG SINGAPORE	EUR	1	74,935,147	197,233,176,519	1,273,313,626,637	1,470,546,803,156
	USD	5	211,607,765	903,997,926,286	2,634,083,904,179	3,538,081,830,465
NIB	EUR	3	4,385,294	12,715,837,556	73,342,306,582	86,058,144,138
PT BNI TOKYO BRANCH	USD	5	149,008,460	860,900,243,614	1,630,521,211,097	2,491,421,454,711

OUTSTANDING UTANG PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR

Creditor Name	*CU Base*	Jml *Loan*	*Outstanding Base*	Bagian Lancar IDR *)	Utang Jangka Panjang IDR *)	Total Posisi Utang IDR *)
PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	6	146,425,538	498,031,524,613	2,375,461,308,645	2,873,492,833,258
	USD	33	1,702,062,509	4,110,918,343,171	24,347,566,809,315	28,458,485,152,486
PT MANDIRI HONGKONG	EUR	1	7,185,242	56,402,020,513	84,603,031,359	141,005,051,872
	USD	20	1,024,150,550	1,377,962,116,282	15,745,835,083,396	17,123,797,199,678
PT. BNI-HONG KONG	USD	11	826,403,502	2,954,810,936,263	10,862,655,615,003	13,817,466,551,266
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	1	12,599,493	-	247,255,726,500	247,255,726,500
RUSIA FED.	USD	7	108,818,292	203,936,017,780	1,615,505,824,460	1,819,441,842,240
S C B L. SINGAPORE	USD	1	14,437,898	-	241,401,661,248	241,401,661,248
SFD	SAR	5	370,437,573	168,695,804,060	1,482,851,956,849	1,651,547,760,909
SOCGEN, Singapore	EUR	1	12,750,000	-	250,209,315,000	250,209,315,000
SOCIETE GENERALE	EUR	1	53,979,955	117,701,855,203	941,614,820,430	1,059,316,675,633
UBS, ZURICH	CHF	1	9,585,412	67,363,588,177	134,727,176,354	202,090,764,531
UNICREDIT BANK AUSTR	EUR	24	190,395,675	273,131,053,341	3,463,243,171,025	3,736,374,224,366
UNICREDIT CZECH	EUR	1	117,326,871	-	2,302,453,020,705	2,302,453,020,705
US DEP TREASURY	USD	1	19,737,619	94,695,485,298	235,317,506,222	330,012,991,520
US EXIM	USD	2	8,219,779	49,484,059,557	87,950,639,304	137,434,698,861
USAID	USD	53	10,180,828	68,150,625,866	102,072,813,110	170,223,438,976
Total		**836**	**13,246,660,663,709**	**58,546,041,812,626**	** **526,881,470,331,585**	**585,427,512,144,211**

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 16.720,-

**) Selisih Rp3 karena pembulatan

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI

No.	BUMN	Pendapatan Usaha	HPP + Beban Usaha	Laba Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	EBIT	Beban Bunga	Laba Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Laba Rugi Tahun Berjalan	Pendapatan Komprehensif	Laba Rugi Komprehensif	Laba Rugi Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali	Laba Rugi Komprehensif Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali
		1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	BPI Danantara	390.444	2.642.451	(2.252.007)	147.666.028	270	145.413.751	4.518	145.409.233	110.000	145.299.233	1.732.106	147.031.339	145.299.233	147.031.339
	Subtotal BPI Danantara	**390.444**	**2.642.451**	**(2.252.007)**	**147.666.028**	**270**	**145.413.751**	**4.518**	**145.409.233**	**110.000**	**145.299.233**	**1.732.106**	**147.031.339**	**145.299.233**	**147.031.339**
1	PT Danantara Asset Management (Persero)	3.012.006	3.650.777	(638.771)	149.931.432	-	149.292.661	-	149.292.661	97.646	149.195.014	1.752.644	150.947.658	149.174.369	150.927.013
	Subtotal Holding BUMN	**3.012.006**	**3.650.777**	**(638.771)**	**149.931.432**	**-**	**149.292.661**	**-**	**149.292.661**	**97.646**	**149.195.014**	**1.752.644**	**150.947.658**	**149.174.369**	**150.927.013**
1	Perum Perhutani	4.214.844	4.720.708	(505.864)	828.580	121.549	201.167	70.391	130.776	48.990	81.786	(78.742)	3.044	83.346	4.604
2	Perum Bulog	39.813.089	35.362.099	4.450.990	902.021	2.052.316	3.300.694	3.438.177	(137.483)	317.091	(454.574)	3.704	(450.870)	(392.963)	(389.253)
3	Perum Jasa Tirta I	847.742	755.415	92.328	23.661	12.515	103.473	446	103.027	17.265	85.762	477	86.239	85.774	86.251
4	Perum Jasa Tirta II	1.128.786	941.973	186.812	46.438	-	233.250	-	233.250	40.222	193.027	(1.165)	191.863	192.892	191.728
5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	91.295	100.386	(9.091)	34.740	38.978	(13.329)	48.591	(61.920)	6.221	(68.141)	1.965	(66.176)	(68.141)	(66.176)
6	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	4.221.832	4.005.618	216.214	142.939	-	359.153	34.122	325.031	86.602	238.429	21.124	259.553	235.045	256.052
7	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	500.465	446.819	53.646	-	15.444	38.201	15.044	23.157	7.233	15.925	(9.575)	6.350	15.847	6.272
8	Perum Perumnas	731.542	715.083	16.459	120.375	127.641	9.193	364.236	(355.043)	16.033	(371.077)	-	(371.077)	(375.464)	(375.464)
9	Perum Damri	1.637.942	1.582.054	55.889	1.834	30.372	27.351	23.381	3.970	(5.826)	9.796	(3.950)	5.846	9.796	5.846
10	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	4.148.815	3.357.873	790.942	280.164	32.626	1.038.480	-	1.038.480	206.027	832.453	(48.771)	783.682	832.453	783.682
	Total Perum	**57.336.353**	**51.988.029**	**5.348.324**	**2.380.751**	**2.431.442**	**5.297.633**	**3.994.388**	**1.303.245**	**739.858**	**563.387**	**(114.932)**	**448.455**	**618.586**	**503.542**
1	PT Barata Indonesia (Persero)	400.967	405.777	(4.810)	181.650	9.558	167.282	90.009	77.273	-	77.273	73.660	150.933	77.273	150.933
2	PT Indah Karya (Persero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PT Djakarta Lloyd (Persero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Persero Non-Inbreng	**400.967**	**405.777**	**(4.810)**	**181.650**	**9.558**	**167.282**	**90.009**	**77.273**	**-**	**77.273**	**73.660**	**150.933**	**77.273**	**150.933**
1	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	27.447.817	26.944.751	503.066	965.061	388.173	1.079.954	443.649	636.305	243.210	393.095	(46)	393.049	410.936	410.890
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	59.318.258	48.500.844	10.817.414	4.319.882	3.408.390	11.728.906	2.671.064	9.057.842	2.663.211	6.394.631	(252.971)	6.141.660	6.094.870	5.880.235
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	90.401.649	81.486.071	8.915.578		443.404	8.472.174	554.152	7.918.022	2.405.237	5.512.785	1.564.913	7.077.698	5.535.884	7.100.797
4	PT Bio Farma (Persero)	15.084.880	14.819.281	265.599	551.438	-	817.037	568.786	248.251	172.346	75.905	(14.756)	61.149	194.313	179.556
5	PT Pertamina (Persero)	1.168.157.445	1.062.945.521	105.211.925	22.089.366	1.619.608	125.681.683	19.997.101	105.684.582	45.010.980	60.673.603	(9.257.878)	51.415.725	55.211.206	49.150.248
6	PT Pos Indonesia (Persero)	3.970.738	3.565.419	405.319	653.173	218.319	840.173	542.472	297.701	(8.261)	305.962	-	305.962	305.075	305.075
7	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	582.681.870	533.455.857	49.226.013	1.098.356	12.462.188	37.862.181	24.869.532	12.992.649	5.731.941	7.260.708	(8.767.213)	(1.506.505)	7.014.769	(1.752.445)
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	35.243.751	33.705.469	1.538.282	190.715	301.100	1.427.897	825.984	601.913	422.474	179.439	(7.702)	171.737	190.848	177.239
9	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	146.742.000	112.151.000	34.591.000	1.960.000	243.000	36.308.000	5.206.000	31.102.000	6.644.000	24.458.000	126.000	24.584.000	17.814.000	17.954.000
10	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	70.425	72.791	(2.366)	3.906	310	1.230	2.726	(1.496)	-	(1.496)	-	(1.496)	(1.656)	(1.656)
11	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	525.128	522.812	2.316	29.763	-	32.079	-	32.079	8.303	23.775	-	23.775	23.775	23.775
12	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	79.751	80.189	(437)	1.736	912	387	-	387	-	387	-	387	387	387
13	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	159.461.043	145.522.685	13.938.358	25.701.357	-	39.639.715	6.038.367	33.601.348	3.713.378	29.887.970	4.971.136	34.859.106	25.120.393	29.762.733
14	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	15.815.765	17.228.086	(1.412.321)	11.745.093	153.982	10.178.790	2.589.524	7.589.265	1.992.841	5.596.425	(733.151)	4.863.274	5.362.757	4.629.606
15	PT Boma Bisma Indra (Persero)	41.896	52.736	(10.840)	4.125	786	(7.500)	776	(8.277)	-	(8.277)	-	(8.277)	(8.277)	(8.277)
16	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	435.887	465.392	(29.506)	-	14.413	(43.919)	711	(44.630)	1.912	(46.542)	10.407	(36.135)	(46.517)	(36.110)
17	PT LEN Industri (Persero)	20.711.740	18.762.968	1.948.772	118.941	357.592	1.710.121	641.847	1.068.274	155.226	913.048	247.099	1.160.147	905.638	1.148.221
18	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	9.666.050	9.486.562	179.487	466.537	5.397.309	(4.751.284)	865.312	(5.616.596)	(19.875)	(5.596.722)	(84.276)	(5.680.998)	(5.402.521)	(5.486.797)
19	PT Amarta Karya (Persero)	5.525	17.683	(12.158)	581	3	(11.580)		(11.580)		(11.580)		(11.580)	(11.580)	(11.580)
20	PT Brantas Abipraya (Persero)	2.241.566	2.307.493	(65.927)	580.502	147.290	367.286	215.409	151.877	1.359	150.518	10.568	161.086	150.687	161.254
21	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	29.890.247	18.103.537	11.786.710	858.815	2.687.834	9.957.691	3.603.869	6.353.822	1.546.818	4.807.004	(203.933)	4.603.071	3.659.535	3.455.970
22	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	8.816.827	8.933.166	(116.339)	876.272	1.149.647	(389.714)	4.003.032	(4.392.747)	91.438	(4.484.184)	121.665	(4.362.519)	(3.928.557)	(3.837.035)
23	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	13.325.492	13.519.060	(193.568)	1.157.766	8.119.143	(7.154.946)	2.968.058	(10.123.004)	12.174	(10.135.178)	(46.184)	(10.181.362)	(9.708.962)	(9.753.204)
24	PT Hutama Karya (Persero)	25.132.919	22.393.186	2.739.733	2.707.519	830.084	4.617.168	1.241.216	3.375.952	287.369	3.088.583	89.035	3.177.618	3.290.426	3.379.461
25	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	16.270.782	15.714.406	556.376	3.227.184	9.375.533	(5.591.972)	2.135.037	(7.727.009)	272.164	(7.999.173)	(84.623)	(8.083.795)	(6.075.259)	(6.155.663)
26	PT Industri Kereta Api (Persero)	3.756.594	3.914.142	(157.548)	-	140.113	(297.661)	394.144	(691.805)	105.092	(796.897)	77.286	(719.612)	(813.394)	(736.449)
27	PT PDI Pulau Batam (Persero)	584.578	624.972	(40.393)	48.867	487	7.987	3.011	4.975	(934)	5.910	(42)	5.868	5.855	5.813
28	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	36.728.274	29.269.767	7.458.507	1.333.328	-	8.791.835	2.966.737	5.825.098	1.461.792	4.363.306	(1.665.244)	2.698.062	4.161.330	2.496.603

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI

No.	BUMN	Pendapatan Usaha	HPP + Beban Usaha	Laba Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	EBIT	Beban Bunga	Laba Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Laba Rugi Tahun Berjalan	Pendapatan Komprehensif	Laba Rugi Komprehensif	Laba Rugi Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali	Laba Rugi Komprehensif Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali
		1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
29	PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) (d/h PT Virama Karya (Persero))	419.614	510.379	(90.765)	-	12.652	(103.417)	14.734	(118.151)	9.323	(127.474)	(179)	(127.653)	(127.474)	(127.653)
30	PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) (d/h PT Yodya Karya (Persero))	178.668	189.231	(10.563)	208	1.935	(12.289)	-	(12.289)	2.864	(15.154)	-	(15.154)	(15.154)	(15.154)
31	PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) (d/h PT Indra Karya (Persero))	173.348	156.095	17.253	14.179	976	30.456	386	30.070	6.464	23.606	-	23.606	23.606	23.606
32	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	97.205.773	72.810.149	24.395.624	1.839	-	24.397.463	-	24.397.463	4.286.423	20.111.040	3.605.082	23.716.122	20.040.703	23.583.665
33	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	213.688.137	137.377.398	76.310.739	106.824	-	76.417.563	-	76.417.563	15.071.430	61.346.133	7.127.788	68.473.921	56.293.950	63.192.562
34	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	331.317.944	258.070.063	73.247.881		455.062	72.792.819	-	72.792.819	15.660.454	57.132.365	2.909.006	60.041.371	56.652.384	59.265.589
35	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	40.451.787	36.095.750	4.356.037	25.927	-	4.381.964	-	4.381.964	880.810	3.501.154	889.065	4.390.219	3.501.154	4.390.219
36	PT ASABRI (Persero)	5.304.419	4.971.516	332.903	524.712	-	857.614	-	857.614	143.896	713.718	(183.777)	529.941	713.718	529.941
37	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	4.632.910	4.605.701	27.209	54.582	590	81.201	75.690	5.511	(52.084)	57.595	134.859	192.454	57.595	192.454
38	PT Taspen (Persero)	17.607.621	17.808.432	(200.811)	1.863.689	176.178	1.486.699	-	1.486.699	443.085	1.043.614	2.648.527	3.692.141	1.045.574	3.694.046
39	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	53.001.661	51.125.392	1.876.270	968.644	19.877	2.825.037	8.663.717	(5.838.680)	(575.901)	(5.262.779)	(60.287)	(5.323.066)	(5.313.796)	(5.357.838)
40	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	6.243.123	6.176.727	66.396	213.676	-	280.072	-	280.072	77.784	202.288	28.623	230.911	202.377	231.004
41	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	35.748.927	27.404.696	8.344.232	888.205	3.007.491	6.224.946	2.621.538	3.603.408	1.453.641	2.149.767	215.848	2.365.616	2.134.322	2.350.161
42	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	35.636.098	32.884.307	2.751.791	1.499.619	98.909	4.152.501		4.152.501	897.163	3.255.338	1.824.043	5.079.381	3.255.338	5.079.381
43	PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero) (d/h PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero))	7.524.280	6.627.755	896.525	302.711	-	1.199.236	-	1.199.236	216.474	982.762	(147.655)	835.107	929.104	787.897
44	PT Danareksa (Persero)	12.698.979	10.564.023	2.134.956	357.664	260.799	2.231.821	-	2.231.821	462.734	1.769.087	(441.391)	1.327.696	1.321.257	879.869
45	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	4.962.465	4.679.501	282.964	193.816	30.934	445.845	98.922	346.923	61.493	285.430	(4.360)	281.071	272.987	268.647
46	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	28.579.616	22.888.124	5.691.492	6.474.379	349.345	11.816.526	3.577.412	8.239.114	1.325.921	6.913.193	3.566	6.916.759	6.775.947	6.777.170
47	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	40.624	41.200	(576)	223	53	(405)	8	(413)	-	(413)	-	(413)	(413)	(413)
48	PT Produksi Film Negara (Persero)	22.779	21.014	1.765	833	-	2.599	93	2.506	736	1.770	45	1.815	1.770	1.815
49	PT Perkebunan Nusantara I	15.194.398	14.806.921	387.478	2.706.162	989.365	2.104.275	2.459.319	(355.045)	202.904	(557.949)	-	(557.949)	(557.360)	(780.070)
50	PT Perkebunan Nusantara IV	46.496.134	35.300.344	11.195.791	1.863.538	2.159.537	10.899.791	2.053.249	8.846.542	2.653.963	6.192.579	-	6.192.579	6.230.133	5.831.023
Subtotal Persero Inbreng		**3.429.738.204**	**2.969.680.562**	**460.057.642**	**98.751.712**	**55.023.322**	**503.786.031**	**102.913.583**	**400.872.448**	**116.143.771**	**284.728.677**	**4.648.895**	**289.377.572**	**262.893.683**	**269.240.569**
1	PT PANN Pembiayaan Maritim	7.518	7.161	356		7.124	(6.767)	1.403	(8.170)		(8.170)		(8.170)	(8.170)	(8.170)
2	PT Bukit Asam Tbk	42.651.724	39.547.296	3.104.428	994.709	-	4.099.137	325.928	3.773.209	813.973	2.959.236	876.261	3.835.497	2.929.957	3.806.218
3	PT Timah Tbk	11.553.037	9.820.501	1.732.536	103.275	-	1.835.811	120.079	1.715.732	435.649	1.280.083	37.801	1.317.884	1.280.071	1.317.872
4	PT Aneka Tambang Tbk	84.642.439	76.247.409	8.395.030	1.519.197	-	9.914.227	167.100	9.747.127	1.826.712	7.920.415	278.471	8.198.886	7.208.834	7.487.305
5	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	65.513.268	56.772.910	8.740.358	2.769.418	755.071	10.754.704	1.070.237	9.684.467	2.333.313	7.351.154	(485.282)	6.865.872	3.548.678	3.063.395
6	PT Indofarma Tbk	153.536	271.902	(118.366)	-	52.347	(170.713)	8.171	(178.884)	7.457	(186.340)		(186.340)	(186.340)	(186.340)
7	PT Kimia Farma Tbk	7.008.211	6.970.250	37.961	114.135	1.640	150.455	364.797	(214.341)	19.772	(234.114)	-	(234.114)	(179.732)	(179.732)
8	PT Asuransi Jasa Indonesia	2.598.714	1.874.529	724.185	348.225	175.254	897.156	-	897.156	6.557	890.599	-	890.599	890.599	890.599
9	PT Jasa Raharja	8.259.352	6.630.615	1.628.737	1.082.365	897.446	1.813.656		1.813.656	315.786	1.497.870	457.497	1.955.367	1.495.057	1.955.246
10	PT Jaminan Kredit Indonesia	6.194.535	4.520.754	1.673.781	1.728.639	2.122.705	1.279.715	-	1.279.715	227.886	1.051.829	313.159	1.364.988	1.051.729	1.364.874
11	PT Asuransi Kredit Indonesia	13.497.040	11.764.379	1.732.660	84.452	85.903	1.731.209	-	1.731.209	331.235	1.399.975	314.716	1.714.691	1.399.975	1.714.691
12	PT Energy Management Indonesia	69.138	67.569	1.570	127	376	1.320	-	1.320	293	1.027	-	1.027	1.027	1.027
13	PT Pegadaian	89.582.409	72.317.676	17.264.733	30.856	1.457.242	15.838.347	4.696.107	11.142.240	2.798.028	8.344.212	232.519	8.576.731	8.343.027	8.575.546
14	PT Permodalan Nasional Madani	15.785.772	15.469.164	316.608	1.202.607	-	1.519.215	-	1.519.215	380.083	1.139.132	(19.247)	1.119.885	1.133.043	1.113.788
15	PT Hotel Indonesia Natour	1.148.045	1.025.558	122.487	22.457	7.866	137.079	125.464	11.616	45.113	56.728	(1.426)	55.302	56.728	55.302
16	PT Sarinah	609.334	607.193	2.141	20.036	539	21.638	8.690	12.949	12.692	257	-	257	257	257
17	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	582.608	538.475	44.133	23.589	25.720	42.002	1.626	40.375	11.916	28.459	-	28.459	28.459	28.459
18	PT Angkasa Pura Indonesia	21.213.780	15.384.427	5.829.353	6.470.348	664.295	11.635.406	3.127.948	8.507.458	645.238	7.862.220	14.992	7.877.212	7.860.286	7.875.291
19	PT Sucofindo	3.856.470	3.344.521	511.949	166.442	41.051	637.340	-	637.340	122.041	515.299	(117.910)	397.389	515.749	397.839
20	PT Surveyor Indonesia	2.216.338	1.642.284	574.054	196.530	455.273	315.311	-	315.311	46.987	268.324	(5.196)	263.128	268.533	263.130
21	PT Perikanan Indonesia	325.431	318.961	6.470	46.443	9.847	43.066	11.207	31.860	-	31.860		31.860	31.860	31.860
22	PT Berdikari	9.189.227	8.748.114	441.113	15.626	133.418	323.321	5.452	317.869	66.188	251.681	(140)	251.541	251.664	251.541
23	PT Sang Hyang Seri	496.743	504.265	(7.522)	183.172	41.482	134.167	-	134.167	-	134.167	-	134.167	134.164	134.168
24	PT Garam	375.383	319.535	55.848	26.489	16.251	66.086	277	65.809	21.683	44.126	-	44.126	44.126	44.126
25	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	6.950.328	6.795.538	154.790	-	23.015	131.775	12.017	119.758	43.130	76.628	6.904.895	6.981.523	76.622	6.981.517
26	PT Nindya Karya	5.817.710	5.601.470	216.239	334.414	153.234	397.419	86.360	311.059	160.753	150.306	2.967	153.273	144.606	147.568

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI

No.	BUMN	Pendapatan Usaha	HPP + Beban Usaha	Laba Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	EBIT	Beban Bunga	Laba Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Laba Rugi Tahun Berjalan	Pendapatan Komprehensif	Laba Rugi Komprehensif	Laba Rugi Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali	Laba Rugi Komprehensif Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali
		1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
27	PT Kawasan Berikat Nusantara	1.095.676	795.347	300.330	291.671	81.715	510.286	8.458	501.828	5.296	496.531	-	496.531	496.531	496.531
28	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	1.441.335	782.117	659.217	59.536	65.981	652.773	-	652.773	153.596	499.177	1.071	500.247	483.836	500.247
29	PT Kawasan Industri Medan	279.047	231.337	47.710	20.356	2.553	65.513	1.565	63.948	6.512	57.436	-	57.436	57.436	57.436
30	PT Kawasan Industri Makassar	80.546	64.066	16.480	19.737	-	36.217	767	35.450	3.258	32.191	3.966	36.157	32.191	36.157
31	PT Balai Pustaka	15.857	26.982	(11.125)	8.333		(2.792)	1.179	(3.972)	(1.904)	(2.067)	2.042	(26)	(2.067)	(26)
32	PT Kliring Berjangka Indonesia	208.089	116.084	92.005	2.554	562	93.997	-	93.997	27.978	66.019		66.019	66.170	66.170
33	PT Perusahaan Pengelola Aset	1.481.335	3.461.404	(1.980.069)	154.130	3.882	(1.829.821)	12.300	(1.842.121)	(9.215)	(1.832.906)	(2.277.876)	(4.110.782)	210.660	(2.006.884)
34	PT Dahana	3.368.820	2.706.061	662.760	41.126	24.689	679.196	73.520	605.676	96.020	509.655	62.116	571.771	506.577	565.608
35	PT Pindad	3.969.075	3.602.177	366.898	12.584	-	379.482	314.272	65.210	57.930	7.280	(32.160)	(24.880)	7.279	(24.882)
36	PT Dirgantara Indonesia	4.136.103	3.812.261	323.842	86.656	6.677	403.821	165.354	238.467	(21.412)	259.879	(117.167)	142.712	259.878	142.711
37	PT PAL Indonesia	4.389.764	4.249.897	139.866	141.026	103.447	177.445	61.065	116.381	55.544	60.837	(494)	60.343	60.838	60.342
38	PT Industri Nuklir Indonesia	-	1.791	(1.791)	64	4.435	(6.163)	3.490	(9.653)		(9.653)		(9.653)	(9.653)	(9.653)
39	PT Semen Baturaja Tbk	2.361.906	2.093.315	268.591	18.772	-	287.363	52.933	234.430	62.506	171.924	(1.670)	170.254	171.925	170.255
40	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	26.065.682	16.057.665	10.008.017	3.688	250.293	9.761.412	-	9.761.412	2.193.889	7.567.523	394.662	7.962.185	7.567.523	7.962.185
41	PT Indonesia Asahan Aluminium	12.946.336	10.150.985	2.795.351	457.465	51.501	3.201.315	5.666	3.195.649	842.573	2.353.076	(7.146)	2.345.930	2.210.917	2.203.535
42	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	875.159	1.305.488	(430.329)	48.924	76.993	(458.398)	215.208	(673.606)	63.447	(737.052)	(16.293)	(753.345)	(736.707)	(753.000)
43	PT Petrokimia Gresik	33.622.705	30.836.822	2.785.883	427.141	-	3.213.024	564.573	2.648.451	557.959	2.090.492	376.864	2.467.356	2.044.262	2.417.577
44	PT Pupuk Kalimantan Timur	27.381.370	22.832.854	4.548.516	431.996	466.551	4.513.961	18.403	4.495.558	941.470	3.554.088	652.893	4.206.981	3.541.256	4.194.148
45	PT Pupuk Kujang	7.720.609	7.374.104	346.505	123.115	19.639	449.981	16.811	433.170	87.508	345.662	164.107	509.769	345.289	509.396
46	PT Pupuk Iskandar Muda	7.076.234	6.380.678	695.556	20.173	-	715.729	259.067	456.662	122.891	333.771	30.036	363.807	333.668	363.704
47	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	13.949.792	12.829.631	1.120.161	13.334	62.371	1.071.124	159.093	912.031	232.734	679.297	302.881	982.178	686.059	988.940
48	PT Inhutani I	546.623	541.795	4.828	63.131	34.084	33.874	-	33.874	5.323	28.551	-	28.551	28.551	28.551
49	PT Inhutani V	151.615	161.497	(9.882)	5.132	11.625	(16.375)	-	(16.375)	-	(16.375)	-	(16.375)	(16.375)	(16.375)
50	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.543.222	1.211.887	331.335	5.763	-	337.098	-	337.098	47.455	289.644	(24.549)	265.094	289.644	265.094
	Subtotal Persero Anper Holding	555.004.989	478.738.701	76.266.287	19.939.959	8.394.100	87.812.146	12.066.587	75.745.560	16.203.843	59.631.942	8.317.360	67.949.302	56.956.495	65.345.147
	Total	4.045.882.963	3.507.106.298	538.776.665	418.851.531	65.858.692	891.769.505	119.069.085	772.700.419	133.295.118	639.495.527	16.409.733	655.905.259	615.019.639	633.198.543

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA

No	BUMN	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Kepemilikan Negara
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14 = 12+13	15
1	BPI Danantara	9.874.606	3.208.058.277	3.217.932.883	2.273.648	64.267	2.337.915	1.032.345.480	2.035.921.385	-	2.028.870	145.299.233	3.215.594.968		3.215.594.968	3.215.594.968
	Subtotal BPI Danantara	**9.874.606**	**3.208.058.277**	**3.217.932.883**	**2.273.648**	**64.267**	**2.337.915**	**1.032.345.480**	**2.035.921.385**	**-**	**2.028.870**	**145.299.233**	**3.215.594.968**	**-**	**3.215.594.968**	**3.215.594.968**
1	PT Danantara Asset Management (Persero)	43.564.695	3.126.788.637	3.170.353.332	801.471	51.337	852.808	1.042.725.000	2.052.052.946	-	3.631.769	71.090.810	3.169.500.525		3.169.500.525	31.647.276
	Subtotal Holding BUMN	**43.564.695**	**3.126.788.637**	**3.170.353.332**	**801.471**	**51.337**	**852.808**	**1.042.725.000**	**2.052.052.946**	**-**	**3.631.769**	**71.090.810**	**3.169.500.525**	**-**	**3.169.500.525**	**31.647.276**
1	Perum Perhutani	1.852.169	16.563.221	18.415.390	2.172.863	3.884.322	6.057.185	2.586.303	(1.334.150)	-	-	11.116.487	12.368.640	(10.435)	12.358.205	12.368.640
2	Perum Bulog	73.933.362	8.210.531	82.143.893	49.738.145	23.106.338	72.844.484	12.522.387	-	-	-	(2.951.653)	9.570.733	(271.324)	9.299.410	9.570.733
3	Perum Jasa Tirta I	830.985	636.813	1.467.798	307.965	16.432	324.396	31.701	4.186	-	7.986	1.098.912	1.142.784	617	1.143.402	1.142.784
4	Perum Jasa Tirta II	1.023.793	1.278.069	2.301.862	291.174	149.647	440.820	164.548	-	-	830.412	859.145	1.854.105	6.937	1.861.041	1.854.105
5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	35.790	1.235.121	1.270.911	1.070.506	36.362	1.106.868	43.749	-	-	1.169.780	(1.049.486)	164.043	0	164.043	164.043
6	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	3.894.331	3.318.952	7.213.283	1.916.069	725.738	2.641.808	363.573	(64.059)	-	(195.476)	4.436.038	4.540.076	31.399	4.571.476	4.540.076
7	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	204.310	265.879	470.189	136.713	48.483	185.196	9.116	47.605	-	6.115	221.426	284.263	730	284.993	284.263
8	Perum Perumnas	4.799.158	3.244.416	8.043.573	3.008.137	3.950.452	6.958.590	1.000	3.528.375	-	244.280	(2.702.487)	1.071.168	13.816	1.084.984	1.071.168
9	Perum Damri	402.496	1.310.738	1.713.235	316.103	455.128	771.231	693.853	338	-	1.239.386	(991.573)	942.004	-	942.004	942.004
10	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	6.030.612	2.574.653	8.605.265	974.512	215.029	1.189.541	3.997.243	(516.195)	-	(92.223)	4.026.900	7.415.725	-	7.415.725	7.415.725
	Subtotal Total Perum	**93.007.007**	**38.638.393**	**131.645.400**	**59.932.187**	**32.587.931**	**92.520.118**	**20.413.473**	**1.666.099**	**-**	**3.210.260**	**14.063.708**	**39.353.541**	**(228.259)**	**39.125.282**	**39.353.541**
1	PT Barata Indonesia (Persero)	406.517	1.312.853	1.719.370	1.797.212	3.439.037	5.236.249	762.915	3.221	-	684.791	(4.967.806)	(3.516.879)		(3.516.879)	-
2	PT Indah Karya (Persero)	314.179	151.349	465.529	869.637	241.506	1.111.144	-	-	-		(645.615)	(645.615)		(645.615)	-
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)			172.757			535.919	235.000	27.538.894	-	(23.412)	(28.113.645)	(363.163)		(363.163)	-
4	PT Djakarta Lloyd (Persero)	227.677	464.565	692.242	411.669	294.237	705.906	1.954.659	1.426	-	65	(1.969.814)	(13.664)		(13.664)	-
	Subtotal Persero Non Inbreng	**948.373**	**1.928.768**	**3.049.897**	**3.078.519**	**3.974.780**	**7.589.218**	**2.952.574**	**27.543.541**	**-**	**661.444**	**(35.696.879)**	**(4.539.321)**	**-**	**(4.539.321)**	**-**
1	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	10.022.845	43.920.456	53.943.301	13.504.087	4.324.514	17.828.601	12.898.183	3.651	-	23.494.965	14.719	36.411.518	(296.818)	36.114.700	3
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	29.094.136	129.156.182	158.250.318	27.376.039	50.047.316	77.423.355	40.216.132	(14.222.580)	-	50.304.416	18.039	76.316.007	4.510.955	80.826.962	2
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	53.583.702	96.599.123	150.182.825	26.525.307	20.199.983	46.725.290	25.000.000	-	-	31.221.005	47.021.275	103.242.280	215.255	103.457.535	4
4	PT Bio Farma (Persero)	11.044.455	19.128.137	30.172.592	8.065.512	7.658.951	15.724.464	17.481.279	(6.399.833)	-	3.581.336	(594.477)	14.068.305	379.823	14.448.128	1
5	PT Pertamina (Persero)	612.903.218	919.158.241	1.532.061.458	297.992.183	488.140.367	786.132.550	276.810.217	(17.176.122)	-	(8.579.617)	433.042.616	684.097.095	61.831.814	745.928.909	4
6	PT Pos Indonesia (Persero)	9.177.837	8.805.508	17.983.345	5.914.556	2.889.859	8.804.416	455.023		-	3.797.130	4.974.149	9.226.302	(47.372)	9.178.930	20
7	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	225.401.312	1.612.008.596	1.837.409.908	204.030.456	569.171.840	773.202.296	150.536.096	34.608	-	698.857.031	213.338.549	1.062.766.284	1.441.328	1.064.207.612	7
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	17.430.795	59.137.929	76.568.724	15.837.335	13.011.674	28.849.009	675.154	6.217.241	-	1.892.081	34.679.637	43.464.113	4.255.602	47.719.715	0
9	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	61.766.000	225.993.000	287.759.000	73.948.000	63.274.000	137.222.000	4.953.000	2.310.000	-	10.229.000	113.193.000	130.685.000	19.852.000	150.537.000	0
10	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	55.579	612.064	667.643	185.443	356.115	541.558	456.694	3.656	-	423.213	(757.478)	126.085	-	126.085	0
11	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	321.218	1.706.808	2.028.026	643.319	507.426	1.150.744	976.600	635	-	2.689.009	(2.788.961)	877.282	-	877.282	1
12	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	29.924	364.806	394.729	189.405	863.703	1.053.108	242.836	51	-	237.161	(1.138.426)	(658.379)	-	(658.379)	-
13	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	68.444.357	239.212.555	307.656.912	64.701.977	70.888.994	135.590.971	119.090.865	(69.543.526)	-	18.014.944	82.913.953	150.476.236	21.589.705	172.065.941	1
14	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	9.795.746	36.448.647	46.244.393	13.384.845	20.729.038	34.113.883	16.512.221	2.926.334	-	25.445.148	(33.615.610)	11.268.093	862.418	12.130.510	0
15	PT Boma Bisma Indra (Persero)	149.895	591.659	741.553	689.537	51.174	740.711	340.916	22.808	-	450.331	(813.219)	836	6	842	0
16	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	252.623	886.652	1.139.275	437.508	509.301	946.809	350.000	1.229	-	782.018	(935.070)	198.177	(5.711)	192.466	1
17	PT LEN Industri (Persero)	46.274.624	19.776.886	66.051.510	39.733.670	11.086.929	50.820.599	22.499.805	(10.131.721)	-	2.015.874	528.600	14.912.558	318.352	15.230.910	1
18	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	16.617.870	12.176.070	28.793.940	19.458.103	6.038.494	25.496.596	840.761	4.755.656	-	893.483	(3.624.376)	2.865.524	431.819	3.297.343	0
19	PT Amarta Karya (Persero)	258.772	151.763	410.535	106.356	247.768	354.124	44.285	-	-	525.840	(513.714)	56.411	-	56.411	1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA

No	BUMN	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Kepemilikan Negara
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14 = 12+13	15
20	PT Brantas Abipraya (Persero)	3.158.990	4.986.663	8.145.654	3.105.592	2.246.925	5.352.517	373.537	-	-	542.445	1.846.088	2.762.070	31.067	2.793.137	7
21	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	9.268.670	150.726.615	159.995.285	15.995.855	81.637.713	97.633.568	3.628.936	3.997.085	-	(723.208)	29.452.801	36.355.614	26.006.103	62.361.717	0
22	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16.891.804	53.841.794	70.733.598	33.104.465	33.957.562	67.062.028	2.880.681	13.642.597	-	939.592	(18.495.138)	(1.032.269)	4.703.839	3.671.570	-
23	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	20.065.929	30.081.157	50.147.086	15.513.323	32.948.445	48.461.767	3.987.196	9.040.356	-	1.002.834	(14.915.098)	(884.711)	2.570.030	1.685.319	-
24	PT Hutama Karya (Persero)	36.090.929	153.007.241	189.098.170	21.094.465	26.825.636	47.920.101	131.646.000	44.037	-	775.283	8.117.181	140.582.501	595.568	141.178.069	1
25	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	20.532.612	22.451.841	42.984.452	19.447.400	19.231.636	38.679.036	619.990	4.710.055	-	1.563.311	(3.743.803)	3.149.552	1.155.864	4.305.416	0
26	PT Industri Kereta Api (Persero)	6.087.994	2.083.403	8.171.397	7.180.695	35.596	7.216.291	2.689.843	-	-	841.688	(2.629.512)	902.018	53.087	955.105	0
27	PT PDI Pulau Batam (Persero)	464.405	425.659	890.064	821.178	51.763	872.941	19.000				(1.933)	17.067	56	17.123	1
28	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	21.449.869	104.604.937	126.054.806	18.891.313	56.805.889	75.697.202	40.575.584	(33.331.222)	-	(2.618.921)	44.266.963	48.892.404	1.465.200	50.357.604	1
29	PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) (d/h PT Virama Karya (Persero))	355.667	141.701	497.368	255.869	59.549	315.418	25.000	1.051	-	86.397	69.503	181.950	-	181.950	7
30	PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) (d/h PT Yodya Karya (Persero))	382.464	318.807	701.271	198.121	10.593	208.714	50.000	-	-	84.502	358.055	492.557	-	492.557	10
31	PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) (d/h PT Indra Karya (Persero))	170.026	2.893.419	3.063.445	75.504	2.774.250	2.849.754	10.001	-	-	107.315	96.374	213.690	-	213.690	21
32	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			1.362.054.731			1.185.715.363	9.054.807	17.010.254	-	21.810.253	123.854.830	171.730.144	4.609.224	176.339.368	0
33	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			2.829.948.026			2.502.546.028	11.666.667	18.095.274	-	40.479.006	223.509.722	293.750.669	33.651.329	327.401.998	0
34	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			2.135.371.105			1.804.429.671	7.577.950	75.946.195	-	17.846.335	222.663.378	324.033.858	6.907.576	330.941.434	0
35	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			527.793.420			491.583.127	7.017.222	4.418.900	-	2.878.759	21.895.394	36.210.275	18	36.210.293	0
36	PT ASABRI (Persero)			55.969.649			56.332.391	200.000	-	-	(3.991.177)	3.428.435	(362.742)	-	(362.742)	-
37	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)			15.040.938			12.228.330	878.358	1.018.600	-	1.144.623	(228.992)	2.812.589	19	2.812.608	3
38	PT Taspen (Persero)			438.552.380			424.476.787	500.000	-	-	1.892.589	11.595.570	13.988.159	87.433	14.075.593	28
39	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	23.713.351	100.543.014	124.256.365	22.539.252	100.180.345	122.719.597	59.376.634	4.401.369	-	322.031	(63.962.855)	137.179	1.399.589	1.536.768	0
40	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	9.934.118	3.038.748	12.972.866	1.518.479	200.429	1.718.908	9.129.900	2.898.022	-	1.479.953	(2.258.089)	11.249.786	4.171	11.253.958	1
41	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	21.066.689	85.386.787	106.453.476	17.165.610	49.797.929	66.963.539	24.368.743	1.800.486	-	(693.390)	13.899.304	39.375.143	114.795	39.489.937	2
42	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)			135.004.257			91.190.215	93.719.537	(62.100.111)	-	-	10.924.470	42.543.896	1.270.146	43.814.042	0
43	PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero) (d/h PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero))	6.847.149	3.757.510	10.604.659	1.923.249	809.547	2.732.796	16.087.699	(11.679.237)	-	(32.989)	3.064.702	7.440.175	431.688	7.871.863	0
44	PT Danareksa (Persero)	19.931.581	46.777.477	66.709.058	13.510.245	9.797.346	23.307.591	18.332.900	5.474.905	-	4.282.953	2.965.250	31.056.008	12.345.459	43.401.467	2
45	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2.399.487	8.955.198	11.354.685	1.341.286	978.437	2.319.723	5.561.760	8.445	-	-	3.269.323	8.839.528	195.434	9.034.962	2
46	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	13.965.651	92.674.426	106.640.077	18.383.608	45.967.355	64.350.963	78.656.758	(45.973.009)	-	(349.507)	8.599.358	40.933.600	1.355.514	42.289.114	1
47	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	27.921	255.802	283.723	163.780	19.659	183.439	11.000	206	-	226.230	(137.152)	100.284	-	100.284	9
48	PT Produksi Film Negara (Persero)	8.367	37.619	45.986	32.228	16.151	48.380	54.904	-	-	-	(57.298)	(2.394)	-	(2.394)	-
49	PT Perkebunan Nusantara I	9.709.683	68.296.312	78.005.995	13.155.519	37.167.459	50.322.978	8.941.996	(11.041.508)	-	34.298.087	(4.561.777)	27.636.797	46.219	27.683.017	3
50	PT Perkebunan Nusantara IV	18.019.117	60.402.532	78.421.649	16.765.413	34.648.663	51.414.076	8.395.318	(1.705.349)	-	8.912.835	11.999.641	27.602.446	(594.873)	27.007.573	3
	Subtotal Persero Inbreng	**1.433.167.382**	**4.421.523.741**	**13.354.425.628**	**1.054.906.089**	**1.866.166.322**	**9.489.574.323**	**1.236.417.987**	**(104.520.511)**	**-**	**999.382.195**	**1.519.827.901**	**3.651.107.573**	**213.743.730**	**3.864.851.303**	**150**
1	PT PANN Pembiayaan Maritim			776.459			163.319	1.315.061	87.690	-	0	(789.611)	613.140	-	613.140	1
2	PT Bukit Asam Tbk	14.241.193	29.675.870	43.917.063	12.727.127	8.573.135	21.300.262	1.152.066	630.311	-	1.430.335	19.271.002	22.483.714	133.087	22.616.801	0
3	PT Timah Tbk	7.344.774	6.122.022	13.466.796	3.078.732	2.094.859	5.173.591	372.388	64.383	-	127.991	7.728.088	8.292.850	355	8.293.205	0
4	PT Aneka Tambang Tbk	23.021.850	29.508.555	52.530.405	9.682.943	6.247.576	15.930.519	2.403.076	9.696.068	-	4.417.988	18.781.075	35.298.207	1.301.679	36.599.886	0
5	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	34.676.011	69.529.453	104.205.464	19.553.135	24.329.318	43.882.453	5.751.995	(7.817.848)	-	(1.121.868)	49.007.499	45.819.778	14.503.233	60.323.011	0
6	PT Indofarma Tbk	136.128	415.199	551.327	1.286.010	215.504	1.501.514	309.927	81.120	-	196.910	(1.538.144)	(950.187)	-	(950.187)	-
7	PT Kimia Farma Tbk	4.113.074	10.797.868	14.910.941	6.984.273	4.731.973	11.716.247	556.659	(882.526)	-	6.866.347	(3.293.471)	3.247.009	(52.314)	3.194.695	0
8	PT Asuransi Jasa Indonesia			16.006.462			12.656.061	425.000	475.512	-	1.298.258	1.144.851	3.343.621	6.780	3.350.401	8
9	PT Jasa Raharja			19.548.859			7.978.673	8.500.000	13.504	-	(643.292)	3.593.366	11.463.578	106.608	11.570.186	1
10	PT Jaminan Kredit Indonesia			30.857.443			17.019.312	10.638.733	-	-	(65.235)	3.263.636	13.837.134	997	13.838.131	1
11	PT Asuransi Kredit Indonesia	29.621.483	3.296.146	32.917.629	20.807.983	2.734.466	23.542.449	9.611.000	-	-	201.091	(437.137)	9.374.954	226	9.375.180	1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA

No	BUMN	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Kepemilikan Negara
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14 = 12+13	15
12	PT Energy Management Indonesia	51.793	23.698	75.491	38.307	3.185	41.492	15.555	0	-	-	18.437	33.992	7	33.999	0
13	PT Pegadaian			151.654.818			110.029.582	6.250.000	-	-	6.877.139	28.492.974	41.620.113	5.123	41.625.236	7
14	PT Permodalan Nasional Madani			57.016.308			45.348.111	3.800.000	-	-	(21.321)	7.863.661	11.642.340	25.857	11.668.197	3
15	PT Hotel Indonesia Natour	246.932	4.962.117	5.209.049	1.265.066	2.348.134	3.613.201	243.810	191.547	-	(1.348)	137.474	571.483	1.024.366	1.595.849	6
16	PT Sarinah	431.237	872.015	1.303.252	277.170	26.798	303.968	576.129	181	-	(23.877)	446.845	999.278	6	999.284	21
17	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	278.242	928.381	1.206.624	291.814	206.348	498.162	250.100	106	-	5.623	453.358	709.186	(725)	708.461	3
18	PT Angkasa Pura Indonesia	9.184.851	81.388.238	90.573.089	13.719.905	39.611.716	53.331.621	25.251.253	(925.600)	-	1.237.497	11.626.303	37.189.453	52.015	37.241.468	3
19	PT Sucofindo	3.425.353	2.171.173	5.596.525	1.135.150	395.138	1.530.288	300.000	1.141	-	367.237	3.396.658	4.065.036	1.201	4.066.237	14
20	PT Surveyor Indonesia	1.943.385	840.659	2.784.045	449.125	161.867	610.992	25.000	105	-	142.315	2.009.943	2.177.363	(4.310)	2.173.053	87
21	PT Perikanan Indonesia	235.399	2.400.736	2.636.136	307.490	771.922	1.079.411	495.216	15.266	-	1.046.242	-	1.556.724	-	1.556.724	3
22	PT Berdikari	1.993.965	716.712	2.710.676	1.856.527	18.147	1.874.674	75.000	-	-	9.992	751.019	836.011	(9)	836.003	11
23	PT Sang Hyang Seri	232.276	8.172.133	8.404.409	1.010.258	1.310.670	2.320.928	1.913.159	(693.208)	-	6.994.308	(2.130.787)	6.083.472	9	6.083.481	4
24	PT Garam	338.856	11.002.691	11.341.546	77.213	15.872	93.086	670.227	12.778	-	10.531.774	33.682	11.248.461	-	11.248.461	19
25	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	1.538.949	10.974.559	12.513.508	1.527.654	128.194	1.655.849	1.826.131	(231.042)	-	133.855	9.128.630	10.857.574	84	10.857.659	12
26	PT Nindya Karya	5.368.117	1.686.149	7.054.266	4.898.896	316.947	5.215.843	559.497	-	-	228.483	1.026.116	1.814.096	24.328	1.838.424	0
27	PT Kawasan Berikat Nusantara	1.316.706	4.565.511	5.882.217	771.209	700.876	1.472.085	363.945	111.968	-	984.164	2.949.246	4.409.323	809	4.410.132	12
28	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	3.178.747	2.057.438	5.236.185	963.063	1.194.212	2.157.275	89.488	913.375	-	933.793	836.233	2.772.890	306.020	3.078.910	31
29	PT Kawasan Industri Medan	437.019	1.009.170	1.446.190	96.793	679.452	776.245	150.000	-	-	-	519.945	669.945	-	669.945	4
30	PT Kawasan Industri Makassar	98.511	1.127.123	1.225.633	69.800	372.294	442.094	40.000	-	-	83.132	660.408	783.539	-	783.539	20
31	PT Balai Pustaka	18.915	155.821	174.736	142.778	-	142.778	14.400	-	-	49.399	(31.841)	31.958	-	31.958	2
32	PT Kliring Berjangka Indonesia	3.100.090	34.959	3.135.049	2.358.263	17.460	2.375.722	500.000			28	257.371	757.399	1.928	759.327	3
33	PT Perusahaan Pengelola Aset	3.586.680	10.267.365	13.854.045	2.035.339	2.863.469	4.898.808	5.668.998	(1.386.916)	-	5.157.543	(484.365)	8.955.260	(23)	8.955.237	2
34	PT Dahana	2.849.342	2.435.766	5.285.109	1.091.414	800.574	1.891.988	250.000	2.013	-	619.020	2.338.792	3.209.825	183.295	3.393.120	13
35	PT Pindad	12.981.685	3.885.395	16.867.080	13.594.247	1.069.317	14.663.564	2.051.289	-	-	2.325.092	(2.172.885)	2.203.497	19	2.203.516	2
36	PT Dirgantara Indonesia	13.095.032	5.585.126	18.680.158	9.211.600	3.985.168	13.196.768	25.729.414	1.084.448	-	1.046.943	(22.377.422)	5.483.384	7	5.483.391	0
37	PT PAL Indonesia	9.348.937	5.315.521	14.664.458	9.224.341	3.213.577	12.437.918	5.750.103	-	-	730.296	(4.253.825)	2.226.574	(34)	2.226.540	0
38	PT Industri Nuklir Indonesia	4.113	-	4.113	69.413	24.625	94.038	27.200	-	-	7.044	(124.170)	(89.926)	-	(89.926)	-
39	PT Semen Baturaja Tbk	1.021.354	3.751.226	4.772.581	746.034	613.899	1.359.933	993.253	1.270.607	-	(78.664)	1.227.477	3.412.673	(25)	3.412.648	0
40	PT Bank Syariah Indonesia Tbk			456.192.606			404.239.732	23.064.630	(3.929.100)	-	1.238.932	31.578.412	51.952.874	-	51.952.874	0
41	PT Indonesia Asahan Aluminium	11.389.667	28.596.723	39.986.390	5.362.216	691.152	6.053.368	21.638.848	(583.307)	-	278.350	10.845.660	32.179.550	1.753.472	33.933.022	2
42	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	1.347.653	6.747.097	8.094.750	1.291.213	2.848.234	4.139.447	3.019.750	275.148	-	18.906	644.879	3.958.683	(3.380)	3.955.303	2
43	PT Petrokimia Gresik	14.535.683	26.799.707	41.335.390	8.881.149	7.076.552	15.957.701	6.600.000	-	-	7.504.018	10.987.320	25.091.338	286.351	25.377.689	4
44	PT Pupuk Kalimantan Timur	12.908.497	25.997.286	38.905.783	4.077.402	538.374	4.615.776	8.800.000	-	-	10.340.461	15.108.130	34.248.591	41.416	34.290.007	0
45	PT Pupuk Kujang	3.892.788	6.481.850	10.374.638	1.429.487	120.346	1.549.833	1.900.000	-	-	4.061.394	2.860.480	8.821.874	2.931	8.824.805	5
46	PT Pupuk Iskandar Muda	3.896.101	4.895.071	8.791.172	2.764.601	1.493.209	4.257.810	2.225.674	-	-	1.025.864	1.280.526	4.532.064	1.298	4.533.362	2
47	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	5.400.311	26.621.972	32.022.283	3.258.558	9.294.900	12.553.458	5.800.000	(333.876)		6.606.654	7.390.367	19.463.145	5.680	19.468.825	3
48	PT Inhutani I	358.669	514.277	872.947	217.420	134.077	351.497	523.815	(37.960)	-	15.218	20.377	521.450	-	521.450	1
49	PT Inhutani V	188.435	14.962	203.397	173.666	18.654	192.320	150.102	(14.659)	-	(16.111)	(108.255)	11.077	-	11.077	0
50	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.183.787	711.881	1.895.668	395.838	220.630	616.467	4.080.000	(3.898.108)	-	215.970	881.339	1.279.201	-	1.279.201	0
	Total Persero	**244.562.594**	**443.055.622**	**1.419.671.171**	**169.200.622**	**132.212.823**	**898.848.235**	**202.717.892**	**(5.806.880)**	**-**	**83.383.891**	**220.819.666**	**501.114.569**	**19.708.367**	**520.822.936**	**313**
	Total	**1.825.124.656**	**11.239.993.437**	**21.297.078.311**	**1.290.192.535**	**2.035.057.460**	**10.491.722.616**	**3.537.572.406**	**4.006.856.581**	**-**	**1.092.298.429**	**1.935.404.439**	**10.572.131.855**	**233.223.839**	**10.805.355.694**	**3.286.596.248**

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON-BUMN (MINORITAS)

No.	Nama Perusahaan	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilikan (Cost Method)	Kepemilikan (Equity Method)
1	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	0.00%	1		2,822,996
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	0.00%	1		1,897,647
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	0.00%	1		4,105,046
4	PT Bio Farma (Persero)	0.00%	1		804,764
5	PT Pertamina (Persero)	0.00%	1		3,870,325
6	PT Pos Indonesia (Persero)	0.00%	1		20,276,562
7	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	0.00%	1		7,018,845
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	0.00%	1		6,438
9	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	0.00%	1		1,437
10	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	0.00%	1		276,082
11	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	0.00%	1		898,302
12	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	0.00%	1		-
13	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	0.00%	1		1,263,541
14	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	0.00%	1		582
15	PT Boma Bisma Indra (Persero)	0.00%	1		2,454
16	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	0.00%	1		566,220
17	PT LEN Industri (Persero)	0.00%	1		662,786
18	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	0.00%	1		341
19	PT Amarta Karya (Persero)	0.00%	1		1,273,817
20	PT Brantas Abipraya (Persero)	0.00%	1		7,394,368
21	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	0.00%	1		5,009
22	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	0.00%	1		-
23	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	0.00%	1		-
24	PT Hutama Karya (Persero)	0.00%	1		1,067,883
25	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	0.00%	1		508
26	PT Industri Kereta Api (Persero)	0.00%	1		406,893
27	PT PDI Pulau Batam (Persero)	0.01%	1		898,272
28	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	0.00%	1		1,204,971
29	PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) (d/h PT Virama	0.00%	1		7,278,010
30	PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) (d/h PT Yody	0.00%	1		9,851,147
31	PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) (d/h PT Indra K	0.01%	1		21,366,894
32	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	0.00%	1		4,609
33	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	0.00%	1		3,147
34	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0.00%	1		2,138
35	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	0.00%	1		2,580
36	PT ASABRI (Persero)	0.00%	1		-
37	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	0.00%	1		3,202,099
38	PT Taspen (Persero)	0.00%	1		27,976,319
39	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	0.00%	1		0
40	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	0.00%	1		1,232,192
41	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	0.00%	1		1,615,805
42	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	0.00%	1		453,949
43	PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero)	0.00%	1		462,476
44	PT Danareksa (Persero)	0.00%	1		1,694,004
45	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	0.00%	1		1,589,340
46	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	0.00%	1		520,408
47	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	0.01%	1		9,116,738
48	PT Produksi Film Negara (Persero)	0.00%	1		-
49	PT Perkebunan Nusantara I	0.00%	1		3,090,674
50	PT Perkebunan Nusantara IV	0.00%	1		3,287,838
51	PT Asean Bintulu Fertilizer	13.00%	39,000	125,307,000,000	-
52	PT Indosat Tbk	0.00%	1	100	-
53	PT PANN Pembiayaan Maritim	0.00%	1		903,786
54	PT Bukit Asam Tbk	0.00%	5		2,010
55	PT Timah Tbk	0.00%	1		1,113
56	PT Aneka Tambang Tbk	0.00%	1		1,469
57	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	0.00%	1		1,890
58	PT Indofarma Tbk	0.00%	1		-
59	PT Kimia Farma Tbk	0.00%	1		583
60	PT Asuransi Jasa Indonesia	0.00%	1		7,867,344
61	PT Jasa Raharja	0.00%	1		1,348,656

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON-BUMN (MINORITAS)

No.	Nama Perusahaan	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilikan (Cost Method)	Kepemilikan (Equity Method)
62	PT Jaminan Kredit Indonesia	0.00%	1		1,300,882
63	PT Asuransi Kredit Indonesia	0.00%	1		975,440
64	PT Energy Management Indonesia	0.00%	1		2
65	PT Pegadaian	0.00%	1		6,659,218
66	PT Permodalan Nasional Madani	0.00%	1		3,063,774
67	PT Hotel Indonesia Natour	0.00%	1		5,619,303
68	PT Sarinah	0.00%	1		21,329,307
69	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan I	0.00%	1		2,836,744
70	PT Sucofindo	0.00%	1		13,550,120
71	PT Surveyor Indonesia	0.00%	1		87,094,516
72	PT Perikanan Indonesia	0.00%	1		3,143,520
73	PT Berdikari	0.00%	1		11,146,818
74	PT Sang Hyang Seri	0.00%	1		4,036,828
75	PT Garam	0.00%	1		18,747,435
76	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	0.00%	1		11,516,979
77	PT Nindya Karya	0.00%	1		304,890
78	PT Kawasan Berikat Nusantara	0.00%	1		12,115,355
79	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	0.00%	1		30,986,163
80	PT Kawasan Industri Medan	0.00%	1		4,466,301
81	PT Kawasan Industri Makassar	0.00%	1		19,588,483
82	PT Balai Pustaka	0.01%	1		2,219,316
83	PT Kliring Berjangka Indonesia	0.00%	1		3,029,596
84	PT Perusahaan Pengelola Aset	0.00%	1		1,642,376
85	PT Dahana	0.00%	1		12,839,301
86	PT Pindad	0.00%	1		1,611,283
87	PT Dirgantara Indonesia	0.00%	1		204,604
88	PT PAL Indonesia	0.00%	1		431,034
89	PT Industri Nuklir Indonesia	0.00%	1		-
90	PT Semen Baturaja Tbk	0.00%	1		344
91	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	0.00%	1		1,263
92	PT Indonesia Asahan Aluminium	0.00%	1		2,458,833
93	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	0.00%	1		1,843,254
94	PT Angkasa Pura Indonesia	0.00%	2		2,945,553
95	PT Petrokimia Gresik	0.00%	1		3,801,718
96	PT Pupuk Kalimantan Timur	0.00%	1		1,946
97	PT Pupuk Kujang	0.00%	1		4,643,092
98	PT Pupuk Iskandar Muda	0.00%	1		2,036,266
99	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	0.00%	1		3,355,715
100	PT Inhutani I	0.00%	1		995,484
101	PT Inhutani V	0.00%	1		73,795
102	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	0.00%	1		313,530
Total				**125,307,000,100**	**462,533,687**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

No.	Perusahaan Minoritas	Pendapatan Usaha	HPP + Beban Usaha	Laba Usaha	Pendapatan Lain - Lain	Beban Lain - Lain	EBIT	Beban Bunga	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	Laba Rugi Tahun Berjalan	Pendapatan Komprehensif	Laba Rugi Komprehensif	Laba Rugi Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali	Laba Rugi Komprehensif Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali
		1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	PT Asean Bintulu Fertilizer			-			-		-	-	-	-	-		
2	PT Indosat Tbk	56,518,141	29,920,846	26,597,295	737,800	15,849,161	11,485,934	4,201,287	7,284,647	1,467,141	5,817,506	13,743	5,831,249	5,509,703	5,524,428
Jumlah		**56,518,141**	**29,920,846**	**26,597,295**	**737,800**	**15,849,161**	**11,485,934**	**4,201,287**	**7,284,647**	**1,467,141**	**5,817,506**	**13,743**	**5,831,249**	**5,509,703**	**5,524,428**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA

(dalam jutaan rupiah)

No.	Perusahaan Minoritas	Kode	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba	Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Kepemilikan Negara (Rp Juta)
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	16
1	PT Asean Bintulu Fertilizer	ASBF	1,172,961	3,241,429	4,414,390	276,692	552,986	829,679	2,517,911	-	-	-	1,066,800	3,584,711	-	3,584,711	125,307
2	PT Indosat Tbk	IDST	19,003,874	99,625,997	118,629,871	30,499,266	48,621,497	79,120,763	806,270	17,713,642		375,174	17,425,155	36,320,241	3,188,867	39,509,108	0
Total Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas																	125,307

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	Laba (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Pengendali	Laba (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7 = 5 -6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 -13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
	Persero															
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited 2025	8,910,795,779,934	5,609,895,637,526	3,300,900,142,408	93,715,247,242	18,817,259,326	3,375,798,130,324	-	3,375,798,130,324	474,774,264,170	2,901,023,866,154	259,642,098,612	3,160,665,964,766	2,901,023,866,154	3,160,665,964,766
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited 2025	1,478,204,800,000	536,928,315,000	941,276,485,000	-	-	941,276,485,000	-	941,276,485,000	45,292,841,000	895,983,644,000	103,045,819,000	999,029,463,000	895,983,644,000	999,029,463,000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	Audited 2025	3,102,610,000,000	2,386,091,000,000	716,519,000,000	-	127,634,000,000	588,885,000,000	-	588,885,000,000	23,492,000,000	565,393,000,000	24,521,000,000	589,914,000,000	565,393,000,000	589,914,000,000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited 2025	1,093,855,189,967	793,292,017,560	300,563,172,407	88,300,311,485	8,885,808,001	379,977,675,891	-	379,977,675,891	119,085,240,807	260,892,435,084	(15,832,040,130)	245,060,394,954	260,892,435,084	245,060,394,954
5	PT Bina Karya	Unaudited 2025	18,114,840,468	39,914,165,799	(21,799,325,331)	18,243,027,513	4,441,333,854	(7,997,631,672)	-	(7,997,631,672)	-	(7,997,631,672)	-	(7,997,631,672)	(7,997,631,672)	(7,997,631,672)
	Total Persero		**14,603,580,610,369**	**9,366,121,135,885**	**5,237,459,474,484**	**200,258,586,240**	**159,778,401,181**	**5,277,939,659,543**	**-**	**5,277,939,659,543**	**662,644,345,977**	**4,615,295,313,566**	**371,376,877,482**	**4,986,672,191,048**	**4,615,295,313,566**	**4,986,672,191,048**
	Badan Usaha Lainnya															
1	PT Tuban Petrochemical Industries	Audited 2025	6,711,199,000,000	6,763,547,000,000	(52,348,000,000)	236,217,000,000	254,806,000,000	(70,937,000,000)	-	(70,937,000,000)	(11,871,000,000)	(59,066,000,000)	278,931,000,000	219,865,000,000	(59,066,000,000)	219,865,000,000
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Audited 2025	4,035,044,000,000	3,810,405,000,000	224,639,000,000	28,439,000,000	-	253,078,000,000	-	253,078,000,000	800,000,000	252,278,000,000	15,476,000,000	267,754,000,000	252,278,000,000	267,754,000,000
3	Lembaga Pengelola Investasi	Audited 2025	8,454,214,000,000	1,030,628,000,000	7,423,586,000,000	93,379,000,000		7,516,965,000,000	-	7,516,965,000,000	70,292,000,000	7,446,673,000,000	(6,771,101,000,000)	675,572,000,000	7,446,673,000,000	675,572,000,000
	Total Badan Usaha Lainnya		**19,200,457,000,000**	**11,604,580,000,000**	**7,595,877,000,000**	**358,035,000,000**	**254,806,000,000**	**7,699,106,000,000**	**-**	**7,699,106,000,000**	**59,221,000,000**	**7,639,885,000,000**	**(6,476,694,000,000)**	**1,163,191,000,000**	**7,639,885,000,000**	**1,163,191,000,000**
	Jumlah		**33,804,037,610,369**	**20,970,701,135,885**	**12,833,336,474,484**	**558,293,586,240**	**414,584,401,181**	**12,977,045,659,543**	**-**	**12,977,045,659,543**	**721,865,345,977**	**12,255,180,313,566**	**(6,105,317,122,518)**	**6,149,863,191,048**	**12,255,180,313,566**	**6,149,863,191,048**

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA

No.	Perusahaan Negara	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistibusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	(2)	(5)	(6)	(7 = 5 + 6)	(8)	(9)	(10 = 8 + 9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15)	(17)	(18 = 16 + 17)	(19)	(20 = 16 x 19)
	Persero																
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	-	-	121,325,658,336,717	-	-	74,911,772,017,204	30,516,600,000,000	-	-	302,472,696,931	15,594,813,622,582	46,413,886,319,513	-	46,413,886,319,513	100.00	46,413,886,319,513
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-	-	17,716,787,893,000	-	-	231,360,737,000	10,655,000,000,000	-	-	191,960,902,000	6,638,466,254,000	17,485,427,156,000	-	17,485,427,156,000	100.00	17,485,427,156,000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	-	-	66,813,645,000,000	-	-	39,087,714,000,000	16,221,000,000,000	-	-	6,707,675,000,000	4,797,256,000,000	27,725,931,000,000	-	27,725,931,000,000	100.00	27,725,931,000,000
4	PT Geo Dipa Energi	1,722,689,515,592	7,363,516,073,192	9,086,205,588,784	1,195,164,782,503	3,077,086,766,207	4,272,251,548,710	3,975,443,770,000	-	-	(42,355,557,348)	880,865,827,422	4,813,954,040,074	-	4,813,954,040,074	94.50	4,549,397,071,417
5	PT Bina Karya	6,868,751,967	112,973,164,657	119,841,916,624	57,226,349,593	20,013,985,395	77,240,334,988	15,000,000,000	-	-	83,564,169,390	(55,964,646,799)	42,599,522,591	2,059,045	42,601,581,636	100.00	42,599,522,591
	Total Persero	**1,729,558,267,559**	**7,476,489,237,849**	**215,062,138,735,125**	**1,252,391,132,096**	**3,097,100,751,602**	**118,580,338,637,902**	**61,383,043,770,000**	**-**	**-**	**7,243,317,210,973**	**27,855,437,057,205**	**96,481,798,038,178**	**2,059,045**	**96,481,800,097,223**	**495**	**96,217,241,069,521**
	Badan Usaha Lainnya																
6	PT Tuban Petrochemical Industries	5,043,527,000,000	8,161,834,000,000	13,205,361,000,000	2,437,499,000,000	1,420,632,000,000	3,858,131,000,000	7,841,307,000,000	309,290,000,000	-	1,196,617,000,000	-	9,347,214,000,000	16,000,000	9,347,230,000,000	35.23	3,292,892,299,148
7	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	-	58,767,496,000,000	-	-	44,570,213,000,000	42,759,385,000,000	-	-	140,870,000,000	(28,702,973,000,000)	14,197,282,000,000	1,000,000	14,197,283,000,000	100.00	14,197,282,000,000
8	Lembaga Pengelola Investasi	-	-	110,994,151,000,000	-	-	2,772,104,000,000	75,000,000,000,000	-		17,434,450,000,000	15,787,597,000,000	108,222,047,000,000	-	108,222,047,000,000	100.00	108,222,047,000,000
	Total Badan Usaha Lainnya	**5,043,527,000,000**	**8,161,834,000,000**	**182,967,008,000,000**	**2,437,499,000,000**	**1,420,632,000,000**	**51,200,448,000,000**	**125,600,692,000,000**	**309,290,000,000**	**-**	**18,771,937,000,000**	**(12,915,376,000,000)**	**131,766,543,000,000**	**17,000,000**	**131,766,560,000,000**	**235**	**125,712,221,299,148**
	Jumlah	**6,773,085,267,559**	**15,638,323,237,849**	**398,029,146,735,125**	**3,689,890,132,096**	**4,517,732,751,602**	**169,780,786,637,902**	**186,983,735,770,000**	**309,290,000,000**	**-**	**26,015,254,210,973**	**14,940,061,057,205**	**228,248,341,038,178**	**19,059,045**	**228,248,360,097,223**		**221,929,462,368,668**

LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

No	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah			Surat hutang		
			Mata Uang Asing	IDR	Utang dalam MUA		Utang dalam IDR
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional						
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289,100,000	6,619,823,364,000			
	World Bank Group						
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	USD	249,898,720	4,178,306,597,898			
3	International Development Association (IDA)	USD	140,490,817	2,349,006,460,191	IDR		(5,237,901,545)
4	International Finance Corporation (IFC)	USD	309,305,000	5,171,579,600,000			
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	3,797,820	63,499,550,400	USD	1,135,018	(18,977,500,960)
6	Islamic Development Bank (IsDB)	ID	315,530,897	7,225,039,102,116			
7	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD	2,060,000	34,443,200,000			
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	ID	246,693	5,648,790,074			
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD	94,959,000	1,587,714,480,000			
10	Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223,450	21,588,278,098	EUR	223,450	(4,385,045,018)
		USD	1,028,901				
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD	22,242,517	371,894,884,240			
12	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	USD	30,600,000	511,632,000,000			
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD	672,100,000	11,237,512,000,000			
	Jumlah			**39,377,688,307,018**			**(28,600,447,523)**
	B. PMN Lainnya						
14	ASEAN Infrastructure Fund	USD	120,000,000	2,006,400,000,000			
15	International Rubber Consortium Limited	USD	4,000,000	66,880,000,000			
	Jumlah		**-**	**2,073,280,000,000**			**-**
Jumlah			**-**	**41,450,968,307,018**	**-**	**-**	**(28,600,447,523)**

1. Kurs ID = kurs Islamic Dinar. Kurs ID sama dengan kurs SDR
2. Kurs Special Drawing Right (SDR); SDR1 = USD 1,36940
3. Kurs Euro to IDR 19.624,26
4. Kurs USD to IDR Rp 16.720

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi *Outstanding*	Saldo Akhir Nilai Investasi *Outstanding*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Audited 2025	4,000,000,000,000	30,987,890,952,000	(49,978,550,000)	239,408,499,778,000	270,346,412,180,000

REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

	Alokasi Pembiayaan Anggaran	DIPA 2025	Realisasi Tunai s.d. 31 Desember 2025	Persentase Realisasi
	PEMBIAYAAN ANGGARAN UAP BUN INVESTASI PEMERINTAH	**(100,381,308,982,000)**	**(86,251,942,665,028)**	**85.92%**
1	**PEMBIAYAAN INVESTASI**	**(100,381,308,982,000)**	**(86,251,942,665,028)**	**85.92%**
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**-**	**14,121,986,879,370**	
1	Penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK	-	3,981,138,401,573	
2	Penerimaan pembiayaan dari UAKPA KBUMN	-	533,958,333,334	
3	Penerimaan pembiayaan dari UAKPA BLU BPDLH	-	144,662,715,592	
4	Penerimaan pembiayaan dari UAKPA BLU LMAN	-	9,462,227,428,871	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**(100,381,308,982,000)**	**(100,373,929,544,398)**	**99.99%**
I	**Investasi kepada BUMN dan BLU**	**(45,702,928,813,000)**	**(45,702,928,813,000)**	**100.00%**
1	PMN kepada BPI Danantara untuk diteruskan kepada	(4,773,000,000,000)	(4,773,000,000,000)	100.00%
	a. PT Kereta Api Indonesia (Pesero)	(1,800,000,000,000)	(1,800,000,000,000)	100.00%
	b. PT Industri Kereta Api (Persero)	(473,000,000,000)	(473,000,000,000)	100.00%
	c. PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero)	(2,500,000,000,000)	(2,500,000,000,000)	100.00%
2	PMN kepada PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero)	(6,684,022,705,000)	(6,684,022,705,000)	100.00%
3	Investasi kepada BLU LMAN	(7,546,980,793,000)	(7,546,980,793,000)	100.00%
4	Investasi kepada BLU LPDP	(26,698,925,315,000)	(26,698,925,315,000)	100.00%
II	**Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional**	**(1,902,337,169,000)**	**(1,894,957,731,398)**	**99.61%**
1	Islamic Development Bank (IsDB)	(1,649,665,669,000)	(1,642,045,731,398)	99.54%
2	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(48,831,000,000)	(49,068,000,000)	100.49%
3	International Development Association (IDA)	(203,840,500,000)	(203,844,000,000)	100.00%
III	**Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen)**	**(52,776,043,000,000)**	**(52,776,043,000,000)**	**100.00%**
1	Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	(29,200,000,000,000)	(29,200,000,000,000)	100.00%
2	Investasi kepada Perum BULOG	(22,076,043,000,000)	(22,076,043,000,000)	100.00%
3	Investasi kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	(1,500,000,000,000)	(1,500,000,000,000)	100.00%

PENJELASAN MUTASI LAIN-LAIN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)

No.	BUMN	Saldo Ekuitas pada LKPN 2024	Laba Bersih	OCI Non Reval	OCI Reval	Laba Komprehensif	Dividen	PMN	Mutasi Ekuitas	ILKPN 2025 + Mutasi Ekuitas	Saldo Ekuitas	Selisih	Selisih Saldo Awal	Selisih pencatatan tambahan modal disetor
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=7+8+9	11=3+10	12	13=12-11	14	15
	Persero													
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	43,811,220,354,747	2,901,023,866,154	259,642,098,612	-	3,160,665,964,766	(558,000,000,000)	-	2,602,665,964,766	46,413,886,319,513	46,413,886,319,513	-	-	-
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	16,672,573,693,000	895,983,644,000	103,045,819,000	-	999,029,463,000	(186,176,000,000)	-	812,853,463,000	17,485,427,156,000	17,485,427,156,000	-	-	-
3	PT Sarana Multigriya Finansial	20,559,960,000,000	565,393,000,000	24,521,000,000	-	589,914,000,000	(107,966,770,000)	6,684,022,705,000	7,165,969,935,000	27,725,929,935,000	27,725,931,000,000	1,065,000	-	295,000
4	PT Geo Dipa Energi	4,343,727,362,817	246,554,759,403	(14,961,970,223)	-	231,592,789,180	(25,923,080,580)	-	205,669,708,600	4,549,397,071,417	4,549,397,071,417	-	-	-
5	PT Bina Karya	-	(7,997,631,672)		80,072,319,300	72,074,687,628	-	-	72,074,687,628	72,074,687,628	42,599,522,591	(29,475,165,037)	(29,475,165,037)	-
	Total Persero	**85,387,481,410,564**	**4,600,957,637,885**	**372,246,947,389**	**80,072,319,300**	**5,053,276,904,574**	**(878,065,850,580)**	**6,684,022,705,000**	**10,859,233,758,994**	**96,246,715,169,558**	**96,217,241,069,521**	**(29,474,100,037)**	**(29,475,165,037)**	**295,000**
	Badan Usaha Lainnya													
5	PT Tuban Petrochemical Industries	3,215,436,945,568	(20,808,122,778)	98,263,476,357	-	77,455,353,579	-	-	77,455,353,579	3,292,892,299,148	3,292,892,299,148	-	-	-
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	13,992,629,000,000	252,278,000,000	15,476,000,000	-	267,754,000,000	(63,101,790,610)	-	204,652,209,390	14,197,281,209,390	14,197,282,000,000	790,610	-	-
7	Lembaga Pengelola Investasi	107,546,475,000,000	7,446,673,000,000	(6,771,101,000,000)	-	675,572,000,000	-	-	675,572,000,000	108,222,047,000,000	108,222,047,000,000	-	-	-
	Total Lembaga/Badan Usaha Lainnya	**124,754,540,945,568**	**7,678,142,877,222**	**(6,657,361,523,643)**	**-**	**1,020,781,353,579**	**(63,101,790,610)**	**-**	**957,679,562,969**	**125,712,220,508,538**	**125,712,221,299,148**	**790,610**	**-**	**-**
	Jumlah	**210,142,022,356,132**	**12,279,100,515,107**	**(6,285,114,576,254)**	**80,072,319,300**	**6,074,058,258,153**	**(941,167,641,190)**	**6,684,022,705,000**	**11,816,913,321,963**	**221,958,935,678,095**	**221,929,462,368,668**	**(29,473,309,427)**	**(29,475,165,037)**	**295,000**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA

Status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit TAB	Selisih Revaluasi		Kenaikan Investasi dari Selisih Revaluasi	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
			Saldo Periode Ini	Saldo Periode Lalu				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(7)=(2)+(5)+(6)+(7)
Audited 2025	3,726,349,000,000	76,794,518,000,000	130,043,664,000,000	-	130,043,664,000,000	1,109,244	473,944,440,890,756	680,782,624,000,000

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BPJS

BPJS	Status laporan	Saldo Awal Nilai Investasi Awal	Perolehan/ Penambahan Investasi	Penghasilan/Rugi Operasional	Kontribusi Kepada Program DJS	Delta Saldo Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali	Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
BPJS Ketenagakerjaan	*Unaudited* 2025	7,313,062,079,771	-	5,551,030,891	-	-	(201,499,373,884)	12,532,546,561,923	12,336,598,218,930
BPJS Kesehatan	*Audited* 2025	9,649,555,725,127	-	654,869,862,714	-	-	(52,823,967,065)	10,581,197,310,345	11,183,243,205,994

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PTNBH

No.	Investee	Status Laporan	Nilai Kekayaan Awal	Koreksi Nilai Kekayaan Awal	Surplus/(Defisit) Aktivitas	Surplus/(Defisit) Aktivitas untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/Penurunan Investasi dari aktivitas	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Pendapatan Komprehensif Lainnya untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/Penurunan Investasi dari Pendp. Komp. Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)=(5)+(8)+(11)+(12)
1	Institut Pertanian Bogor	2025 Audited	2,065,425,950,255	-	122,592,000,000	550,000,000	122,042,000,000	739,496,031	-	739,496,031	2,990,843,503,969	3,113,625,000,000
2	Universitas Airlangga	2025 Audited	1,580,878,299,810	-	(48,521,486,441)	21,745,034	(48,543,231,475)	(321,107,051)	-	(321,107,051)	3,591,352,850,630	3,542,488,512,104
3	Institut Teknologi Bandung	2025 Audited	1,480,261,453,553	-	(297,323,060,209)	(281,293,339)	(297,041,766,870)	12,859,655,432	-	12,859,655,432	2,205,593,497,050	1,921,411,385,612
4	Universitas Indonesia	2025 Unaudited	3,391,030,031,348	-	216,248,724,567	-	216,248,724,567	261,703,426	-	261,703,426	4,987,446,197,141	5,203,956,625,134
5	Universitas Gadjah Mada	2025 Audited	2,732,049,610,116	-	151,488,857,921	946,739,700	150,542,118,221	(1,128,714,198)	-	(1,128,714,198)	4,690,537,636,727	4,839,951,040,750
6	Universitas Pendidikan Indonesia	2025 Audited	1,260,368,332,545	-	44,167,193,100	262,706	44,166,930,394	336,078,000	-	336,078,000	1,337,549,025,053	1,382,052,033,447
7	Universitas Sumatera Utara	2025 Audited	1,914,901,341,726	-	76,131,236,078	(5,672,415)	76,136,908,493	(1,262,680,904)	-	(1,262,680,904)	1,974,779,275,696	2,049,653,503,285
8	Universitas Padjajaran	2025 Draft Audited	1,332,124,751,039	-	277,176,309,258	-	277,176,309,258	(11,869,312,111)	-	(11,869,312,111)	1,385,194,813,264	1,650,501,810,411
9	Universitas Diponegoro	2025 Audited	1,782,365,799,939	-	260,297,094,040	-	260,297,094,040	(7,929,664)	-	(7,929,664)	4,503,404,904,260	4,763,694,068,636
10	Universitas Hasanuddin	2025 Audited	2,046,177,096,397	-	75,239,317,173	28,577,685	75,210,739,488	1,189,105,085	-	1,189,105,085	2,653,554,569,612	2,729,954,414,185
11	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	2025 Audited	949,575,199,295	-	257,484,604,587	(1,306,947,185)	258,791,551,772	51,981,642	-	51,981,642	2,024,869,034,265	2,283,712,567,679
12	Universitas Sebelas Maret	2025 Audited	1,520,066,455,977	-	53,871,074,754	595,256	53,870,479,498	-	-	-	1,779,364,907,379	1,833,235,386,877
13	Universitas Negeri Malang	2025 Audited	1,846,612,548,097	-	181,561,700,798	-	181,561,700,798	6,967,484,445	-	6,967,484,445	2,142,369,181,646	2,330,898,366,889
14	Universitas Andalas	2025 Unaudited	1,493,595,705,524	-	51,443,580,674	32,410,572	51,411,170,102	125,185,974,836	-	125,185,974,836	1,401,297,719,035	1,577,894,863,973
15	Universitas Brawijaya	2025 Audited	3,422,807,945,353	-	198,252,244,091	(99,300)	198,252,343,391	35,286,100	-	35,286,100	3,821,445,509,872	4,019,733,139,363
16	Universitas Negeri Padang	2025 Draft Audited	1,846,612,548,097	-	85,227,676,448	-	85,227,676,448	153,914,469,009	-	153,914,469,009	1,403,755,330,398	1,642,897,475,855
17	Universitas Syiah Kuala	2025 Audited	1,532,599,687,465	-	45,545,979,282	18,740,688	45,527,238,594	5,925,594,111	-	5,925,594,111	1,590,623,277,520	1,642,076,110,225
18	Universitas Terbuka	2025 Audited	3,552,533,805,610	-	349,564,430,593	-	349,564,430,593	(14,855,965,907)	-	(14,855,965,907)	3,370,784,028,495	3,705,492,493,181
19	Universitas Negeri Surabaya	2025 Audited	1,677,983,220,365	-	138,098,190,148	17,432,254	138,080,757,894	(5,014,108,369)	-	(5,014,108,369)	1,977,372,725,959	2,110,439,375,484
20	Universitas Negeri Yogyakarta	2025 Unaudited	1,373,142,652,142	-	(1,745,236,661)	-	(1,745,236,661)	(382,555,919,906)	-	(382,555,919,906)	1,709,485,958,936	1,325,184,802,369
21	Universitas Negeri Semarang	2025 Unaudited	1,708,859,618,819	-	172,285,272,075	-	172,285,272,075	(45,535,695,750)	-	(45,535,695,750)	2,010,881,734,706	2,137,631,311,031
22	Universitas Negeri Jakarta	2025 Audited	1,604,209,065,767	-	126,111,013,237	-	126,111,013,237	1,642,443,309,725	-	1,642,443,309,725	-	1,768,554,322,962
23	Universitas Sriwijaya	2025 Draft Audited	1,468,564,983,364	-	54,841,526,967	-	54,841,526,967	1,468,564,983,364	-	1,468,564,983,364	-	1,523,406,510,331
TOTAL			43,582,746,102,603	-	2,590,038,242,480	22,491,656	2,590,015,750,824	2,955,923,687,346	-	2,955,923,687,346	53,552,505,681,613	59,098,445,119,783

MUTASI REKENING LAIN BI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MIGAS

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024 (*Audited*)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	**471.802.611**	**7.622.915**	**94.982.920**	**1.466.441**
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PNBP SDA Migas dan PNBP Lainnya	3.457.218.995	56.920.253	3.369.269.620	53.610.034
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI				
3. Penerimaan Lain-lain	99.957.890	1.668.800	36.172.466	586.645
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening				
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit		6.353.428		3.778.394
Total Penerimaan	**3.557.176.885**	**64.942.482**	**3.405.442.086**	**57.975.073**
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. PBB Migas ke DJP	523.967.785	8.515.142	542.513.135	8.377.866
b. Pajak Penerangan Jalan Non PLN & ABT ke Pemda	2.885.965	47.763	1.148.723	17.989
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
· Pendapatan dari PNBP SDA Migas	736.780.577	12.311.401	457.721.301	7.129.748
· Pendapatan dari PNBP Migas Lainnya	1.958.068	32.645	816.347	13.126
Subtotal Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/APBD	1.265.592.395	20.906.952	1.002.199.505	15.538.728
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
· Pembayaran Reimbursement PPN KKKS	449.395.573	7.432.138	580.978.473	9.108.884
· Pembayaran DMO Fee KKKS	474.945.874	7.824.553	534.349.150	8.498.254
· Pembayaran Underlifting KKKS	1.068.368.419	17.752.270	872.881.122	13.868.266
· Pembayaran Fee Penjual Migas	23.739.054	386.980	31.557.958	487.333
Subtotal Pengeluaran Non APBN/APBD	2.016.448.919	33.395.941	2.019.766.702	31.962.737
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI				
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening				
5. Pengeluaran Lainnya	166.305	2.706	6.656.188	107.131
6. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit		5.773.772		4.210.002
Total Pengeluaran	**3.282.207.619**	**60.079.371**	**3.028.622.395**	**51.818.599**
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	**274.969.266**	**4.863.111**	**376.819.691**	**6.156.473**
V. Saldo Akhir (I + IV)	**746.771.877**	**12.486.026**	**471.802.611**	**7.622.915**

MUTASI REKENING LAIN BI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PANAS BUMI

Uraian	31 Desember 2025 (*Audited*)	31 Desember 2024 (*Audited*)
I. Saldo Awal	**2.082.717.172.953**	**1.912.870.273.099**
II. Penerimaan:		
1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	3.428.621.827.061	3.610.596.954.925
2. Kekurangan Setoran Bagian Pemerintah Hasil Audit Internal PT GDE	5.014.923.472	-
3. Koreksi Pembukuan Kredit	-	-
Total Penerimaan	**3.433.636.750.533**	**3.610.596.954.925**
III. Pengeluaran:		
1. Pembayaran PBB Panas Bumi	478.123.083.225	447.695.185.254
2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi	434.158.800.646	179.482.201.175
3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum	99.955.532.581	106.361.907.798
4. Pemindahbukuan PNBP Pengusahaan Panas Bumi ke Rek. KUN	2.284.796.200.872	2.707.210.760.839
5. Koreksi Pembukuan debit	-	-
Total Pengeluaran	**3.297.033.617.324**	**3.440.750.055.066**
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	**136.603.133.209**	**169.846.899.859**
V. Saldo Akhir (I + IV)	**2.219.320.306.162**	**2.082.717.172.958**

REKAPITULASI PENGISIAN, PEMBAYARAN, DAN PENIHILAN RPATA

(Dalam Rupiah)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Nilai Kontrak	Tahun 2025			Saldo RPATA 2025	Tahun 2026		Saldo RPATA 2026
				SP2D Pengisian	SP2D Pembayaran (Neto)	SP2D Penihilan		SP2D Pembayaran (Neto)	SP2D Penihilan	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	14	15
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	38.847.281.524	12.825.931.886	2.770.177.661	-	10.055.754.225	10.007.891.628	47.862.597	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	280.090.957.632	130.520.432.434	-	-	130.520.432.434	130.520.432.434	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	132.531.186.310	36.420.079.475	1.092.054.955	-	35.328.024.520	35.328.024.520	-	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	281.935.797.006	63.032.191.154	15.344.247.451	-	47.687.943.703	47.068.923.618	619.020.085	-
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.568.566.854.580	1.284.974.396.383	6.423.497.568	-	1.278.550.898.815	1.277.815.849.206	735.049.609	-
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	771.590.650.200	560.538.178.612	1.500.676.000	-	559.037.502.612	554.298.818.302	4.738.684.310	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	838.872.630.809	229.426.433.867	1.179.229.940	-	228.247.203.927	227.929.832.511	317.371.416	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	99.802.547.012	22.606.899.076	302.808.000	-	22.304.091.076	22.233.857.427	70.233.649	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	2.551.722.078.575	851.365.919.424	1.024.715.400	-	850.341.204.024	850.338.615.797	2.588.227	-
10	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.883.508.219.539	440.925.152.177	35.767.194.506	11.425	405.157.946.246	396.162.598.547	8.995.347.699	-
11	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	8.687.878.971.578	6.550.863.011.106	27.967.416.485	144.642.040	6.522.750.952.581	3.824.386.839.775	2.698.364.112.806	-
12	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	158.443.369.949	47.378.991.966	6.365.852.667	-	41.013.139.299	40.290.299.780	722.839.519	-
13	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.442.117.775.469	3.798.741.680.309	15.276.310.734	-	3.783.465.369.575	2.821.446.478.780	962.018.890.795	-
14	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	4.752.546.434.164	1.346.696.626.560	37.476.009.549	195.797.236	1.309.024.819.775	1.137.966.296.011	171.058.523.764	-
15	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	3.371.682.857.560	1.959.340.886.878	505.672.739.334	3.927.650	1.453.664.219.894	1.216.189.146.438	237.475.073.456	-
16	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.354.300.458.853	540.158.997.298	63.106.311.950	-	477.052.685.348	462.455.846.005	14.596.839.343	-
17	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	146.154.913.240	56.772.441.937	1.537.241.255	9.380.000	55.225.820.682	55.004.005.936	221.814.746	-
18	027	KEMENTERIAN SOSIAL	183.446.347.805	147.427.229.359	19.961.301.015	3.102.252.817	124.363.675.527	124.304.980.837	58.694.690	-
19	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.673.498.440.450	1.694.088.948.859	84.369.263.886	585.880.911	1.609.133.804.062	1.597.949.296.305	11.184.507.757	-
20	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	15.400.523.918	3.267.868.275	-	-	3.267.868.275	3.237.339.626	30.528.649	-
21	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	11.673.886.200	2.494.254.000	-	-	2.494.254.000	2.494.254.000	-	-
22	041	BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	69.333.515.195	30.736.718.163	156.999.843	-	30.579.718.320	28.006.511.048	2.573.207.272	-
23	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.519.114.496	201.412.879	-	-	201.412.879	201.412.879	-	-
24	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	9.136.923.886	3.893.353.386	-	-	3.893.353.386	3.869.412.018	23.941.368	-
25	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	236.461.416.864	27.212.510.778	-	-	27.212.510.778	27.212.510.778	-	-
26	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	76.041.835.052	46.927.971.214	1.339.770.000	-	45.588.201.214	45.588.016.774	184.440	-
27	054	BADAN PUSAT STATISTIK	121.126.458.391	42.173.434.593	681.187.035	-	41.492.247.558	39.841.547.642	1.650.699.916	-
28	055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	78.645.204.073	18.525.959.978	-	-	18.525.959.978	18.153.626.465	372.333.513	-
29	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	186.798.868.379	63.351.646.903	23.068.906.285	69.913.800	40.212.826.818	39.804.010.324	408.816.494	-
30	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	34.631.080.831	8.373.161.622	-	-	8.373.161.622	8.373.161.622	-	-
31	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	227.953.947.473	117.474.750.208	7.151.441.143	-	110.323.309.065	105.099.173.290	5.224.135.775	-
32	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.413.167.704.723	1.959.408.983.034	15.254.463.996	143.968.850	1.944.010.550.188	1.938.251.806.023	5.758.744.165	-
33	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	90.315.346.110	10.212.343.463	648.588.755	-	9.563.754.708	9.534.829.963	28.924.745	-
34	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	6.786.240.181	6.137.290.534	-	-	6.137.290.534	6.137.290.534	-	-
35	065	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	173.069.958.762	62.386.245.915	1.342.780.000	-	61.043.465.915	61.007.482.674	35.983.241	-
36	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	25.183.393.214	11.829.108.566	84.280.000	-	11.744.828.566	11.525.973.866	218.854.700	-
37	068	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	11.976.853.236	4.801.039.758	1.372.884.822	-	3.428.154.936	3.424.462.458	3.692.478	-
38	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.544.432.000	869.512.000	-	-	869.512.000	869.512.000	-	-
39	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	205.416.785.647	77.859.286.651	1.440.752.588	-	76.418.534.063	76.319.854.824	98.679.239	-
40	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	14.845.423.838	7.513.197.958	2.982.444.055	-	4.530.753.903	4.530.753.903	-	-
41	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	18.887.160.520	5.019.798.683	-	-	5.019.798.683	4.988.668.368	31.130.315	-
42	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	27.666.304.566	6.441.940.605	75.510.000	-	6.366.430.605	5.138.262.337	1.228.168.268	-
43	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	33.940.482.148	7.474.873.925	207.977.748	24.843.132	7.242.053.045	7.242.053.045	-	-
44	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)	21.143.017.328	20.730.430.328	8.726.943.788	-	12.003.486.540	12.003.486.540	-	-
45	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	6.382.039.215	3.661.362.290	1.133.489.850	-	2.527.872.440	2.527.872.440	-	-
46	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	27.065.132.186	5.105.131.080	1.248.736.125	-	3.856.394.955	3.856.394.955	-	-
47	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	4.053.375.279	1.613.775.211	487.095.427	-	1.126.679.784	1.126.679.784	-	-
48	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	114.221.012.762	54.898.182.248	7.215.016.464	-	47.683.165.784	47.493.285.619	189.880.165	-

REKAPITULASI PENGISIAN, PEMBAYARAN, DAN PENIHILAN RPATA

(Dalam Rupiah)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Nilai Kontrak	Tahun 2025			Saldo RPATA 2025	Tahun 2026		Saldo RPATA 2026
				SP2D Pengisian	SP2D Pembayaran (Neto)	SP2D Penihilan		SP2D Pembayaran (Neto)	SP2D Penihilan	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	14	15
49	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	82.517.112.267	28.729.737.699	639.191.000	-	28.090.546.699	28.070.632.700	19.913.999	-
50	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	30.718.097.812	8.973.753.142	715.373.500	60.000.000	8.198.379.642	8.186.979.642	11.400.000	-
51	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	104.544.067.664	22.936.586.822	137.145.000	-	22.799.441.822	22.046.587.614	752.854.208	-
52	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	11.876.626.487	2.951.447.901	-	-	2.951.447.901	2.687.408.905	264.038.996	-
53	100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	21.041.393.076	2.961.600.584	-	-	2.961.600.584	2.961.600.584	-	-
54	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	30.601.494.771	13.777.925.138	9.884.964.507	-	3.892.960.631	3.892.960.631	-	-
55	104	KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	23.812.866.533	7.331.981.013	4.616.757.452	171.685.500	2.543.538.061	2.520.815.911	22.722.150	-
56	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	12.398.518.708	945.584.258	-	-	945.584.258	945.584.258	-	-
57	107	BADAN SAR NASIONAL	160.395.931.725	80.013.619.566	1.125.510.306	-	78.888.109.260	78.886.859.260	1.250.000	-
58	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	5.260.795.091	3.342.328.817	-	-	3.342.328.817	3.342.328.817	-	-
59	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	4.155.630.634	836.639.069	-	-	836.639.069	836.639.069	-	-
60	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	25.373.354.409	5.062.867.407	559.107.500	-	4.503.759.907	4.503.759.907	-	-
61	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	23.500.502.173	21.922.738.497	2.679.473.210	-	19.243.265.287	19.243.265.287	-	-
62	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	46.073.075.332	19.093.350.954	1.588.453.378	-	17.504.897.576	17.504.897.576	-	-
63	117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	87.714.862.688	53.291.151.734	5.173.963.469	-	48.117.188.265	48.056.440.311	60.747.954	-
64	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)	1.985.311.000	191.962.700	-	-	191.962.700	191.962.700	-	-
65	119	BADAN KEAMANAN LAUT	217.814.933.231	48.158.879.736	-	-	48.158.879.736	48.158.879.736	-	-
66	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	8.333.718.567	1.758.980.382	-	-	1.758.980.382	1.758.980.382	-	-
67	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	22.071.438.745	2.282.179.388	-	-	2.282.179.388	2.282.179.388	-	-
68	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	509.927.609.180	194.048.674.590	83.000.000	-	193.965.674.590	192.970.740.985	994.933.605	-
69	125	BADAN PANGAN NASIONAL	12.835.794.952.000	7.275.560.395.795	-	-	7.275.560.395.795	5.704.395.914.314	1.571.164.481.481	-
70	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	5.090.095.124.093	585.708.128.153	3.296.014.893	-	582.412.113.260	531.127.364.883	51.284.748.377	-
71	127	BADAN KARANTINA INDONESIA	12.596.618.163	3.812.575.552	1.865.279.397	-	1.947.296.155	1.838.516.155	108.780.000	-
72	128	BADAN GIZI NASIONAL	2.461.867.250.680	1.961.665.028.997	-	-	1.961.665.028.997	1.621.039.158.501	340.625.870.496	-
73	129	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	1.827.623.282	1.827.623.282	-	-	1.827.623.282	1.827.623.282	-	-
74	131	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	858.020.800	568.706.675	-	-	568.706.675	568.706.675	-	-
75	134	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23.983.414.540	11.632.431.013	-	-	11.632.431.013	11.554.256.450	78.174.563	-
76	135	KEMENTERIAN HUKUM	479.618.328.647	125.878.809.911	1.412.343.697	-	124.466.466.214	124.297.149.991	169.316.223	-
77	136	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	11.501.743.962	2.979.176.978	1.113.454.851	-	1.865.722.127	1.865.722.127	-	-
78	137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	3.433.038.144.833	871.093.281.079	57.866.460.051	1.765.859.578	811.460.961.450	791.924.625.561	19.536.335.889	-
79	138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	10.201.454.129.141	2.461.294.490.134	10.513.959.971	11	2.450.780.530.152	2.314.778.923.240	136.001.606.912	-
80	139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	616.453.078.991	234.866.760.982	27.328.344.427	39.049.800	207.499.366.755	193.255.523.751	14.243.843.004	-
81	140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	122.180.705.403	82.333.071.616	37.934.521.356	-	44.398.550.260	44.398.550.260	-	-
82	141	KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH	12.711.478.929	12.711.478.929	-	-	12.711.478.929	12.711.478.929	-	-
83	142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	2.234.819.832	558.704.958	-	-	558.704.958	558.704.958	-	-
84	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	49.397.021.130	10.167.642.183	2.601.532.596	-	7.566.109.587	7.566.109.587	-	-
85	144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	4.366.321.749	3.657.592.399	-	-	3.657.592.399	3.657.592.399	-	-
86	145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	31.859.506.861.139	7.853.027.345.352	203.432.070.532	243.558.929	7.649.351.715.891	6.940.051.507.691	709.300.208.200	-
87	146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	341.351.343.131	71.372.881.557	10.571.139.455	-	60.801.742.102	55.351.169.547	5.450.572.555	-
88	147	KEMENTERIAN PARIWISATA	88.562.297.422	17.355.161.197	4.359.363.879	-	12.995.797.318	12.995.797.318	-	-
89	148	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	284.500.000	170.700.000	170.700.000	-	-	-	-	-
90	149	KEMENTERIAN KOPERASI	30.660.423.095	14.353.694.173	5.811.857.370	-	8.541.836.803	8.541.836.803	-	-
91	150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	39.482.867.499	19.178.207.420	1.237.483.500	-	17.940.723.920	17.940.723.920	-	-
92	151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	39.475.554.287	24.390.238.526	4.101.291.400	-	20.288.947.126	19.753.896.482	535.050.644	-
93	152	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	377.078.930.288	190.526.802.791	13.685.940.924	-	176.840.861.867	172.919.503.043	3.921.358.824	-
94	99908	PPA BUN PENGELOLA BELANJA LAINNYA	340.939.018.046	66.355.565.511	5.417.946.656	1.823.703.865	59.113.914.990	52.283.390.480	6.830.524.510	-
95	99999	PPA BUN PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS	24.591.057.938	23.703.252.188	-	-	23.703.252.188	23.703.252.188	-	-
Grand Total			113.415.954.177.841	44.830.061.709.756	1.321.678.960.557	8.384.475.544	43.499.998.273.655	36.509.514.181.854	6.990.484.091.801	-

Catatan:

REKAPITULASI PENGISIAN, PEMBAYARAN, DAN PENIHILAN RPATA

(Dalam Rupiah)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Nilai Kontrak	Tahun 2025			Saldo RPATA 2025	Tahun 2026		Saldo RPATA 2026
				SP2D Pengisian	SP2D Pembayaran (Neto)	SP2D Penihilan		SP2D Pembayaran (Neto)	SP2D Penihilan	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	14	15

Merupakan rekapitulasi SP2D Pengisian, Pembayaran dan Penihilan RPATA dengan tahun RPATA 2025
Data aplikasi OMSPAN per 13 Maret 2026

DAFTAR PINJAMAN ISDB *CLOSING DATE* (SELESAI) DAN *ON GOING* (MASIH BERJALAN)

No.	No Referensi	Nama Proyek	Modalitas	Kementerian / Lembaga	No Register	*Loan Id*	Tanggal Penandatangan Perjanjian	Tanggal Batas Penarikan	Mata Uang	Nilai Komitmen	Pembatalan (*Cancellation*)	Penarikan	Pembayaran	Saldo Utang (*Outstanding*)	Tatacara Penarikan
Pinjaman *closing date* di 2025															
1	IDN-1012	Development of Trans South-South Java Road Project	Service Ijarah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1SMHNPCA	20999016	16 May 2017	3 Feb 2024	USD	15,000,000.00	4,178,350.56	10,821,649.44	541,082.47	10,280,566.97	Pembayaran Langsung
2	IDN-1012	Development of Trans South-South Java Road Project	Istisna'a	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1NQ47EHA	20999017	16 May 2017	2 Feb 2024	USD	235,000,000.00	36,674,350.44	198,325,649.56	9,916,282.48	188,409,367.08	Pembayaran Langsung
Pinjaman *on going* di 2025															
1	IDN-1024	The Development of Integrated Farming Systems in Upland Areas	ISFD Loan	Kementerian Pertanian	1P4VGA4A	20999018	15 Jan 2020	31 Dec 2026	USD	4,000,000.00		1,861,552.00		1,861,552.00	Rekening Khusus
2	IDN-1024	The Development of Integrated Farming Systems in Upland Areas	Installment Sale	Kementerian Pertanian	1FXSV52A	20999019	15 Jan 2020	31 Dec 2026	USD	66,000,000.00		38,764,569.00		38,764,569.00	Rekening Khusus
3	IDN-1031	Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospitals, and Vertical Technical Units-6in1 Referral Hospital	Installment Sale	Kementerian Kesehatan	1NAPT2PA	20999020	8 Dec 2020	19 Jun 2026	USD	12,153,000.00		3,786,379.30 777,291.32 3,009,087.98		3,786,379.30	Pembayaran Langsung dan Rekening Khusus Rekening Khusus Pembayaran Langsung
4	IDN-1031	Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospitals, and Vertical Technical Units-6in1 Referral Hospital	Installment Sale	Kementerian Kesehatan	17AFHKXA	20999021	8 Dec 2020	30 Sep 2026	USD	154,239,000.00		151,566,276.29 - 151,566,276.29		151,566,276.29	Pembayaran Langsung dan Rekening Khusus Pembayaran Langsung
5	IDN-1031	Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospitals, and Vertical Technical Units-6in1 Referral Hospital	Installment Sale	Kementerian Kesehatan	1SF4H9CA	20999022	8 Dec 2020	29 Aug 2027	USD	95,326,000.00		80,811,444.89 - 80,811,444.89		80,811,444.89	Pembayaran Langsung dan Rekening Khusus Rekening Khusus Pembayaran Langsung
6	IDN-1053	Development of Trans South-South Java Road Project Phase II	Installment Sale	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1QJNFXTA	20999023	4 Jun 2022	22 Sep 2027	USD	150,000,000.00		67,759,823.86		67,759,823.86	Pembayaran Langsung
7	IDN-1054	Strengthening of National Referral Hospital on Oncology Center	Ijarah	Kementerian Kesehatan	15A3839A	20999024	8 Feb 2023	22 Aug 2028	EUR	205,002,000.00		60,197,713.40 1,153,640.24 59,044,073.16		60,197,713.40	Pembayaran Langsung dan Rekening Khusus Rekening Khusus Pembayaran Langsung
8	IDN-1055	Integrated Fishing Ports and International Fish Markets	Ijarah	Kementerian Kelautan dan	144HG51A	20999025	8 Feb 2023	26 Feb 2028	EUR	100,000,000.00		1,269,599.49 940,431.40 329,168.09		1,269,599.49	Pembayaran Langsung Rekening Khusus Pembayaran Langsung
9	IDN-1070	Strengthening Indonesia's Health Care Referral	Installment Sale	Kementerian Kesehatan	1CHPFTXA	20999026	31 Jan 2024	27 Aug 2029	EUR	803,300,000.00		527,283.03 369,331.40 157,951.63		527,283.03	Pembayaran Langsung dan Rekening Khusus Rekening Khusus Pembayaran Langsung

PENGALIHAN SAHAM SERI B DAN/ATAU SERI C MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA 52 PERUSAHAAN NEGARA KEPADA *HOLDING* OPERASIONAL

No	BUMN	Jenis Saham	Lembar Saham	Nilai Saham yang Dialihkan (Rp)	
1	PT Pertamina	Seri B	176.754.416	Rp	176.754.416.000.000
2	PT Perusahaan Listrik Negara	Seri B	150.536.095	Rp	150.536.095.000.000
3	PT Mineral Industri Indonesia	Seri B	119.090.864	Rp	119.090.864.000.000
4	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Seri B	80.610.976.875	Rp	4.030.548.843.750
5	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Seri B	434.012.799	Rp	1.627.547.996.250
		Seri C	21.944.374.950	Rp	4.114.570.303.125
6	PT Bank Mandiri Tbk	Seri B	48.533.333.333	Rp	6.066.666.666.625
7	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Seri B	8.420.666.647	Rp	4.210.333.323.500
8	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Seri B	51.602.353.559	Rp	2.580.117.677.950
9	PT Aviasi Pariwisata Indonesia	Seri B	78.656.757	Rp	78.656.757.000.000
10	PT Perkebunan Nusantara III	Seri B	40.216.131	Rp	40.216.131.000.000
11	PT Kereta Api Indonesia	Seri B	24.368.742	Rp	24.368.742.000.000
12	PT Industri Kereta Api	Seri B	2.216.842	Rp	2.216.842.000.000
13	PT Pos Indonesia	Seri B	455.022	Rp	455.022.000.000
14	PT Garuda Indonesia Tbk	Seri B	15.670.777.620	Rp	7.192.886.927.580
		Seri C	43.367.346.782	Rp	8.499.999.969.272
15	PT Pelabuhan Indonesia	Seri B	40.575.583	Rp	40.575.583.000.000
16	PT ASDP Indonesia Ferry	Seri B	5.561.759	Rp	5.561.759.000.000
17	PT Pelayaran Nasional Indonesia	Seri B	9.129.899	Rp	9.129.899.000.000
18	PT Danareksa	Seri B	18.332.899	Rp	18.332.899.000.000
19	PT Bio Farma	Seri B	17.481.278	Rp	17.481.278.000.000
20	PT Jasa Marga Tbk	Seri B	5.080.509.839	Rp	2.540.254.919.500
21	PT Semen Indonesia Tbk	Seri B	3.457.023.004	Rp	345.702.300.400
22	PT Krakatau Steel Tbk	Seri B	15.477.117.519	Rp	7.738.558.759.500
23	PT Len Industri	Seri B	21.850.574	Rp	21.850.574.000.000
24	PT Varuna Tirta Prakasya	Seri B	10.999	Rp	10.999.000.000
25	PT Hutama Karya	Seri B	131.645.999	Rp	131.645.999.000.000
26	PT Waskita Karya Tbk	Seri B	21.705.633.361	Rp	2.170.563.336.100
27	PT Adhi Karya Tbk	Seri B	5.408.773.791	Rp	540.877.379.100
28	PT Wijaya Karya Tbk	Seri B	36.291.702.780	Rp	3.629.170.278.000
29	PT Pembangunan Perumahan Tbk	Seri B	3.161.947.835	Rp	316.194.783.500
30	PT Brantas Abipraya	Seri B	373.536	Rp	373.536.000.000
31	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Seri B	93.719.536	Rp	93.719.536.000.000
32	PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri	Seri B	499.999	Rp	499.999.000.000
33	PT Reasuransi Indonesia Utama	Seri B	878.357	Rp	878.357.000.000
34	PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Seri B	199.999	Rp	199.999.000.000
35	PT Pupuk Indonesia	Seri B	24.999.999	Rp	24.999.999.000.000
36	PT Rajawali Nusantara Indonesia	Seri B	12.898.182	Rp	12.898.182.000.000
37	PT Agrinas Jaladri Nusantara	Seri B	24.999	Rp	24.999.000.000
38	PT Agrinas Pangan Nusantara	Seri B	49.999	Rp	49.999.000.000
39	PT Agrinas Palma Nusantara	Seri B	10.000	Rp	10.000.000.000
40	PT Amarta Karya	Seri B	44.284	Rp	44.284.000.000
41	PT Boma Bisma Indra	Seri B	340.915	Rp	340.915.000.000
42	PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari	Seri B	976.146	Rp	976.146.000.000
43	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Seri B	240.935	Rp	240.935.000.000
44	PT Industri Telekomunikasi Indonesia	Seri B	349.999	Rp	349.999.000.000
45	PT PDI Pulau Batam	Seri B	18.999	Rp	18.999.000.000
46	PT Primissima	Seri B	6.863	Rp	6.863.000.000
47	PT Produksi Film Negara	Seri B	54.903	Rp	54.903.000.000
48	PT Semen Kupang	Seri B	82.213	Rp	82.213.000.000
49	PT Industri Kapal Indonesia	Seri B	456.693	Rp	456.693.000.000
50	PT Rekayasa Industri	Seri B	22.366	Rp	22.366.000.000

PENGALIHAN SAHAM SERI B DAN/ATAU SERI C MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA 52 PERUSAHAAN NEGARA KEPADA *HOLDING* OPERASIONAL

No	BUMN	Jenis Saham	Lembar Saham	Nilai Saham yang Dialihkan (Rp)	
51	PT Perkebunan Nusantara I	Seri B	946.238	Rp	946.238.000.000
52	PT Perkebunan Nusantara IV	Seri B	593.846	Rp	593.846.000.000
Total			**362.141.223.559**	**Rp**	**1.030.276.858.464.150**

DAFTAR BUMN PERSERO DI BAWAH HOLDING OPERASIONAL PASCA PERISTIWA AKSI KORPORASI

No	Nama Perusahaan	Jumlah Saham RI	% Saham RI	Jumlah Saham PT DAM (Rp)	% Saham PT DAM
1	PT Pertamina (Persero)	1	0,00%	176.754.416	100,00%
2	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	0,00%	150.536.095	100,00%
3	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	1	0,00%	119.090.864	100,00%
4	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1	0,00%	80.610.976.875	53,19%
5	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	0,00%	22.378.387.749	60,07%
6	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	0,00%	48.533.333.333	52,00%
7	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1	0,00%	8.420.666.647	60,00%
8	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1	0,00%	51.602.353.559	52,09%
9	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	1	0,00%	78.656.757	100,00%
10	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	0,00%	40.216.131	100,00%
11	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	0,00%	24.368.742	100,00%
12	PT Industri Kereta Api (Persero)	1	0,00%	2.216.842	100,00%
13	PT Pos Indonesia (Persero)	1	0,00%	455,022	100,00%
14	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1	0,00%	59.038.124.402	64,54%
15	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1	0,00%	40.575.583	100,00%
16	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1	0,00%	5.561.759	100,00%
17	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	0,00%	9.129.899	100,00%
18	PT Danareksa (Persero)	1	0,00%	18.332.899	100,00%
19	PT Bio Farma (Persero)	1	0,00%	17.481.278	100,00%
20	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1	0,00%	5.080.509.839	70,00%
21	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1	0,00%	3.457.023.004	51,20%
22	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1	0,00%	15.477.117.519	80,00%
23	PT Len Industri (Persero)	1	0,00%	21.850.574	100,00%
24	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	1	0,01%	10,999	99,99%
25	PT Hutama Karya (Persero)	1	0,00%	131.645.999	100,00%
26	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1	0,00%	21.705.633.361	75,35%
27	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1	0,00%	5.408.773.791	64,33%
28	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1	0,00%	36.291.702.780	91,02%
29	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	1	0,00%	3.161.947.835	51,00%
30	PT Brantas Abipraya (Persero)	1	0,00%	373,536	100,00%
31	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	1	0,00%	93.719.536	100,00%
32	PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1	0,00%	499,999	100,00%
33	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	1	0,00%	878,357	100,00%
34	PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)	1	0,00%	199,999	100,00%
35	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1	0,00%	24.999.999	100,00%
36	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	1	0,00%	12.898.182	100,00%
37	PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)	1	0,00%	24,999	100,00%
38	PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)	1	0,00%	49,999	100,00%
39	PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)	1	0,01%	10	99,99%
40	PT Amarta Karya (Persero)	1	0,00%	44,284	100,00%
41	PT Boma Bisma Indra (Persero)	1	0,00%	340,915	100,00%
42	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	1	0,00%	976,146	99,95%
43	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	1	0,00%	240,935	100,00%

DAFTAR BUMN PERSERO DI BAWAH HOLDING OPERASIONAL PASCA PERISTIWA AKSI KORPORASI

No	Nama Perusahaan	Jumlah Saham RI	% Saham RI	Jumlah Saham PT DAM (Rp)	% Saham PT DAM
44	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	1	0,00%	349,999	100,00%
45	PT PDI Pulau Batam (Persero)	1	0,01%	18,999	99,99%
46	PT Primissima (Persero)	-	0,00%	6,863	52,79%
47	PT Produksi Film Negara (Persero)	1	0,00%	54,903	100,00%
48	PT Semen Kupang (Persero)	-	0,00%	82,213	61,48%
49	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	1	0,00%	456,693	100,00%
50	PT Rekayasa Industri	-	0,00%	22,366	0,89%
51	PT Perkebunan Nusantara I	1	0,00%	946,238	10,58%
52	PT Perkebunan Nusantara IV	1	0,00%	593,846	7,07%
53	PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero)	1	0,00%	16.087.698	100,00%

DAFTAR PERUSAHAAN NEGARA YANG DICATAT DALAM ILKPN

No	Nama Entitas	Status	Keterangan
1	BPI Danantara	BPI Danantara	Kepemilikan 99% Saham Seri B PT DAM dan 100% Saham PT DIM
2	PT Danantara Asset Management*	Holding Operasional	Kepemilikan Negara 1% Saham Seri A Dwiwarna
3	Perum Perhutani	Perum	Kepemilikan Negara 100%
4	Perum Bulog	Perum	Kepemilikan Negara 100%
5	Perum Jasa Tirta I	Perum	Kepemilikan Negara 100%
6	Perum Jasa Tirta II	Perum	Kepemilikan Negara 100%
7	Perum PNRI	Perum	Kepemilikan Negara 100%
8	Perum Peruri	Perum	Kepemilikan Negara 100%
9	Perum LKBN Antara	Perum	Kepemilikan Negara 100%
10	Perum Perumnas	Perum	Kepemilikan Negara 100%
11	Perum Damri	Perum	Kepemilikan Negara 100%
12	Perum LPPNPI	Perum	Kepemilikan Negara 100%
13	PT Barata Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan Negara 100%
14	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	BUMN	Kepemilikan Negara 100%
15	PT Indah Karya (Persero)	BUMN	Kepemilikan Negara 100%
16	PT Djakarta Lloyd (Persero)	BUMN	Kepemilikan Negara 78,65%
17	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
18	PT Perikanan Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
19	PT Berdikari	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
20	PT Sang Hyang Seri	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
21	PT Garam	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
22	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
23	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
24	PT Perkebunan Nusantara I	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
25	PT Perkebunan Nusantara IV	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
26	PT Pupuk Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
27	PT Petrokimia Gresik	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
28	PT Pupuk Kalimantan Timur	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
29	PT Pupuk Kujang	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
30	PT Pupuk Iskandar Muda	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
31	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
32	PT Bio Farma (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
33	PT Indofarma Tbk	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
34	PT Kimia Farma Tbk	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
35	PT Industri Nuklir Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
36	PT Pertamina (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
37	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
38	PT Pos Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
39	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
40	PT Energy Management Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
41	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
42	PT Semen Baturaja Tbk	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
43	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
44	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
45	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
46	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
47	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
48	PT Bukit Asam Tbk	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
49	PT Timah Tbk	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
50	PT Aneka Tambang Tbk	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
51	PT Indonesia Asahan Aluminium	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna

DAFTAR PERUSAHAAN NEGARA YANG DICATAT DALAM ILKPN

No	Nama Entitas	Status	Keterangan
52	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
53	PT Boma Bisma Indra (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
54	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
55	PT LEN Industri (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
56	PT Dahana	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
57	PT Pindad	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
58	PT Dirgantara Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
59	PT PAL Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
60	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
61	PT Amarta Karya (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
62	PT Brantas Abipraya (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
63	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
64	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
65	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
66	PT Hutama Karya (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
67	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
68	PT Industri Kereta Api (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
69	PT PDI Pulau Batam (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
70	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
71	PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) (d/h PT Virama Karya (Persero))	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
72	PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) (d/h PT Yodya Karya (Persero))	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
73	PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) (d/h PT Indra Karya (Persero))	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
74	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
75	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
76	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
77	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
78	PT Pegadaian	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
79	PT Permodalan Nasional Madani	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
80	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
81	PT ASABRI (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
82	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
83	PT Taspen (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
84	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
85	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
86	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
87	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
88	PT Asuransi Jasa Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
89	PT Jasa Raharja	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
90	PT Jaminan Kredit Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
91	PT Asuransi Kredit Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
92	PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
93	PT Sucofindo	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
94	PT Surveyor Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
95	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
96	PT Danareksa (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
97	PT Nindya Karya	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
98	PT Kawasan Berikat Nusantara	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
99	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
100	PT Kawasan Industri Medan	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
101	PT Kawasan Industri Makassar	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna

DAFTAR PERUSAHAAN NEGARA YANG DICATAT DALAM ILKPN

No	Nama Entitas	Status	Keterangan
102	PT Balai Pustaka	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
103	PT Kliring Berjangka Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
104	PT Perusahaan Pengelola Aset	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
105	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
106	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
107	PT Hotel Indonesia Natour	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
108	PT Sarinah	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
109	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
110	PT Angkasa Pura Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
111	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
112	PT Perminas (Persero) (d/h PT Varuna Tirta Prakasya (Persero))**	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
113	PT Produksi Film Negara (Persero)	BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
114	PT Inhutani I (Persero)	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
115	PT Inhutani V (Persero)	Anak Usaha BUMN	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna
116	PT PANN Pembiayaan Maritim***	Penyertaan Modal Negara	Kepemilikan 1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna

Catatan:

**PT Danantara Asset Management (Persero) masih dimiliki secara langsung melalui BP BUMN sebanyak 1% saham seri A Dwiwarna pada tanggal 31 Desember 2025 dikarenakan pengalihan saham atas PT DAM dari BP BUMN kepada BPI Danantara terjadi pada tanggal 5 Januari 2026 melalui Perjanjian Pengalihan 1% Saham Milik Negara Republik Indonesia Berupa Saham Seri A Dwiwarna pada PT Danantara Asset Management (Persero) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Nomor PERJ-2/BPU/01/2026 dan KPPS PT Danantara Asset Management (Persero) Nomor 41 Tahun 2026 dan Nomor SK.01/DI-BP/I/2026.*

***PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) telah berubah nama menjadi PT Perusahaan Mineral Nasional atau disingkat PT Perminas (Persero) berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tentang Persetujuan Perubahan Nama. Maksud. Tujuan. Kegiatan Usaha. dan Anggaran Dasar PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor 09.- tanggal 11 November 2025.*

**** Telah dilaksanakan RUPS Pembubaran PT PANN Pembiayaan Maritim pada tanggal 1 November 2024.*

Entitas yang Dicatat dengan Metode Biaya

No	Nama Entitas	Status	Keterangan
1	PT Indosat Tbk	Penyertaan Modal Negara	Kepemilikan Saham Seri A namun tidak memiliki hak istimewa sesuai UU 16 Tahun 2025
2	PT Asean Bintulu Fertilizer	Penyertaan Modal Negara	Kepemilikan Negara 13%

SETORAN DIVIDEN BUMN KE KAS NEGARA DAN PT DAM (PERSERO)

No	BUMN	Dividen Disetor ke Negara		Dividen ke PT DAM	
Tahun Anggaran 2025					
Dividen Tahun Buku 2023					
1	PT Angkasa Pura II	Rp	50.684	Rp	-
Dividen Interim Tahun Buku 2024					
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Rp	10.882.481.878.260	Rp	-
Dividen Tahun Buku 2024					
1	Perum Jasa Tirta II	Rp	18.958.000.000	Rp	-
2	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Rp	16.740.811.007	Rp	-
3	Perum Jasa Tirta I	Rp	7.355.727.062	Rp	-
4	PT Danantara Asset Management (Persero) (eks PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero))	Rp	4.658.346.933	Rp	-
5	PT Surveyor Indonesia	Rp	4.968.312	Rp	-
6	PT Sucofindo	Rp	922.118	Rp	-
7	PT Pegadaian	Rp	468.080	Rp	-
8	PT Dahana	Rp	432.000	Rp	-
9	PT Pertamina (Persero)	Rp	262.039	Rp	42.105.870.149.529
10	PT Perkebunan Nusantara IV	Rp	186.071	Rp	110.497.709.668
11	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	Rp	185.594	Rp	20.093.266.981.278
12	PT Pos Indonesia (Persero)	Rp	181.365	Rp	76.412.257.353
13	PT Indonesia Asahan Aluminium	Rp	168.160		-
14	PT Petrokimia Gresik	Rp	161.511		-
15	PT Jasa Raharja	Rp	143.821		-
16	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Rp	129.604	Rp	2.945.555.114.390
17	PT Jaminan Kredit Indonesia	Rp	88.429		-
18	PT Pupuk Kujang Cikampek	Rp	82.262		-
19	PT Angkasa Pura Indonesia	Rp	74.569		-
20	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Rp	46.108	Rp	1.700.765.839.084
21	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Rp	30.732		-
22	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Rp	24.044	Rp	3.351.351.977.737
23	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Rp	9.097	Rp	650.511.733.460
24	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Rp	8.894	Rp	44.964.073.408
25	PT Pupuk Iskandar Muda	Rp	7.946		-
26	PT Bukit Asam Tbk	Rp	1.662		-
27	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp	467	Rp	22.625.480.128.248
28	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rp	375	Rp	8.370.803.422.346
29	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Rp	237	Rp	10.963.771.927.185
30	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rp	209	Rp	16.799.327.580.750

SETORAN DIVIDEN BUMN KE KAS NEGARA DAN PT DAM (PERSERO)

No	BUMN	Dividen Disetor ke Negara		Dividen ke PT DAM	
31	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Rp	204		-
32	PT Pupuk Kalimantan Timur	Rp	183		-
33	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Rp	175	Rp	793.723.936.934
34	PT Aneka Tambang Tbk	Rp	164		-
35	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Rp	106	Rp	332.618.159.734
36	PT Timah Tbk	Rp	64		-
37	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rp	54	Rp	451.099.154.033
38	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Rp	26		-
39	PT Semen Baturaja Tbk	Rp	3		-
Dividen Interim Tahun Buku 2025					
1	PT Danantara Asset Management (Persero) - Interim Pertama	Rp	551.061.427.892	Rp	-
2	PT Danantara Asset Management (Persero) - Interim Kedua	Rp	253.341.653.067	Rp	-
Total		**Rp**	**11.734.606.479.590**	**Rp**	**131.416.020.145.137**

DAFTAR BUMN BELUM MELAKUKAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN *AUDITED*

No	BUMN	KAP	Penjelasan
1	PT Danareksa (Persero)	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Pembentukan tambahan CKPN dan Entitas anak *streamlining* (*discontinued operation* PSAK 105)
2	PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Menunggu *approval* BP BUMN sehubungan *cost allocation* untuk pengelolaan lahan sitaan
3	PT Bio Farma (Persero)	KAP Heliantono & Rekan	LK berpotensi mengalami *restatement* dan/atau *impairment* yang material/signifikan. Penurunan nilai investasi terkait issue *going concern.*
4	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Menunggu pemeriksaan *backlog* IMO 2024 dari BPKP
5	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Reviu revaluasi properti investasi dan aktuaria pada seluruh Anper
6	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Dalam proses penyelesaian reviu atas kontrak asuransi pada entitas anak
7	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan	LK yang berdampak dengan adanya penerapan PSAK 117
8	PT Pos Indonesia (Persero)	KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan	-
9	PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)	Belum ditetapkan	Proses penunjukan KAP
10	PT Amarta Karya (Persero)	N/A	-
11	PT Boma Bisma Indra (Persero)	KAP Heliantono & Rekan	-
11	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Proses penunjukan KAP
12	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	-
13	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	-
14	PT PDI Pulau Batam (Persero)	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	-
15	PT Primissima (Persero)	N/A	-
16	PT Semen Kupang (Persero)	N/A	-
17	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	N/A	Proses penunjukan KAP

RINCIAN PORTOFOLIO KEWAJIBAN PENJAMINAN AKTIF PER PROGRAM PENJAMINAN

No	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor (Tahun) *	Nilai Penjaminan Kredit/Investasi (miliar)			Posisi *Outstanding* Kredit/ *Exposure* Investasi (miliar)		
						Original Curr.		Eq. IDR	Original Curr.		Eq. IDR
1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	PT PLN (Persero)	Perbankan	0	10 s.d. 15	IDR	-	-	IDR	-	-
						USD	-		USD	-	
2	Penyediaan Air Minum **	PDAM	Perbankan	4	6 s.d. 13	IDR	304.56	304.56	IDR	229.75	229.75
3	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	BUMN	Lembaga Keuangan Internasional	18	15 s.d. 35	USD	5.93	120,897.17	USD	1.53	59,151.71
						EUR	1.08		EUR	0.95	
						JPY	-		JPY	137.53	
4	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT HK (Persero)	Lembaga Keuangan dan Wali Amanat	5	5 s.d. 25	IDR	20,866.00	30,935.20	IDR	12,020.09	22,089.29
						USD	0.60		USD	0.60	
5	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	PT PLN (Persero)	Pengembang Listrik Swasta	7	15 s.d. 20	USD	3.95	66,320.06	USD	3.99	66,918.58
6	Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)	PJPK	Badan Usaha	7	15 s.d. 21	IDR	68,536.14	139,757.27	IDR	62,414.62	123,503.12
						USD	4.24		USD	3.64	
7	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Pemda	PT SMI (Persero)	1	5 s.d. 9	IDR	1,925.38	1,925.38	IDR	85.16	85.16
8	Penyelenggaraan *Light Rail Transit* /LRT Jabodebek	PT KAI (Persero)	Perbankan	1	15 s.d. 18	IDR	23,419.13	23,419.13	IDR	21,379.13	21,379.13
9	Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta Bandung	PT KAI (Persero)	Perbankan	1	40 s.d. 45	USD	0.54	9,107.59	USD	0.54	9,107.33
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	PT PLN (Persero)	Perbankan	4	10 s.d. 10	IDR	15,173.79	125,934.99	IDR	8,682.32	93,334.50
			Pengembang Listrik Swasta	2	15 s.d. 20	USD	6.60		USD	5.04	
Total				**50**		**IDR**	*** 130,225.00**	*** 518,601.35**	**IDR**	***104,811.07**	*** 395,798.57**
						USD	*** 21.86**		**USD**	*** 15.34**	
						EUR	**1.08**		**EUR**	**0.95**	
						JPY	**-**		**JPY**	**137.53**	

*) Selisih 0,01 karena pembulatan

Nilai tukar menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2025

USD	16,782.00
EUR	19,753.26
JPY	107,59

*) Rentang tenor penjaminan Proyek 10.000 MW Tahap 2, KPBU dan PIK (nomor 5, 6 dan 9 (Penerima Jaminan Pengembang listrik Swasta)) sejak TOK

**) Nilai penjaminan hanya sebesar 70% nilai perjanjian kredit

DAFTAR REKAPITULASI NILAI PENGALIHAN 1% SAHAM DARI PT DAM KEPADA BP BUMN

No.	BUMN	Total Lembar Saham Keseluruhan	Jumlah Lembar Saham yang Dialihkan	Nilai Total Nominal Saham yang Dialihkan (Rp)	Jumlah Lembar Saham Milik BP BUMN (Pasca Pengalihan)
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	8.407.608.979	54.087.737	5.408.773.700	54.087.738
2	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	407.091.703.837	3.746.490.443	1.719.639.113.337	3.746.490.444
3	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	93.719.537	937,194	937.194.000.000	937,195
4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	93.333.333.332	485.333.332	60.666.666.500	485.333.333
5	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	37.297.312.916	223.783.877	839.189.538.750	223.783.878
6	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	151.559.001.604	806.109.768	40.305.488.400	806.109.769
7	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	14.034.444.413	84.206.665	42.103.332.500	84.206.666
8	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.257.871.200	50.805.097	25.402.548.500	50.805.098
9	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	19.346.396.900	154.771.174	77.385.587.000	154.771.175
10	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	6.199.897.354	31.619.477	3.161.947.700	31.619.478
11	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	12.898.183	128,981	128.981.000.000	128,982
12	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	6.751.540.089	34.570.229	3.457.022.900	34.570.230
13	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	99.062.216.600	516.023.535	25.801.176.750	516.023.536
14	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	39.873.063.858	362.917.027	36.921.702.700	362.917.028
15	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	28.806.807.016	217.056.333	21.705.633.300	217.056.334
16	PT Industri Kereta Api (Persero)	2.689.843	26,897	26.897.000.000	26,898
17	PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)	50	499	499.000.000	500
18	PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)	25	249	249.000.000	250
19	PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)	10,001	99	99.000.000	100
20	PT Amarta Karya (Persero)	44,285	442	442.000.000	443
21	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	19	189	189.000.000	190
22	PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)	240,936	2,408	2.408.000.000	2,408
23	PT Boma Bisma Indra (Persero)	340,916	3,408	3.408.000.000	3,409
24	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	976,6	9,76	9.760.000.000	9,761
25	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	350	3,499	3.499.000.000	3,5
26	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	40.575.584	405,755	405.755.000.000	405,756
27	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	878,358	8,783	8.783.000.000	8,784
28	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	456,694	4,566	4.566.000.000	4,567
29	PT Produksi Film Negara (Persero)	54,904	548	548.000.000	549
30	PT Asabri (Persero)	200	1,999	1.999.000.000	2
31	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	78.656.758	786,567	786.567.000.000	786,568
32	PT Bio Farma (Persero)	17.481.279	174,812	174.812.000.000	174,813
33	PT Brantas Abipraya (Persero)	373,537	3,734	3.734.000.000	3,735
34	PT Danareksa (Persero)	18.332.900	183,328	183.328.000.000	183,329
35	PT Hutama Karya (Persero)	131.646.000	1.316.459	1.316.459.000.000	1.316.460
36	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	26.168.743	261,686	261.686.000.000	261,687
37	PT Len Industri (Persero)	21.850.575	224,997	224.997.000.000	224,998
38	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	119.090.865	1.190.908	1.190.908.000.000	1.190.909
39	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	11.629.900	116,298	116.298.000.000	116,299
40	PT Pertamina (Persero)	176.754.417	1.767.543	1.767.543.000.000	1.767.544
41	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	150.536.096	1.505.360	1.505.360.000.000	1.505.361
42	PT Pos Indonesia (Persero)	455,023	4,549	4.549.000.000	4,55
43	PT Pupuk Indonesia (Persero)	25.000.000	249,999	249.999.000.000	250
44	PT Taspen (Persero)	500	4,999	4.999.000.000	5
45	PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero)	11	109	109.000.000	110
46	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	5.561.760	55,617	55.617.000.000	55,618
47	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	40.216.132	402,16	402.160.000.000	402,161
48	PT Perkebunan Nusantara I	8.941.996	9,461	9.461.000.000	9,462
49	PT Perkebunan Nusantara IV	8.395.318	5,937	5.937.000.000	5,938
50	PT Inspeksi Sertifikasi dan Survei Indonesia (Persero)	16.087.699	160,876	160.876.000.000	160,877

DAFTAR ASET HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PROVINSI, MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA KEPADA BP KPBPB (BINTAN, KARIMUN, DAN TANJUNGPINANG) YANG BELUM DISAJIKAN PADA NERACA LKBUN

No	Uraian Aset Tetap	Alamat	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Sumber Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Sumber Nilai Perolehan	Bukti Hibah	Nomor	Status Pemanfaatan
Aset Tetap Tanah										
	BP Bintan									
1	Bidang tanah	Komplek Perkantoran, Bintan Buyu, Kec Teluk Bintan, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	5	2013	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan	911.270.000	KPKNL	Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tanggal 04 Nopember 2014, antara Ansar Ahmad SE MM, (Bupati Bintan) dan Dra Mardhiah, MM	570/BPMPD/766a 29 Oktober 2013	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
2	Jalan Simpang Ekang - Penaga	Jalan Simpang Ekang - Penaga Kec Teluk Bintan, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	339	2015	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan	4.802.919.340	NPHD	Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas jalan antara Ansar Ahmad SE MM, (Bupati Bintan) dan Dra Mardhiah, MM	NPHD No 030/NPHD/DPPKD-Asset/07 386/VII/2015 13 Juli 2015	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
3	Jalan Korindo - Kawal	Jalan Korindo - Kawal Kec Bintan Timur dan Kec Gunung Kijang, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	2055	2015	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan	2.055.000.000	NPHD	Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas jalan antara Ansar Ahmad SE MM, (Bupati Bintan) dan Dra Mardhiah, MM	NPHD No 030/NPHD/DPPKD-Asset/07 386/VII/2015 13 Juli 2015	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
4	Jalan Menuju Kawasan Wisata Tanah Merah	Jalan Menuju Kawasan Wisata Tanah Merah, Kec Teluk Bintan, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	6594	2016	Hibah dari Masyarakat	8.055.115.000	KPKNL	Surat Pernyataan Kesiapan Lahan Apri Sujadi, SSos (Bupati Bintan)	289/SPKL/PU/2016, 29 Nopember 2016	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
5	Jalan Menuju CTI Galang Batang	Jalan Menuju CTI Galang Batang, Kec Gunung Kijang, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	63625	2013	Hibah dari PT Libra Agro Taman Asri	8.911.951.000	KPKNL	Surat Pernyataan Hibah antara Ny Yufritis Rolotan Banua (Dir PT Libra Agro Taman Asri / CV Libra Corporation) dan Drs Muhammad Hendri, MM	SURAT PERNYATAAN HIBAH 8 April 2013	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
6	Jalan Menuju PT BAI Galang Batang	Jalan Menuju PT BAI Galang Batang, Kec Gunung Kijang, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	2142	2017	Hibah dari PT Bintan Alumina Indonesia	2.808.492.000	KPKNL	Surat Pernyataan Hibah antara Direktur PT Bintan Alumina Indonesia, Santony dan Wakil Kepala BP Bintan, Drs H Mohd Saleh H Umar MM	283/BAI/TPI/II/2017, 1 Februari 2017	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
7	Jalan Selat Bintan	Jalan Selat Bintan Kec Teluk Bintan, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	6	2018	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan	1.091.018.712	BAST Hibah	Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas jalan antara Drs Adi Prihantara (Sekda Bintan) dan Drs H Mohd Saleh H Umar MM	014/BAST/-HBH/2018, 6 November 2018	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
8	Jalan Lintas Barat Lanjutan	Jalan Lintas Barat Lanjutan Kec Bintan Timur Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	58	2018	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan	13.678.055.352	BAST Hibah	Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas jalan antara Drs Adi Prihantara (Sekda Bintan) dan Drs H Mohd Saleh H Umar MM	014/BAST/-HBH/2018,	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
9	Jalan Taman Sari	Jalan Taman Sari, Kec Bintan Utara, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	85525	2022	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan	8.598.134.000	KPKNL	tidak dibuatkan surat hibah karena tanah belum diketahui kepemilikannya	-	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
10	Jalan Penghujan - Kuala Sempang	Jalan Penghujan - Kuala Sempang, Kec Teluk Bintan, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	43131	2020	Hibah dari Masyarakat	4.108.287.000	KPKNL	Surat Pernyataan Hibah antara Hamrudin (Kades Penaga) dan Drs H Mohd Saleh H Umar MM	001/SPH/DPNG/2020	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
11	Jalan Akses Menuju Kawasan Wisata Ekang Anculai	Jalan Akses Menuju Kawasan Wisata Ekang Anculai, Kec Teluk Sebong, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	47592	2021	Hibah dari Masyarakat	4.784.594.000	KPKNL	Surat Pernyataan Hibah antara Bonari (Kades Ekang Anculai) dan Drs H Mohd Saleh H Umar MM	140/DEA/2021 Aprili 2021	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
12	Jalan Penaga - Sp Segelap	Jalan Penaga - Sp Segelap, Kec Teluk Bintan, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	35112	2021	Hibah dari Masyarakat	4.289.221.000	KPKNL	Surat Pernyataan Hibah antara Hamrudin (Kades Penaga) dan Drs H Mohd Saleh H Umar MM	8 januari 2021	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
13	Jalan Kp Belak - Kemalai	Jalan Kp Belak - Kemalai, Kec Teluk Sebong, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	51732	2020	Hibah dari Masyarakat	6.782.863.000	KPKNL	Surat Pernyataan Hibah antara Hamrudin (Kades Penaga), Bonari (Kades Ekang Anculai) dan Drs H Mohd Saleh H Umar MM	003/DEA/XI/2020 20 Nov 2020 (Desa Ekang Anculai) 03-05/SPH/DPNG/2020 30 Nov 2020 (Desa Penaga)	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
14	Jalan Marga Utama	Jalan Marga Utama, Kec Teluk Sebong, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	17875	2020	Tanah milik Pemkab Bintan	2.779.558.000	KPKNL	Surat Kesiapan Lahan oleh Bupati Bintan	Bulan Juli 2020	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
15	Jalan Kimbong -Jalan Pengudang	Jalan Kimbong -Jalan Pengudang, Kec Teluk Sebong, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	275	2021	Hibah dari Masyarakat	3.359.352.000	KPKNL	Surat Pernyataan Hibah antara Djumiran (Kades Sri Bintan), dan Drs H Mohd Saleh H Umar MM	01/SPH/DSB/2021 02/SPH/DSB/2021	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
16	Jalan Pattimura	Jalan Pattimura, Kec Teluk Sebong, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	685	2021	Tanah milik Pemkab Bintan	767.102.000	KPKNL	Surat Kesiapan Lahan oleh Bupati Bintan	-	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
17	Jalan Kp Limau Tengah	Jalan Kp Limau Tengah, Kec Seri Kuala Lobam, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	46	2021	Hlbah dari Pemerintah Kabupaten Bintan	4.381.564.000	KPKNL	Surat Pernyataan Hibah antara M Hatta (Kades Kuala Sempang), dan Drs H Mohd Saleh H Umar MM	01/SPH/DKS/2021	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
18	Jalan Penaga - Pengujan	Jalan Penaga - Pengujan, Kec Teluk Bintan, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	405	2022	Hlbah dari Masyarakat	4.947.409.000	KPKNL	Surat Pernyataan Hibah diketahui Sayet (Kades Penaga)		Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
19	Jalan Harapan Baru	Jalan Harapan Baru, Kec Toapaya, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	84345	2022	Hlbah dari Masyarakat	-		Surat Keterangan Hibah oleh Sayet (Kades Toapaya Utara)		Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
20	Jalan Sp Sei Kecil - Sp Sakera	Jalan Sp Sei Kecil - Sp Sakera, Kec Teluk Bintan, Kec Bintan Utara, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	99	2023	Hlbah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4.734.795.730	NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Prov Kepulauan Riau (Sekda Dan BPK PBPB Wilayah Kab Bintan	Nomor:B/032/26/NPHD/PUPP1/2023 Nomor: 1591/BP-BINTAN/X/2023 30 Oktober 2023	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
21	Jalan Beringin	Jalan Beringin, Kec Teluk Bintan, Kec Seri Kuala Lobam, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	363	2025	Hlbah dari Masyarakat	-	-	Surat Pernyataan Hibah diketahui M Hatta (Kades Kuala Sempang)		Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
22	Jalan Sp Lobam - Pelabuhan T Sasah	Jalan Sp Lobam - Pelabuhan T Sasah, Kec Seri Kuala Lobam, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	37	2024	Hlbah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4.166.400.000	KPKNL	Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Prov Kepulauan Riau (Sekda Dan Kepala BPK Bintan PBPB Wilayah Kab Bintan)	Nomor: B/032/3931/BKAD-SET/2024 Nomor: 77/BP-BINTAN/VI/2024 5 Juni 2024	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
23	Jalan Lingkar Kelong mangrove	Jalan Lingkar Kelong mangrove Kec Teluk Bintan, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	24	2024	Hlbah dari Masyarakat	-	-	Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat, diketahui oleh Kades Sebong Lagoi		Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB

DAFTAR ASET HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PROVINSI, MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA KEPADA BP KPBPB (BINTAN, KARIMUN, DAN TANJUNGPINANG) YANG BELUM DISAJIKAN PADA NERACA LKBUN

No	Uraian Aset Tetap	Alamat	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Sumber Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Sumber Nilai Perolehan	Bukti Hibah	Nomor	Status Pemanfaatan
24	Jalan Said Bidin	Jalan Said Bidin, Kec Teluk Bintan, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	158	2025	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan	-	-	Masih menunggu proses serah terima hibah dari Pemda		Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
25	Jalan Sp Lagoi - Sei Kecil	Jalan Sp Lagoi - Sei Kecil, Kec Teluk Bintan, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	492	2025	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan	-	-	Masih menunggu proses serah terima hibah dari Pemda		Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
26	Jalan Provinsi (Sp Lagoi - Lintas Barat)	Sp Lagoi - Lintas Barat	tidak diketahui	2025	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2.349.000.000	NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Prov Kepulauan Riau (Sekda Dan Kepala BPK Bintan PBPB Wilayah Kab Bintan)	NPHD Nomor: 131/BP-BINTAN/VIII/2025, 5 Agustus 2025 BAST Nomor: 130/BP-BINTAN/VIII/2025, 5 Agustus 2025	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
27	Jalan Raden patah	Jalan Raden patah, Kec Teluk Sebong, Kab Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	195	2024	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan	-	-	Surat Keterangan Hibah antara Zuli Adi (Kades Ekang Anculai) dan Farid Irfan Siddik, SH	Nomor : 001 s/d 023 /DEA/XII/2024 9 Desember 2024	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
	BP Tanjungpinang					**98.362.101.134**				
28	Daeng Kamboja (Jl Senggarang), Kota Tanjungpinang	Ruas Jalan Provinsi di Tanjungpinang	476	2019	Pemerintahan Provinsi Kepri	39.606.772.000	KPKNL	BAST Hibah, Surat Pernyataan Gubernur perihal Pelepasan Hak Atas Jalan	120/0541/BPKAD/SET	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
29	Daeng Marewa	Ruas Jalan Provinsi di Tanjungpinang	1054	2019	Pemerintahan Provinsi Kepri	76.036.251.000	KPKNL	BAST Hibah, Surat Pernyataan Gubernur perihal Pelepasan Hak Atas Jalan	120/0541/BPKAD/SET	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
30	Simpang Wacopek - Pel Tj Mocco	Ruas Jalan Provinsi di Tanjungpinang	3	2019	Pemerintahan Provinsi Kepri	48.133.756.000	KPKNL	BAST Hibah, Surat Pernyataan Gubernur perihal Pelepasan Hak Atas Jalan	120/0541/BPKAD/SET	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
31	Datuk Pakau	Ruas Jalan Provinsi di Tanjungpinang	39	2021	Hibah dari PT kemayan Binta	33.894.187.000	KPKNL	BAST Hibah, Surat Pernyataan Gubernur perihal Pelepasan Hak Atas Jalan	620/1329/BEKOSET/2021	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
32	Simpang Dompak Lama - Pelabuhan Roro	Ruas Jalan Provinsi di Tanjungpinang	28	2021	Hibah dari Masyarakat	21.713.672.000	KPKNL	BAST Hibah, Surat Pernyataan Gubernur perihal Pelepasan Hak Atas Jalan	620/1329/BEKOSET/2021	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
33	Simpang Pos Koramil - Pelabuhan Tj Mocco	Ruas Jalan Menuju Pelabuhan Tg Mocco - Dompak	37	2018	Penandatanganan Hibah dari PJN, 28-Juli-2022	133.460.212.000	KPKNL	BAST Hibah, Surat Pernyataan Gubernur perihal Pelepasan Hak Atas Jalan	0624/BP-TPI/IX/2023 tanggal 21 September 2023	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
34	Kelam Pagi - Simpang Kp Tanjung Moccoh	Jalan Sp Sei Ungar - Sp Kelam	4086	2018	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang	20.363.907.000	KPKNL	BAST Hibah, Surat Pernyataan Gubernur perihal Pelepasan Hak Atas Jalan	0624/BP-TPI/IX/2023 tanggal 21 September 2023	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
35	Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Moccoh	Pagi, Kec Dompak, Kota	36	2020	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang	33.761.827.000	KPKNL	PKS	PKS 0304-Bb245/6961	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
36	Jalan Kampung Kelam Pagi Kel Dompak	Jalan Kampung Kelam Pagi, Kel Dompak	5609	2019	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang	1.397.743.961	BAST	BAST	181/1102/12/BA/2024 14322/BP-TPI/XII/2024	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
37	Jalan Daeng Celak Kel Senggarang	Jalan Daeng Celak Kel Senggarang	1271	2002	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang	77.000.000	BAST	BAST	181/1102/12/BA/2024 14322/BP-TPI/XII/2024	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
38	Jalan Daeng Celak Kel Senggarang	Jalan Daeng Celak Kel Senggarang	2216	2022	Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang	99.000.000	BAST	BAST	181/1102/12/BA/2024 14322/BP-TPI/XII/2024	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
39	Jalan Daeng Celak Kel Senggarang	Jalan Daeng Celak Kel Senggarang	2349	2006	Hibah dari Masyarakat	437.800.000	BAST	BAST	181/1102/12/BA/2024 14322/BP-TPI/XII/2024	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
40	Jalan Menuju Kelenteng Sun Te Kong Kota Tanjungpinang	Jalan Kampung Lampu merah senggarang	tidak diketahui	2022	Hibah dari Masyarakat	-		BAST		Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
41	Pembangunan Jalan Menuju PT Win Win Shrimp Kp Waklolang Kelam Pagi RT 003/RW 002 Kelurahan Dompak Kec Bukit Bestari Kota Tanjungpinang	Jalan Menuju PT Win Win Shrimp Kp Waklolang Kelam Pagi RT 003/RW 002 Kelurahan Dompak Kec Bukit Bestari Kota Tanjungpinang	8097	2025	Hibah dari Masyarakat	-		Surat Pernyataan	06180/BP-TPI/IV/2025 tgl 30 April 2025	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
42	Jalan Senggarang Raya	Jalan Senggarang Raya	5615	2025	Hibah dari Masyarakat	-		Surat Pernyataan	06193/BP-TPI/V/2025 tgl 06 Mei 2025	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
43	SP Kampung Bebek-Jalan Senggarang-Jalan Datuk Pakau (Akses Rencana Pelabuhan TgGeliga) Tahap I di kawasan BP Tanjungpinang	SP Kampung Bebek-Jalan Senggarang-Jalan Datuk Pakau (Akses Rencana Pelabuhan TgGeliga) Tahap I di kawasan BP Tanjungpinang	260	2024	PT Yakin Perkasa Propertama (YPP) Bekas perusahaan pertambangan Baucksit Saat ini jenis usaha perusahaan beralih fungsi menjadi pemanfaatan lahan untuk properti bisnis dan permukiman	-	-	Berita Acara Kesepakatan	1430/BP-TPI/XI/2024 tgl 25 November 2024	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
44	Jalan Tanjung Sebauk Kelurahan Senggarang Kec Tanjungpinang Kota	Jalan Tanjung Sebauk Kelurahan Senggarang Kec Tanjungpinang Kota	tidak diketahui	2025	Hibah dari Masyarakat	-		Surat Pernyataan	06184/BP-TPI/V/2025 tgl 02 Mei 2025	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
45	Jalan Senggarang Besar Tahap I	Jalan Senggarang Besar Tahap I	5	2025	Hibah dari Masyarakat	-		Surat Pernyataan	06194/BP-TPI/V/2025 tgl 6 Mei 2025	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
	BP Karimun					**408.982.127.961**				
46	Jalan Simpang Mutiara (Kawasan Industri)	Kec Meral	60134	2018	Hibah Pemda	1.970.367.493	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST HIBAH No 009/BPKAD-05/IV/2018	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
47	Tanah Jalan (Lanjutan) Kawasan Industri	Kec Meral	62194	2018	Hibah Pemda	8.240.221	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST HIBAH No 009/BPKAD-05/IV/2018	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
48	Jalan Pangke Kec Meral Barat	Kec Meral Barat	24	2020	Hibah Pemda	157.171.000	NPHD	BAST Hibah	Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 04/DISPU-PR/NPHD/KRM-MRL-MRL BRT-TBG/PEMBJLN/IX/2020 BAST HIBAH No 04/DISPU-PR/NPHD/KRM-MRL-MRL BRT-TBG/PEMBJLN/IX/2020	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
49	Jalan Sp Mutiara - Pesisir Selatan	Kec Meral Barat	-	2020	Hibah Pemda	14.721.498.970	NPHD	BAST Hibah	Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 03/DISPU-PR/NPHD/KRM-MRL-MRL BRT-TBG/PEMBJLN/IX/2020	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
50	Simpang GOR - Teluk Musodo (Tanah Badan Jalan)	KecTebing	6294	2021	Hibah PemProv	1.258.800.000	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST antara Pemprov dan BP Karimun No 032/62/BPKAD-SET/2021, No 01/BABPKrm/1/2021	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
51	Simpang GOR - Teluk Musodo (Jalan)	KecTebing	1049	2021	Hibah PemProv	3.889.599.000	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST antara Pemprov dan BP Karimun No 032/62/BPKAD-SET/2021, No 01/BABPKrm/1/2021	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
52	Jalan Pelabuhan Malarko Desa Pongkar Kec Tebing	KecTebing	16608	2018	Hibah Pemda	221.801.000	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST HIBAH no 004/BPKAD-05/III/2018	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
53	Jalan Parit Lapis Sungai Raya Meral	KecMeral	400	2022	Hibah Pemda	107.821.200	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST HIBAH No 008/BPKAD-05/VII/BASTH/ 2022 Keputusan Bupati Karimun No 696 Tahun 2022	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
54	Tanah bangunan Kantor , Sei Raya	KecMeral	2	2023	Hibah Pemda	212.578.109	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST 007/BPKAD-05/X/2023	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
55	Jalan Pait Lapis Sei Raya Meral	KecMeral	725	2023	Hibah Pemda	195.425.925	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST 003/BPKAD-05/V/BASTH/2023	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
56	Jalan Jelutung Guntung Punak	KecMeral	2	2023	Hibah Pemda	1.414.400.000	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST 003/BPKAD-05/V/BASTH/2023	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
57	JlFamily RT02RW02KelSungai Raya Kec Meral	KecMeral	184	2024	Hibah Pemda	174.934.000	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST 002/BPKAD-05/V/BASTH/2024	Tanah dibawah jalan kawasan BPKPBPB
58	JlAkses Kantor Camat Meral-Perkantoran Dinas Kab Karimun	KecMeral	949	2024	Hibah Pemda	174.298.000	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST 002/BPKAD-05/V/BASTH/2024	Tanah dan Jalan di kawasan BPKPBPB
59	Teluk Paku -Teluk Setimbul-Sepedas Laut	KecMeral Barat	1135	2024	Hibah Pemda	802.627.000	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST 008/BPKAD-05/IX/BASTH/2024	Tanah dan Jalan di kawasan BPKPBPB
60	Jalan Paya Sunan Kel Darussalam	KecMeral Barat	150	2024	Hibah Pemda	112.710.000	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST 008/BPKAD-05/IX/BASTH/2024	Tanah dan Jalan di kawasan BPKPBPB
61	JlSoekarno Hatta-Jl Jend Sudirman	KecTebing	16	2025	Hibah Pemda	10.761.175.673	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST HIBAH 001a/BPKAD-05/VII/BASTH/2025	Tanah dan Jalan di kawasan BPKPBPB
62	JlInvora Jaya	KecMeral	880	2025	Hibah Pemda	1.034.987.712	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST HIBAH 001a/BPKAD-05/VII/BASTH/2025	Tanah dan Jalan di kawasan BPKPBPB
63	Jalan Poros - Jelutung	KecMeral Barat	450	2025	Hibah Pemda	180.710.340	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST HIBAH 001a/BPKAD-05/VII/BASTH/2025	Tanah dan Jalan di kawasan BPKPBPB

DAFTAR ASET HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PROVINSI, MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA KEPADA BP KPBPB (BINTAN, KARIMUN, DAN TANJUNGPINANG) YANG BELUM DISAJIKAN PADA NERACA LKBUN

No	Uraian Aset Tetap	Alamat	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Sumber Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Sumber Nilai Perolehan	Bukti Hibah	Nomor	Status Pemanfaatan
64	Jl Family	KecMeral	127	2025	Hibah Pemda	174.934.100	BAST Hibah	BAST Hibah	BAST HIBAH 001a/BPKAD-05/VII/BASTH/2025	Tanah dan Jalan di kawasan BPKPBPB
65	Jembatan Sei-Bati Karimun ruas jalan Sp Sei Bati-Sp Tugu Stadion-Jelutung	KecTebing	-	2025	Hibah PemProv	234.132.250	BAST Hibah	BAST Hibah	NOBAST HIBAH B/000232/2521/PUPP-SET/2025 NO182/30001/BPKrm/3/2025	Tanah dan Jalan di kawasan BPKPBPB
66	Jembatan Sei-Bati Karimun-Sp Tugu Stadion-Pelabuhan Malarko	KecTebing	-	2025	Hibah PemProv	12.322.750	BAST Hibah	BAST Hibah	NOBAST HIBAH B/000232/2521/PUPP-SET/2025 NO182/30001/BPKrm/3/2025	Tanah dan Jalan di kawasan BPKPBPB
67	Aset tanah ruas jalan Sp Sei Bati-Sp Tugu Stadion-Jelutung (1600 m)	KecTebing	-	2025	Hibah PemProv	1.570.400.000	BAST Hibah	BAST Hibah	NOBAST HIBAH B/000232/2521/PUPP-SET/2025 NO182/30001/BPKrm/3/2025	Tanah dan Jalan di kawasan BPKPBPB
68	Pemeliharaan rutin/berkala pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Karimun (SpTugu Stadion-	KecTebing	-	2025	Hibah PemProv	4.059.659.000	BAST Hibah	BAST Hibah	NOBAST HIBAH B/000232/2521/PUPP-SET/2025 NO182/30001/BPKrm/3/2025	Tanah dan Jalan di kawasan BPKPBPB
	Jumlah					**550.794.822.838**				
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan										
	BP Bintan									
1	Ruas Jalan Provinsi (Sp Lagoi - Lintas Barat)	Kec Teluk Subong	-	2025	Hibah PemProv	32.248.183.404	BAST Hibah	BAST Hibah	NO BAST HIBAH 130/BP-BINTAN/VIII/2025	Jalan di kawasan BPKPBPB

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	KETERANGAN	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (5)-(8)	(11)	(10)
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)			-			-	-	Bagian Satker	007
2	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)			-			-	-	Bagian Satker	050
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	79.603	259.522	339.125	28.886.024	-	28.886.024	(28.546.899)	Satker	026
4	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	188.683	4.716	193.400	18.611.004	-	18.611.004	(18.417.605)	Satker	147
5	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	23.854.226	90.415	23.944.640	26.773.318	365.600	27.138.919	(3.194.279)	Satker	147
6	Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI)	25.000.000	23.796.865	48.796.865	25.000.000	20.818.569	45.818.569	2.978.296	Bagian Satker	025
7	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	1.843.195.235	1.052.485	1.844.247.720	174.468.627	460.908	174.929.535	1.669.318.185	Satker	020
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	-	55.837	55.837	6.844.656	-	6.844.656	(6.788.819)	Satker	090
9	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)			-			-	-	Bagian Satker	088
10	Badan Promosi Pariwisata Indonesia			-			-	-	Bagian Satker	040
11	Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM)			-			-	-	Satker	029
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	-	14.160	14.160	62.730.367	319.241	63.049.608	(63.035.448)	Satker	020
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	-	-	-	165.948	-	165.948	(165.948)	Satker	036
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun	26.954	75.147.039	75.173.993	195.705.920	1.784.398	197.490.318	(122.316.325)	Satker	999
15	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)			-			-	-	Bagian Satker	044
16	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	-	53.552	53.552	51.221.297	-	51.221.297	(51.167.746)	Satker	035
17	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)			-			-	-	Bagian Satker	026
18	Dewan Pers	-	-	-	23.791.002	-	23.791.002	(23.791.002)	Satker	059
19	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)			-			-	-	Bagian Satker	010
20	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	-	15.480	15.480	17.620.293	879	17.621.172	(17.605.692)	Satker	007
21	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	-	-	10.112.955	-	10.112.955	(10.112.955)	Satker	145
22	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)			-			-	-	Bagian Satker	055
23	Komisi Banding Merek			-			-	-	Bagian Satker	013
24	Komisi Banding Paten			-			-	-	Bagian Satker	013
25	Komisi Informasi Pusat (KIP)	-	-	-	28.199.272	(13.824)	28.185.448	(28.185.448)	Satker	059
26	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)			-			-	-	Bagian Satker	043
27	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	-	-	-	24.916.932	-	24.916.932	(24.916.932)	Bagian Satker	034
28	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	-	-	-	22.180.758	-	22.180.758	(22.180.758)	Bagian Satker	034
29	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	-	5.261.825	5.261.825	3.480	4.857.852	4.861.332	400.493	Bagian Satker	074
30	Komite Nasional Disabilitas	-	1.541	1.541	6.067.102	-	6.067.102	(6.065.561)	Satker	027
31	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	-	47.750	47.750	42.598.968	-	42.598.968	(42.551.218)	Satker	059
32	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	-	26.154	26.154	8.419.178	-	8.419.178	(8.393.024)	Satker	047
33	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	48.143.600	-	48.143.600	31.597.333	-	31.597.333	16.546.267	Bagian Satker	084
34	Komite Cipta Kerja			-			-	-	Bagian Satker	035
35	Komite Penanganan Covid-19 dan PEN			-			-	-	Bagian Satker	035
36	Komite Nasional Geopark Indonesia			-			-	-	Bagian Satker	120
37	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)			-			-	-	Bagian Satker	012

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	KETERANGAN	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (5)-(8)	(11)	(10)
38	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	-	-	-	220.992	-	220.992	(220.992)	Bagian Satker	078
39	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)			-			-	-	Bagian Satker	035
40	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	-	1.932	1.932	42.612.920	6.298.952	48.911.872	(48.909.941)	Satker	022
41	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)			-			-	-	Bagian Satker	015
42	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)			-			-	-	Bagian Satker	092
43	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)			-			-	-	Bagian Satker	048
44	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan			-			-	-	Bagian Satker	035
45	Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)	-	-	-	375.736	3.258.949	3.634.685	(3.634.685)	Satker	015
46	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)			-			-	-	Bagian Satker	084
47	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)			-			-	-	Bagian Satker	035
48	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)			-			-	-	Satker	048
49	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (024_01_439505)			-			-	-	Satker	024
50	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)			-			-	-	Satker	024
51	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)			-			-	-	Bagian Satker	088
52	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	4.600.377	-	4.600.377	4.213.827	-	4.213.827	386.550	Bagian Satker	026
53	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)			-			-	-	Bagian Satker	026
54	Lembaga Sensor Film (LSF)	2.816.475	-	2.816.475	46.488.296	-	46.488.296	(43.671.821)	Satker	140
55	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)			-			-	-	Bagian satker	024
56	Otoritas Nasional Senjata Kimia			-			-	-	Bagian satker	019
57	Sekretariat Pengadilan Pajak	8.114	212.648	220.762	80.922.884	23.248	80.946.132	(80.725.370)	Satker	015
58	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden			-			-	-	Bagian Satker	114
59	Tim Pengembangan Vaksin COVID-19			-			-	-	Bagian satker	042
60	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)			-			-	-	Bagian Satker	088
61	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan			-			-	-	Bagian satker	007
62	Kantor Staf Presiden	-	44.100	44.100	88.134.381	1.824	88.136.206	(88.092.106)	Satker	007
63	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	1.363.346.337	-	1.363.346.337	1.303.355.227	-	1.303.355.227	59.991.110	Bukan Satker	999
64	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	15.000.000	2.786.736	17.786.736	14.999.999	2.639.685	17.639.684	147.052	Bukan Satker	999
65	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	7.595.400	-	7.595.400	8.850.426	-	8.850.426	(1.255.026)	Bukan Satker	999
66	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	26.435.303.216	419.765.849	26.855.069.065	26.757.084.163	-	26.757.084.163	97.984.902	Bukan Satker	999
67	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII			-			-	-	Bukan Satker	999
68	Otorita Asahan			-			-	-	Bukan Satker	999
69	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Bukan Satker)	8.465.691.487	14.108.084	8.479.799.571	10.791.282.076	-	10.791.282.076	(2.311.482.505)	Bukan Satker	999
	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Satker) (999_08_984469)	-	17.581.965	17.581.965	(75)	-	(75)	17.582.040	Satker	999

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	KETERANGAN	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (5)-(8)	(11)	(10)
70	SKK MIGAS (Satker) (999_08_999975)	184.651	202.736	387.386	1.870.323.999	-	1.870.323.999	(1.869.936.613)	Satker	999
	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.879.745.875	-	1.879.745.875	2.002.025.222	161.773.228	2.163.798.450	(284.052.575)	Bukan Satker	999
J U M L A H		**40.114.780.233**	**560.531.391**	**40.675.311.624**	**43.816.804.509**	**202.589.510**	**44.019.394.019**	**(3.344.082.395)**		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	REALISASI								
		APBN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)	(9) = (3)-(8)	(10)	(11)
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	7.594.628	-	7.593.327	-	-	7.593.327	1.301	Bagian Satker	007
2	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	1.839.030	-	1.839.030	-	-	1.839.030	-	Bagian Satker	050
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	33.559.963	11.039.531	14.956.393	-	-	25.995.923	7.564.040	Satker	026
4	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	21.470.474	6.947.907	10.690.343	1.585.441	-	19.223.692	2.246.782	Satker	147
5	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	24.887.801	5.630.946	17.114.675	1.418.967	-	24.164.588	723.213	Satker	147
6	Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI)	25.000.000	14.809.394	10.190.606	-	-	25.000.000	-	Bukan Satker	025
7	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	268.929.832	81.641.475	79.061.190	1.890.114	-	162.592.779	106.337.053	Satker	020
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	8.967.942	-	6.696.459	-	-	6.696.459	2.271.483	Satker	090
9	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)						-	-	Bagian Satker	088
10	Badan Promosi Pariwisata Indonesia						-	-	Bagian Satker	040
11	Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM)						-	-	Satker	029
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	75.284.532	41.499.647	20.426.008	846.866	-	62.772.521	12.512.011	Satker	020
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	-	-	-	-	-	-	-	Satker	036
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun	246.860.461	-	-	-	233.041.825	233.041.825	13.818.636	Satker	999
15	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)						-	-	Bagian Satker	044
16	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	53.557.597	17.396.510	30.041.490	926.260	-	48.364.260	5.193.337	Satker	035
17	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)						-	-	Bagian Satker	026
18	Dewan Pers	26.022.654	4.879.323	17.171.641	769.559	-	22.820.523	3.202.131	Satker	059
19	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)						-	-	Bagian Satker	010
20	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	32.777.142	584.545	16.813.879	191.581	-	17.590.005	15.187.137	Satker	007
21	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	11.360.774	268.495	9.684.314	-	-	9.952.809	1.407.965	Satker	145
22	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	988.094	-	985.424	-	-	985.424	2.670	Bagian Satker	055
23	Komisi Banding Merek	2.740.602	-	2.400.684	333.860	-	2.734.544	6.058	Bagian Satker	013
24	Komisi Banding Paten	3.081.361	-	3.078.636	-	-	3.078.636	2.725	Bagian Satker	013
25	Komisi Informasi Pusat (KIP)	35.349.764	8.760.330	18.606.742	235.900	-	27.602.972	7.746.792	Satker	059
26	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)						-	-	Bagian Satker	043
27	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	25.943.522	6.213.062	19.014.486	-	-	25.227.549	715.973	Bagian Satker	034
28	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	24.414.442	5.973.216	16.207.542	1.041.250	-	23.222.008	1.192.434	Bagian Satker	034
29	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	45.338.259	15.554.531	22.126.985	2.303.905	-	39.985.420	5.352.839	Bagian Satker	074
30	Komite Nasional Disabilitas	6.744.469	-	6.055.168	-	-	6.055.168	689.301	Satker	027
31	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	52.662.290	16.621.075	25.000.495	115.884	-	41.737.454	10.924.836	Satker	059
32	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	16.516.132	2.914.977	4.942.344	-	-	7.857.320	8.658.812	Satker	047
33	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	37.594.536	-	23.413.623	8.183.710	-	31.597.333	5.997.203	Bagian Satker	084
34	Komite Cipta Kerja						-	-	Bagian Satker	035
35	Komite Penanganan Covid-19 dan PEN						-	-	Bagian Satker	035
36	Komite Nasional Geopark Indonesia						-	-	Bagian Satker	120
37	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)						-	-	Bagian Satker	012
38	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	222.399	-	220.992	-	-	220.992	1.407	Bagian Satker	078
39	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	15.000.000	-	7.959.323	-	-	7.959.323	7.040.677	Bagian Satker	035
40	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	51.056.223	17.031.407	24.148.468	-	-	41.179.875	9.876.348	Satker	022
41	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)						-	-	Bagian Satker	015
42	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)						-	-	Bagian Satker	092
43	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)						-	-	Bagian Satker	048

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)	(9) = (3)-(8)	(10)	(11)
44	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan						-	-	Bagian Satker	035
45	Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)	3.995.358	-	3.586.288	-	-	3.586.288	409.070	Satker	015
46	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)						-	-	Bagian Satker	084
47	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1.000.000	-	290.875	-	-	290.875	709.125	Bagian Satker	035
48	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)						-	-	Satker	048
49	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (024_01_439505)						-	-	Satker	024
50	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)						-	-	Satker	024
51	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)						-	-	Bagian Satker	088
52	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	4.600.377	-	-	-	4.213.827	4.213.827	386.550	Bagian Satker	026
53	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)						-	-	Bagian Satker	026
54	Lembaga Sensor Film (LSF)	52.476.738	13.222.027	32.223.224	6.640.508	-	52.085.760	390.978	Satker	140
55	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)						-	-	Bagian satker	024
56	Otoritas Nasional Senjata Kimia	280.750	-	279.576	-	-	279.576	1.174	Bagian satker	019
57	Sekretariat Pengadilan Pajak	91.666.140	53.113.602	24.148.679	4.875.546	-	82.137.827	9.528.313	Satker	015
58	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden						-	-	Bagian Satker	114
59	Tim Pengembangan Vaksin COVID-19						-	-	Bagian satker	042
60	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)	617.693	-	-	-	617.691	617.691	2	Bagian Satker	088
61	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan						-	-	Bagian satker	007
62	Kantor Staf Presiden	108.234.689	41.024.215	39.872.827	6.616.665	-	87.513.707	20.720.982	Satker	007
63	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)						-	-	Bukan Satker	999
64	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	15.000.000	-	14.999.959	-	-	14.999.959	41	Bukan Satker	999
65	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"						-	-	Bukan Satker	999
66	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)						-	-	Bukan Satker	999
67	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII						-	-	Bukan Satker	999
68	Otorita Asahan						-	-	Bukan Satker	999
69	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Bukan Satker)	-	-	-	-	-	-	-	Bukan Satker	999
	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Satker) (999_08_984469)	-	-	-	-	-	-	-	Satker	999
70	SKK MIGAS (Satker) (999_08_999975)	1.896.525.226	-	-	-	1.879.745.875	1.879.745.875	16.779.351	Satker	999
	SKK MIGAS (Bukan Satker)						-	-	Bukan Satker	999
	J U M L A H	**3.330.161.894**	**365.126.215**	**531.841.694**	**37.976.016**	**2.117.619.218**	**3.052.563.143**	**277.598.751**	**-**	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KETERANGAN	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)					-			-	-	-	Bagian Satker	007
2	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)					-			-	-	-	Bagian Satker	050
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	2.273.846	-	36.521.734	4.662	38.800.242	143.097	-	143.097	38.657.145	38.800.242	Satker	026
4	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	634.218	-	84.224.622	3.664.624	88.523.463	750	-	750	88.522.713	88.523.463	Satker	147
5	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	1.467.575	-	439.164.401	873.624	441.505.600	346.404	-	346.404	441.159.196	441.505.600	Satker	147
6	Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI)					-			-	-	-	Bagian Satker	025
7	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	117.240.247	-	299.942.756	2.052.777	419.235.780	8.664.645	-	8.664.645	410.571.136	419.235.780	Satker	020
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	-	-	51.417	246.800	298.217	-	-	-	298.217	298.217	Satker	090
9	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)					-			-	-	-	Bagian Satker	088
10	Badan Promosi Pariwisata Indonesia					-			-	-	-	Bagian Satker	040
11	Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM)					-			-	-	-	Satker	029
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	132.931	-	1.716.976	22.691	1.872.599	-	-	-	1.872.599	1.872.599	Satker	020
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satker	036
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun	190.775	-	1.160.731.497	29.666.904	1.190.589.176	36.500	-	36.500	1.190.552.676	1.190.589.176	Satker	999
15	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)					-			-	-	-	Bagian Satker	044
16	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	221.672	-	7.560.635	516.966	8.299.273	1.081.277	-	1.081.277	7.217.997	8.299.273	Satker	035
17	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)					-			-	-	-	Bagian Satker	026
18	Dewan Pers	189.772	-	1.893.948	442.741	2.526.461	238.145	-	238.145	2.288.316	2.526.461	Satker	059
19	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)					-			-	-	-	Bagian Satker	010
20	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	1.192.816	-	1.069.963	2.815.119	5.077.898	2.816.978	-	2.816.978	2.260.920	5.077.898	Satker	007
21	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	19.929	-	538.016	-	557.945	-	-	-	557.945	557.945	Satker	145
22	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)					-			-	-	-	Bagian Satker	055
23	Komisi Banding Merek					-			-	-	-	Bagian Satker	013
24	Komisi Banding Paten					-			-	-	-	Bagian Satker	013
25	Komisi Informasi Pusat (KIP)	269.606	-	1.439.637	-	1.709.243	412	-	412	1.708.831	1.709.243	Satker	059
26	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)					-			-	-	-	Bagian Satker	043
27	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia					-			-	-	-	Bagian Satker	034
28	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	-	-	1.041.250	-	1.041.250	-	-	-	1.041.250	1.041.250	Bagian Satker	034
29	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	400.493	-	-	-	400.493	-	-	-	400.493	400.493	Bagian Satker	074
30	Komite Nasional Disabilitas	-	-	39.501	-	39.501	-	-	-	39.501	39.501	Satker	027
31	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	278.894	-	1.214.290	20.791	1.513.975	3.612	-	3.612	1.510.363	1.513.975	Satker	059
32	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	13.839	-	804.319	2.090	820.248	13.979	-	13.979	806.269	820.248	Satker	047
33	Komite Akreditasi Nasional (KAN)					-			-	-	-	Bagian Satker	084
34	Komite Cipta Kerja					-			-	-	-	Bagian Satker	035
35	Komite Penanganan Covid-19 dan PEN					-			-	-	-	Bagian Satker	035
36	Komite Nasional Geopark Indonesia					-			-	-	-	Bagian Satker	120
37	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)					-			-	-	-	Bagian Satker	012
38	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)					-			-	-	-	Bagian Satker	078

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KETERANGAN	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)
39	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)					-			-	-	-	Bagian Satker	035
40	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	49.701	-	4.499.113	4.829.103	9.377.917	-	-	-	9.377.917	9.377.917	Satker	022
41	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)					-			-	-	-	Bagian Satker	015
42	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)					-			-	-	-	Bagian Satker	092
43	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)					-			-	-	-	Bagian Satker	048
44	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan					-			-	-	-	Bagian Satker	035
45	Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)	31.441	-	12.145	-	43.586	-	-	-	43.586	43.586	Satker	015
46	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)					-			-	-	-	Bagian Satker	084
47	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)					-			-	-	-	Bagian Satker	035
48	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)					-			-	-	-	Satker	048
49	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (024_01_439505)					-			-	-	-	Satker	024
50	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)					-			-	-	-	Satker	024
51	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)					-			-	-	-	Bagian Satker	088
52	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	4.600.377	-	-	-	4.600.377	-	-	-	4.600.377	4.600.377	Bagian Satker	026
53	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)					-			-	-	-	Bagian Satker	026
54	Lembaga Sensor Film (LSF)	394.223	-	6.315.649	5.234.713	11.944.585	972.978	-	972.978	10.971.607	11.944.585	Satker	140
55	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)					-			-	-	-	Bagian satker	024
56	Otoritas Nasional Senjata Kimia					-			-	-	-	Bagian satker	019
57	Sekretariat Pengadilan Pajak	707.942	-	10.100.809	1.222.123	12.030.874	1.165.284	-	1.165.284	10.865.590	12.030.874	Satker	015
58	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden					-			-	-	-	Bagian Satker	114
59	Tim Pengembangan Vaksin COVID-19					-			-	-	-	Bagian satker	042
60	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)					-			-	-	-	Bagian Satker	088
61	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan					-			-	-	-	Bagian satker	007
62	Kantor Staf Presiden	4.823.878	-	22.628.391	784.823	28.237.093	784.823	-	784.823	27.452.269	28.237.093	Satker	007
63	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	504.686.710	-	39.968.486	7.492.819	552.148.015	85.183.911	13.881.243	99.065.154	453.082.862	552.148.015	Bukan Satker	999
64	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	27.946.537	761.105.075	4.421.962	4.087.460	797.561.034	342.928	758.592.468	758.935.396	38.625.638	797.561.034	Bukan Satker	999
65	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	2.488.580	-	3.264.233	-	5.752.813	204.699	1.171.654	1.376.353	5.567.169	6.943.522	Bukan Satker	999
66	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	74.856.790.315	161.969.122.595	2.137.795.124	-	238.963.708.034	58.689.407.564	157.898.977.841	216.588.385.405	22.375.322.629	238.963.708.034	Bukan Satker	999
67	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII					-			-	-	-	Bukan Satker	999
68	Otorita Asahan					-			-	-	-	Bukan Satker	999
69	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Bukan Satker)	8.037.010.134	-	2.821.649.855	1.599.558.741	12.458.218.730	2.212.390.462	3.993.043.747	6.205.434.209	6.252.784.521	12.458.218.730	Bukan Satker	999
	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Satker) (999_08_984469)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satker	999
70	SKK MIGAS (Satker) (999_08_999975)	35.944.794	-	64.908.038	67.842.017.383	67.942.870.215	50.299.815	67.778.850.083	67.829.149.898	113.720.316	67.942.870.215	Satker	999
	SKK MIGAS (Bukan Satker)	94.327.067	-	119.303.905	-	213.630.972	268.959.442	1.797.041.483	2.066.000.926	(1.852.369.954)	213.630.972	Bukan Satker	999
	JUMLAH	83.694.328.312	162.730.227.670	7.272.822.672	69.505.556.954	323.202.935.609	61.323.057.704	232.241.558.519	293.564.616.223	29.639.510.094	323.204.126.318		

REKAPITULASI PENYETORAN PAJAK ROKOK KE RKUD PROVINSI DAN REKENING BPJS KESEHATAN

No.	Nama Provinsi	Penyetoran Pajak Rokok TA 2024		Penyetoran Pajak Rokok Triwulan I TA 2025		Penyetoran Pajak Rokok Triwulan II TA 2025		Penyetoran Pajak Rokok Triwulan III TA 2025		Penyetoran Pajak Rokok Triwulan IV TA 2025	
		Pemotongan ke BPJS	Penyaluran ke RKUD	Pemotongan ke BPJS	Penyaluran ke RKUD	Pemotongan ke BPJS	Penyaluran ke RKUD	Pemotongan ke BPJS	Penyaluran ke RKUD	Pemotongan ke BPJS	Penyaluran ke RKUD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
1	Provinsi Aceh	6.854.577.553	57.318.104.237	27.490.278.556	80.502.574.530	24.540.352.015	71.904.505.089	25.636.943.491	77.618.304.393	39.992.336.913	26.352.482.050
2	Provinsi Bali	8.169.112.967	172.468.537.521	327.027.156	301.114.733.064	-	269.207.699.017	-	288.217.625.376	-	185.189.097.594
3	Provinsi Banten	-	66.869.245.059	-	112.218.830.057	-	100.218.937.827	-	107.295.832.860	-	68.941.024.814
4	Provinsi Bengkulu	4.087.028.624	75.605.892.417	782.024.162	134.324.679.177	-	120.659.342.956	-	129.179.623.886	-	83.002.064.651
5	Provinsi DI Yogyakarta	-	25.219.633.776	-	43.039.368.170	-	38.437.040.919	-	41.151.247.534	-	26.441.000.566
6	Provinsi DKI Jakarta	129.578.395	43.569.993.312	-	73.583.854.908	-	65.715.315.125	-	70.355.759.309	-	45.205.839.025
7	Provinsi Gorontalo	8.334.410.243	95.029.661.413	3.581.015.824	170.379.344.947	1.629.694.953	153.728.568.644	-	166.328.786.213	-	106.871.596.705
8	Provinsi Jambi	-	17.620.162.095	-	29.809.555.293	-	26.621.931.160	-	28.501.821.492	-	-
9	Provinsi Jawa Barat	-	50.399.757.988	-	41.003.393.459	-	36.618.779.021	-	39.204.590.255	-	-
10	Provinsi Jawa Tengah	8.910.904.903	96.660.203.864	5.282.563.717	170.801.787.507	4.717.683.516	152.537.445.938	1.136.896.951	167.222.701.065	-	108.176.458.630
11	Provinsi Jawa Timur	-	133.119.683.267	-	215.874.911.026	-	192.790.766.713	-	206.404.561.160	-	132.621.571.533
12	Provinsi Kalimantan Barat	11.484.360.218	569.913.914.953	7.123.088.695	971.697.416.921	1.546.327.198	872.605.999.526	-	935.880.024.031	-	601.333.027.014
13	Provinsi Kalimantan Selatan	-	145.208.829.583	7.446.682.489	237.372.767.446	6.634.176.865	212.006.003.393	2.835.704.210	231.243.609.999	-	150.403.490.790
14	Provinsi Kalimantan Tengah	-	445.078.768.676	6.774.567.979	735.366.547.975	3.632.894.959	659.148.871.000	3.353.470.433	706.230.198.328	-	455.930.337.757
15	Provinsi Kalimantan Timur	-	43.514.558.287	-	72.332.790.624	-	64.598.030.854	-	69.159.578.737	-	44.437.254.521
16	Provinsi Kalimantan Utara	21.367.160.366	465.016.537.538	2.489.911.286	806.226.020.972	-	722.237.539.760	-	773.237.873.311	-	496.830.212.229
17	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	64.807.931.672	-	108.530.582.740	-	96.925.085.732	-	103.769.387.544	-	66.675.170.236
18	Provinsi Kepulauan Riau	1.152.410.150	30.825.051.373	6.074.040.738	47.917.432.496	5.424.525.553	42.793.479.362	3.558.543.927	48.064.344.006	-	33.169.366.443
19	Provinsi Lampung	-	49.326.935.204	695.068.649	82.015.340.149	-	73.865.939.547	-	79.081.934.767	-	50.812.687.518
20	Provinsi Maluku	-	46.570.182.466	-	78.517.776.998	-	70.121.638.297	-	75.073.232.122	-	48.236.967.090
21	Provinsi Maluku Utara	-	8.616.910.618	-	14.747.948.717	-	13.170.906.830	-	14.100.961.841	-	9.060.321.676
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.391.131.881	26.993.852.752	196.328.228	51.045.215.290	-	45.762.133.337	-	48.993.596.582	-	31.479.962.154
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	14.376.604.157	-	24.118.833.530	-	21.539.735.148	-	23.060.749.519	-	14.817.273.537
24	Provinsi Papua	1.142.727.183	35.492.416.407	-	61.749.246.632	-	55.146.216.602	-	59.040.330.776	-	37.935.312.123
25	Provinsi Papua Barat	1.679.068.638	107.970.111.215	14.586.525.358	168.818.583.658	-	163.793.056.909	-	175.359.196.961	-	112.673.926.161
26	Provinsi Papua Barat Daya	-	17.093.727.079	30.573.142	28.288.646.879	-	25.290.961.857	-	27.076.866.659	-	17.397.758.016
27	Provinsi Papua Pegunungan	5.759.771.838	155.193.259.732	393.391.558	53.608.666.829	-	-	-	-	-	-
28	Provinsi Papua Selatan	-	50.751.450.577	-	84.547.572.621	-	75.506.649.995	-	80.838.502.915	-	51.941.339.070
29	Provinsi Papua Tengah	3.501.235.456	61.907.218.698	-	109.851.284.149	-	98.104.560.623	-	105.032.150.286	-	67.486.535.927
30	Provinsi Riau	-	65.367.674.968	59.465.702	109.973.995.523	-	98.267.256.964	-	105.206.335.324	-	67.598.455.418

REKAPITULASI PENYETORAN PAJAK ROKOK KE RKUD PROVINSI DAN REKENING BPJS KESEHATAN

No.	Nama Provinsi	Penyetoran Pajak Rokok TA 2024		Penyetoran Pajak Rokok Triwulan I TA 2025		Penyetoran Pajak Rokok Triwulan II TA 2025		Penyetoran Pajak Rokok Triwulan III TA 2025		Penyetoran Pajak Rokok Triwulan IV TA 2025	
		Pemotongan ke BPJS	Penyaluran ke RKUD	Pemotongan ke BPJS	Penyaluran ke RKUD	Pemotongan ke BPJS	Penyaluran ke RKUD	Pemotongan ke BPJS	Penyaluran ke RKUD	Pemotongan ke BPJS	Penyaluran ke RKUD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
31	Provinsi Sulawesi Barat	4.464.605.461	17.829.822.471	3.266.910.863	34.058.374.538	2.523.270.627	30.810.711.336	1.464.747.787	34.223.091.605	1.523.684.735	21.406.900.317
32	Provinsi Sulawesi Selatan	239.875.490	63.845.857.959	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Provinsi Sulawesi Tengah	2.488.789.900	10.144.207.909	2.940.263.817	18.258.094.957	2.507.395.827	16.424.159.590	2.684.453.951	17.583.940.923	-	-
34	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	6.593.796.198	-	11.048.689.739	-	9.867.220.586	-	10.563.987.942	-	6.787.702.145
35	Provinsi Sulawesi Utara	968.645.001	5.209.536.580	1.812.714.816	8.769.743.519	1.618.875.847	7.831.968.843	1.719.218.501	8.398.991.430	2.689.494.360	3.811.781.071
36	Provinsi Sumatera Barat	-	15.852.618.353	1.043.409.513	25.371.374.741	932.104.041	22.658.069.013	997.923.961	24.258.053.801	1.406.112.934	14.821.665.379
37	Provinsi Sumatera Selatan	-	17.140.769.160	1.147.294.830	27.287.954.754	613.012.561	24.781.571.474	656.300.044	26.531.506.005	164.358.638	17.304.681.506
38	Provinsi Sumatera Utara	2.542.035.838	23.487.672.841	1.325.139.128	10.619.643.919	-	-	-	-	-	-
Total		**97.667.430.105**	**3.398.011.092.375**	**94.868.286.206**	**5.354.793.578.454**	**56.320.313.962**	**4.751.698.098.987**	**44.044.203.256**	**5.103.489.298.957**	**45.775.987.580**	**3.205.153.263.666**

Penyetoran Pajak Rokok per 31 Desember 2025 terdapat pemotongan Pajak Rokok sebesar (c+e+g+i+k)	**338.676.221.109**

KONTRIBUSI SKEMA *BURDEN SHARING* YANG DIBAYARKAN OLEH BANK INDONESIA

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. *Public Goods*				
1	Penyesuaian Akrual 2024	(2.536.264.580.000)	-	(2.536.264.580.000)
2	Januari	1.132.952.450.000	-	1.132.952.450.000
3	Februari	2.356.537.400.000	-	2.356.537.400.000
4	Maret	3.098.872.010.000	-	3.098.872.010.000
5	April	1.149.950.040.000	-	1.149.950.040.000
6	Mei	2.334.671.640.000	-	2.334.671.640.000
7	Juni	2.911.907.780.000	-	2.911.907.780.000
8	Juli	1.089.441.110.000	-	1.089.441.110.000
9	Agustusf	2.248.346.315.000	-	2.248.346.315.000
10	September	2.833.816.130.000	-	2.833.816.130.000
11	Oktober	1.008.629.210.000	-	1.008.629.210.000
12	November	1.602.205.880.000	-	1.602.205.880.000
13	Desember	2.003.262.670.000	-	2.003.262.670.000
11	Penyesuaian Akrual 2025	1.357.543.122.500	-	1.357.543.122.500
SUBTOTAL PG		**22.591.871.177.500**	**-**	**22.591.871.177.500**
B. *Non Public Goods*				
1	Penyesuaian Akrual 2024	(11.235.156.175)	(455.224.819.661)	(466.459.975.836)
2	Juni	120.282.260.230	4.886.935.646.619	5.007.217.906.849
3	Desember	463.644.880.132	4.354.050.707.129	4.817.695.587.260
4	Penyesuaian Akrual 2025	108.461.709.315	398.899.764.515	507.361.473.830
SUBTOTAL NPG		**681.153.693.502**	**9.184.661.298.602**	**9.865.814.992.103**
C. Cluster A				
1	Penyesuaian Akrual 2024	(744.277.970.740)	-	(744.277.970.740)
2	Januari	358.585.173.150	-	358.585.173.150
3	Februari	144.357.777.900	-	144.357.777.900
4	Maret	1.128.362.590.030	-	1.128.362.590.030
5	April	367.529.573.700	-	367.529.573.700
6	Mei	143.627.854.320	-	143.627.854.320
7	Juni	1.060.285.095.340	-	1.060.285.095.340
8	Juli	344.348.486.700	-	344.348.486.700
9	Agustus	138.465.623.700	-	138.465.623.700
10	September	1.056.819.166.990	-	1.056.819.166.990
11	Oktober	336.366.319.950	-	336.366.319.950
12	November	117.825.495.480	-	117.825.495.480
13	Desember	834.069.282.500	-	834.069.282.500
14	Penyesuaian Akrual 2025	529.425.069.240	-	529.425.069.240
SUBTOTAL CLUSTER A		**5.815.789.538.260**	**-**	**5.815.789.538.260**
TOTAL PG, NPG DAN CLUSTER A		**29.088.814.409.262**	**9.184.661.298.602**	**38.273.475.707.863**

PELAKSANAAN KONVERSI MATA UANG VALAS KE MATA UANG RUPIAH

Konversi sebanyak 19 *loan* ADB, 8 *loan* dengan mata uang JPY dan 11 *loan* dengan mata uang JPY yang dikonversi ke mata uang IDR.

No.	ADB Loan	Loan ID	No Register	Loan Name	Conversion Date	Last Payment Date	Base Rate	Effective Contractual Spread	Maturity Premium	Surcharge / Rebate	Net Lending Rate	Transaction Fee
	JPY *Converted*											
1	2500-INO	215660B0	10788801	ICWRMP	15 May 2025	15-Nov-33	-0,15000%	0,20909%	NIL	-0,06000%	-0,00091%	0,020910%
2	2575-INO	215680B0	10798801	RIS-PNPM II	15 Mar 2025	15-Sep-34	-0,16000%	0,21818%	NIL	-0,06000%	-0,00182%	0,021820%
3	2768-INO	212300B0	10836401	USRI	15 Mar 2025	15-Mar-36	-0,28000%	0,33750%	NIL	-0,06000%	-0,00250%	0,022500%
4	2817-INO	212330B0	10846401	RRDP	15 Mar 2025	15-Mar-36	-0,28000%	0,33750%	NIL	-0,06000%	-0,00250%	0,022500%
5	3402-INO	212510B0	1NFR6B1A	SIGAP-2	15 Jun 2025	15-Jun-31	-0,47000%	0,52885%	NIL	-0,06000%	-0,00115%	0,021150%
6	3541-INO	212550B0	18C7KHEA	FMDIP- 2	15 Jun 2025	15-Jun-32	-0,48000%	0,53846%	NIL	-0,06000%	-0,00154%	0,021540%
7	3779-INO	212640B0	1CZG7LLA	FMDIP- 3	15 Mar 2025	15-Mar-34	-0,49000%	0,54808%	NIL	-0,06000%	-0,00192%	0,021920%
8	3842-INO	212670B0	18A8NW4A	FPEMP-3	15 Apr 2025	15-Okt-34	-0,49000%	0,54808%	NIL	-0,06000%	-0,00192%	0,021920%
	USD Original *Loan*											
9	1982-INO	212050A0	10669501	REDS	1 Apr 2025	01-Okt-27	-1,00000%	0,60968%	NIL	0,39000%	-0,00032%	0,020320%
10	1983-INO	212060A0	10670201	PTIS	1 Apr 2025	01-Okt-27	-1,00000%	0,60968%	NIL	0,39000%	-0,00032%	0,020320%
11	2072-INO	212070A0	10685701	NUSSP	1 Jun 2025	01-Des-28	-1,02000%	0,62903%	NIL	0,39000%	-0,00097%	0,020970%
12	2074-INO	212080A0	10692601	DHS-2	1 Jun 2025	01-Des-28	-1,02000%	0,62903%	NIL	0,39000%	-0,00097%	0,020970%

No.	ADB Loan	Loan ID	No Register	Loan Name	Conversion Date	Last Payment Date	Base Rate	Effective Contractual Spread	Maturity Premium	Surcharge / Rebate	Net Lending Rate	Transaction Fee
13	2163-INO	212110A1	10721901	CWSHP	1 Aug 2025	01-Feb-30	-1,02000%	0,62903%	NIL	*to be advised*	*to be advised*	0,020970%
14	2184-INO	212140A0	10734001	RRDP-2	15 Mar 2025	15-Mar-30	-1,02000%	0,62903%	NIL	0,39000%	-0,00097%	0,020970%
15	2619-INO	215690A0	10806401	JB-EDPI	1 Aug 2025	01-Feb-35	-0,61000%	0,21818%	NIL	*to be advised*	*to be advised*	0,021820%
16	3015-INO	212390A0	10869501	WKPGS	15 May 2025	15-Mei-33	-0,83000%	0,43810%	NIL	0,39000%	-0,00190%	0,021900%
17	3083-INO	212420A0	10877101	JB 500Kv PTC	15 Mar 2025	15-Sep-33	-0,93000%	0,43077%	0,10769%	0,39000%	-0,00154%	0,021540%
18	3122-INO	212440A0	10882601	NUSP-2	1 Sep 2025	01-Mar-32	-0,93000%	0,53846%	NIL	*to be advised*	*to be advised*	0,021540%
19	3123-INO	212450A0	10883301	MSMIP	1 Aug 2025	01-Feb-31	-0,92000%	0,52885%	NIL	*to be advised*	*to be advised*	0,021150%
20	2654-INO	212280A0	10811901	MSMHP	1 Feb 2026	01-Feb-35	-0,60000%	0,20909%	NIL	*to be advised*	*to be advised*	0,020910%
21	3455-INO	212540A0	1F1NDHGA	ESP	1 Nov 2025	01-Nov-31	-0,94000%	0,54808%	NIL	0,39000%	*to be advised*	0,021920%

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Juanda I, Jl. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230
Faximile (021) 3852143 Email portalkemenkeu@kemenkeu.go.id
Situs https://www.kemenkeu.go.id/

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Juanda I, Jl. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230
Faximile (021) 3852143 Email portalkemenkeu@kemenkeu.go.id
Situs https://www.kemenkeu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF